RENCANA KERJA 2024
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

www.https://boyolali.go.id

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah, perlu disusun rencana kerja perangkat daerah;

b. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 4);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 232);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 265);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
8. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
10. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan, serta mengevaluasi hasil kinerja Perangkat Daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator Program yang telah ditetapkan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yaitu:

a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
b. sebagai pelaksana teknis Kegiatan prioritas pembangunan Daerah;
c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan capaian target indikator Program yang telah ditetapkan.

BAB II
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. BAB I PENDAHULUAN
        1.1 Latar Belakang
        1.2 Landasan Hukum
        1.3 Maksud dan Tujuan
        1.4 Sistematika Penulisan
    b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
        2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
        2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
        2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
        2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
        2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

c. BAB III ...

c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

e. BAB V PENUTUP

(2) Uraian sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 terdiri atas Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. Inspektorat Daerah;

d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

e. Dinas Kesehatan;

1. RSUD Pandan Arang;

2. RSUD Waras Wiris; dan

3. RSUD Simo.

f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

h. Dinas Sosial;

i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;

j. Dinas Ketahanan Pangan;

k. Dinas Lingkungan Hidup;

l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

n. Dinas Perhubungan;

o. Dinas Komunikasi dan Informatika;

p. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja;

q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

r. Dinas ...

r. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
t. Dinas Pertanian;
u. Dinas Peternakan dan Perikanan;
v. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
w. Satuan Polisi Pamong Praja;
x. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
y. Badan Keuangan Daerah;
z. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;
aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
cc. Kecamatan Selo;
dd. Kecamatan Cepogo;
ee. Kecamatan Musuk;
ff. Kecamatan Ampel;
gg. Kecamatan Boyolali;
hh. Kecamatan Mojosongo;
ii. Kecamatan Teras;
jj. Kecamatan Sawit;
kk. Kecamatan Banyudono;
ll. Kecamatan Sambi;
mm. Kecamatan Simo;
nn. Kecamatan Ngemplak;
oo. Kecamatan Nogosari;
pp. Kecamatan Andong;
qq. Kecamatan Klego;
rr. Kecamatan Karanggede;
ss. Kecamatan Wonosegoro;
tt. Kecamatan Kemusu;
uu. Kecamatan Juwangi;
vv. Kecamatan Wonosamodro;
ww. Kecamatan Gladagsari; dan
xx. Kecamatan Tamansari.

BAB III
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila terjadi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP.19671102 199403 2 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024

A. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga, bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ini disamping untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, juga diharapkan dapat memberikan informasi tentang dampak dan manfaat program/ kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah bagi masyarakat.

Akhirnya, kami berharap dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini dapat menjadi pedoman bagi setiap Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan kebijakannya yang dilaksanakan secara konsisten, sinergis, efisiensi dan efektif serta bertanggungjawab.

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1.Latar Belakang 1
1.2.Landasan Hukum 1
1.3.Maksud dan Tujuan 3
1.4.Sistematika Penyusunan 4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 5
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah 7
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 8
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 33
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 33
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah 33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 38
4.1. Program dan Kegiatan 38
BAB V PENUTUP 66

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan menduduki peran penting dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi pemerintah Kabupaten Boyolali, yang menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali disusun dan diuraikan kedalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024, yang merupakan kelanjutan atas tahapan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya. Penyusunan dokumen Rencana Kerja merupakan implementasi dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun awal dari dokumen Rencana Srategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali dengan periode lima tahunan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut memiliki keterkaitan dengan mempedomani dokumen perencanaan baik pemerintah pusat maupun provinsi.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat rencana kerja dan pendanaan kegiatan yang dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024. dalam rangka mendukung percepatan dan kelancaran pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dilaksanakan dengan melibatkan seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali dengan mengalokasikan anggaran yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali mengarah pada hal-hal yang sifatnya prioritas dan strategis guna mendukung kebijakan-kebijakan, program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 – 2031(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 232);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 265);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah (Renja Setda) Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah :

a. Memberikan arah, kebijakan, program/kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Boyolali sebagai landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan peran, tugas dan fungsi masing-masing, dimana program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Boyolali serta pembiayaan lain yang sah, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya dalam rangka pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah :

a. Terarahnya kebijakan dan program/kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Boyolali sebagai landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan peran, tugas dan fungsi masing-masing.
b. Terciptanya sinergitas perencanaan program pembangunan antar Satuan Kerja.
c. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya dalam rangka pembangunan daerah secara terpadu dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah (Renja Setda) Kabupaten Boyolali Tahun 2024, disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I **PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan.

BAB II **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali bermaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali selama tahun 2022 dan perkiraan pencapaian target tahun 2023. Tidak ada satupun kegiatan di tahun 2022 yang tidak dapat dilaksanakan semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah disusun. Untuk lebih jelasnya, tersaji dalam **tabel T-C.29**. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan (terlampir)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 67, maka kedudukan dan tugas pokok Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, dan kecamatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
    a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
    b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) ;
    c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
    d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah dan
    e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah;

a. Asisten Sekretaris Daerah;
b. Bagian;
c. Subbagian; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah dibantu oleh :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
    a. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
        1) Subbagian Adminitrasi Pemerintahan ;
        2) Subbagian Administrasi Kewilayahan.
        3) Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
    b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
        1) Subbagian Bina Mental Spiritual.
        2) Subbagian Kesejahteraan Sosial.
        3) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
    c. Bagian Hukum, terdiri dari :
        1) Subbagian Perundang-Undangan.
        2) Subbagian Bantuan Hukum.
        3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
    a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
        1) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.
        2) Subbagian Perekonomian.
        3) Subbagian Sumber Daya Alam.
    b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
        1) Subbagian Penyusunan Program.
        2) Subbagian Pengendalian Program.
        3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
    c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
        1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
        2) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik.
        3) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
    a. Bagian Umum, terdiri dari :
        1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian.
        2) Subbagian Perlengkapan.
        3) Subbagian Rumah Tangga.
    b. Bagian Organisasi, terdiri dari :
        1) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
        2) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
        3) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
    c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :

1) Subbagian Protokol.
2) Subbagian Komunikasi Pimpinan.

d. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :
1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
2) Subbagian Keuangan.

Sekretariat Daerah yang terdiri dari 10 (sepuluh) Bagian telah menjalankan program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya secara umum. Sebagian besar sasaran kinerja organisasi Sekretariat Daerah dapat tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi Sekretariat Daerah berhasil melaksanakan tugas dengan baik sesuai perencanaannya.

Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali (terlampir)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali merupakan urusan pemerintahan umum mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali adalah berikut :

ISU STRATEGIS DAEAH KABUPATEN BOYOLALI 2021-2026
1. Pertumbuhan Ekonomi dan Iklim Investasi yang Berwawasan Lingkungan ***2. Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan*** ***3. Pembangunan SDM yang Inklusif dan Berdaya Saing*** ***4. Peningkatan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan*** ***5. Reformasi Birokrasi yang Akuntabel dan Agile***

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali dengan mempertimbangkan isu penting diatas, secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dipengaruhi oleh faktor koordinasi, SDM dan sarana prasarana.

Kebijakan penting yang dapat dikembangkan Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dan dalam meningkatkan kinerjanya, antara lain:

a. Meningkatkan kualitas kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi.
b. Diperlukan komitmen dan kesungguhan seluruh aparatur, kejelasan rencana Reformasi Birokrasi, dan keteladanan para pimpinan. Diharapkan dengan berjalannya Reformasi Birokrasi tersebut, dapat meningkatkan kinerja di lingkup Sekretariat Daerah utamanya dan seluruh pegawai di Kabupaten Boyolali pada umumnya.

c. Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kepada OPD dan penyedia jasa terhadap aturan-aturan dan regulasi yang ada/baru.
d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, kapastitas sumberdaya serta tata kerja aparat pemerintah desa.
e. Memfasilitasi sarana dan prasarana guna mendukung perkembangan investasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Boyolali.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara umum usulan program dan kegiatan yang disusun oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan prioritas pembangunan beserta target yang akan dicapai pada tahun 2024, sebagaimana terlihat dari Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD (terlampir)

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2022
KABUPATEN BOYOLALI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI **Lembar : 1**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026 (Tahun Berjalan /Tahun Akhir)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KIENRJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
4	1				**SEKRETARIAT DAERAH**									
4	1	1	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	cakupan pelaksanaan adminitrasi keuangan perangkat daerah	100%	80%						
4	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 orang	110 orang	119	*110*	*92,44*			
4	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	9 dok	23	*23*	*100,00*			
4	1	1	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	50 orang	*0*	*0*				
4	1	1	2,6		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan layanan adminitrasi perkantoran yang dilaksanakan								

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026 (Tahun Berjalan /Tahun Akhir)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KIENRJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	1	1	2,6	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	*291 titik*	*291 titik*	*100,00*			
4	1	1	2,6	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 paket	8 paket	*8 paket*	*8 paket*	*100,00*			
4	1	1	2,6	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	*18000*	*15310*	*85,06*			
4	1	1	2,6	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32 paket	32 paket	*32 paket*	*32 paket*	*100,00*			
4	1	1	2,6	7		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah layanan bahan/material yang tersedia	15 paket	15 paket	*15 kali*	*15 kali*	*100,00*			
4	1	1	2,6	8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	*12 bulan*	*12 bulan*	*100,00*			
4	1	1	2,6	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	*12 bulan*	*12 bulan*	*100,00*			
4	1	1	2,07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang yang terlaksana	1 unit	1 unit						

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026 (Tahun Berjalan /Tahun Akhir)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KIENRJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	1	1	2,07	5		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			*0*					
4	1	1	2,8			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	9 jenis	9 jenis						
4	1	1	2,8	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	*406 buah*	*406 buah*	*100,00*			
4	1	1	2,8	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	*4 rekening*	*4 rekening*	*100,00*			
4	1	1	2,8	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	3 laporan	3 laporan	*3 jenis*	*3 jenis*	*100,00*			
4	1	1	2,9			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah unit aset/barang milik daerah dilakukan pemeliharaan berkala/rutin								
4	1	1	2,9	1		Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan DinasJabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	6 unit	*91 unit*	*91 unit*	*100,00*			

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026 (Tahun Berjalan /Tahun Akhir)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KIENRJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	1	1	2,9	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	6 unit	*0*					
4	1	1	2,9	5		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 unit	3 unit	*1 paket*	*1 paket*	*100,00*			
4	1	1	2,9	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	12 unit	*12 paket*	*12 paket*	*100,00*			
4	1	1	2,9	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	*3 unit*	*3 unit*	*100,00*			
4	1	1	2,11			**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Jumlah penerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	2 orang	*2 orang*	*2 orang*	*100,00*			
4	1	1	2,11	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	2 orang	*12 bulan*	*12 bulan*	*100,00*			
4	1	1	2,11	4		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	2 orang	*12 bulan*	*12 bulan*	*100,00*			

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026 (Tahun Berjalan /Tahun Akhir)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KIENRJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	1	2			**Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**		Persentase alokasi beasiswa pendidikan tinggi yang tepat sasaran Persentase batas wilayah yang diselesaikan Persentase kebijakan SPM yang ditindaklanjuti Persentase kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti Persentase kebijakan strategis bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti Persentase kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti Persentase ketercapaian target IKK Persentase peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan Persentase produk hukum Daerah yang tidak dibatalkan, baik di Provinsi maupun di Pemerintah Pusat	100 persen 9,09 Persen 100 Persen 92 Persen 82,00 Persen 82 Persen 66 Persen 68,00 persen 100 Persen							
4	1	2	2,01			**Administrasi Tata Pemerintahan**	Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD, ILPPD	4 dokumen	*4 dokumen*						
4	1	2	2,01	2		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 dokumen	0	0	0				

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026 (Tahun Berjalan /Tahun Akhir)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KIENRJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 dokumen	4 dokumen	0	0				
4	1	2	2,02			**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan	67%	51%	0	0				
4	1	2	2,02	1		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 dokumen	2 dokumen	100%	100	*100,00*			
4	1	2	2,02	3		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan CapaianKinerja Terkait KesejahteraanMasyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 dokumen	2 dokumen	100%	100	*100,00*			
4	**1**	**2**	**2,03**			**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perda	13 kali	6 kali						
4	01	02	2.03	01		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	698 Dokumenj		0	0				
4	01	02	2.03	02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	0	0	0				

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026 (Tahun Berjalan /Tahun Akhir)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KIENRJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	01	02	2.03	03		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	697 Dokumen	501 dokumen	0	0				
4	**1**	**3**				**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 dokumen			0				
4	**1**	**3**	**2,03**			**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah paket yang proses pemilihannya melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	160 paket	51 paket	100%	70				
4	01	03	2.03	02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4	*100,00*			
4	**1**	**3**	**2,04**			**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**									
4	01	03	2.04	01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 dokumen	1 dokumen	0	0				

TABEL T-C.30.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2024	2022	2023	2023	2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*13*	*14*
1	Persentase peningkatan peran perusahaan		Jumlah perusahaan pelaksana TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan)	1,00 Perusahaan	2,00 Perusahaan	3,00 Perusahaan	4,00 Perusahaan	0	0	3,00 Perusahaan	4,00 Perusahaan	
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)		Persentase alokasi beasiswapendidikan tinggi yang tepat sasaran	100 persen	100 persen	100,00 persen	100,00 persen	0	0	100,00 persen	100,00 persen	
3	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan		Persentase peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan	67 persen	68 persen	69 persen	70 persen	100%	50%	69 persen	70 persen	
4	Nilai Sakip (SDGs) Indeks Reformasi Birokrasi (SDGs) Nilai EKPPD		- Persentase batas wilayah yang diselesaikan - Persentase kebijakan SPM yang ditindaklanjuti - Persentase kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti - Persentase kebijakan strategis bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti - Persentase kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti Persentase - ketercapaian target IKK - Persentase produk hukum Daerah yang tidak dibatalkan, baik di Provinsi maupun di Pemerintah Pusat	9,09 Persen 100 Persen 90 Persen 80,00 Persen 80 Persen 65 Persen 100 Persen	9,09 Persen 100 Persen 92 Persen 82,00 Persen 82 Persen 66 Persen 100 Persen	9,09 Persen 100 Persen 95 Persen 84,00 Persen 84 Persen 67 Persen 100 Persen	9,09 Persen 100 Persen 95 Persen 84,00 Persen 84 Persen 67 Persen 100 Persen	9,09 Persen 100 Persen 92 Persen 82,00 Persen 82 Persen 66 Persen 100 Persen	9,09 Persen 100 Persen 95 Persen 84,00 Persen 84 Persen 67 Persen 100 Persen	9,09 Persen 100 Persen 95 Persen 84,00 Persen 84 Persen 67 Persen 100 Persen	9,09 Persen 100 Persen 95 Persen 84,00 Persen 84 Persen 67 Persen 100 Persen	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2024	2022	2023	2023	2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*13*	*14*
			- Persentase kebijakan strategis bidang pembangunan yang ditindaklanjuti - Persentase kebijakan strategis bidang perekonomian yang ditindaklanjuti - Persentase kontribusi BUMD pada PAD - Persentase penggunaan E- Procurement terhadap belanja pengadaan	100 Persen 80 Persen 1,86 Persen 56,00 Persen	100 Persen 82 Persen 1,87 Persen 60,00 Persen	100 Persen 84 Persen 1,88 Persen 64,00 Persen	100 Persen 84 Persen 1,88 Persen 64,00 Persen	100 Persen 82 Persen 1,87 Persen 60,00 Persen	100 Persen 84 Persen 1,88 Persen 64,00 Persen	100 Persen 84 Persen 1,88 Persen 64,00 Persen	100 Persen 84 Persen 1,88 Persen 64,00 Persen	
			- Persentase IKU kepala Daerah yang mencapai target - Persentase OPD yang memiliki nilai RB minimal baik - Persentase OPD yang memiliki nilai SAKIP minimal 80 - Persentase perangkat Daerah dengan tata laksana baik - Persentase perangkat Daerah yang memiliki nilai kematangan organisasi rata-rata 3	80 Persen 20 Persen 58 Persen 20 Persen 82 Persen	82 Persen 35 Persen 60 Persen 50 Persen 86 Persen	84 Persen 55 Persen 65 Persen 50 Persen 90 Persen	84 Persen 55 Persen 65 Persen 50 Persen 90 Persen	100 Persen 82 Persen 1,87 Persen 60,00 Persen	100 Persen 84 Persen 1,88 Persen 64,00 Persen	84 Persen 55 Persen 65 Persen 50 Persen 90 Persen	84 Persen 55 Persen 65 Persen 50 Persen 90 Persen	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat ((Permendagri 18 dan Permendagri 86)		- Cakupan layanan protokol dan komunikasi pimpinan sesuai standar - Persentase kualitas pelayanan publik yang baik - Persentase satuan/unit yang memiliki IKM dengan kategori Baik	100 % 100 % 83 unit	100 % 100 % 85 unit	100 % 100 % 87 unit	100 % 100 % 89 unit	100 % 100 % 85 unit	80 % 80 % 87 unit	100 % 100 % 87 unit	100 % 100 % 89 unit	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2024	2022	2023	2023	2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*13*	*14*
6	Nilai Sakip Sekretariat Daerah		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	80%	100 %	100 %	

TABEL T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
KABUPATEN BOYOLALI

SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOYOLALI lembar

No	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	SEKRETARIAT DAERAH				29.795.507.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				29.795.507.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan protokol dan komunikasi pimpinan sesuai standar Persentase IKU kepala Daerah yang mencapai target Persentase kualitas pelayanan publik yang baik Persentase OPD yang memiliki nilai RB minimal baik Persentase OPD yang memiliki nilai SAKIP minimal 80 Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase perangkat Daerah dengan tata laksana baik Persentase perangkat Daerah yang memiliki nilai kematangan organisasi rata-rata 3 Persentase satuan/unit yang memiliki IKM dengan kategori Baik	100 Persen 82 Persen 100 Persen 35 Persen 60 Persen 100 Persen 50 Persen 86 Persen 85 Persen	**20,360,507,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Cakupan layanan protokol dan komunikasi pimpinan sesuai standar Persentase IKU kepala Daerah yang mencapai target Persentase kualitas pelayanan publik yang baik Persentase OPD yang memiliki nilai RB minimal baik Persentase OPD yang memiliki nilai SAKIP minimal 80 Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase perangkat Daerah dengan tata laksana baik Persentase perangkat Daerah yang memiliki nilai kematangan organisasi rata-rata 3 Persentase satuan/unit yang memiliki IKM dengan kategori Baik	100 Persen 82 Persen 100 Persen 35 Persen 60 Persen 100 Persen 50 Persen 86 Persen 85 Persen	**20,360,507,000**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		cakupan pelaksanaan adminitrasi keuangan perangkat daerah	100 %	**16,619,404,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		cakupan pelaksanaan adminitrasi keuangan perangkat daerah	100 %	**16,619,404,000**	

No	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/b	ulan 15,316,154,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/b	ulan 15,316,154,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1,303,250,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1,303,250,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**150,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**150,000,000**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	150,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	150,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan adminitrasi perkantoran yang dilaksanakan	100 %	**1,585,989,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Cakupan layanan adminitrasi perkantoran yang dilaksanakan	100 %	**1,585,989,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,175,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,175,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	324,249,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	324,249,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	237,682,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	237,682,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32 Paket	75,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32 Paket	75,000,000	
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket	75,000,000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket	75,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	468,883,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	468,883,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	400,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	400,000,000	

No	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan pengadaan barang yang terlaksana	100 %	**10,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Cakupan pengadaan barang yang terlaksana	100 %	**10,000,000**	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	9 jenis	**581,689,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	9 jenis	**581,689,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8,689,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8,689,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	572,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	572,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit aset/barang milik daerah dilakukan pemeliharaan berkala/rutin	113 unit	**561,976,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah unit aset/barang milik daerah dilakukan pemeliharaan berkala/rutin	113 unit	**561,976,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	90,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	90,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	277,743,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	277,743,000	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	15,000,000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	15,000,000	

No	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	129,233,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	129,233,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50,000,000	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlaksana	100 %	**851,449,000**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		Persentase administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlaksana	100 %	**851,449,000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bula	251.449.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bula	251.449.000	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bula	600.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bula	600.000.000	

No	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase alokasi beasiswa pendidikan tinggi yang tepat sasaran Persentase batas wilayah yang diselesaikan Persentase kebijakan SPM yang ditindaklanjuti Persentase kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti Persentase kebijakan strategis bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti Persentase kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti Persentase ketercapaian target IKK Persentase peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan Persentase produk hukum Daerah yang tidak dibatalkan, baik di Provinsi maupun di Pemerintah Pusat	100 persen 9,09 Persen 100 Persen 92 Persen 82,00 Persen 82 Persen 66 Persen 68,00 persen 100 Persen	**8,580,000,000**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		Persentase alokasi beasiswa pendidikan tinggi yang tepat sasaran Persentase batas wilayah yang diselesaikan Persentase kebijakan SPM yang ditindaklanjuti Persentase kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti Persentase kebijakan strategis bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti Persentase kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti Persentase ketercapaian target IKK Persentase peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan Persentase produk hukum Daerah yang tidak dibatalkan, baik di Provinsi maupun di Pemerintah Pusat	100 persen 9,09 Persen 100 Persen 92 Persen 82,00 Persen 82 Persen 66 Persen 68,00 persen 100 Persen	**8,580,000,000**	
	Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase kebijakan strategis bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	80 %	**175,666,000**	**Administrasi Tata Pemerintahan**		Persentase kebijakan strategis bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	80 %	**175,666,000**	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	150,000,000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	150,000,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	25,666,000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	25,666,000	

No	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumah kegiatan bidang keagamaan yang terfasilitasi	18 kegiatan	**8,198,482,000**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		Jumah kegiatan bidang keagamaan yang terfasilitasi	18 kegiatan	**8,198,482,000**	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	6,875,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	6,875,000,000	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	1,323,482,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	1,323,482,000	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Jumlah Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan Produk Hukum Daerah	673 kali	**205,852,000**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		Jumlah Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan Produk Hukum Daerah	673 kali	**205,852,000**	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	698 Dokume	n 30,107,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	698 Dokume	n 30,107,000	
	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	111,995,000	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	111,995,000	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	697 Dokume	n 63,750,000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	697 Dokume	n 63,750,000	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan	56 %	**855,000,000**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan	56 %	**855,000,000**	

No	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah paket tender yang terfasilitasi melalui SPSE Jumlah paket yang proses pemilihannya melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	160 paket 160 paket	**355,000,000**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		Jumlah paket tender yang terfasilitasi melalui SPSE Jumlah paket yang proses pemilihannya melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	160 paket 160 paket	**355,000,000**	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	355,000,000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	355,000,000	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				**500,000,000**	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**				**500,000,000**	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	500,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	500,000,000	

TABEL T-C.33.

RUMUSAN RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kabupaten Boyolali

SEKRETRAIAT DAERAH KABUATEN BOYOLALI

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana)							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	(9)=(6)+(7)+(8)	10	11	12
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**29,795,507,000**			**29,795,507,000**			**29,795,507,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan layanan protokol dan komunikasi pimpinan sesuai standar Persentase IKU kepala Daerah yang mencapai target Persentase kualitas pelayanan publik yang baik Persentase OPD yang memiliki nilai RB minimal baik Persentase OPD yang memiliki nilai SAKIP minimal 80 Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase perangkat Daerah dengan tata laksana baik Persentase perangkat Daerah yang memiliki nilai kematangan organisasi rata-rata 3 Persentase satuan/unit yang memiliki IKM dengan kategori Baik	Kab. Boyolali	100 Persen 82 Persen 100 Persen 35 Persen 60 Persen 100 Persen 50 Persen 86 Persen 85 Persen	**20,360,507,000**			**20,360,507,000**		100 Persen 82 Persen 100 Persen 35 Persen 60 Persen 100 Persen 50 Persen 86 Persen 85 Persen	**20,360,507,000**
							Kab. Boyolali								
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	cakupan pelaksanaan adminitrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Boyolali	100 %	**16,619,404,000**			**16,619,404,000**		100 %	**16,619,404,000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana)							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	(9)=(6)+(7)+(8)	10	11	12
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Boyolali	112 Orang/b	ulan 15,316,154,000			ulan 15,316,154,000		112 Orang/b	ulan 15,316,154,000
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Boyolali	12 Dokumen	1,303,250,000			1,303,250,000		12 Dokumen	1,303,250,000
4	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Kab. Boyolali		**150,000,000**			**150,000,000**			**150,000,000**
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Boyolali	50 Orang	150,000,000			150,000,000		50 Orang	150,000,000
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan layanan adminitrasi perkantoran yang dilaksanakan	Kab. Boyolali	100 %	**1,585,989,000**			**1,585,989,000**		100 %	**1,585,989,000**
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali	1 Paket	5,175,000			5,175,000		1 Paket	5,175,000
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Boyolali	8 Paket	324,249,000			324,249,000		8 Paket	324,249,000
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali	1 Paket	237,682,000			237,682,000		1 Paket	237,682,000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Boyolali	32 Paket	75,000,000			75,000,000		32 Paket	75,000,000
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Boyolali	15 Paket	75,000,000			75,000,000		15 Paket	75,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana)							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	(9)=(6)+(7)+(8)	10	11	12
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Boyolali	12 Laporan	468,883,000			468,883,000		12 Laporan	468,883,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Boyolali	250 Laporan	400,000,000			400,000,000		250 Laporan	400,000,000
4	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan pengadaan barang yang terlaksana	Kab. Boyolali	100 %	**10,000,000**			**10,000,000**		100 %	**10,000,000**
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Boyolali	1 Unit	10,000,000			10,000,000		1 Unit	10,000,000
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kab. Boyolali	9 jenis	**581,689,000**			**581,689,000**		9 jenis	**581,689,000**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Boyolali	1 Laporan	8,689,000			8,689,000		1 Laporan	8,689,000
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Boyolali	4 Laporan	572,000,000			572,000,000		4 Laporan	572,000,000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali	3 Laporan	1,000,000			1,000,000		3 Laporan	1,000,000
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah unit aset/barang milik daerah dilakukan pemeliharaan berkala/rutin	Kab. Boyolali	113 unit	**561,976,000**			**561,976,000**		113 unit	**561,976,000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Boyolali	6 Unit	90,000,000			90,000,000		6 Unit	90,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana)							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	(9)=(6)+(7)+(8)	10	11	12
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Boyolali	6 Unit	277,743,000			277,743,000		6 Unit	277,743,000
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Boyolali	3 Unit	15,000,000			15,000,000		3 Unit	15,000,000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Boyolali	12 Unit	129,233,000			129,233,000		12 Unit	129,233,000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Boyolali	3 Unit	50,000,000			50,000,000		3 Unit	50,000,000
4	**01**	**01**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlaksana	Kab. Boyolali	100 %	**851,449,000**			**851,449,000**		100 %	**851,449,000**
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Boyolali	2 Orang/Bula	n 251,449,000			n 251,449,000		2 Orang/Bula	n 251,449,000
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Boyolali	2 Orang/Bula	n 600,000,000			n 600,000,000		2 Orang/Bula	n 600,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana)							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	(9)=(6)+(7)+(8)	10	11	12
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase alokasi beasiswa pendidikan tinggi yang tepat sasaran Persentase batas wilayah yang diselesaikan Persentase kebijakan SPM yang ditindaklanjuti Persentase kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti Persentase kebijakan strategis bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti Persentase kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti Persentase ketercapaian target IKK Persentase peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan Persentase produk hukum Daerah yang tidak dibatalkan, baik di Provinsi maupun di Pemerintah Pusat	Kab. Boyolali	100 persen 9,09 Persen 100 Persen 92 Persen 82,00 Persen 82 Persen 66 Persen 68,00 persen 100 Persen	**8,580,000,000**			**8,580,000,000**		100 persen 9,09 Persen 100 Persen 92 Persen 82,00 Persen 82 Persen 66 Persen 68,00 persen 100 Persen	**8,580,000,000**
4	**01**	**02**	2.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase kebijakan strategis bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Kab. Boyolali	80 %	**175,666,000**			**175,666,000**		80 %	**175,666,000**
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Boyolali	1 Dokumen	150,000,000			150,000,000		1 Dokumen	150,000,000
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Boyolali	5 Dokumen	25,666,000			25,666,000		5 Dokumen	25,666,000
4	**01**	**02**	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Jumah kegiatan bidang keagamaan yang terfasilitasi	Kab. Boyolali	18 kegiatan	**8,198,482,000**			**8,198,482,000**		18 kegiatan	**8,198,482,000**
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Boyolali	4 Dokumen	6,875,000,000			6,875,000,000		4 Dokumen	6,875,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana)							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	(9)=(6)+(7)+(8)	10	11	12
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Boyolali	4 Dokumen	1,323,482,000			1,323,482,000		4 Dokumen	1,323,482,000
4	**01**	**02**	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Jumlah Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Boyolali	673 kali	**205,852,000**			**205,852,000**		673 kali	**205,852,000**
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Boyolali	698 Dokume	n 30,107,000			n 30,107,000		698 Dokume	n 30,107,000
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Boyolali	1 Kasus	111,995,000			111,995,000		1 Kasus	111,995,000
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Boyolali	697 Dokume	n 63,750,000			n 63,750,000		697 Dokume	n 63,750,000
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase penggunaanE-Procurement terhadap belanja pengadaan	Kab. Boyolali	56 %	**855,000,000**			**855,000,000**		56 %	**855,000,000**
4	**01**	**03**	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah paket tender yang terfasilitasi melalui SPSE Jumlah paket yang proses pemilihannya melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Boyolali	160 paket 160 paket	**355,000,000**			**355,000,000**		160 paket 160 paket	**355,000,000**
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Boyolali	4 Dokumen	355,000,000			355,000,000		4 Dokumen	355,000,000
4	**01**	**03**	2.04		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		Kab. Boyolali		**500,000,000**			**500,000,000**			**500,000,000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana)							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	(9)=(6)+(7)+(8)	10	11	12
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab. Boyolali	1 Dokumen	500,000,000			500,000,000		1 Dokumen	500,000,000

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai pembantu Bupati dalam perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaannya yang meliputi semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka hampir semua kementerian/ lembaga di tingkat pusat yang terkait dengan tugas dan fungsi setda. Namun untuk menfokuskan pokok pembahasan ada beberapa kementerian yang dapat mewakili fungsi dalam perumusan kebijakan dan pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintah daerah antara lain Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Isu-isu dan permasalahan di ketiga kementerian dapat memberikan gambaran keterkaitan dengan isu dan permasalahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali pada semua bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, terutama pada bagian yang dibawah Asisten Pemerintahan dan Asisten Administrasi, yaitu isu tentang reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam **visi reformasi birokrasi yaitu "Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia".** Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Selanjutnya misi Reformasi Birokrasi adalah:

a. membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
b. melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, *mind set* dan *culture set*;
c. mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;
d. mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.
e.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah

. Sesuai dengan visi yang terdapat dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali periode 2021 - 2026:

"Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik"

Misi OPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi OPD. Rumusan misi OPD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi OPD yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh OPD bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi OPD.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra OPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi OPD. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati Boyolali yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026. Visi Bupati Boyolali 2021-2026 adalah :

BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI

Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas

Misi :

1. **Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan**

   Memantapkan "*business friendly",* dengan mempertahankan iklim investasi yang kondusif, mendorong perusahaan yang ramah lingkungan (*green company)*, strategi bisnis perusahaan *(green strategy)*, dan proses bisnis yang aman, nyaman dan bersih (*green process*), serta pengembangan produk yang ramah lingkungan *(green product)* serta Pengembangan kompetensi dan perlindungan kempada sumber daya manusia (*green employe).*

   Mensinergikan manajemen pemerintahan, peran masyarakat dan swasta dalam pembangunan sosial, pembangunan ekonomi dan pembangunan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kehidupan yang lebih maju, dengan mengedepankan peningkatan Kualitas manusia, ekonomi yang produktif, mandiri, berdaya saing serta pembangunan dan lingkunan hidup yang berkelanjutan.

   Pembangunan Sosial, guna pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berkualitas, keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastuktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Pembangunan tata kelola pemerintahan, tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mewujudkan prinsip dan standar pelayanan publik yang prima.

   Mendorong pembangunan berkelanjutan, yang memanusiakan manusia dengan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, berlandaskan prinsip universal, terintegrasi dan inklusif untuk menyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind"*.

2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya

Mencapai Boyolali sehat, ketangguhan/ketahanan terhadap dampak negatif akibat aktivitas alam dan non alam, serta ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, baik melalui pelayanan kesehatan, lingkungan, ataupun perilaku dengan pendekatan keluarga peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas.

Dengan adanya resiko bencana dan perubahan iklim dan dampaknya, tindakan cepat untuk mengatasi diperlukan sebagai bentuk wilayah yang tangguh.

Penyediaan dan pemeliharaan prasarana olah raga public.

Adanya Pemeliharaan fakir miskin, yatim, anak terlantar dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Demikian pula dengan *Sosial and Economy Safety Net* yakni jaminan sosial daerah baik bidang kesehatan maupun sosial seperti cukup sandang, pangan, dan papan. Kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, kriminalitas, pelanggaran terhadap ketertiban umum, dan penanggulangan kerawanan sosial.

Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, adanya akses memperoleh pendidikan yang bermutu dan relevan disertai tatakelola pendidikan yang baik, penerapan teknologi dan standar untuk meningkatkan daya saing.

Pendidikan bertujuan menciptakan manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan ini diimplementasikan sampai tingkat desa dan keluarga, sehingga dampak pendidikan berpengaruh pada kecerdasan, karakter dan budaya keluarga dan masyarakat. Disamping itu penguasaan skill, mewujudkan manusia unggul, berbudaya dan memperkuat masyarakat "*Guyub Saeko Proyo".*

Pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya, mengadakan kegiatan event budaya, serta revitalisasi situs-situs sejarah dan religi untuk menghidupkan kembali daerah yang dulunya pernah hidup namun sekarang mengalami degradasi sehingga menjadi daya tarik wisata.

3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional

Mempertahankan tradisi Boyolali kota susu, penghasil daging, pengembangan produksi perikanan darat, serta sektor peternakan lainnya adalah sesuatu yang prioritas.

Boyolali lumbung pangan sebagai aplikasi dari konsep ketahanan pangan (*food security*) lokal dan nasional terus dipertahankan dan dikembangkan, dengan prinsip pertanian yang maju, lestari, budaya saing internasional, dan berkontribusi penting bagi perekonomian bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan budaya untuk mensejahterakan masyarakat yang berperadaban.

Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, perikanan darat termasuk sektor sejenis lainnya. Aplikasi good farming practices, fasilitasi kebutuhan modal, pengembangan kemitraan yang sehat, kredit pengembangan kelompok/perorangan, pendampingan sampai dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan serta memberi nilai lebih pada pasca produksi.

4. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai utuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok *good and clean governance*. Peran masyarakat yang melahirkan kontrol terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan sangat diharapkan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN.

Pembangunan integritas dengan menumbuhkan karakter yang baik bagi individu maupun organisasi dalam mewujudkan tindakan maupun keputusan bagi kebaikan bersama.

Tidak berhenti pada *good and clean governance*, Boyolali berusaha menumbuhkan *Smart governance*, atau pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi, dengan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi-inovasi dan adaptasi teknologi yang terpadu, yang bermuara pada efektifitas, efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.

5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Boyolali dikenal dengan slogan Tersenyum, yang memiliki arti tertib, elok, rapi, sehat, nyaman untuk masyarakat. Tanpa meninggalkan tersenyum, Boyolali mulai dikenal dengan slogan nyaman ditinggali, nyaman investasi, nyaman untuk *everybody.* Sebagai identitas dari kota, city brand akan terus dikembangkan guna memasarkan segala aktivitas terutama potensi wisata dan budayanya.

Smart governance diharapkan dapat mendorong terwujudnya *Smart City, Water City*, dan *Green City* yakni konsep Boyolali kota cerdas/pintar, kota air, yang ramah lingkungan.

Boyolali tumbuh dengan infrastruktur yang tangguh dan iconik, pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Mengurangi kesenjangan intra dan antar wilayah.

Potensi ekonomi daerah, akan terus dioptimalkan guna kemandirian daerah dengan kinerja yang inovatif, termasuk peningkatan penerimaan daerah. Peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja yang terbuka terhadap persaingan domestik ataupun internasional,

serta berbagai inovasi yang tumbuh diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah. Percepatan pembangunan yang mendorong pertumbuhan investasi dipadukan dengan koperasi umkm pasar tradisional dan modern.

Adapun misi tersebut diatas dijabarkan dalam beberapa tujuan. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidak mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun *tangible*, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

Berikut hasil identifikasi tujuan Sekretariat Daerah :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik”

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi organisasi serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Berikut hasil identifikasi sasaran Sekretariat Daerah :

1. **Meningkatnya peran perusahaan dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat & pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya**
2. **Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan**
3. **Meningkatnya nilai budaya lokal sebagai identitas dan katalisator pembangunan**
4. **Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah**
5. **Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**
6. **Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan dengan tolok ukur kinerja masing-masing kelompok program serta kebutuhan pembiayaannya. Kerangka pendanaan yang disajikan bersifat indikatif yang berarti bahwa anggaran pendanaan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kegiatan dan target yang akan dilaksanakan. Adapun rumusan program yang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Penyediaan Bahan/Material

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Mebel

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Administrasi Tata Pemerintahan

Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Fasilitasi Bantuan Hukum

Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Program Prioritas Sekretariat Daerah merupakan program prioritas Kabupaten Boyolali 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah. Penentuan program dan kegiatan Sekretariat Daerah sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutalhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan keuangan Daerah. Indikasi program prioritas pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2024 mengacu program indikatif kebutuhan pendanaan. Indikator keluaran program prioritas merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran merupakan pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Sekretariat Daerah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI KAB. BOYOLALI TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI						**28.444.611.000,00**							**34.419.680.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**28.444.611.000,00**							**34.419.680.000,00**	
	4,01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**28.444.611.000,00**							**34.419.680.000,00**	
1	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**		**-**	**-**	**21.303.769.500,00**						**-**	**24.734.717.000,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00			-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan	-	2 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan	-	2 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	16 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	4 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	15.739.554.000,00			-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	103 Orang/bulan	18.261.818.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima	103 Orang/bulan		103 Orang/bulan	103 Orang/bulan	14.444.786.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	103 Orang/bulan	16.811.818.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyedia	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.294.768.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Dokumen	1.450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tangga	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bula	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	18 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00			-	4 Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berintegritas dengan ASN yang semakin profesional.	-	12 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan da	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berintegritas dengan ASN yang semakin profesional.	-	12 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Ev	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berintegritas dengan ASN yang semakin profesional.	-	12 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	800 Orang		800 Orang	800 Orang	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	800 Orang	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	1.888.847.000,00			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Paket	2.115.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instala	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Paket	15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Pe	2 Paket		2 Paket	2 Paket	68.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Paket	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah	2 Paket		2 Paket	2 Paket	234.247.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Paket	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	450.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Paket	450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan d	2 Paket		2 Paket	2 Paket	101.600.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Paket	125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material ya	2 Paket		2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Paket	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

11000 NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	475.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Laporan	475.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	450.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Laporan	450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pe	-	-		-	-	0,00			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Unit	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Unit	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusar	-	-		-	-	538.794.500,00			-	4 Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Laporan	615.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Laporan	7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jas	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	505.194.500,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Laporan	580.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jas	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	4 Laporan	20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jas	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.100.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	4 Laporan	8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-		-	-	909.325.000,00			-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	9 Unit	1.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	150.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	9 Unit	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Opera	76 Unit		76 Unit	76 Unit	300.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	76 Unit	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Unit	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	73.950.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	5 Unit	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana P	3 Unit		3 Unit	3 Unit	355.375.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	3 Unit	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasi	-	-		-	-	971.449.000,00			-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Orang/Bulan	971.449.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	251.449.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Orang/Bulan	251.449.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas da	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Paket	60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti M	2 Orang		2 Orang	2 Orang	60.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Orang	60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima U	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	600.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Orang/Bulan	600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-		-	-	540.000.000,00			-	4 Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Paket	540.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah	12 Paket		12 Paket	12 Paket	300.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Paket	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah	12 Paket		12 Paket	12 Paket	240.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Paket	240.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-		-	-	0,00			-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	7 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	7 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	6 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-		-	-	715.800.000,00			-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	4 Laporan	980.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	293.600.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	4 Laporan	558.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	422.200.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	4 Laporan	422.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
2	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	-		**-**	**-**	**6.439.729.000,00**						**-**	**9.216.489.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-		-	-	105.000.000,00			-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	22 Dokumen	155.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataa	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	22 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelol	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Dokumen	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	55.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	4 Dokumen	55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-		-	-	6.133.877.000,00			-	-	-	0 0	8.906.887.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			0	0 0		0 0	0 0	4.631.395.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	0 0	7.483.405.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			0	0 0		0 0	0 0	1.502.482.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	0 0	1.423.482.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-		-	-	200.852.000,00			-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	13 Dokumen	154.602.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	22.606.200,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	13 Dokumen	22.606.200,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatka	1 Kasus		1 Kasus	1 Kasus	111.995.800,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Kasus	111.995.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pen	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	66.250.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Dokumen	20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-		-	-	0,00			-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	25 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	25 Dokumen		25 Dokumen	25 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	25 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
3	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**	**-**		**-**	**-**	**701.112.500,00**						**-**	**468.474.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-		-	-	0,00			-	Memacu pr oduktivitas dengan pe mberdayaa n masyarakat untuk optimalisasi sektor unggulan serta percepatan dan pemer ataan investasi	-	4 Dokumen	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordina	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memacu pr oduktivitas dengan pe mberdayaa n masyarakat untuk optimalisasi sektor unggulan serta percepatan dan pemer ataan investasi	-	4 Dokumen	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			-	-		-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perenca	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan kapasitas p erekonomia n yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pen gendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Memacu pr oduktivitas dengan pe mberdayaa n masyarakat untuk optimalisasi sektor unggulan serta percepatan dan pemer ataan investasi	-	4 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-		-	-	0,00			-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	106 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	106 Dokumen		106 Dokumen	106 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	106 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengenda	80 Laporan		80 Laporan	80 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	80 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelola	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-		-	-	481.941.000,00			-	4 Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	0 Dokumen	75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelol	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	406.941.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	0 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti P	6 Orang		6 Orang	6 Orang	75.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangu nan pemeri ntahan yang bersih dan berinte gritas dengan ASN yang semakin profesional.	-	6 Orang	75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-		-	-	219.171.500,00			-	Memacu produktivitas dengan pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi sektor unggulan serta percepatan dan pemerataan investasi	-	4 Dokumen	343.474.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordina	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	219.171.500,00	- Kab. Boyolali, Semu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Memacu produktivitas dengan pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi sektor unggulan serta percepatan dan pemerataan investasi	-	4 Dokumen	343.474.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
	J U M L A H							**28.444.611.000,00**							**34.419.680.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 Kabupaten Boyolali dan Renstra OPD, berkenaan dengan hal tersebut guna menjaga kesinambungan antar dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya maka harus dipedomani oleh bagian pada lingkup Sekretariat Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun anggaran tahun 2024 yang selanjutnya sebagai landasan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Program dan kegiatan dalam lampiran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 berfungsi sebagi acauan dan pedoman bagi setiap bagian pada lingkup Setda dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Pedoman yang tertuang dalam Rencana Kerja ini tidak bersifat kaku dan masih dimungkinkan adanya perubahan mengingat keterbatasan dalam perencanaan dan adanya perubahan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran organisasi serta arah kebijakan.

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali. Selain itu dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang. Pelaksanaan program dan kegiatan perlu menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan melihat seluruh potensi pembiayaan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota dan Masyarakat, sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

B. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI ii
KATA PENGANTAR iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi 3
1.5 Susunan Organisasi, SDM, dan Sarana Prasarana 4
1.6 Data Umum Organisasi 10
1.7 Sistematika Penulisan 10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU . 12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD..... 13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 31
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 34
3.3 Program dan Kegiatan 36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 39
4.1 Program dan Kegiatan 39
BAB V PENUTUP 43

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas bimbingan dan petunjukNya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dapat kami susun.

Sedangkan DPRD Kabupaten Boyolali merupakan Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Boyolali sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244), dan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 110). Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali, menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali tahun 2022 - 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) ini, dan kami menyadari bahwa dalam Rencan Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali terdapat kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan, dalam menyusun Rencana Kerja ini diucapkan terima kasih.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bupati terpilih wajib menyusun dokumen dokumen perencanaan antara lain Renstra/ RPJMD (Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah), dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan di implementasikan kedalam Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah wajib untuk menyusun Rencana Strategis lima tahunan dan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD (Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 memuat penjelasan ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja, daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran 2024, dan tolok ukur dan target capaian program, kegiatan dan indikator yang ditetapkan di Tahun 2024 landasan hukum penyusunan rencana kerja tahunan.

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali merupakan penjabaran atas Visi, Misi dan program yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2022 - 2026. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2022 - 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2022 - 2026. Hal ini dimaksudkan agar terdapat sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan Daerah khususnya dalam kegiatan-kegiatan kedewanan.

Atas dasar tersebut di atas maka disusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 - 2026;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
8. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2022 – 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud penyusunan rencana kerja adalah
   - Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjadi sarana akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2024;
   - Untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun serta menetapkan tolak ukur dan target kenerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan selama satu tahun, Tahun Anggaran 2024.

b. Tujuan penyusunan rencana kerja adalah
   - Untuk menjamin pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang di inginkan;
   - Untuk menyampaikan Informasi mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali selama Tahun Anggaran 2024 sebagai pedoman pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta mendukung suksesnya sasaran Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Boyolali.

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Tugas Pokok

Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan

tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

b. Fungsi Sekretariat DPRD

Fungsi Sekretariat DPRD adalah :

a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
c. Fasilitas Penyelenggaraan Rapat dan tugas DPRD; dan
d. Penyediaan dan Pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

1.5 SUSUNAN ORGANISASI, SDM, DAN SARANA PRASARANA

a. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD,
2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
3. Bagian Umum, yaitu Sub Bagian Tata Usaha;
4. Bagian Keuangan, yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2023

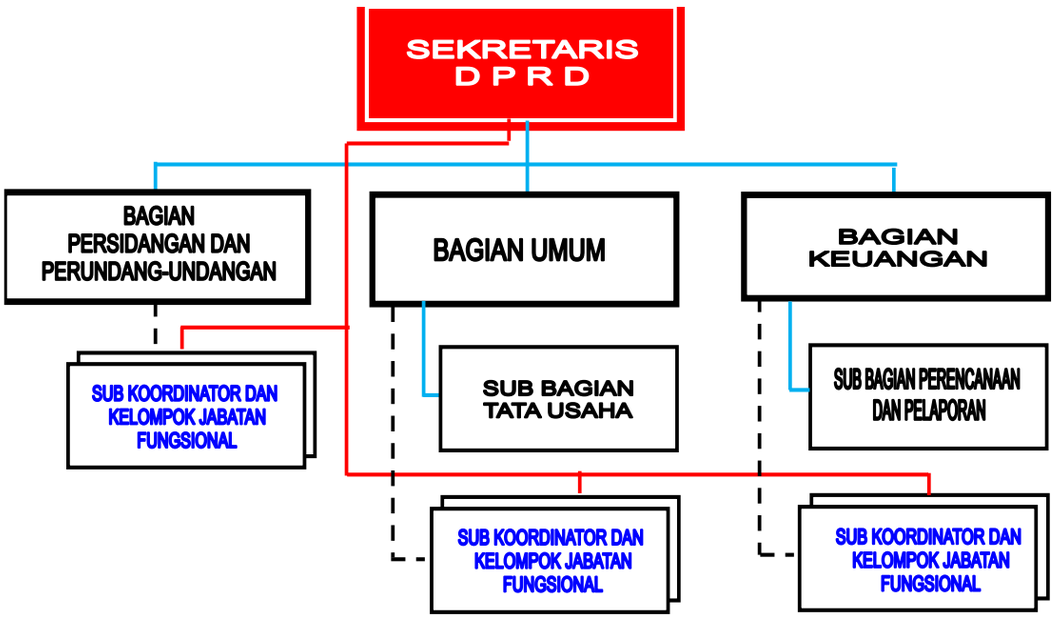

b. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali, didukung dengan personil sebanyak 50 orang yang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Pria	37 orang
2	Wanita	13 orang
	Jumlah	**50 orang**

Susunan atau komposisi pegawai yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali berdasarkan pangkat /golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel: 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/ Eselon

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	Sekretaris DPRD	II	1	
2.	Kepala Bagian	III	3	
3.	Kepala Sub Bagian	IV	2	
4.	Kelompok Jabatan Fungsional	IV	5	
5.	Staf	-	14	
6.	PTT	-	1	
7.	TKHL	-	24	
Jumlah			**50**	

Tabel : 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV	6	
2.	Golongan III	15	
3.	Golongan II	4	
4.	Non Golongan	25	
JUML AH		**50**	

c. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang/ mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali berupa Aset Tetap yang dikelompokkan dalam Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5

Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali s.d Bulan Juli Tahun 2023

No	Nama Barang	Jumlah
	Peralatan dan Mesin	
1.	Komputer	
1	Komputer Jaringan lainnya	8
2	P.C Unit	26
3	Lap Top	35
4	Note Book	55
5	Personal Komputer lainnya	1
6	Serial Printer	2
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2
8	Peralatan Komputer lainnya	1
2.	Peralatan Olah Raga	
1	Peralatan Olahaga lainnya (dst)	1
3.	Alat Angkutan	
1	Sedan	1
2	Station Wagon	10
3	Micro Bus (Penumpang 16 Orang)	2
4	Sepeda Motor	15
4.	Alat Kantor dan Rumah tangga	
1	Mesin Ketik Manual Portable (11 – 13 inci)	1
2	Mesin Foto Copy Folio	1
3	Lemari Kayu	14
4	Rak Besi	4
5	Rak Kayu	3
6	Filing Cabinet Besi	66

No	Nama Barang	Jumlah
7	Brandkas	2
8	Lemari Kaca	4
9	Mesin absendi	1
10	LCD Projector/ Infocus	12
11	Papan Pengumuman	2
12	Alat kantor lainnya	25
13	Meja Kerja Kayu	3
14	Kursi Besi/ Metal	10
15	Meja Panjang	26
16	Meja ½ Biro	57
17	Kursi Rapat	95
18	Bangku Tunggu	4
19	Sofa	3
20	Mesin Penghisap Debu/ Vacum Cleaner	3
21	Mesin Pemotong Rumput	3
22	Alat Pembersih lainnya	9
23	Lemari Es	5
24	AC Window	14
25	AC Split	72
26	Kompor Listrik (Alat Dapur)	1
27	Kitchen Set	1
28	Alat Dapur Lainnya	3
29	Televisi	11
30	Sound System	5
31	Karaoke	1
32	Wireless	3
33	Microphone Table Stand	4
34	Unit Power Supply	1
35	Camera Video	3
36	Alat Hiasan	19
37	Lamabng Garuda Pancasila	2
38	Dispenser	7
39	Mimbar/ Podium	1
40	Handy Cam	1

No	Nama Barang	Jumlah
41	Alat Rumah Tangga Lain - lain	10
42	Alat Pemadam/ Portable	5
43	Detektor Kebakaran	1
44	Alat Pembantu Kebakaran	2
45	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	1
46	Meja Kerja Ketua/ Wakil Ketua DPRD	1
47	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
48	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5
49	Meja Kerja Pejabat lain - lain	36
50	Meja Tamu Ruangan Tunggu Ketua/ Wakil Ketua DPRD	3
51	Meja Tamu Biasa	6
52	Meja Rapat Pejabat Lainnya	71
53	Kursi Kerja Ketua/ Wakil Ketua DPRD	2
54	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	3
55	Kursi Rapat Ruangan Rapat Ketua/ Wakil Ketua DPRD	12
56	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	113
57	Kursi Rapat Pejabat lainnya	26
58	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Ketua/ Wakil Ketua DPRD	2
59	Kursi Tamu di Ruangan Ketua/ Wakil Ketua DPRD	8
60	Kursi Tamu di Depan Ajudan menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota	3
61	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	10
62	Buffet Kaca	3
6.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	Audio Mixing Console	1
2	Audio tape Reel Recorder	1
3	Camera Electronic	4
4	Camera Conference	1
5	Alat Studio lainnya	3
6	Alat Komunikasi Telephone lainnya (dst)	1

No	Nama Barang	Jumlah
7	Antene SHF Portable	2
8	Switcher Antena Lainnya (dst)	1
7.	Alat Laboratorium	
1	Pompa Airasil	1
2	Personal Komputer	1
3	Lambang Negara (Garuda)	1
	Aset Tetap lainnya	
1	Bahan Perpustakaan	
1	Ilmu Pengetahuan Umum	113
2	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	1
3	Buku Umum Lain – lain	714
4	Ilmu Jiwa	3
5	Agama Islam	49
6	Buku agama lainnya (dst)	5
7	Statistik	1
8	Ekonomi	3
9	Hukum	1508
10	Administrasi, Pertahanan dan Keamanan	12
11	Buku Ilmu Sosial lain – lain	1
12	Pengetahuan Bahasa Indonesia	5
13	Pengetahuan Bahasa Inggris	5
14	Management dan Perkantoran	11
2	Barang bercorak Kesenian / Kebudayaan/ Olahraga	
1	Lukisan lain – lain	8
2	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	1
3	Tanaman	
1	Tanaman Hortikultura	101
	Aset Lainnya	
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	Alat Kantor Lainnya (lain – Lain)	1
2	Kursi Rapat Pejabat lain – lain	1
3	Kursi Tamu di Ruangan Ketua/ Wakil ketua DPRD	1

1.6 DATA UMUM ORGANISASI

Dasar Hukum

Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali sebagai satuan kerja yang dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244), dan
2. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 110).

1.7 SISTIMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok, Susunan Organisasi, Data Umum Organisasi, serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, jumlah anggaran dan indikator kinerja

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dinilai berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2022 - 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali melaksanakan 2 (dua) program, 15 (Lima belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sebaik - baiknya. Berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut telah memenuhi target kinerja. Berikut ini merupakan capaian kinerja masing - masing program pada Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2023:

Tabel 2.1
Capaian Program Tahun 2023

No	Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100%	100%	100%

Dari 2 (dua) program yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2023, memiliki capaian kerja yang baik.

Sehingga menunjukkan bahwa, kondisi/ tingkat praktek penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2023 dikategorikan berhasil.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2022 - 2026, Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali sesuai Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Oleh karena itu, Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Boyolali harus mampu menjadi institusi pelayananan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ingin diwujudkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
2. Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah.

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolai bukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM), tetapi berdasarkan rumusan indikator kinerja utama. Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan indicator - indikator tersebut ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Boyolali

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi							Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Persentase terlaksananya layanan fasilitasi DPRD dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD

Sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pemerintahan Umum, maka harus ditunjang oleh adanya kebijakan publik dalam pelaksanaan tugasnya.

Melalui kebijakan publik ini dapat dilakukan penyempurnaan kebijakan birokrasi terutama dalam melakukan efisiensi dan peningkatan kinerja sumber daya Aparatur untuk menghadapi tuntutan peningkatan mutu pengawasan sesuai harapan masyarakat terhadap tuntutan kualitas pelayanan Aparatur.

Penyempurnaan birokrasi dilakukan dengan mengubah perilaku yang tadinya dilayani menjadi melayani, dari yang mengandalkan kekuasaan menjadi pengayom dan pelayan masyarakat, serta dituntut menciptakan iklim yang kondusif.

Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali dilakukan berdasarkan jadwal yang sudah tertuang dalam Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Boyolali yakni memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui kegiatan – kegiatan kedewanan.

Bahwa saat ini salah satu permasalahan utama adalah kondisi sumber daya manusia yang masih ada yang belum memiliki kemampuan dan pengetahuan yang optimal. Kondisi sumber daya yang dimaksud selain tingkat pendidikan formal, ketrampilan, keahlian/ profesionalisme, termasuk di dalamnya aspek mentalitas yaitu kejujuran, tingkat disiplin, moral, dan etos kerja.

Sebagaimana disebutkan di muka bahwa Visi Sekretariat DPRD diarahkan untuk mendukung visi Bupati yaitu ***"Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi"*** sebagaimana diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2022 - 2026**.**

Visi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam *guidelines* yang lebih pragmatis dan kongkrit yang dijadikan ***acuan*** dalam pengembangan strategi dan aktivitas organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali, yaitu:

1. Memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang ada di Sekretariat DPRD;
2. Mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD;
3. Mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan nilai-nilai atau kriteria tentang kebaikan dan kebenaran yang diyakini dan diterapkan dalam kehidupan organisasi, sehingga menjadi norma yang diyakini dalam kehidupan individu di Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali antara lain adalah profesionalisme, kejujuran, responsif, dan kearifan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi guna menjawab permasalahan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali, perlu dilakukan strategi berupa analisis situasi dengan mempertimbangkan aspek kekuatan (*Strenght*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opporunity*), dan tantangan (*Threat*).

KEKUATAN (STRENGHT) :

a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sebagian sudah berpengalaman di bidang tugasnya;
b. Jenjang pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan serta keahlian pegawai yang sebagian telah memadai;
c. Adanya persamaan visi, misi dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
d. Kelengkapan sarana dan prasarana yang sebagian telah tercukupi;
e. Jumlah pegawai yang berpendidikan Sarjana Muda (D3), Sarjana (S1), dan Pasca sarjana (S2) yang cukupmemadai;
f. Tersedianya Dana APBD untuk operasional kegiatan.

KELEMAHAN (*WEAKNESS*)

a. Masih kurang profesional dan kompetensi sebagian pegawai dalam bidang tugasnya;
b. Belum optimalnya koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan DPRD;
c. Belum optimalnya tingkat kedisiplinan dan etos kerja sebagian pegawai.

PELUANG (*OPPORTUNITY*)

a. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang sarana komputer dan sarana komunikasi serta transportasi;
b. Adanya program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai kegiatan pendidikan dan latihan serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya;
c. Tumbuhnya kesadaran,disiplin dan semangat serta motivasi pegawai untuk selalu meningkatkan kinerja dirinya dalam menjalankan tugasnya;
d. Adanya peraturan perundang-undangan baru yang mendukung.

TANTANGAN (*THREAT*)

a. Belum optimalnya koordinasi lintas Sekretariat Dewan dengan Dewan;
b. Meningkatnya kompleksitas kegiatan Dewan yang harus dilayani dengan cepat;
c. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan;
d. Adanya perubahan berbagai produk hukum yang demikian cepat;
e. Pelaksanaan program kerja yang belum konsisten;
f. Masih terdapat perbedaan persepsi di kalangan anggota Dewan.

ANALISA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Peningkatan pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan Dewan;
b. Pengelolaan sumber dana yang berprinsip efisien;
c. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
d. Perencanaan kegiatan Dewan yang disesuaikan dengan Renja DPRD, Keputusan Tata Tertib Dewan dan Jadwal Kegiatan yang sudah disepakati oleh Badan Musyawarah;
e. Peningkatan koordinasi antara Sekretariat Dewan dengan Dewan;
f. Terciptanya optimalisasi kinerja Sekretariat Dewan;
g. Memperkuat peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan antara lain diklat, bintek, seminar, lokakarya dan workshop;
h. Memberi ijin belajar guna peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

a. Penyelenggaraan pelayanan memfasilitasi kelancaran kegiatan Dewan yang dilakukan oleh tenaga yang berpengalaman dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai;
b. Perencanaan kegiatan Dewan yang disesuaikan dengan Renja DPRD, Keputusan Tata Tertib Dewan dan Jadwal Kegiatan yang sudah disepakati oleh Badan Musyawarah;
c. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi lintas Sekretariat Dewan dengan Dewan;
d. Peningkatan dan optimalisasi kinerja Setwan dalam memfasilitasi kegiatan Dewan;
e. Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

TUJUAN

a. Terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan DPRD;
b. Terselenggaranya pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
c. Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan keuangan DPRD yang tertib dan akuntabel.

KEBIJAKAN

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, diarahkan untuk **"Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi"** sebagaimana diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2022 - 2026.

SASARAN

Meningkatkan konsistensi peraturan daerah dengan peraturan pusat dan provinsi dengan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Persentase jumlah Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang telah dievaluasi;
b. Rasio pemenuhan tahapan pembahasan Ranperda dan Keputusan DPRD;
c. Tertampungnya aspirasi masyarakat;
d. Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sebagai anggota lembaga legislasi dalam melakukan pengawasan;
e. Jumlah Ranperda yang selesai dilakukan pembahasan.

2.4 RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam proses perencanaan awal program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2024, beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal RKPD tahun 2024, Sekretariat DPRD melakukan analisis terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Analisis yang dilakukan merupakan estimasi volume kegiatan dan dana yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan diperlukan sebagai langkah antisipasi agar program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dapat terakomodir seluruhnya dalam dokumen RKPD baik jumlah program/ kegiatan, volume, maupun dana yang dibutuhkan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 ditunjukkan pada tabel berikut :

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**2**				**SEKRETARIAT DPRD**								**60.335.858.000**					**60.335.858.000**
4	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**33.583.017.000**					**33.583.017.000**
4	**2**	**1**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.017.327.000**					**4.017.327.000**
4	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji ASN dan Non ASN di Sekretariat DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	25 Orang/ bulan	80 Dokumen	3.488.617.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	3.488.617.000
4	2	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Gaji ASN dan Non ASN di Sekretariat DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	12 Dokumen	80 Dokumen	528.710.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	528.710.000
4	2	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Gaji ASN dan Non ASN di Sekretariat DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	12 Dokumen	80 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	0
4	2	1	02.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terpenuhinya Gaji ASN dan Non ASN di Sekretariat DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	12 Dokumen	80 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	0
4	2	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Terpenuhinya Gaji ASN dan Non ASN di	Kab. Boyolali, Mojosongo	100%	18 Laporan	80 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-		Persentase Penunjang Urusan	100%	0

						Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sekretariat DPRD	, Kemiri					Dana Alokasi Umum		Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar		
4	2	1	02.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Terpenuhinya Gaji ASN dan Non ASN di Sekretariat DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	1 Dokumen	80 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	0
4	**2**	**1**	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**40.000.000**					**40.000.000**
4	2	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan kompetensi SDM ASN dan optimalisasi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	8 Orang	8 orang	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	40.000.000
4	**2**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**992.049.000**					**992.049.000**
4	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terfasilitasinya kegiatan kesekretariatan DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	4 Paket	28 Paket	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	3.000.000
4	2	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terfasilitasinya kegiatan kesekretariatan DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	4 Paket	28 Paket	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	3.000.000
4	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terfasilitasinya kegiatan kesekretariatan DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	12 Paket	28 Paket	427.249.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	427.249.000
4	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penunjang Urusan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terfasilitasinya kegiatan kesekretariata	Kab. Boyolali, Mojosongo	100%	4 Paket	28 Paket	30.000.000	Dana Transfer Umum-		Persentase Penunjang Urusan	100%	30.000.000

						Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar		n DPRD	, Kemiri					Dana Alokasi Umum		Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar		
4	2	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terfasilitasinya kegiatan kesekretariatan DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	4 Paket	28 Paket	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	25.000.000
4	2	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kegiatan kesekretariatan DPRD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Laporan	28 Paket	403.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	403.800.000
4	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya kegiatan kesekretariatan DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	4 Laporan	28 Paket	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	100.000.000
4	**2**	**1**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**248.000.000**					**248.000.000**
4	2	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terfasilitasinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	75 Unit	48 Unit	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	150.000.000
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terfasilitasinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	5 Unit	100 Unit	73.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	73.000.000
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintaha	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Terfasilitasinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	20 Unit	100 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase Penunjang Urusan Pemerintaha	100%	25.000.000

					Lainnya	n yang terpenuhi sesuai Standar	Disediakan	Daerah						Alokasi Umum		n yang terpenuhi sesuai Standar		
4	**2**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**272.550.000**					**272.550.000**
4	2	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercukupinya kebutuhan jasa penunjang di sekretariat DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	12 Laporan	45 Laporan	4.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	4.830.000
4	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tercukupinya kebutuhan jasa penunjang di sekretariat DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	12 Laporan	45 Laporan	264.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	264.720.000
4	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tercukupinya kebutuhan jasa penunjang di sekretariat DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	21 Laporan	45 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	3.000.000
4	**2**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**392.363.000**					**392.363.000**
4	2	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Barang milik daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	27 Unit	241 Unit	322.363.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	322.363.000
4	2	1	02.09	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Barang milik daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	212 Unit	241 Unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	20.000.000
4	2	1	02.09	4	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Barang milik daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	2 Unit	241 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi	100%	50.000.000

						sesuai Standar												sesuai Standar	
4	**2**	**1**	**02.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**								**27.320.728.000**						**27.320.728.000**
4	2	1	02.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Terpenuhinya Gaji, Tunjangan kesehatan dan atribut DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	45 Orang/ Bulan	45 orang	26.728.468.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	26.728.468.000
4	2	1	02.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Terpenuhinya Gaji, Tunjangan kesehatan dan atribut DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	5 Paket	45 orang	417.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	417.260.000
4	2	1	02.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Terpenuhinya Gaji, Tunjangan kesehatan dan atribut DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	45 Orang	45 orang	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	175.000.000
4	**2**	**1**	**02.16**		**Layanan Administrasi DPRD**								**300.000.000**						**300.000.000**
4	2	1	02.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	3 Laporan	3 Laporan	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar	100%	300.000.000
					Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								0						0
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Perda dan peraturan DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	2 dokumen	25 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	100%	0
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terwujudnya Perda dan peraturan DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	1 Dokumen	25 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai	100%	0

						standart											standart		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terwujudnya Perda dan peraturan DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	1 Dokumen	25 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	100%	0
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terwujudnya Perda dan peraturan DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	1 Dokumen	25 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	100%	0
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terwujudnya Perda dan peraturan DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	1 Dokumen	25 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	100%	0
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya Perda dan peraturan DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	15 Laporan	25 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	100%	0
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perda dan peraturan DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	4 Laporan	25 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	100%	0
4	**2**	**2**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**								**26.752.841.000**					**26.752.841.000**
4	**2**	**2**	**02.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**								**7.775.891.000**					**7.775.891.000**
4	2	2	02.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terwujudnya Perda dan peraturan DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	1 Dokumen	40 Dokumen	563.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	100%	563.800.000
4	2	2	02.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terwujudnya Perda dan peraturan DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	19 Dokumen	40 Dokumen	5.614.091.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	100%	5.614.091.000
4	2	2	02.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Terwujudnya Perda dan peraturan DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	10 Dokumen	40 Dokumen	1.098.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai	100%	1.098.000.000

						standart								Umum		standart			
4	2	2	02.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Terwujudnya Perda dan peraturan DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	10 Dokumen	40 Dokumen	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	100%	500.000.000
4	**2**	**2**	**02.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**								**2.845.500.000**					**2.845.500.000**
4	2	2	02.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Tercapainya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	1 Dokumen	5 dokumen	564.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	100%	564.300.000
4	2	2	02.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tercapainya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	1 Dokumen	5 dokumen	564.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	100%	564.300.000
4	2	2	02.02	3	Pembahasan APBD	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Tercapainya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	1 Dokumen	5 dokumen	572.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	100%	572.300.000
4	2	2	02.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Tercapainya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	1 Dokumen	5 dokumen	572.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	100%	572.300.000
4	2	2	02.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tercapainya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	1 Dokumen	5 dokumen	572.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	100%	572.300.000
					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								**1.464.000.000**					**1.464.000.000**
					Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Tercapainya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	1.464.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	100%	1.464.000.000
4	**2**	**2**	**02.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**								**3.130.450.000**					**2.701.700.000**

					Orientasi DPRD	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Tercapainya Kapasitas DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	1 Dokumen	17 Dokumen	428.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	100%	0
4	2	2	02.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Tercapainya Kapasitas DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	6 Dokumen	17 Dokumen	1.715.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	100%	1.715.000.000
4	2	2	02.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tercapainya Kapasitas DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	7 Dokumen	17 Dokumen	833.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	100%	833.700.000
4	2	2	02.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Tercapainya Kapasitas DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	3 Orang	17 Dokumen	153.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	100%	153.000.000
4	**2**	**2**	**02.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**								**7.557.000.000**					**7.985.750.000**
4	2	2	02.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Tertampungnya Aspirasi Masyarakat	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	24 Laporan	119 Laporan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	100%	15.000.000
4	2	2	02.05	3	Pelaksanaan Reses	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Tertampungnya Aspirasi Masyarakat	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	135 Dokumen	135 Laporan	7.542.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	100%	7.970.750.000
4	**2**	**2**	**02.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**								**3.980.000.000**					**3.980.000.000**
4	2	2	02.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	40 Dokumen	52 Dokumen	3.780.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	100%	3.780.000.000

4	2	2	02.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas DPRD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	100%	12 Dokumen	52 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standart	100%	200.000.000
TOTAL													**60.335.858.000**					**60.335.858.000**

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsipprinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benarbenar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/ RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan/ Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah serta Musrenbang Tingkat Kota/ Kabupaten. Pada tahap Forum Perangkat Daerah, usulan-usulan program/ kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing Perangkat Daerah terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/ kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja Perangkat Daerah yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan

target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Pada tahun 2024 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan atau dari masyarakat Kabupaten Boyolali untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, yaitu **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi, antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024.

Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam rangka mengaktualisasikan otonomi daerah, memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Boyolali mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik. Dan untuk mewujudkan misi pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2022 - 2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali, yaitu **"Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi",** maka penyelenggaraan

pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian daerah, membaiknya pelayanan masyarakat, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat eksistensi NKRI. Untuk itu perlu ditempuh langkah - langkah konsolidasi, revitalisasi, refungsionalisasi dan profesionalisasi secara sistematis, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan agar penyelenggaraan pembangunan daerah melalui konsep "Community Development" dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Semangat Reformasi.

Upaya reformasi birokrasi yang berbasis pada sistem kinerja dan kompetensi, penataan personalia birokrasi sebagai bagian integral, dan pembinaan personalia dengan sistem merit serta pemantapan mekanisme kesisteman lembaga, tetap aktual, relevan dan urgen. Pelaksanaan sistem pengawasan intern mutlak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan kepemerintahan yang baik. Dalam era reformasi dan otonomi daerah, terjadi reposisi peran pemerintah menjadi fasilitator, sedangkan masyarakat dan dunia usaha ditempatkan pada posisi pemeran utama pembangunan. Namun demikian, dalam masa transisi ini pemerintah masih tetap diharapkan peran besarnya dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong keberhasilan pembangunan masyarakat.

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Boyolali, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali menetapkan agenda pembangunan utama yaitu :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

   Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya dari sektor pendidikan formal tetapi juga ditempuh pada upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui lembaga pengembangan sumber daya manusia. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung terciptanya penyelenggaraan program pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu kreativitas dan inovasi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan mempercepat tercapainya tataran pembangunan ekonomi yang lebih mandiri.

2. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pemberantasan Korupsi

Saat ini perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalamkonteks nasional dan internasional. Upaya keras Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan selama kurun waktu terakhir telah berada pada arah yang benar. Namun demikian, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktek tata kelola pemerintahan antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Di sisi lain pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen yang penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu, perlu dilakukan reformasi birokrasi di seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, termasuk juga Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali. Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja yang sudah berjalan dan memberikan penekanan lebih lanjut dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan terarah dalam bentuk pengarus utamaan anggaran dan kebijakan. Pengarus utamaan ini dimaksud untuk mengarahkan pencapaian tujuan meskipun dengan sumber daya yang minimal. Reformasi Birokrasi diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali dan penanggulangan korupsi. Langkah-langkah yang disebutkan di atas, akan dipercepat dengan memantapkan dan memperluas program percepatan reformasi birokrasi yang dikombinasikan dengan sejumlah program aksi lainnya.

Untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 maka Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2022 - 2026 yaitu :

1. Terbangunnya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat, yang dijabarkan dalam beberapa sasaran yaitu :
   a. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis.
   b. Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan.
   c. Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan arsip daerah.
   d. Meningkatnya ketersediaan, hasil guna dan daya guna sumber daya iptek serta terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas.
   e. Semakin meningkatnya kerjasama kemitraan antara Kabupaten Boyolali dengan Pemerintah Pusat / Provinsi / Kota / Kabupaten lainnya maupun dengan institusi lain seperti Perguruan Tinggi dan LSM.
   f. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
   g. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat.

2. Terwujudnya sistem politik dan pemerintahan yang demokratis dan kostitusional, dijabarkan dalam sasaran yaitu :
   a. Terselenggaranya pembinaan politik.
   b. Meningkatnya konsistensi peraturan daerah dengan peraturan pusat dan provinsi.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dan atau direncanakan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, yaitu :

“Terbangunnya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat dan terwujudnya sistem politik dan pemerintahan yang demokratis dan kostitusional ”.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

a. Tujuan

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2022 - 2026 adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik.

b. Sasaran

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2022 – 2026 adalah Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah

Strategi untuk menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk Tahun Anggaran 2024 melalui SWOT analisis atau analisis Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) di Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali, yaitu dengan mengoptimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang, mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang, menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan, serta mengurangi kelemahan untuk mengatasi tantangan.

program yang diprioritaskan adalah :

a. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
b. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Dari program tersebut diatas dapat kami laksanakan dengan dua indikator kinerja yaitu indikator utama sebagaimana dalam RPJMD Tahun 2022 - 2026 dan indikator pendukung kegiatan adalah :

a. Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
b. Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah;
c. Terpenuhinya Kebutuhan administrasi perrkantoran perangkat daerah;
d. Realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
e. Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
f. Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah;
g. Jumlah Layanan Administrasi DPRD;
h. Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat;
i. Hasil Keputusan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD;
j. Hasil pembahasan kebijakan anggaran;
k. Jumlah capaian kegiatan peningkatan kapasitas DPRD;

l. Pelaksanaan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat; dan

m. Pelaksanaan Tugas DPRD.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Program adalah istrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik - baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Boyolali, maka pada Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali melaksanakan 2 program, 15 kegiatan dan 52 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 60.335.858.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Program		
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	
	Kegiatan	
	1.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
		- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	2.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
		- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi
	3.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		- Penyediaan Bahan/Material
		- Fasilitasi Kunjungan Tamu
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
		- Pengadaan Mebel
		- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	6.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	7.	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**
		- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
		- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
		- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
	8.	**Layanan Administrasi DPRD**
		- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
	9	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	
	Kegiatan	
	1.	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**
		- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembenbentukan Peraturan Daerah
		- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
		- Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan
		- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademis
	2.	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**
		- Pembahasan KUA dan PPAS
		- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
		- Pembahasan APBD
		- Pembahasan APBD Perubahan
		- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
	3.	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**
		- Pengawasan Penggunaan Anggaran
	4.	**Peningkatan Kapasitas DPRD**
		- Orientasi DPRD
		- Pendalaman Tugas DPRD
		- Publikasi dan Dokumentasi Dewan
		- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
	5.	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**
		- Kunjungan Kerja Dalam Daerah
		- Pelaskanaan Reses
	6.	**Fasilitasi Tugas DPRD**
		- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
		- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali tahun 2022 - 2026. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Rencana kerja program dan kegiatan serta pagu indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	
1	**Administrasi Keuangan Peranglat Daerah**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.488.617.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	528.710.000

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	-
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-
2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	427.249.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000
	Penyediaan Bahan/ Material	25.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	403.800.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
	Pengadaan Mebel	150.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.830.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.720.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.000.000
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	322.363.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000

7	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26.728.468.000
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	417.260.000
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	175.000.000
8	**Layanan Administrasi DPRD**	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	300.000.000
9	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
II	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	
1	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	563.800.000
	Pembahasan Rancangan Perda	5.614.091.000
	Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan	1.098.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	500.000.000
2	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	
	Pembahasan KUA dan PPAS	564.300.000
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	564.300.000
	Pembahasan APBD	572.300.000
	Pembahasan APBD Perubahan	572.300.000
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	572.300.000
3	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.464.000.000

4	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	
	Orientasi DPRD	428.750.000
	Pendalaman Tugas DPRD	1.715.000.000
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	833.700.000
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	153.000.000
5	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	15.000.000
	Pelaksanaan Reses	7.542.000.000
6	**Fasilitasi Tugas DPRD**	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.780.000.000
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	200.000.000
JUMLAH		***60.335.858.000***

BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali tergantung dari tekad, semangat dan Profesionalisme segenap aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali serta koordinasi, kerjasama yang baik dengan para pihak terkait termasuk segenap lapisan masyarakat.

Dengan telah disajikannya Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberi gambaran secara menyeluruh dan terukur menyangkut kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan pada masyarakat Tahun 2024.

Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali senantiasa selalu terbuka dan siap menerima kritik saran, masukan untuk perbaikan dari pihak manapun, demi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Demikian program kerja dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024.

C. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

INSPEKTORAT DAERAH

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

BAB I PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum. 1

1.3 Maksud dan Tujuan. 2

1.4 Sistematika Penulisan..... 2

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023. 4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali..... 4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali. 16

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali. 23

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 25

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 27

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. 32

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional. 32

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali..... 33

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 35

4.1 Program dan Kegiatan..... 35

BAB IV. PENUTUP..... 47

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bupati terpilih wajib menyusun dokumen perencanaan antara lain RPJMD (Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah) / Renstra, RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang di implementasikan kedalam Rencana Strategik (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali sebagai salah satu organisai perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategik Lima Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD (Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 memuat penjelasan ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja, daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2024 dan tolok ukur dan target capaian program, kegiatan dan indikator yang ditetapkan di tahun 2024 landasan hukum penyusunan rencana kerja tahunan.

1.2.LANDASAN HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

3. Peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang sistem Perencanan dan Penganggaran Terpadu;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tenang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian,Daeran evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah serta tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dala negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tenatng hasil Verifikasi dan Velidasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud penyusunan rencana kerja tahunan adalah, untuk menentukan program – program dan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun serta menetapkan tolok ukur dan target kinerja dari program, kegiatan selama satu tahun anggaran 2024.
b. Tujuan penyusunan rencana kerja adalah untuk menjamin pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan serta target kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang di inginkan.

1.4. SISTIMATIKA PEMBAHASAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang.

1.2 Landasan Hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

3.3 Program dan Kegiatan.

BAB V. PENUTUP.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali untuk tahun 2024 telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada untuk mencapai suatu kinerja yang baik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra) Tahun 2021 – 2026 pada dasarnya telah dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja selama 2 (dua) tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2),2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal**	**94**	**90**	**90**	**90**	100%	**91**	**91**	97%
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Perentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal**	**89**	**85**	**85**	**85**	100%	**86**	**86**	97%
	Kegiatan									
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah realisasi pelaksanaan pengawasan	30	10 kegiatan pengawasan	10 kegiatan pengawasan	10 kegiatan pengawasan	100%	5 kegiatan	15 kegiatan	50%
	Sub Kegiatan									
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	65	13 laporan	13 laporan	13 laporan	100%	13 laporan	26 laporan	40%
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan kinerja	Jumlah Laporan Reviu dan Evaluasi Laporan Kinerja	5	1	1	1	100%	1	2	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2),2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5	1	1	1	100%	1	2	40%
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	150	30	30	30	100%	30	30	100%
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut **Hasil** Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	185	37	37	37	37	37	74	40%
		Nilai Survei penilaian integritas	**89**	**88,5**	**88,6**	**88,6**	100%	**88,7**	**88,7**	100%
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**94**	**91**	**91**	**91**	100%	**92**	**92**	98%
	Kegiatan									
6.01.02.2.02	Penyelenggraan Pengawasan dengan tujuan Tertentu	Jumlah pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang sesuai standar.	160	32	32	32	100%	32	64	48%
	Sub Kegiatan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2),2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	160	32	32	32	100%	32	64	48%
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Capaian Nilai MCP Kab. Boyolali oleh KPK**	**89**	**85**	**85**	**99**	116%	**99**	**99**	111%
	Kegiatan									
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	5 Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	2 kegiatan	40%
	Sub Kegiatan									
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	10 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	100%	2 rekomendasi	4 rekomendasi	40%
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Prosentase pendampingan dan asistensi perangkat daerah yang sesuai standar	15 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	6 kegiatan	40%
	Sub Kegiatan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2),2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	30 Keg	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100%	6 kegiatan	12 kegiatan	40%
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, asistensi , Verifikasi dan Penilaian Reformsi birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	345	69 perangkat daerah	69 perangkat daerah	69 perangkat daerah	100%	69 perangkat daerah	138 OPD	40%
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan assistensi Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	305	61 perangkat daerah	61 perangkat daerah	61 perangkat daerah	100%	61 perangkat daerah	122 perangkat daerah	40%
		Nilai Sakip Inspektorat			**82,3**	**82,3**	100%	**82,3**	**82,3**	100%
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar**			**100**	**100**	100%	**100**	**100**	100%
	Kegiatan									
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Sub Kegiatan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2),2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3290	658 Orang/bl	658 Orang/bl	658 Orang/bl	100%	658 Orang/bl	658 Orang/bl	40%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	40%
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	40%
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	40%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	18 laporan	18 laporan	18 laporan	100%	18 laporan	36 laporan	40%
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	40%
	Kegiatan									
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	100%	7 kegiatan	7 kegiatan	100%
	Sub Kegiatan									
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan komponen	Jumlah Paket Komponen Instalasi	20 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	8 paket	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2),2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	8 paket	40%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	8 paket	40%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	8 paket	40%
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	8 paket	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2),2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	8 paket	40%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	48laporan	40%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	65 dok	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	100%	13 dokumen	26 dokumen	40%
	Kegiatan									
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 bulan	12 bulan	100%	28 laporan	28 laporan	100%
	Sub Kegiatan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2),2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 lap	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	40%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 lap	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	40%
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	8 Laporan	40%
	Kegiatan									
X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	390 unit	78 unit	78 unit	78 unit	100%	78 unit	156 unit	40%
	Sub Kegiatan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2),2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	14 unit	40%
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	0	0	0	0	10 unit	10 unit	100%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 unit	60 unit	60 unit	60 unit	100%	60 unit	120 unit	40%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0	0	0	0	1 unit	1 unit	100%
	Kegiatan									
X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	5 Keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	2 keg	40%
	Sub Kegiatan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2),2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60 Dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	24 dok	40%
	Kegiatan									
X.XX.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	125	25	25	25	100%	25	25	100%
	Sub Kegiatan									
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	40%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2),2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan **Dokumen** DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	40%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	40%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan **Dokumen** Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	5	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	40%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80	16 lap	16 lap	16 lap	100%	16 lap	16 lap	40%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	4 lap	4 lap	4 lap	100%	4 lap	8 lap	40%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

Seiring dengan adanya kemajuan tuntutan dari masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan pemerintah kepada masyakat yang lebih akuntabel, transparan, cepat dan murah, isu strategis yang diambil dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Inspektorat Kabupaten Boyolali yang disesuaikan dengan tugas pokok sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Guna mewujudkan pelaksanaan pemerintahan di tingkat kabupaten maupun di tingkat pemerintahan desa, maka isu strategis adalah " Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah sesuai dengan asas kepemerintahan yang baik (good governance) dan masih kurang profesionalnya aparatur pemerintah daerah " hal ini masih terlihat sering terjadinya :

- Ketidak patuhan terhadap aturan yang berlaku.
- Kelemahan Sistem Pengendalian Interen.
- Ketidakhematan/pemborosan.
- Ketidak ekonomis, efisien, dan efektifitas.
- Keterlambatan pencatatan dan pelaporan.

Guna mencapai hal tersebut diatas direncanakan adanya program dan kegiatan sebagaimana uraian matrik kinerja program dalam Tabel II sebagai berikut :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Boyolali

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (tnn -1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal			**90**	**91**	**92**	**93**	**100**	**100**	**92**	**93**	
	Perentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal			**85**	**86**	**87**	**88**	**85**	**86**	**87**	**88**	
	Jumlah realisasi pelaksanaan pengawasan			10 kegiatan pengawasan	5 kegiatan pengawasan	5 kegiatan pengawasan	5 kegiatan pengawasan	10 kegiatan pengawasan	5 kegiatan pengawasan	5 kegiatan pengawasan	5 kegiatan pengawasan	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	
	Jumlah Laporan Reviu dan Evaluasi Laporan Kinerja			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa			30	30	30	30	30	30	30	30	
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			37	37	37	37	37	37	37	37	
	Nilai Survei penilaian integritas			**88,7**	**88,8**	**88,9**	**88,9**	**88,7**	**88,8**	**88,9**	**88,9**	
	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti			**90**	**91**	**92**	**93**	**90**	**91**	**92**	**93**	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (tnn -1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Jumlah pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang sesuai standar.			32	32	32	32	32	32	32	32	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			32	32	32	32	32	32	32	32	
	Capaian Nilai MCP Kab. Boyolali oleh KPK			**85**	**86**	**87**	**88**	**85**	**86**	**87**	**88**	
	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun			2 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	2 rekomendasi	
	Prosentase pendampingan dan asistensi perangkat daerah yang sesuai standar			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			69 perangkat daerah	69 perangkat daerah	69 perangkat daerah	69 perangkat daerah	69 perangkat daerah	69 perangkat daerah	69 perangkat daerah	69 perangkat daerah	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			61 perangkat daerah	61 perangkat daerah	61 perangkat daerah	61 perangkat daerah	61 perangkat daerah	61 perangkat daerah	61 perangkat daerah	61 perangkat daerah	
	Nilai Sakip Inspektorat			**82,2**	**84,15**	**84,4**	**84,4**	**82,2**	**84,15**	**84,4**	**84,65**	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (tnn -1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
	Capaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			658 Orang/bl	658 Orang/bl	658 Orang/bl	658 Orang/bl	658 Orang/bl	658 Orang/bl	658 Orang/bl	658 Orang/bl	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			18 laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (tnn -1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	
	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28 laporan	28 laporan	28 laporan	28 laporan	12 bulan	28 laporan	28 laporan	28 laporan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (tnn -1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.			78 unit	78 unit	78 unit	78 unit	78 unit	78 unit	78 unit	78 unit	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara			0	10 unit	10 unit	10 unit	0	10 unit	10 unit	10 unit	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			60 unit	60 unit	60 unit	60 unit	60 unit	60 unit	60 unit	60 unit	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0	1 unit	1 unit	1 unit	0	1 unit	1 unit	1 unit	
	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg		1 keg	1 keg	1 keg	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			12 dok	12 dok	12 dok	12 dok		12 dok	12 dok	12 dok	
	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat			25	25	25	25	25	25	25	25	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	2 dok	2 dok	2 dok	2	2 dok	2 dok	2 dok	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen			1	1 dok	1 dok	1 dok	1	1 dok	1 dok	1 dok	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (tnn -1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	RKA-SKPD											
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1	1 dok	1 dok	1 dok	1	1 dok	1 dok	1 dok	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1	1 dok	1 dok	1 dok	1	1 dok	1 dok	1 dok	
	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun			1	1 dok	1 dok	1 dok	1	1 dok	1 dok	1 dok	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			15	16 lap	16 lap	16 lap	15	16 lap	16 lap	16 lap	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4	4 lap	4 lap	4 lap	4	4 lap	4 lap	4 lap	

Dalam rangka mencegah terjadinya kelemahan/ kesalahan/ketidaktertiban administrasi pada OPD yang selalu berulang ulang dalam penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Boyolali, maka peran Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali lebih diperankan dalam pembinaan dan atau pemeriksaan ke OPD sebagai obyek pemeriksaan. Meskipun hasil Capaian kinerja program sebagaimana tabel diatas, ini disebabkan karena :

- Respon dari auditan untuk segera menindaklanjuti surat Bupati perihal Koreksi Intern LHP Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali masih rendah.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BOYOLALI.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Boyolali dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pengawasan Daerah, maka harus ditunjang oleh adanya kebijakan publik dalam pelaksanaan tugasnya.

Melalui kebijakan publik ini dapat dilakukan penyempurnaan kebijakan birokrasi terutama dalam melakukan efisiensi dan peningkatan kinerja sumber daya Aparatur untuk menghadapi tuntutan peningkatan mutu pengawasan sesuai harapan masyarakat terhadap tuntutan kualitas pelayanan Aparatur.

Penyempurnaan birokrasi dilakukan dengan mengubah perilaku yang tadinya dilayani menjadi melayani, dari yang mengandalkan kekuasaan menjadi pengayom dan pelayan masyarakat, serta dituntut menciptakan iklim yang kondusif.

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan di Inspektorat dilakukan berdasarkan jadwal yang sudah tertuang dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yakni untuk kegiatan pemeriksaan reguler/ketaatan. Sedang untuk pemeriksaan kasus karena adanya aduan ataupun pemeriksaan khusus atas perintah Atasan/Bupati dilakukan sewaktu-waktu di luar jadwal PKPT.

Bahwa saat ini pemeriksaan menitik beratkan pada pembinaan dan kosulting, sehingga paradigma lama pemeriksaan hanya mencari-cari kesalahan harus ditinggalkan dan tujuan utama dari hasil pemeriksaan adalah untuk mewujudkan pengelolaan administrasi yang akuntabel.

Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan bentuk akhir pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemeriksaan. Setelah berakhirnya tugas pemeriksaan, seorang pemeriksa wajib segera menyusun laporannya untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Kecepatan penerbitan laporan akan sangat bermanfaat bagi objek pemeriksaan sebagai bahan masukan/feed back untuk perbaikan kinerja mereka. Sebaliknya, jika laporan hasil pemeriksaan diterbitkan terlambat maka feed back dan rekomendasi seringkali menjadi basi.

Keterlambatan penerbitan laporan hasil pemeriksaan seringkali terjadi karena ketidaklengkapan data perolehan saat dilaksanakannya pemeriksaan. Disamping itu juga sering pemeriksa merasa kesulitan mencari landasan hukum/aturan sebagai acuan temuan pemeriksaan dan banyaknya aturan yang terbit belum diikuti dengan juknisnya.

Sedangkan nilai-nilai atau kriteria tentang kebaikan dan kebenaran yang diyakini dan diterapkan dalam kehidupan organisasi, sehingga menjadi norma yang diyakini dalam kehidupan individu di Inspektorat Kabupaten Boyolali antara lain adalah profesionalisme, kejujuran, responsif, dan kearifan.

TANTANGAN :

a. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih dan berwibawa.
b. Adanya penawaran program peningkatan Sumber Daya Manusia melalui DIKLAT/Seminar dan pemberian ijin belajar;
c. Koordinasi dan sinkronisasi program pengawasan
d. Kontrol masyarakat cukup tinggi (baik melalui wakil (DPRD), maupun perorangan (aduan)).
e. Tuntutan masyarakat untuk pemberantasan KKN .
f. Nilai-nilai agama dan kepercayaan masyarakat cukup tinggi

PELUANG :

a. Pengawasan dianggap kurang efektif dan efisien;
b. Penegakan sanksi/hukum masih rendah.
c. Kelambatan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
d. Sosialisasi kebijakan publik dan perundang-undangan masih belum memadai.

e. Kinerja dan disiplin aparat penyelenggara pemerintah Kabupaten Boyolali masih rendah.
f. Penghasilan aparat penyelenggara pemerintahan Kabupaten Boyolali masih rendah.

REKOMENDASI :

1. Mengirim Aparatur untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan fungsional dalam rangka meningkatkan profesionalisme Aparatur, Inspektorat Kabupaten Boyolali.
2. Peningkatan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.
3. Segera menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan dengan harapan di kemudian hari kesalahan/penyimpangan yang sama atau sejenis tidak akan terulang lagi.

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD).

Renstra (RENCANA STRATEGIK) Inspektorat Kabupaten Boyolali merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Boyolali selama kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka mendukung Visi, Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati terpilih yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2021– 2026, yaitu :

Dalam rangka mendukung Strategi Pembangunan Daerah pada RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan sistem pemerintahan dan pemberantasan korupsi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.

Dalam rangka mendukung program pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali 2021-2026 diantaranya memprioritaskan penciptaan sistem pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih, lebih berwibawa dan lebih efektif dimana hal ini diprioritaskan sebab masih adanya penyimpangan-penyimpangan dan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan, diantaranya masih adanya penyalahgunaan wewenang dan masih lemahnya pengawasan dan kurangnya akuntabilitas, maka untuk mendukung prioritas tersebut.

Dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku, kegiatan utama dan consulting dilaksanakan dengan mandat pengawasan yang efektif, tidak mencari-cari kesalahan, dan tidak

menghukum diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Luasnya mandat yang dimiliki sekarang ini membawa implikasi terhadap pergeseran peran Inspektorat Daerah, pengawasan yang dulu semata-mata mengedepankan watchdog sekarang APIP menjadi bagian (katalis) dengan mitra audit.

Sebagai mitra audit Inspektorat harus lebih fokus kepada mitra dan setiap pelaksanaan pemeriksaan dapat memberikan solusi masalah secara konstruktif kepada mitra audit sehingga laporan hasil pemeriksaan dapat berhasil guna dan berdaya guna tidak saja kepada user (mitra) tetapi juga kepada stakeholder lainnya. Jika peran ini dapat dilaksanakan dengan baik, Inspektorat Daerah selaku prime mover mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Boyolali dapat tercapai.

Selama ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di OPD di Kabupaten Boyolali, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh OPD/unit kerja itu sendiri sesuai denan PP 60 Tahun 2007 tentang SPIP. Oleh karena itu perlu dilakukan sistem pengawasan yang efektif, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dengan melakukan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif, diharapkan dapat terwujud sistem pemerintahan yang baik (good governance)

Inspektorat Daerah selaku APIP menyadari betul bahwa kunci keberhasilan pencapaian visi terletak ditangan para aparat pengawas (PFA dan P2UPD) sebagai ujung tombak pengawasan.

Pengembangan kapasitas ini tidak hanya terletak pada sisi kuantitas namun juga kualitas aparat pengawas. Untuk meningkatkan kuantitas aparat pengawas, maka diperlukan penyusunan formasi kebutuhan PNS setiap tahun dibandingkan dengan beban kerja yang dimiiki. Selain itu rekruitmen tenaga PFA atau P2UPD dari APIP lainnya dapat dibuka peluang untuk mengisi kekosongan aparat pengawas yang tentunya harus melalui proses penseleksian dan disesuaikan kebutuhan kualifikasi teknis yang dipersyaratkan.

Untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas tidak hanya terpusat pada kemampuan dan keahlian aparat pengawas saja, namun yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas moral aparat pengawas sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan selalu mendasarkan pada etika dan standar pemeriksaan.

Pada prinsipnya misi kedua mengedepankan aspek peningkatan SDM aparat pengawas mengingat semakin luasnya mandat yang dimiliki Inspektorat dan adanya pergeseran paradigma pengawasan, sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional dan kompeten.

Rencana Strategik Inspektorat Kabupaten Boyolali memuat Program dan Kegiatan-Kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2021 – 2026 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Guna mencapai hal tersebut diatas direncanakan adanya program dan kegiatan sebagaimana Tabel III sebagai berikut :

2.5. PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Lebih lanjut Proses Perencanaan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

a. Politik ;

   Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah.

b. Teknokratik ;

   Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

c. Partisipatif;

   Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

d. Atas-Bawah (Top-Down), dan Bawah-Atas (Bottom-Up).

   Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 dimaksud, perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

a. penyusunan rencana;
b. penetapan rencana;
c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan

d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah.

Tahap pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Tahapan ini diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali Penyusunan perencanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali dilaksanakan atau dikoordinasi oleh Kasubag Perencanaan dan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya, pada setiap akhir tahun atau menjelang tahun perencanaan, melalui rapat kerja perencanaan tahunan, yang diikuti oleh Unsur dari Inspektur Pembantu dan sekretariat serta dipimpin oleh Inspektur Daerah Inspektorat dengan hasil berupa Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT). PKPT dimaksud diupayakan dapat memenuhi sasaran pemeriksaan yakni seluruh instansi atau satuan kerja Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan penyesuaian anggaran kegiatan yang ditetapkan dalam APBD. Rancangan rencana kerja. Pelibatkan masyarakat (stake-holders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan oleh Inspektorat dilakukan melalui paparan program pada Penyusunan APBD dengan DRRD.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Tahapan ini diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Boyolali dengan mengajukan rancangan PKPT Bersama Rancangan Dokumen Anggran Satuan Kerja kepada Bupati Boyolali guna mendapatkan pengesahan rencana pengawasan Inspektorat atau yang disebut dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Dokumen Anggaran Satuan Kerja, dan jadwal pemeriksaan, penyelesaian tindak lanjut/monitoring, jadwal kegiatan lainnya berserta ketetapan pelaksana dan tata cara pelaksanaannya.

Dalam hal rencana pengendalian terhadap pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan ini diatur mengenai Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan penetapan Perencanaan Strategik tentang program-program utama yang akan dicapai, rumusan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan strategi instansi Pemerintah ; rumusan indikator kinerja instansi Pemerintah dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah ; pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan seksama ; serta mengukur pencapaian kinerja dengan perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target dan melakukan evaluasi kinerja.

Guna mencapai hal tersebut diatas direncanakan adanya program dan kegiatan sebagaimana Tabel IV sebagai berikut :

TABEL IV
PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

Dalam rangka mendukung sasaran Rencana Jangka Panjang Nasional (2006 – 2025) yaitu :"Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur negara dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip Tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat , lini pemerintahan dan semua kegiatan , pemberian sanksi yang seberat beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas dan efektifitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta peningkatan etika birokarasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip ketataan pemerintahan yang baik", juga untuk mendukung sasaran rencana kerja pembangunan di Jawa Tengah, bidang pengawasan yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan pengawasan untuk mendukung kualitas hasil pengawasan dilakukan antara lain dengan pembinaan sumber daya manusia dan peningkatan profesionalisme.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas laporan hasil pengawasan/ pemeriksaan. Salah satu tolok ukur peran pengawasan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas laporan hasil pengawasan.
3. Selesainya tindak lanjut, artinya semua temuan hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti secara tuntas.
4. Terwujudnya sistem pengawasan intern dan pengawasan melekat. Pelaksanaan pengawasan fungsional pada akhirnya diharapkan dapat mendorong terwujudnya pengawasan melekat.
5. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Pelaksanaan pengawasan fungsional diharapkan dapat mendorong terwujudnya AKIP.

6. Meningkatnya pelayanan Instansi Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Pelaksanaan pengawasan fungsional diharapkan dapat mendorong meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
7. Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Pelaksanaan pengawasan fungsional diharapkan dapat mendorong intensifikasi dan efektifitas pendapatan asli daerah.
8. Mengurangi tumpang tindih pelaksanaan proyek. Pelaksanaan pengawasan fungsional diharapkan dapat mengeliminir terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan proyek dengan cara memberikan umpan balik dalam perencanaan.

Maka Sasaran Pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dan 2 (dua) tahun berikutnya 2024 dan 2025, adalah secara nyata semakin meningkatnya Pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah), terjadwal, teratur, tidak tumpang tindih; Laporan Hasil pemeriksaan dan laporan hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja OPD yang profesional yang dapat dengan mudah dipahami dan cepat untuk ditindaklanjuti, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atau evaluasi yang benar, tepat dan cepat dan benar – benar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, semakin profesional tenaga dan/atau aparat pengawasan fungsional di Kabupaten Boyolali. Dan semakin efektif dan efisien pengelolaan sarana dan prasarana pedukung kegiatan pengawasan/pemeriksaan.

Secara nyata dari tahun ketahun semakin menurunnya tingkat temuan hasil pemeriksaan sehingga pada saatnya nanti akan terwujud Pemerintahan Kabupaten Boyolali yang lebih baik, bersih, dan berwibawa serta bebas dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam dalam tubuh pemerintahan Kabupaten Boyolali .

Program dan Kegiatan-Kegiatan yang telah ditetapkan dan atau direncanakan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan.

3.2.TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN BOYOLALI

a. Tujuan

Tujuan Rencana Strategi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali 2021 – 2026 :

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik

b. Sasaran

Sasaran rencana pembangunan jangka menengah 2021 – 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas keuangan daerah.
2. Meningkatnya integritas dan kapasitas pemerintah daerah
3. Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Strategi untuk menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk Tahun Anggaran 2023 melalui analisis asumsi situasi bidang pengawasan yang ada di Kabupaten Boyolali, yaitu dengan mengoptimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang, mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang, menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan, serta mengurangi kelemahan untuk mengatasi tantangan, program yang diprioritaskan adalah :

a. Program penyelenggaraan pengawasan
b. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Dari program dan kegiatan tersebut diatas dapat kami laksanakan dengan dua indikator kinerja yaitu indikator utama sebagaimana dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan indikator pendukung kegiatan adalah :

a. Opini BPK
b. Nilai Survei penilaian integritas
c. Nilai Sakip Inspektorat

Sedangkan program dan kegiatan pendukung lainnya yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2024 antara lain :

1 Program Penyelenggaraan Pengawasan

a Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Reviu Laporan kinerja
- Reviu Laporan Keuangan
- Pengawasan Desa
- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hsil Pemeriksaan APIP

b Kegiatan Penyelenggraan Pengawasan dengan tujuan Tertentu

- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

2 Program Perumusan kebijakan, pendampingan, asistensi

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang

Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Pendampingan, asistensi , Verifikasi dan Penilaian Reformsi birokrasi
- Pendampingan dan assistensi Urusan pemerintah Daerah

3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penataanusahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

b Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

d Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja

Sebagaimana dalam Rencana Kerja Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali akan melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh Program dan kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2024 untuk mencapai 3 sasaran.

Adapun rencana tingkat capaian (target) indikator sasaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas keuangan daerah.
2. Meningkatnya integritas dan kapasitas pemerintah daerah
3. Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah

c. Pembangunan kelembagaan berbasis kinerja

Untuk lebih jelasnya sebagaimana uraian diatas dapat dilihat dalam Tabel V dibawah ini :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
OPD : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg.	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg.	Renstra OPD Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	APBD KAB. (Rp)	APBD Prov	APBN	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		**833**						**893**	
		Opini BPK		**WTP**						**WTP**	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal**	**Boyolali**	**92**	**27.128.000**			**27.128.000**		**94**	**27.128.000**
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Perentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal**	**Boyolali**	**87**						**89**	
	Kegiatan										
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah realisasi pelaksanaan pengawasan	**Boyolali**	5 kegiatan pengawasan	27.128.000			27.128.000		5 kegiatan pengawasan	27.128.000
	Sub Kegiatan										
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	**Boyolali**	13 laporan	-			-		13 laporan	-
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan kinerja	Jumlah Laporan Reviu dan Evaluasi Laporan Kinerja	**Boyolali**	1 laporan	-			-		1 laporan	-
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	**Boyolali**	1 laporan	-			-		1 laporan	-

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg.	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg.	Renstra OPD Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	APBD KAB. (Rp)	APBD Prov	APBN	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		**833**						**893**	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	**Boyolali**	30 Laporan	-			-		30 Laporan	-
	Kegiatan										
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah realisasi pelaksanaan pengawasan	**Boyolali**	5 Kegiatan	27.128.000			27.128.000		5 Kegiatan	27.128.000
	Sub Kegiatan										
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut **Hsil** Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	**Boyolali**	37 Dokumen	-			-		37 Dokumen	-
		Nilai Survei penilaian integritas		**89**						**89**	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**Boyolali**	**92**						**93**	
	Kegiatan		**Boyolali**								
6.01.02.2.02	Penyelenggraan Pengawasan dengan tujuan Tertentu	Jumlah pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang sesuai standar.	**Boyolali**	32 Laporan						32 Laporan	
	Sub Kegiatan										
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	**Boyolali**	32 Laporan						32 Laporan	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah**	**Boyolali**	**3**	**135.640.000**			**135.640.000**		**3**	**135.640.000**
		Indeks Manajemen Resiko	**Boyolali**	**2**						**2**	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg.	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg.	Renstra OPD Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	APBD KAB. (Rp)	APBD Prov	APBN	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		**833**						**893**	
		Capaian Nilai MCP Kab. Boyolali oleh KPK	**Boyolali**	**87**	**135.640.000**			**135.640.000**		**88**	**135.640.000**
	Kegiatan		**Boyolali**								
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Boyolali**	**1 Kegiatan**							
	Sub Kegiatan		**Boyolali**								
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	**Boyolali**	**2 Rekomendasi**							
	Kegiatan										
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	**Boyolali**	3 kegiatan	135.640.000			135.640.000		3 kegiatan	135.640.000
	Sub Kegiatan										
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	**Boyolali**	6 kegiatan	135.640.000			135.640.000		6 kegiatan	135.640.000
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, asistensi , Verifikasi dan Penilaian Reformsi birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	**Boyolali**	69 PD						69 PD	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg.	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg.	Renstra OPD Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	APBD KAB. (Rp)	APBD Prov	APBN	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		**833**						**893**	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan assistensi Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	**Boyolali**	61 PD						61 PD	
		Nilai Sakip Inspektorat		**82,5**						**82,7**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar**		**100**	**7.806.925.000**			**7.806.925.000**		**100**	**7.806.925.000**
	Kegiatan										
X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Boyolali**	**6 kegiatan**	**7.364.400.000**			**7.364.400.000**		**6 kegiatan**	**7.364.400.000**
	Sub Kegiatan										
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**Boyolali**	658 Orang/bl	7.247.400.000			7.247.400.000		658 Orang/bl	7.247.400.000
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Boyolali**	12 dokumen	117.000.000			117.000.000		12 dokumen	117.000.000
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Boyolali**	12 dokumen						12 dokumen	
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Boyolali**	12 dokumen						12 dokumen	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg.	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg.	Renstra OPD Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	APBD KAB. (Rp)	APBD Prov	APBN	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		**833**						**893**	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**Boyolali**	18 laporan						18 laporan	
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	**Boyolali**	1 dokumen						1 dokumen	
	Kegiatan										
X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Boyolali**	**7 kegiatan**	**316.745.000**			**316.745.000**		**7 kegiatan**	**316.745.000**
	Sub Kegiatan										
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**Boyolali**	4 paket	4.000.000			4.000.000		4 paket	4.000.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Boyolali**		-			-			-
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**Boyolali**	4 paket	6.000.000			6.000.000		4 paket	6.000.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**Boyolali**	12 paket	100.000.000			100.000.000		12 paket	100.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**Boyolali**	4 paket	30.000.000			30.000.000		4 paket	30.000.000

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg.	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg.	Renstra OPD Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	APBD KAB. (Rp)	APBD Prov	APBN	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		**833**						**893**	
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	**Boyolali**	4 paket	25.000.000			25.000.000		4 paket	25.000.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Boyolali**	4 Laporan	51.745.000			51.745.000		4 Laporan	51.745.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Boyolali**	4 laporan	100.000.000			100.000.000		4 laporan	100.000.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**Boyolali**	13 Dokumen	-			-		13 Dokumen	-
	Kegiatan										
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Boyolali**	0	-			-		0	-
	Sub Kegiatan										
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	**Boyolali**	0	-			-		0	-
	Kegiatan										
X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Boyolali**	**28 laporan**	**56.400.000**			**56.400.000**		**28 laporan**	**56.400.000**
	Sub Kegiatan		**Boyolali**								
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Boyolali**	12 laporan	6.000.000			6.000.000		12 laporan	6.000.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Boyolali**	12 laporan	50.400.000			50.400.000		12 laporan	50.400.000

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg.	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg.	Renstra OPD Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	APBD KAB. (Rp)	APBD Prov	APBN	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		**833**						**893**	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**Boyolali**	4 laporan	1.000.000			1.000.000		4 laporan	1.000.000
	Kegiatan										
X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	**Boyolali**	**68 unit**	**69.380.000**			**69.380.000**		**68 unit**	**69.380.000**
	Sub Kegiatan										
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**Boyolali**	7 unit	49.380.000			49.380.000		7 unit	49.380.000
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	**Boyolali**	0 unit	-			-		0 unit	-
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**Boyolali**	60 unit	20.000.000			20.000.000		60 unit	20.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**Boyolali**	0 unit	-			-		0 unit	-
	Kegiatan										
X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Boyolali**	**1 kegiatan**	**-**			**-**		**1 kegiatan**	**-**
	Sub Kegiatan										

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg.	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg.	Renstra OPD Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	APBD KAB. (Rp)	APBD Prov	APBN	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		**833**						**893**	
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Boyolali**	12 dok	-			-		12 dok	-
	Kegiatan										
X.XX.01.2.01	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat**	**Boyolali**	**25 Dokumen**						**25 Dokumen**	
	Sub Kegiatan										
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Boyolali**	2 dokumen						2 dokumen	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Boyolali**	1 dokumen						1 dokumen	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan **Dokumen** DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	**Boyolali**	1 dokumen						1 dokumen	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Boyolali**	1 dokumen						1 dokumen	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan **Dokumen** Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	**Boyolali**	1 dokumen						1 dokumen	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg.	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg.	Renstra OPD Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	APBD KAB. (Rp)	APBD Prov	APBN	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		**833**						**893**	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Boyolali**	16 Laporan						16 Laporan	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Boyolali**	4 laporan						4 laporan	
					7.969.693.000			**7.969.693.000**			**7.969.693.000**

BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali tergantung dari tekat, semangat dan Profesionalisme segenap aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali serta koordinasi, kerjasama yang baik dengan para pihak terkait termasuk segenap lapisan masyarakat.

Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali senantiasa selalu terbuka dan siap menerima kritik saran, masukan untuk perbaikan dari pihak manapun, demi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Demikian program kerja dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024.

D. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN LALU 7

2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9
2.2.1 Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10
2.2.2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 12

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 14

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 41

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 41

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 43

4.1 Program dan Kegiatan 43
BAB V PENUTUP 113

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Capaian Kinerja Keuangan..... 7
Tabel II. 2 Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Pendidikan..... 13
Tabel II. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024..... 16
Tabel II. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Boyolali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali 40

Tabel IV. 1 PROGRAM DAN KEGIATAN DISDIKBUD TAHUN 2024 44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Secara kontekstual, Renja memuat visi, misi, nilai-nilai dan faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Acuan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026 Tahun dan RKPD Tahun 2024. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matrik yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Secara substansial di dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan :

1. Pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.
2. Dokumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengembangan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah untuk pembangunan suatu wilayah maka perencanaan menduduki peran yang sangat penting agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah

secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan

Guna melaksanakan perintah undang-undang tersebut di atas, maka setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 138

(1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat.
(2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKP;
(3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129.

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu RKPD.

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali tahun 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan tahapan persiapan penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dan Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah kemudian Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah rencana kerja awal tahun yang

merupakan implementasi pencapaian visi daerah yaitu **"BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI' Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)"**, yang diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaga negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2017 ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007, tentang Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;
17. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 45);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan maksud sebagai berikut :

1) Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2024.
2) Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BABIII TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.1 Program dan Kegiatan
BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali tahun 2022 menyajikan pengukuran terhadap hasil Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali pada tahun 2022 dan perkiraan pencapaian target tahun 2022.

Pada tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali melaksanakan anggaran belanja program/kegiatan sebesar Rp. 730.313.619.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah), dengan realisasi sebagaimana tabel 2.1 :

Tabel II. 1 Capaian Kinerja Keuangan

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	200.000.000	195.553.000	98%
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	315.000.000	313.842.000	100%
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	422.000.000	421.146.000	100%
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	210.000.000	209.174.000	100%
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.269.615.000	2.240.050.000	99%
6	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	1.036.000.000	928.689.526	90%
7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	475.000.000	472.270.000	99%
8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	145.400.000	144.900.000	100%
9	Pengadaan Mebel Sekolah	600.000.000	598.302.320	100%
10	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	500.000.000	494.450.000	99%
11	Pengadaan Perlengkapan Siswa	250.000.000	248.000.000	99%
12	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.000.000.000	1.000.000.000	100%
13	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.838.700.000	3.824.349.000	100%
14	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	350.000.000	340.793.000	97%
15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	63.249.726.144	59.417.075.429	93%
16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	649.692.000	648.573.000	100%
17	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.500.000.000	1.475.568.000	98%
18	Pembangunan Laboratorium	510.675.000	507.622.340	99%
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	750.828.000	736.549.000	98%
20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	19.504.920.000	19.372.147.715	99%
21	Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	291.538.500	97%

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
22	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	200.000.000	199.152.000	100%
23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	382.000.000	379.277.000	99%
24	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	206.000.000	205.905.770	100%
25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	340.000.000	296.741.200	87%
26	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	276.000.000	273.622.550	99%
27	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	38.228.265.206	36.999.958.603	99%
28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	500.000.000	491.875.000	98%
29	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.000.000.000	700.000.000	70%
30	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.073.038.000	1.047.066.000	98%
31	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100.000.000	98.998.000	99%
32	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	275.000.000	269.388.000	98%
33	Pengadaan Mebel PAUD	125.000.000	125.000.000	100%
34	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	500.000.000	498.375.000	100%
35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	824.595.000	809.010.000	98%
36	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	4.788.000.000	3.607.475.000	75%
37	Pengelolaan Dana BOP PAUD	17.765.400.000	15.234.209.400	91%
38	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	150.000.000	149.644.000	100%
39	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	135.372.000	132.000.000	98%
40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	119.800.000	98.247.330	82%
41	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.478.600.000	1.242.800.000	84%
	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan			
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.950.000.000	8.825.400.000	99%
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	495.352.000	483.460.550	98%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	537.499.357.000	507.552.020.361	94%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.890.400.000	8.165.700.000	92%
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.000.000	12.989.000	100%
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	113.000.000	112.376.000	99%
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	152.900.000	146.653.461	96%
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	93.737.000	91.552.100	98%
7	Penyediaan Bahan/Material	35.000.000	34.999.820	100%
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	121.690.000	113.280.000	93%
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000	117.694.690	94%
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.000.650	109.838.000	100%
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.010.000	5.000.000	100%

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.464.000	112.808.792	61%
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.078.000	250.000	23%
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.104.000	67.317.223	99%
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000	52.351.800	95%
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	469.000.000	448.884.000	96%
17	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.022.000.000	1.018.580.000	100%
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
1	Pelindungan Cagar Budaya	981.400.000	753.350.450	77%
2	Pengembangan Cagar Budaya	50.000.000	49.539.300	99%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	220.000.000	218.930.000	99%
2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	200.000.000	199.450.000	100%
3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	3.140.000.000	2.940.108.500	95%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	758.500.000	551.850.700	73%
2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	15.000.000	14.500.000	97%
	TOTAL	730.313.619.000	688.938.222.430	91%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 20) dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah (Kabupaten/ kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu, dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja OPD, yang disusun dengan

berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.2.1 Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

a. Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.

   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.

b. Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali

   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi :

   1) perumusan kebijakan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   2) pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   4) pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan dan bidang kebudayaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 1

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Menurut Peraturan Bupati Boyolali Nomor 45 Tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1) Kepala
2) Sekretariat;
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Subbagian Keuangan; dan
3) Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    a. Seksi Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
    b. Seksi Penjenjangan dan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4) Bidang Sekolah Dasar;
    a. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar; dan
    b. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.
5) Bidang Sekolah Menengah Pertama;
    a. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama; dan
    b. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
6) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal;
    a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
    b. Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal.
7) Bidang Kebudayaan
8) Kelompok Jabatan Fungsional;
9) UPT; dan
10) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan.

Jenis pelayanan dasar urusan Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Boyolali berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis pelayanan tersebut meliputi:

a. Pelayanan minimal pada Pendididkan Anak Usia Dini dengan indikatornya adalah jumlah anak usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD.
b. Pelayanan minimal pada Pendidikan Dasar dengan indikatornya adalah jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpastisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs).
c. Pelayanan minimal pada Pendidikan Kesetaraan dengan indikatornya adalah jumlah pendudk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpastisipasi dalam Pendidikan kesetaraan.

Realisasi dari target pencapaian SPM urusan Pendidikan yang dapat terlayani pada tahun 2022 di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Realisasi Capaian SPM Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendidikan Dasar	32.029	27.428	85,63%	140.382.859.350	83.707.663.276	60%
2	Pendidikan Kesetaraan	150.867	145.723	96,59%	1.733.772.000	1.190.947.330	69%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	198.742	183.651	92,41%	24.427.995.000	21.694.800.100	89%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat bidang Pendidikan dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni.

Faktor-faktor pendukung capaian fokus Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan meliputi kondisi geografis yang dekat akses transportasi dan informasi, anggaran pendidikan tepat sasaran, kebersamaan dan keseriusan Pemerintah Daerah bersama masyarakat membangun pendidikan di Kabupaten Boyolali.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian fokus ini adalah kemampuan ekonomi masyarakat dan faktor geografi yang menyebabkan wilayah-wilayah tertentu di pedesaan dan pegunungan sulit dijangkau layanan pendidikan.

Solusinya adalah pemberian lebih banyak subsidi untuk membantu anak dalam menjangkau hak pendidikannya, seperti beasiswa, pendirian sekolah satu atap dan SMP Terbuka demi perluasan kesempatan belajar kepada anak-anak lulusan SD/MI atau sederajat yang berhenti sekolah. Solusi lainnya ialah penjaringan anak usia sekolah baik yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah untuk masuk ke dalam sistem pendidikan. Selain itu, program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu ditawarkan untuk menarik anak usia jenjang pendidikan dasar yang berada di luar sistem sekolah, dengan mengindahkan asas keadilan dan kesetaraan gender.

Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kebudayaan kepada masyarakat bukan hanya dititikberatkan pada pelayanan hiburan atau seni kepada masyarakat, tetapi juga memberikan pelayanan dalam bentuk pemberian bantuan, kaderisasi dan sosialisasi sehingga diharapkan kekayaan budaya lokal yang mengandung kearifan lokal dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini perlu digali dan disebarkan kepada masyarakat luas khususnya generasi penerus agar memahami makna setiap budaya daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional.

Tabel II. 2 Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Pendidikan

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	Internal	-	-
2	Eksternal	Penyelenggaraan PAUD dengan biaya pendidikan murah belum dapat diwujudkan sepenuhnya, kurangnya sarana dan prasarana, serta masih perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak usia dini terlebih pada masyarakat pedesaan Dalam penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Boyolali terdapat 1.052 lembaga, namun hanya 3 lembaga (TK Negeri) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali atau sebesar 0,28% selebihnya sebanyak 1.049 lembaga atau sebesar 99,71% diselenggarakan oleh masyarakat, sehingga peningkatan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan, pembinaan,	Memanfaatkan peluang dalam pengembangan PAUD antara lain melalui peningkatan hubungan silaturahmi dan kerja sama antara lembaga PAUD dengan orang tua anak didik, terutama dalam hal perencanaan program agar tujuan dari program bisa dicapai secara maksimal dan meningkatkan peranan orang tua murid dalam pelaksanaan program-program lembaga.

		dan pelembagaan pembinaan anak sangat mempengaruhi capaian indikator ini.	
		Pada layanan dasar Pelayanan Pendidikan Dasar baru terealisasi sebesar 97%, dikarenakan realisasi anak usia 6 tahun pada kenyataanya sudah ada yang masuk ke sekolah dasar, dimana seharusnya usia 5-6 tahun masih masuk pada jenjang anak usia PAUD	Strategi manajemen PAUD dengan meningkatkan koordinasi dengan desa, melalui pemberdayaan dana desa juga diharapkan menjadi strategi yang jitu dalam pelaksanaan pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini
		Pada Pelayanan Pendidikan Kesetaraan terealisasi sebesar 87,13%, dikarenakan Usia Anak 7-18 tahun aktif dalam Pendidikan Dasar, Menengah, Atas dan Kejuruan, dan sisanya anak 7-18 tahun didaerah Perbatasan Kabupaten dan Pegunungan usia 16-18 sudah ada yang menikah dan bekerja sehingga enggan untuk melanjutkan Pendidikan	Memberikan lebih banyak lagi subsidi untuk membantu anak dalam menjangkau hak pendidikannya, seperti beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin, optimalisasi Kejar Paket A, Kejar Paket B dan Kejar Paket C yang bertujuan memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada warga negara yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler karena berbagai hambatan yang dihadapinya.
		Secara makro hambatan /permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM urusan Pendidikan adalah masih diperlukannya peningkatan perluasan akses dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah khususnya bagi siswa dari keluarga miskin dan daerah daerah di perbatasan/ pegunungan.	Memperkuat pelayanan pendidikan (peningkatan akses dan kualitas) di daerah daerah pegunungan dan perbatasan agar tercipta pemerataan pendidikan di semua wilayah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD merupakan penjabaran RPJMD yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan bagi SKPD, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam melaksanakan dan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan daerah guna mendukung capaian target pembangunan daerah. Disamping itu RKPD dimaksudkan sebagai acuan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rancangan awal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah Upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali lebih baik dan akuntabel antara lain dengan melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel II. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD	89,05 Prosentase	75.066.592.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD	89,05 Prosentase	75.066.592.000	
	Kegiatan				Kegiatan				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah SD Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	546 Sekolah	75.066.592.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah SD Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	546 Sekolah	75.066.592.000	
	Sub Kegiatan				Sub Kegiatan				
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB yang dibangun	5 Sekolah	200.000.000	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB yang dibangun	5 Sekolah	200.000.000	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang dibangun	4 Paket	315.000.000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang dibangun	4 Paket	315.000.000	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	5 Paket	422.000.000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	5 Paket	422.000.000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah jamban, Ruang Kepsek dan pagar SD yang dibangun	10 Paket	210.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah jamban, Ruang Kepsek dan pagar SD yang dibangun	10 Paket	210.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang diperbaiki	44 Paket	2.279.342.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang diperbaiki	44 Paket	2.279.342.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Unit Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	60 Paket	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Unit Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	60 Paket	0	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Evaluasi Program Pendidikan Dasar, dan operasional Koordinator	12 Bulan	1.480.200.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Evaluasi Program Pendidikan Dasar, dan operasional Koordinator	12 Bulan	1.480.200.000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Frekuensi lomba siswa	3 Paket	505.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Frekuensi lomba siswa	3 Paket	505.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah pelaksanaan Pembinan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sensuai dengan SNP	12 Bulan	195.400.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah pelaksanaan Pembinan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sensuai dengan SNP	12 Bulan	195.400.000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Pengelola BOS SD	582 Sekolah	0	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Pengelola BOS SD	582 Sekolah	0	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru yang dibangun	1 Unit	1.500.000.000	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru yang dibangun	1 Unit	1.500.000.000	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah paket pengadaan mebel/mebel pengganti SD	20 Sekolah	600.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah paket pengadaan mebel/ mebel pengganti SD	20 Sekolah	600.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Sekolah	50 Paket	500.000.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Sekolah	50 Paket	500.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah peserta didik jenjang SD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	1000 Orang	250.000.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah peserta didik jenjang SD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	1000 Orang	250.000.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima beasiswa miskin	1000 Orang	1.000.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima beasiswa miskin	1000 Orang	1.000.000.000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Paket Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	25 Paket	3.838.700.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Paket Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	25 Paket	3.838.700.000	
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa peserta Assesmen Kompetensi Minimal	15500 Orang	774.246.000	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa peserta Assesmen Kompetensi Minimal	15500 Orang	774.246.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	55950 Orang	69.167.026.642	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	55950 Orang	69.167.026.642	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	3412 Orang	500.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	3412 Orang	500.000.000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP	78,80 Prosentase	45.968.828.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP	78,80 Prosentase	45.968.828.000	
	Kegiatan				Kegiatan				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	52 Sekolah	45.968.828.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	52 Sekolah	45.968.828.000	
	Sub Kegiatan				Sub Kegiatan				
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB yang dibangun	6 Unit	0	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB yang dibangun	6 Unit	0	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 Sekolah	0	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	1 Sekolah	0	
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang dibanggun	2 Unit	510.675.000	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang dibanggun	2 Unit	510.675.000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah unit Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	2 Unit	0	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah unit Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	2 Unit	0	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah gedung/ruang sekolah yang diperbaiki	20 Sekolah	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah gedung/ruang sekolah yang diperbaiki	20 Sekolah	0	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah unit Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	5 Unit	19.498.565.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah unit Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	5 Unit	19.498.565.000	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Paket Pengadaan Mebel / mebel penggati SMP	5 Paket	300.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Paket Pengadaan Mebel / mebel penggati SMP	5 Paket	300.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah paket perlengkapan perlengkapan sekolah	20 Paket	200.000.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah paket perlengkapan perlengkapan sekolah	20 Paket	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah buku teks bagi siswa	25 Sekolah	0	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah buku teks bagi siswa	25 Sekolah	0	
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Frekuensi pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi siswa	1 Tahun	920.000.000	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Frekuensi pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi siswa	1 Tahun	920.000.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	2028 Orang	0	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	2028 Orang	0	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang memenuhi standar SPMI dan SPME	98 Sekolah	206.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang memenuhi standar SPMI dan SPME	98 Sekolah	206.000.000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah penyelenggaraan lomba-lomba siswa	3 Kegiatan	400.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah penyelenggaraan lomba-lomba siswa	3 Kegiatan	400.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelola Dana BOS jenjang SMP	98 Sekolah	216.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelola Dana BOS jenjang SMP	98 Sekolah	216.000.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	26600 Orang	31.837.571.585	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	26600 Orang	31.837.571.585	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah yang diperbaiki	0 Paket	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah yang diperbaiki	0 Paket	0	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru sekolah yang diperbaiki	0 Paket	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru sekolah yang diperbaiki	0 Paket	0	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang diperbaiki	0 Paket	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang diperbaiki	0 Paket	0	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	1000 Orang	500.000.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	1000 Orang	500.000.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik yang menerima beasiswa miskin	1000 Orang	1.000.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik yang menerima beasiswa miskin	1000 Orang	1.000.000.000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah pengadaan paket alat peraga pendidikan bagi siswa	5 Sekolah	1.073.038.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah pengadaan paket alat peraga pendidikan bagi siswa	5 Sekolah	1.073.038.000	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Satdik SMP	52 Sekolah	312.828.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Satdik SMP	52 Sekolah	312.828.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	85,00 Prosentase	22.352.200.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	85,00 Prosentase	22.352.200.000	
	Kegiatan								
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	520 Sekolah	22.352.200.000	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	520 Sekolah	22.352.200.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas/ruang guru direhab	3 Sekolah	250.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas/ruang guru direhab	3 Sekolah	250.000.000	
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah pengadaan mebel PAUD	4 Paket	125.000.000	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah pengadaan mebel PAUD	4 Paket	125.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	1000 Orang	500.000.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	1000 Orang	500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa	10 Sekolah	824.595.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa	10 Sekolah	824.595.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah lembaga dan PTK PAUD yang terfasilitasi	22 Sekolah	4.788.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah lembaga dan PTK PAUD yang terfasilitasi	22 Sekolah	4.788.000.000	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga PAUD penerima BOP	783 Sekolah	17.765.400.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga PAUD penerima BOP	783 Sekolah	17.765.400.000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana dan prasarana PAUD dibangun	3 Sekolah	175.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana dan prasarana PAUD dibangun	3 Sekolah	175.000.000	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	100 Prosentase	2.500.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	100 Prosentase	2.500.000.000	
	Kegiatan				Kegiatan				

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	9 Sekolah	2.500.000.000	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	9 Sekolah	2.500.000.000	
	Sub Kegiatan				Sub Kegiatan				
	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	500 Orang	100.800.000	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	500 Orang	100.800.000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah paket pengadaan alat praktik dan peraga siswa	2 Sekolah	50.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah paket pengadaan alat praktik dan peraga siswa	2 Sekolah	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) KK Miskin	500 Orang	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) KK Miskin	500 Orang	0	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah evaluasi belajar pendidikan kesetaraan	1 Tahun	119.800.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah evaluasi belajar pendidikan kesetaraan	1 Tahun	119.800.000	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal /Kesetaraan	Jumlah lembaga Non formal penerima BOP Kesetaraan	16 Sekolah	1.478.600.000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah lembaga Non formal penerima BOP Kesetaraan	16 Sekolah	1.478.600.000	
	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan	1 Kegiatan	0	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan	1 Kegiatan	0	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi	99,42 Prosentase	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi	99,42 Prosentase	0	
6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	100 Prosentase	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	100 Prosentase	0	
7	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan)	100 Prosentase	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan)	100 Prosentase	0	
8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	100 Prosentase	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	100 Prosentase	0	
9	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi	54,47 Prosentase	13.638.152.000	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi	54,47 Prosentase	13.638.152.000	
	Kegiatan				Kegiatan				

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	582 Orang	13.638.152.000	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	582 Orang	13.638.152.000	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	4874 Orang	8.950.000.000	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	4874 Orang	8.950.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Guru Yang Mengikuti seleksi Calon Kepala Sekolah	35 Orang	495.352.000	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Guru Yang Mengikuti seleksi Calon Kepala Sekolah	35 Orang	495.352.000	
	Kegiatan				Kegiatan				
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 Persen	543.975.400.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 Persen	543.975.400.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	543.230.714.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	543.230.714.800	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	537.496.447.386	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	537.496.447.386	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji PTT dan Tenaga Honorer	12 Bulan	9.050.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji PTT dan Tenaga Honorer	12 Bulan	9.050.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	0	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12 Bulan	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12 Bulan	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	2 Dokumen	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	2 Dokumen	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	405.627.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	405.627.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/telepon	12 Bulan	13.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/telepon	12 Bulan	13.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	13.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	13.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	72.900.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	72.900.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	79.937.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	79.937.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	35.000.200	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	35.000.200	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	101.690.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	101.690.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	100.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	120.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	120.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaaan Peralatan Kantor	12 Bulan	70.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaaan Peralatan Kantor	12 Bulan	70.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Bangunan Lainnya	12 Bulan	79.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Bangunan Lainnya	12 Bulan	79.000.000	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya pengadaan aset tetap kantor	2 Paket	206.220.600	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya pengadaan aset tetap kantor	2 Paket	206.220.600	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	160.954.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	160.954.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	12 Bulan	5.010.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	12 Bulan	5.010.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	184.464.083	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	184.464.083	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	1.078.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	1.078.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.	12 Bulan	58.104.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.	12 Bulan	58.104.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	12 Bulan	68.104.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	12 Bulan	68.104.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	60.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	60.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Paket	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Paket	100.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	25 Dokumen	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	25 Dokumen	0	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 Dokumen	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	1 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15 Dokumen	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	7 Bulan	1.022.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	7 Bulan	1.022.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersosialisasinya bahaya rokok melalui pagelaran seni dan budaya	7 Bulan	1.022.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersosialisasinya bahaya rokok melalui pagelaran seni dan budaya	7 Bulan	1.022.000.000	
		Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan				Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan			
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang teregistrasi	85,00 Prosentase	1.356.400.000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang teregistrasi	85,00 Prosentase	1.356.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	"Jumlah Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)"	640 Buah	1.356.400.000	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	"Jumlah Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)"	640 Buah	1.356.400.000	
	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah budaya Benda dan Tak Benda Yang dilestarikan	664 Buah	906.400.000	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah budaya Benda dan Tak Benda Yang dilestarikan	664 Buah	906.400.000	
	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar Budaya yang dilestarikan	25 Buah	50.000.000	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar Budaya yang dilestarikan	25 Buah	50.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok seni yang dibina	27 Prosentase	3.449.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok seni yang dibina	27 Prosentase	3.449.000.000	
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya	12 Buah	3.449.000.000	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya	12 Buah	3.449.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina dan difasilitasi	180 Orang	220.000.000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina dan difasilitasi	180 Orang	220.000.000	
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	329 Orang	200.000.000	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	329 Orang	200.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah kelompok seni yang dibina dan pelaksanaan gelar Seni dan Budaya	161 Kelompok	2.800.000.000	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah kelompok seni yang dibina dan pelaksanaan gelar Seni dan Budaya	161 Kelompok	2.800.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase koleksi museum dalam kondisi baik	95,00 Prosentase	673.500.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase koleksi museum dalam kondisi baik	95,00 Prosentase	673.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	12 Kegiatan	673.500.000	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	12 Kegiatan	673.500.000	
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	160 Buah	758.500.000	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	160 Buah	758.500.000	
	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	2 Orang	15.000.000	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	2 Orang	15.000.000	
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pengunjung	1850 Orang	0	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pengunjung	1850 Orang	0	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	1 Unit	0	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	1 Unit	0	
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah kapasitas koleksi yang informatif	2 Paket	0	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah kapasitas koleksi yang informatif	2 Paket	0	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyelanggaraan RKPD di Kabupaten Boyolali dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Mekanisme perencanaan pembangunan dirancang agar dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Proses penyusunan rencana pembangunan ditempuh melalui beberapa mekanisme usulan, yaitu kegiatan musrenbang, aspirasi langsung kepada Bupati saat kunjungan ke lapangan dan aspirasi melalui hasil Reses DPRD. Berdasarkan data rancangan RKPD Kabupaten Boyolali sesuai data usulan Program/Kegiatan dari masyarakat, tidak terdapat usulan untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel II. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Boyolali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali

No	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

Seiring dengan keterbukaan informasi publik, dan pemanfaatan teknologi informasi, Pemerintah Kabupaten Boyolali membuka beberapa sarana untuk membangun sinergi dan komunikasi pembangunan dengan masyarakat. Kanal yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali antara lain melalui sms, website, media sosial (twitter, facebook, instagram, dll). Meskipun terhubung secara struktur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali juga mempunyai kanal tersendiri melalui berbagai media yang dimanfaatkan untuk jalur dua arah sehingga peyelenggaraan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Boyolali dapat berjalan dengan efektif, efisien, cepat, dan tanggap.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Isu strategis nasional tidak lepas dari Arahan Presiden Republik Indonesia sebagai dasar penyusunan RPJMN Tahun 2020 - 2024, yaitu:

1. Pembangunan SDM: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *omnibus law* terutama menerbitkan 2 undang-undang, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM.

Salah satu cara meningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”. Salah satu prioritas kebijakan pembangunan daerah tersebut adalah Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada: meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata melalui perluasan akses layanan pendidikan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Yang dimaksud tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Misi kedua "***Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya***". Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Penjabaran misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali dengan mengacu pada Visi dan Misi Bupati Boyolali yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026.

Merujuk pada unsur visi dan misi RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 tersebut diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali harus mampu menjabarkan dan melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya secara keseluruhan. Untuk itu aparat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali dengan disiplin untuk menegaskan visinya dan bekerja keras agar visi tersebut terealisasi.

Dengan berpedoman terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

Tujuan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 adalah meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 adalah meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta meningkatnya kapasitas kelembagaan Perangkat daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Adapun usulan pogram dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
   a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
   b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
   d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
   a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
   a. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
4. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
   a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Permuseuman
   a. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel IV. 1 PROGRAM DAN KEGIATAN DISDIKBUD TAHUN 2024

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								282.668.615.000,00					291.913.995.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								277.706.615.000,00					286.451.995.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								277.514.795.000,00					286.260.175.000,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								189.828.620.000,00					191.881.000.000,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								187.448.417.000,00					189.540.810.000,00
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Orang/bulan	12 Bulan	173.403.379.000,00	Pajak Daerah, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-TPG PNSD, DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	175.495.772.000,00
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	37 Dokumen	12 Bulan	14.045.038.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37 Dokumen	14.045.038.000,00
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								1.500.000.000,00					1.500.000.000,00
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	5000 Orang	-	1.500.000.000,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5000 Orang	1.500.000.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								549.135.000,00					549.122.000,00
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah. Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Paket	12 Bulan 12 bulan	13.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.000.000,00
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah. Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Paket	12 Bulan 12 bulan	30.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								Perangkat Daerah										
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah. Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Paket	12 Bulan 12 bulan	165.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	165.000.000,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah. Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Paket	12 Bulan 12 bulan	70.937.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	70.937.000,00
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah. Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	0 Dokumen	12 Bulan 12 bulan	0,00	-		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah. Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Paket	12 Bulan 12 bulan	38.508.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	38.495.000,00
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah. Tercapaianya fungsi	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan 12 bulan	121.690.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	121.690.000,00

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah										
1	01	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah. Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	5 Laporan	12 Bulan 12 bulan	110.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	110.000.000,00
1	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							192.964.000,00					192.964.000,00
1	01	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah. Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	12 Bulan 12 bulan	5.010.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.010.000,00
1	01	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah. Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Laporan	12 Bulan 12 bulan	186.876.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	186.876.000,00
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah. Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	12 Bulan 12 bulan	1.078.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.078.000,00
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								138.104.000,00					98.104.000,00
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah. Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	49 Unit	12 Bulan 12 bulan	78.104.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	78.104.000,00
1	01	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah. Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	30 Unit	12 Bulan 12 bulan	60.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20.000.000,00
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							79.067.437.000,00					85.760.437.000,00
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							31.604.200.000,00					33.022.200.000,00
1	01	02	2.01	0001		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)												

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi APK PAUD APM SD APM SMP Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Jumlah SD Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SD negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100 persen 100,00 persen 99,71 persen 95,00 persen 91,16 persen 79,40 persen 100,00 persen	1 Unit	546,00 % 545 sekolah	1.500.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1.500.000.000,00
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi APK PAUD APM SD APM SMP Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah SD Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SD negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100 persen 100,00 persen 99,71 persen 95,00 persen 91,16 persen 79,40 persen 100,00 persen	4 Ruang	546,00 % 545 sekolah	420.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	420.000.000,00
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi APK PAUD APM SD APM SMP Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah SD Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SD negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100 persen 100,00 persen 99,71 persen 95,00 persen 91,16 persen 79,40 persen 100,00 persen	5 Ruang	546,00 % 545 sekolah	698.500.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	698.500.000,00
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi APK PAUD APM SD APM SMP Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah SD Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasi nya SD negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100 persen 100,00 persen 99,71 persen 95,00 persen 91,16 persen 79,40 persen 100,00 persen	10 Unit	546,00 % 545 sekolah	5.990.538.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	5.990.538.000,00
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi APK PAUD APM SD APM SMP Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Jumlah SD Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasi nya SD negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100 persen 100,00 persen 99,71 persen 95,00 persen 91,16 persen 79,40 persen 100,00 persen	1 Paket	546,00 % 545 sekolah	600.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	600.000.000,00
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi APK PAUD APM SD APM SMP Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah SD Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SD negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100 persen 100,00 persen 99,71 persen 95,00 persen 91,16 persen 79,40 persen 100,00 persen	50 Paket	546,00 % 545 sekolah	500.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	50 Paket	500.000.000,00
1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi APK PAUD APM SD APM SMP Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah SD Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SD negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100 persen 100,00 persen 99,71 persen 95,00 persen 91,16 persen 79,40 persen 100,00 persen	1000 Peserta Didik	546,00 % 545 sekolah	1.000.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	1.000.000.000,00
1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi APK PAUD APM SD APM SMP Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah SD Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SD negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100 persen 100,00 persen 99,71 persen 95,00 persen 91,16 persen 79,40 persen 100,00 persen	25 Paket	546,00 % 545 sekolah	2.010.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	25 Paket	2.010.000.000,00
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi APK PAUD APM SD APM SMP Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah SD Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SD negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100 persen 100,00 persen 99,71 persen 95,00 persen 91,16 persen 79,40 persen 100,00 persen	1500 Peserta Didik	546,00 % 545 sekolah	434.800.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta Didik	434.800.000,00
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi APK PAUD APM SD APM SMP Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah SD Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SD negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100 persen 100,00 persen 99,71 persen 95,00 persen 91,16 persen 79,40 persen 100,00 persen	3412 Orang	546,00 % 545 sekolah	480.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3412 Orang	480.000.000,00
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi APK PAUD APM SD APM SMP Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah SD Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SD negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100 persen 100,00 persen 99,71 persen 95,00 persen 91,16 persen 79,40 persen 100,00 persen	50 Satuan Pendidikan	546,00 % 545 sekolah	195.400.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	50 Satuan Pendidikan	195.400.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi APK PAUD APM SD APM SMP Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah SD Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SD negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100 persen 100,00 persen 99,71 persen 95,00 persen 91,16 persen 79,40 persen 100,00 persen	583 Satuan Pendidikan	546,00 % 545 sekolah	14.104.700.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	583 Satuan Pendidikan	14.104.700.000,00
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi APK PAUD APM SD APM SMP Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SD negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100 persen 100,00 persen 99,71 persen 95,00 persen 91,16 persen 79,40 persen 100,00 persen	853 Orang	546,00 % 545 sekolah	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	853 Orang	1.418.000.000,00
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi APK PAUD APM SD APM SMP Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah SD Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasi nya SD negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100 persen 100,00 persen 99,71 persen 95,00 persen 91,16 persen 79,40 persen 100,00 persen	583 Dokumen	546,00 % 545 sekolah	975.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	583 Dokumen	975.000.000,00
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi APK PAUD APM SD APM SMP Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah SD Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SD negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100 persen 100,00 persen 99,71 persen 95,00 persen 91,16 persen 79,40 persen 100,00 persen	1000 Paket	546,00 % 545 sekolah	720.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	720.000.000,00
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi APK PAUD APM SD APM SMP Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah SD Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SD negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100 persen 100,00 persen 99,71 persen 95,00 persen 91,16 persen 79,40 persen 100,00 persen	5 Ruang	546,00 % 545 sekolah	200.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	200.000.000,00
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi APK PAUD APM SD APM SMP Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah SD Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SD negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100 persen 100,00 persen 99,71 persen 95,00 persen 91,16 persen 79,40 persen 100,00 persen	60 Unit	546,00 % 545 sekolah	0,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	60 Unit	0,00
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi APK PAUD APM SD APM SMP Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Jumlah SD Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SD negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100 persen 100,00 persen 99,71 persen 95,00 persen 91,16 persen 79,40 persen 100,00 persen	583 Satuan Pendidikan	546,00 % 545 sekolah	301.012.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	583 Satuan Pendidikan	301.012.000,00
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi APK PAUD APM SD APM SMP Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah SD Negeri Terakreditasi (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasi nya SD negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100 persen 100,00 persen 99,71 persen 95,00 persen 91,16 persen 79,40 persen 100,00 persen	44 Ruang	546,00 % 545 sekolah	1.474.250.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	44 Ruang	1.474.250.000,00
1	01	02	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							22.947.714.000,00					27.897.714.000,00
1	01	02	2.02	0005		Pembangunan Perpustakaan Sekolah												

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) APM SMP APM SD APK PAUD	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi, Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SMP Negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100,00 persen 99,71 persen 100 persen 100,00 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen	1 Ruang	52 Sekolah 52 Satuan Pendidikan	0,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	350.000.000,00
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) APM SMP APM SD APK PAUD	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi, Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SMP Negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100,00 persen 99,71 persen 100 persen 100,00 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen	2 Ruang	52 Sekolah 52 Satuan Pendidikan	0,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	800.000.000,00
1	01	02	2.02	0012		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah												

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) APM SMP APM SD APK PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi, Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SMP Negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100,00 persen 99,71 persen 100 persen 100,00 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen	2 Unit	52 Sekolah 52 Satuan Pendidikan	1.509.351.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	1.509.351.200,00
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) APM SMP APM SD APK PAUD	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi, Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SMP Negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100,00 persen 99,71 persen 100 persen 100,00 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen	20 Ruang	52 Sekolah 52 Satuan Pendidikan	2.200.000.000,00	Insentif Fiskal		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	2.200.000.000,00
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) APM SMP APM SD APK PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi, Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SMP Negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100,00 persen 99,71 persen 100 persen 100,00 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen	5 Unit	52 Sekolah 52 Satuan Pendidikan	7.601.163.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	7.601.162.800,00
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) APM SMP APM SD APK PAUD	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi, Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SMP Negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100,00 persen 99,71 persen 100 persen 100,00 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen	5 Paket	52 Sekolah 52 Satuan Pendidikan	0,00	Pajak Daerah, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket	300.000.000,00
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) APM SMP APM SD APK PAUD	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi, Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SMP Negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100,00 persen 99,71 persen 100 persen 100,00 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen	20 Paket	52 Sekolah 52 Satuan Pendidikan	325.930.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	20 Paket	325.930.000,00
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) APM SMP APM SD APK PAUD	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi, Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SMP Negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100,00 persen 99,71 persen 100 persen 100,00 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen	1000 Peserta Didik	52 Sekolah 52 Satuan Pendidikan	1.000.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	1.000.000.000,00
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) APM SMP APM SD APK PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi, Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SMP Negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100,00 persen 99,71 persen 100 persen 100,00 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen	5 Paket	52 Sekolah 52 Satuan Pendidikan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	2.250.000.000,00
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) APM SMP APM SD APK PAUD	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi, Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SMP Negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100,00 persen 99,71 persen 100 persen 100,00 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen	1000 Peserta Didik	52 Sekolah 52 Satuan Pendidikan	310.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	310.000.000,00
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) APM SMP APM SD APK PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi, Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SMP Negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100,00 persen 99,71 persen 100 persen 100,00 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen	2028 Orang	52 Sekolah 52 Satuan Pendidikan	0,00	-		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2028 Orang	0,00
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) APM SMP APM SD APK PAUD	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi, Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SMP Negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100,00 persen 99,71 persen 100 persen 100,00 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen	100 Satuan Pendidikan	52 Sekolah 52 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	100 Satuan Pendidikan	200.000.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) APM SMP APM SD APK PAUD	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi, Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SMP Negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100,00 persen 99,71 persen 100 persen 100,00 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen	100 Satuan Pendidikan	52 Sekolah 52 Satuan Pendidikan	7.152.200.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	100 Satuan Pendidikan	7.152.200.000,00
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) APM SMP APM SD APK PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi, Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SMP Negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100,00 persen 99,71 persen 100 persen 100,00 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen	140 Orang	52 Sekolah 52 Satuan Pendidikan	404.070.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	140 Orang	404.070.000,00
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) APM SMP APM SD APK PAUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi, Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SMP Negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100,00 persen 99,71 persen 100 persen 100,00 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen	52 Dokumen	52 Sekolah 52 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	52 Dokumen	100.000.000,00
1	01	02	2.02	0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) APM SMP APM SD APK PAUD	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi, Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SMP Negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100,00 persen 99,71 persen 100 persen 100,00 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen	18270 Satuan Pendidikan	52 Sekolah 52 Satuan Pendidikan	295.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	18270 Satuan Pendidikan	295.000.000,00
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) APM SMP APM SD APK PAUD	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi, Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SMP Negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100,00 persen 99,71 persen 100 persen 100,00 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen	6 Ruang	52 Sekolah 52 Satuan Pendidikan	1.350.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	1.350.000.000,00
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) APM SMP APM SD APK PAUD	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi, Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SMP Negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100,00 persen 99,71 persen 100 persen 100,00 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen	26449 Buku	52 Sekolah 52 Satuan Pendidikan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	26449 Buku	1.250.000.000,00
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) APM SMP APM SD APK PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi, Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya SMP Negeri (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100,00 persen 99,71 persen 100 persen 100,00 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen	4 Paket	52 Sekolah 52 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	500.000.000,00
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								21.703.323.000,00					22.028.323.000,00
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						APK PAUD Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) APM SMP Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) APM SD Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta) Terakreditasinya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Negeri dan Swasta)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,00 persen 100 persen 99,71 persen 100,00 persen 79,40 persen 100,00 persen 91,16 persen 100,00 persen	3 Unit	610 Sekolah 610 Satuan Pendidikan	591.723.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	591.723.000,00
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						APK PAUD Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) APM SMP Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) APM SD Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta) Terakreditasinya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Negeri dan Swasta)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,00 persen 100 persen 99,71 persen 100,00 persen 79,40 persen 100,00 persen 91,16 persen 100,00 persen	3 Unit	610 Sekolah 610 Satuan Pendidikan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	200.000.000,00
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						APK PAUD Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) APM SMP Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) APM SD Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta) Terakreditasinya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Negeri dan Swasta)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,00 persen 100 persen 99,71 persen 100,00 persen 79,40 persen 100,00 persen 91,16 persen 100,00 persen	4 Paket	610 Sekolah 610 Satuan Pendidikan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4 Paket	125.000.000,00
1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						APK PAUD Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) APM SMP Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) APM SD Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta) Terakreditasinya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Negeri dan Swasta)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,00 persen 100 persen 99,71 persen 100,00 persen 79,40 persen 100,00 persen 91,16 persen 100,00 persen	10 Paket	610 Sekolah 610 Satuan Pendidikan	550.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	10 Paket	550.000.000,00
1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						APK PAUD Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) APM SMP Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) APM SD Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta) Terakreditasinya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Negeri dan Swasta)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,00 persen 100 persen 99,71 persen 100,00 persen 79,40 persen 100,00 persen 91,16 persen 100,00 persen	26973 Peserta Didik	610 Sekolah 610 Satuan Pendidikan	4.788.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	26973 Peserta Didik	4.788.000.000,00
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						APK PAUD Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) APM SMP Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) APM SD Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta) Terakreditasinya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Negeri dan Swasta)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,00 persen 100 persen 99,71 persen 100,00 persen 79,40 persen 100,00 persen 91,16 persen 100,00 persen	881 Satuan Pendidikan	610 Sekolah 610 Satuan Pendidikan	15.393.600.000,00	DAK Non Fisik-BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	881 Satuan Pendidikan	15.393.600.000,00
1	01	02	2.03	0041		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik												

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						APK PAUD Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) APM SMP Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) APM SD Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta) Terakreditasinya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Negeri dan Swasta)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,00 persen 100 persen 99,71 persen 100,00 persen 79,40 persen 100,00 persen 91,16 persen 100,00 persen	1000 Paket	610 Sekolah 610 Satuan Pendidikan	380.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	380.000.000,00
1	01	02	2.04			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							2.812.200.000,00					2.812.200.000,00
1	01	02	2.04	0001		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan												

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) APM SMP APM SD APK PAUD Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99,71 persen 100 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	0 Unit	11 Sekolah 11 Lembaga	0,00	-		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	0 Unit	0,00
1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) APM SMP APM SD APK PAUD Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99,71 persen 100 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	500 Peserta Didik	11 Sekolah 11 Lembaga	600.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	600.000.000,00
1	01	02	2.04	0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) APM SMP APM SD APK PAUD Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasi nya satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99,71 persen 100 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	2 Paket	11 Sekolah 11 Lembaga	50.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	50.000.000,00
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) APM SMP APM SD APK PAUD Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99,71 persen 100 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	14 Satuan Pendidikan	11 Sekolah 11 Lembaga	1.852.200.000,00	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan	1.852.200.000,00
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) APM SMP APM SD APK PAUD Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99,71 persen 100 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	13 Dokumen	11 Sekolah 11 Lembaga	120.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	13 Dokumen	120.000.000,00
1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) APM SMP APM SD APK PAUD Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasi nya satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99,71 persen 100 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	1 Paket	11 Sekolah 11 Lembaga	110.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	110.000.000,00
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) APM SMP APM SD APK PAUD Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasinya satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99,71 persen 100 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	14 Peserta Didik	11 Sekolah 11 Lembaga	80.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	14 Peserta Didik	80.000.000,00
1	01	02	2.04	0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan) APM SMP APM SD APK PAUD Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM) Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terakreditasi nya satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99,71 persen 100 persen 79,40 persen 91,16 persen 95,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	0 Unit	11 Sekolah 11 Lembaga	0,00	-		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0,00
1	01	04				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							8.618.738.000,00					8.618.738.000,00
1	01	04	2.01			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							8.618.738.000,00					8.618.738.000,00
1	01	04	2.01	0001		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan												
						Persentase guru SD dan SMP yang	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan	Jumlah kepala	Kab. Boyolali,	56,68 persen	1 Dokumen	582 Satuan	8.143.200.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	8.143.200.000,00

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						bersertifikasi	dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah (Indikator LPPD	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Pendidikan 582 orang				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								(permen 18 tahun 2020)										
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
						Persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56,68 persen	2 Laporan	582 Satuan Pendidikan 582 orang	475.538.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	475.538.000,00

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								dan pelatihan calon kepala sekolah (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)										
1	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								191.820.000,00					191.820.000,00
1	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								191.820.000,00					191.820.000,00
1	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								191.820.000,00					191.820.000,00
1	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah. Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Unit	12 Bulan 12 bulan	90.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	90.000.000,00
1	XX	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah. Tercapaianya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Unit	12 Bulan 12 bulan	101.820.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	101.820.000,00
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.962.000.000,00					5.462.000.000,00
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							4.962.000.000,00					5.462.000.000,00
2	22	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							3.114.000.000,00					3.114.000.000,00
2	22	03	2.01			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							3.114.000.000,00					3.114.000.000,00
2	22	03	2.01	0001		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional												
						Persentase kelompok seni yang dibina Persentase kelompok seni yang dibina	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Jumlah Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya Terlaksananya Gelar Seni dan Budaya	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34,00 persen 34,00 persen	180 Orang	12 kegiatan 12 Bulan	142.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	180 Orang	142.000.000,00
2	22	03	2.01	0002		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan												
						Persentase kelompok seni yang dibina Persentase kelompok seni yang dibina	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Jumlah Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya Terlaksananya Gelar Seni	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34,00 persen 34,00 persen	329 Sertifikat	12 kegiatan 12 Bulan	238.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses	329 Sertifikat	238.000.000,00

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								dan Budaya								Standarisasi		
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional													
						Persentase kelompok seni yang dibina Persentase kelompok seni yang dibina	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya Terlaksananya Gelar Seni dan Budaya	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34,00 persen 34,00 persen	161 Lembaga	12 kegiatan 12 Bulan	2.734.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	161 Lembaga	2.734.000.000,00
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								1.148.000.000,00					1.148.000.000,00
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								1.148.000.000,00					1.148.000.000,00
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya													
						Persentase cagar budaya yang teregistrasi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Teregisternya cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) (Indikator LPPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87,00 persen	664 Objek	650 unit 12 Bulan	1.052.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	664 Objek	1.052.000.000,00

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								(permen 18 tahun 2020)										
2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya													
						Persentase cagar budaya yang teregistrasi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Jumlah Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Teregisternya cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87,00 persen	25 Objek	650 unit 12 Bulan	96.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	25 Objek	96.000.000,00
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								700.000.000,00					1.200.000.000,00
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota								700.000.000,00					1.200.000.000,00
2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase koleksi museum dalam kondisi baik	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terselenggaranya kegiatan museum yang melibatkan masyarakat (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97,00 persen	160 Unit	12 kegiatan 12 Bulan	700.000.000,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	160 Unit	700.000.000,00
2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman													
						Persentase koleksi museum dalam kondisi baik	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terselenggaranya kegiatan museum yang melibatkan masyarakat (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97,00 persen	2 Orang	12 kegiatan 12 Bulan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	0,00

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum													
						Persentase koleksi museum dalam kondisi baik	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terselenggaranya kegiatan museum yang melibatkan masyarakat (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97,00 persen	6 Unit	12 kegiatan 12 Bulan	0,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	6 Unit	0,00
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum													
						Persentase koleksi museum dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terselenggaranya kegiatan museum yang melibatkan masyarakat (Indikator LPPD (permen 18	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97,00 persen	1 Unit	12 kegiatan 12 Bulan	0,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	200.000.000,00

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								tahun 2020)										
2	22	06	2.01	0005		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum												
						Persentase koleksi museum dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020) Terselenggaranya kegiatan museum yang melibatkan masyarakat (Indikator LPPD (permen 18 tahun 2020)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97,00 persen	2 Unit	12 kegiatan 12 Bulan	0,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	2 Unit	300.000.000,00
												TOTAL	**282.668.615.000,00**					**291.913.995.000,00**

BAB V
PENUTUP

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ini dapat selesai disusun. Renja ini disusun sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali dalam Tahun 2024, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Mengingat Renja memuat program dan kegiatan pembangunan, maka pelaksanaan program/kegiatan hendaknya dapat dilakukan secara akurat, terpadu, fokus dan terarah serta tepat sasaran serta menjadi modal dalam periode pembangunan pada periode berikutnya dengan tetap memperhatikan peluang dan tantangan yang ada.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam rangka merencanakan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya mengalir kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali adalah Program Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar usulan prakiraan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Rencana Kerja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan

dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan OPD dan seluruh staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

E. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

DINAS KESEHATAN

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dapat disusun. REncana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali ini merupakan salah satu sarana yang digunakan sebagai arah tujuan dan evaluasi terhadap pencapaian hasil pembangunan Bidang Kesehatan yang ada di Kabupaten Boyolali selama tahun 2022 dan rencana tahun 2024.

Ketersediaan data secara berkesinambungan dari tahun ke tahun merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan. Dengan adanya Renja Dinas kesehatan ini diharapkan dapat memenuhi salah satu kewajiban Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja 2024 ini, dan semoga bermanfaat bagi pelaksana program di jajaran Kesehatan.

DAFTAR ISI

BAB I 4
PENDAHULUAN 4
1.1. Latar Belakang 4
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.3.1. Maksud 7
1.3.2. Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 55
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 67
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 68
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 87
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 94
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 94
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 94
3.3 Program dan Kegiatan 95
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 99
4.1. Program dan Kegiatan 99
BAB V PENUTUP 383

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan Kesehatan yang berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Dalam rangka merencanakan secara sistematis upaya-upaya pembangunan kesehatan yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2024, disusunlah Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kesehatan tahun 2024. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Dinas Kesehatan sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah, mempunyai kewajiban menyusun rencana kerja bidang kesehatan untuk mendukung perencanaan daerah tahunan atau lebih dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai target (indikator) yang akan ditetapkan sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Renja Perangkat Daerah menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Dinas Kesehatan memuat usulan dari hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang memuat indikator, tolak ukur dan target kinerja mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Dan akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024.

I.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk PenangananPandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia No.1335 tahun 2019);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
25. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor.4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225) dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 224);
28. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 adalah memberikan arah pedoman bagi seluruh personil organisasi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan program kerja Dinas Kesehatan dan terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan kabupaten Boyolali 2024 yaitu menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan pada tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran program dan indikator kinerja kegiatan yang selaras dengan RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan, RPJP 2005-2025 Kabupaten Boyolali, dan Renstra Dinas Kesehatan 2021-2026.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU (2022)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Boyolali, di bidang kesehatan. Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam RENSTRA maupun RENJA, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan meliputi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pengukuran kinerja pada sasaran tahun 2022 terdapat indikator yang mencapai target yang diharapkan, bahkan beberapa indikator melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, guna menyesuaikan dengan program dan prioritas pembangunan bidang kesehatan serta kebijakan pusat, maka terjadi beberapa perubahan-perubahan yang dituangkan dalam review renstra, sehingga ada indicator-indikator yang berubah. Indikator yang lama tidak digunakan dan diganti dengan indicator baru, mulai pada tahun 2023.

Hasil pengukuran kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan) Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Wajib									
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase rumah sakit terakreditasi (Permendagri 18/2020)**	**100,00**	**100**	100	91,6	91,6	**100**		
	Kegiatan									
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Persentase RS dilakukan pendampingan akreditasi	100	100	100	91,6	91,6	100		
	Sub Kegiatan									
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah RS Swasta yang dilaksanakan pendampingan akreditasi	9	9	9	8	88,8	9		
02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah RS Pemerintah yang dilaksanakan pendampingan akreditasi	3	3	3	3	100	3		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase Puskesmas terakreditasi**	**100**	**100**	100	100	100	**100**		
	Kegiatan									
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Jumlah Puskesmas dilakukan penilaian akreditasi	35	25	10	0	0	25		
	Sub Kegiatan									
		Puskesmas Terakreditasi		25	10	0	0			
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah monev pasca akreditasi yang	25	25	10	10	100	5		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
					terselenggara								
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah workshop terkait akreditasi	5		1	1	100	1		
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Rawat Jalan puskesmas	15	18,76	15	20,4	136	15		
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Rawat Inap puskesmas	1,5	0,21	1.5	0.63	0,42	1,5		
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Respon aduan kegawatdaruratan kesehatan ditangani	100	100	90	100	111	100		
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Jumlah Puskemas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	25	25	25	25	25	25		
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Pelayanan kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	Jumlah Puskesmas yang memiliki kelompok asmantoga dan akupresure	25	25	25	25	100	25		
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Persentase STPT yang mengajukan dan diterbitkan	100	100	100	100	100	100		
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan TradisionalLainnya	Jumlah Puskesmas yang melakukan pendataan dan pembinaan kepada penyehat tradisional	25	25	25	25	100	25		
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	jumlah kesalahan penyerahan hasil Laboratorium	0	0	0	0	100	0		
				Sub Kegiatan									
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rata-rata waktu tunggu hasil pemeriksaan	<90 menit	<90 menit	<90 menit	<90 menit	100	<90 menit		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
					laboratorium								
				Kegiatan									
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan sarana fisik (ruang) sesuai standar Permenkes.	40	36				24		
					Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar Pemenkes		6		8	100			
				Sub Kegiatan									
				Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dilaksanakan pengembangan	5					1		
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhab	5					1		
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas mengadakan alat kesehatan	25					25		
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Labkesda mengadakan alat kesehatan	1					1		
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas PelayananKesehatan	Jumlah Puskesmas dengan Alat Kesehatan dasar yang dilakukan kalibrasi	25	25	25	25	100	25		
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, makanan minuman ke Puskesmas serta Faskes Lainnya	Jumlah Puskesmas mendapat distribusi Obat dan BMHP	10					10		
				Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Puskesmas dan IFK yang memiliki Obat Esensial **	26					26		
					Prosentase ketersediaan obat dan perbekalan Kesehatan		92	90	92	102.2			
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Prosentase Pengadaan BMHP	100					100		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				Kegiatan									
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laboratorium Kesehatan Yang lulus Pemantapan Mutu Eksternal	100					100		
				Sub Kegiatan									
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	jumlah Laboratorium Kesehatan Yang Melaksanakan Pemantapan Mutu Eksternal	1					1		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan ibu hamil (SPM)	**100**	**95,46**	100	94,09	94,09	**100**		
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (ante natal Care) sesuai standar	100	99,5	95%	99.5%		100		
					Cakupan Kunjungan Bayi		99,5	95%	99.5%	104.3%			
					Penurunan Angka Kematian Bayi	8,4	9,3	9,3	9.3	89.2			
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan ibu Hamil K1	100					100		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Ibu Hamil K4	100	94,8	100	92.6	92.6	100		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (SPM)	**100**	**99,44**	100	95,67	95,67	**100**		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah kematian ibu	**9**	**45**	13	20	-40.8	**13**		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				MASYARAKAT									
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Cakupan Ibu Bersalin di Fasyankes	100		100	94.8	94.8	100		
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	cakupan persalinan normal di fasyakes	100							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan pertolongan Persalinan oleh Nakes	100		100	94.8	94.8	100		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Persalinan komplikasi di fasyankes dasar dan rujukan	100		100	100	100	100		
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Nifas	100		100	93.8	93.8	100		
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan pelayanan KF1	100		100	93.8	93.8	100		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan pelayanan KF4	100		100	93.8	93.8	100		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	**100**	**98,16**	100	96,56	96,56	**100**		
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Cakupan Bayi Baru lahir (Neonatal) yang mendapatkan pelayanan esensial sesuai standar.	100		100	96.4	96.4	100		
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan KN 1	100		100	96.4	96.4	100		
				Pengelolaan Pelayanan	Cakupan KN 3	100		100	96.4	96.4	100		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				Kesehatan Bayi Baru Lahir									
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	**100**	**95,91**	100	93,21	93,21	**100**		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah kematian balita	**110**	**118**				**116**		
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sehat sesuai standar	100					100		
				Sub Kegiatan									
					Cakupan pelayanan anak balita	100	99,2%	95%	100%	105.3%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita usia 0-11 bulan sesuai standar	100		100			100		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah kematian balita	**110**	**118**				**116**		
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sakit sesuai standar	100					100		
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan sesuai standar	100		100	91.5	91.5	100		
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Cakupan kunjungan bayi	100	99,5	100	95.7	95.7	100		
				Sub Kegiatan									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan sesuai standar	100					100		
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Cakupan ASI Eksklusif	75		54	79	146	65		
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sakit menggunakan pendekatan MTBS	100					100		
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 0-11 bulan	100	100	100	100	100	100		
				Sub Kegiatan									
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	jumlah anak usia 1 tahun diimunisasi campak rubela	95	100	100	100	100	95		
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase anak usia 18-24 bulan diberikan imunisasi lanjutan Campak Rubela	95	100	100	100	100	95		
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase anak usia 18-24 bulan diberikan imunisasi lanjutan DPT-HB-HiB	95	100	100	100	100	95		
					Cakupan Desa UCI		92,1	100	100	100			
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita stunting	**8,8**	8,6	9,3	6.8	126,8			
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase balita gizi kurang	**3**	**3,7**	3,6	4,2	83,3			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans gizi	25		25	25	100	25		
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Pendek dan sangat Pendek (TB/U)	10					14		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita yang ditimbang dan diukur	90					90		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita kurus mendapat makanan tambahan	100	100	90	100	111.1	100		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Bumil KEK yang mendapat PMT Pemulihan	14					14		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Ibu Hamil mendapat Fe Minimal 90 tablet	95	80	94	92	97.8	95		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita 6-59 Bulan yang memperoleh Vitamin A	90	95	95	100	105	90		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Bayi usia < 6 Bulan yang mendapat ASI Eksklusif	65		54	79	146	65		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Remaja Putri mendapat TTD	80		50	100	200	70		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan IMD	95		45	91	202	95		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan ibu nifas mendapat Vit A	100		90	93.5	103	100		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100		100	100	100	100		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	**100**	**71,48**	100	79,56	79,56	**100**		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				MASYARAKAT	standar (SPM)								
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita TBC	100		100	34	34	100		
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Penanganan penderita TBC sesuai standar	100		100	100	100	100		
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TBC)	85		85	80	94.1	85		
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase kasus TBC yang diperiksa HIV	98		98	90	92	98		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (SPM)	**100**	**94,96**	100	92,69	92,69	**100**		
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Penemuan kasus pada orang dengan resiko tertular HIV/AIDS	100					100		
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pemeriksaan HIV pada ibu hamil	90		90	90	100	90		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Penemuan pada kelompok risiko tertular (populasi kunci) yaitu LSL, WPS, Waria, WBP, Pasangan ODHA, Pengguna NAPZA Suntik	56		100	218	218	56		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Persentase HIV diobati	58		56	48	85%	50		
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase ODHA baru yang mendapatkan ARV (Anti Retro Virus)	74		70	60.2	86	70		
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Jumlah kasus baru kusta yang ditemukan dan ditangani sesuai standar	11		11	17		11		
				Sub Kegiatan									
					Angka kematian DBD (CFR)		2,4%	1.6	2.4	50			
					Prosentase jumlah orang yang ditest HIV dan menerima hasil		64,1	50	64.1	128.2			
					Angka keberhasilan pengobatan TB yang terkonfirmasi ≥85%		80,09	85	80.09	94.22			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	90		90	100	111	90		
1				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Angka Kesakitan DBD (Insiden Rate/IR)	46	18,9	47.5	28	171	48		
				Sub Kegiatan									
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	Angka Bebas Jentik	95		95	89	93.6	95		
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	Jumlah Penderita Diare Balita yang meninggal	0		0	0	100	0		
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	Angka kasus Filaria yang ditangani	100		100	100	100	100		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Prosentase Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM ke-Cacingan)	80		80	99.9	124.8	80		
				Sub Kegiatan									
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	Jumlah pemberian obat cacing usia 1- 12 tahun	80		80	99.9	124.8	80		
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence/API)	<1/100.000 pddk		1/100.000	0.012	98.8	<1/100.000 pddk		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)	**100**	**96,59**	100	93,42	93,42	**100**		
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan Hipertensi	100		100	93,42	93,42	100		
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penduduk Penderita Hipertensi yang dilayani oleh FASYANKES (Puskesmas, klinik, Rumah sakit, DPM , PKD, PMB) dan POSBINDU	100		100	93	93	100		
					Persentase desa/kel. yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM		65	50	65	130			
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)	**100**	**96,59**	100	99,94	99,94	**100**		
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Prevelensi Diabetes Melitus	2,2		2.2	2.45	89.7	2,2		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penduduk Perderita Diabetes Melitus yang dilayani oleh FASYANKES (Puskesmas, klinik, Rumah sakit, DPM , PKD, PMB) dan POSBINDU PTM dan Posyandu Lansia	100		100	111	111	100		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	**100**	**100**	100	86,55	86,55	**100**		
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Persentase ODGJ Berat ditangani	100		100	93	93	100		
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ Berat yang ditemukan kasus baru	31		31	31	100	31		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ yang ditemukan kasus baru	60		60	60	100	60		
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan <24Jam	100		100	100	100	100		
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan <24Jam	100		100	100	100	100		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN		**300**	**468,1**	>450	430.65	104	**450**		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				MASYARAKAT									
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Persentase Jumlah kematian Covid19	4		.3	1.10	100	3		
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah kasus terkonfirmasi covid19	4840		>5260	4639	100	5260		
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Prosentase Puskesmas melaksanakan kesehatan Kerja dan olahraga	100		60	60	100	60		
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	% puskesmas melaksanakan Kesehatan Kerja Minimal level 1	100		60	60	100	60		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	% puskesmas melaksanakan Kesehatan Olahraga Minimal level 1	100		60	60	100	60		
				Kegiatan									
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas Memiliki WEBSITE	100		80	100	125	0		
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang memiliki website	25		10					
					Prosentase puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi		100		100	100			
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	**100**	**86,84**	**100**	79,06	79,06	100		
				Kegiatan									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100		100	86	86			
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan skrining kesehatan pada anak sekolah kelas 1 SD	100		100					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan skrining kesehatan pada anak sekolah kelas 7 SLTP	100		100					
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	**100**	**86,86**	**100**	99,94	99,94	100		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah kematian warga negara usia produktif	**911**	**936**	**931**					
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Jumlah penduduk produktif usia 15-59 tahun yang dilakukan screening kesehatan oleh FASYANKES (Puskesmas, klinik, Rumah sakit, DPM , PKD, PMB) dan POSBINDU PTM dan Posyandu lansia	100		100					
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk produktif usia 15-59 tahun yang dilakukan screening kesehatan oleh FASYANKES (Puskesmas, klinik, Rumah sakit, DPM , PKD, PMB) dan POSBINDU PTM dan Posyandu lansia	100		100					
				Pengelolaan Pelayanan	Jumlah desa/kelurahan	120		100					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				Kesehatan pada Usia Produktif	melaksanakan POSBINDU PTM								
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase warga negara lanjut usia yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	**100**	**99,47**	100	91,90	91,90	**100**		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah kematian warga negara usia lanjut	**1189**	**1239**	1229	NA				
					Prosentase puskesmas melaksanakan pelayanan Lansia	**100**	100	100	100	100			
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Cakupan warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya	100		100	92.68	92.68	100		
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan usia lanjut > 60 tahun yang mendapat skrining	100		100	92.68	92.68	100		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten Sehat	**9 tatanan (wistara)**	0	6	9	150	**9 tatanan (wistara)**		
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) sehat	85		71	62.02	95,4	71		
				Sub Kegiatan									
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Prosentase Tempat Fasilitas Umum Memenuhi syarat Kesehatan	85		71	62.02	95,4	71		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Jumlah warga miskin yang mendapatkan bantuan	**64142**		54.829	47.509	86,7			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	pembiayaan sebagai peserta JKN Kis (premi non DTKS)								
					Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan		43,4	42	44,47	105			
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan masyarakat Miskin	5		5					
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat miskin non PBI pusat yang dibiayai pemda	5		5					
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Desa/kelurahan STBM	**100**	**64,79**	65,5					
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Desa STBM	267	152	200	195	97,5	225		
				Sub Kegiatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa STBM yang terverifikasi	267		200	195	97,5	225		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penyediaan fasilitas buang air besar/bersama-sama bagi rumah tangga miskin (program kemiskinan)	**100**		100	100	100	100		
				Kegiatan									
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Persentase KK dengan akses terhadap sarana sanitasi Jamban Sehat Permanen	100		100	100	100	100		
				Sub Kegiatan									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	% KK miskin mendapatkan stimulan jamban	15		15			15		
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi (pendidikan min. D3 Kesehatan)	**100**	**100**	100			**100**		
				Kegiatan									
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Puskesmas dengan 9 Nakes Strategis	100		88			88		
				Sub Kegiatan									
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia KesehatanTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dengan 9 Nakes Stragtegis	25		22			22		
					Rasio dokter per satuan penduduk		21,83	17.0	27,66				
					Rasio dokter gigi per satuan penduduk		5.6	5.9					
					Rasio perawat per satuan penduduk		132.8	100.3	137,3				
					Rasio bidan per satuan penduduk		67	58.4	70,45				
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase makanan Minuman yang lolos uji	**95**	**87**	88			**88**		
				Kegiatan									
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRTsebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapatDiproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi standar dan persyaratan perijinan	80		60			60		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				Sub Kegiatan									
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi PanganIndustri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk MakananMinuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sarana IRTP yang Dibina	115		90			90		
					Proporsi pembinaan dan pengawasan Produksi dan distribusi makanan dan minuman		55,4	45	55.4	123.1			
				Kegiatan									
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antaralain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat higiene sanitasi	95		77	77	100	77		
				Sub Kegiatan									
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat LaikHigiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Prosentase Tempat Pengolahan Makanan Memenuhi Syarat	77		77			77		
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat LaikHigiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	% Jasa Boga Memenuhi Syarat	77		77			77		
				Pengendalian dan Pengawasan	% Depot Air Minum (DAM)	77		77			77		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat LaikHigiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Memenuhi Syarat								
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian	**100**	**96**	100			**100**		
				Kegiatan									
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro ObatTradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perijinan	70	70,2	50			50		
				Sub Kegiatan									
				Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Proporsi pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian		70,2	40	70.2	156			
					Jumlah apotik dan toko obat yang dibina	60		60			60		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa/kelurahan siaga aktif mandiri	**63,67 (170 desa)**	**48,31 (129 desa)**	130	150	115.38	**(140 desa)**		
				Kegiatan									
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki minimal 4 Jenis UKBM	135		115	115	100	115		
				Sub Kegiatan									
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Posyandu Mandiri	52		48	64.45	134.27	50		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan GERMAS	**100**	**100**	100	100	100	**100**		
				Kegiatan									
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang menerapkan PHBS	267		267	267	100	267		
				Sub Kegiatan									
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Proporsi Rumah Tangga Sehat	97	92	92	94.49	102.7	93		
				Kegiatan									
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki kampung germas	40	15	20	20	100	20		
				Sub Kegiatan									
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Desa yang memiliki Kampung Germas dengan strata A	13		5	5	100	5		
					Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	**903,00**	**763,00**				**800,00**		
					Nilai Sakip	**85,04**	**84,97**	85	80.6	94	**85,00**		
					Rata-Rata Nilai IKM Puskesmas,Labkes	**81**	**78**	79	103		**79**		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	**100**	**100**				**100**		
				Kegiatan									
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	100					100		
				Sub Kegiatan									
				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS	60 bln					12		
				Penyediaan Administrasi	Pembayaran Gaji Non PNS	60					12		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
	Pelaksanaan Tugas ASN									
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	60					12		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	60					12		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90					18		
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	10					2		
	Kegiatan									
	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	100					100		
	Sub Kegiatan									
	bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pendampingan dan penilaian ISO	0					0		
	Kegiatan									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	100					100		
	Sub Kegiatan									
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100					100		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	100					100		
	Penyediaan bahan logistik kantor	Pengadaan Bahan Logistik Kantor BBM	100					100		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100					100		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pengadaan Bahan Bacaan Surat Kabar	0					0		
				Penyediaan bahan / Material	tersedianya Bahan/Material	100					100		
				Fasilitasi kunjungan tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	60					12		
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100					100		
				Kegiatan									
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	100					100		
				Sub Kegiatan									
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman Surat/ Paket	100					100		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Pajak Listrik, PDAM, telpon, internet	60					12		
				Kegiatan									
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	100					100		
				Sub Kegiatan									
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran biaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60					12		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran perbaikan genset, komputer	100					100		
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan kantor	100					100		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Penyediaan Biaya apraisal						0		
				Kegiatan									
				Perencanaan,Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen	125					25		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat								
				Sub Kegiatan									
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	10					2		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	5					1		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	5					1		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	5					1		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	5					1		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	75					15		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	20					4		
				Kegiatan									
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	60					12		
				Sub Kegiatan									
				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah target retribusi daerah	7.028.223.000					1.261.681.000		
					Jumlah target lain-lain PAD yang Sah (BLUD Puskesmas)	216.991.995.000					43.398.399.000		
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	60					12		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
1				2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan Wajib										
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase rumah sakit terakreditasi (Permendagri 18/2020)**		**100,00**	**100**	100	91,6	91,6	**100**		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase rumah sakit terakreditasi (Permendagri 18/2020),:**	**Persentase**	**100**			**100**		**100**		
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan	Prosentase	92,08			91,19		91,93		
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	67			44		54		
				Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas									
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase Puskesmas terakreditasi**	**Prosentase**	**100**			**100**		**100**		
				Penyediaan Layanan Kesehatan	Prosentase rata-rata	Prose								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan	ntase								
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	25			25		25		
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	40			39		39		
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus									
				Pengelolaan Pelayananan Promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi kesehatan	Dokumen	2							
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	3			3		3		
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dokumen	1			1		1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
					Lainnya									
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Puskesmas dengan sarana, prasarana, alkes, obat sesuai standar	%	90					90		
				Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1					8		
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	1					5		
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1					10		
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	41					41		
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke	Paket	3					3		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
					Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya									
				Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	2					2		
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1					1		
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan TingkatDaerah Kabupaten/Kota	Prosentase Faskes melaksanakan pengukuran INM	Prosentase	100					100		
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	84					74		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan ibu hamil (SPM)**	**Prosentase**	**100**			**93,2**		**100**		
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14335			14496		14249		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (SPM)**	**Prosentase**	**100**			**99,7**		**100**		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	**Jumlah kematian ibu**	**kasus**	**9**			**17**				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				KESEHATAN MASYARAKAT										
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	**13.599**			13640		13.522		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)**	**Prosentase**	**100**			**98,7**		**100**		
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	13.088			13.434		12.934		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)**	**Prosentase**	**100**			**88,6**		**100**		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Jumlah kematian balita**	**kasus**	**110**			**118**				
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	67615			69.045		67.819		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak									
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	12					12		
				Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar									
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase balita stunting**	**Prosentase**	**8,8**			**9,4**				
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase balita gizi kurang**	**Prosentase**	**3**			**3,7**				
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	**4**					4		
				PROGRAM PEMENUHAN	**Persentase orang**	**Prose**	**100**			**35,6**				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)**	**ntase**								
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	12.710			8.683		12.681		
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1263			861				
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (SPM)**	**Prosentase**	**100**			**57,2**				
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	15.562			15546		15.557		
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	490			460		460		
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	9					9		
				Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	5			13		3		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)**		**100**			**63,2**				
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	253.761			208.770		226.358		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)**		**100**			**98,6**				
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	20.058			18.531		18.531		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan**		**100**			**50,9**				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)**									
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	2.401			1765		1842		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang								
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	52			52		52		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Angka kesakitan Covid-19**	**org/100,000 pddk**	**300**			**468,1**				
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	12			16 kj		10		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium Rujukan/nasional	jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	paket								
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2			2		2		
				Penyelenggaraan Sistem Informasi secara terintegrasi	Prosentase Puskesmas memiliki website	Prosentase	100					48		
				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	29			29		29		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)**		100			**84,9**				
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	189.197			182923		186.389		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	**Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan**	**%**	**100**			**59,8**				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				KESEHATAN MASYARAKAT	**layanan kesehatan (SPM)**									
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Jumlah kematian warga negara usia produktif**		**911**			**936**				
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	**651.695**			449.200		479.959		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase warga negara lanjut usia yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)**	**%**	**100**			**98,8**				
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Jumlah kematian warga negara usia lanjut**		**1189**			**1239**				
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	159.475			159.308		159.308		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	**Kabupaten Sehat**		**9 tatanan (wistara)**			**0**				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				KESEHATAN MASYARAKAT										
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	9			9		9		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Jumlah warga miskin yang mendapatkan bantuan pembiayaan sebagai peserta JKN Kis (premi non DTKS)**	**orang**	**64142**			**52720**				
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	20			5		20		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase Desa/kelurahan STBM**		**100**			**59,5505618**				
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan									
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase penyediaan fasilitas buang air besar/bersama-sama bagi rumah tangga**		**100**					**100**		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
					miskin (program kemiskinan)									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2			2		2		
				Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun									
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi (pendidikan min. D3 Kesehatan)**		**100**			**100**				
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Puskesmas dengan 9 Nakes Strategis	%	98					92		
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	100			521		521		
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan									
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase makanan Minuman yang lolos uji**		**95**			**87**				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRTsebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapatDiproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi standar dan persyaratan perijinan	%	73					65		
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	80			100		80		
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	50					50		
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antaralain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat higiene sanitasi	persen	85					77		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat LaikHigiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	dokumen	1			1		1		
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian**		**100**			**96**				
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro ObatTradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perijinan	%	85					85		
				Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	90					79		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	**Persentase Desa/kelurahan siaga**		**63,67 (170 desa)**			**44,94 (120 desa)**				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				KESEHATAN	**aktif mandiri**									
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki minimal 4 Jenis UKBM							120 desa		
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen						2		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan GERMAS**		**100**			**100**				
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase desa/kelurahan yang memiliki kampung germas	%	14,98% (40 Desa/kl)							
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	2					2		
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Desa/kel yang memiliki minimal 4 Jenis UKBM	%	135 desa (50,56%)					44,9% (120 desa		
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan	Dokumen	2					2		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		**nilai**	**82,10**			**84,97**		**81,35**		
	Nilai IKM rata2-labkes-dinkes-pusk			**81**			**78**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**		**100**			**100**				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	8					8		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	960					960		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12			12		12		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12			12		12		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12			12		12		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Lap Hasil	Laporan	1					1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
					Koordinasi Penyusunan laporan Keuanhgan akhir tahun SKPD									
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1			1		1		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18			18		18		
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	2					2		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	8					8		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4			2		4		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1					1		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4			2		4		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12			2		12		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4			2		4		
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4			2		4		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4			2		4		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4			2		4		
				Dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD	Laporan	13					13		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		1					1		
				pengadaan mebelair	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	1					1		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2					2		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12			2		12		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12			2		12		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kegiatan	4					4		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12			23		12		
				pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1					1		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	200					205		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1			1		1		
				Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	6					6		
				Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen	Doku	2			2		2		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah	men								
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1			1		1		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1			1		1		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1			1		1		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1			1		1		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16			16		16		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4			4		4		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	kegiatan	14					14		
				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	2			2		2		
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12			12		12		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali pada tahun 2022, dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja program yang telah ditetapkan, dengan tujuan perangkat Daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indicator meningkatnya usia harapan hidup, dapat diuraikan sebagai berikut:

Target dan Realisasi Usia Harapan Hidup
Kabupaten Boyolali tahun 2022

	Indikator Kinerja Utama	Target 2022		Realisasi 2022	Capaian
1	Angka Harapan Hidup	76,04	tahun	76,12	100,11%

Indikator Usia Harapan Hidup terealisasi 76,12 tahun dengan capaian diatas rata-rata Jawa Tengah (74,57), namun menduduki posisi nomor 4 di Soloraya, diatas Kabupaten Sragen dengan nilai 75,87. Berdasarkan data dari BPS yang telah dirilis. (*https://www.bps.go.id/indicator/26/414/1/-metode-baru-umur-harapan-hidup-saat-lahir-uhh-.html*).

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Tahun 2021 dan 2022

	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi		satuan
			2021	2022	
1	Angka Harapan Hidup	76,04	76,03	76,12	tahun

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, Usia Harapan Hidup Kabupaten Boyolali meningkat sebesar 0,9 point dari 76,03 menjadi 76,12.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2026, maka dibawah ini disajikan data perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan
Akhir Periode RPJMD 2026

No	Indikator Kinerja Kunci	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi sampai dengan 2022	% realisasi Thd Target RPJMD
1	Angka Harapan Hidup	76,29	76,12	99,77%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD dari indikator Usia Harapan Hidup, sudah progres realisasi sebesar 99,77%.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi Nasional, maka Kabupaten Boyolali telah berada di atas rata-rata Nasional, *(https://www.bps.go.id/indicator/26/414/1/-metode-baru-umur-harapan-hidup-saat-lahir-uhh-.html).* Seperti ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Keterangan
1	Angka Harapan Hidup	76,12	71,85	Diatas realisasi Nasional

Usia harapan hidup adalah adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah Umur Harapan Hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan UHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Perkembangan Usia Harapan Hidup dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

GRAFIK 3.1.

Usia Harapan Hidup Kab Boyolali Tahun 2020-2022

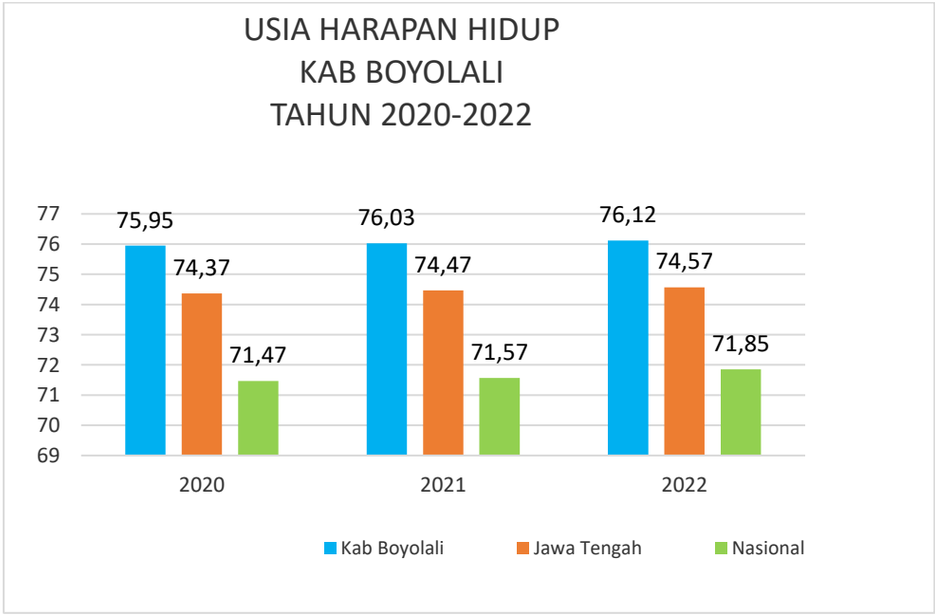

Tabel 3.6

Usia Harapan Hidup Nasional, Jawa Tengah, Soloraya

KAB/KOTA	2020	2021	2022
Kab Boyolali	75,95	76,03	76,12
Jawa Tengah	74,37	74,47	74,57
Nasional	71,47	71,57	71,85
Kota Surakarta	77.22	77.32	
Kab Klaten	76,78	76,86	76,95
Kab Sukoharjo	77,65	77,73	77,82
Kab Wonogiri	76,18	76,28	76,41
Kab Karanganyar	77,47	77,55	77,64
Kab Sragen	75,71	75,79	75,87

(https://www.bps.go.id/indicator/26/414/1/-metode-baru-umur-harapan-hidup-saat-lahir-uhh-.html).

Usia harapan hidup Kabupaten Boyolali tahun 2022, berada tepat di atas Kabupaten Sragen, namun dibawah Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar dan Kota Surakarta. Namun demikian masih diatas rata-rata Jawa Tengah dan Nasional.

Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target usia harapan hidup di bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan terakreditasinya fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas semua telah terakreditasi), sedangkan klinik yang telah terakreditasi sebanyak 6 Klinik (pratama) dari 28 klinik yang ada dikabupaten Boyolali, serta jumlah rumah sakit yang

telah terakreditasi sebanyak 11 Rumah sakit terdiri dari 3 RS milik Pemerintah dan 8 Milik swasta (1 RS swasta belum terakreditasi karena masih baru).

Tabel 3.7
Status Akreditasi Puskesmas se Kab. Boyolali
(kondisi s.d tahun 2022)

NO	KODE	Nama	AKREDITASI			
			TINGKAT KELULUSAN SEBELUMNYA	PELAKSANAAN SURVEI AKREDITASI (TH)		
				2019	2018	2017
1	1031640	SELO	UTAMA	1		
2	1031641	AMPEL	MADYA	1		
3	1031642	GLADAGSARI	MADYA			1
4	1031643	CEPOGO	UTAMA	1		
5	1031644	TAMANSARI/ MUSUK II	MADYA			1
6	1031645	MUSUK	MADYA			1
7	1031646	BOYOLALI I	MADYA			1
8	1031648	BOYOLALI II	MADYA		1	
9	1031649	MOJOSONGO	UTAMA		1	
10	1031650	TERAS	DASAR			1
11	1031651	SAWIT	MADYA			1
12	1031653	BANYUDONO I	MADYA			1
13	1031654	BANYUDONO II	MADYA	1		
14	1031655	SAMBI	MADYA			1
15	1031657	NGEMPLAK	UTAMA			1
16	1031658	NOGOSARI	UTAMA	1		
17	1031659	SIMO	UTAMA	1		
18	1031660	KARANGGEDE	UTAMA	1		1
19	1031661	KLEGO I	MADYA	1		
20	1031662	KLEGO II	MADYA	1		1
21	1031663	ANDONG	UTAMA	1		
22	1031664	KEMUSU	DASAR			1
23	1031666	WONOSEGORO	MADYA		1	
24	1031667	WONOSAMODRO	MADYA			
25	1031668	JUWANGI	MADYA		1	

Sumber data : Bidang Yankes Dinkes Kab Boyolali

Tabel 3.8
Status Akreditasi Rumah Sakit se Kab. Boyolali
(kondisi s.d tahun akhir 2022)

No	KODE REGISTRASI	NAMA RS	ALAMAT	KLS RS	HASIL
1	3309015	RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI	Jl. Kantil No. 14, Boyolali	B	PARIPURNA
2	3309107	RSUD SIMO BOYOLALI	Jl. Simo-Bangak Km.1, Ds. Pelem, Kec. Simo, Boyolali	D	PARIPURNA
3	3309096	RSUD WARAS WIRIS BOYOLALI	Jl. Karanggede-Gemolong km.13 Andong, Boyolali	C	PARIPURNA
4	3309136	RSU ISLAM BOYOLALI	Jl. Nangka, Gumulan, Kemiri, Mojosongo, Boyolali	C	**BELUM AKREDITASI**
5	3309063	RSU PKU AISYIYAH BOYOLALI	Jl. Pasar Sapi Baru, Singkil, Karanggeneng, Boyolali	D	PARIPURNA
6	3309135	RSU INDRIATI BOYOLALI	Jl. Raya Boyolali-Solo Km.2 Mojosongo, Boyolali	D	PARIPURNA
7	3309074	RSU UMI BAROKAH BOYOLALI	Jl.Prof.Suharso No.6 Tegalrejo	D	PARIPURNA
8	3309128	RSU ASY SYIFA SAMBI BOYOLALI	Jl. Raya Bangak Simo Km7,Sambi	D	PARIPURNA
9	3309129	RSU HIDAYAH	Jln.Recosari, Kragilan, Mojosongo	D	PARIPURNA
10	3309085	RSU KARANGGEDE SISMA MEDIKA	Jl. Raya Karanggede-Solo KM 1, Kebonan, Karanggede, Boyolali	D	PARIPURNA
11	3309132	RSU NATALIA	Jl. Teratai No.15 Siswodipuran, Pulisen, Boyolali	D	PERDANA
12	3309131	RSUI.BANYU BENING	Jln.Raya Waduk Cengklik, Ngargorejo, Ngemplak, Boyolali	D	PARIPURNA

Sumber data : Bidang Yankes Dinkes Kab Boyolali

Tabel 3.9
Status Akreditasi Klinik se Kab. Boyolali
(kondisi s.d tahun 2022)

NO	KODE REGISTER	NAMA KLINIK	MASA BERLAKU SERTIFIKAT	TINGKAT KELULUSAN	RENCANA SURVEI
1	1231925	Klinik Sumber Waras	11 Mei 2019	Madya	Mei
2	1231926	Klinik Insan Sehat	29 Des 2019	Paripurna	Juni
3	1232165	Klinik Firena Husada			Juni
4	1233693	Klinik Mitra Medicare			Juli
5	1233455	Klinik Milla Husada	27-Nov-19	Paripurna	Juli
6	1233664	Klinik Palang Merah Indonesia	28-Sep-19	Madya	Sept

NO	KODE REGISTER	NAMA KLINIK	MASA BERLAKU SERTIFIKAT	TINGKAT KELULUSAN	RENCANA SURVEI
7	1232082	Klinik Siti Barokah			Sept
8	1231940	Klinik Kondang Sehat			Sept
9	1233840	Klinik Nayaka Husada 02			Oktober
10	1232096	Klinik Surya Medika			Oktober
11	1231922	Klinik Baety Rahma	27-Nov-19	Madya	Oktober
12	1233636	Klinik Harapan Bunda			Oktober
13	1234000	Klinik Miranti			Oktober
14	1234058	Klinik Kartika 24	27-Nov-19	Utama	November
15	1231927	Klinik Medika			November
16	1232001	Klinik Gita Husada			November
17	1233320	Klinik Klinik Ellena Skin Care			November
18	1233673	Klinik Kebon Arum			November
19	1232031	Klinik Bhayangkara			November
20	1231939	Klinik Imron Medika			November
21	1233917	Klinik Mitra Sehati			Desember
22	1234412	Klinik Estu Utomo			Desember
23	1233592	Klinik Al Mabrur			2024
24	1235004	Klinik PKU Muhammadiyah Simo			2024
25	1236766	Klinik Budi Sehat			2024
26	1237685	Klinik Mirza Medika			2024
27	1236864	Klinik Casa dr Hez			2024
28	1236866	Klinik Ali Medika			2024

Sumber data : Bidang Yankes Dinkes Kab Boyolali

2. Jumlah posyandu yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Boyolali, yang dapat melayani seluruh balita dengan jumlah posyandu sebanyak 1.851 posyandu, dibandingkan dengan jumlah balita sebanyak 69.045. dan posyandu mandiri yang mengalami peningkatan menjadi 64,45%.

3. Dalam upaya meningkatkan kesehatan bayi guna mencegah terjadinya penyakit-penyakit PD3I seperti TBC, Dipteri, polio, Campak, Hepatitis, maka semua bayi usia 0-11 bulan diberikan imunisasi, di Kabupaten Boyolali imunisasi dasar lengkap (IDL) telah tercapai 100%, dengan imunisasi ini diharapkan bayi dapat dicegah dari penyakit-penyakit yang fatal di kemudian hari.

4. Perawatan untuk balita yang mengalami gizi kurang dan gizi buruk, semua balita dengan gizi kurang dan gizi buruk telah dilakukan perawatan sesuai standar,

intervensi yang dilakukan denga pemberian makanan tambahan berupa biscuit untuk balita gizi kurang. Tahun 2022 terdapat 16 kasus balita gizi buruk. Capaian indikator ini yaitu 100 persen karena semua balita yang menderita gizi buruk telah mendapatkan mendapatkan perawatan dan monitoring baik di saat perawatan maupun setelah pulang dari perawatan rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit. Intervensi lainnya berupa pemberian tablet tambah darah bagi remaja SMP dan SMA yang mengalami anemia dan dilakukan penyuluhan serta skrening hb, untuk mencegah terjadinya stunting pada saat terjadi kehamilan saat menikah.

5. Peningkatan kepemilikan jamban untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dengan memberikan bantuan stimulant jamban untuk keluarga miskin yang terpicu untuk memiliki jamban baik dari apbd maupun pihak non pemerintah, sehingga kualitas pencemaran lingkungan akan berkurang dan meningkatkan kesehatan bayi, dan balita. Proporsi rumah tangga sehat juga mengalami peningkatan.

Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut di atas adalah :

a) Pelaksanaan program poskes RT dan posyandu yang semakin ditingkatkan.
b) Meningkatnya proporsi rumah tangga sehat, serta penerapan Germas.
c) Pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat yang memberikan akses bagi masyarakat miskin untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan.
d) Pelaksanaan program prolanis, untuk tetap membuat masyarakat yang memiliki penyakit kronis agar tetap terdeteksi untuk mencegah munculnya penyakit komplikasi.
e) Dukungan anggaran dari APBN untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
f) Perkembangan teknologi informasi yang pesat.

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Masih cukup tingginya kasus kematian ibu yaitu sebanyak 20 kasus.
2. Masih terdapat balita gizi buruk sebanyak 16 kasus.

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

1. Melaksanakan kegiatan AMP (audit maternal perinatal) untuk menelusuri kasus kematian ibu dan bayi 4 bulan sekali, serta memaksimalkan peran dokter dalam Antenatal Care (ANC/pemeriksaaan pada ibu hamil).
2. Mengoptimalkan pendampingan untuk ibu hamil risiko tinggi
3. Orientasi penanganan gawat darurat meternal dan sosialisasi SISRUTE untuk rujukan dan PSC 119 untuk pertolongan darurat.
4. Pemantauan dan pertumbuhan surveilens gizi melalui e-PPGBM, pemberian edukasi Pemberian Makan Bayi Anak untuk meningkatkan pengetahuan orang tua dalam memenuhi gizi seimbang bagi anak.
5. Melakukan sharing melalui dana desa, serta mencari sumber anggaran lain untuk penambahan jumlah PMT pada tahun 2023, dari sektor pemerintah dan swasta (CSR).

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, sesuai dengan IKK dan SPM Bidang Kesehatan sebagai berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (tnn n)	Tahun (thn n+1	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	*Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan*		IKK					0.11				
2	*Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi*		IKK					100				
3	*Prosentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	SPM		100	100	100	100	94.09	97,7		100	Proyeksi dr hasil smt 1 2023
4	*Prosentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	SPM		100	100	100	100	95.67	96,86		100	Proyeksi dr hasil smt 1 2023
5	*Prosentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	SPM		100	100	100	100	96.56	98,4		100	Proyeksi dr hasil smt 1 2023
6	*Prosentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	SPM		100	100	100	100	93.21	98,14		100	Proyeksi dr hasil smt 1 2023
7	*Prosentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	SPM		100	100	100	100	79.06	81,9		100	Proyeksi dr hasil smt 1 2023
8	*Prosentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	SPM		100	100	100	100	91.90	98,6		100	Proyeksi dr hasil smt 1 2023
9	*Prosentase usia produktif yang mendapatkan*	SPM		100	100	100	100	99.94	100		100	Proyeksi dr hasil smt 1

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (tnn n)	Tahun (thn n+1	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
	pelayanan kesehatan sesuai standar											2023
10	*Prosentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	SPM		100	100	100	100	93.42	100		100	Proyeksi dr hasil smt 1 2023
11	*Prosentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	SPM		100	100	100	100	99.94	100		100	Proyeksi dr hasil smt 1 2023
12	*Prosentase 0rang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	SPM		100	100	100	100	86.55	100		100	Proyeksi dr hasil smt 1 2023
13	*Prosentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	SPM		100	100	100	100	79.56	94,42		100	Proyeksi dr hasil smt 1 2023
14	*Prosentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	SPM		100	100	100	100	92.69	94,28		100	Proyeksi dr hasil smt 1 2023
15	*Persentase rumah sakit terakreditasi*	RPJMD		100	100	100	100	91,6	100		100	
16	*Persentase Puskesmas terakreditasi*	RPJMD		100	100	100	100	100	100		100	
17	*Jumlah kematian balita*	RPJMD		116				112				
18	*Persentase balita stunting*	RPJMD		9,3	13	12	11	6,8			11	
19	*Persentase balita gizi kurang*	RPJMD		3,6	3,5	3,3	3,1	4,2			3,1	

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (tnn n)	Tahun (thn n+1	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
20	*Angka kesakitan Covid-19*	RPJMD		450	425	400	350	430,6				
21	Jumlah kematian warga negara usia produktif	RPJMD		931				NA				
22	Jumlah kematian warga negara usia lanjut	RPJMD		1229				NA				
23	Kabupaten Sehat	RPJMD		6 status	9	9	9	9				
24	*Prosentase warga miskin yang mendapatkan bantuan pembiayaan sebagai peserta JKN Kis (premi non DTKS)*	RPJMD		54.829				47.509				
25	*Persentase Desa/kelurahan STBM*	RPJMD		65,54	84,27	85,02	88,76	73,03				
26	*Persentase penyediaan fasilitas buang air besar/bersama-sama bagi rumah tangga miskin (program kemiskinan)*	RPJMD		100	100	100	100	100				
27	*Jumlah kematian ibu*	RPJMD		13				20				
28	*Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi (pendidikan min. D3 Kesehatan)*											
29	*Persentase makanan Minuman yang lolos uji*			88	91	93	94					
30	*Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian*			100	100	100	100					
31	*Persentase Desa / Kelurahan Siaga Aktif Mandiri*			43,07 (115 desa	44,94 (120 desa)	46,81 (125 desa)	48,68 (130 desa)	56.17				
32	*Prosentase Desa/Kelurahan yang menerapkan GERMAS*			100	100	100	100	100				
33	*Nilai Sakip Dinas*			85	81,35	81,60	81,85	80,6				

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (tnn n)	Tahun (thn n+1	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
	Kesehatan				(rev)							
34	*Rata-Rata Nilai IKM Puskesmas, Labkes*			79	79,5	80	80,5	82,03				

- Target pada indikator kinerja ini sama dengan target pelayanan ibu hamil K 4 yaitu 100 % realisasi 94,09% karena adanya kasus abortus sebanyak 197 kasus dan persalinan prematur sebanyak 186 kasus sehingga ibu hamil tidak mencapai pelayanan K 4. Pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil sudah dilakukan sesuai dengan standart, yaitu setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4x selama kehamilan dengan ketentuan waktu minimal 1 kali pada triwulan pertama, minimal 1x pada triwulan kedua, dan minimal 2x pada triwulan ketiga.

- Target Kinerja Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100% realisasi 95,6% dari ibu bersalin sejumlah 12.953 masih ada 75 ibu bersalin dengan pertolongan belum sesuai standart (20 ibu bersalin di PKD, 26 ibu bersalin di rumah pasien 10 ibu bersalin lahir di perjalanan)

- Target indikator Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100%, realisasi 96,6 % disebabkan karena ada bayi lahir hidup dan meninggal sebelum mendapat pelayanan sesuai standart (Kematian Neonatal 95 bayi).

- Target indikator Cakupan Pelayanan Anak Balita 100 %, realisasi 93.2% dan disebabkan adanya balita yang belum memasuki jadwal pelayanan sesuai standart dan ada 10 anak balita yang meninggal belum mendapatkan pelayanan sesuai standart.

- Target indikator kinerja ini 100%, dengan realisasi 79,06 % adanya pandemi COVID-19 pada semester 1 yang menghambat akses dan kegiatan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar terutama pelayanan di luar gedung. Solusi untuk pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar pada tahun 2022 dengan mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar yang berkunjung ke Puskesmas. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar yang pada semester Memanfaatkan media sosial (WA/telepon) dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar. Memberdayakan masyarakat/keluarga untuk membantu mengumpulkan data kesehatan anak lewat media/google form.

- Target Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 100% realisasi 91,90% dan capaian 92.68 %. Capaian belum mencapai target dikarenakan adanya pandemic COVID 19 menghambat akses dan kegiatan pelayanan kesehatan pada lansia. Lanjut usia merupakan kelompok yang rentan tertular COVID 19 sehingga sampai dengan pertengahan tahun 2022 ini banyak lansia lebih memilih yang tidak

berkunjung ke posyandu maupun fasilitas kesehata jika tidak ada keluhan yang mengganggu. Selain itu untuk melaksanakan pelayanan kesehatan lansia yang terstandart , untuk beberapa puskesmas ketersediaan bahan habis pakai belum mencukupi dan belum mendapatkan dukunggan dari sumber danan lainnya.

- Indikator ini terutama didukung tenaga kesehatan yang belum terlatih dalam pelayanan geriatri dan belum semua Puskesmas menjadi Puskesmas Santun Lansia, serta melakukan Orientasi Caregiver Informal dalam Melaksanakan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia bagi petugas lansia di 25 Puskesmas

- Empat indikator yang belum memenuhi target diantaranya Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (78%), Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human Immunodefisiensy virus) yang mendapatkan layanan kesehatan (91%), Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (93%) dan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (93).

- Tahun 2022 terdapat 1 rumah sakit yang belum dilaksanakan akreditasi yaitu RS Islam, karena rumah sakit masih baru selesai dibangun.
- Pada tahun 2022 tidak ada pelaksanaan survei akreditasi dari kementerian, ada relaksasi bagi semua Pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) yang habis masa akreditasinya untuk dilaksanakan pada tahun 2023.

- Target indikator Penurunan Kematian Balita 10 realisasi 10 dan capaian 100 cakupan dimana kematian bayi (0-11 bulan) sebanyak 120 kasus dan kematian usia 12-59 bulan sebanyak 10 kasus sehingga jumlahnya adalah 130 kasus. Sedangkan kelahiran hidup sebanyak 12.951 bayi. Kasus kematian anak balita ini terbanyak disebabkankan karena asfiksia ada 24 kasus. Hal ini disebabkan karena adanya faktor risiko tinggi ibu hamil. Tahun 2022 ada 14.307 ibu hamil dan yang mengalami risiko tinggi ada 5951 (41,5% dari jumlah ibu hamil).
- Solusi untuk mencegah terjadinya asfiksia adalah dengan deteksi dini risiko tinggi ibu hamil dan penanganan risiko tinggi ibu hamil yang optimal, dan pertolongan persalinan sesuai dengan standart.

- Target Indikator 14% realisasi 6.6% capaian 47,1%. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena sudah terpaparnya petugas gizi dan kader posyandu tentang pencegahan penanganan stunting sehingga meningkatkan pengetahuan ibu balita.sudah terlaksananya intervensi spesifik yang melibatkan lintas program yang meliputi 20 indikator
- Aksi Konvergensi stunting yang dilaksanakan sudah melibatkan OPD terkait sehingga intervensi sensitive dan spesifik sudah dilaksanakan di Kabupaten Boyolali, 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi tersebut yaitu analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, Perbup Kewenangan Desa, Pembinaan Kader Pembangunan Manusia, manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting, dan review kinerja tahunan.

- Tahun 2022 terdapat sisa kasus balita gizi buruk (BB/TB) sebanyak 16 disebabkan karena penyakit bawaan seperti : CP, PJB , Microcephalus dan TB serta ada 4 balita yang dikarenakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Gangguan perkembangan dan BBLR. Keberhasilan capaian indikator ini yaitu 100% balita gizi buruk mendapatkan perawatan disebabkan karena semua petugas sudah mendapatkan orientasi pemantauan pertumbuhan, 1 RSU rujukan dan 6 puskesmas sudah mendapatkan pelatihan tata laksana gizi buruk, sharing anggaran dari dana desa untuk pemberian balita

kurus.

- Pandemi Covid-19 yang menyerang secara global di negara-negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Indikator kinerja keberhasilan penanganan Covid-19 di wujudkan dalam indikator penemuan kasus konfirmasi covid-19. angka kesakita covid-19 tahun 2022 sebesar <450/100.000 penduduk. Target jumlah kasus yang ditemukan kurang dari 5.260 kasus. Penanggulangan covid sebesar 95%, dengan tujuan menghentikan penularan dan mencegah penyebaran penyakit covid-19. Realisasi penanggulang covid-19 adalah 100% dengan indikasi semua kasus yang terkonfirmasi covid-19 ditangani. Jumlah target kasus terkonfirmasi covid 19 pada tahun 2022 adalah <5.260 dengan angka kesakitan covid 450/100.000 dari jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Boyolali sebanyak 1.077.213 maka didapatkan angka absolut sebanyak 4.847 kasus yang harus ditangani. Jumlah kasus terkonfirmasi covid 19 pada bulan Januari – Desember 2022 sebanyak 4.639 atau angka kesakitan covid 19 sebesar 430,65/100.000.

- Indikator pelayanan kesehatan pada usia produktif terdapat dalam target Standar Pelayana Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten. Target sasaran di Kabupaten Boyolali sebanyak 449.202 jiwa, capaian kinerja indikator ini sebesar 100%.

- Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa, dari 12 target SPM, 1 indikator telah mencapai 100%, jumlah kematian bayi masih 102 kasus kematian, jumlah kematian ibu sebanyak 20 kasus, jaminan kesehatan belum mencapai total coverage.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Dari evaluasi kinerja Dinas kesehatan Kabupaten Boyolali dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Dinas kesehatan cukup berhasil. Hal kritis / permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Dinas kesehatan Kabupaten Boyolali antara lain adalah :

1. Masih adanya kematian ibu, bayi dan balita;
2. Masih ada balita gizi buruk, kurang dan stunting;
3. Cakupan Desa STBM masih belum optimal.
4. Kondisi Pandemi Covid19 yang telah dicabut pada tahun 2023, maka target untuk kesakitan covid berkurang.
5. Adanya kematian karena DBD pada tahun 2022.
6. Target pencapaian SPM (standar pelayanan minimal) yang belum mencapai 100%.
7. Penemuan penderita Aids, dan Tubercolosis serta penanganannya belum maksimal.

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, ada beberapa hambatan yang harus dihadapi, diantaranya adalah :

1. Deteksi dini terhadap kasus yang ada belum maksimal, mengakibatkan keterlambatan penanganan.
2. Keterbatasan Puskesmas yang mampu PONED dan RS yang mampu PONEK, sehingga rujukan belum bisa langsung ke PONEK karena jauhnya jarak tempuh ke RS PONEK.
3. Penanganan ibu hamil anemi serta perbaikan gizi sebelum dan selama hamil sehingga anemi dan KEK bisa dicegah dan deteksi dini resiko tinggi ibu hamil sedini mungkin.

4. Pilar STBM sebanyak 5 pilar masih tersisa 2 pilar pengelolaan sampah rumah tangga dan Pengelolaan Limbah cair rumah tangga, sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat.
5. Pengetahuan masyarakat yang menganggap bahwa ketika menderita sakit DBD lebih dianggap demam biasa dan tidak segera memeriksakan sehingga menyebabkan terlambat penanganannya atau sampai di fasilitas kesehatan sudah kondisi buruk sehingga menyebabkan fatal (kematian).
6. Penderita sering berpindah-pindah dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan lain dalam proses pengobatan sehingga memperlambat pendiagnosaan.
7. Kerjasama dengan jejaring di pelayanan kesehatan lain belum optimal dilakukan dalam pencapaian SPM

Berdasarkan analisis, kajian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan antara lain:

1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas, dan Rumah Sakit dengan melalui akreditasi;
2. Pencapaian target SDG's dan SPM bidang Kesehatan yang belum sepenuhnya tercapai;
3. Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan desa STBM, Germas, Kota Sehat dan penggalakan Poskes RT.
4. Melakukan MOU dengan pelayanan kesehatan yang ada dalam jejaring untuk pencapaian SPM.
5. Peningkatan penemuan dan penanganan penderita AIDS dan Tuberkolusis.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2024 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021 – 2026, SDG's dan SPM-Kesehatan. Secara garis besar program dan kegiatan sama dengan tahun sebelumnya. Ada perubahan jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD karena dimasing-masing program dan kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan. Secara lebih rinci dituangkan dalam tabel T.C. 31

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
I	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase rumah sakit terakreditasi (Permendagri 18/2020),:**	**100**	**Persentase**	**-**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase rumah sakit terakreditasi (Permendagri 18/2020),:**	**100**	**Persentase**	**-**	
1.1	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan	91,98	Prosentase	-	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan	91,98	Prosentase	-	
1.1.1	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	9	Unit	-	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	9	Unit	-	
1.1.2	Pengelolaan Manajemen Puskesmas		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas				Pengelolaan Manajemen Puskesmas		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Persentase Puskesmas terakreditasi**	**100**	**Prosentase**	**141.541.043.000**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase Puskesmas terakreditasi**	**100**	**Prosentase**	**141.541.043.000**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan		Prosentase	58.186.435.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan		Prosentase	58.186.435.000	
1.1.3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	25	Dokumen	58.086.435.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	25	Dokumen	58.086.435.000	
1.1.4	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100	Unit	70.000.000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100	Unit	70.000.000	
1.1.5	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				
1.1.6	Pengelolaan Pelayananan Promosi kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi kesehatan	2	Dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayananan Promosi kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi kesehatan	2	Dokumen	30.000.000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			80.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			80.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
1.1.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	3	Dokumen	80.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	3	Dokumen	80.000.000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			7.679.971.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			7.679.971.000	
1.1.8	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Dokumen	7.679.971.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Dokumen	7.679.971.000	Dapat dikurangkan
1.2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Puskesmas dengan sarana, prasarana, alkes, obat sesuai standar	90	%	21.454.153.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Puskesmas dengan sarana, prasarana, alkes, obat sesuai standar	90	%	21.454.153.000	
1.2.1	Pengembangan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	Unit	8.548.000.000	Pengembangan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	Unit	8.548.000.000	
1.2.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1	Unit	5.073.018.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1	Unit	5.073.018.000	
1.2.3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	Unit	1.200.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	Unit	1.200.000.000	Menyesuaikan dengan usulan DAK NON FISIK
1.2.4	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	41	Unit	120.000.000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	41	Unit	120.000.000	Menyesuaikan dengan usulan DAK NON FISIK
1.2.5	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke	3	Paket	13.135.000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke	3	Paket	13.135.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya						Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				
1.2.6	Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2	Paket	5.000.000.000	Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2	Paket	5.000.000.000	Menyesuaikan dengan usulan DAK NON FISIK
1.2.7	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1	Paket	1.500.000.000	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1	Paket	1.500.000.000	Menyesuaikan dengan usulan DAK NON FISIK
1.2.8	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan TingkatDaerah Kabupaten/Kota		Prosentase Faskes melaksanakan pengukuran INM	100	Prosentase	28.000.000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan TingkatDaerah Kabupaten/Kota		Prosentase Faskes melaksanakan pengukuran INM	100	Prosentase	28.000.000	
1.2.9	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	74	Unit	28.000.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	74	Unit	28.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan ibu hamil (SPM)**	**100**	**Prosentase**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan ibu hamil (SPM)**	**100**	**Prosentase**		
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			4.390.150.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			4.390.150.000	
1.1.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.285	Orang	4.390.150.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.285	Orang	4.390.150.000	Menyesuaikan dengan usulan DAK NON FISIK
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (SPM)**	**100**	**Prosentase**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (SPM)**	**100**	**Prosentase**		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Jumlah kematian ibu**	**11**	**kasus**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Jumlah kematian ibu**	**11**	**kasus**		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			3.707.434.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			3.707.434.000	
1.1.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.545	Orang	3.707.434.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.545	Orang	3.707.434.000	Menyesuaikan dengan usulan DAK NON FISIK
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)**	**100**	**Prosentase**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)**	**100**	**Prosentase**		
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			1.332.550.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			1.332.550.000	
1.1.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13024	Orang	1.332.550.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13024	Orang	1.332.550.000	Menyesuaikan dengan usulan DAK NON FISIK
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)**	**100**	**Prosentase**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)**	**100**	**Prosentase**		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Jumlah kematian balita**	**113**	**kasus**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Jumlah kematian balita**	**113**	**kasus**		
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			1.297.550.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			1.297.550.000	
1.1.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67750	Orang	1.297.550.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67750	Orang	1.297.550.000	Menyesuaikan dengan usulan DAK NON FISIK
1.1.13	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			64.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			64.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
1.1.14	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	Laporan	64.000.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	Laporan	64.000.000	
1.1.15	Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi		Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi		Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Persentase balita stunting**	**9,1**	**Prosentase**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase balita stunting**	**9,1**	**Prosentase**		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Persentase balita gizi kurang**	**3,3**	**Prosentase**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase balita gizi kurang**	**3,3**	**Prosentase**		
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			500.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			500.000.000	
1.1.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	Dokumen	500.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	Dokumen	500.000.000	Menyesuaikan dengan usulan DAK NON FISIK
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)**	**100**	**Prosentase**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)**	**100**	**Prosentase**		
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			3.522.550.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			3.522.550.000	
1.1.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12710	orang	3.172.550.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12710	orang	3.172.550.000	Menyesuaikan dengan usulan DAK NON FISIK
1.1.18	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1263	Orang	350.000.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1263	Orang	350.000.000	Sudah sesuai

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (SPM)**	**100**	**Prosentase**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (SPM)**	**100**	**Prosentase**		
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			2.172.550.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			2.172.550.000	
1.1.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.562	orang	1.872.550.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.562	orang	1.872.550.000	Menyesuaikan dengan usulan DAK NON FISIK
1.1.20	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	470	Orang	300.000.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	470	Orang	300.000.000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan	11		1.790.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan	11		1.790.000.000	
1.1.21	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9	Dokumen	1.750.000.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9	Dokumen	1.750.000.000	Menyesuaikan dengan usulan DAK NON FISIK
1.1.22	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5	Orang	40.000.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5	Orang	40.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)**	**100**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)**	**100**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			1.322.550.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			1.322.550.000	
1.1.23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	230.169	Orang	1.322.550.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	230.169	Orang	1.322.550.000	Menyesuaikan dengan usulan DAK NON FISIK

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Persentase penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)**	**100**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)**	**100**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			1.322.550.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			1.322.550.000	
1.1.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	208	Orang	1.322.550.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	208	Orang	1.322.550.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)**	**100**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)**	**100**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			1.322.950.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			1.322.950.000	
1.1.25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2058	Orang	822.550.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2058	Orang	822.550.000	Menyesuaikan dengan usulan DAK NON FISIK
1.1.26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza		Jumlah Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan kesehatan	25	Orang	500.400.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza		Jumlah Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan kesehatan	25	Orang	500.400.000	Menyesuaikan dengan usulan DAK NON FISIK
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			40.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			40.000.000	
1.1.27	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52	Dokumen	40.000.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52	Dokumen	40.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Angka kesakitan Covid-19**	**400**	**org/100,000 pddk**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Angka kesakitan Covid-19**	**400**	**org/100,000 pddk**		
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			1.080.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			1.080.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
1.1.28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	Dokumen	580.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	Dokumen	580.000.000	Menyesuaikan dengan usulan DAK NON FISIK
	pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium Rujukan/nasional		jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	25	paket	500.000.000	pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium Rujukan/nasional		jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	25	paket	500.000.000	Menyesuaikan dengan usulan DAK NON FISIK
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			45.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			45.000.000	
1.1.29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2	Dokumen	45.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2	Dokumen	45.000.000	
1.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi secara terintegrasi		Prosentase Puskesmas memiliki website	64	Prosentase	60.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi secara terintegrasi		Prosentase Puskesmas memiliki website	64	Prosentase	60.000.000	
1.3.1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	29	Dokumen	60.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	29	Dokumen	60.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)**	**100**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)**	**100**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			1.307.550.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			1.307.550.000	
1.1.30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	187.320	Orang	1.307.550.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	187.320	Orang	1.307.550.000	Menyesuaikan dengan usulan DAK NON FISIK
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)**	**100**	**%**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)**	**100**	**%**		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Jumlah kematian warga negara usia produktif**	**921**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Jumlah kematian warga negara usia produktif**	**921**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			822.550.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			822.550.000	
1.1.31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	538.591	Orang	822.550.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	538.591	Orang	822.550.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Persentase warga negara lanjut usia yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)**	**100**	%		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase warga negara lanjut usia yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)**	**100**	%		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Jumlah kematian warga negara usia lanjut**	**1209**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Jumlah kematian warga negara usia lanjut**	**1209**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			1.322.550.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			1.322.550.000	
1.1.32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	159.308	Orang	1.322.550.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	159.308	Orang	1.322.550.000	Menyesuaikan dengan usulan DAK NON FISIK
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Kabupaten Sehat**	**9 tatanan (wistara)**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Kabupaten Sehat**	**9 tatanan (wistara)**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			190.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			190.000.000	
1.1.33	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9	Dokumen	190.000.000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9	Dokumen	190.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Jumlah warga miskin yang mendapatkan bantuan pembiayaan sebagai peserta JKN Kis (premi non DTKS)**	**59303**	**orang**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Jumlah warga miskin yang mendapatkan bantuan pembiayaan sebagai peserta JKN Kis (premi non DTKS)**	**59303**	**orang**		
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			25.000.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			25.000.000.000	
1.1.34	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20	Dokumen	25.000.000.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20	Dokumen	25.000.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Persentase Desa/kelurahan STBM**	**88,76404494**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase Desa/kelurahan STBM**	**88,76404494**			
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			1.500.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota		Prosentase rata-rata cakupan pelayanan SPM Bidang kesehatan			1.500.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Persentase penyediaan fasilitas buang air besar/bersama-sama bagi rumah tangga miskin (program kemiskinan)**	**100**		**-**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase penyediaan fasilitas buang air besar/bersama-sama bagi rumah tangga miskin (program kemiskinan)**	**100**		**-**	
1.1.35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2	Dokumen	1.500.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2	Dokumen	1.500.000.000	
1.1.36	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan		Jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun				Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan		Jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun				
4	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi (pendidikan min. D3 Kesehatan)**	**100**		**135.640.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi (pendidikan min. D3 Kesehatan)**	**100**		**135.640.000**	
4.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis		Prosentase Puskesmas dengan 9 Nakes Strategis	96	%	135.640.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis		Prosentase Puskesmas dengan 9 Nakes Strategis	96	%	135.640.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
	Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
4.1.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100	Orang	135.640.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100	Orang	135.640.000	Perlu ditambah anggaran sesuai DAK
4.1.2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				
5	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**Persentase makanan Minuman yang lolos uji**	**93**		**618.626.000**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**Persentase makanan Minuman yang lolos uji**	**93**		**618.626.000**	
5.1	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRTsebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapatDiproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi standar dan persyaratan perijinan	67	%	500.000.000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRTsebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapatDiproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi standar dan persyaratan perijinan	67	%	500.000.000	
5.1.1	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	80	Dokumen	300.000.000	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	80	Dokumen	300.000.000	Menyesuaikan dengan usulan DAK NON FISIK
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50	Unit	200.000.000	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50	Unit	200.000.000	Menyesuaikan dengan usulan DAK NON FISIK
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antaralain Jasa		Persentase Tempat Pengolahan Makanan	80	persen	118.626.000	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antaralain Jasa		Persentase Tempat Pengolahan Makanan	80	persen	118.626.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
	Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		(TPM) memenuhi syarat higiene sanitasi				Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		(TPM) memenuhi syarat higiene sanitasi				
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat LaikHigiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	dokumen	118.626.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat LaikHigiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	dokumen	118.626.000	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		**Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian**	**100**		**150.000.000**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian**	**100**		**150.000.000**	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro ObatTradisional (UMOT)		Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perijinan	85	%	150.000.000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro ObatTradisional (UMOT)		Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perijinan	85	%	150.000.000	
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	81	Sarana	150.000.000	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	81	Sarana	150.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		**Persentase Desa/kelurahan siaga aktif mandiri**	**56,18 (150 desa)**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**Persentase Desa/kelurahan siaga aktif mandiri**	**56,18 (150 desa)**			
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah desa/kelurahan yang memiliki minimal 4 Jenis UKBM				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah desa/kelurahan yang memiliki minimal 4 Jenis UKBM				
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah dokumen promosi kesehatan advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Dokumen		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah dokumen promosi kesehatan advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		**Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan GERMAS**	**100**		**497.346.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan GERMAS**	**100**		**497.346.000**	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase desa/kelurahan yang memiliki kampung germas	11,23 % (30 desa)	%	342.346.000	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase desa/kelurahan yang memiliki kampung germas	11,23 % (30 desa)	%	342.346.000	
						-						-	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2	Dokumen	342.346.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2	Dokumen	342.346.000	Menyesuaikan dengan usulan DAK NON FISIK
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Desa/kel yang memiliki minimal 4 Jenis UKBM	125 desa (46,81 %)	%	155.000.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Desa/kel yang memiliki minimal 4 Jenis UKBM	125 desa (46,81 %)	%	155.000.000	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	Dokumen	155.000.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	Dokumen	155.000.000	
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			**81,60**	**nilai**		**Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**			**81,60**	**nilai**		
	Nilai IKM rata2-labkes-dinkes-pusk			**80**			**Nilai IKM rata2-labkes-dinkes-pusk**			**80**			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	**100**		**68.443.868.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	**100**		**68.443.868.000**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8	Dokumen	67.855.656.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8	Dokumen	67.855.656.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	960	Orang/bulan	66.849.480.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	960	Orang/ bulan	66.849.480.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	1.006.176.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	1.006.176.000	Menyesuaikan kebijakan TKHL (perlu ditambah)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penysusunan laporan Keuanhgan akhir tahun SKPD	1	Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penysusunan laporan Keuanhgan akhir tahun SKPD	1	Laporan		
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	-	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2	Dokumen		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2	Dokumen		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Dokumen	256.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	Dokumen	256.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	3.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Paket	10.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	30.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	Paket	25.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	25.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	100.000.000	
	Dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD	13	Laporan	30.000.000	Dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD	13	Laporan	30.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	1		10.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	1		10.000.000	
	pengadaan mebelair		Jumlah paket mebel yang disediakan	1	Unit	10.000.000	pengadaan mebelair		Jumlah paket mebel yang disediakan	1	Unit	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Dokumen	196.714.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Dokumen	196.714.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	191.714.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	191.714.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	kegiatan	125.498.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	kegiatan	125.498.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	55.498.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	55.498.000	
	pemeliharaan mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	1	Unit		pemeliharaan mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	1	Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200	Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200	Unit	20.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	50.000.000	
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	dokumen	-	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	dokumen	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	Dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
				1		-				1		-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Laporan	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	-	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	14	kegiatan		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	14	kegiatan		
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2	Dokumen	-	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2	Dokumen	-	
				43.398.399.000						43.398.399.000			
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Dokumen	-	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Dokumen	-	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat telah dirangkum dari hasil musrenbang kecamatan tahun 2024, yang telah dilaksanakan pada bulan Maret 2023. Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa sebagian besar usulan dari masyarakat digunakan untuk Jaminan Kesehatan (jamkesda), stimulan Jamban.

Berdasarkan rangkuman usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut, bahwa seluruhnya telah secara rutin dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, dan pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Alat Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Desa Kayen, Juwangi	50 orang	Jumlah warga miskin yang mendapatkan bantuan pembiayaan sebagai peserta JKN Kis (premi non DTKS)		Pemberian Jaminan Kesehatan melalui premi asuransi dapat diakomodir dengan mempertimbangkan jumlah kuota yang ada dan verifikasi usulan.
		Desa Gosono, Wonosegoro				
		Desa Tambak, Mojosongo				
		Desa Metuk, Mojosongo				
		Desa Kragilan, Mojosongo				
		DEsa Dlingo, Mojosongo				
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Karanggeneng, Kab. Boyolali		Persentase penyediaan fasilitas buang air besar/bersama-sama bagi rumah tangga miskin (program kemiskinan)		Pemberian Bantuan Jambanisasi diberikan dengan verifikasi usulan untuk maskin.
		Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Kab. Boyolali				
		Desa Wates Ke. Simo, Kab. Boyolali , Kab. Boyolali				
		Desa Manggung, Kab. Boyolali				
		Desa Dibal, Kab. Boyolali				
		Desa Sobokerto, Kab. Boyolali				
		Ds.Krasak dan Ds.Tawangsari, Kab. Boyolali				
		Desa Ngargorejo, Kab. Boyolali				

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Desa Gagaksipat, Kab. Boyolali				
		Desa Ngesrep, Kab. Boyolali				
		Desa Donohudan, Kab. Boyolali				
		Desa Sindon, Kab. Boyolali				
		Desa Jatilawang, Kab. Boyolali				
		Desa Kismoyoso, Kab. Boyolali				
		Desa Giriroto, Kab. Boyolali				
		Desa Sawahan, Kab. Boyolali				
		Desa Dologan Kecamatan Karanggede, Kab. Boyolali				
		Desa Genting, Kab. Boyolali				
		Desa Pandeyan, Kab. Boyolali				

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter.

Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

Sejalan dengan arah kebijakan Nasional, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali juga melaksanakan program tersebut dengan cara sebagai berikut:

1. Peningkatan kesehatan ibu dan bayi, dan stunting,
2. Pembudayaan Germas dengan melakukan peningkatan kesehatan lingkungan, maupun pola hidup sehat.
3. Penerapan SPM bidang kesehatan menjadi indicator kinerja Dinas Kesehatan
4. Pencapaian SDGs.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.2.1 Tujuan

Tujuan RPJMD 2021-2026 yaitu Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing dengan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan sasaran

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indicator meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2023 sebesar 76,16 tahun.
2. Sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah, dengan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan nilai 85.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan merumuskan 5 (lima) program dan 15 (lima belas) kegiatan yang terbagi dalam 60 (enam puluh) sub kegiatan Secara rinci Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

NO	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				8	Penyediaan Bahan/Material
				9	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
		3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	11	Pengadaan Mebel
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
				15	Pemeliharaan Mebel
				16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	18	Pengembangan Puskesmas
				19	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Failitas Pelayanan Kesehatan
				20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				21	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
				22	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman

NO	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN
		7	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
				29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
				30	Pengelolaan PelayanaKesehatan Penderita Hipertensi
				31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
				33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
				34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
				35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
				36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				39	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
				41	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				42	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				43	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				44	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
				45	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
				46	Operasional Pelayanan Puskesmas
				47	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				48	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN
				49	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat
				50	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
				51	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
				52	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
		8	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	53	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
		9	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	54	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**10**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	55	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan TingkaDaerah Kabupaten/Kota
4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**11**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	56	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		12	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	57	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		13	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	58	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		14	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	59	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

NO	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**15**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	60	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Dalam rangka mendukung pencapaian target SDGs maka program yang dipilih disesuaikan dengan SDGs sebanyak 4 Goals yaitu

   1. Goal 1 mengakhiri segala bentuk kemiskinan (Jaminan Kesehatan)
   2. Goal 2 menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan (Peningkatan Gizi)
   3. Goal 3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. (Kesakitan dan kematian, pencegahan penyakit)
   4. Goal 5 menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. (kesehatan lingkungan)

b. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan juga menjadi salah satu pertimbangan. Program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali harus mengacu capaian indikator SPM terhadap target yang telah ditetapkan.
c. Dalam mendukung program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Boyolali, premi jaminan kesehatan dan pemberian bantuan jamban untuk penduduk miskin di Kabupaten Boyolali tetap perlu untuk diprogramkan.
d. Melanjutkan dan mempertahankan kegiatan inovatif di bidang kesehatan seperti Kampung Germas, Poskes RT, dan Kibla (untuk penanggulangan kematian ibu/bayi), serta Boyolali Sehat.
e. Melaksanakan peningkatan mutu layanan di semua fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Boyolali, Rumah Sakit, Puskesmas, Labkesda, Praktik Dokter, klinik, Bidan Praktik dlsb dengan pelaksanaan akreditasi di Pelayanan Kesehatan yang belum dilaksanakan survei akreditasi pada tahun 2023.
f. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dengan melakukan pembangunan Puskesmas,
g. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan berbagai pelatihan yang menunjang.
h. Mengakomodir program baru dari kementrian kesehatan antara lain untuk Integrasi Layanan Primer, dan pengaktifan Pustu dan Posyandu, serta jejaring puskesmas.

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan merumuskan 5 (lima) program dan 60 (enam puluh) subkegiatan. Secara rinci Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel Tc 33. Namun demikian rumusan program kegiatan dan sub kegiatan berbeda dengan rancangan awal RKPD, baik jenis dan atau pagu indikatifnya dikarenakan adanya kebijakan atau regulasi baru yang ditetapkan dari Pemerintah Pusat dan Daerah, serta ketersediaan anggarannya.

Perbedaan RKA pada UPT Puskesmas yang dalam Rancangan awal menjadi 1 dengan RKPD Dinas Kesehatan, namun pada renja, anggaran nya berdiri sendiri.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Boyolali

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kab. Boyolali Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Dinas Kesehatan								92.665.687.000,00					68.679.706.000,00
I					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								92.665.687.000,00					68.679.706.000,00
I	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								92.665.687.000,00					68.679.706.000,00
I	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								13.569.603.000,00					67.829.706.000,00
I	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								0,00					0,00
I	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0,00
I	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00
I	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0,00
1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0,00
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Laporan	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Laporan	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11.892.649.000,00					67.629.706.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN (GAJI DINKES DAN Pusk)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,02 Persen	960 Orang/bulan	100 persen	9.017.113.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	960 Orang/bulan	67.629.706.000,00
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN (GAJI DINKES DAN Pusk)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,02 Persen	12 Dokumen	100 persen	2.875.536.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	0,00
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN (GAJI DINKES DAN Pusk)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,02 Persen	12 Dokumen	100 persen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00
1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
						Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN (GAJI DINKES DAN Pusk)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,02 Persen	0 Dokumen	100 persen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0,00
1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
						Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN (GAJI DINKES DAN Pusk)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,02 Persen	3 Dokumen	100 persen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN (GAJI DINKES DAN Pusk)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,02 Persen	0 Laporan	100 persen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0,00
1	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								0,00					0,00
1	02	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah													
						Pemenuhan Standart pelayanan kesehatan Rumah Sakit (IKM) (RSUD Simo) Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Pemenuhan Standart Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (IKM) (RSUD Waras Wiris) Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN (GAJI DINKES DAN Pusk) Pemenuhan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Prosen 100 Persen 100 persen 85,02 Persen 1 persen 100 persen	0 Dokumen	-	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Standart pelayanan kesehatan Rumah Sakit (IKM) (RSUD Pandan Arang) Pemenuhan Standart pelayanan kesehatan Rumah Sakit (IKM) (RSUD Pandan Arang)													
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.127.941.000,00					0,00
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN (GAJI DINKES DAN Pusk)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,02 Persen	2 Paket	100 persen	3.008.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN (GAJI DINKES DAN Pusk)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,02 Persen	0 Paket	100 persen	57.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN (GAJI DINKES DAN Pusk)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,02 Persen	0 Paket	100 persen	4.218.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0,00
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN (GAJI DINKES DAN Pusk)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,02 Persen	0 Paket	100 persen	251.202.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN (GAJI DINKES DAN Pusk)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,02 Persen	2 Paket	100 persen	150.593.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0,00
1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN (GAJI DINKES DAN Pusk)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,02 Persen	0 Paket	100 persen	83.040.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0,00
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN (GAJI DINKES DAN Pusk)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,02 Persen	2 Laporan	100 persen	420.920.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	0,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN (GAJI DINKES DAN Pusk)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,02 Persen	0 Laporan	100 persen	157.960.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								135.000.000,00					0,00
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN (GAJI DINKES DAN Pusk)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,02 Persen	0 Unit	-	135.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								236.764.000,00					0,00
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN (GAJI DINKES DAN Pusk)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,02 Persen	2 Laporan	100 persen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	0,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN (GAJI DINKES DAN Pusk)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,02 Persen	12 Laporan	100 persen	231.764.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								177.249.000,00					200.000.000,00
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN (GAJI DINKES DAN Pusk)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,02 Persen	0 Unit	100 persen	55.498.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0,00
1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi	Kab. Boyolali, Semua Kecamat	85,02 Persen	0 Unit	100 persen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						(GAJI DINKES DAN Pusk)		Perangkat Daerah	an, Semua Kel/Desa					Alokasi Umum				
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN (GAJI DINKES DAN Pusk)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,02 Persen	0 Unit	100 persen	21.751.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	200.000.000,00
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN (GAJI DINKES DAN Pusk)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,02 Persen	1 Unit	100 persen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								77.140.387.000,00					850.000.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								24.429.980.000,00					0,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas													
						Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM) Jumlah warga miskin yang mendapatkan bantuan pembiayaan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSPA) Persentase Puskesmas dengan sarana fisik (ruang) sesuai standar Permenkes. Persentase Laboratorium Kesehatan Yang lulus Pemantapan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 100,00 persen 59.303 penduduk 9,10 persen 9 tatanan (wistara) status 100 Persen 100,00 persen 100,00 persen 3,3 persen	2 Unit	2 Unit 32 persen 100 persen	14.093.030.000,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						sebagai peserta JKN Kis (premi non DTKS) Persentase balita stunting (Penunjang Stunting) Kabupaten Sehat Persentase capaian SPM RS (RSUD Simo) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) Persentase balita gizi kurang Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM) Persentase penyediaan fasilitas buang air besar/bersama-sama bagi rumah tangga miskin (program kemiskinan) Persentase Desa/kelurahan STBM		Mutu Eksternal		100,00 persen 100,00 persen 88,76 persen 1209 jiwa 1,21 jiwa 59.303 penduduk 100,00 persen 106 jiwa 100,00 persen 100,00 persen 400,00 angka 100,00 persen 113,00 jiwa 100,00 persen 9,10 persen 921,00 jiwa 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 82,00 Persen 100,00 Persen 100,00 persen							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Jumlah kematian warga negara usia lanjut Jumlah kematian warga negara usia lanjut Jumlah warga miskin yang mendapatkan bantuan pembiayaan sebagai peserta JKN Kis (premi non DTKS) (Penunjang Kemiskinan) Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar (SPM) Jumlah Kematian Bayi Persentase penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar (SPM) Persentase penyediaan fasilitas buang air besar/bersama-sama bagi rumah tangga miskin (program kemiskinan) (Penunjang Kemiskinan) Angka kesakitan Covid-19				100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 11,00 jiwa								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM) Jumlah kematian balita Persentase capaian SPM RS Persentase balita stunting Jumlah kematian warga negara usia produktif Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan ibu hamil (SPM) Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (SPM) Persentase rumah sakit terakreditasi (Permendagri 18/2020) Persentase capaian SPM RS (RSUD Simo) Persentase capaian SPM RS (RSUD Waras Wiris) Persentase capaian SPM RS (RS Pandan Arang) Persentase													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						warga negara lanjut usia yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM) Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (SPM) Persentase Puskesmas terakreditasi Jumlah kematian ibu												
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSPA) Persentase Puskesmas dengan sarana fisik (ruang) sesuai standar Permenkes. Persentase Laboratorium Kesehatan Yang lulus Pemantapan Mutu Eksternal	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		10 Unit	2 Unit 32 persen 100 persen	50.000.000,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Jumlah Penyediaan Fasilitas	Kab. Boyolali, Semua		41 Unit	2 Unit 32 persen	25.000.000,00	DBH Cukai Hasil		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	41 Unit	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Pelayanan Kesehatan (RSPA) Persentase Puskesmas dengan sarana fisik (ruang) sesuai standar Permenkes. Persentase Laboratorium Kesehatan Yang lulus Pemantapan Mutu Eksternal	Kecamatan, Semua Kel/Desa			100 persen		Tembakau (CHT)		Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSPA) Persentase Puskesmas dengan sarana fisik (ruang) sesuai standar Permenkes. Persentase Laboratorium Kesehatan Yang lulus Pemantapan Mutu Eksternal	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		215 Paket	2 Unit 32 persen 100 persen	10.169.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	215 Paket	0,00
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan													
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan	Jumlah Penyediaan Fasilitas	Kab. Boyolali, Semua		1510 Paket	2 Unit 32 persen	92.850.000,00	Dana Transfer Umum-		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan	1510 Paket	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan (RSPA) Persentase Puskesmas dengan sarana fisik (ruang) sesuai standar Permenkes. Persentase Laboratorium Kesehatan Yang lulus Pemantapan Mutu Eksternal	Kecamatan, Semua Kel/Desa			100 persen		Dana Alokasi Umum		Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								51.622.157.000,00					20.000.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		14285 Orang	-	135.825.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14285 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0 Orang	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan	-	- Semua Kecamatan,		0 Orang	-	367.840.000,00	DAK Non Fisik-		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan	0 Orang	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Semua Kel/Desa					BOKKB-BOK		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		67750 Orang	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67750 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0 Orang	-	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0 Orang	-	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		538591 Orang	-	3.390.391.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	538591 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		159308 Orang	-	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	159308 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		230169 Orang	-	20.238.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	230169 Orang	20.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0 Orang	-	991.161.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0 Orang	-	18.850.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamat		12710 Orang	-	1.596.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	12710 Orang	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		an, Semua Kel/Desa							Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		15562 Orang	-	246.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15562 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Dokumen	-	10.420.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen	-	15.112.596.000,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Dokumen	-	42.845.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0 Dokumen	-	1.518.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Dokumen	-	119.276.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 Dokumen	-	11.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	3 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		52 Dokumen	-	6.760.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		9 Dokumen	-	1.704.108.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		20 Dokumen	-	25.000.033.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		9 Dokumen	-	22.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota													
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		67 Unit	-	193.194.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	67 Unit	0,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Laporan	-	64.020.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
														BOKKB-BOK				
I	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)													
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0 Unit	-	250.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	0 Unit	0,00
I	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1263 Orang	-	350.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1263 Orang	0,00
I	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0 Orang	-	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00
I	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan,		5 Orang	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									Semua Kel/Desa					Alokasi Umum				
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								338.250.000,00					80.000.000,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Puskesmas Memiliki WEBSITE	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen	64 persen	338.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	80.000.000,00
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								750.000.000,00					750.000.000,00
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan													
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Persentase Laboratorium Kesehatan Yang lulus Pemantapan Mutu Eksternal	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		84 Unit	100 persen	750.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	84 Unit	750.000.000,00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								1.316.651.000,00					0,00
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.316.651.000,00					0,00
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
						Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi (pendidikan min. D3 Kesehatan)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Prosentase Puskesmas dengan 9 Nakes Strategis Persentase Puskesmas dengan 9	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen	521 Orang	96 persen 100 persen	1.316.651.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	521 Orang	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								Nakes Strategis										
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								534.456.000,00					0,00
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								106.496.000,00					0,00
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)													
						Persentase makanan Minuman yang lolos uji Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perijinan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93 persen 100,00 persen	86 Dokumen	60 persen	106.496.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86 Dokumen	0,00
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								82.375.000,00					0,00
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga													
						Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian Persentase makanan Minuman yang lolos uji	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi	Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi standar dan persyaratan perijinan Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi standar dan persyaratan perijinan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 93 persen	100 Dokumen	70 persen 70 persen	82.375.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi	100 Dokumen	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							oleh Industri Rumah Tangga									oleh Industri Rumah Tangga		
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								56.210.000,00					0,00
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)													
						Persentase makanan Minuman yang lolos uji Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat higiene sanitasi	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93 persen 100,00 persen	1 Dokumen	88 persen	56.210.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	0,00
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								289.375.000,00					0,00
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan													
						Persentase makanan Minuman yang lolos uji Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93 persen 100,00 persen	0 Unit	50 unit	289.375.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	0 Unit	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								104.590.000,00					0,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								104.590.000,00					0,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
						Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan GERMAS Persentase Desa/kelurahan siaga aktif mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan tehnis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 persen 56,18 (150 desa) persen	2 Dokumen	2 dokumen	104.590.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	0,00
TOTAL													**92.665.687.000,00**					**68.679.706.000,00**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**64,551,341,000**					**211,706,523,000**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**12,842,789,000**					**68,563,868,000**
1	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**12,142,543,000**					**67,855,656,000**
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	102 Orang/bulan	12 bulan	9.017.113.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	66,849,480,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Gaji PNS	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen	12 bulan	2.875.536.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	1,006,176,000
1	**2**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**311,000,000**					**281,000,000**
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Paket	12 bulan	3.008.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	3,000,000
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan *Peralatan dan Perlengkapan Kantor*		100 persen	1 Paket	12 bulan	57,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	55,000,000
1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Paket	12 bulan	4,218,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	3,000,000
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bakar	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen		12 bulan	251.202.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	40,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang cetakan/ penggandaan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Paket	12 bulan	150.593.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	30,000,000
1	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Alat TUlis Kantor	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	Paket	12 bulan	83.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	25,000,000
1	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Rapat/Tamu	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	7 Laporan	12 bulan	420.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	25,000,000
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Makan Minum Tamu	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	8 Laporan	12 bulan	157.960000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	100,000,000
1	**2**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**135,000,000**					**50,000,000**
1	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Penyediaan Mebeler aula	Dinas Kesehatan		1 Unit	12 Bulan	135.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
1	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**236,714,000**					**236,714,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman Surat/ Paket	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Laporan	100 persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	5,000,000
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pengiriman Surat/ Paket	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	231,764,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	231,714,000
1	**2**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**142,532,000**					**140,498,000**
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pembayaran biaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	4 Unit	12 bulan	55,498,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	55,498,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Perbaikan mebeler		100 persen	4 Unit	12 bulan	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	15,000,000
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Mesin / Komputer/ Printer/	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	3 Unit	12 bulan	21,751,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	20,000,000
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan / gedung kantor	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Unit	12 bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	50,000,000
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**50,498,659,000**					**141,741,043,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	**2**	**2**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**13,307,690,000**					**26,458,153,000**
1	2	2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah puskesmas yang dilaksanakan pengembangan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	2 Unit	1 puskesmas	14.093.030.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar			425,00 angka	6,650,000,000
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin		*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*	Jumlah puskesmas yang dilaksanakan pengembangan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	215 Paket	1 puskesmas	10.169.100.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian			425,00 angka	5,000,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	2	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang dilaksanakan pengembangan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	900 Paket	1 puskesmas	175,000,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian			425,00 angka	13,135,000
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**36,354,639,000**					**115,194,890,000**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	14496 Orang	100 persen	2,037,105,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			425,00 angka	3,117,600,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	13640 Orang	100 persen	649,807,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			425,00 angka	2,434,884,000
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	13434 Orang	100 persen	183,217,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			425,00 angka	60,000,000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	74137 Orang	100 persen	37,199,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			425,00 angka	25,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	41141 Orang	100 persen	35,000,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			425,00 angka	35,000,000
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	489628 Orang	100 persen	45,153,000	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			425,00 angka	50,000,000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	160481 Orang	100 persen	35,000,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			425,00 angka	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	219209 Orang	100 persen	37,948,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			425,00 angka	50,000,000
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	18531 Orang	100 persen	2,437,308,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			425,00 angka	50,000,000
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	1906 Orang	100 persen	50,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			425,00 angka	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)		425,00 angka	0 Orang	100 persen	1,716,264,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar			425,00 angka	0
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)		425,00 angka	0 Orang	100 persen	291,174,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat			425,00 angka	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	12 Dokumen	100 persen	363,293,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			425,00 angka	580,000,000
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	10 Dokumen	100 persen	753,915,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			425,00 angka	500,000,000
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	16 Dokumen	100 persen	1,500,000,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			425,00 angka	1,500,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	100 Dokumen	100 persen	70,965,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			425,00 angka	80,000,000
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	64 Dokumen	100 persen	125,374,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			425,00 angka	40,000,000
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)		425,00 angka	0 Dokumen	100 persen	246,811,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			425,00 angka	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	48586 Dokumen	100 persen	25,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			425,00 angka	25,000,000,000
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	1 Dokumen	100 persen	183,486,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			425,00 angka	190,000,000
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)		425,00 angka	0 Laporan	100 persen	199,588,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			425,00 angka	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	2	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	1 Unit	100 persen	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			425,00 angka	70,000,000
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ANC (antenatal Care sesuai standar)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	2670 Keluarga	100 persen	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			425,00 angka	0
1	**2**	**2**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**								**36,330,000**					**60,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang memiliki website	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425,00 angka	1 Dokumen	12 puskesmas	36,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			425,00 angka	60,000,000
1	**2**	**2**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**800,000,000**					**28,000,000**
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	jumlah laboratorium Kesehatan Yang Melaksanakan pemantapan Mutu Eksternal	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		42 Unit	1 unit	800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				28,000,000
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**180,000,000**					**135,640,000**
1	**2**	**3**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**180,000,000**					**135,640,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi (pendidikan min. D3 Kesehatan)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Puskesmas dengan 9 Nakes Strategis	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 persen	10 Orang	23 puskesmas	180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi (pendidikan min. D3 Kesehatan)	100,00 persen	135,640,000
1	**2**	**4**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**								**495,529,000**					**768,626,000**
1	**2**	**4**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**								**38,653,000**					**150,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	4	2.01	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase makanan Minuman yang lolos uji	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotik dan toko obat yang dibina	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 persen	75 Sarana	60 unit	38,653,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase makanan Minuman yang lolos uji	91 persen	150,000,000
						Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian				100,00 persen						Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian	100,00 persen	
1	**2**	**4**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**								**406,876,000**					**500,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase makanan Minuman yang lolos uji	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sarana IRTP yang Dibina	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 persen	228 Dokumen	95 unit	406,876,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase makanan Minuman yang lolos uji	91 persen	500,000,000
						Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian				100,00 persen						Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian	100,00 persen	
1	**2**	**4**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**								**50,000,000**					**118,626,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase makanan Minuman yang lolos uji	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Prosentase Tempat Pengolahan Makanan Memenuhi Syarat	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 persen	1 Dokumen	77 persen	50,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase makanan Minuman yang lolos uji	91 persen	118,626,000
						Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian				100,00 persen						Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian	100,00 persen	
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**								**534,364,000**					**497,346,000**
1	**2**	**5**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**134,364,000**					**155,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa/kelurahan siaga aktif mandiri	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki minimal 4 Jenis UKBM	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52, 43 (140 desa) persen	4 Dokumen	120 desa	134,364,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase Desa/kelurahan siaga aktif mandiri	52, 43 (140 desa) persen	155,000,000
						Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan GERMAS				100,00 persen						Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan GERMAS	100,00 persen	
1	**2**	**5**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**400,000,000**					**342,346,000**
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Desa/kelurahan siaga aktif mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Desa/Kelurahan yang menerapkan PHBS	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52, 43 (140 desa) persen	4 Dokumen	267 desa	400,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase Desa/kelurahan siaga aktif mandiri	52, 43 (140 desa) persen	342,346,000
						Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan GERMAS				100,00 persen						Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan GERMAS	100,00 persen	
												TOTAL	**64,551,341,000**					**211,706,523,000**

PUSKESMAS DAN LABKESDA

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPT Puskesmas Ampel (APBD)

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPT Puskesmas Ampel (APBD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Ampel (APBD)								3.017.362.000,00					3.017.362.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								589.765.000,00					589.765.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								589.765.000,00					589.765.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								15.000.000,00					15.000.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								15.000.000,00					15.000.000,00
1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	5 Paket	-	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	15.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								553.841.000,00					553.841.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								22.348.000,00					22.348.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	11 Unit	-	7.348.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	11 Unit	7.348.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
						-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	30 Paket	-	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	30 Paket	15.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								531.493.000,00					531.493.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
						-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	547 Orang	-	51.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	547 Orang	51.625.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	2407 Orang	-	16.650.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2407 Orang	16.650.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
						-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	500 Orang	-	3.900.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	3.900.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
						-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	70 Orang	-	20.149.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70 Orang	20.149.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
						-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	7054 Orang	-	24.750.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7054 Orang	24.750.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
						-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	35 Orang	-	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Andong, Semua Kel/Desa	-	6 Orang	-	3.249.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6 Orang	3.249.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	34 Orang	-	198.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	34 Orang	198.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	69.943.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	69.943.300,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	20.175.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	20.175.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	14.068.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	14.068.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	7 Dokumen	-	59.651.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7 Dokumen	59.652.200,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	1.074.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	1.072.500,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
						-	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	50 Orang	-	750.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	750.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	92.168.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	92.168.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
						-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	2 Paket	-	1.620.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	1.620.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	120.764.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	120.764.000,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
						-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	2.475.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	2.475.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
						-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	10 Orang	-	22.284.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	22.284.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								20.924.000,00					20.924.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								20.924.000,00					20.924.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	6 Dokumen	-	20.924.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6 Dokumen	20.924.000,00
-								-					2.427.597.000,00					2.427.597.000,00
-	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.427.597.000,00					2.427.597.000,00
-	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.427.597.000,00					2.427.597.000,00
-	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.427.597.000,00					2.427.597.000,00
-	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	40 Orang/bulan	-	2.427.597.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	2.427.597.000,00
TOTAL													**3.017.362.000,00**					**3.017.362.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0121 UPT Puskesmas Ampel (BLUD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program /	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Ampel (BLUD)								2.182.783.000,00					2.182.783.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.182.783.000,00					2.182.783.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.182.783.000,00					2.182.783.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2.182.783.000,00					2.182.783.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2.182.783.000,00					2.182.783.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	2.182.783.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	2.182.783.000,00
TOTAL													**2.182.783.000,00**					**2.182.783.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Banyudono 1 (APBD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program /	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Banyudono 1 (APBD)								3.035.153.000,00					3.035.151.527,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.023.133.000,00					1.023.131.527,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.023.133.000,00					1.023.131.527,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								432.167.000,00					432.165.527,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								192.944.000,00					195.500.000,00
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa	-	0 Paket	-	25.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	25.500.000,00
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa	-	0 Paket	-	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	30.000.000,00
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa	-	0 Paket	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	20.000.000,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa	-	0 Paket	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	50.000.000,00
1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa	-	0 Paket	-	47.444.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	50.000.000,00
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa	-	0 Laporan	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	20.000.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								139.223.000,00					136.665.527,00
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa	-	0 Laporan	-	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	3.000.000,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa	-	0 Laporan	-	136.223.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	133.665.527,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100.000.000,00					100.000.000,00
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa	-	0 Unit	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	10.000.000,00
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa	-	0 Unit	-	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	90.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								527.690.000,00					527.690.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								46.750.000,00					46.750.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
						-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa	-	50 Unit	-	6.750.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	50 Unit	6.750.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
						-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa	-	0 Paket	-	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 Paket	40.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								480.940.000,00					480.940.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa		405 Orang	-	58.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	405 Orang	58.800.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa		1836 Orang	-	37.875.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1836 Orang	37.875.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa		1181 Orang	-	6.174.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1181 Orang	6.174.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa		14913 Orang	-	4.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14913 Orang	4.200.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa		1689 Orang	-	9.825.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1689 Orang	9.825.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa		55 Orang	-	8.100.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	55 Orang	8.100.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa		4 Orang	-	24.117.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4 Orang	24.117.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa		12 Dokumen	-	116.350.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	12 Dokumen	116.350.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Kesehatan Gizi Masyarakat									Kesehatan Gizi Masyarakat		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa		12 Dokumen	-	4.599.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	4.599.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa		12 Dokumen	-	2.241.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	2.241.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa		12 Dokumen	-	11.123.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	11.123.000,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa		0 Orang	-	1.950.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	1.950.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa		12 Dokumen	-	68.314.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	68.314.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa		6 Paket	-	4.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	6 Paket	4.800.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa		12 Dokumen	-	116.097.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	116.097.000,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa		12 Laporan	-	1.350.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	1.350.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa		179 Orang	-	4.950.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	179 Orang	4.950.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa		1 Orang	-	75.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	75.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								63.276.000,00					63.276.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								63.276.000,00					63.276.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	63.276.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	63.276.000,00
-					-								2.012.020.000,00					2.012.020.000,00
-	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.012.020.000,00					2.012.020.000,00
-	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.012.020.000,00					2.012.020.000,00
-	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.012.020.000,00					2.012.020.000,00
-	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa	-	0 Orang/bulan	-	2.012.020.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	2.012.020.000,00
TOTAL													**3.035.153.000,00**					**3.035.151.527,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0107 UPT Puskesmas Banyudono 1 (BLUD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program /	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Banyudono 1 (BLUD)								1.095.581.000,00					1.095.581.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.095.581.000,00					1.095.581.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.095.581.000,00					1.095.581.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1.095.581.000,00					1.095.581.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.095.581.000,00					1.095.581.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	1.095.581.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	1.095.581.000,00
TOTAL													**1.095.581.000,00**					**1.095.581.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Banyudono 2 (APBD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Tolok Ukur	Target Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					UPT Puskesmas Banyudono 2 (APBD)								3.264.857.000,00					3.285.906.249,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.264.857.000,00					3.285.906.249,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.264.857.000,00					3.285.906.249,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.539.644.000,00					2.560.693.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.785.644.000,00					1.806.693.000,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	12 Orang/bulan	-	1.785.644.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.806.693.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								442.500.000,00					442.500.000,00
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	12 Paket	-	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	12 Paket	-	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	70.000.000,00
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	12 Paket	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	12 Paket	-	62.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	62.500.000,00
1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	12 Paket	-	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	90.000.000,00
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	12 Laporan	-	170.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	170.000.000,00
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								160.000.000,00					160.000.000,00
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	12 Unit	-	160.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	160.000.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								146.500.000,00					146.500.000,00
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	12 Laporan	-	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.500.000,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	12 Laporan	-	142.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	142.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5.000.000,00					5.000.000,00
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	12 Unit	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	5.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								692.911.000,00					692.910.649,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								177.434.000,00					177.434.249,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono		4 Unit	-	6.382.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4 Unit	6.382.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono		0 Paket	-	171.052.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 Paket	171.052.249,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								515.477.000,00					515.476.400,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
						-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	12 Orang	-	72.900.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	72.900.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
						-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	4 Orang	-	15.375.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4 Orang	15.375.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	12 Orang	-	7.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	7.500.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
						-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	12 Orang	-	47.490.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	47.490.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
						-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	8 Orang	-	11.250.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8 Orang	11.250.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	4 Orang	-	11.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4 Orang	11.400.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	6 Orang	-	4.566.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6 Orang	4.566.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	12 Dokumen	-	88.495.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	88.495.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	4 Dokumen	-	7.740.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	7.740.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	2 Dokumen	-	3.300.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	3.300.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	12 Dokumen	-	21.860.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	21.860.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	2 Dokumen	-	3.258.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	3.258.000,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
						-	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	1 Orang	-	3.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	3.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	12 Dokumen	-	101.767.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	101.766.400,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
						-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	4 Paket	-	1.160.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	4 Paket	1.160.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	12 Dokumen	-	113.816.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	113.816.000,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	1 Laporan	-	600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	600.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								32.302.000,00					32.302.600,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								32.302.000,00					32.302.600,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Banyudono	-	12 Dokumen	-	32.302.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	32.302.600,00
TOTAL													**3.264.857.000,00**					**3.285.906.249,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0091 UPT Puskesmas Banyudono 2 (BLUD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					UPT Puskesmas Banyudono 2 (BLUD)								624.730.000,00					624.730.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								624.730.000,00					624.730.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								624.730.000,00					624.730.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								624.730.000,00					624.730.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								624.730.000,00					624.730.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kel/Desa		12 Dokumen	-	624.730.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	624.730.000,00
TOTAL													**624.730.000,00**					**624.730.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Puskesmas Boyolali 1 (APBD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program Program	Keluaran Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Tolok Ukur	Target Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					UPT Puskesmas Boyolali 1 (APBD)								2.673.777.000,00					2.165.037.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.673.777.000,00					2.165.037.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.673.777.000,00					2.165.037.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.095.802.000,00					2.095.802.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.925.802.000,00					1.925.802.000,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0 Orang/bulan	100 persen	1.925.802.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	1.925.802.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								55.000.000,00					55.000.000,00
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	55.000.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								90.000.000,00					90.000.000,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								25.000.000,00					25.000.000,00
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	12 Unit	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	25.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								542.970.000,00					69.235.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								47.727.000,00					41.335.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Unit	-	6.392.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
						-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	41.335.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 Paket	41.335.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								495.243.000,00					27.900.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
						-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	54.250.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	6.025.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
						-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	10.711.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
						-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	3.936.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
						-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	27.900.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	27.900.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
						-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	4.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	13.148.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	1.299.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	67.299.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	19.428.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	12.958.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	18.529.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	11.397.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
						-	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	1.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	129.897.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
						-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Paket	-	780.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	109.254.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
						-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Laporan	-	700.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
						-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	1.932.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								35.005.000,00					0,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								35.005.000,00					0,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	35.005.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0,00
TOTAL													**2.673.777.000,00**					**2.165.037.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0102 UPT Puskesmas Boyolali 1 (BLUD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Boyolali 1 (BLUD)								1.154.430.000,00					1.154.430.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.154.430.000,00					1.154.430.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.154.430.000,00					1.154.430.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1.154.430.000,00					1.154.430.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.154.430.000,00					1.154.430.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0 Dokumen	-	1.154.430.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	1.154.430.000,00
TOTAL													**1.154.430.000,00**					**1.154.430.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT Puskesmas Boyolali 2 (APBD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Boyolali 2 (APBD)								2.978.889.000,00					3.111.930.262,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.978.889.000,00					3.111.930.262,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.978.889.000,00					3.111.930.262,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.354.191.000,00					2.590.122.422,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.866.100.000,00					2.027.031.000,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	28 Orang/bulan	-	1.866.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	2.027.031.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								250.000.000,00					325.000.000,00
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	95.000.000,00
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	65.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	65.000.000,00
1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	80.000.000,00
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.000.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								160.000.000,00					160.000.000,00
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	156.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	156.000.000,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								78.091.000,00					78.091.422,00
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Unit	-	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	8.000.000,00
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Unit	-	70.091.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	70.091.422,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								585.711.000,00					482.822.340,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								106.467.000,00					106.467.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	15 Unit	-	6.467.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	15 Unit	6.467.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
						-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	100.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								479.244.000,00					376.355.340,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
						-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	66.675.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	66.675.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	66.675.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	66.675.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
						-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	39.675.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	39.675.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
						-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	4.599.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	4.599.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
						-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	19.264.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	19.264.050,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
						-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	20.175.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	20.175.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
						-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	1.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	1.500.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	10.674.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	10.674.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	4.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	4.500.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	51.362.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	51.362.900,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	7.601.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	7.602.200,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	9.599.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	9.599.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	10.109.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	10.108.950,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	3.641.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	364.040,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
						-	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	300.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	300.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	67.508.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	67.508.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Paket	-	5.930.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	5.930.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	110.682.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	11.068.200,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
						-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	2.250.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	2.250.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	42.750.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	42.750.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
						-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	450.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	450.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								38.987.000,00					38.985.500,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								38.987.000,00					38.985.500,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	38.987.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	38.985.500,00
TOTAL													**3.045.564.000,00**					**3.178.605.262,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0103 UPT Puskesmas Boyolali 2 (BLUD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Boyolali 2 (BLUD)								881.893.000,00					881.893.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								881.893.000,00					881.893.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								881.893.000,00					881.893.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								881.893.000,00					881.893.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								881.893.000,00					881.893.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	881.893.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	881.893.000,00
TOTAL													**881.893.000,00**					**881.893.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPT Puskesmas Cepogo (APBD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Cepogo (APBD)								3.175.381.000,00					3.175.381.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								659.256.000,00					659.256.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								659.256.000,00					659.256.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								30.000.000,00					30.000.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								30.000.000,00					30.000.000,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	30.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								595.339.000,00					595.339.150,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								7.348.000,00					7.348.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	7.348.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	5 Unit	7.348.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								587.991.000,00					587.991.150,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa		397 Orang	-	88.140.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	397 Orang	88.140.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa		366 Orang	-	8.100.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	366 Orang	8.100.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa		716 Orang	-	11.415.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	716 Orang	11.415.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa		2875 Orang	-	5.250.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2875 Orang	5.250.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa		534 Orang	-	5.860.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	534 Orang	5.860.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	-	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa		12 Orang	-	4.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	12 Orang	4.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Berat Sesuai Standar									Berat Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa		24 Orang	-	10.215.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24 Orang	10.215.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa		6 Dokumen	-	103.068.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	103.068.200,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa		1 Dokumen	-	6.577.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	6.577.200,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa		2 Dokumen	-	6.750.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	6.750.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa		1 Dokumen	-	83.912.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	83.911.900,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa		2 Dokumen	-	12.714.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	12.714.000,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa		41 Orang	-	900.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	41 Orang	900.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
														Khusus Non Fisik				
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa		10 Dokumen	-	83.503.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	83.502.850,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa		50 Paket	-	19.740.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	50 Paket	19.740.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa		4 Dokumen	-	129.097.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	129.097.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa		12 Laporan	-	1.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	1.500.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa		24 Orang	-	4.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	24 Orang	4.500.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa		903 Orang	-	2.250.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	903 Orang	2.250.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								33.917.000,00					33.916.850,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								33.917.000,00					33.916.850,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	33.917.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	33.916.850,00
-					-								2.516.125.000,00					2.516.125.000,00
-	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.516.125.000,00					2.516.125.000,00
-	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.516.125.000,00					2.516.125.000,00
-	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.516.125.000,00					2.516.125.000,00
-	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kel/Desa	-	41 Orang/bulan	100 persen	2.516.125.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	2.516.125.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur / Target	
								TOTAL	**3.175.381.000,00**				**3.175.381.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0122 UPT Puskesmas Cepogo (BLUD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur / Target	
					UPT Puskesmas Cepogo (BLUD)								2.434.333.000,00				2.434.333.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.434.333.000,00				2.434.333.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.434.333.000,00				2.434.333.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2.434.333.000,00				2.434.333.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2.434.333.000,00				2.434.333.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Dokumen	-	2.434.333.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	2.434.333.000,00
												TOTAL	**2.434.333.000,00**				**2.434.333.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPT Puskesmas Gladagsari (APBD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Gladagsari (APBD)								2.608.371.000,00					2.691.440.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.608.371.000,00					2.691.440.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.608.371.000,00					2.691.440.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.990.579.000,00					2.073.648.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.970.579.000,00					2.053.648.000,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	34 Orang/bulan	-	1.970.579.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	2.053.648.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								0,00					0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	0,00	-		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	0,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0,00					0,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	0 Laporan	-	0,00	-		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								20.000.000,00					20.000.000,00
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	12 Unit	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	20.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								588.402.000,00					588.402.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								39.700.000,00					39.700.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	12 Unit	-	6.470.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12 Unit	6.470.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
						-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	6 Paket	-	33.230.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	6 Paket	33.230.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								548.702.000,00					548.702.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
						-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	12 Orang	-	54.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	54.600.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	12 Orang	-	24.750.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	24.750.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
						-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	12 Orang	-	19.185.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	19.185.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
						-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	12 Orang	-	40.900.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	40.900.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
						-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	12 Orang	-	19.860.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	19.860.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
						-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	12 Orang	-	22.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 Orang	22.500.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	12 Orang	-	28.875.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	28.875.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	102.890.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	102.890.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	1.245.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	1.245.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	5.250.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	5.250.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	10.620.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	10.620.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	5.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	5.400.000,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	12 Orang	-	1.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	1.500.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	85.698.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	85.698.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
						-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	1.050.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	1.050.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	121.979.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	121.979.000,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	2.250.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	2.250.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
						-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	12 Orang	-	150.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	12 Orang	150.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								29.390.000,00					29.390.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								29.390.000,00					29.390.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kab. Boyolali, Gladagsari, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	29.390.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	29.390.000,00
TOTAL													**2.608.371.000,00**					**2.691.440.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0124 UPT Puskesmas Gladagsari (BLUD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Gladagsari (BLUD)								2.091.288.000,00					2.091.288.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.091.288.000,00					2.091.288.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.091.288.000,00					2.091.288.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2.091.288.000,00					2.091.288.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2.091.288.000,00					2.091.288.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	2.091.288.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	2.091.288.000,00
TOTAL													**2.091.288.000,00**					**2.091.288.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPT Puskesmas Juwangi (APBD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Juwangi (APBD)								2.869.300.000,00					2.869.300.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.869.300.000,00					2.869.300.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.869.300.000,00					2.869.300.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.255.779.000,00					2.255.779.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.215.779.000,00					2.215.779.000,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	40 Orang/bulan	12 Dokumen	2.215.779.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	2.215.779.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								25.000.000,00					25.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								15.000.000,00					15.000.000,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	15.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								586.401.000,00					586.401.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								7.413.000,00					7.413.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	7.413.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	7.413.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								578.988.000,00					578.988.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
						-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	61.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	61.200.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
						-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	18.450.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	18.450.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	17.796.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	17.796.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
						-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	15.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	15.200.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
						-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	27.875.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	27.875.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	3.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	3.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	5.398.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	5.398.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	-	12 Orang	-	2.223.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	2.223.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	106.569.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	106.569.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	4.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	4.200.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	14.299.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	14.299.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	9.940.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	9.940.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	7.248.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	7.248.000,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
						-	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	1.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1.500.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	138.255.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	138.255.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
						-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	870.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	870.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	142.715.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	142.715.000,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
						-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	2.250.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	2.250.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								27.120.000,00					27.120.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								27.120.000,00					27.120.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	27.120.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	27.120.000,00
												TOTAL	**2.869.300.000,00**					**2.869.300.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0120 UPT Puskesmas Juwangi (BLUD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Juwangi (BLUD)								1.885.816.000,00					1.885.816.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.885.816.000,00					1.885.816.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.885.816.000,00					1.885.816.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1.885.816.000,00					1.885.816.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.885.816.000,00					1.885.816.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						Kabupaten Sehat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	9 tatanan (wistara) status	12 Dokumen	-	1.885.816.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.885.816.000,00
TOTAL													**1.885.816.000,00**					**1.885.816.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Karanggede (APBD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Karanggede (APBD)								3.569.767.000,00					3.569.767.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								884.049.000,00					884.049.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								884.049.000,00					884.049.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								15.000.000,00					15.000.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								15.000.000,00					15.000.000,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Karanggede, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	15.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								837.641.000,00					837.641.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								22.566.000,00					22.566.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Karanggede, Semua Kel/Desa	-	11 Unit	-	7.566.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	11 Unit	7.566.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
						-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	Kab. Boyolali, Karanggede, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	15.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								815.075.000,00					815.075.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
						-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Karanggede, Semua Kel/Desa	-	547 Orang	-	102.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	547 Orang	102.800.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Karanggede, Semua Kel/Desa	-	2407 Orang	-	13.950.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2407 Orang	13.950.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
						-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Karanggede, Semua Kel/Desa	-	500 Orang	-	27.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	27.600.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
						-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Karanggede, Semua Kel/Desa	-	70 Orang	-	16.638.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70 Orang	16.638.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
						-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Karanggede, Semua Kel/Desa	-	7054 Orang	-	19.855.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7054 Orang	19.855.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
						-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Karanggede, Semua Kel/Desa	-	35 Orang	-	13.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	13.800.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Karanggede, Semua Kel/Desa	-	6 Orang	-	9.999.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6 Orang	9.999.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Boyolali, Karanggede, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	172.770.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	172.770.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Boyolali, Karanggede, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	229.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	229.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Boyolali, Karanggede, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	11.425.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	11.425.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Karanggede, Semua Kel/Desa	-	7 Dokumen	-	39.900.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7 Dokumen	39.900.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Karanggede, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	14.250.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	14.250.000,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Karanggede, Semua Kel/Desa	-	50 Orang	-	11.550.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	11.550.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Boyolali, Karanggede, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	190.513.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	190.513.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
						-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	Kab. Boyolali, Karanggede, Semua Kel/Desa	-	2 Paket	-	870.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	870.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Karanggede, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	168.101.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	168.101.000,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kab. Boyolali, Karanggede, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	675.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	675.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
						-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Orang	-	150.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	150.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								31.408.000,00					31.408.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								31.408.000,00					31.408.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kab. Boyolali, Karanggede, Semua Kel/Desa	-	6 Dokumen	-	31.408.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6 Dokumen	31.408.000,00
-					-								2.685.718.000,00					2.685.718.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
-	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.685.718.000,00					2.685.718.000,00
-	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.685.718.000,00					2.685.718.000,00
-	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.685.718.000,00					2.685.718.000,00
-	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Boyolali, Karanggede, Semua Kel/Desa	-	12 Orang/bulan	-	2.685.718.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	2.685.718.000,00
TOTAL													**3.569.767.000,00**					**3.569.767.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0118 UPT Puskesmas Karanggede (BLUD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Karanggede (BLUD)								2.876.848.000,00					2.876.848.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.876.848.000,00					2.876.848.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.876.848.000,00					2.876.848.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2.876.848.000,00					2.876.848.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2.876.848.000,00					2.876.848.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	2.876.848.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	2.876.848.000,00
TOTAL													**2.876.848.000,00**					**2.876.848.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPT Puskesmas Kemusu (APBD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Kemusu (APBD)								2.604.381.000,00					2.604.381.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								614.079.000,00					614.079.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								614.079.000,00					614.079.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								596.871.000,00					596.871.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								47.290.000,00					47.290.000,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas													
						-	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	1 Unit	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	0,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
						-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Kemusu, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	7.290.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	7.290.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	40.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								549.581.000,00					549.581.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
						-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Kemusu, Klewor	-	1 Orang	-	70.385.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	70.385.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
						-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Kemusu, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	22.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	22.200.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Kemusu, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	22.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	22.200.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
						-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Kemusu, Klewor	-	0 Orang	-	31.782.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	31.782.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
						-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Kemusu, Klewor	-	0 Orang	-	37.050.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	37.050.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
						-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Kemusu, Kemusu	-	0 Orang	-	11.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	11.600.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
						-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Kemusu, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	5.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	5.850.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Kemusu, Klewor	-	0 Orang	-	35.150.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	35.150.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Kemusu, Klewor	-	0 Orang	-	1.983.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	1.983.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Boyolali, Kemusu, Klewor	-	1 Dokumen	-	89.322.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	89.322.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Boyolali, Kemusu, Klewor	-	0 Dokumen	-	13.936.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	13.936.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Kemusu, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	77.891.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	77.891.000,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
						-	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Kemusu, Klewor	-	0 Orang	-	4.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	4.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	28.140.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	28.140.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
						-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	Kab. Boyolali, Kemusu, Klewor	-	0 Paket	-	870.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	870.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Kemusu, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	117.722.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	117.722.000,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kab. Boyolali, Kemusu, Klewor	-	0 Laporan	-	1.125.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	1.125.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
						-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Boyolali, Kemusu, Klewor	-	0 Orang	-	75.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	75.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								17.208.000,00					17.208.000,00
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								17.208.000,00					17.208.000,00
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	17.208.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	17.208.000,00
-					-								1.990.302.000,00					1.990.302.000,00
-	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.990.302.000,00					1.990.302.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
-	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.990.302.000,00					1.990.302.000,00
-	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.990.302.000,00					1.990.302.000,00
-	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Orang/bulan	-	1.990.302.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	1.990.302.000,00
TOTAL													**2.626.581.000,00**					**2.626.581.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0119 UPT Puskesmas Kemusu (BLUD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Kemusu (BLUD)								1.664.580.000,00					1.664.580.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.664.580.000,00					1.664.580.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.664.580.000,00					1.664.580.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1.664.580.000,00					1.664.580.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.664.580.000,00					1.664.580.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1.664.580.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.664.580.000,00
TOTAL													**1.664.580.000,00**					**1.664.580.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Klego 1 (APBD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Klego 1 (APBD)								2.475.334.000,00					2.437.437.347,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								579.042.000,00					574.042.347,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								579.042.000,00					574.042.347,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								83.975.000,00					83.975.347,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								51.975.000,00					51.975.347,00
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00
1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	16.975.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	16.975.347,00
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								22.000.000,00					22.000.000,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	22.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								10.000.000,00					10.000.000,00
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	10.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								470.509.000,00					465.509.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								10.398.000,00					10.398.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
						-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	8 Unit	-	7.398.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	8 Unit	7.398.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	3.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								460.111.000,00					455.111.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
						-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	332 Orang	-	42.465.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	332 Orang	42.465.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
						-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	332 Orang	-	3.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	332 Orang	3.100.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
														BOKKB-BOK				
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
						-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	332 Orang	-	9.624.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	332 Orang	9.624.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
						-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	332 Orang	-	32.511.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	332 Orang	32.511.850,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	1564 Orang	-	47.275.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1564 Orang	42.275.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
						-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	11 Orang	-	9.450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	11 Orang	9.450.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	11 Orang	-	6.849.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11 Orang	6.849.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	64.771.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	64.771.450,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	3.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.600.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	4.252.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	4.249.650,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
														BOKKB-BOK				
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	17.318.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	17.318.350,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	7.898.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	7.898.000,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	50 Orang	-	2.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	2.100.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	97.333.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	97.333.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
						-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	50 Paket	-	3.141.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	50 Paket	3.141.700,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	101.824.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	101.824.000,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
						-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	6.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	6.300.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
						-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	2 Orang	-	300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2 Orang	300.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
														BOKKB-BOK				
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								24.558.000,00					24.558.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								24.558.000,00					24.558.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	24.558.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	24.558.000,00
-					-								1.896.292.000,00					1.863.395.000,00
-	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.896.292.000,00					1.863.395.000,00
-	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.896.292.000,00					1.863.395.000,00
-	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.896.292.000,00					1.863.395.000,00
-	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	32 Orang/bulan	-	1.896.292.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	1.863.395.000,00
TOTAL													**2.475.334.000,00**					**2.437.437.347,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0114 UPT Puskesmas Klego 1 (BLUD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Klego 1 (BLUD)								1.202.192.000,00					1.469.434.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.202.192.000,00					1.469.434.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.202.192.000,00					1.469.434.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1.202.192.000,00					1.469.434.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.202.192.000,00					1.469.434.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	1.202.192.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.469.434.000,00
TOTAL													**1.202.192.000,00**					**1.469.434.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Klego 2 (APBD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Klego 2 (APBD)								2.598.459.000,00					2.598.459.276,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								993.224.000,00					993.224.276,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								993.224.000,00					993.224.276,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								371.000.000,00					371.000.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								221.000.000,00					221.000.000,00
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	21.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21.000.000,00
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	14.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.000.000,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00
1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	41.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	41.000.000,00
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.000.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								120.000.000,00					120.000.000,00
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	117.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	117.000.000,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								30.000.000,00					30.000.000,00
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5.000.000,00
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	25 Unit	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								589.014.000,00					589.014.276,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								93.741.000,00					93.741.276,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
						-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	8 Unit	-	6.395.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	8 Unit	6.395.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
						-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	87.346.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	87.346.276,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								495.273.000,00					495.273.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	328 Orang	-	51.350.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	328 Orang	51.350.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
						-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	2650 Orang	-	26.550.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2650 Orang	26.550.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
						-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	5435 Orang	-	4.650.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5435 Orang	4.650.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
						-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	11316 Orang	-	32.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11316 Orang	32.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
						-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	4273 Orang	-	38.700.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4273 Orang	38.700.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
						-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	44 Orang	-	1.800.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	44 Orang	1.800.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	306 Orang	-	2.100.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	306 Orang	2.100.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	104.230.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	104.230.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	7.620.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	7.620.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	6.840.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	6.840.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	44.920.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	44.920.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	4.515.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	4.515.000,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
						-	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	10 Orang	-	1.800.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	1.800.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	54.505.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	54.505.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	4 Paket	-	4.275.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	4 Paket	4.275.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	109.013.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	109.013.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
						-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	2 Orang	-	405.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2 Orang	405.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								33.210.000,00					33.210.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								33.210.000,00					33.210.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	33.210.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	33.210.000,00
-					-								1.605.235.000,00					1.605.235.000,00
-	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.605.235.000,00					1.605.235.000,00
-	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.605.235.000,00					1.605.235.000,00
-	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.605.235.000,00					1.605.235.000,00
-	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	28 Orang/bulan	-	1.605.235.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	1.605.235.000,00
TOTAL													**2.598.459.000,00**					**2.598.459.276,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0115 UPT Puskesmas Klego 2 (BLUD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program /	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Klego 2 (BLUD)								977.222.000,00					977.222.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								977.222.000,00					977.222.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								977.222.000,00					977.222.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								977.222.000,00					977.222.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								977.222.000,00					977.222.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Klego, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	977.222.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	977.222.000,00
TOTAL													**977.222.000,00**					**977.222.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Mojosongo (APBD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					UPT Puskesmas Mojosongo (APBD)								3.072.575.000,00					3.163.242.700,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.072.575.000,00					3.163.242.700,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.072.575.000,00					3.163.242.700,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.360.912.000,00					2.451.580.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.320.912.000,00					2.411.580.000,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	12 Orang/bulan	-	2.320.912.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	2.411.580.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								35.000.000,00					35.000.000,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	2 Paket	-	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	35.000.000,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5.000.000,00					5.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	5.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								681.413.000,00					681.412.700,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								6.432.000,00					6.432.000,00
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi													
						-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	21 Unit	-	6.432.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	21 Unit	6.432.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								674.981.000,00					674.980.700,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	3217 Orang	-	91.075.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3217 Orang	91.075.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
						-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	39 Orang	-	4.875.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	39 Orang	4.875.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
						-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	123 Orang	-	15.375.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	123 Orang	15.375.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
						-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	1238 Orang	-	44.185.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1238 Orang	44.185.100,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
						-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	50 Orang	-	8.825.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	8.825.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
						-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	20 Orang	-	9.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	9.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	80 Orang	-	36.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	80 Orang	36.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	9 Orang	-	675.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9 Orang	675.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	7 Dokumen	-	115.607.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	115.606.600,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	10.499.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	10.498.700,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	16.899.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	16.899.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	20.391.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	20.390.800,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	10.298.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	10.298.000,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
						-	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	2 Orang	-	150.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2 Orang	150.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	17 Dokumen	-	114.591.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17 Dokumen	114.591.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	6 Paket	-	597.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	6 Paket	597.500,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	17 Dokumen	-	143.989.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen	143.989.000,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
						-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	3 Laporan	-	675.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3 Laporan	675.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	13 Orang	-	31.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13 Orang	31.200.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
						-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	75.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	75.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								30.250.000,00					30.250.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								30.250.000,00					30.250.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kel/Desa	-	5 Dokumen	-	30.250.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	30.250.000,00
TOTAL													**3.072.575.000,00**					**3.163.242.700,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0105 UPT Puskesmas Mojosongo (BLUD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Mojosongo (BLUD)								1.505.568.000,00					1.505.568.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.505.568.000,00					1.505.568.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.505.568.000,00					1.505.568.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1.505.568.000,00					1.505.568.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.505.568.000,00					1.505.568.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						undefined operasional pelayanan kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	undefined undefined 1 tahun	0 Dokumen	-	1.505.568.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	1.505.568.000,00
TOTAL													**1.505.568.000,00**					**1.505.568.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Musuk (APBD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Musuk (APBD)								2.784.403.000,00					2.784.403.104,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								923.210.000,00					923.210.104,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								923.210.000,00					923.210.104,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								291.842.000,00					291.842.404,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								165.000.000,00					165.000.000,00
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00
1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	30.000.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								80.842.000,00					80.842.404,00
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	76.842.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	76.842.404,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								46.000.000,00					46.000.000,00
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1.000.000,00
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Unit	-	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	45.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								602.368.000,00					602.367.700,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								21.494.000,00					21.494.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
						-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	15 Unit	-	6.494.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	15 Unit	6.494.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	15.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								580.874.000,00					580.873.700,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
						-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Orang	-	65.525.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	65.525.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
						-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Orang	-	28.050.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	28.050.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Orang	-	3.549.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	3.549.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
						-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1000 Orang	-	26.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	26.500.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
						-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1000 Orang	-	27.825.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	27.825.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Orang	-	12.375.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	12.375.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Orang	-	16.074.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	16.074.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	83.025.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	83.025.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	10.550.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	10.550.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	17.198.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	17.198.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	31.416.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	31.415.800,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	5.301.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	5.300.650,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1000 Orang	-	1.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1000 Orang	1.800.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	53.348.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	53.348.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
						-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	4.732.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	4.732.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	125.444.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	125.444.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
						-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	150.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	150.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
						-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Orang	-	3.375.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50 Orang	3.375.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
						-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Orang	-	64.637.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	50 Orang	64.637.250,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								29.000.000,00					29.000.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								29.000.000,00					29.000.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	29.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	29.000.000,00
-					-								1.861.193.000,00					1.861.193.000,00
-	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.861.193.000,00					1.861.193.000,00
-	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.861.193.000,00					1.861.193.000,00
-	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.861.193.000,00					1.861.193.000,00
-	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	31 Orang/bulan	-	1.861.193.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	1.861.193.000,00
TOTAL													**2.784.403.000,00**					**2.784.403.104,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0104 UPT Puskesmas Musuk (BLUD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program /	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Musuk (BLUD)								1.158.576.000,00					1.158.576.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.158.576.000,00					1.158.576.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.158.576.000,00					1.158.576.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1.158.576.000,00					1.158.576.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.158.576.000,00					1.158.576.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	1.158.576.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.158.576.000,00
TOTAL													**1.158.576.000,00**					**1.158.576.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Ngemplak (APBD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program /	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Ngemplak (APBD)								3.526.373.000,00					4.062.079.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.526.373.000,00					4.062.079.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.526.373.000,00					4.062.079.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.777.983.000,00					3.313.689.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.747.983.000,00					3.283.689.000,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	12 Orang/bulan	-	2.747.983.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	3.283.689.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								30.000.000,00					30.000.000,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								721.188.000,00					721.188.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								7.358.000,00					7.358.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
						-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	13 Unit	-	7.358.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	13 Unit	7.358.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								713.830.000,00					713.830.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
						-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	4 Orang	-	64.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4 Orang	64.800.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
						-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	170 Orang	-	13.050.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	170 Orang	13.050.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	48 Orang	-	3.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48 Orang	3.600.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
						-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	174 Orang	-	66.890.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	174 Orang	66.890.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
						-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	456 Orang	-	12.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	456 Orang	12.600.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	96 Orang	-	7.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	96 Orang	7.200.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	20 Orang	-	5.100.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	5.100.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	124 Orang	-	9.300.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	124 Orang	9.300.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	226.615.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	226.615.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	3.900.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	3.900.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	7.140.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	7.140.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	8.700.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	8.700.000,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	72 Orang	-	5.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	72 Orang	5.400.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	5 Dokumen	-	126.585.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dokumen	126.585.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
						-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	18 Paket	-	870.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	18 Paket	870.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	150.505.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	150.505.000,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	1.575.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1.575.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								27.202.000,00					27.202.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								27.202.000,00					27.202.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	27.202.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	27.202.000,00
TOTAL													**3.526.373.000,00**					**4.062.079.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0111 UPT Puskesmas Ngemplak (BLUD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					UPT Puskesmas Ngemplak (BLUD)								2.962.609.000,00					3.131.485.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.962.609.000,00					3.131.485.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.962.609.000,00					3.131.485.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2.962.609.000,00					3.131.485.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2.962.609.000,00					3.131.485.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	2.962.609.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	3.131.485.000,00
TOTAL													**2.962.609.000,00**					**3.131.485.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Nogosari (APBD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Tolok Ukur	Target Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					UPT Puskesmas Nogosari (APBD)								3.303.348.000,00					3.468.268.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.303.348.000,00					3.468.268.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.303.348.000,00					3.468.268.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.465.324.000,00					2.630.244.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.435.324.000,00					2.600.244.000,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa		1 Orang/bulan	100 persen	2.435.324.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan	2.600.244.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								14.000.000,00					14.000.000,00
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8.000.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3.000.000,00					3.000.000,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								13.000.000,00					13.000.000,00
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	13.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	13.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								808.477.000,00					808.476.750,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								7.217.000,00					7.217.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa		1 Unit	32 persen 100 persen 2 Unit	7.217.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	7.217.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								801.260.000,00					801.259.750,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa		1 Orang	-	91.475.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	91.475.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Orang	-	25.350.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	25.350.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa		1 Orang	-	25.398.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	25.398.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa		1 Orang	-	36.650.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	36.650.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa		1 Orang	-	15.725.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	15.725.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa		1 Orang	-	8.775.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	1 Orang	8.775.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Berat Sesuai Standar									Berat Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa		1 Orang	-	17.100.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	17.100.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa		1 Dokumen	-	106.137.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	106.136.850,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa		1 Dokumen	-	7.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	7.200.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa		1 Dokumen	-	13.948.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	13.948.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa		1 Dokumen	-	16.298.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	16.298.250,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen	-	7.248.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	7.248.000,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa		1 Orang	-	9.750.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	9.750.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa			-	224.846.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	224.846.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa		1 Paket	-	4.921.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	4.920.650,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa		1 Dokumen	-	167.714.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	167.714.000,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa		1 Laporan	-	8.775.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	8.775.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa		1 Orang	-	13.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	13.500.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa		1 Orang	-	450.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	450.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								29.547.000,00					29.547.250,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								29.547.000,00					29.547.250,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	29.547.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	29.547.250,00
TOTAL													**3.303.348.000,00**					**3.468.268.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0113 UPT Puskesmas Nogosari (BLUD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Nogosari (BLUD)								2.708.324.000,00					2.708.324.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.708.324.000,00					2.708.324.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.708.324.000,00					2.708.324.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2.708.324.000,00					2.708.324.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2.708.324.000,00					2.708.324.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa		0 Dokumen	-	2.708.324.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	2.708.324.000,00
TOTAL													**2.708.324.000,00**					**2.708.324.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Sambi (APBD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Sambi (APBD)								3.190.394.000,00					3.216.434.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.190.394.000,00					3.216.434.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.190.394.000,00					3.216.434.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.687.935.000,00					2.713.975.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.647.935.000,00					2.673.975.000,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Boyolali, Sambi, Semua Kel/Desa	-	0 Orang/bulan	-	2.647.935.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	2.673.975.000,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								40.000.000,00					40.000.000,00
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Boyolali, Sambi, Semua Kel/Desa	-	12 Unit	-	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	40.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								455.834.000,00					455.834.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								6.469.000,00					6.469.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
						-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Sambi, Semua Kel/Desa	-	12 Unit	-	6.469.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12 Unit	6.469.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								449.365.000,00					449.365.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
						-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Sambi, Semua Kel/Desa	-	12 Orang	-	75.675.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	75.675.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Sambi, Semua Kel/Desa	-	12 Orang	-	6.450.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	6.450.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
						-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Sambi, Semua Kel/Desa	-	12 Orang	-	9.300.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	9.300.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
						-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Sambi, Semua Kel/Desa	-	12 Orang	-	22.650.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	22.650.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
						-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Sambi, Semua Kel/Desa	-	12 Orang	-	5.850.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	5.850.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
						-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Sambi, Semua Kel/Desa	-	12 Orang	-	4.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 Orang	4.800.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Sambi, Semua Kel/Desa	-	12 Orang	-	18.900.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	18.900.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Boyolali, Sambi, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	57.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	57.200.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Boyolali, Sambi, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	18.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	18.400.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Boyolali, Sambi, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	4.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	4.200.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Sambi, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	20.054.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	20.054.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Sambi, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	12.900.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12.900.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Boyolali, Sambi, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	87.525.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	87.525.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
						-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	Kab. Boyolali, Sambi, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	450.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	450.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Sambi, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	103.511.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	103.511.000,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
						-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kab. Boyolali, Sambi, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	1.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	1.200.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
						-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Boyolali, Sambi, Semua Kel/Desa	-	12 Orang	-	300.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	12 Orang	300.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								46.625.000,00					46.625.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								46.625.000,00					46.625.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kab. Boyolali, Sambi, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	46.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	46.625.000,00
TOTAL													**3.190.394.000,00**					**3.216.434.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0110 UPT Puskesmas Sambi (BLUD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					UPT Puskesmas Sambi (BLUD)								1.737.440.000,00					1.737.440.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.737.440.000,00					1.737.440.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.737.440.000,00					1.737.440.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1.737.440.000,00					1.737.440.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.737.440.000,00					1.737.440.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Sambi, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	1.737.440.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.737.440.000,00
TOTAL													**1.737.440.000,00**					**1.737.440.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Sawit (APBD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					UPT Puskesmas Sawit (APBD)								3.380.594.000,00					3.486.496.179,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.380.594.000,00					3.486.496.179,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.380.594.000,00					3.486.496.179,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.823.629.000,00					2.929.531.179,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.769.859.000,00					2.875.761.000,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	41 Orang/bulan	-	2.769.859.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	2.875.761.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								53.770.000,00					53.770.179,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Laporan	-	53.770.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	53.770.179,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								556.965.000,00					556.965.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								7.340.000,00					7.340.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
						-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Sawit, Jenengan Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kel/Desa	-	0 Unit	-	7.340.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	7.340.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								549.625.000,00					549.625.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
						-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Sawit, Jenengan	-	0 Orang	-	183.571.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	183.571.600,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Sawit, Jenengan Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	134.536.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	134.536.600,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Sawit, Jenengan Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	117.236.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	117.234.800,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kel/Desa Kab. Boyolali, Sawit, Jenengan	-	0 Dokumen	-	114.282.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	114.282.000,00
TOTAL													**3.380.594.000,00**					**3.486.496.179,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0109 UPT Puskesmas Sawit (BLUD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Sawit (BLUD)								1.941.573.000,00					1.941.573.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.941.573.000,00					1.941.573.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.941.573.000,00					1.941.573.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1.941.573.000,00					1.941.573.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.941.573.000,00					1.941.573.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	1.941.573.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	1.941.573.000,00
TOTAL													**1.941.573.000,00**					**1.941.573.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPT Puskesmas Selo (APBD)																		
					UPT Puskesmas Selo (APBD)								3.031.481.000,00					3.147.503.800,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.031.481.000,00					3.147.503.800,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.031.481.000,00					3.147.503.800,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.425.832.000,00					2.541.852.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.372.237.000,00					2.488.257.000,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa		40 Orang/bulan	40 orang/bulan	2.372.237.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	2.488.257.000,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								53.595.000,00					53.595.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	53.595.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	53.595.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								557.379.000,00					557.381.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								7.224.000,00					7.224.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
						-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	-	10 Unit	-	7.224.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit	7.224.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								550.155.000,00					550.157.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	40 Orang	12 Bulan	44.075.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	44.075.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	30 Orang	12 Bulan	11.125.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	11.125.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	30 Orang	12 Bulan	23.550.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	23.550.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	30 Orang	12 Bulan	4.149.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	4.149.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Orang	12 Bulan	38.625.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	38.625.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	30 Orang	12 Bulan	12.575.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	12.575.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	30 Orang	12 Bulan	5.850.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	5.850.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	30 Orang	12 Bulan	13.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	13.500.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	30 Orang	12 Bulan	12.399.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30 Orang	12.399.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	30 Orang	12 Bulan	1.899.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30 Orang	1.899.000,00
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	225.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	225.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	95.421.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	95.421.100,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	11.877.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	11.877.900,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	9.797.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	9.797.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	44.115.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	44.115.800,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	8.597.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8.597.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	8.597.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8.597.000,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	30 Orang	12 Bulan	5.700.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	30 Orang	5.700.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	67.348.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	67.348.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Paket	12 Bulan	2.177.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	2.177.200,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	125.127.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	125.127.000,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Laporan	12 Bulan	675.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	675.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	30 Orang	12 Bulan	8.400.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30 Orang	8.400.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	30 Orang	12 Bulan	2.949.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	30 Orang	2.949.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								48.270.000,00					48.270.800,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								48.270.000,00					48.270.800,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	48.270.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	48.270.800,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								TOTAL	**3.040.078.000,00**					**3.156.100.800,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0123 UPT Puskesmas Selo (BLUD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Selo (BLUD)								1.596.273.000,00					1.596.273.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.596.273.000,00					1.596.273.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.596.273.000,00					1.596.273.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1.596.273.000,00					1.596.273.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.596.273.000,00					1.596.273.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas Terpenuhi	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	1.596.273.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.596.273.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								TOTAL	**1.596.273.000,00**					**1.596.273.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Simo (APBD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Simo (APBD)								2.777.496.000,00					2.940.570.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.777.496.000,00					2.940.570.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.777.496.000,00					2.940.570.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.195.970.000,00					2.380.712.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.177.638.000,00					2.360.712.000,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	0 Orang/bulan	-	2.177.638.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	2.360.712.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								18.332.000,00					20.000.000,00
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	8.332.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								565.770.000,00					544.103.800,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								28.441.000,00					6.773.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
						-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	6.773.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	6.773.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	21.668.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	0,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								537.329.000,00					537.330.800,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
						-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	77.835.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	77.835.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
						-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	13.850.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	13.850.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	13.560.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	13.560.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
						-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	37.965.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	37.965.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
						-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	17.610.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	17.610.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	4.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	4.500.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	13.350.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	13.350.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	67.890.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	67.890.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	7.725.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	7.725.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	10.174.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	10.174.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	32.360.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	32.360.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	948.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	948.000,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
						-	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	1.950.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1.950.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	115.766.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	115.767.800,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
						-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	870.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	870.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	117.952.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	117.952.000,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
						-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	225.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	225.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
						-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	2.799.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	2.799.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								15.756.000,00					15.754.200,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								15.756.000,00					15.754.200,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	15.756.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	15.754.200,00
TOTAL													**2.777.496.000,00**					**2.940.570.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0112 UPT Puskesmas Simo (BLUD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					UPT Puskesmas Simo (BLUD)								1.858.531.000,00					1.858.531.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.858.531.000,00					1.858.531.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.858.531.000,00					1.858.531.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1.858.531.000,00					1.858.531.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.858.531.000,00					1.858.531.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Simo, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	1.858.531.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.858.531.000,00
TOTAL													**1.858.531.000,00**					**1.858.531.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPT Puskesmas Tamansari (APBD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
																Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Tamansari (APBD)								3.015.361.000,00					711.718.710,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.015.361.000,00					711.718.710,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.015.361.000,00					711.718.710,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.455.980.000,00					152.337.710,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.323.030.000,00					2.388.030,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	12 Orang/bulan	-	2.323.030.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	2.388.030,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								57.000.000,00					74.000.000,00
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	0,00	-		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	17.000.000,00
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	18.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.000.000,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	9.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.000.000,00
1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								48.402.000,00					48.401.680,00
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	44.402.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	44.401.680,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								27.548.000,00					27.548.000,00
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	2.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	2.500.000,00
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	25.048.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	25.048.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								521.431.000,00					521.431.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								71.117.000,00					71.117.000,00
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi													
						-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	7.309.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	1 Unit	7.309.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
						-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	23.808.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 Paket	23.808.000,00
						-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	40.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								450.314.000,00					450.314.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
						-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	100 Orang	-	54.825.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	54.825.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
						-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	100 Orang	-	7.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	7.500.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
						-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	100 Orang	-	6.207.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	6.207.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
						-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	100 Orang	-	67.002.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	67.002.200,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	50 Orang	-	16.700.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	16.700.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
						-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	20 Orang	-	2.250.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	2.250.000,00
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	2.250.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	2.250.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	82.971.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	82.971.300,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	13.686.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	13.686.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	3.950.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	3.950.000,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
						-	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	20 Orang	-	3.750.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	3.750.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	60.268.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	60.267.500,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
						-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	6 Paket	-	4.620.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	6 Paket	4.620.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	104.685.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	104.685.000,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
						-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	1.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
						-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	50 Orang	-	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50 Orang	12.000.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
						-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	-	50 Orang	-	6.150.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	50 Orang	6.150.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								37.950.000,00					37.950.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								37.950.000,00					37.950.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	37.950.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	37.950.000,00
TOTAL													**3.015.361.000,00**					**711.718.710,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0125 UPT Puskesmas Tamansari (BLUD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Tamansari (BLUD)								1.346.251.000,00					1.346.251.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.346.251.000,00					1.346.251.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.346.251.000,00					1.346.251.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1.346.251.000,00					1.346.251.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.346.251.000,00					1.346.251.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	1.346.251.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.346.251.000,00
TOTAL													**1.346.251.000,00**					**1.346.251.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Teras (APBD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Teras (APBD)								3.027.529.000,00					3.037.529.175,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								698.707.000,00					708.707.175,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								698.707.000,00					708.707.175,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								132.000.000,00					142.000.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								48.000.000,00					58.000.000,00
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	14.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.000.000,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	34.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34.000.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								54.000.000,00					54.000.000,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	54.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	54.000.000,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								30.000.000,00					30.000.000,00
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						undefined	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	undefined undefined	1 Unit	-	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	30.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								549.652.000,00					549.652.175,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								18.307.000,00					18.307.175,00
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						undefined	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	undefined undefined	1 Unit	-	6.468.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	1 Unit	6.468.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
						undefined	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	undefined undefined	1 Paket	-	11.839.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	11.839.175,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								531.345.000,00					531.345.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	66.675.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	66.675.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
						-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	32.775.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	32.775.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
						-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	11.799.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	11.799.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
						-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	26.334.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	26.334.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
						-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	20.475.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	20.475.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
						-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	21.525.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	21.525.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	1.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	1.500.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	94.752.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	94.752.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	18.214.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	18.214.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	4.948.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	4.948.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	12.168.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	12.168.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	3.455.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	3.453.200,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
						-	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	5.850.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	5.850.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	80.196.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	80.196.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	1.266.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1.266.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	117.113.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	117.113.000,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
						-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	675.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	675.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	4.950.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	4.950.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
						-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	675.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	676.800,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								17.055.000,00					17.055.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								17.055.000,00					17.055.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	17.055.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	17.055.000,00
-					-								2.328.822.000,00					2.328.822.000,00
-	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.328.822.000,00					2.328.822.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
-	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.328.822.000,00					2.328.822.000,00
-	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.328.822.000,00					2.328.822.000,00
-	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						undefined	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	undefined undefined	12 Orang/bulan	-	2.328.822.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	2.328.822.000,00
TOTAL													**3.027.529.000,00**					**3.037.529.175,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0106 UPT Puskesmas Teras (BLUD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Teras (BLUD)								1.390.050.000,00					1.390.050.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.390.050.000,00					1.390.050.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.390.050.000,00					1.390.050.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1.390.050.000,00					1.390.050.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.390.050.000,00					1.390.050.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						undefined	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Teras, Semua Kel/Desa	undefined undefined	12 Dokumen	-	1.390.050.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.390.050.000,00
TOTAL													**1.390.050.000,00**					**1.390.050.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPT Puskesmas Wonosamodro (APBD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Wonosamodro (APBD)								2.515.169.000,00					2.515.169.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.515.169.000,00					2.515.169.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.515.169.000,00					2.515.169.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.891.458.000,00					1.891.458.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.851.458.000,00					1.851.458.000,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	33 Orang/bulan	12 dokumen	1.851.458.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	1.851.458.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								0,00					0,00
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Paket	1 dokumen	0,00	-		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Paket	1 dokumen	0,00	-		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0,00
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	1 dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00
1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	0 Paket	1 dokumen	0,00	-		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0,00
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	1 dokumen	0,00	-		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								40.000.000,00					40.000.000,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	1 Dokumen	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								571.651.000,00					571.651.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								7.382.000,00					7.382.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	18 Unit	1 dokumen	7.382.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	18 Unit	7.382.000,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
						-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	1 dokumen	0,00	-		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	0,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								564.269.000,00					564.269.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	446 Orang	1 dokumen	55.700.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	446 Orang	55.700.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
						-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	1946 Orang	1 dokumen	25.700.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1946 Orang	25.700.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
						-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	2388 Orang	1 dokumen	22.599.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik-		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2388 Orang	22.599.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
														BOKKB-BOK				
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
						-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	14228 Orang	1 dokumen	32.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14228 Orang	32.000.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
						-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	4080 Orang	1 dokumen	13.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4080 Orang	13.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
						-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	54 Orang	1 dokumen	9.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	54 Orang	9.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	367 Orang	1 dokumen	16.383.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	367 Orang	16.383.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	442 Orang	1 dokumen	2.433.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	442 Orang	2.433.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	1 dokumen	120.141.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	120.141.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	1 dokumen	13.168.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik-		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	13.168.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
														BOKKB-BOK				
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	1 dokumen	13.650.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	13.650.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	1 dokumen	17.718.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	17.718.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	1 dokumen	6.999.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	6.999.000,00
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
						-	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	1 dokumen	4.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	4.500.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	1 dokumen	82.109.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	82.109.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
						-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	11 Paket	1 dokumen	1.550.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	11 Paket	1.550.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	1 dokumen	126.045.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik-		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	126.045.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
														BOKKB-BOK				
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
						-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	10 Laporan	1 dokumen	1.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10 Laporan	1.500.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
						-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	1 dokumen	74.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	74.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								52.060.000,00					52.060.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								52.060.000,00					52.060.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	1 dokumen	52.060.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	52.060.000,00
TOTAL													**2.515.169.000,00**					**2.515.169.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0126 UPT Puskesmas Wonosamodro (BLUD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program Program	Keluaran Sub Kegiatan Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Tolok Ukur Tolok Ukur	Target Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					UPT Puskesmas Wonosamodro (BLUD)								1.965.317.000,00					1.965.317.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.965.317.000,00					1.965.317.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.965.317.000,00					1.965.317.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1.965.317.000,00					1.965.317.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1.965.317.000,00					1.965.317.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Boyolali, Wonosamodro, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	12 Dokumen	1.965.317.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.965.317.000,00
TOTAL													**1.965.317.000,00**					**1.965.317.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Wonosegoro (APBD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Wonosegoro (APBD)								2.951.700.000,00					639.280.734,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								636.966.000,00					636.966.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								636.966.000,00					636.966.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								30.000.000,00					30.000.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								30.000.000,00					30.000.000,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Boyolali, Wonosegoro, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								606.966.000,00					606.966.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								7.735.000,00					7.735.000,00
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Wonosegoro, Semua Kel/Desa	-	0 Unit	-	7.735.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	7.735.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								599.231.000,00					599.231.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
						-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	74.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	74.800.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
						-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	57.750.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	57.750.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Wonosegoro, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	9.324.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	9.324.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
						-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	12.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	12.500.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
						-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Wonosegoro, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	29.182.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	29.182.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Wonosegoro, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	7.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	7.800.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Wonosegoro, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	20.825.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	20.825.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
						-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Boyolali, Wonosegoro, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	4.299.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	4.299.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Boyolali, Wonosegoro, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	15.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	15.800.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Boyolali, Wonosegoro, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	14.257.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	14.257.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Boyolali, Wonosegoro, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	17.347.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	17.347.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Wonosegoro, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	50.382.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	50.382.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Boyolali, Wonosegoro, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	99.939.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	99.939.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Boyolali, Wonosegoro, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	12.624.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	12.624.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Wonosegoro, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	156.277.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	156.277.000,00
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Boyolali, Wonosegoro, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	14.325.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	14.325.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Boyolali, Wonosegoro, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1.800.000,00
-					-								2.314.734.000,00					2.314.734,00
-	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.314.734.000,00					2.314.734,00
-	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.314.734.000,00					2.314.734,00
-	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.314.734.000,00					2.314.734,00
-	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Boyolali, Wonosegoro, Semua Kel/Desa	-	39 Orang/bulan	-	2.314.734.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	2.314.734,00
TOTAL													**2.951.700.000,00**					**639.280.734,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0117 UPT Puskesmas Wonosegoro (BLUD)

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Puskesmas Wonosegoro (BLUD)								2.532.264.000,00					2.532.264.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.532.264.000,00					2.532.264.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.532.264.000,00					2.532.264.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2.532.264.000,00					2.532.264.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2.532.264.000,00					2.532.264.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Boyolali, Wonosegoro, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	2.532.264.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2.532.264.000,00
TOTAL													**2.532.264.000,00**					**2.532.264.000,00**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					UPT Laboratorium Kesehatan Daerah								1.662.899.000,00					1.662.899.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.662.899.000,00					1.662.899.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.662.899.000,00					1.662.899.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								791.353.000,00					791.353.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								791.353.000,00					791.353.000,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	-	12 Orang/bulan	-	791.353.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	791.353.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								871.546.000,00					871.546.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								871.546.000,00					871.546.000,00
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
						-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	-	12 Dokumen	-	871.546.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	871.546.000,00
TOTAL													**1.662.899.000,00**					**1.662.899.000,00**

BAB V PENUTUP

1. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh personil Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan sebagai implementasi dari Visi dan misi Bupati Boyolali dan Renstra Dinas Kesehatan.
2. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai.
3. Pada akhir tahun anggaran 2023 dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.
4. Tahun 2023 sering kali berbagai kebijakan dan regulasi berubah secara cepat, menyebabkan kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

1. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

RSUD PANDAN ARANG

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iv
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Landasan Hukum.....	4
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
	1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA RSUD PANDAN ARANG TAHUN LALU.....	11
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali Tahun 2022 dan Capaian Renstra RSUD Pandan Arang.....	11
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali.....	28
	2.3. Isu – Isu penting permasalahan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Pandan Arang.....	39
	2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.....	44
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	64
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN RSUD PANDAN ARANG	72
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	72
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Pandan Arang.....	75

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD PANDAN ARANG..... 86
4.1. Program dan Kegiatan..... 86

BAB V PENUTUP..... 95

DAFTAR TABEL

T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Pandan Arang dan Pencapaian Renstra RSUD Pandan Arang s/d Tahun 2023	13-25
T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali	32-38
T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kab. Boyolali	45-63
T-C.32	Usulan Program dan kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 RSUD Pandan Arang Kab.Boyolali	65-71
Tabel	Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Pandan Arang Kab.Boyolali	77-85
Tabel	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Pandan Arang Kab.Boyolali Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	87-94

BAB I
PENDAHULUAN

Penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD), dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah (PD), evaluasi pelaksanaan kerja perangkat daerah (Renja PD) tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD).

1.1. LATAR BELAKANG.

Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan penjabaran atas Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Tahun 2021-2026. Namun apabila dalam perjalanan waktu terdapat perubahan - perubahan peraturan bidang pemerintahan maupun kebijakan - kebijakan dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah tidak menutup kemungkinan terdapat

perubahan - perubahan terhadap program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja (Renja) RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali tahun 2024 mengacu pada pelaksanaan Rencana Rencana Strategis (Renstra) RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali tahun 2021 - 2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun 2024. Rencana kerja (Renja) digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali Tahun 2024 memuat evaluasi pencapaian pelaksanaan tugas umum kesehatan selama Tahun 2022, prioritas program dan kegiatan tahun 2022, strategi dan kebijakan mencapai sasaran bidang kesehatan umum Tahun 2022 serta penganggaran untuk masing-masing program dari kegiatan. Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang sebagai pelayanan publik yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK- BLUD) penuh, sesuai dengan Keputusan Bupati Boyolali Nomor: 900/57 Tahun 2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) dengan Status Penuh kepada RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, dalam pengelolaan (managemen) dituntut untuk profesional dengan

konsep bisnis yang sehat dan bukan semata – mata untuk mencari keuntungan. Fungsi sosial rumah sakit yang menjalankan urusan wajib pemerintah di bidang kesehatan tetap dilaksanakan, khususnya dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada warga miskin. Hal ini sesuai dengan janji pelayanan yang dimiliki RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali yaitu “Melayani dengan sepenuh hati“. Konsekuensi bagi RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang menerapkan PPK BLUD penuh adalah mampu mengelola pendapatan fungsional rumah sakit (pendapatan BLUD) untuk membiayai seluruh kegiatan operasional yang berhubungan langsung dengan pemberian layanan kepada masyarakat / pasien. Untuk itu setiap potensi yang berpeluang menjadi sumber pendapatan harus dikelola dengan optimal. Pengembangan – pengembangan setiap jenis layanan baru sesuai dengan inti bisnis rumah sakit perlu dilakukan terus menerus sepanjang tahun dengan inovasi – inovasi terkini sesuai dengan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan.

Rencana kerja perangkat daerah (Renja) RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali tahun 2024 secara hirarki berpedoman pada perencanaan Pembangunan Daerah yang dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, yang dijabarkan dalam rencana panjang jangka menengah daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dalam setiap tahunnya.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali menjadi pedoman dalam pembuatan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD). Selanjutnya rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) (RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali) akan dijabarkan dalam rencana kerja

perangkat daerah (Renja PD) tiap tahun. Secara skematis hubungan antara rencana strategis (Renstra) Dinas sampai rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dapat dilihat pada skema berikut :

Skema Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

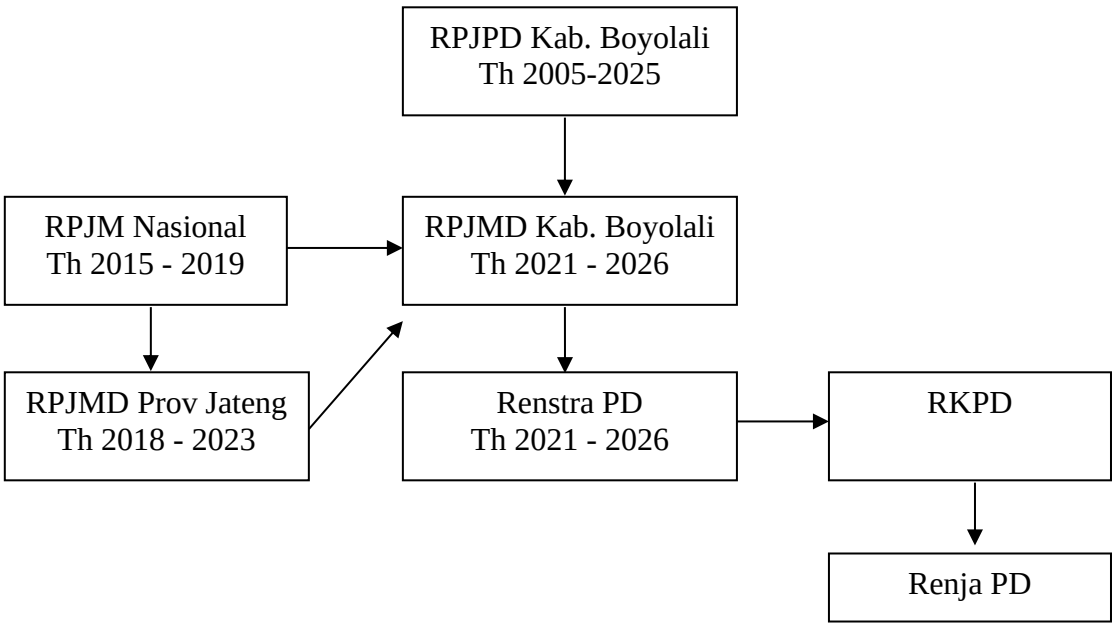

1.2. LANDASAN HUKUM.

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boyolali adalah:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri No 86 Th 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RKPD;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;

16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 61);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

a. Maksud

Rancangan awal rencana kerja (Renja) RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali terhadap suatu dokumen rencana tahunan di tahun 2024 yang sesuai dengan perkembangan serta perubahan situasi dan kondisi yang terjadi dalam waktu berjalan, serta sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.

Renja RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali yaitu menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program,

dan kegiatan serta indikator yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali dan sesuai dengan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali;
- Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis RSUD Pandan Arang Kab.Boyolali;
- Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali;

b. Tujuan

Rancangan awal rencana kerja (Renja) RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk :

a. Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan serta program RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan selama tahun 2024;
b. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi peningkatan mutu pelayanan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
c. Menilai daya serap dan capaian target kinerja program / kegiatan yang mencakup masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam

dokumen Renja RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali tahun 2024;

d. Diperolehnya program / kegiatan prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan pasien di RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali di tahun 2024 guna mewujudkan target dari visi dan misi RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

e. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di RSUD Pandan Arang Kab.Boyolali ;

f. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);

g. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;

h. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

i. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di RSUD Pandan Arang Kab.Boyolali.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

Penyajian rancangan awal rencana kerja (Renja) RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA RSUD PANDAN ARANG KAB. BOYOLALI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Pandan Arang Tahun 2022 dan Capaian Renstra RSUD Pandan Arang

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RSUD PANDAN ARANG KAB. BOYOLALI

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD PANDAN ARANG

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA RSUD PANDAN ARANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali Tahun 2022 dan Capaian Renstra RSUD Pandan Arang

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali, ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan renstra serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada lima tahun terakhir ini. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali maka dalam pelaksanaan diperlukan suatu indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam Renstra dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan.

Evaluasi program dan hasil kegiatan berdasarkan realisasi capaian kegiatan selengkapnya dapat diurai sebagai berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Pandan Arang dan Pencapaian Renstra RSUD Pandan Arang s/d Tahun 2023

RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali

Kode						Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra RSUD PA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja RSUD PA Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra RSUD PA s/d tahun berjalan	
										Target Renja RSUD PA Tahun 2022	Realisasi Renja RSUD PA Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1	02					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
1	02	02				Program Pemenuhan	Persentase	100	200	100	105	105	100	405	405

						Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	capaian SPM RS								
						Kegiatan									
1	02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	100	95	100	100	100	100	295	295
						Sub Kegiatan									
1	02	02	2	01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah unit bangunan yang dibangun	2	2	2	2	100	2	6	300
						Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan								

							Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan								
1	02	02	2	01	13	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah prasarana pendukung yang diadakan	3	1	3	0	0	3	4	133
1	02	02	2	01	14	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayana kesehatan	Jumlah paket alat kesehatan/penunjang medik yang diadakan	2	9	2	2	100	2	13	650

						Kegiatan									
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten /Kota	Persentase capaian pelayanan gawat darurat	100	100	100	99	199	100	299	299
						Sub Kegiatan									
1	02	02	2	02	32	Operasional pelayanan rumah sakit	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat setelah pasien datang	5	5	5	5	100	5	5	100
							Jam buka pelayanan darurat	24	24	24	24	100	24	24	100
							Jumlah tim	1	1	1	1	100	1	1	100

							penanggulangan bencana								
							Jumlah kematian pasien < 24 jam (GDR)	45	99	45	45	100	45	189	24
						Kegiatan									
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten /Kota	Persentase capaian pelayanan rawat inap	100	100	100	133	133	100	333	333
						Sub Kegiatan									
1	02	02	2	02	32	Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah kematian pasien > 48 jam (NDR)	25	59	25	27	92	25	111	22
							Jumlah kejadian	82	68	82	59	139	82	209	39

							pulang paksa								
							Jumlah pemberi pelayanan di rawat inap	214	275	214	225	105	214	714	333
						Kegiatan									
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten /Kota	Persentase capaian pelayanan rawat jalan	100	100	100	90	90	100	290	290
						Sub Kegiatan									
1	02	02	2	02	32	Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah dokter pemberi pelayanan di poliklinik	33	35	33	37	112	33	105	318

							Waktu tunggu di rawat jalan	60	100	60	107	56	60	267	22
							Jumlah ketersediaan pelayanan poliklinik	31	26	31	28	90	31	85	274
1	02	02	2	02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah elemen penilaian akreditasi dan reakredetasi	789	1218	1218	789	100	789	2796	354
							Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	823	-	800			800		

							Nilai IKM	83,50		83,00	83,97	101	83,50		
							Nilai Sakip	81,31	79,59	79,81	80,60	100	81,31		
1	02	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemenuhan Standart pelayanan kesehatan Rumah Sakit (IKM)	100	100	100	100	100	100	300	300
						Kegiatan									
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	300	300
						Sub Kegiatan									

1	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100	100	100	100	100	100	300	300
1	02	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12	12	12	12	100	12	36	300
1	02	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12	12	12	12	100	12	36	300
1	02	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	18	18	100	18	54	300

1	02	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2	2	2	2	100	2	6	300
						Kegiatan									
1	02	01	2	01		Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	25	25	25	25	100	25	75	300
						Sub Kegiatan									
1	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perenca	2	2	2	2	100	2	6	300

							naan yang disusun								
1	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	1	1	1	100	1	3	300
1	02	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	1	1	1	100	1	3	300
1	02	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	1	1	1	1	100	1	3	300
1	02	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA Perubah	1	1	1	1	100	1	3	300

						Perubahan DPA-SKPD	an-SKPD yang disusun								
1	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15	15	15	15	100	15	45	300
1	02	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	100	4	12	300
						Kegiatan									
1	02	01	2	04		Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah layanan Adminis	12	12	12	12	100	12	36	300

						Kewenangan Perangkat Daerah	trasi Perkantoran Perangkat Daerah								
						Sub Kegiatan									
1	02	01	2	04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah target lain-lain PAD yang Sah (BLUD)	109.000.000.000	127.812.247.441	103.150.000.000	129.101.305.520	125	109.000.000.000	365.913.552.961	336
1	02	01	2	04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12	12	12	12	300	12	36	100

Berdasarkan tabel diatas faktor – faktor yang mempengaruhi

a. Tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan
   - Kemampuan komunikasi dan koordinasi SDM yang kurang
   - Sistem pemasaran dan promosi belum optimal
   - Jumlah SDM untuk pengelolaan dan pemeliharaan alat canggih masih kurang
   - Karyawan RSUD Pandan Arang gaya kerja masih di zona nyaman
   - Sistem rujukan berjenjang mengakibatkan kunjungan dari FKTP sulit untuk langsung ke RSPA. Dan kadang sistem rujukan BPJS kurang optimal, menyulitkan rujukan ke RSPA.
   - Pasien yang dikirim dengan kondisi komplek yang mengakibatkan angka NDR dan GDR tinggi
   - Kasus kematian terbanyak di ruang intensif
   - Kejadian Pulang Paksa (APS) terjadi sebagian besar karena permintaan keluarga untuk pasien stadium akhir yang menginginkan perawatan di rumah.
   - Pelayanan di Poliklinik belum optimal karena masih kurangnya dokter spesialis tertentu dan sub spesialis.
   - Untuk saat ini terdapat kendala terkait bridging aplikasi BPJS dengan SIMRS yang mengakibatkan waktu tunggu pasien menjadi lama.
   - Terdapat antrian (waiting list) pasien Hemodialisa dikarenakan meningkatnya jumlah kasus dan keterbatasan SDM pelayanan.

b. Terpenuhi / melebihi target kinerja program / kegiatan
   - Adanya pembiayaan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk pemenuhan standarisasi peralatan kedokteran dan kesehatan lainnya.
   - Lokasi RSUD Pandan Arang yang strategis yang berada di tepi jalan raya sehingga mudah dicapai / diakses.
   - Meningkatkan koordinasi sistem rujukan dengan lintas sektor untuk mengurangi kematian / perburukan pasien untuk menurunkan (NDR & GDR)
   - RSUD Pandan Arang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan karena merupakan perangkat daerah BLUD.
   - Penguatan jejaring rujukan untuk mengoptimalkan rujukan berjenjang

- Tarif pelayanan terjangkau.
- Tim EMS yang siap menjemput pasien 24 jam.
- Sistem remunerasi kepegawaian yang jelas.
- Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan yang canggih dan komplit.
- Sarana prasarana yang lengkap
- Jumlah SDM yang mencukupi.
- Rumah sakit tipe B satu – satunya di Boyolali
- RSUD Pandan Arang mempunyai tenaga kesehatan yang sudah berpengalaman dan kompeten dibidangnya.
- Penguatan aplikasi BAPER (Sistem pendaftaran online) yang sudah ada
- Pengaturan jam pelayanan dokter poliklinik untuk mengurangi antrian dan memastikan waktu kunjung pasien rawat jalan
- RSUD Pandan Arang dapat mengangkat tenaga non PNS BLUD sesuai dengan kemampuan pembiayaan rumah sakit.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra RSUD Pandan Arang

Target capaian program yang terpenuhi menimbulkan implikasi sebagai berikut :

- Kegiatan terlaksana tepat waktu
- Dukungan Dinkes Provinsi dan Kementrian Kesehatan
- Mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien.
- Terpenuhinya pengadaan gedung kesehatan, sarana prasarana, dan alat kesehatan
- Pengelolaan anggaran disesuaikan dengan pendapatan RS sehingga kegiatan operasional RS dapat tercukupi.
- Peningkatan sarana dan prasarana sehingga meningkatkan kualitas Rumah Sakit
- Terpenuhinya pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dan non medis
- Penyelenggaraan pelayanan rujukan

Target capaian program yang tidak terpenuhi menimbulkan implikasi sebagai berikut :

- Tingkat kunjungan yang berkurang sehingga pendapatan rumah sakit juga berkurang.
- Penurunan Mutu.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah :

- Percepatan kegiatan dengan penambahan alat & waktu kerja, optimalisasi anggaran
- Meningkatkan koordinasi sistem rujukan dengan lintas sektor
- Penguatan jejaring rujukan untuk mengoptimalkan rujukan berjenjang.
- Tim EMS yang siap menjemput pasien 24 jam (UNTUK WILAYAH Kecamatan Boyolali, Musuk, Tamansari, Cepogo, Gladagsari, Ampel, Mojosongo, Teras, Banyudono dan Sawit)
- Peningkatan sarana dan prasarana sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan di RS Tipe B
- Home visite ke rumah pasien pasca rawat inap (sudah dilaksanakan rata – rata setiap minggu)
- Penambahan dokter mitra sub spesialis dan memfasilitasi dokter yang akan menempuh subspesialis
- Penguatan aplikasi BAPER (Sistem pendaftaran online) yang sudah ada setiap kali ada kesempatan.
- Pengaturan jam pelayanan dokter poliklinik untuk mengurangi antrian dan memastikan waktu kunjung pasien rawat jalan (pendaftaran diarahkan secara online melalui aplikasi BAPER, pengaturan jam praktek dokter jam 08.00 – 10.00 dan jam 10.00 – 12.00)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali

Kinerja pelayanan RSUD Pandan Arang Boyolali dinilai berdasarkan pada indikator yang telah ditetapkan. Dari data di atas ada beberapa indikator yang sudah memenuhi target, akan tetapi masih ada indikator pelayanan yang belum memenuhi target. Oleh karena itu kinerja RSUD Pandan Arang masih perlu ditingkatkan agar

target yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui strategi yang telah ditetapkan.

A. Kajian Renstra dan Prioritas Program

Dalam rangka upaya merealisasi program-program pembangunan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 terutama dalam Program Kesehatan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan kegiatannya berlandaskan pada sasaran meningkatkan derajad kesehatan.

Bertolak pada prioritas dan program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 dibidang kesehatan dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali pada tahun 2023 telah merencanakan dan menentukan program antara lain :

a. Program Kerja
    1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
    2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
b. Kegiatan
    1. Penyediaan Fasiltas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
    2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota
    3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    5. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
c. Sub Kegiatan
    1. Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    2. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
    3. Operasional Pelayanan Rumah Sakit
    4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
8. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
13. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
14. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
15. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
16. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
17. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
18. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

B. Perkiraan Pencapaian Program Tahun 2023

Dalam rangka mengemban visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2016 - 2021, dan rencana kerja tahun 2023 Rumah Sakit Umum Pandan Arang Boyolali pada tahun 2022 telah melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan serta perkiraan capaian program pada tahun 2023 sebagai berikut :

Program	Indikator Kinerja (outcome)	Target Tahun 2023
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM RS	100

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Standart pelayanan kesehatan Rumah Sakit (IKM)	100

C. Identifikasi Masalah

Secara umum pelayanan kesehatan yang dilaksanakan RSUD Pandan Arang pada masyarakat / pasien dapat berjalan dengan baik. Namun beberapa hal yang menjadi kendala RSUD Pandan Arang dalam upaya meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat adalah :

1. Promosi Rumah Sakit swasta yang gencar
2. Banyaknya Rumah Sakit swasta di Boyolali
3. Sistem kebijakan rujukan berjenjang BPJS
4. Pasien yang dikirim dengan kondisi komplek
5. Kasus kematian terbanyak di ruang intensif
6. Kejadian Pulang Paksa (APS) terjadi sebagian besar karena permintaan keluarga untuk pasien stadium akhir yang menginginkan perawatan di rumah
7. Pelayanan di Poliklinik belum optimal
8. Banyak kendala terkait aplikasi bridging bpjs
9. Pelayanan yang tidak tepat waktu

Analisis pencapaian kinerja pelayanan pada RSUD Pandan Arang Kab.Boyolali ditunjukan pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Pandan Arang
Kabupaten Boyolali

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra RSUD PA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			75,28	75,80	76,31	76,83			76,31	76,83	
	Angka Harapan Hidup (AHH) (Permendagri 86/2017)			76,04	76,10	76,16	76,23	76,12	76,16	76,16	76,23	
	Persentase capaian SPM RS			100	100	100	100	105	100	100	100	
	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah prasarana pendukung yang diadakan			3	3	3	3	0	0	0	0	

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra RSUD PA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n	Tahun 2025 (thn n+1)	
	Jumlah paket alat kesehatan/penun jang medik yang diadakan			2	2	2	2	2	1	1	1	
	Jumlah unit bangunan yang dibangun			2	2	2	2	2	1	1	1	
	Persentase capaian pelayanan gawat darurat			100	100	100	100	99	100	100	100	
	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat setelah pasien datang	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang		5	5	5	5	5	5	5	5	
	Jam buka pelayanan darurat	24 jam		24	24	24	24	24	24	24	24	
	Jumlah tim penanggulangan bencana	1 tim		1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah kematian pasien < 24 jam (GDR)			45	45	45	45	45	45	45	45	

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra RSUD PA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n	Tahun 2025 (thn n+1)	
	Persentase capaian pelayanan rawat inap			100	100	100	100	100	133	100	100	
	Jumlah kematian pasien > 48 jam (NDR)	≤0.24 % ≤ 2.4/ 1000 (internasional) atau ≤ 25/1000 (Indonesia)		25	25	25	25	27	25	25	25	
	Jumlah kejadian pulang paksa			82	82	82	82	59	59	59	59	
	Jumlah pemberi pelayanan di rawat inap			214	214	214	214	225	225	225	225	
	Persentase capaian pelayanan rawat jalan			100	100	100	100	90	100	100	100	

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra RSUD PA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n	Tahun 2025 (thn n+1)	
	Jumlah dokter pemberi pelayanan di poliklinik	100 % dokter Spesialis		33	33	33	33	37	37	37	37	
	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	≤ 60 menit	60	60	60	60	107	60	60	60	
	Jumlah ketersediaan pelayanan poliklinik			31	31	31	31	28	31	31	31	
	Jumlah elemen penilaian akreditasi dan reakredetasi			1218	1218	1218	1218	789	789	-	-	
	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			800	823	833	893	800	823	833	893	
	Nilai IKM	≥70%	≥70%	83,00	83,50	84,00	84,50	83,00	83,50	84,00	84,50	
	Nilai Sakip		-	79,81	81,31	82,81	84,31	79,81	81,31	82,81	84,31	
	Pemenuhan Standart pelayanan kesehatan Rumah Sakit (IKM)		-	100	100	100	100	100	100	100	100	

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra RSUD PA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n	Tahun 2025 (thn n+1)	
	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			18	18	18	18	18	18	18	18	
	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan			2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan			25	25	25	25	25	25	25	25	

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra RSUD PA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n	Tahun 2025 (thn n+1)	
	evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat											
	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun			2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun			15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah			4	4	4	4	4	4	4	4	

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra RSUD PA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n	Tahun 2025 (thn n+1)	
	Jumlah layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah target lain-lain PAD yang Sah (BLUD)			103.150.000.000	105.000.000.000	109.000.000.000	114.000.000.000	129.101.305.520	113.000.000.000	116.000.000.000	120.000.000.000	
	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	

2.3. Isu – Isu penting permasalahan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Pandan Arang

2.3.1 Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Berikut ini isu - isu penting dan strategis dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali:

1) Isu strategis terkait dengan mutu pelayanan
   a. Masih belum optimalnya prosedur dan mekanisme kerja;
   b. Belum optimalnya pemanfaatan berbagai jenis potensi pelayanan yang dimiliki;
   c. Mutu pelayananan yang masih kurang memadai dikarenakan alat – alat yang ada belum optimal sehingga berpengaruh pada jumlah kunjungan;
   d. Cakupan pelayanan yang rendah dilihat dari angka kunjungan pasien yang menurun;
   e. Pelayanan medis tidak dapat berdiri sendiri, memerlukan dukungan dan kolaborasi dari pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medis.
2) Isu strategis terkait dengan profesionalisme SDM
   a. Masih kurangnya tenaga medis dokter spesialis dan sub spesialis kedokteran;
   b. Masih kurangnya tenaga administrasi dan tenaga medis dan paramedis;
   c. Masih kurangnya kualitas dan mutu SDM.
3) Isu strategis terkait dengan Sarana Prasarana
   a. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan baik tempat maupun peralatan masih memerlukan penyempurnaan;
   b. Kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas alat kesehatan yang ada.
4) Isu strategis terkait dengan peningkatan “apresiasi/penghayatan” budaya (sikap dan perilaku)
   a. Masih rendahnya kesadaran untuk melestarikan budaya/sikap perilaku yg terkait dengan pemberian pelayanan.
   b. Karyawan RSUD Pandan Arang gaya kerja masih di zona nyaman.

2.3.2.Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi RSUD Pandan Arang

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan visi misi RSUD Pandan Arang.
b. Kebijakan - kebijakan yang selalu berubah ubah dari BPJS selaku penyelenggara JKN menjadi salah satu indikasi penghambat peningkatan mutu pelayanan khususnya dalam pelayanan administrasi keuangan rumah sakit;
c. Berdasarkan kejadian tersebut berakibat adanya komplain dari masyarakat, banyaknya berkas persyaratan klaim hingga akhir pasien dirawat belum lengkap. Hal ini menjadikan pembuatan SEP dan pengajuan verifikasi tidak dapat tepat waktu;
d. Adanya aturan BPJS untuk pelayanan kesehatan tidak dapat langsung ke RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali (kelas B) / rujukan berjenjang.
e. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang paripurna dan bermutu;
f. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan sarana prasarana kesehatan yang representatif;
g. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan dan non kesehatan di rumah sakit yang profesional;

2.3.3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kabupaten Boyolali harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan **BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (Metal)**.

Sebagai upaya untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Boyolali, yaitu:

a. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan.

b. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.

c. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional.

d. Boyolali sehat menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

e. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing.

RSUD Pandan Arang Kabupatan Boyolali mempunyai tugas pokok di bidang pelayanan Kesehatan sesuai dengan MISI kedua Kabupaten Boyolali "Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya" .Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi :

1) perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
2) penyusunan program kerja dan anggaran RSUD;
3) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
4) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
5) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
6) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
7) penyelenggaraan kesekretariatan RSUD;
8) pelaksanaan pengelolaan keuangan, asset dan kepegawaian RSUD;
9) pemantauan, evaluasi dan pelaporanRSUD;dan
10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dalam pelayanan kesehatan harus mampu mendukung Misi Bupati Kedua dengan berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dengan cara meningkatkan derajad kesehatan masyarakat agar menjadi masyarakat tangguh, cerdas, berkarakter dan berbudaya. RSUD Pandan Arang merupakan salah satu rumah sakit daerah di Boyolali mendukung misi ini dengan menyelenggarakan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dan non medis, mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dengan menerima peserta Jampersal, memberikan pelayanan dan asuhan keperawatan, menerima pelayanan rujukan dari faskes-faskes sekitar, memberikan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kesehatan. RSUD Pandan Arang melaksanakan tupoksi-tupoksi tersebut agar misi kedua yang berupaya meningkatkan derajad kesehatan masyarakat agar menjadi masyarakat tangguh, cerdas, berkarakterdan berbudaya.

Dengan berpedoman pada RPJMD maka RSUD Pandan Arang sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali

2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali

Beberapa tantangan dan peluang strategis yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia untuk menunjang pelayanan kesehatan rumah sakit.
b. Belum optimalnya promosi kesehatan RSUD Pandan Arang dalam mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

c. Belum optimalnya jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait agar pelayanan kesehatan berjalan dengan lancar, Peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan denganmeningkatkan kelas Rumah Sakit menjadi Tipe B secara bertahap mengacu pada master plan.
d. Masih kurangnya inovasi - inovasi baru di bidang pelayanan kesehatan agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat Boyolali dan sekitarnya.
e. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder agar dapat bergerak dengan cepat mengikuti perubahan-perubahan dari eksternal maupun internal rumah sakit.
f. RSUD Pandan Arang mempunyai tenaga kesehatan yang sudah berpengalaman dan kompeten dibidangnya.
g. RSUD Pandan Arang mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien.
h. Menjadi wahana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia serta penelitian dalam rangka peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting

Dari isu –isu penting yang ada, permasalahan dan hambatan, tantangan dan peluang, serta dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, terdapat beberapa formulasi isu isu penting berupa strategi utama yang dipilih sebagai faktor kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit, diantaranya sebagai berikut :

a. Pengembangan pelayanan unggulan dengan pemanfaatan teknologi kedokteran, serta pengembangan pelayanan diluar kekhususannya.
b. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM.
c. Pengembangan manajemen mutu Rumah Sakit.
d. Pengembangan promosi dan kerjasama dengan institusi lain atau pihak ketiga.
e. Peningkatan kesejahteraan pegawai dengan penerapan sistem remunerasi yang adil dan proporsional.

f. Pengembangan manajemen organisasi yang meliputi manajemen keuangan, manajemen perencanaan dan manajemen sarana & prasarana RS yang berbasis SIMRS.
g. Peningkatan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit.
h. RSUD Pandan Arang sebagai RSUD Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Dari hasil terhadap capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali tahun 2022 maupun terhadap capaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah beserta kerangka pedoman di bidang kesehatan sebagaimana diprioritaskan (dirumuskan dalam prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026). Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boyolali merupakan Badan Layanan Umum Daerah dalam tahun 2023 ini hanya melaksanakan dua program, lima kegiatan dan delapan belas sub kegiatan. Terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD terhadap besaran anggaran alokasi kegiatan yang bersumber dari anggaran DAK, hal tersebut disebabkan karena disesuaikan dengan lokus prioritas dari Kemenkes. Berdasarkan Rancangan awal serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif RSUD Pandan Arang, maka analisis kebutuhan RSUD Pandan Arang Tahun 2024, adalah sebagaimana terlihat dari tabel di bawah ini.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Boyolali

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan/Sub keg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	**76,31**				**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**76,31**		
		Angka Harapan Hidup (AHH) (Permendagri 86/2017)	**76,16**				**Angka Harapan Hidup (AHH) (Permendagri 86/2017)**	**76,16**		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	RSUD PA	**Persentase capaian SPM RS**	**100**	**120.848.167.000**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA**	RSUD PA	**Persentase capaian SPM RS**	**100**	**120.848.167.000**	

KESEHATAN MASYARAKAT					**KESEHATAN MASYARAKAT**					
Kegiatan					**Kegiatan**					
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	RSUD PA	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2	**11.848.167.000**	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	RSUD PA	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2	**11.848.167.000**	
Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD PA	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1	5.000.000.000	Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD PA	Jumlah paket alat kesehatan/Alat penujang medik rfasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1	5.000.000.000	

Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	6.8.48.167.000	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	6.8.48.167.000	
Kegiatan					**Kegiatan**					

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD PA	Jumlah dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	13	**109.000.000.000**	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD PA	Jumlah dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	13	**109.000.000.000**	
Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
Operasional pelayanan rumah sakit	RSUD PA	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12	109.000.000.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD PA	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12	109.000.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	RSUD PA	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1			RSUD PA	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1		
Kegiatan										
Penyelenggaraan Sistem		Jumlah Sub Kegiatan	2				Jumlah Sub Kegiatan	2		

Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Sub Kegiatan										
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1		
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	15				Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	15		
		Indeks Penyelenggaraan	**833**				**Indeks Penyelenggaraan**	**833**		

		Pemerintah Daerah					**Pemerintah Daerah**			
		Nilai IKM	**84,00**				**Nilai IKM**	**84,00**		
		Nilai Sakip	**82,81**				**Nilai Sakip**	**82,,81**		
PROGRAM PENUN JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD PA	**Pemenuhan Standart pelayanan kesehatan Rumah Sakit (IKM)**	**100**	**24.184.897.000**	**PROGRAM PENUN JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	RSUD PA	**Pemenuhan Standart pelayanan kesehatan Rumah Sakit (IKM)**	**100**	**24.184.897.000**	
Kegiatan					**Kegiatan**					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	24.184.897.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	24.184.897.000	
Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	RSUD PA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	342	24.184.897.000	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	RSUD PA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	342	24.184.897.000	

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD PA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD PA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1		

							Akhir Tahun SKPD			
Pengelolaan dan Penyia pan Bahan Tanggapan Pemerik saan	RSUD PA	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2		Pengelolaan dan Penyia pan Bahan Tanggapan Pemerik saan	RSUD PA	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaa n	2		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD	RSUD PA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD	18		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	RSUD PA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	18		

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RSUD PA	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RSUD PA		2		
Kegiatan					**Kegiatan**					
Perencana an,Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah dokumen/lapo ran perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	26		Perencana an,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah dokumen/la poran perencanaan ,penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	26		
Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
Penyusunan Dokumen Perenca naan Pe rangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2		Penyusunan Dokumen Perenca naan Pe rangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2		

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1		

		Perubahan RKA-SKPD					Perubahan RKA-SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	16		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	16		
Evaluasi Kinerja	RSUD PA	Jumlah dokumen evaluasi	4		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah dokumen evaluasi	4		

Perangkat Daerah		kinerja Perangkat Daerah					kinerja Perangkat Daerah			
Kegiatan										
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	RSUD PA	jumlah dokumen/laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	RSUD PA	jumlah dokumen/laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3		
Sub Kegiatan										
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	RSUD PA	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	RSUD PA	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD PA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	1		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD PA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	1		

		Daerah pada SKPD					Daerah pada SKPD			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD PA	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD PA	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1		
Kegiatan					**Kegiatan**					
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	14		Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	14		
Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD PA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD PA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2		

Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD PA	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD PA	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12		
Kegiatan										
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2		
Sub Kegiatan										
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	RSUD PA	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	RSUD PA	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD PA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	50		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD PA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	50		

		Pendidikan dan Pelatihan					dan Pelatihan			
Kegiatan					**Kegiatan**					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah Sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah	7		Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah Sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah	7		
Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	RSUD PA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	RSUD PA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RSUD PA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RSUD PA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	RSUD PA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	12		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	RSUD PA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	12		

		yang Disediakan					yang Disediakan			
Penyediaan Bahan/Material	RSUD PA	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12		Penyediaan Bahan/Material	RSUD PA	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	RSUD PA	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12		Fasilitasi Kunjungan Tamu	RSUD PA	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD PA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD PA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	12		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	12		

		Elektronik pada SKPD					Elektronik pada SKPD			
Kegiatan					**Kegiatan**					
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD PA	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD PA	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10		
Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD PA	"Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan"	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD PA	"Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan"	10		
Kegiatan					**Kegiatan**					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	RSUD PA	jumlah laporan Penyediaan Jasa	14		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	RSUD PA	jumlah laporan Penyediaan Jasa	14		

Pemerintahan Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemerintahan Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSUD PA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSUD PA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD PA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD PA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		
Kegiatan					**Kegiatan**					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD PA	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	35		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD PA	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	35		

		Urusan Pemerintahan Daerah					Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUD PA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUD PA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35		
TOTAL				**145.033.064.000**	**TOTAL**				**145.033.064.000**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program / kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning). Kegiatan perencanaan di RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program / kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan dan pengelolaan program yang akuntabel dan transparan di lingkup internal manajemen sebuah rumah sakit, tuntutan kualitas dan kuantitas mutu program merupakan keharusan, karena penyelenggaraan pelaksanaan program dan pengembangan mutu merupakan bagian dari keberhasilan penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit.

Rancangan rencana kerja RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali merupakan hasil dari usulan dan diskusi melalui pembahasan internal rumah sakit. Pembahasan dilakukan untuk menyelarasakan rumusan renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Boyolali.

Bahwa dalam proses perencanaan RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali sebagai BLUD yang menggunakan dana fungsional sudah dilakukan upaya efisiensi dan efektifitas dengan mengurangi belanja-belanja operasional diantaranya makan minum rapat, honor dan belanja modal bangunan. Usulan program dan kegiatan 2024 diusulkan terkait dengan biaya operasional rutin rumah sakit, pemeliharaan gedung-gedung baru, penambahan peralatan termasuk investasi gedung Berdasarkan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran dimaksud serta memperhatikan kesesuaian program / kegiatan yang ada, maka usulan pemangku kepentingan diakomodir sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
			Angka Harapan Hidup (AHH) **(Permendagri 86/2017)**		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD PA	**Persentase capaian SPM RS**	**145.033.064.000 / 100%**	APBD/BLUD
	Kegiatan				
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	RSUD PA	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11.848.167.000 / 2 unit	DAK
	Sub Kegiatan				
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	RSUD PA	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 unit	DAK
	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD PA	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	DAK
	Kegiatan				

	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD PA	Jumlah dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	**109.000.000.000 / 13 dokumen**	BLUD
	Sub Kegiatan				
	Operasional pelayanan rumah sakit	RSUD PA	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	109.000.000.000/ 12 dokumen	BLUD
	Sub Kegiatan				
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	RSUD PA	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	BLUD
	Kegiatan				
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	RSUD PA	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	2 kegiatan	BLUD
	Sub Kegiatan				
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	RSUD PA	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen	BLUD
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	RSUD PA	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	15 unit	BLUD
			Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	893 Indeks	
			Nilai IKM	84,00 nilai	
			Nilai Sakip	82,81 nilai	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD PA	**Pemenuhan Standart pelayanan kesehatan Rumah Sakit (IKM)**	**24.184.897.000 / 100 %**	APBD
	Kegiatan				

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.184.897.000 / 3 kegiatan	APBD
	Sub Kegiatan				
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	RSUD PA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24.887.205.000 / 342 orang/bulan	APBD
	Pelaksanaan Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	RSUD PA	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	BLUD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	BLUD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	BLUD
	Pengelolaan dan Penyia pan Bahan Tanggapan Pemerik saan	RSUD PA	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	BLUD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	RSUD PA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	BLUD
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	BLUD
	Kegiatan				
	Perencana an,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah dokumen/laporan perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	26 dokumen/laporan	BLUD

	Sub Kegiatan				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	BLUD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	BLUD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	BLUD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	BLUD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	BLUD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD PA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	BLUD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	BLUD
	Kegiatan				
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		jumlah dokumen/laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 dok/laporan	BLUD
	Sub Kegiatan				

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	BLUD
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	BLUD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	BLUD
	Kegiatan				
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	14 dokumen	BLUD
	Sub Kegiatan				
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD PA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 dokumen	BLUD
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD PA	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12 dokumen	BLUD
	Kegiatan				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 kegiatan	BLUD
	Sub Kegiatan				
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	RSUD PA	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	BLUD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD PA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 orang	BLUD
	Kegiatan				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD PA	Jumlah Sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah	7 kegiatan	BLUD
	Sub Kegiatan				

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	RSUD PA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	BLUD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RSUD PA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	BLUD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	RSUD PA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	BLUD
	Penyediaan Bahan/Material	RSUD PA	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	BLUD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	RSUD PA	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	BLUD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD PA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	BLUD
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	RSUD PA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	BLUD
	Kegiatan				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD PA	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 unit	BLUD
	Sub Kegiatan				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD PA	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	BLUD
	Kegiatan				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD PA	jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14	
	Sub Kegiatan				

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSUD PA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	BLUD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD PA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	BLUD
	Kegiatan				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD PA	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35 unit	BLUD
	Sub Kegiatan				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUD PA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	
	TOTAL			**145.033.064.000**	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RSUD PANDAN ARANG

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Nasional dan prioritas pembangunan dibidang kesehatan adalah prioritas program dibidang kesehatan untuk meningkatkan akses terhadap kesehatan yang berkualitas itu semua dijabarkan kedalam program yang bertujuan untuk meningkatkan *performance* RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Permendagri No 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagai SKPD telah menerapkan PPK BLUD diberikan kewenangan sepenuhnya dalam pengelolaan pendayagunaan fungsional yang digariskan sepenuhnya untuk membiayai biaya operasional pelayanan langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta mengacu pada arah kebijakan Kabupaten Boyolali dibidang Kesehatan. Prioritas kegiatan tahun 2024 adalah meningkatnya derajad kesehatan.

A. Arah Kebijakan Nasional Bidang Kesehatan

Peningkatan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi peningkatan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan peningkatan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Arah kebijakan dan strategi peningkatan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar

peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik lndonesia.

Untuk mencapai sasaran peningkatan kesehatan pada akhir tahun 2024 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2024. Dalam rangka untuk menjabarkan visi misi pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator tujuan Angka Harapan Hidup.
2. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat

Penjabaran kebijakan yang ada secara Nasional berdasarkan tugas dan fungsi RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dan berfungsi sebagai berikut:

a. perencanaan pelayanan medik, keperawatan, pelayanan penunjang, sarana dan prasarana rumah sakit pendidikan dan pelatihan,promosi, administrasi kepegawaian serta keuangan;
b. penyelenggaraan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna;
c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, melalui pelayanan kesehatan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan non medik;
d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan;

e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
f. pelaksanaan administrasi rumah sakit.

Sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Boyolali periode 2021-2026, maka RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagai lembaga teknis daerah sebagaimana kewenangan dan tugas pokok fungsinya, akan secara khusus melaksanakan penjabaran dari Misi Kedua, yaitu **Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya**.

Tujuan yang terkait dengan pelayanan kesehatan di RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali adalah Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, baik melalui pelayanan kesehatan, lingkungan, ataupun perilaku dengan pendekatan keluarga peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa program yang menjadi prioritas dalam RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Pandan Arang Boyolali yaitu Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota dan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

B. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Kesehatan

Prioritas pembangunan nasional meliputi 14 yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan, penyediaan air bersih, penanggulangan kemiskinan, pelayanan publik, pemukiman dan sanitasi, ketahanan pangan, infrastruktur, penataan ruang, pendapatan daerah, lingkungan hidup, sdm dan ketenagakerjaan, bencana. Prioritas tersebut dijabarkan ke dalam berbagai sasaran dan kebijakan. Adapun kebijakan nasional yang menjadi rujukan bagi RSUD Pandan Arang

Kab. Boyolali disinkronkan dengan kebijakan daerah dan urusan yang menjadi kewenangan RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali yaitu:

1. Pencapaian kinerja secara optimal disinkronkan dengan kebijakan koordinasi dan sinergisasi pembangunan bidang kesehatan. Kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan perencanaan pengembangan RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali dan penyusunan berbagai dokumen perencanaan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran (LKPJ). Untuk mendukung perwujudan perencanaan yang akuntabel dilakukan pula kajian-kajian lapangan atas berbagai usulan kegiatan di 3 (tiga) bidang yaitu bidang pelayanan umum, bidang penunjang, bagian keuangan serta evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya. Kebijakan birokrasi dilaksanakan pula melalui peningkatan kualitas SDM.
2. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik disinkronkan dengan kebijakan pelayanan masyarakat yang berkualitas didukung oleh teknologi informasi. Kebijakan ini diwujudkan melalui penyusunan sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi.
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui upaya inovasi strategis disinkronkan dengan meningkatkan alih teknologi .
4. Pemantapan pelaksanaan sistem kesehatan nasional disinkronkan dengan peningkatan kualitas pengembangan pelayanan kesehatan. Kebijakan ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitasi pelayanan kesehatan (alat kesehatan dan kedokteran) sesuai SPM RS Kelas B.
5. Peningkatan promosi kesehatan yang efektif dan terpadu untuk produk-produk kreatif unggulan disinkronkan dengan mendorong sektor kesehatan yang kompetitif dalam persaingan global melalui penguatan kelembagaan dan jejaring promosi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang.

Rancangan awal renja RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali

tahun 2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1) Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing
2) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan rencana kerja (Renja) RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali tahun 2024 adalah :

1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit
3) Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali dalam tabel sebagi berikut :

TUJUAN DAN SASARAN RENJA
RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing					**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan**	**Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan**		**Angka Harapan Hidup (AHH) (Permendagri 86/2017)**
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase capaian SPM RS**
				Kegiatan	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				Sub Kegiatan	

				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan
				Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000
				Kegiatan	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
				Sub Kegiatan	
				Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				Kegiatan	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
				Sub Kegiatan	
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

				Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan
					Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
					Nilai IKM
					Nilai Sakip
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahann yang baik	**Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit**	**Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit**	**Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Pemenuhan Standart pelayanan kesehatan Rumah Sakit (IKM)**
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah			**Kegiatan**	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Sub Kegiatan	
				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

				Pelaksanaan Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Pengelolaan dan Penyia pan Bahan Tanggapan Pemerik saan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Kegiatan	
				Perencana an,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat
				Sub Kegiatan	

				Penyusunan Dokumen Perenca naan Pe rangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Kegiatan	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah dokumen/laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				Sub Kegiatan	

				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Kegiatan	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
				Sub Kegiatan	
				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah
				Kegiatan	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Sub Kegiatan	
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
				Kegiatan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah
				Sub Kegiatan	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Kegiatan	

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Sub Kegiatan	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Kegiatan	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Sub Kegiatan	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Kegiatan	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Sub Kegiatan	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

				Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD PANDAN ARANG

4.1. Program dan Kegiatan

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, yaitu: "**BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (Metal)**" yang dijabarkan kedalam sasaran RPJMD 2021 – 2026 sebagaimana telah diuraikan diatas
- Pencapaian SPM, yaitu standar pelayanan minimal
- Peningkatan pelayanan dasar bidang kesehatan.
- Pendukung Pelayanan JKN
- Peningkatan pelayanan rujukan
- Peningkatan sumber daya kesehatan

B. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2024

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan adalah 2 (dua) program, 12 (dua belas) kegiatan, 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Kebutuhan dana / pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah Rp 145.033.064.000,00. Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif dapat dilihat dalam tabel berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Pandan Arang Kab.Boyolali Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RSUD PANDAN ARANG KAB. BOYOLALI TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)						**36.033.064.000,00**							**36.033.064.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**36.033.064.000,00**							**36.033.064.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**36.033.064.000,00**							**36.033.064.000,00**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-		-	-	**24.184.897.000,00**						-	**24.184.897.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Dokumen	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Dokumen	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Dokumen	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Dokumen	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Dokumen	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Dokumen	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	16 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	16 Laporan	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	4 Laporan	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	24.184.897.000,00			-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	342 Orang/bulan	24.184.897.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		Orang/bulan	342 Orang/bulan	24.184.897.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	342 Orang/bulan	24.184.897.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Dokumen	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Dokumen	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Laporan	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Dokumen	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	18 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	18 Laporan	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Dokumen	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00			-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Dokumen	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Dokumen	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Laporan	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Laporan	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kew enangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00			-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Dokumen	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Dokumen	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Dokumen	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00			-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Dokumen	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegaw aian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Dokumen	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegaw ai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	50 Orang	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	50 Orang	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00			-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Paket	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		Paket	12 Paket	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Paket	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	12 Paket	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Paket	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	12 Paket	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Paket	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		Paket	12 Paket	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Paket	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Laporan	12 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Laporan	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Laporan	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Dokumen	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	0,00			-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	10 Unit	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	10 Unit	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	10 Unit	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	0,00			-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Laporan	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	2 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Laporan	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Laporan	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perangkat Daerah*	100 persen		100 persen	100 persen	0,00			-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	35 Unit	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	35 Unit	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	35 Unit	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**		**-**	**-**	**11.848.167.000,00**						**-**	**11.848.167.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kew enangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	11.848.167.000,00			-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkata n derajat kesehatan masyarakat .	-	1 Unit	11.848.167.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit		Unit	1 Unit	6.848.167.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkata n derajat kesehatan masyarakat .	-	1 Unit	6.848.167.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	5.000.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkata n derajat kesehatan masyarakat .	-	1 Unit	5.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (APBD)

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (BLUD) KAB. BOYOLALI TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (BLUD)						**109.000.000.000,00**							**114.000.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**109.000.000.000,00**							**114.000.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**109.000.000.000,00**							**114.000.000.000,00**	
1,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-		-	-	**109.000.000.000,00**						-	**114.000.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	109.000.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	-	12 Dokumen	114.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (BLUD)
	1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	109.000.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	-	12 Dokumen	114.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG (BLUD)
		JUMLAH						**109.000.000.000,00**							**114.000.000.000,00**	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali tahun 2024 ini merupakan pedoman bagi segenap aparatur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali guna memudahkan dalam pengendalian penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Dalam perjalanan waktu tidak menutup kemungkinan rencana kerja ini berubah karena beberapa faktor, misalnya regulasi dari Pusat, kebijakan – kebijakan lainnya, karena kebutuhan / kepentingan organisasi dan lain – lain. Namun diupayakan agar perubahan – perubahan yang dilakukan tidak terlalu jauh berbeda dari garis – garis besar yang telah disusun.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini harapannya pelayanan yang diberikan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali dapat lebih meningkat dan optimal sehingga dapat mewujudkan Pelayanan Prima kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali.

Rancangan awal renja RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali tahun 2024 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pelayanan kesehatan tahunan daerah. Rancangan awal Renja RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali tahun 2024 menjadi acuan dan pedoman bagi RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2024.

Rencana Kerja RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Kesehatan.

Rencana Kerja ini merupakan dasar monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan RSUD Pandan Arang yang berarti bahwa setiap kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan harus dapat dipertanggungiawabkan secara profesional dan transparan.

Selain itu, Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian dari semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan

dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat' akurat, transparan dan adil serta biaya terjangkau'

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali sebagai berikut:

1. Bagian dan bidang pada RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali agar mendukung pencapaian target - target Renja dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renja dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan beserta target triwulanan.
2. Diharapkan seluruh aparatur di bagian dan bidang pada RSUD Pandan Arang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target - target Renja RSUD Pandan Arang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renja secara berkala.
4. Koordinasi dengan OPD lain yang memiliki kepentingan dalam rangka mencapai target program-program yang masih rendah capaiannya.

Dengan disusunnya dan ditetapkannya Renja Tahun 2024 RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang kemudian dikonversi ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), dengan melihat KUA PPAS.

Dengan demikian, hasil-hasil pelayanan diharapkan dapat diterima di seluruh lapisan masyarakat, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan.

2. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

RSUD WARAS WIRIS

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Allah SWT, dengan petunjuk dan pertolongan-Nya Rencana Kerja (Renja) RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dapat kami susun.

Rencana Kerja RSUD Waras Wiris Boyolali ini, utamanya menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2026 dan sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja sebagai salah satu acuan minimal dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali Tahun 2024 bagi masing-masing Bagian, Bidang, Subbag, Seksi dan Instalasi.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun Rencana Kerja ini diucapkan terima kasih, dan semoga Rencana Kerja Tahun 2024 bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

Halaman Judul			i
Kata Pengantar			ii
Daftar isi			iii
BAB I	**PENDAHULUAN**		1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	2
	1.3	Maksud dan Tujuan	3
	1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**		6
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan	13
	2.3	Kajian Atas Indikator Kinerja	20
	2.4	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	22
	2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
	2.6	Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat	25
BAB III	**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**		27
	3.1	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	27
	3.2	Tujuan dan Sasaran renja	29
	3.3	Program dan kegiatan Tahun 2024	39
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**		40
	4.1	Program dan kegiatan	40
BAB V	**PENUTUP**		41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhan akan menuju satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No 25 tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya intregasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik ditingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan penjabaran atas visi, misi dan program yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Tahun 2021–2026 Namun apabila dalam perjalan waktu terdapat perubahan-perubahan peraturan bidang pemerintahan maupun kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah tidak menutup kemungkinan terdapat perubahan-perubahan terhadap program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021–2026, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024, hal ini untuk mendapatkan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah khususnya

bidang kesehatan sedangkan dalam hal penentuan program dan kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali Tahun 2024 memuat evaluasi pencapaian pelaksanaan tugas umum kesehatan selama Tahun 2022, prioritas program dan kegiatan Tahun 2024, strategi dan kebijakan mencapai sasaran bidang kesehatan umum Tahun 2024 serta penganggaran untuk masing-masing program dari kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4844) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Cara Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

Kegiatan-kegiatan teknis operasional maupun dalam penyiapan kebijakan teknis di bidang kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali senantiasa mengacu/berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dari pusat, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Mendagri, dan Keputusan Menteri Kesehatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud penyusunan Rencana Kerja RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :
   1) Sebagai acuan bagi unit-unit kegiatan dan masyarakat pengguna jasa rumah sakit karena memuat kebijakan pelayanan kesehatan (pelayanan publik) di rumah sakit;

2) Memberikan arah kebijakan teknis dan pedoman melaksanakan kegiatan Tahun 2024 bagi Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris dalam rangka mengemban visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali, sebagaimana tertuang dalam rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2026;
3) Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

b. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah :
1) Menjabarkan Rencana Strategis RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan rumah sakit Tahun Anggaran 2024;
2) Menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan seluruh kegiatan rumah sakit pada Tahun Anggaran 2024;
3) Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan;
4) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik;
5) Mewujudkan keterpaduan perencanaan dan kegiatan bidang kesehatan tahunan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, mempertajam prioritas program kegiatan dan kesinambungan program kegiatan dari tahun ke tahun.

1.4. Sistematika

Penulisan rencana kerja RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali dengan sistematika, sebagai berikut :

Kata Pengantar
Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Sistematika Dokumen Renja
- 1.4 Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran renja
- 3.3 Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD WARAS WIRIS KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Waras Wiris Tahun 2022 dan Capaian Renstra RSUD Waras Wiris

Renja RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali selama tahun 2022 dan perkiraan pencapaian target tahun 2023.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan rumah sakit dimana indikator kinerja rumah sakit adalah

1. Meningkatnya Tingkat Hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR)
2. Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS)
3. Turn Over Internal (TOI)
4. Bed Turn Over (BTO)
5. Menurunnya angka kematian murni (Net Death Rate/ NDR)
6. Gross Death Rate (GDR)
7. Pelayanan pasien Jamkesmas-Jamkesda
8. Meningkatnya nilai IKM

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Pencapaian Target Tahun 2023

Pada tahun 2022 RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali menerima anggaran sebesar Rp. 47.907.948.000,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 2 program dan 3 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 44.097.466.789,- atau mencapai 92.05%, dengan tingkat capaian 3 indikator kinerja program

Selama tahun 2022 hasil capaian kinerja kegiatan pada RSUD Waras Wiris dapat dilihat dari Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Target indikator kinerja BOR pada tahun 2022 75%, dapat direalisasi 53,7 %. Nilai BOR RSUD Waras Wiris dibawah standar Depkes RI, standar BOR Depkes adalah 60-80% (depkes RI, 2005). Nilai BOR dipengaruhi jumlah pasien dan hari perawatan, semakin rendah hari perawatan maka semakin rendah pula nilai BOR. Nilai BOR rendah dikarenakan kunjungan pasien RSUD

Waras Wiris di Andong masih sangat rendah. Pasien BPJS dengan sistem pembayaran INA CBG's bukan dengan sistem klaim sehingga efektifitas hari perawatan lebih dipotimalkan;

2. Target LOS RSUD Waras Wiris pada Tahun 2022 sebesar 6 hari sedangkan realisasi pada tahun 2022 sebesar 4.1 hari. Secara umum nilai LOS yang ideal (depkes RI) antara 3-12 hari (Depkes, 2005). Sehingga nilai LOS RSUD Waras Wiris masih memenuhi standart. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. Kunci keberhasilan pada penjagaan mutu pelayanan medik dan keperawatan pada pasien. Keberhasilan indikator ini didukung adanya penjagaan mutu pelayanan baik dari segi SDM maupun sarana prasarana;
3. Target TOI pada tahun 2022 RSUD Waras Wiris sebesar 2 hari sedangkan realisasi pada tahun 2022 sebesar 4,8 hari. Angka realisasi tinggi namun idealnya tempat tidur kosong tidak terisi (TOI) pada kisaran 1-3 hari yang mempengaruhi indikator ini adalah jumlah tempat tidur, jumlah pasien dan lama hari perawatan
4. Target BTO pada tahun 2022 adalah 45 kali sedangkan realisasi pada tahun 2022 adalah 40 kali. Ideal BTO 40-50 kali, sehingga masih memenuhi standart. Kunjungan pasien ke RSUD Waras Wiris masih rendah dikarenakan keberadaan RSUD Waras Wiris belum diketahui masyarakat luas sehingga peningkatan promosi perlu dilaksanakan
5. Target NDR pada tahun 2022 adalah 16 % realisasinya sebesar 16,2%. Angka realisasi lebih tinggi namun mencerminkan belum tercapainya target yang ditetapkan. karena semakin tinggi angka NDR menunjukkan semakin meningkatnya Angka kematian lebih dari atau sama dengan 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar
6. Target GDR pada tahun 2022 adalah 30 % realisasinya sebesar 33%. Angka realiasai lebih tinggi namun mencerminkan belum tercapainya target yang ditetapkan. karena semakin tinggi angka GDR menunjukkan semakin meningkatnya Angka kematian setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar.

7. Pemenuhan Standart Sarana dan Prasarana Rumah Sakit adalah sarana prasarana yang harus memenuhi standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari target 90% sesuai dengan self assement terealisasi 90%

8. Pemenuhan Standart Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan sesuai dengan standar nasional akreditasi rumah sakit atau disingkat Snars yang merupakan standar akreditasi baru yang bersifat nasional dan diberlakukan secara nasional di Indonesia. Pelaksanaan akreditasi pada tahun 2022 ditargetkan sudah 100% dan kegiatan baru terealisasi 85%

9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoeh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dari RSUD Waras Wiris yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan selanjutnya. Selain itu juga dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Pada tahun 2022 target IKM sebesar 83%, terealisasi 74,97%, banyak unsur pelayanan yang masih harus diperbaiki baik di rawat jalan maupun rawat inap dan juga menambah/mengoptimalkan sarpras yang ada di rumah sakit.

10. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

    Anggaran Pendapatan RSUD Waras Wiris pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 20.300.000.000,00 Realisasi Pendapatan RSUD Waras Wiris pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 18.707.513.006,00

C. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2023 dengan dana sebesar Rp 54.220.243.302,00 yang terdiri dari pendapatan BLUD Rp. 25.600.000.000, dari APBD sebesar Rp.

26.568.548.000,00 dan Silva BLUD Rp. 2.051.695.302,-. Semua dana tersebut yang diuraikan dalam 2 program dan 3 kegiatan. Dengan pencapaian pertanggal 31 Agustus 2023 mencapai rata-rata 66,68% dari target yang ditetapkan 100%.

Hasil capaian kinerja kegiatan selama tahun 2023 pada RSUD Waras Wiris dapat dilihat dari Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tingkat Hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR)
   BOR sampai dengan bulan Juni sebesar 41,8
2. Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS)
   Sampai dengan bulan Juni tercapai 2,8 hari
3. Turn Over Internal (TOI)
   Sampai dengan bulan Juni tercapai 5,4 hari
4. Bed Turn Over (BTO)
   Sampai dengan bulan Juni tercapai 3,1 kali
5. Menurunnya angka kematian murni (Net Death Rate/ NDR)
   Sampai dengan bulan Juni tercapai 0,9 %
6. Gross Death Rate (GDR)
   Sampai dengan bulan Juni tercapai 1,3 %

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026, maka pada tahun 2023 RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi antar instalasi sehingga akan memberikan efisiensi dalam operasional RSUD Waras Wiris kabupaten boyolali dan meningkatnya kualitas layanan yang diberikan kepada pasien dan keluarga pasien;
2. Menyusun perencanaan yang lebih matang dalam menentukan kegiatan dan alokasi anggarannya;
3. Membuat skala prioritas kegiatan yang paling diperlukan;
4. Melakukan identifikasi masalah yang timbul dalam setiap pelaksanaan kegiatan, serta menyelesaikannya secara koperhensif;
5. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga tidak berbenturan dengan kegiatan yang lain dan hasilnya diharapkan lebih optimal;

6. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada dan mengusulkan penambahan / pengadaan peralatan kesehatan dan kedokteran tidak hanya dari sumber dana DAU tetapi juga dari DAK, TP maupun Dana Dekonsentrasi dari pemerintah pusat;
7. Mengirimkan personil untuk mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

a. Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali

Berdasar Peraturan Bupati Boyolali Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kelas C Kabupaten Boyolali. RSUD Waras Wiris merupakan unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan kepegawaian.

RSUD Waras Wiris dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi RSUD Waras Wiris Boyolali Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

a. Direktur;
b. Bagian Umum;
    1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
    2. Subbagian Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
    3. Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Sistem Informasi Manajemen.
c. Bidang Pelayanan;
    1. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
    2. Seksi Pelayanan Penunjang Medik.
d. Bidang Penunjang Pelayanan;
    1. Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana; dan
    2. Seksi Logistik Medik dan Non Medik.
e. Bidang Keuangan;
    1. Seksi Perencanaan Anggaran dan Mobilisasi Dana; dan

2. Seksi Pembukuan dan Perbendaharaan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Unit Organisasi Pendukung.

Berdasar Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kelas C Kabupaten Boyolali. RSUD Waras Wiris mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Dalam melaksanakan tugas RSUD Waras Wiris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD Waras Wiris;

b. penyusunan program kerja dan anggaran RSUD Waras Wiris;

c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD Waras Wiris;

d. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;

e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

g. penyelenggaraan kesekretariatan RSUD Waras Wiris;

h. pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset, dan kepegawaian RSUD Waras Wiris;

i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RSUD Waras Wiris; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Keadaan Personil

Demi kelancaran dan suksesnya pelaksanaan tugas, RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali didukung oleh 158orang personil, terdiri dari 124 PNS, 3 PTT Daerah dan Kontrak Rumah Sakit 29 orang

a. Menurut Jabatan PNS, PTT Daerah dan Kontrak Rumah Sakit

No.	NAMA JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
I.	**JABATAN STRUKTURAL**		
1.	Eselon IIIa	1	Direktur
2.	Eselon IIIb	4	Kabid pelayanan, kabid penunjang, kabid keuangan dan kabag umum
3.	Eselon Iva	9	Kasi dan kasubag
II.	**JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS**		
1.	Dokter Umum	5	5 PNS
2.	Dokter Gigi	1	
3.	Dokter Spesialis :		
	a. Penyakit Dalam	2	1 PNS,1 KONTRAK
	b. Kandungan	2	1 PNS,1 KONTRAK
	c. Bedah	2	1 PNS, 1 KONTRAK
	d. Anak	1	1 PNS
	e. Syaraf	1	1 KONTRAK
	f. Kulit dan Kelamin	-	-
	g. Patologi Klinik	1	1 KONTRAK
	h. Paru	-	-
	i. Mata	1	1 Kontrak
	j. Radiologi	1	1 Kontrak
	k. Jiwa	1	PNS
	l. Dokter Anastesi	1	Kontrak
4.	Perawat terdiri dari :	86	50 PNS, 32 BLUD, 2 Kontrak
5.	Perawat Gigi	1	PNS
6.	Perawat Anastesi	2	1 PNS, 1 BLUD
5.	Bidan	15	11 PNS, 4 PPPK
6.	Apoteker	4	4 PNS
7.	Asisten Apoteker	11	7 PNS, 2 BLUD, 2 PPPK
8.	Radiografer	6	3 PNS, 3 BLUD
9.	Analisis Kesehatan	8	5 PNS, 1 BLUD, 1 Kontrak, 1 PPPK
10.	Fisioterapi	1	1 PNS
11.	Okupasi terapi	1	1 PNS
12.	Elektromedik	1	1 PNS

No.	NAMA JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
13.	Kesehatan Lingkungan	-	-
14.	Sanitarian	2	2 PNS
15.	Perekam Medik	6	4 BLUD, 1 Kontrak, 1 PPPK
16.	Nutrisionis	3	2 PNS, 1 PPPK
17.	Fisikiawan Medis	1	kontrak
III	**JABATAN FUNGSIONAL UMUM**		
1.	Administrasi Keuangan		
	a. Bendahara penerimaan	1	1 PNS
	b.Bendahara pengeluaran	1	1 PNS
	c.Bendahara pengeluaran pembantu	3	1 PTT, 1 BLUD, 1 Kontrak
	d. Perencanaan	1	PNS
	d. Administrasi keuangan lainnya	5	2 PNS, 2 kontrak, 1 BLUD
2.	Admin lainnya	16	3 PNS, 8 BLUD, 5 Kontrak
3.	Juru Masak	5	3 BLUD, 2 Kontrak
4.	Pengemudi	6	1 PNS, 4 BLUD, 2 Kontrak
5.	Tenaga Kebersihan	27	26 Kontrak
6.	Petugas Keamanan	9	1 PNS, 5 Kontrak
7.	Petugas Loundry	2	1 PNS, 1 KONTRAK

c. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil analisis beban kerja tahun 2023 rencana kebutuhan SDM dan rencana penambahan sebagai berikut:

No.	Nama jabatan	Jumlah pegawai yang dibutuhkan	Jumlah Pegawai yang ada 2022	Rencana Penambahan pegawai 2023
1	**Direktur**	1	1	
2	Dokter Umum	5	5	
3	Dokter Gigi	1	1	
4	Dokter Spesialis			
	- Dokter Obgyn	2	2	

No.	Nama jabatan	Jumlah pegawai yang dibutuhkan	Jumlah Pegawai yang ada 2022	Rencana Penambahan pegawai 2023
	- Dokter Bedah	2	2	
	- Dokter Dalam	2	2	
	- Dokter Anak	2	1	1
	- Dokter Saraf	1	1	
	- Dokter Paru-paru	0	0	
	- Dokter Patologis Klinis	1	1	
	- Dokter Radiologi	1	1	
	- Dokter Anastesi	1	1	
	- Dokter Mata	1	1	
	- Dokter THT	1	0	1
5	Perawat	132	86	30
6	Perawat Gigi	1	1	
7	Bidan	15	15	
8	Apoteker	4	4	
9	Asisten Apoteker	9	8	1
10	Nutrisionis	2	2	
11	Pranata Laboratorium Kesehatan	6	7	1
12	Sanitarian	2	2	
13	Fisioterapi	1	1	
14	Teknik Elektromedik	2	2	
15	Okupasi	1	1	
16	Perekam Medis	5	5	
17	Radiologi	6	4	2
18	**Kepala Subbagian Tata Usaha**	1	1	
19	Pengadministrasi Persuratan	1	1	
20	Pengelola Kegiatan (umum & kepegawaian)	2	1	

No.	Nama jabatan	Jumlah pegawai yang dibutuhkan	Jumlah Pegawai yang ada 2022	Rencana Penambahan pegawai 2023
21	Pengelola Keuangan / Kasir	5	5	
22	Bendahara (Penerima & Pengeluaran)	2	2	
23	Penyusun Program Anggaran dan Laporan	1	1	
24	Petugas Keamanan	9	9	
25	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	0	
26	Pengelola Sistem Informasi	3	3	
27	Pengemudi	6	6	
28	Pramu Bhakti	30	26	
29	**Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan**	1	1	
30	Pengelola Pelayanan Kesehatan	1	1	
31	Pemulasaran Jenasah	0	0	
32	Pengadministrasi Umum (Pelayanan/Loket)	10	10	
33	**Kepala Seksi Penunjang Medik**	1	1	
34	Pengelola Kegiatan (Pengadaan)	2	1	
35	Pengolah Makanan	5	5	
36	Binatu Rumah Sakit/loudry	2	2	
	Jumlah	**253**	**227**	**36**

d. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pada Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali sudah tersedia, namun untuk peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat sangat perlu adanya perbaikan atau penambahan sarana dan prasarana yang ada, seperti sarana komputer, sarana peralatan kerja (meja kursi, almari arsip, filling kabinet dan ruang kerja) dan alat-alat kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan agar lebih memadai dan optimal.

Secara garis besar kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

1. Bangunan; pada tahun 2021 ini dilaksanakan pembangunan Gedung rawat jalan terpadu dari dana DAK, tahun 2023 pembangunan Gedung IGD dan HD dari dana DAK.
2. Sarana kendaraan dinas roda empat ada 5 (lima) buah terdiri dari mobil operasional 2 (dua) buah dalam keadaan baik, mobil ambulans emergency 2 (dua) buah dalam keadaan baik dan 1 (satu) buah ambulance jenazah dalam keadaan baik.
3. Sarana kendaraan roda dua (sepeda motor) ada 1 (satu) buah dalam keadaan baik.
4. Sarana komputer, laptop dan printer dalam keadaan cukup baik dan memadai.
5. Sarana peralatan kantor/inventaris seperti meja kursi, almari, filling cabinet, dll yang sudah cukup memadai.
6. Sarana alat kesehatan masih belum maksimal, untuk perkembangan ke depan perlu adanya penambahan alat-alat kesehatan disesuaikan dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan mutu dan standar layanan kesehatan.

Hasil analisis kondisi dan masalah yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali saat ini adalah sebagai berikut :

1. Peralatan kesehatan masih belum mencukupi dan karena keterbatasan peralatan kesehatan memberikan dampak pada pelayanan kesehatan yang tidak optimal. Dalam beberapa kasus karena ketiadaan peralatan kesehatan, maka pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain yang peralatan kesehatannya lebih lengkap;

2. Masih kurangnya program pengembangan SDM baik untuk tenaga medis, para medis maupun non medis;

   Masih diperlukan pengembangan SDM melalui kursus, workshop, pendidikan, pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan baik untuk tenaga medis, para medis dan non medis ;
3. Beberapa formasi RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali masih kekurangan personil

   Secara tidak langsung hal ini akan berpengaruh pada organisasi karena salah satu tolok ukur pelayanan adalah kecepatan dan ketepatan, dimana pada RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali jumlah personil masih belum seimbang dengan beban kerja yang ada.
4. Sarana dan Prasarana

   Melihat kondisi sarana dan prasarana yang ada di RSUD Waras Wiris kabupaten Boyolali saat ini, perlu kiranya dicukupi terutama kendaraan operasional khususnya ambulance yang kondisinya sudah tidak layak.
5. Semakin banyaknya rumah sakit / pusat layanan kesehatan yang dibangun baik oleh pemerintah maupun swasta sehingga tingkat kompetisinya semakin bertambah ketat.
6. Koordinasi antar unit masih perlu ditingkatkan

   Koordinasi yang baik akan lebih memudahkan memutuskan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan yang diambil, muaranya akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan diberikan kepada pasien/costumer.

e. Capaian kinerja pelayanan

Capaian kinerja pelayanan dan anggaran pada tahun 2022 meningkat bila dibandingkan dengan kurun waktu pada tahun 2021, hal ini dapat ditunjukkan oleh kenaikan jumlah kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap. Saat ini dilakukan upaya pemenuhan fasilitas dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit dan promosi pelayanan baru rumah sakit di Kecamatan Andong. Program-program layanan unggulan rumah sakit sedang digalakan untuk menciptakan peluang pasar baru dan telah disahkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Waras Wiris

Kabupaten Boyolali. Dengan adanya kebijakan tarif baru diharapkan peningkatan mutu layanan dan realisasi proyeksi capaian kinerja pelayanan dan anggaran akan tercapai juga penambahan pelayanan dokter spesialis yaitu spesialais mata, THT dan paru.

Hasil capaian kinerja kegiatan pada tahun 2020 s.d 2022 adalah sebagai berikut :

Tingkat Kemanfaatan Rumah Sakit:

1. Tingkat Kemanfaatan Rumah Sakit:

No.	PASIEN	JUMLAH		
		2020	2021	2022
1.	PASIEN RAWAT JALAN			
	a. Pasien Umum	13.864	7.734	12.606
	b. Pasien BPJS	9.243	8.216	16.765
	c. Pasien Jampersal	-	-	
	d. Pasien Covid-19	-	-	
	e. Pasien asuransi lainnya	-	-	
	J U M L A H			
2.	PASIEN RAWAT INAP			
	a. Pasien Umum	1.167	602	974
	b. Pasien BPJS	1.855	1.513	3.140
	c. Pasien Jampersal	86	28	30
	d. Pasien Covid-19	1	261	-
	e. Pasien asuransi lainnya	120	13	205
	J U M L A H	26.336	18.367	33.720

2. Indikator Pelayanan

No.	INDIKATOR PELAYANAN	JUMLAH		
		2020	2021	2022
1.	Jumlah tempat tidur	76	101	101
2.	Total pasien dirawat	3.139	2.289	4.349
3.	Total pasien keluar hidup dan mati	3.139	2.289	4.349

No.	INDIKATOR PELAYANAN	JUMLAH		
		2020	2021	2022
4.	Total pasien mati	75	144	113
5.	Total pasien rujukan			
6.	Total pasien dirujuk	71	44	20
7.	Total pasien mati ≥ 48 jam	20	98	52
8.	Total pasien mati ≤ 48 jam	55	46	61
9.	Total hari perawatan	10.575	9.630	16.826
10.	Total lama dirawat	9.845	8.900	16.826
11.	Rata-rata kunjungan poliklinik per hari	70,3	13,07	122

3. Efisiensi Pelayanan

No.	INDIKATOR	HASIL		
		2020	2021	2022
1.	BOR (%)	38,1%	26,1%	44,20%
2.	LOS (hari)	3,4	4,2	2,8
3.	TOI (hari)	5,5	11,8	4,8
4.	BTO (kali)	41,3	22,6	3,5
5.	NDR (%)	6,4	42,8%	16%
6.	GDR (%)	2,39%	62,9%	33%

4. Pendapatan

Pelayanan	2020	2021	2022
Umum	***3.058.516.025***	***3.121.509.654***	***5.330.857.017***
BPJS	***10.074.509.902***	***5.587.646.715***	***9.794.838.620***
Jampersal	***407.623.885***	***98.504.700***	-
Covid-19		***12.141.314.600***	***3.192.610.200***
Asuransi Lainnya	***72.526.057***	***186.780.061***	***240.882.929***
Hasil Kerjasama			***78.138.860***
Jasa Giro	***157.700.228***	***111.860.758***	***70.185.380***
Retribusi Kebersihan	***6.675.000***		-
Total	***13.777.551.097***	***21.247.618.509***	***18.707.513.006***

2.3. Kajian Atas Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali telah menerapkan indicator kkinerja sebagai berikut :

1. Target indikator kinerja BOR pada tahun 2022 75%, dapat direalisasi 44,20%. Nilai BOR RSUD Waras Wiris dibawah standar Depkes RI, standar BOR Depkes adalah 60-80% (depkes RI, 2005). Nilai BOR dipengaruhi jumlah pasien dan hari perawatan, semakin rendah hari perawatan maka semakin rendah pula nilai BOR. Nilai BOR rendah dikarenakan kunjungan pasien RSUD Waras Wiris di Andong masih sangat rendah. Pasien BPJS dengan sistem pembayaran INA CBG's bukan dengan sistem klaim sehingga efektifitas hari perawatan lebih dioptimalkan;
2. Target LOS RSUD Waras Wiris pada Tahun 2022 sebesar 6 hari sedangkan realisasi pada tahun 2022 sebesar 2,8 hari. Secara umum nilai LOS yang ideal (depkes RI) antara 3-12 hari (Depkes, 2005). Sehingga nilai LOS RSUD Waras Wiris masih dibawah standart. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. Kunci keberhasilan pada penjagaan mutu pelayanan medik dan keperawatan pada pasien. Keberhasilan indikator ini didukung adanya penjagaan mutu pelayanan baik dari segi SDM maupun sarana prasarana;
3. Target TOI pada tahun 2022 RSUD Waras Wiris sebesar 2 hari sedangkan realisasi pada tahun 2020 sebesar 4,8 hari. Angka realisasi tinggi namun idealnya tempat tidur kosong tidak terisi (TOI) pada kisaran 1-3 hari yang mempengaruhi indikator ini adalah jumlah tempat tidur, jumlah pasien dan lama hari perawatan
4. Target BTO pada tahun 2022 adalah 48 kali sedangkan realisasi pada tahun 2022 adalah 35 kali. Ideal BTO 40-50 kali, sehingga masih dibawah standart. Kunjungan pasien ke RSUD Waras Wiris masih rendah dikarenakan keberadaan RSUD Waras Wiris belum diketahui masyarakat luas sehingga peningkatan promosi perlu dilaksanakan

5. Target NDR pada tahun 2022 adalah 0,5 % realisasinya sebesar 16%. Angka realiasai lebih tinggi namun mencerminkan belum tercapainya target yang ditetapkan. karena semakin tinggi angka NDR menunjukkan semakin meningkatnya Angka kematian lebih dari atau sama dengan 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar
6. Target GDR pada tahun 2022 adalah 1% realisasinya sebesar 33%. Angka realiasai lebih tinggi namun mencerminkan belum tercapainya target yang ditetapkan. karena semakin tinggi angka GDR menunjukkan semakin meningkatnya Angka kematian setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar.
7. Pemenuhan Standart Sarana dan Prasarana Rumah Sakit adalah sarana prasarana yang harus memenuhi standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari target 90% sesuai dengan self assement terealisasi 90%
8. Pemenuhan Standart Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan sesuai dengan standar nasional akreditasi rumah sakit atau disingkat Snars yang merupakan standar akreditasi baru yang bersifat nasional dan diberlakukan secara nasional di Indonesia. Pelaksanaan akreditasi pada tahun 2022 ditargetkan sudah 100% namun kegiatan baru terealisasi 85%
9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoeh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dari RSUD Waras Wiris yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan selanjutnya. Selain itu juga dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Pada tahun 2022 target IKM sebesar 83%, terealisasi 74,97%, banyak unsur pelayanan yang masih harus diperbaiki baik di rawat jalan maupun rawat inap dan juga menambah/mengoptimalkan sarpras yang ada di rumah sakit.
10. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Anggaran Pendapatan RSUD Waras Wiris pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 22.500.000.000,00 Realisasi Pendapatan RSUD Waras Wiris pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 18.707.513.006,00

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai pelayanan dengan Standar Nasional maka berbagai upaya telah dilakukan untuk melengkapi peralatan medis dan penunjang medis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, tindakan operatif, persalinan, radiologi, anastesi, laboratorium, farmasi, gizi dan fisioterapi.

Adapun jenis dan jumlah alat kesehatan yang tersedia dan telah dimiliki meliputi alat pelayanan medis dan penunjang medis yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi, type rumah sakit dan kemampuan anggaran sehingga diupayakan memadai dalam pelayanannya.

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi masing-masing bidang atau urusan sesuai dengan tupoksi RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali disertai dengan rencana aksi berupa program dan kegiatan strategis yang menggambarkan langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan.

   Permasalahan yang dihadapi RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali adalah :

   1. Masih kurangnya ketersediaan peralatan medik, penunjang medik, sarana dan prasarana di RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali;
   2. Belum optimalnya pemantapan dan peningkatan manajemen mutu;
   3. Koordinasi dan kerjasama pengembangan sistem jaminan kesehatan belum optimal;
   4. Pengawasan dan pengembangan pengelolaan limbah serta pengawasan penanggulangan terjadinya infeksi nosokomial rumah sakit;
   5. Koordinasi antar instalasi masih kurang guna mendukung peningkatan pelayanan kesehatan;

6. Belum optimalnya pola kemitraan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
7. Kualitas SDM masih memerlukan peningkatan agar sesuai dengan kompetensi melalui pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

b. Peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan
   1. Peluang (opportunities)
      - Adanya dukungan dari pemerintah dalam pengembangan rumah sakit
      - Adanya kerjasama dengan institusi pendidikan
      - RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali telah terakreditasi Paripurna
      - Kesadaran masyarakat pada kesehatan semakin meningkat
      - RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali terletak di lokasi yang strategis
   2. Tantangan (threats)
      - Semakin banyaknya rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun swasta
      - Kebijakan rekruitmen pegawai yang tidak mendukung kebutuhan pegawai rumah sakit
      - Terbatasnya anggaran Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk mengembangkan sarana dan prasarana RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali
      - Adanya pengawasan yang lebih intens dari lembaga hukum yang bergerak di bidang kesehatan.

c. Rekomendasi dan alasan-alasan kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi kondisi atau permasalah antara lain :
   1. Peningkatan ketersediaan peralatan medik, penunjang medik, sarana dan prasarana di RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali ;
   2. Pemantapan dan peningkatan manajemen mutu;
   3. Peningkatan Koordinasi dan kerjasama pengembangan sistem jaminan kesehatan;
   4. Pengawasan dan pengembangan pengelolaan limbah serta pengawasan penanggulangan terjadinya infeksi nosokomial rumah sakit;

5. Peningkatan ketersediaan peralatan medik, penunjang medik, sarana dan prasarana di RSUD Waras Wiris Boyolali;
6. Peningkatan koordinasi antar instalasi guna mendukung peningkatan pelayanan kesehatan;
7. Mengembangkan kemitran dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
8. Peningkatan mutu dan pengembangan kualitas SDM melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
9. Menumbuh kesadaran hukum kesehatan sebagai jaminan akan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan kesehatan.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka upaya merealisasi program-program pembangunan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 terutama dalam Program Kesehatan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan kegiatannya berlandaskan pada sasaran yaitu :

" Meningkatnya Derajad Kesehatan"

Agenda utama yang diambil oleh Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Boyolali dalam rangka pembangunan bidang kesehatan selama tahun 2024 disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagaimana termuat pada RPJMD Tahun 2022-2026 adalah Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Bertolak pada prioritas dan program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dibidang kesehatan dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 telah merencanakan dan menentukan 5 program antara lain :

a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD
b. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

d. Program standarisasi pelayanan kesehatan

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap programnya adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD
   Indikator program ini adalah BOR, LOS, TOI, BTO, NDR, GDR sesuai dengan standart dan meningkatnya nilai SPM. Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan program tersebut adalah pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan
b. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
   Indikator program ini adalah pemenuhan standart sarana dan prasarana rumah sakit. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :
   1. Pembangunan rumah sakit
   2. pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
c. Program standarisasi Pelayanan Kesehatan
   Indikator program ini adalah pemenuhan standart pelayanan kesehatan rumah sakit. kegiatan penyusunan standar pelayanan kesehatan
d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
   Indikator Program ini adalah pemenuhan biaya operasional rumah sakit. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :
   Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2024 hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Boyolali pada tabel berikut:

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kepada pasien tidak mampu melalui program JKN, Jamkesda dan Jampersal;
2. Ikut berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program MDGs dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu bersalin (Jampersal) dan Pasien TB;
3. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami masyarakat;
4. Tetap memberikan pelayanan kesehatan maksimal pada masyarakat;

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayananan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali

BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah. Dalam upaya mendukung arah kebijakan nasional yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, kemudian diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Boyolali.

Sasaran RKPD Pemerintah Kabupaten Boyolali tersebut diaplikasikan dalam Visi dan Misi RSUD Waras Wiris Boyolali Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

1. Pernyataan Visi

Visi Bupati Boyolali adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi Bupati Boyolali harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik Kabupaten Boyolali baik dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Sehubungan dengan hal di atas, maka Visi Bupati Boyolali adalah:

" Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi” Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)".

Tabel IV.1
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
" Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi" Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)".	Pro Investasi	Meneruskan peningkatan kemudahan segala layanan dan perijinan investasi
	Maju	Mewakili gambaran kondisi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Boyolali secara fisi maupun non fisik di dukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. maju juga diarahkan pada terbentuknya kemandirian berbasis potensi unggulan daerah melalui sinergitas pemangku kepentingan dan kerjasama antar daerah
	Sejahtera	Dipresentasikan dengan konsep nyaman, aman, dan mapan. ketiga konsep ini mewakili kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosial, secara adil dan merata. nyaman berarti mengembangkan Kabupaten Boyolali sebagai daerah yang nyaman untuk tempat tinggal, tempat berusaha, atau bekerja, mengakses pelayanan publik, tempat persinggahan, rekreasi, berkreasi melestarikanadat istiadat. aman, mencerminkan kondusivitas wilayah mencakup tertib pemerintahan dan tertib bermasyarakat pendukung terwujudnya keamanan dan ketenteraman masyarakat. mapan, adalah tingginya pendapatan masyarakat sehingga meningkatnya daya beli untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya

Misi Bupati Boyolali adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Bupati Boyolali. Rumusan misi Bupati Boyolali yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi Bupati Boyolali yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakuka. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk

memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi Bupati Boyolali.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra SKPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi Bupati Boyolali. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan

Penjabaran misi Bupati Boyolali Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional
4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan berpedoman terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Waras wiris Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 beserta indikator kinerjanya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel IV.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
					Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing				**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**75,28**	**75,80**	**76,31**	**76,83**	**77,34**
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			**Angka Harapan Hidup (AHH) (Permendagri 86/2020)**	**76,04**	**76,10**	**76,16**	**76,23**	**76,29**
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase capaian SPM RS**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
			Kegiatan						
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Persentase capaian pelayanan gawat darurat	100	100	100	100	100
			Sub Kegiatan						
		1.02.02.2.02.32	Operasional pelayanan rumah sakit	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat setelah pasien datang	3,5	3,4	3,3	3,2	3

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
					Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
				Jam buka pelayanan darurat	24	24	24	24	24
				Jumlah tim penanggulangan bencana	1	1	1	1	1
				Jumlah kematian pasien < 24 jam	6,8	5,5	4,5	3,5	2,5
			Kegiatan						
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Persentase capaian pelayanan rawat inap	100	100	100	100	100
			Sub Kegiatan						
		1.02.02.2.02.32	Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah kematian pasien > 48 jam	2,1	1,9	1,7	1,5	1,3
				Jumlah kejadian pulang paksa	70	63	57	51	46
				Jumlah pemberi pelayanan di rawat inap	113	124	136	150	165
			Kegiatan						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
					Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Persentase capaian pelayanan rawat jalan	100	100	100	100	100
			Sub Kegiatan						
		1.02.02.2.02.32	Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah dokter pemberi pelayanan di poliklinik	16	17	18	19	20
				Waktu tunggu di rawat jalan	46	43	40	35	30
				Jumlah ketersediaan pelayanan poliklinik	11	12	13	14	15
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah elemen penilaian akreditasi dan reakredetasi	1353	1353	1353	1353	1353
			Kegiatan						
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	70	80	90	100	100
			Sub Kegiatan						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
					Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
		1.02.02.2.01.13	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah prasarana pendukung yang diadakan	2	2	1	1	1
		1.02.02.2.01.14	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah paket alat kesehatan/penunjang medik yang diadakan	10	10	10	10	10
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan obat, vaksin	Jumlah jenis obat dan vaksin yang diadakan	962	962	962	962	962
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan bahan habis pakai	Jumlah jenis bahan habis pakai yang diadakan	3	3	3	3	3
		1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah unit bangunan yang dibangun	2	1	2	1	1
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik				**Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**800**	**823**	**833**	**893**	**903**
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit			**Nilai IKM**	**79,18**	**79,58**	**79,98**	**80,38**	**80,78**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
					Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah			**Nilai Sakip**	**81,00**	**82,00**	**83,00**	**84,00**	**85,00**
		X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Pemenuhan Standart pelayanan kesehatan Rumah Sakit (IKM)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
			Kegiatan						
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100
			Sub Kegiatan						
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100	100	100	100	100
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Pemenuhan gaji PTT Daerah	100	100	100	100	100
		X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12	12	12	12	12
		X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12	12	12	12	12

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
					Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	18	18	18
		X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	2	2	2	2	2
			Kegiatan						
		X.XX.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	25	25	25	25	25
			Sub Kegiatan						
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2	2	2	2	2
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	1	1	1	1
		X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	1	1	1	1
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	1	1	1	1	1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
					Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	1	1	1	1	1
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15	15	15	15	15
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	4
			Kegiatan						
		X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	12	12	12	12	12
			Sub Kegiatan						
		X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah target lain-lain PAD yang Sah (BLUD)	16.200.000.000	19.440.000.000	23.328.000.000	27.993.600.000	33.592.320.000
		X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12	12	12	12	12

Dalam hal kebutuhan SDM rencana kebutuhan jangka menengah RSUD Waras Wiris sebagai berikut :

No.	Nama jabatan	Jumlah pegawai yang dibutuhkan	Jumlah Pegawai yang ada 2022	Rencana Penambahan pegawai 2023
1	**Direktur**	1	1	
2	Dokter Umum	5	5	
3	Dokter Gigi	1	1	
4	Dokter Spesialis			
	- Dokter Obgyn	2	2	
	- Dokter Bedah	2	2	
	- Dokter Dalam	2	2	
	- Dokter Anak	2	1	1
	- Dokter Saraf	1	1	
	- Dokter Paru-paru	0	0	
	- Dokter Patologis Klinis	1	1	
	- Dokter Radiologi	1	1	
	- Dokter Anastesi	1	1	
	- Dokter Mata	1	1	
	- Dokter THT	1	0	1
5	Perawat	132	90	30
6	Perawat Gigi	1	1	
7	Bidan	14	14	
8	Apoteker	4	4	
9	Asisten Apoteker	9	8	1
10	Nutrisionis	2	2	
11	Pranata Laboratorium Kesehatan	6	7	1
12	Sanitarian	2	2	
13	Fisioterapi	1	1	
14	Teknik Elektromedik	2	2	
15	Okupasi	1	1	
16	Perekam Medis	5	5	
17	Radiologi	6	4	2
18	**Kepala Subbagian Tata Usaha**	1	1	

No.	Nama jabatan	Jumlah pegawai yang dibutuhkan	Jumlah Pegawai yang ada 2022	Rencana Penambahan pegawai 2023
19	Pengadministrasi Persuratan	1	1	
20	Pengelola Kegiatan (umum & kepegawaian)	2	1	
21	Pengelola Keuangan / Kasir	5	5	
22	Bendahara (Penerima & Pengeluaran)	2	2	
23	Penyusun Program Anggaran dan Laporan	1	1	
24	Petugas Keamanan	9	9	
25	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	0	
26	Pengelola Sistem Informasi	3	3	
27	Pengemudi	6	6	
28	Pramu Bhakti	30	26	
29	**Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan**	1	1	
30	Pengelola Pelayanan Kesehatan	1	1	
31	Pemulasaran Jenasah	0	0	
32	Pengadministrasi Umum (Pelayanan/Loket)	10	10	
33	**Kepala Seksi Penunjang Medik**	1	1	
34	Pengelola Kegiatan (Pengadaan)	2	1	
35	Pengolah Makanan	5	5	0
36	Pramu Bakti	4	0	

No.	Nama jabatan	Jumlah pegawai yang dibutuhkan	Jumlah Pegawai yang ada 2022	Rencana Penambahan pegawai 2023
37	Binatu Rumah Sakit/loudry	2	2	
	Jumlah	**202**	**122**	**37**

3.2.Program dan kegiatan Tahun 2024

Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menyusun prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 48.567.478.000,-

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Operasional pelayanan rumah sakit	23.000.000.000
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayana kesehatan	16.690.604.000
		Pengadaan obat , vaksin	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.850.224.000
		Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	26.650.000
			48.567.478.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA BELANJA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2024	

ORGANISASI : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
UNIT ORGANISASI : 1-02.0-00.0-00.01.002 Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris
SUB UNIT ORGANISASI : 1-02.0-00.0-00.01.002.0 Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI	JUMLAH (Rp)						
				TAHUN-1	TAHUN N					TAHUN+1
					BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**30.730.374.000,00**	**17.837.104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.567.478.000,00**	
1-02	**KESEHATAN**				**30.730.374.000,00**	**17.837.104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.567.478.000,00**	
1-02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.876.874.000,00	0,00	0,00	0,00	8.876.874.000,00	
1-02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.876.874.000,00	0,00	0,00	0,00	8.876.874.000,00	
1-02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU) ; Pajak Daerah	Lokasi belum ditentukan	8.850.224.000,00	8.850.224.000,00	0,00	0,00	0,00	8.850.224.000,00	8.850.224.000,00
1-02.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	26.650.000,00	26.650.000,00	0,00	0,00	0,00	26.650.000,00	26.650.000,00
1-02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				21.853.500.000,00	17.837.104.000,00	0,00	0,00	39.690.604.000,00	
1-02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0,00	16.690.604.000,00	0,00	0,00	16.690.604.000,00	
1-02.02.2.01.014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Lokasi belum ditentukan	16.690.604.000,00	0,00	16.690.604.000,00	0,00	0,00	16.690.604.000,00	16.690.604.000,00
1-02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				21.853.500.000,00	1.146.500.000,00	0,00	0,00	23.000.000.000,00	
1-02.02.2.02.032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Lain-lain PAD yang Sah; Pajak Daerah	Lokasi belum ditentukan	23.000.000.000,00	21.853.500.000,00	1.146.500.000,00	0,00	0,00	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00
			JUMLAH		30.730.374.000,00	17.837.104.000,00	0,00	0,00	48.567.478.000,00	

Boyolali, 6 September 2023
DIREKTUR

dr. SHERLY JEANNE KILAPONG

BAB IV
PENUTUP

Renja RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan di masa mendatang oleh para pimpinan managemen dan seluruh staf RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali kepada masyarakat dapat lebih meningkat menuju ke arah pelayanan prima.

3. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

RSUD SIMO

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN …… 3

1.1 Latar Belakang…… 3

1.2 Landasan Hukum…… 4

1.3 Maksud dan Tujuan……. 5

1.4 Sistematika Penulisan……. 6

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT RENJA TAHUN LALU……. 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Simo Tahun 2022 dan Capaian Renstra RSUD Simo..... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Simo Kabupaten Boyolali..... 10

2.3 Kajian Atas Indikator Kinerja……. 14

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah……. 16

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…… 18

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…..…… 19

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN…….. 20

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional…… 20

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Simo Kabupaten Boyolali..... 22

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024…….…… 39

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN……..... 41

4.1 Program dan Kegiatan……. 41

BAB V PENUTUP……. 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhan akan menuju satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No 25 tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya intregasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik ditingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan penjabaran atas visi, misi dan program yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Simo Tahun 2021–2026 Namun apabila dalam perjalan waktu terdapat perubahan-perubahan peraturan bidang pemerintahan maupun kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah tidak menutup kemungkinan terdapat perubahan-perubahan terhadap program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021–2026, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024, hal ini untuk mendapatkan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah khususnya bidang kesehatan sedangkan dalam hal penentuan program dan kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2024 memuat evaluasi pencapaian pelaksanaan tugas umum kesehatan selama Tahun 2022, prioritas program dan kegiatan Tahun 2024, strategi dan kebijakan mencapai sasaran

bidang kesehatan umum Tahun 2024 serta penganggaran untuk masing-masing program dari kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Simo Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4844) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Cara Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

Kegiatan-kegiatan teknis operasional maupun dalam penyiapan kebijakan teknis di bidang kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali senantiasa mengacu/berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dari pusat, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Mendagri, dan Keputusan Menteri Kesehatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud penyusunan Rencana Kerja RSUD Simo Kabupaten Boyolali adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :
   1) Sebagai acuan bagi unit-unit kegiatan dan masyarakat pengguna jasa rumah sakit karena memuat kebijakan pelayanan kesehatan (pelayanan publik) di rumah sakit;
   2) Memberikan arah kebijakan teknis dan pedoman melaksanakan kegiatan Tahun 2024 bagi Rumah Sakit Umum Daerah Simo dalam rangka mengemban visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali, sebagaimana tertuang dalam rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2026;
   3) Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

b. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja RSUD Simo Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah :
   1) Menjabarkan Rencana Strategis RSUD Simo Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan rumah sakit Tahun Anggaran 2024;
   2) Menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) RSUD Simo Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan seluruh kegiatan rumah sakit pada Tahun Anggaran 2024;

3) Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan;
4) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik;
5) Mewujudkan keterpaduan perencanaan dan kegiatan bidang kesehatan tahunan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, mempertajam prioritas program kegiatan dan kesinambungan program kegiatan dari tahun ke tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Sistematika Dokumen Renja
- 1.4 Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran renja
- 3.3 Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD SIMO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Simo Tahun 2022 dan Capaian Renstra RSUD Simo

Renja RSUD Simo Kabupaten Boyolali pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh RSUD Simo Kabupaten Boyolali selama tahun 2022 dan perkiraan pencapaian target tahun 2023.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan rumah sakit dimana indikator kinerja rumah sakit adalah

1. Meningkatnya Tingkat Hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR)
2. Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS)
3. Turn Over Internal (TOI)
4. Bed Turn Over (BTO)
5. Menurunnya angka kematian murni (Net Death Rate/ NDR)
6. Gross Death Rate (GDR)
7. Pelayanan pasien Jamkesmas-Jamkesda
8. Meningkatnya nilai IKM

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Pencapaian Target Tahun 2023

Pada tahun 2022 RSUD Simo Kabupaten Boyolali menerima anggaran sebesar Rp. 64.580.187.800,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 2 program dan 3 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 62.827.234.451,- atau mencapai 97.29%, dengan tingkat capaian 3 indikator kinerja program

Selama tahun 2022 hasil capaian kinerja kegiatan pada RSUD Simo dapat dilihat dari Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Target indikator kinerja BOR pada tahun 2022 75%, dapat direalisasi 48,8 %. Nilai BOR RSUD Simo dibawah standar Depkes RI, standar BOR Depkes adalah 60-80% (depkes RI, 2005). Nilai BOR dipengaruhi jumlah pasien dan hari perawatan, semakin rendah hari perawatan maka semakin rendah pula nilai BOR. Nilai BOR rendah dikarenakan kunjungan pasien RSUD Simo di Andong masih sangat rendah. Pasien BPJS dengan sistem pembayaran INA CBG's bukan dengan sistem klaim sehingga efektifitas hari perawatan lebih dipotimalkan;

2. Target LOS RSUD Simo pada Tahun 2022 sebesar 6 hari sedangkan realisasi pada tahun 2022 sebesar 4.2 hari. Secara umum nilai LOS yang ideal (depkes RI) antara 3-12 hari (Depkes, 2005). Sehingga nilai LOS RSUD Simo masih memenuhi standart. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. Kunci keberhasilan pada penjagaan mutu pelayanan medik dan keperawatan pada pasien. Keberhasilan indikator ini didukung adanya penjagaan mutu pelayanan baik dari segi SDM maupun sarana prasarana;
3. Target TOI pada tahun 2022 RSUD Simo sebesar 2 hari sedangkan realisasi pada tahun 2022 sebesar 4,4 hari. Angka realisasi tinggi namun idealnya tempat tidur kosong tidak terisi (TOI) pada kisaran 1-3 hari yang mempengaruhi indikator ini adalah jumlah tempat tidur, jumlah pasien dan lama hari perawatan
4. Target BTO pada tahun 2022 adalah 45 kali sedangkan realisasi pada tahun 2022 adalah 42,2 kali. Ideal BTO 40-50 kali, sehingga masih memenuhi standart. Kunjungan pasien ke RSUD Simo masih rendah dikarenakan keberadaan RSUD Simo belum diketahui masyarakat luas sehingga peningkatan promosi perlu dilaksanakan
5. Target NDR pada tahun 2022 adalah 16 % realisasinya sebesar 12,5%. Angka realisasi lebih rendah namun mencerminkan sudah tercapainya target yang ditetapkan. karena semakin tinggi angka NDR menunjukkan semakin meningkatnya Angka kematian lebih dari atau sama dengan 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar
6. Target GDR pada tahun 2022 adalah 30 % realisasinya sebesar 22,1%. Angka realiasai lebih rendah namun mencerminkan sudah tercapainya target yang ditetapkan. karena semakin tinggi angka GDR menunjukkan semakin meningkatnya Angka kematian setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar.
7. Pemenuhan Standart Sarana dan Prasarana Rumah Sakit adalah sarana prasarana yang harus memenuhi standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari target 90% sesuai dengan self assement terealisasi 90%
8. Pemenuhan Standart Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan sesuai dengan standar nasional akreditasi rumah sakit atau disingkat Snars yang merupakan standar akreditasi baru yang bersifat nasional dan diberlakukan secara nasional di Indonesia. Pelaksanaan akreditasi pada tahun 2022 ditargetkan sudah 100% dan kegiatan baru terealisasi 90%

9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoeh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dari RSUD Simo yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan selanjutnya. Selain itu juga dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Pada tahun 2022 target IKM sebesar 79,18%, terealisasi 81,02%, banyak unsur pelayanan yang masih harus diperbaiki baik di rawat jalan maupun rawat inap dan juga menambah/mengoptimalkan sarpras yang ada di rumah sakit.

10. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

    Anggaran Pendapatan RSUD Simo pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 25.500.000.000,00 Realisasi Pendapatan RSUD Simo pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 28.130.292.647,00

C. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2023 dengan dana sebesar Rp 44.147.540,00 yang terdiri dari pendapatan BLUD Rp. 26.000.000.000, dari APBD sebesar Rp. 14.466.055.000,00 dan Silva BLUD Rp. 3.681.485.000,-. Semua dana tersebut yang diuraikan dalam 2 program dan 3 kegiatan. Dengan pencapaian pertanggal 31 Agustus 2023 mencapai rata-rata 72,88% dari target yang ditetapkan 100%.

Hasil capaian kinerja kegiatan selama tahun 2023 pada RSUD Simo dapat dilihat dari Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tingkat Hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR)
   BOR sampai dengan bulan Juni sebesar 41,8
2. Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS)
   Sampai dengan bulan Juni tercapai 2,8 hari
3. Turn Over Internal (TOI)
   Sampai dengan bulan Juni tercapai 5,4 hari
4. Bed Turn Over (BTO)
   Sampai dengan bulan Juni tercapai 3,1 kali
5. Menurunnya angka kematian murni (Net Death Rate/ NDR)
   Sampai dengan bulan Juni tercapai 0,9 %

6. Gross Death Rate (GDR)

   Sampai dengan bulan Juni tercapai 1,3 %

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra RSUD Simo Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026, maka pada tahun 2023 RSUD Simo Kabupaten Boyolali menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi antar instalasi sehingga akan memberikan efisiensi dalam operasional RSUD Simo kabupaten boyolali dan meningkatnya kualitas layanan yang diberikan kepada pasien dan keluarga pasien;
2. Menyusun perencanaan yang lebih matang dalam menentukan kegiatan dan alokasi anggarannya;
3. Membuat skala prioritas kegiatan yang paling diperlukan;
4. Melakukan identifikasi masalah yang timbul dalam setiap pelaksanaan kegiatan, serta menyelesaikannya secara koperhensif;
5. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga tidak berbenturan dengan kegiatan yang lain dan hasilnya diharapkan lebih optimal;
6. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada dan mengusulkan penambahan / pengadaan peralatan kesehatan dan kedokteran tidak hanya dari sumber dana DAU tetapi juga dari DBHCHT;
7. Mengirimkan personil untuk mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali

   Penjabaran tugas pokok dan fungsi RSUD Simo Tipe D adalah Rumah Sakit Umum Tipe D mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan tugas RSUD Simo tipe D mempunya fungsi :

   a. Penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
   b. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
   c. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
   d. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

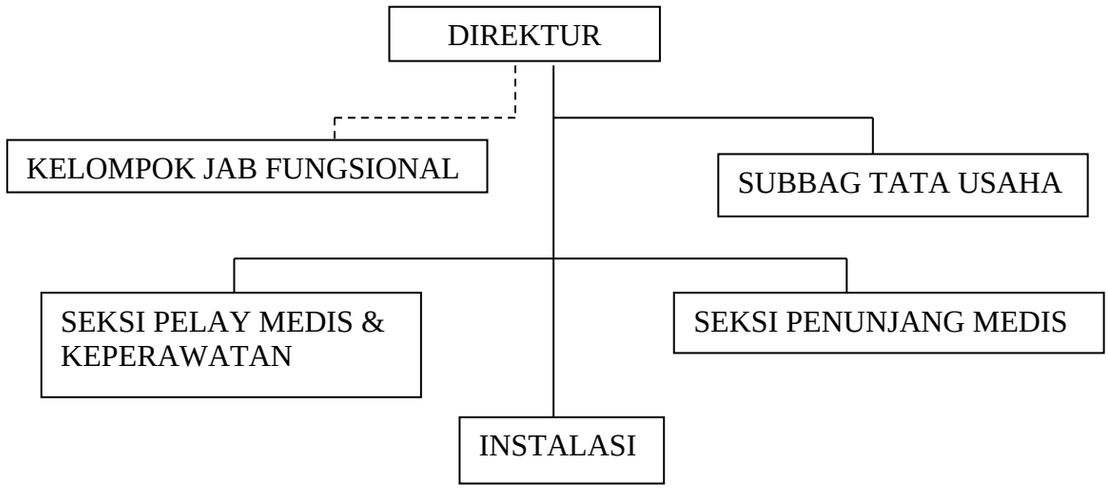

b. Keadaan Personil

Demi kelancaran dan suksesnya pelaksanaan tugas, RSUD Simo Kabupaten Boyolali didukung oleh 266 orang personil, terdiri dari 136 PNS, 4 PTT Daerah, 20 PPPK, 62 BLUD, 42 Kontrak Rumah Sakit dan 2 Dokter PGDS

a. Menurut Jabatan PNS, PTT Daerah dan Kontrak Rumah Sakit

No.	NAMA JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
I.	**JABATAN STRUKTURAL**		
1.	Eselon IIIb	1	Direktur RS
2.	Eselon IVa	3	Kasi/Ka. TU, Kasi Pelayanan Medik, Kasi Penunjang Medik
II.	**JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS**		
1.	Dokter Umum	7	(6 PNS, 1 CPNS)
2.	Dokter Gigi	2	1 PNS, 1 CPNS
3.	Dokter Spesialis :		
	a. Penyakit Dalam	2	(1 PNS, 1 CPNS)
	b. Mata	1	Kontrak
	c. Bedah	2	(1 CPNS, 1 Kontrak)
	d.Neurologi	1	(1 Kontrak)
	e.Radiologi	1	PNS
	f. Patologi Klinik	1	PNS
	g. Jiwa/Psikiatri	1	PNS
	h. Anestesi	1	PNS
	i. Anak	2	(1 CPNS, 1 PGDS)
	j. Obsgin	1	(1 PGDS)
	k. Paru	1	PNS
	l. THT	1	Kontrak
	M. Patologi Anatomi	1	Kontrak

No.	NAMA JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
4.	Psikolog	1	PNS
III.	**PARA MEDIS**		
1.	Perawat (keseluruhan)	96	(55 PNS, 10 PPPK, 22 BLUD, 9 Kontrak)
2.	Perawat Anestesi	2	PNS
3.	Perawat Gigi	2	PNS
4.	Bidan	27	(15 PNS, 4 PPPK, 7 BLUD, 1 Kontrak)
IV	**FARMASI**		
1.	Apoteker	4	PNS
2.	Asisten Apoteker	11	(8 PNS, 2 PPPK,1 BLUD)
V	**FUNGSIONAL NON MEDIS**		
1.	Penata Rontgen	6	(3 PNS, 2 BLUD, 1 Kontrak)
2.	Analis Kesehatan	8	(5 PNS, 1 PPPK, 2 BLUD)
3.	Fisioterapi	2	PNS
4.	Elektromedik	3	(1 PNS, 1 CPNS, 1 BLUD)
5.	Sanitarian	2	(1 PNS, 1 CPNS)
6.	Perekam Medik	8	(1 PNS, 3 PPPK, 4 BLUD)
7.	Nutrisionis	2	(1 PNS,1 BLUD)
8.	Fisikawan Medik	1	Kontrak
9.	Okupasi Terapi	1	BLUD
III	**JABATAN FUNGSIONAL UMUM**		
1.	Bendahara Penerimaan	1	PNS
2.	Bendahara pengeluaran	1	PNS
3.	Pembantu Pengelola Keuangan	3	(1 BLUD, 2 Kontrak)
4.	IT	3	PNS
5.	Pengadministrasian Umum (Persuratan)	1	BLUD
6.	Penyusun Program Evaluasi dan Laporan	2	1 CPNS, 1 BLUD
7.	Administrasi Pendaftaran Pasien/Loket Pembayaran	12	2 PNS, 5 BLUD, 2 PTT, 3 Kontrak)
8.	Kepegawaian	1	Kontrak
9.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1	PTT

No.	NAMA JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
10.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1	BLUD
11.	Pengemudi	5	4 BLUD, 1 Kontrak
12.	Juru Masak	8	1 PNS, 1 BLUD, 1 PTT, 5 Kontrak
13.	Petugas Taman	3	2 BLUD, 1 Kontrak
14.	Laundry	5	Kontrak
15.	Petugas IPSRS	7	1 PNS, 4 BLUD, 2 Kontrak
16.	Transporter	3	2 BLUD, 1 Kontrak
17.	Cs	3	3 Kontrak
18.	Pemulasaran Jenazah	1	Kontrak
		266	

c. Capaian kinerja pelayanan

Capaian kinerja pelayanan dan anggaran pada tahun 2022 meningkat bila dibandingkan dengan kurun waktu pada tahun 2021, hal ini dapat ditunjukkan oleh kenaikan jumlah kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap. Saat ini dilakukan upaya pemenuhan fasilitas dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit dan promosi pelayanan baru rumah sakit di Kecamatan Simo. Program-program layanan unggulan rumah sakit sedang digalakan untuk menciptakan peluang pasar baru dan telah disahkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Simo Kabupaten Boyolali. Dengan adanya kebijakan tarif baru diharapkan peningkatan mutu layanan dan realisasi proyeksi capaian kinerja pelayanan dan anggaran akan tercapai juga penambahan pelayanan dokter spesialis yaitu spesialais Paru, THT dan Mata.

Hasil capaian kinerja kegiatan pada tahun 2020 s.d 2022 adalah sebagai berikut :

Tingkat Kemanfaatan Rumah Sakit:

1. Efisiensi Pelayanan

No.	INDIKATOR	HASIL		
		2020	2021	2022
1.	BOR (%)	44,84%	30,43%	48,89%
2.	LOS (hari)	2,95	2.83	4,22
3.	TOI	3,65	6,47	4,42

4.	BTO	55,37	39,23	42,25

2. Mutu Pelayanan

No.	PASIEN	JUMLAH		
		2020	2021	2022
1.	NDR	4,249%	12,579%	12.579%
2.	GDR	10,269%	27,584%	22,105%

3. **Pendapatan**

Pelayanan	2020	2021	2022
Total	15.108.428.936	19.950.011.917	28.130.292.647

2.3 Kajian Atas Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya RSUD Simo Kabupaten Boyolali telah menerapkan indiKator kkinerja sebagai berikut :

1. Target indikator kinerja BOR pada tahun 2022 75%, dapat direalisasi 48,8 %. Nilai BOR RSUD Simo dibawah standar Depkes RI, standar BOR Depkes adalah 60-80% (depkes RI, 2005). Nilai BOR dipengaruhi jumlah pasien dan hari perawatan, semakin rendah hari perawatan maka semakin rendah pula nilai BOR. Nilai BOR rendah dikarenakan kunjungan pasien RSUD Simo di Andong masih sangat rendah. Pasien BPJS dengan sistem pembayaran INA CBG's bukan dengan sistem klaim sehingga efektifitas hari perawatan lebih dipotimalkan;
2. Target LOS RSUD Simo pada Tahun 2022 sebesar 6 hari sedangkan realisasi pada tahun 2022 sebesar 4.2 hari. Secara umum nilai LOS yang ideal (depkes RI) antara 3-12 hari (Depkes, 2005). Sehingga nilai LOS RSUD Simo masih memenuhi standart. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. Kunci keberhasilan pada penjagaan mutu pelayanan medik dan keperawatan pada pasien. Keberhasilan indikator ini didukung adanya penjagaan mutu pelayanan baik dari segi SDM maupun sarana prasarana;
3. Target TOI pada tahun 2022 RSUD Simo sebesar 2 hari sedangkan realisasi pada tahun 2022 sebesar 4,4 hari. Angka realisasi tinggi namun idealnya tempat tidur kosong tidak terisi (TOI) pada kisaran 1-3 hari yang

mempengaruhi indikator ini adalah jumlah tempat tidur, jumlah pasien dan lama hari perawatan

4. Target BTO pada tahun 2022 adalah 45 kali sedangkan realisasi pada tahun 2022 adalah 42,2 kali. Ideal BTO 40-50 kali, sehingga masih memenuhi standart. Kunjungan pasien ke RSUD Simo masih rendah dikarenakan keberadaan RSUD Simo belum diketahui masyarakat luas sehingga peningkatan promosi perlu dilaksanakan
5. Target NDR pada tahun 2022 adalah 16 % realisasinya sebesar 12,5%. Angka realisasi lebih rendah namun mencerminkan sudah tercapainya target yang ditetapkan. karena semakin tinggi angka NDR menunjukkan semakin meningkatnya Angka kematian lebih dari atau sama dengan 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar
6. Target GDR pada tahun 2022 adalah 30 % realisasinya sebesar 22,1%. Angka realiasai lebih rendah namun mencerminkan sudah tercapainya target yang ditetapkan. karena semakin tinggi angka GDR menunjukkan semakin meningkatnya Angka kematian setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar.
7. Pemenuhan Standart Sarana dan Prasarana Rumah Sakit adalah sarana prasarana yang harus memenuhi standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari target 90% sesuai dengan self assement terealisasi 90%
8. Pemenuhan Standart Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan sesuai dengan standar nasional akreditasi rumah sakit atau disingkat Snars yang merupakan standar akreditasi baru yang bersifat nasional dan diberlakukan secara nasional di Indonesia. Pelaksanaan akreditasi pada tahun 2022 ditargetkan sudah 100% dan kegiatan baru terealisasi 90%
9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoeh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dari RSUD Simo yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan selanjutnya. Selain itu juga dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Pada tahun 2022 target IKM sebesar 79,18%, terealisasi 81,02%, banyak unsur

pelayanan yang masih harus diperbaiki baik di rawat jalan maupun rawat inap dan juga menambah/mengoptimalkan sarpras yang ada di rumah sakit.

10. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

    Anggaran Pendapatan RSUD Simo pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 25.500.000.000,00 Realisasi Pendapatan RSUD Simo pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 28.130.292.647,00

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai pelayanan dengan Standar Nasional maka berbagai upaya telah dilakukan untuk melengkapi peralatan medis dan penunjang medis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, tindakan operatif, persalinan, radiologi, anastesi, laboratorium, farmasi, gizi dan fisioterapi.

Adapun jenis dan jumlah alat kesehatan yang tersedia dan telah dimiliki meliputi alat pelayanan medis dan penunjang medis yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi, type rumah sakit dan kemampuan anggaran sehingga diupayakan memadai dalam pelayanannya.

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi masing-masing bidang atau urusan sesuai dengan tupoksi RSUD Simo Kabupaten Boyolali disertai dengan rencana aksi berupa program dan kegiatan strategis yang menggambarkan langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan.

   Permasalahan yang dihadapi RSUD Simo Kabupaten Boyolali adalah :

   1. Masih kurangnya ketersediaan peralatan medik, penunjang medik, sarana dan prasarana di RSUD Simo Kabupaten Boyolali;
   2. Belum optimalnya pemantapan dan peningkatan manajemen mutu;
   3. Koordinasi dan kerjasama pengembangan sistem jaminan kesehatan belum optimal;
   4. Pengawasan dan pengembangan pengelolaan limbah serta pengawasan penanggulangan terjadinya infeksi nosokomial rumah sakit;
   5. Koordinasi antar instalasi masih kurang guna mendukung peningkatan pelayanan kesehatan;
   6. Belum optimalnya pola kemitraan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;

7. Kualitas SDM masih memerlukan peningkatan agar sesuai dengan kompetensi melalui pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

b. Peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan

1. Peluang (opportunities)
   - Adanya dukungan dari pemerintah dalam pengembangan rumah sakit
   - Adanya kerjasama dengan institusi pendidikan
   - RSUD Simo Kabupaten Boyolali telah terakreditasi Paripurna
   - Kesadaran masyarakat pada kesehatan semakin meningkat
   - RSUD Simo Kabupaten Boyolali terletak di lokasi yang strategis
2. Tantangan (threats)
   - Semakin banyaknya rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun swasta
   - Kebijakan rekruitmen pegawai yang tidak mendukung kebutuhan pegawai rumah sakit
   - Terbatasnya anggaran Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk mengembangkan sarana dan prasarana RSUD Simo Kabupaten Boyolali
   - Adanya pengawasan yang lebih intens dari lembaga hukum yang bergerak di bidang kesehatan.

c. Rekomendasi dan alasan-alasan kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi kondisi atau permasalah antara lain :

1. Peningkatan ketersediaan peralatan medik, penunjang medik, sarana dan prasarana di RSUD Simo Kabupaten Boyolali ;
2. Pemantapan dan peningkatan manajemen mutu;
3. Peningkatan Koordinasi dan kerjasama pengembangan sistem jaminan kesehatan;
4. Pengawasan dan pengembangan pengelolaan limbah serta pengawasan penanggulangan terjadinya infeksi nosokomial rumah sakit;
5. Peningkatan ketersediaan peralatan medik, penunjang medik, sarana dan prasarana di RSUD Simo Boyolali;
6. Peningkatan koordinasi antar instalasi guna mendukung peningkatan pelayanan kesehatan;
7. Mengembangkan kemitran dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
8. Peningkatan mutu dan pengembangan kualitas SDM melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
9. Menumbuh kesadaran hukum kesehatan sebagai jaminan akan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan kesehatan.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka upaya merealisasi program-program pembangunan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 terutama dalam Program Kesehatan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan kegiatannya berlandaskan pada sasaran yaitu :

“ Meningkatnya Derajad Kesehatan“

Agenda utama yang diambil oleh Rumah Sakit Umum Daerah Simo Boyolali dalam rangka pembangunan bidang kesehatan selama tahun 2024 disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagaimana termuat pada RPJMD Tahun 2022-2026 adalah Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Bertolak pada prioritas dan program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dibidang kesehatan dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 telah merencanakan dan menentukan 5 program antara lain :

a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD
b. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
d. Program standarisasi pelayanan kesehatan

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap programnya adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD

   Indikator program ini adalah BOR, LOS, TOI, BTO, NDR, GDR sesuai dengan standart dan meningkatnya nilai SPM. Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan program tersebut adalah pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan

b. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

   Indikator program ini adalah pemenuhan standart sarana dan prasarana rumah sakit.

   Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

   1. Pembangunan rumah sakit
   2. pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

c. Program standarisasi Pelayanan Kesehatan

Indikator program ini adalah pemenuhan standart pelayanan kesehatan rumah sakit.
kegiatan penyusunan standar pelayanan kesehatan

d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator Program ini adalah pemenuhan biaya operasional rumah sakit.

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2024 hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Boyolali pada tabel berikut:

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Simo Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kepada pasien tidak mampu melalui program JKN, Jamkesda dan Jampersal;
2. Ikut berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program MDGs dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu bersalin (Jampersal) dan Pasien TB;
3. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami masyarakat;
4. Tetap memberikan pelayanan kesehatan maksimal pada masyarakat;

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayananan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan RSUD Simo Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah. Dalam upaya mendukung arah kebijakan nasional yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka RSUD Simo Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, kemudian diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Boyolali.

Sasaran RKPD Pemerintah Kabupaten Boyolali tersebut diaplikasikan dalam Visi dan Misi RSUD Simo Boyolali Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

1. Pernyataan Visi

Visi Bupati Boyolali adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi Bupati Boyolali harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik Kabupaten Boyolali baik dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Sehubungan dengan hal di atas, maka Visi Bupati Boyolali adalah:

" Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi" Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)".

Tabel IV.1
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
" Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi" Melangkah dan	Pro Investasi	Meneruskan peningkatan kemudahan segala layanan dan perijinan investasi
	Maju	Mewakili gambaran kondisi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Boyolali secara fisi maupun non fisik di dukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. maju juga

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)".		diarahkan pada terbentuknya kemandirian berbasis potensi unggulan daerah melalui sinergitas pemangku kepentingan dan kerjasama antar daerah
	Sejahtera	Dipresentasikan dengan konsep nyaman, aman, dan mapan. ketiga konsep ini mewakili kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosial, secara adil dan merata. nyaman berarti mengembangkan Kabupaten Boyolali sebagai daerah yang nyaman untuk tempat tinggal, tempat berusaha, atau bekerja, mengakses pelayanan publik, tempat persinggahan, rekreasi, berkreasi melestarikanadat istiadat. aman, mencerminkan kondusivitas wilayah mencakup tertib pemerintahan dan tertib bermasyarakat pendukung terwujudnya keamanan dan ketenteraman masyarakat. mapan, adalah tingginya pendapatan masyarakat sehingga meningkatnya daya beli untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya

Misi Bupati Boyolali adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Bupati Boyolali. Rumusan misi Bupati Boyolali yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi Bupati Boyolali yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakuka. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi Bupati Boyolali.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra SKPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi Bupati Boyolali. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan

Penjabaran misi Bupati Boyolali Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional
4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Simo Kabupaten Boyolali

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan berpedoman terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 beserta indikator kinerjanya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel IV.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing				**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**74,25**	**75,28**		**75,80**		**76,31**		**76,83**		**77,34**		**77,34**		**RSUD Simo**	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			**Angka Harapan Hidup (AHH) (Permendagri**	**75,95**	**76,04**		**76,10**		**76,16**		**76,23**		**76,29**		**76,29**		**RSUD Simo**	

				86/2017)														
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase capaian SPM RS**	**100**	**100**	**56.962.750.000**	**100**	**58.557.750.000**	**100**	**60.311.750.000**	**100**	**62.241.750.000**	**100**	**64.364.750.000**	**100**	**302.438.750.000**	**RSUD Simo**	
			Kegiatan																
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layana	Persentase capaian pelayanan		100	15.950.000.	100	17.54	100	19.299.0	100	21.22	100	23.35	100	97.375.000.000	RSUD Simo	

			n Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	gawat darurat			000		5.000.000		00.000		9.000.000		2.000.000			
			Sub Kegiatan															
		1.02.02.2.02.32	Operasional pelayanan rumah sakit	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat setelah pasien datang		3,4	15.950.000.000	3,4	17.545.000.000	3,4	19.299.000.000	3,4	21.229.000.000	3,4	23.352.000.000	3,4	97.375.000.000	RSUD Simo	
				Jam buka pelayanan		24	-	24	-	24	-	24	-	24	-	24	-	RSUD Simo	

				darurat														
				Jumlah tim penanggulangan bencana		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	RSUD Simo	
				Jumlah kematian pasien < 24 jam		6,8	-	6,8	-	6,8	-	6,8	-	6,8	-	6,8	-	RSUD Simo	
			Kegiatan																
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelayanan rawat inap		100		100		100		100		100		100	-	RSUD Simo	

			Sub Kegiatan															
		1.02.02.2.02.32	Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah kematian pasien > 48 jam		8,8	-	8,8	-	8,8	-	8,8	-	8,8	-	8,8	-	RSUD Simo	
				Jumlah kejadian pulang paksa		68	-	68	-	68	-	68	-	68	-	68	-	RSUD Simo	
				Jumlah pemberi pelayanan di rawat inap		90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	RSUD Simo	
			Kegiatan															
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujuka	Persentase capaian pelayanan rawat jalan		100		100		100		100		100		100	-	RSUD Simo	

			n Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
			Sub Kegiatan															
		1.02.02.2.02.32	Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah dokter pemberi pelayanan di poliklinik		16	-	16	-	16	-	16	-	16	-	16	-	RSUD Simo	
				Waktu tunggu di rawat jalan		120	-	120	-	120	-	120	-	120	-	120	-	RSUD Simo	
				Jumlah ketersediaan pelayanan poliklinik		10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	RSUD Simo	
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas	Jumlah elemen penilaian akreditasi dan reakredeta		1353	-	1353	-	1353	-	1353	-	1353	-	1353	-	RSUD Simo	

			Kesehatan di Kabupaten/Kota	si														
			Kegiatan															
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar		70	41.012.750.000	73	41.012.750.000	76	41.012.750.000	80	41.012.750.000	85	41.012.750.000	85	205.063.750.000	RSUD Simo	
			Sub Kegiatan															

		1.02.02.2.01.13	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah prasarana pendukung yang diadakan		2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	10	5.000.000.000	RSUD Simo	
		1.02.02.2.01.14	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah paket alat kesehatan/ penunjang medik yang diadakan		10	14.000.000.000	10	14.000.000.000	10	14.000.000.000	10	14.000.000.000	10	14.000.000.000	50	70.000.000.000	RSUD Simo	
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan obat, vaksin	Jumlah jenis obat dan vaksin yang diadakan		940	1.500.000.000	940	1.500.000.000	940	1.500.000.000	940	1.500.000.000	940	1.500.000.000	4.700	7.500.000.000	RSUD Simo	
		1.02.02.2.	Pengadaan	Jumlah jenis		3	512.7	3	51	3	512.	3	51	3	51	15	2.563.750.00	RSUD Simo	

		01.17	bahan habis pakai	bahan habis pakai yang diadakan			50.000		2.750.000		750.000		2.750.000		2.750.000		0		
		1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Penduk ungnya	Jumlah unit bangunan yang dibangun		2	24.000.000.000	2	24.000.000.000	2	24.000.000.000	2	24.000.000.000	2	24.000.000.000	10	120.000.000.000	RSUD Simo	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik				**Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**763**	**800**		**823**		**833**		**893**		**903**		**903**		**RSUD Simo**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit			**Nilai IKM**	**78,79**	**79,18**		**79,58**		**79,98**		**80,38**		**80,78**		**80,78**		**RSUD Simo**	

	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah			**Nilai Sakip**	**84,04**	**84,20**		**84,40**		**84,70**		**84,90**		**85,20**		**85,20**		**RSUD Simo**	
		X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Pemenuhan Standart pelayanan kesehatan Rumah Sakit (IKM)**	**100**	**100**	**7.628.767.000**	**100**	**7.628.767.000**	**100**	**7.628.767.000**	**100**	**7.628.767.000**	**100**	**7.628.767.000**	**100**	**38.143.835.000**	**RSUD Simo**	
			Kegiatan																
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat		100	7.628.767.000	100	7.628.767.000	100	7.628.767.000	100	7.628.767.000	100	7.628.767.000	100	38.143.835.000	RSUD Simo	

			Daerah	Daerah														
			Sub Kegiatan															
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN		100	7.628.767.000	100	7.628.767.000	100	7.628.767.000	100	7.628.767.000	100	7.628.767.000	100	7.628.767.000	100	38.143.835.000	RSUD Simo	
		X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD		12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	60	-	RSUD Simo	
		X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD		12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	60	-	RSUD Simo	

		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18	-	18	-	18	-	18	-	18	-	90	-	RSUD Simo	
		X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan		2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	10	-	RSUD Simo	
			Kegiatan																

		X.XX.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat		25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	125	-	RSUD Simo	
			Sub Kegiatan																
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun		2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	10	-	RSUD Simo	
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	RSUD Simo	

			RKA-SKPD															
		X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	RSUD Simo	
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	RSUD Simo	
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubah	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	RSUD Simo	

			an DPA-SKPD															
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun		15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	75	-	RSUD Simo	
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah		4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	20	-	RSUD Simo	
			Kegiatan															
		X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah layanan Administrasi Perkantora		12		12		12		12		12		60	-	RSUD Simo	

			Kewenangan Perangkat Daerah	n Perangkat Daerah														
			Sub Kegiatan															
		X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah target lain-lain PAD yang Sah (BLUD)		15.950.000.000		17.545.000.000		19.299.000.000		21.229.000.000		23.352.000.000		97.375.000.000	-	RSUD Simo	
		X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah		12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	60	-	RSUD Simo	
TOTAL							**64.591.517.000**		**66.186.517.000**		**67.940.517.000**		**69.870.517.000**		**71.993.517.000**		**340.582.585.000**		

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menyusun prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 39.113.469.000,-

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota	Operasional pelayanan rumah sakit	26.500.000.000
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayana kesehatan	2.814.854.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.798.615.000
			39.113.469.000

BAB IV

TUJUAN, SASARAN

4.1 Program dan Kegiatan

Adapun Rencana Kerja RSUD Simo Tahun 2024 sebagai berikut:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2024

REKAPITULASI
RKA BELANJA SKPD

ORGANISASI : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
UNIT ORGANISASI : 1-02.0-00.0-00.01.003 Rumah Sakit Umum Daerah Simo
SUB UNIT ORGANISASI : 1-02.0-00.0-00.01.003.0 Rumah Sakit Umum Daerah Simo

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI	JUMLAH (Rp)						
				TAHUN-1	TAHUN N					TAHUN+1
					BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**35.098.615.000,00**	**4.014.854.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.113.469.000,00**	
1-02	**KESEHATAN**				**35.098.615.000,00**	**4.014.854.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.113.469.000,00**	
1-02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.798.615.000,00	0,00	0,00	0,00	9.798.615.000,00	
1-02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.798.615.000,00	0,00	0,00	0,00	9.798.615.000,00	
1-02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU) ; Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Lokasi belum ditentukan	9.798.615.000,00	9.798.615.000,00	0,00	0,00	0,00	9.798.615.000,00	9.798.615.000,00
1-02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				25.300.000.000,00	4.014.854.000,00	0,00	0,00	29.314.854.000,00	
1-02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0,00	2.814.854.000,00	0,00	0,00	2.814.854.000,00	
1-02.02.2.01.014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Lokasi belum ditentukan	2.814.854.000,00	0,00	2.814.854.000,00	0,00	0,00	2.814.854.000,00	2.814.854.000,00
1-02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				25.300.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	26.500.000.000,00	
1-02.02.2.02.032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Lain-lain PAD yang Sah; Pajak Daerah	Lokasi belum ditentukan	26.500.000.000,00	25.300.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00
			JUMLAH		35.098.615.000,00	4.014.854.000,00	0,00	0,00	39.113.469.000,00	

Boyolali, 6 September 2023
DIREKTUR RSUD SIMO

dr RATMI PUNGKASARI, M.Kes

BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan program kerja dan kegiatan RSUD Simo Kabupaten Boyolali tergantung dari tekad, semangat dan Profesionalisme segenap aparatur RSUD Simo Kabupaten Boyolali serta koordinasi, kerjasama yang baik dengan para pihak terkait termasuk segenap lapisan masyarakat.

Dengan telah disajikannya Renja Perubahan RSUD Simo Kabupaten Boyolali tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberi gambaran secara menyeluruh dan terukur menyangkut kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan pada masyarakat Tahun 2024.

RSUD Simo Kabupaten Boyolali senantiasa selalu terbuka dan siap menerima kritik saran, masukan untuk perbaikan dari pihak manapun, demi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Demikian Rencana Kerja RSUD Simo Kabupaten Boyolali Anggaran Tahun 2024.

F. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPUPR TAHUN 2021 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun 2022 10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPUPR 19
a. Tugas Pokok dan Fungsi 19
b. Struktur Organisasi 20
c. Kajian Indikator Kinerja 20
2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 21
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD 22
2.5. Penelaahan usulan Program dari masyarakat 25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 26

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional 26
3.2. Tujuan dan sasaran Renja DPUPR 30
3.3. Program Dan Kegiatan 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 37

BAB V PENUTUP 40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam menentukan suatu keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah diartikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan unsur pemangku kepentingan didalamnya, pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik untuk skala nasional maupun daerah.

Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan satuan perangkat daerah untuk perode 1 (satu) tahun , yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang

mendukung pemerintah Kabupaten Boyolali sesuai dengan Visi dan Misi yang dicanangkan oleh Bupati Boyolali Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali merupakan tahapan awal yang dilakukan sebelum dituangkan menjadi Dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali . Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali. Penyusunan rencana kinerja ini dimulai dengan merumuskan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahun), yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kerja tahunan. Berdasarkan rencana kerja tahunan tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyusunan RKA dan DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis RPJMD dan Renstra OPD ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian, Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dikelola OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali. Proses penyusunan Renja ini dimulai

dengan persiapan penyusunan RENJA OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) , kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD. Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Mencabut Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/2014 dan Permen PUPR Nomor 22/PERMEN/M/2008);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;
17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 31 Tahun 2018, tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan RuangKabupaten Boyolali;
18. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali adalah untuk menyajikan dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Secara lebih rinci maksud dari penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali Tahun 2024;
2. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu~isu strategis pada tahun 2024;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali Tahun 2024;
4. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali untuk peningkatan kinerja Bidang Pekerjaan Umum.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RKPD;
2. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 yang mengacu pada Renstra dan RKPD;
3. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali Tahun 2024;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan organisasi perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali meliputi : tahapan perumusan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali. Dalam tahapan ini dilakukan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali, telaah terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran sampai kepada dokumen Rencana Kerja.

Secara garis besarisi dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Boyolali

berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian dan catatan penting tentang rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhannya, terkait dengan rumusan program dan kegiatan maupun besarannya.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolaliyang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Program serta Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah- kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD

Pada Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali untuk belanja langsung dialokasikan anggaran sebesar Rp.278.234.429.000,-(dua ratus tujuh delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) yang dialokasikan untuk pelaksanaan 11 (Sebelas) program dan 19 (Sembilan Belas) kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 268.929.221.824,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau mencapai 96,66%, uraian selengkapnya atas capaian tersebut dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran DPUPR Tahun 2022

NO	URUSAN YG DILAKSANAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN/ DANA (Rp)	REALISASI FISIK (DANA) (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	**WAJIB**					
I	**Pekerjaan Umum**	I.1 **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	1.1. Administrasi keuangan perangkat daerah	14.452.852.000	14.210.005.673	98,32
			1.2 Administrasi umum perangkat daerah	1.306.498.600	1.148.352.513	87,90
			1.3 Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan	1.052.000.000	1.025.148.600	97,45

NO	URUSAN YG DILAKSANAKAN	PROGRAM	KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN/ DANA (Rp)	REALISASI FISIK (DANA) (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
				pemerintah daerah			
			1.4	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	349.000.000	304.580.854	87,27
			1.5	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	719.000.000	626.492.806	87,13
		I.2 **Program Pengelolaan Sumber Daya Air**	I.2.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.152.206.000	6.844.544.000	95,70
			I.2.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.639.286.900	15.206.428.053	97,23
		I.3 **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem**	I.3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.615.849.000	10.401.842.750	97,96

NO	URUSAN YG DILAKSANAKAN	PROGRAM		KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN/ DANA (Rp)	REALISASI FISIK (DANA) (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
			Penyediaan Air Minum		(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
		I.4	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	I.4.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.951.714.000	5.946.199.000	99,91
		I.5	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase**	I.5	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.355.000.000	3.967.386.000	91,10
		I.6	**Program Penataan Bangunan Gedung**	I.6.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	35.556.926.500	32.776.657.650	92,18
		I.7	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	I.7	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.513.101.450	1.496.492.500	98,90

NO	URUSAN YG DILAKSANAKAN	PROGRAM		KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN/ DANA (Rp)	REALISASI FISIK (DANA) (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
		I.8	**Program Penyelenggaraan Jalan**	I.8	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	176.929.490.500	172.473.473.125	97,48
		I.9	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	I.9.1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	75.000.000	74.558.700	99,41
				I.9.2	Pengawasan dan evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	529.451.000	500.403.850	94,51
		I.10	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	I.10.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	1.476.840.000	1.448.902.950	98,11
				I.10.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	21.000.000	23,33
				I.10.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	225.000.000	219.697.250	97,64
		I.11	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	I.11	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah	245.213.000	237.055.500	96,67

NO	URUSAN YG DILAKSA NAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN/ DANA (Rp)	REALISASI FISIK (DANA) (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
			Kabupaten/Kota			

Tabel 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPUPR dan Pencapaian Renstra tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022	Target renstra 2022	Realisasi Renstra 2022	Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kenyamanan Transportasi	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	82.72%	82.86%	82.72%	82.86%	82,92%	82,92%
2	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	Prosentase peningkatan PDRB sektor Pertanian : -Prosentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	61.15%	61.15%	61.15%	61.15%	61,53%	61,53%
3	Meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap	100%	94.11%	100%	94.11%	100%	100%

	utilitas permukiman berbasis smartness	layanan Sumber air minum layak dan berkelanjutan						
		Persentase Rumah Tangga yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (SPM)	100%	98.28%	100%	98.28%	100%	100%
4	Meningkatnya Kualitas Bangunan dan Penataan Ruang	Persentase Gedung yang dibangun dalam kondisi baik	92%	85%	92%	85%	90,90%	90,90%
		Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai ITR	91%	90.8%	91%	90.8%	92,14%	92,14%

5	Meningkatnya Nilai Investasi	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) (dalam juta rupiah) : -Prosentase Dokumen Rencana Rinci Kawasan Potensial Investasi	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	18,1%	18,1%

Penjelaan :

Kolom 4 : target kinerja dalam Renstra tahun 2021-2026

Kolom 5 : target renstra pada tahun sebelumnya/ tahun 2022

Kolom 6 : Realisasi capaian renstra pada tahun sebelumya/ tahun 2022

Kolom 7 : Target pencapaian dalam renja tahun 2022

Kolom 8 : realisasi pencapaian berdasarkan target Renja tahun 2022

Kolom 9 : Pencapaian antara target dengan realisasi yang diakumulasikan dalam bentuk persentase

Kolom 10 : Perkiraan capaian Renja pada tahun berjalan saat penyusunan Renja 2023

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali merupakan unsur pelaksana teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan.

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali didalam menyelenggarakan tugas pokoknya berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali sesuai Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Keuangan;
3. Bidang Bina Marga;
4. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
5. Bidang Cipta Karya;
6. Bidang Penataan Ruang:
   a. Seksi Pertanahan
7. Bidang Bina Konstruksi;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Kajian Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dari aspek Aspek Pelayanan Umum di bidang Pekerjaan Umum dengan indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Rasio Jaringan Irigasi, Rasio tempat ibadah per satuan penduduk, Persentase rumah tinggal bersanitasi, Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, Rasio rumah layak huni, Rasio permukiman layak huni, Panjang jalan dilalui Roda 4, Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4), Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/Jam), Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal

1,5 m), Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar, Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar, Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat, Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota, Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik, Lingkungan Pemukiman, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator Rumah tangga pengguna air bersih, Rumah tangga pengguna listrik, Rumah tangga ber-Sanitasi, Lingkungan pemukiman kumuh, Rumah layak huni, dan bidang Penataan Ruang dengan indikator Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB, Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan, Ruang publik yang berubah peruntukannya, bidang Lingkungan Hidup dengan indikator Persentase penanganan sampah, Persentase Penduduk berakses air minum, Persentase Luas pemukiman yang tertata.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah, membuat semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana public untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu infrastruktur juga terkait erat dengan konektivitas reginal dan nasional, yang mendukung penguatan posisi Kabupaten Boyolali melalui beberapa pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar tergadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Isu Strategis Terkait Infrastruktur Dasar.
   a. Belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar;
   b. Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap air baku;
   c. Belum optimalnya akses sanitasi layak.
2. Isu Strategis Infrastruktur Penunjang.
   a. Masih adanya pelanggaran tat ruang;

b. Belum optimalnya pelayanan langsung kepada masyarakat;
c. Belum tersedianya Kawasan untuk penunjang investasi terkait dengan kesiapan Kawasan Peruntukan Industri dan Pola Ruangnya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah memuat : rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemunuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun direncanakan.

Tabel 2.3. RKPD DPUPR Tahun 2022

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan	**Indikator Kinerja Program / Kegiatan**	**MURNI**			**PERUBAHAN**			**Selisih**
			Lokasi	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu**	**Target Capaian Kienrja**	**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif**		
	2	3	4	5	9	10	11	12	16
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar									
1.03	**Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Dokumen Rencana Rinci Kawasan Potensial Investasi							
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RDTR yang disusun	Boyolali		763.840.000		1.316.840.000		

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Boyolali		50.000.000		90.000.000		

	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase jalan dalam kondisi mantap**	**Boyolali**	**82,52**		**82,72**			
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	panjang jalan yang dibangun, dipertahankan & ditingkatkan kualitasnya dalam kondisi mantab	Boyolali	82,52	71.675.871.100	82,72	171.994.717.244		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase drainase dalam kondisi baik**							
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drinase dalam kondisi baik (m)	Boyolali	426,24	2.260.667.000	428,02	4.355.000.000		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik**							
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pengelola sumber daya air yang diberdayakan	Boyolali	8	100.000.000	8	6.000.000		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasiyang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik (m)	Boyolali	5500	9.688.432.000	5500	12.994.627.500		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Persentase peningkatan embung terbangun**							

	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah embung yang terbangun yang berfungsi dengan baik	Boyolali	4	17.274.863.000	4	6.972.203.000		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase rumah tangga yang terlayani Air bersih perpipaan dan terlindung**							
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah rumah tangga penduduk perkotaan yang terlayani air baku	Boyolali	35,69	2.113.849.000	35,69	1.140.000.000		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase rumah tangga miskin yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan**							
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani (SR)	Boyolali	450	1.200.000.000	450	1.206.000.000		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase sanitasi komunal dalam kondisi baik**							
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam DaerahKabupaten/ Kota	Persentase sanitasi komunal dalam kondisi baik	Boyolali	98,18	2.907.217.000	98,18	2.631.206.000		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam DaerahKabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan ketersediaan sanitasi individual	Boyolali	68,32	950.000.000	68,32	3.220.000.000		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Persentase gedung yang dibangun dalam kondisi baik**							

	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian IzinMendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah gedung fasilitas publik yang dibangun dalam kondisi baik	Boyolali	3	48.039.340.000	3	39.820.027.100		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Persentase lingkungan gedung perkantoran dalam kondisi baik**							
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lingkungan gedung perkantoran dalam kondisi baik	Boyolali	3	500.000.000	3	1.250.000.000		
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Persentase SIUJK terbit tepat waktu**							
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	jumlah tenaga terlatih di kabupaten/ kota	Boyolali	94	50.000.000	75	75.000.000		
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan JasaKonstruksi	jumlah badan usaha/perseorangan bidang konstruksi yang terbina	Boyolali	40	49.451.300	49	329.451.000		
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**Persentase kasus sengketa tanah yang tertangani**							
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah sengketa yang tertangani**	**Boyolali**	**40**	**45.213.000**	**40**	**45.213.000**		

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah dibidang Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali melakukan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan yang diajukan para pemangku kepentingan, oleh karena itu dalam penentuan skala prioritas dapat tidaknya usulan program dan kegiatan dari stakeholder diakomodasi, dengan tetap

memperhatikan beberapa kriteria yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Boyolali meliputi :

1. Keterkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
2. Keterkaitan dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Boyolali periode 2021-2026;
3. Keterkaitan dengan pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan
4. Keterkaitan dengan isu strategis daerah.

Berdasarkan kriteria tersebut, Daftar/usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, untuk dijadikan prioritas pembangunan beserta tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program serta kebutuhan pembiayaannya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Pembangunan yang menjadi rujukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah penyesuaian antara program pembangunan yang diarahkan dengan permasalahan kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur, serta relevansinya dengan perkembangan Kabupaten Boyolali ke depan. Kebijakan pengembangan Tata ruang dan Lingkungan, serta Kebijakan Penguatan Struktur Ekonomi merupakan kebijakan Pokok yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Boyolali yang menjadi rujukan pembangunan infrastuktur di daerah baik yang di pemerintah pusat maupun provinsi dan Kabupaten Boyolali.

Arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan, dan Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

   Bidang Tata Ruang, Perencanaan pembangunan wilayah ditujukan untuk mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, tertib dan aman dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara dan memperkokoh ketahanan nasional.
2. Bidang Transportasi Jalan

   Pengembangan jaringan transportasi jalan Primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan

pusat kegiatan Nasional, kegiatan wilayah serta kawasan-kawasan Andalan yang cepat berkembang.

3. Bidang Perumahan

   Terwujudnya keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara mandiri sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam rangka pengembangan jati diri, dan mendorong terwujudnya kualitas lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan, baik di perkotaan maupun diperdesaan.

4. Bidang Lingkungan Hidup
   - menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya, sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan dengan Sasaran terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif;
   - meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi dengan Sasaran tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan;
   - meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan Sasaran tersediaanya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.

Berdasarkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah guna mendukung program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026 mengusung 3 (tiga) prioritas utama pembangunan daerah, dengan program prioritas pendukung lainnya untuk mencapai visi "Boyolali Maju Meneruskan Pro Investasi" Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL). Dengan berpedoman terhadap visi dan misi Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 beserta indikator kinerjanya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Boyolali

No	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran** **(Ukuran/ Penanda)**
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Meningkatnya nilai investasi	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) (dalam juta rupiah)
			Meningkatnya kenyamanan transportasi	Persentase jalan dalam kondisi mantap
2	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Nilai Tukar Petani (NTP)	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian
3	Meningkatnya kenyamanan hidup Kabupaten Boyolali	Index Smart City	Meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. (SDGs)

			berbasis smartness	
			Meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman berbasis smartness	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi sehat, layak dan berkelanjutan. (SDGs)
			Meningkatnya kualitas bangunan dan penataan ruang	Persentase bangunan yang sesuai standar
			Meningkatnya kualitas bangunan dan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
4	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai Sakip

Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, serta mengacu pada arah kebijakan Kabupaten Boyolali dibidang Pekerjaan Umum prioritas pembangunan yang dilaksanakan tahun 2024 meliputi :

1. Pembangunan infrastruktur jalan untuk meminimalisir kesejangan antar wilayah (wilayah utara dan selatan), serta untuk membuka dan meningkatkan akses-akses perekonomian masyarakat.

2. Pembangunan Prasarana dan sarana air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, baik untuk air minum ataupun untuk mengaliri lahan pertanian guna menunjang pencapaian kesejahteraan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2021 – 2026 adalah ***"Boyolali Maju Meneruskan Pro Investasi" Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)*** penyusunan visi rencana pembangunan daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2026 dilakukan dengan memperhatikan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005 – 2025 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Boyolali yang Konstitusional, Berdaya Saing, Aman, Mandiri dan Sejahtera". Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2026 mengakomodasikan prioritas RPJPD tahun IV dan V.

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2021 – 2026 adalah ***"Boyolali Maju Meneruskan Pro Investasi" Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL).*** Penjabaran secara terkait dengan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali adalah menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif, didukung dengan peningkatan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan. Dikaitkan dengan visi misi dalam Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali periode 2021-2026, tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikatornya tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Ukuran/ Penanda)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Meningkatnya nilai investasi	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) (dalam juta rupiah)
			Meningkatnya kenyamanan transportasi	Persentase jalan dalam kondisi mantap
2	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Nilai Tukar Petani (NTP)	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian
3	Meningkatnya kenyamanan hidup Kabupaten Boyolali	Index Smart City	Meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman berbasis smartness	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. (SDGs)
			Meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman berbasis smartness	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi sehat, layak dan berkelanjutan. (SDGs)

			Meningkatnya kualitas bangunan dan penataan ruang	Persentase bangunan yang sesuai standar
			Meningkatnya kualitas bangunan dan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
4	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai Sakip

Uraian keterkaitan antara visi misi dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali periode 2021 – 2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terpenuhinya infrastruktur dasar : air bersih, air minum, drainase, jaringan irigasi, bendung, embung, jalan dan jembatan.
2. Terpenuhinya Infrastruktur Penunjang : sarana publik, landmark, penerangan jalan umum, energi alternatif, sarana penunjang transportasi.

Misi ini fokus pada upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pembangunan yang berkelanjutan. Kemajuan daerah yang berkelanjutan merupakan proses yang tidak pernah berakhir, namun perlu penekanan dan penajaman prioritas pada hal-hal yang dianggap sebagai pilar kunci. Pembangunan infrastruktur dianggap sebagai pilar kunci karena pengaruhnya pada kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sangat signifikan. Infrastruktur yang dibidik dari misi ini meliputi infrastruktur dasar, infrastruktur sosial dan infrastruktur penunjang.

Prioritas daerah andalan tahun 2016 – 2021 adalah pembangunan embungyang mempunyai nilai strategis untuk mendukung pencapaian tujuan keenam *Sustainable Development Goals*, yakni menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Keberadaan embung mendukung ketersediaan air bersih untuk produksi maupun untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan dengan tolok ukur kinerja masing-masing kelompok program serta kebutuhan pembiayaannya. Kerangka pendanaan yang disajikan bersifat indikatif yang berarti bahwa anggaran pendanaan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kegiatan dan target yang akan dilaksanakan. Uraian Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tersebut adalah :

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
b. Pencapaian MDGs,
c. Pengentasan kemiskinan,
d. Pencapaian SPM,
e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
f. Pengembangan daerah terisolir,
g. Membuka dan meningkatkan akses ekonomi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas terhadap program dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali dalam tahun 2024, dapat digambarkan Rekapitulasi program dan kegiatan, yang akan dilakukan dalam tahun 2022 dan dalam rangka pencapaian target RPJMD dan SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali antara lain meliputi program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah

- Administrasi keuangan perangkat daerah;
- Administrasi umum perangkat daerah;

- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota.
- Pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- Pengelolaan dan Pengembangan system air limbah domestic dalam daerah kabupaten/kota

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

- Pengelolaan dan Pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota

6. Program Penataan Bangunan Gedung

- Penyelenggaraan bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/kota, Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi (SLF)
- Perencanaan, pembangunan,pengawasan dan pemanfaatan bangunan Gedung daerah kabupaten/kota.

7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Penyelenggaraan Jalan

- Penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota

9. Program pengembangan jasa konstruksi

- Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi
- Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) Kab/kota.
- Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota.
- Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota.

11. Program penyelesaian sengketa tanah Garapan

- Penyelesaian sengketa tanah Garapan dalam daerah kabupaten/kota.

Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan untuk infrastruktur jalan diarahkan pada jalan-jalan kabupaten yang memiliki akses ekonomi masyarakat, untuk kebutuhan air bersih diarahkan ke lokasi/daerah-daerah yang kekurangan air bersih, dan untuk irigasi teknis diarahkan ke lokasi daerah yang memilik lahan pertanian yang baik guna mempertahankan pangan masyarakat. Dari keseluruhan program dan kegiatan untuk mencapai target baik RPJMD, SPM maupun IKK dibutuhkan dana ± Rp. 278.231.429.000,-.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	URUSAN YG DILAKSANAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	ASUMSI ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	ASUMSI KENAIKAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	**Pekerjaan Umum**	I.1 **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	I.1.1 Administrasi keuangan perangkat daerah	15.211.874.000	16.711.874.000	10%
			I.1.2 Administrasi umum perangkat daerah	959.100.000	1.050.000.000	10%
			I.1.3 Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	200.000.000	220.000.000	10%
			I.1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.340.000	297.340.000	10%
			I.1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	267.300.000	297.300.000	10%
		I.2 **Program Pengelolaan Sumber Daya Air**	I.2.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	5.580.000.000	6.000.000.000	10%
			I.2.2 Pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1	9.989.255.000	10.989.255.000	10%

NO	URUSAN YG DILAKSA NAKAN	PROGRAM		KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	ASUMSI ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	ASUMSI KENAIKAN (%)
					(satu) daerah Kab/ Kota			
		I.3	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	I.3.1	Pengelolaan dan Pengembangan system Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kab/Kota	12.569.091.000	13.769.091.000	10%
		I.4	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	I.4.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah Domestik dalam daerah kabupaten/kota	3.957.217.000	4.357.217.000	10%
		I.5	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	I.5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kab/kota	1.418.737.000	1.568.000.000	10%
		I.6	**Program Penataan Bangunan Gedung**	I.6	Penyelenggaraan bangunan Gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung	39.795.000.000	42.000.000.000	10%
		I.7	**Program penataan bangunan dan lingkungannya**	I.7.1	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kab/kota	2.400.000.000	2.640.000.000	10%
		I.8	**Program Penyelenggaraan Jalan**	I.8.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	113.207.064.000	123.000.000.000	10%
		I.9	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	I.9.1	Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	100.000.000	110.000.000	10%
				I.9.2	Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggara	407.412.000	454.000.000	10%

NO	URUSAN YG DILAKSA NAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)	ASUMSI ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	ASUMSI KENAIKAN (%)
			an dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi			
		I.10 **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	I.10.1 Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR)	785.000.000	850.000.000	10%
			I.10.2 Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	442.680.000	500.000.000	10%
		I.11 **Program Penyelesaian sengketa pertanahan**	I.1.1 Penyelesaian sengketa tanah Garapan dalam daerah kab/kota	100.213.000	110.000.000	10%

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk satu periode (1 tahun). Renja OPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Tahun 2024 ini, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2023. Dokumen Rencana Kerja yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja.

Dengan demikian diharapkan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali akan terlaksana dengan upaya meningkatkan kinerja SKPD, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun 2024 khususnya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali. Dalam rangka mencapai sasaran tujuan pembangunan harus memenuhi beberapa kaidah :

a. Sinergi regulasi : diarahkan untuk mendorong sinergi harmonisasi regulasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan presiden

dan peraturan menteri sehingga dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026.

b. Sinergi Sinergi Perencanaan; dalam tahap perencanaan, RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali Tahun 2024 harus bersinergi dengan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan dalam pelaksanaan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintah (Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antar sektor, antar waktu, antar wilayah, dan antar pusat dan daerah.

G. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Hidayah dan Inayah -Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dapat di susun.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DPKP Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali ini disusun sebagai salah satu acuan/pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing bidang dan sekretariat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali kami banyak mendapatkan bantuan, dan kerjasama dari semua bidang di DPKP dan sekretariat, untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja DPKP Tahun 2024.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) ini bermanfaat dan dapat menjadikan suatu pedoman kerja, utamanya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL ..... -

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

1.4 Sistematika Penulisan.....……..... 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH …….....

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 10

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 11

2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 11

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 30

3.1 Telaahan Terhadap Kabijakan Nasional 30

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 33

4.1 Program dan Kegiatan..... 33

BAB V PENUTUP..... 48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan PD sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021-2026. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Acuan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matrix yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja,kelompok sasaran,pagu indikatif dan sumber dana,

Secara subtansial di dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali tahun 2024 merupakan:

1. Pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali dalam pelaksanana program dan kegiatan tahun 2024.
2. Dokumen untuk menjamin keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan,penganggaran,pelaksanaan dan pengembangan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah untuk pembangunan suatu wilayah maka perencanaan menduduki peran yang sangat penting agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 1 (satu) tahun. Penyusunan RENJA ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Boyolali untuk lima tahun ke depan.

Penyusunan RENJA ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di tahun 2024 dengan fokus utama pelayanan adalah menggerakkan ekonomi rakyat, percepatan pembangunan, peningkatan produktifitas dan kesejahteraan rakyat dalam kerangka kehidupan masyarakat yang berkelanjutan.

1.2.LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Tahun 2024Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolaliadalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2026;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16 tambahan Lembaran Daerah Nomor 183);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (LD Kab. Boyolali Nomor 291, Tanggal 21 Desember 2022);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 5 Tahun 2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Boyolali;
11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021;
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2022, tentang Standart Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 111) tanggal 21 Desember 2022);

1.3.MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2024 yaitu :

1. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun yang memuat visi,misi dan tujuan DPKP selama 1(satu) tahun kedepan dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Boyolali;
2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan dalam satu tahun dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD);
3. Menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi bidang – bidang di lingkungan DPKP Kabupaten Boyolali untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamatkan;

4. Memudahkan seluruh jajaran DPKP untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Adapun tujuannya yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akuntabel dengan meningkatakan kualitas dan intensitas fungsi kordinasi antar bidang di lingkungan DPKP;
2. Pedoman yang berisikan program dan kegiatan yang berisikan proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan Tupoksi DPKP Kabupaten Boyolali Tahun 2024 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Boyolali dan RKPD agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan pengganggaran;
3. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja DPKP dengan membandingkan antara proses dan hasil yang dicapai;
4. Menyediakan satu acuan resmi bagi DPKP dalam menentukan prioritas program dan kegiatan dalam satu tahun;
5. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan DPKP;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Sistematika Renja Perangkat Daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Dasar Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistem Penulisan

BAB IIHASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Riview terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan
BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali Tahun 2023 sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja yang disusun,

Capaian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Lembar :.....

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar									
1	04			Bidang Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman									
1	04	01		Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100				100	100		
1	04	01.2	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Penganggaran Gaji, TPP PNS dan Honorarium Non PNS	76	-	12	12	100	100	73,21	73,21
1	04	01.2	06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa dan Material Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57	-	12	12	100	100	66,67	66,67
1	04	01.2	07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2	-	16paket	16paket	100	100	79,29	79,29
1	04	01.2	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	-	12	12	100	100	66,67	66,67
1	04	01.2	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang/peralatan milik daerah yang terpelihara	53	-	7jenis	7jenis	100	100	66,66	66,66
										100	100		

1	04	02		Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM)	100				100	100		
1	04	02.2	01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah korban bencana/relokasi program Kabupaten dan lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	1	-	1dok	1dok	100	100	30,00	30,00
1	04	02.2	03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat korban bencana	8	-	20unit	21unit	100	100	92,22	92,22
1	04	02.2	06	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Pengembangan Aplikasi dan Peta Perumahan	24	-			100	100	30,00	30,00
										100	100		
1	04	03		Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	100				100	100		
1	04	03.2	01	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Pengembangan Aplikasi dan Peta Perumahan dan Kawasan Permukiman	24	-	2dok	2dok	100	100	30,00	30,00
1	04	03.2	02	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Permukiman Kumuh	3	-	4dok	4dok	100	100	25,00	25,00
1	04	03.2	03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan Kumuh yang tertangani	5	-	5ha	23,66ha	100	100	100,00	100,00
										100	100		
1	04	04		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	100				100	100		
1	04	04.2	01	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah	Jumlah rumah yang dapat dicegah dari kekumuhan	1200	-	1200unit	1713unit	100	100	95,00	95,00

				Kabupaten/Kota									
										100	100		
1	04	05		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik	100				100	100		
1	04	05.2	01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah penambahan kawasan permukiman yang memiliki PSU dalam Kondisi baik	1	-	0 %	100%	100	100	100	100
										100	100		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PerangkatDaerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalamNSPKdan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 2018. Indikator kinerja yang ditetapkan DinasPerumahanKawasan Permukiman, mengacu pada indikator kinerja utama danindikator kinerja kunci yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali 2016-2021 dan pencapaiannya hingga triwulan ke II tahun 2022 sebagai berikut

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Boyolali

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thnn-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2025 (thnn+1	Tahun 2022 (thnn-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thnn+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terwujudnya Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni		IKK	-	-	-	-	-	-	-	-	
			IKK	100	100	100	100	759	649	100	100	
2	Terwujudnya Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni bagi Gakin		IKK	1.000	1.000	1.000	1.000	1000	1000	1.000	1.000	Capain 0 di Karenakan adnya Refokusing Anggaran untuk Penanganan COVID-19
3	Pelayanan Legalisai Site Plan		IKK	24	24	24	24	15	14	24	24	
4	Penyediaan dan rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana	SPM		100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah Daerah	SPM		100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah*

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas sesuai dengan pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah rumah tidak layak huni masih banyak (32.676 unit).
2. Backlog rumah masih cukup banyak.
3. Penanganan rumah korban bencana yang masih perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak.
4. Terbatasnya kemampuan Pemerintah Kabupaten Boyolali sehingga belum bisa optimal memfasillitasi perumahan bagi penduduk miskin/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
5. Belum adanya data Kawasan kumuh seluruh Kabupaten Boyolali.
6. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah belum berjalan optimal.
7. Penyerahan PSU yang belum optimal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali didasarkan pada program dan kegiatan yang direncanakan dalam renstra, hasil mussrenbang,aspirasi/pokir dewan dan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yangtelah dilaksanakan tahun lalu, akan tetapi setelah melalui proses pembahasan, beberapa kegiatan dapat di tambahkan atau dapat dilaksanakan di tahun 2024. dan terlampir tabel Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 di bawah ini:

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Boyolali

NamaPerangkatDaerah: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Lembar 1 dari 12

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					21.522.286.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					21.522.286.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					21.522.286.000,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.129.286.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
		-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					

		-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
		-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
		-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.469.906.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Orang/bulan	2.260.606.000,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	209.300.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					

		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0,00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	0,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	0,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					

		-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
		-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					365.590.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	5.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	0,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					

		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	11.109.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	118.984.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	32.000.000,00
	Penyediaan Bahan/Material					
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	32.114.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu					

		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	49.200.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	117.183.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					

		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	20.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					59.400.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.700.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	56.700.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					

		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	0,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					214.390.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	94.950.000,00
	Pemeliharaan Mebel					
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	15.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31 Unit	30.050.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					

		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	74.390.000,00
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					818.000.000,00
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					100.000.000,00
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana					
		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten (SPM) Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) dan relokasi Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					
		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten (SPM) Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) dan relokasi Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					

		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten (SPM) Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) dan relokasi Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					0,00
	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					
		-	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang	0,00
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					618.000.000,00
	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota					

		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten (SPM) Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) dan relokasi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit Rumah	75.000.000,00
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					
		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten (SPM) Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) dan relokasi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit Rumah	543.000.000,00
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					100.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					
		Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh(Progam Kemiskinan) Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh Persentase kawasan kumuh yang tertangani	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	0,00

		Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh(Progam Kemiskinan) Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh Persentase kawasan kumuh yang tertangani	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00
3.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.321.000.000,00
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman					50.000.000,00
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik					
		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) dan relokasi Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten (SPM)	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00

		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) dan relokasi Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten (SPM)	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	0,00
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					48.000.000,00
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP					
		Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh(Progam Kemiskinan) Persentase kawasan kumuh yang tertangani	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh					
		Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh(Progam Kemiskinan) Persentase kawasan kumuh yang tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Dokumen	48.000.000,00
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					1.223.000.000,00

	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					
		Persentase kawasan kumuh yang tertangani Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh(Progam Kemiskinan) Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Unit Rumah	618.000.000,00
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh					
		Persentase kawasan kumuh yang tertangani Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh(Progam Kemiskinan) Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh					
		Persentase kawasan kumuh yang tertangani Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh(Progam Kemiskinan) Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Ha	605.000.000,00
4.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					16.014.000.000,00
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					16.014.000.000,00
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					

		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1100 Unit Rumah	14.946.000.000,00
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru					
		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	1.068.000.000,00
5.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					240.000.000,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					240.000.000,00
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan					
		Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik Persentase RLH untuk MBR yang dibangun	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00
		Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik Persentase RLH untuk MBR yang dibangun	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00
		Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik Persentase RLH untuk MBR yang dibangun	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					

		Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik Persentase RLH untuk MBR yang dibangun	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lokasi	180.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					
		Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik Persentase RLH untuk MBR yang dibangun	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	0,00
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang					
		Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik Persentase RLH untuk MBR yang dibangun	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	0,00
						21.522.286.000,00

2.1 Penelaahan Usulan Program dan KegiatanMasyarakat

Dalam Rangkaian proses penyusunan Renja mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten, sampai menjadi RKPD Kabupaten, terdapat usulan program dan kegiatan dari kelompok masyarakat, serta ditambah dengan masukan –masukan dari Perangkat Daerah lain yang disesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat atau Perangkat Daerah terkait yang kemudian dianalisis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali. Disajikan dalam table dibawah ini :

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan se Kabupaten Boyolali Tahun 2023

No	Program/Kegiatan /Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ProgramKawasan Permukiman/Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10(sepuluh)/Perbaikan rumah tidak layak huni	Kecamatan Kemusu	Peningkatan Kualitas RTLH	70 unit	disesuaikan dengan hasil verifikasi dan kemampuan anggaran
		Kecamatan Wonosamodro		10 unit	
		Kecamatan Ngemplak		70 Unit	
		Kecamatan Nogosari		70 Unit	
		Kecamatan Musuk		10 Unit	
		Kecamatan Andong		170 Unit	

Usulan Program dan Kegiatan dari Hasil Pokir DPRD Tahun 2023

No	Program/Kegiatan /Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ProgramKawasan Permukiman/Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10(sepuluh)/Perbaikan rumah tidak layak huni	Kecamatan Juwangi	Peningkatan Kualitas RTLH	100 unit	disesuaikan dengan hasil verifikasi dan kemampuan anggaran
		Kecamatan Sambi		5 unit	
		Kecamatan Teras		5 unit	
		Kecamatan Andong		1 unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Arah kebijakan dalam rangka penyediaan akses perumahan dan permukiman layak,aman,dan terjangkau adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Arah kebijakan dan strategi nasional bidang perumahan di tahun 2020-2024 difokuskan pada :

a. Pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana-sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara professional, kredibel, mandiri, danefisien;
b. Pembangunan perumahan dan prasarana-sarana permukiman yang mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; serta
c. Pembangunan perumahan dan prasarana-sarana permukiman yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup

Arah kebijakan dan strategi Provinsi Jawa Tengah Bidang Perumahan sebagai berikut:

a. Peningkatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
b. Penanganan Rumah Menuju Sehat Dan Berwawasan Lingkungan
c. Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana Alam Dan Program Pembangunan
d. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan
e. Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi
f. Peningkatan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman

g. Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman
h. Pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
i. Pembinaan dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPKP KABUPATEN BOYOLALI

Visi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Periode 2021-2026 adalah "Boyolali Maju, Melanjutkan Pro Investasi. *Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL),* dengan Misike 5 nya yaitu "Boyolali Tersenyum,Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing", dimana misi kelima menekankan terwujud nya tata kelola pemerintahan yang tumbuh, mandiri dan berdaya saing,responsive dan akuntabel mendukung kesejahteraan yang berkelanjutan.

Maka untuk mendukung dan merealisasikan visi dan misi Bupati Boyolali Periode 2021-2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali mempunyai Tujuan yaitu :

a. Meningkatnya Jumlah rumah layak huni
b. Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh
c. Meningkatkannya Nilai SAKIP

Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni
b. Meningkatnya Kualitas Prasarana, sarana dan utilitas permukiman berbasis Smartness
c. Meningkatkannya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Adapun kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan bersinergi dengan kebijakan di tingkat provinsi maupun nasional adalah

a. Menjaminketersediaanlahanperumahandenganditetapkannyaperda RT RW.
b. Memberikan kesempatan seluas luasnya kepada pengembang dalam penyediaan perumahan, dengan pemberian rekomendasi secara gratis dengan ketentuan mentaati peraturan perundangan dan sesuai RTRW yang sudah ditetapkan.
c. Peningkatan kualitas RTLH.
d. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR dalam upaya pengurangan backlog.
e. Penyediaan/rehabilitasi bagi masyarakat terdampak bencana
f. Penyediaan/pembangunan kembali rumah layak huni bagi masyarakat terdampak program pemerintah kabupaten.
g. Memberikan kesempatan bagimasyarakat, pengusaha, swasta dan organisasi kemasyarakatan/social untuk membantu dalam upaya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni maupun rumah terdampak bencana.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

a. Untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah, :

Visi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Periode 2021-2026 adalah “Boyolali Maju, Melanjutkan Pro Investasi. *Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)*, dengan Misike 5 nya yaitu “Boyolali Tersenyum,Tumbuh,Mandiri dan Berdaya Saing”,dimana misi kelima menekankan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang tumbuh, mandiri dan berdayasaing, responsive dan akuntabel mendukung kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan sasarannya yaitu meningkatnya akses rumah layak huni.

b. Pencapaian SDGs,sebagaia

Ada beberapa indikator SDGs yang menjadi kewenangan DPKP untuk melakukan intervensi.

c. Pengentasan kemiskinan,

Ada beberapa indikator kemiskinan yang menjadi kewenangan DPKP untuk melakukan intervensi.

d. Pencapaian NSPK danSPM,

SPM bidang Perumahan Rakyat berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dimana untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat ada dua jenis pelayanan dasar yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota.

e. Untuk pencapain target kinerja yang telah ditetapkan di tahun anggaran 2023 akan dijabarkan dalam 5 program dan 13 kegiatan, serta sebaran kegiatan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Boyolali

disesuaikan jenis kegiatan dan berdasarkan skala prioritasnya serta target sasaran bagi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan.

f. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KabupatenBoyolali

Nama Perangkat Daerah : DinasPerumahandanKawasanPermukimanKabupatenBoyolali

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Tolok Ukur	Target	
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					21.522.286.000,00			26.414.589.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					21.522.286.000,00			26.414.589.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					21.522.286.000,00			26.414.589.000,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.129.286.000,00			3.441.189.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00			4.150.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	0,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	100.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								

		-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	1.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
		-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	0,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.469.906.000,00			2.582.232.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Orang/bulan	2.260.606.000,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.372.632.000,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	209.300.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	209.300.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								

		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50.000,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	50.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000,00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	50.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	50.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								

		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	0,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	50.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0,00			50.000,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
		-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0,00			50.000,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
		-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	50.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					365.590.000,00			360.967.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	5.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	0,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	50.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	11.109.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	11.131.500,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	118.984.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	125.984.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	32.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	32.000.000,00
	Penyediaan Bahan/Material								
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	32.114.000,00	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	32.114.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	49.200.000,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	49.200.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	117.183.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	105.387.500,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.000,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								

		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	50.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.000.000,00			220.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	20.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	20.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	0,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					59.400.000,00			59.350.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.700.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.700.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	56.700.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	56.600.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					214.390.000,00			214.390.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	94.950.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	94.950.000,00
	Pemeliharaan Mebel								
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	15.000.000,00	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	15.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31 Unit	30.050.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	30.050.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	74.390.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	74.390.000,00
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					818.000.000,00			1.327.250.000,00
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					100.000.000,00			102.000.000,00
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana								

		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten (SPM) Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) dan relokasi Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	12 Dokumen	1.000.000,00
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								
		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten (SPM) Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) dan relokasi Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								
		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten (SPM) Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) dan relokasi Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	12 Dokumen	1.000.000,00
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					0,00			50.000,00
	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
		-	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang	0,00	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12 Orang	50.000,00
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					618.000.000,00			1.124.200.000,00
	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota								

		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten (SPM) Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) dan relokasi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit Rumah	75.000.000,00	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	14 Unit Rumah	75.000.000,00
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								
		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten (SPM) Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) dan relokasi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit Rumah	543.000.000,00	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	30 Unit Rumah	1.049.200.000,00
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					100.000.000,00			101.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan								
		Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh(Progam Kemiskinan) Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh Persentase kawasan kumuh yang tertangani	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	0,00	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	12 Laporan	1.000.000,00
		Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh(Progam Kemiskinan) Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh Persentase kawasan kumuh yang tertangani	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	100.000.000,00

3.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.321.000.000,00			2.244.100.000,00
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman					50.000.000,00			50.050.000,00
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik								
		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) dan relokasi Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten (SPM)	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	50.000.000,00
		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) dan relokasi Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten (SPM)	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	0,00	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	24 Dokumen	50.000,00
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					48.000.000,00			49.000.000,00
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP								
		Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh(Progam Kemiskinan) Persentase kawasan kumuh yang tertangani	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	12 Dokumen	1.000.000,00

	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh								
		Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh(Progam Kemiskinan) Persentase kawasan kumuh yang tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Dokumen	48.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	16 Dokumen	48.000.000,00
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					1.223.000.000,00			2.145.050.000,00
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni								
		Persentase kawasan kumuh yang tertangani Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh(Progam Kemiskinan) Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Unit Rumah	618.000.000,00	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	200 Unit Rumah	1.536.000.000,00
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh								
		Persentase kawasan kumuh yang tertangani Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh(Progam Kemiskinan) Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	12 Dokumen	50.000,00
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh								
		Persentase kawasan kumuh yang tertangani Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh(Progam Kemiskinan) Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Ha	605.000.000,00	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	5 Ha	609.000.000,00
4.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					16.014.000.000,00			19.161.000.000,00
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					16.014.000.000,00			19.161.000.000,00

	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1100 Unit Rumah	14.946.000.000,00	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1100 Unit Rumah	18.093.000.000,00
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru								
		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	1.068.000.000,00	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	30 Unit	1.068.000.000,00
5.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					240.000.000,00			241.050.000,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					240.000.000,00			241.050.000,00
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan								
		Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik Persentase RLH untuk MBR yang dibangun	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	20.000.000,00
		Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik Persentase RLH untuk MBR yang dibangun	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	20.000.000,00
		Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik Persentase RLH untuk MBR yang dibangun	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	20.000.000,00
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian								
		Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik Persentase RLH untuk MBR yang dibangun	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lokasi	180.000.000,00	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 Lokasi	180.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan								
		Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik Persentase RLH untuk MBR yang dibangun	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	0,00	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	10 Laporan	50.000,00
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang								

		Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik Persentase RLH untuk MBR yang dibangun	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	0,00	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10 Laporan	1.000.000,00
						21.522.286.000,00			**26.414.589.000,00**

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali ini disusun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Keberhasilan pelakasanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali ditentukan oleh dukungan dari seluruh pegawai dan pelaku pengembang perumahan, stake holder terkait dan partisipasi masyarakat.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ,Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali maka sasaran pembangunan dibidang perumahan dan kawasan permukiman ditandai dengan target capaian kinerja dalam Tahun 2024 telah tergambar dan tercatat dengan jelas sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dapat diukur dan dinilai keberhasilannya.

H. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

DINAS SOSIAL

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Sosial 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial 21

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial 24

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 25

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BOYOLALI 39

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 39

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Boyolali 39

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 40

4.1 Program dan kegiatan 40

BAB V PENUTUP 47

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, OPD dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Acuan Renja Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026 Tahun dan RKPD Tahun 2024. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matrik yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Secara substansial di dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Sosial Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan :

1. Pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.
2. Dokumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengembangan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah untuk pembangunan suatu wilayah maka perencanaan menduduki peran yang sangat penting agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Dalam hal ini hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan kebijakan pembangunan nasional maupun rencana pembangunan kabupaten/kota diharapkan tetap sinergis saling berkaitan satu sama lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dinas Sosial Kabupaten Boyolali merupakan salah satu lembaga yang berperan aktif dan memberikan konstribusi terhadap pembangunan di bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Boyolali. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang proporsional, terintegrasi, inovatif dan berkelanjutan, maka perlu dipersiapkan suatu dokumen perencanaan daerah yang bersifat komprehensif mencakup arah dan kebijakan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Guna melaksanakan perintah undang-undang tersebut di atas, maka setiap daerah (Kabupaten/ Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu RKPD.

Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana kerja PD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Boyolali, sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Renja Dinas Sosial Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Renja Dinas Sosial Tahun 2024 merupakan rencana kerja awal tahun implementasi pencapaian visi daerah yaitu **"BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI" Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)",** yang diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Dinas Sosial dalam penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan dalam perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaga negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007, tentang Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran

Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);

12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 47)
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 yaitu:

1. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun yang memuat visi, misi dan tujuan Dinas Sosial selama 1 (satu) tahun ke depan dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Boyolali;
2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan dalam satu tahun dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD);
3. Menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Boyolali untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan;
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
5. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Sosial dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

6. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Sosial untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Adapun tujuannya yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akuntabel dengan meningkatkan kualitas dan intensitas fungsi koordinasi antar OPD;
2. Pedoman yang berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Boyolali Tahun 2024 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Boyolali dan RKPD agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
3. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Dinas Sosial dengan membandingkan antara proses dan hasil yang dicapai;
4. Menyediakan satu acuan dokumen resmi bagi Dinas Sosial dalam menentukan prioritas program dan kegiatan dalam satu tahun;
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Sosial.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Boyolali Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Sosial
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

4.1 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Boyolali adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Sosial tersebut. Tercapainya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Boyolali ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Boyolali selama tahun 2022 dan perkiraan target Tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Pencapaian Target Tahun 2024

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2022

Anggaran Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Boyolali sebesar Rp. 13.702.851.000,- (Tiga belas milyar tujuh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah). Laporan ini sampai dengan Tri wulan 4 tahun 2022, dengan capaian kinerja fisik sebesar 96,58 % dan Capaian kinerja keuangan sebesar 97,01 %, sebagaimana terlampir pada Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangakat Daerah Tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Tingkat Realisasi				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan		Tingat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Nilai Sakip OPD																
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100	5.197.416.711	100	5.175.995.587	69,13	5.268.755.000	100,83	5.175.995.587	100,83	98,24	100	5.544.692.000	300,83	15.896.683.174	300,83	305,86
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	25	0	25	0	25	0	4	0	100	0,00	25	0	54	-	216,00	0,00
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0,00	2	0	6	-	300,00	0,00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0,00	1	0	3	-	300,00	0,00
X.XX.01.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0,00	1	0	3	-	300,00	0,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0,00	1	0	3	-	300,00	0,00
X.XX.01.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0,00	1	0	3	-	300,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangakat Daerah Tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Tingkat Realisasi				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan		Tingat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15	0	15	0	15	0	15	0	60	0,00	15	0	45	-	300,00	0,00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4	0	4	0	4	0	4	0	16	0,00	4	0	12	-	300,00	0,00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Penganggaran Gaji, TPP PNS dan Honorarium Non PNS	12	4.273.366.500	12	4.291.099.098	12	4.344.704.000	8,33	4.291.099.098	100	98,77	12	4.547.896.000	32,33	13.130.094.196	269,42	307,25
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan PNS untuk 14 kali dan TPP PNS untuk 12 kali	12	3.337.675.000	12	3.355.943.810	12	3.409.012.000	12	3.355.943.810	78,09	98,44	32	3.517.896.000	56	10.229.783.620	466,67	306,49
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Tenaga Kontrak Non ASN untuk 1 tahun	12	935.691.500	12	935.155.288	12	935.692.000	12	935.155.288	21,89	99,94	12	1.030.000.000	36	2.900.310.576	300,00	309,96
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12	0	12	0	12	0	12	0	0	0,00	12	0	36	-	300,00	0,00
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	0	12	0	12	0	12	0	0	0,00	12	0	36	-	300,00	0,00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	0	18	0	18	0	18	0	0,01	0,00	18	0	54	-	300,00	0,00
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0,00	2	0	6	-	300,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangakat Daerah Tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Tingkat Realisasi				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan		Tingat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	11	0	11	0	11	0	9,7	0	106,67	0,00	15	0	35,7	-	324,55	0,00
X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	4	0	4	0	4	0	4	0	26,67	0,00	4	0	12	-	300,00	0,00
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 dokumen	11	0	11	0	11	0	12	0	80	0,00	11	0	34	-	309,09	0,00
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang disusun	20	0	20	0	20	0	5	0	100	0,00	21	0	46	-	230,00	0,00
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang disusun	20	0	20	0	20	0	20	0	40	0,00	20	0	60	-	300,00	0,00
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dievaluasi dan dinilai kinerjanya	30	0	30	0	30	0	30	0	60	0,00	1	0	61	-	203,33	0,00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa dan Material Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	640.629.000	12	620.854.194	12	637.629.000	8,33	620.854.194	100	97,37	12	724.078.000	32,33	1.965.786.388	269,42	306,85
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan alat listrik dan komponen instalasi listrik	12	5.682.700	12	5.678.400	12	5.682.700	12	5.678.400	1,33	99,92	1	6.000.000	25	17.356.800	208,33	305,43
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan kebersihan dan peralatan rumah tangga	12	9.000.000	12	8.877.600	12	9.000.000	12	8.877.600	2,1	98,64	1	8.500.000	25	26.255.200	208,33	291,72
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Bakar Minyak, Pelumas dan logistik lainnya	12	88.060.000	12	104.887.724	12	105.060.000	12	104.887.724	20,59	99,84	1	151.583.000	25	361.358.448	208,33	410,35
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	48.042.300	12	47.304.200	12	48.042.300	12	47.304.200	6,74	98,46	1	48.630.000	25	143.238.400	208,33	298,15

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangakat Daerah Tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Tingkat Realisasi				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan		Tingat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan alat tulis kantor	12	55.152.000	12	54.102.550	12	55.152.000	12	54.102.550	4,14	98,10	1	51.015.000	25	159.220.100	208,33	288,69
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan minuman pegawai dan makanan minuman rapat-rapat	12	247.640.000	12	237.853.720	12	242.640.000	12	237.853.720	23,93	98,03	12	255.300.000	36	731.007.440	300,00	295,19
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan kebutuhan perjalanan dinas	12	110.000.000	12	85.548.000	12	95.000.000	12	85.548.000	23,15	90,05	12	150.550.000	36	321.646.000	300,00	292,41
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	77.052.000	12	76.602.000	12	77.052.000	12	76.602.000	18,02	99,42	1	52.500.000	25	205.704.000	208,33	266,97
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	72.990.211	12	59.870.171	12	75.991.000	8,33	59.870.171	100	78,79	28	85.190.000	48,33	204.930.342	402,75	280,76
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materai dan perangko	12	3.240.000	12	3.120.500	12	3.240.000	12	3.120.500	4,65	96,31	12	1.680.000	36	7.921.000	300,00	244,48
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon/ Internet, Sumber Daya Air dan Listrik	12	69.200.211	12	56.554.271	12	72.201.000	12	56.554.271	94,36	78,33	12	81.310.000	36	194.418.542	300,00	280,95
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan cek dan kliring	12	550.000	12	195.400	12	550.000	12	195.400	0,99	35,53	12	2.200.000	36	2.590.800	300,00	471,05
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang/peralatan milik daerah yang terpelihara	12	185.431.000	12	179.172.124	12	185.431.000	8,33	179.172.124	100	96,62	158	180.028.000	178,33	538.372.248	1486,08	290,34

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangakat Daerah Tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Tingkat Realisasi				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan		Tingat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan servis kendaraan, penyediaan suku cadang, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	12	100.431.000	12	94.232.124	12	100.431.000	12	94.232.124	54,1	93,83	22	100.078.000	46	288.542.248	383,33	287,30
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa pemeliharaan peralatan , mesin dan pemeliharaan perlengkapan kantor	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	10,85	100,00	135	25.000.000	159	65.000.000	1325,00	325,00
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung dan kantor	12	65.000.000	12	64.940.000	12	65.000.000	12	64.940.000	35,05	99,91	1	50.000.000	25	179.880.000	208,33	276,74
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	100	25.000.000	100	100,00	1	7.500.000	102	57.500.000	10200,00	230,00
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	100	100,00	1	7.500.000	3	57.500.000	300,00	230,00
		Peningkatan keberdayaan PMKS																
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	100	167.000.000	100	167.000.000	100	167.000.000	100	167.000.000	100	100,00	100	167.000.000	300	501.000.000	300,00	300,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dasar	200	167.000.000	175	167.000.000	200	167.000.000	50	167.000.000	100	100,00	200	167.000.000	425	501.000.000	212,50	300,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangakat Daerah Tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Tingkat Realisasi				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan		Tingat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bahan makanan pokok	75	80.250.000	75	80.250.000	75	80.250.000	75	80.250.000	47,47	100,00	75	80.250.000	225	240.750.000	300,00	300,00
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang memperoleh bantuan peralatan sekolah	100	86.750.000	100	86.750.000	200	86.750.000	100	86.750.000	51,39	100,00	200	86.750.000	400	260.250.000	400,00	300,00
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang mendapat bimbingan sosial	25	0	0	0	0	0	25	0	1,14	0,00	0	0	25	-	100,00	0,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	100	450.000.000	100	449.820.000	100	450.000.000	100	449.820.000	100	99,96	100	450.000.000	300	-	300,00	299,92
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dasar	200	450.000.000	200	449.820.000	200	450.000.000	50	449.820.000	100	99,96	200	450.000.000	450	1.349.640.000	225,00	299,92
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah lansia yang memperoleh bantuan permakanan	200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	88,61	100,00	200	400.000.000	600	1.200.000.000	300,00	300,00
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Posyandu Lansia yang mendapatkan Bimbingan keanggotaan dan pemberian Bantuan sosial barang sarana dan prasarana	5	50.000.000	5	49.820.000	5	50.000.000	5	49.820.000	11,39	99,64	5	50.000.000	15	149.640.000	300,00	299,28

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangakat Daerah Tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Tingkat Realisasi				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan		Tingat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS lainnya yang mendapatkan rehabilitasi sosial di Rumah Singgah	100	1.336.000.000	100	1.287.198.000	100	1.336.000.000	100	1.287.198.000	100	96,35	100	1.336.000.000	300	3.910.396.000	300,00	292,69
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Rumah Singgah	150	1.336.000.000	150	1.287.198.000	150	1.336.000.000	66,67	1.287.198.000	100	96,35	150	1.336.000.000	366,67	3.910.396.000	244,45	292,69
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah lokal asrama yang dibangun	2	1.035.000.000	2	1.008.398.000	2	1.035.000.000	2	1.008.398.000	75,14	97,43	2	1.035.000.000	6	3.051.796.000	300,00	294,86
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah paket permakaman di rumah singgah	1	246.000.000	1	223.830.000	1	246.000.000	1	223.830.000	20,73	90,99	1	246.000.000	3	693.660.000	300,00	281,98
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah paket sandang dan perlengkapan sehari-hari bagi penghuni rumah singgah	1	40.000.000	1	39.970.000	1	40.000.000	1	39.970.000	2,96	99,93	1	40.000.000	3	119.940.000	300,00	299,85
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah paket peralatan dan sarana rumah singgah	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1,15	100,00	1	15.000.000	3	45.000.000	300,00	300,00
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga terkait	1	0	1	0	1	0	1	0	0,03	0,00	1	0	3	-	300,00	0,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	100	907.494.000	98,68	745.552.000	100	878.000.000	98,68	745.552.000	98,68	84,91	100	878.000.000	297,36	2.369.104.000	297,36	261,06

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangakat Daerah Tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Tingkat Realisasi				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan		Tingat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapatkan sosial dasar	390	907.494.000	385	745.552.000	390	907.494.000	25,3	745.552.000	98,68	82,16	390	907.494.000	800,3	2.398.598.000	205,21	264,31
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah ODKB yang mendapat bantuan kebutuhan pokok	160	300.000.000	160	300.000.000	160	300.000.000	160	300.000.000	31,72	100,00	160	300.000.000	480	900.000.000	300,00	300,00
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat alat bantu sesuai ketentuan yang berlaku	80	200.000.000	75	188.475.000	80	200.000.000	75	188.475.000	19,78	94,24	80	200.000.000	230	576.950.000	287,50	288,48
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pembinaan, pelatihan dan fasilitasi penyelenggaraan HDI	50	357.494.000	50	207.077.000	50	357.494.000	50	207.077.000	41,93	57,92	50	357.494.000	150	771.648.000	300,00	215,85
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga ODGJ yang mendapatkan pembinaan dan bantuan sosial barang	100	50.000.000	100	50.000.000	50	50.000.000	100	50.000.000	5,24	100,00	50	50.000.000	250	150.000.000	250,00	300,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh diluar panti (SPM)	100	27.500.000	100	27.500.000	100	27.500.000	100	27.500.000	100	100,00	100	27.500.000	300	82.500.000	300,00	300,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangakat Daerah Tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Tingkat Realisasi				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan		Tingat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial dasar	11	27.500.000	11	27.500.000	11	27.500.000	9,09	27.500.000	100	100,00	11	27.500.000	31,09	82.500.000	282,64	300,00
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Gelandangan/ Pengemis yang mendapat pembinaan	11	27.500.000	11	27.500.000	11	27.500.000	11	27.500.000	100	100,00	11	27.500.000	33	82.500.000	300,00	300,00
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan pengelolaan TMPN sesuai standar	100	335.711.000	100	334.323.000	100	335.711.000	100	334.323.000	100	99,59	100	226.450.000	300	895.096.000	300,00	266,63
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara sesuai standar	1	335.711.000	1	334.323.000	1	335.711.000	100	334.323.000	100	99,59	1	226.450.000	102	895.096.000	10200,00	266,63
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemeliharaan	12	335.711.000	12	334.323.000	12	335.711.000	12	334.323.000	100	99,59	1	226.450.000	25	895.096.000	208,33	266,63
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang bersertifikat	16	143.500.000	12,39	142.600.000	1	143.500.000	12,39	142.600.000	77,44	99,37	18	92.200.000	42,78	377.400.000	267,38	263,00
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dunia Usaha yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan	20	0	20	0	0	0	3,75	0	75	0,00	1	0	24,75	-	123,75	0,00
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah dunia usaha yang mendapatkan fasilitasi	20	0	15	0	0	0	15	0	75	0,00	1	0	31	-	155,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangakat Daerah Tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Tingkat Realisasi				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan		Tingat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terverifikasi	673	143.500.000	655	142.600.000	673	143.500.000	655	142.600.000	79,89	99,37	197	92.200.000	1507	377.400.000	223,92	263,00
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang berpotensi	175	7.200.000	142	7.050.000	175	7.200.000	142	7.050.000	8,34	97,92	175	6.800.000	459	20.900.000	262,29	290,28
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang berpotensi	22	4.500.000	22	4.500.000	22	4.500.000	22	4.500.000	3	100,00	22	4.800.000	66	13.800.000	300,00	306,67
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota kelembagaan masyarakat yang berpotensi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial	159	5.800.000	133	5.800.000	159	5.800.000	133	5.800.000	7,52	100,00	24	7.200.000	290	18.800.000	182,39	324,14
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM dan LK3 yang berpotensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	456	126.000.000	358	125.250.000	456	126.000.000	358	125.250.000	61,03	99,40	250	73.400.000	966	323.900.000	211,84	257,06
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial	0,6	80.100.000	0,6	481.900.000	0,6	930.100.000	0,6	481.900.000	100	51,81	1,3	4.053.250.000	2,5	5.017.050.000	416,67	6263,48
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi kelompok miskin	40	80.100.000	2,5	481.900.000	5	4.622.850.000	2,5	481.900.000	100	10,42	267	4.053.250.000	272	5.017.050.000	680,00	6263,48
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok penerima bantuan sosial	40	0	40	401.800.000	40	4.542.750.000	40	401.800.000	11,96	8,84	400	1.453.950.000	480	2.257.550.000	1200,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangakat Daerah Tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Tingkat Realisasi				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan		Tingat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data PMKS dan DTKS	2	80.100.000	2	80.100.000	2	80.100.000	2	80.100.000	88,04	100,00	267	80.100.000	271	240.300.000	13550,00	300,00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima bantuan sosial yang tepat sasaran	100	0	78,61	0	100	26.320.000	78,61	0	78,61	0,00	1,3	4.053.250.000	158,52	4.053.250.000	158,52	0,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data penerima bantuan sosial program kemiskinan	2	0	39,31	0	2	29.920.000	39,31	0	78,61	0,00	267	4.053.250.000	345,62	4.053.250.000	17281,00	0,00
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan KeluargaÂ	Jumlah kecamatan yang memperoleh fasilitasi bantuan sosial sembako	22	0	22	0	22	0	22	0	30,56	0,00	22	0	66	-	300,00	0,00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase warga miskin yang mendapatkan pelayanan pengobatan di puskesmas/poliklinik/Rumah Sakit (Program Kemiskinan)	100	1.529.920.000	100	3.372.410.000	100	0	100	3.372.410.000	100	0,00	1,3	4.053.250.000	201,3	10.798.070.000	201,30	705,79
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan terhadap warga miskin sesuai syarat/kriteria yang membutuhkan pengobatan di puskesmas/rumah sakit	1	1.529.920.000	100	3.372.410.000	1	0	100	3.372.410.000	100	0,00	267	4.053.250.000	467	10.798.070.000	46700,00	705,79
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan KeluargaÂ	Persentase penerima bantuan sosial kesehatan sesuai kriteria	100	1.529.920.000	100	3.372.410.000	100	0	100	3.372.410.000	100	0,00	100	0	300	6.744.820.000	300,00	440,86
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh pelatihan	100	1.243.258.000	100	748.192.500	100	43.258.000	100	748.192.500	100	1729,60	1,3	4.053.250.000	201,3	5.549.635.000	201,30	446,38
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS yang dilatih	100	1.243.258.000	100	748.192.500	100	43.258.000	100	748.192.500	100	1729,60	267	4.053.250.000	467	5.549.635.000	467,00	446,38

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangakat Daerah Tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Tingkat Realisasi				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan		Tingat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah PMKS yang dilatih	100	1.243.258.000	100	748.192.500	100	43.258.000	100	748.192.500	100	1729,60	400	1.453.950.000	600	2.950.335.000	600,00	237,31
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM)	100	370.863.000	100	361.083.000	100	370.863.000	100	361.083.000	100	97,36	100	526.000.000	300	1.248.166.000	300,00	336,56
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang ditangani	100	302.940.000	100	295.550.000	100	302.940.000	100	295.550.000	100	97,56	100	290.000.000	300	881.100.000	300,00	290,85
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah ketersediaan makanan/logistik bagi korban bencana alam/ sosial	1	200.000.000	1	196.000.000	1	200.000.000	1	196.000.000	65,21	98,00	900	200.000.000	902	592.000.000	90200,00	296,00
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah ketersediaan sandang bagi korban bencana alam/ sosial	1	50.000.000	1	49.100.000	1	50.000.000	1	49.100.000	16,45	98,20	100	40.000.000	102	138.200.000	10200,00	276,40
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase kelompok rentan yang ditangani	100	46.000.000	100	45.000.000	100	46.000.000	100	45.000.000	15,15	97,83	150	30.000.000	350	120.000.000	350,00	260,87
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase korban bencana yang mendapat layanan psikososial	100	6.940.000	100	5.450.000	100	6.940.000	100	5.450.000	3,19	78,53	10	15.000.000	210	25.900.000	210,00	373,20
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Taruna Siaga Bencana dan anggota Kampung Siaga Bencanayang diberdayakan dalam kesiapsiagaan Bencana	110	110.000.000	90,91	65.533.000	110	67.923.000	90,91	65.533.000	100	96,48	110	87.596.000	291,82	218.662.000	265,29	198,78
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah anggota Kampung Siaga Bencana yang berpotensi dalam penanganan bencana	60	9.000.000	60	9.000.000	60	9.000.000	60	9.000.000	12,58	100,00	1	19.850.000	121	37.850.000	201,67	420,56

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangakat Daerah Tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Tingkat Realisasi				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan		Tingat Capaian Realisasi Target Renstra	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana yang meningkat pengetahuan dan ketrampilannya dalam penanganan bencana	50	58.923.000	50	56.533.000	50	58.923.000	50	56.533.000	87,42	95,94	50	67.746.000	150	180.812.000	300,00	306,86
			11.788.762.711		**13.293.574.087**		**13.702.851.000**		**13.293.574.087**		**96,58**	**97,01**						

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi wajib bagi pemerintah daerah untuk selalu mengukur setiap capaian pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat.

Pengukuran kinerja capaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indikator SPM yang dikeluarkan oleh Kementerian/LPNK sebagai tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Bahwa pada awal tahun 2018 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai pedoman pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal bagi Pemerintah Daerah yang didalamnya mengamanatkan akan diterbitkan pedoman teknis penerapan SPM dan perintah terhadap kementerian terkait untuk menyusun standar baku dalam pelaksanaan SPM di daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas 6 urusan dasar yaitu : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta Sosial. Maka laporan ini juga menyajikan perkembangan penerapan dan pencapaian SPM yang mencakup 6 urusan wajib tersebut dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi.

Jenis pelayanan dasar urusan Urusan Sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Boyolali berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan tersebut meliputi:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti dengan indikator prosentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dengan indikator prosentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dengan indikator prosentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.

4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan indikator prosentase Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota dengan indikator prosentase warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Boyolali

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar anak terlantar di Luar Panti	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar lanjut usia terlantar di Luar Panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar gelandangan dan pengemis di Luar Panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Tugas pokok fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

a. Tugas Pokok Dinas Sosial Kabupaten Boyolali.

   Dinas Sosial Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan masalah sosial.

b. Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Boyolali

   Dinas Sosial Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi:

   1. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
   2. pelaksanaan kebijakan bidang sosial
   3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial
   4. pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial.
   5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi Dinas Sosial

   Dinas Sasial Kabupaten Boyolali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 47), Dinas Sosial mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

   1. Kepala.
   2. Sekretariat, yaitu Subbagian Tata Usaha
   3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari:
   4. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari:
   5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari:
   6. Kelompok Jabatan Fungsional

2.3. Isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksestabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian
kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah (PD) diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi PD di masa lima tahun mendatang.

Dinas Sosial Kabupaten Boyolali merupakan fungsi penunjang, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sosial. Identifikasi isu-isu strategis/ permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Boyolali adalah berikut :

1. Belum optimalnya alokasi anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tersedia untuk menangani kompleksitas permasalahan populasi Penyandang Masalah kesejahteraan social (PMKS) dan juga ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa)
2. Belum optimalnya Rehabilitasi Sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial, gelandangan dan pengemis sebagaimana diatur dalam Permensos No 9 tahun 2018
3. Kurang updatenya Data PMKS;
4. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia aparatur secara kualitas dan kuantitas yang mempunyai kompetensi di setiap bidang.
5. Belum optimalnya peningkatan kapasitas bagi PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam penanganan PMKS.

2.4. Review terhadap Rancangan Awai RKPD

RKPD merupakan penjabaran RPJMD yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan bagi SKPD, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam melaksanakan dan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan daerah guna mendukung capaian target pembangunan daerah. Disamping itu RKPD dimaksudkan sebagai acuan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rancangan awal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Sosial Kabupaten Boyolali Tahun 2023, adalah untuk meningkatkan penanganan terhadap PMKS dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dilakukan dengan sistem bottom up yang dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat desa sampai pada tingkat forum gabungan OPD. Mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia, maka tidak semua usulan hasil musrenbang dapat terealisasi.

Dari hasil evaluasi terhadap capaian target dalam RKPD Tahun 2022 maupun terhadap capaian kinerja dalam RPJMD, beserta kerangka pendanaan bidang sosial sebagaimana dirumuskan dalam prioritas pembangunan daerah yang terdapat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali 2021-2026 dan juga prioritas pembangunan daerah tahunan sebagai pedoman dan arahan bagi OPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dan akan dikaitkan dengan tujuan serta sasaran yang terdapat dalam RPJPD, indikator kinerja kunci yang mengacu pada indikator RPJMD. Secara umum terhadap usulan program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Sosial Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan prioritas pembangunan (rancangan awal RKPD) beserta target yang akan dicapai pada Tahun 2024, sebagaimana terlihat dari Tabel Tabel T-C.31.Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Boyolali berikut :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Sosial Kabupaten Boyolali

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis) yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)**	**100**	**1.568.556.000**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Persentase PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis) yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)**	**100**	**1.568.556.000**	
a	*Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*		*Jumlah PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis) di Luar Panti Sosial yang mendapatkan sosial dasar (SPM)*	*100*	*1.568.556.000*	*Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*		*Jumlah PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis) di Luar Panti Sosial yang mendapatkan sosial dasar (SPM)*	*100*	*1.568.556.000*	
1	Penyediaan Permakanan	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	435	680.250.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	435	680.250.000	
2	Penyediaan Sandang	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100	86.750.000	Penyediaan Sandang	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100	86.750.000	
3	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	80	245.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	80	245.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Boyolali	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	186	406.556.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Boyolali	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	186	406.556.000	
5	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Boyolali	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	150.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Boyolali	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	150.000.000	
B	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Persentase PMKS lainnya yang mendapatkan rehabilitasi sosial di Rumah Singgah**	**100**	**1.662.214.000**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Persentase PMKS lainnya yang mendapatkan rehabilitasi sosial di Rumah Singgah**	**100**	**1.662.214.000**	
b	*Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial*		*Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Rumah Singgah*	*240*	*1.662.214.000*	*Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial*		*Jumlah PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Rumah Singgah*	*240*	*1.662.214.000*	
1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	240	1.316.214.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	240	1.316.214.000	
2	Penyediaan Permakanan	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	240	216.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	240	216.000.000	
3	Penyediaan Sandang	Kab. Boyolali	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100	40.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Boyolali	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100	40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	90.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	90.000.000	
5	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	
C	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		**Prosentase PSKS yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas**	**20**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		**Prosentase PSKS yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas**	**20**		
a	*Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota*		*Jumlah Dunia Usaha yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan*	*1 dokumen*	-	*Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota*		*Jumlah Dunia Usaha yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan*	*1 dokumen*	-	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	-	
b	*Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota*		*Jumlah PSKS yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas*	*197*	-	*Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota*		*Jumlah PSKS yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas*	*197*	-	
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	175	-	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	175	-	
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	22	-	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	22	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Lembaga	-	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Lembaga	-	
4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Boyolali	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Sertifikat	-	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Boyolali	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Sertifikat	-	
D	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Persentase fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial**	**1,9**	**840.000.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Persentase fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial**	**1,9**	**840.000.000**	
a	*Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*		*Jumlah Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi kelompok miskin*	*267*	*840.000.000*	*Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*		*Jumlah Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi kelompok miskin*	*267*	*840.000.000*	
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	267	-	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	267	-	
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Boyolali	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2063	-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Boyolali	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2063	-	
3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Boyolali	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	400	840.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Boyolali	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	400	840.000.000	
E	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**Cakupan pengelolaan TMPN sesuai standar**	**100**	**431.561.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**Cakupan pengelolaan TMPN sesuai standar**	**100**	**431.561.000**	
a	*Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*		*Jumlah TMP yang dipelihara sesuai standar*	*1 makam*	*431.561.000*	*Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*		*Jumlah TMP yang dipelihara sesuai standar*	*1 makam*	*431.561.000*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	431.561.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	431.561.000	
F	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat**	**100**	**416.000.000**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat**	**100**	**416.000.000**	
a	*Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota*		*Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat*	*1*	*306.000.000*	*Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota*		*Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat*	*1*	*306.000.000*	
1	Penyediaan Makanan	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	900	200.000.000	Penyediaan Makanan	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	900	200.000.000	
2	Penyediaan Sandang	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150	50.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150	50.000.000	
3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	150	46.000.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	150	46.000.000	
4	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Boyolali	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Boyolali	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10.000.000	
b	*Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesipasiagaan bencana*		*Jumlah anggota KSB dan Tagana yang diberdayakan*	*110*	*110.000.000*	*Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat*		*Jumlah anggota KSB dan Tagana yang diberdayakan*	*110*	*110.000.000*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						terhadap kesipasiagaan bencana					
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Boyolali	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kampung	-	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Boyolali	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kampung	-	
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50	110.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50	110.000.000	
G	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	**100**	**4.831.869.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	**100**	**4.831.869.000**	
a	*Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat*	*25*	-	*Perencanaan,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat*	*25*	-	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	-	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA- SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA- SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	-	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan	1	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	-	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	-	
b	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Jumlah Kebutuhan Penganggaran Gaji, TPP PNS dan Honorarium Non PNS*	*12 Bulan*	*4.335.901.000*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Jumlah Kebutuhan Penganggaran Gaji, TPP PNS dan Honorarium Non PNS*	*12 Bulan*	*4.335.901.000*	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	3.480.901.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Boyolali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	3.480.901.000	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	855.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	855.000.000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	-	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	-	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	-	
c	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun*	*15 laporan*	-	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun*	*15 laporan*	-	
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	-	
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 laporan	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 laporan	-	
d	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang disusun*	*21 dokumen*	-	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang disusun*	*21 dokumen*	-	
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 dokumen	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 dokumen	-	
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokemen	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Boyolali	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokemen	-	
e	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa dan Material Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*12*	*263.094.000*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa dan Material Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*12*	*263.094.000*	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.000.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	-	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.000.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	30.000.000	
6	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	25.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Boyolali	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	25.000.000	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	62.094.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	62.094.000	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	100.000.000	
f	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*28*	*77.637.000*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*28*	*77.637.000*	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.990.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.990.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	74.847.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	74.847.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	800.000	
g	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah Jenis Barang/peralatan milik daerah yang terpelihara*	*158 unit*	*155.237.000*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah Jenis Barang/peralatan milik daerah yang terpelihara*	*158 unit*	*155.237.000*	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Boyolali	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	85.237.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Boyolali	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	85.237.000	
2	Pemeliharaan Mebel	Kab. Boyolali	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	-	Pemeliharaan Mebel	Kab. Boyolali	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	-	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Boyolali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Boyolali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135	20.000.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Boyolali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Boyolali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	JUMLAH				**9.750.200.000**					**9.750.200.000**	

2.5. Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat

RKPD merupakan penjabaran RPJMD yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan bagi SKPD, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam melaksanakan dan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan daerah guna mendukung capaian target pembangunan daerah. Disamping itu RKPD dimaksudkan sebagai acuan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Sosial Kabupaten Boyolali Tahun 2024, adalah untuk meningkatkan penanganan terhadap PMKS dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dilakukan dengan sistem bottom up yang dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat desa sampai pada tingkat forum gabungan OPD. Mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia, maka tidak semua usulan hasil musrenbang dapat terealisasi. Adapun program kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
A	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
1	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Boyolali	Orang Dengan Kedisabilitasan Berat (ODKB) yang mendapat bantuan kebutuhan pokok	160 orang	
		Kabupaten Boyolali	Anak terlantar yang mendapatkan bahan makanan pokok	75 orang	
		Kabupaten Boyolali	Lansia terlantar yang memperoleh bantuan permakanan	200 orang	
2	Penyediaan Sandang	Kabupaten Boyolali	Anak terlantar yang memperoleh bantuan peralatan sekolah	100 anak	
3	Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Boyolali	Penyandang disabilitas yang mendapat alat bantu sesuai ketentuan yang berlaku	80 orang	
4	Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spiritual dan Sosial	Kabupaten Boyolali	Posyandu Lansia yang mendapatkan Bimbingan keanggotaan dan pemberian Bantuan	5 posyandu	
		Kabupaten Boyolali	Gelandangan/ Pengemis yang mendapat pembinaan	11 orang	
5	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Boyolali	Keluarga ODGJ yang mendapatkan pembinaan dan bantuan sosial barang	100 keluarga	
B	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Mayarakat	Kabupaten Boyolali	Kelompok KUBE penerima bantuan sosial	40 KUBE	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BOYOLALI

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan tahunan yang terdapat dalam RPJMD memandu sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Arah kebijakan tahunan akan menjadi tema dan prioritas pembangunan dalam dokumen RKPD. Perumusan arah kebijakan tahunan berbasis pada telaah urgensi isu/permasalahan pembangunan yang perlu direspon secara sistematis dan bertahap, serta dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD di akhir periode pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Yang dimaksud tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Misi kedua **"Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya"** menekankan meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing dan Meningkatnya keberdayaan sosial.

Merujuk pada unsur visi dan misi RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021 tersebut diatas, Dinas Sosial Kabupaten Boyolali harus mampu menjabarkan dan melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya secara keseluruhan. Untuk itu aparat Dinas Sosial dengan disiplin untuk menegaskan visinya dan bekerja keras agar visi tersebut terealisasi.

Dengan berpedoman terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Boyolali Tahun 2024, seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021 - 2026, sebagai berikut:

Tujuan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah Meningkatnya keberdayaan sosial.

Sasaran Renja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah Meningkatnya kesejahteraan PMKS.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan dibidang sosial dan membantu Bupati Boyolali dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial. Adapun usulan pogram, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Sosial Kabupaten Boyolali

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN Kab (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
					Dinas Sosial				11.756.862.000			11.756.862.000			11.756.862.000
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.756.862.000			11.756.862.000			11.756.862.000
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				11.756.862.000			11.756.862.000			11.756.862.000
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.125.830.000			5.125.830.000			5.125.830.000
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0			0			0
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Boyolali	2 Dokumen	0			0		2 Dokumen	0
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Boyolali	1 Dokumen	0			0		1 Dokumen	0
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Boyolali	1 Dokumen	0			0		1 Dokumen	0
1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Boyolali	1 Dokumen	0			0		1 Dokumen	0
1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Boyolali	1 Dokumen	0			0		1 Dokumen	0
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Boyolali	15 Laporan	0			0		15 Laporan	0
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Boyolali	4 Laporan	0			0		4 Laporan	0
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.277.648.000			4.277.648.000			4.277.648.000
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Boyolali	32 Orang/bulan	3.229.322.000			3.229.322.000		32 Orang/bulan	3.229.322.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN Kab (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Boyolali	12 Dokumen	1.048.326.000			1.048.326.000		12 Dokumen	1.048.326.000
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Boyolali	12 Dokumen	0			0		12 Dokumen	0
1	06	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Boyolali	12 Dokumen	0			0		12 Dokumen	0
1	06	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Boyolali	2 Dokumen	0			0		2 Dokumen	0
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Boyolali	18 Laporan	0			0		18 Laporan	0
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0			0			0
1	06	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Boyolali	4 Laporan	0			0		4 Laporan	0
1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Boyolali	11 Laporan	0			0		11 Laporan	0
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0			0			0
1	06	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Boyolali	20 Dokumen	0			0		20 Dokumen	0
1	06	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Boyolali	1 Dokumen	0			0		1 Dokumen	0
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				586.249.000			586.249.000			586.249.000
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali	1 Paket	6.000.000			6.000.000		1 Paket	6.000.000
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Boyolali	1 Paket	8.736.000			8.736.000		1 Paket	8.736.000
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali	1 Paket	137.513.000			137.513.000		1 Paket	137.513.000
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Boyolali	1 Paket	39.000.000			39.000.000		1 Paket	39.000.000
1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Boyolali	1 Paket	45.000.000			45.000.000		1 Paket	45.000.000
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Boyolali	12 Laporan	250.000.000			250.000.000		12 Laporan	250.000.000
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Boyolali	12 Laporan	100.000.000			100.000.000		12 Laporan	100.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN Kab (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				77.637.000			77.637.000			77.637.000
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Boyolali	12 Laporan	1.990.000			1.990.000		12 Laporan	1.990.000
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Boyolali	12 Laporan	74.847.000			74.847.000		12 Laporan	74.847.000
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali	12 Laporan	800.000			800.000		12 Laporan	800.000
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				184.296.000			184.296.000			184.296.000
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Boyolali	22 Unit	99.296.000			99.296.000		22 Unit	99.296.000
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Boyolali	135 Unit	35.000.000			35.000.000		135 Unit	35.000.000
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Boyolali	1 Unit	50.000.000			50.000.000		1 Unit	50.000.000
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				42.200.000			42.200.000			42.200.000
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0			0			0
1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Boyolali	1 Dokumen	0			0		1 Dokumen	0
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				42.200.000			42.200.000			42.200.000
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	175 Orang	6.800.000			6.800.000		175 Orang	6.800.000
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	22 Orang	4.800.000			4.800.000		22 Orang	4.800.000
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	24 Lembaga	7.200.000			7.200.000		24 Lembaga	7.200.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN Kab (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	348 Sertifikat	23.400.000			23.400.000		348 Sertifikat	23.400.000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				2.203.536.000			2.203.536.000			2.203.536.000
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				1.353.556.000			1.353.556.000			1.353.556.000
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	435 Orang	730.250.000			730.250.000		435 Orang	730.250.000
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	100 Orang	86.750.000			86.750.000		100 Orang	86.750.000
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	80 Orang	100.000.000			100.000.000		80 Orang	100.000.000
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	211 Orang	406.556.000			406.556.000		211 Orang	406.556.000
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	100 Orang	30.000.000			30.000.000		100 Orang	30.000.000
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				849.980.000			849.980.000			849.980.000
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	240 Orang	600.000.000			600.000.000		240 Orang	600.000.000
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	240 Orang	199.980.000			199.980.000		240 Orang	199.980.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN Kab (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	100 Orang	40.000.000			40.000.000		100 Orang	40.000.000
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	50 Orang	10.000.000			10.000.000		50 Orang	10.000.000
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	1 Dokumen	0			0		1 Dokumen	0
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				3.765.250.000			3.765.250.000			3.765.250.000
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				3.765.250.000			3.765.250.000			3.765.250.000
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Boyolali	526180 Orang	80.100.000			80.100.000		526180 Orang	80.100.000
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	10000 Keluarga	2.519.200.000			2.519.200.000		10000 Keluarga	2.519.200.000
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	500 Orang	1.165.950.000			1.165.950.000		500 Orang	1.165.950.000
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				393.596.000			393.596.000			393.596.000
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				306.000.000			306.000.000			306.000.000
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	900 Orang	200.000.000			200.000.000		900 Orang	200.000.000
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	150 Orang	50.000.000			50.000.000		150 Orang	50.000.000
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	150 Orang	46.000.000			46.000.000		150 Orang	46.000.000
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	10 Orang	10.000.000			10.000.000		10 Orang	10.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN Kab (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				87.596.000			87.596.000			87.596.000
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	1 Kampung	19.850.000			19.850.000		1 Kampung	19.850.000
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	50 Orang	67.746.000			67.746.000		50 Orang	67.746.000
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				226.450.000			226.450.000			226.450.000
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				226.450.000			226.450.000			226.450.000
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali	1 Makam	226.450.000			226.450.000		1 Makam	226.450.000
								TOTAL	**11.756.862.000**			**11.756.862.000**			**11.756.862.000**

BAB V
PENUTUP

Renja ini disusun sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Boyolali dalam Tahun 2024, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Mengingat Renja memuat program dan kegiatan pembangunan, maka pelaksanaan program/kegiatan hendaknya dapat dilakukan secara akurat, terpadu, fokus dan terarah serta tepat sasaran serta menjadi modal dalam periode pembangunan pada periode berikutnya dengan tetap memperhatikan peluang dan tantangan yang ada.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Boyolali, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam rangka merencanakan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku *(stakeholders)* dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya mengalir kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Boyolali adalah Program Tahunan Dinas sosial Kabupaten Boyolali yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Sosial Kabupaten Boyolali.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Boyolali juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Sosial sebagai dasar usulan prakiraan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Rencana Kerja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan OPD dan seluruh staf Dinas Sosial Kabupaten Boyolali sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

I. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, bimbingan dan petunjukNya, maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali disusun sebagai penjabaran Rencana dan Strategi (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali Tahun 2022 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja DP2KBP3A Kabupaten Boyolali adalah mengacu pada pelaksanaan Program dan Kegiatan – kegiatan yang ada pada Tahun 2024 dan atau tahun tahun sebelumnya. Rencana Kerja Tahun 2024 dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dengan memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dengan adanya Rencana Kerja Tahun 2024 ini semoga bermanfaat yang signifikan bagi perkembangan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud, Tujuan dan Fungsi 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 8

2.3 Isu – isu penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi DP2KBP3A Kabupaten Boyolali 12

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 13

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 28

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional 28

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 28

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2020 29

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 31

4.1 Program dan Kegiatan 29

BAB V PENUTUP 50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada Pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan Makro yaitu semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya antara lain menjamin terciptanya integrasi, Sinkronisasi dan sinergitas baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah.

Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional dibangun secara makro oleh Pemerintah Pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menusun perencanaan dalam skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di Tingkat Pusat maupun Daerah memiliki beberapa jenjang antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap berpedoman perencanaan diatasnya.

Keterlibatan Stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM, dan RKPD. Organisasi Perangkat Derah (OPD) stakeholder di Daerah perlu menjamin bagi terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) lima tahunan OPD dan kemudian diterjemahkan lebih spesifik dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahunan OPD. Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada Pasal 7 menyatakan bahwa setiap OPD wajib membuat Rencana Kerja (RENJA) OPD yang disusun dengan berpedoman pada Renstra OPD dan RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali merupakan penjabaran atas Visi dan Misi program yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2022 – 2026. Akan tetapi dalam perjalanan waktu terdapat perubahan – perubahan peraturan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan – perubahan terhadap program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Visi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali 2022 – 2026 adalah ***"*Boyolali Maju, Menwruskan Pro Investasi*"* Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)*.*** Visi adalah merupakan suatu rumusan keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dengan mendasarkan pada situasi dan kondisi saat ini sehinggan visi dapat memainkan peran yang menetukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi pemerintah dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik dan fokus.

Untuk mewujudkan visi diatas maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali mengemban misi sebagai berikut, yaitu :

1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan;
2. Boyolali, Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter Dan Berbudaya;
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional;
4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih Efektif dan Terpercaya;
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali Tahun 2023 adalah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dan Renstra 2021-2026. Hal ini dimaksudkan agar terdapat sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah memuat evaluasi pelaksanaan program kegiatan, analisis kinerja pelayanan, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan tahun sebelumnya beserta penganggaranya.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penentuan Program dan kegiatan maupun operasional kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali adalah berpedoman pada peraturan – peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 297).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tantang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-03708 Tahun 2020 tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 06 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor.4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke-dua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 253);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2022-2026.

Dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional maupun dalam penyiapan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sangat memperhatikan dan berpedoman pada Ketentuan – ketentuan yang berlaku yang telah dietapkan seperti Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Insruksi Presiden, Keputusan Menpan, Kepeutusan Kepala BKKBN, dll

1.3 Maksud, Tujuan dan Fungsi

Maksud dilaksanakannya Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah untuk memberikan arah kebijakan teknis dan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan tahun 2024 bagi masing – masing bidang dan sekretariat dalam rangka mengemban Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali Tahun 2022 – 2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dan kegiatan tahunan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, mempertajam prioritas program kegiatan demi terciptanya kesinambungan program dan kegiatan dari tahun ke tahun.

Sedangkan fungsi dari disusunnya Renja Kerja (RENJA) bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali adalah sebagai pedoman bagi :

1. Sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali untuk menyusun rencana Kerja (RENJA) dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan tahunan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali Tahun 2024.
3. Sebagai Acuan Sekretariat dan bidang-bidang dalam memadukan dan mensinergikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud, Tujuan dan Fungsi

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) kabupaten Boyolali

2.3 Isu – isu penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi DP2KBP3A kabupaten Boyolali

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra.

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(\text{Target}-(\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
b. 76% sampai 100% = Baik (B)
c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2022 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1		2	3	4	5
1	Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate(TFR)*	%	2.10	1.80	100
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	46.43	66.34	100
3	Angka kekerasan terhadap perempuan		14.00	4.51	100
4	Status Kabupaten Layak Anak		Madya	Madya	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

A. Indikator Kinerja 1: Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate(TFR)*

Analisis penyebab keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena :

1) Meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang (IUD dan Implant) dan kontrasepsi mantap (MOP dan MOW).
2) Edukasi keluarga berkualitas dengan tagline ”Dua Anak Lebih Sehat”.
3) Penguatan peran Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan sub PPKBD) sebagai motor penggerak program Bangga Kencana di tingkat Desa dan RW.

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah

1) Tidak semua PUS dan Peserta KB nyaman dengan penggunaan alat dan obat kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan kontrasepsi mantap (MOP dan MOW).
2) Membutuhkan waktu lama dan biaya yang besar membangun kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas.
3) Sebagian besar PPKBD dan sub PPKBD usianya sudah lanjut dan sulit untuk mendapatkan regenerasi.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala :

1) Bekerjasama dengan seluruh stakeholder kesehatan dan mitra untuk kemudahan penyediaan dan layanan pemakaian alat kontrasepsi MKJP sesuai kondisi akseptor.
2) Edukasi keluarga sehat dan sejahtera secara terus menerus dan berkesinambungan melalui berbagai media KIE yang ada.
3) Penguatan kapasitas SDM Institusi Masyarakat Pedesaan dan lini lapangan melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa Balai Penyuluhan KB dimasing – masing Kecamatan telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah

B. Indikator Kinerja 2 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Analisis penyebab keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena

1) Kebijakan Pemerintah dan swasta dalam memberi peluang angakatan kerja Perempuan.
2) Tingkat pendidikan perempuan makin meningkat.
3) Meningkatnya partisipasi dunia usaha di Boyolali.

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah

1) Rendahnya tingkat pendidikan Kurangnya keterampilan yang dimiliki pelamar kerja.
2) Kemajuan teknologi membuat kebutuhan tenaga kerja manusia semakin berkurang.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah

1) Meningkatkan motivasi perempuan untuk meningkatkan pendidikan formal (sebutkan upaya mengatasi permasalahan atau hambatan)
2) Mengembangkan kapasitas /potensi diri untuk meningkatkan produktifitas ekonomi perempuan
3) Kebijakan Pemerintah dan Swasta yang responsif gender

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, melalui kemitraan dengan Gabungan Organisasi Perempuan (GOW) dapat bekerjasama dan kolaborasi program sehingga tanpa alokasi anggaran dapat melaksanakan program pembinaan organisasi wanita.

C. Indikator Kinerja 3 : Angka kekerasan terhadap perempuan

Analisis yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena

1) Dukungan Pemerintah Daerah dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021.
2) Koordinasi yang baik dengan Dispermasdes sampai Kecamatan dan Pemerintah Desa melalui Dana Desa pada kegiatan DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan peduli Anak.
3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan pada perempuan dan anak

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah

1) Perubahan situasi sosial ekonomi yang mendorong perempuan bekerja di sektor non domestic.
2) Kurangnya kesadaran untuk mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan
3) Rendahnya tingkat pendidikan perempuan yang mempengaruhi pengambilan keputusan.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah

1) Meningkatkan motivasi perempuan untuk meningkatkan pendidikan formal.
2) Mengembangkan kapasitas /potensi diri untuk meningkatkan produktifitas ekonomi perempuan

D. Indikator Kinerja 4 : Status Kabupaten Layak Anak

Analisis yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena

1) Tersedianya regulasi/kebijakan melalui Peraturan daerah Nomor 11 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
2) Berfungsinya Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dengan baik sehingga kerjasama lintas OPD dan sektor berjalan dengan maksimal.
3) Dukungan anggaran untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang tersedia.

4) Terbentuknya Pembentukan Forum Anak tingkat Kecamatan dan tingkat Desa.
5) Keikutsertaan Forum Anak dalam perencanaan pembangunan di Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten sehingga RKPD responsif anak.
6) Kerjasama dengan LSM yang bergerak pada bidang perlindungan anak dan perempuan berjalan dengan maksimal.
7) Teradvokasinya dengan baik terkait Kabupaten Layak Anak yang bekerjasama dengan media.

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah

1) Belum semua masyarakat paham atas pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
2) Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak.
3) Peran dunia usaha (CSR) dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak belum optimal.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah.

1) Meningkatkan peran fungsi keluarga dalam pengasuhan positif.
2) Membangun kemitraan dengan berbagai dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak .
3) Kebijakan Pemerintah dan Swasta yang responsif anak.

Realisasi Anggaran Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	***91.190.000***	***91.189.200***	***100***
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	91.190.000	91.189.200	100
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	***6.423.440.160***	***6.104.966.701***	***95,04***
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.882.890.960	2.700651.301	93,68
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.306.650.000	1.308.350.000	99,88
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	1.542.899.200	1.420.173.800	92,05
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	691.000.000	677.791.600	98,09
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	***4.761.563.000***	***3.272.998.384***	***68,74***
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.761.563.000	3.272.998.384	68,74
Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	264.553.335	249.712.600	94,39
PROGRAM PERLINDUNGA PEREMPUAN	***180.692.000***	***167.441.100***	***92,67***
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	155.692.000	153.225.500	98,42
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	14.215.600	56,86
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	***65.776.000***	***65.501.500***	***99,58***
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	26.201.000	26.201.000	100
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	39.575.000	39.300.500	99,31
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	***18.085.335***	***16.770.000***	***92,73***
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	10.153.445	10.070.000	99,18
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.028.445	5.000.000	92,94
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.903.445	1.700.000	89,31
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**4.313.953.505**	**4.201.355.147**	**97,39**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.624.883.000	3.567.698.593	98,42
Administrasi Umum Perangkat Daerah	383.115.505	373.134.666	97,39
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.725.000	93.986.797	69,76
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.230.000	166.535.091	97,26
JUMALAH	**15.854.700.000**	**13.920.222.032**	**87,80**

1.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

a. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberdayakan sumber daya manusia yang meliputi :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas

   Dibawah Sekretaris, terdiri dari :

   - Kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan
   - Kepala sub bagian umum dan kepegawaian
   - Kepala sub bagian keuangan
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
4. Kepala Bidang Keluarga Berencana
5. Kepala Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

b. Permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1) Permasalahan Tugas dan Fungsi

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan lintas sektoral sehingga sasaran program kerja yang telah dibuat kurang maksimal;
b. Kurangnya sumber daya manusia yang cukup sehingga tidak semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan maksimal;
c. Kurangnya dukungan anggaran pada beberapa kegiatan;
d. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengendalian penduduk serta perlindungan perempuan dan anak, sehingga masih diperlukan upaya yang optimal informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengendalian penduduk dan perlindungan perempuan dan anak.

2) Hambatan pelaksanaan dan fungsi

a. Koordinasi yang belum menyeluruh sehingga fungsi menghambat dalam proses pelayanan publik,
b. Pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsi belum maksimal,
c. Inovasi dan kretifitas dalam menjalankan tugas dan fungsi aparatur masih kurang,
d. Kurangnya pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

3) Dampak terhadap pencapain Visi dan Misi Pemerintah Daerah

a. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerah melalui pembangunan berkelanjutan akan membutuhkan waktu yang lama,

b. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat lamban dan berakibat kepercayaan pada pemerintah akan menurun,

4) Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

a. Tantangan

- Kurangnya jumalah Penyuluh Keluarga berencana/PKB (rasio PKB dibandingkan jumlah desa/kelurahan) serta kualitasnya (pengetahuan dan ketrampilan)
- Belum optimalnya fungsi organisasi DP2KBP3A

b. Peluang

- Struktur oragniasi yang jelas (Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No 117 Tahun 2021) tentang Kependudukan, Susuanan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendaliana Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali.
- Adanya komitmen pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
- Adanya team work yang kuat dalam pelaksanaan tugas
- Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi

c. Isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

- Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berbasis keluarga;
- Satu data kependudukan;
- Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi;
- Rendahnya pemahaman keluarga tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga;
- Kebutuhan berKB pasangan usia subur yang belum terlayani (unmet need);
- Prevalensi stunting masih tinggi;
- Rendahnya keluarga yang mengetahui 8 fungsi keluarga;
- Pernikahan usia anak;
- Masih adanya kesenjangan gender di sektor politik dan ekonomi;
- Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan;
- Hak anak belum terpenuhi secara maksimal;
- Masih adanya kasus kekerasan dan praktik buruk yang mengancam hak-hak anak;

1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Boyolali RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

RPJMD kabupaten Boyolali dalam penyusunannya dilakukan secara komprehensip, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipasif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan.

Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan kebutuhan untuk mencapai kinerja yang telah disusun. Sehingga diharapkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar mendukung kinerja DP2KBP3A.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	KAB BOYOLALI	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani	100,00		**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	KAB BOYOLALI	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani	100,00		
2	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	KAB BOYOLALI	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	3 keg	Rp -	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	KAB BOYOLALI	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	3 keg	Rp -	
3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	KAB BOYOLALI	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (per 100 rb)	0,000035		**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	KAB BOYOLALI	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (per 100 rb)	0,000035		
4	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jml org yg dilayani rujukan lanjutan bagi korban kekerasan Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	14 org	Rp -	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jml org yg dilayani rujukan lanjutan bagi korban kekerasan Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	14 org	Rp -	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jml SDM lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah yang difasilitasi	25 orang	Rp -	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jml SDM lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah yang difasilitasi	25 orang	Rp -	
6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	KAB BOYOLALI	Persentase fasilitas publik layak anak	16,67	Rp 26.201.000	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	KAB BOYOLALI	Persentase fasilitas publik layak anak	16,67	Rp 26.201.000	
7	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jml Advokasi Kebijakan dan KIE terkait PHA di Kabupaten	3 keg	Rp 26.201.000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jml Advokasi Kebijakan dan KIE terkait PHA di Kabupaten	3 keg	Rp 26.201.000	
8	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	KAB BOYOLALI	Persentase desa layak anak	68,18	Rp 26.201.000	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	KAB BOYOLALI	Persentase desa layak anak	68,18	Rp 26.201.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jml Lembaga Layanan Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang ter advokasi Jumlah kelompok forum anak yang terfasilitasi Program PHA	5 klp	Rp 26.201.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jml Lembaga Layanan Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang ter advokasi Jumlah kelompok forum anak yang terfasilitasi Program PHA	5 klp	Rp 26.201.000	
10	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	KAB BOYOLALI	Persentase anak korban kekerasan yang diselesaikan	100	Rp 6.028.000	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	KAB BOYOLALI	Persentase anak korban kekerasan yang diselesaikan	100	Rp 6.028.000	
11	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Frekuensi Koordinasi dengan Lembaga Layanan Perlindungan Khusus	2 keg	Rp 6.028.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Frekuensi Koordinasi dengan Lembaga Layanan Perlindungan Khusus	2 keg	Rp 6.028.000	
12	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	KAB BOYOLALI	Rasio korban kekerasan terhadap anak (per 100 rb)	0,000104	Rp 12.056.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	KAB BOYOLALI	Rasio korban kekerasan terhadap anak (per 100 rb)	0,000104	Rp 12.056.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Frekuensi Koordinasi dengan Lembaga Layanan Perlindungan Khusus	3 keg	Rp 6.028.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Frekuensi Koordinasi dengan Lembaga Layanan Perlindungan Khusus	3 keg	Rp 6.028.000	
14	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jml SDM lembaga layanan yang terlatih dalam perlindungan khusus	30 org	Rp 6.028.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jml SDM lembaga layanan yang terlatih dalam perlindungan khusus	30 org	Rp 6.028.000	
15	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	KAB BOYOLALI	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja APBD	2,50		**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	KAB BOYOLALI	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja APBD	2,50		
16	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	KAB BOYOLALI	Persentase OPD yang melaksanakan program PUG	53 opd		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	KAB BOYOLALI	Persentase OPD yang melaksanakan program PUG	53 opd		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
17	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	KAB BOYOLALI	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	10,00		**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	KAB BOYOLALI	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	10,00		
18		KAB BOYOLALI	Persentase pejabat publik perempuan	6,39			KAB BOYOLALI	Persentase pejabat publik perempuan	6,39		
19	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jumlah Sosialisasi dalam peningkatan partisipasi perempuan di bidang swasta	9 keg		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jumlah Sosialisasi dalam peningkatan partisipasi perempuan di bidang swasta	9 keg		
20	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jumlah Sosialisasi dalam peningkatan partisipasi perempuan di Sektor Publik, Politik, Hukum	10 keg		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jumlah Sosialisasi dalam peningkatan partisipasi perempuan di Sektor Publik, Politik, Hukum	10 keg		
21	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	KAB BOYOLALI	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif	18,18		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	KAB BOYOLALI	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif	18,18		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	KAB BOYOLALI	Cakupan Kecamatan yang memiliki PPKS yang aktif	2 (klp)		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	KAB BOYOLALI	Cakupan Kecamatan yang memiliki PPKS yang aktif	2 (klp)		
23		KAB BOYOLALI	Cakupan desa yang memiliki kelompok Tribina Aktif (BKB, BKR, dan BKL) dan UPPKS (Indikator AMJ)	2 (klp)			KAB BOYOLALI	Cakupan desa yang memiliki kelompok Tribina Aktif (BKB, BKR, dan BKL) dan UPPKS (Indikator AMJ)	2 (klp)		
24	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	KAB BOYOLALI	Persentase peserta KB aktif	71,26	Rp 1.490.957.000	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	KAB BOYOLALI	Persentase peserta KB aktif	71,26	Rp 1.490.957.000	
25	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jumlah Faskes (Fasilitas kesehatan) yang melayani KB modern	56 faskes	Rp 98.952.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jumlah Faskes (Fasilitas kesehatan) yang melayani KB modern	56 faskes	Rp 98.952.000	
26	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	KAB BOYOLALI	Frekuensi KIE melalui berbagai media	12 kali	Rp 1.392.005.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	KAB BOYOLALI	Frekuensi KIE melalui berbagai media	12 kali	Rp 1.392.005.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
27	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	KAB BOYOLALI	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi	12,75		**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	KAB BOYOLALI	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi	12,75		
28	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	KAB BOYOLALI	Frekuensi Pembinaan Lini lapangan dan IMP	12 Kali	-	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	KAB BOYOLALI	Frekuensi Pembinaan Lini lapangan dan IMP	12 Kali	-	
29	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	KAB BOYOLALI	Rata-rata usia kawin pertama wanita	20,25	Rp -	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	KAB BOYOLALI	Rata-rata usia kawin pertama wanita	20,25	Rp -	
30	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jumlah data Basis Keluarga di tingkat Desa	5 Data (PUS, WUS, CPR, Unmetneed , dan ASFR)		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jumlah data Basis Keluarga di tingkat Desa	5 Data (PUS, WUS, CPR, Unmetneed , dan ASFR)		
31	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	KAB BOYOLALI	Presentase perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	8,00	Rp -	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	KAB BOYOLALI	Presentase perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	8,00	Rp -	
32	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	KAB BOYOLALI	Jumlah OPD dan Mitra bekerjasama dalam program pengendalian penduduk	3 OPD dan 2 Mitra		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	KAB BOYOLALI	Jumlah OPD dan Mitra bekerjasama dalam program pengendalian penduduk	3 OPD dan 2 Mitra		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	KAB BOYOLALI	Jml Dukungan LSOM terhadap program KKBPK	3 LSOM		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	KAB BOYOLALI	Jml Dukungan LSOM terhadap program KKBPK	3 LSOM		
34	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	KAB BOYOLALI	Perentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100,00	Rp 3.614.809.000	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	KAB BOYOLALI	Perentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100,00	Rp 3.614.809.000	
35	Administrasi Keuangan perangkat daerah	KAB BOYOLALI	Gaji dan Tunjangan ASN; Gaji Non ASN dan Tenaga Honorer	12	Rp 3.128.854.000	Administrasi Keuangan perangkat daerah	KAB BOYOLALI	Gaji dan Tunjangan ASN; Gaji Non ASN dan Tenaga Honorer	12	Rp 3.128.854.000	
36	Administrasi umum perangkat daerah	KAB BOYOLALI	Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	12	Rp 305.000.000	Administrasi umum perangkat daerah	KAB BOYOLALI	Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	12	Rp 305.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KAB BOYOLALI	Ketercapaian fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah semakin baik dan tepat waktu	12	Rp 64.725.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KAB BOYOLALI	Ketercapaian fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah semakin baik dan tepat waktu	12	Rp 64.725.000	
38	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	KAB BOYOLALI	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Rp 116.230.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	KAB BOYOLALI	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Rp 116.230.000	
39	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB BOYOLALI	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	25	Rp -	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB BOYOLALI	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	25	Rp -	

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja tahun 2023 agar dapat mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali serta mencapai target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis 2022 – 2026, BKP2D Kabupaten Boyolali melaksanakan inventarisasi usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan. Hasil inventarisasi usulan program dan kegiatan sebagai salah satu bahan acuan dalam penyusunan Renja setelah melalui tahapan seleksi dan evaluasi.

Adapun hasil inventarisasi Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan adalah sebagai berikut:

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME
1	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	KAB BOYOLALI	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani	100 persen
2	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	KAB BOYOLALI	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	3 keg
3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	KAB BOYOLALI	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (per 100 rb)	0,000035 persen
4	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jml org yg dilayani rujukan lanjutan bagi korban kekerasan Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	14 org
5	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jml SDM lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah yang difasilitasi	25 orang
6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	KAB BOYOLALI	Persentase fasilitas publik layak anak	16,67
7	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jml Advokasi Kebijakan dan KIE terkait PHA di Kabupaten	3 keg

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME
8	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	KAB BOYOLALI	Persentase desa layak anak	68,18
9	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jml Lembaga Layanan Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang ter advokasi Jumlah kelompok forum anak yang terfasilitasi Program PHA	5 klp
10	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	KAB BOYOLALI	Persentase anak korban kekerasan yang diselesaikan	100
11	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Frekuensi Koordinasi dengan Lembaga Layanan Perlindungan Khusus	2 keg
12	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	KAB BOYOLALI	Rasio korban kekerasan terhadap anak (per 100 rb)	0,000104
13	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Frekuensi Koordinasi dengan Lembaga Layanan Perlindungan Khusus	3 keg
14	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jml SDM lembaga layanan yang terlatih dalam perlindungan khusus	30 org
15	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	KAB BOYOLALI	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja APBD	2,50
16	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Persentase OPD yang melaksanakan program PUG	53 opd
17	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	KAB BOYOLALI	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	10,00
18		KAB BOYOLALI	Persentase pejabat publik perempuan	6,39
19	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jumlah Sosialisasi dalam peningkatan partisipasi perempuan di bidang swasta	9 keg
20	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jumlah Sosialisasi dalam peningkatan partisipasi perempuan di Sektor Publik, Politik, Hukum	10 keg

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME
21	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	KAB BOYOLALI	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif	18,18
22	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	KAB BOYOLALI	Cakupan Kecamatan yang memiliki PPKS yang aktif	2 (klp)
23		KAB BOYOLALI	Cakupan desa yang memiliki kelompok Tribina Aktif (BKB, BKR, dan BKL) dan UPPKS (Indikator AMJ)	2 (klp)
24	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	KAB BOYOLALI	Persentase peserta KB aktif	71,26
25	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jumlah Faskes (Fasilitas kesehatan) yang melayani KB modern	56 faskes
26	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	KAB BOYOLALI	Frekuensi KIE melalui berbagai media	12 kali
27	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	KAB BOYOLALI	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi	12,75
28	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	KAB BOYOLALI	Frekuensi Pembinaan Lini lapangan dan IMP	12 Kali
29	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	KAB BOYOLALI	Rata-rata usia kawin pertama wanita	20,25
30	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	KAB BOYOLALI	Jumlah data Basis Keluarga di tingkat Desa	5 Data (PUS, WUS, CPR, Unmetneed, dan ASFR)
31	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	KAB BOYOLALI	Presentase perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	8,00
32	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	KAB BOYOLALI	Jumlah OPD dan Mitra bekerjasama dalam program pengendalian penduduk	3 OPD dan 2 Mitra
33	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	KAB BOYOLALI	Jml Dukungan LSOM terhadap program KKBPK	3 LSOM

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME
34	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	KAB BOYOLALI	Perentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen
35	Administrasi Keuangan perangkat daerah	KAB BOYOLALI	Gaji dan Tunjangan ASN; Gaji Non ASN dan Tenaga Honorer	12 bulan
36	Administrasi umum perangkat daerah	KAB BOYOLALI	Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	12 bulan
37	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KAB BOYOLALI	Ketercapaian fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah semakin baik dan tepat waktu	12 bulan
38	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	KAB BOYOLALI	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
39	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB BOYOLALI	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	25 dokumen

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tersebut, sesuai dengan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali serta mengacu arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolli dalam hal Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 akan berusaha lebih terencana dan terukur keberhasilannya.

Arah kebijakan dalam pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah meningkatkan kualitas penduduk melalui upaya pokok Program Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tetap mengedepankan peran serta masyarakat yang ditandai dengan hal – hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup;
2. Memperkuat pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
3. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran;
4. Meningkatkan advokasi dan penggerakan Program Bangga Kencana sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran;
5. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi;
6. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan;
7. Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya;
8. Peningkatan sinergitas dan kerjasama antara Kemen PPPA dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Peningkatan perlindungan hak perempuan;
10. Peningkatan perlindungan khusus anak;
11. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA)

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan landasan praktis dan strategis dalam penyusunan kegiatan tahun 2024 dalam rangka mengemban serta mewujudkan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali.

Adapun tujuan penusunan rencan kerja tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 pada masing – masing bidang dan Sekretariat dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali.

A. Tujuan

1. Program Keluarga Berencana sebagai salah satu program pengendalian penduduk melalui pengaturan kelahiran dan pemberdayaan ketahanan keluarga betujuan untuk menjamin agar seluruh fasilitas pelayanan dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan merata di seluruh desa/kelurahan melalui perluasan akses peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, meningkatkan partisipasi dan keikut sertaan tanggung jawab pria dam Keluarga Berencana, penurunan kematian bayi dan Ibu , dan mempromosikan hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur dalam rangka membangun Keluarga Kecil bahagia dan Sejahtera serta menigkatkan partisipasi peremuan dalam kesehatan reproduksi.
2. Menyiapkan kehidupan berkeluarga yang bertanggung jawab yang dilakukan melalui promosi peningkatan pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat keluarga dan remaja tetang kesehatan reproduksi remaja, hak –hak reproduksi, pendewasan usia perkawinan.
3. Meningkatkan upaya pemberdayaan keluarga sebagai saah satu cara untuk membentuk Keluarga Bahagia dan Sejahtera, hidup mandiri serta mengebangkan diri keluarganya untuk hidup harmonis sesame anggota keluaarga dan lingkungan.
4. Penguatan kelembagaan dan peningatan kapasitas kinerja (jejaring kerja) termasuk dalam pengembangan kebiajakan membangun keluarga Berncana yang kuat terintegrasi dengan kebijakan pembangunan kependudukan.

B. Sasaran

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga
- Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Program Perlindungan Khusus Anak

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Pengendalian Penduduk

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Tahun 2024 DP2KBP3A Kabupaten Boyolali melakukan perencanaan program dan kegiatan. Tahun 2024 DP2KBP3A Kabupaten Boyolali melaksanakan 6 (enam) program 16 (enam belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Secara terperinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024 sesuai dengan perencanaan adalah sebagai berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BOYOLALITAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANANAK						**15.595.369.000,00**							**5.562.247.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.595.369.000,00**							**5.562.247.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**134.340.000,00**							**70.486.000,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMA ANGENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender(PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan kesetaraan gender dan perlindunga n anak.	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG														
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan SinkronisasiPerumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan kesetaraan gender dan perlindunga n anak.	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG														

			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				53 Perangkat Daerah	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan kesetaraan gender dan perlindunga n anak.	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Perangkat Daerah	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan kesetaraan gender dan perlindunga n anak.	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan kesetaraan gender dan perlindunga n anak.	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosialdan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan kesetaraan gender dan perlindunga n anak.	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUN GAN PEREMPUA N**	**-**	**-**			**-**	**25.500.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan KekerasanTerhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	11.500.000,00			-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	11.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang MemerlukanKoordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	14.000.000,00			-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi PerempuanKorban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Layanan	14.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan LembagaPenyedia Layanan Perlindungan PerempuanTingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga PenyediaLayanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				60 Orang	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHANHAK ANAK (PHA)**	**-**	**-**			**-**	**71.465.000,00**						**-**	**52.402.000,00**	

	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan DuniaUsaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	38.565.000,00			-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-	-	26.201.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang MendapatAdvokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				8 Organisasi	38.565.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		26.201.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas HidupAnak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	32.900.000,00			-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-	-	26.201.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan SinkronisasiPelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	32.900.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		26.201.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUSANAK**	**-**	**-**			**-**	**37.375.000,00**						**-**	**18.084.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan KekerasanTerhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	18.375.000,00			-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-	-	6.028.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA														

			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi danPendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				4 Orang	18.375.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		6.028.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yangMemerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	7.000.000,00			-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-	-	6.028.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK														
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				5 Orang	7.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		6.028.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anakyang Memerlukan Perlindungan Khusus TingkatDaerah Kabupaten/Kota	-	-			-	12.000.000,00			-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-	-	6.028.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/														
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih danmendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				40 Orang	12.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		6.028.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**15.461.029.000,00**							**5.491.761.000,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.581.978.000,00**						**-**	**4.000.804.000,00**	

	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah				2 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

																ANAK
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.194.688.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, danadaptif secara inklusif danmerata Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-	-	3.514.849.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	2.987.712.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, danadaptif secara inklusif danmerata Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		3.307.873.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	206.976.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, danadaptif secara inklusif danmerata Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		206.976.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD				12 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

			Jumlah Dokumen Koordinasidan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan danTindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	264.465.000,00			-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	-	-	305.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	3.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan				2 Paket	42.940.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan				2 Paket	25.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Materialyang Disediakan				2 Paket	20.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu				2 Laporan	113.530.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		104.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD				2 Laporan	56.995.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	53.325.000,00			-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-	-	64.725.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.325.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		3.325.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		61.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	69.500.000,00			-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-	-	116.230.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganyang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	35.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		46.230.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara				100 Unit	14.500.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	20.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**	**-**			**-**	**196.200.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan SinkronisasiKebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	0,00			-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentangPemanfaatan Kajian DampakKependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				4 Organisasi	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian PendudukCakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	196.200.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														

			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				0 Dokumen	196.200.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				2 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB)**	**-**	**-**			**-**	**5.959.851.000,00**						**-**	**1.490.957.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PengendalianPenduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	2.260.341.000,00			-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-	-	1.392.005.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,dan Keluarga Berencana)				267 Laporan	1.824.341.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		1.159.005.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) MelaluiRapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),dan Mini Lokakarya (Minilok)				4 Laporan	286.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Pemantapan tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														

			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuaiKearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				3 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		233.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepadaStakeholders dan Mitra Kerja				12 Organisasi	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	1.062.400.000,00			-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) diLini Lapangan oleh PKB/PLKB				2 Organisasi	1.062.400.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian KebutuhanAlat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.070.110.000,00			-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-	-	98.952.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke FasilitasKesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	55.220.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		98.952.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)				4702 Orang	2.014.890.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP														
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan PenggunaanMKJP				10 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria														
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				10 Orang	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi KemasyarakatanTingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	567.000.000,00			-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														

			Jumlah Kampung KeluargaBerkualitas yang mengikutiPelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				10 Kampung	567.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS)**	**-**	**-**			**-**	**5.723.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan PembangunanKeluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	5.723.000.000,00			-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				6 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)yang tersedia				2 Unit	360.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Pemantapan tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

			Jumlah kader yang mengikutiOrientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				3 Orang	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				2 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Kader Pengelola danPelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)yang mendapat biaya operasional kegiatan				70 Orang	5.363.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)														
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL),Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				3 Kelompok	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat .	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	J U M L A H							**15.595.369.000,00**							**5.562.247.000,00**	

BAB V

PENUTUP

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Alllah SWT, maka selesailah penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini dengan baik sehingga harapan terbesar bahwa rencana kerja ini mampu memberikan sumbangan positif bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali sehingga dapat menjadi pedoman atau arah bagi Sekretariat dan bidang dalam melksanakan program maupun kegiatan.

Keberhasilan dalam melaksanakan tugas Pokok Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali dan peran semua pihak yang ada kaitannya dengan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja dimasa yang akan datang.

Dalam perjalanan waktu rencana kerja ini tidak tertutup kemungkinan mengalami perubahan karena adanya peraturan dari Pemerintah Pusat, Darah maupun kebijakan – kebijakan dalam bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan kepentingan organisasi yang lebih besar. Namun demikian perubahan yang ada tidak terlalu jauh berbeda dari garis – garis besar perencanaan yang telah disusun.

Diharapkan dengan tersusunya Rencana Kerja (RENJA) ini, pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali lebih meningkat dari tahun ke tahun menuju kearah pelayanan prima.

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK

J. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

DINAS KETAHANAN PANGAN

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
BAB I. PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang ……..... 4
1.2 Landasan Hukum.. 5
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 12
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH…… 20
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional……..... 20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah……..... 20
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH …….……..... 21
4.1 Rencana Program……..... 21
4.2 Kegiatan……. 21
BAB V. PENUTUP 27

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan..... 9

TABEL 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali Tahun 2023…… 11

TABEL 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024…….. 14

TABEL 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Boyolali……. 19

BAB I
PENDAHULUAN

11. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, yang merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Ketahanan Pangan menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Boyolali ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang

menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Boyolali.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali tahun 2005 – 2025;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pangan dan Gizi.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan **tujuannya** adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dijadikan acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja (RENJA) Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali Tahun 2022 adalah sebagai berikut

Bab I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : HASIL EVALUASI RENJA PERNGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Bab V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2016 - 2021

Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Boyolali dilaksanakan 3 program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, serta Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui dari tingkat pencapaian target kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan **yaitu Indeks Ketahanan Pangan sebesar 85,26 telah melebihi target.**

TABEL 2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	09			Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan									
2	09	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi standar	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%
2	09	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ketercapaian fungsi layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	09	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketercapaian fungsi layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	12 laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	09	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah ketercapaian fungsi layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	09	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketercapaian fungsi layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	09	02		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian	Persentase peningkatan lumbung pangan dalam	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%

				Pangan	kondisi baik								
2	09	02	2.01	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan lumbung pangan dalam kondisi baik	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
2	09	03		Program Peningkatan DIversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan informasi distribusi pangan yang dapat diakses masyarakat	85 %	85 %	85 %	85 %	100%	85 %	85 %	100%
2	09	03	2.01	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah data ketersediaan dan harga pangan	5 %	5 %	5 %	5 %	100%	5 %	5 %	100%
2	09	03	2.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	17 ton	15 ton	16 ton	16 ton	100%	17 ton	17 ton	100%
2	09	03	2.02	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukuoan Gizi	Persentase Peningkatan kelompok/ UMKM yang melaksanakan diversifikasi pangan	25 %	20 %	20 %	20 %	100%	25 %	25 %	100%
2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		63 %	54 %	54 %	54 %	100%	63 %	63 %	100%
2	09	04	2.01	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2	09	04	2.02	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan yang Aman (Layak Konsumsi)	87 %	86,39 %	86,39 %	86,39 %	100%	87 %	87 %	100%
2	09	05	2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pangan yang Aman (Layak Konsumsi)	13	13	13	13	100%	13	13	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Pengukuran kinerja pelayanan Dinas Ketahaan Pangan dilaksanakan melalui evaluasi kinerja Tahun 2021 – 2026. Hasil analisis tertuang pada Tabel 2.2. Berdasarkan data pada Tabel 2.2. dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan dari seluruh indikator kinerja outcome tercapai sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan dengan kategori Sangat Baik. Evaluasi kinerja pelayanan tersebut menjadi landasan bagi penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023.

TABEL 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Boyolali Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja RKPD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD		Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)
		2022	2023	2022	2023			
1	Indeks Ketahanan Pangan	83,62	86,88	27,34	27,34	101,37	27,34	101,37

Evaluasi Indikator Kinerja :

1) Indeks Ketahanan Pangan

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan :

Adanya kenaikan Persentase Cadangan Pangan, Persentase Peningkatan lumbung pangan dalam kondisi baik, Persentase Ketersediaan informasi Distribusi Pangan yang dapat diakses masyarakat, Persentase penanganan desa rawan pangan, Persentase pangan yang aman (layak konsumsi), dan bertambahnya Persentase Peningkatan kelompok/UMKM yang melaksanakan Diversifikasi Pangan.

b. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan :

Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan program sebagai berikut:

1) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan:
   - Fasilitasi bantuan pengisian Gudang Lumbung berupa Gabah Kering Giling
   - Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan

- Pelatihan pengolahan pangan local
- Fasilitasi kelompok pekarangan pangan lestari
- Promosi pangan B2SA dan
- Laporan skor pola pangan harapan

2) Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan:
   - Membangun infrastruktur gudang lumbung
   - Memberikan pembinaan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perberasan.
3) Program penanganan rawan pangan, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan:
   - Penyusunan peta kerawanan dan kerentaan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) FSVA
   - Penyaluran Cadangan Pangan pada daerah rawan Pangan
4) Program pengawasan kemanan pangan, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan:
   - Pengujian sampel pangan segar
   - monitoring pengawasan pangan segar

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan khususnya untuk mewujudkan fungsi pelayanan umum dalam rangka mengoptimalkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi:

a. Pembangunan strategi pembangunan ekonomi dan infrastruktur dalam berbagai sektor/urusan yang berlandaskan keunggulan, potensi, dan kekhasan/ciri khas wilayah.
b. Perlunya optimasi penyediaan dan pemeliharaan data perencanaan pembangunan untuk masing-masing urusan (data kurang mutakhir, validitasnya rendah dan tidak berkelanjutan).

Dalam penyelenggaraan tugas dan pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali dengan mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan

kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Penentuan isu-isu strategis diperlukan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan maupun dalam meningkatkan pelayanan organisasi. Isu-isu utama terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, yaitu:

a. Belum optimalnya penanganan panen dan pasca panen
b. Belum optimalnya pengembangan cadangan pangan dan distribusi pangan di masyarakat.
c. Belum optimalnya pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan.
d. Belum optimalnya pembinaan pengawasan keamanan dan mutu pangan.
e. Belum adanya tenaga fungsional di bidang ketahanan pangan yang diperlukan.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Sejak awal ditetapkannya Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan dibandingkan Analisis Kebutuhan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali Tahun Tahun 2023 masih membutuhkan tambahan anggaran pada beberapa kegiatan. Secara rinci pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kabupaten Boyolali

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Boyolali	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1.954.465.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Boyolali	Terbayarnya gaji dan tunnjangan ASN	1 Tahun	2.384.875.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Boyolali	Terbayarnya gaji PTT dan tenaga honorer	12 bulan	140.140.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Boyolali	Terbayarnya gaji PTT dan tenaga honorer	12 bulan	140.140.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Boyolali	Tersedianya komponen instalasi listrik/telepon	12 bulan	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Boyolali	Tersedianya komponen instalasi listrik/telepon	12 bulan	3.001.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Boyolali	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Boyolali	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	16.949.000

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Boyolali	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Boyolali	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	8.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Boyolali	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Boyolali	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	38.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Boyolali	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	30.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Boyolali	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	23.677.000
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Boyolali	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	54.005.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Boyolali	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	49.468.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Boyolali	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Boyolali	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	85.250.000
B	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Boyolali	Terlaksanaya rapat-rapat koordinasi dan konsultai ke luar daerah	12 bulan	70.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Boyolali	Terlaksanaya rapat-rapat koordinasi dan konsultai ke luar daerah	12 bulan	53.186.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Boyolali	Terppenuhinya jasa surat menyurat	12 bulan	1.600.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Boyolali	Terppenuhinya jasa surat menyurat	12 bulan	3.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Boyolali	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	56.064.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Boyolali	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	55.140.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Boyolali	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	12 bulan	28.693.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Boyolali	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	12 bulan	45.000.000
C	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Boyolali	Tersdianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Boyolali	Tersdianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	30.000.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Kab. Boyolali	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor	12 Bulan	50.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Kab. Boyolali	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor	12 Bulan	20.370.000

	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**				
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Kab. Boyolali	Tersedianya lumbung pangan masyarakat desa	1 unit	474.740.000	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Kab. Boyolali	Tersedianya lumbung pangan masyarakat desa	1 unit	1.500.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**				
	Penyediaan Peningkatan Disersifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					Penyediaan Peningkatan Disersifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Boyolali	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5 satuan	965.500.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Boyolali	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5 satuan	666.486.000

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Lainnya Sesuai Dengan kebutuhan daerah kabupaten/ kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan					**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Lainnya Sesuai Dengan kebutuhan daerah kabupaten/ kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan**				
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/ kota	Kab. Boyolali	Jumlah kelembagaan dan jaringan disribusi pangan yang dikembangkan	1 unit	115.500.000	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Boyolali	Jumlah kelembagaan dan jaringan disribusi pangan yang dikembangkan	1 unit	112.500.000
Pengelolaan dan Kesimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota					**Pengelolaan dan Kesimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota**				
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Kab. Boyolali	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota	5 Klp	285.000.000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Kab. Boyolali	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota	5 Klp	285.000.000
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**				
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota					Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota				
Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaliran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Kab. Boyolali	Jumlah pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	1 dokumen	150.000.000	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaliran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Kab. Boyolali	Jumlah pengelolaan dan penyaliran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	1 dokumen	150.000.000
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan					Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				
Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Kab. Boyolali	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	1 dokumen	30.853.000	Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Kab. Boyolali	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	1 buah	30.000.000

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**				
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota					Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota				
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Boyolali	Jumlah monitoring kegiatan pengawasan pangan segar Kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/ kota yang dibina	2 dokumen	90.426.000	Jumlah monitoring kegiatan pengawasan pangan segar	Kab. Boyolali		2 dokumen	90.426.000
				3.923.508.480					5.790.468.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu dasar penetapan alokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali Tahun 2023, adalah usulan dari masyarakat melalui Musrenbang.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Boyolali

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pemberdayaan Masyarakat dlm Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Desa Sangup Kec Tamansari, Kab. Boyolali	Peningkatan kelompok UMKM yang melaksanakan diversifikasi pangan	Rp. 25.000.000/ 1 paket	Disesuaikan dengan hasil verifikasi dan kemampuan anggaran
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Seboto, Kab. Boyolali	Peningkatan cadangan pangan	Rp. 50.000.000/ 1 paket	Disesuaikan dengan hasil verifikasi dan kemampuan anggaran

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, dengan Tema RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan” untuk menuju Visi “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Pembangunan Nasional diarahkan pada : 1) Pembangunan Manusia; 2) Pembangunan Ekonomi; 3) Pembangunan Kewilayahan; 4) Pembangunan Infrastruktur; dan Pembangunan Politik. Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan Kabupaten Boyolali sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Renja Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2024. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat yang berorientasi terwujudnya kedaulatan pangan. Hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dirumuskan sebagai Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, yaitu Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dari aspek produksi, distribusi, dan konsumsi pangan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi yaitu " ***BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas*** dan melaksanakan misi ketiga yaitu ***Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional*** Boyolali lumbung pangan sebagai aplikasi dari konsep ketahanan pangan (*food security*) lokal dan nasional terus dipertahankan dan dikembangkan, dengan prinsip pertanian yang maju, lestari, budaya saing internasional, dan berkontribusi penting bagi perekonomian bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan budaya untuk mensejahterakan masyarakat yang berperadaban.

4.1. Rencana Program

Pemantapan ketahanan pangan di Kabupaten Boyolali Tahun 2023, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026, program dimaksud adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

4.2. Kegiatan

Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pagu Anggaran Indikatif Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 sebesar Rp. 5.790.468.000 ,00

Kegiatan tersebut meliputi :

NO. Program/Kegiatan Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Administrasi Keuangan Daerah
   - Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

b. Administrasi Umum Perangkat Daerafh
   - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
   - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   - Penyediaan peralatan rumah tangga
   - Penyediaan bahan logistik kantor
   - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   - Penyediaan bahan / Material
   - Fasilitasi kunjungan tamu
   - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

c Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

d Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
   - Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharan Peralatan dan Mesin Lainnya
   Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   -

2. Program Peningkatan Diservikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

a. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
   - Pengadaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

   - Penyediaan infrastruktur lumbung pangan

4. Program Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Stabilisasi pasokan dan harga pangan

   - Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan

- Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan
- Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan
- Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia

5 Program Penanganan Kerawanan Pangan

Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

- Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten / Kota

- Pelaksanaan pengadaan pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan

6. Program pengawasan keamanan pangan

Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten / Kota

- Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar Daerah Kabupaten / Kota

7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per Kapita per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi
- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita per Tahun

Tabel 4.1. Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Indikator Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**9**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								**6,007,258,480**					**4,747,986,000**
2	**9**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,005,912,980**					**2,635,967,000**
2	**9**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,556,076,000**					**2,071,465,000**
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	18 Orang/bulan	100%	2,426,076,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart	100%	1,954,465,000
2	9	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart	100%	117,000,000

2	**9**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**228,454,276**						**288,145,000**
2	9	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	3,247,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart	100%	3,000,000
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kelurahan	100%	1 Tahun	100%	9,827,272	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart	100%	15,000,000
2	9	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	8,138,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart	100%	3,000,000
2	9	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	38,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart	100%	40,000,000
2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	14,088,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart	100%	30,000,000

2	9	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	33,118,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart	100%	75,000,000

BAB V
PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan penjabaran proses pencapaian tujuan dinas ketahanan pangan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024, dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026, Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali Tahun 2022, serta dengan penggalian masalah dan potensi-potensi yang ada dengan mendasarkan pada metode pendekatan perencanaan melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat untuk pengembangan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Renja memuat prioritas program dan kegiatan, merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pangan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Renja dijadikan sebagai pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan setiap tahun anggaran. Selain itu, Renja merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan tahunan. Pada perjalanannya Renja Dinas Ketahanan Pangan dapat direview, jika target kinerja sudah terlampaui.

K. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Tuhan YME, karena atas Hidayah dan InayahNya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dapat kami susun.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi kepala daerah terpilih dan program yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2026 dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Boyolali 2021 – 2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024.
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali ini sebagai salah satu acuan/pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing bidang/sekretariat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali kami banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (RENJA) ini bermanfaat dan dapat menjadikan suatu pedoman kerja, utamanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika 8

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 54

2.3 Isu-Isu Penting dan Permasalahan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup 62

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 63

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 78

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH 87

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 87

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DLH Kabupaten Boyolali 89

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .. 90

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 90

BAB IV PENUTUP 108

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota di wajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menajdi kewenangannya daerah perlu menjamin terlaksananya

pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja Tahunan SKPD.

Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk penjabaran teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.

Adapun visi Kepala Daerah Kabupaten Boyolali seperti yang tertuang dalam RPJMD adalah " “BOYOLALI MAJU, MELANJUTKAN PRO INVESTASI” Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL) "

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Kepala Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Boyolali Melanjutkan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional
4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan pertamanan serta urusan pemakaman.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan pertamanan serta urusan pemakaman sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan, pertamanan serta urusan pemakaman sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan, pertamanan serta urusan pemakaman sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan, pertamanan serta urusan pemakaman sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali tersebut di atas adalah untuk mendukung:

1. Misi ke 1, Boyolali Melanjutkan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan

   Sesuai tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan fungsi sebagai pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup tentu sangat berkepentingan terhadap misi ini.

   Misi ini menjelaskan bahwa :

   a. **Memantapkan "*business friendly*",** dengan mempertahankan **iklim investasi yang kondusif**, mendorong perusahaan yang ramah lingkungan (*green company*), strategi bisnis perusahaan (*green strategy*), dan proses bisnis yang aman, nyaman dan bersih (*green process*), serta pengembangan produk yang ramah lingkungan (*green product*) serta Pengembangan kompetensi dan perlindungan

kepada sumber daya manusia (*green employee*).

b. Pembangunan Lingkungan, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berkelanjutan

Misi ini berorientasi pada penyediaan sistem layanan investasi yang kondusif guna meningkatkan daya tarik bagi investor dan kenaikan nilai investasi, dalam koridor investasi berawasan keberlanjutan lingkungan hidup. Misi pro investasi dimaksudkan mendinamisir dunia usaha, aktivitas perekonomian dan hubungan industrial yang berwawasan lingkungan, misi ini sebagai dasar kebijakan yang mensinergikan tumbuhnya investasi dengan keberlanjutan lingkungan. Jadi pengembangan investasi di Kabupaten Boyolali diprioritaskan pada pengembangan kota ramah lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup akan mempunyai peran yang sangat krusial dalam pelaksanaan misi ini, karena lingkungan hidup sebagai kata kunci untuk mendukung bahwa semangat pro investasi bukan sebagai penghambat dan penghalang masuknya investasi ke Kabupaten Boyolali, Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengawal pelaksanaan pembangunan dengan Konsep Kabupaten Hijau nya.

2. Misi ke 5 yaitu Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing, dimana dalam misi ini menekankan bahwa :

a. Boyolali tumbuh dengan infrastruktur yang tangguh dan iconik, permukiman inklusif, aman, dan berkelanjutan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. mengurangi kesenjangan intra dan antar wilayah; dan

b. selain itu dengan terwujudnya *Smart Goverment* diharapkan dapat mendorong terwujudnya *Smart city*, *Water City* dan *Green City* yakni konsep Boyolali Kota cerdas/pintar, kota air, yang ramah lingkungan

Konsep Kabupaten Hijau adalah konsep pembangunan yang berwawasan keberlanjutan kehidupan generasi yang akan datang di planet bumi. Elemen Kabupaten Hijau meliputi :

a. Perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan;

b. Ruang Terbuka Hijau yang ideal;

c. Konsumsi energi yang efisien;
d. Pengelolaan limbah;
e. Bangunan hemat energi;
f. Sistem transportasi berkelanjutan; dan
g. Pelibatan aktif masyarakat sebagai “komunitas hijau”.

Dinas Lingkungan Hidup akan mempunyai peran dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang ikonik, terwujudnya *water city* dan *green city* serta menjadikan Boyolali yang “tersenyum” nyaman ditinggali, nyaman investasi, nyaman untuk *everybody*.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali tahun 2024 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Boyolali khususnya dan Regional serta Nasional pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Teihun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Uundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6056):
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Racangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor.4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16), sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 tahun 2023 tentang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 119);
18. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 42).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut:

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program,

kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2024; dan

b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu~isu strategis tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali pada Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RKPD tahun 2024; dan
b. Pedoman yang berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2024 yang mengacu pada Renstra dan RKPD Tahun 2024.

1.4 . SISTEMATIKA

Penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

Bab II memuat :

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, berisikan uraian

mengenai isu~isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.
   Berisikan uraian dan catatan penting tentang rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhannya, terkait dengan rumusan program dan kegiatan maupun besarannya.
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
   Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab III memuat :

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu~isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV menjelaksan rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Bab V berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali selama tahun 2022 dan perkiraan pencapaian target tahun 2023.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan *(input),* keluaran *(output),* hasil *(outcome).* Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Pencapaian Target Tahun 2023

1. Capaian dan Evaluasi Program/ Kegiatan Tahun 2022

Pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali menerima anggaran Belanja Daerah (Perubahan) sebesar Rp. ***38.894.333.000,-*** yang dialokasikan untuk pelaksanaan 6 (enam) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp ***37.711.545.824,-*** atau mencapai 96,96 %, dengan tingkat capaian 6 (enam) sasaran yang telah ditetapkan adalah 95,32 %, yang masing masing sasaran berhasil mencapai nilai kinerja 97% untuk sasaran 1 dengan 1 (satu) indikator, nilai kinerja 83,48 % untuk kinerja sasaran 2 dengan 1 (satu) indikator, nilai kinerja 96,11 % untuk kinerja sasaran 3 dengan 1 (satu) indicator, nilai kinerja 94,41 % untuk kinerja sasaran 4 dengan 1 (satu) indikator, nilai kinerja 102,98 % untuk kinerja sasaran 5 dengan 1 (satu) indikator, serta nilai kinerja 99,76 % untuk kinerja sasaran 6 dengan 1 (satu)

indikator. Uraian selengkapnya atas capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2022 dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD/ RENSTRA DLHTahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Kinerja RPJMD/ RENSTRA DLH sampai dengan RKPD Kabupaten Kota tahun lalu (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) tahun 2022			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2023)	Perkiraan realisasi capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2023)	
							Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten /kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD/ APBD yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah			Nilai Sakip (SDGs)								
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100	100	100,00
		X.XX.01. 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan Administarsi keuangan perangkat daerah			8 kegiatan	8 kegiatan		8	8	100,00

			Sub Kegiatan									
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	98 org/buln	14 bulan	14 Bulan	14,00 Bulan	100	98/ bulan	98/ bulan	100,00
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor PTT dan THL	48	12 bulan	12 Bulan	12,00 Bulan	100	12	24	50,00
		X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	48	-	12 Dokumen	12,00 Dokumen	100	12	24	50,00
		X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	48	-	12 Dokumen	12,00 Dokumen	100	12	24	50,00
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	-	18 Laporan	18,00 Laporan	100	18	36	50,00
		X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	8	-	2 Dokumen	2,00 Dokumen	100	8	4	50,00
		X.XX.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi umum perangkat daerah			8 kegiatan	8 kegiatan		8	8	100,00
			Sub Kegiatan									
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	16	1 paket	12 Bulan	12,00 Bulan	100	4	8	50,00
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga (bahan pembersih dan peralatan kebersihan)	16	12 Bulan	12 Bulan	12,00 Bulan	100	4	8	50,00
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BBM dan gas	16	2 paket	12 Bulan	12,00 Bulan	100	4	8	50,00
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	16	2 paket	12 Bulan	12,00 Bulan	100	4	8	50,00
		X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Alat Tulis Kantor	16	1 paket	12 Bulan	12,00 Bulan	100	4	8	50,00

		X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jamuan makanan dan minuman	16	12 Bulan	12 Bulan	12,00 Bulan	100	4	8	50,00
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah	36	12 Bulan	12 Bulan	12,00 Bulan	100	12	12	33,33
		X.XX.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Jasa penunjang urusan pemda			2 kegiatan	2 kegiatan	100	2	2	100,00
			Sub Kegiatan									
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda benda pos	48	12 bulan	12 Bulan	12,00 Bulan	100	12	24	50,00
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening langganan telepon, air, listrik, internet	48	12 bulan	12 Bulan	12,00 Bulan	100	12	24	50,00
		X.XX.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3 kegiatan	3 kegiatan		3	3	100,00
			Sub Kegiatan									
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kondisi gedung bangunan terpelihara	2	12 bulan	12 Bulan	12,00 Bulan	100	2	2	100,00
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas layak operasional	57	12 bulan	12 Bulan	12,00 Bulan	100	57	57	100,00
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kerja dapat terpelihara	79	12 bulan	12 Bulan	12,00 Bulan	100	79	79	100,00
		X.XX.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7 kegiatan	7 kegiatan		7	7	100,00

			Sub Kegiatan									
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	10	2	2 Dokumen	2,00 Dokumen	100	2	6	60,00
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	5	1	1 Dokumen	1,00 Dokumen	100	1	3	60,00
		X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	5	1	1 Dokumen	1,00 Dokumen	100	1	3	60,00
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	5	1	1 Dokumen	1,00 Dokumen	100	1	3	60,00
		X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	5	1	1 Dokumen	1,00 Dokumen	100	1	3	60,00
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	64	0	16 Dokumen	16,00 Dokumen	100	16	32	50,00
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	16	0	4 Dokumen	4,00 Dokumen	100	4	8	50,00
		X.XX.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah			2 kegiatan	2 kegiatan		2	2	100,00
			Sub Kegiatan									
		X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah target retribusi daerah	8		1606500000 Rupiah	1.833.500.041 Rupiah	114,13	2,00	4,00	50,00
				Lain-lain PAD yang Sah (DLH)			93500000 Rupiah	114.940.000,00 Rupiah	122,93			
		X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	48		12 Laporan	12,00 Laporan	100	12	24	50,00

2	Meningkatnya kualitas air			Indeks Kualitas Air								
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perusahaan yang mengelola air limbah sesuai ketentuan	70 Persen	60 Persen	62 Persen	45,95 Persen		66	66	94,29
		2.11.03.2 .01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mengelola air limbah sesuai ketentuan	20	-	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	100	4	8	40,00
			Sub Kegiatan									
		2.11.03.2 .01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dalam pengelolaan air limbah	200	-	15 Pelaku Usaha	28,00 Pelaku Usaha	186,67	50,00	78,00	39,00
				Jumlah koordinasi yang dilakukan dalam pencegahan pencemaran air	10	-	2 Kegiatan	2,00 Kegiatan	100	2	4	40,00
		2.11.03.2 .01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga/ KK pemanfaat IPAL Biogas	50	-	15 Kepala Keluarga	11 Kepala Keluarga	73,33	10,00	21,00	42,00
		2.11.03.2 .01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah IPAL Biogas yang dibangun	50	-	15 Unit	11,00 Unit	73,33	10,00	21,00	42,00

		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase sumber air yang dikonservasi	69.2 Persen	62 Persen	63,5 Persen	62,84 Persen	98,96	66,40	66,40	95,95
		2.11.03.2 .02	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penambahan sarana konservasi air	10		2 paket	2 paket	100	2	4	40,00
			Sub Kegiatan									
		2.11.03.2 .02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumur resapan yang dibangun	115		23 Unit	22,00 Unit	95,65	21,00	43,00	37,39
				jumlah peralatan pembuatan Biopori yang disediakan	700		140 Set	140,00 Set	100	140	280	40,00
		2.11.03.2 .01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sektor penyumbang emisi GRK yang dapat dihitung			4 Jenis	4 Jenis	100			
			Sub Kegiatan									
		2.11.03.2 .01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen inventarisasi GRK disusun	5		1 Dokumen	1,00 Dokumen	100	1	2	40,00
				Jumlah koordinasi yang dilakukan dalam Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10		2 Kegiatan	2,00 Kegiatan	100	2	4	40,00
		2.11.03.2 .01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sarpras laboratorium lingkungan yang dalam kondisi baik	5		1 Paket	1 paket	100	1	2	40,00

			Sub Kegiatan									
		2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah paket sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan yang disediakan	15		5 Paket	5,00 Paket	100	1	6	40,00
				Jumlah Sarpras laboratorium lingkungan yang dipelihara	60		13 Unit	13,00 Unit	100	13	26	43,33
		2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penambahan jumlah sumber air yang dikonservasi	20		4 Buah	4 buah	100	4	8	40,00
			Sub Kegiatan									
		2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah tanaman penghijauan yang ditanam	10000		2000 Batang	2.000,00 Batang	100	2000	4000	40,00
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	80 Persen	71 Persen	73 Persen	73,00 Persen		77	77	96,25
		2.11.05.2.01	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Volume LB3 yang dapat dikelola (kg)			4481573,68 Kg	0,00 Kg				
			Sub Kegiatan									
		2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah rekomendasi izin Penyimpanan sementara LB3 yang difasilitasi	100	0	20 Dokumen	20,00 Dokumen	100	20	40	40,00

		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia sebagai dasar penyusunan kebijakan	100 Persen	3 Persen	100 Persen	116,67 Persen		100	100	100,00
		2.11.02.2.01	**Kegiatan** Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Lingkungan Hidup yang tersedia			2 Dokumen	2 Dokumen	100			
		2.11.02.2.01.02	**Sub Kegiatan** Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH, Naskah Akademis dan Kajian yang disusun	2	0	1 Dokumen	1,00 Dokumen	100	1	2	100,00
				Jumlah dokumen IKPLHD yang disusun	5	0	1 Dokumen	1,00 Dokumen	100	1	2	40,00
		2.11.02.2.02	**Kegiatan** Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian Lingkungan Hidup yang tersedia	16	0	4 Dokumen	4 Dokumen	100	3	7	43,75
		2.11.02.2.02.01	**Sub Kegiatan** Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS yang disusun (pendamping RDTR)	11	0	3 Dokumen	3,00 Dokumen	100	2	5	45,45
				Jumlah dokumen kajian lingkungan yang disusun (kajian kualitas tanah) setiap 5 tahun	5	0	1 Dokumen	1,00 Dokumen	100	1	2	40,00
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase aduan lingkungan hidup yang ditangani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00 Persen	100	100	100	100,00
		2.11.10.2.01	**Kegiatan** Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan lingkungan hidup/ PPLH yang ditangani	50		10 Kasus	10,00 Kasus	100	10	20	40,00

		2.11.10.2 .01.01	**Sub Kegiatan** Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah aduan lingkungan hidup/ PPLH yang masuk/ teregistrasi	50		13 Kasus	13,00 Kasus	100	10	23	46,00
3	Meningkatnya kualitas tutupan lahan			Indeks Kualitas Tutupan Lahan								
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan/ ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20 dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	34.519 Persen	34.348 Persen	34,382 Persen	43,03 Persen		34,45	34,45	99,80
		2.11.04.2 .01	**Kegiatan** Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah konservasi eksitu yang dikelola			1 Lokasi	1 Lokasi	100	1	1	100,00
			Sub Kegiatan									
		2.11.04.2 .01.03	Pengelolaan Kebun Raya	Jumah sarana dan prasarana kebun raya paket yang disediakan	16		4 Paket	5,00 Paket	125	5	9	56,25
				Jumlah jenis tanaman yang ditambahkan (Tambahan Jenis)	20		5 Jenis	35,00 Jenis	700	5	40	200,00
		2.11.04.2 .01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik wilayah perkotaan/kawasan Perkotaan yang telah tersedia (ha) (akumulasi)			1505,235 ha					
		2.11.04.2 .01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH/ taman publik yang dibangun	60		12 Lokasi	12,00 Lokasi	100	12	24	40,00
		2.11.04.2 .01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah RTH yang dipelihara	15		15 Lokasi	15,00 Lokasi	100	15	15	100,00
		2.11.04.2 .01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang disediakan	20		4 Paket	4,00 Paket	100	4	8	40,00

4	Meningkatnya kualitas udara			Indeks Kualitas Udara								
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu (SO2 dan NO2)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100	100	100,00
		2.11.03.2 .02	**Kegiatan** Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sampel kualitas udara yang memenuhi baku mutu	130		26 Sample / Uji	26 Sample / Uji	100	26	52	40,00
		2.11.03.2 .02.01	**Sub Kegiatan** Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah sampel kualitas udara yang diuji	130		26 Sample / Uji	26,00 Sample / Uji	100	26	52	40,00
				Jumlah sampel kualitas air yang diuji	80		18 Sample / Uji	18,00 Sample / Uji	100	18	36	45,00
				Jumlah sistem pemantauan kualitas air otomatis, online, kontinyu yang disediakan (Pengadaan (DAK) dan operasional/ pemeliharaan (APBD)	1		1 Paket	0,00 Paket	0	0	0	0,00
				Jumlah sampel kualitas lingkungan (air dan udara) yang diuji	220		44 Sample / Uji	44,00 Sample / Uji	100	44	88	40,00
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase sumber emisi yang memenuhi baku mutu	100 Persen	86 Persen	93 Persen	86 persen	92,47	100	100	100,00

		2.11.03.2.02	**Kegiatan** Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mengelola kualitas udara sesuai ketentuan	20		4 Pelaku Usaha	4,00 Pelaku Usaha	100	4	8	40,00
		2.11.03.2.02.01	**Sub Kegiatan** Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dalam pengelolaan kualitas udara	200	220	50 Pelaku Usaha	28,00 Pelaku Usaha	56	50	78	39,00
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kampung Iklim yang terfasilitasi	100 Persen	34 Persen	56 Persen	84,00 Persen		68	68	68,00
		2.11.03.2.01	**Kegiatan** Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kampung iklim yang telah difasilitasi (total)	50	22	28 Kampung / Desa / Kelurahan	31 Kampung / Desa / Kelurahan	110,71	6,00	37,00	74,00
		2.11.03.2.01.02	**Sub Kegiatan** Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim yang difasilitasi	50	6	6 Kampung / Desa / Kelurahan	9,00 Kampung / Desa / Kelurahan	150	6	37	74,00
5	Meningkatnya penanganan sampah			Persentase sampah yang tertangani								
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan sampah	42.54 Persen	7,35 Persen	20,75 Persen	20,75 Persen		32,58	32,58	76,59
		2.11.11.2.01	**Kegiatan** Pengelolaan Sampah	Luas area pelayanan sampah			21064 ha					

		2.11.11.2.01.07	**Sub Kegiatan** Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana TPA yang disediakan	15	0	3 Paket	3,00 Paket	100	3	6	40,00
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola dengan 3R	31 Persen	23,49 Persen	26 Persen	26,00 Persen		28	28	90,32
		2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Volume sampah yang dikelola dengan 3R (ton/tahun)	32579	-	25254 Ton	0,38 Ton		27319	27319	83,85
			Sub Kegiatan									
		2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan 3R yang disediakan	100	-	20 Unit	20,00 Unit	100	20	40	40,00
				Jumlah (rapat) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah	15	-	3 Kegiatan	3,00 Kegiatan	100	3	6	40,00
		2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan sampah 3 R yang disediakan	15	-	3 Unit	3,00 Unit	100	3	6	40,00
				Jumlah (rapat) Koordinasi Pembatasan, Pendauran Ulang, dan Pemanfaatan Kembali	15	-	3 Kegiatan	3,00 Kegiatan	100	3	6	40,00
		2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah bank sampah yang terbentuk	50	-	10 Unit	10 unit	100	10	20	40,00
		2.11.11.2.01.04	**Sub Kegiatan** Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok masyarakat yang memperoleh sosialisasi	24	-	6 Kelompok	6,00 Kelompok	100	6	12	50,00

6	Meningkatnya perusahaan yang ramah lingkungan			Persentase peningkatan perusahaan yang ramah lingkungan								
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase perusahaan yang ramah lingkungan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	97,00 Persen	97	100	100	100,00
		2.11.06.2 .01	**Kegiatan** Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian penghargaan	5	-	1 Kegiatan	0,00 Kegiatan	0	1	1	20,00
		2.11.06.2 .01.04	**Sub Kegiatan** Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Penilaian perusahaan	5	-	1 Kegiatan	1,00 Kegiatan	100	1	2	40,00
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase persetujuan lingkungan yang dikeluarkan bagi aktivitas investasi yang sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 persen	100	100	100	100,00

		2.11.06.2.01	**Kegiatan** Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi persetujuan lingkungan yang diterbitkan	440	-	100 Pelaku Usaha	191 pelaku usaha	191	110	300	68,18
			Sub Kegiatan									
		2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan rekomendasi persetujuan lingkungan	440	-	100 Pelaku Usaha	191,00 Pelaku Usaha	191	110	300	68,18
		2.11.06.2.01	**Kegiatan** Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi memenuhi kentuan izin lingkungan dan izin PPLH	50	-	10 Pelaku Usaha	10 pelaku usaha	100	10	20	40,00
			Sub Kegiatan									
		2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi memenuhi kentuan izin lingkungan dan izin PPLH	50	-	10 Pelaku Usaha	10,00 Pelaku Usaha	100	10	20	40,00
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	70 Persen	60 Persen	62 Persen	62 Persen	100	66	66	94,29

		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha dan atau kegiatan yang memenuhi ketentuan dalam izin Lingkungan dan IPPLH	20	-	4 Pelaku Usaha	4,00 Pelaku Usaha	100	4	8	40,00
			Sub Kegiatan									
		2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	200	-	50 Pelaku Usaha	28,00 Pelaku Usaha	56	50	78	39,00

Dari Tabel dapat diketahui bahwa :

1. Sasaran 1 Meningkatnya nilai investasi dengan indikator Persentase perusahaan yangramah lingkungan dengan target 100% dapat tercapai 97% dengan nilai kinerja 97%

Capaian indikator persentase peningkatan perusahaan yang ramah lingkungan tahun 2022 tercapai sebanyak 97% dari 100% (kategori sangat tinggi) atau dari 210 perusahaan, sebanyak 203 perusahaan yang ramah lingkungan. Indikator ini merupakan indikator kinerja bidang lingkungan hidup sebagai respon terhadap visi dan misi pembangunan daerah yang melanjutkan pro investasi. Secara umum investasi berupa pembangunan usaha dan/atau kegiatan akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga diperlukan upaya-upaya pengendalian sehingga terwujud konsep pembangunan berkelanjutan. Dilihat dari capaian kinerja, sebenarnya hanya perlu peningkatan 3% hingga capaian 100%. Tetapi hal ini cukup sulit terwujud, karena hampir selalu hingga akhir tahun masih ada perusahaan yang bermasalah dan belum selesai memperbaiki kinerja pengelolaan lingkungan hidup

Perusahaan ramah lingkungan adalah perusahaan yang menaati kaidah-kaidah lingkungan dalam kegiatannya, antara lain memiliki dokumen perizinan berusaha/ persetujuan lingkungan sesuai ketentuan, memiliki IPAL pengolah air limbah dan menguji kualitas air limbahnya, melakukan uji kualitas udara sesuai peraturan perundang-undangan serta menyampaikan laporan triwulan atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Perusahaan ramah lingkungan mengedepankan kelestarian lingkungan dalam proses produksinya.

Mereka secara konsisten menjaga 3K (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan RL (Ramah Lingkungan) dalam proses produksi. Secara sederhana perusahaan ramah lingkungan dapat diartikan tidak ada permasalahan berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam pengelolaan perusahaan, sehingga dapat memunculkan aduan lingkungan dari masyarakat.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator persentase peningkatan perusahaan yang ramah lingkungan tahun 2022 tercapai sebanyak 97% perusahaan dari target yang ditetapkan sebanyak 210 perusahaan atau sebanyak 203 perusahaan yang

ramah lingkungan. Sedangkan 7 (tujuh) perusahaan sedang dalam pembinaan untuk perbaikan dan pemenuhan ketentuan ramah lingkungan.

Ada beberapa hal yang berperan dalam pencapaian target kinerja ”persentase peningkatan perusahaan yang ramah lingkungan” sebagai berikut:

1) pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas perizinan berusaha/persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
2) pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
3) pemberian sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran perizinan berusaha/persetujuan pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah; dan
4) pemberian penghargaan kepada penanggung jawab Usaha dan/Kegiatan.

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

1) pandemi Covid-19 berdampak pada realisasi rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan, bahkan ada beberapa pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum bersedia dikunjungi ke lokasi untuk pembinaan dan pengawasan;
2) keterbatasan jumlah SDM Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) sehingga kegiatan pembinaan dan pengawasan ke lokasi tidak dapat dilakukan di semua perusahaan;
3) perubahan regulasi peraturan perundang-undangan terkait dengan perizinan dan kewenangan pengawasan, beberapa perusahaan yang semula kewenangan daerah menjadi kewenangan provinsi dan pusat, sehingga berpotensi pembinaan dan pengawasan kurang optimal.

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

1) meningkatkan keterlibatan Perangkat Daerah yang terkait seperti Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan dan lain-lain dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan;

2) meningkatkan hubungan kerja (konsultasi/ koordinasi) dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, terutama terkiat dengan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenganan pemerintah provinsi;
3) meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan PPLHD, khususnya di lingkungan usaha dan/atau kegiatan berpotensi tinggi menimbulkan pencemaran lingkungan;
4) penambahan dan peningkatan kapasitas SDM PPLHD;
5) sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama ”persentase peningkatan perusahaan yang ramah lingkungan”, dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Subkegiatan yaitu :

1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH;
2) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH.

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator:

1) persentase persetujuan lingkungan yang dikeluarkan bagi aktivitas investasi yang sesuai standar dengan target 100% dapat tercapai 100% dengan realisasi kinerja 100%, capaian kinerja ini didasarkan pada Jumlah izin lingkungan yang dikeluarkan sebanyak 191 rekomendasi persetujuan lingkungan dari 191 jumlah pendaftar pengajuan ijin lingkungan yang teresgitrasi;
2) persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dengan target 62% dapat tercapai 62% dengan realisasi kinerja 100%, pencapaian target ini yaitu dengan adanya penambahan 4 (empat) jumlah usaha

dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yaitu *PT Sri Wahana Aditiakarta, PT Kencana Print, PT Mulia Cipta Teknologi, PT Warna Mukti Grafika*, sehingga total menjadi 124 usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH (dari data base awal penyusunan Renstra sebanyak 120 usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari 120 usaha dan/atau kegiatan); dan

3) persentase perusahaan yang ramah lingkungan, dengan target 100%, dapat tercapai 97%, dengan realisasi kinerja 97%, dengan definisi operasioanal perusahaan yang ramah lingkungan adalah perusahaan yang tidak menimbulkan permasalahan lingkungan (pencemaran dan/atau kerusakan) di sekitarnya sampai menimbulkan aduan dan bahkan dikenai sanksi.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Dinas Lingkungan Hidup memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa kendaraan dinas operasional, peralatan kerja kantor (komputer, laptop, printer, alat tulis kantor, dan lain-lain) telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah

2. Sasaran 2 Meningkatnya Indeks Kualitas Air dengan Indikator Indeks Kualitas Air (IKA)

Capaian Indeks Kualitas Air sebesar 48,42 dari target 58,00 atau sebesar 83,53% kategori tinggi. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, Indeks Kualitas Air tahun 2022 sebesar 81,68%. Dibandingkan dengan realisasi nasional tahun 2022, Indeks Kualitas Air tahun 2022 sebesar 89,87%. Peningkatan capaian tahun-tahun berikutnya untuk mencapai target akhir tahun perencanaan perlu upaya yang sungguh-sungguh

National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSF-WQI) atau Indeks Kualitas Air (IKA) ditentukan untuk menilai tingkatan kualitas air dari suatu perairan. Indeks kualitas air ini didasarkan pada 9 parameter yang mencakup: BOD, DO, nitrate, total

phosphate, temperature, turbidity, total solids, pH, and Fecal Coliform.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks Kualitas Air tahun 2022 sebesar 48,42. Apabila dibandingkan dengan target Indeks Kualitas Air tahun 2022 sebesar 58, maka tahun ini tercapai sebesar 83,48%. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021. Indeks Kualitas Air tahun 2021 sebesar 52,5, artinya capaian tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4,08 atau (7,77%) dibandingkan tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka indikator Indeks Kualitas Air mengalami progres sebesar 81,68%. Sedangkan jika dibandingkan dengan Indeks Kualitas Air secara nasional maka Kabupaten Boyolali lebih rendah yaitu selisih sebesar 5,46 point, dalam hal ini realisasi nasional sebesar 53,88 (data sementara). Perkembangan Indeks Kualitas Air dari tahun ke tahun mengalami kenaikan/penurunan (fluktuasi/naik-turun). Grafik Indeks Kualitas Air dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 3.1. Grafik Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Boyolali tahun 2017 - 2022

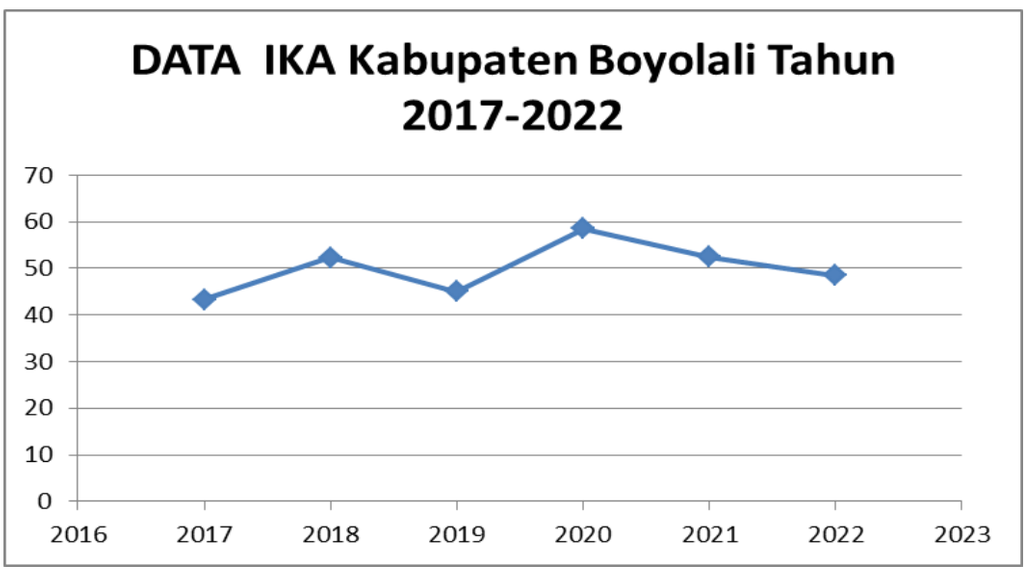

Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target Indeks kualitas air adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengendalian pencemaran air (pencegahan dan penanggulangan) antara lain melalui pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah;

2. Pembuatan IPAL Biogas Limbah Ternak yang bertujuan untuk menurunkan kadar cemaran pada air sungai, terutama BOD dan e-coli; dan
3. Koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholder* dalam upaya pengendalian pencemaran air melalui sinergitas kegiatan di lapangan.

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. pengelolaan limbah rumah tangga, UMKM, peternakan, pertanian yang belum dilakukan secara baik (dialirkan langsung ke badan air) sehingga menjadi salah satu penyebab masih tingginya kadar BOD dan e-coli yang berpengaruh kepada rendahnya kualitas air. Peningkatan aktifitas rumah tangga, kegiatan usaha dan UMKM tidak diikuti dengan meningkatnya kesadaran akan upaya pengendalian pencemaran air;
2. penambahan lokasi atau titik pemantauan sungai, dimana pada lokasi yang ditentukan justru memiliki parameter kualitas air yang melebihi baku mutu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, mengamanatkan bahwa minimal 50% sungai harus terpantau. Pada tahun 2022 terdapat Penambahan lokasi/titik pemantauan sungai dari 3 sungai menjadi 5 sungai, namun tidak memberikan dampak positif terhadap peningkatan indeks kualitas air. Hal ini disebabkan karena Sungai yang dijadikan tambahan titik pemantauan merupakan sungai yang membelah Kota Boyolali. Sungai ini melalui area perkotaan yang padat akan pemukiman dan aktivitas penduduk, sehingga pada beberapa titik pemantauan justru memiliki indeks kualitas air yang melebihi baku mutu;
3. adanya tren penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) secara Global, terutama wilayah Solo Raya. Hipotesisnya, terdapat suatu kondisi tertentu, yang terjadi di dalam cakupan wilayah yang luas, yang mengakibatkan penurunan indeks kualitas air di berbagai wilayah. Hingga saat ini belum dapat disimpulkan faktor utama yang menjadi penyebab kondisi tersebut;
4. lokasi pengambilan sampel air sungai yang berada di hulu Kabupaten Boyolali merupakan lokasi hilir kabupaten lain.

Kondisi ini memberikan konsekuensi dalam hal pembinaan dan pengawasan aktivitas-aktivitas yang berada di dekat badan air/sungai; dan

5. masih kurangnya sinergitas dan koordinasi program pengendalian pencemaran air dengan pihak-pihak terkait.

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

1. peningkatan koordinasi dan kerjasama serta sinergitas kegiatan dengan pihak pihak terkait agar pelaksanaan pengendalian kualitas air dapat lebih terintegrasi;
2. penambahan titik/lokasi pantau, sehingga bisa lebih komprehensif menggambarkan kondisi kualitas air di Kabupaten Boyolali;
3. hasil pengukuran indeks kualitas air di wilayah Solo Raya, rata-rata mengalami penurunan. Apabila kondisi ini disebabkan oleh faktor alam, maka intervensi yang bisa dilakukan adalah melakukan upaya preventif dan proaktif guna meminimalisasi dampak yang disebabkan. Sedangkan apanila penyebabnya berasal dari faktor manusia, maka diperlukan upaya dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait guna menurunkan resiko yang terjadi;
4. pembinaan dan pengawasan badan air yang terletak di Kabupaten lain akan sulit dilakukan apabila belum terbentuk kerjasama yang baik antara kabupaten yang berdekatan tersebut. Pembinaan dan pengawasan akan bisa dilaksanakan dengan lebih baik apabila sudah ada bentuk kerja sama yang telah disepakati antara kedua belah pihak sebelumnya. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama yang dibangun dengan perangkat Dinas Kabupaten lain dalam upaya pembinaan dan pengawasan badan air;
5. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan badan air dalam upaya meningkatakan indeks kualitas air tidak dapat dilakukan secara optimal jika hanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. Dibutuhkan kerja sama dan dukungan dari pihak-pihak lain dalam menjalankan prosesnya. Oleh karena itu perlu diinventarisasi berbagai pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan kualitas air sungai untuk kemudian ditindak lanjuti dengan membangun kerja sama dengan pihak-pihak tersebut; dan

6. Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan upaya lain dalam upaya peningkatan indeks kualitas air yaitu melalui kegiatan pengendalian pencemaran air. Kegiatan pengendalian pencemaran air dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada pengelola unit usaha/kegiatan yang buangan limbahnya memberikan dampak langsung pada kualitas air sungai. Kegiatan lain dalam upaya pengurangan pencemaran air dilakukan dengan pembangunan IPAL Biogas. IPAL Biogas meruapakan salah satu alternatif solusi pada usaha peternakan dalam pengelolaan limbah ternak yang mereka hasilkan. Selain menghasilkan gas yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak, output dari IPAL menghasilkan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan. Dengan output biogas yang dapat dimanfaatkan untuk pemupukan lahan pertanian, maka tidak ada lagi ada pembuangan limbah peternakan ke badan sungai. Sehingga pembangunan IPAL Biogas diharapakan bisa memberikan dampak pada pengurangan pencemaran air di sungai.

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama Indeks Kualitas Air, dilaksanakan melalui program:

1. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan dengan Kegiatan
   a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
      - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut;
      - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim; dan
      - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
   b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan
      - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat; dan
      - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

2. Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:
   a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota; dan
   b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang.
3. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3 dan sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator:

1. Persentase perusahaan yang mengelola air limbah sesuai ketentuan dengan target 62% dapat tercapai 62 % dengan realisasi kinerja 100%, pencapaian target ini yaitu dengan adanya penambahan 4 (empat) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mengelola air limbah sesuai ketentuan yaitu *PT Sri Wahana Aditiakarta, PT Kencana Print, PT Mulia Cipta Teknologi, PT Warna Mukti Grafika*, sehingga total menjadi 124 usaha dan/atau kegiatan yang yang mengelola air limbah sesuai ketentuan (dari data base awal penyusunan Renstra sebanyak 120 usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari 200 usaha dan/atau kegiatan yang didalamnya termasuk mengelola air limbah sesuai ketentuan)
2. Persentase sumber air yang dikonservasi dengan target 63,5% dapat tercapai 63,98% dengan realisasi kinerja 100,7% yaitu bertambahnya 4 (empat) sumber mata air yang dikonservasi dari 3 (tiga) yang ditargetkan, yaitu sumber air di Desa Gedangan, Ds. Sruni, Ds. Senden, Desa Samiran dengan rumusan (Jumlah sumber air yang dikonservasi/ jumlah sumber air)*100% kondisi awal RPJMD adalah dihitung dari jumlah sumber air yang telah dikonservasi sebanyak 131 dari jumlah sumber air sebanyak 211.

Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan indikator:

1) Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia sebagai dasar penyusunan kebijakan dengan target 100% dapat tercapai 100% dengan realisasi kinerja 100%, Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dapat disediakan sebanyak 6 (enam) dokumen dari rencana dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun sebanyak 6 (enam) dokumen yaitu (IKPLHD, RPPLH, KLHS RDTR 3 kecamatan, dan kajian sungai)

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan **indikator**:

1) Persentase Limbah B3 yang terkelola dengan target 73%, dapat tercapai 71,40%, dengan realisasi Kinerja 97,8%. Tahun 2022 jumlah Limbah B3 yang dapat terkelola sebesar 4.284.324 kg, dibanding potensi Limbah B3 yang diperkirakan sebesar 6.000.000 kg, belum tercapainya persentase Limbah B3 yang terkelola disebabkan beberapa faktor antara lain masih ada usaha dan atau kegiatan yang belum secara rutin mengirimkan laporan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan, adanya usaha dan/ atau kegiatan yang beralih menggunakan sumber energi non batubara sehingga tidak lagi mengelola Limbah B3 (batubara).

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan **indikator**:

1) Persentase aduan lingkungan hidup yang ditangani dengan target 100%, dapat tercapai 100% dengan realisasi kinerja 100%. Pada tahun 2022 terdapat 13 aduan yang masuk dan teregisterasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. Dari total 13 aduan tersebut, semua telah ditangani dan ditindaklanjuti. Artinya 100% aduan yang dilaporkan pada Dinas Lingkungan Hidup telah ditangani dan ditindaklanjuti.

   Anggaran yang disediakan untuk 3 (tiga) program) tersebut di atas sebesar Rp. 2.006.800.000,- dan terealisasi Rp. 1.834.015.430,- dengan capaian 91,39% dengan efesiensi sebesar Rp. 172.784.570,- . Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Dinas Lingkungan Hidup memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan dalam diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa kendaraan dinas operasional,

peralatan kerja (komputer, laptop, printer), internet, alat tulis kantor, dan lain-lain telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah

3. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas udara

Capaian Indeks Kualitas Udara sebesar 84,00 dari target 87,40 atau sebesar 96,11% kategori sangat tinggi. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, Indeks Kualitas Udara tahun 2022 sebesar 95,99%. Dibandingkan dengan realisasi nasional tahun 2022, Indeks Kualitas Udara tahun 2022 sebesar 95,39%. Peningkatan capaian tahun-tahun berikutnya untuk mencapai target akhir tahun perencanaan perlu upaya yang sungguh-sungguh.

Indeks Kualitas Udara (IKU) didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan. Udara merupakan campuran berbagai macam komponen gas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta karbondioksida 0,035%. Udara yang mempunyai kandungan tersebut tergolong dalam udara bersih. Sementara udara yang tercemar mempunyai kadar bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun padat melebihi yang terdapat di lingkungan alam.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Indeks Kualitas Udara tahun 2022 tercapai nilai 84,18 dari target yang ditetapkan sebesar 87,40. Artinya pada tahun 2022 capaian realiasasi Indeks Kualitas Udara mencapai 96,76%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 3,99 (4,5%), dari tahun 2021, dimana realisasi tahun 2021 mencapai 88,17.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD (87,51) maka indikator Indeks Kualitas Udara mengalami progres sebesar 96,19 sampai akhir tahun 2022. Sedangkan jika dibandingkan dengan Indeks Kualitas Udara secara nasional (88,06), maka Kabupaten Boyolali memiliki angka yang lebih rendah dengan selisih sebesar 3,88.

Perkembangan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun nilainya fluktuatif (mengalami kenaikan dan penurunan), sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.2. Perkembangan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Boyolali tahun 2017-2022

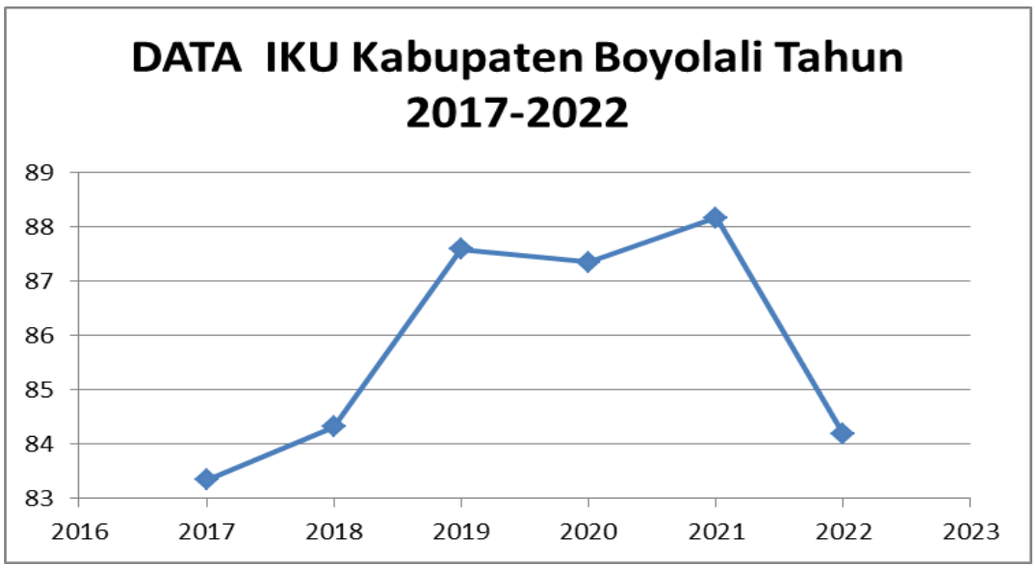

Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah sebagai berikut:

1) lokasi atau titik koordinat pemantauan kualitas udara. Lokasi pemantauan udara sangat berpengaruh terhadap hasil kualitas udara yang dipantau. Pemilihan lokasi akan semakin baik apabila dapat menggambarkan kondisi wilayah yang diukur secara keseluruhan. Lokasi pemantauan kualitas udara di Kabupaten Boyolali dilakukan di 3 area yang berbeda yang mewakili area transportasi, area pemukiman, dan area industri;
2) pemberian informasi dan penyuluhan yang masif dilakukan.
   Aktivitas manusia (faktor antropogenik) yang berperan sebagai sumber pencemar udara yang dapat berpotensi mempengaruhi kualitas udara. Sumber pencemar udara secara umum terdiri atas sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Sumber bergerak terkait dengan kegiatan transportasi yang menggunakan bahan bakar minyak. Sementara, sumber tidak bergerak terkait dengan pembakaran bahan bakar industri untuk proses industry; dan
3) pembaharuan dan penggunaan teknologi baru di bidang pertanian, seperti penggunaan dari pupuk yang terlalu berlebihan menyebabkan gas amonia dan NH_3 yang terkandung dalam pupuk keluar ke atmosfer sehingga dapat menyebabkan dampak yang signifikan terhadap kualitas udara. Selain pertanian, sektor domestik juga dapat menjadi faktor yang tidak kalah penting sebagai penyebab penurunan kualitas udara, aktivitas seperti pembakaran sampah

rumah tangga serta asap rokok dalam jumlah yang besar dapat berpengaruh terhadap kualitas udara.

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. penentuan lokasi pemantauan kualitas udara yang representatif. Hal ini mengingat luasan Kabupaten Boyolali dengan persebaran tingkat polusi yang berbeda-beda;
2. masih adanya oknum pelaku usaha atau masyarakat yang memiliki kesadaran rendah terhadap upaya menjaga lingkungan hidup; dan
3. laju pertumbuhan Ruang Terbuka Hijau yang tidak dapat megimbangi area yang terpapar polusi udara. Salah satu faktor penyebab meningkatnya polusi udara adalah bidang transportasi. Semakin tingginya penggunaan kendaraan bermotor yang berdampak terhadap semakin buruknya kualitas udara yang dihasilkan.

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

1. melakukan peninjauan ulang terhadap lokasi pemantauan kualitas udara. Selain menggunakan faktor-faktor yang telah dipakai selama ini, akan lebih baik juga mempertimbangkan aspek lain seperti meteorologi, geografi, dan tata guna lahan dalam melakukan perencanaan dan penentuan titik pemantauan;
2. melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait pentingnya upaya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara dalam mendukung upaya kelestarian lingkungan; dan
3. melakukan upaya untuk meningkatkan jumlah tanaman hijau di daerah polusi udara tinggi seperti area industri dan transportasi, mengingat salah satu kegunaan tumbuhan adalah sebagai indikator pencemaran dini, selain sebagai penjerap debu dan bahan partikel lain (PM10 & PM 2,5).

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama meningkatnya kualitas udara, dilaksanakan melalui program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan:

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
   - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan
   - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator:

1. persentase sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu (SO_2 dan NO_2) dengan target 100%, dapat tercapai 100% dengan realisasi kinerja 100%, berdasarkan hasil uji kualitas udara ambien yang dilakukan terhadap titik/lokasi pantau sebanyak 26 (dua puluh enam) sampel yang meliputi kawasan perkantoran, perumahan, lingkungan sekitar industri dan transportasi, parameter SO_2 dan NO_2, semua masih dibawah baku mutu yang ditentukan;
2. persentase sumber emisi yang memenuhi baku mutu dengan target 93%, dapat tercapai 86%, dengan realisasi kinerja 92,47%; dan
3. persentase Kampung Iklim yang terfasilitasi, dengan target 56% (28 kampung iklim dari 50 kampung iklim), dapat tercapai 62% atau sebanyak 31 kampung. Oleh karena itu realisasi kinerja pada fasilitasi kampung iklim pada tahun 2022 sebanyak 110,7%. Target penambahan kampung iklim pada tahun 2022 sebanyak 6 (enam) lokasi, dapat terealisasi 9 (sembilan) lokasi. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target tidak lepas adanya dukungan dari mitra kerja (perusahaan) dengan CSRnya yang berperan serta menjadi fasilitator terbentuknya kampung iklim di 3 (tiga) lokasi, sehingga jumlah kampung iklim yang sudah terfasilitasi sampai dengan tahun 2022 sebanyak 31 lokasi kampung iklim. Target pada akhir RPJMD adalah 50 kampung iklim, artinya sampai akhir tahun 2022 sudah tercapai 62%.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 453.000.000,- dan terealisasi Rp. 365.121.730,- dengan capaian 80,6% atau efesiensi anggaran sebesar Rp. 87.878.270,-. Yang sangat menarik pada pelaksanaan program ini adalah keterlibatan/ kerja sama dengan stakeholder lain dalam upaya pembinaan dan penyuluhan lingkungan hidup serta fasilitasi pemenuhan sarapa prasarana serta swadaya masyarakat yang jika diuangkan nilaian sangat besar. Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali melakukan pembinaan melalui pembinaan pegawai, mengikutkan pada diklat ataupun bimtek. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa kendaraan dinas operasional, peralatan kerja (komputer, laptop, printer), internet, alat tulis kantor, dan lain-lain telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah

4. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas tutupan lahan

Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 38,71 dari target 41,00 atau sebesar 94,41% kategori sangat tinggi. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2022 sebesar 94,39%. Dibandingkan dengan realisasi nasional tahun 2022, Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2022 sebesar 65,75%. Peningkatan capaian tahun-tahun berikutnya untuk mencapai target akhir tahun perencanaan perlu upaya yang sungguh-sungguh. Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan termasuk indikator yang kurang sensitif terhadap perubahan. Untuk mencapai target nasional sangat sulit diwujudkan, sehingga sesuai situasi dan kondisi target RPJMD lebih realistis untuk dicapai.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Lahan (ITL) yang digunakan sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Penyempurnaan metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan).

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indikator Indeks Kualitas Lahan tahun 2022 tercapai sebesar 38,71 dari target yang telah ditetapkan sebesar 41,00. Artinya pada tahun 2022 realiasai Indikator Indeks Kualias Lahan sebesar 94,41%. Angka tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan dari capaian tahun 2021, dimana realisasi tahun 2021 sebesar 38,71. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka Indikator Indeks Kualitas Lahan mengalami progres sebesar 94,39%

Sedangkan jika dibandingkan dengan Indeks Kualitas Lahan secara nasional maka Kabupaten Boyolali lebih Rendah yaitu selisih sebesar 12,01 dalam hal ini realisasi nasional sebesar 60,72. Perkembangan Indeks Kualitas Lahan dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.3 : Perkembangan Indeks Kualtas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2022

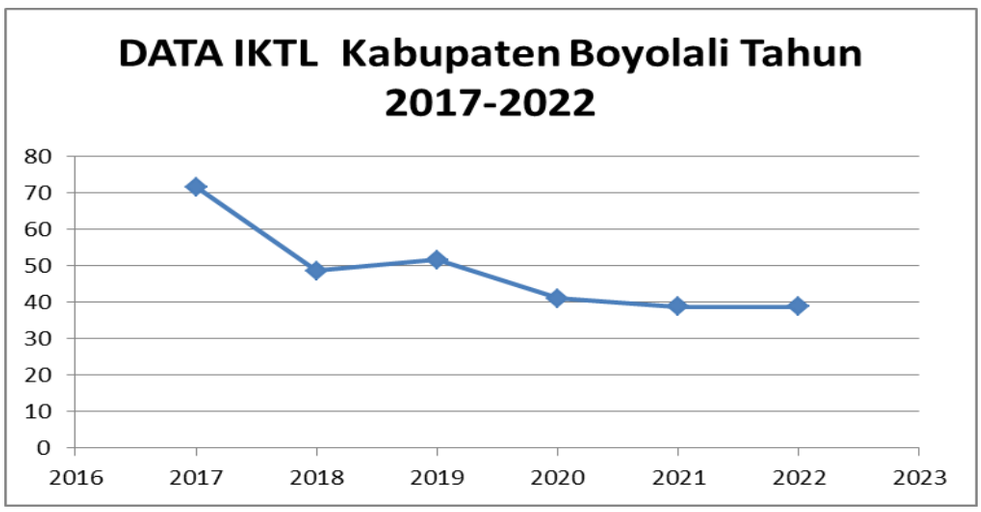

Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya upaya dari berbagai pihak dalam pelestarian lingkungan melalui pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan pihak-pihak lain terus dilakukan secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kegiatan seperti ini harus terus dilakukan mengingat upaya pelestarian lingkungan merupakan kewajiban setiap orang;
2. komunikasi yang telah terjalin baik antara Dinas Lingkungan Hidup dengan stakeholder lain yang berdampak pada lancarnya pelaksanaan kegiatan. Ataupun pada saat muncul permasalahan, maka akan semakin cepat teratasi. Saat ini penggunaan teknologi informasi sangat membantu dalam proses pembangunan komunikasi dengan stakeholder yang lain;
3. tersedianya data yang memadai sebagai salah satu acuan dalam penetapan kebijakan merupakan faktor penting untuk bisa merumuskan kebijakan yang tepat; dan
4. gerakan atau aksi pelestarian lingkungan yang semakin banyak dilakukan oleh berbagai pihak.

Semakin banyak pihak yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini tercermin dari banyaknya pihak yang bersurat kepada DLH untuk berkolaborasi dalam upaya pelastarian lingkungan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain gerakan menanam pohon, gerakan pilah sampah, gerakan bersih sungai, gerakan pelestarian mata air, dll. Kegiatan-kegiatan ini baik langsung ataupun tidak langsung telah berdampak terhadap kondisi tutupan lahan di Kabupaten Boyolali.

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. faktor cuaca yang tidak menentu sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tutupan lahan adalah faktor alam, dalam hal ini adalah kondisi cuaca di Kabupaten Boyolali. Kondisi cuaca pada tahun 2022 bisa dikatakan mengalami anomali. Anomali yang terjadi berupa sering munculnya kondisi cuaca ekstrem seperti hujan disertai angin dan badai. Kejadian ini terjadi secara acak, sehingga memberikan dampak berupa kerusakan pada lahan dan hutan;
2. masih ada kelompok masyarakat yang belum tergugah kesadaran akan pelestarian lingkungan. Sehingga banyak program yang berkaitan pelestarian lingkungan pada akhirnya tidak disetujui atau kurang mendapatkan respon dari masyarakat;
3. banyak lahan terbuka yang belum terkelola dengan baik. Dampaknya tidak hanya mengurangi tutupan lahan hijau, tapi juga menimbulkan timbunan sampah; dan
4. masih adanya vandalis di lingkungan yang telah terbangun. Sarana dan prasarana untuk optimalisasi Ruang Terbuka Hijau yang telah dibangun tidak lepas dari aksi vandalisme. Dampaknya muncul area yang justru kumuh dan terkesan tidak terawat. Hal ini mengakibatkan kurang terpeliharanya sarana-prasarana termasuk tegakan yang difungsikan untuk menambah tutupan lahan hijau.

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

1. penyesuaian perencanaan dengan kondisi yang dihadapi.

   Menghadapi tantangan berupa kondisi cuaca yang dinamis, diperlukan perencanaan yang adaptif juga. Monitoring dan evaluasi harus selalu dilaksanakan untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi di luar perencanaan. Jika kondisi seperti cuaca memang tidak dapat

diubah maka perlu penjadwalan ulang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, sehingga tetap mencapai target yang telah ditentukan.

2. pembinaan, pendampingan dan sosialisasi terkait upaya pelastarian lingkungan harus selalu dilaksanakan, hal ini untuk terus menumbuhkembangan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam pelestarian.
3. perlu adanya peraturan-peraturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Selain untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan, hal ini juga bermanfaat untuk menghindari kerusakan.
4. perlu adanya penguatan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang vandalisme

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama Indeks Kualitas Lahan, dilaksanakan melalui program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dan sub kegiatan:

1. Pengelolaan Kebun Raya;
2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
3. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya; dan
4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati.

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan **indikator**:

1) Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan/ ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan, dengan target 34,382% dapat tercapai 34,569%% dengan realisasi kinerja 100,5%. Luas RTH Publik wilayah perkotaan yang seharusnya tersedia adalah 4.378 ha. (Perda perubahan Tata Ruang), sedangkan luas RTH publik wilayah perkotaan saat penyusunan Renstra/RPJMD adalah 1503,735 Ha atau 34,348. Pada tahun 2022 ada penambahan RTH publik wilayah perkotaan seluas 15.249,88 m2 (1,524988 Ha.) yaitu eks pasar Mojosongo (2.861 m2), sepanjang depan DLH (3.286 m2) , RTH eks pasar Cepogo 8.252,68 m2 dan taman Median interchange exit tol 850,2 m2 sehingga total luas RTH Publik wilayah perkotaan sampai dengan tahun 2022 adalah 1.513,45499 Ha atau 34,569% dari luas RTH Publik wilayah kawasan perkotaan yang seharusnya tersedia. (catatan : Luas RTH Publik perkotaan tahun 2021 sesuai dokumen IKPLHD adalah 1.511,93 Ha.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 12.845.000.000,- dan terealisasi Rp. 12.532.404.675,- dengan capaian 97,57% atau efesiensi sebesar Rp. 312.595.325,-. Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Dinas Lingkungan Hidup memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa kendaraan dinas operasional, peralatan kerja (komputer, laptop, printer), internet, alat tulis kantor, dan lain-lain telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah

5. Sasaran 5 : Meningkatnya penanganan/ pengelolaan sampah

Capaian Persentase sampah yang tertangani/ terkelola sebesar 56,64% dari target 55% atau sebesar 102,98% kategori sangat tinggi. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, Persentase sampah yang tertangani/ terkelola tahun 2022 sebesar 85,82%. Dibandingkan dengan realisasi nasional tahun 2022, Persentase sampah yang tertangani/ terkelola tahun 2022 sebesar 87,62%. Peningkatan capaian tahun-tahun berikutnya untuk mencapai target akhir tahun perencanaan perlu upaya yang sungguh-sungguh.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sampah yang terkelola tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 56,64% dari target sebesar 55% terealisasi sebesar 102,84%. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 0,9%, dimana realisasi tahun 2021 adalah sebesar 54,15%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sebesar 66 %, maka capaian tahun 2022 mengalami progres sebesar 85,69%. Sedangkan jika dibandingkan dengan sampah yang terkelola secara nasional maka Kabupaten Boyolali lebih rendah yaitu sebesar 8,08 dalam hal ini realisasi nasional sebesar 64,64%. Perkembangan sampah yang terkelola dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.4 : Perkembangan Realisasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 – 2022

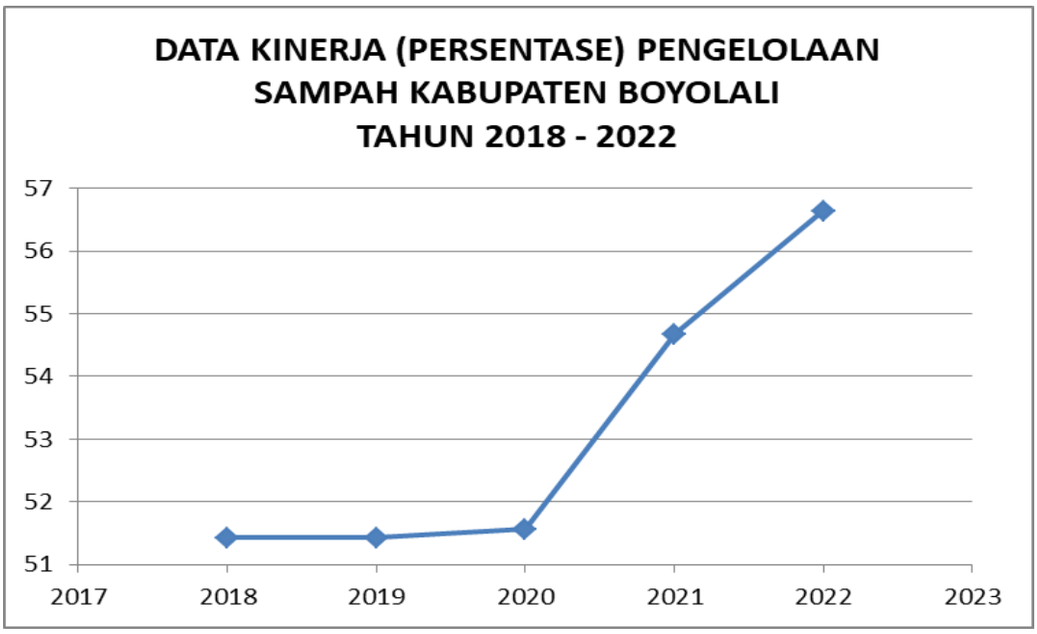

Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target Indikator Persentase sampah yang tertangani/ terkelola adalah sebagai berikut:

1) adanya komitmen dan kesungguhan terhadap upaya membangun sistem ketatakelolaan pemerintahan yang baik (*Good governance*), termasuk dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat dan teduh di lingkungan sekolah;
2) adanya komitmen dan kesungguhan pemerintah dan warga masyarakat dalam upaya membangun dan mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat dengan pengelolaan sampah berbasis 3R;

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

1) masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat;
2) masih rendahnya kesadaran masyarakat dan sekolah untuk melakukan pemilahan sampah dari sumbernya (sampah rumah tangga); dan
3) keterbatasan Sumber Daya Manusia di pemerintahan terkait dengan pengumpulen data sampah se- Kabupaten Boyolali

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

1) melakukan pembinaan maupun sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah tentang pentingnya memilah sampah, diawali dengan memilah sampah yang berasal dari sumbernya dengan berbasis 3R;
2) meningkatkan SDM pemerintah yang terlibat dalam pembinaan pengelolaan sampah guna meningkatkan kualitas SDM dengan cara Diklat formal di luar daerah, studi banding ke daerah lain, maupun konsultasi ke DLHK Provinsi Jawa Tengah;
3) melibatkan komunitas/ pegiat lingkungan dalam berbagai dalam rangka upaya penanganan dan penguranagn sampah antara lain paguyuban pemulung TPA (Sayuk Rukun), paguyuban pemulung TPS (Guyub Rukun), kelompok Hompimpah, kelompok WCD (*world Clean Day*), Ibu Sri Rahayu (Bank Sampah Melati), Pak Setiyo dan pak Widiayanto (Kelompok Tani Hutan Agni Mandiri) dan lain-lain;
4) melakukan koordinasi dan komunikasi membangun kesepahaman dan kesinergisan langkah terkait dalam pengelolaan sampah melalui sistem bank sampah dengan Dinas Kesehatan.

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama **Meningkatnya penanganan/ pengelolaan sampah**, dilaksanakan melalui program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan Pengelolaan Sampah dan sub kegiatan:

1) pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali;
2) peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
3) koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan; dan
4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Persampahan dengan **indikator**:

1) persentase cakupan area pelayanan sampah, dengan target 20,75% dapat tercapai 28,24% dengan realisasi kinerja 136 %, (data base awal tahun 2020 Luas area pelayanan pengelolaan sampah 76,5 km2 meliputi Kec. Boyolali dan Mojosongo dari luas area Kabupaten yaitu 1015,10 km^2), pada tahun 2022 luas area pelayanan sampah bertambah 210,129 km2 yang meliputi beberapa bagian wilayah

kecamatan yaitu Boyolali, Mojosongo, Teras, Banyudono, Sawit, Ngemplak, Nogosari, Ampel, Gladagsari, Cepogo, Musuk, Sambi, Andong dan Selo, sehingga total luas area pelayanan sampah adalah 286,629 km^2 atau 28,24% dari wilayah kabupaten; dan

2) persentase sampah yang dikelola dengan 3R, dengan target 26%, dapat tercapai 28% dengan realisasi kinerja 107,69%. Pengelolaan sampah dengan kegiatan 3R melalui bank sampah, PDU, kompos, TPS3R, dll yang tidak diangkut ke TPA), dengan formulasi Sampah yang terkurangi melalui kegiatan 3R/ jumlah timbulan sampah) *100%.

Dari sisi pembiayaan disediakan anggaran sebesar 8.420.379.000,- dan terealisasi 8.127.233.320,- dengan capaian 96,52 % atau efesiensi anggaran sebesar Rp 293.145.680,-. Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Dinas Lingkungan Hidup memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa kendaraan dinas operasional, peralatan kerja (komputer, laptop, printer), internet, alat tulis kantor, dan lain-lain telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah

6. Sasaran 6 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah

Capaian nilai SAKIP DLH sebesar 82,05 dari target 82,25 atau sebesar 99,76% kategori sangat tinggi. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, Nilai SAKIP DLH sebesar 96,53%. Dibandingkan dengan realisasi nasional tahun 2022, Nilai SAKIP DLH sebesar 96,25%. Jika dibandingkan dengan Nilai SAKIP Perangkat Daerah tertinggi Kabupaten Boyolali, Nilai SAKIP DLH lebih rendah yaitu selisih sebesar 3,20 dalam hal ini realisasi nilai SAKIP tertinggi di Kabupaten Boyolali sebesar 85,25

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai SAKIP DLH tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,76 % dari target sebesar 82,25 terealisasi sebesar 82,05. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 0,17 %, dimana realisasi tahun 2021 adalah sebesar 81,91. Perkembangan Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, yaitu:

2020 (81,56), 2021 (81,91), 2022 (82,05) dengan predikat A. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.5 : Perkembangan Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2022

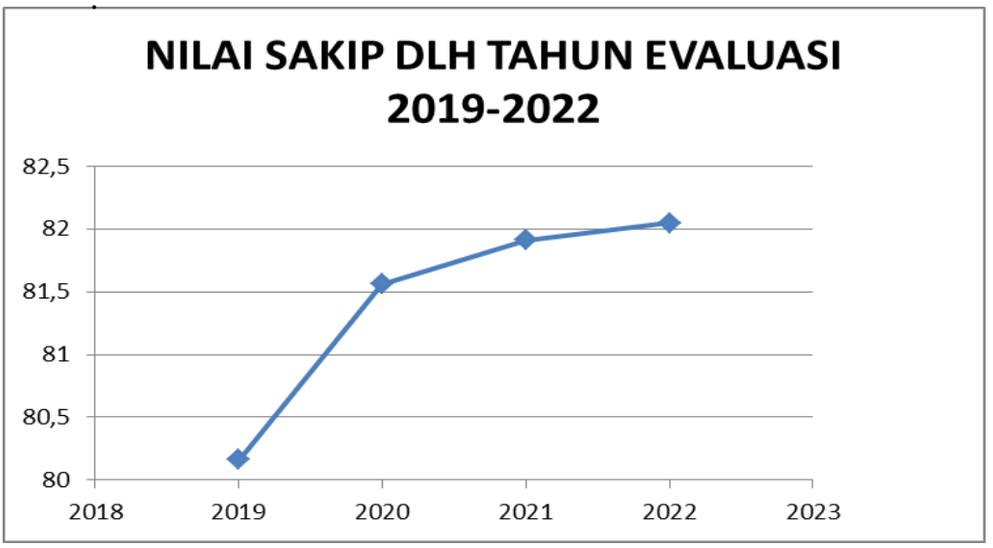

Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. adanya dokumen perencanaan baik jangka menengah (renstra) maupun jangka pendek/tahunan (renja) sebagai acuan pelakanaan program, kegiatan, sub kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja utama;
2. adanya dukungan dan koordinasi antara pihak terkait dalam penyusunan laporan sebagai bahan penilaian SAKIP sehingga terwujud sinergitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
3. adanya dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam pencapaian target kinerja; dan
4. evaluasi yang dilakukan oleh APIP sebagai acuan untuk peningkatan kinerja.

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. meskipun telah ada dokumen perencanaan jangka menengah, jangka pendek, namun masih ada sebagian yang kurang mendukung secara langsung terhadap pencapaian kinerja
2. masih ada beberapa ketidakseimbangan (terutama terkait anggaran) dengan kebutuhan, di satu sisi ada yang berlebih, di sisi lain masih ada yang kurang jika dibanding dengan kebutuhan.

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

1. dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan yang belum mendukung pencapaian kinerja secara langsung; dan
2. dilaksanakan pencermatan terhadap hal tersebut agar perencanaan ke depan lebih baik, sehingga semua kebutuhan untuk menunjang kegiatan dapat terakomodir.

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama Nilai SAKIP DLH, dilaksanakan melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   f. Penyediaan Bahan/Material;
   g. Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan
   h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; dan
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja ”Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar”, target kinerja 100% dapat tercapai

100% dengan realisasi kinerja 100%. Artinya seluruh penunjang pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup berupa sarana prasarana, administrasi perencanaan, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan layan umum lainnya dapat dipenuhi, sehingga semua program/kegiatan dapat terlaksana. Sedangkan dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 15.622.154.000,- dapat terealisasi Rp. 15.217.892.399,- atau sebesar 97,41 % , dengan penghematan sebesar Rp. 404.261.601,-.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Dinas Lingkungan Hidup memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa kendaraan dinas operasional, peralatan kerja (komputer, laptop, printer), internet, alat tulis kantor, dan lain-lain telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah

2. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2023

Anggaran belanja DLH tahun 2023 (murni) sebesar Rp. 36.064.431.000,- yang terinci dalam 8 (delapan) program dan 13 (tigabelas) kegiatan dengan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan, capaian progress sampai dengan bulan Juni 2023 adalah 32,6 % dari target yang ditetapkan 35,6 %, sedangkan untuk realisasi keuangan yaitu sebesar Rp. **8.685.446.783**,- atau 24,08 %, hal ini dikarenakan sebagian besar masih pada tahap persiapan awal pelaksanaan kegiatan sehingga belum begitu besar capaiannya.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023, ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya, sebagai berikut:

a. Upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan belum sepenuhnya menjadi prioritas utama dalam usaha dan/ atau kegiatan, hal ini disebabkan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan yang masih rendah dan adanya paradigma mengelola lingkungan adalah beaya, sehingga muncul anggapan permasalahan lingkungan kurang penting dan keengganan sebagian masyarakat untuk mengelola lingkungan;
b. Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat masih mengalami beberapa hambatan/kendala; dan
c. Perencanaan program/kegiatan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali masih berorientasi terhadap *output* bukan *outcome,* sehingga pelaksanaan evaluasi tidak optimal yang berdampak pada keterlambatan akan data dan informasi tentang perencanaan pembangunan secara keseluruhan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali tahun 2021 - 2026, maka pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali menyusun strategi sebagai berikut :

1. peningkatan kualitas perencanaan lingkungan hidup;
2. penguatan orientasi perusahaan yang menerapkan *green company, green strategy, green process, green product, green employee*;
3. peningkatan ketaatan pelaku usaha dan/ kegiatan dalam pengelolaan air limbah;
4. optimalisasi penanganan limbah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
5. optimalisasi layanan pengaduan lingkungan hidup;
6. peningkatan kualitas udara ambien;

7. peningkatan ketaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan terhadap baku emisi/ kualitas udara;
8. Peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian dampak perubahan iklim;
9. inventarisasi aset/lahan milik pemkab yang bisa dialihfungsikan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik;
10. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana persampahan;
11. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang 3R; dan
12. Peningkatan fasilitasi perangkat daerah dalam mengimplementasikan SAKIP.

Sedangkan arah kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pendampingan, Pembinaan dan Pengawasan dalam proses pemberian Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
2. Peningkatan Komunikasi dan pendampingan terhadap perusahaan guna mencapai *green company*, *green strategy*, *green process*, *green product*, dan *green employee*;
3. Peningkatan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha dan/ kegiatan dalam pengelolaan air limbah;
4. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dan/ kegiatan dalam pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3)dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbahB3);
5. Peningkatan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup;
6. Peningkatan Pelayanan terhadap Pengaduan Lingkungan Hidup;
7. Peningkatan Pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/ atau kegiatan terkait pengendalian kualitas udara ambien;
8. Peningkatan Pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/ atau kegiatan terkait pengendalian kualitas udara emisi;
9. Peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya pengendalian dampak perubahan iklim;

10. Peningkatan ketersediaan luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan;
11. Peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana prasarana persampahan;
12. Peningkatan layanan persampahan;
13. Peningkatan pembinaan/pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan 3R; dan
14. Peningkatan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

A. Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali merupakan unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 119), bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, dan bidang pekeijaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang suburusan persampahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan

ruang sub urusan persampahan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16), sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali. Dan sesuai dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 119), Dinas Lingkungan Kabupaten Boyolali dengan susunan sebagai berikut :

1) Kepala;
2) Sekretariat;
2) Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
3) Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
4) Bidang Pengelolaan Ruang Keanekaragaman Hayati;
5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
6) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7) Unit Pelaksana Teknis.

Berikut uraian struktur organisasi :

1. Sekretariat yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan DLH terdiri dari:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Keuangan; dan
   c. Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan (JF)
2. Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan bidang tata lingkungan dan penaatan lingkungan hidup dengan sub koordinator :
   1) sub koordinator Perencanaan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
   2) sub koordinator Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
   3) sub koordinator Penaatan Lingkungan Hidup.
3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pen3aisunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan bidang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dengan sub koordinator:
   1) sub koordinator Pengelolaan Sampah;
   2) sub koordinator Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Sampah; dan
   3) sub koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
4. Bidang Pengelolaan Ruang Keanekaragaman Hayati yang mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan bidang pengelolaan ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati dengan sub koordinator:
   1) sub koordinator Penataan Ruang Terbuka Hijau;

2) sub koordinator Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau; dan
3) sub koordinator Pengelolaan Sarana Prasarana Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman Hayati.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun yang mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun dengan sub koordinator:
   1) sub koordinator pengendalian Pencemaran dan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun;
   2) sub koordinator pengendalian kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup; dan
   3) sub koordinator Pemantauan Kualitas dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
6. UPT Kebun Raya yang mempunyai tugas melaksanakan konservasi Ex Situ tumbuhan dataran rendah Jawa Bagian Timur;
7. UPT Pengelolaan Sampah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam urusan pemrosesan akhir sampah di Daerah.

3. Kajian Atas Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan PP 65 tahun 2005 terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan minimal yang harus diberikan sesuai dengan kewenangannya dibidang Lingkungan Hidup. Terkait dengan jenis dan mutu pelayanan dasar dalam penyediaan aksesibilitas transportasi yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Ket
			Indikator	Nilai	
1.	Lingkungan Hidup	a. Pelayanan Pencegahan pencemaran air	1) Cakupan jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati peryaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran	100%	2015
		b. Pelayanan Pencegahan pencemaran udara	1) Cakupan jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati peryaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran	100%	2015
		c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produk biomassa	1) Prosentase Luasan kerusakan lahan dan atau tanah untuk produk biomassa yang diinformasikan.	100%	2015
		d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan	1) Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan yang tertangani	100%	2015

Berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah daerah capaian kinerja dengan 4 (empat) Indikator kinerja tersebut, sampai dengan posisi per 31 Desember 2015 rata-rata telah tercapai sebesar 100 %. Dengan adanya tambahan kewenangan di Dinas Lingkungan Hidup yaitu bidang kebersihan/ persampahan, terdapat standar pelayanan minimal yang sebelumnya ada di DPU Cipta Karya yang selanjutnya penanganan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu sebagai berikut :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	persentase pengurangan sampah di perkotaan			3		-	-	2,35		-	-	
2	persentase pengangkutan sampah			12,96			-	13,84			-	
3	persentase pengoperasian TPA			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Persentase peningkatan perusahaan yang ramah lingkungan		V		100%	100%	100%	-	97%	100%	100%	
	Indeks Kualitas Air		V		58,00	58,92	59,04	-	48,42	58,92	59,04	
	Indeks Kualitas Udara		V		87,40	87,43	87,45		84,00	87,43	87,45	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		V		41,00	41,00	41,01		38,71	41,00	41,01	
	Persentase sampah yang tertangani/ terkelola		V		55%	57%	60%		56,64%	57%	60%	

Berdasarkan hasil analisa Tabel T-C.30 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan periode akhir SPM pada tahun 2019.

a. Indikator persentase pengurangan sampah di perkotaan, dengan target akhir periode Renstra/RPJMD Tahun 2016-

2021 adalah 19,73 % (Target SPM Nasional 20%). Dari perhitungan realisasi pada setiap tahun secara akumulasi, capaian pada akhir tahun 2021 adalah sebesar 19,73% atau 100% dari yang telah ditargetkan pada Renstra/RPJMD Tahun 2016-2021;

b. persentase pengangkutan sampah dengan target akhir periode Renstra/RPJMD Tahun 2016-2021 adalah 69,3 % (Target SPM Nasional 70%). Dari perhitungan realisasi pada setiap tahun secara akumulasi, capaian pada akhir tahun 2021 adalah sebesar 69,26% atau hamper 100% dari yang telah ditargetkan pada Renstra/RPJMD Tahun 2016-2021;
c. persentase pengoperasian TPA dengan target akhir periode Renstra/RPJMD Tahun 2016-2021 (pentargetan akhir tahun 2019) adalah 65,53 % (Target SPM Nasional 70%). Dari perhitungan realisasi pada setiap tahun secara akumulasi, capaian pada akhir tahun 2019 adalah sebesar 60,165% atau 91,8% dari yang telah ditargetkan pada Renstra/RPJMD Tahun 2016-2021.
d. Capaian indikator persentase peningkatan perusahaan yang ramah lingkungan tahun 2022 tercapai sebanyak 97% dari 100% (kategori sangat tinggi) atau dari 210 perusahaan, sebanyak 203 perusahaan yang ramah lingkungan. Indikator ini merupakan indikator kinerja bidang lingkungan hidup sebagai respon terhadap visi dan misi pembangunan daerah yang melanjutkan pro investasi. Secara umum investasi berupa pembangunan usaha dan/atau kegiatan akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga diperlukan upaya-upaya pengendalian sehingga terwujud konsep pembangunan berkelanjutan. Dilihat dari capaian kinerja, sebenarnya hanya perlu peningkatan 3% hingga capaian 100%. Tetapi hal ini cukup sulit terwujud, karena hampir selalu hingga akhir tahun masih ada perusahaan yang bermasalah dan belum selesai memperbaiki kinerja pengelolaan lingkungan hidup
e. Capaian Indeks Kualitas Air sebesar 48,42 dari target 58,00 atau sebesar 83,53% kategori tinggi. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, Indeks Kualitas Air tahun 2022

sebesar 81,68%. Dibandingkan dengan realisasi nasional tahun 2022, Indeks Kualitas Air tahun 2022 sebesar 89,87%. Peningkatan capaian tahun-tahun berikutnya untuk mencapai target akhir tahun perencanaan perlu upaya yang sungguh-sungguh

f. Capaian Indeks Kualitas Udara sebesar 84,00 dari target 87,40 atau sebesar 96,11% kategori sangat tinggi. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, Indeks Kualitas Udara tahun 2022 sebesar 95,99%. Dibandingkan dengan realisasi nasional tahun 2022, Indeks Kualitas Udara tahun 2022 sebesar 95,39%. Peningkatan capaian tahun-tahun berikutnya untuk mencapai target akhir tahun perencanaan perlu upaya yang sungguh-sungguh
g. Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 38,71 dari target 41,00 atau sebesar 94,41% kategori sangat tinggi. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2022 sebesar 94,39%. Dibandingkan dengan realisasi nasional tahun 2022, Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2022 sebesar 65,75%. Peningkatan capaian tahun-tahun berikutnya untuk mencapai target akhir tahun perencanaan perlu upaya yang sungguh-sungguh. Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan termasuk indikator yang kurang sensitif terhadap perubahan. Untuk mencapai target nasional sangat sulit diwujudkan, sehingga sesuai situasi dan kondisi target RPJMD lebih realistis untuk dicapai
h. Capaian Persentase sampah yang tertangani/ terkelola sebesar 56,64% dari target 55% atau sebesar 102,98% kategori sangat tinggi. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, Persentase sampah yang tertangani/ terkelola tahun 2022 sebesar 85,82%. Dibandingkan dengan realisasi nasional tahun 2022, Persentase sampah yang tertangani/ terkelola tahun 2022 sebesar 87,62%. Peningkatan capaian tahun-tahun berikutnya untuk mencapai target akhir tahun perencanaan perlu upaya yang sungguh-sungguh

2.3. ISU - ISU PENTING DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Isu – isu dalam penyelengaraan tugas dan fungsi adalah sekrepsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap sasaran strategis. Isu strategis dalam perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup secara umum tidak mengalami perubahan yang significan, masih dihadapkan pada permasalahan pencemaran, kerusakan dan perubahan iklim, khususnya untuk mewujudkan fungsi pelayanan umum dalam rangka mengoptimalkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi :

a) Pencemaran lingkungan (udara, air, tanah, sampah, B3) terutama yang bersumber dari industri dan jasa, sektor rumah tangga (limbah domestik), dan sektor transportasi;
b) Kerusakan Lingkungan;
c) Alih fungsi lahan;
d) Perubahan iklim, fenomena Gas Rumah Kaca (GRK); dan
e) Pembangunan Kebun Raya Indrokilo Boyolali (KRIB).

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dengan mempertimbangkan isu~isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dipengaruhi oleh faktor SDM dan sarana prasarana. Kebijakan penting yang ditempuh untuk mengatasi isu/ faktor utama tersebut antara lain :

1. Peningkatan pengendalian terhadap tingkat pencemaran melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan, pembangunan IPAL, penyediaan sarana dan prasarana persampahan, pengendalian perizinan dll.
2. Peningkatan pengendalian terhadap kerusakan lingkungan melalui kegiatan penanaman, pembuatan sumur resapan, biopori penyusunan peta kerusakan lahan, pengendalian perizinan dll.
3. Peningkatan pengendalian terhadap alih fungsi lahan (pertanian) menjadi lahan non produktif melalui penyusunan KLHS Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan.
4. Peningkatan antisipasi terhadap dampak perubahan iklim, melalui pembentukan kampung iklim, kegiatan penanaman, pembinaan dan penyuluhan, pembuatan IPAL dll.

5. Percepatan pembangunan pendukung Kebun Raya Indrokilo Boyolali dengan melibatkan instansi terkait.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.

Dari hasil evaluasi terhadap capaian target dalam RKPD/Renja tahun 2022 maupun terhadap capaian kinerja dalam RPJMD, beserta kerangka pendanaan bidang lingkungan hidup, sebagaimana dirumuskan dalam prioritas pembangunan daerah yang terdapat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali 2016-2021.

Dan juga prioritas pembangunan daerah tahunan sebagai pedoman dan arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. yang akan dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD, indikator kinerja kunci yang mengacu pada indikator RPJMD, SPM serta indikator Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis PP 8 Tahun 2008.

Secara umum terhadap usulan program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali telah *sesuai* dengan prioritas pembangunan (rencangan awal RKPD) beserta target yang akan dicapai pada Tahun 2024, sebagaimana terlihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

	Rancangan Awal					**Hasil Analisa Kebutuhan**					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sasaran 1		**Persentasi peningkatan perusahaan yang ramah lingkungan**	**100**				**Persentasi peningkatan perusahaan yang ramah lingkungan**	**100**		
	Program					**Program**					
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Boyolali	Persentase persetujuan lingkungan yang dikeluarkan bagi aktivitas investasi yang sesuai standar	100	161.750	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Boyolali	Persentase persetujuan lingkungan yang dikeluarkan bagi aktivitas investasi yang sesuai standar	100	161.750	
			Persentase ketaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	66				Persentase ketaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	66		
			Persentase perusahaan yang ramah lingkungan	100				Persentase perusahaan yang ramah lingkungan	100		
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	50	161.750	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	50	161.750	

	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	110	59.650	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	110	59.650	
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	50	102.100	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	50	102.100	
	Sasaran 2		**Indeks Kualitas Air**	**59,04**				**Indeks Kualitas Air**	**59,04**		
	Program					**Program**					
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase perusahaan yang mengelola air limbah sesuai ketentuan	66,00	3.525.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase perusahaan yang mengelola air limbah sesuai ketentuan	66,00	3.525.000	
			Persentase sumber air yang dikonservasi	66,40				Persentase sumber air yang dikonservasi	66,40		
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah kampung iklim yang telah difasilitasi (akumulasi total)/ target tiap tahun 6 lokas	40,00	705.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah kampung iklim yang telah difasilitasi (akumulasi total)/ target tiap tahun 6 lokas	40,00	705.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5,00	280.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5,00	280.000	

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	200.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	200.000	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2	225.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2	225.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah sarana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2 paket	2.820.000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah sarana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2 paket	2.820.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3,00	40.800	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3,00	40.800	
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	10	2.779.200	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	10	2.779.200	
	Program					**Program**					
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang terkelola	77,00	50.000	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang terkelola	77,00	50.000	

	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penyimpanan Sementara Limbah B3		Volume LB3 yang dapat dikelola (kg)	466262 9,26	50.000	Penyimpanan Sementara Limbah B3		Volume LB3 yang dapat dikelola (kg)	466262 9,26	50.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20,00	50.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20,00	50.000	
	Program					**Program**					
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia sebagai dasar penyusunan kebijakan	100,00	245.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia sebagai dasar penyusunan kebijakan	100,00	245.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen Lingkungan Hidup yang tersedia	1,00	65.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen Lingkungan Hidup yang tersedia	1,00	65.000 -	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1,00	65.000 -	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1,00	65.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen kajian Lingkungan Hidup yang tersedia	2,00	180.000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen kajian Lingkungan Hidup yang tersedia	2,00	180.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang Disusun	2,00	150.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang Disusun	2,00	150.000	

	Program					**Program**					
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase aduan lingkungan hidup yang ditangani	100,00	10.350	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase aduan lingkungan hidup yang ditangani	100,00	10.350	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota		Jumlah pengaduan lingkungan hidup/ PPLH yang ditangani	10,00	10.350	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan lingkungan hidup/ PPLH yang ditangani	10,00	10.350	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	10,00	10.350	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	10,00	10.350	
	Sasaran 3		**Indeks Kualitas Udara**	**87,45**				**Indeks Kualitas Udara**	**87,45**		
	Program					**Program**					
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu (SO2 dan NO2)	100,00		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu (SO2 dan NO2)	100,00	100.000	
			Persentase sumber emisi yang memenuhi baku mutu	93,00				Persentase sumber emisi yang memenuhi baku mutu	93,00	0	
			Persentase Kampung Iklim yang terfasilitasi	56,00				Persentase Kampung Iklim yang terfasilitasi	56,00	0-	
	Sasaran 4		**Indeks Kualitas Tutupan Lahan**	**41,01**				**Indeks Kualitas Tutupan Lahan**	**41,01**		
	Program					**Program**					
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan/ ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	34,450	6.241.900	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan/ ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	34,450	6.241.900	

	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Luas RTH Publik wilayah perkotaan/ kawasan Perkotaan yang telah tersedia (ha) (akumulasi)	1508,235	6.241.900	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Luas RTH Publik wilayah perkotaan/ kawasan Perkotaan yang telah tersedia (ha) (akumulasi)	1508,235	6.241.900	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Pengelolaan Kebun Raya		Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kab./ Kota	8,90	761.900	Pengelolaan Kebun Raya		Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	8,90	761.900	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	17,37 ha	3.380.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	17,37 ha	3.380.000	
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya		Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	9,47 ha	1.250.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya		Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	9,47 ha	1.250.000	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	8,00 unit	850.000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	8,00 unit	850.000	
	Sasaran 5		**Persentase sampah yang tertangani/ terkelola**	**60**				**Persentase sampah yang tertangani/ terkelola**	**60**		
	Program					**Program**					
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase cakupan area pelayanan sampah	32,58	5.881.245	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase cakupan area pelayanan sampah	32,58	5.881.245	
			Persentase sampah yang dikelola dengan 3R	28				Persentase sampah yang dikelola dengan 3R	28		
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pengelolaan Sampah		Volume sampah yang dikelola dengan 3R (ton/tahun)	27319	5.881.245	Pengelolaan Sampah		Volume sampah yang dikelola dengan 3R (ton/tahun)	27319	5.881.245	

	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5,00 unit	796.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5,00 unit	796.000	
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kab./Kota untuk Pengelolaan Sampah Kab./Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	8,00 dok	4.613.645	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kab./Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	8,00 dok	4.613.645	
	Pengurangan Sampah melalui Pembatasan timbulan sampah		Jumlah Laporan Hasil kegiatan Pengurangan Sampah melalui Pembatasan timbulan sampah	4,00 lap	175.000	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang, dan Pemanfaatan Kembali		Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	4,00 lap	175.000	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6,00 klmpk	296.600	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6,00 klmpk	296.600	

	Rancangan Awal					**Hasil Analisa Kebutuhan**					Catatn Penting
No	Program/ Kegiatan/ Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sasaran 6		**Nilai SAKIP**	**82,50**				**Nilai SAKIP**	**82,50**		
	Program					**Program**					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100,00	15.893.514	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100,00	15.893.514	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administarsi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	8 keg	13.688.267	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administarsi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	8 keg	13.688.267	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98,00 org/bln	8.958.167	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98,00 org/bln	8.958.167	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00 dok	4.728.100	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00 dok	4.728.100	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00 dok	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00 dok	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12,00 dok	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12,00 dok	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 lap	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 dok	-	

	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1,00 dok	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1,00 dok	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18,00 lap		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18,00 lap		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,00 dok		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,00 dok		
	Kegiatan										
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4,00 keg		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4,00 keg		
	Sub Kegiatan										
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,00 dok		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,00 dok		
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2,00 lap		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2,00 lap		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2,00 lap		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2,00 lap		

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00 lap		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00 lap		
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10,00 keg	1.324.512	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10,00 keg	1.324.512	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00 paket	3.000	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00 paket	3.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4,00 paket	70.650 -	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4,00 paket	70.650 -	
	Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4,00 paket	10.000	Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4,00 paket	10.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00 paket	900.000	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00 paket	900.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4,00 paket	30.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4,00 paket	30.000	
	Penyediaan bahan / Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4,00 paket	30.862	Penyediaan bahan / Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4,00 paket	30.862	
	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,00 lap	150.000	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,00 lap	150.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,00 lap	130.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,00 lap	130.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12,00 dok	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12,00 dok	0	

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12,00 dok	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12,00 dok	0	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,00 keg	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,00 keg	0	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Pengadaan Alat Besar		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0,00 unit	0	Pengadaan Alat Besar		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0,00 unit	0	
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0,00 unit	0	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0,00 unit	0	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,00 keg	338.895	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,00 keg	338.895	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00 lap	7.735	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00 lap	7.735	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 lap	331.160	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 lap	331.160	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4,00 lap	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4,00 lap	0	

	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,00 keg	543.840	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,00 keg	543.840	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57,00 unit	203.840	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57,00 unit	203.840	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79,00 unit	40.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79,00 unit	40.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00 unit	90.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00 unit	90.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	4,00 unit	160.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	4,00 unit	160.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	83,00 unit	50.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	83,00 unit	50.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,00 keg	0	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,00 keg	0	-
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00 dok	0 -	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00 dok	0	-

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00 dok	0 -	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00 dok	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,00 dok	0 -	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,00 dok	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00 dok	0 -	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00 dok	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00 dok	0 -	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00 dok	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,00 lap	0 -	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,00 lap	0	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00 lap	0 -	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00 lap	0	-
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,00 keg	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,00 keg	0	

	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12,00 dok	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12,00 dok	0	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12,00 dok	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12,00 dok	0	
	Kegiatan (PENDAPATAN)					**Kegiatan (PENDAPATAN)**					
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2,00 keg	0	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2,00 keg	0	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2,00 dok	0 -	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2,00 dok	0	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12,00 lap	0 -	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12,00 lap	0	
	Jumlah				32.008.759					32.008.759	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah dibidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali melakukan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan yang diajukan para pemangku kepentingan, oleh karena itu dalam penentuan skala prioritas dapat tidaknya usulan program dan kegiatan dari stakeholder diakomodasi, dengan tetap memperhatikan beberapa kriteria yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Boyolali meliputi:

1) Keterkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
2) Keterkaitan dengan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah kabupaten Boyolali yang dituangkan dalam RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali periode 2021-2026; dan
3) Keterkaitan dengan isu strategis global.

Usulan dari masyarakat/ pemangku kepentingan diperoleh melalui mekanisme Musrenbang sesuai dengan Petunjuk Teknis pelaksanaan Musrenbang serta dengan memperhatikan koridor tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah menetapkan kriteria untuk usulan-usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang dapat diakomodir atau disetujui oleh SKPD teknis Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan kriteria tersebut, Daftar/ usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, yang masuk dalam usulan Musrenbang Tahun 2023 sebagai bahan pertimbangang penyusunan prioritas pembangunan beserta tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program serta kebutuhan pembiayaannya. Dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	KE-LURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	DI-TERIMA	DI-TOLAK	SUB KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	REKOMENDASI ANGGARAN	KET-
1	609501	21-02-2023	Sudarno	penyediaan alat angkut sampah untuk penanganan sampah	belum ada alat angkut untuk penanganan sampah	Klewor Kec. Kemusu	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	55.000.000	verifikasi pengelolaan sampah di desa
2	609587	21-02-2023	Sutris	penyediaan tempat sampah terpilah (sementara) sebelum dikelola	Bak Tempat Sampah Terpilah	Suroteleng Kec. Selo	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	20 set	10.000.000	verifikasi pengelolaan sampah di desa
3	609726	21-02-2023	Tarto	penyediaan komposter utk pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos	Belum adanya pengelolaan sampah yang memadai	Wonodoyo Kec. Cepogo	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	10 unit	8.000.000	verifikasi pengelolaan sampah di desa
4	610206	21-02-2023	SUPARJI	penyediaan komposter utk pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos	Sampah dibuang sembarangan	Karanggeneng Kec. Boyolali	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	10 unit	8.000.000	verifikasi pengelolaan sampah di desa
5	610375	21-02-2023	UNTUNG	Pembangunan Digester IPAL Biogas ternak untuk dimanfaatkan Gas metannya	Penanganan limbah ternak yang belum optimal	Jemowo Kec. Tamansari	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Penghentian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 unit	30.000.000	Proposal dan kelayakan teknis

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	KE-LURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	DI-TERIMA	DI-TOLAK	SUB KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	REKOMENDASI ANGGARAN	KET-
6	610828	21-02-2023	Suyatno	penyediaan alat angkut sampah untuk penanganan sampah	kurangnya sapras untuk penanganan sampah	Sarimulyo, Kec. Kemusu	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	55.000.000	verifikasi pengelolaan sampah di desa
7	610921	21-02-2023	Wiwik Indriyati	penyediaan alat angkut sampah untuk penanganan sampah	kurangnya sapras penanganan sampah	Genengsari Kec. Kemusu	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	55.000.000	verifikasi pengelolaan sampah di desa
8	610995	21-02-2023	SUKIRIN	penyediaan komposter utk pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos	Pelatihan pembuatan pupuk mendukung peralatan yang belum memadai	Dk. Cilak 17/06 Ds. Blagung Kec. Simo	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	10 unit	8.000.000	verifikasi pengelolaan sampah di desa
9	611040	21-02-2023	FAJAR FERLYSWANTO AGUSTITA, S.STP	penyediaan alat angkut sampah untuk penanganan sampah	Mengiuragi penumpuka sampah	Banaran Kec. Boyolali	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	55.000.000	verifikasi pengelolaan sampah di desa
10	611257	21-02-2023	Joko Pramono	penyediaan alat angkut sampah untuk penanganan sampah	perlu alat angkut sampah untu 13 desa di kec. Teras	13 ds, Mojolegi Kec. Teras	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	55.000.000	verifikasi pengelolaan sampah di desa
11	611292	21-02-2023	Eko Fahrudin, S.Si	penyediaan alat angkut sampah untuk penanganan sampah	belum ada tempat sampah yang layak	Guli Kec. Nogosari	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	55.000.000	verifikasi pengelolaan sampah di desa

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	KE-LURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	DI-TERIMA	DI-TOLAK	SUB KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	REKOMENDASI ANGGARAN	KET-
12	611707	21-02-2023	ARDITA DEVI MAYASARI, S.STP, M.AP	penyediaan tempat sampah terpilah (sementara) sebelum dikelola	buang sampah sembarangan	Pulisen Kec. Boyolali	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	20 set	10.000.000	verifikasi pengelolaan sampah di desa
13	611789	21-02-2023	Muzazin	penyediaan alat angkut sampah untuk penanganan sampah	Kurangnya alat angkut sampah untuk memobilisasi sampah ke tempat pembuangan sampah	Klari Kec. Karanggede	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	55.000.000	verifikasi pengelolaan sampah di desa
14	611918	21-02-2023	Sukir	penyediaan tempat sampah terpilah (sementara) sebelum dikelola	masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan karena belum adanya tempat pembuangan sampah	Ds. Sambi Kec. Sambi	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	20 set	10.000.000	verifikasi pengelolaan sampah di desa
15	612306	21-02-2023	Purwanto, SH	penyediaan alat angkut sampah untuk penanganan sampah	Banyak sampah yang belum tertangani	Giriroto Kec. Ngemplak	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	55.000.000	verifikasi pengelolaan sampah di desa

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	DI TERIMA	DI-TOLAK	SUB KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	REKOMENDASI ANGGARAN	KETERANGAN
16	612520	21-02-2023	Mawardi	penyediaan komposter utk pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos	Pelatihan pembuatan pupuk kompos dan pengolahan sampah rumah tangga	Cepogo Kec. Cepogo	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	10 unit	8.000.000	verifikasi pengelolaan sampah di desa
17	612572	21-02-2023	Hardani	penyediaan komposter utk pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos	Pelatihan pembuatan pupuk kompos dan pengolahan sampah rumah tangga	Mliwis Kec. Cepogo	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	10 unit	8.000.000	verifikasi pengelolaan sampah di desa
18	613226	21-02-2023	Haryanto	penyediaan alat angkut sampah untuk penanganan sampah	Belum tersedia alat untuk mengangkut sampah	Bolo Kec. Wonosegoro	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	55.000.000	verifikasi pengelolaan sampah di desa
19	620281	22-02-2023	Martono	penyediaan alat angkut sampah untuk penanganan sampah	Alat angkut untuk sampah belum ada/tidak tersedia	Ketaon Kec. Banyudono	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	55.000.000	verifikasi pengelolaan sampah di desa
20	620574	22-02-2023	Suparmin	penyediaan tempat sampah terpilah (sementara) sebelum dikelola	tempat sampah terpilah masih terbatas	Ketitang Kec. Nogosari	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	20 set	10.000.000	verifikasi pengelolaan sampah di desa

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	KE-LURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	DI-TERIMA	DI-TOLAK	SUB KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	REKOMENDASI ANGGARAN	KET-
21	621190	22-02-2023	Sugiyanto, S.Sos	penyediaan alat angkut sampah untuk penanganan sampah	belum ada alat angkut sampah	Sembungan Kec. Nogosari	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	55.000.000	verifikasi pengelolaan sampah di desa
22	621670	22-02-2023	Joko Supono, ST	penyediaan alat angkut sampah untuk penanganan sampah	belum tersedianya alat mengangkut sampah	Jeron Kec. Nogosari	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	55.000.000	verifikasi pengelolaan sampah di desa
23	622068	22-02-2023	Suwarno	penyediaan alat angkut sampah untuk penanganan sampah	belum ada sarana pengangkut sampah	Rembun Kec. Nogosari	Kab./ Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Perangkat Daerah	v		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	55.000.000	verifikasi pengelolaan sampah di desa

Tabel T-C.32.a
Pokok Pokok Pikiran DPRD Tahun 2024

No	Tgl Usul	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kelurahan/ Desa, Kec	Koefisien	OPD Tujuan Awal	OPD Tujuan Akhir	Pagu	Disetujui	Ditolak	Keterangan
1	13/01/2023	Lingk. Hidup	penyediaan alat angkut sampah untuk penanganan sampah	Permohonan Bantuan untuk pembangunan TPS dan alat transportasi (akomodasi)	Dukuh Blimbing RT.02 RW 03, Desa Klari, Kec.Karanggede, Kab. Boyolali	Klari Kec. Karanggede	1 paket	Dinas Lingk. Hidup		55.000.000	V		Mohon untuk dapat disertai proposal
2	10/01/2023	Lingk. Hidup	Penataan drainase, memperkaya jumlah air tanah dan mengurangi laju air permukaan	Talud	Tanjungsari, Kab. Boyolali	Tanjungsari Kec. Banyudono	1 KM	Dinas Lingk. Hidup				V	Bukan merupakan kewenangan DLH
3	10/01/2023	Lingk. Hidup	Penataan drainase, memperkaya jumlah air tanah dan mengurangi laju air permukaan	Drainase	RT 1 RW 6 Kebonrejo Kebonbimo, Kec. Boyolali	Kebonbimo Kec. Boyolali	1 paket	Dinas Lingk. Hidup				V	Bukan merupakan kewenangan DLH
4	10/01/2023	Lingk. Hidup	penyediaan tempat sampah terpilah (sementara) sebelum dikelola	Untuk dibuatkan bank sampah/bak sampah	Dk Gatak, Butuh, Mojosongo, Kab. Boyolali	Butuh Kec. Mojosongo	2 tempat	Dinas Lingk. Hidup					Mohon untuk kejelasan detail usulan tersebut, apakah berupa tempat sampah terpilah atau berupa bangunan bak sampah/TPS (apabila berupa TPS dari DLH tidak merekomendasikan)

No	Tgl Usul	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kelurahan/ Desa, Kec	Koefisien	OPD Tujuan Awal	OPD Tujuan Akhir	Pagu	Disetujui	Ditolak	Keterangan
5	10-01-2023	Lingk. Hidup	Penataan drainase, memperkaya jumlah air tanah dan mengurangi laju air permukaan	Perbaikan Drainase sebelah barat dukuh gatak karna kalau hujan air tidak muat	dk Gatak ds Butuh, Kab. Boyolali	Butuh Kec. Mojosongo	500 meter	Dinas Lingk. Hidup				v	Bukan merupakan kewenangan DLH
6	11/01/2023	Lingk. Hidup	Penataan drainase, memperkaya jumlah air tanah dan mengurangi laju air permukaan	Drainase dan trotoar	Desa Pilangrejo, Kab. Boyolali	Pilangrejo Kec. Juwangi	600 M	Dinas Lingk. Hidup				v	Bukan merupakan kewenangan DLH
7	10/01/2023	Lingk. Hidup	penyediaan tempat sampah terpilah (sementara) sebelum dikelola	Pengelolaan sampah	Dk. Bangak Pason Rt 10 Rw 03 Batan ,Banyudono, Kab. Boyolali	Batan Kec. Banyudono	500 M	Dinas Lingk. Hidup					Mohon untuk kejelasan detail usulan tersebut, apakah berupa tempat sampah terpilah atau berupa bangunan bak sampah/TPS (apabila berupa TPS dari DLH tidak merekomendasikan)

No	Tgl Usul	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kelurahan/ Desa, Kec	Koefisien	OPD Tujuan Awal	OPD Tujuan Akhir	Pagu	Disetujui	Ditolak	Keterangan
8	18/01/2023	Lingk. Hidup	Pembangunan bak beserta instalasi penampung air hujan untuk masyarakat daerah sulit air	Pengadaan Air Bersih	Desa Soko, Lampar,Kec. Tamansari, Kab. Boyolali	Lampar Kec. Tamansari	5 paket	Dinas Lingk. Hidup			V		Mohon untuk dapat disertai proposal, jumlah unit dan anggaran disesuaikan dengan pagu anggaran
9	10/01/2023	Lingk. Hidup	Penataan drainase, memperkaya jumlah air tanah dan mengurangi laju air permukaan	Pembangunan Drainase	Peningkatan Jalan Poros Desa Mojolegi Krasak, Kab. Boyolali	Mojolegi Kec. Teras	500 meter	Dinas Lingk. Hidup				V	Bukan merupakan kewenangan DLH
10	10/01/2023	Lingk. Hidup	Penataan drainase, memperkaya jumlah air tanah dan mengurangi laju air permukaan	DRAINASE	DK. SAMBIREJO, DESA BABADAN, Kab. Boyolali	Babadan Kec. Sambi	500 M	Dinas Lingk. Hidup				V	Bukan merupakan kewenangan DLH
11	16/01/2023	Lingk. Hidup	penyediaan komposter utk pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos	Pupuk Ternak	Banyuanyar, Kab. Boyolali	Banyuanyar Kec. Ampel	1 paket	Dinas Lingk. Hidup			V		Mohon untuk dapat disertai proposal

BAB III
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yaitu : **Indonesia Asri dan Lestari** yang diupayakan dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar Pembangunan

Sedangkan di dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
g. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan 7 agenda pembangunan di atas, maka terdapat sebanyak 4 Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan Lingkungan Hidup, yaitu:

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dan
d. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, yang terkait dengan Lingkungan Hidup adalah:

1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang diupayakan dengan :
    a) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas: (1) indeks kualitas udara (IKU) dari 84,1 poin menjadi 84,5 poin (2024), (2) indeks kualitas air (IKA) Rencana Strategis KLHK Tahun 2020-2024 96 dari 55,1 poin menjadi 55,5 poin (2024), (3) indeks kualitas air laut (IKAL) dari 58,5 menjadi 60,5 poin (2024), dan (4) indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dari 61,6 poin menjadi 65,5 poin (2024);
    b) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
    c) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
    d) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
    e) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim dan
3) Pembangunan rendah karbon.

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, serta mengacu pada arah kebijakan Kabupaten Boyolali dibidang Lingkungan Hidup, prioritas pembangunan bidang Lingkungan Hidup yang

dilaksanakan tahun 2024 meliputi :

1) Perencanaan Lingkungan Hidup;
2) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3) Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3;
4) Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
5) Pengelolaan Persampahan;
6) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
7) Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Sedangkan program penunjang meliputi :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

Sesuai dengan visi yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Boyolali Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali sebagai pendukung pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan lingkungan hidup beserta indikatornya tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya perusahaan yang ramah lingkungan	Persentase peningkatan perusahaan yang ramah lingkungan
	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)
	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
	Meningkatnya penanganan/ pengelolaan sampah	Persentase sampah yang tertangani/ terkelola
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dinas Lingkungan Hidup

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan dengan tolok ukur kinerja masing-masing kelompok program serta kebutuhan pembiayaannya. Kerangka pendanaan yang disajikan bersifat indikatif yang berarti bahwa anggaran pendanaan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kegiatan dan target yang akan dilaksanakan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tersebut. Uraian faktor dari hal-hal berikut:

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah; dan
b. Pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan uraian diatas terhadap program dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan bidang Lingkungan Hidup dalam Tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini laksanakan dengan 9 (sembilan) kegiatan yaitu :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan; dan
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
   c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD
   f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri 10 (sepuluh) sub kegiatan yaitu :
   a. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/elektronik;
   b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   e. Penyediaan Bahan/Material;
   f. Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan
   g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
   h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; dan
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang didukung dengan 5 (lima) sub kegiatan yaitu :
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan;
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin; dan
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
   d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
   e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5. Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu
   a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
   c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
   a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
8. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
   a. Pengadaan Alat Besar
   b. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
9. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
   a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
   b. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

B. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu : Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

   Penyusunan Indeks Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) sebagai penyempurnaan dari SLHD dilaksanakan untuk mewujudkan data base lingkungan yang valid dan *up date* sebagai pedoman penyusunan kebijakan pembangunan bidang lingkungan; dan

2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang.

Pembangunan yang dilaksanakan seringkali berdampak negatif terhadap keberlangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan adanya kajian lingkungan terhadap kegiatan yang mempunyai dampak (besar dan penting) terhadap lingkungan sekitar, sehingga kegiatan pembangunan dan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan

C. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

   a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

      Untuk mengetahui tingkat kualitas air dan udara, terutama di daerah rawan pencemaran air dan udara, serta antisipasi terhadap terjadinya pencemaran air dan udara, DLH melaksanakan uji kualitas air dan udara di sungai-sungai dan titik pantau kualitas udara yang telah ditentukan

   b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

      Dalam upaya pengendalian emisi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim salah satu upayanya adalah melalui fasilitasi pembentukan kampung iklim yang diharapkan mampu menghadapi dampak pemanasan global. Peran DLH Kabupaten Boyolali untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim melalui penyusunan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk mengetahui potensi gas rumah kaca yang ada di wilayah kabupaten boyolali sebagai penyebab utama pemanasan global yang berdampak terjadinya perubahan iklim sehingga dapat diantisipasi.

   c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota

      Untuk meningkatkan pengelolaan laboratorium lingkungan

hidup perlu dipersiapkan sarana dan parasarana yang sesuai standar serta sumber daya manusia yang kompeten, karena saat ini laboratorium LH di DLH belum ada aktifitas.

d. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam pelestariang lingkungan perlu dilakukan sosialiasai kepada masyarakat terkait pentingnya informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sehingga masyarakat dapat mengantisipasi apabila hal tersebut benar benar terjadi.

2) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Untuk mengurangi tingkat pencemaran limbah ternak (sapi), serta meningkatkan nilai ekonomis limbahnya, DLH membuat IPAL Biogas pada sentra peternakan sapi. Selain itu untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang bisa berdampak terhadap kelestarian sumber air, dilaksanakan pembangunan sumur resapan, lubang resapan biopori dan sarana pemanenan air hujan di daerah tangkapan air yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkait sumber air.

D. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3

Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :

1. Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara LB3 dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan B3 dan limbah B3 dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan LB3 yang dihasilkan usaha dan/atau kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan Kebun Raya

   Sebagai wujud dukungan terhadap perkembangan pembangunan kebun raya yang sedang dilaksanakan perlu adanya penambahan sarana transportasi dilingkungan kebun raya. Untuk menjaga kelestarian tanaman local daerah hutan hujan wiayah Jawa bagian Timur dicanangkan pembangunan Kebun Raya Indrokilo Boyolali sebagai sarana konservasi tanaman tersebut, disamping fugsi lain dari pembentukan Kebun Raya yaitu fungsi edukasi, penelitian, rekreasi dan jasa lingkungan, serta sebagai salah satu ikon kabupaten Boyolali.

2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

   Untuk meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dengan memanfaatan lahan lahan milik pemkab yang belum dikelola untuk difungsikan sebagai ruang terbuka hijau public sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban ketersediaan RTH Publik wilayah/ kawasan perkotaan dan meningkatkan keindahan, kenyamanan, keasrian kawasan perkotaan melalui penataan lingkungan/taman.

3. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

   Untuk menjaga keberadaan dan kualitas taman yang ada terutama di wilayah Perkotaan (Boyolali dan Mojosongo) DLH serta taman taman yang telah dibangun dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan taman, sehingga kondisi taman lebih terawat dan dapat meningkatkan estetika serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

   Untuk meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati diperlu sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

F. Pengelolaan Persampahan

Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan Sampah yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan:

1. Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang Dan Pemanfaatan Kembali

   Dalam upaya mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA diperlukan upaya pengurangan sampah dengan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali, melalui TPS 3R, bank sampah yang dilaksanakan di sumbernya, sehingga TPA diharapkan hanya menerima residu/ sisa dari system pengolahan tersebut, bukan kumpul, angkut, bung ke TPA.
2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

   untuk meningkatkan kepedulian dan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan sampah sehingga sampah dapat terkelola dengan baik melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan acara lingkungan hidup dan lain-lain.
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

   untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan akan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan guna meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat serta pemeliharaan kebersihan lingkungan perkotaan.
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

   Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di TPA diperlukan sarana dan prasarana serta teknologi yang memadai mengingat volume sampah yang semakin meningkat serta kompleksifitas jenis sampah yang ada sehingga sampah yang masuk ke TPA benar benar dapat diolah sesuai ketentuan yang ada (*controlled/ sanitary landfill*).

G. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program ini dilasksanakan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah Kab/ Kota yang terdiri 3 (tiga) sub kegiatan:

1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH

   Faslitisasi, pembinaan dan rekomendasi terhadap penyusunan dokumen lingkungan oleh pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan serta perizinan lingkungan lainnya.

2. Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota

   Untuk meningkatkan pemahaman usaha dan/ atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan yang dimiliki, perlu dilaksanakan pembinaan, pengawasan dan monitoring terhadap usaha dan/ atau kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan.

H. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan 1 (satu), yaitu Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/ Kota dan dengan sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/ Kota yaitu untuk memfasilitasi penyelesaian adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Boyolali

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				32.008.759				36.118.901
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar		100%	14.808.901			100%	14.808.901
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Julah kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah		8 keg	13.151.809			8 keg	13.151.809
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	98 Orang/ bulan	8.958.167	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		98 Orang/ bulan	9.144.009
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	12 Dokumen	4.728.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	4.007.800
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	12 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	0
2	11	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	12 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0

2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
2	11	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	2 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	18 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
2	11	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	2 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
2	11	01	2.03		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan		4 kegiatan	0			4 kegiatan	0
2	11	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	1 dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	0
2	11	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Ba05rang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	2 laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	0
2	11	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	2 laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	0
2	11	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	2 laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	0

2	11	01	2.04		Kegiatan Administrasi PendapatanDaerah Kewenangan Perangkat Daerah	Julah Kegiatan Administrasi PendapatanDaerah Kewenangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan		2 kegiatan	0			2 kegiatan	0
2	11	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		2 dokumen	0			2 dokumen	0
2	11	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		12 dokumen	0			12 dokumen	0
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan dministrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		10 keg	1.324.512			10 keg	954.357
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	1 Paket	3,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	3,000
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	4 Paket	70.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	40.000
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	1 Paket	10.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	10.000
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	2 Paket	900.000.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	646.357
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	2 Paket	30.000	ana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	30.000
2	11	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	1 Paket	30.862	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	25,000
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	12 Laporan	150.000	Dana Transfer Umum-DAU		12 Laporan	100.000
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan	12 Laporan	130.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	100.000
2	11	01	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan	12 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-DAU		12 Dokumen	0
2	11	01	2.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan	12 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	0

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		2 kegiatan	0			2 kegiatan	0
					Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan	Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Unit	0
					Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan	Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Unit	0
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		3 kegiatan	338.895			3 kegiatan	307,635
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	12 Laporan	7.735	Dana Transfer Umum-DAU		12 Laporan	7.735
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan,	12 Laporan	331.160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	300.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan,	4 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	0
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		5 kegiatan	543.840			5 kegiatan	395.000
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelh, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	57 Unit	203.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		57 Unit	150.000
2	11	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	4 unit	160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 unit	75.000
2	11	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	83 unit	50.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		83 unit	50.000
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	79 Unit	40.000	Dana Transfer Umum-DAU		79 Unit	40.000

2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kab. Boyolali, Boyolali, Winong Mojosongo	2 Unit	90.000	Dana Transfer Umum-DanaAlokasi Umum		2 Unit	80.000
2	11	01	2.01		Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan		7 kegiatan	0			7 kegiatan	0
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Boyolali, Winong Mojosongo	2 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	0
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Boyolali, Boyolali, Winong Mojosongo	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Boyolali, Boyolali, Winong Mojosongo	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Boyolali, Boyolali, Winong Mojosongo	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Boyolali, Boyolali, Winong Mojosongo	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Boyolali, Boyolali, Winong Mojosongo	16 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Laporan	0
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Boyolali, Winong Mojosongo	4 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	0
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan		2 kegiatan	0			2 kegiatan	

					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Boyolali, Boyolali, Winong Mojosongo	12 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	0
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Boyolali, Boyolali, Winong Mojosongo	12 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	0
2	11	02			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**				**245.000**				**180.000**
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				**65.000**				**30.000**
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten / Kota	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	65.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	30.000
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				180.000				150.000
2	11	02	2.02	01	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten / Kota yang Disusun	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	150.000
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kampung Iklim yang terfasilitasi Persentase perusahaan yang mengelola air limbah sesuai ketentuan Persentase sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu (SO2,NO2) Persentase sumber air yang dikonservasi Persentase sumber emisi memenuhi baku mutu		68,00 Persen 64,00 Persen 100 Persen 64,90 Persen 100 Persen	3.525.000				2.660.000
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kampung iklim yang telah difasilitasi (akumulasi)		34 lokasi	705.000				1.100.000

2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	350.000
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Dokumen	300.000
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	5 Dokumen	225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	450.000
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penambahan sarana konservasi air		2 jenis	2.820.000			2 jenis	1.560.000
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten / Kota yang Dilaksanakan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	40.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	100.000
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Titik	2.779.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Titik	1.460.000
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan/ ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20 dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan		34,416 Persen	6.241.900			34,416 Persen	13.000.000
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik Wilayah Perkotaan / Kawasan Perkotaan yang telah tersedia (akumulasi)		1506.735 ha	6.241.900			1506.735 ha	13.000.000

2	11	04	2.01	03	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	8.9 Ha	761.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.9 Ha	2.500.000
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,37 Ha	3.380.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		17,37 Ha	8.000.000
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Boyolali, Simo, Pentur	9.47 Ha	1.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9.47 Ha	1.500.000
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	850.000.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	1.000.000.
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola		75,00 Persen	50.000				100.000
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Volume Limbah B3 yang ddapat dikelola		4571205.16 kg	50.000				100.000
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan / Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Dokumen	50.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	100.000
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH Persentase persetujuan lingkungan yang dikeluarkan bagi aktivitas investasi yang sesuai standar Persentase perusahaan yang ramah lingkungan		66,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen	161.750			68,00 Persen 100,00 Persen 100,00 Persen	200.000
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				161.750				200.000

2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Semua Kab / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110 dokumen	59.650.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		110 dokumen	70.000.
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Semua Kab / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 dokumen	102.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 dokumen	30.000
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase aduan lingkungan hidup yang ditangani		100%	10.350			100%	0
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Aduan Lingkungan Hidup yang ditangani		10 aduan	10.350			10 aduan	0
2	11	10	2.01	04	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten / Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	Semua Kab / Kota, Semua Kecamatan,	10 aduan	10,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 aduan	0
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan area pelayanan sampah Persentase sampah yang dikelola dengan 3R		27,00 Persen 27,00 Persen	5.881.245				5.170.000
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Volume sampah yang dikelola dengan 3R		26284 ton	5.881.245				5.170.000
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan timbulan sampah	Jumlah Laporan Hasil kegiatan Pengurangan Sampah Pembatasan timbulan sampah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	175.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	200.000
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kelompok	296.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Kelompok	300.000

2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten / Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten / Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	4.613.645	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Dokumen	2.670.000
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	796.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 unit	2.000.000
						TOTAL			32.008.750				36.118.901

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(stakeholders)* dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah *(trickle down effect)* sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2024 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

L. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL			i
DAFTAR ISI			ii
BAB I PENDAHULUAN			
PENDAHULUAN	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	3
	1.3	Maksud dan Tujuan	5
	1.4	Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU			
PENDAHULUAN	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	32
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	53
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	54
	3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH			
	4.1	Program dan Kegiatan	56
BAB V PENUTUP			68

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BP3D dan pemangku kepentingan. Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Tahun 2024 disusun untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif berjangka waktu 1 (satu) tahun guna

mengoperasionalkan program dan kegiatan yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Sementara itu sesuai dengan pasal 7 Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Tahun 2024 menjabarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Boyolali dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, propinsi maupun kabupaten/kota serta dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan. Oleh karena itu substansi penyusunan RKPD Tahun 2024 harus selaras dengan dokumen perencanaan baik di tingkat pusat, dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan tidak terlepas

memperhatikan pula dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten di Boyolali sehingga akan terjadi sinergitas perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Tahun;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalaian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupten Boyolali Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, yang memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah.
2. Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil bagi para penyelenggara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil tahun sebelumnya (tahun 2023) serta merumuskan arah kebijakan program dan kegiatan tahun 2024.
2. Mengarahkan pencapaian visi dan misi Kabupaten Boyolali ke dalam suatu strategi program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Menyusun kebijakan program/kegiatan dan indikasi kegiatan tahun 2024.
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Yang Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 menyajikan pengukuran terhadap hasil Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 dan perkiraan pencapaian target tahun 2024.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerjamerupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, SDM, laporan, buku dll. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing indikator yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sbb:

- Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga;
- Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran penduduk Usia 0 - 18
- Cakupan penerbitan kutipan Akte Kelahiran dari jumlah penduduk.
- Cakupan Penerbitan kutipan Akte Kematian;
- Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-el.

B. Capaian dan Evaluasi Program /Kegiatan Tahun 2022

Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 mencapai **Rp. 9.915.664.754** atau **96.99%** dari anggaran yang

ditetapkan sebesar Rp. 10.223.101.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Boyolali

PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH

Program Penunjang Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan 4 kegiatan dan 14 sub Kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

  Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN

  Capaian kinerja

  Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 pada kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 12 bulan (14 kali), dengan realisasi keuangan Rp 5.101.748.194 dari Anggaran 5.211.918.000,- dengan tingkat capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100%, dan capaian kinerja keuangan 97.89%

  Faktor pendorong

  Tersedianya dana dan komitmen untuk melaksanakan pembayaran gaji tepat waktu.

  Faktor penghambat

  -

  Kesimpulan

  Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 selama 12 bulan (14 kali), dengan realisasi keuangan Rp 5.101.748.194 dengan tingkat capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100%, dan capaian kinerja keuangan 97.89%.

- **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**

  Terbayarnya Gaji Tenaga Adminduk

  Capaian kinerja

  Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 pada kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN selama 12 bulan dengan realisasi keuangan Rp.

1.115.100.000,- tingkat capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100%, dan capaian kinerja keuangan 98.91%.

Faktor pendorong

Tersedianya dana dan komitmen untuk melaksanakan pembayaran gaji tepat waktu.

Faktor penghambat

-

Kesimpulan

Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 selama 12 bulan dan realisasi keuangan Rp. 1.115.100.000,- dengan tingkat capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100%, dan capaian kinerja keuangan 98.91%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan**

  Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik (belanja alat alat listrik/elektronik).

  Capaian kinerja

  Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 pada kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan selama 12 bulan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.671.000,- tingkat capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100%, dengan capaian keuangan 89.03%.

  Faktor pendorong

  Tersedianya dana yang bersumber dari DAU.

  Faktor penghambat

  kebutuhan rutin alat-alat listrik sudah terpenuhi, sedangkan kebutuhan anggaran untuk pembenahan jaringan instalasi listrik belum dapat direalisasikan karena terbatasnya anggaran.

Kesimpulan

Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2023 selama 12 bulan dan realisasi keuangan Rp. 2.671.000,-, tingkat capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100%, dengan capaian keuangan 89.03%.

- **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

  Terpeliharanya kebersihan kantor dengan menyediakan alat dan bahan pembersih.

  Capaian kinerja

  Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 pada kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga selama 12 bulan dengan realisasi keuangan Rp. 48.365.200,-, dan tingkat capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100%, tingkat capaian keuangan 98,90%.

  Faktor pendukung

  Tersedianya dana dan adanya komitmen untuk menjaga kebersihan kantor.

  Faktor Penghambat

  Belum tersedianya anggaran belanja modal untuk pengadaan alat-alat kebersihan.

  Kesimpulan

  Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 selama 12 bulan dengan realisasi keuangan Rp. 48.365.200,- dan tingkat capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100%, tingkat capaian keuangan 98.90%.

- **Penyediaan bahan logistik kantor (BBM)**

  Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor yang berupa bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan operasional kantor.

  Capaian kinerja

  Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 pada kegiatan penyediaan bahan logistik kantor selama 12 bulan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

83.996.657,-. tingkat capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100%, dan tingkat capaian kinerja keuangan 95.16%.

Faktor pendukung

Adanya dana dan adanya kerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan kebutuhan BBM.

Faktor Penghambat

-

Kesimpulan

Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 pada kegiatan penyediaan bahan logistik kantor selama 12 bulan,dengan realisasi keuangan sebesar Rp.83.996.657,-. tingkat capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100%, dan tingkat capaian kinerja keuangan 95.16%.

- **Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.**

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan.

Capaian kinerja

Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 62.206.500,-. tingkat capaian kinerja Renja tahun 2022 sebesar 100%, dan tingkat capaian kinerja keuangan 94.69%.

Faktor pendukung

Adanya dana dan adanya kerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengadaan barang cetakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Faktor Penghambat

-

Kesimpulan

Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 kegiatan

penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 62.206.500,-. tingkat capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100%, dan tingkat capaian kinerja keuangan 99.45 %.

- **Penyediaan Bahan/Material**

  Dengan tersedianya Alat tulis Kantor maka perkerjaan administrasi kantor berjalan lancar.

  Capaian kinerja

  Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 pada penyediaaan bahan/material Kantor selama 12 bulan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 947.716.035-. dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 %, dan tingkat capaian kinerja keuangan 98.17%.

  Faktor Pendukung

  Tersedianya dana dan adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang telah dijadwalkan.

  Faktor Penghambat

  -

- **Fasilitasi Kunjungan Tamu**

  Terpenuhinya kebutuhan minum harian untuk pegawai maupun untuk makan minum rapat dan jamuan Tamu.

  Capaian Kinerja

  Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 pada sub kegiatan ini selama 12 bulan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 107.621.900,-. tingkat capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100 %, dan tingkat capaian kinerja keuangan 87.12%.

  Faktor pendukung

  Tersedianya dana dan adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang telah dijadwalkan.

  Faktor Penghambat

-

- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

  Terpenuhinya biaya perjalanan dinas untuk rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

  Capaian kinerja

  Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 pada penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebesar 12 bulan,dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 174.440.660,-. tingkat capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100 %, dan tingkat capaian kinerja keuangan 91.89%.

  Faktor pendukung

  Tersedianya dana yang mencukupi.

  Faktor Penghambat

  -

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

  Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat antara lain untuk kelancaran administrasi keuangan dan surat menyurat.

  Capaian kinerja

  Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 pada penyediaaan jasa surat menyurat selama 12 bulan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.348.000,-. tingkat capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100 %, dan tingkat capaian kinerja keuangan 40.66%.

  Faktor pendukung

  Tersedianya dana dan adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal.

  Faktor Penghambat

-

- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

  Terpenuhinya biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

  Capaian kinerja

  Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 pada penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik sejumlah 12 bulan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 360.217.368,-. tingkat capaian kinerja sebesar 100 %, tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98.14%.

  Faktor pendukung

  Tersedianya dana dan adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal.

  Faktor Penghambat

  Adanya kebocoran Pipa PDAM yang mengakibatkan tagihan bulanan pajak air mengalami kenaikan, sehingga anggaran tidak dapat mencukupi (masih mempunyai beban hutang dengan PDAM).

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- **Penyediaan Jasa ,Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan**

  Terpeliharanya dan terbayarnya pajak kendaraan dinas dan operasional.

  Capaian kinerja

  Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 pada kegiatan Penyediaan Jasa ,Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional/ Lapangan terealisasi sebesar 12 bulan ,dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 57.125.321,-. tingkat capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100%, dan tingkat capaian kinerja keuangan 91.77%.

Faktor Pendorong

Tersedianya anggaran pemeliharaan kedaraan dinas/operasional kantor.

Faktor Penghambat

Karena umur kendaraan dinas yang sudah tua apalagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai mobilitas tinggi untuk pelayanan, maka sangat perlu pemeliharaan ekstra, sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang banyak.

- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Terpeliharanya peralatan kerja dengan bekerja sama dengan pihak ke tiga untuk melaksanakan servis peralatan kerja (computer dll) dan pemeliharaan jaringan SIAK.

Capaian kinerja

Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 pada kegiatan penyediaaan jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 90.842.800,-. tingkat capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100%, dan tingkat capaian kinerja keuangan 99.28%.

Faktor pendukung

Tersedianya dana dan adanya kerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan perbaikan peralatan kerja.

Faktor penghambat

Banyaknya peralatan kantor produk keluaran lama dan frekuensi penggunaan yang berlebihan sehingga harus diservis rutin karena sudah banyak yang rusak.

- **Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor**

Terpeliharanya Gedung kantor dengan bekerja sama dengan pihak ke tiga untuk memperbaiki sarana

prasarana gedung yg rusak

Capaian kinerja

Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 pada kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor selama 12 bulan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 89.515.000,-. tingkat capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100%, dan tingkat capaian kinerja keuangan 99.46%.

Faktor pendukung

Tersedianya dana dan adanya kerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan perbaikan dan perawatan gedung kantor

Faktor penghambat

Seiring dengan berkembangnya jaman, ruang pelayanan membutuhkan fasilitas maupun suasana yang memberikan kenyamanan kepada pengunjung,maka masih diperlukan berbagai rehab di kantor dispendukcapil

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Tersedianya Peralatan Gedung kantor dengan bekerja sama dengan pihak ke tiga untuk menyediakan sarana prasarana kantor

Capaian kinerja

Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 pada kegiatan Belanja modal peralatan dan mesin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 989.602.752,-. tingkat capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100%, dan tingkat capaian kinerja keuangan 91.93%.

Faktor pendukung

Tersedianya dana dan adanya kerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengadaan peralatan gedung kantor

Faktor penghambat

Seiring dengan berkembangnya jaman, dituntut pelayanan yang berbasis IT, untuk menunjang pelayanan yang cepat masih diperlukan peralatan peralatan dikantor dispendukcapil

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- **Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan**

  Tercukupinya kebutuhan pelayanan dokumen kependudukan.

  Capaian kinerja

  Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 pada kegiatan Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan telah menerbitkan dokumen identitas kependudukan sebanyak 50.382 dokumen dengan tingkat capaian kinerja Renja tahun 2022 sebesar 124 %,

  Faktor Pendorong

  masyarakat mengetahui pentingnya dokumen identitas kependudukan

  Faktor Penghambat

  -

- **Pengumpulan Analisis dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk**

  Jumlah penerbitan dokumen kependudukan

  Capaian kinerja

  Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2021 pada

kegiatan Pengumpulan Analisis dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk telah menerbitkan dokumen kependudukan sebanyak 205.479 dokumen dan realisasi keuangan sebesar Rp. 209.576.000,-. dengan tingkat capaian kinerja tahun 2022 sebesar 108 % dan tingkat capaian kinerja keuangan 99.79%.

Faktor Pendorong

Tersediannya dana dari DAK Non-Fisik.

Faktor Penghambat

penggunaan DAK Non-Fisik dibatasi dengan juknis.

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

- **Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting**

Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil

Capaian kinerja

Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 pada Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pelaporan peristiwa penting telah menerbitkan kutipan akte catatan sipil sejumlah 44.830 dokumen. tingkat capaian 186% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 74.007.500,-. (tingkat capaian kinerja keuangan 95.54%).

Faktor pendorong

Dilaksanakannya sosialisasi tentang arti pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil.

Faktor Penghambat

Masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami pentingnya dokumen kependudukan.

b. Kegiatan Penyelenggraan Pencatatan Sipil

- **Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil**

  Tercukupinya kebutuhan pelayanan pencatatan sipil (belanja formulir-formulir permohonan pelayanan pencatatan sipil).

  Capaian kinerja

  Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 pada penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pencatatan sipil, telah terealisasi 100% dengan tingkat capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100%,

  Faktor Pendorong

  Tersediannya dana DAK Non-Fisik.

  Faktor penghambat

  -

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

a. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- **Penyusunan Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

  Kelancaran operasional SIAK di Kabupaten Boyolali.

  Capaian kinerja

  Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 Kegiatan Penyusunan tatacara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan selama 12 bulan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 86.363.867,- dan tingkat capaian kinerja 100% dengan capaian kinerja keuangan 84.99%.

Faktor Pendorong

Tersediannya dana dari DAK Non-Fisik.

Faktor Penghambat

penggunaan DAK Non-Fisik dibatasi dengan juknis.

b. Penyelenggran Pengelolaan Informasi Kependudukan

- **Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga non-pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

  Terbayarnya honor petugas register pada 261 desa.

  Capaian kinerja

  Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2022 Kegiatan Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di Kabupaten/kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan berupa pembayaran honor petugas register selama 12 bulan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 313.200.000,- dan tingkat capaian kinerja 100% dengan capaian kinerja keuangan 100%.

  Faktor Pendorong

  Adanya Regulasi Undang-Undang Adminitrasi Kependudukan.

  Kesimpulan

  Realisasi capaian kinerja RKPD tahun 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 313.200.000,-. dengan tingkat capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100% dan tingkat capaian kinerja keuangan 100 %.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Provinsi/Kabupaten/Kota Boyolali

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	
1	**Urusan Wajib Tidak Terkait**								
1 01	Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	Persentase peningkatan data kependudukan yang diupdate	83%	-	78%	78%	100%	80%	**80%**

	KEPENDUDUKAN								
	Kegiatan								
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen yang diterbitan KK, KTP, KIA, Akte Kelahiran dan Akte kematian secara online							
	Sub Kegiatan								
2.12.04.2.02.01	Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan adminiduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah dokumen aministrasi kependudukan yang diterbitkan sesuai dengan jenisnya yaitu KK, KTP, KIA, Akte klahiran, Akte kematian	211.850 dokumen	298.797 dokumen	211.850 dokumen	69.246 dokumen	32.68%	211.850 dokumen	579.993 dokumen
	Kegiatan								
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah desa yang mengirimkan laporan sesuai standart (oleh petugas register desa)							
	Sub Kegiatan								
2.12.04.2.03.01	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/Kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependukakan tingkat desa oleh petugas register yang telah dikompilasi per Kecamatan	4 Kecamatan	-	4 Kecamatan	22 kecamatan	100%	4 Kecamatan	22 kecamatan
	Program				**-**			**-**	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Presentase ketersediaan data profil kependudukan sesuai ketentuan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan								

2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	jumlah dokumen kependudukan dalam profil / agregat kependudukan yang diterbitkan							
	Sub Kegiatan			-		-	-		
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen agregat kependudukan	1 Dok	-	1 Dok	1 dok	100%	1 Dok	3 dok
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil data kependudukan	1 Dok	-	1 Dok	I dok	100%	1 Dok	3 dok
	Program								
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	99,7%	99.14%	99,7%	99.14%	99,14%	99,7%	99.7%
	Kegiatan								
2.12.02.2.01	Pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah layanan pendaftaran penduduk							
	Sub Kegiatan								
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah dokumen identitas resmi yang diterbitkan (KTP dan KIA)	40.500 dok	238.602 dok	40.500 dok	50.382 dok	124%	40.500 dok	329.484 dok
	Program								
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	45 %	38.85%	30%	38.85%	128%	40%	**45%**
	Kegiatan			-		-	-		
2.12.02.2.01	Pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan							

	Sub Kegiatan								
2.12.02.2.01.08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP, KIA, SKPWNI)	190.050 dok	263.956 dok	190.050 dok	205.479 dok	108%	190.050 dok	659.485 dok
		Jumlah dokumen persyaratan KK,KTP,KIA,SKPWNI yang diverifikasi	191.950 dok	263.960 dok	191.950 dok	205.492 dok	107.55%	191.950 dok	661.402 dok
	Program			-	-	-	-	-	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kematian	40%	-	20%	38.46%	192%	30%	30%
	Kegiatan			-		-	-		
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah berkas persyaratan legalisasi dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil diisi sesuai peraturan							
	Sub Kegiatan			-		-	-		
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan (akte : kelahiran, kematian, perkawinan,perceraian, pengesahan anak, pengakuan anak)	21.901 berkas	32.652 berkas	21.901 berkas	32.652 berkas	149%	24.900 berkas	90.204 berkas
		Jumlah berkas persyaratan legalisasi dokumen yang diverifikasi	24.091 berkas		24.091 berkas	75.507 berkas	192.31%	24.091 berkas	99.598 berkas
	Program			-		-	-		
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	67,40%	66.40%	66,50%	66.40%	100%	67%	**67%**
	Kegiatan								
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan sipil	Jenis form sebagai persyaratan legalisasi dokumen penyelenggaraan	6 form	6 form	6 form	6 form	100%	6 form	**18 form**

		pencatatan sipil							
	Sub Kegiatan			-		-	-		
2.12.03.2.02.11	Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pencatatan sipil	jumlah blanko/form pencatatan sipil	42.000 lembar	42.000 lembar	42.000 lembar	42.000 lembar	100%	42.000 lembar	**126.000 lembar**
	Program								
X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase penujang urusan pemerintahan yg terpenuhi sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Kegiatan								
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terjaminnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan								
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN (55 orang)	14 bln	14 bln	14 kali	14 kali	100%	14 kali	**42 kali**
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terbayarnya Gaji PTT dan Gaji TKHL (42 orang)	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	**36 bulan**
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	**36 bulan**
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	**36 bulan**
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	-	18 laporan	18 laporan	100%	18 laporan	
X.XX.01.	Pengelolaan dan Penyiapan	Jumlah Bahan Tanggapan	2 berkas	-	2 berkas	2 berkas	100%	2 berkas	

2.02.06	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemeriksaaan							**6 berkas**
	Kegiatan								
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercukupinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%	100%		100%	
	Sub Kegiatan								
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	**36 bulan**
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	**36 bulan**
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	**36 bulan**
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	**36 bulan**
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	**36 bulan**
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan bahan / Material	Tersedianya Bahan/material kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	**36 bulan**
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya makanan dan minuman	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	**36 bulan**
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	**36 bulan**
	Kegiatan								
X.XX.01.2.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**

	Sub Kegiatan								
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Perlengkapan Mebelair	1 paket	1 paket	1 paket	-	-	1 paket	**2 paket**
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	**15 unit**
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya aula gedung	1 paket	-	-	-	-	1 paket	**1 paket**
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya tempat parkir dan mushola	-	-		-			
	Kegiatan								
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**
	Sub Kegiatan								
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat menyurat	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	**36 bulan**
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	**36 bulan**
	Kegiatan								
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**
	Sub Kegiatan								
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	**36 bulan**

X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	**36 bulan**
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	**36 bulan**
	Kegiatan								
X.XX.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	25 dok	-	25 dok	25 dok	100%	25 dok	**75 dok**
	Sub Kegiatan								
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	**6 dok**
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	**3 dok**
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	**3 dok**
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	**3 dok**
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	**3 dok**
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15 dok	15 dok	15 dok	15 dok	100%	15 dok	**45 dok**
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	**16 dok**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Boyolali. Adapun indikator kinerja yang tertuang pada Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Tabel 2.2
IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2
Misi ke 4 : Boyolali menghadirkan pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai SAKIP Dispendukcapil

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Boyolali

NO	Indikator	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,11	82,72	83,55	84.18	82,11	82,72	83,55	84.18	
	Nilai SAKIP Dispendukcapil	83,68	84,07	84,49	*84.78*	83,68	84,07	84,49	*84.78*	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Salah satu produk berupa dokumen kependudukan seperti : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan memiliki dampak yang sangat luas. Baik aspek hukum, aspek politik, keamanan dan ketertiban, agama, sosial budaya dan lain-lain.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD antara lain belum tersebarnya informasi secara merata tentang pentingnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang mengakibatkan terbitnya dokumen kependudukan. Beberapa kendala yang menghambat keberhasilan pencapaian kinerja disebabkan antara lain :

- Jaringan internet tidak stabil
- Berdasarkan Permendagri no 95 tahun 2019 Data Base Kependudukan menjadi kewenangan Dirjend Adminduk, untuk Disdukcapil Daerah mempunyai hak akses yang terbatas
- Karena keterbatasan peralatan, peralatan yang ada sebagian ada yang rusak

Berangkat dari telaahan permasalahan dan kondisi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tersebut, maka dirumuskan isu - isu strategis yaitu: Kurang optimalnya pelaksanaan pengadministrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Isu kurang optimalnya pelaksanaan pengadministrasi kependudukan dan pencatatan sipil disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan, yang dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pada peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan kematian yang

dialami oleh masyarakat Kabupaten Boyolali.

Sedangkan salah satu pertimbangan diberlakukannya Undang-undang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Boyolali, sehingga perlu pembinaan, fasilitasi dan bimbingan supervise serta advokasi terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa/Kelurahan supaya tertib dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD

Dari hasil evaluasi terhadap capaian target kinerja RKPD tahun 2022 maupun terhadap capaian kinerja dalam RPJMD, beserta kerangka pendanaan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dirumuskan dalam prioritas pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD kabupaten Boyolali 2021-2026 dan juga prioritas pembangunan daerah tahunan sebagai pedoman dan arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, yang akan dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD, indikator kinerja kunci yang mengacu pada indikator RPJMD, Secara umum terhadap usulan program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023) beserta target yang akan dicapai pada tahun 2024, sebagaimana terlihat pada tabel Rumusan kebutuhan Program dan kegiatan dan kerangka pendanaan tahun 2024 tersebut dalam tabel 2.4 sbb:

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2024 Kabupaten Boyolali

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program					**Program**					
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dispendukcapil	Persentase peningkatan data kependudukan yang diupdate	83	673.555.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase peningkatan data kependudukan yang diupdate	83	633.200.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen yang diterbitan KK, KTP, KIA, Akte Kelahiran dan Akte kematian secara on line	212.000 dokumen	360.355.000	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen yang diterbitan KK, KTP, KIA, Akte Kelahiran dan Akte kematian secara on line	212.000 dokumen	50.000.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan adminiduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan		Jumlah dokumen aministrasi kependudukan yang diterbitkan sesuai dengan jenisnya yaitu KK, KTP, KIA, Akte klahiran, Akte kematian	211.850 dokumen	360.355.000	Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan adminiduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan		Jumlah dokumen aministrasi kependudukan yang diterbitkan sesuai dengan jenisnya yaitu KK, KTP, KIA, Akte klahiran, Akte kematian	211.850 dokumen	50.000.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		Jumlah desa yang mengirimkan laporan sesuai standart (oleh petugas register desa)	156 Desa	313.200.000	Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		Jumlah desa yang mengirimkan laporan sesuai standart (oleh petugas register desa)	156 Desa	448.200.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/Kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan		Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependukakan tingkat desa oleh petugas register yang telah dikompilasi per Kecamatan	4 Kecamatan	313.200.000	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/Kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan		Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependukakan tingkat desa oleh petugas register yang telah dikompilasi per Kecamatan	1 laporan	313.200.000	
						Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan	1 laporan	135.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Data Kependudukan			
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Presentase ketersediaan data profil kependudukan sesuai ketentuan	100,00	-	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Presentase ketersediaan data profil kependudukan sesuai ketentuan	100,00	-	
	Kegiatan										
	Penyusunan Profil Kependudukan		jumlah dokumen kependudukan dalam profil / agregat kependudukan yang diterbitkan	2 Dok		Penyusunan Profil Kependudukan		jumlah dokumen kependudukan dalam profil / agregat kependudukan yang diterbitkan	2 Dok		
	Sub Kegiatan										
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen	1 Dok	-	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen	1 Dok	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			agregat kependudukan					agregat kependudukan			
	Penyusunan Profil Data perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Jumlah dokumen profil data kependudukan	1 Dok	-	Penyusunan Profil Data perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Jumlah dokumen profil data kependudukan	1 Dok	-	
	Program										
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	99,7	146.500.000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	99,7	*	
	Kegiatan										
	Pelayanan pendaftaran penduduk		Jumlah layanan pendaftaran penduduk	49.005 dok	146.500.000	Pelayanan pendaftaran penduduk		Jumlah layanan pendaftaran penduduk	49.005 dok	-	
	Sub Kegiatan										

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan		Jumlah dokumen iden titas resmi yang diterbitkan (KTP dan KIA)	40.500 dok	146.500.000	Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan		Jumlah dokumen iden titas resmi yang diterbitkan (KTP dan KIA)	40.500 dok	-	
	Program										
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	40	1.416.291.000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	40	25.000.000	
	Kegiatan										
	Pelayanan pendaftaran penduduk		Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	190.050 dok	1.416.291.000	Pelayanan pendaftaran penduduk		Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	190.050 dok	25.0000.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan		Jumlah penerbitan dokumen kependudukan (	190.050 dok	1.416.291.000	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan		Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	190.050 dok	25.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perkembangan Penduduk		KK, KTP, KIA, SKPWNI)			Perkembangan Penduduk		(KK, KTP, KIA, SKPWNI)			
			Jumlah dokumen persyaratan KK,KTP,KIA,SKPWNI yang diverifikasi	191.950 dokumen	-			Jumlah dokumen persyaratan KK,KTP,KIA,SKPWNI yang diverifikasi	191.950 dokumen	-	
	Program					**Program**					
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kematian	40 %	217.000.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kematian	40%	307.000.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah berkas persyaratan legalisasi dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil diisi sesuai peraturan	21.841berkas	217.000.000	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah berkas persyaratan legalisasi dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil diisi	21.841 berkas	217.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								sesuai peraturan			
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting		Jumlah penerbitan dokumen kependudukan (akte : kelahiran, kematian, perkawinan,perceraian, pengesahan anak, pengakuan anak)	21.901 berkas	217.000.000	Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting		Jumlah penerbitan dokumen kependudukan (akte : kelahiran, kematian, perkawinan,perceraian, pengesahan anak, pengakuan anak)	21.901 berkas	217.000.000	
			Jumlah berkas persyaratan legalisasi dokumen yang diverifikasi	24.091 berkas	-			Jumlah berkas persyaratan legalisasi dokumen yang diverifikasi	24.091 berkas	-	
	Program					**Program**					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	67,40%	18.200.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	67,40%	18.200.000	
	Kegiatan					**Program**					
	Penyelenggaraan Pencatatan sipil		Jenis form sebagai persyaratan legalisasi dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	6 form	18.200.000	Penyelenggaraan Pencatatan sipil		Jenis form sebagai persyaratan legalisasi dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	6 form	90.000.000	
	Sub Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pencatatan sipil		jumlah blanko/form pencatatan sipil	42.000 lembar	18.200.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan		jumlah blanko/form pencatatan sipil	1 paket	40.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil		Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 laporan	50.000.000	
	Program										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Prosentase penujang urusan pemerintahan yg terpenuhi sesuai standar	100,00	7.691.471.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Prosentase penujang urusan pemerintahan yg terpenuhi sesuai standar	100,00	9.529.768.667	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terjaminnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	6.969.909.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terjaminnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	7.234.809.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN (55 orang)	14 bln	5.982.909.000	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN)	55 org/ bln	5.982.909.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Terbayarnya Gaji PTT dan Gaji TKHL (42 orang)	12 bln	987.000.000	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	1.251.900.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 dok	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12 dok	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah dokumen Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12 dok	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwul	18 laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		Jumlah Laporan Keuangan	18 laporan	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		anan/Semesteran SKPD			Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	2 dok	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	2 dok	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tercukupinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	321.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tercukupinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.413.000.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	12 bln	3.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Jumlah paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	1 paket	80.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan peralatan rumah tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 bln	3.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga	1 paket	3.000.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bln	40.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor	2 paket	40.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bln	30.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan	6 paket	50.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bln	-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	
	Penyediaan bahan / Material		Tersedianya Bahan/material kantor	12 bln	25.000.000	Penyediaan bahan / Material		Jumlah paket Bahan/material kantor	3 paket	980.000.000	
	Fasilitasi kunjungan tamu		Tersedianya makanan dan minuman	12 bln	120.000.000	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah laporan makanan dan minuman	12 laporan	120.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bln	100.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	140.000.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	20.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	881.959.667	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Pengadaan Mebel		Tersedianya Perlengkapan Mebelair	1 paket	20.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	185.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya peralatan gedung kantor	5 unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	5 unit	696.956.667	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								yang disediakan			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya aula gedung	1 paket	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit gedung kantor atau bangunan laiinya yang yang disediakan	-	-	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		tersedianya tempat parkir dan mushola	-	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	298.315.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	298.315.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terpenuhinya Jasa Surat menyurat	12 bln	3.315.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	1 laporan	3.315.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	295.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 lap	295.000.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100	102.247.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	102.247.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bln	32.247.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan, Pajak, dan Perizinannya	11 unit	32.247.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 bln	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	20 unit	20.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bln	50.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	50.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	25	-	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	25 dok	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 dok	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 dok	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dok	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dok	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dok	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dok	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	1 dok	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	1 dok	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	1 dok	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan-DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1 dok	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15 dok	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan hasil	15 laporan	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 dok	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengakomodir usulan program/kegiatan masyarakat melalui musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , khususnya pasal 32 ayat (2) menjelaskan bahwa Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, hal ini sangat berpengaruh menurunnya jumlah pemohon Akta Kelahiran. Berdasarkan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 Perihal Tindaklanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 yang menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehubungan dengan hal tersebut maka sejak diterbitkannya Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pelaporan kelahiran yang nelampaui batas waktu 1 (satu) tahun, pencatatannya tidak lagi memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri, dan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran pencatatan kelahirannya dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

A. Tujuan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang integritas, anti KKN, Responsif dan akuntabel.

B. Sasaran

Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka isu-isu langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasinal untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali yang akan dilaksanakan mencakup program:

1. Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
2. Program Pengelolaan profil kependudukan;
3. Program Pendaftaran penduduk;
4. Program Pencatatan sipil;
5. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah.

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							10.163.017.000,00				10.263.017.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.163.017.000,00				10.263.017.000,00
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							10.163.017.000,00				10.263.017.000,00
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							9.549.817.000,00				7.691.471.000,00
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0,00				0,00
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
						-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											

						-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
						-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
						-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

						-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	15 Laporan	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	0,00
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
						-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Laporan	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,00
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7.234.809.000,00				6.969.909.000,00
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	55 Orang/bulan	-	5.982.909.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	5.982.909.000,00
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	1.251.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	987.000.000,00
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											

						-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	-	12 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00
2	12	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
						-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0,00
2	12	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
						-	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	0,00
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
						-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	18 Laporan	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0,00
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.313.000.000,00				321.000.000,00

2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
						-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Paket	-	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Paket	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	30.000.000,00
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material											
						-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Paket	-	880.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	25.000.000,00

2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
						-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	120.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	120.000.000,00
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	140.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.000.000,00
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							493.693.000,00				0,00
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel											
						-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	115 Unit	-	185.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	115 Unit	0,00
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	308.693.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00
2	12	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Unit	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00

2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							383.315.000,00				298.315.000,00
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	3.315.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.315.000,00
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	380.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	295.000.000,00
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							125.000.000,00				102.247.000,00
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
						-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	11 Unit	-	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.247.000,00
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Unit	-	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.000.000,00
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							25.000.000,00				1.562.791.000,00
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk							25.000.000,00				1.562.791.000,00
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan											
						-	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	40500 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	40500 Dokumen	146.500.000,00
2	12	02	2.01	08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk											
						-	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	190050 Dokumen	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	190050 Dokumen	1.416.291.000,00
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL							90.000.000,00				235.200.000,00
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil							40.000.000,00				235.200.000,00
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting											

						-	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	21901 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	21901 Dokumen	217.000.000,00
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan											
						-	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	18.200.000,00
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							50.000.000,00				0,00
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil											
						-	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	0,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							498.200.000,00				773.555.000,00
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							50.000.000,00				360.355.000,00
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											

						-	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	211850 Dokumen	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	211850 Dokumen	360.355.000,00
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							313.200.000,00				313.200.000,00
2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
						-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	313.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	313.200.000,00
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							135.000.000,00				100.000.000,00
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan											

						-	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	135.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	100.000.000,00
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN							0,00				0,00
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan							0,00				0,00
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota											
						-	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain											
						-	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	0,00
TOTAL												**10.163.017.000,00**				**10.263.017.000,00**

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tahun 2024, merupakan pedoman bagi segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selain sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja, renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan masa mendatang oleh para pimpinan managemen dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Dalam perjalanan waktu tidak menutup kemungkinan rencana kerja ini berubah karena beberapa faktor, misalnya regulasi dari Pusat, kebijakan- kebijakan lainnya, karena kebutuhan/kepentingan organisasi dan lain-lain. Namun diupayakan perubahan- perubahan yang dilakukan tidak terlalu jauh berbeda dari garis- garis besar yang telah disusun.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, pelayanan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Boyolali dapat lebih meningkat sehingga dapat mewujudkan Pelayanan Prima kepada masyarakat.

M. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan taufik-Nya sehingga kita dapat menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Rencana Kerja ini disusun dengan maksud agar dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Perangkat Daerah (**PD**) mempunyai pedoman serta arah dalam pelaksanaan program-program dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali pada khususnya dan masyarakat Boyolali pada umumnya.

Adapun Rencana Kerja ini meliputi sistem, koordinasi, manajemen dan partisipatif serta aspek potensi yang ada dalam **PD** terdapat unsur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tentunya hal ini merupakan hasil analisa yang didasarkan pada kebutuhan serta kecenderungan yang berlaku pada masyarakat dan desa, dengan demikian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dapat mengidentifikasi serta menentukan sasaran-sasaran strategis, yang selanjutnya dipergunakan sebagai penentuan langkah-langkah guna mendorong serta menumbuh kembangkan keberdayaan masyarakat desa dalam rangka ikut serta, berperan dalam pembangunan yang akan dilaksanakan 1 tahun kedepan baik oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, pada khususnya dan masyarakat Boyolali pada umumnya.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengabdian dengan sebaik baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pengelolaan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ……......1
1.2 Landasan Hukum ……..……1
1.3 Maksud dan Tujuan …… 2
1.4 Sistematika Penulisan…… 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ……..…… 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …….. 10
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah …… 10
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ……...…… 11

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional …… 24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah …… 24

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan ……...… 26

BAB V PENUTUP ……..……..…… 48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Stategis (Renstra) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Boyolali menyusun Renja Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang selaras dengan visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ini disusun berdasarkan kebijakan pemerintah dan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dan memperhatikan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali serta dokumen – dokumen lainya secara sinergi.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2024 akan tepat sasaran dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh ketertiban pelaku pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusunnya Renja ini secara stimulan akan diselaraskan dengan perubahan paradigma dan nilai yang selalu berkembang dalam organisasi dan masyarakat dengan tetap mengacu pada skala prioritas Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005 – 2025 (lembaran daerah Kab. Boyolali 2010 no. 3)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali merupakan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan tahunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali dalam rangka mewujudkan konsistensi, keterpaduan dan kesinergian program – program pembangunan.

Adapun tujuan Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan BP3D Kabupaten Boyolali tahun 2024;
2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

2.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2023

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, catatan penting yang perlu medapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Berisikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2022 dan capaian Renstra **Perangkat Daerah** secara umum dapat dilihat berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022. Adapun realisasi program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

REALISASI ANGGARAN Per 31 Desember 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN		%
		ALOKASI	REALISASI	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**9.921.371.000**	**9.745.405.325**	**98,23**
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**8.618.338.000**	**8.507.148.472**	**98,71**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.733.338.000	7.623.528.472	98,58
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	885.000.000	883.620.000	99,84
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**786.769.000**	**748.436.331**	**95,13**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	5.982.000	99,70
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.204.000	38.669.672	89,50
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.000.000	124.346.898	95,65
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.900.000	34.442.350	75,04
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
	Penyediaan Bahan/Material	97.715.000	90.920.662	93,05
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	224.287.000	214.462.180	95,62
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.663.000	239.612.569	99,98
C	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**50.200.000**	**46.950.000**	**93,53**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	**50.200.000**	**46.950.000**	**93,53**
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**99.378.000**	**85.877.313**	**86,41**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.800.000	2.800.000	100,00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN		%
		ALOKASI	REALISASI	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.578.000	83.077.313	86,02
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**366.686.000**	**356.993.209**	**97,36**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.386.000	59.066.617	87,65
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.300.000	98.373.203	99,07
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	199.553.389	99,78
2.	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**1.212.200.000**	**1.121.146.000**	**92,49**
A	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**1.212.200.000**	**1.121.146.000**	**92,49**
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**60.000.000**	**59.385.000**	**98,98**
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	**1.102.200.000**	**1.012.699.000**	**91,88**
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	**50.000.000**	**49.062.000**	**98,12**
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT dan MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**103.900.000**	**103.900.000**	**100,00**
a.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**248.060.000**	**240.440.180**	**96,93**
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan , Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna) , Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	50.000.000	49.770.180	99,54

NO	KEGIATAN	ANGGARAN		%
		ALOKASI	REALISASI	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	50.000.000	46.500.000	93,00
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	16.500.000	14.950.000	90,61
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	131.560.000	129.2200.000	98,22
	JUMLAH	11.381.631.000	11.108.991.505	97,59

Berdasarkan Data Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Tahun 2022 di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali melaksanakan 3 program dan 7 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan anggaran Tahun 2022 secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan terlaksana dengan baik, hal ini dapat terlihat dari jumlah anggaran belanja langsung Rp. **11.381.631.000** ,- terealisasi sebesar Rp. **11.106.991.505**,- (97,59 %).

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja dalam proses pengukuran kinerja yang perlu diperhatikan adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam proses penetapan kinerja dengan realisasinya.

Berdasarkan Tahun 2022 realisasi tingkat capaian kinerja RPJMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	2022		%
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	2 %	2 %	100
		Persentase BUMDES yang berkembang	51,34 %	81,99 %	159,70
		Persentase peningkatan Posyantek Desa	11,11 %	11,49 %	103,42
		Persentase PKK Aktif	100 %	100 %	100

	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah desa yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Aktif	261 Desa	261 Desa	100
		Jumlah laporan kegiatan gotong royong masyarakat	10 Dokumen	10 Dokumen	100
		Jumlah BUMDEs yang terbentuk	26 BUMDes	33 BUMDes	126,92
		Jumlah Posyantek yang terbentuk	22 Lembaga	30 Lembaga	136,36
		Jumlah PKK desa yang aktif	261 Desa	261 Desa1	100
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah kawasan perdesaan yang dikembangkan	1 Kawasan	1 Kawasan	100
	Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah pembentukan Kawasan pedesaan	1 Kawasan	1 Kawasan	100
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi	14,18 %	18,81 %	100
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan desa	261 Desa	261 Desa	100
		Persentase desa yang menjalankan kebijakan pengentasan kemiskinan (Program Kemiskinan)	100 %1	100 %	100
		Jumlah SDM Desa yang meningkat kapasitasnya	200 Orang	251 Orang	175,50

		Jumlah Desa yang Update Aset Desa1	15 Desa	15 Desa	100
		Jumlah Data perkembangan BUMDes	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah formasi jabatan pada pemerintah desa yang terisi	47 Formasi	49 Formasi	104,26
4	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan desa yang difasilitasi sesuai ketentuan	4,98 %	4,98 %	100
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah penataan desa yang difasilitasi sesuai ketentuan	13 Desa	13 Desa	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.	100 %	100 %	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.	100 %	100 %	100
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	25 dokumen	25 Dokumen	100

Berdasarkan capaian realisasi target RPJMD Tahun 2022 di atas, maka tingkat capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, Dengan Indikator Kinerja Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Pada Tahun 2022 menargetkan 2 % dengan realisasi 2 %, dengan kegiatan BBGRM (Bulan Bhakti Gorong Royong Masyarakat)

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
   Indikator Kinerja “Jumlah kawasan perdesaan yang dikembangkan” pada tahun 2022 menetapkan target sejumlah 1 kawasan dengan realisasi 1 kawasan atau 100 %. Fasilitasi 1 kawasan pedesaan yang meliputi 5 Desa Di Kecamatan Sawit antara lain : Cepoko sawit , Kemasan, Tlawong, Tegalrejo dan Gombang.

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
   Indikator Kinerja “Persentase desa yang tertib administrasi ” dengan target 14,18 % terealisasi 14,18 % desa atau 100%. Dalam Mencapai target tersebut Dispermasdes melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sejumlah 261 Desa.

4. Program Penataan Desa
   Indikator Kinerja “Persentase penataan desa yang difasilitasi sesuai ketentuan” dari target 4,98 % terealisasi 4,98 % atau 100% dengan kegiatan Penyelenggaraan penataan Desa sejumlah 13 Desa.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan pelayanan sudah menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai Pedoman bagi setiap Pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya sehingga dapat dilihat bahwa tingkat keberhasilan pelayanan menunjukkan hasil yang baik.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan tidak dapat diimplementasikan dengan baik jika pemerintah tidak tanggap terhadap kondisi yang berkembang dimasyarakat maupun kondisi yang ada di pemerintahan.

Oleh sebab itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali sebagai pembantu Bupati dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus peka terhadap isu-isu strategis yang sedang berkembang dan segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat berkaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Boyolali.

Beberapa isue strategis penting yang perlu untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kinerja aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
2. Belum optimalnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, pengelolaan sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG)
4. Masih rendahnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan perumahan berbasis masyarakat
5. Masih rendahnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif.
6. Belum optimalnya dalam pengelolaan pelestarian asset.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten (Forum Rapat PD) sehingga secara subtansi materi Program dan kegiatan dalam RKPD sudah ada keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah (PD).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali dalam menyusun Rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penyusunan awal RKPD, hasil identifikasi permasalahan menjadi konsep rumusan program `dan kegiatan,selanjutnya program dan kegiatan tersebut dengan menganalisa kebutuhan PD kemudian dipilah antara program dan kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin.

Penjabaran prioritas pembangunan daerah terhadap sasaran pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali dalam program pembangunannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab Boyolali	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	2	2.550.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab Boyolali		2	2.550.000.000	
	Kegiatan										
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Boyolali	Jumlah desa yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Aktif	261 desa	50.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Boyolali		261 desa	50.000.000	
			Jumlah laporan kegiatan gotong royong masyarakat	10 dokumen	2.500.000.000				10 dokumen	2.500.000.000	
	Sub Kegiatan										
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab Boyolali	Jumlah peserta peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	50 lembaga	50.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab Boyolali	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 lembaga	50.000.000	

	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Ds Gunung Kec. Simo, Ds Gilirejo Kec Wonosamodro, Ds Catur Kec. Sambi	Jumlah desa yang menerima bantuan bulan bhakti gotong royong	10 desa	2.500.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Ds Gunung Kec. Simo, Ds Gilirejo Kec Wonosamodro , Ds Catur Kec. Sambi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	10 desa	2.500.000.000	
	Program										
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab Boyolali	Persentase BUMDES yang berkembang	81,34	180.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab Boyolali		81,34	180.000.000	
	Kegiatan			%					%		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalamMeningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab Boyolali	Jumlah BUMDEs yang terbentuk	26 Bumdes	180.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Boyolali		26 Bumdes	180.000.000	
	Sub Kegiatan										
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab Boyolali	Jumlah potensi desa yang teridentifikasi	26 Bumdes	-	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	26 Bumdes	-	
			Jumlah lembaga ekonomi desa yang dilatih	90 orang	-				90 orang	-	
			Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang menerima bantuan	5 lembaga	100.000.000				5 lembaga	100.000.000	
			Jumlah BUMDEs yang mengikuti workshop	1 kegiatan	80.000.000				1 kegiatan	80.000.000	

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab Boyolali	Persentase peningkatan Posyantek Desa	35	80.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab Boyolali		35	80.000.000	
	Kegiatan										
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab Boyolali	Jumlah Posyantek yang terbentuk	22 lembaga	80.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Boyolali		22 lembaga	80.000.000	
	Sub Kegiatan										
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab Boyolali	Jumlah peserta Pelatihan keterampilan pemanfaatan TTG	45 orang	-	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab Boyolali	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	45 orang	-	
			Jumlah Inovasi dalam bidang TTG	3 inovasi	-				3 inovasi	-	
			Jumlah Partisipan dalam gelar TTG Tingkat Nasional	1 kelompok	80.000.000				1 kelompok	80.000.000	
			Jumlah posyantek yang menerima Bantuan modal	0	-				0	-	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab Boyolali	Persentase PKK Aktif	100	410.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab Boyolali		100	410.000.000	
	Kegiatan										
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakatdan Kesejahteraan Keluarga	Kab Boyolali	Jumlah PKK desa yang aktif	261 desa	410.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Kab Boyolali		261 desa	410.000.000	

						Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan										
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab Boyolali	Jumlah Kelompok Binaan PKK yang dibina	53 desa	410.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	53 desa	410.000.000	
5	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kab Boyolali	Jumlah kawasan perdesaan yang dikembangkan	1,00		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Kab Boyolali		1,00		
	Kegiatan										
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kab Boyolali	Jumlah pembentukan Kawasan pedesaan	1	-	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Kab Boyolali		1	-	
	Sub Kegiatan										
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab Boyolali	Jumlah fasilitasi Pembentukan Kawasan pedesaan	1	-	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	-	
			Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	**833**					**833**		
			Nilai EKPPD	**34200**					**34200**		
6	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab Boyolali	Persentase desa yang tertib administrasi	13,79	20.000.000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab Boyolali		13,79	20.000.000	
	Kegiatan										
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Boyolali	Jumlah Desa yang menyusun dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan desa	261 desa	20.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Boyolali	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	261 desa	20.000.000	
	Sub Kegiatan										
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen perencanaan desa	261 dokumen	-	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	261 dokumen	-	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen APBDesa	261 desa	-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Pengelolaan	261 desa	-	

								Keuangan Desa			
			Jumlah Laporan Keuangan Desa yang disusun	261 desa	-				261 desa	-	
			Jumlah fasilitasi administrasi pendapatan desa	261 desa	-				261 desa	-	
			Jumlah Dokumen pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan desa	3 dokumen	-				3 dokumen	-	
7	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab Boyolali	Persentase desa yang menjalankan kebijakan pengentasan kemiskinan (Program Kemiskinan)	100		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab Boyolali		100		
	Kegiatan										
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Boyolali	Jumlah desa yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan	261 desa		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Boyolali		261 desa		
	Sub Kegiatan										
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab Boyolali	jumlah Dokumen petunjuk pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa	1 dokumen	-	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab Boyolali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 dokumen	-	
	Kegiatan										
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Boyolali	Jumlah SDM Desa yang meningkat kapasitasnya	200 orang		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Boyolali		200 orang		
	Sub Kegiatan										
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab Boyolali	jumlah Kepala Desa yang memahami tupoksi		-	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab Boyolali	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		-	
			Jumlah Perangkat Desa yang memahami tupoksi	100 orang	-				100 orang	-	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab Boyolali	Jumlah anggota BPD yang memahami tupoksi	100 orang	-	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab Boyolali	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan	100 orang	-	

								Kapasitas			
	Kegiatan										
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Boyolali	Jumlah Desa yang mendapatkan pendampingan administrasi pemerintahan	36 desa		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Boyolali		36 desa		
	Sub Kegiatan										
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Boyolali	Jumlah aplikasi desa yang dikembangkan		-	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		-	
			Jumlah desa yang mengikuti pelatihan aplikasi		-					-	
			Jumlah desa melaksanakan Administrasi pemerintahan	36 desa	-				36 desa	-	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab Boyolali	Jumlah data profil desa yang di update	45 desa	-	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Profil Desa	45 desa	-	
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab Boyolali	Jumlah dokumen Laporan Kepala Desa	37 desa	-	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab Boyolali	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	37 desa	-	
			Jumlah Aplikasi pelaporan kinerja kepala desa yang dikembangkan	1 aplikasi	-				1 aplikasi	-	
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab Boyolali	Jumlah dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 dokumen	-	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab Boyolali	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	1 dokumen	-	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab Boyolali	Jumlah Desa Berprestasi	1 desa	-	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 desa	-	
	Kegiatan										
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Boyolali	Jumlah Desa yang Update Aset Desa	15 desa		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Boyolali		15 desa		
	Sub Kegiatan										
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen pengelolaan Aset Desa	52 dok	-	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	52 dok	-	
			Jumlah pengelola aset desa yang meningkat kapasitasnya	45 orang	-				45 orang	-	

			Jumlah desa yang memiliki data aset desa yang tervalidasi	15 desa	-				15 desa	-	
	Kegiatan										
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Boyolali	Jumlah Data perkembangan BUMDes	1 dokumen		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Boyolali		1 dokumen		
	Sub Kegiatan										
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab Boyolali	Jumlah BUMDes yang dibina	30 bumdes	-	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	30 bumdes	-	
	Kegiatan										
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah formasi jabatan pada pemerintah desa yang terisi	72 Formasi		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			72 Formasi		
	Sub Kegiatan	**Kab Boyolali**					**Kab Boyolali**				
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab Boyolali	Jumlah pengisian jabatan kepala desa	2 formasi	20.000.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab Boyolali	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2 formasi	20.000.000	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab Boyolali	Jumlah pengisian jabatan Perangkat Desa	70 formasi	-	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab Boyolali	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	70 formasi	-	
	Program										
	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab Boyolali	Persentase penataan desa yang difasilitasi sesuai ketentuan	4,98	8.197.300.000	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab Boyolali	Persentase penataan desa yang difasilitasi sesuai ketentuan	4,98	8.197.300.000	
	Kegiatan										
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab Boyolali	Jumlah penataan desa yang difasilitasi sesuai ketentuan	14 desa	8.197.300.000	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab Boyolali	Jumlah penataan desa yang difasilitasi sesuai ketentuan	14 desa	8.197.300.000	
	Sub Kegiatan										
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan perubahan status Kelurahan menjadi	1 dok	-	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab Boyolali	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan	1 dok	-	

			Desa					Status Desa			
			Jumlah Perangkat desa dan anggota BPD yang menerima kompensasi	18 Orang	6.697.300.000				18 Orang	6.697.300.000	
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab Boyolali	Jumlah desa memiliki dokumen Rencana tata ruang wilayah desa	5 desa	-	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab Boyolali	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	5 desa	-	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab Boyolali	Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan TMMD	3 desa	1.500.000.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab Boyolali	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	3 desa	1.500.000.000	
			Jumlah desa yang menerima bantuan sarana prasarana desa	5 desa	-				5 desa	-	
	Program										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab Boyolali	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100,00	11.355.769.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Boyolali		100,00	11.355.769.000	
	Kegiatan										
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Boyolali	Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.	100	10.888.257.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Boyolali	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	10.888.257.000	
	Sub Kegiatan										
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kab Boyolali	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	33	9.957.541.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Boyolali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	9.957.541.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Boyolali	Terbayarnya gaji Pelaksana tugas ASN	12	930.716.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	930.716.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Boyolali	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab Boyolali	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	-	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Boyolali	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Boyolali	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	-	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab Boyolali	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	1	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab Boyolali	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab Boyolali	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2		
	Kegiatan										
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Boyolali	Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	12 Bulan	309.642.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Boyolali	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	309.642.000	
	Sub Kegiatan										
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kab Boyolali	Belanja alat alat listrik	4	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Boyolali	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	3.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Boyolali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Boyolali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab Boyolali	Belanja peralatan rumah tangga kantor	4	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Boyolali	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	3.000.000	

	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Boyolali	Belanja Bahan Bakar Minyak	4	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Boyolali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	40.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Boyolali	Belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4	30.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Boyolali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	30.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
	Penyediaan bahan / Material	Kab Boyolali	Belanja alat tulis kantor	4	25.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab Boyolali	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	25.000.000	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab Boyolali	makan minum harian dan rapat	4	108.642.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Boyolali	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	108.642.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab Boyolali	Perjalanan dinas	4	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Boyolali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	100.000.000	
	Kegiatan										
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Boyolali	Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.	100	83.800.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Boyolali	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	83.800.000	
	Sub Kegiatan										
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Boyolali	Jasa surat menyurat	12	2.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	2.200.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Boyolali	Jasa telepon,air,listrik	12	81.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	81.600.000	
	Kegiatan										
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Boyolali	Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100	74.070.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Boyolali	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	74.070.000	
	Sub Kegiatan										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kab Boyolali	jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	20	54.070.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Kab Boyolali	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	20	54.070.000	

	Operasional atau Lapangan					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Boyolali	Jasa pemeliharaan peralatan kerja	45	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Boyolali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	20.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Boyolali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Boyolali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		
	Kegiatan										
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	26	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Boyolali	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26	-	
	Sub Kegiatan										
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	1	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	1	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	-	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Boyolali	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	16	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Boyolali	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Boyolali	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Boyolali	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	-	
					22.793.069.000	**-**	**-**	**-**		**22.793.069.000**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembangunan harus bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis dan tanggap terhadap perkembangan jaman, melalui tahapan yang terdiri dari RPJP 25 tahunan dan RPJM 5 tahunan dan Renja 1 tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi, misi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang mengacu kepada RPJMD Propinsi Jateng 2019-2024 dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Boyolali.

RPJMD Kabupaten Boyolali merupakan pedoman landasan dan referensi dalam menyusun RKPD Kabupaten Boyolali dan Renstra Perangkat Daerah. RKPD Merupakan dokumen perencanaan pemerintahan untuk periode 1 tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2024. Sedangkan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun dalam bentuk Renja, merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan program indikatif.

3.2 Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2024

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi yang rumusannya menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa mendatang, sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan secara spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu yang secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026, yang menjadi pedoman Dispermasdes Kabupaten Boyolali dalam menyusun Renstra 2021-2026. RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Visi pembangunan yang ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah :

“BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI MELANGKAH DAN MENATA BERSAMA, PENUH TOTALITAS (METAL)”

Pengertian terhadap tiga kata kunci, yaitu Boyolali Maju, Melanjutkan Pro Investasi, Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL) adalah sebagai berikut :

1. Boyolali Maju

   Berarti *no-one left behind,* yakni tidak ada pihak yang terlewatkan untuk merasakan kemajuan, karena semua komponen telah menjadi subyek pembangunan.

2. Melanjutkan Pro Investasi

   Melanjutkan arah pembangunan yang pro investasi berarti tidak hanya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membangun sinergi dengan arah pembangunan nasional, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional secara sistematis dan cepat.

3. Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)

   Pembangunan yang efektif membutuhkan prasyarat berupa sinergi dan kolaborasi seluruh komponen *governance*, yakni masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

   Seluruh komponen daerah diharapkan mampu melangkah dan menata bersama penuh totalitas yang merupakan implementasi dari prinsip gotong royong.

   Gotong royong dengan menjalankan perannya masing-masing namun saling bersinergi dan berkolaborasi dalam ikatan visi pembangunan daerah maupun landasan nilai kearifan yang tertanam kuat di tengah masyarakat berupa filosofi dari Pangeran Sambernyawa *“Tiji Tibeh (mati siji, mati kabeh, mukti siji mukti kabeh)”.*

Untuk mencapai visi tersebut di atas dengan melaksanakan misi sebagai berikut :

1. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan;
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya;
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional;
4. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing.

Guna mewujudkan visi Bupati, Dipermasdes Kabupaten Boyolali mengemban misi yang kedua yaitu : Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya dan keempat yaitu Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Program dan Kegiatan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali, harus selaras dengan isu-isu strategis dan tema pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2024. Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BOYOLALI
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**12.077.441.000,00**							**21.241.537.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.077.441.000,00**							**21.241.537.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**12.077.441.000,00**							**21.241.537.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 Persen 100 Persen**			**-**	**6.694.707.000,00**						**100 Persen 100 Persen**	**11.437.753.000,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.*	-			100 persen	5.503.111.000,00			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah	-	10.970.241.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	4.490.411.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah		9.957.541.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1.012.700.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berintegritas dengan ASN yang semakin profesional.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah		1.012.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	943.846.000,00			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	309.642.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	6.100.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	70.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	36.800.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	156.946.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	50.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	75.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	247.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		108.642.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	302.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	85.250.000,00			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	83.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.650.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		2.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	81.600.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		81.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	162.500.000,00			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	74.070.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	102.500.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	54.070.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	60.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	***Persentase penataan desa yang difasilitasi sesuai ketentuan***	**4,98 Persen**			**4,98 Persen**	**0,00**						**4,98 Persen**	**1.500.000.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Jumlah penataan desa yang difasilitasi sesuai ketentuan*	-			14 desa	0,00			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa														
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				1 Desa	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				5 Desa	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				3 Unit	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**-**	**6,00 kawasan**			**-**	**0,00**						**1,00 kawasan**	**0,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-			-	0,00			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**13,79 Persen 100 Persen**			**-**	**5.063.784.000,00**						**13,79 Persen 100 Persen**	**5.083.784.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	5.063.784.000,00			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	5.083.784.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1566 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				261 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				261 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				2502 Orang	5.063.784.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		5.063.784.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				261 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				22 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				45 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				52 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				100 Orang	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				20 Desa	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				783 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat*** ***Persentase PKK Aktif*** ***Persentase peningkatan Posyantek Desa*** ***Persentase BUMDES yang berkembang***	**100 Persen 100,00 Persen 51,00 Persen 3,00 Persen**			**2,00 Persen 100,00 Persen 35,00 Persen 81,34 Persen**	**318.950.000,00**						**100 Persen 100,00 Persen 51,00 Persen 3,00 Persen**	**3.220.000.000,00**	

	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah PKK desa yang aktif* *Jumlah Posyantek yang terbentuk* *Jumlah desa yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Aktif* *Jumlah BUMDEs yang terbentuk* *Jumlah laporan kegiatan gotong royong masyarakat*	-			261 desa 22 lembaga 261 desa 26 Bumdes 10 dokumen	318.950.000,00			-	Peningkatan keberdayaan masyarakat desa melalui optimaliasi potensi/aset desa, penguatan BUMDesa dan pembangunan kawasan pedesaan.	-	-	3.220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Lembaga	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keberdayaan masyarakat desa melalui optimaliasi potensi/aset desa, penguatan BUMDesa dan pembangunan kawasan pedesaan.	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				22 Dokumen	180.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keberdayaan masyarakat desa melalui optimaliasi potensi/aset desa, penguatan BUMDesa dan pembangunan kawasan pedesaan.	-		180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	58.000.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keberdayaan masyarakat desa melalui optimaliasi potensi/aset desa, penguatan BUMDesa dan pembangunan kawasan pedesaan.	-		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				10 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan keberdayaan masyarakat desa melalui optimaliasi potensi/aset desa, penguatan BUMDesa dan pembangunan kawasan pedesaan.	-		2.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	80.950.000,00	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		410.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	J U M L A H							**12.077.441.000,00**							**21.241.537.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dan disusun secara optimal dengan mensinergiskan antara perencanaan dan penganggaran. Rencana Kerja disusun dengan memperhatikan isu stratergis yang merupakan salah satu pilar pembangunan daerah.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sasaran dan target yang diamanatkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dalam Renstra serta memperhatikan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap Tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta perkembangan lingkungan organisasi.

N. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di sektor transportasi yang efisien dan efektif terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis seperti globalisasi yang ditandai adanya krisis keuangan global sebagai akibat berlakunya ekonomi pasar; kebijakan otonomi daerah; perubahan kondisi sosial politik yang mengarah kepada demokratisasi yang menjujung tinggi hak asasi manusia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah kepada peningkatan skala usaha dan efisiensi dalam segala bidang usaha; semakin meningkatnya kepedulian masyarakat kepada kelestarian lingkungan hidup; serta adanya keterbatasan sumber daya alam seperti energi, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut, konsep pembangunan transportasi perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan di sektor transportasi di seluruh nusantara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu dasar dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala SKPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja SKPD serta keterkaitan visi, misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan *bottom up* serta perencanaan *top down*.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa Rencana Kerja SKPD sebagai penjabaran Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR ..... i.

DAFTAR ISI ..... ii.

DAFTAR TABEL..... iii.

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 4.

1.4 Sistematika..... 5.

BAB II. EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU ..... 6.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali 6

2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Boyolali..... 7.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ..... 35.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..... 62.

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional ..... 62.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan 64

BAB V PENUTUP..... 86

DAFTAR TABEL

- Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Boyolali 7
- Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali 34
- Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Boyolali 38
- Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Boyolali Tahun 2023 60
- Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 66

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan yang merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Perhubungan menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Boyolali ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga

berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi

maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Boyolali.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RKPD, bahwa Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
o. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Boyolali dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pemberian perijinan, sosialisasi/penyuluhan dan penyampaian informasi, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaporan dibidang perhubungan.

Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan, Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOYOLALI

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-4) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD Berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan Kabupaten Boyolali Tahun 2023 dan Capaian RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada

dibawah ini beserta penjelasan terhadap pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d dengan tahun (n-3) 2021	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	**Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022**	**Tingkat Realisasi (%)**	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

X	**2**	**15**	**02**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik	6.230.000.000							
	2	15	02	2	02			**Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten /Kota**	Jumlah kebutuhan sarana perlengkapan jalan untuk keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas yang tersedia	5.905.000.000	-	5.905.000.000,00	6.503.215.359	110	5.905.000.000,00	-	-
2	15	02	2	02				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik lampu penerangan jalan umum yang dipasang	5.080.000.000	4.853.741.246	4.000.000.000	5.208.740.197	130	5.080.000.000	314.964.471	86

									Jumlah rambu rambu lalu lintas yang dipasang	-	-	-	-	-	-	-	-
									Panjang marka jalan yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
									Jumlah pagar pengaman jalan yang dipasang	-	-	-	-	-	-	-	-
2	15	02	2	02	04			Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	775.000.000	481.245.610	775.000.000	1.245.857.162	160	775.000.000	314.964.471	86

2	1 5	0 2	2	0 2	0 3			Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah tempat-tempat pemberhentian angkutan umum yang direhabilitasi/ dipelihara	50.000.000	-	50.000.000	48.618.000	97	50.000.000	-	-
2	**1 5**	**0 2**	**2**	**0 6**				**Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota**	Jumlah kecamatan yang kondisi perlengkapan jalannya sesuai manajemen rekayasa lalu lintas menurut peraturan perundang-undangan	225.000.000	-	195.000.000,00	192.818.500	100	195.000.000	-	-

2	1 5	0 2	2	0 6	0 2			Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan dalam rangka manajemen rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten/kota	195.000.000	-	195.000.000	192.818.500	100	195.000.000	-	-
2	1 5	0 2	2	0 6				Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan car free Sunday	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1 5	0 2	2	0 6	0 4			Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan	Jumlah penindakan pelanggaran angkutan jalan	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-

								Kabupaten/Kota									
2	15	02	2	01				**Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen rencana induk jaringan LLAJ yang tersedia	-	-	30.000.000,00	-	-	30.000.000	-	-
2	15	02	2	01	01			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian perhubungan yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-

2	15	02	2	01	02			Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah pelajar yang mengikuti lomba pemilihan pelopor keselamatan LLAJ di Kabupaten Boyolali	-	-	30.000.000	22.789.320	76	30.000.000	-	-
2	15	02	2	01	02			Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	'Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi terkait aturan perbengkelan /karoseri	-	-	-	-	-	-	-	-
									Jumlah aplikasi bengkel online yang dikembangkan dan dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-

2	15	02	2	01	02			**Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/kota**	Jumlah rekomendasi andalalin yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-
2	15	02	2	03				Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Jumlah dokumen andalalin yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-
2	15	02	2	07	04			Pengawasan pelaksanaaan rekomendasi andalalin	Jumlah lokasi pelaksanaan andalalin yang diawasi	-	-	-	-	-	-	-	-

2	1 5	0 2	2	0 4				**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Jumlah lokasi parkir yang dikelola atau difasilitasi	30.000.000	-	30.000.000	350.751.000	100	30.000.000	-	-
2	1 5	0 2	2	0 4	0 2			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana perparkiran yang tersedia	30.000.000	-	30.000.000	350.751.000	100	-	-	-
2	1 5	0 2	2	0 3				**Pengelolaan terminal penumpang tipe C**	Jumlah terminal yang yang dilengkapi Fasilitas penyelenggra	70.000.000	-	70.000.000	69.257.000	99	70.000.000	-	-

									an terminal penumpang tipe C							
2	15	02	2	03	04			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal tipe C yang dipelihara	70.000.000	-	70.000.000	69.257.000	99	70.000.000	-	-
2	15	02						**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum	1.553.078.000	-	-	-	-	-	-	-

2	1 5	0 2	2	0 5				**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Jumlah kendaraan angkutan umum yang diuji	1.553.078.000	-	1.553.078.000,00	1.472.526.850	95	1.553.078.000,00	-	-
2	1 5	0 2	2	0 5	0 1			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana prasarana penunjang pengujian kendaraan bermotor yang tersedia	1,460,078,000	2.223.978.000	1.460.078.000	1.383.692.650	95	1.460.078.000	-	-
2	1 5	0 2	2	0 5	0 7			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara/ direhabilitasi/ dikalibrasi	93,000,000	73.265.000	93,000,000	88.834.200	95	93,000,000	-	-

2	1 5	0 2						**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase sarana dan prasarana pendukung angkutan aglomerasi yang tersedia	218.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	1 5	0 2	2	0 9				**Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	Jumlah jalur trayek angkutan umum yang tersedia di Kabupaten Boyolali	218.000.000	-	99.000.000,00	-	-	218.000.000	-	-
2	1 5	0 2	2	0 9	0 2			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar	Jumlah pengelola angkutan umum yang mengikuti temu wicara untuk menciptakan pelayanan	218.000.000	-	90.000.000	443.633.937	492	218.000.000	-	-

								Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	angkutan di Kabupaten Boyolali yang aman ,nyaman untuk keselamatan penumpang							
									Jumlah halte yang dibangun	-	-	-	-	-	-	-
									Jumlah peserta yang mengikuti lomba pemilihan sopir/juru mudi /awak kendaraan umum teladan di tingkat Kabupaten	-	-	9.000.000	-	-	-	-

X	X X	0 1						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	27.749.431.000	-	-	-	-	-	-	-
X	X X	0 1	2					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	6.113.103.000	-	6.113.103.000,00	5.689.727.208	93	6.113.103.000,00	-	-
X	X X	0 1	2	0 2	0 1			Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan selama 1 tahun	4.576.003.000	4.242.056.149	4.576.003.000	4.052.662.092	88	4.576.003.000	1.408.967.517	45

X	X X	0 1	2	0 2	0 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa administrasi perkantoran yang tersedia selama 1 (satu) tahun	1.537.100.000	1.548.668.964	1.537.100.000	1.637.065.116	106	1.537.100.000	476.286.700	40
X	X X	0 1	2	0 2	0 3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
X	X X	0 1	2	0 2	0 4			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
X	X X	0 1	2	0 1	0 5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X	X X	0 1	2	0 1	0 6			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	-	-	-	-	-	-	-	-
X	X X	0 1	2	0 1	0 7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
X	X X	0 1	2	0 1	0 8			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	X X	0 1	2	0 6				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Kebutuhan administrasi perrkantoran perangkat daerah	388.460.000	-	388.460.000,00	834.494.298	214	-	-	-

X	X X	0 1	2	0 6	0 1			Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor yang disediakan	3.000.000	986.000	3.000.000	2.949.936	98	-	-	-
X	X X	0 1	2	0 6	0 3			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama 1 (satu) tahun	110.000.000	265.942.232	-	216.323.095	100	110.000.000	6.877.540	40
X	X X	0 1	2	0 6	0 4			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah BBM untuk operasional yang disediakan selama 1 (satu) tahun	100.000.000	192.000.000	192.000.000	244.533.360	127	100.000.000	52.947.354	35

X	X X	0 1	2	0 6	0 5			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan selama 1 (satu) tahun	30.000.000	86.428.085	30.000.000	76.662667	255	30.000.000	8.490.000	30
X	X X	0 1	2	0 6	0 7			Penyediaan bahan / Material	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan selama 1 (satu) tahun	25.000.000	22.763.719	25.000.000	33080775	132	25.000.000	9.652.100	35
X	X X	0 1	2	0 6	0 8			Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan selama 1 (satu) tahun	38.460.000	74.472.898	38.460.000	158.965.000	413	38.460.000	19.150.000	25

X	X X	0 1	2	0 6	0 9			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rapat-rapat untuk koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun	82.750.000	61.047.000	100.000.000	101.979.465	101	-	-	-
X	X X	0 1	2	0 7				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah kebutuhan sarana prasarana pendukung kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
X	X X	0 1	2	0 7	0 2			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas dan operasioanal lapangan disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-

X	X X	0 1	2	0 7	1 1			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dibangun	-	-	-	-	-	-	-	-
X	X X	0 1	2	0 5	0 2			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya disediakan	-	-	-	111.098.568	100	-	-	-
X	X X	0 1	2	0 8				**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah kebutuhan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	21.002.050.000	-	21.002.800.000,00	22.202.311.211	105	21.002.050.000	-	-

X	X X	0 1	2	0 8	0 1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.298.500	99	1.300.000	400.000	45
X	X X	0 1	2	0 8	0 2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa listrik, dan air yang disediakan selama 1 (satu) tahun	21.000.000.000	20.335.882.218	21.000.000.000	22.200.758.311	105	21.000.000.000	8.143.372.108	40
X	X X	0 1	2	0 8	0 3			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama 1 (satu) tahun	-	21.125.000	-	-	-	-	-	-
X	X X	0 1	2	0 8	0 4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kliring dan pembelian cek yang disediakan	750.000	734.400	1.500.000	254.400	17	750.000	275.000	45

									selama 1 (satu)tahun							
X	X X	0 1	2	0 9				**Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional dan pemeliharaan peralatan/sarana prasarana kantor lainnya	245.068.000	-	245.068.000	261.163.591	106	-	-	-
X	X X	0 1	2	0 9	0 2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak, perizinan kendaraan	125.068.000	253.134.600	125.068.000	137.843.491	110	125.068.000	4.930.600	25

								Operasional atau Lapangan	dinas operasional atau lapangan yang disediakan selama 1 (satu) tahun								
X	X X	0 1	2	0 9	0 6			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana prasarana kantor yang dipelihara	20.000.000		20.000.000	24.963.000	124	20.000.000	3.940.000	30
X	X X	0 1	2	0 9	0 9			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung /bangunan kantor yang dipelihara	100.000.000		100.000.000	98.357.100	98	100.000.000		
									Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor yang	-	-	-	-	-	-	-	-

									dipelihara								
X	X X	0 1	2	0 1				**Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	-	-	-	-	-	-	-	-
X	X X	0 1	2	0 1	0 1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-
X	X X	0 1	2	0 1	0 2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-

X	X X	0 1	2	0 1	0 4			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-
X	X X	0 1	2	0 1	0 3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-
X	X X	0 1	2	0 1	0 3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-
X	X X	0 1	2	0 1	0 6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang	-	-	-	-	-	-	-	-

								Kinerja SKPD	disusun							
X	X X	0 1	2	0 1	0 7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
X	X X	0 1	2	0 4				**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Jumlah layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
X	X X	0 1	2	0 4	0 1			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah target retribusi daerah	-	-	-	-	-	-	-

X	X X	0 1	2	0 4	0 7			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali merupakan unsur teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perhubungan
Kabupaten Boyolali

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Presentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C			75%	75%			75%	75%			
	Terlaksananya pelayanan uji berkala			48%	48%			48%	48%			
	Presentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota			100%	100%			100%	100%			

2.3 ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Secara umum permasalahan transportasi di Kabupaten Boyolali tidak banyak berbeda dengan daerah lain. Permasalahan transportasi pada umumnya menyangkut infrastruktur, aksesibilitas, issu lingkungan, keselamatan, pelayanan angkutan umum, efisiensi dan efektivitas, dan kesenjangan pelayanan serta prasarana antar wilayah. Secara rinci permasalahan-permasalahan di bidang transportasi adalah sebagai berikut:

1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a) Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi jalan masih belum memadai terutama dalam penyediaan dan perlengkapan jalan, sehingga masih sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda;

b) Semakin berkembangnya teknologi rekayasa kendaraan bermotor mengakibatkan kecepatan semakin tinggi sehingga membutuhkan ruang untuk berlalu lintas semakin besar pula;

c) Jaringan sarana tranportasi jalan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan angkutan penumpang dan barang, artinya keterjangkauan penumpang, barang sampai daerah terpencil belum terhubungi secara maksimal;

d) Pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan panjang jalan yang dibangun sehingga banyak ruas jalan yang padat dan macet;

e) Tingkat keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi jalan dengan moda lain (antar moda) relatif rendah, sehingga pelayanan dari pintu ke pintu (door to door service) belum dapat terwujud sebagaimana mestinya;

f) Jaringan pelayanan transportasi jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan penumpang dan barang;

g) Semakin terbatasnya ketersediaan energi dan aspek

lingkungan;

h) Kurang dan Rusaknya kondisi Perlengkapan Jalan dan LPJU;

i) Konversi BBM menjadi BBG belum berjalan;

j) Belum adanya kebijakan pembatasan kendaraan pribadi;

k) Masyarakat lebih tertarik naik kendaraan pribadi daripada kendaraan umum;

l) Meningkatnya volume kendaraan setiap tahunnya;

m) Banyaknya kendaraan yang menggunakan BBM yang kurang ramah lingkungan;

n) Pelayanan angkutan umum masih rendah sehingga mengakibatkan kurang diminatinya angkutan umum oleh masyarakat;

o) Jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi di jalan sampai saat ini 80% usianya melebihi 10 tahun;

p) Pertumbuhan kendaraan pribadi dan sepeda motor sangat tinggi sehingga berpengaruh terhadap load factor angkutan umum;

q) Persaingan antar moda yang semakin meningkat memerlukan peningkatan pelayanan dan utilitisasi;

r) Tumpang tindihnya jaringaan trayek AKAP, AKDP, Angkutan perkotaan, Angkutan Pedesaan dan angkutan perbatasan;

s) Belum optimalnya jaringan dan perijinan angkutan;

t) Kurang disiplinnya para awak kendaraan umum dan masyarakat pengguna angkutan;

u) Masyarakat lebih berminat menggunakan angkutan multifungsi (orang dan barang).

2. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

a) Masih rendahnya disiplin pengemudi;

b) Angkutan pariwisata digunakan untuk angkutan reguler (antar

jemput);

3. Bidang Pengujian dan Rekayasa Kendaraan

a) Sarana dan prasarana penunjang pelayanan sudah memadai.

b) Masih banyak awak-awak angkutan yang tidak memperhatikan kelayakan kendaraan angkutan baik umum dan barang.

c) Masih banyaknya kendaraan angkut baik dalam kota maupun luar kota melebihi kapasitas daya angkut.

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
	Dinas Perhubungan					**35.750.509.000,00**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**35.750.509.000,00**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					**35.750.509.000,00**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**27.749.431.000,00**
	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar					0,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					

		-	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	7 kegiatan	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	2 Dokumen	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	1 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	4 Laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
			Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	8 kegiatan	6.113.103.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	37 Orang/bulan	4.576.003.000,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	12 Dokumen	1.537.100.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	12 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	1 Laporan	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	2 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					

			Jumlah kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	1 kegiatan	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	1 Laporan	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					
			Jumlah kegiatan administrasi pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	2 kegiatan	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					

			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	2 Dokumen	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	12 Dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
			Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	1 kegiatan	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	12 Dokumen	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
			Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	8 kegiatan	389.210.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	4 Paket	3.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	4 Paket	110.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	4 Paket	100.000.000,00
	Barang Cetakan dan Penggandaan					

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	4 Paket	30.000.000,00
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	4 Paket	25.000.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	4 Laporan	38.460.000,00
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	4 Laporan	82.750.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	12 Dokumen	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
				Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					

			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh		
	Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah					
			Jumlah Kegiatan PenyediaanJasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	12 Laporan	1.300.000,00
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	12 Laporan	21.000.000.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	12 Laporan	750.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	3 kegiatan	245.068.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					

			Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	32 Unit	125.068.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	50 Unit	20.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	1 Unit	100.000.000,00
3.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**					**8.001.078.000,00**
	Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik					
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					

			Jumlah dokumen penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kab/kota	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	1 Dokumen	
	2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	1 Dokumen	
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					

			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh		
	Penyediaan PerlengkapanJalan di Jalan Kabupaten/Kota					
			Jumlah kebutuhan sarana perlengkapan jalan untukkeselamatan dan kenyamanan berlalu lintas yang tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	8016 Unit 8000 Unit 6 Unit 10 Unit	5.905.000.000,00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					

			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	8000 Unit	5.080.000.000,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan					
			Jumlah Prasarana Jalanyang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	10 Unit	50.000.000,00
4.	dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	6 Unit	775.000.000,00
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					

			Jumlah terminal yang yang dilengkapi Fasilitas penyelenggraan terminal penumpang tipe C	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	1 Unit	70.000.000,00
5.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)					
			Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	1 Unit	70.000.000,00
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	6 Laporan	30.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	6 Laporan	30.000.000,00

			Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
			Jumlah sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang memadai	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	30 Unit	1.553.078.000,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	18 Unit	1.460.078.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	12 Unit	93.000.000,00
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						

			Jumlah dokumen yang tersedia untuk pelaksanaan manajemen rekayasa lalulintas di jalan kab/kota	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	3 Dokumen	225.000.000,00
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	22 Laporan	
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						
			Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan danPemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Boyolali, Mojosongo, Butuh	1 Unit	195.000.000,00

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Rangkaian proses penyusunan Renja mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten, sampai menjadi RKPD Kabupaten, terdapat usulan program dan kegiatan dari kelompok masyarakat, serta ditambah dengan masukan –masukan dari Perangkat Daerah lain yang disesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat atau Perangkat Daerah terkait yang kemudian dianalisis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali. Disajikan dalam table dibawah ini :

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Boyolali Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan/Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/Kota	Kecamatan Klego	Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik	8 titik	disesuaikan dengan hasil verifikasi dan kemampuan anggaran
		Kecamatan Cepogo		32m	
		Kecamatan Nogosar		25 titik	
		Kecamatan Ngemplak		20 titik	
		Kecamatan Wonosegoro		15 titik	

Usulan Program dan Kegiatan dari Hasil Pokir DPRD Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan/Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/Kota	Kecamatan Sambi	Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik	10 unit	disesuaikan dengan hasil verifikasi dan kemampuan anggaran
		Kecamatan Sambi		20 unit	
		Kecamatan Ngemplak		1 kegiatan	
		Kecamatan Wonosegoro		50 unit	
		Kecamatan Sambi		3 unit	
		Kecamatan Klego		1 paket	
		Kecamatan Juwangi		1 paket	
		Kecamatan Andong		65 unit	
		Kecamatan Andong		60 unit	
		Kecamatan Boyolali		1 paket	
		Kecamatan Boyolali		1 paket	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional dibidang perhubungan darat dan bidang transportasi jalan serta transportasi danau dan sungai, adalah sebagai berikut :

1. Perhubungan Darat

   Arah kebijakannya adalah mampu mewujudkan keterpaduan antara moda transportasi jalan, sungai dan danau serta penyeberangan, sebagai upaya untuk menghubungkan seluruh wilayah tanah air dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara dan memperkokoh ketahanan nasional.

2. Bidang Transportasi Jalan

   Pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan-kawasan andalan yang cepat berkembang.

3. Bidang Transportasi Sungai dan Danau

   Diarahkan menjadi alternatif transportasi jalan dengan titik berat angkutan barang dalam jumlah besar (massal) disamping itu juga diharapkan akan menjadi sinergi dengan transportasi jalan yang

menjadi tulang punggung sistem trasnportasi dan akan membuka daerah terisolir

Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, serta mengacu pada arah kebijakan Kabupaten Boyolali dibidang perhubungan darat, danau dan penyeberangan, prioritas pembangunan bidang perhubungan yang dilaksanakan tahun 2019 :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang perhubungan melalui pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan
2. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan; dan
3. Peningkatan keselamatan angkutan umum dalam trayek.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Mengacu visi Kabupaten Boyolali 2021-2026 yaitu*:* **" *Melangkah Bersama, Menata Bersama, Penuh Totalitas"*.**

Artinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali bercita-cita melanjutkan peningkatan kemudahan layanan dan perijinan investasi melalui pengembangan sistem one stop service, membuka puast informasi investasi, penataan regulasi yang menjamin investasi dan eksekusi sistem produksinya tidak membahayakan keberlanjutan lingkungan serta humanis, peningkatan sarana prasarana dan aparat pelakasana yang memadai. Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali sebagai penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang profesional diharapkan mampu mendorong terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kenyamanan transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten
		Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik
		Persentase sarana dan prasarana pendukung angkutan aglomerasi yang tersedia
		Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum

Uraian keterkaitan antara visi misi pembangunan di Kabupaten Boyolali dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 dapat dijelaskan dalam misi kedua RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 yaitu Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan dengan arah kebijakan umum sebagai berikut:

- Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan PPJU

- ❖ Meningkatkan pelayanan angkutan melalui penyediaan fasilitas angkutan umum serta penertiban lalu lintas
- ❖ Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- ❖ Meningkatkan pelayanan perhubungan melalui penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur

Perumusan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dengan tolak ukur kinerja masing-masing kelompok serta kebutuhan pembiayaannya. Kerangka pendanaan yang disajikan bersifat indikatif yang berarti bahwa anggaran pendanaan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kegiatan dan target yang akan dilaksanakan.

Berdasarakan uraian di atas terhadap program dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada Dinas Perhubungan dalam tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali

lembar

Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Suub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Renstra 2024		Renstra Tahun 2025		
							Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	16	17	18	19	24
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi						**-1.24**			**5,18-5,90**		
	Meningkatnya kenyamanan transportasi					**0.36**	**0.39**		**0.40**		

		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik	persen	79.5	82.00	6,230,000,000	83.00	6,230,000,000	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan sarana perlengkapan jalan untuk keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas yang tersedia	unit		8016 unit	5,905,000,000	8016 unit	5,875,000,000	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit		8000 unit	5,080,000,000	8000 unit	5,080,000,000	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit		6 unit	775,000,000	6 unit	775,000,000	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit		10 unit	50,000,000	10 unit	20,000,000	Dinas Perhubungan

		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tersedia untuk pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan kab/kota	dokumen		3 dokumen	225,000,000.00	3 dokumen	225,000,000.00	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit		1 unit	195,000,000	1 unit	195,000,000	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan		22 laporan	0	22 laporan	0	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan		16 laporan	30,000,000	16 laporan	30,000,000	Dinas Perhubungan

		2.15.02.2.01	Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kab/kota	dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	70,000,000	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	70,000,000	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0	0	0	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.07	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/kota	Jumlah laporan rekomendasi andalalin yang ditindaklanjuti	laporan		32laporan	0	32laporan	0	Dinas Perhubungan

		2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan		20 laporan	0	20 laporan	0	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan		12 laporan	0	12 laporan	0	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah laporan yang tersedia untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan parkir	laporan		6 laporan	30,000,000	6 laporan	30,000,000.00	Dinas Perhubungan

		2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		6 laporan	30,000,000	6 laporan	30,000,000	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.03	Pengelolaan terminal penumpang tipe C	Jumlah kebutuhan pengelolaan terminal tipe C yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tersedia	unit		1 unit	70,000,000	1 unit	30,000,000.00	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		1 unit	70,000,000	1 unit	30,000,000	Dinas Perhubungan

		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	45.00	45.00	1,553,078,000.00	45	1,553,078,000.00	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan angkutan umum yang diuji	unit		200 unit	1,553,078,000.00	200 unit	1,553,078,000.00	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit		12 unit	1,460,078,000	12 unit	1,460,078,000	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit		12 unit	93,000,000	12 unit	93,000,000	Dinas Perhubungan

		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana pendukung angkutan aglomerasi yang tersedia	Persen	79.5	82.00	218,000,000	83	218,000,000	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.09	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan yang untuk mendukung tersedianya angkutan untuk melayani jasa angkutan orang dalam 1 (satu) daerah kab/kota dan/atau barang antar kota	laporan		4 laporan	218,000,000	4 laporan	218,000,000.00	Dinas Perhubungan
		2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan		4 laporan	218,000,000	4 laporan	218,000,000	Dinas Perhubungan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik						**763**					**Dinas Perhubungan**

	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah					**78,98**	**81.30**		81.55		**Dinas Perhubungan**
		X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persen	100.00	100	27,749,431,000		27,749,431,000	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kegiatan		8 kegiatan	6,113,103,000	8 kegiatan	6,113,103,000.00	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		37 orang	4,576,003,000	37 orang	4,576,003,000	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12 dokumen	1,537,100,000	12 dokumen	1,537,100,000	Dinas Perhubungan

		X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12 dokumen	0	12 dokumen	0	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		12 dokumen	0	12 dokumen	0	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1 laporan	0	1 laporan	0	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		1dokumen	0	1 dokumen	0	Dinas Perhubungan

		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		18 laporan	0	18 laporan	0	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		2 dokumen	0	2 dokumen	0	Dinas Perhubungan
		x.xx.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	kegiatan		1 kegiatan	0	1 kegiatan	0	Dinas Perhubungan

		x.xx.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1 laporan	0	1 laporan	0	Dinas Perhubungan
		x.x.x.01..2.07	-	-	kegiatan		-	0	-	0	
			-	-	paket		-	0	-	0	
			-	-	Unit		-	0	-	0	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	kegiatan		9 kegiatan	389,210,000	9 kegiatan	389,210,000	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4 paket	3,000,000	4 paket	3,000,000	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		4 paket	110,000,000	4 paket	110,000,000	Dinas Perhubungan

		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12 paket	100,000,000	12 paket	100,000,000	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4 paket	30,000,000	4 paket	30,000,000	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.06.07	Penyediaan bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		4 paket	25,000,000	4 paket	25,000,000	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		4 laporan	38,460,000	4 laporan	38,460,000	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		4 laporan	82,750,000	4 laporan	82,750,000	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		12 dokumen	0	12 dokumen	0	Dinas Perhubungan

		X.XX.01.2.06.11	Dukungan pelaksanaan sistem berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen		13 dokumen	0	13 dokumen	0	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan		1 kegiatan	0	1 kegiatan	0	
		X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		12 dokumen	0	12 dokumen	0	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		3 kegiatan	21,002,050,000	**3 kegiatan**	21,002,050,000	Dinas Perhubungan

		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12 laporan	1,300,000	**12 laporan**	1,300,000	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12 laporan	21,000,000,000	**12 laporan**	21,000,000,000	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0	**0**	0	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12 laporan	750,000	**12 laporan**	750,000	Dinas Perhubungan

		X.XX.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan		2 kegiatan	245,068,000	**2 kegiatan**	245,068,000.00	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		32 unit	125,068,000	**32 unit**	125,068,000	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		50 unit	20,000,000	**50 unit**	20,000,000	Dinas Perhubungan
			-	-	paket		-	0	-	0	

		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		7 kegiatan	0	7 kegiatan	0	Dinas Perhubungan
									0		
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2 dokumen	0	2 dokumen	0	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	Dinas Perhubungan

		X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		1 dokumen	0	1 dokumen	0	Dinas Perhubungan

		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		16 laporan	0	16 laporan	0	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4 laporan	0	4 laporan	0	Dinas Perhubungan
		X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kegiatan		2 kegiatan		**2 kegiatan**	0	Dinas Perhubungan
										0	
		X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen		2 dokumen	0	**2 dokumen**	0	Dinas Perhubungan

		X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan		12 laporan	0	12 laporan	0	Dinas Perhubungan
Total								**35,750,509,000.00**		**35,750,509,000**	

BAB V
PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegerasi dan sinegris dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, yang berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan mencerminkan:

1. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik;
2. Tersedianya pelaporan capaian kerja dan realisasi kinerja dinas;
3. Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
4. Terpenuhinya rehabilitasi sarana pengujian dan terminal;
5. Terwujudnya penertiban kendaraan dan kenyamanan pengguna jalan;
6. Tersedianya rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan pagar pengaman jalan;
7. Tersedianya buku uji, plat uji dan stiker tanda samping kendaraan bermotor;
8. Terpenuhinya dan Terpeliharanya pembangunan penerangan jalan umum;
9. Terpenuhinya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
10. Terpenuhinya penyusunan dokumen renja

O. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 3

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali 5

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 12

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 15

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 17

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 20

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 20

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan 22

BAB V PENUTUP 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, yang merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Boyolali ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan,

program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Boyolali.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rancana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pemberian perijinan, sosialisasi/penyuluhan dan penyampaian informasi, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaporan dibidang komunikasi dan informatika.

Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali, sebagai pelaksana urusan wajib bukan Pelayanan Dasar komunikasi dan informatika. Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali telah melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian Kinerja Keuangan sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah.
2. Program informasi dan komunikasi publik.
3. Program aplikasi informatika.
4. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing indikator yang telah ditetapkan

B. Capaian dan Evaluasi Progran/Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Pencapaian Target Tahun 2024

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali menerima anggaran sebesar Rp. 8.947.412.000,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 4 (lima) program dan 8 (delapan) kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.2.715.671.750,- atau mencapai 30,35 % Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja:

1. Efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan

C. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 maupun perkiraan capaian tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

1. Besarnya keinginan masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Boyolali tidak diiringi dengan peningkatan pembiayaan, sehingga pencapaian pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali perlu dilakukan bertahap dengan pembagian yang proporsional diantara SKPD;
2. Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat masih mengalami beberapa hambatan/kendala;
3. Sebagian besar usulan program/kegiatan yang diinventarisasi tidak sesuai dengan Rencana program/kegiatan yang telah dicanangkan pada RENJA maupun RENSTRA SKPD;
4. Perencanaan program/kegiatan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali masih berorientasi terhadap output bukan outcome, sehingga pelaksanaan evaluasi tidak optimal. Hal ini berdampak pada keterlambatan akan data dan informasi tentang perencanaan pembangunan secara keseluruhan;
5. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali tidak didukung dengan sistem kerja stakeholder pendukung, sehingga tidak sedikit pekerjaan yang dapat diselesaikan melebihi target waktu yang ditentukan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026, maka pada tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia bagi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali dengan arah kebijakan :
   - Pendidikan formal. Informal dan pelatihan bidang Komunikasi dan Informatika.

2. Meningkatkan dan mengembangkan mekanisme perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dengan arah kebijakan :
    - Keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dan kebijakan politik;
    - Meningkatkan peran dokumen RENJA SKPD dalam perumusan pembiayaan pembangunan.
3. Meningkatkan konsultasi dan konfirmasi program pembangunan secara terpadu, dengan arah kebijakan
4. Menciptakan sistem jaringan perencanaan kota yang sistematis, dengan arah kebijakan;
    - Menciptakan sistem jaringan perencanaan yang terintegrasi antar SKPD dalam upaya *controling* terhadap kinerja SKPD yang dikaitkan dengan program prioritas RPJMD dan RKPD
5. Menjalin kerjasama dengan stakeholder dalam sistim perencanaan dan pengkajian potensi ekonomi, dengan arah kebijakan:
    - Melibatkan pihak swasta serta akademisi untuk menjamin tercapainya objektifitas dan netralitas dalam penilaian pelaksanaan pembangunan

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2023 Kabupaten Boyolali

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16			Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									
2	16	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi standar	100 %	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%
2	16	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ketercapaian fungsi layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	16	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketercapaian fungsi layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	16	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah ketercapaian fungsi layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	16	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketercapaian fungsi layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	16	02		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

					daerah								
					Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	92%	92%	2%	2%	100%	92%	92%	100%
2	16	02	2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang terkelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase pelayanan informasi publik yang diselenggarakan sesuai strategi	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
2	16	03		Program Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	77 Dokumen	77 Dokumen	77 Dokumen	77 Dokumen	100%	77 Dokumen	77 Dokumen	100%
					Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	51%	51%	51%	51%	100%	51%	51%	100%
					Persentase Perangkat daerah mengembangkan inovasi E-governance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	03	2.01	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	80%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	100%
					Persentase domain dan sub domain yang terolah di lingkup pemerintah daerah kabupaten oleh dinas Komunikasi	60%	60%	60%	60%	100%	60%	60%	100%
2	16	03	2.02	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang difasilitasi pembuatan aplikasi	31 OPD	31 OPD	31 OPD	31 OPD	100%	31 OPD	31 OPD	100%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali melaksanakan tugas pokok Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Komunikasi dan Informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informasi;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Komunikasi dan Informasi;
3. Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan informasi publik;
4. Pemantauan dan pengawasan informasi publik;
5. Pelaksanaan pengendalian informasi publik;
6. Pengembangan dan pengelolaan informasi publik;
7. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang komunikasi dan informasi;
8. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang komunikasi dan informasi;
9. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi menara;
10. Penetapan jaringan informasi publik;
11. Pemberian pertimbangan teknis perijinan dan pengawasan usaha di bidang telekomunikasi ;
12. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (spm) di bidang komunikasi dan informasi;
13. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;
14. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali terdiri dari

1. Kepala.
2. Sekretariat.
3. Bidang Informasi dan komunikasi Publik.
4. Bidang Penyelenggaraan SPBE.
5. Bidang Persandian dan Statistik.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Sekretariat melaksanakan tugas pokok:
   Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
2. Bidang Informasi dan komunikasi Publik Melaksanakan Tugas Pokok : penyiapan Pelaksanaan perumusan dan kebijakan pengelolaan informasi publik.
3. Bidang Penyelenggaraan SPBE melaksanakan tugas pokok: penyiapan kebijakan pelaporan layanan infrastruktur data center.
4. Bidang Persandian dan Statistik melaksanakan tugas pokok;
   Pelaksanaan pelayanan di bidang persandian dan statistik.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah DISKOMINFO
Kabupaten Boyolali

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1	Tahun 2024 (thn n+1	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo	53	53	53	53	53 Dokumen	53	53	53	53 Dokumen	
	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan	13	13	13	13	13 Dokumen	13	13	13	13 Dokumen	

	dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015										
	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	77	77	77	77	77 Dokumen	77	77	77	77 Dokumen	
	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	6	6	6	6	6 Dokumen	6	6	6	6 Dokumen	
	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan	3	3	3	3	3 Laporan	2	2	2	2 Laporan	

Struktur Organisasi

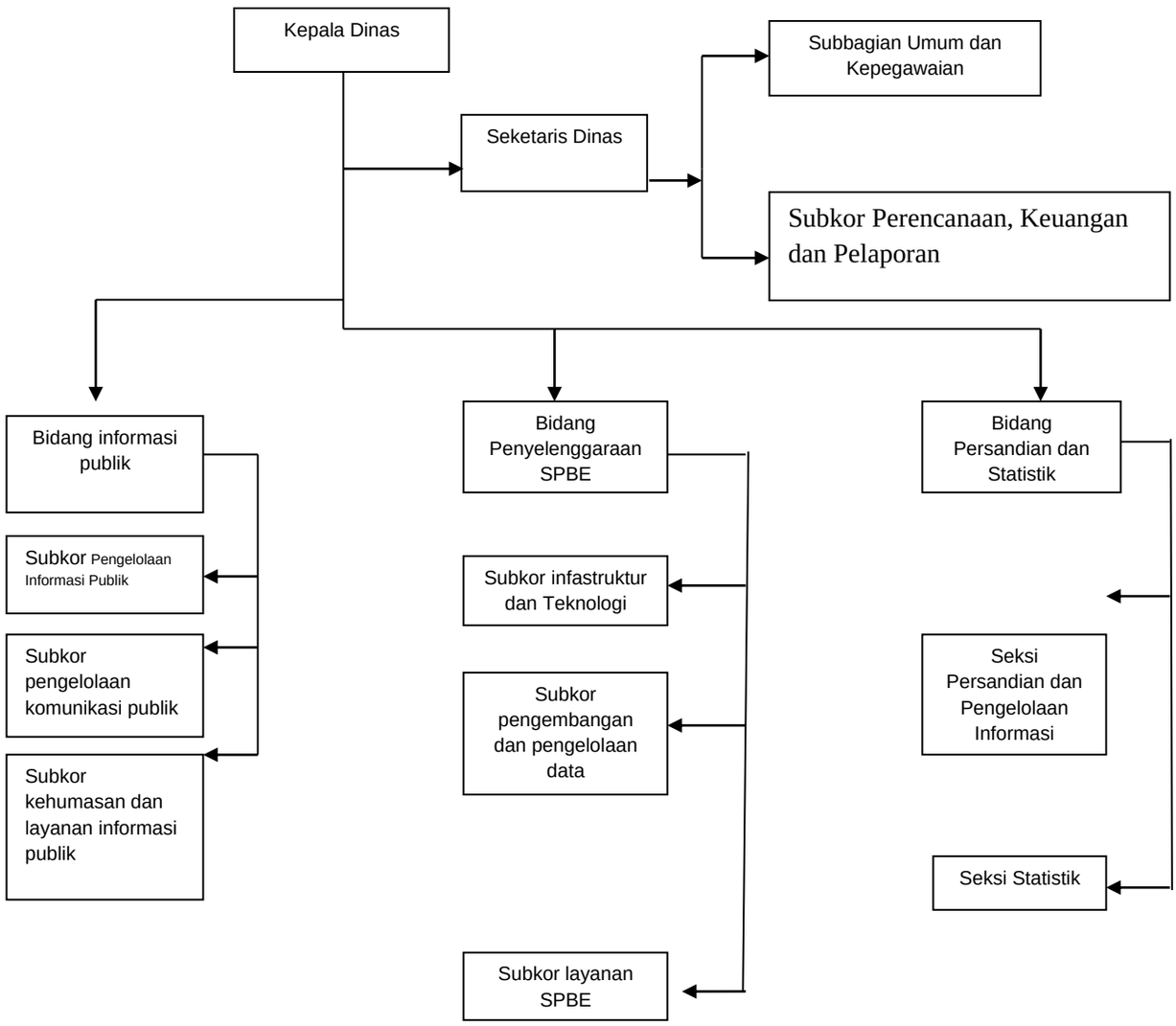

2.3 ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Analisis isu isu strategis dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Boyolali selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta merupakan dasar utama visi dan misi rencana strategis dinas yang juga akan menentukan kinerja dinas dalam lima tahun mendatang.

2.3.1 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Potensi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Secara umum permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dikelompokan dalam 2 (dua) kelompok yaitu;

1. Permasalahan tatakelola pemerintahan, antara lain meliputi:
   a. Belum terpenuhinya rasio kecukupan dan kuantitas SDM aparatur dengan kompetensi khusus sesuai fungsi yang dibutuhkan.
   b. Kurangnya sinergitas dan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran.
   c. Kurang lengkapnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat waktu.
   d. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi (TI).
   e. Masih kurangnya fasilitas pelayanan publik prima.
2. Permasalahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah, antara lain meliputi:
   a. Belum optimalnya pemanfaatan pengembangan komunikasi.
   b. Belum tersedianya infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mewujudkan Boyolali smart city

      Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

      Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

      Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu

trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan keselamatan kendaraan, pembangunan dan pengembangan kelalulintasan serta pengembangan kota berbasis teknologi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERANGKAT DAERAH

Proses yang dilakukan dalam membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analis kebutuhan. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analis kebutuhan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali meliputi :

- Program penunjang urusan pemerintah daerah.
- Program informasi dan komunikasi publik.
- Program aplikasi informatika.
- Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Boyolali

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi standar	100%	5.992.381.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskominfo	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi standar	100%	4.743.427.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah ketercapaian fungsi layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	12 Bulan	3.916.465.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah ketercapaian fungsi layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	12 Bulan	4.027.648.000	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.930.465.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.041.648.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Diskominfo	Terbayarnya Gaji PTT dan Tenaga Honorer	12 Bulan	986.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Diskominfo	Terbayarnya Gaji PTT dan Tenaga Honorer	12 Bulan	986.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah ketercapaian fungsi layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	12 Bulan	1.612.205.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah ketercapaian fungsi layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	12 Bulan	235.358.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Tersedianya komponen instalasi listrik/telepon	12 Bulan	4.550.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Tersedianya komponen instalasi listrik/telepon	12 Bulan	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	60.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	40.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Diskominfo	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	22.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Diskominfo	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	30.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Diskominfo	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	25.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Diskominfo	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	25.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Diskominfo	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	37.358.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Diskominfo	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	37.358.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	128.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Jumlah ketercapaian fungsi layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	367.068.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Jumlah ketercapaian fungsi layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	324.668.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo	Terpenuhinya jasa surat menyurat	12 Bulan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo	Terpenuhinya jasa surat menyurat	12 Bulan	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	323.168.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	323.168.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Jumlah ketercapaian fungsi layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	96.643.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Jumlah ketercapaian fungsi layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	155.753.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	35.753.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskominfo	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	35.753.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	10.900.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	20.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskominfo	Tersedianya rehabilitasi gedung kantor dan bangunan	12 Bulan	49.990.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Diskominfo	Tersedianya rehabilitasi gedung kantor dan bangunan	12 Bulan	100.000.000	

	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Diskominfo	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang terbentuk	22 Kecamatan	109.020.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Diskominfo	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang terbentuk	22 Kecamatan		
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	77%	2.201.860.000	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	77 Dokumen	1.356.400.000	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	80	1.700.860.000	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	80	1.356.400.000	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo	Persentase layanan adminitrasi pemerintahan yang terintegrasi	77%	2.201.860.000	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo	Persentase layanan adminitrasi pemerintahan yang terintegrasi	77 Dokumen	90.426.000	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Domain dan sub domain yang terolah dilingkup pemerintah daerah kabupaten oleh dinas komunikasi	80	1.700.860.000	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Persentase Domain dan sub domain yang terolah dilingkup pemerintah daerah kabupaten oleh dinas komunikasi	80	90.426.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Diskominfo	Persentase Tingkat Keamanan Pemerintah	100 %	50.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Diskominfo	Persentase Tingkat Keamanan Pemerintah	100 %	45.213.000	
	Penyelenggaraan Persansdian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali	Diskominfo	Persentase Tingkat Keamanan Pemerintah	100 %	50.000.000	Penyelenggaraan Persansdian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali	Diskominfo	Persentase Tingkat Keamanan Pemerintah	100 %	45.213.000	
	Pelaksanaan Keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan non Elektronik	Diskominfo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik	3 Laporan	50.000.000	Pelaksanaan Keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan non Elektronik	Diskominfo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik	3 Laporan	45.213.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten Boyolali Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali tidak mendapatkan usulan dari masyarakat maupun pokok pikiran (pokir) DPRD, sehingga Bidang komunikasi dan Informatika tidak juga tidak memperoleh usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJKAN NASIONAL

1. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Boyolali sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan misi **Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.**

Misi ini untuk Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai utuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok *good and clean governance*. Peran masyarakat yang melahirkan kontrol terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan sangat diharapkan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN.

Pembangunan integritas dengan menumbuhkan karakter yang baik bagi individu maupun organisasi dalam mewujudkan tindakan maupun keputusan bagi kebaikan bersama.

Tidak berhenti pada *good and clean governance*, Boyolali berusaha menumbuhkan *Smart governance,* atau pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi, dengan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi-inovasi dan adaptasi teknologi yang terpadu, yang bermuara pada efektifitas, efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan visi Bupati yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali 2021-2026 yaitu ***"BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas***

Artinya Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan visi dan misi Bupati Boyolali, melalui penyelenggaraan Kabupaten Cerdas (Smart City)

Boyolali Kabupaten Cerdas *(Smart City)* , melalui upaya antara lain:

1) Pengembangan e-governance, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
2) Pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT;
3) Pengembangan pengembangan kewirausahaan, Pengembangan usaha secara on-line;
4) Pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, pengembangan sumber energi terbarukan;
5) Pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat;
6) Kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, kemudahan akses terhadap jaminan keamanan;

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan dengan tolak ukur kinerja masing-masing kelompok serta kebutuhan pembiyaan. Kerangka pendanaan yang disajikan bersifat indikatif yang berarti bahwa anggaran pendanaan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kegiatan dan target yang dilaksanakan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
2. Pencapaian SPM;
3. Peningkatan fasilitas saranan dan prasarana informasi

Berdasarkan uraian diatas terhadap program dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam tahun 2024 dan dalam rangka pencapaian target RPJMD dan SPM bidang komunikasi dan Informatika antara lain meliputi:

   a. Jumlah program dan kegiatan

      Jumlah program dan kegiatan usulan awal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dapat diketahui sebagai berikut:

      1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

         - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
            - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
            - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
         - Administrasi Umum Perangkat Daerah
            - Penyediaan Komponen Instanlansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
            - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
            - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
            - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
            - Penyediaan Bahan Materai

- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daaerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Informasi dan Komunikasi Publik
   - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
     - Pelayanan Informasi Publik
     - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
3) Program Aplikasi Informatika
   - Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
     - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   - Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
     - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik

4) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten / Kota
  - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan
  - Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Penyebaran lokasi program dan kegiatan usulan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali dalam RKPD tahun 2024 dapat diketahui sebagai berikut:

1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali
2) Kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali
3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaanya

2. Dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali sudah sesuai dengan dokumen yang ada seperti RKPD, RPJMD dan RENSTRA (Terlampir)

BAB V
PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegerasi dan sinegris dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali, yang berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan mencerminkan:

1. Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas komunikasi dan informasi;
2. Tersedianya sumber daya komunikasi dan informasi yang profesional dan handal;
3. Tersebarnya informasi pembangunan kepada masyarakat melalui media interaktif, cetak dan elektronik.

P. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali ini adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2024 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam RKPD Pemerintah kabupaten Boyolali tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 ini sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran di Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali untuk tahun 2024 yang akan datang dan merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good goverence). Dengan demikian Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dapat menunjukkan eksistensinya sebagai penyelenggara pembangunan bidang Koperasi dan Ketenaga kerjaan kepada masyarakat (public Goods) secara professional.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali Tahun 2024, semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran tahun 2024 di Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 3

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 3

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA 6

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA 12

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA 17

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 18

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 28

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 30

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 30

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA 31

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA 32

B A B IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 34

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN 34

BAB V. PENUTUP 41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Sasaran 1.....7

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Sasaran 2.....7

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Sasaran 3.....8

Tabel 4. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023 11

Tabel 5. Rancangan Awal RKPD.....19

Tabel 6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 28

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali....31

Tabel 8. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024 40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali bersama-sama dengan para pemangku Kepentigan (stakehoder) termasuk Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota di wajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis.(Renstra) lima tahunan SKPD , kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024. Renja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja tahun 2024 mengacu pada RPJMD Kabupaten Boyolali periode (2021-2026) yang menetapkan Visi sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanan yaitu**, "Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi"** Melangkah dan menata bersama, Penuh Totalitas (METAL), sebagai bentuk perwujudan visi, maka telah ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Boyolali, yaitu :

1. Boyolali meneruskan pro Investasi, maju, sinergi dan berkelanjutan;
2. Boyolali sehat, tangguh, cerdas, berkarakter dan berbudaya;
3. Boyolali kota susu, lumbung pangan nasional;;
4. Boyolali menghadirkan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya;
5. Boyolali tersenyum, tumbuh, mandiri dan berdaya saing.

Renja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Boyolali khususnya dan Nasional pada umumnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 (lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 7);
g. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 31 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 31).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut:

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali Tahun 2024;
b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut*:*

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RKPD;
2. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali Tahun 2024 yang mengacu pada isu strategis RPJMD Kabupaten dan RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali Tahun 2024, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali Tahun 2023vdan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali. Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali. Berisikan uraian mengenai isu~isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD. Berisikan uraian dan catatan penting tentang rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhannya, terkait dengan rumusan program dan kegiatan maupun besarannya.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Berisikan uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional. berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. **Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja.** Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3. **Program dan Kegiatan.** Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA

Renja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali selama tahun 2023 dan perkiraan pencapaian target tahun 2024.

2.1.1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan *{input),* keluaran *{output),* hasil *{outcome).* Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2.1.2. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Pencapaian Target Tahun 2024.

Pada Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali menerima anggaran sebesar Rp 7.687.070.000,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 7 (tujuh) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut capaian keuangannya terealisasi sebesar Rp 4.840.048.236,- atau mencapai 62,96 % ,meliputi 1 program rutin dan 6 program teknis. Pada tahun 2023 di Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja mendapat alokasi dana APBN yang dialokasikan untuk pelatihan ketrampilan di UPT BLK, sebesar Rp 904.812.000,- terealisasi sebesar Rp 706.287.784,- sehingga capaiannya sebesar 78,06%. Program teknis uraian selengkapnya atas capaian kinerja kegiatan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Menurunnya pengangguran

No	Program	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kesesuaian tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja	persen	1,23	0,76	61,79
2	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	persen	47,50	33	70

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Meningkatnya perlindungan hak-hak tenaga kerja dan promosi lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi seluruh pekerja

No	Program	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	persen	75	76	101
2		Persentase Perusahaan yg menerapkan tata kelola kerja yang layak	persen	78	75	96
3		Persentase Perusahaan yang memenuhi hak Pekerja dan kebebasan berserikat	persen	75	75	100
4		Persentase Perusahaan yang mempekerjakan penduduk Boyolali termasuk difabel	persen	80	80	100

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Sasaran 3

Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap perekonomian

No	Program	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan SDM koperasi yang terlatih	persen	54,79	50	91
2	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi yang di bina yang meningkat nilai kesehatannya	persen	6,62	7,8	117
3	Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan SDM pelaku UMKM yang terlatih	persen	1,03	1,51	147
4	Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase rata-rata peningkatan omzet pelaku usaha mkikro	persen	63	68,40	108

2.1.3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja.

Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran 1 (Menurunnya Pengangguran) :

Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan program penempatan tenaga kerja, Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan:

- Pelatihan berdasarkan unit kompetensi, yang kegiatannya dilaksanakan di UPT BLK yaitu Pelatihan ketrampilan otomotif, TIK, Tata Boga, sudah selesai 100 %, sedang untuk ketrampilan menjahit, baru dilaksanakan 50 % dan untuk Drafter bangunan belum bisa dilaksanakan karena Instrukturnya menjalani cuti diluar tanggungan negara, dan ini akan diusulkan dalam perubahan anggaran 2023 dialihkan untuk pelatihan TIK.
- Penyelenggaraan Unit layanan disabilitas ketenagakerjaan, dilaksanakan untuk kegiatan pelatihan tata boga/kuliner dan pertukangan dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pelatihan Tataboga / Kuliner bagi penyandang Disabillitas di Kec Klego	20 Orang	Peserta dari Kec Klego dan Kec. Karanggede
2	Pelatihan Tataboga / Kuliner bagi penyandang Disabillitas di Kec Teras	20 Orang	Peserta dari Kec Teras dan Kec. Banyudono
3	Pelatihan Tataboga / Kuliner bagi penyandang Disabillitas di Kec Sambi	20 Orang	Peserta dari Kec Simo dan Kec. Sambi
4	Pelatihan Tataboga / Kuliner bagi penyandang Disabillitas di Kec Mojosongo	20 Orang	Peserta dari Kec Mojosongo dan Kec. Gladagsari
5	Pelatihan Tataboga/Kuliner bagi penyandang Disabillitas di Kec Kemusu	20 Orang	Peserta dari Kec Kemusu dan Kec. Juwangi
6	Pelatihan Pertukangan bagi penyandang Disabillitas di Kec Andong	20 Orang	Peserta dari Kec Andong dan Kec. Nogosari

- Perluasan Kesempatan Kerja, digunakan untuk pelatihan kewirausahaan bagi para petani tembakau yang akan dilaksanakan di UPT BLK pada Bulan Agustus s/d September 2023.

Selain itu di UPT BLK juga dilaksanakan pelatihan pembuatan roti dan kue, pelatihan Pengelolaan administrasi perkantoran, pelatihan menjahit pakaian wanita dewasa, pelatihan practical office advance, pelatihan desain grafis muda (DGM) pelatihan service sepeda motor injeksi dan pelatihan pemeliharaan kendaraan ringan system injeksi, dengan jumlah total 12 paket dan per paket ada 16 peserta.

Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran 2 (Meningkatnya perlindungan hak-hak tenaga kerja dan promosi lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi seluruh pekerja) :

Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dengan Program Hubungan Industrial yaitu dengan melaksanakan monitoring ke Perusahaan-perusahaan terkait UMK sekaligus diadakan pembinaan dan pencegahan perselisihan hubungan antara pekerja dengan perusahaan tempat bekerja, sehingga permasalahan yang muncul antara pekerja dengan pengusaha dapat segera teratasi dan akan tercipta hubungan yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha. Adapun Program Hubungan Industrial ini yang didanai dari APBD adalah kegiatan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten telah dilaksanakan untuk penyelenggaraan acara Hari Buruh (May day) pada tanggal 1 Mei 2023, dan untuk pembahasan usulan penetapan UMK yang akan dilaksanakan di Triwulan IV.

Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran 3 (Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap perekonomian) :

Dalam mencapai sasaran ke 3 ini Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja melaksanakan program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Pengembangan UMKM dan Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Adapun beberapa kendala yang terjadi senhingga menganggu pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Penilaian kesehatan Koperasi tidak bisa dilakukan pada semua KSP/USP koperasi karena jumlah koperasi yang banyak.
- Tidak semua KSP/USP Koperasi melaksanakan RAT.
- KSP/USP Koperasi yang melakukan RAT tidak semuanya mengirimkan laporan ke Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja.
- Terkendala masalah pemasaran.
- Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan terkait digital marketing.
- Kurangnya modal usaha.

Untuk mengatasi permasalahan dimaksud telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan penilaian kesehatan koperasi kepada KSP/USP koperasi secara bergilir.
- Mengingatkan KSP/USP koperasi dengan membuat surat edaran kepada seluruh koperasi untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangany yaitu melaksanakan RAT dan menyampaikan laporan hasilnya.
- Menyelenggarakan pelatihan pemasaran online, pakaging dan branding kepada pelaku UMKM dalam menghadapi era digitalisasi, lewat proses Marketplace baik itu Shope,Lazada maupun Bukalapak disamping itu menfasilitasi legalitas PIRT,HALAL,HAKI untuk menuju UMKM naik kelas sehingga produk-produk tersebut bisa masuk dalam Toko Modern sebagai Mitra Kerja.
- Memfasilitasi pemberian pinjaman lunak dengan program KUR bekerja sama dengan BUMD, Telkom, dan Peruri

2.1.4. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2024

Sedangkan untuk tahun Anggaran tahun 2024 dengan perkiraan anggaran sebesar Rp. 7.535.492.000,- terurai dalam 7 program dan 10 kegiatan, dan 22 sub kegiatan, dengan target capaian sebagai berikut :

Tabel 4. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran terbuka	3,61 %
2	Meningkatnya perlindungan hak-hak tenaga kerja dan promosi lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi seluruh pekerja.	Persentase peningkatan kepatuhan perusahaan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat)	100 %
3	Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan sektor koperasi dan usaha kecil/menengah terhadap perekonomian	1 Persentase koperasi yang meningkat SHU nya	18,46 %
		2 Jumlah Usaha Mikro yang meningkat omzetnya	66 UMKM

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 maupun perkiraan capaian tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

a. Belum tersedianya data yang telah difalidasi dan verifikasi tentang ketersediaan tenaga kerja serta kebutuhan lapangan kerja.
b. Banyaknya pelanggaran kepatuhan norma hukum ketenagakerjaan dan meningkatnya tuntutan perlindungan kesejahteraan bagi pekerja/buruh.
c. Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif
d. Belum optimalnya kualitas SDM koperasi
e. Kurang optimalnya pengetahuan dan kemampuan kemandirian berwirausaha
f. Kurang optimalnya fasilitasi permodalan

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mendukung Visi misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 maka Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja

2. Peningkatan penerapan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan
3. Optimalisasi fungsi mediasi dan deteksi dini perselisihan hubungan industrial
4. Peningkatan kapasitas pengurus koperasi
5. Peningkatan kualitas metode pengelolaan koperasi
6. Peningkatan kapasitas SDM pelaku UKM
7. Peningkatan akses permodalan

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA

2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang koperasi, usaha mikro dan menengah, dan bidang ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi dinas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali dengan susunan sebagai berikut:

a. Kepala;
b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan;
c. Bidang Koperasi;
d. Bidang Usaha Mikro;
e. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
f. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. UPT.
    1. Kepala UPT;
    2. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASIN TENAGA KERJA

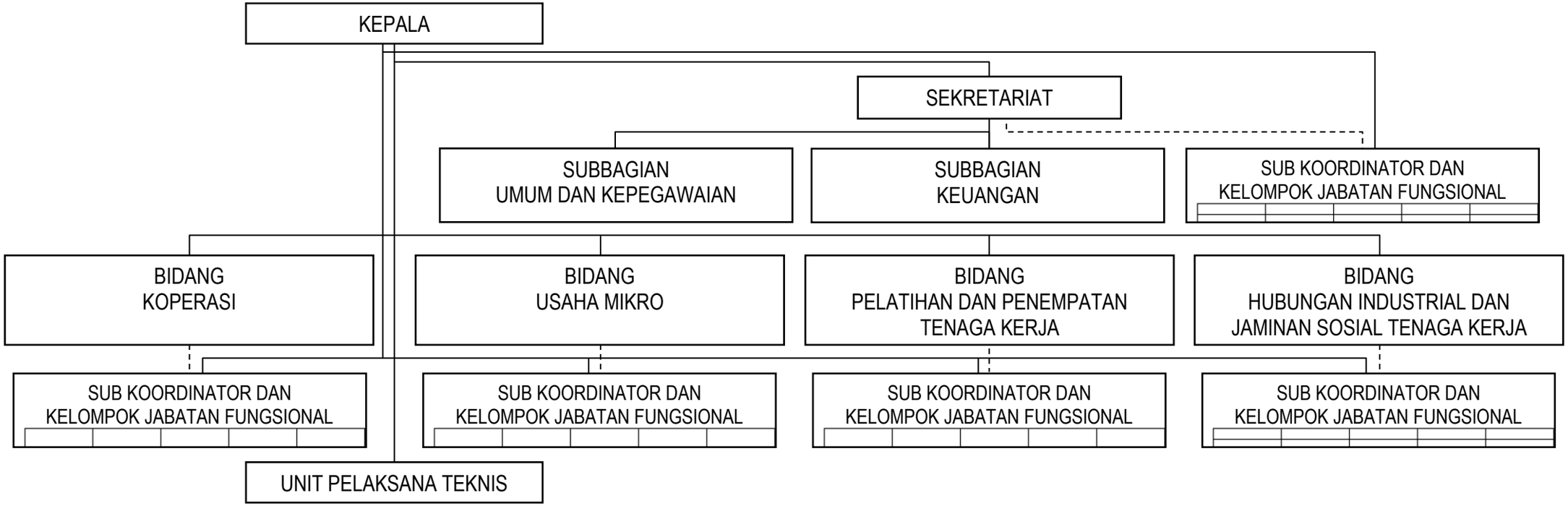

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT BALAI LATIHAN KERJA

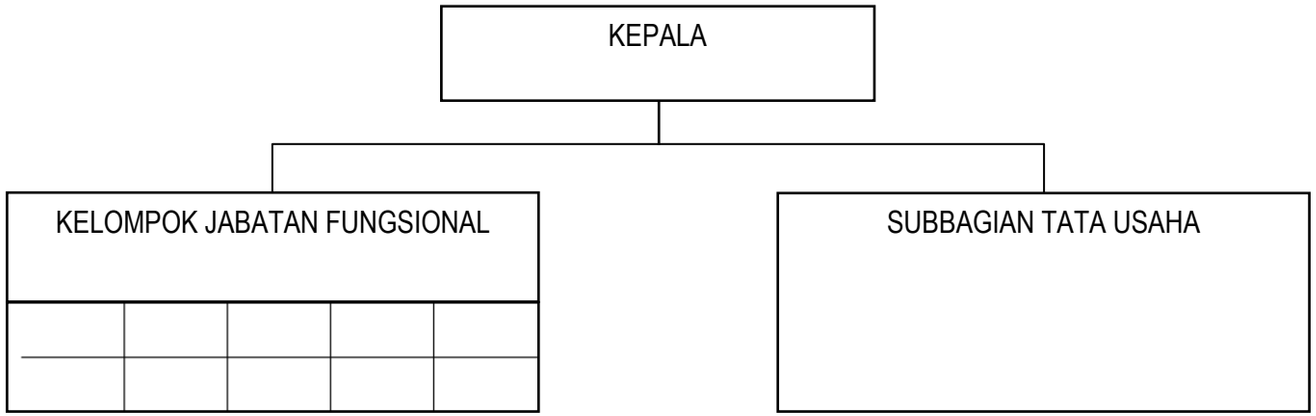

2.2.3. Kajian Atas Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 berupa pencari kerja yang terdaftar sampai dengan pertengahan tahun 2023 ini sebanyak 6.418 orang dan lowongan kerja yang dibutuhkan sebanyak 2.242 orang. Usaha mikro di Kabupaten Boyolali yang sudah diverifikasi sampai dengan pertengahan tahun 2023 sebanyak 48.336 usaha mikro, yang meliputi berbagai sektor usaha.

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali yang terkait dengan pencapaian Indikator Kunci tahun 2023 maupun perkiraan capaian tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

a. Tidak adanya biaya pengganti transportasi bagi siswa peserta pelatihan;
b. Kurangnya tenaga instruktur di BLK Boyolali;
c. Tidak semua perusahaan menerapkan peraturan perundang-undangan terkait pengupahan, karena sebagian pengusaha masih berpedoman pada komponen upah sebuah asosiasi (Kesehatan);
d. Tingkat Partisipasi rendah dari Level Top Manager dalam pembinaan Pencegahan perselisihan HI;
e. Penilaian kesehatan Koperasi tidak bisa dilakukan pada semua KSP/USP koperasi karena jumlah koperasi yang banyak;
f. Tidak semua KSP/USP Koperasi melaksanakan RAT dan bagi Koperasi yang melakukan RAT tidak semuanya mengirimkan laporan ke Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja;
g. Masih rendahnya kesadaran akan standarisasi produk (izin PIRT, BPOM, Halal, dll);

Beberapa upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan kebijaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Tenaga Kerja yaitu:

a. Diusulkan biaya pengganti transportasi bagi siswa peserta pelatihan pada tahun 2024;
b. Memberdayakan dan mengoptimalkan SDM yang tersedia;
c. Melakukan pembinaan secara periodik dan kontinyu terhadap perusahaan-perusahaan;
d. Meningkatkan koordinasi dan persuasi dengan Level Top Manager serta memantau informasi agar tersampaikan ke Level Top Manager;

e. Melaksanakan penilaian kesehatan koperasi kepada KSP/USP koperasi secara bergilir;

f. Mengingatkan KSP/USP koperasi dengan membuat surat edaran kepada seluruh koperasi untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yaitu melaksanakan RAT dan menyampaikan laporan hasilnya ke Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja;

g. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi PIRT, pelatihan halal, dan perizinan usaha (NIB);

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA

Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang cepat berubah diperlukan perubahan kearah perubahan.

Beberapa faktor kunci keberhasilan dimulai dengan melakukan identifikasi indikator yang dapat menunjang tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Faktor kunci tersebut antara lain berupa potensi, kekuatan, ancaman dan peluang yang dihadapi, termasuk sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana, serta peraturan dan perundang undangan dan kebijakan yang digunakan oleh Instansi pemerintah dalam kegiatan-kegiatannya. Adapun peran organisasi dalam pelaksanaan pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah :

1) Peningkatan penempatan kesempatan kerja dan perluasan kerja;
2) Pembinaan yang diarahkan untuk kemandirian masyarakat;
3) Penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga yang profesional dan dilengkapi dengan adanya sarana dan prasarana yang memadahi;
4) Perwujudan Hubungan Industrial yang harmonis ;
5) Optimalisasi koordinasi lintas sektoral dan lintas program;
6) Peningkatan optimalisasi peran serta masyarakat dan kemitraan dalam pembangunan di bidang Koperasi dan tenaga kerja;
7) Kebijakan pembangunan yang selalu berdasarkan kepada data yang akurat ataupun isu-isu permasalahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta tenaga kerja;
8) Adanya dukungan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dalam menunjang kegiatan .

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali dengan mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dipengaruhi oleh faktor SDM dan sarana prasarana. Kebijakan penting yang ditempuh untuk mengatasi kedua faktor tersebut antara lain:

1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Tenaga Kerja;
2) Peningkatan kesempatan Ketenaga Kerjaaan;
3) Pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan untuk taat pada peraturan ketenagakerjaan;
4) Adanya pantauan UMK secara kontinyu;
5) Peningkatan koordinasi LKS Tripartit;
6) Perumusan kebijakan teknis dalam penanganan bidang pengembangan Koperasi dan Tenaga Kerja;
7) Koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan umum bidang pengembangan koperasi dan tenaga kerja;
8) Pemberian rekomendasi dalam perijinan dan penyuluhan serta pembinaan bidang pengembangan Koperasi dan Usaha mikro Kecil dan Menengah;
9) Pemberian ijin bidang pengembangan Koperasi dan UMKM;

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari hasil evaluasi terhadap capaian target dalam RKPD tahun 2022 maupun terhadap capaian kinerja dalam RPJMD, beserta kerangka pendanaan bidang Koperasi dan Tenaga Kerja, sebagaimana dirumuskan dalam prioritas pembangunan daerah yang terdapat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali 2016-2021 dan juga prioritas pembangunan daerah tahunan sebagai pedoman dan arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. yang akan dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD, indikator kinerja kunci yang mengacu pada indikator RPJMD, SPM serta indikator Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Secara umum terhadap usulan program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja sesuai dengan prioritas pembangunan (rencangan awal RKPD) beserta target yang akan dicapai pada tahun 2024, sebagaimana terlihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Rancangan Awal RKPD

(Prioritas Pembangunan Bidang Koperasi dan Tenaga Kerja)

dan Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Boyolali	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpebuhi sesuai standar								
1	Administrasi keuangan perangkat daerah	Boyolali	Fungsi Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Boyolali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	4.874.745	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Boyolali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	4.874.745	
1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	258.720	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	258.720	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Boyolali	Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Boyolali	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	6.152	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Boyolali	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	6.152	
2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Boyolali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakankantor	12 paket	44.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Boyolali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakankantor	12 paket	44.800	
2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Boyolali	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	6.780	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Boyolali	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	6.780	
2.4	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Boyolali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	74.274	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Boyolali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	74.274	

No	Rancangan Awal RKPD: Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024: Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Boyolali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	80.167	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Boyolali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	80.167	
2.6	Penyediaan Bahan/Material	Boyolali	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	109.278	Penyediaan Bahan/Material	Boyolali	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	109.278	
2.7	Fasilitasi kunjungan tamu	Boyolali	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	281.400	Fasilitasi kunjungan tamu	Boyolali	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	281.400	
2.8	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Boyolali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	228.500	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Boyolali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	228.500	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Boyolali	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3.000	
3.2	Penyedian jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 laporan	141.000	Penyedian jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 laporan	141.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Daya Air dan Listrik yang Disediakan			dan Listrik		Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.200	
4.	Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Boyolali	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah								
4.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Boyolali	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	60.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Boyolali	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	60.000	
4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Boyolali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	35.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Boyolali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	35.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Boyolali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 unit	70.000	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Boyolali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 unit	70.000	
II	Program Pelatihan kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Boyolali	Persentase kesesuaian tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja								
1	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Boyolali	Jumlah tenaga kerja yang meningkat kompetensinya								
1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Boyolali	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	500 orang	372.200	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Boyolali	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	500 orang	372.200	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III	Program Penempatan Tenaga Kerja	Boyolali	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan								
1	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Boyolali	Boyolali	Jumlah pencari kerja yang bisa mengakses informasi kerja								
1.1	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas ketenagakerjaan	Boyolali	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	100 orang	251.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas ketenagakerjaan	Boyolali	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	100 orang	251.000	
IV	Program Hubungan Industrial	Boyolali	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan								
1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Boyolali	Jumlah perusahaan yang menggaji sesuai regulasi								

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Boyolali	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	97.400	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Byl	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	97.400	
V	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Boyolali	Persentase koperasi yang di bina yang meningkat nilai kesehatannya								
1.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Boyolali	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya			Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Boyolali	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Boyolali	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	66 unit ush	59.706	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Byl	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	66 unit ush	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VI	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Boyolali	Persentase peningkatan SDM Koperasi yang terlatih								
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/kota	Boyolali	Persentase koperasi yang meningkat pengetahuan perkoperasian								
1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Boyolali	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian kompetensi SDM Koperasi	240 orang	124.150	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Boyolali	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian kompetensi SDM Koperasi	240 orang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian kompetensi SDM Koperasi	
VII	Program Pemberdayaan UMKM	Boyolali	Persentase rata-rata peningkatan omzet pelaku usaha mikro								
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,	Boyolali	Jumlah usaha mikro yang bermitra dan memperoleh pendampingan								

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		kelembagaan								
1.1	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Boyolali	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	230	356.020	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Boyolali	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	230	356.020	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja melakukan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan yang diajukan para pemangku kepentingan, oleh karena itu dalam penentuan skala prioritas dapat tidaknya usulan program dan kegiatan dari stakeholder diakomodasi, dengan tetap memperhatikan beberapa kriteria yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Boyolali meliputi:

1) Keterkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
2) Keterkaitan dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Boyolali periode 2021-2026;
3) Keterkaitan dengan pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan
4) Keterkaitan dengan isu strategis daerah.

Berdasarkan kriteria tersebut, Daftar/usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, untuk dijadikan prioritas pembangunan beserta tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program serta kebutuhan pembiayaannya. Dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Boyolali		
		Administrasi Umum perangkat daerah	Kab. Boyolali		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Boyolali		
		Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Boyolali		
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi.	Kab. Boyolali		
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali		
4	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Kab. Boyolali		

No (1)	Program (2)	Kegiatan (3)	Lokasi (4)	Besaran/ Volume (5)	Catatan (6)
		Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali		
6	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Boyolali		
7	Program Pemberdayaan UMKM	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Kab. Boyolali		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi pemberdayaan Koperasi dan Tenaga Kerja tidak dapat dilepaskan Pengawasan terhadap perkembangan koperasi dan tenaga kerja dengan upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Tenaga Kerja serta efisiensi usaha dan mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali. Untuk itu perlu pula dilakukan peningkatan akses usaha Koperasi dan Tenaga Kerja. Seiring dengan itu perlu pula dilakukan peningkatan kualitas usaha Koperasi dan Tenaga Kerja kepada sumber daya produktif, berikut kapasitas kompetensi dan produktivitas usahanya.

Dengan pertimbangan kondisi internal dan eksternal ke depan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan prioritas yang akan ditempuh yaitu :

1) Peningkatan kesesuaian ketrampilan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja;
2) Peningkatan jaringan kerjasama penyaluran tenaga kerja;
3) Peningkatan penerapan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan;
4) Optimalisasi fungsi mediasi dan deteksi dini perselisihan hubungan industrial;
5) Peningkatan kapasitas pengurus koperasi dan kualitas metode pengelolaan koperasi;
6) Peningkatan kapasitas SDM pelaku UKM;
7) Peningkatan standarisasi produk UKM dan peningkatan akses permodalan;

Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, serta mengacu pada arah kebijakan Kabupaten Boyolali dibidang koperasi dan tenaga kerja prioritas pembangunan yang dilaksanakan tahun 2024 meliputi:

1) Meningkatkan kompetesi dan produktivitas tenaga kerja;
2) Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja;
3) Tersedianya upah yang layak bagi tenaga kerja;
4) Peningkatan SDM pelaku koperasi melalui bimbingan penilaian kesehatan, sosialisasi dan yang lainnya;
5) Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana bagi UMKM;
6) Fasilitasi akses permodalan dan promosi;

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali yaitu mewujudkan pembangunan manusia yang berkwalitas, tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikatornya tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Meningkatnya perlindungan hak-hak tenaga kerja dan promosi lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi seluruh pekerja	Persentase peningkatan kepatuhan perusahaan atashak hak pekerja (kebebasan berserikat)
	Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap perekonomian	Persentase koperasi yang SHUnya meningkat
		Jumlah Usaha Mikro yang meningkat omzetnya

Uraian keterkaitan antara visi misi dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Boyolali dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi pertama Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju Sinergi dan Berkelanjutan pada misi ini Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintah di bidang koperasi, usaha mikro dan menengah, dan tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis bidang koperasi, usaha mikro dan menengah, dan tenaga kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Adapun upaya yang dilakukan melalui fasilitasi bantuan modal, keterampilan sumber daya pelaku usaha, pengorganisasian kelompok usaha dan Koperasi peningkatan kualitas sumber daya tenaga kerja dan pencari kerja untuk menciptakan ketrampilan tenaga kerja yang kompeten dan produktif serta peluang kesempatan kerja mandiri;

Dalam rangka penjabaran atas tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dari Dinas Koperasi dan Tenga Kerja Kabupaten Boyolali, maka output akhir yang diharapkan sebagaimana tertuang pada prioritas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA

Perumusan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan dengan tolok ukur kinerja masing-masing kelompok program serta kebutuhan pembiayaannya. Kerangka pendanaan yang disajikan bersifat indikatif yang berarti bahwa anggaran pendanaan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kegiatan dan target yang akan dilaksanakan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, tersebut.

1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah, adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan;
2) Pencapaian SDGs;
3) Penurunan angka kemiskinan, adalah suatu upaya penanggulangan kemiskinan dan menjadi prioritas pembangunan;
4) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, adalah suatu yang harus di gali dalam pengembangan potensi agar berkembang dan berhasil sehingga dapat menarik investor masuk ke Boyolali;
5) Pengembangan daerah terisolir, agar pembangunan dan kesejahteraan dapat merata.

Berdasarkan uraian diatas terhadap program dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dalam tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Rekapitulasi program dan kegiatan, yang akan dilakukan dalam tahun 2024 dan dalam rangka pencapaian target RPJMD antara lain meliputi:
   - Jumlah program ada 7 (tujuh) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan baik kegiatan rutin maupun kegiatan tekhnis. Kegiatan rutin ada 1 program dan 4 kegiatan, sedangkan kegiatan tekhnis ada 6 program dan 6 kegiatan;
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya, sesuai tabel terlampir.
2) Penjelasan jika terdapat rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD maupun yang tidak sesuai dengan RPJMD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, bisa diakibatkan adanya perubahan struktur

organisasi maupun capaian target SPM yang dulu belum tertampung dalam dokumen RPJMD.

B A B IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 8. Program dan Kegiatan
Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2 07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								**720.600.000**					**1,250,000,000**
2 07 03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**								**372,200,000**					**750,000,000**
2 07 03 2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**								**372,200,000**					**750,000,000**
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Meningkat Kompetensinya	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Meningkat Kompetensinya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 orang	500 Orang	500 orang	372,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Kerja yang Meningkat Kompetensinya	500 orang	750,000,000

2	**07**	**04**				**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**								**251,000,000**						**500,000,000**
2	**07**	**04**		**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**								**251,000,000**						**500,000,000**
2	07	04		2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4750 Persen	22 Orang	4750 Persen	251,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	4750 Persen	500,000,000
2	**07**	**05**				**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**								**97,400,000**						**0**
2	**07**	**05**		**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**								**97,400,000**						**0**
2	07	05		2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		Kab. Boyolali,		1 Lembaga		97,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	**17**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								**6,769,942,000**						**6,904,398,000**
2	**17**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6,230,066,000**						**6,514,094,000**
2	**17**	**01**		**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5,133,465,000**						**5,971,308,000**
2	17	01		2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Fungsi Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	40 Orang/bulan	12 Bulan	4,874,745,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fungsi Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	5,737,308,000
2	17	01		2.02	02	Penyediaan Administrasi	Fungsi Layanan Administras	Jumlah Dokumen Hasil	Terpenuhinya Gaji dan	Kab. Boyolali, Semua	12 bulan	12 Dokumen	12 Bulan	258,720,000	Dana Transfer Umum-		Fungsi Layanan Administras	12 bulan	234,000,000

					Pelaksanaan Tugas ASN	i Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tunjangan ASN	Kecamatan, Semua Kelurahan					Dana Alokasi Umum		i Keuangan Perangkat Daerah		
2	**17**	**01**		**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**786,401,000**					**301,969,000**
2	17	01		2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1 Paket	12 Bulan	6,152,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3,000,000
2	17	01		2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1 Paket	12 Bulan	44,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	60,000,000
2	17	01		2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1 Paket	12 Bulan	6,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3,000,000
2	17	01		2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Paket	12 Bulan	74,274,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	40,000,000

2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	6 Paket	12 Bulan	80,167,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	30,000,000
2	17	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	6 Paket	12 Bulan	109,128,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	25,000,000
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Laporan	12 Bulan	281,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	100,969,000
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Laporan	12 Bulan	228,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fungsi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	100,000,000
2	**17**	**01**		**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**145,200,000**					**128,817,000**
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan	Jasa penunjang Urusan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	12 bulan	1 Laporan	12 Bulan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana		Jasa penunjang Urusan	12 bulan	2,817,000

						Pemerintahan Daerah	Jasa Surat Menyurat	Pemerintahan Daerah	Semua Kelurahan					Alokasi Umum		Pemerintahan Daerah		
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 Laporan	12 Bulan	141,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	124,800,000
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	1 Laporan	12 Bulan	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1,200,000
2	**17**	**01**		**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**165,000,000**					**112,000,000**
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boyolali, Semua Kecamatan,	12 Bulan	38 Unit	12 Bulan	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	42,000,000

									Semua Kelurahan									
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	10 Unit	12 Bulan	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	20,000,000
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1 Unit	12 Bulan	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	50,000,000
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**								**59,706,000**					**0**
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**59,706,000**					**0**
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Unit Usaha		59,706,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**								**124,150,000**					**0**
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**124,150,000**					**0**
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan		Jumlah SDM yang		Kab. Boyolali,		50 Orang		124,150,000	Dana Transfer				0

					Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Memahami Pengetahuan Perkoperasian		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**								**356,020,000**					**390,304,000**
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**								**356,020,000**					**390,304,000**
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Peningkatan SDM Pelaku UMKM yang Terlatih	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Peningkatan SDM Pelaku UMKM yang Terlatih	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,03 persen	230 Unit Usaha	103 Persen	356,020,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Peningkatan SDM Pelaku UMKM yang Terlatih	1,03 persen	390,304,000
												TOTAL	**7,535,492,000**					**8,904,398,000**

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja tahun 2024 di susun sebagai pedoman bagi segenap aparatur dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas pembangunan di bidang Koperasi dan Tenaga Kerja dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah *(trickle down effect)* sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat dan dunia usaha beserta aparatur pemerintah diperlukan sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin para penyelenggara pembangunan. Keberhasilan tersebut tercermin pada kualitas dan profesional dalam pengolahan pengelolaan pembangunan yang terdiri dari aspek perencanaan,pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta kondisi yang mantap dengan instansi terkait dalam untuk mendukung kelancaran kinerja

Renja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Q. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
DAFTAR TABEL 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.2. Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 8
BAB II 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2022 dan Capaian Renstra DPMPTSP Boyolali 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Boyolali 13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Boyolali 18
2.3.2. Permasalahan dan Hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Boyolali 19
2.3.3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan DPMPTSP Boyolali 19
2.3.4. Rekomendasi strategis untuk ditindaklanjuti dalam peru- musan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 22
BAB III 25
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Boyolali 26
BAB IV 43
PENUTUP 59

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2022 9
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP Boyolali 10
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Boyolali 17
Tabel 2. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Boyolali Tahun 2024 23

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 27
Tabel 3. 2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 28

Tabel 4. 1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) OPD sehingga penyusunan Renja OPD berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan aturan yang berlaku, penyusunan RENJA DPMPTSP Tahun 2024 dilaksanakan melalui pendekatan teknokratif, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Sesuai pendekatan dimaksud, maka RENJA DPMPTSP Tahun 2024 ini merupakan manifestasi dari berbagai pikiran segenap pemangku kepentingan. Proses penyusunan RENJA DPMPTSP Tahun 2024 dilakukan melalui koordinasi antar bidang dan stakeholder yang terkait. Penyusunan RENJA DPMPTSP Tahun 2024 ini sendiri telah memperhatikan keterkaitan dan sejalan dengan RPJMD Boyolali Tahun 2021 - 2026, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Boyolali Tahun 2024 dan Rencana Kerja kementerian/lembaga terkait yang nantinya akan dijabarkan dalam rencana kinerja jangka pendek urusan penanaman modal tahun 2024.

Penyusunan RENJA DPMPTSP Tahun 2024 ini sendiri sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta aturan pelaksanaannya, dimana RENJA DPMPTSP Tahun 2024 menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Disamping itu, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA DPMPTSP Boyolali mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Boyolali, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA OPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi, dan program OPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis OPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA OPD merupakan acuan bagi OPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) pada tahun 2024;
3. RENJA OPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183;

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2020 Nomor 134);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor.4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 133);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor .7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
22. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 53).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Boyolali Tahun 2024 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2022 dan perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Boyolali Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan RENJA DPMPTSP Boyolali Tahun 2024 ini meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP BOYOLALI TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Boyolali Tahun 2022 dan Capaian Renstra DPMPTSP Boyolali
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Boyolali
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Boyolali
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP BOYOLALI

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Boyolali
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP BOYOLALI

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP BOYOLALI TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2022 dan Capaian Renstra DPMPTSP Boyolali

Berikut nomenklatur program dan/atau kegiatan pada DPMPTSP Boyolali Tahun 2022 berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Boyolali Tahun 2021-2026 (murni) dan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Boyolali Tahun 2022, sebagaimana Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2022

NO	BIDANG URUSAN	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH
		Tahun 2022
(1)	(2)	(3)
1	PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Boyolali Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP Boyolali dan Pencapaian Renstra DPMPTSP Boyolali s.d. Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021-2026	Realisasi TargetKinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun 2022			Target Programdan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun2024	
						Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
	Bidang Urusan Penanaman Modal										
	Meningkatnya nilai investasi		Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) (dalam juta rupiah)	9.153.535.000.000	5.113.402.435.836	1.711.512.000.000	3.125.294.501.658	182.60 %	1.771.109.000.000	1.830.706.930.000	100 %
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi potensi investasi yang ditindak lanjuti dengan penjajakan kerjasama investasi	50		30	30	100 %	35	35	100 %
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan promosi penanaman modal	15	15	2 Keg	2	100 %	2 Keg	2	100 %
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	75		58	58	100 %	63	63	100 %
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen fasilitas /Insentif Di bidang penanaman Modal	5		1 Dok	1	100 %	1 Dok	1	100 %

		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi	-		1 Dok	1	100 %	1 Dok	1	100 %
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM Perizinan Investasi	86		82,55	89.68	108 %	83,5	83,5	100 %
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan	15000		5000	13.290	260 %	5300	5300	100 %
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan	100		100	100	100 %	100	100	100 %
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	10		2 Kali	2	100 %	2 Kali	2	100 %
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan perusahaan yang tertib pelaporan LKPM	23,16		19,26	20	103 %	19,91	19,91	100 %
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaporan LKPM	200	200	30	30	100 %	35	35	100 %
	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah		Nilai Sakip	85,5		82,3	82,3	100 %	82,9	82,9	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100		100	100	100 %	100	100	100 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	60 Bulan	60	12 Bulan	12	100 %	12 Bulan	12	100 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan administrasi perkantoran perangkat daerah	60 Bulan	60	12 Bulan	12	100 %	12 Bulan	12	100 %

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	15 Paket	15	3 Paket	3	100	0 Paket	0	
		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kebutuhan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	60 Bulan	60	12 Bulan	12	100 %	12 Bulan	12	100 %
		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional , pemeliharaan peralatan kantor lainnya pemeliharaan gedung kantor	60 Bulan	60	12 Bulan	12	100 %	12 Bulan	12	100 %
		Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	125	125	25	25	100 %	25	25	100 %

Indikator kinerja DPMPTSP Boyolali dalam Renstra Tahun 2021 - 2026 untuk tahun 2022 sejumlah total 22 indikator, yang terdiri dari:

- 2 (dua) indikator tujuan
- 2 (dua) indikator sasaran
- 6 (enam) indikator program
- 12 (enam belas) indikator kegiatan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Boyolali

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Boyolali, maka fungsi yang harus dilaksanakan adalah melakukan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendali- an Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, serta Pengelolaan Data dan Informasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut maka penjabaran penjelasan ringkas tentang capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan pada renja tahun sebelumnya sebagaimana Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Boyolali

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				2021	2022	2024	2021	2022	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(13)	(14)
	IKM Perizinan Investasi			**82,5**	**82,55**	**83,5**		**89,68**	**88,5**	
	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan			-	5000	5300		13290	5300	
	Jumlah Konsultasi perizinan dan non perizinan			-	1100	1200		1557	1500	
	Jumlah pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan			-	500	550		1493	600	
	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan			-	3 layanan	3 layanan		3	3	
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah			-	3 kali	3 kali		3	3	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Boyolali

2.3.1. Tingkat Pelayanan DPMPTSP Boyolali

Dalam menyelenggarakan tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Boyolali, DPMPTSP Boyolali mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;

d. penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas, maka kinerja pelayanan pada DPMPTSP lebih difokuskan pada pro- mosi yang dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan citra positif Boyolali di mata investor baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, kinerja DPMPTSP juga diukur dari peningkatan realisasi investasi di Boyolali setiap ta- hunnya, baik itu dari segi prosentase pertumbuhan jumlah proyek PMA dan PMDN dari tahun ke tahun, jumlah nilai investasi, maupun penyerapan tenaga kerja.

Kinerja DPMPTSP Boyolali juga dapat diukur dari pelayanan yang diberikan kepada investor dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dalam merealisasikan investasinya di Boyolali. Tolok ukur kinerja lainnya adalah dalam pelayanan perizinan yang diberikan kepada investor dan penanganan pengaduan masyarakat.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Boyolali

Permasalahan dan hambatan DPMPTSP Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perlambatan terhadap laju ekonomi global dan nasional sehingga berpengaruh terhadap B o y o l a l i , meliputi

    a. Realisasi penanaman modal yang belum merata dan berkelanjutan;

    b. Kurang optimalnya akses masyarakat terhadap pemenuhan atas legalitas usaha sebagai akibat dampak pandemi dan penyesuaian regulasi; dan

    c. Kurang intensifnya kegiatan promosi dan investasi.

2. Persiapan implementasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait dengan urusan penanaman modal, khususnya terkait regulasi, kelembagaan, SDM, Sarana Prasana, Sistem Informasi dan diseminasi informasi.

2.3.3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan DPMPTSP Boyolali

Dalam rangka meningkatkan pelayanan DPMPTSPBoyolali mempunyai tantangan sebagai berikut:

1. Diseminasi dan implementasi regulasi baru dalam urusan penanaman modal dan perizinan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) beserta peraturan pelaksananya;
2. Pemulihan ekonomi dan penurunan pertumbuhan penanaman modal akibat dampak Covid - 19;
3. Belum optimalnya pertumbuhan dan persebaran realisasi penanaman modal di Kabupaten Boyolali
4. Kurang intensifnya penanaman modal daerah;
5. Belum optimalnya sinergi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, khususnya pelaku usaha menengah kecil

(UMK) dan pendataan/pencatatan penanaman modalnya;

6. Infrastruktur digital promosi masih terbatas;
7. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi dalam bidang promosi, pelayanan perizinan, penyajian data investasi, dan pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha;
8. Ketersediaan jumlah tenaga kerja belum disertai dengan keterampilan yang memadai sesuai kebutuhan industri;

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

1. Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap Iklim usaha yang kondusif;
2. Ketersediaan infrastruktur pendukung penananam modal;
3. Ketersediaan tenaga kerja dan upah tenaga kerja yang kompetitif;
4. Peluang investasi yang siap ditawarkan, prospektif dan potensial;
5. Sistem pelayanan perizinan secara terintegrasi melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA);
6. Ketersediaan RTRW Boyolali;
7. Budaya pertanian yang terdapat di masyarakat;
8. Banyaknya sumberdaya alam (pertanian, perkebunan, kehutanan) yang bisa dikembangkan menjadi pertanian terintegrasi, agro industri dan wisata alam/desa.

2.3.4. Rekomendasi strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Boyolali terdapat isu-isu penting guna meningkatkan realisasi investasi di Boyolali, yaitu :

1. Perlunya pertumbuhan dan persebaran realisasi penanaman modal yang merata di Boyolali;
2. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten-

tang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya; dan

3. Percepatan pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19.

Langkah strategis yang akan dilaksanakan DPMPTSP Boyolali guna mengatasi isu-isu penting tersebut di atas, meliputi:

A. Strategi untuk sasaran *Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan* :
   1. Menyempurnakan regulasi daerah sebagai implementasi peraturan perundang-undangan pelaksanaan perizinan berusaha di daerah;
   2. Meningkatkan sistem dan layanan perizinan secara mudah, murah, cepat, dan tepat serta transparan dengan pemanfaatan teknologi informasi;
   3. Meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat; dan
   4. Meningkatkan penyediaan data dan informasi penanaman modal.
B. Strategi untuk sasaran *Meningkatnya capaian realisasi PMA dan PMDN:*
   1. Mengembangkan *digital investment promotion*;
   2. Meningkatkan kualitas kajian potensi penanaman modal;
   3. Meningkatkan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dengan dunia usaha;
   4. Meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan berusaha; dan

Sedangkan khusus untuk mengatasi dampak Covid - 19 terhadap investasi di Boyolali, DPMPTSP Boyolali fokus pada solusi yang meliputi:

a. Mendorong/mempercepat realisasi investasi yang berasal dari negara tidak terkena/minimal terdampak Covid-19;
b. Mempercepat realisasi investasi dalam negeri (PMDN) dengan memberikan perlakuan khusus (*case by case*) kepa- da perusahaan yang sudah berproduksi namun kesulitan bahan baku atau tidak ada tenaga ahli;
c. Mempercepat realisasi bagi kegiatan investasi tahap kon-

struksi melalui relaksasi aturan-aturan jangka pendek atau perlakuan khusus;

d. Mendorong realisasi fasilitas insentif dan kemudahan investasi di daerah;

e. Mendorong kepeminatan investor lokal (PMDN) terhadap peluang potensi investasi yang ada;

f. Memfasilitasi kemitraan antara usaha menengah besar dengan usaha mikro kecil; dan

g. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait (Pusat dan Daerah) dalam penyelesaian masalah investasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Boyolali Tahun 2024

DPMPTSP Boyolali

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	
Non Urusan (Eks BAU)											
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DPMPTSP Boyolali	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	Rp. 4.370.725.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DPMPTSP Boyolali	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp. 3,845,929,000	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP Boyolali	Persentase perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dipromosikan	63 %	Rp. 0	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP Boyolali	Persentase perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dipromosikan	63 %	Rp. 89,400,000	
3	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP Boyolali	Rasio Izin Usaha terhadap kepeminatan penanaman modal (%)	35 %	Rp. 5.000.000	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP Boyolali	Rasio Izin Usaha terhadap kepeminatan penanaman modal (%)	35 %	Rp 66,500,000	
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP Boyolali	IKM Perizinan Investasi	83,5	Rp. 0	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP Boyolali	IKM Perizinan Investasi	83,5	-	
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP Boyolali	Persentase peningkatan perusahaan yang tertib pelaporan LKPM	19,91	Rp. 333.900.000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP Boyolali	Persentase peningkatan perusahaan yang tertib pelaporan LKPM	19,91	Rp. 393,394,000	DAK

6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP Boyolali	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan	100	Rp. 0	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP Boyolali	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan	100	Rp. 110,000,000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP BOYOLALI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Presiden Republik Indonesia memberikan arahan untuk pencapaian visi 2045 *Menjadi Negara Pendapatan Tinggi dan Ekonomi Terbesar Dunia* melalui transformasi ekonomi yang harus didukung oleh industrialisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, dan penyederhaan regulasi dan birokrasi.

Visi Presiden tersebut terakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 dengan tema *Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.*

Tujuh agenda menjadi prioritas pembangunan RPJMN IV 2020 - 2024 diantaranya adalah (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, (2) Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerintahaan, (3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing dan (5) Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Agenda prioritas tersebut menitikberatkan wilayah sebagai basis pembangunan.

Tahun 2024 merupakan Tahap pertama RPJMN 2020 - 2024, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2024 dengan spektrum perencanaan pembangunan nasional yang berdasarkan pada evaluasi RKP Tahun 2020 dan antisipasi pemulihan pembangunan nasional pasca Covid-19. Covid-19 menjadi pandemi global di awal tahun 2020 hingga saat ini. Ratusan negara telah terdampak, termasuk Indonesia dengan kasus terkonfirmasi positif pertama pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Dalam kondisi dan situasi tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat dan belanja transfer di tahun 2021.

Berdasarkan situasi terkini dalam rangka penanganan wabah Covid-19 dan kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, RKP 2024 memiliki tema *Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.* Tahun 2024 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan Covid - 19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Terdapat beberapa indikasi isu penting di tahun 2024 yaitu pemulihan ekonomi dan

transformasi ekonomi yang inklusif dalam jangka menengah dan panjang. Terkait dengan urusan penanaman modal, fokus dilakukan guna mendukung prioritas pembangunan ke-1 yaitu *Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan* dengan *highlight major project* meliputi pengembangan kawasan industri, peningkatan peran UMKM dan peningkatan peran destinasi wisata yang dilakukan dengan tujuan untuk menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi.

Berdasarkan dokumen perencanaan nasional, Investasi menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional selain ekspor dikarenakan:

1) Investasi akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas yang apabila dapat dipenuhi oleh ketersediaan tenaga kerja yang ada akan menurunkan angka pengangguran pasca pandemi;
2) Investasi akan meningkatkan perekonomian yang sempat turun karena dampak pandemi Covid - 19 baik melalui pembangunan unit usaha baru, peningkatan kapasitas produksi maupun perluasan usaha.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Boyolali

Sebagai pedoman implementasi RKPD Tahun 2024, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 disusun dan diwujudkan dalam beberapa tujuan dan sasaran pembangunan daerah Boyolali Tahun 2024. Tujuan dan sasaran pada hakikatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Boyolali.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misipembangunan Kabupaten Boyolali yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu Misi Ke-1 : a. Boyolali Melanjutkan Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jawa Tengah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran urusan Penanaman Modal seperti diuraikan pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Boyolali Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4.68
		Meningkatnya nilai investasi	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp	1,830,706,930,000
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	833
		Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah	Nilai Sakip	Nilai	82.90

Tabel 3. 2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**4.709.625.000,00**							**3.872.218.000,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.709.625.000,00**							**3.872.218.000,00**
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**4.709.625.000,00**							**3.872.218.000,00**
1,	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar***	**100 Persen 100 Persen**			**100 Persen**	**4.370.725.000,00**						**100 Persen 100 Persen**	**3.726.578.000,00**
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat*	7 Kegiatan			25 Dokumen	0,00			-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	7 Kegiatan	0,00
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			2 Dokumen	0,00	-	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	2 Dokumen	0,00
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	1 Dokumen	0,00
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	1 Dokumen	0,00
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	1 Dokumen	0,00
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	1 Dokumen	0,00
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64 Laporan			16 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	16 Laporan	0,00
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan			4 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	4 Laporan	0,00
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah*	6 Kegiatan			6 Kegiatan 12 Bulan	3.422.883.000,00			-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	6 Kegiatan	3.232.762.000,00

	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan			25 Orang/bulan	3.032.883.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	25 Orang/bulan	2.877.862.000,00
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen			12 Dokumen	390.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	12 Dokumen	354.900.000,00
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen			12 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	12 Dokumen	0,00
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48 Dokumen			12 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	12 Dokumen	0,00
	2.18.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan												
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	1 Dokumen	0,00
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	72 Laporan			18 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	18 Laporan	0,00

	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Kebutuhan administrasi perkantoran perangkat daerah*	9 Kegiatan			12 Bulan	405.462.000,00			-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	9 Kegiatan	297.732.000,00
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket			2 Paket	3.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	4 Paket	3.000.000,00
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket			2 Paket	70.480.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	4 Paket	0,00
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket			2 Paket	3.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	4 Paket	3.000.000,00
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket			2 Paket	40.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	12 Paket	40.000.000,00
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket			2 Paket	60.482.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	4 Paket	60.482.000,00
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL		0,00
	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													

			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	16 Paket			2 Paket	75.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	4 Paket	75.000.000,00
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16 Laporan			2 Laporan	53.500.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	4 Laporan	16.250.000,00
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan			2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	4 Laporan	100.000.000,00
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Juml Pengadaan Barang Milik Daerah*	3 Kegiatan			3 Paket	0,00			-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	3 Kegiatan	0,00
	2.18.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud													
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit			0 Unit	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	0 Unit	0,00
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit			0 Unit	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	0 Unit	0,00
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit			0 Unit	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	0 Unit	0,00

	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*kebutuhan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah*	3 Kegiatan			12 Bulan	194.924.000,00			-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	3 Kegiatan	47.190.000,00
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan			12 Laporan	1.299.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	12 Laporan	1.299.000,00
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	153.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	12 Laporan	45.266.000,00
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan			12 Laporan	40.625.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	4 Laporan	625.000,00
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional , pemeliharaan peralatan kantor lainnya pemeliharaan gedung kantor*	4 Kegiatan			12 Bulan	347.456.000,00			-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	4 Kegiatan	148.894.000,00
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			9 Unit	28.894.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	9 Unit	28.894.000,00
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	788 Unit			788 Unit	20.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	788 Unit	20.000.000,00
	2.18.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud													
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	15 Unit			1 Unit	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	15 Unit	0,00
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	298.562.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	1 Unit	100.000.000,00
2,	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	***Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi***	**75,00 Perse n**			**65,00 Persen**	**0,00**						**75,00 Persen**	**70.000.000,00**
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen fasilitas /Insentif Di bidang penanaman Modal*	1 Dokumen			1 Dok	0,00			-	1. Peningka tan kapasitas perekonomia n yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pen gendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	1 Dokumen	0,00
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal													

			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	0 Dokumen	0,00
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi*	1 Dokumen			1 Dok	0,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	1 Dokumen	70.000.000,00
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													

			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomia n yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	1 Dokumen	0,00
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	0 Dokumen	70.000.000,00
3,	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Persentase promosi potensi investasi yang ditindaklanjuti dengan penjajakan kerjasama investasi Persentase realisasi investasi di wilayah Boyolali utara***	**50,00 Perse n**			**40,00 Persen**	**5.000.000,00**						**50,00 Persen**	**75.640.000,00**

	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan promosi penanaman modal*	9 Dokumen			2 Keg	5.000.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	2 Dokumen	75.640.000,00
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	8 Dokumen			3 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	2 Dokumen	75.640.000,00
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota													

			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	1 Dokumen	0,00
4,	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***IKM perizinan investasi***	**86,00 Nilai**			**84,50 Nilai**	**0,00**						**86,00 Nilai**	**0,00**
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan*	21000 izin usaha			1200 izin usaha	0,00			-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	5500 izin usaha	0,00
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah													
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen			30 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	3 Dokumen	0,00
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	21000 Pelaku Usaha			5200 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	5500 Pelaku Usaha	0,00
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko													

			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4600 Pelaku Usaha			3 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	1300 Pelaku Usaha	0,00
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko													
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	130 Kegiatan Usaha			600 Kegiatan Usaha	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	40 Kegiatan Usaha	0,00
5,	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Persentase peningkatan perusahaan yang tertib pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)***	**23,16 Perse n**			**21,00 Persen**	**333.900.000,00**						**23,16 Persen**	**0,00**
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaporan LKPM*	170 Perusah aan			40 Perusahaan	333.900.000,00			-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	50 Perusaha an	0,00
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	28 Kegiatan Usaha.			28 Kegiatan Usaha.	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	7 Kegiatan Usaha.	0,00
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	450 Pelaku Usaha			110 Pelaku Usaha	295.050.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	120 Pelaku Usaha	0,00
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal													

			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	112 Kegiatan Usaha			28 Kegiatan Usaha	38.850.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	30 Kegiatan Usaha	0,00
6,	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***Persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan***	**100,00 Pers en**			**100,00 Persen**	**0,00**							**100,00 Persen**	**0,00**
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan*	8 kali			2 kali	0,00			-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	2 kali	0,00
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5 Dokumen			5 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	5 Dokumen	0,00
	J U M L A H							**4.709.625.000,00**							**3.872.218.000,00**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP BOYOLALI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Boyolali yaitumeningkatkan realisasi penanaman modal dalam mewujudkan masyarakatBoyolali yang semakin sejahtera dan meningkatnya tata kelolaorganisasi perangkat daerah, telah ditetapkan sasaran melalui pencapaianindeks kepuasan masyarakat dan peningkatan realisasi penanaman modal.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

   Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten dan pembuatan peta potensi investasi provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi dengan target sebesar 65 %.

b. Program Promosi Penanaman Modal

   Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase promosi potensi investasi yang ditindaklanjuti dengan penjajakan kerjasama dengan target sebesar 40 %.

c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

   Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah . Program ini diarahkan pada pencapaian indikator ersentase peningkatan perusahaan yang tertib pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal dengan target sebesar 21 %.

d. Program Pelayanan Penanaman Modal

   Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan penanaman modal . Program ini diarahkan pada pencapaian indikator IKM perizinan investasi dengan target sebesar nilai 84,50

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan dengan target sebesar 100 persen

Guna tercapainya target tersebut, terlampir Rencana Kerja Program dan Kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif tahun 2024 serta perkiraan maju tahun 2024 sebagaimana tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4. 1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**4.709.625.000,00**							**3.872.218.000,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.709.625.000,00**							**3.872.218.000,00**
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**4.709.625.000,00**							**3.872.218.000,00**
1,	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar***	**100 Persen 100 Persen**			**100 Persen**	**4.370.725.000,00**						**100 Persen 100 Persen**	**3.726.578.000,00**
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat*	7 Kegiatan			25 Dokumen	0,00			-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	7 Kegiatan	0,00
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			2 Dokumen	0,00	-	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	2 Dokumen	0,00
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	1 Dokumen	0,00
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	1 Dokumen	0,00
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	1 Dokumen	0,00
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	1 Dokumen	0,00
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64 Laporan			16 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	16 Laporan	0,00
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan			4 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	4 Laporan	0,00

	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah*	6 Kegiatan			6 Kegiatan 12 Bulan	3.422.883.000,00			-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	6 Kegiatan	3.232.762.000,00
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan			25 Orang/bulan	3.032.883.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	25 Orang/bulan	2.877.862.000,00
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen			12 Dokumen	390.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	12 Dokumen	354.900.000,00
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen			12 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	12 Dokumen	0,00
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48 Dokumen			12 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	12 Dokumen	0,00
	2.18.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	1 Dokumen	0,00

	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan			18 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	18 Laporan	0,00
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Kebutuhan administrasi perkantoran perangkat daerah*	9 Kegiatan			12 Bulan	405.462.000,00			-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	9 Kegiatan	297.732.000,00
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket			2 Paket	3.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	4 Paket	3.000.000,00
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket			2 Paket	70.480.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	4 Paket	0,00
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket			2 Paket	3.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	4 Paket	3.000.000,00
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket			2 Paket	40.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	12 Paket	40.000.000,00
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket			2 Paket	60.482.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	4 Paket	60.482.000,00
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL		0,00
	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	16 Paket			2 Paket	75.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	4 Paket	75.000.000,00
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16 Laporan			2 Laporan	53.500.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	4 Laporan	16.250.000,00
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan			2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	4 Laporan	100.000.000,00

	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Juml Pengadaan Barang Milik Daerah*	3 Kegiatan			3 Paket	0,00			-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	3 Kegiatan	0,00
	2.18.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud													
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit			0 Unit	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	0 Unit	0,00
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit			0 Unit	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	0 Unit	0,00
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit			0 Unit	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	0 Unit	0,00
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*kebutuhan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah*	3 Kegiatan			12 Bulan	194.924.000,00			-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	3 Kegiatan	47.190.000,00
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan			12 Laporan	1.299.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	12 Laporan	1.299.000,00
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	153.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	12 Laporan	45.266.000,00
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan			12 Laporan	40.625.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	4 Laporan	625.000,00
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional , pemeliharaan peralatan kantor lainnya pemeliharaan gedung kantor*	4 Kegiatan			12 Bulan	347.456.000,00			-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	4 Kegiatan	148.894.000,00
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			9 Unit	28.894.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	9 Unit	28.894.000,00
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	788 Unit			788 Unit	20.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	788 Unit	20.000.000,00
	2.18.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud													
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	15 Unit			1 Unit	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	15 Unit	0,00

	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	298.562.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	ASN / TKHL	1 Unit	100.000.000,00
2,	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	***Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi***	**75,00 Perse n**			**65,00 Persen**	**0,00**						**75,00 Persen**	**70.000.000,00**
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen fasilitas /Insentif Di bidang penanaman Modal*	1 Dokumen			1 Dok	0,00			-	1. Peningka tan kapasitas p erekonomia n yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pen gendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	1 Dokumen	0,00
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal													

			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	0 Dokumen	0,00
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi*	1 Dokumen			1 Dok	0,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	1 Dokumen	70.000.000,00
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													

			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	1 Dokumen	0,00
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	0 Dokumen	70.000.000,00
3,	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Persentase promosi potensi investasi yang ditindaklanjuti dengan penjajakan kerjasama investasi Persentase realisasi investasi di wilayah Boyolali utara***	**50,00 Persen**			**40,00 Persen 32,00 Persen**	**5.000.000,00**						**50,00 Persen**	**75.640.000,00**

	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan promosi penanaman modal*	9 Dokumen			2 Keg	5.000.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	2 Dokumen	75.640.000,00
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	8 Dokumen			3 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	2 Dokumen	75.640.000,00
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota													

			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	1 Dokumen	0,00
4,	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***IKM perizinan investasi***	**86,00 Nilai**			**84,50 Nilai**	**0,00**						**86,00 Nilai**	**0,00**
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan*	21000 izin usaha			1200 izin usaha	0,00			-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	5500 izin usaha	0,00
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah													
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen			30 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	3 Dokumen	0,00
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	21000 Pelaku Usaha			5200 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	5500 Pelaku Usaha	0,00

	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko												
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4600 Pelaku Usaha			3 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	1300 Pelaku Usaha	0,00
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko												
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	130 Kegiatan Usaha			600 Kegiatan Usaha	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	40 Kegiatan Usaha	0,00
5,	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Persentase peningkatan perusahaan yang tertib pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)***	**23,16 Perse n**			**21,00 Persen**	**333.900.000,00**						**23,16 Persen**	**0,00**
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaporan LKPM*	170 Perusah aan			40 Perusahaan	333.900.000,00			-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	50 Perusaha an	0,00
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya												
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	28 Kegiatan Usaha.			28 Kegiatan Usaha.	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	7 Kegiatan Usaha.	0,00
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha												
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis	450 Pelaku Usaha			110 Pelaku Usaha	295.050.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	120 Pelaku Usaha	0,00

			Risiko											
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal												
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	112 Kegiatan Usaha			28 Kegiatan Usaha	38.850.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	30 Kegiatan Usaha	0,00
6,	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***Persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan***	**100,00 Pers en**			**100,00 Persen**	**0,00**						**100,00 Persen**	**0,00**
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan*	8 kali			2 kali	0,00			-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	2 kali	0,00
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5 Dokumen			5 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkata n kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan	Investor / Pengusaha / Masyarakat	5 Dokumen	0,00
	J U M L A H							**4.709.625.000,00**							**3.872.218.000,00**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja DPMPTSP Boyolali Tahun 2024 (RENJA 2024) ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Boyolali Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada rencana pembangunan tahap ke-II pentahapan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021 - 2026. RENJA 2024 ini berpedoman pada RKPD Boyolali Tahun 2024. Penyusunan RENJA 2024 ini berkolaborasi dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan di sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan dalam mempersiapkan penyusunan RENJA 2024.

Penyusunan RENJA 2024 telah melalui proses dan tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Investasi menjadi salah satu sektor yang penting dan perlu mendapatkan perhatian yang besar dari semua pihak dalam rangka upaya pemulihan dan peningkatan perekonomian daerah pasca pandemi Covid-19. Dokumen ini telah mengakomodir tindak lanjut dari isu-isu strategis baik terkait pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun percepatan pemulihan ekonomi dengan mengoptimalkan keterbatasan anggaran yang ada.

Oleh karena itu, komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh sumber daya manusia di lingkungan DPMPTSP Boyolali sangat diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut dan guna terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak. RENJA 2024 ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien sehingga mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Jawa Tengah melalui perwujudan *good governance* dan peningkatan realisasi investasi di Boyolali.

R. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali tahun 2024 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali Tahun 2024 memuat Program, Kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan yang sudah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali merupakan penjabaran dari Renstra yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Pemerintah Kabupaten Boyolali setelah melewati proses penyusunan Ranwal, Rancangan, Forum Konsultasi Publik dan beberapa kali mengikuti pendampingan yang diselenggarakan oleh BP3D Kabupaten Boyolali yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dalam satu tahun anggaran. Dokumen Renja tersebut nantinya diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan yang sedang berkembang saat ini serta sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 40
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 41
3.3. Program dan Kegiatan 43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 48
4.1. Program dan Kegiatan 49
BAB V PENUTUP..... 61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Capaian Indikator Sasaran 1 9

Tabel 2.2 : Capaian Indikator Sasaran 2 12

Tabel 2.3 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Boyolali 17

Tabel 2.4 : Pencapaian Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali 23

Tabel 2.5 : Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Boyolali 26

Tabel 2.6 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabuapten Boyolali 39

Tabel 3.1 : Identifikasi Isu-Isu Strategis terkait Tupoksi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali 42

Tabel 3.2 : Program dan Kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali Tahun 2024 43

Tabel 4.1 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Boyolali 49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1. Selanjutnya untuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerjanya tertuang dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dipimpin Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata.

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang lebih berdaya dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan kepariwisataan, diperlukan adanya Rencana Kerja yang didukung oleh sumberdaya manusia, kondisi keuangan serta fasilitas dan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali didasarkan pada Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun 2023, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali (2021–2026) dan Forum Konsultasi Publik serta sudah mengikuti pendampingan yang diselenggarakan oleh BP3D Kabupaten Boyolali serta RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya Renja ini menjadi acuan kerja sebagai implementasi yang lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kinerja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renja Perangkat Daerah khususnya dan perencanaan penganggaran daerah pada umumnya di era desentralisasi, yaitu :

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Serie E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3);

h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

i. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);

j. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 3);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 7);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja 2024 ini adalah sebagai dasar dan acuan dalam merancang program dan kegiatan tahun 2024 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Boyolali, Renstra dan RKPD Kabupaten Boyolali dan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan yang harus diselesaikan pada tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) ini berfungsi juga sebagai pedoman bagi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2024 adalah untuk :

a. Menyajikan data dan analisis evaluasi hasil pembangunan.
b. Merumuskan strategi yang perlu dilakukan oleh sektoral untuk mendukung tema pembangunan daerah tahun 2024.
c. Menyajikan hasil-hasil proses perencanaan partisipatorif atau bottom up, termasuk telaah atas usulan dari masyarakat yang disampaikan dalam proses musrenbang.
d. Menyajikan telaah atas pokok-pokok pikiran DPRD.
e. Melakukan penyelarasan dengan rencana pembangunan tingkat nasional (K/L) dan rencana pembangunan provinsi.
f. Melakukan identifikasi dan rumusan kegiatan lintas sektor yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan.

g. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahun 2024 yang mencakup lokasi, pagu indikatif dan keluaran-keluaran dan hasilnya.
h. Mengoptimalkan peran dan fungsi perumusan kebijakan teknis di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisataan dengan menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional kegiatan.
i. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisataan.
j. Menjaga konsistensi antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan rancangan Renja yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat tentang capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Penelaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan.

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor yang menjadi pertimbngan terhadap rumusan progdam dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai.

Bab V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup yang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 dan perkiraan capaian Renja tahun 2025 yang meliputi :

1. Kebijakan perencanaan program dan kegiatan
2. Pelaksanaan rencana program dan kegiatan
3. Capaian Kinerja program dan kegiatan

Pada tahun 2022 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali melalui APBD Kabupaten Boyolali melaksanakan 7 program dengan 18 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7 kegiatan);
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (2 kegiatan);
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (4 kegiatan);
4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan (1 kegiatan);
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (2 kegiatan);
6. Program Pemasaran Pariwisata (1 kegiatan);
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Kreatif (1 kegiatan).

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis dimana capaian kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali. Untuk tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

2.1.1 Capaian Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian

Sasaran di atas dicapai dengan indikator :

a. Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata

Dengan pencapaian dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Capaian Indikator Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian	1. Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	0,5 %	3,73 %	746 %

Untuk mencapai target indikator di atas diakomodir dalam pelaksanaan 3 (tiga) Program pada 4 (empat) kegiatan yang terperinci sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp 3.209.809.991,-.
2. Program Pemasaran Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp 923.333.000,-
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan anggaran Rp 952.289.000,-.

Dari tiga program tersebut, untuk pencapaian target indikator sasaran tahun 2022 sebesar Rp. 5.085.431.991,- (Lima miliar delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) terealisasi Rp 5.031.731.243,- (Lima miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) atau dengan persentase 98,94%.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,73 % dari target sebesar 0,5 % terealisasi sebesar 746 %

Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 4,17 %, dimana realisasi tahun 2021 adalah sebesar -0,44%

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata mengalami progres sebesar 106,57 %.

Perkembangan Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kunjungan wisatawan.
2. Peningkatan tingkat hunian hotel/penginapan.
3. Pertumbuhan destinasi wisata baru yang sangat beragam.
4. Peningkatan atraksi dan event wisata.

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

1) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan destinasi pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata.
2) Kapasitas pelaku usaha wisata yang kurang kreatif dalam menangkap peluang atau potensi yang ada.
3) Pemeliharaan obyek wisata yang membutuhkan anggaran besar.
4) Keterbatasan kepemilikan lahan untuk pengembangan destinasi wisata baru;

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara :

1) Memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha wisata.
2) Membuka peluang pihak ketiga (swasta, investor) dalam pengembangan destinasi wisata.

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata, dilaksanakan melalui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan :

2) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   a. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
      - Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota.
   b. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
      - Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
      - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
      - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
3) Program Pemasaran Pariwisata
   a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
      - Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
      - Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri
4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
   a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
      - Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
      - Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

2.1.2 Capaian Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan

Berkaitan dengan sasaran 2 di atas dicapai dengan indikator :

a. Persentase pembinaan cabang olahraga
b. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan

dengan pencapaian dapat disajikan pada table di bawah ini:

Tebel 2.2
Capaian Indikator Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	1. Persentase pembinaan cabang olahraga	80 %	92,16%	115,20 %
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	5,18 %	23,67 %	456,95 %

Dalam mencapai target indikator diakomodir dalam pelaksanaan 3 (tiga) Program pada 7 (tujuh) kegiatan dan terperinci sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan anggaran sebesar Rp 661.215.000,-.
b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan anggaran Rp 6.632.182.000,-.
c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan dengan anggaran Rp 421.280.000,-.

Capaian indikator pada tabel diatas, berkaitan dengan indikator Persentase pembinaan cabang olahraga dapat disimpulkan bahwa telah mencapai target yang ditetapkan yaitu

sebesar 92,16 % dari target sebesar 80 % terealisasi sebesar 115,20 %.

Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 3,92 %, dimana realisasi tahun 2021 adalah sebesar 88,24 %.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka Persentase pembinaan cabang olahraga mengalami progres sebesar 92,16 %.

Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target Persentase pembinaan cabang olahraga adalah sebagai berikut:

1. Potensi olahraga yang sangat besar untuk dikembangkan.
2. Kesadaran masyarakat tehadap olahraga.

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Cakupan sarana dan prasarana olahraga yang belum merata.
2. Masih kurangnya kolaborasi dan sinergisitas para pemangku kepentingan bidang keolahragaan.

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

1. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga publik
2. Pembibitan atlet yang tersistem.
3. Penyelenggaraan kompetisi reguler dan berjenjang.
4. Koordinasi efektif antar pemangku kepentingan dalam pembinaan dan pengembagan olahraga.

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama Persentase pembinaan cabang olahraga, dilaksanakan melalui Program/Kegiatan/Sub kegiatan :

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
    a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
        - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota.
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota.

c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
   - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota.
   - Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota.

d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
   - Sub Kegiatan Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga terkait

Dari sisi pembiayaan disediakan anggaran sebesar Rp 6.632.182.000,- dan terealisasi Rp 6.610.915.000,- dengan capaian 99,68%.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa peralatan kantor, kendaraan operasional, dan sarana lain memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah.

Selanjutnya untuk indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 23,67 % dari target sebesar 5,18 % terealisasi sebesar 456,95 %.

Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 9,33 %, dimana realisasi tahun 2021 adalah sebesar 14,34 %.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi mengalami progres sebesar 329,67 %.

Sedangkan jika dibandingkan dengan Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi secara nasional maka Kabupaten Boyolali lebih baik yaitu sebesar 15,38 % dalam hal ini realisasi nasional sebesar 8,29%.

Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi adalah sebagai berikut:

1. Potensi Kepemudaan yang sangat besar untuk dikembangkan.

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan
2. Masih rendahnya kapasitas dan kemandirian pemuda
3. Cakupan fasilitas dan sarana prasarana kepemudaan yang belum merata.

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

1. Optimalisasi pembinaan organisasi kepemudaan.
2. Pengembangan organisasi kepemudaan secara tematik dan inovatif.
3. Pembinaan organisasi pemuda belum mencakup seluruh wilayah hingga desa.
4. Pengembangan pemuda belum diarahkan secara tematik dan peningkatan keterampilan, misalnya pada isu-isu tertentu yang sifatnya inovatif.
5. Diversifikasi peran organisasi kepemudaan belum optimal.

Sementara dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi, dilaksanakan melalui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan :

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
   a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor

Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera.

b. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota.

2) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

- Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah.

dari sisi pembiayaan disediakan anggaran sebesar Rp 1.082.495.000,- dan terealisasi Rp 1.067.879.950,- dengan capaian 98,65%.

Sementara untuk Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3

(Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Boyolali)

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s / d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s /d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2	19	01				*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100	100	100	100	100%	100	100	100
2	19	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100

2	19	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100
2	19	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100
2	19	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100
2	19	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	25 Dokumen	25	25	25	100%	25 Dokumen	25 Dokumen	100
2	19	01	2	04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	12	12	12	100%	12 Bulan	12 Bulan	100
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2	19	02				*PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN*	Persentase organisasi pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	85%	75	0	0	0	80	80	100

2	19	02	2	01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dalam bidang wirausaha	21 Organisasi	0	0	0	0	20	20	100
2	19	02	2	02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan organisasi kepemudaan	1 Kegiatan	1	0	0	0	1	1	100
2	19	03				*PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN*	Cakupan fasilitas olahraga dalam kondisi baik	73,10%	0	72,62	72,62	100%	72,86	73,10	100
							Cakupan pembinaan atlet muda	9,67%	0	0	0	0	9,3	9,3	100
							Cakupan pelatih yang bersertifikasi	63,33%		0	0	0	60	60	100
2	19	03	2	01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasara olahraga yang dikembangkan	1 Buah	1	1	1	100%	1	1	100
2	19	03	2	02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga	2 Kegiatan	2	0	0	0	2	2	100
2	19	03	2	03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah event olahraga yang diikuti	2 Kegiatan		2	1	50%	2	2	100
2	19	03	2	04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pelatih yang lolos sertifikasi	100%	100	100	100	100%	100	100	100
2	19	04				*PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN*	Persentase kelompok pramuka aktif	100%	100	100	100	100%	100	100	100
2	19	04	2	01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	100%	100	100	100	100%	100	100	100
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									

3	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
3	26	02				*PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA*	Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	8,89%	0	0	0	0	6,67	6,67	100
							Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	11,52%	2	2	2	100%	6,76	6,76	100
							Persentase peningkatan destinasi wisata berkembang di wilayah Boyolali utara	50,00%	0	0	0	0	42	42	100
3	26	02	2	01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas sarana prasarana pariwisata yang layak	43 Obyek wisata	43	43	43	100%	43	43	100
							Jumlah obyek wisata yang dikelola	10 obyek wisata	10	10	10	100%	10	10	100
3	26	02	2	03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan pengembangan obyek wisata yang ditindaklanjuti	100%	100	100	100	100%	100	100	100
3	26	02	2	04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan Tanda Usaha Pariwisata per Tahun	55 Dokumen	45	0	0	0	50	50	100
3	26	03				*PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA*	Persentase promosi potensi pariwisata yang ditindaklanjuti dengan kerjasama investasi	100%	0	0	0	0	100	100	100

							Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin	11,11%	0	0	0		11,11	11,11	100
3	26	03	2	01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah media promosi yang di gunakan	4 Media	4	4	4	100%	4	4	100
							Jumlah kerjasama antar daerah dan pelaku pariwisata	15 Kerjasama	15	15	15	100%	15	15	100
3	26	05				*PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF*	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif dan ekonomi kepariwisataan	20%	0	0	0	0	13,33	13,33	100
3	26	05	2	01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih	50%	0	0	0	0	50	50	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali untuk masyarakat secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan program/kegiatannya. Pemerintah Kabupaten Boyolali berupaya untuk melakukan bidang urusan Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisataan di Kabupaten Boyolali melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali mempunyai 3 sasaran perangkat daerah yaitu Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian, Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan dan Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah, dengan Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

(Tabel T-C.30 Pencapaian Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali)

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1			Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	0,5	1,25	2	2,75	3,73	2	2	2,75	
2			Persentase pembinaan cabang olahraga	80	85	90	95	92,16	90	90	95	
3			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	5,18	5,68	6,18	6,68	23,67	6,18	6,18	6,68	
4			Nilai SAKIP	84,05	84,25	84,65	84,75	83,00	84,65	84,65	84,75	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali

Dalam pelaksanaan bidang urusan yang dilaksanakan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali memiliki potensi yang cukup besar dan beragam. Namun, permasalahan pembangunan yang meliputi bidang urusan Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisataan juga sangat kompleks dan berkaitan. Berikut Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali yaitu :

2.3.1 Ancaman :

a. Lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata dan belum sinerginya kemitraan dan kerjasama antar para pemangku kepentingan untuk mewujudkan aksesibitilitas dan amenitas bidang pariwisata. Hal tersebut mengakibatkan destinasi wisata belum mampu bersaing pada segi sumber daya manusia, kurang optimalnya pemasaran dan diversifikasi usaha pariwisata serta rendahnya pemanfaatan teknologi. Hal lain juga dipengaruhi keterbatasan kepemilikan lahan yang dimiliki untuk pengembangan destinasi wisata.
b. Keterbatasan sumber daya pemuda dan atlet olahraga yang mampu berkiprah pada bidang/sektornya yang dikarenakan rendahnya minat untuk berpartisipasi serta sarana dan prasarana pendukung yang masih terbatas.

2.3.2 Peluang :

a. Regulasi terkait bidang urusan yang menjadi dasar dalam melaksanakan urusan.
b. Besarnya potensi yang bisa dikembangkan.
c. Berada di wilayah strategis yang sangat terbuka untuk melakukan kerjasama antar daerah dan kawasan dengan optimal.
d. Dukungan tehnologi informasi untuk inovasi.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali berdasarkan RKPD.

RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026. Rencana program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Boyolali, yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dijelaskan dalam tabel sebagaimana terlampir :

Tabel 2.5

(Tabel T-C.31. Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Boyolali)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
	Program					**Program**					
A.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	8,89	10.264.018.000	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	8,89	10.264.018.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitas sarana prasarana pariwisata yang layak	43	10.264.018.000	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitas sarana prasarana pariwisata yang layak	43	10.264.018.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah obyek wisata yang dikelola	43	5.077.686.000	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah obyek wisata yang dikelola	43	5.077.686.000	
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang terbangun	2	5.186.332.000	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang terbangun	2	5.186.332.000	
	Program					**Program**					
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	11,52		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	11,52		
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah obyek wisata yang dikelola	10		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah obyek wisata yang dikelola	10		
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					

	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah obyek wisata yang dikelola	10		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah obyek wisata yang dikelola	10		
	Program					**Program**					
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase peningkatan destinasi wisata berkembang di wilayah Boyolali utara	50,00	5.904.709.000	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase peningkatan destinasi wisata berkembang di wilayah Boyolali utara	50,00	5.904.709.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Persentase dokumen perencanaan pengembangan obyek wisata yang ditindaklanjuti	100	3.057.554.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Persentase dokumen perencanaan pengembangan obyek wisata yang ditindaklanjuti	100	3.057.554.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah peningkatan kwalitas pengembangan daya tarik dan menejemen	2	200.000.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah peningkatan kwalitas pengembangan daya tarik dan menejemen	2	200.000.000	
	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah pemeliharaan destinasi Pariwisata	2	1.128.777.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah pemeliharaan destinasi Pariwisata	2	1.128.777.000	
			Jumlah pemeliharaan destinasi Pariwisata	2	1.728.777.000			Jumlah pemeliharaan destinasi Pariwisata	2	1.728.777.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penerbitan Tanda Usaha Pariwisata per Tahun	55	2.847.155.000	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penerbitan Tanda Usaha Pariwisata per Tahun	55	2.847.155.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					

	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata		Jumlah sosialisasi standarisasi usaha pariwisata	1	1.328.777.000	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata		Jumlah sosialisasi standarisasi usaha pariwisata	1	1.328.777.000	
			Jumlah sosialisasi standarisasi usaha pariwisata	1	1.518.378.000			Jumlah sosialisasi standarisasi usaha pariwisata	1	1.518.378.000	
	Program					**Program**					
B.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase promosi potensi pariwisata yang ditindaklanjuti dengan kerjasama investasi	100,00	380.853.000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase promosi potensi pariwisata yang ditindaklanjuti dengan kerjasama investasi	100,00	380.853.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah media promosi yang di gunakan	4	380.853.000	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah media promosi yang di gunakan	4	380.853.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah kegiatan promosi	7	380.853.000	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah kegiatan promosi	7	380.853.000	
	Program					**Program**					
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin	11,11	207.980.000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin	11,11	207.980.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					

	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah kerjasama antar daerah dan pelaku pariwisata	15	207.980.000	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah kerjasama antar daerah dan pelaku pariwisata	15	207.980.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Cakupan pelaksanaan pembinaan pelaku pariwisata Kabupaten Boyolali	15	207.980.000	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Cakupan pelaksanaan pembinaan pelaku pariwisata Kabupaten Boyolali	15	207.980.000	
	Program					**Program**					
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif dan ekonomi kepariwisataan	20	361.706.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif dan ekonomi kepariwisataan	20	361.706.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih	50	361.706.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih	50	361.706.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	6	271.206.000	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	6	271.206.000	

	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah kelompok masyarakat aktif dalam pengembangan kepariwisataan	46	90.500.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah kelompok masyarakat aktif dalam pengembangan kepariwisataan	46	90.500.000	
D.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Cakupan fasilitas olahraga dalam kondisi baik	72,86	1.931.580.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Cakupan fasilitas olahraga dalam kondisi baik	72,86	1.931.580.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sarana prasara olahraga yang dikembangkan	1	1.931.580.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sarana prasara olahraga yang dikembangkan	1	1.931.580.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terbangun	1	1.931.580.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terbangun	1	1.931.580.000	
	Program					**Program**					
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Cakupan pelatih yang bersertifikasi	63,33	50.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Cakupan pelatih yang bersertifikasi	63,33	50.000.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Persentase pelatih yang lolos sertifikasi	100	50.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Persentase pelatih yang lolos sertifikasi	100	50.000.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan		Jumlah pelatih yang diikutkan pelatihan	3	50.000.000	Peningkatan Kerjasama Organisasi		Jumlah pelatih yang diikutkan pelatihan	3	50.000.000	

	Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait					Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait					
	Program					**Program**					
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Cakupan pembinaan atlet muda	9,67	1.444.693.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Cakupan pembinaan atlet muda	9,67	1.444.693.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penyelenggaraan event olahraga	2	992.560.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penyelenggaraan event olahraga	2	992.560.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah penyelengaran event olahraga non prestasi	1	496.280.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah penyelengaran event olahraga non prestasi	1	496.280.000	
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi	1	496.280.000	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi	1	496.280.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah event olahraga yang diikuti	2	452.133.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah event olahraga yang diikuti	2	452.133.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		Jumlah pengiriman event olahraga	2	339.100.000	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		Jumlah pengiriman event olahraga	2	339.100.000	
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota		jumlah pemberian penghargaan atlet dan pelatih berprestasi	10	113.033.000	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota		jumlah pemberian penghargaan atlet dan pelatih berprestasi	10	113.033.000	
	Program					**Program**					

E.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase organisasi pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	85	655.215.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase organisasi pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	85	655.215.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dalam bidang wirausaha	21	436.810.000	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dalam bidang wirausaha	21	436.810.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		Jumlah peserta PKKP	6	218.405.000	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		Jumlah peserta PKKP	6	218.405.000	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Pelaksanaan kegiatan paskibra	1	218.405.000	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Pelaksanaan kegiatan paskibra	1	218.405.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelatihan organisasi kepemudaan	1	218.405.000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelatihan organisasi kepemudaan	1	218.405.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					

	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Jumlah kelas pelatihan kepemudaan	1	218.405.000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Jumlah kelas pelatihan kepemudaan	1	218.405.000	
	Program					**Program**					
F.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase kelompok pramuka aktif	100	271.280.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase kelompok pramuka aktif	100	271.280.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	100	271.280.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	100	271.280.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah jenis Pelatihan SDM kepramukaan	3	271.280.000	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah jenis Pelatihan SDM kepramukaan	3	271.280.000	
G.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100	5.809.168.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100	5.809.168.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	5.194.130.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	5.194.130.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	4.983.530.000	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	4.983.530.000	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	210.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	210.600.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	-	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	2	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	2	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	293.650.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	293.650.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	25.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	25.000.000	
	Penyediaan peralatan rumah tangga		Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	45.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga		Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	45.000.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor		Bahan Logistik Kantor	12 bulan	40.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor		Bahan Logistik Kantor	12 bulan	40.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	30.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	30.000.000	

	Penyediaan bahan / Material		Bahan/Material	12 bulan	25.000.000	Penyediaan bahan / Material		Bahan/Material	12 bulan	25.000.000	
	Fasilitasi kunjungan tamu		Kunjungan Tamu	12 bulan	28.650.000	Fasilitasi kunjungan tamu		Kunjungan Tamu	12 bulan	28.650.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	100.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	100.000.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	152.743.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	152.743.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jasa Surat Menyurat	12 bulan	6.160.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jasa Surat Menyurat	12 bulan	6.160.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	146.133.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	146.133.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	450.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	450.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	168.645.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	168.645.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	48.645.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	48.645.000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	20.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	100.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	100.000.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	25	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	25	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	1	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	1	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	1	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	1	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15	-	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	12		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	12		
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah target retribusi daerah	522.628.000	-	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah target retribusi daerah	522.628.000	-	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12	-	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12	-	
					27.281.202.000					**27.281.202.000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kesatu pasal 7 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali disusun dalam pembahasan Forum Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum ini membahas rancangan Renja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali yang bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali yang akan dibahas dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan untuk menajamkan indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan rapat forum konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan yang dapat digambarkan dalam tabel di bawah :

Tabel 2.6

(Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Boyolali)

No	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Boyolali	Jumlah kelas pelatihan kepemudaan	2 kegiatan	Pendampingan organisasi kepemudaan untuk peningkatan kualitas
2	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Boyolali	Jumlah pemberian penghargaan atlet dan pelatih berprestasi	1 kegiatan	Peningkatan anggaran penghargaan bagi atlet dan pelatihan berprestasi
3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Boyolali	Jumlah obyek wisata yang dikelola	1 tahun	Pengelolaan dan pengembangan obyek wisata yang ada di Boyolali
4	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Boyolali	Jumlah kelompok masyarakat aktif dalam pengembangan kepariwisataan	3 kegiatan	Pendampingan Desa Wisata secara berkala utuk meningkatkan kualitas Desa Wisata
5	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Boyolali	Cakupan pelaksanaan pembinaan pelaku pariwisata Kabupaten Boyolali	2 kegiatan	Menjalin kemitraan dengan pelaku usaha penginapan (hotel, homestay, losmen dan sejenisnya)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah pembangunan nasional 5 tahun kedepan dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Pilar-pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Dalam penentuan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali akan menyelaraskan dengan kebijakan yang dilaksanakan Kementerian yang berkaitan yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Berkaitan dengan pembangunan pemuda dilaksanakan sesuai dengan arah Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda pada berbagai bidang pembangunan, sedangkan pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya dan prestasi olahraga. Arah kebijakan tersebut sesuai dengan prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sesuai yaitu Pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan;

dan Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.

Sementara Pariwisata berkaitan dengan pilar Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat dan Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh. Kemenparekraf diharapkan dapat berkontribusi dalam agenda pertama: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Terhadap tujuan dan sasaran atas Rencana Kerja pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata disusun dengan menganalisa terhadap isu strategis yang dihadapi. Tahapan ini merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kerja untuk melengkapi tahapan yang telah direncanakan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah pada masa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis apabila tidak diantisipasi, dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Pada sisi sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang dalam meningkatkan pelayanan publik.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali yang mengemban urusan wajib dan pilihan, mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisataan. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali adalah berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Isu-isu Strategis terkait Tupoksi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Pengembangan kapasitas pemuda belum optimal	Pembinaan organisasi pemuda belum mencakup seluruh desa
		Pengembangan pemuda belum diarahkan secara tematik dan peningkatan keterampilan, misalnya pada isu-isu tertentu yang sifatnya inovatif
		Diversifikasi peran organisasi kepemudaan belum optimal
Perlu ditingkatkannya prestasi olahraga	Sarana dan prasarana keolahragaan belum optimal	Persebaran fasilitas olahraga tidak merata
		Sarana keolahragaan masih terbatas pada olahraga tertentu.
	Pengembangan SDM keolahragaan belum optimal	Pembibitan atlet masih belum terstruktur
		Tidak adanya kompetisi reguler dan berjenjang sebagai sarana pembibitan
Belum optimalnya potensi kepariwisataan Boyolali sebagai bagian dari dari KSPN Candi Borobudur	Sulitnya akses destinasi wisata bagi wisatawan nasional	Destinasi wisata yang belum tersebar
		Belum optimalnya sarana dan prasarana pariwisata
		Paket wisata belum terdiversifikasi
		Belum banyaknya akomodasi pariwisata yang sesuai kebutuhan wisatawan
	Belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat	Belum optimalnya kompetensi SDM masyarakat desa
		Keterbatasan kepemilikan lahan untuk pengembangan destinasi wisata baru
		Belum optimalnya integrasi desa wisata dengan pembangunan desa

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 2024 terdiri dari program dan kegiatan yang mengacu RPJMD dan RKPD. Adapun program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali Tahun 2024

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
A.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
1.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
a.	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)
2.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
a.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)
b.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara
c.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3.	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
a.	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi
B.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
1.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
a.	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
2.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

a.	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
1.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
a.	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan Kompetensinya
b.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
D.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
a.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan
2.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
a.	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota
3	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
a.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
b.	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
4.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
a.	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan
b.	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan
E.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
1.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	

a.	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan
2.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
a.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan
F.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
1.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
a.	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan
G.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
a.	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
d.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
e.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
f.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
a.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
b.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
c.	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
e.	Penyediaan bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
f.	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

g.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
h.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
c.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
5.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
e.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
f.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	

a.	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah
b.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta untuk merealisasikan program Pemerintah Kabupaten Boyolali seperti yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 menetapkan visi :

"BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI"
Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas.

Sebagai upaya untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Boyolali, yaitu :

Misi 1:
Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan

Misi 2:
Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya

Misi 3:
Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional

Misi 4:
Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

Misi 5:
Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali tersebut di atas adalah untuk mendukung Misi ke-1 yaitu Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan dan Misi ke-2 yaitu Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.

Capaian yang ingin diwujudkan Misi 1 yaitu Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan dengan tujuan :

a. Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi
b. Menurunnya tingkat kemiskinan
c. Semakin berkurangnya ketimpangan kesejahteraan masyarakat
d. Menurunnya kesenjangan antar wilayah

Untuk pencapaian tujuan tersebut Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali akan berkontribusi untuk mewujudkannya melalui sektor pariwisata.

Selanjutnya berkaitan dengan Misi 2 : Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya adalah akan dilakukan dengan tujuan :

a. Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing
b. Meningkatnya keberdayaan sosial

Untuk pencapaian tersebut berkaitan dengan urusan Kepemudaan dan Keolahragaan yang akan dijadikan modal dalam partisipasi untuk pembangunan.

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali tahun 2024 direncanakan dengan rincian ada 7 program, 18 kegiatan dan 45 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1

(Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Disporapar Kabupaten Boyolali)

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KAB. BOYOLALI
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA						**18.395.577.000,00**							**27.262.797.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.134.363.000,00**							**4.134.363.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**4.134.363.000,00**							**4.134.363.000,00**	
1,	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Persentase organisasi pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda***	**100,00 %**			**90,00 %**	**436.810.000,00**						**100,00 %**	**436.810.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dalam bidang wirausaha*	22 Organisasi			22 Organisasi	218.405.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	22 Organisasi	218.405.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda														
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	240 Orang			250 Orang	218.405.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	60 Orang	218.405.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelatihan organisasi kepemudaan*	5 Pelatihan			1 Pelatihan	218.405.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	1 Pelatihan	218.405.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	8 Dokumen			3 Dokumen	218.405.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	2 Dokumen	218.405.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2,	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Cakupan fasilitas olahraga dalam kondisi baik Cakupan pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda***	**73,33 %** **10,81 %** **73,57 %**			**73,10 %** **66,67 %** **10,05 %**	**3.426.273.000,00**						**73,33 %** **10,81 %** **73,57 %**	**3.426.273.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana prasara olahraga yang dikembangkan*	5 Unit			1 Unit	1.931.580.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	1 Unit	1.931.580.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	17 Unit			17 Unit	1.931.580.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyar akat	17 Unit	1.931.580.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelenggaraan event olahraga*	10 Kegiatan			2 Kegiatan	1.081.660.000,00			-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyar akat	2 Kegiatan	992.560.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	16 Dokumen			4 Dokumen	585.380.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyar akat	4 Dokumen	496.280.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	496.280.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyar akat	1 Dokumen	496.280.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	10 Kegiatan			-	363.033.000,00			-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyar akat	2 Kegiatan	452.133.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	400 Orang			100 Orang	250.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyar akat	100 Orang	339.100.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota														
			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	40 Orang			10 Orang	113.033.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyar akat	10 Orang	113.033.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	500 %			-	50.000.000,00			-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyar akat	100 %	50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

	2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organizasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	8 Dokumen			2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyar akat	2 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3,	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	***Persentase kelompok pramuka aktif***	**100,00 %**			**100,00 %**	**271.280.000,00**						**100,00 %**	**271.280.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Persentase organisasi kepramukaan yang dibina*	100 %			100 %	271.280.000,00			-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyar akat	100 %	271.280.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	3 Unit			3 Unit	271.280.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	3 Unit	271.280.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**14.261.214.000,00**							**23.128.434.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**14.261.214.000,00**							**23.128.434.000,00**	
1,	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	**100 %**			-	**6.476.502.000,00**						**100 %**	**6.009.168.000,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	125 Dokume n			-	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	25 Dokumen	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			2 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Dokumen	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63 Laporan			16 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	16 Laporan	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan			4 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	4 Laporan	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah*	100 %			100 %	5.336.194.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berinte gritas dengan ASN yang semakin profesional.	-	100 %	5.194.130.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan			45/12 Orang/bulan	5.050.194.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berinte gritas dengan ASN yang semakin profesional.	-	45 Orang/bulan	4.983.530.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen			12 Dokumen	286.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berinte gritas dengan ASN yang semakin profesional.	-	12 Dokumen	210.600.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatauzahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen			12 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Dokumen	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48 Dokumen			12 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Dokumen	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	72 Laporan			18 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	18 Laporan	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	60 Laporan			-	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Laporan	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribuzi Daerah	8 Dokumen			2 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Dokumen	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

	3.26.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah													
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	48 Dokumen			12 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Dokumen	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrazi Perkantoran Perangkat Daerah*	100 %			100 %	405.920.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berinte gritas dengan ASN yang semakin profesional.	Pegawai dan Karyawan	100 %	393.650.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalazi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket			2 Paket	25.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berinte gritas dengan ASN yang semakin profesional.	Pegawai dan Karyawan	4 Paket	25.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket			2 Paket	45.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berinte gritas dengan ASN yang semakin profesional.	Pegawai dan Karyawan	4 Paket	45.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket			2 Paket	40.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berinte gritas dengan ASN yang semakin profesional.	Pegawai dan Karyawan	12 Paket	40.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket			2 Paket	30.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berinte gritas dengan ASN yang semakin profesional.	Pegawai dan Karyawan	4 Paket	30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	16 Paket			2 Paket	25.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berinte gritas dengan ASN yang semakin profesional.	Pegawai dan Karyawan	4 Paket	25.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16 Laporan			2 Laporan	28.650.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berinte gritas dengan ASN yang semakin profesional.	Pegawai dan Karyawan	4 Laporan	28.650.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan			2 Laporan	112.270.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berinte gritas dengan ASN yang semakin profesional.	Pegawai dan Karyawan	4 Laporan	100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	52 Dokumen			12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berinte gritas dengan ASN yang semakin profesional.	Pegawai dan Karyawan	13 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	313.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	100 %	100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit			5 Unit	313.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	5 Unit	100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah*	100 %			100 %	252.743.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berinte gritas dengan ASN yang semakin profesional.	Pegawai dan Karyawan	100 %	152.743.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan			12 Laporan	6.160.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berinte gritas dengan ASN yang semakin profesional.	Pegawai dan Karyawan	12 Laporan	6.160.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	246.133.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berinte gritas dengan ASN yang semakin profesional.	Pegawai dan Karyawan	12 Laporan	146.133.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan			12 Laporan	450.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berinte gritas dengan ASN yang semakin profesional.	Pegawai dan Karyawan	4 Laporan	450.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Peningkat Daerah*	100 %			100 %	168.645.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berinte gritas dengan ASN yang semakin profesional.	Pegawai dan Karyawan	100 %	168.645.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit			30 Unit	48.645.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berinte gritas dengan ASN yang semakin profesional.	Pegawai dan Karyawan	30 Unit	48.645.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit			15 Unit	20.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berinte gritas dengan ASN yang semakin profesional.	Pegawai dan Karyawan	80 Unit	20.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berinte gritas dengan ASN yang semakin profesional.	Pegawai dan Karyawan	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2,	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***Persentase peningkatan destinasi wisata berkembang di wilayah Boyolali utara Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan***	**15,56 % 25,80 % 75 %**			**58 % 11,11 % 16,28 %**	**6.834.173.000,00**						**15,56 % 25,80 % 75 %**	**16.168.727.000,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*0 Jumlah fasilitas sarana prasarana pariwisata yang layak Jumlah obyek wisata yang dikelola*	43 Lokasi 10 Lokasi			0 lokasi 43 Obyek Wisata 10 Oyek Wisata	2.151.619.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan daya saing pariwisata melalui strategi peningkatan daya tarik, promosi, kerjasama pariwisata, serta penguatan sektor ekonomi kreatif.	Masyarakat	43 Lokasi 10 Lokasi	10.264.018.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	12 Lokasi			4 Lokasi	2.151.619.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan daya saing pariwisata melahi strategi peningkatan daya tarik, promosi, kerjasama pariwisata, serta penguatan sektor ekonomi kreatif.	Masyarakat	4 Lokasi	10.264.018.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase dokumen perencanaan pengembangan obyek wisata yang ditindaklanjuti*	100 %			``	3.057.554.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan daya saing pariwisata melahi strategi peningkatan daya tarik, promosi, kerjasama pariwisata, serta penguatan sektor ekonomi kreatif.	Masyarakat	100 %	3.057.554.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	16 Lokasi			4 Lokasi	200.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan daya saing pariwisata melahi strategi peningkatan daya tarik, promosi, kerjasama pariwisata, serta penguatan sektor ekonomi kreatif.	Masyarakat	4 Lokasi	200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	23 Unit			23 Unit	2.657.554.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan daya saing pariwisata melahi strategi peningkatan daya tarik, promosi, kerjasama pariwisata, serta penguatan sektor ekonomi kreatif.	Masyarakat	23 Unit	2.657.554.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0005	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan			2 Laporan	200.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan daya saing pariwisata melahi strategi peningkatan daya tarik, promosi, kerjasama pariwisata, serta penguatan sektor ekonomi kreatif.	Masyarakat	2 Laporan	200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	*Jimlah penerbitan Tanda Uzaha Pariwizata per Tahun*	270 Unit Usaha			60 Dokumen	1.625.000.000.00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan daya saing pariwisata melalui strategi peningkatan daya tarik, promosi, kerjasama pariwisata, serta penguatan sektor ekonomi kreatif.	Masyarakat	55 Unit Usaha	2.847.155.000.00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
			Jimlah uzaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperazi	120 Usaha			40 Usaha	1.625.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan daya saing pariwisata melalui strategi peningkatan daya tarik, promosi, kerjasama pariwisata, serta penguatan sektor ekonomi kreatif.	Masyarakat	40 Usaha	2.847.155.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3,	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin Persentase promosi potensi pariwisata yang ditindaklanjuti dengan kerjasama investasi***	**100 % 15,56 %**			**13,33 % 100 %**	**679.333.000,00**						**100 % 15,56 %**	**679.333.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jimlah kerjazama antar daerah dan pelaku pariwizata Jimlah media promosi yang di gunakan*	4 Media 75 Dokumen			15 Kerjasama 4 Media	679333.000.00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan daya saing pariwisata melalui strategi peningkatan daya tarik, promosi, kerjasama pariwisata, serta penguatan sektor ekonomi kreatif.	Masyarakat	4 Media 15 Dokumen	679.333.000.00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														
			Jimlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwizata Dalam dan Luar Negeri	40 Dokumen			40 Dokumen	[illegible]	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan daya saing pariwisata melalui strategi peningkatan daya tarik, promosi, kerjasama pariwisata, serta penguatan sektor ekonomi kreatif.	Masyarakat	10 Dokumen	90500 000.00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
			Jimlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwizata Dalam dan Luar Negeri	40 Dokumen			10 Dokumen	207980.000.00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan daya saing pariwisata melalui strategi peningkatan daya tarik, promosi, kerjasama pariwisata, serta penguatan sektor ekonomi kreatif.	Masyarakat	10 Dokumen	207.980.000.00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	28 Promosi			7 Promosi	380.853.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan daya saing pariwisata melalui strategi peningkatan daya tarik, promosi, kerjasama pariwisata, serta penguatan sektor ekonomi kreatif.	Masyarakat	7 Promosi	380.853.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
4,	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	***Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif dan ekonomi kepariwisataan***	**40,00 %**			**26,67 %**	**271.206.000,00**						**40,00 %**	**271.206.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih*	70 %			70 %	271206000.00			-	1. Peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan daya saing pariwisata melalui strategi peningkatan daya tarik, promosi, kerjasama pariwisata, serta penguatan sektor ekonomi kreatif.	Masyarakat	70 %	271206000.00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 Laporan			60 Laporan	271.206.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan daya saing pariwisata melalui strategi peningkatan daya tarik, promosi, kerjasama pariwisata, serta penguatan sektor ekonomi kreatif.	Masyarakat	2 Laporan	271.206.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	JUMLAH							**18.187.597.000,00**							**27.054.817.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali 2024 dibuat untuk menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan penyelenggaraan pemerintah dengan jangka waktu satu tahunan. Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasi berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Pedoman yang tertuang dalam Rencana Kerja ini tidak bersifat kaku dan masih dimungkinkan adanya perubahan mengingat keterbatasan dalam perencanaan dan adanya perubahan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran organisasi serta arah kebijakan.

Selanjutnya perlu dipedomani pula beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali perlu secara konsisten mengupayakan sasaran dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Boyolali.
2. Renja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabuapten Boyolali disusun mendasarkan asumsi makro dari seluruh bidang Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, untuk itu diperlukan adanya dukungan dari masing-masing pemangku kepentingan dalam mengupayakan perwujudan Rencana Kerja.

Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali. Disamping itu dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan

rencana kerja di masa mendatang pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

S. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA) DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN 3

1.1. Latar Belakang..... 3

1.2. Landasan Hukum..... 5

1.3. Maksud dan Tujuan..... 7

1.4. Sistematika Penulisan..... 8

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD..... 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 16

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 19

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal SKPD..... 20

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 29

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 30

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 30

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Program dan Kegiatan..... 30

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 32

4.1. Program dan Kegiatan..... 32

BAB V. PENUTUP..... 71

.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota di wajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan **J**angka Panjang (RP**J**P), Rencana Pembangunan **J**angka Menengah (RP**J**M), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD , kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman

kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022.

Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2025, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016- 2025.

Adapun visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali seperti yang tertuang dalam Renstra (Perubahan) adalah "*Terwujudnya tertib administrasi, ketersediaan informasi dan dokumentasi serta layanan prima di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi bagi masyarakat*"

Maksudnya, dengan terwujudnya tertib administrasi dan tersedianya informasi yang akurat serta pelayanan prima di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pengguna layanan lainnya dalam pemenuhan kebutuhan di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi.

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali tahun 2016-2025 sebagai berikut:

1) Meningkatkan ketrampilan dan keahlian sumberdaya manusia di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi
2) Menyediakan kelengkapan sarana perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi
3) Memberikan kemudahan dalam layanan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi.

Maksud dari penyusunan misi tersebut di atas adalah :

- Terselenggaranya manajemen kearsipan yang baik dan benar menurut kaidah yang berlaku sudah menjadi kebutuhan di setiap satuan kerja karena dengan terciptanya tertib administrasi merupakan cerminan penyelenggaraan pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat. Karena itu perlu diciptakan tertib administrasi tata kearsipan yang terawat.
- Keberhasilan penyelenggaraan suatu kegiatan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik diperlukan suatu pengertian yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga diperlukan sarana layanan informasi agar masyarakat memahami kebijakan-kebijakan pemerintah dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Karena itu perlu mendayagunakan hasil dokumentasi untuk kepentingan informasi yang aktual dan faktual.
- Dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan adanya dukungan sumberdaya manusia di semua strata masyarakat yang semakin

meningkat dan berwawasan luas. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang mendukung peningkatan daya saing daerah, menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan dan pengelolaan perpustakaan dan menumbuhkan budaya gemar membaca.

- Meningkatkan kualitas SDM di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi sehingga trampil dan menguasai tata cara pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi menurut ketentuan yang berlaku.
- Menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana tata perpustakaan, tata kearsipan, tata dokumentasi yang berupa sarana perpustakaan, sarana kearsipan serta sarana dokumentasi menurut aturan yang berlaku.

Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Boyolali khususnya dan Nasional pada umumnya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah :

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
e. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6323);
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 136);
m. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

q. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 111);
s. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 112);
t. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
u. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten boyolali tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
v. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2021, tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali;
w. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut:

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali Tahun 2024.
b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RKPD.
2. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. Sistematika

Penulisan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan CapaianRenstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan PerpustakaanKabupaten Boyolali
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipandan Perpustakaan Kabupaten Boyolali
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD,
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Program dan Kegiatan
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Progran dan kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali selama tahun 2022 dan perkiraan pencapaian targettahun 2023.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan *{input),* keluaran *{output),* hasil *{outcome).* Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untukmasing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Pencapaian Target Tahun 2023.

Pada Tahun 2022 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali menerima anggaran sebesar Rp. 8.397.625.000,- untuk belanja operasi (Rp 5.333.850,00) dan belanja Modal (Rp 3.053.775.000,00). Dari anggaran Rp. 8.397.625.000,- dialokasikan untuk pelaksanaan 4 (empat) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 8.118.864.940,- atau mencapai 96,80%, dengan tingkat capaian 6 (enam) indikator kinerja program/sasaran (outcome kegiatan) ada 5 (lima) indikator kinerja yang dapat mencapai target yang ditetapkan, dan 1 (satu) indikator yang belum mencapai target. Sedangkan dari 16 (enam belas) indikator output kegiatan ada 1 (satu) yang tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Uraian selengkapnya atas capaian tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya, Terpenuhinya atau terlampauinya target kinerja berikut implikasinya terhadap target Renstra SKPD, adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja Pada program penunjang Urusan

Pemerintah Daerah pada tahun 2022 sebesar 96,93% sesuai target yang telah ditetapkan. Diharapkan realisasi capaian kinerja tahun 2023 untuk program penunjang Urusan Pemerintah Daerah lebih meningkat, yaitu sebesar 99,00% indikator tersebut merupakan pelaksanaan dari program/kegiatan yang bersifat rutin dan mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD secara keseluruhan. Jika melihat realisasi sampai dengan saat ini, maka implikasi terhadap target Renstra 2022 tercapai sebesar 100 %.

2. Capaian indikator Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk dapat memenuhi target, hal ini ditunjang dengan teranggarkannya pengadaan buku dari dana DAK dan pendampingan dari APBD, selain itu jumlah buku yang ada di seluruh perpustakaan Kabupaten Boyolali mampu meningkatkan nilai Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan.
3. Capaian indikator Presentase perpustakaan sesuai standart nasional dapat memenuhi terget yang ditetapkan yaitu dengan menghasilkan 52 perpustakaan ber NSP, sejumlah 11perpustkaan sekolah terakreditasi melalui akreditasi Reguler dengan nilai A dan B, maupun terakreditasi melalui akreditasi relaksasi dengan nilai C sejumlah 41 perpustkaan sekolah. Dari tahun 2020 sampai dengan 2022 sudah 72 perpustakaan sekolah yang terakreditasi dari 960 perpustakaan sekolah.
4. Capaian indikator SKM layanan perpustakaan dapat memenuhi target 86,00 terealisasi sebesar 86,02 dan dipersepsikan Baik oleh masyarakat penggunanya. Dari hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh yaitu berkisar diantara 76,61 – 88,30 dan nilai yang diperoleh yaitu pada 9 unsur pelayanan 86,02. Dengan dilaksanakannya SKM diharapkan akan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk menumbuhkan inovasi-inovasi sehingga dapat membantumempercepat dan mempermudah dalam pemberian
5. Indikator cakupan arsip yang terlindungi dan terselamatkan dilingkungan pemerintah Kabupaten Boyolali dapat terealisasi 100%, penyelamatan arsip meliputi pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun, evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana, autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media serta pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang.
6. Keberhasilan indikator Nilai Audit kearsipan di lingkungan Kabupaten Boyolali belum dapat mencapai 100% dari target

yang ditentukan. Ketidakberhasilan indikator ini dikarenakan Nilai audit kearsipan melibatkan penilaian external (LKD) dan internal (OPD), hasil pengawasan di OPD terdapat banyak kendala antara lain: kurangnya sarana prasarana kearsipan (record center, peralatan perlengkapan kearsiapan), tidak adanya SDM pengelola arsip (arsiparis) dan hanya pengelola arsip yang belum memiliki sertifikat pengelola kearsipan.

Pada dasarnya semua OPD telah menerapkan pengelolaan arsip dinamis inaktif baik itu secara sederhana maupun melalui aplikasi SIKD. Dengan aplikasi SIKD akan lebih memudahkan pengelolaan kearsipan didalam mengelola arsipnya dari awal penciptaan, pendistribusian, penyimpanan dan penyusutan disertai dengan system keamanan akses arsip. Sebagian besar pencipta arisp dalam melakukan penyimpanan arsip dinamis di simpan dalam almari arsip. Pengelolaan Arsip dinamis meliputi arsip vital, arsip aktif dan arsip inaktif.

C. **Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024**

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2023 dengan usulan sebesar Rp. 5.370.025.000,- terurai dalam 4 (empat) program dan 12 (dua belas) kegiatan, dan 42 (empat puluh dua)

Sub Kegiatan diestimasikan capaian kinerja dapat tercapai 100 %, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 maupun perkiraan capaian tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

- Keterbatasan SDM dalam jumlah dan dalam penguasaan teknologi informasi (computer/IT), serta masih kurangnya SDM yang kompeten di bidangnya, seperti perencana/Renlap, Pustakawan, Arsiparis sehingga mempengaruhi kualitas layanan di bidang perpustakaan, kearsipan
- Sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada tingkat pelaksana belum sepenuhnya memahami aturan-aturan baru tersebut sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- Pengelolaan kearsipan di satuan kerja belum dapat terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan, antara lain karena petugas pengelola kearsipan di Satuan Kerja masih sering dibebani tugas-

tugas lain dan sering dilakukan pergantian petugas sehingga petugas yang baru belum begitu memahami pengelolaan arsip secara baik dan benar. Selain itu kegiatan pembinaan petugas pengelola kearsipan sudah merupakan agenda rutin setiap tahun sehingga kadang-kadang muncul kebosanan dari pihak penyelenggara maupun peserta yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan kegiatan.

- Kurangnya sarana tata kearsipan di Satuan Kerja sehingga arsip belum seluruhnya dapat tertata secara baik dan benar, yang sebagian besar disebabkan oleh masih kurangnya kepedulian/ perhatian dari pejabat/pimpinan SKPD/UPT/Desa terhadap masalah-masalah kearsipan.
- Penetapan target indikator Rasio jumlah pengunjung perpustakaan dan Keberadaan koleksi buku dalam Renstra OPD terlalu tinggi, karena kurang memperhatikan realitas dan kondisi di lapangan. Jika target ini tetap dipertahankan tentunya butuh perjuangan yang cukup keras untuk mewujudkannya.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan, seperti jumlah dan keanekaragaman buku, layanan khusus anak, layanan khusus difabel, dan lain-lain serta sarana mobilitas untuk pembinaan/pengembangan Perpustakaan Desa dan Mobil Perpustakaan Keliling.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali tahun 2021 - 2026, maka pada tahun 2023 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia bagi Aparat di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, dengan arah kebijakan :
   - Diklat dan Bimbingan Teknis terkait dengan bidang perpustakaan dan kearsipan.
2. Meningkatkan Konsultasi dan Koordinasi pelaksanaan program/ kegiatan di bidang perpustakaan dan kearsipan secara terpadu, dengan arah kebijakan:
   - Meningkatkan Sinkronisasi, Konsultasi dan Koordinasi dengan instansi terkait secara periodik dalam mendukung percepatan pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran, baik yang bersumber APBD II, provinsi maupun pusat.
   - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama di internal OPD

untuk mengatasi masalah yang timbul dengan prinsip saling dukung, saling pengertian dan terbuka.

- Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara rutin sebagai alat kendali dan umpan balik dalam pencapaian target kinerja.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)* Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Lembar : .....

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				PERPUSTAKAAN									
				Program pembinaan Perpustakaan									
2	23	02	2.01	Kegiatan.pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah kab/kota	Jumlah pengembangan koleksi perpustakaan	982.343 exemplar	925.953 exemplar	953.731 exmplar	953.731 exmplar		982.343 exemplar	982.343 exemplar	100%
					Jumlah pembinaan perputakaan tingkat Kab/Kota	110 kali	100 kali	100 kali	100 kali		110 kali	110 kali	100%
2	23	02	2.02	Kegiatan pembudayaan gemar membaca Tingkat daerah Kab/kota	Jumlah pengunjung perpustakaan	60.000 orang	20.000 orang	50.000 orang	70.100 orang		60.000 orang	60.000 orang	100%
				KEARSIPAN									
2	24	02	2.01	Kegiatan pengelolaan Arsip dinamis daerah kab/kota	Jumlah arsip dinamis yang dikelola sesuai NSPK	77.600 berkas		77.400 berkas	77.400 berkas		77.600 berkas	77.600 berkas	100%
2	24	02	2.02	Kegiatan pengelolaan arsip statis daerah kab/kota	Jumlah arsip statis yang dikelola sesuai NSPK	3.000 berkas		2.300 berkas	2.300 berkas		3.000 berkas	3.000 berkas	100%
2	24	02	2.03	Pengelolaan simpul jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	650 berkas		500 berkas	500 berkas		650 berkas	650 berkas	100%
2	24	03	2.01	pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah Kab/kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) tahun	jumlah arsip daerah yang dimusnahkan yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	5.000 berkas		4.000 berkas	4.000 berkas		5.000 berkas	5.000 berkas	100%
2	24	03	2.02	perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kab/kota	persentase arsip yg di Evakuasi dan diidentifikasi akibat bencana	56%		56%	56%		56%	56%	100%

2	24	03	2.03	Penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan	Jumlah arsip yang diselamatkan dari perangkat daerah kab/kota yang digabung dan atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan	1.950 berkas		1.950 berkas	1.950 berkas		1.950 berkas	1.950 berkas	100%
2	24	03	2.04	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media Kab/kota	jumlah arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	150 berkas		150 berkas	150 berkas		150 berkas	150 berkas	100%
2	24	03	2.05	Pencarian Arsip Statis Kab/Kota yg dinyatakan hilang	Jumlah Penetapan dan Pengumuman Daftar Arsip yang dinyatakan hilang	2 berkas		2 berkas	2 berkas		1 berkas	1 berkas	100%

Boyolali, 2023.

Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Boyolali

ARIEF GUNARTO, ST.,MT.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. *Tugas Pokok dan Fungsi*

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok, yaitu menyelenggarakan perpustakaan dan memelihara kearsipan, dan dokumentasi.

Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali, mempunyai fungsi:

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi
b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi.
c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi.
d) Penyelenggaraan pelayanan perpustakaan, dan
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali sesuai, Nomor 128 Tahun 2021, tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali terdiri dari:

1) Kepala Dinas
2) Sekretaris
   - Sub Bagian Tata Usaha
3) Bidang Perpustakaan
4) Bidang Kearsipan
5) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Boyolali Nomor 128 Tahun 2021, tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali.

c. Kajian Atas Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan tingkat Kabupaten Boyolali, antara lain

Rencana Pembangunan **J**angka Panjang (RP**J**P) Kabupaten Boyolali 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RP**J**M) Kabupaten Boyolali 2016-2025, RKPD dan dokumen tingkat SKPD berupa Renstra SKPD yang mengacu pada RPJM Kabupaten Boyolali 2016-2025 serta Renja SKPD.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan yang harus diberikan sesuai dengan kewenangannya di bidang Kearsipan dan Perpustakaan, dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Boyolali

NO	Indikator	SPM/stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	WAJIB											
1	**KEARSIPAN**											
	Meningkatnya tata kelola dan Pemanfaatan arsip daerah		Tingkat ketersediaan arsip	76,50	77,00	77,50		75,00%		76%	77,50	
			Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	57,50	58,00	58,50		83,3%		83,5%	58,50	
2	**PERPUSTAKAAN**											
	Meningkatnya upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	60,77	61,77	62,77		70,74		72,00	62,77	
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	14,54	15,54	16,54		95,48		95,50	16,54	
			Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	5%	5,50%	6,00%		38,52%		39%	6,00%	
			Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,74%	0,91%	1,08%		0,081%		1,10%	1,08%	
			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	2,29%	3,66%	4,81%		5,42%		5,50%	4,81%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis dalam urusan kearsipan dan perpustakaan untuk mewujudkan fungsi pelayanan umum dalam rangka mengoptimalkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi :

- Perlunya optimasi penyelenggaraan kearsipan, pembangunan sistem informasi arsip yang memadai, serta kualitas pelayanan dan sumber daya aparatur bidang kearsipan.
- Perlunya optimasi penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan, peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan, peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan hingga ke desa-desa dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang perpustakaan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali dengan mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dipengaruhi oleh faktor SDM dan sarana prasarana. Kebijakan penting yang ditempuh untuk mengatasi kedua faktor tersebut antara lain :

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan dan bimtek-bimtek terkait untuk meningkatkan profesionalisme bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, sehingga dapat dihasilkan aparatur di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi yang kreatif dan inovatif.
2. Menerapkan *Right Man On The Right Place* dalam penempatan/perekrutan aparatur serta memberdayakan SDM yang ada. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, mengingat aparatur yang dimiliki akan lebih responsif terhadap perkembangan kebijakan provinsi dan nasional serta cepat tanggap dalam memenuhi keinginan masyarakat yang membutuhkanpelayanan.
3. Mengembangkan Teknologi Informasi, perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi.
4. Optimalisasi perlengkapan dan peralatan yang ada, mengusulkan penambahan sarana prasarana kerja serta pembangunan gedung/ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja dalam pelayanan di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari hasil evaluasi terhadap capaian target dalam RKPD tahun 2022 maupun terhadap capaian kinerja dalam RPJMD, beserta kerangka pendanaan bidang perpustakaan dan kearsipan, sebagaimana dirumuskan dalam prioritas pembangunan daerah yang terdapat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP**J**MD) Kabupaten Boyolali 2016-2025 dan juga prioritas pembangunan daerah tahunan sebagai pedoman dan arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD, indikator kinerja kunci yang mengacu pada indikator RPJMD. Secara umum terhadap usulan program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan prioritas pembangunan (rancangan awal RKPD) beserta target yang akan dicapai pada tahun 2024 meskipun terdapat beberapa perubahan karena disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan, sebagaimana terlihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Boyolali

Nama OPD : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali

	Rancangan Awal RKPD (Prioritas Pembangunan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA***		***Persentase penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi sesuai standart***	**100%**	**4.106.532.000**	***PROGRAM URUSAN PEMERINTAH DAERAH***		***Persentase penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi sesuai standart***	**100%**	**4.819.856.604**	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		***Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran perangkat daerah***	**100%**	**3.601.490.000**	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		***Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran perangkat daerah***	**100%**	**4.028.301.000**	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang	3.176.690.000	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang	31 orang	
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	424.800.000	Pembayaran gaji PTT dan tenaga honorer		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		***Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi perkantoran perangkat daerah***	**100%**	**261.785.000**	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**		***Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi perkantoran perangkat daerah***	**100%**	**321.044.200**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	6.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	3.000.000	

	Penyediaan Bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	40.000.000	Penyediaan Bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	40.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	20.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 paket	10.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 paket	10.000.000	
	Penyediaan Bahan/ material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	25.000.000	Penyediaan Bahan/ material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	72.500.000	
	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	57.785.000	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	87.785.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	100.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	50.000.000	
	Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		**jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**70.716.000**	**Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		**jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**199.290.404**	
	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.390.000	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.390.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	68.326.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	68.326.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.000.000	
	Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		**Pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**172.541.000**	**Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**Pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**171.221.000**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	14 unit	52.541.000	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	14 unit	52.541.000	

	operasional atau lapangan		Perizinannya			operasional atau lapangan		Perizinannya			
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	20.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	20.000.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	50.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	50.000.000	
	Pemeliharaan mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 unit	20.000.000	Pemeliharaan mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 unit	20.000.000	
	Kegiatan pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		**pengadaan Barang milik daerah**	100%		**Kegiatan pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		Terpenuhinya bangunan gedung yang representatif			
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	20.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	20.000.000	
	Pengadaan mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	10.000.000	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	10.000.000	
	URUSAN WAJIB KEARSIPAN										
A.	***PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP***		***Nilai audit kearsipan***	**80**	**70.484.000**	***PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP***		***Nilai audit kearsipan***	**80**	**74.000.000**	
	Kegiatan Pengelolaan arsip dinamis daerah Kabupaten/kota		**Jumlah arsip dinamis yang dikelola sesuai NSPK**	**77.600 berkas**	**7.000.000**	**Kegiatan Pengelolaan arsip dinamis daerah Kabupaten/kota**		**Perangkat daerah yang dilakukan pengawasan**	**77.600 berkas**	**15.500.000**	
	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis		Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	77.800 berkas	2.500.000	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis		Jumlah arsip dinamis yang diciptakan	2 paket	10.000.000	
	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis		Jumlah Naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	52.000 berkas	2.500.000	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis		Jumlah arsip dinamis yang disimpan	52.000 berkas	2.500.000	
	Pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/kota		Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan Kab/kota	31 laporan	2.000.000	Pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/kota		Jumlah arsip dinamis yang dilakukan pengawasan	31 laporan	2.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota		**Jumlah arsip statis yang dikelola sesuai NSPK**	**2.300 berkas**	**56.484.000**	**Kegiatan Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota**		**Jumlah arsip statis yang dikelola sesuai NSPK**	**2.300 berkas**	**52.500.000**	
	Pengumpulan dan		Jumlah Salinan Otentik	500 arsip	51.484.000	Pengumpulan dan		Jumlah Salinan Otentik	500 arsip	51.484.000	

	penyampaian salinan otentik naskah asli arsip statis		Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI			penyampaian salinan otentik naskah asli arsip statis		Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI			
	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2.000 arsip	5.000.000	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2.000 arsip	5.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota		**Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN**	650 berkas	12.800.000	**Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota**		**Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN**	500 berkas	12.800.000	
	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kab/Kota melalui JIKN		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	600 pengguna	3.400.000	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	600 pengguna	3.400.000	
	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	53 laporan	3.500.000	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	53 laporan	3.500.000	
B.	***PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP***		***Cakupan arsip yang terlindungi dan terselamatkan***	**30%**	**146.482.000**	***Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah***		***Cakupan arsip yang terlindungi dan terselamatkan***	**30%**	***141.482.000***	
	Kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun		**Jumlah arsip daerah yang dimusnahan yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun**	5.000 berkas	6.400.000	**Kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun**		**Jumlah arsip daerah yang dimusnahan yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun**	5.000 berkas	6.400.000	
	Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	6.000 arsip	3.500.000	Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	6.000 arsip	3.500.000	
	Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki Retensi di bawah 10 tahun		Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	6.500 berkas	0	Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki Retensi di bawah 10 tahun		Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	6.500 berkas	0	
	Kegiatan Perlindungan		**Persentase arsip yang di**	**56%**	**53.056.000**	**Kegiatan Perlindungan**		**Persentase arsip yang di**	**56%**	**53.056.000**	

	dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten/kota		**evakuasi dan didentifikasi akibat bencana**			**dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten/kota**		**evakuasi dan didentifikasi akibat bencana**			
	Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana		Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	800 arsip	3.500.000	Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana		Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	800 arsip	3.500.000	
	Pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana		Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	150 arsip	75.000.000	Pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana		Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	150 arsip	75.000.000	
	Kegiatan Penyelamatan arsip perangkat Daerah Kab/kota yang digabung dan atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan		**Jumlah arsip yang diselamatan dari perangkat Daerah Kab/kota yang digabung dan atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan**	1.950 berkas	27.982.000	**Kegiatan Penyelamatan arsip perangkat Daerah Kab/kota yang digabung dan atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan**		**Jumlah arsip yang diselamatan dari perangkat Daerah Kab/kota yang digabung dan atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan**	1.950 berkas	27.982.000	
	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan Perangkat daerah kab/kota		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0	27.982.000	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan Perangkat daerah kab/kota		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0	27.982.000	
	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran Perangkat daerah kab/kota		Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran Perangkat daerah kab/kota		Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	
	Pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran daerah kecamatan		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	700 berkas	0	Pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran daerah kecamatan		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	700 berkas	0	
	Pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran desa/kelurahan		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	300 berkas	0	Pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran desa/kelurahan		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	300 berkas	0	
	Kegiatan Autentifikasi		**Jumlah arsip statis yang**	150	7.500.000	**Kegiatan Autentifikasi**		**Jumlah arsip statis yang**	150 berkas	7.500.000	

	arsip statis dan arsip hasil alih media Kabupaten/kota		**sesuai pesyaratan penjaminan keabsahan arsip**	berkas		**arsip statis dan arsip hasil alih media Kabupaten/kota**		**sesuai pesyaratan penjaminan keabsahan arsip**			
	Penilaian dan penetapan autentifikasi arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip		Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	170 arsip	3.000.000	Penilaian dan penetapan autentifikasi arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip		Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	170 arsip	3.000.000	
	Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100 arsip	28.500.000	Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100 arsip	28.500.000	
	Kegiatan pencarian arsip Statis Kab/kota yang dinyatakan hilang		**Jumlah penetapan dan pengumuman daftar arsip yang dinyatakan hilang**	**1 berkas**	**3.200.000**	**Kegiatan pencarian arsip Statis Kab/kota yang dinyatakan hilang**		**Jumlah penetapan dan pengumuman daftar arsip yang dinyatakan hilang**	**1 berkas**	**3.400.000**	
	Penetapan dan pengumuman Daftar Pencarian Arsip		Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	7 arsip	3.200.000	Penetapan dan pengumuman Daftar Pencarian Arsip		Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	7 arsip	3.200.000	
	URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN										
A.	***PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN***		***Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk***	***1.05***	***180.853.000***	***PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN***		***Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk***	***1.05***	***883.243.000***	
	Kegiatan pengelolaan perpustakaan Tingkat Daerah Kab/kota		**Jumlah pengembangan koleksi perpustakaan**	982.343 exemplar	180.853.000	**Kegiatan pengelolaan perpustakaan Tingkat Daerah Kab/kota**		**Jumlah pengembangan koleksi perpustakaan**	982.343 exemplar	582.250.000	
	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2 layanan	47.000.000	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2 layanan	47.000.000	
	Pengembangan perpustakaan di Tingkat daerah Kab/kota		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	10 perpustakaan	3.000.000	Pengembangan perpustakaan di Tingkat daerah Kab/kota		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	10 perpustakaan	3.000.000	
	Pengembangan kekhasan		Jumlah Koleksi Perpustakaan	220	100.000.000	Pengembangan kekhasan		Jumlah Koleksi Perpustakaan	220	100.000.000	

	koleksi pepustakaan daerah tingkat daerah Kab/kota		Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	exemplar		koleksi pepustakaan daerah tingkat daerah Kab/kota		Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	exemplar		
	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah Kab/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 perpus sekolah	20.820.000	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah Kab/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 perpus sekolah	20.820.000	
	Pembinaan perpustakaan khusus tingkat kab/kota		Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	7 perpustakaan	20.000.000	Pembinaan perpustakaan khusus tingkat kab/kota		Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	7 perpustakaan	20.000.000	
	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kab/kota		Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	6 layanan	13.500.000	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kab/kota		Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	6 layanan	13.500.000	
	Pengembangan bahan pustaka		Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	30.000 eksemplar	30.853.000	Pengembangan bahan pustaka		Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	30.000 eksemplar	30.853.000	
	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	30.000 exemplar	0	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	30.000 exemplar	0	
	Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kab/kota		Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	13.500.000	Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kab/kota		Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	13.500.000	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		**SKM Layanan Perpustakaan**	**86,20**	**600.993.000**	***PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN***		**SKM Layanan Perpustakaan**	**86,20**	**300.993.000**	
	Kegiatan Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Kab/kota		**Jumlah pengunjung perpustakaan**	50.000 orang	**600.993.000**	**Kegiatan Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Kab/kota**		**Jumlah pengunjung perpustakaan**	50.000 orang	**300.993.000**	
	Sosialisasi budaya baca dan		Jumlah Lokus Pembudayaan	80 lokus	100.000.000	Sosialisasi budaya baca		Jumlah Lokus Pembudayaan	80 lokus	100.000.000	

	literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat		Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan			dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat		Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan			
	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	96 orang	500.000.000	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	96 orang	500.000.000	
	Pengembangan literasi berbasis inclusi sosial		Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 perpustakaan	16.493.000	Pengembangan literasi berbasis inclusi sosial		Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 perpustakaan	16.493.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali melakukan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan yang diajukan para pemangku kepentingan, oleh karena itu dalam penentuan skala prioritas dapat tidaknya usulan program dan kegiatan dari stakeholder diakomodasi, tentu saja dengan tetap memperhatikan beberapa kriteria yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Boyolali meliputi :

1) Keterkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
2) Keterkaitan dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Boyolali periode 2021- 2026;
3) Keterkaitan dengan pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan
4) Keterkaitan dengan isu strategis daerah.
5) Ketersediaan anggaran.

Berdasarkan kriteria tersebut, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi menerima usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, untuk dijadikan prioritas pembangunan beserta tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program serta kebutuhan pembiayaannya. Usulan akan diakomodir dan diteruskan ke lembaga terkait sepanjang memenuhi kriteria tersebut di atas.

Tabel. T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

Tahun 2024 Kabupaten Boyolali

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No.	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pengelolaan perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	menyesuaikan usulan dari desa/kel			
	Pengembangan perpustakaan tingkat daerah Kab/Kota		Jumlah perpustakaan desa dan kelurahan yang dikembangkan	3.000.000	
	Pembudayaan gemar membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	menyesuaikan usulan dari desa/kel			
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi sosial		Jumlah perpustakaan desa berbasis inclusi sosial	16.493.000	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional di bidang perpustakaan dan kearsipan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2025 adalah sebagai berikut :

1) *Bidang Perpustakaan*

   Kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional diarahkan pada semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia, yang ditandai dengan semakin memadainya sarana dan prasarana perpustakaan hingga ke pedesaan.

2) *Bidang Kearsipan*

   Kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional diarahkan pada meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah dan dipercaya oleh masyarakat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kearsipan.

Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, serta mengacu pada arah kebijakan Kabupaten Boyolali di bidang perpustakaan dan kearsipan, kebijakan dan prioritas pembangunan yang dilaksanakan tahun 2016 meliputi :

1) *Bidang Perpustakaan*

   Kebijakan dalam urusan perpustakaan diarahkan pada :

   - Meningkatkan pemerataan dalam penyediaan layanan perpustakaan hingga ke pedesaan dan daerah-daerah terpencil
   - Meningkatkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan
   - Meningkatkan minat baca masyarakat

2) *Bidang Kearsipan*

   Kebijakan dalam urusan kearsipan diarahkan pada :

   - Menyempurnakan sistem administrasi kearsipan
   - Meningkatkan mekanisme pengelolaan dan pelestariandokumen/arsip daerah
   - Meningkatkan kualitas pelayanan dan sumberdaya aparaturbidang kearsipan

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Jika dikaitkan dengan visi Bupati terpilih yang ada dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali periode 2021- 2026 *"Boyolali Maju Meneruskan Pro Investasi, Menata dan Melangkah Bersama, Penuh Totalitas (METAL)"* dan misi-misi yang

ingin diwujudkan, tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikatornya tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Boyolali Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai Sakip

Uraian keterkaitan antara visi misi dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali periode 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Meningkatkan ketrampilan dan keahlian sumberdaya manusia di bidang perpustakaan dan kearsipan
- Menyediakan kelengkapan sarana perpustakaan dan kearsipan
- Memberikan kemudahan dalam layanan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi.

Kedua misi tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) indikator sasaran, yang semuanya bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang ditempuh dengan cara :

- Menyempurnakan sistem administrasi kearsipan
- Meningkatkan mekanisme pengelolaan dan pelestariandokumen/arsip daerah
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan sumberdaya aparatur bidangkearsipan
- Menciptakan sistem informasi daerah
- Meningkatkan pemerataan dalam penyediaan layanan perpustakaan hingga ke pedesaan dan daerah-daerah terpencil
- Meningkatkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan
- Meningkatkan minat baca masyarakat

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan dengan tolok ukur kinerja masing-masing kelompok program serta kebutuhan pembiayaannya. Kerangka pendanaan yang disajikan bersifat indikatif yang berarti bahwa anggaran pendanaan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kegiatan dan target yang akan dilaksanakan.

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali, antara lain :

   a. Pencapaian prioritas dan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2016-2025
   b. Pencapaian visi dan misi kepala daerah

B. Rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

   - Untuk Rencana kerja tahun anggaran 2024 terdiri dari 4 (empat) program dan 12 (dua belas) kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) Sub Kegiatan;
   - Total kebutuhan dana / pagu indikatif Rp 5.186.764.000,-

Tabel Rencana program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan yaitu sebagai berikut (Tabel T-C.33.):

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. BOYOLALI
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						**5.186.764.000,00**							**5.186.764.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.186.764.000,00**							**5.186.764.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**865.166.000,00**							**865.166.000,00**	
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***persentase perpustakaan sesuai standar nasionall Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan pendudukk SKM layanan perpustakaann***	**4,81 persen 1,07 persen 86,30 Nilai**		**4,81 persen 1,07 persen 86,30 Nilai**	**4,81 persen 1,07 persen 86,30 Nilai**	**865.166.000,00**						**4,81 persen 1,07 persen 86,30 Nilai**	**865.166.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah pembinaan perpustakaan sesuai standart nasional* *Jumlah pembinaan perpustakaan tingkat Kab/Kota* *Jumlah pengembangan koleksi perpustakaan* *Jumlah pengembangan koleksi perpustakaan (LPPD, AMJ)* *SKM layanan perpustakaan*	120 kali 130 kali 1.011.813 exemplar 1011813 eksemplar 86,30 nilai		120 kali 130 kali 1.011.813 exemplar 1011813 eksemplar 86,30 nilai	120 kali 130 kali 1.011.813 exemplar 1011813 eksemplar 86,30 nilai	248.673.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pengembangan koleksi perpustakaan dan pembinaan perpustakaan	2 Layanan	248.673.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	47.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pengembangan koleksi perpustakaan dan pembinaan perpustakaan	2 Layanan	47.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	10 Perpustakaan		10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	3.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pengembangan koleksi perpustakaan dan pembinaan perpustakaan	10 Perpustakaan	3.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			0	220 0		220 0	220 0	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pengembangan koleksi perpustakaan dan pembinaan perpustakaan	220 0	100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan		10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	20.820.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pengembangan koleksi perpustakaan dan pembinaan perpustakaan	10 Perpustakaan	20.820.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	7 Perpustakaan		7 Perpustakaan	7 Perpustakaan	20.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pengembangan koleksi perpustakaan dan pembinaan perpustakaan	7 Perpustakaan	20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	6 Layanan		6 Layanan	6 Layanan	13.500.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pengembangan koleksi perpustakaan dan pembinaan perpustakaan	6 Layanan	13.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka														
			Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	30000 Eksemplar		30000 Eksemplar	30000 Eksemplar	30.853.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pengembangan koleksi perpustakaan dan pembinaan perpustakaan	30000 Eksemplar	30.853.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	30000 Eksemplar		30000 Eksemplar	30000 Eksemplar	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pengembangan koleksi perpustakaan dan pembinaan perpustakaan	30000 Eksemplar	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.500.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pengembangan koleksi perpustakaan dan pembinaan perpustakaan	1 Dokumen	13.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengunjung perpustakaan* *Jumlah pengunjung perpustakaan*	70.000 orang 70000 orang		70.000 orang 70000 orang	70.000 orang 70000 orang	616.493.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pengunjung perpustakaan	80 Lokus	616.493.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	80 Lokus		80 Lokus	80 Lokus	100.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pengunjung perpustakaan	80 Lokus	100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0 Perpustakaan		0 Perpustakaan	0 Perpustakaan	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pengunjung perpustakaan	0 Perpustakaan	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	96 Orang		96 Orang	96 Orang	500.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pengunjung perpustakaan	96 Orang	500.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 Perpustakaan		2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	16.493.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pengunjung perpustakaan	2 Perpustakaan	16.493.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**4.321.598.000,00**							**4.321.598.000,00**	
1.	**2.24.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi sesuai standar Persentase penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi sesuai standar Persentase penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi sesuai standart Persentase penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi sesuai standartt***	**100 persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen**		**100 persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**100 persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**4.106.532.000,00**						**100 persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen**	**4.106.532.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat*	25 dokumen		25 dokumen	25 dokumen	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	perencanaan	2 Dokumen	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	perencanaan	2 Dokumen	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	perencanaan	1 Dokumen	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	perencanaan	1 Dokumen	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	perencanaan	1 Dokumen	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	perencanaan	15 Laporan	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	perencanaan	4 Laporan	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.*	8 kegiatan 100 Persen		8 kegiatan 100 Persen	8 kegiatan 100 Persen	3.601.490.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	ASN, TKHL, dan PTT	31 Orang/bulan	3.601.490.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan		31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3.176.690.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	ASN, TKHL, dan PTT	31 Orang/bulan	3.176.690.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	424.800.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	ASN, TKHL, dan PTT	12 Dokumen	424.800.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	ASN, TKHL, dan PTT	12 Dokumen	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	ASN, TKHL, dan PTT	12 Dokumen	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	ASN, TKHL, dan PTT	18 Laporan	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	ASN, TKHL, dan PTT	1 Dokumen	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	261.785.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	layanan administrasi perkantoran	4 Paket	261.785.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	layanan administrasi perkantoran	4 Paket	6.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	layanan administrasi perkantoran	4 Paket	3.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	40.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	layanan administrasi perkantoran	4 Paket	40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	layanan administrasi perkantoran	4 Paket	20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	layanan administrasi perkantoran	4 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	layanan administrasi perkantoran	4 Paket	25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	57.785.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	layanan administrasi perkantoran	4 Laporan	57.785.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	layanan administrasi perkantoran	4 Laporan	100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-					30.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pengadaan BMD	2 Unit	30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.05	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pengadaan BMD	2 Unit	10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	15 Unit	20.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pengadaan BMD	15 Unit	20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pengadaan BMD	1 Unit	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	100 persen		100 persen	100 persen	70.716.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	penyediaan jasa penunjang	12 Laporan	70.716.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.390.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	penyediaan jasa penunjang	12 Laporan	1.390.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.323.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	penyediaan jasa penunjang	12 Laporan	68.323.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.003.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	penyediaan jasa penunjang	12 Laporan	1.003.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	142.541.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	14 Unit	142.541.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	52.541.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	14 Unit	52.541.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	20.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	30 Unit	20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	20.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	20 Unit	20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	3 Unit	50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Nilai audit kearsipann***	**82 nilai**		**82 nilai**	**82 nilai**	**70.384.000,00**						**82 nilai**	**70.384.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah arsip dinamis yang dikelola sesuai NSPK* *Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola Sesuai NSPK*	77.800 berkas 77800 berkas		77.800 berkas 77800 berkas	77.800 berkas 77800 berkas	7.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	arsip dinamis	77800 Berkas	7.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	77800 Berkas		77800 Berkas	77800 Berkas	2.500.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	arsip dinamis	77800 Berkas	2.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	52000 Berkas		52000 Berkas	52000 Berkas	2.500.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	arsip dinamis	52000 Berkas	2.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Laporan		31 Laporan	31 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	arsip dinamis	31 Laporan	2.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah arsip statis yang dikelola sesuai NSPK* *Jumlah Arsip Statis yang Dikelola Sesuai NSPK*	3.150 berkas 3150 berkas		3.150 berkas 3150 berkas	3.150 berkas 3150 berkas	56.484.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	arsip statis	500 Arsip	56.484.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	500 Arsip		500 Arsip	500 Arsip	51.484.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	arsip statis	500 Arsip	51.484.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2000 Arsip		2000 Arsip	2000 Arsip	5.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	arsip statis	2000 Arsip	5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN* *Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN*	750 berkas 750 berkas		750 berkas 750 berkas	750 berkas 750 berkas	6.900.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	arsip yang dimasukkan dalama SIKN melalui JIKN	600 Pengguna	6.900.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	600 Pengguna		600 Pengguna	600 Pengguna	3.400.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	arsip yang dimasukkan dalama SIKN melalui JIKN	600 Pengguna	3.400.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	53 Laporan		53 Laporan	53 Laporan	3.500.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	arsip yang dimasukkan dalama SIKN melalui JIKN	53 Laporan	3.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	***Cakupan arsip yang terlindungi dan terselamatkann***	**40 persen**		**40 persen**	**40 persen**	**144.682.000,00**						**40 persen**	**144.682.000,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*jumlah arsip daerah yang dimusnahkan yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun* *jumlah arsip daerah yang dimusnahkan yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun*	6.600 berkas 6600 berkas		6.600 berkas 6600 berkas	6.600 berkas 6600 berkas	3.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pemusnahan arsip dengan retensi dibawah 10 tahun	6000 Arsip	3.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	6000 Arsip		6000 Arsip	6000 Arsip	3.500.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pemusnahan arsip dengan retensi dibawah 10 tahun	6000 Arsip	3.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun														
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	6500 Berkas		6500 Berkas	6500 Berkas	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pemusnahan arsip dengan retensi dibawah 10 tahun	6500 Berkas	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	*persentase arsip yang dievakuasi dan diidentifikasi akibat bencana* *persentase arsip yg di Evakuasi dan diidentifikasi akibat bencana*	58,00 berkas 58 berkas		58,00 berkas 58 berkas	58,00 berkas 58 berkas	78.500.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	evakuasi arsip dari bencana	800 Arsip	78.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana														
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	800 Arsip		800 Arsip	800 Arsip	3.500.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	evakuasi arsip dari bencana	800 Arsip	3.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	150 Arsip		150 Arsip	150 Arsip	75.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	evakuasi arsip dari bencana	150 Arsip	75.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	*jumlah arsip daerah yang diselamatkan dari perangkat daerah kab/kota yang digabung dan atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan* *Jumlah arsip yang diselamatkan dari perangkat daerah kab/kota yang digabung dan atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan*	2.150 berkas 2150 berkas		2.150 berkas 2150 berkas	2.150 berkas 2150 berkas	27.982.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	penyelamatan arsip akibat penggabungan, pembubaran, pemekaran kec, desa/kel	0 Daftar	27.982.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Daftar		0 Daftar	0 Daftar	27.982.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	penyelamatan arsip akibat penggabungan, pembubaran, pemekaran kec, desa/kel	0 Daftar	27.982.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Arsip		0 Arsip	0 Arsip	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	penyelamatan arsip akibat penggabungan, pembubaran, pemekaran kec, desa/kel	0 Arsip	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	700 Arsip		700 Arsip	700 Arsip	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	penyelamatan arsip akibat penggabungan, pembubaran, pemekaran kec, desa/kel	700 Arsip	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	300 Arsip		300 Arsip	300 Arsip	0,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	penyelamatan arsip akibat penggabungan, pembubaran, pemekaran kec, desa/kel	300 Arsip	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	*jumlah arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip* *jumlah arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip (berkas)*	170 berkas 170 berkas		170 berkas 170 berkas	170 berkas 170 berkas	31.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	keabsahan arsip statis	170 Arsip	31.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	170 Arsip		170 Arsip	170 Arsip	3.000.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	keabsahan arsip statis	170 Arsip	3.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100 Arsip		100 Arsip	100 Arsip	28.500.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	keabsahan arsip statis	100 Arsip	28.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	*jumlah penetapan dan pengumuman daftar arsip yang dinyatakan hilang Jumlah Penetapan dan Pengumuman Daftar Arsip yang dinyatakan hilang*	7 berkas 7 berkas		7 berkas 7 berkas	7 berkas 7 berkas	3.200.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pencarian arsip yang hilang	7 Arsip	3.200.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	7 Arsip		7 Arsip	7 Arsip	3.200.000,00	- Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	pencarian arsip yang hilang	7 Arsip	3.200.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	J U M L A H							**5.186.764.000,00**							**5.186.764.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku- pelaku *(stakeholders)* dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah *(trickle down effect)* sehingga keberpihakan pada masyarakatkecil benar-benar dikedepankan.

Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatanyang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

T. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

DINAS PERTANIAN

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.4. Sistematika Rencana Kerja 2

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2022 dan Capaian Renstra Tahun 2022 4
2.1.1. Uraian Operasi 7
2.1.1.1. Belanja Pegawai 7
2.1.1.2. Belanja Barang dan Jasa 7
2.1.1.3. Belanja Hibah 8
2.1.1.4. Belanja bantuan Sosial 9
2.1.2. Belanja Modal 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian 13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian 13
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 13
.....

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 20
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 20
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian 20
.....

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 22
4.1. Program dan Kegiatan Tahun 2024 22
4.2. Pendanaan Pembangunan Pertanian Tahun 2024 23
BAB V. PENUTUP 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Target dan Realisasi APBD pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali	…….	4
Tabel. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021	…….	8
Tabel Belanja Hibah	…….	8
Tabel Belanja Bantuan Sosial	…….	9
Tabel Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021	…….	10
Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Provinsi/Kabupaten/Kota Boyolali	…….	15
Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	…….	17
Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Boyolali	…….	25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2024 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah turunan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan perencanaan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2022—2026 dalam rangka mewujudkan visi "**Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas** ".

Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 45 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pertanian. Penguatan ketahanan pangan yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas merupakan salah satu arah kebijakannya. Berkaitan dengan hal tersebut, kedaulatan pangan menjadi salah satu isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 140);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2022;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Boyoiali (Berita Daerah Kabupaten Boyoiali Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyoiali Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan. Susunan Onsanisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyoiali (Berita Daerah Kabupaten Boyoiali Tahun 2019 Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Boyoiali Nomor 46 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyoiali (Berita Daerah Kabupaten Boyoiali Tahun 2018 Nomor 46);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di bidang pertanian. Tujuan penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2024, kaitannya dengan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pertanian.
3. Memberikan arah dalam penyusunan Program/Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

1.4. Sistematika Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Rencana Kerja.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN
4.1 Program dan kegiatan .
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2022 dan Capaian Renstra Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Pertanian merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun sapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaranyang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas pertanian Kabupaten Boyolali ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali selama Tahun 2022 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2024.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2022 telah terlewati. Berbagai Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu dan pencapaian rentra OPD adalah untuk mengidentifikasikan sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasikan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Secara rinci Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali sebagaimana Tabel T-C.29. Dari data tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Target dan Realisasi APBD pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.093.974.000	14.940.449.584	*98,*85
		Penyediaan Administrasi dan	307.800.000	307.800.000	

		Pelaksanaan Tugas ASN			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.500.000	101.569.762	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.348.000	59.344.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	99.600.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.871.000	75.321.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.000.000	66.934.854	
		Penyediaan Bahan/Material	28.000.200	27.895.400	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	29.418.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	7.601.000	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000	7.985.659	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000	77.407.707	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.000.000	130.306.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya air dan Listrik	146.000.000	134.095.373	

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	294.000.000	293.939.280	**99,69**
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	440.000.000	437.795.900	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	1.918.807.000	1.890.251.800	**98,82**
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	976.000.000	975.365.000	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	894.597.000	883.063.912	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	100.000.000	98.901.000	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2.998.295.400	2.907.208.358	**93,97**
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.482.546.400	3.195.451.449	

		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.100.100.000	1.021.305.750	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.274.750.000	1.246.479.441	**97,80**
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	10.800.000	10.767.000	
Grand Total			29.742.389.000	29.026.257.729	**97,59**

2.1.1 Uraian Operasi

2.1.1.1. Belanja Pegawai Rp 14.940.449.584,00

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 14.940.449.584,00 atau 98,98% dari anggaran sebesar Rp 15.093.974.000,00. Bila dibandingkan realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 16.680.542.239,00 mengalami penurunan /kenaikan sebesar Rp 1.740.092.655,00 atau 10,43%.

Realisasi belanja pegawai tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran 2022(Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	**10.299.569.000,00**	**10.216.453.558,00**	**99,19**	**11,498,728,239,00**
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	**4.794.405.000,00**	**4.723.996.026,00**	**98,53**	**5.181.814.000,00**
	Jumlah	**15.093.974.000,00**	**14.940.449.584,00**	**98,98**	**16.680.542.239,00**

2.1.1.2. Belanja Barang dan Jasa Rp 7.544.228.370,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 7.544.228.370,00 atau 94,38% dari anggarannya sebesar Rp

7.993.808.000,00 Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	5.635.291.600	5.268.761.428	93,50	3.884.963.020
2	Belanja Jasa Kantor	764.300.000	728.336.296	95,29	733.005.835
3	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	142.500.000	140.458.000	98,57	
4	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.075.000	21.075.000	100,00	
5	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100.348.000	100.306.439	99,96	120.459.100
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	202.896.400	157.894.207	77,82	57.105.500
7	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.127.397.000	1.127.397.000	100,00	
8	**Grand Total**	**7.993.808.000**	**7.544.228.370**	**94,38**	**4.795.533.455**

2.1.1.3 Belanja Hibah Rp 627.000.000,00

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 627.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp 627.000.000,00. Bila dibandingkan realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 150.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 477.000.000,00 atau 318,00%.

Jumlah realisasi belanja hibah tersebut dipergunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang kepada kelompok tani yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya untuk pembangunan Jalan Usaha Tani. Rincian hibah sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel Belanja Hibah

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah				
2	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	627.000.000,00	627.000.000,00	100,00	150.000.000,00
3	Belanja Hibah Dana BOS				
	Jumlah	**627.000.000,00**	**627.000.000,00**	**100,00**	**150.000.000,00**

2.1.1.4 Belanja Bantuan Sosial Rp 873.000.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 873.000.000,00 atau 99,28% dari anggaran sebesar Rp 879.300.000,00 bila dibandingkan realisasi belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 873.000.000,00

Realisasi Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel Belanja Bantuan Sosial

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	879.300.000,00	873.000.000,00	99,28	0,00
	Jumlah	**879.300.000,00**	**873.000.000,00**	**99,28**	**0,00**

Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pertanian menganggarkan bantuan sosial berupa uang kepada masyarakat yang terdampak Inflasi sebesar Rp 879.300.000,00. Anggaran tersebut sudah terealisasi sebesar Rp 873.000.000,00 atau 99,28% yang disalurkan kepada 1940 Buruh Tani penerima manfaat. Mekanisme penyaluran bantuan sosial tersebut sebagai berikut:

1) Jumlah bantuan yang diberikan kepada masing-masing KPM sebesar Rp450.000,00;

2) Dispertan menyusun perjanjian kerjasama dengan Bank Boyolali mengatur tentang pembuatan rekening dengan saldo Rp.0,00 (nol rupiah) dan menyalurkan hibah periode bulan oktober s.d desember 2022.
3) Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Kecamatan terkait pengumpulan data pribadi untuk pembuatan rekening bank dan teknis pembagian;
4) Dinas Pertanian membentuk Tim Verifikasi calon penerima bantuan sosial dan melakukan verifikasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi calon penerima bantuan sosial, ditandatangani oleh Tim Verifikasi. Berita acara hasil verifikasi merupakan dasar bagi Dinas Pertanian untuk mengajukan keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan sosial dalam rangka penanganan Dampak Inflasi.
5) Dinas Pertanian menyalurkan bantuan sosial berdasarkan daftar penerima bantuan sosial yang tertuang dalam keputusan bupati, melalui Rekening Bank Boyolali penerima bantuan sosial tersebut.
6) Setiap penerima bantuan diwajibkan membuat Pakta Integritas dan menandatangani di atas materai saat pengambilan Uang di Bank Boyolali.

2.1.2 **Belanja Modal Rp 5.041.579.775,00**

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 5.041.579.775,00 atau 97,93 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 5.148.307.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.150.487.250,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.891.092.525,00 atau 134,44%.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum dengan rincian sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	319.000.000,00	311.985.300,00	97,80	691.603.250,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.747.807.000,00	1.723.060.000,00	98,58	1.458.884.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.081.500.000,00	3.006.534.475,00	97,57	0,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal-Pengadaan Aset Tak Berwujud				
Jumlah	5.148.307.000,00	5.041.579.775,00	97,93	2.150.487.250,00

II.a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 311.985.300,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 311.985.300,00 atau 97,80 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 319.000.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 691.603.250,00 mengalami penurunan sebesar Rp 379.617.950,00 atau 54,89%.

Jumlah tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan Tahun Anggaran 2022 untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai, antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan peralatan dan mesin sehingga dapat digunakan.

Tabel. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2022

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengadaan Alat Kantor	45.700.000,00
2	Pengadaan Alat Rumah Tangga	128.515.800,00
3	Pengadaan Komputer	66.000.000,00
4	Pengadaan Alat Komunikasi	4.606.500,00
5	Pengadaan computer all in one	14.000.000
6	Sarana informasi BPP	53.163.000
	JUMLAH	**311.985.300,00**

2.1.2.1.Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 1.723.060.000,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.723.060.000,00 atau 98,58 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.747.807.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.458.884.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp

264.176.000,00 atau 18,11%.

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak, serta biaya langsung lainnya yang dikeluarkan sampai gedung dan bangunan tersebut siap pakai.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada **lampiran 5.15.** Berikut tabel realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022:

Tabel. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.723.060.000,00
	Jumlah	**1.723.060.000,00**

2.1.2.2. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 3.006.534.475,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.006.534.475,00 atau 97,57 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 3.081.500.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.081.500.000,00

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan yang meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, jaringan, dan instalasi tersebut siap digunakan.

Berikut tabel realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2022:

Tabel. Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2022

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.197.330.000,00
2	Belanja Modal JIJ - Pengadaan Bangunan Air	1.809.204.475,00
	Jumlah	**3.006.534.475,00**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2022 yang mendukung kepada pencapaian visi dan misi sesuai dengan hasil evaluasi pencapaian kinerja masing-masing sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2022 dikategorikan "tercapai", dikarenakan capaian kinerja berdasarkan perbandingan target penetapan kinerja dibandingkan realisasi sebesar sama dengan 100%. Pencapaian sasaran dalam tahun 2022 secara umum telah dapat dicapai secara optimal.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian.

Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:

a. Produktivitas
   Masih rendahnya produktivitas, nilai tambah produk-produk pertanian dalam arti luas dan belum optimalnya pendayagunaan serta pengembangan sumber daya pertanian;

b. **Gejala penyempitan dan penguasaan lahan**

   Tata ruang kawasan yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan pembangunan pertanian di Kabupaten Boyolali (Alih fungsi lahan). Kebutuhan pangan dari tahun ke tahun akan terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi disisi lain penguasaan petani umumnya sampai dengan saat ini semakin sempit, hal ini akan menyebabkan kurang sejahteranya petani yang mungkin akan terjadi kemiskinan struktural.

c. **Proses pasca panen**

   Umumnya hasil produksi (bahan baku pangan) kurang diperhatikan, padahal apabila diperhatikan akan memberikan nilai tambah. Proses pasca panen merupakan rantai lanjutan kegiatan pemasaran produk yang harus didukung sarana prasarana atau infrastruktur.

d. **Perubahan iklim global dan lingkungan hidup**

   Perubahan iklim global dan perubahan kondisi lingkungan hidup menyebabkan El- Nino yaitu menyebabkan terjadinya kemarau yang panjang sehingga produksi pertanian turun, bahkan mungkin kebakaran atau puso. Selain El-Nino, mungkin juga La-Nina yaitu menyebabkan terjadinya banjir. Perubahan dari El-Nino ke La-Nina akan menyebabkan perkembangbiakan hama penyakit tanaman.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil evaluasi terhadap capaian target dalam RKPD tahun 2022 dan rancangan awal RKPD Tahun 2024, beserta kerangka pendanaan bidang pertanian sebagaimana dirumuskan dalam prioritas pembangunan daerah yang terdapat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali tahun 2016-2022 yang akan dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD tahun 2022-2026, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengacu pada indikator RPJMD.

Secara umum terhadap usulan program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali telah **SESUAI** dengan prioritas pembangunan beserta target yang akan dicapai pada tahun 2022, estimasi tahun 2022 dan refleksi untuk perencanaan tahun 2024 .

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Pertanian dapat dilihat pada Tabel T-C.31 sebagaimana terlampir :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota Boyolali

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	URAIAN	LOKASI	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	URAIAN	LOKASI	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	1	3									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.573.125.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.573.125.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.936.754.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.936.754.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KABUPATEN BOYOLALI			14.571.168.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KABUPATEN BOYOLALI			14.571.168.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KABUPATEN BOYOLALI			365.586.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KABUPATEN BOYOLALI			365.586.000	
					14.936.754.000					14.936.754.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				273.871.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				273.871.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KABUPATEN BOYOLALI			3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KABUPATEN BOYOLALI			3.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KABUPATEN BOYOLALI			3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KABUPATEN BOYOLALI			3.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KABUPATEN BOYOLALI			40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KABUPATEN BOYOLALI			40.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KABUPATEN BOYOLALI			30.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KABUPATEN BOYOLALI			30.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	KABUPATEN BOYOLALI			25.000.000	Penyediaan Bahan/Material	KABUPATEN BOYOLALI			25.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KABUPATEN BOYOLALI			72.871.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KABUPATEN BOYOLALI			72.871.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KABUPATEN BOYOLALI			100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KABUPATEN BOYOLALI			100.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				124.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				124.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KABUPATEN BOYOLALI			124.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KABUPATEN BOYOLALI			124.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				238.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				238.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KABUPATEN BOYOLALI			118.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KABUPATEN BOYOLALI			118.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KABUPATEN BOYOLALI			20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KABUPATEN BOYOLALI			20.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KABUPATEN BOYOLALI			100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KABUPATEN BOYOLALI			100.000.000	
					636.371.000					636.371.000	

	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				4.482.500.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				4.482.500.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				4.482.500.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				4.482.500.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	KABUPATEN BOYOLALI			1.900.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	KABUPATEN BOYOLALI			1.900.000.000	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	KABUPATEN BOYOLALI			2.582.500.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	KABUPATEN BOYOLALI			2.582.500.000	
					4.482.500.000					4.482.500.000	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				3.291.467.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				3.291.467.000	
	Pengembangan Prasarana Pertanian				100.000.000	Pengembangan Prasarana Pertanian				100.000.000	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	KABUPATEN BOYOLALI			100.000.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	KABUPATEN BOYOLALI			100.000.000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian				3.191.467.000	Pembangunan Prasarana Pertanian				3.191.467.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	KABUPATEN BOYOLALI			700.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	KABUPATEN BOYOLALI			700.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	KABUPATEN BOYOLALI			240.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	KABUPATEN BOYOLALI			240.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	KABUPATEN BOYOLALI			291.467.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	KABUPATEN BOYOLALI			291.467.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	KABUPATEN BOYOLALI			210.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	KABUPATEN BOYOLALI			210.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	KABUPATEN BOYOLALI			750.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	KABUPATEN BOYOLALI			750.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Lokasi belum ditentukan			1.000.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Lokasi belum ditentukan			1.000.000.000	
					3.291.467.000					3.291.467.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				734.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				734.000.000	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				734.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				734.000.000	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	KABUPATEN BOYOLALI			440.000.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	KABUPATEN BOYOLALI			440.000.000	
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	KABUPATEN BOYOLALI			294.000.000	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	KABUPATEN BOYOLALI			294.000.000	
					734.000.000					734.000.000	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				180.800.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				180.800.000	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				180.800.000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				180.800.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Lokasi belum ditentukan			180.800.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Lokasi belum ditentukan			180.800.000	
					180.800.000					180.800.000	
					24.261.892.000					24.261.892.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

NO	Program/kegiatan/Sub keg	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	VOLUME /SATUAN	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	4	5	6	7	8
1	Bantuan embung	Desa Tlawong, Kab.	Sawit	1 unit	200.000.000	
2	Fasilitasi untuk kelompok tani yang tanamannya terserang hama penyakit dan fasilitasi pemberian asuransi apabila	Desa Dragan Kec Tamansari, Kab. Boyolali	Tamansari			
3	Bantuan jalan usaha tani	Dukuh Welar Desa	Ngemplak	1 unit	200.000.000	
4	fasilitasi untuk kelompok tani dengan pemberian bantuan bibit tanaman pajale, pepaya, bawang merah kelapa genjah dan mete	Pagerjurang, Kab. Boyolali	Musuk			
5	Bantuan jalan usaha tani	Desa Jrakah, Kab. Boyolali	Selo	1 unit	200.000.000	
6	fasilitasi untuk kelompok tani dengan pemberian bantuan bibit tanaman pajale, pepaya, bawang merah kelapa genjah dan	Pusporenggo, Kab. Boyolali	Musuk			
7	Bantuan jalan usaha tani	Desa Ngaren (Jati Kandang), Kab. Boyolali	Juwangi	1 unit	200.000.000	
8	fasilitasi untuk kelompok tani dengan pemberian bantuan bibit tanaman pajale, pepaya, bawang merah kelapa genjah dan mete	Desa Sumbung, Kab. Boyolali	Cepogo			
9	fasilitasi untuk kelompok tani dengan pemberian bantuan bibit tanaman pajale, pepaya, bawang merah kelapa genjah dan mete	Desa Lampar Kec Tamansari, Kab. Boyolali	Tamansari	200 batang	10.000.000	
10	bantuan cultivator	Desa Sendang Kecamatan Karanggede, Kab. Boyolali	Karanggede	1 unit	20.000.000	
11	fasilitasi untuk kelompok tani dan atau petani dengan pembangunan saran prtnian berupa jalan usaha tani, embung dan	katongan-Mlangan , Desa Jipangan, Kab. Boyolali	Banyudono	1 unit	200.000.000	
12	bantuan traktor	Desa Jlarem, Kab. Boyolali	Gladagsari			
13	Bantuan jalan usaha tani	RW 02 Dukuh Tanduk, Kab. Boyolali, Kab. Boyolali	Ampel	1 unit	200.000.000	
14	Bantuan jalan usaha tani	Bandung Wetan RT 03 RW 04, Kab. Boyolali, Kab. Boyolali	Wonosegoro	1 unit	200.000.000	
15	bantuan traktor	Desa Kacangan,Kecamatan Andong, Kab. Boyolali	Andong	1 Unit	35.000.000	
16	bantuan traktor	Desa Kendel, Kab. Boyolali	Kemusu	1 Unit	35.000.000	
17	bantuan cultivator	Lanjaran Kec Tamansari, Kab. Boyolali	Tamansari	1 unit	20.000.000	
18	fasilitasi untuk kelompok tani dengan pemberian bantuan bibit tanaman pajale, pepaya, bawang merah kelapa genjah dan mete	Desa Pilangrejo, Kab. Boyolali	Juwangi	5 Ha	75.000.000	
19	fasilitasi untuk kelompok tani dengan pemberian bantuan bibit tanaman pajale, pepaya, bawang merah kelapa genjah dan mete	Desa Sukorame, Kab. Boyolali	Musuk	750 batang	50.000.000	
20	bantuan traktor	Desa Andong, Kab. Boyolali	Andong			
21	Bantuan jalan usaha tani	Desa Watugede, Kab. Boyolali	Kemusu	1 unit	200.000.000	
22	fasilitasi untuk kelompok tani dan atau petani dengan pembangunan saran prtnian berupa jalan usaha tani, embung dan jariangan irigasi tersier	Manjung, Kab. Boyolali	Sawit	1 unit	200.000.000	
23	bantuan traktor	Desa Kedungrejo, Kab. Boyolali	Kemusu			
24	fasilitasi untuk kelompok tani dan atau petani dengan pembangunan saran prtnian berupa jalan usaha tani, embung dan jariangan irigasi tersier	Dk. Kalidadap RT 01/02, Kab. Boyolali, Kab. Boyolali	Ampel	1 unit	200.000.000	
25	bantuan handsprayer	Desa Sruni, Kab. Boyolali	Musuk	1 UNIT	1.000.000	

26	fasilitasi untuk kelompok tani dengan pemberian bantuan bibit tanaman pajale, pepaya, bawang merah kelapa genjah dan mete	Desa Kalimati, Kab. Boyolali	Juwangi	5 Ha	75.000.000	
27	fasilitasi untuk kelompok tani dengan pemberian bantuan bibit tanaman pajale, pepaya, bawang merah kelapa genjah dan mete	Desa Pengkol Kecamatan Karanggede, Kab. Boyolali	Karanggede			
28	fasilitasi untuk kelompok tani dan atau petani dengan pembangunan saran prtnian berupa jalan usaha tani, embung dan jariangan irigasi tersier	Desa Gunung, Kab. Boyolali , Kab. Boyolali	Simo	1 unit	200.000.000	
29	fasilitasi untuk kelompok tani dan atau petani dengan pembangunan saran prtnian berupa jalan usaha tani, embung dan jariangan irigasi tersier	Selatan Jalan Tol - Desa Trayu, Kab. Boyolali	Banyudono	1 unit	200.000.000	
30	fasilitasi untuk kelompok tani dengan pemberian bantuan bibit tanaman pajale, pepaya, bawang merah kelapa genjah dan mete	Desa Gunung, Kec.Simo Kab. Boyolali , Kab. Boyolali	Simo			
31	bantuan cultivator	Desa Ngagrong, Kab. Boyolali	Gladagsari	1 unit	20.000.000	
32	bantuan sarana pasca panen	Desa Cluntang, Kab. Boyolali	Musuk	1 unit/poktan	50.000.000	
33	bantuan traktor	Pentur, Kec.Simo Kab. Boyolali , Kab. Boyolali	Simo	1 Unit	35.000.000	
34	fasilitasi untuk kelompok tani dan atau petani dengan pembangunan saran prtnian berupa jalan usaha tani, embung dan jariangan irigasi tersier	Dk. Banjarejo 01/14, Kab. Boyolali, Kab. Boyolali	Ampel	1 unit	200.000.000	
35	fasilitasi untuk kelompok tani dan atau petani dengan pembangunan saran prtnian berupa jalan usaha tani, embung dan jariangan irigasi tersier	Barat Dukuh Wonokembang RT.05 RW.06 Desa Sukorejo, Kab. Boyolali	Musuk	1 unit	200.000.000	
36	bantuan traktor	13 Desa di KecTeras, Kab. Boyolali	Teras	1 Unit	35.000.000	
37	fasilitasi untuk kelompok tani dan atau petani dengan pembangunan saran prtnian berupa jalan usaha tani, embung dan jariangan irigasi tersier	Winong RT. 07 RW. 02 Desa Bantengan Kecamatan Karanggede (perbatasan jalan desa Bantengan dan Desa Grogolan), Kab. Boyolali	Karanggede	1 unit	200.000.000	
38	bantuan cultivator	Desa Ngleses, Kab. Boyolali	Juwangi	1 unit	20.000.000	
39	bantuan traktor	Desa Beji, Kecamatan Andong, Kab. Boyolali	Andong			
40	bantuan traktor	Desa Munggur, Kab. Boyolali	Andong			
41	fasilitasi untuk kelompok tani dan atau petani dengan pembangunan saran prtnian berupa jalan usaha tani, embung dan jariangan irigasi tersier	Dusun Ketoyan Rt 03 Rw 01 , Desa Ketoyan, Kab. Boyolali	Wonosegoro	1 unit	200.000.000	
42	fasilitasi untuk kelompok tani dan atau petani dengan pembangunan saran prtnian berupa jalan usaha tani, embung dan jariangan irigasi tersier	Banger Ledok RT.01 RW. 03 Desa Mojosari Kecamatan Karanggede, Kab. Boyolali	Karanggede	1 unit	200.000.000	
43	fasilitasi untuk kelompok tani dan atau petani dengan pembangunan saran prtnian berupa jalan usaha tani, embung dan	13 Desa di Kec.Teras, Kab. Boyolali	Teras	1 unit	200.000.000	
44	fasilitasi untuk kelompok tani dan atau petani dengan pembangunan saran prtnian berupa jalan usaha tani, embung dan jariangan irigasi tersier	Dukuh Jetak RT.12 Rw.03, Desa Jembungan, Kab. Boyolali	Banyudono	1 unit	200.000.000	
45	bantuan cultivator	desa kenteng, Kab. Boyolali	Nogosari			
46	bantuan handsprayer	Desa Kebongulo, Kab. Boyolali	Musuk			
47	fasilitasi untuk kelompok tani dengan pemberian bantuan bibit tanaman pajale, pepaya, bawang merah kelapa genjah dan mete	Desa Glintang, Kab. Boyolali	Sambi	200 batang	10.000.000	
48	bantuan traktor	Desa Kadipaten, Kab. Boyolali	Andong	1 Unit	35.000.000	
49	bantuan traktor	Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kab. Boyolali	Andong			
50	bantuan traktor	Desa Kadipaten, Kab. Boyolali	Andong			
51	fasilitasi untuk kelompok tani dengan pemberian bantuan bibit tanaman pajale, pepaya, bawang merah kelapa genjah dan mete	Desa Kalinanas, Kab. Boyolali	Wonosamodro			
52	fasilitasi untuk kelompok tani dengan pemberian bantuan bibit tanaman pajale, pepaya, bawang merah kelapa genjah dan mete	Desa Guwo, Kab. Boyolali	Wonosegoro	200 batang	10.000.000	
53	fasilitasi untuk kelompok tani dengan pemberian bantuan bibit tanaman pajale, pepaya, bawang merah kelapa genjah dan	Desa Sukabumi, Kab. Boyolali	Cepogo	2 Ha	30.000.000	

54	fasilitasi untuk kelompok tani dengan pemberian bantuan bibit tanaman pajale, pepaya, bawang merah kelapa genjah dan mete	Desa Wonodoyo, Kab. Boyolali	Cepogo	2 Ha	30.000.000	
55	fasilitasi untuk kelompok tani dengan pemberian bantuan bibit tanaman pajale, pepaya, bawang merah kelapa genjah dan mete	Desa Jombong, Kab. Boyolali	Cepogo	2 Ha	30.000.000	
56	fasilitasi untuk kelompok tani dengan pemberian bantuan bibit tanaman pajale, pepaya, bawang merah kelapa genjah dan mete	Desa genting, Kab. Boyolali	Cepogo	2 Ha	30.000.000	
57	bantuan traktor	Desa Kedungdowo, Kab. Boyolali	Andong			
58	Fasilitasi untuk kelompok tani yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia sehingga dapat berpengaruh terhadap kenaikan taraf hidup petani	Desa Sindon, Kab. Boyolali	Ngemplak	1	14.450.000	
59	bantuan traktor	Desa Sobokerto, Kab. Boyolali	Ngemplak			
60	bantuan traktor	Desa Sawahan, Kab. Boyolali	Ngemplak	1 Unit	35.000.000	
61	bantuan traktor	Desa Sempu, Kecamatan Andong, Kab. Boyolali	Andong			
62	fasilitasi untuk kelompok tani dengan pemberian bantuan bibit tanaman pajale, pepaya, bawang merah kelapa genjah dan mete	Tegalgiri, Kab. Boyolali	Nogosari			
63	bantuan cultivator	desa bendo, Kab. Boyolali	Nogosari			
64	bantuan cultivator	Keyongan, Kab. Boyolali	Nogosari	1 unit	35.000.000	
65	bantuan traktor	Desa Kunti, Kab. Boyolali	Andong			
66	bantuan traktor	Desa Brajan : Gapoktan Tani Maju I , Kab. Boyolali	Mojosongo	1 Unit	35.000.000	
67	bantuan traktor	Desa Pelemrejo, Kab. Boyolali	Andong			
68	bantuan traktor	Desa Pranggong, Kab. Boyolali	Andong			
69	bantuan traktor	Desa Pakang, Kecamatan Andong, Kab. Boyolali	Andong			
70	bantuan traktor	Desa Pakang, Kab. Boyolali	Andong			
71	bantuan traktor	DEsa Semawung, Kab. Boyolali	Andong			
72	bantuan traktor	Desa Pakel, Kab. Boyolali	Andong			
73	bantuan traktor	Desa Gondangrawe, Kab. Boyolali	Andong	1 Unit	35.000.000	
74	bantuan traktor	Desa Senggrong, Kab. Boyolali	Andong			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, dan sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Pembangunan sektor pertanian ke depan akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (Agriculture for Development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat.

Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan
bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan bsecara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian

Dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Boyolali Tahun 2022—2026 "**Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi, Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas**", Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok mendukung misi ketiga yaitu "**Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional** ".

Boyolali lumbung pangan sebagai aplikasi dari konsep ketahanan pangan (*food security*) lokal dan nasional terus dipertahankan dan dikembangkan, dengan prinsip pertanian yang maju, lestari, budaya saing internasional, dan berkontribusi penting bagi perekonomian bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan budaya untuk mensejahterakan masyarakat yang berperadaban.

Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, perikanan darat termasuk sektor sejenis lainnya. Aplikasi good farming practices, fasilitasi kebutuhan modal, pengembangan kemitraan yang sehat, kredit pengembangan kelompok/perorangan, pendampingan sampai dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan serta memberi nilai lebih pada pasca produksi.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam menyusun pembangunan pertanian selama 1 (Satu) tahun kedepan

Sasaran Renja Dinas Pertanian adalah penjabaran dari tujuan, yaitu gambaran dari suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan- tindakan yang akan dilakukan. Sasaran untuk memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat diukur dan dicapai.

Selanjutnya untuk menjamin keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati Boyolali, Dinas Pertanian menetapkan Tujuan dan sasaran Renja yang dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas utaman tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
2. Meningkatkan kesejahteraan petani

Sasaran :

1. Terwujudnya peningkatan produksi komoditas utama tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
2. Terwujudnya peningkatan pendapatan keluarga petan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali guna mendukung pembangunan di bidang pertanian pada tahun 2024 sebanyak 5 program, 9 Kegiatan dan 24 Sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Fasilitasi Kunjungan Tamu
      b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
      c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      d. Penyediaan Bahan/Material
      e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
   3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
      a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
   4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

II. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
   1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
      a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
      b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
   1. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
   2. Pembangunan Prasarana Pertanian
      a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

IV. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
b. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

V. Program Penyuluhan Pertanian
1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
a. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

4.2. Pendanaan Pembangunan Pertanian Tahun 2024

Pendanaan pembangunan pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2024 membutuhkan anggaran sebesar Rp. 27.442.756.000, dengan perincian sebagaimana tertera pada Lampiran Tabel T-C.33

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota BOYOLALI
Nama Perangkat Daerah : DINAS PRTANIAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun.....	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Boyolali
Nama Perangkat Daerah : DINAS PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						24,434,327,000							27,442,756,000	
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	15,391,757,000						100 Persen	18,060,456,000	
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	14,595,932,000						100 Persen	17,348,085,000	
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan				14 Orang /bulan	14,246,882,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-		Peningkatan produksi	ASN dan Non ASN	14 Orang/ bulan	17,040,285,000	Dinas Pertanian

						Tunjangan ASN							Dana Alokasi Umum		tanaman pangan, inovasi pertanian dan peternakan.	di Lingkungan Dinas Pertanian Kab. Boyolali			
3	27	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan	349,050,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan peternakan.	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pertanian Kab. Boyolali	12 Bulan	307,800,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan alat listrik dan elektronik selama 12 bulan	Bulan		Bulan	12 Bulan	410,325,000						12 Bulan	348,871,000	
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan				1 Paket	10,000,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produksi tanaman pangan	ASN dan NON ASN di Lingkungan	1 Paket	3,000,000	Dinas Pertanian

						Kantor yang Disediakan									, inovasi pertanian dan peternakan.	Dinas Pertanian			
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	75,000,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mendukung percepatan prioritas pembangunan nasional, terutama dalam rangka penanganan dampak pandemi melalui peningkatan fasilitas kesehatan, vaksinasi, pengua	ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinas Pertanian	4 Paket	75,000,000	Dinas Pertanian

															tan ketahanan sosial melalui konsep jogo tonggo dan pemulihan dampak ekonomi				
3	27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri			Peningkatan produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan peternakan.	ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinas Pertanian	1 Paket	3,000,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	70,000,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produksi tanaman pangan	ASN dan NON ASN di Lingkungan	1 Paket	40,000,000	Dinas Pertanian

															, inovasi pertanian dan peternakan.	Dinas Pertanian			
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	30,000,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan peternakan.	ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinas Pertanian	12 Paket	30,000,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	31,000,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinas Pertanian	1 Paket	25,000,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	72,870,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Peningkatan produksi tanaman	ASN dan NON ASN di Lingk	2 Laporan	72,871,000	Dinas Pertanian

													Umum		pangan, inovasi pertanian dan peternakan.	ungan Dinas Pertanian			
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	106,455,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan peternakan.	ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinas Pertanian	12 Laporan	100,000,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	Bulan		Bulan	12 Bulan	137,000,000						12 Bulan	125,000,000	
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	136,000,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produksi tanaman pangan,	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas	12 Laporan	124,000,000	Dinas Pertanian

						yang Disediakan										inovasi pertanian dan peternakan.	Pertanian			
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1,000,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mendukung percepatan prioritas pembangunan nasional, terutama dalam rangka penanganan dampak pandemi melalui peningkatan fasilitas kesehatan, vaksinasi, penguatan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pertanian	2 Laporan	1,000,000	Dinas Pertanian

															ketahanan sosial melalui konsep jogo tonggo dan pemulihan dampak ekonomi				
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan	Bulan		Bulan	12 Bulan	248,500,000						12 Bulan	238,500,000	
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	138,500,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan peternakan.	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pertanian	7 Unit	118,500,000	Dinas Pertanian

3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	60,000,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri			Peningkatan produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan peternakan.	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pertanian	22 Unit	20,000,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan peternakan.	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pertanian	1 Unit	100,000,000	Dinas Pertanian
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktifitas pertanian per ha/tahun	kw/ha		kw/ha	58,84 kw/ha	3,099,100,000						58,84 kw/ha	4,482,500,000	
3	27	2	2.0		Pengawasan Penggunaan	Jumlah kelompok	Kelom		Kelom	215 Kelom	3,099,100,000						215 Kelom	4,482,500,000	

			1		Sarana Pertanian	tani yang telah menggunakan benih tanaman pangan yang bersertifikat	pok		pok	pok								pok		
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				9 Laporan	875,000,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan peternakan.	Kelompok Tani di Kabupaten Boyolali	9 Laporan	1,900,000,000	Dinas Pertanian
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	2,224,100,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan peternakan.	Kelompok Tani di Kabupaten Boyolali	2 Laporan	2,582,500,000	Dinas Pertanian

3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas lahan pengendalian pemanfaatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha		Ha	20694 Ha	5,162,807,000						20694 Ha	3,985,000,000	
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas lahan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang dikendalikan (Ha)	Ha		Ha	20694 Ha	100,000,000						20694 Ha	100,000,000	
3	27	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang				2 Dokumen	100,000,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan peternakan.	Klompok Tani Di Kabupaten Boyolali	2 Dokumen	100,000,000	Dinas Pertanian

						Dikelola													
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Gedung BPP	Unit		Unit	1 Unit	5,062,807,000						1 Unit	3,885,000,000	
						Jumlah pembangunan irigasi air tanah dalam dan dangkal	Unit		Unit	5 Unit							5 Unit		
						Jumlah pembangunan/ rehabilitasi embung dalam meningkatkan suplesi air irigasi untuk pertanian	Unit		Unit	2 Unit							2 Unit		
						Jumlah Pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasi usahatani dalam meningkatkan suplesi air irigasi untuk pertanian (meter)	Meter		Meter	300 Meter							300 Meter		

						Jumlah pembangunan / rehabilitasi JUT untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara	Unit		Unit	3 Unit							3 Unit		
						Jumlah pembangun/ rehabilitasi dam parit dalam meningkatkan suplesi air irigasi untuk pertanian	Unit		Unit	2 Unit							2 Unit		
						Jumlah pembangun/	Unit		Unit	1 Unit						1 Unit		

						rehabilitasi long storage dalam meningkatkan suplesi air irigasi untuk pertanian													
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara				5 Unit	1,439,000,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan peternakan.	Kelompak Tani di Kabupaten Boyolali	5 Unit	700,000,000	Dinas Pertanian
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	218,500,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan peternakan.	Kelompak Tani di Kabupaten Boyolali	2 Unit	240,000,000	Dinas Pertanian
3	27	3	2.0	3	Pembangunan, Rehabilitasi	Jalan Usaha Tani yang				6 Unit	1,542,500,000	Kab. Boyolali,	Dana Transfe		Peningkatan	Kelompak	6 Unit	625,000,000	Dinas Perta

			2		dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara						Mojosongo, Kemiri	r Umum-Dana Alokasi Umum		produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan peternakan.	Tani di Kabupaten Boyolali			nian
3	27	3	2.02	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	1,831,807,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan peternakan.	Kelompak Tani di Kabupaten Boyolali	2 Unit	750,000,000	Dinas Pertanian
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	31,000,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan	Kelompak Tani di Kabupaten Boyolali	2 Unit	1,000,000,000	Dinas Pertanian

																peternakan.			
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana yang tertangani (Program kemiskinan)	persen		persen	100 persen	494,000,000						100 persen	734,000,000	
						Persentase luasan lahan terkena bencana yang tertangani (Program kemiskinan)	persen		persen	100 persen							100 persen		
						Persentase petani yang mendapatkan asuransi pertanian (Program Kemiskinan)	persen		persen	100 persen							100 persen		
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha	Ha		Ha	4833 Ha	494,000,000						4833 Ha	734,000,000	

						Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				2000 Ha	200,000,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan peternakan.	Kelompok tani di Kabupaten boyolali	2000 Ha	440,000,000	Dinas Pertanian
3	27	5	2.01	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran				4833 Ha	294,000,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Membangun Lingkun	Peningkatan produksi tanaman	Kelompok tani di Kabupaten boyol	4833 Ha	294,000,000	Dinas Pertanian

					Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							Umum	gan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	pangan, inovasi pertanian dan peternakan.	ali			
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Binaan Kelompok tani	Kelompok tani		Kelompok tani	8675 Kelompok tani	286,663,000						8675 Kelompok tani	180,800,000	
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Gapoktan penerima bantuan PUAP	Gapoktan		Gapoktan	197 Gapoktan	286,663,000						197 Gapoktan	180,800,000	
						Jumlah Gapoktan penerima bantuan PUAP yang didampingi	Gapoktan		Gapoktan	197 Gapoktan							197 Gapoktan		
						Jumlah kelompok	Poktan		Poktan	3 Pokta							3 Poktan		

						tani binaan yang mendapat bantuan bibit/alsintan /pupuk dalam pemanfaatan bantuan yang diterima.				n									
						Jumlah penguatan kelembagaan P3A/GP3A menjadi mandiri dan berperan aktif dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi	Gapoktan		Gapoktan	197 Gapoktan							197 Gapoktan		
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Unit	286,663,000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan peterna	Balai Penyuluh Pertanian dan Kelompoktani di Kabupaten Boyol	3 Unit	170,000,000	Dinas Pertanian

										kan.	ali			
TOTAL						24,434,327,000							27,442,756,000	

BAB V
PENUTUP

5.1. Penutup

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan tahapan strategis dalam rangkaian perencanaan dan disusun secara optimal dengan mensinergiskan antara perencanaan dan penganggaran. Rencana kerja disusun dengan memperhatikan isu strategis di bidang pertanian yang merupakan salah satu pilar pembangunan daerah. Penyusunan rencana kerja diharapkan mampu menjadi acuan penjabaran program dan kegiatan tahunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2024 memerlukan dukungan dari semua pihak guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Semoga Rencana Kerja ini dapat dijadikan pedoman bagi seluruh *stakeholders* yang berkepentingan, sehingga pembangunan pertanian sebagai salah satu pilar pembangunan daerah dapat semakin berkembang dan mewujudkan visi Kabupaten Boyolali.

U. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1. Latar Belakang 4
1.2. Landasan Hukum 6
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun 2022 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 17
2.3. Isu-Isu Penting dan Permasalahan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 62

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 71

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 71
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 74

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 76

4.1. Program dan Kegiatan 76

BAB V PENUTUP 89

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali Tahun 2022 10

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan..... 11

Tabel 2.3 Tantangan, Strategi dan Peluang Dinas 22

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten BoyolaliTahun 2024 27

Tabel 2.5 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali tahun 2024 62

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerntah Daerah (RKPD).

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal untuk melaksanakan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan salah satunya adalah Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan perencanaan tahunan dari Organisasi Perangkat daerah yang bersangkutan. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD yang merupakan perencanaan tahunan dari OPD yang bersangkutan, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal untuk melaksanakan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan RENJA adalah salah satunya. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan

Rancangan Renja OPD. Sesuai amanat tersebut, maka Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali tahun 2024. Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendan aan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 disusun dengan untuk tindak lanjut hasil evaluasi Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2022 dan prediksi/ proyeksi pelaksanaan Renja Tahun 2023.

Adapun Visi Misi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

VISI

BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI

Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas

Misi:

1. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan;
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya
3. **Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional**;
4. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing.

Penjelasan lebih rinci terkait dengan Misi ke-3 yaitu Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional adalah:

- Mempertahankan tradisi Boyolali kota susu, penghasil daging, pengembangan produksi perikanan darat, serta sektor peternakan lainnya adalah sesuatu yang prioritas.

- Boyolali lumbung pangan sebagai aplikasi dari konsep ketahanan pangan (*food security*) lokal dan nasional terus dipertahankan dan dikembangkan, dengan prinsip pertanian yang maju, lestari, berdaya saing internasional, dan berkontribusi penting bagi perekonomian bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan budaya untuk mensejahterakan masyarakat yang berperadaban.
- Meningkatkan kesejahteraan petani, **peternak, perikanan** darat termasuk sektor sejenis lainnya. Aplikasi good farming practices, fasilitasi kebutuhan modal, pengembangan kemitraan yang sehat, kredit pengembangan kelompok/perorangan, pendampingan sampai dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan serta memberi nilai lebih pada pasca produksi.

Dari penjelasan Misi ke-3 tersebut, dapat dirumuskan sasaran stategis pembangunan daerah Tahun 2021-2026 adalah peningkatan produksi susu, daging, perikanan dan komoditas ternak lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Siatem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Bupati Boyoiali Nomor 130 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyoiali;
g. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 050/01642/5.1/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang peternakan dan perikanan tahun 2024.

Tujuan Penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali tahun 2024;
2. Menyediakan dokumen evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan bidang peternakan dan perikanan tahun 2022 proyeksi tahun 2023;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2024

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, catatan penting yang perlu medapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Berisikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun 2022 dan Estimasi Capaian Renja Tahun 2023

Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Boyolali merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Boyolali. Tercapai tidaknya pelaksanaan Sub Kegiatan, kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Boyolali ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Boyolali selama tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran serta evaluasi akuntabilitas keuangan Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Boyolali pada tahun 2022. Renja Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Boyolali tahun 2024 pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali Tahun 2022 dan perkiraan pencapaian target renstra tahun 2023.

Berikut Rekapituasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali tahun 2021-2022 dan perkiraan pencapaian target renstra tahun 2023.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali Tahun 2022

No	Sasaran/ Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Target 2022	Realisasi Tahun 2021	Realisasi 2022	Realisasi Nasional
Sasaran 1. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian						
1	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	4,00	3,00	3,45	1,29	6,24
Sasaran 2. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian						
2	Persentase pertumbuhan PDRB Subsektor perikanan	5,00	2,00	3,45	1,29	2,79
Sasaran 3. Meningkatnya kualitas susu						
3	Jumlah Perusahaan yang menerima produk susu boyolali	5	5	5	5	0

(Sumber : SAKIP Disnakkan, Tahun 2023)

Tabel 2.2.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan

Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidaya Ikan Boyolali	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	922.630.000	909.975.240	99
2			Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	120.560.000	120.188.300	99
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,Rawa, dan Genagan Air Lainya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Boyolali	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	127.500.000	127.158.780	99
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Boyolali	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis	1.140.000.000	1.135.950.664	99

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
5			Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	80.000.000	100
6			Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	100.000.000	99.475.750	99
7		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Boyolali	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	124.846.000	122.495.500	98
8			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	950.000.000	896.949.780	94
9		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Boyolali	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	20.000.000	19.971.250	99
10			Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	66.000.000	61.596.000	93
11	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Komsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	48.235.050	96

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		Kabupaten Kota Boyolali				
12		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Boyolali	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	250.000.000	232.644.330	93
13	Program Penunjang Uerusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Boyolali	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	57.540.000	55.760.600	97
14			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kator dan Bangunan Lainya	100.000.000	99.500.936	99
15			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	40.000.000	40.000.000	100
16		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Boyolali	Punyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	7.591.974.000	7.217.010.861	95
17			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	615.900.000	615.900.000	100
18		Administrasi Umum Perangkat Daerah Boyolali	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.533.000	6.532.300	99

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
19			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.000.000	73.943.943	99
20			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.675.300	7.668.600	99
21			Fasilitas Kunjungan Tamu	65.265.000	65.111.000	99
22			Penyediaan Bahan/Material	28.774.700	28.774.700	99
23			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.293.000	199.178.668	88
24			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	46.500.000	46.500.000	100
25		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Boyolali	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.610.000	2.610.000	100
26			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	915.000	436.700	48
27			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.143.000	164.363.186	86
28	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer Boyolali	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	25.000.000	21.980.400	88
29		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	385.000.000	381.759.975	99

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Boyolali				
30		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Boyolali	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	70.000.000	67.000.000	96
31	Program Penyediaan dan Pengambangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Boyolali	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	40.000.000	40.000.000	100
32		Pembangunan Prasarana Pertanian Boyolali	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	2.775.608.000	2.632.904.875	95
33		Pembangunan Prasarana Pertanian Boyolali	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	815.000.000	814.529.000	99

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
34	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Boyolali	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	10.000.000	9.975.000	99
Jumlah				**17.126.267.000**	**16.446.081.388**	**96.03**

(Sumber : SAKIP Disnakkan, Tahun 2022)

Berdasarkan pada Laporan SAKIP Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Boyolali Tahun 2022, Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 mencapai **Rp. 16.446.081.388,00** atau **96,03%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 17.126.267.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 680.185.388,00 atau 3,97%.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Renja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Sub-sektor Peternakan :
   - Infrastruktur informasi dan teknologi (inovasi) harus ada di daerah, artinya pemerintah atau pelaku usaha menyediakan jaringan internet sampai ke desa.
   - Peternakan harus dibangun berdasarkan klasterisasi atau spasialisasi sebuah wilayah. "Baik feed lot [penggemukan] dan pembibitan, masing-masing punya ciri khas oleh sebab itu perlu dipisah supaya efisien kalau tumpang tindih pasti salah satu kalah saing".
   - Peternakan harus menggunakan teknologi finansial sebab syarat orang lepas dari kemiskinan ialah dengan memanfatkan teknologi dan finansial sebagai inovasi baru.

- Memanfaatkan jejaring bisnis lewat sistem aplikasi. Menurutnya, lewat jejaring aplikasi, sistem transportasi, logistik, komunikasi, semuanya akan lebih mudah.
- Kontrol Higienisme media peternakan, hama dan penyakit ternak, peningkatan mutu pakan ternak dan penguatan menejemen ternak (kelompok).
- Kontrol mutu baku pengolahan produk peternakan, supaya memiliki daya saing yang cukup baik;
- Menejemen pemasaran ternak maupun hasil produksi ternak yang baik.
- Meningkatkan sarana prasarana peternakan.
- Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait.
- Implementasi tata niaga sektor peternakan yang berkeadilan.

2. Sub-sektor Perikanan :
   - Meningkatkan penerapan teknologi perikanan yang sesuai standar.
   - Peningkatan penerapan teknologi perikanan yang sesuai standar.
   - Penerapan eco-aquaculture.
   - Penerapan CPIB dan CBIB.
   - Meningkatkan mutu ikan hasil tangkapan / budidaya dan produk olahannya.
   - Penerapan *Good Manufacturing Practice* dan *Sanitation Standard Operating Procedure* dalam pengolahan produk perikanan.
   - Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan pelaku usahaperikanan.
   - Peningkatan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan pelaku usahaperikanan.
   - Pemberdayaan KUB, POKDAKAN, dan POKLAHSAR yang ada.
   - Meningkatkan sarana prasarana perikanan.
   - Peningkatan sarana prasarana perikanan, baik sarana budidaya ikan maupun saranasarana penangkapan ikan.
   - Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait.
   - Implementasi tata niaga sektor kelautan dan perikanan yang berkeadilan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyoiali dengan tugas yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang pertanian, sub peternakan dan bidang kelautan/ perikanan sebagai berikut:

Tugas :

- Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang pertanian, Sub Peternakan dan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan Bidang Pertanian, Sub Peternakan dan Bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanian, Sub Peternakan dan Bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan administrasi Dinas Bidang Pertanian, Sub Peternakan dan Bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plant*.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, serta perkiraan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali dalam menjalankan fungsinya sebagai berikut:

Sub-sektor Peternakan :

1. Meskipun terbilang banyak pelaku usaha di bidang peternakan sapi, nyatanya sebagian besar pelaku usaha tersebut adalah peternak tradisional dengan jumlah kepemilikan sapi yang masih sangat sedikit. Ternak sapi sering dipelihara sebagai sumber tenaga kerja untuk mengolah lahan, tabungan untuk acara hajat tertentu, dan bukan untuk sapi pedaging, serta banyak pelaku atau pemilik sapi/hewan ternak hanya mengembangkan

ternak seadanya saja. Kondisi tersebut menyebabkan hasil peternakan yang didapatkan tidak optimal. Cara perawatan yang digunakan masih tradisional sehingga pertumbuhan sapi cenderung lambat. Keuntungan yang dihasilkan pun tidak maksimal.

2. Masih sedikit sumber daya manusia yang berorientasi untuk menghasilkan ternak sesuai permintaan pasar. Memiliki pengetahuan yang mumpuni dan benar-benar dibutuhkan dalam dunia peternakan Akibatnya, masih sedikit kelompok tani ternak sapi pedaging ataupun sapi perah yang bisa mengembangkan sistem dan usaha agribisnis berbasis sapi yang baik.
3. Pakan menjadi kebutuhan utama yang sering mengalami masalah. Hingga saat ini sebagian besar peternak masih bergantung pada pakan hijauan yang semusim dan pemanfaatan limbah atau hasil sampingan dari tanaman pertanian. Peternak di Indonesia bagian timur lebih sering menggunakan limbah hasil pertanian karena di daerah tersebut cukup sulit mendapatkan pakan hijauan. Dalam hal inilah diperlukan banyak sarjana muda yang menguasai nutrisi dan teknologi pakan ternak agar dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang berguna untuk pengganti atau tambahan pakan yang bergizi bagi ternak, sehingga ternak dapat tumbuh dengan sehat dan sesuai keinginan.
4. Investasi pada pemotongan dan pengolahan masih terkendala belum optimalnya fungsi Rumah Potong Hewan sebagai unit yang sepenuhnya memenuhi pelayanan public. Selama ini RPH yang ada masih berorientasi kepada pendapatan di daerah, sehingga investasi pemotongan dan pengolahan yang menuntut kualitas daging tertentu tidak tercapai. Kendala lainnya pada aspek konsumsi, dimana konsumen lebih menyukai daging segar yang tidak ditiriskan dan tidak dibekukan, hal ini terlihat dari angka retensi indeks daging sebesar 80% tidak dapat diolah lebih lanjut.
5. Masalah lainnya adalah perilaku peternak yang saat ini rata-tata berusia 40-60 tahun. Hal ini menjadi salah satu yang membuat produktifitas dari para peternak di Indonesia sangat rendah.
6. Hama atau penyakit yang menyerang hewan, kurangnya pengetahuan para peternak dalam merawat hewan.
7. Kekurangan modal dalam merawat hewan yang diternakkan.

8. Jumlah ketersediaan padang penggembalaan dan lokasi kering cukup terbatas. Peternak kesulitan mencari lokasi yang bagus untuk digunakan beternak karena sebagian besar sudah mulai dialihfungsikan.

Sub-sektor Perikanan :

1. Masih rendahnya produksi perikanan.
2. Masih kurangnya ketersediaan dan kualitas benih ikan.
3. Masih rendahnya mutu, keamanan dan daya saing produk olahan perikanan.
4. Masih kurangnya sinkronisasi antara produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
5. Masih rendahnya kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan pelaku usaha perikanan.
6. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha perikanan untuk pengurusan legalitas dan ijin usaha.
7. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan.
8. Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman kebijakan di bidang perikanan.
9. Masih kurangnya koordinasi antara Dinas perikanan dengan instansi lain yang terkait
10. Kurangnya kapasitas sarana dan prasarana umum rumah tangga dinas.
11. Kurangnya ketersediaan data dan informasi data serta kurangnya akurasi data di bidang kelautan dan perikanan.

Berdasarkan evaluasi hasil pencapaian Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali tahun 2022 Secara umum capaian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali masuk dalam KATEGORI TINGGI (77%), Berikut simpulan capaian kinerja per sasaran dan perkiraan capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan recording pelaksanaan capaian kinerja tahun 2022:

a. Sasaran “Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian” capaian kinerja 54% dalam KATEGORI RENDAH meliputi 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (capaian 43%) dan Persentase pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan (65%).
b. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Susu” capaian kinerja 100% dalam KATEGORI SANGAT TINGGI meliputi 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Jumlah Perusahaan Yang Menerima Produk Susu Boyolali (capaian 100%).

c. dan proyeksi pencapaian Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali tahun 2023 adalah sebesar 80%, dengan didukung capaian Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian capaian kinerja 60% (Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dengan perkiraan capaian 55% (meningkat 12% dari tahun 2022) dan Persentase pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan dengan perkiraan 65% (tetap)) dan capaian Meningkatnya Kualitas Susu" capaian kinerja 100% (tetap).
d. Perlu kami sampaiakan bahwa dari 3 capaian kinerja tersebut, untuk capaian point a, data didapat dari BPS Kabupaten Boyolali per Bulan Maret berjalan, dan data pada point b, merupakan luncuran data primer dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali per bulan Februari tahun berjalan melalui bidang Uspet-Kesmavet.

2.3. ISU-ISU PENTING DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan yang terkait bidang peternakan dan perikanan serta memperhatikan visi-misi kepala daerah, maka dapat dirumuskan isu-su strategis dan permasalahan utama dalam penyelenggaraan tugas/ fungsi perangkat daerah yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kontribusi sub-sektor peternakan terhadap perekonomian.
2. Belum optimalnya kontribusi sub-sektor perikanan terhadap perekonomian.

Kebijakan penting yang ditempuh untuk mengatasi kedua faktor tersebut, antara lain:

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme bidang perencanaan dan teknis peternakan/ perikanan, sehingga dapat dihasilkan aparatur perencanaan yang kreatif dan inovatif;
2. Menerapkan penempatan/ perekrutan aparatur beserta perangkatnya disesuaikan dengan jumlah kegiatan yang ada di SKPD. Hal ini berdampak pada ketepatan dan keakuratan perencanaan, mengingat aparatur yang dimiliki lebih responsif terhadap perkembangan kebijakan provinsi dan nasional;
3. Pengajuan anggaran dengan didukung dengan pengalokasian anggaran dan pengunaan anggaran secara transparan dan akuntabel;
4. Mengembangkan TI/ GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam

mendukung menejemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan;

5. Optimalisasi perlengkapan dan peralatan yang memadai, serta penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

Dapat disimpulkan, bahwa isu/ permasalahan tersebut diatas akan dioleh menjadi strategi dan peluang Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali sebagaimana pada tabel 2.4, berikut.

Tabel 2.3

Tantangan, Strategi dan Peluang Dinas

No	Tantangan	Strategi	Peluang
A	Sub Sektor Peternakan		
1	Masih rendahnya kualitas SDM petani ternak dan ikan sehingga dalam mengelola usaha di bidang peternakan maupun perikanan belum bisa optimal	Mempertahankan dan meningkatkan pelayanan thd konsumen	Semasih ada aktivitas kemanusiaan, pasti butuh produk peternakan
2	Daya beli thd produk peternakan menurun	mempertahankan loyalitas thd pelangggan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
3	Adanya kompetitor peternak2 baru (alih profesi)	Mejaga kualitas dan kontinuitas produk peternakan	Kesadaran masyarakat terhadap makanan yang sehat dan begizi /ASUH
4	Gangguan supply chain akibat terganggunya distribusi DOC, pakan dan obat-obatan serta kegiatan operasional	Memperbaiki dan meningkatkan kemampuan manajerial melalui evaluasi	Peningkatan pembukaan usaha DOC, Obat-obatan, dll. Memahami perubahan perilaku consumen.
5	Penurunan produksi dan income peternak	Melakukan penataan terhadap organisasi, terutama pada pemasaran	Permintaan akan produk peternakan yang semakin meningkat, Menyesuaikan

No	Tantangan	Strategi	Peluang
		untuk menghadapi persaingan yg semakin tingg	strategi customer relations dan kanal penjualan
6	Menurunnya daya beli lonsumen terhadap produksi ternak,dll	Melaksanakan even-even kemasyarakatan, operasi pasar, dll	Meningkatkan pemasaran produk melalui kegiatan promisi serta meningktakan kapasitas produksi
B	Sub Sektor Perikanan		
	Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan ekonomi makro (PDB, pengangguran, dan ekspor-impor) dan lesunya ekonomi mikro (turunnya pendapatan, konsumsi rumah tangga, serta terhentinya berbagai bidang usaha, termasuk akuakultur	Akselerasi peningkatan produksi akuakultur melalui intensifikasi dan ektensifikasi	Penguatan kelembagaan pembudidaya ikan, Pemberian stimulus usaha, Fasilitasi skema pembiayaan yang murah, Sertifikasi lahan, Asuransi usaha, Pendampingan teknis, Pengaturan akses perizinan dan investasi usaha
	Pembudidaya skala kecil rentan tertular Covid-19 saat berbudidaya ikan di ruang terbuka dan beresiko terhenti usahanya karena hasil panen tidak terserap, beban biaya tambahan pemeliharaan ikan, minimnya akses permodalan, dan terbatasnya ketersediaan input produksi.	Pengembangan kawasan kluster usaha budidaya ikan terintegrasi dan berkelanjutan	Fasilitasi skema pembiayaan yang murah, Sertifikasi lahan, Asuransi usaha, Pendampingan teknis, Pengaturan akses perizinan dan investasi usaha
	Terhentinya aktivitas sosial ekonomi dan terhambatnya distribusi sarana dan prasarana menyebabkan gangguan pada semua rantai pasok industri	Pendampingan teknis, Peningkatan kerjasama dan sinergisitas kebijakan,	Penguatan kelembagaan pembudidaya ikan, Pemberian stimulus usaha

No	Tantangan	Strategi	Peluang
	akuakultur (produksi, pengolahan, pemasaran), baik domestik maupun ekspor	program, anggaran dan data perikanan budidaya	
	Kelesuan ekonomi dan penurunan pendapatan menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat, sehingga berpengaruh pada turunnya permintaan terhadap produk perikanan	Pengembangan komoditas ekonomis penting untuk konsumsi domestik dan ekspor	Even-even gemarikan, lomba masak, operasi pasar, Harmonisasi regulasi dan penyederhanaan perizinan di pusat dan daerah
	Harga pakan ikan naik 1% - 3% dan harga pakan udang naik 3% - 3,5%, yang menyebabkan turunnya permintaan pakan ikan. Akibatnya, terjadi pengurangan tenaga kerja pada beberapa pabrik pakan	Pengembangan pakan ikan mandiri	Akselerasi peningkatan produksi akuakultur melalui intensifikasi dan ektensifikasi, Pengembangan komoditas ekonomis penting untuk konsumsi domestik dan ekspor

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi Bupati/ Wakil Bupati Boyolali, yaitu sebagai berikut:

"BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI"

Penjelasan dari Visi Kabupaten Boyolali adalah Program inti melanjutkan Bupati sebelumnya/ meneruskan program Boyolali Pro Investasi, memajukan dan menyejahterakan masyarakat Boyolali.Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud bahwa tercipta kondisi masyarakat di Kabupaten yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil. Artinya masyarakat Kabupaten Boyolali dapat terpenuhi sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, memiliki usia harapan

hidup yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki pendapatan perkapita yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Selain terpenuhinya kebutuhan secara materiil, masyarakat merasa aman dalam menjlani kehidupannya, terhindar dari ancaman kemanan dan ketertiban masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung maksud bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Boyolali yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah kabupaten. Ditandai dengan menurunnya tingkat kesenjangan kelompok pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang merata dan menurunnya kesenjangan antar wilayah.

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Boyolali, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan.
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.
3. **Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional.**
4. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali akan menjalankan Misi ke-3 dari Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu **Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional.** Arti penerapan misi ini, diterjemahkan Dinas yaitu mempertahankan tradisi Boyolali kota susu, penghasil daging, pengembangan produksi perikanan darat, serta sektor peternakan lainnya adalah sesuatu yang prioritas. Boyolali lumbung pangan sebagai aplikasi dari konsep ketahanan pangan (*food security*) lokal dan nasional terus dipertahankan dan dikembangkan, dengan prinsip pertanian yang maju, lestari, budaya saing internasional, dan berkontribusi penting bagi perekonomian bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan budaya untuk mensejahterakan masyarakat yang berperadaban. Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, perikanan darat termasuk sektor sejenis lainnya. Aplikasi good farming practices, fasilitasi kebutuhan modal, pengembangan kemitraan yang sehat, kredit pengembangan kelompok/perorangan, pendampingan sampai dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan serta memberi nilai lebih pada pasca produksi.

Upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (demand side) maupun sisi penawaran (supply side); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (decent job) dan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan; percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, jasa pariwisata, serta usaha pendukung secara berkelanjutan.

Penjabaran prioritas pembangunan daerah terhadap sasaran pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali dalam program pembangunannya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kesejahteraan petani		**Nilai Tukar Petani (NTP)**				**106,68**	**108,12**		
	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	**Persentse Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan**				**0,27**	**4,00**		
		Persentase pembudi daya ikan kecil yang diberdayakan	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase pembudi daya ikan kecil yang diberdayakan**	**persen**	**5**	**100,00**	**474.940.000**	
		Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang berhasil didampingi	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					474.940.000	
		Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitas bantuan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan	Unit		12,00	474.940.000	Lokasi UPT BBI Boyolali (Tlatar dan Metuk)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		sarana prasarana budidaya * (Indikator LPPD Output)		dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
		Persentase peningkatan ketersediaan benih ikan	**Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan ketersediaan benih ikan**	**persen**	**152.390.026 ekor**	**6,00**	**1.017.500.000**	
		Jumlah produksi benih ikan di BBI* (Indikator LPPD Output)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan di BBI* (Indikator LPPD Output)	ekor		1.900.500	1.017.500.000	Benih yang diproduksi oleh UPT BBI Boyolali
		Jumlah produksi benih ikan di BBI* (Indikator LPPD Output)	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2,00	2,00	542.560.000	Benih yang diproduksi oleh UPT BBI Boyolali

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitas bantuan sarana prasarana budidaya * (Indikator LPPD Output)	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	5,00	5,00	474.940.000	Jumlah sarpras budidaya ikan yang di hibahkan kepada kelompok pembudidaya ikan
		Persentase Kelompok Pembudidaya Perikanan yang Menggunakan Metode Budidaya yang Baik	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Kelompok Pembudidaya Perikanan yang Menggunakan Metode Budidaya yang Baik**	**Persen**		**60,00**	**361.706.000**	
		Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang terlatih	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang terlatih	Kelompok		8,00	361.706.000	
		Jumlah kelompok Pembudidaya Ikan yang meningkat ketrampilannya	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok		8,00	361.706.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Produksi Ikan Budidaya	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi Ikan Budidaya**	**Ekor**	**34093**	**35.174,00**		
		Persentase kelompok nelayan yang menerapkan metode penangkapan ikan yang baik dan benar	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase kelompok nelayan yang menerapkan metode penangkapan ikan yang baik dan benar**	**Persen**	**1 kel**	**100,00**	**30.000.000**	
		Jumlah penebaran benih ikan pada perairan umum	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penebaran benih ikan pada perairan umum	Benih		300000 benih	30.000.000	
		Jumlah bantuan prasarana usaha perikanan tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan	Unit	10	100 Unit	30.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tangkap yang Tersedia					
		Persentase nelayan kecil yang diberdayakan	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase nelayan kecil yang diberdayakan**	**Persen**		**100,00**	**0**	
		Jumlah nelayan yang berhasil didampingi	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang berhasil didampingi	orang		150 orang	-	
		Jumlah nelayan yang berhasil didampingi	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat	Orang	100	100 orang	-	
		Jumlah kelompok yang difasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan asuransi usaha perikanan (klp)	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	0	5,00	0	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Produksi Ikan Tangkap	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi Ikan Tangkap**	**ekor**	**2178**	**2.369,00**		
		Persentase promosi konsumsi ikan yang berhasil dijalankan	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase promosi konsumsi ikan yang berhasil dijalankan**	**Persen**	**0**	**100,00**	**-**	
		Jumlah kelompok yang meningkat kualitas dan nilai tambah produknya	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok yang meningkat kualitas dan nilai tambah produknya	kelompok		1,00	-	
		Jumlah kelompok yang mendapatkan bimbingan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan (klp)	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan	Unit Usaha	1	1,00	-	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko					
		Pengolahan ikan	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi pengolahan ikan**	**ton**	**79,86**	**81,03**	**0**	
		Jumlah lokasi yang meningkat ketersediaan bahan bakunya	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lokasi yang meningkat ketersediaan bahan bakunya	lokasi		2,00	-	
		Jumlah kampanye Gemarikan dan pengadaan paket gemarikan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1	Ton	5	1,00	-	Penigkatan bahan baku ikan dalam industri umkm pengolahan ikan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
		Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitas bantuan sarana prasarana pengolahan (klp)	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	1	1,00	-	Kelompok yang mendapatkan bantuan sarpras pengolahan ikan
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**Persen**	**52 kasus**	**15**	**494.846.000**	
		Jumlah ternak yang diobati dan divaksin	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang diobati dan divaksin	ekor		10.000,00	370.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah ternak/hewan yang diobati	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	12		250.000.000	Pembuatan laporan bulanan pengobatan hewan ternak
		Jumlah ternak yang diganti rugi (bansos)	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	1	2 ekor	20.000.000	Pembuatan laporan tahunan
		Jumlah ternak/hewan yang divaksin	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	12	5000 ekor	100.000.000	Pembuatan laporan bulanan vaksinasi hewan ternak
		Jumlah penerbitan dokumen SKKH	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penerbitan dokumen SKKH	Dokumen		300 dokumen	-	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah hewan/ ternak yang diperiksa (ekor)	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	11000 ekor	0	Laporan bulanan
		Jumlah sampel yang diperiksa	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang diperiksa	sampel		200 sampel	124.846.000	
		Pemeriksaan sampel penyakit hewan	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	12	200 sampel	124.846.000	Laporan Bulanan
	Meningkatnya kualitas susu	**Jumlah perusahaan yang menerima produk susu boyolali**				**5**	**5,00**		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase susu yang memenuhi standar mutu	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase susu yang memenuhi standar mutu**	**Persen**	**58**	**73,00**	**-**	
		jumlah produk susu yang memenuhi standar mutu (liter)	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	jumlah produk susu yang memenuhi standar mutu (liter)	liter		36.293.366,93		
		Jumlah unit usaha	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan				**Jumlah unit usaha hewan yang didampingi**
		Jumlah festival susu							
Meningkatnya kesejahteraan petani		**Nilai Tukar Petani (NTP)**				**106,68**	**108,12**		
	Meningkatnya pertumbuhan	**Persentse Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**				**2,01**	**3,50**		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PDRB sektor pertanian								
		Persentase peningkatan ketersediaan prasarana peternakan	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**				**15,00**	**404.266.000**	
		Jumlah embung peternakan yang dibangun/ direhab	Pembangunan Prasarana Pertanian				2,00	-	
		Jumlah RPH yang dibangun/ direhab		Jumlah RPH yang dibangun/ direhab	unit		1,00	250.000.000	Jumlah RPH yg ada di Boyolali
		Jumlah embung peternakan yang dibangun/ direhab					2,00	250.000.000	
		Jumlah sapi yang dipotong (ekor)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun,	Unit	0	1 Unit		Jumlah RPH yg ada di Boyolali

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Direhabilitasi dan Dipelihara					
		Jumlah Kelompok Ternak yang mendapatkan fasilitasi produksi ternak	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Ternak yang mendapatkan fasilitasi produksi ternak	Kelompok		20,00	154.266.000	
		Jumlah kelompok ternak yang melaksanakan cara budidaya ternak yang baik	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan		12,00	154.266.000	**Laporan Bulanan**
		Persentase peningkatan ketersediaan sarana peternakan	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase peningkatan ketersediaan sarana peternakan**	**Persen**		**50,00**	**245.000.000**	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah kelahiran ternak sapi perah dan potong	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kelahiran ternak sapi perah dan potong	ekor		35.000,00		
		Jumlah ternak sapi yang di IB/PKB dan ATR	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen			0	Jumlah kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
		Jumlah kelompok ternak yang produksi dan kualitas pakan ternak meningkat	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok ternak yang produksi dan kualitas pakan ternak meningkat	Kelompok		10,00	70.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan bantuan peralatan pengolahan pakan ternak dan bimbingan teknis peningkatan kualitas pakan ternak	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan		10,00	70.000.000	Kelompok yang mendapatkan bantuan bimtek pembuatan pakan ternak
		Jumlah kelompok ternak yang meningkat luasan hijauan pakan ternak dan kualitas bibit ternak	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok ternak yang meningkat luasan hijauan pakan ternak dan kualitas bibit ternak	Kelompok		15,00	175.000.000	
		Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan bantuan bibit ternak	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor			125.000.000	Jumlah bibit ternak yang dihibahkan kepada peternak
		Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan bantuan bibit, pupuk dan bimbingan teknis peningkatan kualitas HPT	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton			50.000.000,00	Jumlah hijauan pakan ternak yang dihibahkan kepada peternak

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase sampel obat hewan yang diperiksa	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase sampel obat hewan yang diperiksa**	**Persen**	**40 sampel**	**100**		
		Jumlah sampel obat hewan yang diperiksa	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah sampel obat hewan yang diperiksa	sampel		40 sampel		
		Jumlah sampel obat hewan yang diperiksa	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	1	40 sampel	-	
		Produksi susu	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produksi susu**	**Liter**	**49.988.343**	**51.200.000**		
				Produksi daging	**Kg**	**14.081.221**	**14.361.221**		
				Produksi telur	**Butir**	**27.899.559**	**28.011.000**		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Populasi ternak (sapi potong)	**ekor**	**106.765**	**111.100**		
				Populasi ternak (sapi perah)	**ekor**	**94.143**	**97.965**		
				Populasi ternak (kambing dan domba)	**ekor**	**159.718**	**172.885**		
		Persentase produk hasil peternakan yang ditangani sesuai standar ASUH	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase produk hasil peternakan yang ditangani sesuai standar ASUH**	**Persen**	**12 unit usaha**	**60**	**86.000.000**	
		Jumlah UPH yang menerapkan Pra NKV dan peningkatan jaminan mutu produk peternakan di UPH/PU/peternak/KTT/Gapoktan/Asosiasi	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah UPH yang menerapkan Pra NKV dan peningkatan jaminan mutu produk peternakan di UPH/PU/peternak/KTT/ Gapoktan/Asosiasi	Unit		2 UPH	86.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah UPH yang mendapatkan fasilitasi/pelatihan untuk peningkatan jaminan mutu produk peternakan	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan		2 Laporan	66.000.000,00	
		Jumlah pasar tradisional/UPH yang dimonitor peredaran produk hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan		10 Laporan	0	
		Jumlah UPH/peternak yang di Audit Pra NKV	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	Laporan		2 Laporan	-	
		Jumlah sample produk hewan yang diuji	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen		100 dokumen	20.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah RPH/ TPH yang memenuhi kesejahteraan hewan dalam pemotongan hewan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah RPH/ TPH yang memenuhi kesejahteraan hewan dalam pemotongan hewan	unit		25 RPH/ TPH kurban		
		Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, sosialisasi pemotongan hewan di RPH dan pemotongan hewan kurban	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Laporan		5 Laporan	0	
		Persentase usaha peternakan yang mempunyai izin usaha	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase usaha peternakan yang mempunyai izin usaha**	**Persen**		**30,00**	**10.000.000**	
		Jumlah PU yang mendapatkan izin usaha bidang peternakan	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah PU yang mendapatkan izin usaha bidang peternakan	Unit		2 PU	10.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah sampel pengujian mutu pakan	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Laporan		2 sampel	-	Unit usaha peternakan yang diawasi
		Jumlah peternak yang diawasi pelaksanaan proses mendapatkan izin Usaha Fasilitasi Pemeliharaan Hewan	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	Laporan		5 peternak	-	Unit usaha pemeliharaan hewan yang diawasi
		Jumlah sampel pengujian baku mutu IPAL RPH	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	Laporan		1 Laporan	10.000.000	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik		**Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**				**763**	**833,00**		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Disnakkan**				**80,91**	**82,50**		
		Persentase penunjang Urusan Pemerintahan yang sesuai standar				**100**	**100,00**	**7.760.818.000**	
		Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tercapai target	kegiatan		25	-	Sesuai jumlah subkegiatan yg berkotribusi untuk pencapaian target kegiatan
		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2	-	Renja, Renja Perub

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		1	-	RKA
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		1	-	Perub RKA
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1	-	DPA
		Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen		1	-	Perub DPA

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					
		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		15	-	- LKJIP - LPPD - LKPJ - SPIP - E-laporint (12)
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4	-	- Monev 4 Triwulan
		Pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan PTT	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang tercapai sesuai target	kegiatan		100,00	7.260.688.000	Sesuai jumlah subkegiatan yg berkotribusi untuk

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									pencapaian target kegiatan
		Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		100,00	6.710.788.000	disesuaikan jumlah ASN
		Pembayaran honor PTT	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		25,00	549.900.000	13 dokumen (SPJ THL per bulan + THR)
		Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12,00	-	12 dokumen (verifikasi keuangan)
		Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	Dokumen		12,00	-	12 dokumen (dokumen pembukuan skuntansi)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan				1 laporan
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen				1 dokumen (jika tidak menjadi obyek pemeriksaan maka membuat laporan nihil)
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan		18,00	-	- 12 lap bulanan - 4 lap triwulan - 2 semesteran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		2,00	-	- 1 dokumen (semester 1)
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	kegiatan				Sesuai jumlah subkegiatan yg berkotribusi untuk pencapaian target kegiatan
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan				3 Laporan (2 laporan rekon barang per semester dan 1 laporan persediaan akhir tahun)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenagan Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	kegiatan		12		Sesuai jumlah subkegiatan yg berkotribusi untuk pencapaian target kegiatan
		Jumlah target retribusi daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen		582.124.000	-	2 Dokumen (Potensi pendapatan murni dan perubahan) khusus OPD pengelola pendapatan
		Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen		12	-	12 dokumen (lap bulanan)
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Sesuai jumlah subkegiatan yg berkotribusi untuk pencapaian target kegiatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen				12 dokumen bulanan dan 1 dokumen laporan tahunan
		Penyediaan sarana dan prasarana administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang tercapai sesuai target	kegiatan		100,00	167.265.000	Sesuai jumlah subkegiatan yg berkotribusi untuk pencapaian target kegiatan
		Pengadaan alat listrik dan elektronik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		100,00	3.000.000	2 paket (laporan pengadaan per semester, jika sudah selesai di laksanakan salah satu semester, maka semester lainnya dibuat laporan nihil)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		100,00	-	2 paket (laporan pengadaan per semester, jika sudah selesai di laksanakan salah satu semester, maka semester lainnya dibuat laporan nihil)
		Pengadaan peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		100,00	3.000.000	2 paket (laporan pengadaan per semester, jika sudah selesai di laksanakan salah satu semester, maka semester lainnya dibuat laporan nihil)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengadaan bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket				2 paket (laporan pengadaan per semester, jika sudah selesai di laksanakan salah satu semester, maka semester lainnya dibuat laporan nihil)
		Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		100,00	30.000.000	2 paket (laporan pengadaan per semester, jika sudah selesai di laksanakan salah satu semester, maka semester lainnya dibuat laporan nihil)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengadaan alat tulis kantor	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		100,00	25.000.000	2 paket (laporan pengadaan per semester, jika sudah selesai di laksanakan salah satu semester, maka semester lainnya dibuat laporan nihil)
		Pengadaan minum tamu dan pegawai	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		100,00	6.265.000	2 laporan (laporan pengadaan per semester, jika sudah selesai di laksanakan salah satu semester, maka semester lainnya dibuat laporan nihil)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan BBM dan perjalanan dinas	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		100,00	100.000.000	2 laporan (laporan pengadaan per semester, jika sudah selesai di laksanakan salah satu semester, maka semester lainnya dibuat laporan nihil)
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen				12 dokumen (dokumen dibuat per bulan) arsip hard copy
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen				12 dokumen (dokumen dibuat per bulan) arsip soft copy

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercapai sesuai target	kegiatan		1,00	170.325.000	Sesuai jumlah subkegiatan yg berkontribusi untuk pencapaian target kegiatan
		Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		100,00	2.610.000	12 Laporan
		Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		100,00	166.800.000	12 Laporan
		Jasa administrasi keuangan selama 12 bulan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		100,00	915.000	OPD yang akan mencantumkan, berkoordinasi dengan BP3D

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjnag urusan pemerintahan daerah yang tercapai sesuai target	kegiatan		100,00	162.540.000	Sesuai jumlah subkegiatan yg berkotribusi untuk pencapaian target kegiatan
		Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		100,00	42.540.000	Berdasarkan jumlah mobil dan motor dinasjabatan/mobil operasional lapangan yang dimiliki OPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, *Sub Kegiatan* (Renstra)	Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai kepmen 050-5889)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Sesuai Kepmen 050-5889)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Dasar Perhitungan Penetapan Target
							Renstra OPD Tahun 2024		
							Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		100,00	20.000.000	Sesuai kepemilikan OPD (seluruh peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki OPD, apabila memerlukan pemeliharaan, menggunakan sub kegiatan ini, termasuk pemeliharaan mebel)
		Jasa perbaikan gedung kantor dan bangunan lainnya selama 12 bulan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		100,00	100.000.000	Sesuai Kebutuhan OPD
Rencana Jumlah Anggaran								**10.885.076.000**	

(Sumber : Rancangan Awal RKPD Disnakkan Kab. Boyolali, Tahun 2023)

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam menyusun Program, Kegiatan, Sub kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali senantiasa membuka diri terhadap saran dan masukan dari para *stekholder* terkait pembangunan Sub sektor peternakan dan perikanan, hal ini dipandang sangat penting dilakukan untuk memperoleh Program, Kegiatan, Sub kegiatan yang berkualitas serta tepat sasaran.

Dalam merealisasikan hal tersebut tentunya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali selalu berpegangan pada peraturan yang berlaku, dalam aturan yang ada terdapat beberapa mekanisme penyerapan Usulan dan masukan Program, Kegiatan, Sub kegiatan diantaranya yaitu usulan langsung oleh masyarakat dengan cara berjenjang melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat terendah sampai tertinggi, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mekanisme penyerapan aspirasi langsung oleh anggota DPRD (Reses DPRD) maupun usulan-usulan *Button Up* lainya seperti permohonan dan Proposal langsung oleh Kelompok Binaan.

Selain itu Dinas Perikan juga secara aktif melakukan kordinasi kepada instansi lain terkait pembangunan Sub sektor peternakan dan perikanan untuk memperoleh informasi aktual yang relefan terhadap pembangunan peternakan dan perikanan Kabupaten Boyolali.

Hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini untuk Usulan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dari Masyarakat Tahun 2024 pada tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.5

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali tahun 2024

No	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Vol	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**				
	Kegiatan				
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
	Sub Kegiatan				

No	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Vol	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Boyolali	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitas bantuan sarana prasarana budidaya * (Indikator LPPD Output)	5 Kelp	Hibah sarpras pembudidayaan ikan (APBN)
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**				
	Kegiatan				
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
	Sub Kegiatan				
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Boyolali	Jumlah bantuan prasarana usaha perikanan tangkap	100 Unit	Hibah Sarpras penangkapan ikan (Nelayan) (APBN)
			Jumlah penebaran benih ikan pada perairan umum	200.000 benih	Ikan Nila, Lele, Gurami, dll (APBD Provinsi Jawa Tengah)
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**				
	Kegiatan				
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				
	Sub Kegiatan				
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Boyolali	Jumlah kelompok Pembudidaya Ikan yang meningkat ketrampilannya	8 Kelp	Pembinaan/ Penyuluhan kelompok Pembudidaya (APBN)
4	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**				
	Kegiatan				

No	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Vol	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah nelayan yang berhasil didampingi	150 Orang	
	Sub Kegiatan				
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Boyolali	Jumlah nelayan yang berhasil didampingi	150 Orang	Pembinaan Nelayan (APBN)
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Boyolali	Jumlah kelompok yang difasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan asuransi usaha perikanan (klp)	10 Kelp	Penguatan kelembagaan nelayan (APBN)
5	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**				
	Kegiatan				
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				
	Sub Kegiatan				
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Boyolali	Jumlah kelompok yang mendapatkan bimbingan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan (klp)	1 kelp	Pembinaan kelompok pengolahan ikan (APBN)
6	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**				
	Kegiatan				
	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
	Sub Kegiatan				

No	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Vol	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Boyolali	Jumlah kampanye Gemarikan dan pengadaan paket gemarikan	1 keg (even)	Kegiatan Gemarikan dan lomba pengolahan ikan (APBD kab. Boyolali)
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Boyolali	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitas bantuan sarana prasarana pengolahan (klp)	1 kelp	Hibah Sarpras pengolahan ikan (APBN)
7	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**				
	Kegiatan				
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
	Sub Kegiatan				
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Boyolali	Jumlah ternak/hewan yang diobati	5.000 ekor	Pengobatan ternak (APBD Kab. Boyolali)
	Pembebasan Penyakit Hewan Menular daaml 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Boyolali	Jumlah ternak yang diganti rugi (bansos)	2 ekor	Hibah pengantian ternak potong paksa (APBD Kab. Boyolali)
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Boyolali	Jumlah ternak/hewan yang divaksin	5.000 ekor	Vaksinasi ternak (APBD Kab. Boyolali)
	Kegiatan				
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota				
	Sub Kegiatan				

No	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Vol	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Boyolali	Jumlah hewan/ ternak yang diperiksa (ekor)	11.000 ekor	Pelayanan Surat keterangan ternak (APBD Kab. Boyolali)
	Kegiatan				
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
	Sub Kegiatan				
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Boyolali	Pemeriksaan sampel penyakit hewan	200 sampel	Pemeriksaan sampel ternak (APBD Kab. Boyolali)
8	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**				
	Kegiatan				
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				
	Sub Kegiatan				
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Boyolali	Jumlah unit usaha	5 unit	Pembinaan kelompok pengolahan peternakan (APBD Kab. Boyolali)
		Boyolali	Jumlah festival susu	1 even	Lomba anak (APBD Kab. Boyolali)
9	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**				
	Kegiatan				
	Pembangunan Prasarana Pertanian				
	Sub Kegiatan				

No	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Vol	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Boyolali	Jumlah embung peternakan yang dibangun/ direhab	2 unit	Pembangunan dan pemeliharaan embung (APBD Kab. Boyolali)
	Kegiatan				
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
	Sub Kegiatan				
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Boyolali	Jumlah kelompok ternak yang melaksanakan cara budidaya ternak yang baik	16 Kelp	Kegiatan IB/ ATR (APBD Kab. Boyolali)
10	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**				
	Kegiatan				
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota				
	Sub Kegiatan				
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Boyolali	Jumlah ternak sapi yang di IB/PKB dan ATR	45 Ekor	Kegiatan IB/ ATR (APBD Kab. Boyolali)
	Kegiatan				
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
	Sub Kegiatan				
	Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Boyolali	Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan bantuan peralatan pengolahan pakan ternak dan bimbingan teknis	10 Kelp	Hibah sarpras peternakan (APBD Kab. Boyolali)

No	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Vol	Catatan
1	2	3	4	5	6
			peningkatan kualitas pakan ternak		
	Kegiatan				
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain				
	Sub Kegiatan				
	Pengadaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Boyolali	Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan bantuan bibit ternak	10 Kelp	Hibah bibit ternak (APBD Kab. Boyolali)
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Boyolali	Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan bantuan bibit, pupuk dan bimbingan teknis peningkatan kualitas HPT	5 Kelp	Penyuluhan Bimtek Pengolahan pakan ternak (APBD Kab. Boyolali)
	Kegiatan				
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				
	Sub Kegiatan				
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Boyolali	Jumlah sampel obat hewan yang diperiksa	40 sampel	Pemeriksaan sampel obat ternak (APBD Kab. Boyolali)
11	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**				
	Kegiatan				
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				
	Sub Kegiatan				

No	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Vol	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Boyolali	Jumlah UPH yang mendapatkan fasilitasi/ pelatihan untuk peningkatan jaminan mutu produk peternakan	2 UPH/ kel	Pelatihan pengolahan hasil ternak (APBD Kab. Boyolali)
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Boyolali	Jumlah pasar tradisional/ UPH yang dimonitor peredaran produk hewan	10 pasar/ UPH	Pemeriksaan sampel produk ternak (APBD Kab. Boyolali)
	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Boyolali	Jumlah UPH/ peternak yang di Audit Pra NKV	2 UPH	Pendampingan UPH (APBD Kab. Boyolali)
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Boyolali	Jumlah sampel produk hewan yang diuji	100 sampel	Pemeriksaan sampel produk hewan (APBD Kab. Boyolali)
	Kegiatan				
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				
	Sub Kegiatan				
	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Boyolali	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, sosialisasi pemotongan hewan di RPH dan pemotongan hewan kurban	5 kegiatan	Monitoring/ Pengawasan Pemotongan di RPH (APBD Kab. Boyolali)
12	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**				
	Kegiatan				
	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				
	Sub Kegiatan				
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan	Boyolali	Jumlah sampel pengujian mutu pakan	2 sampel	Pemneriksaan mutu pakan (APBD Kab. Boyolali)

No	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Vol	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitasi Pemeliharaan Hewan	Boyolali	Jumlah peternak yang diawasi pelaksanaan proses mendapatkan izin Usaha Fasilitasi Pemeliharaan Hewan	5 peternak	Pendampingan pengurusan perijinan usaha ternak (APBD Kab. Boyolali)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pendekatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan *Money Follow Program*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan *Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial* dengan memperhatikan pada:

a. Pengendalian perencanaan;
b. Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2021;
c. Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan;
d. Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Tematik yang berarti penekanan atau fokus pada perencanaan sampai dengan program prioritas, ***Holistik*** yang berarti pendekatan menyeluruh dan komprehensif dari hulu sampai hilir, ***Integratif*** yang berarti integrasi dalam siapa berbuat apa dan integrasi sumber pendanaan dan ***Spasial*** yang berarti keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi.

Perkuatan Money Follow Program pada RKP 2023 diarahkan kepada:

a. Menajamkan Prioritas Nasional;
b. Memastikan pelaksanaan program;
c. Menajamkan integrasi sumber pendanaan.

Menurut Bappenas ada lima prioritas nasional dalam RKP 2024 ini. Pertama adalah pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan, kedua adalah infrastruktur dan pemerataan wilayah, ketiga adalah nilai tambah sektor riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan kerja, keempat adalah ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup, serta kelima adalah stabilitas pertahanan dan keamanan. Kunci untuk merealisasikan lima prioritas tersebut adalah dengan membentuk ekosistem yang memiliki sumber daya manusia (SDM) berkualitas, berdaya saing, terdidik, dan berkarakter.

Konsep pangan (gizi) sebagai pusat pembangunan memiliki 3 alasan besar seperti yang dipaparkan oleh sebagai berikut:

a. Kekurangan pangan (gizi) akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan karenanya akan melanggengkan kemiskinan.
b. Dampak tidak langsung yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, disebabkan oleh tingkat kecerdasan dan capaian tingkat pendidikan yang rendah.
c. Beban biaya kesehatan yang meningkat akibat kekurangan pangin/ gizi.

Salah satu tantangan pembangunan SDM Nasional adalah konsumsi protein hewani penduduk Indonesia sangat rendah yaitu sekitar 10 g/ kapita/ hari dan diperkirakan akan meningkat tajam apabila pendapatan penduduk terus meningkat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah perlu menyiapkan strategi pembangunan peternakan jangka menengah dan panjang secara berkelanjutan dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya lokal. Dalam hal ini, selain mengeksplorasi sumber daya genetik ternak yang efisien dalam penggunaan pakan, juga harus dapat memanfaatkan bahan pakan berupa produk samping tanaman maupun industri pertanian yang tidak bersaing dengan bahan pangan.

Kebijakan pembangunan pertanian secara nasional adalah percepatan pembangunan pertanian yang modern menuju kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Adapun strategi yang akan dilakukan meliputi aspek:

- Regulasi;
- Inftastruktur;
- Produksi;
- Investasi dan hilirisasi;
- Tataniaga domestic;
- Pengendalian import dan peningkatan eksport;
- Kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Adapun tujuan pembangunan peternakan nasional adalah pemenuhan pangan asal ternak melalui agribisnis peternakan rakyat. Strategi pemenuhan pangan asal ternak dilakukan melalui peningkatan produksi dan populasi ternak yang meliputi:

- Ternak Ruminansia Besar (Potong dan Perah)
- Ternak Ruminansia Kecil;
- Ternak Nonruminansia;
- Ternak Unggas dan aneka ternak.

Strategi pengembangan asgibisnis peternakan diarahkan untuk mencapai peningkatan daya saing peternakan dan kesehatan hewan, ditempuh dengan strategi

- Pengolahan dan pemasaran produk peternakan;
- Peningkatan eksport;
- Perbaikan Tataniaga perdagangan produk;
- Peningkatan peran kelembagaan dan SDM Peternak.

Sebagai sumber pangan, ikan memiliki kandungan gizi yang sangat baik seperti protein sebagai sumber pertumbuhan, asam lemak omega 3, 6 dan 9 yang bermanfaat bagi kesehatan ibu dan pembentukan otak janin, vitamin, serta berbagai mineral yang sangat bermanfaat bagi ibu dan janin.Ikan sebagai bahan makanan yang mengandung protein tinggi dan mengandung asam amino essensial yang diperlukan oleh tubuh, disamping itu nilai biologisnya mencapai 90%, dengan jaringan pengikat sedikit sehingga lebih mudah dicerna. Hal yang paling penting adalah harganya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan sumber protein lainnya.

Permasalahan yang masih dihadapi adalah masih rendahnya angka konsumsi ikan di tingkat masyarakat untuk, konsumsi ikan tahun 2022 Kabupaten Boyolali sebesar 22,24 kg/kap/tahun, masih dibawah Propinsi Jateng sebesar 35,99 kg/kapita/tahun, dan masih dibawah Tingkat Nasional yang sebesar 56,39 kg/kapita/tahun. Penyebabnya antara lain faktor budaya, ketersediaan ikan, harga dan tingkat pengetahuan masyarakat.

Menurut Data Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) BPS, protein ikan memberikan kontribusi terbesar dalam kelompok sumber protein hewani sekitar 57,2% dibanding daging, telur dan susu. Selain itu, ikan dapat diterima oleh semua agama. Kandungan komposisi asam amino, lemak, vitamin dan mineral sangat baik dan prospektif bagi tubuh. Keragaman ikan tinggi baik dari segi jenis, bentuk, warna, rasa dan ukuran sehingga dapat diproses lebih lanjut menjadi berbagai macam produk olahan. Sedangkan keragaman harga ikan dapat memenuhi semua segmen kelas ekonomi. Karena ikan mudah dicerna dan diserap tubuh dengan kekayaan kandungan gizinya maka ikan sangat berperan penting dalam Gerakan Peningkatan Gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Pembangunan perikanan budidaya mengalami perubahan paradigma yaitu dari orientasi peningkatan produksi menjadi pembangunan perikanan budidaya yang

berkelanjutan dan berdaya saing dengan mempertimbangkan potensi daya dukung lingkungan, ekonomi dan sosial di WPP budidaya

Kebijakan pokoknya adalah Peningkatan efektivitas tata kelola sumberdaya perikanan budidaya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan; Penguatan daya saing dan nilai tambah industri perikanan budidaya; Pembangunan perikanan budidaya berbasis kewilayahan; Peningkatan kesejahteraan pelaku perikanan budidaya.

Kebijakan peningkatan perikanan budidaya berkelanjutan meliputi:

1. Pengembangan komoditas unggulan lokal dan ekspor;
2. Penataan sistem logistik perbenihan;
3. Penyediaan input produksi yang efisien (induk, benih, obat, pakan, peralatan);
4. Pembangunan infrastruktur perikanan budidaya;
5. Revitalisasi sarana prasarana produksi perbenihan;
6. Inovasi, diseminasi, dan pendampingan teknologi budidaya;
7. yang modern dan berkelanjutan dan Tata kelola kemitraan usaha (pembudidaya dan penyedia modal).

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali sesuai dengan tugas pokoknya membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah pada sub sektor peternakan dan perikanan. Untuk itu berdasarkan visi dan misi yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 serta sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali tahun 2024 adalah Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten sentra produksi peternakan dan perikanan di Jawa Tengah dengan komoditas

unggulan yaitu ikan lele dan produk olahan ikan lele, susu sapi dan daging sapi serta produk olahannya.

Mengacu kepada Kebijakan Nasional, Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 dan tugas pokok fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, serta mempertimbangkan potensi sub sektor peternakan perikanan Kabupaten Boyolali, maka dirumuskan tujuan pembangunan sub sektor peternakan perikanan dalam Renja 2024 adalah meningkatkan produksi dan daya saing sub sektor peternakan perikanan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan peternak.

Adapun sasaran Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan produksi susu dan produksi daging;
2. Meningkatkan populasi ternak sapi perah, sapi potong dan ternak lainnya;
3. Meningkatkan ketersediaan pangan asal hewani yang aman, sehat, utuh dan halal;
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk hasil peternakan;
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
6. Meningkatkan produksi ikan dan peningkatan kualitas dan nilai tambah hasil pengolahan ikan;
7. Meningkatnya jaringan pemasaran produk olahan ikan;
8. Optimalisasi perinakan darat;
9. Peningkatan sarana-prasarana kelompok peternakan dan perikanan;
10. Peningkatan kelembagaan kelompok peternakan dan perikanan;
11. Meningkatkan PDRB Sektor pertanian, sub sektor peternakan dan perikanan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Boyolali, pada dasarnya kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali adalah sebagai "*pengarah*" setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Perangkat daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Boyoalli Tahun 2021-2026 yaitu : **"Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas"** dan sesuai dengan Misi ke 3 Kabupaten Boyolali yaitu : **"Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional"**, maka Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan Bupati Boyolali ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya peternakan dan perikanan saat ini dan berdasarkan Permendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021.

Rencana Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali Tahun 2024, direncanakan akan melaksanakan Pagu anggaran sebesar Rp. 10.885.076.000,00, yang terdiri dari Bidang Perikanan sebesar Rp. 1.884.146.000,00 dan Bidang Peternakan sebesar Rp. 9.000.930.000,00. Pagu anggaran tersebut terbagi menjadi 15 program, 28 kegiatan dan 63 subkegiatan, yang mana merupakan gabungan dari bidang perikanan dengan 7 program, 7 kegiatan dan 10 subkegiatan dan bidang peternakan dengan 8 program, 21 kegiatan dan 53 subkegiatan.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali tahun 2024 seperti pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali tahun 2024

Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Persentase pembudi daya ikan kecil yang diberdayakan**	**persen**	**100,00**	
Kabupaten/Kota	**Persentase peningkatan ketersediaan benih ikan**	**persen**	**6,00**	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan di BBI* (Indikator LPPD Output)	ekor	1.900.500	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2,00	190.000.000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	5,00	474.940.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Persentase Kelompok Pembudidaya Perikanan yang Menggunakan Metode Budidaya yang Baik**	**Persen**	**60,00**	
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yangterlatih	Kelompok	8,00	
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	8,00	361.706.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Produksi Ikan Budidaya**	**Ekor**	**35.174,00**	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Persentase kelompok nelayan yang menerapkan metode penangkapan ikan yang baik dan benar**	**Persen**	**100,00**	

Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penebaran benih ikan pada perairan umum	Benih	300000 benih	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	100 Unit	30.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Persentase nelayan kecil yang diberdayakan**	**Persen**	**100,00**	**0**
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang berhasil didampingi	orang	150 orang	-
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat	Orang	100 orang	-
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	5,00	0
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Produksi Ikan Tangkap**	**ekor**	**2.369,00**	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Persentase promosi konsumsi ikan yang berhasil dijalankan**	**Persen**	**100,00**	**-**
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok yang meningkat kualitas dan nilai tambah produknya	kelompok	1,00	-

Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	1,00	-
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Produksi pengolahan ikan**	**ton**	**81,03**	**0**
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lokasi yang meningkat ketersediaan bahan bakunya	lokasi	2,00	-
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	1,00	75.000.000
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	1,00	-
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**Persen**	**15**	
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang diobati dan divaksin	ekor	10.000,00	

Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam satu wilayah Kab / Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan		250.000.000
Pelaksanaan Manajemen Resiko Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	2 ekor	20.000.000
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	5000 ekor	100.000.000
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penerbitan dokumen SKKH	Dokumen	300 dokumen	-
Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	11000 ekor	0
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang diperiksa	sampel	200 sampel	
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	200 sampel	124.846.000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Persentase susu yang memenuhi standar mutu**	**Persen**	**73,00**	**-**
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	jumlah produk susu yang memenuhi standar mutu (liter)	liter	36.293.366,93	
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan		

Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			**15,00**	
Pembangunan Prasarana Pertanian			2,00	-
	Jumlah RPH yang dibangun/ direhab	unit	1,00	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1 Unit	250.000.000
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Ternak yang mendapatkan fasilitasi produksi ternak	Kelompok	20,00	
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	12,00	154.266.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase peningkatan ketersediaan sarana peternakan**	**Persen**	**50,00**	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kelahiran ternak sapi perah dan potong	ekor	35.000,00	
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	2,00	-
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok ternak yang produksi dan kualitas pakan ternak meningkat	Kelompok	10,00	

Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	10,00	70.000.000
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok ternak yang meningkat luasan hijauan pakan ternak dan kualitas bibit ternak	Kelompok	15,00	
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor		275.000.000
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton		50.000.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase sampel obat hewan yang diperiksa**	**Persen**	**100**	
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah sampel obat hewan yang diperiksa	sampel	40 sampel	-
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	40 sampel	-
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Produksi susu**	**Liter**	**51.200.000**	
	Produksi daging	**Kg**	**14.361.221**	
	Produksi telur	**Butir**	**28.011.000**	
	Populasi ternak (sapi potong)	**ekor**	**111.100**	
	Populasi ternak (sapi perah)	**ekor**	**97.965**	

Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
	Populasi ternak (kambing dan domba)	**ekor**	**172.885**	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Persentase produk hasil peternakan yang ditangani sesuai standar ASUH**	**Persen**	**60**	**86.000.000**
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah UPH yang menerapkan Pra NKV dan peningkatan jaminan mutu produk peternakan di UPH/ PU/ peternak/ KTT/Gapoktan/ Asosiasi	Unit	2 UPH	
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	2 Laporan	66.000.000,00
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	10 Laporan	0
Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	Laporan	2 Laporan	-
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	100 dokumen	20.000.000
Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Laporan	5 Laporan	0
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Persentase usaha peternakan yang mempunyai izin usaha**	**Persen**	**30,00**	
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah PU yang mendapatkan izin usaha bidang peternakan	Unit	2 PU	

Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Laporan	2 sampel	-
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	Laporan	5 peternak	-
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha RPH	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	Laporan	1 Laporan	10.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSA PEMERINTAHAN DAERAH				
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tercapai target	kegiatan	25	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	1	-

Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang tercapai sesuai target	kegiatan	100,00	
Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	100,00	6.305.147.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	25,00	660.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	18,00	-
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2,00	-
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenagan	kegiatan	12	-

Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
	Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target			
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	-
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	-
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang tercapai sesuai target	kegiatan	100,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	100,00	3.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100,00	78.600.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	100,00	3.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	100,00	30.000.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	100,00	25.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	100,00	26.265.000

Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100,00	216.176.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercapai sesuai target	kegiatan	1,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100,00	2.610.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	100,00	200.800.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	100,00	915.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjnag urusan pemerintahan daerah yang tercapai sesuai target	kegiatan	100,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	100,00	62.540.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100,00	30.000.000

Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	100,00	200.000.000
Rencana Jumlah Anggaran				**10.365.811.000**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampau ke bawah (*trickle down effect*), sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali menggunakan Analisis kebijakan publik, yang mana kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan, diantaranya:

1). Penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

2) Mencari dan mengkaji berbagai alternatif pemecahan masalah atau pencapain tujuan.

Syarat utama dari analisis ini, keduanya dilakukan secara multidisiplin dan harus memiliki kecakapan-kecakapan yang mampu dengan cepat mengambil fokus pada kriteria keputusan yang paling sentral, serta mempunyai kemampuan analisis multi-disiplin dan mampu memikirkan jenis-jenis tindakan kebijakan yang dapat diambil. Ruang lingkup dari kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Oleh sebab itu diperlukan adanya analisis kebijakan publik guna mengetahui secara terperinci dampak/ hasil/ akibat yang dihasilkan dari suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam kehidupan masyarakat, apakah kebijakan tersebut sudah tepat atau belum dalam pelaksanaannya.

Maka dari itu kami Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali melaksankan Penyusunan Renja melalui proses analisis lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali baik lingkungan internal maupun eksternal dengan memperhitungkan tantangan (*threats*), Strategy (Strategi) dan peluang (*opportunities*) untuk perwujudan visi dan misi Kabupaten Boyolali.

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dinas dan seluruh jajaran/ staf Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, diharapkan berguna sebagai arah, pedoman dan landasan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan. Selain itu Renja ini juga dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan kelestarian sumberdaya peternakan dan Perikanan secara optimal berkelanjutan, demi terwujudnya masyarakat peternakan dan perikanan yang berdaya, sejahtera dan berwawasan lingkungan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, dengan harapan dapat dianalisa dan dipertimbangkan penuangannya dalam Rencana APBD Tahun Anggaran 2024.

V. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	2
	1.1. Latar Belakang	2
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RK	20
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	27
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	30
	3.3. Program dan Kegiatan	30
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
	4.1 Program dan Kegiatan	34
BAB V	PENUTUP	39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 mengacu pada perencanaan Nasional dan Provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan baik dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Boyolali dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas Perangkat Daerah memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan yang ada baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kab.), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Prov.) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dan menjadi pedoman serta rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2024 yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya**,** serta antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengacu pada kemampuan keuangan daerah, sehingga program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dimaksudkan untuk:

a. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026 ke dalam rencana program prioritas kegiatan tahunan daerah;

b. Menciptakan sinergitas pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan;

c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah dalam rangka pembangunan daerah.

Sedangkan penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2024 bertujuan untuk:

a. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Boyolali Tahun 2024;
b. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Boyolali Tahun 2024;
c. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RK
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) suatu Perangkat Daerah adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2024 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development)* untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-

masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

- Evaluasi Program Tahun 2022

Secara keseluruhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali pada tahun 2022 telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya yang bersumber dari:

1. Daerah (APBD) Rp 22.762.184.000,00
2. DAK Rp 3.549.059.000,00

Total keseluruhan anggaran sebesar Rp 26.311.243.000,00

Secara ringkas komposisi penggunaan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Belanja pegawai sebesar: Rp 11.287.321.000,00
   Realisasi: Rp 11.115.328.379,00
2. Belanja Barang dan Jasa: Rp 5.981.136.000,00
   Realisasi: Rp 5.369.863.530,00
3. Belanja Hibah: Rp 2.334.696.000,00
   Realisasi Rp 1.743.397.000,00
3. Belanja Modal: Rp 6.708.090.000,00
   Realisasi: Rp 5.632.393.850,00

Tabel yang perlu disajikan adalah yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lembar : .....

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3	30	03				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									
3	30	03	2	01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana distribusi perdagangan yang kondisinya baik								
							Pendapatan retribusi pelayanan pasar								
3	30	03	2	01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang dibangun dan direvitalisasi	2	4	2	4	200,00	2	4	200,00
3	30	03	2	01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Penertiban pedagang yang dilaksanakan	4	20	4	20	500,00	4	20	500,00
3	30	03	2	02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya									
3	30	03	2	02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pendapatan retribusi pelayanan pasar yang dikelola	*8.287.778.400*	*6.351.723.733*	*6.307.180.000*	*6.351.723.733*	*100,71*	*7.598.350.000*	*6.351.723.733*	83,59
3	30	04				PROGRAM STABILISASI									

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING									
3	30	04	2	02		Pengendalian Harga dan Stok Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota									
3	30	04	2	02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	koefisien harga antar waktu	12	10,48	12	10,48	87,33	12	10,48	87,33
3	30	04	2	02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Pasar murah yang dilaksanakan	2	2	2	2	100	2	2	100
3	30	05				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR									
3	30	05	2	01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kab/Kota.	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kab/Kota.								
3	30	05	2	01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kab/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	40	34	40	34	85	40	34	85
3	30	05	2	01	03	Pameran dagang nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1	1	1	1	100	1	1	100
3	30	05	2	01	06	pembinaan pelaku usaha ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	2	2	2	2	100	2	2	100
3	30	06				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									
3	30	06	2	01		Pelaksanaan Metrologi Legal	Prosentase alat								

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	UTTP yang ditera /tera ulang sah								
3	30	06	2	01	01	Pelaksanaan Metrologi legal berupa tera, tera ulang	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang yang sah	13.033	29.536	13.033	29.536	226,62	226,62	226,62	226,62
3	30	07				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI									
3	30	07	2	01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaku usaha yang memperoleh promosi								
3	30	07	2	01	01	Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi	50	50	50	50	100	50	50	100
3	30	07	2	01	02	Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah produk olahan susu yang produknya dipromosikan	2	2	2	2	100	2	2	100
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
X	XX	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
X	XX	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun	12	12	12	12	100	12	12	100
X	XX	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya gaji THL/Tenaga Kontrak	12	12	12	12	100	12	12	100
X	XX	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12	12	12	12	100	12	12	100
X	XX	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12	12	12	12	100	12	12	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	XX	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	18	18	18	100	18	18	100
X	XX	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	2	2	2	2	100	2	2	100
X	XX	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
X	XX	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12	12	12	12	100	12	12	100
X	XX	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	12	12	100	12	12	100
X	XX	01	2	06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	12	12	12	12	100	12	12	100
X	XX	01	2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan BBM/ logistik kantor	12	12	12	12	100	12	12	100
X	XX	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12	12	12	12	100	12	12	100
X	XX	01	2	06	07	Penyediaan bahan/Material	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	12	12	12	12	100	12	12	100
X	XX	01	2	06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	12	12	12	12	100	12	12	100
X	XX	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya kebutuhan SPPD dalam daerah dan luar daerah	12	12	12	12	100	12	12	100
X	XX	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	XX	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	12	12	12	12	100	12	12	100
X	XX	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telepon	12	12	12	12	100	12	12	100
X	XX	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya kebutuhan jasa pelayanan umum	12	12	12	12	100	12	12	100
X	XX	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
X	XX	01	2	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12	12	12	12	100	12	12	100
X	XX	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12	12	12	12	100	12	12	100
X	XX	01	2	09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	12	12	12	100	12	12	100
X	XX	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat								
X	XX	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2	2	2	2	100	2	2	100
X	XX	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	1	1	1	100	1	1	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X	XX	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	1	1	1	100	1	1	100
X	XX	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	1	1	1	1	100	1	1	100
X	XX	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	1	1	1	1	100	1	1	100
X	XX	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15	15	15	15	100	15	15	100
X	XX	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	100	4	4	100
3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									
3	31	02	2	01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									
3	31	02	2	01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan	450	450	450	450	100	450	450	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai salah satu Dinas yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali bisa dikatakan sebagai Dinas yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Boyolali.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perdagangan dan Perindustrian. Upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan, dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pelayanan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan terutama dalam indikator kinerja utama (IKU).

Sebanyak 5 indikator utama yang telah tercapai adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1. Realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2022 secara keseluruhan menunjukkan kenaikan sesuai dengan target capaian yang ditetapkan.

Peningkatan sektor perdagangan diupayakan pula melalui peningkatan pemasaran produk daerah namun demikian nilai ekspor bersih pada tahun 2022 mencapai 2.611.677.939,71 USD, terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 97.281.812,56 USD.

Peningkatan sektor perindustrian diupayakan pula melalui meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah yang diukur dengan indikator jumlah IKM yang berkembang dan mampu mengakses pasar, pada tahun 2022 pertumbuhan industri Kabupaten Boyolali meningkat 3,42 **%** dari 9.840 industri pada tahun 2021 menjadi 10.177 industri pada tahun 2022**.**

Seluruh kinerja pelayanan tersebut didukung dengan kinerja administrasi dan urusan rutin yang berjalan dengan baik. Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, diperkirakan akan mencapai target 100 persen sesuai dengan rencana.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan pasar dalam bentuk pengelolaan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha, Sesuai dengan target pendapatan pada tahun 2022 adalah sebesar

Rp 6.307.180.000,- dan terealisasi sebesar Rp 7.511.951.950,- atau 119,10 %.

Setiap tahun ditentukan target pendapatan yang diharapkan dapat tercapai. Agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal, diupayakan langkah-langkah strategis yang diharapkan dapat memacu optimalisasi pendapatan daerah.

Pendapatan pasar hampir selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun nilainya relatif kecil. Hal ini disebabkan karena jumlah pedagang, los, kios di pasar relatif sama. Peningkatan penerimaan retribusi dari tahun ke tahun berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan dapat memperkuat posisi keuangan daerah. Selain di bidang pendapatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui Bidang Infrastruktur, Pembinaan dan Penataan Pedagang mempunyai tugas dalam pemeliharaan dan pengembangan pasar, pengelolaan data pedagang pasar serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban pasar. Pemeliharaan dan pengembangan pasar diupayakan melalui peningkatan sarana prasarana yang dibutuhkan pasar, yang setiap tahunnya selalu mengalami penyempurnaan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan pasar selalu diinventarisir dan ditindaklanjuti dengan melengkapi fasilitas yang dianggap belum memadai. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menunjang perwujudan pasar yang representatif, sehingga keberadaan pasar tradisional tetap lestari dan tidak akan tergeser oleh toko-toko modern disamping melindungi kepentingan masyarakat ekonomi lemah. Kegiatan Penataan dan Pembinaan Pedagang Pasar (kaki lima dan asongan) merupakan agenda tetap tahunan dan sampai dengan saat ini segala permasalahan yang terkait dengan pembinaan dan penataan pedagang dapat diselesaikan dengan baik meskipun ada beberapa hambatan yang terjadi. Permasalahan yang menyangkut kepentingan publik dalam jumlah besar memang sering dialami pada saat penempatan maupun penataan pedagang, hal tersebut masih dapat diatasi melalui upaya pendekatan secara persuasif kepada pedagang.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sebagaimana paparan di atas terangkum secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Boyolali

NO	Indikator	SPM/stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian			3,88	4,91	5,94	6,97	4,44	-	5,94	6,97	-
2.	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian			1	2	3	4	4,33	-	3	4	-
3.	Meningkatnya Stabilitas harga barang dan jasa			109,89	112,89	115,39	117,89	114,85	-	115,39	117,89	-
4.	Meningkatnya agro industri susu			2	2,5	3	3,5	2,04	-	3	3,5	-
5.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah			81,3	81,6	81,8	82	81,90	-	81,8	82	-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Peran dan posisi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah maupun Kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu ditingkatkan. Dengan potensi yang begitu besar yang ada di Kabupaten Boyolali mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia yang sangat potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum bisa mencapai apa yang

diharapkan oleh masyarakat di Kabupaten Boyolali.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas hasil produksi IKM masih belum bisa bersaing dengan produk dari luar daerah;

2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendukung industri dan perdagangan;

3. Belum optimalnya pemanfaatan akses permodalan;

4. Belum maksimalnya pemasaran produk hasil industri dan perdagangan;

5. Terbatasnya anggaran menyebabkan peningkatan sarana dan prasarana pasar belum maksimal;

6. Kesadaran Wajib Retribusi yang masih rendah;

7. Kurangnya kesadaran pemilik peralatan UTTP untuk melakukan tera ulang; dan

9. Meningkatkan PAD melalui optimalisasi e-retribusi pasar rakyat.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Perlu digaris bawahi pula berkaitan dengan kondisi riil pelaku usaha bahwa kualitas SDM pelaku usaha bidang perdagangan dan perindustrian masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi, dan pemasaran pun masih lemah. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah. Hal ini merupakan tantangan khususnya dalam upaya memenangkan kompetisi

menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN serta percaturan ekonomi global pada umumnya.

Pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Kondisi ini didukung oleh adanya minat investor di bidang perdagangan dan industri yang cukup tinggi. Tentunya keselarasan program dan kerja sama lintas sektor sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya perdagangan dan industri di Kabupaten Boyolali.

Untuk meningkatkan daya saing produk-produk unggulan kabupaten Boyolali, juga dikembangkan forum-forum komunikasi dan forum diskusi antar lembaga yang berorientasi terhadap pengembangan ekonomi daerah sebagai *stakeholders* daerah dalam pengembangan ekonomi.

Namun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terdapat permasalahan yang di hadapi, yaitu:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM kemetrologian mendukung pelaksanaan tera.
2. Kurangnya pengembangan pemasaran *online* untuk memasarkan produk IKM.
3. Sarana prasarana bangunan pasar belum seluruhnya layak/representatif.
4. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) berdampak pada kurang optimalnya pelayanan bagi pasar dan PKL

Dengan banyaknya permasalahan yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kebupaten Boyolali, maka bisa berdampak pada pencapaian visi misi kepala daerah yang sudah ditentukan. Karena dalam menyelesaikan berbagai masalah tersebut diperlukan kerja keras dan juga biaya yang sangat banyak, sedangkan anggaran yang tersedia sangat minim.

Dengan semua kekurangan dan keterbatasan bukan alasan untuk menyerah, tapi sebagai tantangan untuk mendapat peluang yang sangat baik di masa depan. Beberapa usaha untuk meningkatkan pelayanan sesuai tugas dan fungsi diantaranya:

- ✓ Memaksimalkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.

- ✓ Meningkatkan pemasaran produk unggulan IKM melalui penjualan *online*.
- ✓ Meningkatakan kualitas IKM melalui pelatihan.
- ✓ Melakukan pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan kegiatan di lingkungan Disdagperin.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kebupaten Boyolali mengusulkan beberapa program kegiatan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan program kegiatan diperlukan dana dari APBD melalui Renja Tahun 2024. Tapi karena keterbatasan anggaran yang tersedia dari usulan yang ada dilakukan analisis sesuai dengan kebutuhan antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kebupaten Boyolali dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali.

Tabel 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		Prosentase koefisiensi variasi harga antar waktu	12	**0**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		Prosentase koefisiensi variasi harga antar waktu	12	**0**	
1.1	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**		koefisien harga antar waktu	12	**0**	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**		koefisien harga antar waktu	12	**0**	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabu-paten/Kota		koefisien harga antar waktu	12	0	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		koefisien harga antar waktu	12	0	
1.2	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota**		Persentase realisasi pe-nyaluran pupuk ber-subsidi yang tepat sasaran	100	**0**	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota**		Persentase realisasi pe-nyaluran pupuk ber-subsidi yang tepat sasaran	100	**0**	
	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi		Jumlah pengawasan penyaluran pupuk dan penggunaan pupuk bersubsidi	52 kali	0	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi		Jumlah pengawasan penyaluran pupuk dan penggunaan pupuk bersubsidi	52 kali	0	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**		Prosentase peningkatan pelaku usaha ekspor		**349.440.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**		Prosentase peningkatan pelaku usaha ekspor		**444,240,000**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kab/Kota.		**349.440.000**	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kab/Kota.		**444,240,000**	
	Pameran Dagang Nasional		Jumlah pameran dagang yang dilaksanakan		349.440.000	Pameran Dagang Nasional		Jumlah pameran da-gang yang dilaksana-kan		444,240,000	
3	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		Prosentase alat UTTP yang sudah tertib ukur	62	**20.000.000**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		Prosentase alat UTTP yang sudah tertib ukur	62	**20,000,000**	
3.1	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**		Prosentase alat UTTP yang ditera/tera ulang sah	62	**20.000.000**	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**		Prosentase alat UTTP yang ditera/tera ulang sah	62	**20,000,000**	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	15.000 UTTP	20.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	15.000 UTTP	20,000,000	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	-	0	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	-	0	
4	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi (Permendagri 86 Tahun 2020)	0.72	**36,313,000**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi (Permendagri 86 Tahun 2020)	0.72	**36,313,000**	
4.1	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**		Pelaku usaha yang memperoleh promosi	60 pelaku usaha	36,313,000	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**		Pelaku usaha yang memperoleh promosi	60 pelaku usaha	36,313,000	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 pelaku usaha	36,313,000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 pelaku usaha	36,313,000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	**PROGRAM PENUN-JANG URUSAN PEME-RINTAHAN DAERAH**		Persentase penun-jang urusan pemerin-tah daerah yang ter-penuhi sesuai stan-dar	100	**16.050.531.467**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH-AN DAERAH**		Persentase penun-jang urusan pemerin-tah daerah yang ter-penuhi sesuai stan-dar	100	**15.982.718.000**	
5.1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Terpenuhinya kebu-tuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100	**14.423.462.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Terpenuhinya kebu-tuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100	**13.389.332.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang	12,015,210,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang	10.891.080.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelak-sanaan Tugas ASN	12 dokumen	2,408,252,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelak-sanaan Tugas ASN	12 dokumen	2.498.252.000	
5.2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Terpenuhinya Kebu-tuhan administrasi perkantoran perang-kat daerah	100	**994.399.467**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Terpenuhinya Kebu-tuhan administrasi perkantoran perang-kat daerah	100	**1.262.716.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene-rangan Bangunan Kan-tor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene-rangan Bangunan Kan-tor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	36.900.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	25,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	25,000,000	
	Penyediaan Bahan Lo-gistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	250,393,000	Penyediaan Bahan Lo-gistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	430,095,000	
	Penyediaan Barang Ce-takan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	219,821,300	Penyediaan Barang Ce-takan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	221,783,000	
	Penyediaan Bahan/Ma-terial		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	156,395,667	Penyediaan Bahan/Ma-terial		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	156,167,000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	117,239,500	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	117,221,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	219,550,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	269,550,000	
5.3	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100	**327.240.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100	**353.240.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1,670,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1,670,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	319,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	345,500,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	6,070,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	6,070,000	
5.4	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100	**305.430.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100	**977.430.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 unit	185,430,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 unit	362,430,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 unit	20,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 unit	15,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	600,000,000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	**PROGRAM PERENCA-NAAN DAN PEMBANGU-NAN INDUSTRI**		Persentase IKM yang terlatih	4.78	**2,890,000,000**	**PROGRAM PERENCA-NAAN DAN PEMBANGU-NAN INDUSTRI**		Persentase IKM yang terlatih	4.78	**2,890,000,000**	
6.1	**Penyusunan dan Eva-luasi Rencana Pem-bangunan Industri Ka-bupaten/Kota**		Jumlah IKM yang terlatih	510 IKM	**2,890,000,000**	**Penyusunan dan Eva-luasi Rencana Pem-bangunan Industri Ka-bupaten/Kota**		Jumlah IKM yang terlatih	510 IKM	**2,890,000,000**	
	Koordinasi, Sinkronisa-si, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	2,890,000,000	Koordinasi, Sinkronisa-si, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	2,890,000,000	
7	**PROGRAM PENING-KATAN SARANA DIS-TRIBUSI PERDAGANG-AN**		Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	84.09	**3.440.000.000**	**PROGRAM PENINGKA-TAN SARANA DISTRI-BUSI PERDAGANGAN**		Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	84.09	**34,331,411,000**	
7.1	**Pembangunan dan Pe-ngelolaan Sarana Dis-tribusi Perdagangan**		Jumlah Sarana dis-tribusi perdagangan yang kondisinya baik	37	**3.440.000.000**	**Pembangunan dan Pe-ngelolaan Sarana Dis-tribusi Perdagangan**		Jumlah Sarana dis-tribusi perdagangan yang kondisinya baik	37	**34,331,411,000**	
	Penyediaan Sarana Dis-tribusi Perdagangan		Jumlah Pasar yang dibangun dan direvitalisasi	1 unit	3.440.000.000	Penyediaan Sarana Dis-tribusi Perdagangan		Jumlah Pasar yang dibangun dan direvitalisasi	1 unit	34,331,411,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin lainnya		**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin lainnya		**81,039,000**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin lainnya		**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin lainnya		**81,039,000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	81,039,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Rencana Kerja PD (RENJA PD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kebupaten Boyolali Tahun 2024, disamping berpedoman pada Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kebupaten Boyolali Tahun Tahun 2021-2026, juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat.

Berbagai usulan dari masyarakat yang muncul di Musrenbang Desa kemudian dibawa dalam Musrenbang Kecamatan, lalu diteruskan ke PD sesuai tupoksi. Tahun Anggaran 2024 dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah diharapkan dapat meperbaiki dampak ekonomi yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 dengan memfokuskan pengembangan industri dan perdagangan.

Kemudian akan ditelaah untuk dibahas di dalam lingkup Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti dalam draft penyusunan renja Perangkat Daerah pada tahun yang akan datang. Berbagai pertimbangan akan diambil untuk meneruskan atau menunda program atau kegiatan usulan dari masyarakat, mulai dari ketersediaan anggaran, sampai pada bahan pendukung berupa proposal baik untuk pelatihan dan bantuan peralatan. Untuk lebih jelasnya ada di tabel 2.5:

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Perencanaan Pembangunan Industri/Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota /Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri - Kegiatan pelatihan	Kabupaten Boyolali	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan	-	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Telaah Renstra Kementrian Perindustrian

Dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2024 telah menyinkronkan dengan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 yaitu:

PERMASALAHAN PELAYANAN PD BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG

Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	*2*	*3*	*4*
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Kurangnya peningkatan tenaga kerja industri yang kompeten.	Keterbatasan SDM	Pelatihan industri berbasis kompetensi
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Kurangnya pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM)	Kurangnya pendampingan perusahaan berstandar industri	Pendampingan standarisasi industri
Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri.	Kurangnya kemampuan industri dalam negeri.	Kurangnya penggunaan teknologi untuk peningkatan industri dalam negeri	Adanya dorongan pengunaan teknologi guna peningkatan industri dalam negeri
Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder untuk pengembangan perindustrian	Kurangnya komunikasi yang baik diantara industri	Adanya keinginan untuk meningkatkan pangsa pasar
Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Belum optimalnya pembinaan industri kecil	Masih kurangnya data industri	Tumbuhnya industri di tengah pandemi
Meningkatnya Persebaran Industri	Masih tersentranya kawasan industri	Keterbatasan sarpras pendukung Kawasan industri	Adanya peraturan yang mendorong pembentukan kawasn industri

3.1.2. Telaah Renstra Kementerian Perdagangan

Dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boyolali Tahun 2024 telah menyinkronkan dengan Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 yaitu:

PERMASALAHAN PELAYANAN PD BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG

Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	*2*	*3*	*4*
Meningkatnya pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	Belum optimalnya ekspor produk unggulan	Kurangnya SDM yang menguasai ekspor dan belum banyaknya usaha yang mempunyai ijin usaha	Banyak kualitas produk unggulan yang banyak
Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok	Masih belum stabilnya harga kebutuhan pokok masyarakat	Kurangnya kekuatan hukum untuk menindak pelaku usaha yang curang	Perlu pengawasan dan monitoring ke lapangan
Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	Belum optimalnya tera dan tera ulang bagi alat UTTP	Keterbatasan SDM dan peralatan metrologi legal	Sudah ada UPT Metrologi legal Supaya ditingkatkan kinerjanya
Meningkatnya pasar produk dalam negeri	Masih kurangnya media pengenalan produk-produk unggulan	Keterbatasan SDM pelaku usaha	Banyaknya produk-produk unggulan yang bisa ditawarkan
Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK	Belum optimalnya serapan di SRG	Belum terdatanya Gudang yang ada	Adanya sosialisasi dari Provinsi terkait dengan pendataan gudang
Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional	Nilai SKM yang masih perlu ditingkatkan	Kebiasaan lama yang sulit berubah	Tambahan penghasilan yang semakin baik
Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan	Belum optimalnya pengembangan SDM	Keterbatasan anggaran untuk pengembangan SDM	SDM yang berkualitas

3.1.3. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Selain itu dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2024 juga telah menyingkronkan dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

PERMASALAHAN PELAYANAN PD BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG

Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	*2*	*3*	*4*
Optimalisasi kawasan industri dan industri yang menyerap tenaga kerja	Belum optimalnya pembinaan terhadap industri	Masuknya industri besar	Peningkatan SDM dengan bintek dan magang
Peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan hilirisasi industri	Belum optimalnya pembinaan terhadap industri	Keterbatasn SDM yang ada	Anggaran yang cukup dari pemerintah untuk pengembangan usaha
Pengembangan inovasi teknologi produksi	Kurangnya kemampuan industri dalam negeri.	Kurangnya penggunaan teknologi untuk peningkatan industri dalam negeri	Adanya dorongan pengunaan teknologi guna peningkatan industri dalam negeri
Penguatan IKM yang mencakup aspek modal, pemasaran dan standarisasi produk	Belum optimalnya pembinaan industri kecil	Masih kurangnya data industri	Tumbuhnya industri di tengah pandemi
Harmonisasi peran Stakeholder hulu hilir Pengembangan Bahan baku industri subtitusi impor	Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder untuk pengembangan perindustrian	Kurangnya komunikasi yang baik diantara industri	Adanya keinginan untuk meningkatkan pangsa pasar
Peningkatan data informasi industri dan kawasan industri Integrasi sektor pendukung urusan industri.	Kurang optimalnya aplikasi yang ada	Masih adanya industri yang belum terdata	Adanya aplikasi informasi industri
Pengembangan sistem distribusi yang efisien dan berdaya saing;	Kurangnya pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM)	Kurangnya pendampingan perusahaan berstandar industri	Pendampingan Standarisasi industri
Pengembangan perdagangan dan perijinan secara online.	Kurangnya pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM)	Kurangnya pendampingan perusahaan berstandar industri	Pendampingan Standarisasi industri
Perluasan ekspor (diversifikasi pasar dan produk ekspor, Peningkatan standar dan mutu prduk ekspor, dan peningkatan promosi luar negeri);	Belum optimalnya ekspor produk unggulan	Kurangnya SDM yang menguasai ekspor dan belum banyaknya usaha yang mempunyai ijin usaha	Banyak kualitas produk unggulan yang banyak
Peningkatan penggunaan produk dalam negeri;	Masih kurangnya media pengenalan produk-produk unggulan	Keterbatasan SDM pelaku usaha	Banyaknya produk-produk unggulan yang bisa ditawarkan

Peningkatan kualitas, pengawasan, pelayanan dan Pengujian mutu produk.	Belum optimalnya tera dan tera ulang bagi alat UTTP	Keterbatasan SDM dan peralatan metrologi legal	Sudah ada UPT Metrologi legal supaya ditingkatkan kinerjanya

.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 s/d 2026, maka telah dibuat Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah selama 5 tahun ke depan. Adapun Visi dari Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

"BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI**"**

Dari Visi diatas dijabarkan ke dalam beberapa Misi yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan. Disini ada 5 Misi yang ditentukan oleh Kepala Daerah periode 2021-2026, yaitu :

1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan;
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya;
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional;
4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali tersebut di atas adalah untuk mendukung:

Misi ke satu yaitu "Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan" dan Misi Ketiga yaitu "Boyolali Kota Susu, Lumbung pangan Nasional" Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama.

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 maka terbentuk Perangkat Daerah Baru yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali. Setelah

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 ditetapkan maka berdampak bahwa bidang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali bertambah menjadi 4 (empat) yaitu Bidang Usaha Perdagangan, Bidang Pendapatan, Bidang Infrastruktur Pembinaan dan Penataan Pedagang, dan Bidang Perindustrian.

Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ada 6 program, 9 kegiatan dan 25 sub kegiatan baik belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk lokasi kegiatan hampir di semua wilayah Kabupaten Boyolali juga ada yang diluar kabupaten bahkan luar provinsi. Kebutuhan dana APBD Rp 22.786.284.467,-

Jika rumusan program dan kegiatan yang dirinci tidak sesuai dengan rancangan awal RK maka akan berdampak pada capaian kinerja baik program maupun kegiatan. Dan diharapkan kebutuhan anggaran yang ada di rumusan rencana kerja dapat sesuai dengan yang diharapkan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran maka dibuat beberapa program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu:

PROGRAM (6)		**KEGIATAN (9)**		**SUB KEGIATAN (25)**
1. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**1**	Pameran Dagang Nasional
2. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**2**	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**2**	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
			3	Pengawasan/Peyuluhan Metrologi Legal
3. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**3**	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**4**	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

			5	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**4**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**6**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**8**	Penyediaan Komponen Instalasi Lis-trik/ Penerangan Bangunan Kantor
			9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			13	Penyediaan Bahan /Material
			14	Fasilitasi Kunjungan Tamu
			15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**18**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**21**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			23	Pemeliharaan/ Rehabilitasi

				Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**8**	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**24**	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
6. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**9**	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**25**	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kinerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel. 4.1.

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan dan Perindustrian lembar ..... dari .....

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
3				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	30			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**										
3	30	03		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	Kab. Boyolali	84.09	34.331.411.000	-	-	34.331.411.000		86.36	23.440.000.000
3	30	03	2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Jumlah Sarana distribusi perdagangan yang kondisinya baik	Kab. Boyolali	37	34.331.411.000	-	-	34.331.411.000		38	23.440.000.000
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang dibangun dan direvitalisasi	Kab. Boyolali	1 Paket	34.331.411.000	-	-	34.331.411.000		1	23.440.000.000

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
3	30	05		**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Prosentase peningkatan pelaku usaha ekspor		12,16	444.240.000			444.240.000	-	12,45	500.000.000
3	30	05	2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kab/Kota.			444.240.000	-	-	444.240.000	--	-	500.000.000
				Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Tingkat Nasional	7 pelaku usaha	444.240.000	-	-	444.240.000	--	-	500.000.000
3	30	06		**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Prosentase alat UTTP yang sudah tertib ukur	Kab. Boyolali	62	20.000.000			20.000.000	-	67	20.000.000
3	30	06	2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Prosentase alat UTTP yang ditera/ tera ulang sah	Kab. Boyolali	62	20.000.000			20.000.000	-	67	20.000.000
			01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Boyolali	15.000 UTTP	20.000.000			20.000.000	-	15.000 UTTP	20.000.000
3	30	07		**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi (Permendagri 86 Tahun 2020)		0.72	36.313.000			36.313.000	-	0.77	45.213.000
3	30	07	2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Pelaku usaha yang memperoleh promosi		50 pelaku usaha	36.313.000			36.313.000	-	50 pelaku usaha	45.213.000
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		50 pelaku usaha	36.313.000	--	-	36.313.000	-	50 pelaku usaha	45.213.000

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
3	31			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								-		
3	31	01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi sesuai standar		100	**15.982.718.000**			**15.982.718.000**	-	100	**15.925.539.000**
3	31	01	2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100	**13.389.332.000**			**13.389.332.000**	-	100	**14.442.371.000**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100 orang	10.891.080.000	-	-	10.891.080.000	-	100 orang	12.206.948.000
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 dokumen	2.498.252.000	-	-	2.498.252.000	-	12 dokumen	2.235.423.000
3	31	01	2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Kebutuhan administrasi perrkantoran perangkat daerah		100	**1.262.716.000**			**1.262.716.000**	-	100	**930.205.000**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	6.000.000	-	-	6.000.000	-	1 paket	6.000.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	36.900.000			36.900.000		1 paket	0
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 paket	25.000.000	-	-	25.000.000	-	1 paket	25.000.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik		1 paket	430.095.000	-	-	430.095.000	-	1 paket	350.000.000

					Kantor yang Disediakan									
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	221.783.000	-	-	221.783.000	-	1 paket	200.000.000

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 paket	156.167.000	-	-	156.167.000	-	1 paket	110.542.000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan	117.221.000	-	-	117.221.000	-	12 laporan	98.663.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	269.550.000	-	-	269.550.000	-	12 laporan	100.000.000
3	31	01	2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**81.039.000**			**81.039.000**			**60.000.000**
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 unit	81.039.000			81.039.000		10 unit	60.000.000
3	31	01	2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah		100	**402.560.000**			**402.560.000**	-	100	**482.533.000**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat		100	1.670.000	-	-	1.670.000	-	100	1.672.467
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telepon		100	394.820.000	-	-	394.820.000	-	100	475.300.000

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya kebutuhan jasa pelayanan umum		100	6.070.000	-	-	6.070.000	-	100	6.093.000
3	31	01	2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah		100	**977.430.000**			**977.430.000**	-	100	**405.430.000**

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		100	362.430.000	-	-	362.430.000	-	100	185.430.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		100	15.000.000	-	-	15.000.000	-	100	20.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100	600.000.000	-	-	600.000.000	-	100	200.000.000
3	31	02		**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase IKM yang terlatih		4.78	2.890.000.000	-	-	2.890.000.000	-	4.88	2.721.788.000
3	31	02	2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Jumlah IKM yang terlatih		510 IKM	2.890.000.000	-	-	2.890.000.000	-	560 IKM	2.721.788.000
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan		450 IKM	2.890.000.000	-	-	2.890.000.000	-	450 IKM	2.721.788.000
				TOTAL				**53.785.721.000**			**53.785.721.000**			**43.216.284.467**

BAB V
PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali pada Tahun 2024 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan Perangkat Daerah. Pada tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 6 program, 9 kegiatan, 25 sub kegiatan. Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Renja PD ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kabupaten Boyolali. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra Revisi 2021-2026.

Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali tahun 2024 ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali pada tahun 2024, Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali.

W. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL i

DAFTAR GAMBAR ii

KATA PENGANTAR iv

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM 1

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 4

1.3.2 TUJUAN 5

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB II 8

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP TAHUN LALU 8

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 8

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SATPOL PP 26

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATPOL PP 29

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 29

BAB III 49

TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP 49

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 49

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SATPOL PP 53

BAB IV 56

RENCANA KERJA DAN PENDANAANSATPOL PP 56

PROGRAM DAN KEGIATAN SATPOL PP 56

Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota 56

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 58

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 59

BAB V 88

PENUTUP 88

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan di Satpol PP Kabupaten Boyolali s.d Bulan Desember 2022 9
Tabel II. 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD S.D Tahun 2022 di Satpol PP Kabupaten Boyolali 15
Tabel II. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah di Satpol PP Kabupaten Boyolali : 28
Tabel II. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 30

Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Satpol PP Tahun 2021-2026 54

Tabel IV. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 di Satpol PP Kabupaten Boyolali 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Bagan Susunan Organisasi 27

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2025, dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan pada Tahun 2024.

Kami berharap Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali serta mendukung dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Boyolali, sehingga pembangunan di Kabupaten Boyolali dapat berjalan dengan lancar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Boyolali.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam Menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat perlu menyusun Rencana kerja (Renja).

Rencana kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan rincian rencana tahunan dari renstra. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali merupakan dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai penjabaran dari rumusan keinginan dan upaya untuk mewujudkan kondisi yang dicita-citakan secara bertahap melalui sumber dana APBD sesuai dengan yang diprioritaskan.

Untuk mencapai target rencana selama lima tahun yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja tahunan menggambarkan kondisi yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam periode tahun yang bersangkutan.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 merupakan suatu perwujudan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi pemerintah dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Good Governance.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 232);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 265);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 15);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);
25. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Maksud disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Adanya dokumen perencanaan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali Tahun 2024, yang memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah;

2. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dalam melaksanakan tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali tahun sebelumnya serta merumuskan arah kebijakan program dan kegiatan tahun 2024;

2. Mengarahkan pencapaian visi dan misi Kabupaten Boyolali ke dalam suatu strategi program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali merujuk pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;

3. Menyusun kebijakan program/kegiatan dan indikasi kegiatan tahun 2024;

4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja

BAB V : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428), maka landasan hukum satuan Polisi Pamong Praja semakin jelas. Sehingga keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja adalah institusi yang harus ada dalam suatu Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah ini ditindaklanjuti dengaan beberapa Peraturan Mendagri tentang kebijakan teknis Satpol PP, antara lain :

a. Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Permendagri nomo 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
c. Permendagri Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu Menegakan Perda dan Perkada; Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; Menyelenggarakan perlindungan masyarakat; dan Pemadam Kebakaran.

Pada Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel II. 1 Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan di Satpol PP Kabupaten Boyolali s.d Bulan Desember 2022

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
				Keuangan	Fisik
1	**Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah**				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Sub Kegiatan:				
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.307.715.000	4.254.816.149	98,77	100,00
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.655.625.000	2.652.810.000	99,89	100,00
	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0,00	100,00
	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0,00	100,00
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0,00	100,00
	6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	0	0,00	100,00
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Sub Kegiatan:				
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	195.000.000	193.000.000	98,97	100,00
	2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	535.545.000	502.095.908	93,75	100,00
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Sub Kegiatan:				
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	2.999.800	99,99	100,00
	2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	2.996.750	99,89	100,00
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	195.074.000	194.788.900	99,85	100,00
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	29.734.000	99,11	100,00
	5. Penyediaan Bahan/Material	25.000.000	24.551.400	98,21	100,00

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
				Keuangan	Fisik
	6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	162.975.000	157.370.000	96,56	100,00
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.422.000	299.304.712	99,63	100,00
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Sub Kegiatan:				
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	18.775.000	93,88	100,00
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Sub Kegiatan:				
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	3.600.000	100,00	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.868.000	49.602.174	99,47	100,00
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	0,00	100,00
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Sub Kegiatan:				
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	287.750.000	259.066.085	90,03	100,00
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.414.000	44.405.000	99,98	100,00
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Sub Kegiatan:				
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0,00	100,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0,00	100,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0,00	100,00
	4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0,00	100,00
	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	0,00	100,00

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
				Keuangan	Fisik
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0,00	100,00
	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0,00	100,00
	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	Sub Kegiatan:				
	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0,00	100,00
2	**Sasaran: Meningkatnya kohesivitas sosial masyarakat**				
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum				
	Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan:				
	1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	170.901.000	169.040.000	98,91	100,00
	2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	154.036.000	149.525.000	97,07	100,00
	3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0,00	100,00
	4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0,00	100,00
	5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang	0	0	0,00	100,00

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
				Keuangan	Fisik
	Bernuansa Hak Asasi Manusia				
	6. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0,00	100,00
	7. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0,00	100,00
	8. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	0	0	0,00	100,00
	Kegiatan: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				
	Sub Kegiatan:				
	1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0	0	0,00	100,00
	2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0	0	0,00	100,00
	3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0	0	0,00	100,00
	Kegiatan: Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan:				
	1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0	0	0,00	100,00
3	**Sasaran: Menurunnya resiko bencana**				
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran				

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
				Keuangan	Fisik
	Kegiatan: Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan:				
	1. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	14.647.000	14.599.000	99,67	100,00
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.230.000.000	1.217.700.000	99,00	100,00
	3. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0,00	100,00
	4. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0,00	100,00
	5. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	0	0	0,00	100,00
	6. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0,00	100,00
	7. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	0	0	0,00	100,00
	8. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	0	0	0,00	100,00
	9. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0	0	0,00	100,00
TOTAL		**10.388.572.000**	**10.240.779.878**	**98,58**	**100,00**

Sumber : LKJIP Satpol PP Kab. Boyolali Tahun 2022

Dari Tabel diatas diketahui bahwa secara keseluruhan capaian keuangan dan capaian fisik sub kegiatan sudah cukup baik, dimana serapan keuangan sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp.10.240.779.878 atau 98,58%. Sedangkan capaian fisik sub kegiatan terlaksana 100%.

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2022, dilaksanakan juga Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 berdasarkan pada outcome setiap program sesuai dengan Formulir Evaluasi Pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 seperti yang terlampir pada Tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel II. 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD S.D Tahun 2022 di Satpol PP Kabupaten Boyolali

Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
								PD sd Tahun Berjalan		
				Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renstra sd Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)**	**100**	**100**	178,75	106,67	**100**	**100**	**100**	100
	Kegiatan									
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	150	150	178,75	119,17	165	917	343,75	37,49
	Sub Kegiatan									
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan CegahDini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Frekwensi Pencegahan gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat melaui Deteksi dini, Cegah dini, Pembi naan dan Penyuluhan serta pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Pengawalan	72	72	72	100,00	72	360	144	40,00
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda danPerkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Frekwensi Kegiatan Penindakan atas gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada	50	50	50	100,00	50	250	100	40,00

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sd Tahun Berjalan		
				Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renstra sd Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi Penyelenggaraan Keteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	Frekwensi Pelaksanaan Koordinasi	6	6	6	100,00	6	30	12	40,00
	Pemberdayaan Perlindungan masyarkat dalam rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Petugas Linmas yang terdata	100	100	600	600,00	100	500	700	140,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol dan Satlinmas termasuk Pelaksana yang bernuansa HAM	Jumlah SDM satpol PP yang mengi'kuti kegiatan peningkatan kapasitas	50	50	153	306,00	50	250	203	81,20
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pence gahan dan Penanganan	Jumlah Kegiatan Kerjasama antarlembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan	15	15	16	106,67	15	75	31	41,33
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kendaraan operasional yang memadai.	1	1	1	100,00	1	5	2	40,00
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang memperoleh 'Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	25	25	532	2128,00	25	125	557	445,60
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (SPM)**	**100**	**100**	87,2	87,20	**100**	**100**	**100**	100
	Kegiatan									
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten, Peraruran Bupati	Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak lanjuti	150	150	204,66	136,44	165	917	369,66	40,31
	Sub Kegiatan									
	Sosialisasi Penegakan Perda dan Peraturan Bupati	Frekwensi Sosialisasi Perda Trantibbum.	150	150	76	50,67	150	750	226	30,13

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sd Tahun Berjalan		
				Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renstra sd Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah warga Negara yang diberi mendapat Sosialisasi								
	Pengawasan atas kepatuhan ter hadap Pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati	Frekuensi Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan bupati Jumlah Pelanggar Perda dan Perbup	75	75	74	98,67	75	375	149	39,73
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.	Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tertangani	50	50	130	260,00	50	250	180	72,00
	Kegiatan									
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten	PPNS Kabupaten yang aktif	50	50	0	0,00	55	307	55	17,92
	Sub Kegiatan									
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas dan Karir Frekuensi Diklat PPNS	42	42	0	0,00	42	210	42	20,00
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)**	**100**	**100**	102,49	102,49	**100**	**100**	**100**	100
	Kegiatan									
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan BahanBerbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan,Pengendalian, Pemadam,Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan Beracun Kebakaran dlm daerah kabupaten	85	85	71,434	84,04	85	85	156,434	184,04
	Sub Kegiatan									

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sd Tahun Berjalan		
				Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renstra sd Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten	Jumlah Pencegahan kebakaran Kabupaten yang tertangani	65	65	65	100,00	65	325	130	40,00
	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten	65	65	65	100,00	65	325	130	40,00
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.	Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran ran yang tertangani	65	65	65	100,00	65	325	130	40,00
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah	Jumlah Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah.	50	50	44	88,00	50	250	94	37,60
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan AlatPelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakarn dan alat memenuhi standart	6	6	6	100,00	6	30	12	40,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan AlatPelindung Diri	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat tersedia	1	1	1	100,00	1	5	2	40,00
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran.	Jumlah 'Aparatur Pemadam Kebakaran yang mengikuti Pembinaan	100	100	106	106,00	100	500	206	41,20
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Sistem Komunikasi dan Infor masi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Yang dikelola (Alkom)	4	4	4	100,00	4	20	8	40,00

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sd Tahun Berjalan		
				Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renstra sd Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyelenggaraan Kerja sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatas, antar lembaga dan kemitraan Pencegahan, Penanggulangan, pe nyelamatan Kebakaran dan Pe nyelamatan Non Kebakaran.	Frekuensi Penyelenggaraan Kerjasama Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar lembaga dan Kemitraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	6	6	7	116,67	6	30	13	43,33
	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah data Sarana dan Prasarana Proteksi.	4	4	4	100,00	4	20	8	40,00
	Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Nilai Kelayakan Proteksi Kebakaran	150	150	30	20,00	150	750	180	24,00
	Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penilaian dan Pengujian Penyebab Kejadian.	Frekuensi investigasi kejadian kebakaran	150	150	30	20,00	150	750	180	24,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan Penanggu kebakaran melalui Sosialisasi masyarakat	Jumlah Relawan yang aktif dalam penangulangan kebakaran melalui Sosialisasi masyarakat	100	100	0	0,00	100	500	100	20,00
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran melalui penyedia	Jumlah Pembinaan Relawan yang aktif	100	100	0	0,00	100	500	100	20,00
	Penyelenggaraam Operasi Pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa,membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.	Jumlah Operasi Pencarian dan perto longan yang menimpa, membahayakan keselamatann manusia	66	66	26	39,39	66	330	92	27,88
	Standarisasi Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap Kondisi membahayakan manusia,Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelamatan dan Evakuasi	6	6	8	133,33	6	30	14	46,67

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sd Tahun Berjalan		
				Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renstra sd Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana dlm Pertolongan terhadap manusia	Jumlah sarana dalam pencarian yang memadai	6	6	8	133,33	6	30	14	46,67
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan	Jumlah Aparatur pencarian yang terampil	25	25	39	156,00	25	125	64	51,20
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standart	100	100	123,11	123,11	100	100	100	100,00
	Kegiatan									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Aparatur Satpol PP yang menerima Gaji dan Tunjangan Khu sus	50	50	33	66,00	55	304	88	28,95
	Sub Kegiatan									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji & Tunjangan ASN Satpol PP	12	12	12	100,00	12	60	24	40,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium	104	104	109	104,81	104	520	213	40,96
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12	12	12	100,00	12	60	24	40,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12	12	12	100,00	12	60	24	40,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	18	100,00	18	90	36	40,00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	2	2	2	100,00	2	10	4	40,00
	Kegiatan									

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sd Tahun Berjalan		
				Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renstra sd Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Dokumen Barang Milik Daerah dalam pendataan	3	3	3	100,00	3	15	6	40,00
	Sub Kegiatan									
	Penyusunan Perencanaan Barang Kebutuhan Milik Daerah SKPD	Dokumen Perencanaa barang milik daerah	3	3	3	100,00	3	15	6	40,00
	Kegiatan									
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas dan Aparatur yang mengikuti Pendi dikan dan Pelatihan	154	154	142	92,21	169	934	311	33,30
	Sub Kegiatan									
	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas	139	139	139	100,00	139	695	278	40,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	15	3	20	15	75	18	24,00
	Kegiatan									
	Administrasi Umum Perangkat 'Daerah	Peningkatan Administrasi Umum Perangkat daerah	12	12	12	100,00	12	60	24	40,00
	Sub Kegiatan									
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Alat-alat listrik dan lampu penerangan kantor	12	12	12	100,00	12	60	24	40,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor yang disediankan	12	12	12	100,00	12	60	24	40,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	12	12	12	100,00	12	60	24	40,00
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	12	12	100,00	12	60	24	40,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dokumen yang dicetak / digandakan	12	12	12	100,00	12	60	24	40,00

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sd Tahun Berjalan		
				Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renstra sd Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan Koran	12	12	12	100,00	12	60	24	40,00
	Penyediaan bahan / Material	Jumlah Bahan Material	12	12	12	100,00	12	60	24	40,00
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah fasilitasi yg disediakan	12	12	12	100,00	12	60	24	40,00
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	12	12	12	100,00	12	60	24	40,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Admin /Operator /Sistem Informasi yang dikerjakan	1	1	1	100,00	1	5	2	40,00
	Kegiatan									
	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah'	5	5	3	60,00	5	25	8	32,00
	Sub Kegiatan									
	Pengadaan Kend. Dinas Operasi onal atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	1	1	1	100,00	1	5	2	40,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	1	1	0	0,00	1	5	1	20,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	4	4	2	50,00	4	20	6	30,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor/ bangunan lainnya	1	1	0	0,00	1	5	1	20,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Kantor /bangunan lainnya	1	1	0	0,00	1	5	1	20,00
	Kegiatan									

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sd Tahun Berjalan		
				Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renstra sd Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium Jumlah Cleaning Service yang di bayar gajinya Jumlah Iklan yang disediakan	12	12	12	100,00	12	60	24	40,00
	Sub Kegiatan									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Perangko yang dibeli	12	12	12	100,00	12	60	24	40,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik, Tv Kabel dan Internet	12	12	12	100,00	12	60	24	40,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	12	12	12	100,00	12	60	24	40,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli	12	12	12	100,00	12	60	24	40,00
	Kegiatan									
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi baik	16	16	24	150,00	16	60	40	66,67
	Sub Kegiatan									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan dan Service	16	16	24	150,00	16	60	40	66,67
		Jumlah Website yang dikelola/	12	12	12	100,00	12	60	24	40,00
	Kegiatan									
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	25	25	25	100,00	25	125	50	40,00

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sd Tahun Berjalan		
				Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Target Renstra sd Tahun 2026	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2	2	2	100,00	2	10	4	40,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	1	1	100,00	1	5	2	40,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	1	1	100,00	1	5	2	40,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	1	1	1	100,00	1	5	2	40,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	1	1	1	100,00	1	5	2	40,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15	15	15	100,00	15	75	30	40,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	100,00	4	20	8	40,00

Pada Tahun Anggaran 2022 Satpol PP Kabupaten Boyolali mendapatkan anggaran sebesar Rp. 10.388.572.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 10.240.779.878,00 atau 98,58% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 147.792.122,00 atau 1,42%. Dilaksanakan dalam 3 Program, 16 Kegiatan dan 75 Sub Kegiatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan efektifitas dan efesiensi anggaran. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 maupun perkiraan capaian Tahun Anggaran 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Satpol PP Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencapaian Indikator Kinerja belum sepenuhnya didukung dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, sehingga berpengaruh terhadap kualitas dan kecepatan pelayanan masyarakat.
b. Masih kurangnya SDM terlatih dan bersertifikat dalam Penegakan Perda, Penyelenggaraan Tibumtranmas, Penyelenggaraan Linmas, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satpol PP Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026, maka pada Tahun 2024 Satpol PP Kabupaten Boyolali menyusun strategi :

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemenuhan managemen kebutuhan kantor, termasuk sarana prasarana pelayanan;
b. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baik, berkualitas dan sistematis, termasuk dokumen perencanaan dan kajian rencana induk yang bersifat teknis yang menunjang pencapaian kinerja Satpol PP; dan
c. Menyiapkan rencana tindak pemenuhan SDM terlatih dan bersertifikat.

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Meningkatkan pemenuhan managemen kebutuhan kantor; sarana prasarana penegakan perda, penyelenggaraan trantibum linmas, pemadaman kebakaran dan penyelamatan (rescue);
b. Menyusun rencana kerja, rencana induk system proteksi kebakaran dan standar operasional pelayanan dan dokumen lain yang menunjang pencapaian kinerja Satpol PP ; dan
c. Optimalisasi koordinasi dengan BKP2D dalam peningkatan SDM terlatih dan bersertifikat dalam hal keikutsertaan diklat dan sejenisnya.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SATPOL PP

Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Peraturan Bupati Boyolali Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya; dan
6. Pengawasan terhadap masyarakat dan aparatur atau Satpol PP agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri dari:
    a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah; dan
    b. Seksi Penindakan.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari:
    a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
    b. Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perlindungan Masyarakat; dan
b. Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat.

6. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
   a. Seksi Operasional dan Pengendalian Pemadam kebakaran dan Penyelamatan; dan
   b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 131 Tahun 2021 :

Gambar II. 1 Bagan Susunan Organisasi

Satpol PP Kabupaten Boyolali

Sumber : Perbup Boyolali No 131 Tahun 2021

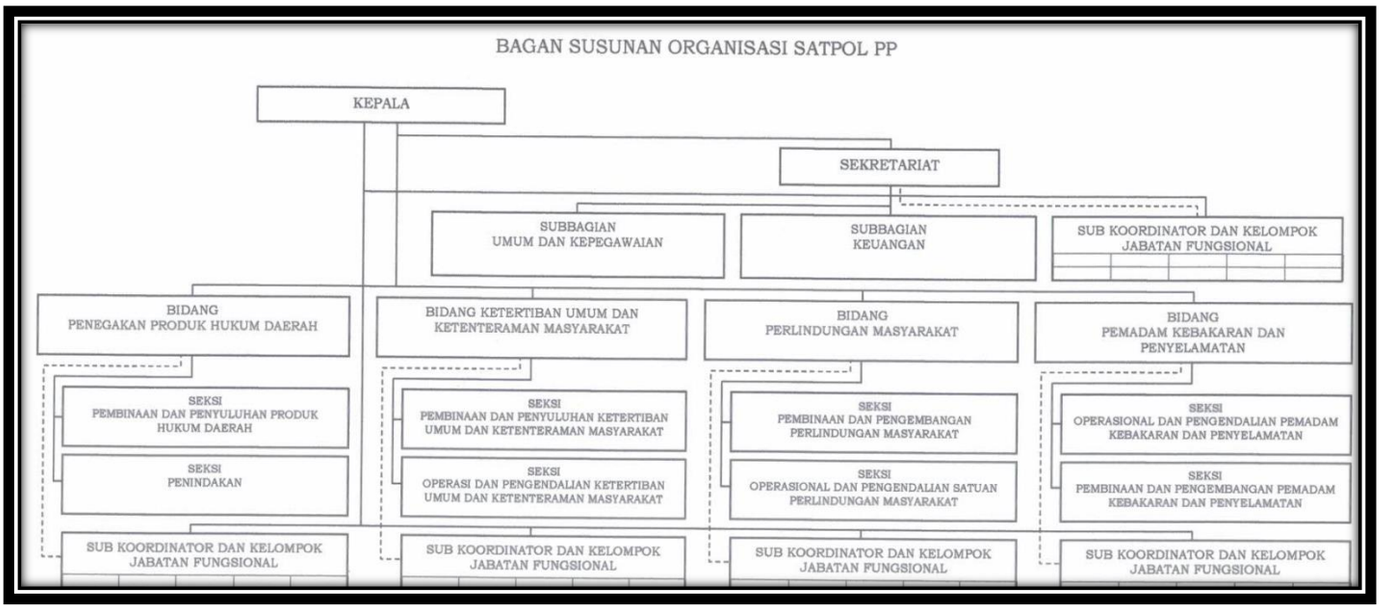

Dalam perencanaan program kegiatan dan sub kegiatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, Satpol PP Kabupaten Boyolali telah menerapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan dokumen Renja Tahun 2024 juga berpedoman pada Renstra Satpol PP Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dan RPJMD Boyolali Tahun 2021-2026. Berikut Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah di Satpol PP Kabupaten Boyolali Tahun 2022.

Tabel II. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah di Satpol PP Kabupaten Boyolali :

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian 2022	Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026		2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Angka Potensi Konflik Sosial	-	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	100	100	100	100	100	106,67	100	100	
		100%	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (SPM)	100	100	100	100	100	87,2	100	100	Perlunya aktivasi sekretariat PPNS
2	Indeks Kapasitas (komponen Indeks Resiko Bencana)	100%	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	100	100	100	100	100	102,49	100	100	
		15 menit	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	20,16	19,16	18,16	17,16	16,16	27,8	19,16	18,16	Perlunya penambahan pos damkar dan relawan damkar
3	Nilai Sakip Satpol PP	-	Prosentase penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standart	100	100	100	100	100	123,11	100	100	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATPOL PP

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, Satpol PP Kabupaten Boyolali tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ditentukan oleh SDM, sarana prasarana dan kondisi eksternal terkini. Adapun isu-isu penting tersebut antara lain :

1. Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, yang meliputi Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Gubernur dan Kepala Daerah;
2. Ketersediaan SDM terlatih dan bersertifikasi yang dapat menjawab kebutuhan pelayanan publik;
3. Ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang kesigapan dalam pelayanan publik;
4. Ketersediaan dokumen perencanaan yang memadai guna pencapaian indikator pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Boyolali dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 seperti yang telah tersaji pada tabelberikut ini :

Tabel II. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2024

Kode (Sesuai kepmen 050-5889)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Boyolali	**Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)**	**100**	**491.870.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Boyolali	**Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)**	**100**	**4.744.732.400**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Boyolali	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	30	491.870.000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Boyolali	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	30	4.744.732.400	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Boyolali	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	30	269.522.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Boyolali	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	30	3.548.182.400	Hibah Pilkada Polri, TNI, Monev Pemilu Satpol, Monev Pilkada Satpol, PKL dst & PAM Lebaran dst

Kode (Sesuai kepmen 050-5889)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Boyolali	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	30	189.036.000	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Boyolali	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	30	140.000.000	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	-	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	-	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Boyolali	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	-	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Boyolali	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	926.550.000	Honor Linmas diluar TPS, Pembinaan Linmas
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan	Boyolali	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	50	-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan	Boyolali	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	50	130.000.000	Korsik, latgar, keg melibatkan satlinmas, Pembinaan satlinmas keluar daerah

Kode (Sesuai kepmen 050-5889)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Catatan**
	Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1	-	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1	-	
1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Boyolali	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1	-	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Boyolali	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1	-	
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	33.312.000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	-	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Boyolali	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (SPM)**	**100**	**-**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Boyolali	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (SPM)**	**100**	**672.000.000**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Boyolali	jumlah perda/perkada yang ditegakkan	5	-	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Boyolali	jumlah perda/perkada yang ditegakkan	5	672.000.000	
	Sub kegiatan					**Sub kegiatan**					

Kode (Sesuai kepmen 050-5889)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Catatan**
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Boyolali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1	-	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Boyolali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1	-	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Boyolali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	-	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Boyolali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	-	
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Boyolali	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1	-	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Boyolali	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1	672.000.000	DBHCHT
	Kegiatan					**Kegiatan**					
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Boyolali	PPNS Kabupaten yang aktif	5	-	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Boyolali	PPNS Kabupaten yang aktif	5	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					

Kode (Sesuai kepmen 050-5889)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Catatan**
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Boyolali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	-	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Boyolali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	-	
				126,32					**126,32**		
				85,00					**85,00**		
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Boyolali	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)**	**100**	**1.244.647.000**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Boyolali	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)**	**100**	**1.244.647.000**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Boyolali	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran yang ditangani dalam Daerah Kabupaten/Kota	85	1.244.647.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Boyolali	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran yang ditangani dalam Daerah Kabupaten/Kota	85	1.206.796.625	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Boyolali	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah	1	-	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Boyolali	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah	1	50.000.000	

Kode (Sesuai kepmen 050-5889)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
			Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya					Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya			
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1	-	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1	-	
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	-	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	-	
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1	14.647.000	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1	300.000.000	RISPK

Kode (Sesuai kepmen 050-5889)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Boyolali	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1	1.230.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Boyolali	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1	812.050.625	Rekon mobil damkar, Repeater, vertical resque, SAR air
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Boyolali	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	39	-	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Boyolali	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	39	44.746.000	Lomba National Fire Figther Skill Competition
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Boyolali	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	1	-	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Boyolali	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	1	-	

Kode (Sesuai kepmen 050-5889)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1	-	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Boyolali	Jumlah dokumen inspeksi peralatan proteksi kebakaran	1	-	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Boyolali	Jumlah dokumen inspeksi peralatan proteksi kebakaran	1	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Boyolali	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1	-	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Boyolali	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1	-	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Boyolali	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1	-	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Boyolali	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Boyolali	Jumlah dokumen investigasi kejadian kebakaran	1	-	Investigasi Kejadian Kebakaran	Boyolali	Jumlah dokumen investigasi kejadian kebakaran	1	-	

Kode (Sesuai kepmen 050-5889)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Boyolali	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	1	-	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Boyolali	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	1	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Boyolali	Jumlah relawan pemadam kebakaran	100	-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Boyolali	Jumlah relawan pemadam kebakaran	100	37.850.375	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Boyolali	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100	-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Boyolali	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100	-	
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Boyolali	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	50	-	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Boyolali	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	50	37.850.375	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap	Boyolali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Pembinaan Aparatur Operasi Pencarian dan	2	-	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Boyolali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Pembinaan Aparatur Operasi Pencarian	2	-	

Kode (Sesuai kepmen 050-5889)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Catatan**
	Kondisi Membahayakan Manusia		Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Boyolali	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1	-	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Boyolali	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1	-	
1.05.04.2.05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Boyolali	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1	-	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Boyolali	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1	-	
1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Boyolali	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Boyolali	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1	-	

Kode (Sesuai kepmen 050-5889)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Catatan**
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Boyolali	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1	-	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Boyolali	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1	-	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Boyolali	**Prosentase penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standart**	**100**	**8.263.150.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Boyolali	**Prosentase penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standart**	**100**	**8.777.982.250**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Boyolali	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7	7.133.976.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Boyolali	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7	7.167.976.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Boyolali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	4.700.376.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Boyolali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	4.000.812.000	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	2.433.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	3.167.164.000	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Boyolali	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Boyolali	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	-	
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Boyolali	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Boyolali	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	-	

Kode (Sesuai kepmen 050-5889)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Boyolali	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Boyolali	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18	-	
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Boyolali	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Boyolali	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	-	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Boyolali	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Boyolali	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18		
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Boyolali	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Boyolali	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Boyolali	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Boyolali	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan	Boyolali	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	3	-	Penyusunan Perencanaan	Boyolali	Jumlah Rencana Kebutuhan	3	-	

Kode (Sesuai kepmen 050-5889)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Catatan**
	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Milik Daerah SKPD			Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Barang Milik Daerah SKPD			
X.XX.01. 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Boyolali	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Boyolali	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
X.XX.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Boyolali	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Boyolali	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	312.448.750	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
X.XX.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Boyolali	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Boyolali	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	229.293.750	pakaian damkar, seragam korps musik
X.XX.01. 2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	-	
X.XX.01. 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Boyolali	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Boyolali	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	-	
X.XX.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Boyolali	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Boyolali	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	83.155.000	Diklat Damkar (tergantung sdh dibiayai BKP2D belum)
	Kegiatan					**Kegiatan**					
X.XX.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Boyolali	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11	510.674.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Boyolali	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11	671.657.500	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					

Kode (Sesuai kepmen 050-5889)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Boyolali	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Boyolali	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	5.000.000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Boyolali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Boyolali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	18.100.000	Gorden gedung tegak lurus, wireles, taplak, bendera
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Boyolali	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Boyolali	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	3.000.000	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Boyolali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	173.074.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Boyolali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	273.074.000	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Boyolali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	30.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Boyolali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	30.000.000	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Boyolali	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Boyolali	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Boyolali	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	25.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Boyolali	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	25.000.000	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Boyolali	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	176.600.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Boyolali	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	200.000.000	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Boyolali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Boyolali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	117.483.500	
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Boyolali	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	12	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Boyolali	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	12	-	

Kode (Sesuai kepmen 050-5889)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
			Dinamis pada SKPD					Dinamis pada SKPD			
X.XX.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Boyolali	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Boyolali	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
X.XX.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Boyolali	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Boyolali	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	164.250.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
X.XX.01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Boyolali	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Boyolali	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	-	
X.XX.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Boyolali	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	-	Pengadaan Mebel	Boyolali	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	20.000.000	Mebel ruang lantai 2 (damkar)
X.XX.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Boyolali	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Boyolali	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	144.250.000	Terompet korsik, Laptop
X.XX.01. 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Boyolali	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Boyolali	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	-	
X.XX.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Boyolali	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Boyolali	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	-	

Kode (Sesuai kepmen 050-5889)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
	Kegiatan					**Kegiatan**					
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Boyolali	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	48.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Boyolali	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	54.400.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3.600.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3.600.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	44.100.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	50.000.000	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	800.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Boyolali	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	570.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Boyolali	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	407.250.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					

Kode (Sesuai kepmen 050-5889)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Catatan**
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Boyolali	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	570.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Boyolali	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	307.250.000	
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Boyolali	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1		Pemeliharaan Mebel	Boyolali	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	-	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Boyolali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Boyolali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37	50.000.000	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Boyolali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Boyolali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	50.000.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Boyolali	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Boyolali	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Boyolali	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Boyolali	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	-	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Boyolali	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Boyolali	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	-	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Boyolali	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Boyolali	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	-	

Kode (Sesuai kepmen 050-5889)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
			Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Boyolali	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Boyolali	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	-	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Boyolali	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Boyolali	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	-	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Boyolali	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Boyolali	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	-	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Boyolali	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Boyolali	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	-	
					9.999.667.000					**15.439.361.650**	

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Satpol PP Kabupaten Boyolali akan menelaah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah terkait maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Berikut adalah Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 di Satpol PP Kabupaten Boyolali:

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024 KABUPATEN BOYOLALI

Satpol PP Kabupaten Boyolali

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam RPJMN 2020-2024 dimana terdapat **7 Agenda PrioritasPembangunan Nasional** diantaranya yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan danMenjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda Pembangunan Nasional tersebut dalam pelaksanaan pembangunannya, difokuskan atau diarahkan pada kebijakan-kebijakanyang dapat memberikan daya ungkit besar terhadap pembangunan nasional serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Penjabaran dari 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas diantaranya yakni :

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.**

   Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

   a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, sertakehutanan; dan
   b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry,

kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangandan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatanruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

c. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
d. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
e. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
f. Memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan tekhnologi berbasis kewilayahan dalammendukung ekonomi unggulan daerah; dan
g. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untukmenuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f. Pengentasan kemiskinan; dan
g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubahcara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan

kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada :

h. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
i. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
j. Revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

4. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung PengembanganEkonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastrukturakan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

k. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahuikebutuhan infrastruktur wilayah;
l. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalampembangunan;
m. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
n. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
o. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

5. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan KetahananBencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :

p. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
q. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
r. Pembangunan rendah karbon

6. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan TransformasiPelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

s. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
t. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
u. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
v. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
i. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.

Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu : **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Terdapat 8 Arah Kebijakan Prioritas Nasional dalam RKP 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN);
8. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

Sasaran dan Target Pembangunan Nasional tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan berada pada kisaran 5,3% hingga 5,7%;
b. Tingkat kemiskinan 6,5% hingga 7,5%;
c. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0%-5,7%;
d. Rasio Gini 0,374-0,477 poin;
e. Indeks pembangunan manusia (IPM) 73,99-74,02;
f. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,27%;
g. Nilai Tukar Petani 105-108 poin;
h. Nilai Tukar Nelayan 107-110 poin;

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SATPOL PP

Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kabupaten Boyolali Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Adapun Visi dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 adalah **"Boyolali Maju, meneruskan Pro Investasi" (Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)).**

Sebagai bentuk perwujudan Visi, maka disusunlah Misi Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi Dan Berkelanjutan;
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter Dan Berbudaya;
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional;
4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Terpercaya; dan
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri Dan Berdaya Saing.

Dari ke lima misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mendukung Misi ke 2 yaitu Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter Dan Berbudaya.

Fokus pelaksanaan misi tersebut pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah meningkatnya kohesivitas sosial masyarakat, menurunnya resiko bencana, meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut maka Satpol PP mempunyai Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Capaiannya sesuai dengan Renstra Satpol PP Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026, seperti yang tersaji dalam Tabel 3.1 :

Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Satpol PP Tahun 2021-2026

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya ketahanan sosial	**Angka Konflik Sosial**	**Angka**	**18**	**16**	**13**	**12**	**10**	**8**
Meningkatnya kohesivitas sosial masyarakat	Angka Potensi konflik sosial	Angka	20	17	15	13	11	9
Meningkatnya ketahanan sosial	**Index Resiko Bencana (IRB)**	**Nilai**	**130,32**	**130,32**	**128,32**	**126,32**	**124,32**	**122,32**
Menurunnya resiko bencana	Indeks Kapasitas	Nilai	82	82	83	85	86	87
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	**Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**763**	**800**	**823**	**833**	**893**	**903**
Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah	Nilai Sakip Satpol PP	Nilai	77,43	76,43	76,43	82	84	84

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi Kajian Pembagunan Daerah	Persen	50	50	50	60	65	70	75

Sumber Dari : Renstra Satpol PP Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP

PROGRAM DAN KEGIATAN SATPOL PP

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolalai Pada Tahun 2024 terdiri atas :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki Indikator : Prosentase penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standart, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  d) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
  f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  g) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan SubKegiatan:
  a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  c) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  d) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

- Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  f) Penyediaan Bahan/Material
  g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  h) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  i) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  j) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  k) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  b) Pengadaan Mebel
  c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  d) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b) Pemeliharaan Mebel
c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d) Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan BangunanLainnya

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program ini memiliki Indikator : Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan), dengan kegiatan sebagai berikut :

❖ Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
a) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
b) Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
c) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
d) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
e) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
f) Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik

Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

g) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

h) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

❖ Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dengan Sub Kegiatan:

a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

b) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

c) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

❖ Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dengan Sub Kegiatan :

a) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini memiliki Indikator : Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM), dengan Kegiatan sebagai berikut :

❖ Koordinasi Pencegahan, Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

a) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

b) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

c) Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

d) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

f) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

g) Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
h) Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, dengan Sub Kegiatan :
  a) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
  b) Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- Investigasi Kejadian Kebakaran, dengan Sub Kegiatan :
  a) Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, dengan Sub Kegiatan :
  a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
  b) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
- Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia, dengan Sub Kegiatan :
  a) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
  b) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
  c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
  d) Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Berikut adalah Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 di Satpol PP Kabupaten Boyolali :

Tabel IV. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 di Satpol PP Kabupaten Boyolali

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BOYOLALI
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**13.348.714.000,00**							**9.999.667.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.348.714.000,00**							**9.999.667.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**13.348.714.000,00**							**9.999.667.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	**84 Persen 84 Persen 84 Angka**			-	**7.668.880.000,00**						**84 Persen 84 Persen 84 Angka**	**8.263.150.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.581.494.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	7.133.976.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	3.761.446.000,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		4.700.376.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	2.820.048.000,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		2.433.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	566.296.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	510.674.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	18.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	197.896.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		173.074.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	30.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	25.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	176.604.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		176.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	110.696.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	40.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	53.840.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	48.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.600.000,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		3.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	49.440.000,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		44.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	800.000,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	407.250.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	570.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	307.250.000,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		570.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	50.000.000,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	**100 Persen 100 Persen**			-	**4.933.550.000,00**						**100 Persen 100 Persen**	**491.870.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.261.550.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	491.870.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	926.550.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Orang	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				30 laporan	3.115.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		269.522.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				30 Laporan	140.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		189.036.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah														
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		33.312.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	672.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				1 Laporan	672.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	-	**100 Persen**			-	**746.284.000,00**						**100 Persen**	**1.244.647.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	708.434.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	1.244.647.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		14.647.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				39 Orang	44.746.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				0 Desa/Kelurahan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				1 Unit	613.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		1.230.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-			-	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-			-	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	37.850.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				100 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				50 Desa/Kelurahan	37.850.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-			-	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	JUMLAH							**13.348.714.000,00**							**9.999.667.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra PD.

Rencana Kerja Perangkat daerah ini memuat Tujuan dan Sasaran Pencapaian Misi, Program dan Usulan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Boyolali Tahun 2024. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali selain menjadi Acuan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen beserta seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kea rah yang lebih baik di masa datang.

Semoga Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024.

X. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Hidayah dan Inayah-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dapat disusun.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu acuan/pedoman perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing bidang dan sekretariat.

Dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali didasarkan pada dokumen Renstra BP3D 2021-2026 tahun ke-3 dan telah disesuaikan target dan satuan indikator sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Akhirnya semoga Renja ini bermanfaat dan dapat menjadikan suatu pedoman kerja, utamanya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

DAFTAR ISI

		Hal
HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BP3D TAHUN 2022**.....	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BP3D Tahun 2022.....	7
	2.2 Capaian Indikator Kinerja BP3D	61
	2.3 Isu-Isu Strategis dan Permasalahan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BP3D	63
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	64
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	90
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN**	91
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	91
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja BP3D.....	94
	3.3 Program dan Kegiatan Prioritas.....	95
BAB IV	**RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN**.....	101
1	4.1 Program dan Kegiatan.....	101
BAB V	**PENUTUP**	126

DAFTAR TABEL

		Hal
TABEL 2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (RPJMD 2016-2021)	12
TABEL 2.1.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 RPJMD 2021-2026 (Revisi Renstra 050-5889)	36
TABEL 2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021-2026	62
TABEL 2.3	Identifikasi Isu-isu Strategis terkait Tupoksi BP3D	64
TABEL 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023	65
TABEL 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	90
TABEL 3.1	Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional dengan Perangkat Daerah	92
TABEL 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BP3D	94
TABEL 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 (Program Prioritas)	97
TABEL 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) merupakan Dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Acuan Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 serta hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matrik yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Secara substansial di dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan :

1. Pedoman bagi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.
2. Dokumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengembangan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah untuk pembangunan suatu wilayah maka perencanaan menduduki peran yang sangat penting agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif

penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu Dokumen perencanaan dengan Dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Dalam hal ini hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan kebijakan pembangunan nasional maupun rencana pembangunan kabupaten/kota diharapkan tetap sinergis saling berkaitan satu sama lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali merupakan salah satu lembaga yang berperan aktif dan memberikan konstribusi yang besar terhadap pembangunan di Kabupaten Boyolali. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang proporsional, terintegrasi, inovatif dan berkelanjutan, maka perlu dipersiapkan suatu Dokumen perencanaan daerah yang bersifat komprehensif mencakup arah dan kebijakan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 yang berfungsi sebagai Dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Ranwal Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahun implementasi pencapaian visi daerah yaitu "**BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas**" yang diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas BP3D dalam penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan dalam perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Renja BP3D Tahun 2024 juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 232);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225) dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 224);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 55
18. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 132);
19. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 Kabupaten Boyolali (Berita daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 42).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuannya yaitu :

1. Memberikan landasan operasional bagi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah;
3. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2022

Memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali, analisis kinerja pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali, isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali serta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali.

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

Memuat rencana program dan kerangka pendanaan Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2023. Pada tahun 2022 BP3D Kabupaten Boyolali melaksanakan sebanyak 4 (empat) program yang telah disesuaikan dengan nomenklatur Permendagri nomor 90 tahun 2019 dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp7.574.386.000,00 (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp7.243.768.419,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah) atau sebesar 95,64%. Secara detail pelaksanaan untuk program-program BP3D Kabupaten Boyolali Tahun 2022 dapat diberikan gambaran sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja BP3D Kabupaten Boyolali. Indikator Kinerjanya adalah Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%.

   Program ini terdiri atas 5 (lima) kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal dan bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan perencanaan pelaporan. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan ini sebesar Rp5.790.381.000,00 terealisasi sebesar Rp5.753.243.573,00 (99,36%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :

   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

      Kegiatan dicapai dengan indikator output terbayarnya gaji dan tunjangan serta honor tenaga kontrak selama 12 bulan. Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp4.247.121.000,00 terserap sebesar Rp4.194.029.138,00 atau sebesar 98,75%.

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan dicapai dengan indikator output tercukupinya kebutuhan pelayanan umum kantor selama 12 bulan. Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp1.099.951.000,00 terserap sebesar Rp1.072.585.479,00 atau sebesar 97,51%.

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan dicapai dengan indikator output tercukupinya jasa penunjang kantor selama 12 bulan. Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp69.550.000,00 terserap sebesar Rp55.697.248,00 atau sebesar 80,08%.

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan dicapai dengan indikator output tercukupinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah kantor selama 12 bulan. Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp113.309.000,00 terserap sebesar Rp62.407.829,00 atau sebesar 55,08%.

e. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan dicapai dengan indikator output tersusunnya Dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja kantor selama 12 bulan. Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dicapai dengan nol anggaran.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam rangka mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Indikator Kinerjanya adalah

a. Persentase capaian target program dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%.
b. Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam Dokumen perencanaan daerah dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%.

Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi anggaran untuk sebesar Rp391.000.000,00 terealisasi sebesar Rp342.729.196,00 (87,65%) dengan sebagai berikut :

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

Kegiatan dicapai dengan indikator output Dokumen Perencanaan dan Pendanaan sesuai regulasi yang tersusun tepat waktu. Capaian Indikator Kinerja

sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp141.000.000,00 terserap sebesar Rp114.858.000,00 atau sebesar 81,46%.

b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kegiatan dicapai dengan indikator output Jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai regulasi, akurat, update sebagai baseline perencanaan. Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp20.000.000,00 terserap sebesar Rp13.650.000,00 atau sebesar 68,25%.

c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kegiatan dicapai dengan indikator output Jumlah Dokumen evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang selaras, sesuai regulasi dan tepat waktu. Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp230.000.000,00 terserap sebesar Rp214.221.196,00 atau sebesar 93,14%.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Indikator Kinerjanya adalah

a. Persentase keterpaduan antar Dokumen RPJMD dengan RKPD dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%.
b. Persentase kesesuaian antara RKPD dan Renja dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%.

Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi anggaran nol rupiah yaitu sebagai berikut :

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Kegiatan dicapai dengan indikator output Program RKPD/RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang konsisten. Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran nol rupiah.

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).

Kegiatan dicapai dengan indikator output Program RKPD/RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang konsisten. Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran nol rupiah.

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan dicapai dengan indikator output Program RKPD/RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang konsisten. Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran nol rupiah.

4. Program Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan dalam rangka mendukung penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah. Indikator Kinerjanya adalah

a. Prosentase *policy brief* bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dengan target program sebesar 75% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 75%.
b. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan dengan target program sebesar 75% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 75%.

Program ini terdiri atas 4 (empat) kegiatan dengan alokasi anggaran untuk sebesar Rp1.275.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.147.795.650,00 (90,23%) dengan sebagai berikut :

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Kegiatan dicapai dengan indikator output Jumlah kajian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajiaan peraturan yang telah disusun *policy brief* dan didiseminasikan. Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp380.000.000,00 terserap sebesar Rp348.179.700,00 atau sebesar 91,63%.

b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.

Kegiatan dicapai dengan indikator output Jumlah kajian bidang sosial dan kependudukan yang telah disusun *policy brief* dan didiseminasikan. Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 terserap sebesar Rp99.228.450,00 atau sebesar 99,23%.

c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Kegiatan dicapai dengan indikator output Jumlah kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang telah disusun policy brief dan didiseminasikan. Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp395.000.000,00 terserap sebesar Rp388.735.300,00 atau sebesar 98,41%.

d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan dicapai dengan indikator output Jumlah Inovasi yang masuk/diakui dalam database daerah. Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp400.000.000,00 terserap sebesar Rp311.652.200,00 atau sebesar 77,91%.

Capaian Indikator Kinerja Keseluruhan di BP3D Kabupaten Boyolali telah optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan BP3D Kabupaten Boyolali dengan capaian indikator kinerja output yang dihasilkan rata-rata sebesar 92,09% dapat dikatakan dalam kategori berhasil.

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2022 pada Renstra Tahun 2021-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam dalam Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BP3D Kabupaten Boyolali dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 2.1.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (RPJMD 2021-2026)

Kabupaten Boyolali

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	903	-	-	-	-	833	Proses	-
		Nilai Sakip (SDGs)	**80,13**	**-**	**69,13**	**72,13**	**103,34%**	**72,13**	Proses	**-**
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase capaian target program**	**100**	**-**	**20**	**18,33**	**91,68%**	**40**	**20**	**50%**
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam Dokumen perencanaan daerah**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**50**	**50%**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan dan Pendanaan sesuai regulasi yang tersusun Tepat waktu	25 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	1 Dokumen	33%
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis kondisi daerah	10 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan dokumen kebijakan lainnya	10 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik tepat waktu	1 Kali	-	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	1 Kali	100%
		Jumlah unsur Keterlibatan Publik dalam Konsultasi Publik	6 Unsur		6 Unsur	6 Unsur	100%	6 Unsur	6 Unsur	100%
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD tepat waktu	1 Kali	-	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	1 Kali	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten tepat waktu	1 Kali	-	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	1 Kali	100%
		Jumlah Keterlibatan Publik dalam pelaksanaan Musrenbang	6 Unsur		6 Unsur	6 Unsur	100%	6 Unsur	6 Unsur	100%
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Hasil Musrenbang Desa yang telah diverifikasi sesuai kewenangan dan regulasi secara tepat waktu	22 Kecamatan	-	22 Kecamatan	22 Kecamatan	100%	22 Kecamatan	22 Kecamatan	100%
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai regulasi yang disusun tepat waktu	23 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	6 Dokumen	1 Dokumen	33%
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai regulasi, akurat, update sebagai *baseline* perencanaan	15 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data Perencanaan Pembangunan Daerah yang update	10 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah OPD yang memiliki data update dan akurat	50 OPD	-	50 OPD	50 OPD	100%	50 OPD	25 OPD	50%
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil daerah yang update dan akurat	10 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang selaras, sesuai regulasi dan tepat waktu	36 Dokumen	-	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	3 Dokumen	42%
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen analisis data Perencanaan Pembangunan Daerah yang update	50 OPD	-	50 OPD	50 OPD	100%	50 OPD	25 OPD	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah OPD yang memiliki data update dan akurat	50 OPD	-	50 OPD	50 OPD a	100%	50 OPD	25 OPD	50%
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen profil daerah yang update dan akurat	35 Laporan	-	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	3 Dokumen	42%
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase keterpaduan antar Dokumen RPJMD dengan RKPD**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**50**	**50%**
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian antara RKPD dan Renja**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**50**	**50%**
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Rkpd/Rpjmd Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang konsisten	58 Program	-	58 Program	58 Program	100%	59 Program	30 Program	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah program bidang pemerintahan yang dikoordinasi dalam penyusunan perencanaan	36 program	-	36 program	36 program	100%	37 program	30 program	50%
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah OPD bidang pemerintahan yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan	33 OPD	-	33 OPD	33 OPD	100%	33 OPD	17 OPD	50%
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah indikator program bidang pemerintahan yang dimonitoring dan evaluasi dalam penyusunan perencanaan	77 indikator kinerja program	-	77 indikator kinerja program	77 indikator kinerja program	100%	81 indikator kinerja program	41 indikator kinerja program	**50%**
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah OPD bidang pemerintahan yang yang sinergis dan harmonis dalam penyusunan perencanaan	33 OPD	-	33 OPD	33 OPD	100%	33 OPD	17 OPD	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	(Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah program bidang pembangunan manusia yang dikoordinasi dalam penyusunan perencanaan	22 program	-	22 program	22 program	100%	22 program	11 program	50%
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah OPD bidang pembangunan manusia yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan	5 OPD	-	5 OPD	5 OPD	100%	5 OPD	3 OPD	50%
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah indikator bidang pembangunan manusia yang dimonitoring evaluasi dalam penyusunan perencanaan	64 indikator kinerja program	-	64 indikator kinerja program	64 indikator kinerja program	100%	74 indikator kinerja program	37 indikator kinerja program	50%
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah OPD bidang pembangunan manusia yang yang sinergis dan harmonis dalam penyusunan perencanaan	5 OPD	-	5 OPD	5 OPD	100%	5 OPD	3 OPD	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Program Rkpd/Rpjmd Bidang Perekonomian dan SDA Yang Konsisten	64 program	-	47 program	47 program	100%	64 program	32 program	50%
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah program bidang Perekonomian yang dikoordinasi dalam penyusunan perencanaan	27 program	-	27 program	27 program	100%	26 program	13 program	50%
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah OPD bidang Perekonomian yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan	4 OPD	-	4 OPD	4 OPD	100%	4 OPD	2 OPD	50%
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah indikator bidang Perekonomian yang dimonitoring evaluasi dalam penyusunan perencanaan	44 indikator kinerja program	-	24 indikator kinerja program	24 indikator kinerja program	100%	48 indikator kinerja program	24 indikator kinerja program	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah OPD bidang Perekonomian yang yang sinergis dan harmonis dalam penyusunan perencanaan	4 OPD	-	4 OPD	4 OPD	100%	4 OPD	2 OPD	50%
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah program bidang SDA yang dikoordinasi dalam penyusunan perencanaan	20 program	-	20 program	20 program	100%	20 program	10 program	50%
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah OPD bidang SDA yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan	4 OPD	-	4 OPD	4 OPD	100%	4 OPD	2 OPD	50%
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah indikator bidang SDA yang dimonitoring evaluasi dalam penyusunan perencanaan	60 indikator kinerja program	-	34 indikator kinerja program	34 indikator kinerja program	100%	60 indikator kinerja program	30 indikator kinerja program	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah OPD bidang SDA yang yang sinergis dan harmonis dalam penyusunan perencanaan	4 OPD	-	4 OPD	4 OPD	100%	4 OPD	2 OPD	50%
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Program Rkpd/Rpjmd Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Yang konsisten	18 program	-	20 program	20 program	100%	18 program	9 program	50%
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah program bidang infrastruktur yang dikoordinasi dalam penyusunan perencanaan	13 program	-	15 program	15 program	100%	13 program	7 program	50%
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah OPD bidang infrastruktur yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan	2 OPD	-	2 OPD	2 OPD	100%	2 OPD	1 OPD	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah indikator bidang infrastruktur yang dimonitoring evaluasi dalam penyusunan perencanaan	24 indikator kinerja program	-	24 indikator kinerja program	24 indikator kinerja program	100%	24 indikator kinerja program	12 indikator kinerja program	50%
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah OPD bidang infrastruktur yang yang sinergis dan harmonis dalam penyusunan perencanaan	2 OPD	-	2 OPD	2 OPD	100%	2 OPD	1 OPD	50%
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah program bidang kewilayahan yang dikoordinasi dalam penyusunan perencanaan	5 program	-	5 program	5 program	100%	5 program	3 program	50%
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah OPD bidang kewilayahan yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan	2 OPD	-	2 OPD	2 OPD	-	2 OPD	1 OPD	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah indikator bidang kewilayahan yang dimonitoring evaluasi dalam penyusunan perencanaan	10 indikator kinerja program	-	10 indikator kinerja program	10 indikator kinerja program	-	10 indikator kinerja program	5 indikator kinerja program	50%
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah OPD bidang kewilayahan yang yang sinergis dan harmonis dalam penyusunan perencanaan	2 OPD	-	2 OPD	2 OPD	-	2 OPD	1 OPD	50%
		Nilai EKPPD	34400	-	34000	3,4618	101,82%	34100	Proses	-
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Prosentase *policy brief* bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan**	**401**	**-**	**75**	**39,72**	**52,96%**	**78**	**Proses**	**-**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah kajian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajiaan peraturan yang telah disusun *policy brief* dan didiseminasikan**	**15 kajian**	**-**	**4 kajian**	2,63 kajian	**65,82%**	**3 kajian**	**Proses**	**-**
5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 riset	-	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.01.06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	2 riset	-	1 riset	1 riset	12,66%	-	-	-
5.05.02.2.01.11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Badan Usaha Milik Desa	2 riset	-	1 riset	1 riset	1,90%	2 riset	Proses	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Data Kelitbangan dan Peraturan	10 riset	-	2 riset	2 riset	49,37%	2 riset	Proses	-
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	2 riset	-	1 riset	1 riset	1,90%	-	-	-
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah kajian bidang sosial dan kependudukan yang telah disusun *policy brief* dan didiseminasikan	13 kajian	-	2 kajian	0,37 kajian	18,37%	2 kajian	Proses	-
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 riset	-	-	1 riset	0%	-	-	-
5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 riset	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1 riset	-	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2 riset	-	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Pariwisata	3 riset	-	1 riset	1 riset	9,18%	1 riset	Proses	-
5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Kesehatan	1 riset	-	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Tenaga Kerja	3 riset	-	1 riset	1 riset	9,18%	1 riset	Proses	-
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang telah disusun *policy brief* dan didiseminasikan	12 kajian	-	2 kajian	1,49 kajian	74,68%	3 kajian	Proses	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 riset	-	1 riset	1 riset	18,99%	-	-	-
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Perindustrian dan Perdagangan	2 riset	-	-	-	-	1 riset	Proses	-
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 riset	-	1 riset	1 riset	17,72%	1 riset	Proses	-
5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Kelautan dan Perikanan	1 riset	-	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Lingkungan Hidup	0 riset	-	-	1 riset	12,66%	-	-	-
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Pekerjaan Umum	0 riset	-	-	1 riset	25,32%	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Perhubungan	0 riset	-	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	4 riset	-	-	-	0%	1 riset	Proses	-
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	1 riset	-	-	-	-	-	-	-
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan**	**100**	**-**	**75**	**75**	**100%**	**78**	**Proses**	**-**
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi yang masuk/diakui dalam database daerah	42 Inovasi	-	5 inovasi	5 inovasi	100%	7 inovasi	Proses	-
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah inovasi bidang teknologi dan perekayasaan	35 inovasi	-	7 inovasi	7 inovasi	100%	7 inovasi	Proses	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang didiseminasikan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Inovasi yang disosialisasikan dan didiseminasikan	15 inovasi	-	3 inovasi	3 inovasi	100%	3 inovasi	Proses	-
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah inovasi yang mendapatkan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	15 inovasi	-	3 inovasi	3 inovasi	100%	3 inovasi	Proses	-
		Nilai SAKIP BP3D	**84,50**	**-**	**83,35**	**83,85**	**100,59%**	**83,75**	Proses	**-**
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar**	**100**	**-**	**100**	**99,95**	**99,95%**	**100**	**50**	**50%**
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	60 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	-	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	8 bulan	50%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa administrasi perkantoran (PTT)	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	-	18 laporan	18 laporan	100%	18 laporan	6 bulan	50%
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	2 bahan	-	2 bahan	2 bahan	100%	2 bahan	6 bulan	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	60 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga kantor	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Bahan logistik kantor	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan bahan / Material	Alat tulis kantor	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Kebutuhan makan minum kantor	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	60 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat	60 Laporan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Laporan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Transaksi-transaksi keuangan SKPD	60 Laporan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	60 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
X.XX.01 .2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
X.XX.01 .2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
X.XX.01 .2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kebutuhan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	4 aplikasi	-	-	-	-	1 aplikasi	0 aplikasi	0%
X.XX.01 .2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Aset Tetap Lainnya	1 aplikasi	-	1 aplikasi	0 aplikasi	0%	-	-	-
X.XX.01 .2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	1 Dokumen	25%
X.XX.01 .2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
X.XX.01 .2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA Murni Perangkat Daerah	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	Proses	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA Perubahan Perangkat Daerah	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	Proses	-
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah DPA Murni Perangkat Daerah	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	Proses	-
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan Perangkat Daerah	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	Proses	-
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah	75 Dokumen	-	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	15 Dokumen	Proses	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
X.XX.01 .2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
	Rata-rata Capaian Kinerja				**100%**	**92,09%**	**92,09%**			

Sumber Data : emonev RKPD 2022 Triwulan IV dan LKjIP BP3D Kabupaten Boyolali Tahun 202

Tabel 2.1.2 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (RPJMD 2021-2026)

Kabupaten Boyolali (Review Renstra 2021-2026 Kepmendagri 050-5889)

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	903	-	-	-	-	833	Proses	-
		Nilai Sakip (SDGs)	**80,13**	**-**	**69,13**	**71,44**	**103,34%**	**72,13**	Proses	**-**
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase capaian target program**	**100**	**-**	**20**	**18,33**	**91,68%**	**40**	**20**	**50%**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam Dokumen perencanaan daerah**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**50**	**50%**
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan dan Pendanaan sesuai regulasi yang tersusun Tepat waktu	25 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	Proses	-
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	10 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	Proses	-
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	10 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	Proses	-
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5 Berita Acara	-	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5 Berita Acara	-	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	-	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	22 Usulan	-	22 Usulan	22 Usulan	100%	22 Usulan	22 Usulan	100%
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	23 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	Proses	-
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai regulasi, akurat, update sebagai *baseline* perencanaan	15 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	Proses	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Semua Perencanaan Pembangunan Daerah	10 Masukan	-	2 Masukan	2 Masukan	100%	2 Masukan	Proses	-
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	50 Orang	-	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	Proses	-
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	10 Buku	-	2 Buku	2 Buku	100%	2 Buku	Proses	-
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang selaras, sesuai regulasi dan tepat waktu	36 Dokumen	-	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	Proses	-
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	50 Laporan	-	50 Laporan	50 Laporan	100%	50 Laporan	Proses	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	50 Kerja Sama	-	50 Kerja Sama	50 Kerja Sama	100%	50 Kerja Sama	Proses	-
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	35 Laporan	-	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	Proses	-
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase keterpaduan antar Dokumen RPJMD dengan RKPD**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**Proses**	**-**
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian antara RKPD dan Renja**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**Proses**	**-**
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Rkpd/Rpjmd Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang konsisten	59 Program	-	58 Program	58 Program	100%	58 Program	Proses	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37 Dokumen	-	36 Dokumen	36 Dokumen	100%	36 Dokumen	Proses	-
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	-	33 OPD Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	100%	33 Perangkat Daerah	Proses	-
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	33 Perangkat Daerah	-	33 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	100%	33 Perangkat Daerah am	Proses	-
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	33 Laporan	-	33 Laporan	33 O Laporan PD	100%	33 Laporan	Proses	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	22 Dokumen	-	22 Dokumen	22 Dokumen	100%	22 Dokumen	Proses	-
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 Perangkat Daerah	-	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	100%	5 Perangkat Daerah	Proses	-
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 Perangkat Daerah	-	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	100%	5 Perangkat Daerah	Proses	-
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	-	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	Proses	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Program Rkpd/Rpjmd Bidang Perekonomian dan SDA Yang Konsisten	64 program	-	47 program	47 program	100%	47 program	Proses	-
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	26 Dokumen	-	27 Dokumen	27 Dokumen	100%	27 Dokumen	Proses	-
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah	-	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	100%	4 Perangkat Daerah	Proses	-
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah	-	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	100%	4 Perangkat Daerah	Proses	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	Proses	-
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	20 Dokumen	-	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	20 Dokumen	Proses	-
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	-	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	100%	4 Perangkat Daerah	Proses	-
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	-	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	100%	4 Perangkat Daerah	Proses	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	Proses	-
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Program Rkpd/Rpjmd Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Yang konsisten	18 program	-	20 program	20 program	100%	20 program	Proses	-
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD	13 Dokumen	-	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	15 Dokumen	Proses	-
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	-	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	100%	2 Perangkat Daerah	Proses	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	(Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	-	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	100%	2 Perangkat Daerah	Proses	-
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	Proses	-
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	Proses	-
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	2 Perangkat Daerah	-	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	100%	2 Perangkat Daerah	Proses	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	2 Perangkat Daerah	-	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	100%	2 Perangkat Daerah	Proses	-
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	Proses	-
		Nilai EKPPD	34400	-	34000	3,4618	101,82%	34000	Proses	-
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Prosentase policy brief bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan**	**401**	**-**	**75**	**39,72**	**52,96%**	**75**	**Proses**	**-**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah kajian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajiaan peraturan yang telah disusun *policy brief* dan didiseminasikan**	**18 kajian**	**-**	**4 kajian**	2,63 kajian	**65,82%**	**5 kajian**	**Proses**	**-**
5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.01.06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban danKetentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	2 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	12,66%	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.05.02.2.01.11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	2 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	1,90%	1 Laporan	Proses	-
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	12 Dokumen	-	2 Dokumen	3 Dokumen	49,37%	4 Dokumen	Proses	-
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	-	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1,90%	-	-	-
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah kajian bidang sosial dan kependudukan yang telah disusun *policy brief* dan didiseminasikan	11 kajian	-	2 kajian	0,37 kajian	18,37%	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	-	-	1 Dokumen	0%	-	Proses	-
5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	-	-	-	-	-	Proses	-
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	Proses	-
5.05.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	2 Dokumen	-	-	-	-	-	Proses	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	9,18%	-	-	-
5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	9,18%	-	-	-
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang telah disusun *policy brief* dan didiseminasikan	12 kajian	-	2 kajian	1,49 kajian	74,68%	2 kajian	Proses	-
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	18,99%	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	17,72%	-	-	-
5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	-	-	1 Dokumen	12,66%	2 Dokumen	Proses	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0 Dokumen	-	-	1 Dokumen	25,32%	-	-	-
5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	3 Dokumen	-	-	2 Dokumen	0%	1 Dokumen	Proses	-
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 riset	-	-	-	-	-	-	-
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan**	**100**	**-**	**75**	**75**	**100%**	**78**	**Proses**	**-**
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi yang masuk/diakui dalam database daerah	42 Inovasi	-	5 inovasi	5 inovasi	100%	7 inovasi	Proses	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	umlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	35 Dokumen	-	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	Proses	-
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang didiseminasikan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	15 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	Proses	-
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	15 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	Proses	-
		Nilai SAKIP BP3D	**85**	**-**	**83,35**	**83,85**	**100,59%**	**83,75**	Proses	**-**
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar**	**100**	**-**	**100**	**99,95**	**99,95%**	**100**	**50**	**50%**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	60 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	Proses	-
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang / Bulan	-	30 Orang / Bulan	30 Orang / Bulan	100%	30 Orang / Bulan	Proses	-
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	Proses	-
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	Proses	-
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	Proses	-
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	90 Laporan	-	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	Proses	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	Proses	-
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	60 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	Proses	-
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	-	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	Proses	-
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	Proses	-
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	Proses	-
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	Proses	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
X.XX.01 .2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	Proses	-
X.XX.01 .2.06.07	Penyediaan bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	Proses	-
X.XX.01 .2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	Proses	-
X.XX.01 .2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	Proses	-
X.XX.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	60 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	Proses	-
X.XX.01 .2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	Proses	-
X.XX.01 .2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	Proses	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	Proses	-
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	60 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	Proses	-
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	-	21 Unit	21 Unit	100%	21 Unit	Proses	-
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	-	80 Unit	80 Unit	100%	80 Unit	Proses	-
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	-	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	Proses	-
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	-	-	-	-	1 Unit	Proses	-
X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	-	1 Unit	0 Unit	0%	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
X.XX.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	129 Dokumen	-	25 Dokumen	25 Dokumen	100%	26 Dokumen	Proses	-
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	Proses	-
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	Proses	-
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	Proses	-
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	Proses	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra 2021-2026) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan 2023 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 TW 2 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 = (5+7+9)**	**11 = (10/4)**
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	Proses	-
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	79 Dokumen	-	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	16 Dokumen	Proses	-
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	Proses	-
	Rata-rata Capaian Kinerja				**100%**	**92,09%**	**92,09%**			

Sumber Data : eMonev RKPD 2022 Triwulan 4 dan LKjIP BP3D Kabupaten Boyolali Tahun 2022

2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan serta statistik;
- pengoordinasian penyusunan dan pemaduan rencana pembangunan Daerah dalam bentuk dokumen, antara lain : rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Perangkat Derah;
- pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan Daerah;
- pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- pengoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan serta statistik; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, indikator yang menjadi target sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu :

1. Indikator kinerja dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.
2. Indikator kinerja dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.

Secara detail hasil capaian terhadap indikator kinerja dapat dilihat pada **Tabel 2.2.1.**

Tabel 2.2.1. T-C.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (2021-2026)

Kabupaten Boyolali

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (2021-2026)				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1	Tahun 2022 (thn n-2	Tahun 2023 (s/d TW 2) (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1	
1	**2**		**3**	**5**	**6**	**7**	**8**	**11**	**12**	**17**	**18**	**19**
1.	Nilai SAKIP			69,13	72,13	75,13	77,13	71,44	Proses	72,13	75,13	
2.	Persentase capaian indikator program			20%	40%	60%	80%	18,34%	Proses	60%	80%	
3.	Persentase keterpaduan antar Dokumen RPJMD dengan RKPD			100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
4.	Nilai EKPPD			3,40	3,41	3,42	3,43	3,4618	Proses	3,42	3,43	
5.	Prosentase *policy brief* bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan			75%	78%	80%	83%	39,72%	Proses	80%	83%	
6.	Nilai SAKIP BP3D			83,35	83,75	84,00	84,25	83,85	Proses	84,00	84,25	
7.	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi standar			100%	100%	100%	100%	99,95%	50%	100%	100%	

Sumber Data : eMonev RKPD 2022 Triwulan 4 dan LKjIP Tahun 2022

2.3. ISU - ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah enantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah (PD) diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi PD di masa lima tahun mendatang.

BP3D Kabupaten Boyolali merupakan fungsi penunjang, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan daerah. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi BP3D Kabupaten Boyolali adalah berikut :

Tabel 2.3

Identifikasi Isu-isu Strategis terkait Tupoksi BP3D

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Belum terbangunnya sistem manajemen kinerja	Pembagian dan sinergi target kinerja antara kepala daerah dengan perangkat daerah belum terbangun
		Indikator kinerja masih banyak berorientasi level output belum *outcome/impact*
		Penetapan target kinerja dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran
	Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja	Belum terbangunnya sistem pengelolaan data kinerja yang baik
		Belum optimalnya sinergi antara e-*planning* dengan e-kinerja
		Pengendalian dan evaluasi belum mengawal capaian kinerja *outcome*
	Belum optimalnya impelementasi perencanaan sektoral dan berbasis isu strategis	Belum terbangunan instrumen pengendalian implementasi, misalnya perencanaan berupa Rencana Aksi Daerah (RAD)
		Perlunya kejelasan tugas dan fungsi antar bidang dalam BP3D dalam mengawal perencanaan sektoral
Masih kurangnya pengembangan penelitian dan inovasi	Minimnya ketersediaan hasil penelitian untuk basis perumusan kebijakan	Masih minimnya kegiatan penelitian karena tidak adanya SDM fungsional peneliti
		Tidak adanya hasil penelitian yang terstruktur karena penelitian masih tersebar di tingkat Perangkat Daerah
		Belum optimalnya koordinasi kelitbangan
	Belum optimalnya inovasi daerah	Belum terlaksananya proses tindaklanjut dari Kreasi dan Inovasi (KRENOVA)
		Belum adanya fasilitasi pendaftaran HAKI
		Belum optimalnya fasilitasi pengembangan inovasi masyarakat

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024. Dalam proses penyempurnaannya dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali. Hasil analisa kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah, sehingga terjadi perbedaan rincian dengan rancangan awal RKPD. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4 (T-C.31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Kabupaten Boyolali

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BP3D	**Peresentase capaian target program**	**60%**	**781.750.000**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	BP3D	**Peresentase capaian target program**	**60%**	**740.705.000**	
			Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam Dokumen perencanaan daerah	**100%**				**Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam Dokumen perencanaan daerah**	**100%**		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	BP3D	**Dokumen Perencanaan dan Pendanaan sesuai regulasi yang tersusun Tepat waktu**	**3 Dokumen**	**481.750.000**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	BP3D	**Dokumen Perencanaan dan Pendanaan sesuai regulasi yang tersusun Tepat waktu**	**6 Dokumen**	**538.205.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Analisis kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	BP3D	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	-	Analisis kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	BP3D	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	-	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	BP3D	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	-	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	BP3D	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	-	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	BP3D	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	-	Pelaksanaan Konsultasi Publik	BP3D	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	BP3D	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	-	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	BP3D	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	-	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	BP3D	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	-	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	BP3D	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	-	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	BP3D	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	22 Kec	-	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	BP3D	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	22 Kec	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	BP3D	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	481.750.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	BP3D	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6 Dokumen	538.205.000	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	BP3D	**Jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai regulasi, akurat, update sebagai baseline perencanaan**	**2 Dokumen**	**70.000.000**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	BP3D	**Jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai regulasi, akurat, update sebagai baseline perencanaan**	**4 Dokumen**	**96.250.000**	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BP3D	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Semua Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Masukan	-	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BP3D	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Masukan	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	BP3D	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	50 Orang	50.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	BP3D	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	53 Orang	56.250.000	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	BP3D	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 Buku	20.000.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	BP3D	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 Buku	20.000.000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	BP3D	**Jumlah Dokumen evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang selaras, sesuai regulasi dan tepat waktu**	**7 Dokumen**	**136.000.000**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	BP3D	**Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang selaras, sesuai regulasi dan tepat waktu**	**7 Dokumen**	**106.250.000**	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	BP3D	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	50 Laporan	-	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	BP3D	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	50 Laporan	-	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	BP3D	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	50 Kerjasama	-	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	BP3D	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	50 Kerjasama	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	BP3D	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	7 Laporan	230.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	BP3D	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	7 Laporan	106.250.000	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BP3D	**Persentase keterpaduan antar Dokumen RPJMD dengan RKPD**	**100%**	**-**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	BP3D	**Persentase keterpaduan antar Dokumen RPJMD dengan RKPD**	**100%**	**-**	
		BP3D	**Persentase kesesuaian antara RKPD dan Renja**	**100%**	**-**		BP3D	**Persentase kesesuaian antara RKPD dan Renja**	**100%**	**-**	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	BP3D	**Program Rkpd/Rpjmd Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang konsisten**	**59 Program**	**-**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	BP3D	**Program Rkpd/Rpjmd Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang konsisten**	**59 Program**	**-**	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BP3D	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37 Dokumen	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BP3D	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37 Dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	33 Laporan	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	33 Perangkat Daerah	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	33 Laporan	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	BP3D	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	33 Laporan	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	BP3D	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	33 Laporan	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BP3D	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	22 program	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BP3D	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya	22 Dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								(RPJPD. RPJMD dan RKPD)			
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 Perangkat Daerah	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 Perangkat Daerah	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BP3D	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BP3D	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	BP3D	**Program Rkpd/Rpjmd Bidang Perekonomian dan SDA Yang Konsisten**	**64 program**	**-**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	BP3D	**Program Rkpd/Rpjmd Bidang Perekonomian dan SDA Yang Konsisten**	**64 program**	**-**	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	BP3D	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	26 Dokumen	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	BP3D	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	26 Dokumen	-	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Laporan	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Laporan	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	BP3D	Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	BP3D	Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BP3D	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	20 Dokumen	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BP3D	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	20 Dokumen	-	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	BP3D	"Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Laporan	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	60 Perangkat Daerah	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	60 Laporan	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	BP3D	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	BP3D	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	-	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	BP3D	**Program Rkpd/Rpjmd Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Yang konsisten**	**18 program**	-	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	BP3D	**Program Rkpd/Rpjmd Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Yang konsisten**	**18 program**	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BP3D	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD	13 Dokumen	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BP3D	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD	13 Dokumen	-	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Laporan	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Laporan	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	BP3D	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	BP3D	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BP3D	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BP3D	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	-	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	2 Perangkat Daerah	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	2 Laporan	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	2 Perangkat Daerah	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	BP3D	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	2 Laporan	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	BP3D	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	BP3D	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	-	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BP3D	**Prosentase policy brief bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan**	**78%**	**605.000.000**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	BP3D	**Prosentase policy brief bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan**	**78%**	**673.000.000**	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	BP3D	**Jumlah kajian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajiaan peraturan yang telah disusun policy brief dan didiseminasikan**	**3 kajian**	**180.000.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	BP3D	**Jumlah kajian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajiaan peraturan yang telah disusun policy brief dan didiseminasikan**	**3 kajian**	**423.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	BP3D	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	-	-	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	BP3D	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	50.000.000	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	BP3D	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	-	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	BP3D	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban danKetentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	-	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	BP3D	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 riset	50.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	BP3D	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	BP3D	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Data Kelitbangan dan Peraturan	2 riset	130.000.000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	BP3D	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Laporan	373.000.000	
	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	BP3D	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadapPelaksanaan Peraturan	-	-	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	BP3D	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	-	-	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	BP3D	**Jumlah kajian bidang sosial dan kependudukan yang telah disusun policy brief dan didiseminasikan**	**2 kajian**	**150.000.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	BP3D	**Jumlah kajian bidang sosial dan kependudukan yang telah disusun policy brief dan didiseminasikan**	**2 kajian**	**100.000.000**	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	BP3D	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Aspek-Aspek Sosial	-	-	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	BP3D	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-	-	
	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BP3D	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BP3D	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	BP3D	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	BP3D	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	50.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	BP3D	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Kepemudaan dan Olahraga	-	-	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	BP3D	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	1 Dokumen	50.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	BP3D	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Pariwisata	1 riset	75.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	BP3D	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-	-	
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	BP3D	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Kesehatan	-	-	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	BP3D	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	-	-	
	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	BP3D	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Tenaga Kerja	1 riset	75.000.000	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	BP3D	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	-	-	
	Penelitian dan Pengembangan	BP3D	**Jumlah kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang**	**3 kajian**	**275.000.000**	**Penelitian dan Pengembangan**	BP3D	**Jumlah kajian bidang ekonomi dan**	**3 kajian**	**150.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bidang Ekonomi dan Pembangunan		**telah disusun policy brief dan didiseminasikan**			**Bidang Ekonomi dan Pembangunan**		**pembangunan yang telah disusun policy brief dan didiseminasikan**			
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	BP3D	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	BP3D	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	BP3D	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Perindustrian dan Perdagangan	1 riset	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	BP3D	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	50.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	BP3D	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 riset	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	BP3D	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-	-	
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	BP3D	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	BP3D	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	BP3D	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Lingkungan Hidup	-	-	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	BP3D	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	-	
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	BP3D	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Pekerjaan Umum	-	-	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	BP3D	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	-	-	
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	BP3D	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Perhubungan	-	-	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	BP3D	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	**50.000.000**	
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	BP3D	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 riset	75.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	BP3D	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	50.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	BP3D	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	BP3D	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BP3D	**Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan**	**78%**	**400.000.000**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	BP3D	**Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan**	**78%**	**400.000.000**	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	BP3D	**Jumlah Inovasi yang masuk/diakui dalam database daerah**	**7 inovasi**	**400.000.000**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	BP3D	**Jumlah Inovasi yang masuk/diakui dalam database daerah**	**7 inovasi**	**400.000.000**	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	BP3D	Jumlah inovasi bidang teknologi dan perekayasaan	7 inovasi	200.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	BP3D	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	7 Dokumen	200.000.000	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	BP3D	Jumlah inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang didiseminasikan	-	-	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	BP3D	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	-	-	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	BP3D	Jumlah Inovasi yang disosialisasikan dan didiseminasikan	3 inovasi	100.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	BP3D	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	BP3D	Jumlah inovasi yang mendapatkan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	3 inovasi	100.000.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	BP3D	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	3 Laporan	100.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BP3D	**Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar**	**100%**	**5.970.805.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	BP3D	**Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar**	**100%**	**5.054.185.000**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BP3D	**Jumlah layanan keuangan perangkat daerah yang terpenuhi**	**12 bulan**	**4.829.403.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	BP3D	**Jumlah layanan keuangan perangkat daerah yang terpenuhi**	**55 Dokumen**	**4.301.394.000**	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	BP3D	Gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	4.450.203.000	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	BP3D	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang / Bulan	3.838.750.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BP3D	Jasa administrasi perkantoran (PTT)	12 bulan	379.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BP3D	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	462.644.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BP3D	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BP3D	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BP3D	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12 bulan	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BP3D	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BP3D	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BP3D	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	-	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BP3D	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	2 bahan	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BP3D	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 bahan	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BP3D	**Jumlah layanan umum Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**12 bulan**	**591.852.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	BP3D	**Jumlah layanan umum Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**12 Dokumen**	**578.941.000**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	BP3D	Tersedianya Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 bulan	3.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	BP3D	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BP3D	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BP3D	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	197.000.000	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	BP3D	Tersedianya Peralatan rumah tangga kantor	12 bulan	3.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	BP3D	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3.000.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	BP3D	Tersedianya Bahan logistik kantor	12 bulan	40.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	BP3D	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BP3D	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	76.988.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BP3D	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	62.690.000	
	Penyediaan bahan / Material	BP3D	Tersedianya Alat tulis kantor	12 bulan	232.997.000	Penyediaan bahan / Material	BP3D	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	75.919.000	
	Fasilitasi kunjungan tamu	BP3D	Terpenuhinya Kebutuhan makan minum kantor	12 bulan	135.867.000	Fasilitasi kunjungan tamu	BP3D	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	97.332.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BP3D	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	100.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BP3D	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BP3D	**Jumlah jasa penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**12 bulan**	**319.550.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	BP3D	**Jumlah jasa penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**36 Dokumen**	**73.750.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BP3D	Tersedianya Jasa surat menyurat	12 bulan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BP3D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BP3D	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	96.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BP3D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	67.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BP3D	Transaksi-transaksi keuangan SKPD	12 bulan	222.550.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BP3D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	12 Laporan	5.750.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BP3D	**Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**12 bulan**	**230.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	BP3D	**Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**4 Paket**	**100.100.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BP3D	Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	70.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BP3D	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BP3D	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BP3D	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	20.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BP3D	Terpenuhinya Kebutuhan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	12 bulan	100.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BP3D	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	30.100.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	BP3D	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 aplikasi	40.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	BP3D	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	BP3D	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	BP3D	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BP3D	**Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat**	**25 Dokumen**	**-**	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	BP3D	**Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat**	**26 Dokumen**	**-**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BP3D	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 Dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BP3D	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BP3D	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BP3D	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BP3D	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BP3D	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BP3D	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BP3D	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BP3D	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BP3D	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BP3D	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BP3D	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BP3D	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BP3D	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	-	
					7.390.555.000					**6.867.890.000**	

Sumber Data : Renstra BP3D Kabupaten Boyolali 2021-2026; RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2024

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Boyolali di kecamatan. Pada forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BP3D Kabupaten Boyolali selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.5 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Boyolali

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersinergi, diharapkan seluruh aspek Pemerintahan mulai dari skala Nasional, Provinsi hingga Kabupaten/Kota dapat saling mendukung rencana ataupun program rancangan prioritas dimulai dari rancangan prioritas Nasional hingga Kabupaten/Kota. Berikut Tema Pembangunan Nasional hingga Kabupaten/Kota pada tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam RKP Tahun 2024 :

Gambar 3.1. Rancangan Tema Pembangunan

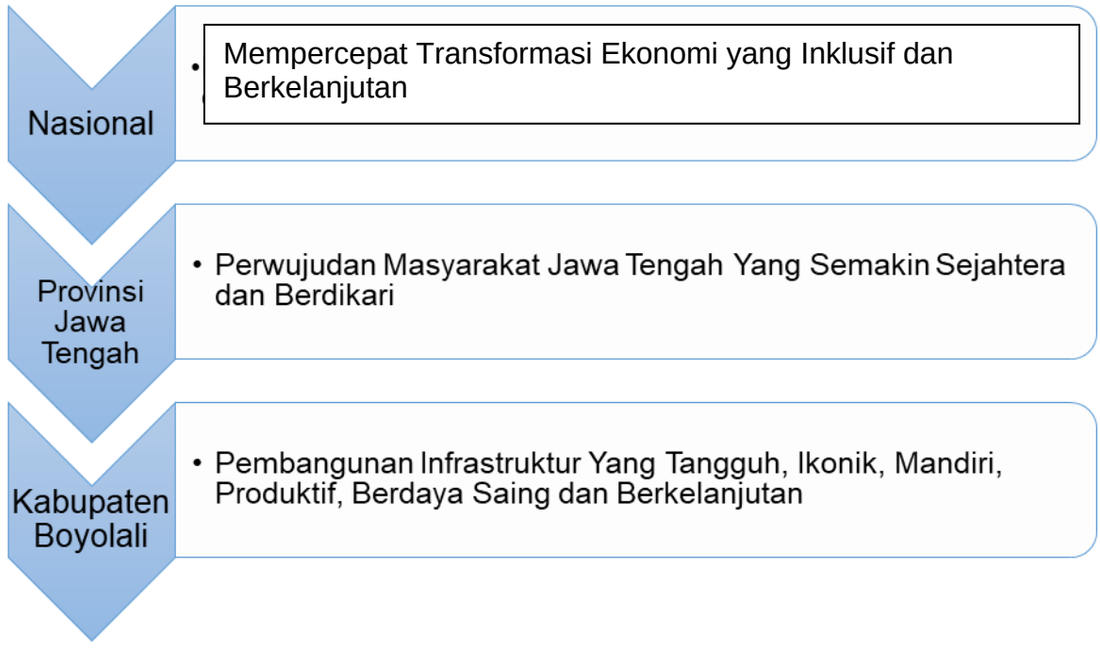

Belum tersusun, masa RPJMD 2018-2023 (Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023)

Memacu produktivitas dengan pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi sektor unggulan serta percepatan dan pemerataan investasi

Prioritas Pembangunan Nasional yang diangkat berdasarkan tema dalam RKP

Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan tema dalam RKPD Tahun 2024 belum tesusun dikarenakan masa RPJMD berakhir yaitu tahun 2018-2023. Adapun Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing.
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Program pembangunan pada bidang perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah perlu disinergiskan. Berikut peran kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali terhadap Prioritas Nasional ataupun tujuan yang hendak dicapai dengan Program Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali :

Tabel 3.1. Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional dengan Perangkat Daerah

No.	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kabupaten Boyolali	Arah Kebijakan BP3D Kabupaten Boyolali
1	Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Identitas Boyolali Kota Susu dan Boyolali Lumbung Pangan mencerminkan sektor unggulan yang perlu semakin dioptimalkan. Optimalisasi sektor unggulan	• Pengembangan instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan

No.	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kabupaten Boyolali	Arah Kebijakan BP3D Kabupaten Boyolali
2 3 4 5 6 7 8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Penguatan Daya Saing Usaha Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Pelaksanaan Pemilu 2024	memiliki konsep terintegrasi dengan berbagai sektor lain. Strategi utama yang dijalankan berupa penerapan good farming practices, fasilitasi kebutuhan modal, pengembangan kemitraan yang sehat, pendampingan dari hulu ke hilir hingga memberi nilai tambah pasca produksi. Prioritas pembangunan dalam arah kebijakan ini antara lain : • Peningkatan produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan peternakan • Pendampingan UMKM/IKM secara berkelanjutan • Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung industri pengolahan susu • Peningkatan kapasitas pemasaran produk olahan susu dan peningkatan kompetensi SDM pelaku agro industri susu • Peningkatan daya saing pariwisata melalui strategi peningkatan daya tarik, promosi, kerjasama pariwisata, serta penguatan sektor ekonomi kreatif • Peningkatan pemerataan pembangunan di wilayah Boyolali Utara, terutama dalam realisasi investasi, peningkatan daya tarik wisata, dan peningkatan kualitas infrastruktur yang menopang pusat pertumbuhan baru di wilayah wilayah Boyolali utara • Peningkatan keberdayaan masyarakat desa melalui optimaliasi potensi/aset desa, penguatan BUMDesa dan pembangunan kawasan pedesaan • Peningkatan keberdayaan PMKS, dengan prioritas kelompok sasaran penyandang disabilitas dan rehabilitasi ODGJ • Pengelolaan sampah 3R	• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah • Peningkatan sinergitas perencanaan di tingkat daerah dengan perangkat daerah • Peningkatan peran penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan • Pengembangan inovasi • Peningkatan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja

No.	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kabupaten Boyolali	Arah Kebijakan BP3D Kabupaten Boyolali
		berbasis komunitas di setiap desa dan kecamatan	

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BP3D KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang akan dicapai oleh BP3D Kabupaten Boyolali adalah :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik”

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja sasaran yang akan diukur. Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh BP3D Kabupaten Boyolali adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BP3D Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target kinerja pada tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	800,00	823,00	833,00	893,00	903,00
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai	69,13 (B)	72,13 (BB)	75,13 (BB)	77,13 (BB)	80,13 (A)
		Nilai EKPPD	Nilai	3,4000	3,4100	3,4200	3,4300	3,4400
	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BP3D	Nilai	83,35	83,75	84,00	84,25	84,50

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target kinerja pada tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perangkat daerah							

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, dan membantu Bupati Boyolali dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali adalah sebagai *"pengarah"* setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi PD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan.

RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026 terdiri dari 5 misi yang masing-masing menaungi rumpun urusan yang berbeda. Terdapat 31 program yang menjadi rekomendasi dari kajian lingkungan hidup strategis yang menjadi salah satu masukan dalam penyusunan program dalam RPJMD.

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali adalah Program Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh BP3D Kabupaten Boyolali sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026. Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan prioritas ini adalah program rekomendasi KLHS yang mendukung masing-masing misi RPJMD, yaitu di Misi 4 : Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Jumlah Program dan Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan oleh BP3D Kabupaten Boyolali di tahun 2024 berjumlah :

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
    1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
    2) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
    1) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
    2) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
    1) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
    2) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
    3) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
    1) Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
    2) Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
    3) Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis ini adalah sebesar Rp1.073.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh tiga juta puluh juta rupiah). Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkkan pada Tabel 3.3 di bawah ini.

.

Tabel 3.3 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Boyolali

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program penelitian dan pengembangan Daerah	**Prosentase policy brief bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan Persentase inovasi yang difasilitasi**	**BP3D**	**78%**	**1.073.000.000**	**APBD**	**-**	**80%**	**1.005.000.000**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Jumlah kajian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajiaan peraturan yang telah disusun policy brief dan didiseminasikan**	**BP3D**	**3 Kajian**	**423.000.000**	**APBD**	**-**	**3 Kajian**	**180.000.000**
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	BP3D	1 Laporan	50.000.000		-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	BP3D	2 Dokumen	373.000.000	APBD	-	2 Dokumen	130.000.000
	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	1 Rekomendasi	50.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Jumlah kajian bidang sosial dan kependudukan yang telah disusun policy brief dan didiseminasikan**	**BP3D**	**2 Kajian**	**100.000.000**	**APBD**	**-**	**3 Kajian**	**250.000.000**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	BP3D		-	APBD	-	1 Dokumen	100.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BP3D		-	APBD	-	1 Dokumen	50.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	BP3D	1 Dokumen	50.000.000	APBD	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	BP3D	1 Dokumen	50.000.000	APBD	-	-	-
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	BP3D		-	APBD	-	1 Dokumen	100.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Jumlah kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang telah disusun policy brief dan didiseminasikan**	**BP3D**	**3 Kajian**	**150.000.000**	**APBD**	**-**	**2 Kajian**	**175.000.000**
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	BP3D	1 Dokumen	50.000.000	APBD	-	-	-
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	BP3D	1 Dokumen	50.000.000	APBD	-	-	-
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	BP3D	1 Dokumen	50.000.000	APBD	-	1 Dokumen	75.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	BP3D	-	-	APBD	-	1 Dokumen	100.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah Inovasi yang masuk/diakui dalam database daerah**	**BP3D**	**10 inovasi**	**400.000.000**	**APBD**	**-**	**10 inovasi**	**400.000.000**
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	BP3D	7 Dokumen	200.000.000	APBD	-	7 Dokumen	200.000.000
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	BP3D	3 Laporan	100.000.000	APBD	-	3 Laporan	100.000.000
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	BP3D	3 Laporan	100.000.000	APBD	-	3 Laporan	100.000.000

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana kerja dan pendanaan BP3D Kabupaten Boyolali tahun 2024 adalah yang seperti ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra BP3D Kabupaten Boyolali dan RPJMD Kabupaten Boyolali.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilakanakan oleh BP3D Kabupaten Boyolali tahun 2024 sebanyak 4 Program, 15 Kegiatan dan 79 Sub Kegiatan A. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
    a) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
    b) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
    c) Pelaksanaan Konsultasi Publik
    d) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
    e) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
    f) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
    g) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
    a) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
    b) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
    c) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
    a) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
    b) Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
    c) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

B. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
    a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
    b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
    c) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
    d) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
    e) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
    f) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
    g) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
    h) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
    a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
    b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
    c) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
    d) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
    e) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
    f) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
    g) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
    h) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
c) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
d) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
e) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
f) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
g) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
h) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

C. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
   a) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
   b) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
   a) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
   b) Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
   a) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
   b) Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
   c) Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
   a) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
   b) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
   c) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
d) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
g) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
h) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f) Penyediaan Bahan/Material
g) Fasilitasi Kunjungan Tamu
h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
i) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
j) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
d) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp6.867.890.000,00 (enam milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh rupiah). nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Boyolali

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		**833**				**893**	
	UNSUR PERENCANAAN	**Nilai Sakip (SDGs)**		**75,13**				**77,13**	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase capaian target program**	**BP3D**	**60**	**-**	**APBD**		**80**	**-**
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam Dokumen perencanaan daerah**	**BP3D**	**100**	**740.705.000**	**APBD**		**100**	**871.750.000**
	Kegiatan								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan dan Pendanaan sesuai regulasi yang tersusun Tepat waktu	BP3D	3 Dokumen	538.205.000	APBD		6 Dokumen	665.750.000
	Sub Kegiatan								
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	BP3D	2 Dokumen	-	APBD		2 Dokumen	-
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	BP3D	2 Dokumen	-	APBD		2 Dokumen	-
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	BP3D	1 Berita Acara	-	APBD		1 Berita Acara	-
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	BP3D	1 Berita Acara	-	APBD		1 Berita Acara	-
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	BP3D	1 Berita Acara	-	APBD		1 Berita Acara	-
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	BP3D	22 Usulan	-	APBD		22 Usulan	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	BP3D	6 Dokumen	538.205.000	APBD		5 Dokumen	665.750.000
	Kegiatan								
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai regulasi, akurat, update sebagai *baseline* perencanaan	BP3D	4 Dokumen	96.250.000	APBD		4 Dokumen	70.000.000
	Sub Kegiatan								
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Semua Perencanaan Pembangunan Daerah	BP3D	2 Masukan	20.000.000	APBD		2 Masukan	-
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	BP3D	50 Orang	56.250.000	APBD		50 Orang	50.000.000
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	BP3D	2 Buku	20.000.000	APBD		2 Buku	20.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Kegiatan								
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang selaras, sesuai regulasi dan tepat waktu	BP3D	7 Dokumen	106.250.000	APBD		7 Dokumen	136.000.000
	Sub Kegiatan								
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	BP3D	50 Laporan	-	APBD		50 Laporan	-
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	BP3D	50 Kerja Sama	-	APBD		50 Kerja Sama	-
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	BP3D	7 Laporan	106.250.000	APBD		7 Laporan	136.000.000
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase keterpaduan antar Dokumen RPJMD dengan RKPD**	**BP3D**	**100**		**APBD**		**100**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian antara RKPD dan Renja**	**BP3D**	**100**		**APBD**		**100**	
	Kegiatan								
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Rkpd/Rpjmd Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang konsisten	BP3D	59 Program	-	APBD		59 Program	-
	Sub Kegiatan								
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BP3D	37 Dokumen	-			37 Dokumen	-
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	BP3D	33 Perangkat Daerah	-			33 Perangkat Daerah	-
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	BP3D	33 Perangkat Daerah	-			33 Perangkat Daerah	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	BP3D	33 Laporan	-			33 Laporan	-
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	BP3D	22 Dokumen	-			22 Dokumen	-
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	BP3D	5 Perangkat Daerah	-			5 Perangkat Daerah	-
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	BP3D	5 Perangkat Daerah	-			5 Perangkat Daerah	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	BP3D	5 Laporan	-			5 Laporan	-
	Kegiatan								
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Program Rkpd/Rpjmd Bidang Perekonomian dan SDA Yang Konsisten	BP3D	64 program	-	APBD		64 program	-
	Sub Kegiatan								
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	BP3D	26 Dokumen	-			26 Dokumen	-
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	BP3D	4 Perangkat Daerah	-			4 Perangkat Daerah	-
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	BP3D	4 Perangkat Daerah	-			4 Perangkat Daerah	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	BP3D	4 Laporan	-			4 Laporan	-
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	BP3D	20 Dokumen	-			20 Dokumen	-
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	BP3D	4 Perangkat Daerah	-			4 Perangkat Daerah	-
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	BP3D	4 Perangkat Daerah	-			4 Perangkat Daerah	-
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	BP3D	4 Laporan	-			4 Laporan	-
	Kegiatan								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Program Rkpd/Rpjmd Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Yang konsisten	BP3D	18 program	-	APBD		18 program	-
	Sub Kegiatan								
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD	BP3D	13 Dokumen	-			13 Dokumen	-
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	BP3D	2 Perangkat Daerah	-			2 Perangkat Daerah	-
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	BP3D	2 Perangkat Daerah	-			2 Perangkat Daerah	-
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	BP3D	2 Laporan	-			2 Laporan	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	BP3D	5 Dokumen	-			5 Dokumen	-
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	BP3D	2 Perangkat Daerah	-			2 Perangkat Daerah	-
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	BP3D	2 Perangkat Daerah	-			2 Perangkat Daerah	-
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	BP3D	2 Laporan	-			2 Laporan	-
	UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**Nilai EKPPD**	**BP3D**	**34100**		**APBD**		**34200**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Prosentase *policy brief* bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan**	**BP3D**	**80**	**673.000.000**	**APBD**		**83**	**605.000.000**
	Kegiatan								
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah kajian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajiaan peraturan yang telah disusun *policy brief* dan didiseminasikan	BP3D	4 kajian	423.000.000	APBD		2 kajian	180.000.000
	Sub Kegiatan								
5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	BP3D	1 Laporan	50.000.000	APBD		-	-
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	BP3D	3 Dokumen	373.000.000	APBD		2 Dokumen	130.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	BP3D			APBD		1 Rekomendasi	50.000.000
	Kegiatan								
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah kajian bidang sosial dan kependudukan yang telah disusun *policy brief* dan didiseminasikan	BP3D	2 kajian	100.000.000	APBD		3 kajian	250.000.000
	Sub Kegiatan								
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	BP3D	-	-	APBD		1 Dokumen	100.000.000
5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BP3D		-	APBD		1 Dokumen	50.000.000
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	BP3D	1 Dokumen	50.000.000	APBD		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5.05.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	BP3D	1 Dokumen	50.000.000	APBD		-	-
5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	BP3D		-	APBD		1 Dokumen	100.000.000
	Kegiatan								
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang telah disusun policy brief dan didiseminasikan	BP3D	4 kajian	150.000.000	APBD		2 kajian	175.000.000
	Sub Kegiatan								
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	BP3D	1 dokumen	50.000.000	APBD		-	-
5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	BP3D	1 dokumen	50.000.000	APBD		-	-
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	BP3D	2 dokumen	50.000.000	APBD		1 dokumen	75.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	BP3D	-	-	APBD		1 dokumen	100.000.000
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan	BP3D	80	400.000.000	APBD		83	400.000.000
	Kegiatan								
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi yang masuk/ diakui dalam database daerah	BP3D	10 inovasi	400.000.000	APBD		10 inovasi	400.000.000
	Sub Kegiatan								
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian,Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	BP3D	7 dokumen	200.000.000			7 dokumen	200.000.000
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	BP3D	3 Laporan	100.000.000			3 Laporan	100.000.000
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	BP3D	3 Laporan	100.000.000			3 Laporan	100.000.000
		Nilai SAKIP BP3D	**BP3D**	**84**		**APBD**		**84,25**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar**	**BP3D**	**100**	**5.054.185.000**	**APBD**		**100**	**6.118.805.000**
	Kegiatan								
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	BP3D	55 Dokumen	4.301.394.000	APBD		55 Dokumen	4.829.403.000
	Sub Kegiatan								
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BP3D	30 Orang/Bulan	3.838.750.000			30 Orang/Bulan	4.450.203.000
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BP3D	12 Dokumen	462.644.000			12 Dokumen	379.200.000
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	BP3D	12 Dokumen	-			12 Dokumen	-
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BP3D	12 Dokumen	-			12 Dokumen	-
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BP3D	1 Laporan	-			1 Laporan	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	BP3D	1 Dokumen	-			1 Dokumen	-
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BP3D	18 Laporan	-			18 Laporan	-
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BP3D	2 Dokumen	-			2 Dokumen	-
	Kegiatan								
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	BP3D	16 Dokumen	578.941.000	APBD		16 Dokumen	639.352.000
	Sub Kegiatan								
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BP3D	4 Paket	3.000.000			4 Paket	3.000.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BP3D	4 Paket	197.000.000			4 Paket	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BP3D	4 Paket	3.000.000			4 Paket	3.000.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BP3D	4 Paket	40.000.000			4 Paket	40.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BP3D	4 Paket	62.690.000			4 Paket	76.988.000
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	BP3D	4 Paket	75.919.000			4 Paket	280.497.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BP3D	4 Laporan	97.332.000			4 Laporan	135.867.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BP3D	4 Laporan	100.000.000			4 Laporan	100.000.000
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BP3D	12 Dokumen	-			12 Dokumen	-
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BP3D	12 Dokumen	-			12 Dokumen	-
	Kegiatan								
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	BP3D	36 Dokumen	73.750.000	APBD		36 Dokumen	419.550.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Sub Kegiatan								
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BP3D	12 Laporan	1.000.000			12 Laporan	1.000.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BP3D	12 Laporan	67.000.000			12 Laporan	96.000.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BP3D	12 Laporan	5.750.000			12 Laporan	322.550.000
	Kegiatan								
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	BP3D	4 Paket	100.100.000	APBD		4 Paket	230.000.000
	Sub Kegiatan								
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BP3D	21 Unit	50.000.000			21 Unit	70.000.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BP3D	80 Unit	20.000.000			80 Unit	20.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BP3D	15 Unit	30.100.000			15 Unit	100.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	BP3D	1 Unit	-			1 Unit	40.000.000
	Kegiatan								
X.XX.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	BP3D	26 Dokumen	-	APBD		26 Dokumen	-
	Sub Kegiatan								
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	BP3D	2 dokumen	-			2 dokumen	-
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BP3D	1 dokumen	-			1 dokumen	-
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BP3D	1 dokumen	-			1 dokumen	-
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BP3D	1 dokumen	-			1 dokumen	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, *Sub Kegiatan*	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BP3D	1 dokumen	-			1 dokumen	-
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BP3D	16 laporan	-			16 laporan	-
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BP3D	4 laporan	-			4 laporan	-
					6.867.890.000				**7.995.055.000**

Sumber Data : Cascading Review Renstra BP3D 2021-2026 (Revisi 050-5889) dan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 (halaman : 474 dan 1384-1405)

BAB V

PENUTUP

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa maka Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ini dapat selesai disusun. Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali dalam tahun 2024, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Mengingat Renja memuat program dan kegiatan pembangunan, maka pelaksanaan program/kegiatan hendaknya dapat dilakukan secara akurat, terpadu, fokus dan terarah serta menjadi modal dalam periode pembangunan pada periode berikutnya dengan tetap memperhatikan peluang dan tantangan yang ada.

Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam rangka merencanakan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya mengalir ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali adalah Renja Akhir yang berisi Program Tahunan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali.

Renja BP3D Kabupaten Boyolali selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BP3D serta dasar usulan rancangan awal RKPD sebagai prakiraan pelaksanaan kegiatan tahun 2024.

Renja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan Perangkat Daerah dan seluruh staf BP3D Kabupaten Boyolali sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Y. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

BADAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 mempunyai arti yang strategis dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2026

Melihat laporan capaian kinerja tahun 2023 dalam pelaksanaan program dan kegiatan maka sasaran program yang telah disusun telah mencapai target sasaran tahunan. Hal ini disebabkan target kinerja Badan merupakan target kinerja pelayanan tahunan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 selain mengoptimalkan program dan kegiatan yang sudah berjalan juga disiapkan berbagai rencana tindak sebagai peningkatan kualitas pelayanan dan kesinambungan pelayanan dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis BKD serta rencana tindak dan pagu indikatif yang dibutuhkan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) 2024 selanjutnya akan menjadi dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun dan akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024 dan memperkirakan capaian kinerja tahun berjalan. Dengan disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Organisasi perangkat daerah, maupun bagi pemangku kepentingan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……. ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ……. 1
1.2 Landasan Hukum ……..... 1
1.3 Maksud dan Tujuan ……. 3
1.4 Sistematika Penulisan …….. 4

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali …….....6
2.2 Analisis Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali 12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali …….. 14
2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD ……. 15
2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ……. 22

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. 25

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan ……..... 33

BAB IV PENUTUP

5.1 Penutup …… 66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3.1 Sasaran Renstra 2021 – 2026 ……..... 6
Tabel 2.3.2 Pelaksanaan Program kegiatan Tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali sampai dengan Bulan Agustus 2023 7
Tabel 2.3.3 Sasaran Kinerja Target Kinerja Sasaran BKD Boyolali 13
Tabel 3.1.1 Sasaran dan Indikator Kinerja BKD Boyolali 2021-2026 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan otonomi daerah terjadi adanya perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan secara luas, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. Perubahan paradigma ini merupakan perwujudan dari semangat reformasi dalam tubuh pemerintah dalam kontak "*Good Governance*". Proses perubahan paradigma ini diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih merata, berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan lebih banyak melibatkan aspirasi masyarakat.

Hasil pembangunan itu sendiri juga diharapkan dapat mendorong kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, maju serta memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk menuju masyarakat madani tersebut harus didukung oleh perencanaan program yang matang dengan diimbangi adanya sumber daya manusia yang berkomitmen kuat terhadap keberhasilan pembangunan.

Pembangunan tersebut tentunya melibatkan berbagai sumber daya yang ada, baik sumberdaya manusia, sumberdaya alam maupun sumberdaya lainnya. Untuk itu perencanaan strategis perlu disusun sebagai langkah awal yang harus dilakukan agar keberadaan organisasi dapat bertahan dan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis dan isu-isu strategis. Perencanaan akan digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan merupakan "Arah Kebijakan Umum" yang strategik dan prioritas sebagai dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing satuan kerja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2024 yaitu :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;
k. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 133 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026;

m. Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2021;

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk mendapatkan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Munculnya paradigma baru dalam pengelolaan Keuangan Daerah dilatarbelakangi antara lain oleh meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik secara transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas.

Sedangkan dalam penentuan nomenklatur program dan kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Seiring dengan berlakunya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali perlu menyusun Rencana Kerja Daerah (RENJA OPD) Tahun 2024. Materi Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ini, yaitu :

a. Target pencapaian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah selama Tahun 2024 sampai dengan akhir Desember 2024.
b. Prioritas program dan kegiatan Tahun 2024.
c. Strategi dan kebijakan dalam mencapai sasaran bidang keuangan Tahun 2024.
d. Penganggaran untuk masing-masing kegiatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan arah kebijakan teknis dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2024 bagi masing-masing bidang dan sekretariat dalam rangka mengemban visi dan misi Bupati Kabupaten Boyolali, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 yaitu sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) guna menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dituangkan

dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2024 adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Badan Keuangan Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai APBD;
2. Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dan kegiatan tahunan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan;
3. Mempertajam prioritas program kegiatan dan kesinambungan program kegiatan dari tahun ke tahun;
4. Menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur lingkup Badan Keuangan Daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA KERJA

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

1.2 Landasan Hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.

2.2 Analisis Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.

2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKD Boyolali

Dalam rangka mengemban visi dan misi Bupati Kabupaten Boyolali yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026, dan Rencana Kerja tahun 2024, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali pada tahun 20223 telah merealisasikan 4 (empat) program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan. Untuk mengukur sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2026, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.1 Sasaran Renstra 2021 – 2026

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target Jangka Menengah					Capaian Kinerja 2022
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekomoni	Meningkatnya Pemanfaatan BMD untuk meningkatkan PAD	Meningkatnya Pemanfaatan BMD untuk meningkatkan PAD	NA	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	IPKD	Na	66.49	67.81	69.16	70.54	71.95	**Dalam proses penilaian (Agustus 2022)**
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	**WTP untuk LKPD 2022**
		Nilai SAKIP	80	80	83.15	83.40	83.65	83.90	**Nilai SAKIP 83.20 untuk SAKIP 2023**

Pada tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali melaksanakan 4 (empat) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 450.501.063.000,-. (Empat ratus lima puluh empat milyar lima ratus satu juta enam puluh tiga ribu rupiah) Seluruh program/kegiatan tersebut sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023 atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri *(Self Assessment)* atas realisasi pelaksanaan Program kegiatan Tahun 2023 sampai dengan Bulan Agustus 2023 sebagai berikut, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari dua Sasaran Strategis yang telah ditetapkan adalah 50%.

Tabel 2.3.2
Pelaksanaan Program kegiatan Tahun 2023
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali sampai dengan Bulan Agustus 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2023	Realisasi s/d Agustus 2023	%	Bidang Pengampu
1			2	3	4	5
1	Program	Penunjang Urusan Pemerintah	28.827.718.000	15.410.860.564	53%	
	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.300.391.000	10.546.883.239	61%	
	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	16.611.317.000	10.156.075.218	61%	Sekretariat
	Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	689.074.000	390.808.021	57%	Sekretariat
	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.406.757.000	728.759.941	52%	Sekretariat
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	9.813.400	65%	Sekretariat
		Penyedia Peralatan Rumah Tangga	29.999.910	11.913.900	40%	Sekretariat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2023	Realisasi s/d Agustus 2023	%	Bidang Pengampu
1			2	3	4	5
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.893.000	103.231.680	87%	Sekretariat
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	490.894.000	189.752.253	39%	Sekretariat
		Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	0	0	0	Sekretariat
		Penyediaan Bahan / Material	242.888.000	144.617.875	60%	Sekretariat
		Fasilitas Kunjungan Tamu	237.340.000	83.787.000	35%	Sekretariat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	271.842.090	185.643.833	68%	Sekretariat
	Kegiatan	Pengadaan Barang milik Daerah urusan Pemerintah Daerah	8.901.208.000	3.796.103.232	43%	
	Sub Kegiatan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3000.000.000	2.626.552.163	88%	Bidang Aset
		Pengadaan Mebel	24.408.000	19.980.000	82%	Sekretariat
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	656.800.000	451.135.000	69%	Sekretariat
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.220.000.000	698.436.069	13%	Bidang Aset
	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	886.270.000	166.033.554	19%	Sekretariat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2023	Realisasi s/d Agustus 2023	%	Bidang Pengampu
1			2	3	4	5
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	13.669.880	91%	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	345.600.000	143.684.947	42%	Sekretariat
		Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	525.670.000	8.678.727	2%0	Sekretariat
	Kegiatan	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.092.000	173.080.598	52%	Sekretariat
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	180.092.000	106.389.598	59%	Sekretariat
		Pemeliharaan Mebeler	15.000.000	1.260.000	8%	Sekretariat
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.000.000	36.627.000	47%	Sekretariat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	28.804.000	37%	Sekretariat
2	Program	Pengelolaan Keuangan Daerah	400.000.000	89.000.000	22%	
	Kegiatan	Koordinasi dan penyusunan rencana Anggaran Daerah	150.000.000	12.000.000	8%	Bidang Anggaran
	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan	150.000.000	12.000.000	8%	Bidang Anggaran

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2023	Realisasi s/d Agustus 2023	%	Bidang Pengampu
1			2	3	4	5
		Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				
	Kegiatan	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dn pelaporan keuangan Daerah	140.000.000	16.100.000	12%	Bidang Akuntansi dan pembiayaan
	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggunjawaban Pelaksanaan	140.000.000	16.100.000	12%	Bidang Akuntansi dan pembiayaan
	Kegiatan	Pengelolaan Data dan implementasi sistem informasi pemerintah Daerah lingkup keuangan Daerah	90.000.000	31.174.078	35%	Bidang Akuntansi dan pembiayaan
	Sub Kegiatan	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Lingkup Keuangan Daerah	110.000.000	60.900.000	55%	Bidang Akuntansi dan pembiayaan
3	Program	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.491.400.000	852.951.346	57%	
	Kegiatan	Pengelolaan Barang milik	1.491.400.000	852.951.346	57%	Bidang Pengelolaan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2023	Realisasi s/d Agustus 2023	%	Bidang Pengampu
1			2	3	4	5
		Daerah				Aset daerah
	Sub Kegiatan	Inventarisasi Barang Milik Daerah	301.400.000	68.500.000	23%	Bidang Pengelolaan Aset daerah
	Sub Kegiatan	Pengaman Barang Milik Daerah	800.000.000	672.530.048	84%	Bidang Pengelolaan Aset daerah
	Sub Kegiatan	Penilaian Barang Milik Daerah	250.000.000	60.197.298	24%	Bidang Pengelolaan Aset daerah
	Sub Kegiatan	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,Pemindahtanganan,Pemusnahan,dan Penghapusan Barang Milik Daerah	140.000.000	51.724.000	37%	Bidang Pengelolaan Aset daerah
4	Program	Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.426.000.000	4.072.551.328	63%	
	Kegiatan	Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.426.000.000	4.072.551.328	63%	Bidang Pajak Daerah
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3.944.020.000	2.365.133.317	60%	Bidang Pajak Daerah
		Penyediaan Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	720.000.000	253.260.100	35%	Bidang Pajak Daerah
		Penagihan pajak Daerah	1.763.980.000	1.429.638.411	82%	Bidang Pajak Daerah
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	25.000.000	24.519.500	98%	Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran 2023	Realisasi s/d Agustus 2023	%	Bidang Pengampu
1			2	3	4	5
	Program	Pengelolaan Keuangan Daerah	413.355.945.000	280.062.862.609	68%	
	Kegiatan	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	413.355.945.000	280.062.862.609	68%	Bidang Anggaran
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.000.000.000	5.148.997.409	51%	Bidang Anggaran
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	379.516.838.000	256.349.709.200	68%	Bidang Anggaran
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	23.839.107.000	256.564.156.000	78%	Bidang Anggaran
		Jumlah	450.501.063.000	300.488.225.847	67%	

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Badan Keuangan Daerah agar lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil Evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021, 2022 dan 2023 sesuai apa yang sudah dijadikan indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.3 Sasaran Kinerja
Target Kinerja Sasaran BKD Boyolali

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target Jangka Menengah					Capaian Kinerja 2023
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekomoni	Meningkatnya Pemanfaatan BMD untuk meningkatkan PAD	Meningkatnya Pemanfaatan BMD untuk meningkatkan PAD	N/a	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	IPKD	N/a	66.49	67.81	69.16	70.54	71.95	**Dalam proses penilaian**
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	**WTP untuk LKPD 2022**
		Nilai Sakip	79.71	80.00	83.15	83.40	83.65	83.9	**83.20**

Dari tabel tersebut di atas bisa dijelaskan untuk target sesuai RPJMD untuk indikator sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah telah tercapai dengan pemanfaatan satu jenis BMD.

Indikator Sasaran Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di tahun 2023 dengan target nilai 67.81 ini masih dalam tahap Penilaian oleh Kementrian Dalam Negeri, karena untuk Penilaian IPKD tahun bersangkutan di tahun berikutnya. Untuk Indikator Opini BPK dengan target WTP untuk opini atas Laporan Keuangan Daerah setiap tahunnya. Telah tercapai target Opini WTP dari BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 yang diterimakan di tahun 2023. Untuk mencapai target yang telah di tetapkan, maka diperlukan berbagai

peningkatan kinerja dan pelayanan di semua pada di Badan Keuangan Daerah. Untuk Laporan Keuangan Daerah tahun 2022 yang dinilai pada tahun 2023 telah mendapatkan Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah atau keuangan daerah, faktor kemampuan aparat sangat berpengaruh terhadap pengelolaan pendapatan daerah, Selain itu, juga sangat dipengaruhi oleh indikator-indikator seperti: Laju pertumbuhan penduduk, Laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita.

Terlepas dari beberapa indikator seperti tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun tetap diusahakan agar dari tahun ke tahun Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali selalu mengalami peningkatan. Namun demikian dalam usaha optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali di awal tahun 2024 ini masih menghadapi beberapa masalah atau kendala seperti kesadaran wajib pajak yang tingkat kesadaran untuk membayar pajak dan retribusi masih rendah.

Selain itu, dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian bukan berarti laporan keuangan Kabupaten Boyolali sempurna tanpa catatan. Ada beberapa hal atau isu strategis yang masih perlu ditingkatkan utamanya dalam hal penatausahaan aset/ada beberapa upaya yang dilakukan pada tahun 2024 untuk mempertahankan opini WTP antara lain :

- Peningkatan kemampuan/kapasitas Sumber Daya Manusia Pengurus Barang Perangkat Daerah, dimana pengurus Barang kurang memiliki kompetensi di bidang Penatausahaan Aset sehingga menyebabkan belum tertibnya administrasi pengelolaan BMD.
- Perubahan budaya kerja pengelolaan BMD di masing-masing OPD dimana saat ini pengelolaan BMD yg baik belum menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pekerjaan OPD.
- Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah menjadi prioritas dalam kegiatan pengamanan BMD.

- Peningkatan Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan mengadakan rekonsiliasi dengan pengurus barang di semua Perangkat daerah dan UPT yang dilaksanakan setiap triwulan.

Selain hal tersebut diatas Upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah antara lain yaitu :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi pendapatan yang ada, dapat masuk ke Kas Daerah dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Boyolali.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan pendapatan daerah melalui perbaikan sistem pelayanan berbasis web untuk mempermudah akses wajib pajak dalam pembayaran pajak pajak dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan unit-unit usaha daerah agar bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang stabil dan signifikan sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan.
4. Pendataan PBB – P2 di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali dalam rangka optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
5. Melaksanakan undian berhadiah bagi para wajib pajak yang telah menunaikan kewajibannya untuk meningkatkan antusiasme wajib pajak.
6. Meningkatkan upaya pengamanan dan pemeliharaan aset daerah berupa legalisasi Aset milik Pemerintah daerah yang berupa tanah/bangunan dan juga kendaraan dinas/ operasional.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal Renstra serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan RKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Rancangan RKPD Tahun 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Program				*Program*			
A	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah BMD yang dimanfaatkan	3 Jenis BMD	0	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah BMD yang dimanfaatkan	3 Jenis BMD	0
	Kegiatan				*Kegiatan*			
A.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dimanfaatkan	3 Jenis BMD	0	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dimanfaatkan	3 Jenis BMD	0
	Program				*Program*			
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Ketercapaian penerimaan pendapatan asli daerah	448.479.141.000 (Rupiah)	6.426.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Ketercapaian penerimaan pendapatan asli daerah	448.479.141.000 (Rupiah)	6.426.000.000
	Kegiatan				*Kegiatan*			
B.1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Ketercapaian penerimaan pendapatan asli daerah	40 Lapoan	6.426.000.000	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Ketercapaian penerimaan pendapatan asli daerah	40 Lapoan	6.426.000.000

	Program				*Program*			
C	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyerapan APBD tahun berjalan	55%	502.133.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyerapan APBD tahun berjalan	55%	502.133.000
	Kegiatan				*Kegiatan*			
C.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang anggaran	14 Dokumen	502.133.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang anggaran	14 Dokumen	502.133.000
					Program			
C	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyediaan anggaran sesuai ketentuan	92%	0	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyediaan anggaran sesuai ketentuan	92%	0
	Kegiatan				*Kegiatan*			
C.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penatausahaan APBD sesuai peraturan perundang - undangan	28 Laporan	0	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penatausahaan APBD sesuai peraturan perundang - undangan	28 Laporan	0
	Program				*Program*			

C	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai Aturan	100%	409.652.417.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai Aturan	100%	409.652.417.000
	Kegiatan				*Kegiatan*			
C.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	17 Laporan	140.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	17 Laporan	140.000.000
C.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya kebijakan tentang kewenangan pengelolaan keuangan daerah	27 Laporan	408.900.284.000	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksanaya kebijakan tentang kewenangan pengelolaan keuangan daerah	27 Laporan	408.900.284.000
C.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	13 Dokumen	110.000.000	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan yang ter-update	13 Dokumen	110.000.000

		Keuangan Daerah						
	Program		7		*Program*			
A	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	100%	1.491.400.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	100%	1.491.400.000
	Kegiatan				*Kegiatan*			
A.2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan BMD	23 Dokumen	1.491.400.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib pengelolaan barang milik daerah	23 Dokumen	1.491.400.000
	Program				*Program*			
D	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100%	29.015.090.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100%	29.015.090.000
	Kegiatan				*Kegiatan*			
D.1	Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah kegiatan administrasi	8 Kegiatan	17.075.037.000	Administrasi Keuangan Perangkat	Terjaminnya administrasi	8 Kegiatan	17.075.037.000

	Daerah	keuangan PD			Daerah	keuangan perangkat daerah		
	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah kegiatan adminisstrasi barang milik daerah	1 Kegiatan	0	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah kegiatan adminisstrasi barang milik daerah	1 Kegiatan	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian PD	1 Kegiatan	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian PD	1 Kegiatan	0
D. 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum PD	9 Kegiatan	1.466.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercukupinya administrasi umum perangkat daerah	9 Kegiatan	1.466.500.000
D. 3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	9.167.911.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD penunjang urusan pemerintah daerah	4 Kegiatan	9.167.911.000
D. 4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	3 Kegiatan	867.670.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintan	3 Kegiatan	867.670.000

		Pemerintahan Daerah				daerah		
D.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	417.972.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	4 Kegiatan	417.972.000
D.6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja PD Kinerja Perangkat Daerah	26 Dokumen	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	26 Dokumen	-

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2023. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

BKD sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BKD tidak secara langsung berdampak pada capaian program nasional ataupun internasional. Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kedua ketentuan tersebut, serta menyikapi dinamika kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD/ Perubahan APBD, diarahkan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi utamanya ekonomi berbasis kreatifitas (ekonomi kreatif), lingkungan hidup, kemiskinan serta pengangguran, Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai dan isu-isu strategis lainnya, yang dijabarkan dalam program kegiatan PD di lingkungan Kabupaten Boyolali sesuai bidang urusan, kebutuhan dan karakter daerah masing-masing. Dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, antara lain seperti kebijakan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di daerah.

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program kebijakan pengelolaan keuangan Daerah, Kabupaten Boyolali telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini adalah pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan keuangan Daerah secara tertib, efisiensi, efektivitas dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat. Selain itu mewujudkan pemerintah Daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Kebijakan pemerintah pusat lainnya juga adalah menerapkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yakni implementasi dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Permendagri No. 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa

penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

- Perencanaan pembangunan daerah;
- Perencanaan anggaran daerah;
- Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
- Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- Pertanggungjawaban keuangan daerah;
- Pengawasan keuangan daerah; dan
- Analisis informasi pemerintahan daerah lainnya

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju *single codebase*, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, *accountable, responsible*, serta *reliable* sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Dibidang aset daerah, sertifikasi aset tetap tanah tidak dapat dipastikan jangka waktu penyelesaiannya, karena pelaksanaan sertifikasi aset tetap tanah merupakan proses yang saling terkait dan harus melibatkan beberapa pihak. Hal ini, secara langsung sangat berpengaruh terhadap percepatan penyelesaian sertifikasi dan realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan penunjang lainnya, misal biaya pendaftaran dan pengukuran, pemeriksaan, pendaftaran hak, honor tim, serta akomodasi, transportasi, dan konsumsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah Boyolali

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Keuangan Daerah sesuai Perbup 133 tahun 2021Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali, adalah mempuyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali, tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Sasaran dan Indikator Kinerja BKD Boyolali 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Tahun ke				
				1 2022	2 2023	3 2024	4 2025	5 2026
1	Meningkatnya Kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pemanfaatan BMD untuk meningkatkan PAD	Persentase pemanfaatan BMD	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas keuangan daerah	Index Pengelolaan Keuangan Daerah	66.49	67.81	69.16	70.54	71.95
			Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	80.00	83.15	83.40	83.65	83.90

3.3 Program Kegiatan Tahun 2024

Agenda utama yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali dalam rangka pembangunan bidang keuangan Tahun 2024 akan disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali yaitu dengan prioritas ”Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan pelayanan

publik bebas KKN, responsif, dan akuntabel mendukung kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan".

Bertolak pada prioritas dan program rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 tahun 2019 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali pada tahun 2022 merencanakan empat program yaitu :

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota
b. Program pengelolaan keuangan daerah
c. Program pengelolaan barang milik daerah
d. Program pengelolaan pendapatan daerah

Adapun program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota**

   Sasaran program ini adalah terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis dengan Target Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai Standar sebesar 100%. Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan program tersebut adalah sebagai berikut :

   1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
      a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
      b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
      c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      e. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
g. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
h. Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

2. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
    a. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    a. Monitoring Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
    a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    b. Penyediaan peralatan rumah tangga
    c. Penyediaan bahan logistik kantor
    d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    e. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
    f. Penyediaan bahan material
    g. Fasilitasi kunjungan tamu
    h. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
    i. Penataan arsip dinamis pada SKPD
    j. Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
    a. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
    b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
    c. Pengadaan Mebeler
    d. Pengadaan Aset tetap lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
    a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7. Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan sub kegiatan :
    a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
    b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
    c. Pemeliharaan mebel
    d. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
8. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan sub kegiatan :
    a. Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
    b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
    c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran program ini adalah meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dengan target Persentase Penyediaan Anggaran Sesuai Ketentuan sebesar 55%.

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daeah dengan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah :
    a. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
    b. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
    c. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan bidang Anggaran.
    d. Pembinaan perencanaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota;
    e. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
    f. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

Selain itu program ini memiliki target lain yaitu Persentase Penyerapan APBD tahun berjalan sebesar 92% dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah :
    a. Koordinasi dan pengelolaan kas daerah;
    b. Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan, dana transfer lainnya.
    c. Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan;
    d. Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten / Kota;

Program ini juga memiliki target lain yaitu Persentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai aturan sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah :
    a. Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
    b. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;

c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah .
d. Penyusunan Sistem dan Prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Penunjang Urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah :
    a. Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;
    b. Pengelolaan dana darurat dan mendesak
    c. Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota

3. Pengelolaan data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup Keuangan Daerah dengan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu
    a. Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah dengan target Persentase Aset Daerah yang diinventarisasi sebesar 100% dan .....

Kegiatan untuk menunjang program tersebut adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sub kegiatan yang akan dilaksanakan :

a. Penyusunan Standar Satuan Harga
b. Penatausahaan Barang Milik Daerah
c. Inventarisasi barang milik daerah
d. Pengamanan barang milik daerah
e. Penilaian barang milik Daerah
f. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sasaran program ini adalah Ketercapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 397.252.279.000. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu pengelolaan pendapatan daerah dengan sub kegiatan yang akan dilaksanakan:

a. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
b. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
c. Penagihan pajak daerah;
d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah .

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEUANGAN DAERAH						**446.584.907.000,00**							**419.505.182.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**446.584.907.000,00**							**419.505.182.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**446.584.907.000,00**							**419.505.182.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100"Persen**			-	**29.015.090.000,00**						**100"Persen**	**39.957.322.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	104"Dokumen			-	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	26"Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen			2 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	2 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	1 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	1 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	1 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	1 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64 Laporan			16 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	16 Laporan	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan			4 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	4 Laporan	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	32"Kegiatan			undefined undefined	17.075.037.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	8"Kegiatan	25.548.903.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/bulan			70 Orang/bulan	16.344.887.000,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	70 Orang/bulan	25.174.503.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen			12 Dokumen	730.150.000,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	12 Dokumen	374.400.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen			12 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	12 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen			3 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	3 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	1 Laporan	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	1 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan			18 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	18 Laporan	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	1 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	4"Kegiatan			-	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	1"Kegiatan	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	1 Laporan	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	4"Kegiatan			-	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	1"Kegiatan	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48 Dokumen			12 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	12 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	36"Kegiatan			-	1.466.500.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	9"Kegiatan	2.189.779.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	20.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	4 Paket	3.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	30.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	4 Paket	3.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket			0 Paket	185.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	12 Paket	40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	475.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	4 Paket	436.169.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	325.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	4 Paket	500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16 Laporan			4 Laporan	161.500.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	4 Laporan	207.610.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan			4 Laporan	270.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	4 Laporan	1.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	52 Dokumen			13 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	13 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	52 Dokumen			13 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	13 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	16"Kegiatan			-	9.167.911.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	4"Kegiatan	10.850.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit			1 Unit	2.400.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	1 Unit	1.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	1 Unit	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit			8 Unit	348.800.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	4 Unit	350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	6.369.111.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	1 Unit	9.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12"Kegiatan			-	887.670.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	3"Kegiatan	1.013.548.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 Laporan			4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	4 Laporan	13.548.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	347.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	12 Laporan	400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan			4 Laporan	525.670.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	4 Laporan	600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	16"Kegiatan			-	417.972.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	4"Kegiatan	355.092.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit			32 Unit	222.305.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	32 Unit	180.092.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	38 Unit			0 Unit	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	4 Unit	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			5 Unit	135.667.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	5 Unit	125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	60.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	1 Unit	50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**	**55^Persen 92^Persen 100^Persen**			-	**409.652.417.000,00**						**55^Persen 92^Persen 100^Persen**	**371.119.422.000,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	48^dokumen			-	502.133.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	14^dokumen	452.133.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	8 Dokumen			2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	2 Dokumen	100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8 Dokumen			2 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	2 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Dokumen			3 Dokumen	352.133.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	3 Dokumen	352.133.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	8 Dokumen			2 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	2 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	20 Dokumen			5 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	5 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	160 Orang			106 Orang	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	160 Orang	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	112"dokumen			-	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	28"dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	48 Dokumen			12 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	12 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 Dokumen			4 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	4 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	48 Dokumen			12 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	12 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	160 Orang			50 Orang	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	160 Orang	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	69"laporan			-	140.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	17"laporan	90.853.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48 Laporan			12 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	12 Laporan	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	8 Dokumen			2 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	2 Dokumen	90.853.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	8 Dokumen			2 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	2 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	1 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	108"laporan			-	408.900.284.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	27"laporan	370.486.436.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	48 Laporan			12 Laporan	379.616.838.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA DESA	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	12 Laporan	347.705.441.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	48 Laporan			12 Laporan	10.000.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	12 Laporan	4.400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan			3 Laporan	19.283.446.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	3 Laporan	18.380.995.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	52"dokumen			-	110.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	13"dokumen	90.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	52 Dokumen			13 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	13 Dokumen	90.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**	**100"Persen 5"BMD 5,00"Jenis**			-	**1.491.400.000,00**						**100"Persen 5"BMD 5,00"Jenis**	**1.575.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	93"dokumen			-	1.491.400.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	23"dokumen	1.575.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	1 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	16 Laporan			4 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	4 Laporan	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan			1 Laporan	301.400.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	0 Laporan	25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	16 Laporan			4 Laporan	800.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	4 Laporan	1.200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	8 Laporan			2 Laporan	250.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	2 Laporan	350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	48 Dokumen			12 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	12 Dokumen	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**448479141000"Rupiah**			-	**6.426.000.000,00**						**448479141000"Rupiah**	**6.853.438.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	40"laporan			-	6.426.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	10"laporan	6.853.438.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan			2 Laporan	3.944.020.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	2 Laporan	3.850.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit			2 Unit	720.000.000,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	2 Unit	1.850.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	16 Dokumen			4 Dokumen	1.736.980.000,00	Kab. Boyolali, Mojosongo, Kemiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	4 Dokumen	1.153.438.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Laporan			4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD.	-	4 Laporan	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	J U M L A H							**446.584.907.000,00**							**419.505.182.000,00**	

Perencanaan Pendapatan Badan Keuangan Daerah

Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Tarif/Harga
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**			
4.1.01	**Pajak Daerah**			
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel			1.700.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran			10.065.000.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Hiburan			1.800.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame			4.000.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan			53.500.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir			2.000.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah			3.200.000.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			735.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)			47.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			56.000.000.000,00
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**			
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)			18.798.530.000,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)			1.000.000.000,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air			2.300.000.000,00

	Minum			
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**			
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin			83.551.000,00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			40.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD			558.625.000,00
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah			121.196.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah			1.000.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah			8.000.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain			5.000.000,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel			29.000.000,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya			102.000.000,00
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam, dan Sejenisnya			500.000,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron			73.000.000,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir			500.000,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah			1.000.000,00
4.1.04.12.14.0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil			147.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2			647.000.000,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**			
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**			
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan			3.014.720.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21			15.299.994.000,00

4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			32.951.235.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi			158.625.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi			34.227.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent			844.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			400.477.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan			1.259.941.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU			977.962.380.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD			591.723.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD			10.593.288.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP			9.110.514.000,00
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat			1.323.411.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB			1.240.241.000,00
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)			14.229.718.000,00
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM			1.990.780.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler			4.541.479.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler			2.238.310.000,00
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup			4.068.645.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan			41.742.633.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Regule			92.976.900.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja			4.850.000.000,00

4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD			156.047.717.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD			5.207.750.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD			15.393.600.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan			1.852.200.000,00
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum			700.000.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			24.293.241.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan			445.272.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			10.638.810.000,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM			410.170.000,00
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan			946.459.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal			333.900.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian			1.135.875.000,00
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM			2.750.000.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa			258.860.591.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiska			8.872.583.000,00
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**			
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor			51.115.354.000,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor			28.794.947.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor			38.331.231.000,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan			139.886.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok			56.618.582.000,00
Jumlah				2.096.375.155.000,00

Rencana Pembiayaan

Tahun 2024

Penerimaan Pembiayaan		
Kode Rekening	**Uraian**	**Nilai**
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	11.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	15.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	4.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	13.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	5.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	7.000.000.000,00
Jumlah		Rp. 55.000.000.000,00
Pengeluaraan Pembiayaan		
Kode Rekening	**Uraian**	**Nilai**
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD (Penyertaan Modal PUDAM Tirta Ampera)	Rp. 5.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD (Penyertaan Modal PT Aneka Karya)	Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah		Rp. 7.000.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2024 ini merupakan tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali yang disusun berdasarkan Visi, Misi, Kebijakan strategis, Program, Kegiatan dan sub kegiatan.

Dengan mempertimbangkan potensi yang ada, sarana dan prasarana yang tersedia serta kemampuan untuk mencapai sasaran menjadi pendorong dalam peningkatan peranan masyarakat yang terpadu dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Boyolali sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan Pelaksanaan Program dan kegiatan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan jaman yang sangat dinamis, maka Rencana Kerja ini sewaktu-waktu bisa berubah untuk mengikuti situasi dan kondisi. Perubahan ini bisa karena beberapa faktor seperti adanya Undang-undang atau peraturan yang baru dari pemerintah pusat, kebijakan-kebijakan Kepegawaian di Kabupaten Boyolali, karena kebutuhan / kepentingan organisasi, kejadian tak terduga dan lain-lain.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan draft KUAP PPAS serta RKAP Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2024. Selanjutnya dapat memberikan dampak positif untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Selain itu dengan tersusunnya Rencana Kerja tahun 2024 ini di waktu yang akan datang dapat membantu mempertahankan terwujudnya opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah.

Z. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 LATAR BELAKANG 3

1.2 LANDASAN HUKUM 6

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 11

1.3.1 MAKSUD 11

1.3.2 TUJUAN 11

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 12

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 14

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 14

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 29

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT 44

DAERAH 44

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 48

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 62

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 63

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 63

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 65

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 66

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PERANGKAT DAERAH 94

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN 94

BABV P E N U T U P 123

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tidak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai acuan perencanaan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kabupaten Boyolali dalam penentuan program dan kegiatan di Tahun 2024. Di dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituangkan pada RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021- 2026.

Adapun Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kabupaten Boyolali ini merupakan amanat dari dari Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian,dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Harapan Kami Semoga Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kabupaten Boyolali ini bisa digunakan sebagai acuan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel. Terima Kasih

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD),adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan, dengan :

1. Berpedoman Pada Renstra untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan,lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Revisi Renstra Perangkat Daerah
2. Berpedoman pada hasil Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu,dan hasil Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali
3. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali mencakup analisis gambaran pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali dan hasil evaluasi Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali tahun lalu
4. Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali disusun dengan melakukan beberapa penyempurnaan yang mencakup perumusan rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pendanaan Indikatif, Lokasi

Kegiatan dan Kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan,indicator kinerja, pemdanaan iondikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Program dan Kegiatan untuk Tahun 2024 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali, dengan berpedoman pada RKPD Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupate Boyolali Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun selanjutnya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dilakukan dalam rangka melaksanankan Undang- Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana diamanatkan bahwa setia daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu,menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2) dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, yang dilaksanakan oleh antar penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan koordinasi Integrasi, sinkronisasi, dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan secara Keseluruhan

Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja yang berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada RKPD yang memuat Kebijakan, Program,dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Dalam rangka mensinkronkan visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Boyolali, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 maka BKP2D Kabupaten Boyolali menyusun Renja 2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja BKP2D Kabupaten Boyolali mempunyai arti penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaran program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahkan dari program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra OPD yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Boyolali
2. Rencana Kerja PD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA, PPAS dan Perencanaan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022
3. Rencana Kerja PD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja OPD

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tat cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rancangan Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 (RKPD).
2. Program dan Kegiatan dalam rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh bidang di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali.
3. Program dan Kegiatan dalam Rencana dilengkapi dengan Indikator Kinerja Hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah tercantum dam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negaea yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6037);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standart Pelayanan Mnimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1678);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai pemerintahan dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6264);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Perubahan Atas peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
21. Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2009 tentang pengarustamaan gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengeloaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927):
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarustamaan gender di daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nmor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
27. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;

35. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;
37. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 42).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 , dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang BKP2D Kabupaten Boyolali untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagia implementasi Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis BKP2D Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.

1.3.2 TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang BKP2D berdasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerahterhadap tugas pokok dan fungsi BKP2D dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sisitematika penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum,maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasa hasil evalusai pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah,isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target dan tujuan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali dan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra SKPD dan RPJMD kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target Kinerja Program dan Kegiatan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah,serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi didasarkan atas laporan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan perkiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan yang baru disahkan.

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja yang berpedoman pada Renstra BKP2D Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026, pada Tahun 2022 BKP2D mendapatkan Alokasi anggaran sebesar Rp. 13.874.422.000,- . Dari Keseluruhan pagu tersebut telah terserap anggaran sebesar Rp. 10.987.702.884,- (79,19%). Sedangkan sisa anggaran selain karena efisiensi juga disebabkan adanya kondisi pasca pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah pada Tahun 2022 tersusun atas 3 (tiga) program, Yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,Program Kepegawaian Daerah, dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022,dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator dan capaian dari masing-masing kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dibuat. Capaian kinerja dari kegiatan ini pada tahun 2022 sesuai target yaitu sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin sehingga dapat meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Prosentase Ketercapaian Fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah. Capaian pada tahun 2022 kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dapat memenuhi target yaitu sebesar 100%, pencapaian ini didukung dengan penggunaan teknologi informasi yang memudahkan dalam penyusunan dokumen sehingga dapat diselesaikan secara tepat waktu.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Prosentase Ketercapaian Fungsi Layanan Kepegawaian Perkantoran Perangkat Daerah. Target dari kegiatan ini pada tahun 2022 yaitu sebesar 100%, dan dapat tercapai. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Prosentase Ketercapaian fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah. Target dari kegiatan ini pada tahun 2022 yaitu sebesar 100%, dan dapat tercapai. Kegiatan administrasi umum dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Prosentase Ketercapaian fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah, pada tahun 2022 targetnya adalah 100%, dan dapat mencapai target tersebut..

f Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,

Indikator dari kegiatan ini adalah Prosentase Ketercapaian fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah, pada Tahun 2022 targetnya dalah 9 paket pengadaan barang, dan dapat direlisasikan sebesar 13 paket.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Prosentase Ketercapaian fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah, tahun 2022 target sebesar 100% .Capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100% artinya dapat memenuhi target, dimana semua peralatan dan perlengkapan yang ada di BKP2D Kabupaten Boyolali dalam kondisi baik dan terawat.

2. Program Kepegawaian Daerah

Indikator dan capaian dari masing-masing kegiatan yang mendukung Program Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut.

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah pemenuhan ASN yang sesuai standar. Pada tahun 2022 capaian kinerja sebesar 100%, dari target kinerja sebesar 100%, yang artinya dapat memenuhi target, Dimana kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan

b. Mutasi dan Promosi

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah Jabatan yang terisi. Pada tahun 2022 capaian kinerja dapat melebihi target yaitu sebesar 100%. Capaian kinerja tersebut didukung dari terlaksananya proses penyederhanaan birokrasi dengan pengangkatan beberapa jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu, serta penataan ASN melalui pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka.

c. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Indikator dari kegiatan ini adalah Hasil evaluasi penilaian Kinerja aparatur. Pada tahun 2022 capaian kinerja sebesar 100%. Faktor pendukung dari ketercapaian target kinerja antara lain adanya sentralisasi presensi melalui pengembangan aplikasi e-Presensi sehingga tingkat kehadiran ASN bisa terpantau setiap saat oleh pembina kepegawaian.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Indikator dan capaian dari masing-masing kegiatan yang mendukung Program Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut.

a. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (LPPD), Jumlah ASN yang berpendidikan tinggi (LPPD), dan Jumlah OPD yang terpenuhi kebutuhan diklatnya (LPPD). Capaian kinerja kegiatan ini pada tahun 2022 sesuai dengan target yaitu sebesar 100%. Ketercapaian kinerja didukung oleh kesesuaian jenis pengiriman diklat dengan kompetensi yang dimiliki pegawai, kerjasama dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga terakreditasi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan juga adanya kerjasama dengan instansi pembina dalam penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa hampir keseluruhan target Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali pada tahun 2022 dapat tercapai. Berikut terlampir rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pencapaian Rencana strategis Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana berikut dalam tabel T-C.29.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota Boyolali

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali

Kode						Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5						**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Indeks penyelenggaraan Pemerintahan daerah**	**903**	**763**	**800**	**763**	**0,95**	**823**	**2.349**	**2,60**
5	03					**Kepegawaian**	**Indeks Profesionalitas Pegawai(Permenpan 26/2020)**	**83**	**78**	**79**	**63**	**0,80**	**80**	**221**	**2,66**
5	**03**	**02**				**Program Kepegawaian Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Pegawai di Setiap Jabatan**	**98,02**	**90,84**	**94,06**	**94**	**0,99**	**95,05**	**279**	**2,85**
						Kegiatan									

5	**03**	**02**	**2**	**01**		**Pengadaan, Pemberhentian,dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah Pemenuhan ASN yang Sesuai Standart**	**11.023**		**10.373**	**11.045**	**1,06**	**10.689**	**21734**	**1,97**
						Sub Kegiatan									
5	03	02	2	01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi kebutuhan ASN	445		1.190	1190	1,00	822	2.012	4,52
5	03	02	2	01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CASn yang lolos seleksi	445		1.190	1190	1,00	822	2012	4,52
5	03	02	2	01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase SK Pensiun yang Diterbitkan	400		530	497	0,94	506	1003	2,51
5	03	02	2	01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN yang memperoleh Pembekalan Pensiun	400		530	550	1,04	506	1056	2,64
5	03	02	2	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen dan arsip kepegawaian yang Tersusun	10.421		9.771	7618	0,78	10.987	18605	1,79
						Kegiatan									
5	**03**	**02**	**2**	**02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah Jabatan yang Terisi**	**791**		**759**	**1.089**	**1,43**	**767**	**1856**	**2,35**
						Sub Kegiatan									
5	03	02	2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Kegiatan Pengisian Jabatan Struktural, Fungsional,dan Staff	12		12	12	1,00	12	24	2,00
5	03	02	2	02	02	Pengelolaan kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK KP yang Terbit	1.400		1.000	1.000	1,00	1.100	2100	1,50

5	03	02	2	02	02	Pengelolaan kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang Lulus Ujian Dinas	90		50	50	1,00	60	110	1,22
5	03	02	2	02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang Lulus Uji Potensi dan Uji Kompetensi	12		12	12	1,00	12	24	2,00
5	03	02	2	02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Kegiatan Pelantikan	21		15	15	1,00	16	31	1,48
5	**03**	**02**				**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Pegawai yang Memenuhi Target SKP**	**99,80**	**99**	**99,40**	**99,40**	**1,00**	**99,50**	**297,9**	**2,98**
						Kegiatan									
5	**03**	**02**	**2**	**04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah ASN yang Menyusun SKP sesuai Standart**	**11.001**		**10.311**	**97**	**0,01**	**10.636**	**10.733**	**0,98**
						Sub Kegiatan									
5	03	02	2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang memperoleh Sosialisasi Kepegawaian	100		100	100	1,00	100	200	2,00
5	03	02	2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang memperoleh workshop kepegawaian	100		100	0	0,00	100	100	1,00
5	**03**	**02**				**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Penurunan pelanggaran Displin ASN**	**0,06**	**0,17**	**0,14**	**0,27**	**1,93**	**0,12**	**0,56**	**9,33**
						Kegiatan									
5	**03**	**02**	**2**	**04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah Pegawai Yang dijatuhi hukuman Disiplin**								
						Sub Kegiatan									

5	03	02	2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang memperoleh Sosialisai dan workshop disiplin Pegawai	200		200	200	1,00	200	400	2,00
5	03	02	2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Memperoleh Pembinaan Disiplin	55		40	19	0,48	45	64	1,16
5	03	02	2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang terlayani administrasinya	5.512		5.187	5187	1,00	4.345	9532	1,73
5	03	02	2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Pemeliharaan mesin absensi untuk disiplin pegawai	174		120	613	5,11	132	745	4,28
5	03	02	2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang menerima tanda jasa satya lencana karya satya	90		50	44	0,88	60	104	1,16
5	**04**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi**	**80**	**53,79**	**60**	**60**	**1,00**	**65**	**178,79**	**2,23**
						Kegiatan									
5	**04**	**02**	2	**02**		**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (LPPD)**	**44**		**32**	**32**	**1,00**	**35**	**67**	**1,52**
						Sub Kegiatan									
5	04	02	2	02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang lulus sertifikasi kompetensi	32		165	165	1,00	32	197	6,16

5	04	02	2	02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan diklat sertifikasi kompetensi	400		400	400	1,00	400	800	2,00
5	**04**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Rasio pegawai pendidikan tinggi**	**60,36**	**60,29**	**60,30**	**60,30**	**1,00**	**60,31**	**180,9**	**3,00**
						Kegiatan									
5	**04**	**02**	**2**	**02**		**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manjerial dan Fungsional**	**Jumlah ASN yang berpendidikan tinggi (LPPD)**	**127**		**60,30**	**60,30**	**1,00**	**100**	**160,3**	**1,26**
						Sub Kegiatan									
5	04	02	2	02	08	Pembinaan,Pengoordinasian,Fasilitasi,Pemantauan,Evaluasi,dan Pelaporan,Pelaksanaan Sertifikasi,Pengelolaan,Kelembagaan,dan Tenaga Pengembang Kompetensi,Pengelolaan Sumber Belajar,dan Kerjasama Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daera, Jabatan Pimpinan Tinggi,Kepemimpinan,dan Prajabatan	Jumlah ASN yang lulus ijin belajar dan tugas belajar	90		50	50	1,00	60	110	1,22
5	**04**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase OPD yang terpenuhi kebutuhan diklat**	**84,85**	**78,79**	**78,79**	**78,79**	**1,00**	**78,79**	**236,37**	**2,79**
						Kegiatan									
5	**04**	**02**	**2**	**02**		**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manjerial dan Fungsional**	**Jumlah OPD yang terpenuhi kebutuhan diklatnya (LPPD)**	**84,85**		**78,79**	**78,79**	**1,00**		**78,79**	**0,93**
						Sub Kegiatan								0	
5	04	02	2	02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi,Pengelolaan Kelembagaan,Tenaga Pengembang Kompetensi,Sumber Belajar,Kerjasama, Pengembang Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,serta Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen AKD	5	1	1	1	1,00	1	3	0,60

5	04	02	2	02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi,Pengelolaan Kelembagaan,Tenaga Pengembang Kompetensi,Sumber Belajar,Kerjasama, Pengembang Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,serta Jabatan Fungsional	Jumlah OPD yang mengusulkan diklat	53	53	53	53	1,00	53	159	3,00
						Kegiatan								0	
5	**04**	**02**	**2**	**02**		**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manjerial dan Fungsional**	**Jumlah CASN dan ASN yang lulus diklat sesuai standar**			**815**	**819**	**1,00**		**819**	
						Sub Kegiatan								0	
5	04	02	2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional, Kepemimpinan,dan Prajabatan	Jumlah CASN yang lulus diklat prajabatan Gol II, III,	0		265	265	1,00	0	265	0,00
5	04	02	2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional, Kepemimpinan,dan Prajabatan	Jumlah ASN yang lulus diklat Pim II, III dan IV,	14		10	14	1,40	11	25	1,79
5	04	02	2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional, Kepemimpinan,dan Prajabatan	Jumlah ASN yang lulus diklat teknis dan fungsional	40		500	500	1,00	30	530	13,25
5	04	02	2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional, Kepemimpinan,dan Prajabatan	Jumlah ASN yang lulus diklat	40		40	40	1,00	40	80	2,00
5	04	02	2	02	08	Pembinaan,Pengoordinasian,Fasilitasi,Pemantauan,Evaluasi,dan Pelaporan,Pelaksanaan Sertifikasi,Pengelolaan,Kelembagaan,dan Tenaga Pengembang	Jumlah dokumen evaluasi alumni diklat	5		1	1	1,00	1	2	0,40
5						**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai SAKIP BKP2D**	**85,51**	**83,71**	**84,01**	**83,71**	**84,20**	**84,31**	**251,73**	**2,94**
5	**03**	**01**				**PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standart**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,00**	**100**	**300**	**3,00**
						Kegiatan									

5	**03**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketercapaian Fungsi LayananAdministrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,00**	**100**	**300**	**3,00**
						Sub Kegiatan									
5	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	70	14	14	14	1,00	14	42	0,60
5	03	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji Tenaga PTT dan Tenaga Kontrak yang Terbayar	70	12	12	12	1,00	14	38	0,54
5	03	01	2	02	03	Pelaksanaaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	60	12	12	12	1,00	12	36	0,60
5	03	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	60	12	12	12	1,00	12	36	0,60
5	03	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	90,00	18,00	18,00	18	1,00	18,00	54	100,00
5	03	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10	2,00	2,00	2	1,00	2	6	100,00
						Kegiatan								0	
5	**03**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketercapaian Fungsi Layanan Kepegawaian Perkantoran Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**55,89**	**0,56**	**100**	**255,89**	**2,56**

						Sub Kegiatan								
5	03	01	2	05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah PNS yang Mendapatkan Pembekalan Pensiun	2305		530	497	0,94	506	1003	0,44
5	03	01	2	05	09	pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah CPNS yang Lulus Diklat Prajabatan	2534		109	45	0,41	822	867	0,34
						Kegiatan								0	
5	**03**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketercapaian fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,00**	**100**	**300**	**3,00**
						Sub Kegiatan									
5	03	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik Yang Tersedia	275		255	255	1,00	260	515	1,87
5	03	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia	387		358	358	1,00	365	723	1,87
5	03	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Bahan Bakar Minyak Yang Tersedia	8.413		7.527	7.527	1,00	7678	15205	1,81
5	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan/Fotocopy yang Tersedia	338.566		312.783	312.783	1,00	319.039	631822	1,87
5	03	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan Koran yang terbayar	60	12	12	12	1,00	12	36	0,60

5	03	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kamtor yang tersedia	60	12	12	12	1,00	12	36	0,60
5	03	01	2	06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Untuk Pegawai dan Tamu yang Tersedia	60	12	12	12	1,00	12	36	0,60
5	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulltasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Yang Terbiayai	60	12	12	12	1,00	12	36	0,60
						Kegiatan									
5	**03**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Ketercapaian fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**1,44**	**0,01**	**100**	**201,44**	**2,01**
						Sub Kegiatan									
5	03	01	2	07	06	Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer,Printer dan Mesin Lainnya	9		9	13	1,44	9,0	22,0	2,44
						Kegiatan									
5	**03**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Ketercapaian fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,00**	**100**	**300**	**3,00**
						Sub Kegiatan									
5	03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko yang Tersedia dan Pengiriman Paket yang terbiayai	60	12	12	12	1,00	12	36	0,60

5	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Langganan Telepon,Listrik,Air dan Internet yang Terbiayai	60	12	12	12	1,00	12	36	0,60
						Kegiatan									
5	**03**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Ketercapaian fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,00**	**100**	**300**	**3,00**
						Sub Kegiatan									
5	03	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajka dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Pajak dan Service Kendaraan Dinas Yang Terbayar	60	12	12	12	1,00	12	36	0,60
5	03	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Service Komputer dan Printer yang Tersedia	60	12	12	12	1,00	12	36	0,60
5	03	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung/bangunan kantor yang terbiayai	60	12	12	12	1,00	12	36	0,60
						Kegiatan									
5	**03**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dibuat**	**125**	**17**	**25**	**25**	**1,00**	**25**	**67**	**0,54**
						Sub Kegiatan									
5	03	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	10	2	2	2	1,00	2	6	0,60

5	03	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	5	1	1	1	1,00	1	3	0,60
5	03	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	5	1	1	1	1,00	1	3	0,60
5	03	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	5	1	1	1	1,00	1	3	0,60
5	03	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	5	1	1	1	1,00	1	3	0,60
5	03	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerka SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Telah di susun	75	15	15	7	0,47	15	37	0,49
5	03	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	4	4	4	1,00	4	12	0,60

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan telah sesuai dan adanya dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi di waktu yang akan datang.

Dalam rangka menganalisis kinerja pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah digunakan beberapa indikator,berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta berdasar pada Permenpan No 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan sasaran target sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.Berdasarkan rumusan tersebut, capaian indikator kinerja pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut.

a.) Indikator Indeks Profesionalitas Pegawai

Indeks Profesionalitas Pegawai merupakan indikator Sasaran pertama dari BKP2D Kabupaten Boyolali, yaitu Meningkatkan Integritas dan kapasitas Pemerintah Daerah. Indeks Profesionalitas Pegawai merupakan ukuran statistic yang menggambarkan kualitas pegawai yang bersadarkan kualifikasi pendiidkan,

kompetensi, kinerja,dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang professional Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan public, pelayan public, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standart profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi tingkat kerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi Capaian indikator kinerja ini pada akhir tahun 2022 telah mencapai nilai 47 atau kategori Rendah, hasil penilaian yang diperoleh lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan, yaitu 79. Hal tersebut diakibatkan karena database kepegawaian yang ada di BKP2D Kabupaten Boyolali belum dapat tersinkronisasi dengan aplikasi dari BKN yaitu My-SAPK yang dijadikan acuan penilaian Indeks Profesionalitas Pegawai, sehingga penilaian yang dilakukan menggunakan data yang ada di aplikasi My- SAPK yang belum terupdate.

b.) Nilai SAKIP Perangkat Daerah

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, untuk Tahun 2022 target nilai SAKIP adalah sebesar 84,10 dari target tersebut BKP2D Kabupaten Boyolali mendapatkan capaian nilai SAKIP sebesar 84,20 atau 0,10 lebih tinggi dari nilai yang ditargetkan, keberhasilan BKP2D Kabupaten dalam melampaui target nilai SAKIP tahun 2022 dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Strategis dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan
2. Penyusunan Target dalam Perjanjian Kinerja secara teliti dan terukur
3. Pengelolaan Data Kinerja yang baik sesuia kaidah-kaidah yang telah ditentukan

Adapun hasil pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel T-C.30 sebagai berikut.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota Boyolali

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra BKP2D				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			800,00	**823**	**833,00**	**893,00**	**763**	**0**	**833,00**	**893,00**	
	Indeks Profesionalitas Pegawai (Permenpan 26/2020)			79 (Sedang)	**80 (Baik)**	**81 (Baik)**	**82 (Baik)**	**63 (Rendah)**	**0**	**81 (Baik)**	**82 (Baik)**	
	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai di setiap jabatan			94,06	**95,05**	**96,04**	**97,03**	**93,56**	**0**	**96,04**	**97,03**	
	Jumlah pemenuhan ASN yang sesuai standar			**10.373 ASN**	**10.689 ASN**	**10.934 ASN**	**10.978 ASN**	**11.045 ASN**	**ASN**	**10.934 ASN**	**10.978 ASN**	

	Jumlah formasi kebutuhan ASN			1.190 ASN	822 ASN	702 ASN	456 ASN	1.190 ASN	125 ASN	702 ASN	456 ASN	
	Jumlah CASN yang lolos seleksi			1.190 ASN	822 ASN	702 ASN	456 ASN	1.190 ASN	0	702 ASN	456 ASN	
	Persentase SK pensiun yang diterbitkan			530 ASN	506 ASN	457 ASN	412 ASN	497 ASN	280 ASN	457 ASN	412 ASN	
	Jumlah ASN yang memperoleh pembekalan pensiun			530 ASN	506 ASN	457 ASN	412 ASN	550 ASN	200 ASN	457 ASN	412 ASN	
	Jumlah dokumen dan arsip kepegawaian yang tersusun			9.771 ASN	10.987 ASN	10.332 ASN	10.376 ASN	7.618 ASN	8.522 ASN	10.332 ASN	10.376 ASN	
	Jumlah Jabatan yang terisi (amj)			**759 ASN**	**767 ASN**	**775 ASN**	**783 ASN**	**1.089 ASN**	**771 ASN**	**775 ASN**	**783 ASN**	
	Jumlah Kegiatan pengisian Jabatan Struktural, fungsional dan staf			12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	6 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	
	Jumlah SK KP yang terbit			1.000 ASN	1.100 ASN	1.200 ASN	1.300 ASN	1.000 ASN	325 ASN	1.200 ASN	1.300 ASN	

	Jumlah ASN yang lulus ujian dinas			50 ASN	60 ASN	70 ASN	80 ASN	50 ASN	0	70 ASN	80 ASN	
	Jumlah kegiatan pelantikan			12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	2 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	
	Jumlah ASN yang Lulus Uji potensi dan Uji Kompetensi			15 ASN	16 ASN	18 ASN	19 ASN	15 ASN	13 ASN	18 ASN	19 ASN	
	Persentase pegawai yang memenuhi target SKP			99,40	**99,50**	**99,60**	**99,70**	**99,4**	**0**	**99,60**	**99,70**	
	Jumlah ASN yang menyusun SKP sesuai standar			10.311 ASN	**10.636 ASN**	**10.890 ASN**	**10.945 ASN**	**97 ASN**	**ASN**	**10.890 ASN**	**10.945 ASN**	
	Jumlah ASN yang memperoleh sosialisasi kepegawaian			100 ASN	100 ASN	100 ASN	100 ASN	100 ASN	743 ASN	100 ASN	100 ASN	
	Jumlah ASN yang memperoleh workshop kepegawaian			100 ASN	100 ASN	100 ASN	100 ASN	ASN	0	100 ASN	100 ASN	
	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai			**0,14**	**0,12**	**0,10**	**0,08**	**0,27**	**0,00**	**0,10**	**0,08**	

	Jumlah Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin (AMJ)											
	Jumlah ASN yang memperoleh sosialisasi dan workshop disiplin pegawai			200 ASN	200 ASN	200 ASN	200 ASN	200 ASN	743 ASN	200 ASN	200 ASN	
	Jumlah ASN yang memperoleh pembinaan disiplin			40 ASN	45 ASN	50 ASN	50 ASN	19 ASN	9 ASN	50 ASN	50 ASN	
	Jumlah ASN yang terlayani administrasinya			5.187 ASN	4.345 ASN	5.467 ASN	5.499 ASN	5.187 ASN	2.923 ASN	5.467 ASN	5.499 ASN	
	Jumlah pemeliharaan mesin absensi untuk disiplin pegawai			120 buah	132 buah	145 buah	159 buah	613 buah	20 buah	145 buah	159 buah	
	Jumlah ASN yang menerima tanda jasa satya lencana karya satya			50 ASN	60 ASN	70 ASN	80 ASN	44 ASN	0	70 ASN	80 ASN	
	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi			**60,00**	**65,00**	**70,00**	**75,00**	**60,00**	**-**	**70,00**	**75,00**	

	Jumlah jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (LPPD)			**32 ASN**	**35 ASN**	**39 ASN**	**41 ASN**	**32 ASN**	**ASN**	**39 ASN**	**41 ASN**	
	Jumlah ASN yang lulus sertifikasi kompetensi			32 ASN	32 ASN	32 ASN	32 ASN	165 ASN	487 ASN	32 ASN	32 ASN	
	Jumlah Usulan diklat sertifikasi kompetensi			400 usulan	400 usulan	400 usulan	400 usulan	400 usulan	487 usulan	400 usulan	400 usulan	
	Rasio pegawai pendidikan tinggi			**60,30**	**60,31**	**60,34**	**60,36**	**60,30**	**0**	**60,34**	**60,36**	
	Jumlah ASN yang berpendidikan tinggi (LPPD)			**90 ASN**	**100 ASN**	**110 ASN**	**118 ASN**	**50 ASN**	**0**	**110**	**118**	
	Jumlah ASN yang lulus ijin belajar dan tugas belajar			50 ASN	60 ASN	70 ASN	80 ASN	50 ASN	31 ASN	70 ASN	80 ASN	
	Persentase OPD yang terpenuhi kebutuhan diklat			**78,79**	**78,79**	**81,82**	**84,85**	**78,79**	**100,00**	**81,82**	**84,85**	

	Jumlah OPD yang terpenuhi kebutuhan diklatnya (LPPD)			**78,79**				**78,79**				
	Jumlah dokumen AKD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah OPD yang mengusulkan diklat			53 OPD	53 OPD	53 OPD	53 OPD	53 OPD	53 OPD	53 OPD	53 OPD	
	Jumlah CASN dan ASN yang lulus diklat sesuai standar											
	Jumlah CASN yang lulus diklat prajabatan Gol II, III,			109 ASN	ASN	ASN	ASN	265 ASN	6 ASN	ASN	ASN	
	Jumlah ASN yang lulus diklat Pim II, III dan IV,			10 ASN	11 ASN	12 ASN	13 ASN	14 ASN	14 ASN	12 ASN	13 ASN	
	Jumlah ASN yang lulus diklat teknis dan fungsional			25 ASN	30 ASN	30 ASN	35 ASN	500 ASN	448 ASN	30 ASN	35 ASN	
	Jumlah ASN yang lulus diklat			40 ASN	40 ASN	40 ASN	40 ASN	40 ASN	462 ASN	40 ASN	40 ASN	

	Jumlah dokumen evaluasi alumni diklat			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Nilai Sakip BKP2D			**84,01**	**84,31**	**84,61**	**84,91**	**84,91**	**0**	**84,61**	**84,91**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar			**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	
	Prosentase Ketercapaian Funmgsi Layanan Admimistrasi Perkantoran Perangkat Dearah (AMJ)			**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
	gaji dan tunjangan ASN			14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	7 bulan	14 Bulan	14 Bulan	
	Jumlah Gaji Tenaga PTT dan Tenaga Kontrak yang terbayar			14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	6 bulan	14 Bulan	14 Bulan	
	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	

	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1.800 bulan	18 bulan	18 bulan	18 bulan	18 bulan	9 bulan	18 bulan	18 bulan	
	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan			200 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	1 bulan	2 bulan	2 bulan	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar			**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	
	Prosentase ketercapaian fungsi layanan Kepegawaian Perkantoran Perangkat Daerah (AMJ)			**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**55,89**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	
	Jumlah PNS yang mendapat pembekalan pensiun			530 ASN	506 ASN	457 ASN	412 ASN	497 ASN	0	457 ASN	412 ASN	
	Jumlah CPNS yang lulus diklat prajabatan			109 ASN	822 ASN	702 ASN	456 ASN	45 ASN	0	702 ASN	456 ASN	
	Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah (AMJ)			**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	

	Jumlah Alat listrik yang tersedia			255 buah	260 buah	265 buah	270 buah	255 buah	135 buah	265 buah	270 buah	
	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia			358 buah	365 buah	372 buah	380 buah	358 buah	190 buah	372 buah	380 buah	
	Jumlah Bahan Bakar Minyak yang tersedia			7.527 Liter	7.678 Liter	7.831 Liter	7.799 Liter	7.527 Liter	3.900 Liter	7.831 Liter	7.799 Liter	
	Jumlah penggandaan/ fotocopy yang tesedia			312.783 Lembar	319.039 Lembar	325.419 Lembar	331.928 Lembar	312.783 Lembar	165.964 Lembar	325.419 Lembar	331.928 Lembar	
	Jumlah Langganan koran yang terbayar			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah Makan dan Minum untuk pegawai dan tamu yang tersedia			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah Perjalanan Dinas yang terbiayai			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	

	Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah (AMJ)			**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1,44**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	
	Jumlah Komputer, printer dan perangkat kamera yang terbiayai			9 paket	9 paket	9 paket	9 paket	13 Paket	0 Paket	9 paket	9 paket	
	Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah (AMJ)			**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	
	Jumlah perangko yang tersedia dan pengiriman paket yang terbiayai			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah langganan Telepon, Listrik, Air, dan Internet yang terbayar			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah (AMJ)			**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	

	Jumlah Pajak dan kendaraan dinas yang terbayar& pemeliharaan kendaraan dinas yang terlayani			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah Service Komputer dan Printer yang tersedia			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung/bangunan kantor yang terbiayai			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat			**25 Dokumen**	**25 Dokumen**	**25 Dokumen**	**25 Dokumen**	**25 Dokumen**	**12 Dokumen**	**25 Dokumen**	**25 Dokumen**	
	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun			15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	9 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	
	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan, dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang.

Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Ketercapaian pelayanan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor,diantaranya:

a.) Faktor Internal

Kekuatan (Strength)

(1) Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang kompeten;

(2) Tersedianya sarana prasarana yang terkait dengan pengembangan database untuk mendukung kualitas informasi dan layanan data kepegawaian.

(3) Meningkatnya efektifitas aplikasi SIMPEG dalam menunjang manajemen kepegawaian sehingga meningkatkan ketersediaan data dan informasi terkait kepegawaian.

(4) Tersedianya aplikasi absensi elektronik yang dapat memantau tingkat kedisiplinan pegawai secara real time.

(5) Tersedianya kebijakan internal terkait reward atau penghargaan pegawai, yang berfungsi selain sebagai motivasi juga sebagai sarana dalam mengubah budaya kerja.

(6) Adanya komitmen semua pihak untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan terutama terkait dengan pelayanan manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja dan merit system.

(7) Adanya pengawasan intern (audit internal kepegawaian) oleh pimpinan secara rutinitas dalam pelaksanaan pelayanan manajemen kepegawaian.

(8) Ketersediaan Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) dan Penilaian Kinerja sebagai tools dalam penilaian kinerja pejabat JPT, administrator dan pengawas.

Kelemahan (Weakness)

(1) Belum terintegrasinya sistem database kepegawaian antara database Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali dengan database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

(2) Belum optimalnya penempatan alumni diklat sesuai dengan kompetensinya.

(3) Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SIMPEG sebagai penunjang manajemen kepegawaian.

(4) Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap kompetensi masing-masing individu pegawai.

(5) Terbatasnya kesempatan peningkatan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis.

(6) Terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat.

b.) Faktor Eksternal

Peluang (Opportunity)

(1) Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

(2) Perubahan mental/ perilaku aparatur yang diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

(3) Perkembangan teknologi dan informatika membuka peluang bagi organisasi dalam mengembangkan sistem informasi guna mewujudkan adanya integrasi data. Selain hal tersebut, juga dapat mengembangkan inovasi pelayanan berbasis TIK.

(4) Banyaknya kerjasama dengan pihak ketiga terkait pelayanan di BKP2D Kabupaten Boyolali. Hal ini diindikasikan melalui adanya pola kemitraan dalam penyelenggaraan diklat. Selain itu,adanya penawaran dalam pengiriman peserta diklat maupun fasilitasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Kompetensi pegawai,seperti aplikasi SI BOLERN yang membantu dalam pelaksanaan diklat secara online.

Ancaman (Threath)

(1) Optimalisasi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN pada BKP2D Kabupaten Boyolali masih terdapat beberapa hal yang belum dilaksanakan diantaranya menyusun kebijakan terkait pola karier, membangun talent pool, melakukan analisis kesenjangan kinerja, menyusun program pengembangan karir melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai, program coaching, counseling dan mentoring, pelaksanaan penilaian kinerja yang obyektif dan terukur secara berkala, serta pembangunan assessment center.

(2) Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi Salah satu tantangan ke depan yaitu penempatan Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi mengacu pada minimnya program peningkatan kompetensi ASN.

(3) Peningkatan pengelolaan database kepegawaian yang terintegrasi, Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang treintegrasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya dibidang kepegawaian.

(4) Tingkat profesionalitas ASN Sebagai salah satu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu mewujudkan ASN yang profesional. Keterbatasan anggaran maupun akses dalam memperoleh pengembangan kompetensi melalui pengiriman serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, terutama, menyebabkan nilai indeks profesionalitas ASN dalam aspek pengembangan kompetensi masih rendah.

(5) Peran sosial media sebagai kontrol eksternal masyarakat secara langsung terhadap tuntutan perbaikan kinerja, pelayanan publik serta pemerintah yang baik dan bersih.

Salah satu isu strategis Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 yaitu Reformasi birokrasi yang akuntabel dan agile. Merujuk pada hal tersebut Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai isu strategis yang dihadapi pada Tahun 2021-2026 guna mendukung isu strategis daerah tersebut, yaitu:

1. Tata kelola Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur.

   Manajemen ASN bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi

politik serta bersih dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, pengelolaan manajemen ASN haruslah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.Tata kelola manajemen sumber daya manusia aparatur terdiri dari 18 elemen, dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, pengadaan, pola karier, pengembangan,kompetensi, manajemen kinerja, penghargaan hingga pensiun dan perlindungan bagi ASN. Hal ini juga untuk mendukung terwujudnya sistem merit dalammanajemenASN.

2. Profesionalitas ASN.

Kualitas Pelayanan kepada masyarakat sangatlah ditunjang adanya ASN yang profesional, berorientasi pelayanan, bermartabat dan berintegritas tinggi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat profesionalitas ASN, antara lain tingkat kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin.Pengembangan kompetensi menjadi faktor paling rendah, dikarenakan ada kebijakan refocusing anggaran dan perubahan pola pembelajaran dari classical menjadi daring dan atau blended learning. Sehingga diperlukan inovasi dan upaya dalam peningkatan profesionalitas ASN, khususnya pengembangan kompetensi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan capaian kinerja serta arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah.Reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indicator kinerja program/ kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/ kegiatan untuk Perangkat

Daerah yang bersangkutan. Berdasarkan rancangan awal RKPD tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan pada Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan memperhatikan prioritas program/ kegiatan dan kemampuan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya tertuang dalam RKPD 2024. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada indikator sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.Pembandingan antara rancangan awal RKPD tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dimaksudkan untuk penyesuaian anggaran pada program/ kegiatan dengan memperhatikan prioritas program/ kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan RKPD tahun 2024. Reviu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 disajikan dalam tabel T-C.31. berikut ini :

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**BKP2D Boyolali**	**Pemenuhan Kebutuhan Pegawai di Setiap Jabatan**	**96,04**	**2.112.456.000**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**BKP2D Boyolali**	**Pemenuhan Kebutuhan Pegawai di Setiap Jabatan**	**96,04**	**2.112.456.000**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
A	**Pengadaan, Pemberhentian,dan Informasi Kepegawaian ASN**	**BKP2D Boyolali**	**Jumlah Pemenuhan ASN yang Sesuai Standart**	**10 Dokumen**	**1.273.195.000,00**	**Pengadaan, Pemberhentian,dan Informasi Kepegawaian ASN**	**BKP2D Boyolali**	**Jumlah Pemenuhan ASN yang Sesuai Standart**	**10 Dokumen**	**1.273.195.000,00**	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	28.376.000,00	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	28.376.000,00	
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen	957.547.000,00	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen	957.547.000,00	

3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	3 Dokumen	232.803.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	3 Dokumen	232.803.000,00	
4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	54.469.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	54.469.000,00	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
B	**Mutasi dan Promosi ASN**	**BKP2D Boyolali**	**Jumlah Jabatan yang Terisi**	**21 Dokumen**	**839.261.000,00**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**BKP2D Boyolali**	**Jumlah Jabatan yang Terisi**	**21 Dokumen**	**839.261.000,00**	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
6	Pengelolaan Mutasi ASN	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5 Dokumen	298.082.000,00	Pengelolaan Mutasi ASN	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5 Dokumen	298.082.000,00	
7	Pengelolaan kenaikan Pangkat ASN	BKP2D Boyolali	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Dokumen	39.787.000,00	Pengelolaan kenaikan Pangkat ASN	BKP2D Boyolali	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Dokumen	39.787.000,00	
8	Pengelolaan Promosi ASN	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PromosiASN	12 Dokumen	501.392.000,00	Pengelolaan Promosi ASN	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PromosiASN	12 Dokumen	501.392.000,00	
II	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**BKP2D Boyolali**	**Persentase Pegawai yang Memenuhi Target SKP**	**99,60**	**13.361.000**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**BKP2D Boyolali**	**Persentase Pegawai yang Memenuhi Target SKP**	**99,60**	**13.361.000**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
C	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**BKP2D Boyolali**	**Hasil evaluasi penilaian Kinerja aparatur**	**6.018 Laporan**	**13.361.000**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**BKP2D Boyolali**	**Hasil evaluasi penilaian Kinerja aparatur**	**6.018 Laporan**	**13.361.000**	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					

9	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6.018 Laporan	13.361.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6.018 Laporan	13.361.000	
III	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**BKP2D Boyolali**	**Persentase Penurunan pelanggaran Displin ASN**	**0,14**	**172.504.000**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**BKP2D Boyolali**	**Persentase Penurunan pelanggaran Displin ASN**	**0,14**	**172.504.000**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
D	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**BKP2D Boyolali**	**Hasil evaluasi penilaian Kinerja aparatur**		**172.504.000**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**BKP2D Boyolali**	**Hasil evaluasi penilaian Kinerja aparatur**		**172.504.000**	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
10	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	-	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	-	
11	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKP2D Boyolali	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	70 Orang	330.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKP2D Boyolali	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	70 Orang	330.000	
12	Pembinaan Disiplin ASN	BKP2D Boyolali	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	200 Orang	24.734.000	Pembinaan Disiplin ASN	BKP2D Boyolali	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	200 Orang	24.734.000	
13	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	99.440.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	99.440.000	
14	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	30 Dokumen	-	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	30 Dokumen	-	
15	Evaluasi Disiplin ASN	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	12 Laporan	48.000.000	Evaluasi Disiplin ASN	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	12 Laporan	48.000.000	

IV	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**BKP2D Boyolali**	**Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi**	**70**	**162.103.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**BKP2D Boyolali**	**Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi**	**70**	**162.103.000**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
E	**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**BKP2D Boyolali**	**Jumlah Jabatan Fungsional yang Bersertifikat Kompetensi (LPPD)**	**400 Orang**	**162.103.000,00**	**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**BKP2D Boyolali**	**Jumlah Jabatan Fungsional yang Bersertifikat Kompetensi (LPPD)**	**400 Orang**	**162.103.000,00**	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
16	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKP2D Boyolali	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	400 Orang	162.103.000	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKP2D Boyolali	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	400 Orang	162.103.000	
V	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**BKP2D Boyolali**	**Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi**	**60,34**	**13.871.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**BKP2D Boyolali**	**Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi**	**60,34**	**13.871.000,00**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
F	**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manjerial dan Fungsional**	**BKP2D Boyolali**	**Jumlah ASN yang berpendidikan tinggi (LPPD)**	**60**	**13.871.000,00**	**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manjerial dan Fungsional**	**BKP2D Boyolali**	**Jumlah ASN yang berpendidikan tinggi (LPPD)**	**60**	**13.871.000,00**	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					

17	Pembinaan,Pengoordinasian,Fasilitasi,Pemantauan,Evaluasi,dan Pelaporan,Pelaksanaan Sertifikasi,Pengelolaan,Kelembagaan,dan Tenaga Pengembang Kompetensi,Pengelolaan Sumber Belajar,dan Kerjasama Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daera, Jabatan Pimpinan Tinggi,Kepemimpinan,dan Prajabatan	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	60 Dokumen	13.871.000	Pembinaan,Pengoordinasian,Fasilitasi,Pemantauan,Evaluasi,dan Pelaporan,Pelaksanaan Sertifikasi,Pengelolaan, Kelembagaan,dan Tenaga Pengembang Kompetensi,Pengelolaan Sumber Belajar,dan Kerjasama Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daera, Jabatan Pimpinan Tinggi,Kepemimpinan,dan Prajabatan	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	60 Dokumen	13.871.000	
VI	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**BKP2D Boyolali**	**Persentase OPD yang terpenuhi kebutuhan Diklat**	**81,82**	**997.856.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**BKP2D Boyolali**	**Persentase OPD yang terpenuhi kebutuhan Diklat**	**81,82**	**997.856.000**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
G	**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manjerial dan Fungsional**	**BKP2D Boyolali**	**Jumlah OPD yang terpenuhi kebutuhan Diklatnya (LPPD)**		**8.747.000**	**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manjerial dan Fungsional**	**BKP2D Boyolali**	**Jumlah OPD yang terpenuhi kebutuhan Diklatnya (LPPD)**		**8.747.000**	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					

18	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi,Pengelolaan Kelembagaan,Tenaga Pengembang Kompetensi,Sumber Belajar,Kerjasama, Pengembang Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,serta Jabatan Fungsional	BKP2D Boyolali	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	8.747.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi,Pengelolaan Kelembagaan,Tenaga Pengembang Kompetensi,Sumber Belajar,Kerjasama, Pengembang Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,serta Jabatan Fungsional	BKP2D Boyolali	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	8.747.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
H	**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manjerial dan Fungsional**	**BKP2D Boyolali**	**Jumlah CASN dan ASN yang Lulus Diklat Sesuai standart**		**989.109.000**	**Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manjerial dan Fungsional**	**BKP2D Boyolali**	**Jumlah CASN dan ASN yang Lulus Diklat Sesuai standart**		**989.109.000**	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
19	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional, Kepemimpinan,dan Prajabatan	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	975.443.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional, Kepemimpinan,dan Prajabatan	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	975.443.000	

20	Pembinaan,Pengoordinasian,Fasilitasi,Pemantauan,Evaluasi,dan Pelaporan,Pelaksanaan Sertifikasi,Pengelolaan,Kelembagaan,dan Tenaga Pengembang	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	2 Dokumen	13.666.000	Pembinaan,Pengoordinasian,Fasilitasi,Pemantauan,Evaluasi,dan Pelaporan,Pelaksanaan Sertifikasi,Pengelolaan, Kelembagaan,dan Tenaga Pengembang	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	2 Dokumen	13.666.000	
VII	**PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BKP2D Boyolali**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standart**	**100,00**	**4.002.791.000,00**	**PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BKP2D Boyolali**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standart**	**100,00**	**4.002.791.000,00**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
I	**Administari Keuangan Perangkat Perangkat Daerah**	**BKP2D Boyolali**	**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**4.002.791.000**	**Administari Keuangan Perangkat Perangkat Daerah**	**BKP2D Boyolali**	**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**4.002.791.000**	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
21	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	BKP2D Boyolali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/Bulan	3.807.182.000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	BKP2D Boyolali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/Bulan	3.807.182.000	
22	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	195.300.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	195.300.000	
23	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	309.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	309.000	
24	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	

25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	
26	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	
27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
J	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**BKP2D Boyolali**	**Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**87.688.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**BKP2D Boyolali**	**Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**87.688.000,00**	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
28	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	87.688.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	87.688.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
K	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**BKP2D Boyolali**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**32 Paket**	**525.748.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**BKP2D Boyolali**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**32 Paket**	**525.748.000**	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					

29	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	BKP2D Boyolali	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	BKP2D Boyolali	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.000.000	
30	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKP2D Boyolali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKP2D Boyolali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	
38	Penyediaan peralatan rumah tangga	BKP2D Boyolali	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	BKP2D Boyolali	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.000.000	
39	Penyediaan bahan logistik kantor	BKP2D Boyolali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	BKP2D Boyolali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.000.000	
40	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKP2D Boyolali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	93.835.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKP2D Boyolali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	93.835.000	
41	Penyediaan bahan / Material	BKP2D Boyolali	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	75.000.000	Penyediaan bahan / Material	BKP2D Boyolali	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	75.000.000	
42	Fasilitasi kunjungan tamu	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	210.913.000	Fasilitasi kunjungan tamu	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	210.913.000	
43	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	100.000.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					

L	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BKP2D Boyolali**	**Prosentase Ketercapaian fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**26 Laporan**	**122.042.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BKP2D Boyolali**	**Prosentase Ketercapaian fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**26 Laporan**	**122.042.000,00**	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
44	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.700.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.700.000	
45	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	117.342.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	117.342.000	
46	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
N	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**BKP2D Boyolali**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**912 Unit**	**168.178.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**BKP2D Boyolali**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**912 Unit**	**168.178.000,00**	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
47	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajka dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	BKP2D Boyolali	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	48.178.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajka dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	BKP2D Boyolali	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	48.178.000	

48	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKP2D Boyolali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	887 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKP2D Boyolali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	887 Unit	20.000.000	
49	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKP2D Boyolali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKP2D Boyolali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
O	**Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah**	**BKP2D Boyolali**	**Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**26 Dokumen**		**Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah**	**BKP2D Boyolali**	**Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**26 Dokumen**		
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
50	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	
51	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	
52	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	
53	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	

54	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BKP2D Boyolali	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	
55	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	0	
56	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	4 Laporan	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKP2D Boyolali	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	4 Laporan	0	
	JUMLAH				8.378.598.000					8.378.598.000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 42)., mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, sehingga tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dari hasil Musrenbang Kabupaten Boyolali Tahun 2023 ,usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali pada Rencana Kerja Tahun 2024 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku kegiatan seperti kelompok masyarakat terkait.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan – kebijakan nasional telah dituangkan dalam Program Pembangunan. Sebagaimana yang tercantum dalam RPJM Nasional tahun 2020-2024, arah pembangunan ditujukan untuk lebih menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, memantapkan dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu pengarusutamaan yang menjadi katalis pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 yaitu tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui kinerja secara terpadu, penuh integritas dan akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan dan kapasitas pegawai pemerintah daerah yang memadai. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah provinsi.

Renja BKP2D Kabupaten Boyolali harus sinkron dan sinergi dengan Renja K/L atau Renja Badan Kepegawaian yang berada dilevel atasnya, seperti Renja Badan Kepegawaian Negara dan Renja BKD Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana yang tercantum dalam Renja BKN Tahun 2024, BKN mempunyai 6 (enam) agenda prioritas, diantaranya pemetaan/penilaian potensi dan kompetensi ASN. Hal ini selaras dengan visi BKN Tahun 2020-2024 yaitu Mewujudkan pengelola ASN yang profesional dan berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Hal tersebut sejalan dengan strategi Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yaitu pelaksanaan pemetaan potensi dan kompetensi, talent scouting, pengembangan kompetensi dan seleksi terbuka JPT. Strategi tersebut guna menyokong terwujudnya penyelenggaraan system merit dalam manajemen ASN dengan salah satu sasaran distribusi penempatan PNS dalam jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi guna mewujudkan ASN yang professional dan bermartabat.

Menilik hal tersebut, pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit untuk mewujudkan ASN yang memiliki integritas, professional, bebas, bersih dan berintegritas menjadi faktor yang penting. Hal tersebut sejalan dan sinergi dengan sasaran dalam

Renstra BKP2D Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026, yaitu meningkatnya profesionalitas ASN yang ditunjang dengan kualitas kualifikasi, kompetensi, kinerja dan integritas yang tinggi. Adapun yang menjadi prioritas kegiatan strategis dalam Rencana Kerja BKP2D Kabupaten Boyolali Tahun 2024 yaitu pengembangan kompetensi ASN dan pengembangan Profesionalisme ASN di Kabupaten Boyolali.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen yang penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Beberapa kebijakan program pembangunan khususnya di bidang pengelolaan kepegawaian sangat tergantung pada keputusan Pusat. Sebagai contoh terkait seleksi penerimaan CPNS/ PPPK. Sehingga pertumbuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali mengalami minus growth cukup lama dikarenakan formasi CPNS/ PPPK yang ditentukan terbatas. Hal ini dipengaruhi pula adanya ketidakseimbangan antara jumlah penerimaan pegawai dengan jumlah pegawai yang pensiun.

Oleh karena itu, upaya reformasi birokrasi yang dilangsungkan pada pemerintah daerah khususnya pada Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu didukung dengan penyusunan program dan kegiatan dalam RKPD dan Renja

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali yang diharapkan membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas kegiatan Perangkat Daerah.

.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian akan diuraikan dalam bab ini. Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2024 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Performance Plan) 2024.

Dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategi Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, diharapkan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali dapat secara tepat menentukan program kegiatan untuk mewujudkan visi dan misinya untuk kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Guna mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu **Boyolali Maju Meneruskan Pro Investasi ,Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas**

(METAL), serta pencapaian misi keempat, yaitu **Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya**, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Berikut tujuan,sasaran, indikator dan target Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali yang akan dicapai pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel T-C.32

Tujuan dan Sasaran Indikator Dan Target Kinerja

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya integritas dan kapasitas pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas Pegawai (Permenpan 26/2020)	79	80	81	82	83
		Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah	Nilai Sakip BKP2D Kabupaten Boyolali	84,01	84,31	84,61	84,91	85,21

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, perlu adanya dukungan program,kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pada Tahun 2024 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.378.598.000,- Mempunyai 3 (tiga) Program Kerja dan 10 (sepuluh) Kegiatan yang kemudian dijabarkan menjadi 46 (empat puluh enam) Sub Kegiatan sebagai berikut ;

1. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
    1.1 . Pengadaan, Pemberhentian,dan Informasi Kepegawaian ASN
        1.1.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
        1.1.2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
        1.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
        1.1.4 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
    1.2. Mutasi dan Promosi ASN
        1.2.1 Pengelolaan Mutasi ASN
        1.2.2 Pengelolaan kenaikan Pangkat ASN
        1.2.3 Pengelolaan Promosi ASN
    1.3. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
        1.3.1 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
        1.3.2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi ASN
        1.3.3 Pembinaan Disiplin ASN
        1.3.4 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
        1.3.5 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
        1.3.6 Evaluasi Disiplin Asn
2. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2.1. Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

2.1.1 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

2.1.2 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional, Kepemimpinan,dan Prajabatan

2.1.3 Pembinaan,Pengoordinasian,Fasilitasi,Pemantauan,Evaluasi danPelaporan,PelaksanaanSertifikasi,Pengelolaan,Kelembagaan, dan Tenaga Pengembang Kompetensi,Pengelolaan Sumber Belajar,dan Kerjasama Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daera, Jabatan Pimpinan Tinggi,Kepemimpinan,dan Prajabatan

2.1.4 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan,Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

3.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3.1.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3.1.3 Pelaksanaaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3.1.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

3.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3.1.5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

3.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3.2.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

3.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor

3.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3.3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3.3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3.3.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

3.3.6 Penyediaan Bahan/Material

3.3.7 Fasilitasi kunjungan Tamu

3.3.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulltasi SKPD

3.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

3.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3.5.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3.5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3.6 Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.6.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

3.6.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

3.6.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

3.6.4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

3.6.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

3.6.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.6.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dari kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan, BKP2D sendiri tidak lepas bekerjasama dengan OPD lain dalam mewujudkan target kinerjanya. BKP2D sebagai leading sector dalam penentuan jabatan bagi masing-masing individu yang bertugas dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus betul-betul *realable* dan *sustainable*. Artinya sesuai dengan kenyataan (dapat dipertanggung jawabkan) dan berkelanjutan. Selain itu, perubahan dalam pengelolaan ASN semakin dinamis dijawab dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN yang didalamnya terdapat perubahan-perubahan yang arahnya adalah menuju perubahan yang cepat dan tanggap dari para seluruh aparatur.

Selain itu, beberapa catatan yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan kegiatan BKP2D Kabupaten Boyolali tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi, Pengembangan kompetensi sangat menunjang peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Selain hal tersebut, pengembangan kompetensi menjadi unsur tertinggi dalam pengukuran indeks

Profesionalitas ASN. Seperti diketahui saat ini Indeks Profesionalitas ASN Pemkab Boyolali masih sangat rendah, yaitu 47 pada tahun 2022.

2. Kegiatan Seleksi Terbuka/Open Bidding bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Boyolali.Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.Kegiatan tersebut sejalan dengan salah satu sasaran strategis Pemkab Boyolali yaitu meritokrasi dalam manajemen ASN.

Adapun rumusan program kegiatan dan sub kegiatan yang akan mendukung pelaksanaan program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2024
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**								**7.204.768.000**		
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4.906.447.000**		
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**-**		
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Pengan	- Kab. Boyolali, Semu		2 Dokumen		0,00	Dana Transfer	

						Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar		ggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a Kecamatan, Semua Kel/Desa					Um um-Dana Alokasi Umum	
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		16 Laporan		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Laporan		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.090.510.000**		
5	03	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Administrasi Keuangan Perangk	- Kab. Boyolali, Semua Kecam		39 Orang/ Bulan	-	3.907.678.000,00	Dana Transfer Umum-	

						terpenuhi sesuai standar		at Daerah	atan, Semua Kel/Desa					Dana Alokasi Umum	
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Dokumen	-	182.832.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Dokumen	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	01	2.03	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Program Penunjang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	Jumlah Administrasi	- Kab. Boyolali,		12 Dokumen	-	0,00	Dana Tran	

						Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					sfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		18 Laporan	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**0,00**		
5	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Dokumen		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**542.508.500**		
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Program Penunjang Urusan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	Jumlah Administrasi Umum	- Kab. Boyolali, Semu		4 Paket		2.944.000,00	Dana Transfer	

						Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	n Bangunan Kantor yang Disediakan	Perangkat Daerah	a Kecamatan, Semua Kel/Desa					Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Paket		21.907.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Paket		3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Paket		39.985.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Paket		91.043.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua		4 Paket		73.629.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alok	

									Kel/Desa					asi Umum	
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Laporan		210.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Laporan		100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**123.208.000**		
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Program Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan	- Kab. Boyolali,		12 Laporan		4.700.000,00	Dana Tran	

						Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					sfer Um um-Dana Alokasi Umum	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Laporan		118.200.000,00	Dana Transfer Um um-Dana Alokasi Umum	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Laporan		308.000,00	Dana Transfer Um um-Dana Alokasi Umum	

5	**0 3**	**0 1**	**2. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**150.220.500**		
5	0 3	0 1	2. 09	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		23 Unit		48.178.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	0 3	0 1	2. 09	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		877 Unit		20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	0 3	0 1	2. 09	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecam		2 Unit		82.042.500,00	Dana Transfer Umum-	

						terpenuhi sesuai standar		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	atan, Semua Kel/Desa					Dana Alokasi Umum	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**2.108.286.000**		
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**								**1.269.536.000**		
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai di setiap jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah pemenuhan ASN yang sesuai standar	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 Dokumen		28.376.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah pemenuhan ASN yang sesuai standar	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semu		3 Dokumen		957.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana	

						di setiap jabatan			a Kel/Desa					Alokasi Umum	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai di setiap jabatan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah pemenuhan ASN yang sesuai standar	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 Dokumen		212.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai di setiap jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah pemenuhan ASN yang sesuai standar	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		71.760.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**								**838.750.000**		

5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai di setiap jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Jabatan yang terisi (amj)	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5 Dokumen	21 Dokumen	298.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai di setiap jabatan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Jabatan yang terisi (amj)	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Dokumen	21 Dokumen	39.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai di setiap jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Jabatan yang terisi (amj)	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua		12 Dokumen	21 Dokumen	501.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alok	

									Kel/Desa					asi Umum	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**0,00**		
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**								**0,00**		
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai yang memenuhi target SKP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Hasil evaluasi penilaian Kinerja aparatur	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		6018 Laporan		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**190.035.000**		
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**								**190.035.000**		
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penurunan pelanggaran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Hasil evaluasi penilaian Kinerja aparatur	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan,		6018 Laporan	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dan	

						disiplin pegawai			Semua Kel/Desa					a Alokasi Umum	
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Hasil evaluasi penilaian Kinerja aparatur	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		70 Orang	-	900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Hasil evaluasi penilaian Kinerja aparatur	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		200 Orang	-	38.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase penurunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian	Hasil evaluasi penilaian	- Kab. Boyolali, Semu		10 Laporan	-	99.391.000,00	Dana Transfer	

						pelanggaran disiplin pegawai	Pelanggaran Disiplin ASN	Kinerja aparatur	a Kecamatan, Semua Kel/Desa					Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Hasil evaluasi penilaian Kinerja aparatur	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		30 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	02	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Hasil evaluasi penilaian Kinerja aparatur	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Laporan	-	51.744.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								**1.173.830.000**		
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**								**983.332.000**		
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**								**8.000.000,00**		
5	04	02	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Persentase OPD yang terpenuhi kebutuhan diklat	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Jumlah OPD yang terpenuhi kebutuhan diklatnya (LPPD)	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**								**975.332.000**		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase OPD yang terpenuhi kebutuhan diklat	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CASN dan ASN yang lulus diklat sesuai standar	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 Laporan		975.332.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase OPD yang terpenuhi kebutuhan diklat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Jumlah CASN dan ASN yang lulus diklat sesuai standar	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Dokumen		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**								**190.498.000,00**		
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**								**190.498.000,00**		
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (LPPD)	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		400 Orang		190.498.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**								**0,00**		
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**								**0,00**		

5	0 4	0 2	2. 02	0 8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rasio pegawai pendidikan tinggi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Jumlah ASN yang berpendidikan tinggi (LPPD)	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		60 Dokumen		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
												TOTAL	**8.378.598.000**		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PERANGKAT DAERAH

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang mengikuti peraturan Perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi BKP2D Kabupaten Boyolali Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026. Selain itu, rencana kerja disusun untuk mendukung prioritas pembangunan daerah,dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal,maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Adapun rencana kerja program, kegiatan dan pendanaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Program ini dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.906.447.000,-

dengan indikator kinerja persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar. Formula indikator kinerja tersebut yaitu Prosentase jumlah capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibandingkan dengan Prosentase target Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kegiatan dikalikan 100%. Untuk melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu sebesar Rp 0,-. Adapun indikator kinerja kegiatan ini yaitu jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 4.090.510.000,-Adapun indikator kinerja kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah yaitu Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dibuat tepat waktu.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dinilai kinerjanya dengan indikator Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun, dengan pagu anggaran sebesar Rp.0,-
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dihitung kinerjanya dengan indikator Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada BKP2D Kabupaten Boyolali pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.525.748.000,-
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.122.042.000,- Adapun indikator kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp.168.1788.000,-Adapun indikator untuk mengukur capaian kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dan dalam kondisi baik.

B.PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Program ini dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.298.321.000,-. Guna mencapai sasaran, program kepegaawaian daerah dirumuskan dengan formulasi indicator kinerja yaitu persentase dan pemenuhan pegawai disetiap jabatan dan persentase penilaian kinerja pegawai dibagi dengan target presentase pemenuhan pegawai disetiap jabatan dan presentase hasil penilaian kinerja pegawai dikali 100%. Adapun dukungan kegiatan untuk melaksanakan Program Kepegawaian Daerah pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.269.536.000,- dengan Indikator kinerja untuk mencapai sasaran kegiatan ini yaitu Jumlah dukumen mengenai pemenuhan kebutuhan ASN yang sesuai standar.
2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, dengan dukungan pagu anggaran sebesar Rp.838.750.000,-Adapun indikator kinerja untuk mencapai sasaran kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yaitu jumlah dokumen mengenai kegiatan pengisian Jabatan Pengawas, Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi.
3. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan dukungan pagu anggaran sebesar Rp.185.865.000,- Adapun indikator kinerja untuk mencapai sasaran kegiatan ini yaitu laporan mengenai Hasil evaluasi penilaian Kinerja aparatur.

C. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Program ini dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.173.830.000,. Guna mencapai sasaran program pengembangan sumber daya manusia dirumuskan dengan formulasi indikator kinerja persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi meningkat kinerjanya. Adapun dukungan kegiatan untuk melaksanakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun

2024 sebagai berikut :

1. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.173.830.000,. Adapun indicator kinerja kegiatan ini yaitu persentase ASN yang lulus diklat latsar/kepemimpinan, lulus uji kompetensi jabatan fungsional serta persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis/fungsional meningkat kinerjanya.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi,dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada indikator sub kegiatan,yang ada, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pembandingan antara rancangan awal RKPD tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dimaksudkan untuk penyesuaian anggaran pada program/ kegiatan dengan memperhatikan prioritas program/ kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan RKPD tahun 2024. Reviu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 disajikan dalam tabel T-C.33. berikut ini :

Tabel T-C.33
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Boyolali
Tahun 2024

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	03				KEPEGAWAIAN								7.204.768.000					7.204.768.000
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.906.447.000					4.906.447.000
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								-					-

5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Dokumen		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00

5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00

5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		16 Laporan		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	0,00

5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Laporan		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,00
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.090.510.000**					**4.002.791.000**
5	03	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		39 Orang /Bulan	-	3.907.678.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang /Bulan	3.807.182.000,00

5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Dokumen	-	182.832.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	195.300.000,00
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Dokumen	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	309.000
5	03	01	2.03	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Program Penunjang Urusa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Administrasi Keuangan	- Kab. Boyolali, Semua		12 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Um		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0,00

						n Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar		Perangkat Daerah	Kecamatan, Semua Kel/Desa					um-Dana Alokasi Umum					
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00
5	03	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua		1 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0,00

						uhi sesuai standar			Kel/Desa					Umum					
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		18 Laporan	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0,00
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**0,00**						**87.688.000**
5	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Dokumen		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	87.688.000

						standar												
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**542.508.500**					**525.748.000**
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Paket		2.944.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.000.000,00
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Paket		21.907.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0,00

						standar													
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Paket		3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.000.000,00
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Paket		39.985.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.000.000,00

5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Paket		91.043.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	93.835.000,00
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Paket		73.629.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	75.000.000,00
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Program Penunjang Urusa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Administrasi Umum Perangk	- Kab. Boyolali, Semua		4 Laporan		210.000.000,00	Dana Transfer Um		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	210.913.000,00

						n Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar		at Daerah	Kecamatan, Semua Kel/Desa					um-Dana Alokasi Umum				
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Laporan		100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	100.000.000,00
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**123.208.000**					**122.042.000**
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Program Penunjang Urusan Pemer	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan		12 Laporan		4.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.700.000,00

						intah yang terpenuhi sesuai standar		Pemerintahan Daerah	, Semua Kel/Desa					a Alokasi Umum				
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Laporan		118.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	117.342.000,00
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Laporan		308.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	-

						standar												
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**150.220.500**					**168.178.000**
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		23 Unit		48.178.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	48.178.000,00
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeri	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua		877 Unit		20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	887 Unit	20.000.000,00

						sesuai standar		ntahan Daerah	Kel/Desa					Um um					
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Program Penunjang Urusan Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Unit		82.042.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000,00
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**2.108.286.000**					**2.112.456.000**
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**								**1.269.536.000**					**1.273.195.000**
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai di setiap	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah pemenuhan ASN yang sesuai standar	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semu		3 Dokumen		28.376.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alok		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	28.376.000,00

						jabatan			a Kel/Desa					asi Umum					
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai di setiap jabatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah pemenuhan ASN yang sesuai standar	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 Dokumen		957.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen	957.547.000,00
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai di setiap jabatan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah pemenuhan ASN yang sesuai standar	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 Dokumen		212.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	3 Dokumen	232.803.000,00
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah pemenuhan ASN yang	- Kab. Boyolali, Semua Keca		1 Dokumen		71.760.000,00	Dana Transfer Umum-		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	54.469.000,00

						pegawai di setiap jabatan		sesuai standar	matan, Semua Kel/Desa					Dana Alokasi Umum					
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**								**838.750.000**						**839.261.000**
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai di setiap jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Jabatan yang terisi (amj)	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5 Dokumen	21 Dokumen	298.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5 Dokumen	298.082.000,00
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai di setiap jabatan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Jabatan yang terisi (amj)	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Dokumen	21 Dokumen	39.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Dokumen	39.787.000,00

5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai di setiap jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Jabatan yang terisi (amj)	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Dokumen	21 Dokumen	501.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	12 Dokumen	501.392.000
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**0,00**					**13.361.000**
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**								**0,00**					**13.361.000**
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai yang memenuhi target SKP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Hasil evaluasi penilaian Kinerja aparatur	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		6018 Laporan		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5536 Laporan	13.361.000
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**190.035.000**					**172.504.000**

5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**								**190.035.000**					**172.504.000**
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Hasil evaluasi penilaian Kinerja aparatur	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		6018 Laporan	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.536 Laporan	-
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Hasil evaluasi penilaian Kinerja aparatur	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		70 Orang	-	900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	80 Orang	330.000,00
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase penurunan pelanggaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Hasil evaluasi penilaian Kinerja	- Kab. Boyolali, Semua Keca		200 Orang	-	38.000.000,00	Dana Transfer Umum-		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	200 Orang	24.734.000,00

						disiplin pegawai		aparatur	matan, Semua Kel/Desa					Dana Alokasi Umum				
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Hasil evaluasi penilaian Kinerja aparatur	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		10 Laporan	-	99.391.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	99.440.000,00
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Hasil evaluasi penilaian Kinerja aparatur	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		30 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	30 Dokumen	0,00
5	03	02	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Persentase penur	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Hasil evaluasi penilaia	- Kab. Boyolali,		12 Laporan	-	51.744.000,00	Dana Tran		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	12 Laporan	48.000.000,00

						unan pelanggaran disiplin pegawai		n Kinerja aparatur	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					sfer Umum-Dana Alokasi Umum					
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								**1.173.830.000**					**1.173.830.000**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**								**983.332.000**					**997.856.000**	
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**								**8.000.000,00**					**8.747.000**	
5	04	02	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi	Persentase OPD yang terpenuhi kebutuhan diklat	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi	Jumlah OPD yang terpenuhi kebutuhan diklatnya (LPPD)	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	8.747.000

					Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional		Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun									Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun		
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**								**975.332.000**					**989.109.000**
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase OPD yang terpenuhi kebutuhan diklat	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CASN dan ASN yang lulus diklat sesuai standar	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 Laporan		975.332.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	975.443.000,00

5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase OPD yang terpenuhi kebutuhan diklat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Jumlah CASN dan ASN yang lulus diklat sesuai standar	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Dokumen		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	2 Dokumen	13.666.000
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**								**190.498.000,00**					**162.103.000,00**
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**								**190.498.000,00**					**162.103.000,00**

5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (LPPD)	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		400 Orang		190.498.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	400 Orang	162.103.000,00
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**								**0,00**					**13.871.000**
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**								**0,00**					**13.871.000**
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan	Rasio pegawai pendidikan tinggi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi,	Jumlah ASN yang berpendidikan tinggi (LPPD)	- Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		60 Dokumen		0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi,	60 Dokumen	13.871.000

					Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama								Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama		
											TOTAL	**8.378.598.000**						**8.378.598.000**

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan yang lebih banyak dari para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Output Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali adalah ProgramTahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tujuan serta sasaran dalam upaya mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali.

Selain menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja, Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

5.1. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hal itu sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu

kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas pokok dan kewenangan pada masing-masingbidang;
b. Menjaga Konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
c. Dalam Rangka Efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024

5.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2024, selanjutnya Renja akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.

AA. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel ii
BAB I PENDAHULUAN ..... - 1 -
1. Latar Belakang ..... - 1 -
2. Landasan Hukum ..... - 3 -
3. Maksud Dan Tujuan ..... - 4 -
4. Sistematika Penulisan ..... - 5 -
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU - 7 -
1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... - 7 -
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... - 11 -
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah ..... - 13 -
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... - 14 -
5. Penelaahan Program Dan Kegiatan Masyarakat ..... - 29 -
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... - 30 -
1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... - 30 -
2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..... - 30 -
3. Program dan Kegiatan ..... - 31 -
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..... - 35 -
BAB V PENUTUP 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 ..... - 7 -
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Boyolali..... - 9 -
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Boyolali ..... - 12 -
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ..... - 18 -
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Boyolali ..... - 29 -
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ..... - 31 -
Tabel 3.2 Sasaran dan Strategi yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Boyolali..... - 31 -
Tabel 3.3 Daftar Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian SPM Sub Bidang Bencana..... - 33 -
Tabel 4.1 Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 ..... - 35 -

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun upaya bersama dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah, karena menjadi produk perencanaan pada unit satuan kerja pemerintah yang berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat menentukan kualitas pelayanan pada publik yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan BPBD untuk periode 1 (satu) tahun selama tahun 2024. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Organisasi Pemerintah Daerah wajib menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja 2024 merupakan tahun pencapaian kinerja ketiga atas tahapan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Boyolali 2021 – 2026.

Sebagai dokumen perencanaan, Renja Perangkat Daerah merupakan rancangan usulan BPBD Kabupaten Boyolali dengan target yang terukur serta telah disesuaikan berdasarkan prioritas dan strategi utama guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Boyolali. Pengajuan Renja Perangkat Daerah ini disusun secara realistis untuk mencapai tujuan pembangunan dimaksud.

Renja Perangkat Daerah sebagai penjabaran tahunan dari renstra merupakan bentuk komitmen BPBD Kabupaten Boyolali dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Boyolali sekaligus wujud dan peran serta BPBD Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2021 – 2026. Dokumen tersebut menjadi pedoman dalam

pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan, serta evaluasi kinerja.

Disamping itu, dalam penyusunan Renja BPBD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 telah dilakukan penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2024. Dan juga sekaligus mengacu RKP Tahun 2024, serta hasil penelaahan Rancangan Renja BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

a) Kedudukan BPBD Kabupaten Boyolali

   BPBD Kabupaten Boyolali merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

b) Tugas Pokok

   Sesuai pasal 7, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali, bahwa BPBD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang penanggulangan bencana.

c) Fungsi

   Sesuai pasal 8, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali, bahwa dalam melaksanakan tugas BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut.

   1) penyusunan kebijakan di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana;
   2) pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana;
   3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penanggulangan bencana;
   4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana; dan
   5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Keadaan Tertentu;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

13. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Boyolali;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);

19. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolai Tahun 2021 Nomor 135).

3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah :

a) Sebagai pedoman bagi BPBD Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Boyolali

dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026.

b) Sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pemantauan / monotoring, dan evaluasi di lingkungan BPBD Kabupaten Boyolali.

Tujuan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah :

a) Sebagai landasan operasional BPBD Kabupaten Boyolali untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b) Sebagai pedoman untuk monitoring sinergi dan keterkaitan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana.

c) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan pembangunan.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program Dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 menyajikan pengukuran terhadap hasil Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2022 dan perkiraan pencapaian target tahun 2023.

Pada tahun 2022, BPBD Kabupaten Boyolali melaksanakan anggaran belanja program/kegiatan sebesar Rp7.080.837.000,00 (tujuh milyar delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dengan realisasi sebagaimana tabel 2.1.

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	2.604.774.000	2.568.935.954	98,62	35.838.046
2	Belanja Barang dan Jasa	2.882.233.000	2.667.696.986	92,56	214.536.014
3	Belanja Hibah	11.400.000	11.200.000	98,25	200.000
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	325.430.000	317.725.204	97,63	7.704.796
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.245.000.000	1.219.984.500	97,99	25.015.500
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.000.000	11.999.999	100,00	1
Jumlah		7.080.837.000	6.797.542.643	96,00	283.294.357

Anggaran BPBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dalam 2 program, 9 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatannya adalah sebagai berikut.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi:

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.285.174.000,- terealisasi sebesar Rp 3.249.335.954,-.

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp456.230.000,- terealisasi sebesar Rp442.509.301,-.

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp140.270.000,- terealisasi sebesar Rp85.074.566,-.

4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp 278.349.000,- terealisasi sebesar Rp271.207.784

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran Rp82.982.000,- terealisasi sebesar Rp82.174.999

b. Program Peanggulangan Bencana meliputi:

1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp222.500.000,- terealisasi sebesar Rp185.077.025

2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.416.832.000,- terealisasi sebesar Rp2.329.879.229,-.

3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp117.500.000,- terealisasi sebesar Rp77.314.335,-.

4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp81.000.000 terealisasi sebesar Rp74.969.450,-.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
1	05	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Dearah	Persentase capaian fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
1	05	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
1	05	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%

1	05	01	2	08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %			0	100 %	100 %	100 %
1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian fungsi layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %			0	100 %	100 %	100 %
1	05	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana								
1	05	03	2	01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	556885	0	503283	503283	100%	545966	1049249	1.88 %
1	05	03	2	02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	568248	0	90784	90784	100%	557106	647890	1.14 %
1	05	03	2	03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	568246	0	95696	95696	100%	557106		1.15 %
1	05	03	2	04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase peran serta lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan dalam penanaganan kebencanaan	100 %	0	0	0	0	0	0	0

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Boyolali merupakan daerah rawan bencana terutama bencana alam. Kabupaten Boyolali memiliki kondisi geografis dan topografis yang beragam sehingga memiliki kerawanan bencana yang cukup tinggi. Beberapa jenis bencana yang paling rawan terjadi di Boyolali antara lain : banjir, banjir lahar dingin, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran yang tersebar di semua bagian wilayah. Berdasarkan dokumen RPJPD Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025, tingginya kerawanan bencana disebabkan oleh kurang terintegrasinya pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Artinya, aspek pembangunan tidak sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana.

Berkaitan dengan capaian indikator kinerja BPBD Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam rencana strategis telah sesuai dengan target. Pencapaian tersebut diperoleh atas usaha dan kerjasama semua pihak.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Boyolali

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
1.	Indeks Risiko Bencana (IRB)			130,32	128,32	126,32	124,32	122,32	130,32	130,32	128,32	126,32	
2.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Tolok ukur keberhasilan penanggulangan bencana adalah Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Kapasitas. Tahun 2022, Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Boyolali sebesar 130,32 dan Indeks Kapasitas Kabupaten Boyolali sebesar 82. Artinya, penanggulangan bencana semakin optimal jika Indeks Kapasitas besar sehingga Indeks Risiko Bencana akan menurun.

Capaian kinerja untuk persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM) serta persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM) tercapai 100% pada tahun 2022.

3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa 4 (empat) dari 6 (enam) jenis pelayanan dasar di kabupaten adalah terkait dengan bencana, yaitu: kesehatan, trantibumlinmas, perumahan rakyat dan sosial. Oleh sebab itu informasi dan data terkait kebencanaan dibutuhkan dalam pemenuhan pelayanan dasar di urusan tersebut.

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkewajiban dalam pemenuhan sub-urusan bencana pada pelayanan SPM Kabupaten. Namun, dalam pemenuhan SPM pemerintah kabupaten / kota untuk sub-urusan bencana disebutkan secara jelas 3 (tiga) pelayanan terkait kebencanaan yaitu: pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Dalam Pasal 11 Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota disebutkan bahwa pemerintah kabupaten dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sub-urusan bencana Daerah Kabupaten / Kota dalam APBD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar pelayanan minimal yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan telah dilengkapi dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 serta dimutakhirkan melalui

Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021.

Perubahan iklim merupakan suatu isu lintas-sektoral, dan membutuhkan koordinasi antar dan intra-sektoral, oleh karena itu peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lingkungan, ekonomi, pembangunan, energi, pertanian, perikanan, peternakan, dan sektor kehutanan merupakan hal yang sangat penting.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan bahwa paradigma penanggulangan bencana lebih mengutamakan pada kegiatan prefentif atau pencegahan. Pengurangan risiko bencana diharapkan mampu mengurangi kerusakan dan kerugian serta tingkat kematian yang diakibatkan oleh bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Boyolali meliputi:

1. Masih kurangnya jumlah *Early Warning System* termasuk rambu bahaya dan jalur evakuasi yang dipasang di daerah rawan bencana;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulanan bencana;
3. Masih kurangnya sumber literasi mengenai kebencanaan dan pendokumentasian sejarah kebencanaan;
4. Belum optimalnya dukungan lintas sektor dalam pembiayaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap meningkatnya potensi bencana (alam dan non alam);
6. Bencana tidak mengenal wilayah, ruang dan waktu sehingga setiap saat bisa terjadi;
7. Tanggung jawab dan wewenang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024, yang merupakan kelanjutan Tahun Ke-3 atas tahapan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Arah Kebijakan/Tema Pembangunan tahun 2024 Kabupaten Boyolali adalah: “Memacu produktivitas dengan pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi sektor unggulan serta percepatan dan pemerataan investasi”. Prioritas Kabupaten Boyolali tahun 2024 yaitu mengembalikan identitas Boyolali sebagai kota susu dan lumbung pangan. Identitas Boyolali Kota Susu dan Boyolali Lumbung Pangan mencerminkan sector unggulan yang perlu semakin dioptimalkan. Optimalisasi sektor unggulan memiliki konsep terintegrasi dengan berbagai sektor lain. Strategi utama yang dijalankan berupa penerapan good farming practices, fasilitasi kebutuhan modal, pengembangan kemitraan yang sehat, pendampingan dari hulu ke hilir hingga memberi nilai tambah pasca produksi.

Prioritas pembangunan dalam arah kebijakan ini antara lain:

1. Peningkatan produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan Peternakan;
2. Pendampingan UMKM/IKM secara berkelanjutan;
3. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung industri pengolahan susu;
4. Peningkatan kapasitas pemasaran produk olahan susu dan peningkatan kompetensi SDM pelaku agro industri susu;
5. Peningkatan daya saing pariwisata melalui strategi peningkatan daya tarik, promosi, kerjasama pariwisata,serta penguatan sektor ekonomi kreatif;
6. Peningkatan pemerataan pembangunan di wilayah Boyolali Utara, terutama dalam realisasi, investasi, peningkatan daya tarik wisata, dan peningkatan kualitasinfrastruktur yang menopang pusat pertumbuhan baru di wilayah wilayah Boyolali utara;
7. Peningkatan keberdayaan masyarakat desa melalui optimalisasi potensi/aset desa, penguatan BUMDesa dan pembangunan kawasan pedesaan;
8. Peningkatan keberdayaan PMKS, dengan prioritas kelompok sasar penyandang disabilitas dan rehabilitasi ODGJ;
9. Pengelolaan sampah 3R berbasis komunitas di setiap desa dan kecamatan.

Secara umum usulan program dan kegiatan yang disusun Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah sesuai dengan prioritas

pembangunan Daerah beserta target yang akan dicapai pada tahun 2023, sebagaimana terlihat pada tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 tersebut dalam tabel berikut :

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2024

BPBD Kabupaten Boyolali

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		**Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)**	**100**	**272.500**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		**Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)**	**100**	**198.900**	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	459.258	272.500	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	459.258	198.900	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi		-	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi		-	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kabupaten Boyolali	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	470	272.500	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kabupaten Boyolali	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	459.258	198.900	Ada perubahan indikator menyesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900,1,15,5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguna

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											n dan Keuangan Daerah
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		**Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)**	**100**	**478.812**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		**Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)**	**100**	**330.544**	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)/LPPD	52950	478.812	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)/LPPD	52950	330.544	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Boyolali	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1150	10.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Boyolali	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	150	21.700	Ada perubahan indikator menyesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900,1,15,5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Daerah
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12	-	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12	-	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Boyolali	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun petugas	6	262.500	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kabupaten Boyolali	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	6	135.332	
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Boyolali	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	3	10.800	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Boyolali	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	3	8.200	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kabupaten Boyolali	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2	108.512	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kabupaten Boyolali	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2	108.512	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Boyolali	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	55	6.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Boyolali	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	55	26.800	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kabupaten Boyolali	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	3	75.000	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kabupaten Boyolali	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	-	-	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Boyolali	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	400	6.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Boyolali	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	150	30.000	
	PROGRAM PENANGGULANGAN		**Persentase warga negara yang memperoleh layanan**	**100**	**2.091.000**	**PROGRAM PENANGGULANGAN**		**Persentase warga negara yang memperoleh layanan**	**100**	**924.294**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BENCANA		**penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)**			**BENCANA**		**penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)**			
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100	200.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100	181.732	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	12	-	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	12	-	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1	-	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1	-	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10.000	-	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10.000	-	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Boyolali	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.000	200.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Boyolali	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.000	181.732	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2	-	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	2	-	
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1	-	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase peran serta lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penanganan kebencanaan	100	1.891.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase peran serta lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penanganan kebencanaan	100	742.562	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1	-	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1	-	
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1	-	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1	-	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3	-	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3	-	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kabupaten Boyolali	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	12	5.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kabupaten Boyolali	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	12	3.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Boyolali	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1	6.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Boyolali	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1	139.100	
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Boyolali	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	6	1.880.000	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Boyolali	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	200	10.600	Ada perubahan nomemklatur sub kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dinonaktifikan, sub kegiatan tersebut dirinci kedalam dua sub kegaitan baru, menyesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900,1,15,5-1317 Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
						Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Boyolali	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4	589.862	Ada perubahan nomemklatur sub kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dinonaktifikan, sub kegiatan tersebut dirinci kedalam dua sub kegaitan baru, menyesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900,1,15,5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											dan Keuangan Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	**100**	**3.821.846**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	**100**	**5.036.325**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8	2.983.824	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8	3.874.078	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Boyolali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	2.303.424	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Boyolali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	3.145.350	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	680.400	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Boyolali	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	728.728	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1		
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	18	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	18	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SKPD		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			SKPD		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Boyolali	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Boyolali	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	427.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	625.056	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Boyolali	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	3.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Boyolali	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	3.070	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Boyolali	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	3.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Boyolali	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	9.786	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Boyolali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	200.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Boyolali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	195.038	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Boyolali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	30.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Boyolali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	28.871	
	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Boyolali	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	25.000	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Boyolali	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	66.185	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Boyolali	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	66.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Boyolali	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	173.709	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Boyolali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	100.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Boyolali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	148.397	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13	-	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8	20.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	21.521	
	Pengadaan Mebel	Kabupaten Boyolali	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	20.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Boyolali	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	18.750	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Boyolali	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Boyolali	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	2.771	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	118.891	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	101.400	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	2.950	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	115.241	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	97.400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Boyolali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	272.131	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	414.270	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah					Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Boyolali	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	202.131	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Boyolali	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	253.390	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1	-	
	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Boyolali	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Boyolali	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	15.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Boyolali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67	20.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Boyolali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67	45.000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Boyolali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	50.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Boyolali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	100.880	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	-	
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	-	
					6.664.158					**6.490.063**	

5. Penelaahan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Penyelanggaraan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Boyolali dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Mekanisme perencanaan pembangunan dirancang agar dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Proses penyusunan rencana pembangunan ditempuh melalui beberapa mekanisme usulan, yaitu kegiatan musrenbang, aspirasi langsung kepada Bupati saat kunjungan ke lapangan dan aspirasi melalui hasil Reses DPRD. Berdasarkan data rancangan RKPD Kabupaten Boyolali sesuai data usulan Program/Kegiatan dari masyarakat, tidak terdapat usulan untuk Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Boyolali

BPBD Kabupaten Boyolali

No	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator Kerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

Seiring dengan keterbukaan informasi publik, dan pemanfaatan teknologi informasi, Pemerintah Kabupaten Boyolali membuka beberapa sarana untuk membangun sinergi dan komunikasi pembangunan dengan masyarakat. Kanal yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali antara lain melalui sms, website, media sosial (twitter, facebook, instagram, dll). Meskipun terhubung secara struktur, BPBD Kabupaten Boyolali juga mempunyai kanal tersendiri melalui berbagai media yang dimanfaatkan untuk jalur dua arah sehingga penanganan bencana di Kabupaten Boyolali dapat berjalan dengan efektif, efisien, cepat, dan tanggap.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Terdapat 8 Arah Kebijakan Prioritas Nasional dalam RKP 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN);
8. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

Tugas dan fungsi BPBD tidak terkait secara langsung terhadap tema pembangunan nasional tersebut, namun hanya sebagai pendukung dalam penanganan bencana, sehingga mendukung pencapaian tema pembangunan dan prioritas nasional tahun 2024.

2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Boyolali sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 yaitu Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya, maka tujuan BPBD Kabupaten Boyolali adalah meningkatnya ketahanan sosial dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Adapun sasaran yang akan dicapai BPBD Kabupaten Boyolali antara lain :

1. Menurunnya resiko bencana dengan cara:
   a. Pembentukan desa tangguh bencana;
   b. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan;
   c. Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Kebencanaan;
   d. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kebencanaan;

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Boyolali Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan dan sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Ketahanan Sosial		Indeks Risiko Bencana (IRB)		126,32
		Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Kapasitas		85
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik		Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		833,00
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip BPBD		82,50

3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam rangka menyukseskan visi misi Bupati Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026, dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi bidang penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Boyolali berperan dan berkontribusi dalam melaksanakan misi ke 2, yaitu Boyolali sehat, tangguh, cerdas, berkarakter dan berbudaya. Korelasi dengan arah kebijakan pembangunan TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Sasaran dan Strategi yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Boyolali

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Boyolali sehat, tangguh, cerdas, berkarakter dan berbudaya	Meningkatnya ketahanan sosial	Menurunnya risiko bencana	Peningkatan penanggulangan bencana

Fokus prioritas pada arah kebijakan Penanggulangan Bencana tersebut

adalah :

1. Pembentukan desa tangguh bencana;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan;
3. Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Kebencanaan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kebencanaan.

2. Pencapaian SPM

Permasalahan strategis pelayanan kebencanaan di Kabupaten Boyolali adalah luasnya kawasan rawan bencana yang ada. Hal tersebut berdampak pada banyaknya warga/penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana. Pencapaian standar pelayanan minimal di bidang kebencanaan mensyaratkan tersedianya data jumlah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut.

Berdasarkan masalah strategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan melalui penyediaan payung hukum penanganan bencana, dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan yang berkualitas dengan memanfaatkan media yang tepat.
2) Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui penyediaan SDM yang handal dan koordinasi yang cepat dan tepat.

   Adapun arah kebijakan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah:

   1) Pemanfaatan media berbasis teknologi dan informasi serta media massa untuk penyebarluasan informasi kebencanaan.
   2) Penguatan sistem koordinasi penanggulangan bencana daerah.

Daftar Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian SPM dalam sub bidang bencana adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Daftar Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian SPM Sub Bidang Bencana

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
4	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
7	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
8	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
9	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
10	Penyusunan Rencana Kontijensi
11	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
12	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
13	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
14	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
15	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
16	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
17	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
18	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
20	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
21	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
22	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
23	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
24	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
25	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
26	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Renja BPBD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 meliputi:

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan

   Program pada Renja BPBD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 berjumlah 2 yaitu Program Penanggulangan Bencana dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diuraikan kedalam 10 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

   Lokasi pelaksanaan kegiatan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Boyolali, dan difokuskan pada daerah rawan bencana.

3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

   Dana yang dibutuhkan oleh BPBD Kabupaten Boyolali pada Tahun 2024 sebesar Rp6.490.063.000 yang didanai dari Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah								6.490.063.000,00					6.644.158.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								6.490.063.000,00					6.644.158.000,00
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								6.490.063.000,00					6.589.158.000,00
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.036.325.000,00					3.801.846.000,00
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								0,00					0,00
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Dokumen	7 Kegiatan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	7 Kegiatan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	7 Kegiatan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	7 Kegiatan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00
1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	7 Kegiatan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	16 Laporan	7 Kegiatan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	0,00
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	4 Laporan	7 Kegiatan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.874.078.000,00					2.983.824.000,00
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	26 Orang/bulan	8 Kegiatan	3.145.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2.303.424.000,00
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Dokumen	8 Kegiatan	728.728.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	680.400.000,00
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Dokumen	8 Kegiatan	0,00	-		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00
1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Dokumen	8 Kegiatan	0,00	-		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0,00
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	8 Kegiatan	0,00	-		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00
1	05	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	8 Kegiatan	0,00	-		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	0,00
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	18 Laporan	8 Kegiatan	0,00	-		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0,00
1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Dokumen	8 Kegiatan	0,00	-		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								625.056.000,00					427.000.000,00
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	4 Paket	10 Kegiatan	3.070.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.000.000,00
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	4 Paket	10 Kegiatan	9.786.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.000.000,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Paket	10 Kegiatan	195.038.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	200.000.000,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	4 Paket	10 Kegiatan	28.871.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30.000.000,00
1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	4 Paket	10 Kegiatan	66.185.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	25.000.000,00
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	4 Laporan	10 Kegiatan	173.709.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	66.000.000,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	4 Laporan	10 Kegiatan	148.397.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.000.000,00
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	13 Dokumen	10 Kegiatan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0,00
1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	13 Dokumen	10 Kegiatan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0,00
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								21.521.000,00					0,00
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase capaian fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	5 Unit	100 persen	18.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0,00
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase capaian fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	7 Unit	100 persen	2.771.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								101.400.000,00					118.891.000,00
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Laporan	4 Kegiatan	3.500.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.950.000,00
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Laporan	4 Kegiatan	97.400.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	115.241.000,00
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	4 Laporan	4 Kegiatan	500.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	700.000,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								414.270.000,00					272.131.000,00
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	27 Unit	8 Kegiatan	253.390.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	202.131.000,00
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	15 Unit	8 Kegiatan	15.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	67 Unit	8 Kegiatan	45.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	20.000.000,00
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	3 Unit	8 Kegiatan	100.880.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50.000.000,00
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								1.453.738.000,00					2.767.312.000,00
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								198.900.000,00					272.500.000,00

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)													
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	458.258 Orang	458.258 Orang	198.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	470 Orang	272.500.000,00
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								330.544.000,00					478.812.000,00
1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan													
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)/LPPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Kawasan	52950 Orang	108.512.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2 Kawasan	108.512.000,00
1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota													
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)/LPPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	55 Orang	52950 Orang	26.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	55 Orang	6.000.000,00
1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)/LPPD	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	150 Orang	52950 Orang	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	400 Orang	6.000.000,00
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota													
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)/LPPD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Mojosongo	100 Persen	1 Kegiatan	52950 Orang	8.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	3 Kegiatan	10.800.000,00

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota													
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)/LPPD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Mojosongo	100 Persen	6 Unit	52950 Orang	135.332.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	6 Unit	262.500.000,00
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota													
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)/LPPD	Kab. Boyolali, Mojosongo, Mojosongo	100 Persen	1 Kawasan	52950 Orang	21.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1150 Kawasan	10.000.000,00
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								181.732.000,00					200.000.000,00
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota													
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1000 Orang	100 Persen	181.732.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	200.000.000,00
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								742.562.000,00					1.891.000.000,00
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota													
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Persentase peran serta lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penanganan kebencanaan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	0,00
1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota													
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Persentase peran serta lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penanganan kebencanaan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	0,00	-		Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2 Dokumen	0,00

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota													
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Persentase peran serta lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penanganan kebencanaan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	3 Dokumen	100 Persen	0,00	-		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen	0,00
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan													
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Persentase peran serta lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penanganan kebencanaan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	12 Dokumen	5.000.000,00
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana													
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase peran serta lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penanganan kebencanaan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	139.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	6.000.000,00
1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota													
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Persentase peran serta lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penanganan kebencanaan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	200 Orang	100 Persen	10.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	200 Orang	0,00
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota													
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Persentase peran serta lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penanganan kebencanaan	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	4 Kegiatan	100 Persen	589.862.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	4 Kegiatan	1.880.000.000,00
TOTAL													**6.490.063.000,00**					**6.589.158.000,00**

BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yaitu pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijkasanaan yang dampaknya merembes kebawah *(trickle down effect)* sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, semoga pelayanan yang diberikan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali kepada masyarakat lebih meningkat dan optimal serta dapat meminimalkan kerugian terhadap korban bencana alam.

BB. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali merupakan unit/satuan kerja dilingkungan Kabupaten Boyolali sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No, 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Boyolali No. 3 tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali.

Sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja OPD.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan dan Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali. Selain itu Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali merupakan dokumen perencanaan terendah dan terkecil di Pemerintah yang mempunyai fungsi penting sebagai bahan masukan dan dasar bagi penyusunan perencanaan yang lebih tinggi.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja OPD) Kabupaten Boyolali tahun 2024. untuk menjadikan periksa dan guna seperluya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN..... 4

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali..... 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali .. 21

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali 24

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 27

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 41

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOYOLALI..... 45

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... 45

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali 46

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOYOLALI..... 48

4.1. Program dan Kegiatan 48

BAB V P E N U T U P 63

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 . LATAR BELAKANG

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota di wajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD.

Oleh karena itu, OPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis.(Renstra) lima tahunan OPD , kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD.

Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD.

Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali melaksanakan Visi Bupati Boyolali yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan, yaitu "**Boyolali Maju Meneruskan Pro Investasi" Melangkah dan Menata Bersama penuh Totalitas (METAL)**

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali Tahun 2023 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Boyolali khususnya dan Nasional pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah :

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali Tahun 2024.
b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu~isu strategis pada tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut *;*

a. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RKPD.
b. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali tahun 2024 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

Penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I **PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai :

1.1. Latar belakang
1.2. Landasan hukum
1.3. Maksud dan tujuan
1.4. Sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI P RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali,

2.4. Reviu terhadap rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOYOLALI

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali,

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali selama tahun 2022 dan perkiraan pencapaian target tahun 2023.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan *(input)*, keluaran *(output)*, hasil *(outcome)*. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Pencapaian Target Tahun 2023.

Pada Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali menerima anggaran sebesar Rp. 6.537.458.000 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 6 (enam) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dari jumlah tersebut capaian keuangan terealisasi sebesar Rp 6.156.431.404,- atau mencapai 94,17%.

Adapun Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Kab. Boyolali dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol dan Pencapaian Renstra Badan Kesbangpol s/d Tahun 2022
Kabupaten Boyolali

OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah)(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Angka konflik yang ditangani	12	3	16	3	181,3	13	0	100
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional danPenanganan Konflik Sosial	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	12	12	12	12	100	12	12	100
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan	100	12	12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah)(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12	12	12	12	100	12	12	100
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	50	26	30	30	100	40	40	100
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasiladan Karakter Kebangsaan	Cakupan Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap	2	2	2	2	100	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah)(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kecamatan								
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	107	2	2	2	100	2	2	100
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penanganan potensi konflik keagamaan	50	25	30	30	100	40	40	100
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	12	12	12	12	100	12	12	100
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	160	12	12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah)(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Masyarakat yang paham terhadap pembinaan Ormas	32	8	16	16	100	24	24	100
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	12	12	12	12	100	12	12	100
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	FrekuensiJumlah orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	170	12	12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah)(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ormas Asing di Daerah								
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase penanganan fasilitasi bidang politik dalam negeri	83	74	74	74	100	74	74	100
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2	2	2	2	100	2	2	100
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika	300	2	2	2	100	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah)(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah								
		Jumlah Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik	5	5	5	5	100	5	5	100
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart	100	100	100	100	100	100	100	100
X.XX.01.2.02	adiminstrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	7	12	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan	19	12	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi	12	12	12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah)(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelaksanaan Tugas ASN								
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12	12	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12	12	12	12	100	12	12	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun dan laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan akhir tahun SKPD	1							
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	18	18	100	18	18	100
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	1	2	2	2	100	2	2	100
	Administrasi barang milik daerah SKPD	Jumlah kegiatan administrasi barang milik daerah	1	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah)(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	1	0	0	0	0	0	0	0
	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12	0	0	0	0	0	0	0
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum perangkat daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah	9	12	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	4	12	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	12	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.	Penyediaan peralatan rumah	Jumlah paket peralatan	4	12	12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah)(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.06.03	tangga	rumah tangga yang disediakan								
X.XX.01. 2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
X.XX.01. 2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	4	12	12	12	100	12	12	100
X.XX.01. 2.06.07	Penyediaan bahan / Material	Jumlah paket bahan material yang disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
X.XX.01. 2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	12	12	12	100	12	12	100
X.XX.01. 2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	12	12	100	12	12	100
X.XX.01. 2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kegiatam Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	12	12	12	100	12	12	100
X.XX.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	100	12	12	100
X.XX.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12	12	12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah)(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Daya Air dan Listrik								
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4	12	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3	12	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perijinannya	10	12	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30	12	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	12	12	12	100	12	12	100
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	7	12	12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah)(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		perangkat daerah								
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2	2	2	2	100	2	2	100
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	1	1	1	100	1	1	100
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	1	1	1	100	1	1	100
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	1	1	1	1	100	1	1	100
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	1	1	1	1	100	1	1	100
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15	15	15	15	100	15	15	100
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	100	4	4	100

C. Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2023 dengan besaran anggaran sebesar Rp. 8.850.615.000,- terurai dalam 6 (enam) program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 21 (Dua Puluh satu) sub kegiatan.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 maupun perkiraan capaian tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

a. Terbatasnya kwalitas dan kwantitas Sumber Daya Manusia;
b. Globalisasi yang digerakkan oleh perdagangan dan kemajuan tehnologi telah memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan politik , ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan ;
c. Kemajuan tehnologi komunikasi dapat menimbulkan gangguan keamanan;
d. Maraknya kasus narkoba yang merupakan ancaman terhadap kelangsungan kehidupan bangsa;
e. Terjadinya krisis akhlak dan krisis moral yang terjadi akibat diabaikannya nilai-nilai agama dan budaya sebagai sumber etika berbangsa dan bernegara;
f. Banyaknya Ormas/LSM yang hanya sekedar mendapatkan SKT, sehingga keberadaanya sulit di deteksi;
g. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembinaan Politik.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Boyolali tahun 2021 - 2026, maka pada tahun 2023 Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kwalitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi baik keatas maupun kesamping apabila timbul permasalahan dilapangan.
3. Memfasilitasi kegiatan ormas/LSM yang terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol.
4. Menjalin kerjasama yang baik dengan toga, tomas, ormas/LSM serta dengan Instansi terkait dalam rangka menyelesaikan masalah yang timbul dilapangan.
5. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Boyolali.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BOYOLALI

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempunyai tugas pokok : membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.

Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali menyelenggarakkan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sedangkan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali menurut Peraturan Bupati Boyolali nomor 3 Tahun 2021

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati nomor 25 Tahun 20218 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan:
   2.1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
   2.2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan:
   3.1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
   3.2. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat, membawahkan:
   4.1. Subbidang Politik Dalam Negeri;
   4.2. Subbidang Organisasi Masyarakat.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2

- **Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten**

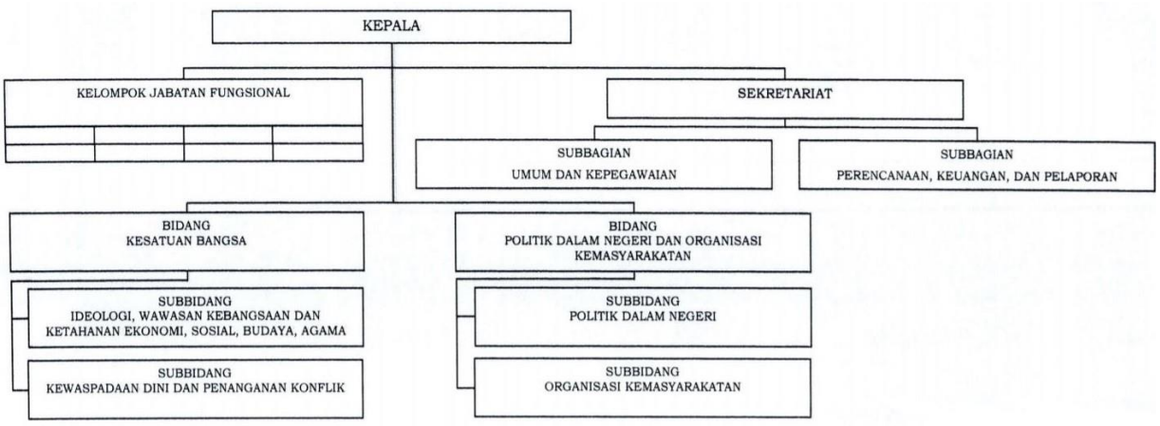

C. Kajian Atas Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerjanya tercapai 100 %, sedangkan target yang ditetapkan adalah 100%,

Sedangkan penyerapan anggaran mencapai 94,17% dari total anggaran baik belanja langsung maupun tidak langsung sebesar Rp. 6.537.458.000,-

Permasalahan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali yang terkait dengan pencapaian sebagai berikut:

a) Fasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap Ormas / LSM yang telah mempunyai SKT
b) Ormas yang habis masa berlakunya tidak melapor / memperpajang lagi.
c) Sekertaris Ormas / LSM yang berpindah / Ormas yang berbadan hukum tidak melaporkan keberadaan ke Badan Kebangpol.

Beberapa upaya yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah yaitu:

a. Memfasilitasi kegiatan ormas / LSM yang terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol.
b. Menjalin kerjasama yang baik dengan toga, tomas, ormas/LSM serta dengan Instansi terkait dalam rangka menyelesaikan masalah yang timbul dilapangan.
c. Mengoptimalkan koordinasi dengan ormas/LSM.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Boyolali

No	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
	Persentase Masyarakat yang paham terhadap pembinaan Ormas			24	24	24	24					
	Cakupan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			12	12	12	12					
	Frekuensi Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			12	12	12	12					

2.3. ISU ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI OPD.

Memperhatikan gambaran kondisi daerah dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, isu-isu global, nasional dan regional termasuk dampak dari pandemic Covid 19,isu strategis pembangunan Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang berwawasan lingkungan;
2. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan;
3. Pembangunan SDM yang Inklusif dan berdaya saing;
4. Peningkatan Inftastruktur dasar yang berkelanjutan;
5. Reformasi birokrasi yang akuntabel dan agile;

6. Penanganan bencana alam dan non alam;
7. Inovasi dan teknologi informatika.

Sedangkan Permasalahan yang dihadapi dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

1. Globalisasi yang digerakkan oleh perdagangan dan kemajuan tehnologi telah memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Disisi lain apabila tidak diwaspadai dapat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.
2. Kemajuan tehnologi komunikasi dapat menimbulkan gangguan keamanan, penipuan, peredaran barang ilegal.
3. Terjadinya krisis akhlak dan krisis moral yang terjadi sebagai akibat diabaikannya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya sebagai sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh masyarakat.
4. Berkembangnya ormas keagamaan yang radikal yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat.
5. Maraknya kasus narkoba dan HIV/Aid yang cenderung meningkat merupakan ancaman terhadap kelangsungan kehidupan bangsa.
6. Peralihan kekuasaan sering menimbulkan konflik dan dendam antar kelompok masyarakat. Hal ini disebabkan proses demokrasi tidak berjalan dengan baik sebagai akibat lemahnya pembinaan politik.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan, tidak terlepas dari apa yang menjadi Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Adapun Visi dan Misi Pemerintah kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

Visi : "***Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi" Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL) diarahkan pada :Pembangunan Infrastruktur yang tanggung, ikonik, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan".***

Untuk mewujudkan visi tersebut perlu dukungan semua potensi yang ada di Kabupaten Boyolali, terutama dukungan sumber daya manusia yang berkwalitas, dan mampu mengelola dan mendayagunakan semua sumber daya yang ada secara maksimal.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali adalah :

1. Meningkatnya Ketahanan Sosial
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Sasaran yang ingin dicapai Badan Kesbangpol Kabupaten Boyolali adalah:

1. Meningkatnya Kohesifitas Sosial Masyarakat
2. Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah

STRATEGI

Strategi Badan Kesbangpol Kabupaten Boyolali adalah :

1. Peningkatan deteksi dini terhadap gangguan stabilitas wilayah yang akan mempengaruhi investasi.
2. Pembangunan kelembagaan berbasis kinerja

KEBIJAKAN .

Kebijakan pembangunan dibidang kesatuan bangsa diarahkan untuk:

1. pengembangan nilai nilai kebangsaan dan multikulturalisme.
2. Peningkatan fasilitasi perangkat daerah dalam mengimplementasikan SAKIP

KONDISI YANG DIINGINKAN KEDEPAN

Rasa aman dan damai merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat .

Dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat dan rasa aman dan damai diperlukan kondisi sebagai berikut :

a. Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral berbangsa dan bernegara.
b. Terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan sosial dalam kebersamaan dan kemasyarakatan.
c. Terwujudnya sistem politik yang dapat mewujudkan proses peralihan kekuasaan secara demokratis, tertib dan damai.
d. Terwujudnya kewaspadaan masyarakat terhadap setiap ancaman yang timbul yang dapat mengganggu keamanan , ketertiban masyarakat.

Untuk mengetahui hasil eavaluasi Program dan kegiatan tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 2.1.

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari hasil evaluasi terhadap capaian target dalam RKPD tahun 2022 maupun terhadap capaian kinerja dalam RPJMD, beserta kerangka pendanaan bidang perhubungan, sebagaimana dirumuskan dalam prioritas pembangunan daerah yang terdapat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali 2021-2026 dan juga prioritas pembangunan daerah tahunan sebagai pedoman dan arahan bagi OPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. yang akan dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD, indikator kinerja kunci yang mengacu pada indikator RPJMD, SPM serta indikator Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis PP 8 Tahun 2008.

Secara umum terhadap usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Boyolali telah sesuai dengan prioritas pembangunan (rencangan awal RKPD) beserta target yang akan dicapai pada tahun 2024. sebagaimana terlihat pada :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Boyolali

OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesbangpol	Angka konflik yang ditangani	12 angka	97.200.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesbangpol	Angka konflik yang ditangani	12 angka	97.200.000	
I.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional danPenanganan Konflik Sosial	Badan Kesbangpol	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	12 bulan	97.200.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional danPenanganan Konflik Sosial	Badan Kesbangpol	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	12 bulan	97.200.000	
I.1.a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	Badan Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,	100 orang	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	Badan Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang	100 orang	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah			Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
I.1.b	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	97.200.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	97.200.000	
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesbangpol	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	50 %	641.040.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesbangpol	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	50	641.040.000	
II.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Badan Kesbangpol	Cakupan Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan	2 kegiatan	641.040.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Badan Kesbangpol	Cakupan Fasilitasi pengembangan nilai-nilai	2 kegiatan	641.040.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasiladan Karakter Kebangsaan		kebangsaan di setiap Kecamatan			Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasiladan Karakter Kebangsaan		wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan			
II.1.a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	107 orang	641.040.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	107 orang	641.040.000	
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesbangpol	Persentase penanganan potensi konflik keagamaan	50 persen	350.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesbangpol	Persentase penanganan potensi konflik keagamaan	40 persen	350.000.000	
III.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Badan Kesbangpol	Cakupan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan	12 bulan	350.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Badan Kesbangpol	Cakupan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan	12 bulan	350.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Ekonomi, Sosial, Dan Budaya			Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Ekonomi, Sosial, Dan Budaya			
III.1.a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	160 orang	350.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	160 orang	350.000.000	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesbangpol	Persentase Masyarakat yang paham terhadap pembinaan Ormas	32 %	1.838.200.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesbangpol	Persentase Masyarakat yang paham terhadap pembinaan Ormas	32 %	1.838.200.000	
IV.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Badan Kesbangpol	Cakupan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi	12 bulan	1.838.200.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Badan Kesbangpol	Cakupan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi	12 bulan	1.838.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Kemasyarakatan			Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Kemasyarakatan			
IV.1.a	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan Ormas dan ormas asing di daerah	170 orang	1.838.200.000	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan Ormas dan ormas asing di daerah	170 orang orang	1.838.200.000	
V	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesbangpol	Persentase penanganan fasilitasi bidang politik dalam negeri	83	38.333.588.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesbangpol	Persentase penanganan fasilitasi bidang politik dalam negeri	83	38.333.588.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Badan Kesbangpol	Cakupan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2 kegiatan	38.333.588.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Badan Kesbangpol	Cakupan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2 kegiatan	38.333.588.000	
V.1.a	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Badan Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	100 orang	38.333.588.000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Badan Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	100 orang	38.333.588.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kesbangpol	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart	100 persen	3.649.974.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kesbangpol	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart	100 persen	3.649.974.000	
VI,1	adiminstrasi keuangan perangkat daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Kebutuhan Penganggaran Gaji, TPP PNS dan Honorarium Non PNS	7 kegiatan	2.373.473.000	adiminstrasi keuangan perangkat daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Kebutuhan Penganggaran Gaji, TPP PNS dan Honorarium Non PNS	7 kegiatan	2.373.473.000	
VI.1.a	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan PNS	19 orang/ bulan	2.295.473.000	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan PNS	19 orang/ bulan	2.295.473.000	
VI.1.b	Penyediaan Administrasi	Badan Kesban	Jumlah Dokumen hasil penyediaan	12 Doku	78.000.000	Penyediaan Administrasi	Badan Kesban	Jumlah Dokumen hasil penyediaan	12 dokum	78.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Tugas ASN	gpol	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	men		Pelaksanaan Tugas ASN	gpol	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	en		
VI.1.c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	0	
VI.1.d	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12 dokumen	0	
VI.1.e	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	1 Laporan	0	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	1 Laporan	0	
VI.1.f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	0	
VI.1.g	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	2 dokumen	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	2 dokumen	0	
VI.2	Administrasi barang milik daerah SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah kegiatan administrasi barang milik daerah	1 kegiatan	0	Administrasi barang milik daerah SKPD	Badan Kesbangpol		1 kegiatan	0	
VI.2.a	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan	Badan Kesban	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan	1 lapora	0	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan	Badan Kesban	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan	1 lapora	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	barang milik daerah SKPD	gpol	penyusunan laporan barang milik daerah SKPD	n		barang milik daerah SKPD	gpol	penyusunan laporan barang milik daerah SKPD	n		
VI.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 kegiatan	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Badan Kesbangpol		1 kegiatan	0	
VI.3.a	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12 dokumen	0	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12 dokuemn	0	
VI.4	Administrasi Umum perangkat daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah	9 kegiatan	1.077.411.000	Administrasi Umum perangkat daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa dan Material Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 kegiatan	1.077.411.000	
VI.4.a	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	4 paket	3.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	4Paket	3.000.000	
VI.4.b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0 Paket	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI.4.c	Penyediaan peralatan rumah tangga	Badan Kesbangpol	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	3.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Badan Kesbangpol	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	3.000.000	
VI.4.d	Penyediaan bahan logistik kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	45.941.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	12 Paket	45.941.000	
VI.4.e	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Kesbangpol	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	94.629.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Kesbangpol	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	94.629.000	
VI.4.f	Penyediaan bahan / Material	Badan Kesbangpol	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	4 Paket	152.186.000	Penyediaan bahan / Material	Badan Kesbangpol	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	4 Paket	152.186.000	
VI.4.g	Fasilitasi kunjungan tamu	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 laporean	449.740.000	Fasilitasi kunjungan tamu	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan	449.740.000	
VI.4.h	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	328,915.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	328,915.000	
VI.4.i	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	13 Dokumen	0	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada	13 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								SKPD			
VI.5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 kegiatan	57.700.000	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 kegiatan	57.700.000	
VI.5.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	1.350.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	1.350.000	
VI.5.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	54.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	54.900.000	
VI.5.c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	4 laporan	1.450.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	4 Laporan	1.450.000	
VI.6	Pemeliharaan Barang milik daerahpenunjang urusan pemerintahan daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	3 kegiatan	141.390.000	Pemeliharaan Barang milik daerahpenunjang urusan pemerintahan daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Jenis Barang/peralatan milik daerah yang terpelihara	3 kegiatan	141.390.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI.6.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Kesbangpol	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	10 Unit	47.890.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Kesbangpol	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	10 Unit	47.890.000	
VI.6.b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 Unit	33.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 Unit	33.500.000	
VI.6.c	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	60.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	60.000.000	
VI.7	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Kegiatan	0	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Kegiatan	0	
VI.7.a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 Dokumen	0	
VI.7.b	Koordinasi dan Penyusunan	Badan Kesban	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang	1 Doku	0	Koordinasi dan Penyusunan	Badan Kesban	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang	1 Doku	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dokumen RKA-SKPD	gpol	disusun	men		Dokumen RKA-SKPD	gpol	disusun	men		
VI.7.c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	0	
VI.7.d	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	1 Dokumen	0	
VI.7.e	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	1 Dokumen	0	
VI.7.f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusu	15 Dokumen	0	
VI.7.g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	0	
	JUMLAH				44.910.002.000					44.910.002.000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sasaran Stratejik Badan Kesbangpol dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Adapun sasaran stratejik tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kohesifitas sosial masyarakat;
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan sasaran sasaran dimaksud dapat disusun program dan kegiatan sebagai berikut :

3. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL;

   Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional danPenanganan Konflik Sosial;

   Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
4. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

   Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasiladan Karakter Kebangsaan;

   Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
5. PROGRAM PEMBINAANAAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA;

   Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

   Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN;

   Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

   Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

7. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK;

   Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;

   Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

8. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;

   a. Kegiatan : adiminstrasi keuangan perangkat daerah;

      Sub Kegiatan :

      - Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
      - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

   b. Kegiatan : Administrasi barang milik daerah pada SKPD

      Sub Kegiatan :

      - Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD

   c. Kegiatan : Administrasi kepegawaian perangkat daerah

      Sub Kegiatan :

      - Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai

   d. Kegiatan : Administrasi Umum perangkat daerah

      Sub Kegiatan :

      - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan peralatan rumah tangga
      - Penyediaan bahan logistik kantor
      - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
      - Penyediaan bahan / Material
      - Fasilitasi kunjungan tamu
      - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
      - Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD

e. Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
   Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik daerahpenunjang urusan pemerintahan daerah
   Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

g. Kegiatan :
   Sub Kegiatan :
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Adapun Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 Kabupaten Boyolali, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.32.

Usulan program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Boyolali

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Nihil				
2					
3					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Dan Tugas Pokok Dan Fungsi OPD

Dalam rangka mengaktualisasikan otonomi daerah, memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Boyolali mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik. Dan untuk mewujudkan misi pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali, yaitu **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan sistem pemerintahan dan pemberantasan korupsi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat",** maka penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian daerah, membaiknya pelayanan masyarakat, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat eksistensi NKRI. Untuk itu perlu ditempuh langkah-langkah konsolidasi, revitalisasi, refungsionalisasi dan profesionalisasi secara sistematis, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan agar penyelenggaraan pembangunan daerah melalui konsep "Community Development" dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Semangat Reformasi.

Upaya reformasi birokrasi yang berbasis pada sistem kinerja dan kompetensi, penataan personalia birokrasi sebagai bagian integral, dan pembinaan personalia dengan sistem merit serta pemantapan mekanisme kesisteman lembaga, tetap aktual, relevan dan urgen. Pelaksanaan sistem pengawasan intern mutlak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan kepemerintahan yang baik. Dalam era reformasi dan otonomi daerah, terjadi reposisi peran pemerintah menjadi fasilitator, sedangkan masyarakat dan dunia usaha ditempatkan pada posisi pemeran utama pembangunan. Namun demikian, dalam masa transisi ini pemerintah masih tetap diharapkan peran besarnya dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong keberhasilan pembangunan masyarakat.

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Boyolali, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali menetapkan agenda pembangunan utama yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

   Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya dari sektor pendidikan formal tetapi juga ditempuh pada upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui lembaga pengembangan sumber daya manusia.

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung terciptanya penyelenggaraan program pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu kreativitas dan inovasi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan mempercepat tercapainya tataran pembangunan ekonomi yang lebih mandiri.

2. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pemberantasan Korupsi.

   Saat ini perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Upaya keras Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan selama kurun waktu terakhir telah berada pada arah yang benar. Namun demikian, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktek tata kelola pemerintahan antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

   Di sisi lain pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen yang penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu, perlu dilakukan reformasi birokrasi di seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, termasuk juga Badan Kesatuan Bangsa Dan Politk Kabupaten Boyolali. Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja yang sudah berjalan dan memberikan penekanan lebih lanjut dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan terarah dalam bentuk pengarustamaan anggaran dan kebijakan. Pengarusutamanan ini dimaksud untuk mengarahkan pencapaian tujuan meskipun dengan sumber daya yang minimal. Reformasi Birokrasi diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali dan penanggulangan korupsi. Langkah-langkah yang disebutkan di atas, akan dipercepat dengan memantapkan dan memperluas program percepatan reformasi birokrasi yang dikombinasikan dengan sejumlah program aksi lainnya.

   Untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu meningkatkan ketahanan nasional, yang dijabarkan dalam beberapa sasaran, yaitu :

   1. Meningkatnya kohesifitas sosial masyarakat;
   2. Meningkatnya Kapasitas kelembagaan perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali

1. Tujuan

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 adalah :

- Meningkatkan ketahanan social
- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik

2. Sasaran

Sasaran rencana pembangunan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali Tahun 2021 – 2026 adalah :

- Meningkatnya kohesifitas sosial masyarakat;
- Meningkatnya Kapasitas kelembagaan perangkat daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOYOLALI

4.1. Program Dan Kegiatan

Setiap Sasaran Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL;

   Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional danPenanganan Konflik Sosial;

   Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

   Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasiladan Karakter Kebangsaan;

   Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

3. PROGRAM PEMBINAANAAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA;

   Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

   Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN;

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK;

   Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;

   Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

6. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;

   a. Kegiatan : Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah;

      Sub Kegiatan :

      - Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
      - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

   b. Kegiatan : Administrasi Umum perangkat daerah

      Sub Kegiatan :

      - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan peralatan rumah tangga
      - Penyediaan bahan logistik kantor
      - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
      - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
      - Penyediaan bahan / Material
      - Fasilitasi kunjungan tamu
      - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

- Dokumen pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD

c. Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

d. Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik daerahpenunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

e. Kegiatan : Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Adapun rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Boyolali

OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (RP)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Angka konflik yang ditangani	Badan Kesbangpol	12	97.200.000			97.200.000		10	100.000.000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional danPenanganan Konflik Sosial	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesbangpol	12 bulan	97.200.000			97.200.000		12 bulan	100.000.000
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	Badan Kesbangpol	100 orang	0			0		100 orang	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (RP)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Kesbangpol	2 dokumen	97.200.000			97.200.000		2 dokumen	100.000.000
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Badan Kesbangpol	40	641.040.000			641.040.000		50	406.920.000
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasiladan Karakter Kebangsaan	Cakupan Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan	Badan Kesbangpol	2 kegiatan	641.040.000			641.040.000		2 kegiatan	406.920.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (RP)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	107 orang	641.040.000			641.040.000		107 orang	406.920.000
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penanganan potensi konflik keagamaan	Badan Kesbangpol	40	350.000.000			350.000.000		50	0
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesbangpol	12 bulan	350.000.000			350.000.000		12 bulan	0
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	Jumlah orang yang meningikiti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	Badan Kesbangpol	160 orang	350.000.000			350.000.000		160 orang	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (RP)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Masyarakat yang paham terhadap pembinaan Ormas	Badan Kesbangpol	24	1.838.200.000			1.838.200.000		32	0
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesbangpol	12 bulan	1.838.200.000			1.838.200.000		12 bulan	0
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas,	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas,	Badan Kesbangpol	170 orang	1.838.200.000			1.838.200.000		170 orang	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (RP)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase penanganan fasilitasi bidang politik dalam negeri	Badan Kesbang pol	83	38.333.588.000			38.333.588.000		83	47.954.922.000
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Cakupan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesbang pol	2 kegiatan	38.333.588.000			38.333.588.000		2 kegiatan	47.954.922.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (RP)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Badan Kesbangpol	100 orang	38.333.588.000			38.333.588.000		100 orang	47.954.922.000
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart	Badan Kesbangpol	100	3.649.974.000			2.908.890.000		100	2.156.625.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (RP)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
X.XX.01.2.02	adiminstrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah kegiatan adiminstrasi keuangan perangkat daerah	Badan Kesbangpol	7 kegiatan	2.373.473..000			2.404.646.000		7 kegiatan	1.690.881.000
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	19 orang	2.295.473.000			2.319.646.000		19 orang	1.620.681.000
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Badan Kesbangpol	12 dokumen	78.000.000			85.000.000		12 dokumen	70.200.000
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	Badan Kesbangpol	12 Dokumen	0			0		12 dokumen	0
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Akuntansi SKPD	Badan Kesbangpol	12 dokumen	0			0		12 dokumen	0
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan	Badan Kesbangpol	1 dokumen	0			0		1 dokumen	0
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	Badan Kesbang	18 lapo	0			0		18 lapora	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (RP)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	ran SKPD	pol	ran						n	
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	Badan Kesbangpol	2 bahan	0			0		2 bahan	0
X.XX.01.2.03	Administrasi barang milik daerah SKPD	Jumlah kegiatan Administrasi barang milik daerah SKPD	Badan Kesbangpol	1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	0
X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah SKPD	Badan Kesbangpol	1 laporan	0			0		1 laporan	0
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Badan Kesbangpol	1 kegiatan	0			0		1 kegiatan	0
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Badan Kesbangpol	12 Dokumen	0			0		12 Dokumen	0
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum perangkat daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	Badan Kesbangpol	9 kegiatan	1.077.411.000			1.077.411.000		9 kegiatan	311.954..000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (RP)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Badan Kesbangpol	4 paket	3.000.000			3.000.000		4 Paket	3.000.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Badan Kesbangpol	0 paket	0			0		0 paket	0
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Badan Kesbangpol	4 paket	3.000.000			3.000.000		4 Paket	3.000.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Badan Kesbangpol	12 paket	45.941.000			45.941.000		12 paket	40.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Badan Kesbangpol	4 paket	94.629.000			94.629.000		4 paket	30.000.000
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan bahan / Material	Jumlah paket bahan / Material yang disediakan	Badan Kesbangpol	4 paket	152.186.000			152.186.000		4 paket	25.000.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu	Badan Kesbangpol	4 Laporan	449.740.000			449.740.000		4 laporan	110.954.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Badan Kesbangpol	4 Laporan	328.915.000			328.915.000		4 laporan	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (RP)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.06.11	Dokumen pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Badan Kesbangpol	13 Dokumen	0			0		13 dokumen	0
X.XX.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesbangpol	3 kegiatan	57.700.000			57.700.000		3 kegiatan	60.900.000
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbangpol	12 Laporan	1.350.000			1.350.000		12 laporan	1.350.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Kesbangpol	12 laporan	54.900.000			54.900.000		12 laporan	58.100.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Badan Kesbangpol	12 laporan	1.450.000			1.450.000		12 Laporan	1.450.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang milik daerahpenunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerahpenunjang urusan pemerintahan daerah	Badan Kesbangpol	3 kegiatan	141.390.000			141.390.000		3 kegiatan	92.890..000
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Badan Kesbangpol	10 Unit	47.890.000			47.890.000		10 unit	22.890.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (RP)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lapangan										
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Badan Kesbangpol	30 Unit	33.500.000			33.500.000		30 unit	20.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Badan Kesbangpol	1 Unit	60.000.000			60.000.000		1 unit	50.000.000
X.XX.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan eveluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan eveluasi kinerja perangkat daerah	Badan Kesbangpol	7 Kegiatan	0			0		7 Kegiatan	0
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Badan Kesbangpol	2 dokumen	0			0		2 dokumen	0
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Badan Kesbangpol	1 dokumen	0			0		1 dokumen	0
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Badan Kesbangpol	1 dokumen	0			0		1 dokumen	0
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	Badan Kesbangpol	1 dokumen	0			0		1 dokumen	0
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen DPA	Badan	1	0			0		1	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (RP)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Perubahan-SKPD yang disusun	Kesbangpol	dokumen						dokumen	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	Badan Kesbangpol	12 laporan	0			0		12 laporan	0
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	4 dokumen	0			0		4 dokumen	0
		JUMLAH			44.910.002.000			44.910.002.000			50.618.467.000

BAB IV
P E N U T U P

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah , maka Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lain mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja (RENJA).

Penerapan semua ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan dapat mendukung terbitnya dokumen perencanaan yang berkualitas di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali.

Kiranya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi Jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya Tim Penyiapan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali Tahun 2024, atas terwujudnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini.

CC. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

KECAMATAN SELO

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Selo Tahun 2024 telah dapat diselesaikan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Kecamatan Selo mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik. Perwujudan dari komitmen tersebut, antara lain dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Selo yang merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selo Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Selo merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan Selo.

Penyusunan Renja Kecamatan Selo mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Penyusunan Renja Kecamatan Selo dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Selo tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Selo

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Selo Tahun 2024 ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SELO TAHUN 2022 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Selo Tahun 2022 dan Capaian Resntra Perangkat Daerah 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah 15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 31
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 33
4.1 Program dan Kegiatan .....

BAB V PENUTUP 42

DAFTAR TABEL

TABEL T-C.29 :	EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022	10
TABEL T-C.30 :	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI ….....…	16
TABEL T-C.31 :	RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI	22
TABEL T-C.32 :	DAFTAR RENCANA KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN SELO	29
TABEL T-C.33 :	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 KECAMATAN SELO	34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik. Perwujudan dari komitmen tersebut, antara lain dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Selo yang merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali dan Renstra Kecamatan Selo Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Selo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Selo untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Selo Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Penyusunan Renja Kecamatan Selo dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Selo tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Selo.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Selo dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

Dalam tahapan perumusan rancangan Renja OPD, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan OPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan

Renstra OPD;

4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal OPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
10. Penyempurnaan rancangan Renja OPD;
11. Pembahasan forum OPD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

Namun karena keterbatasan data dan adanya beberapa kesulitan dalam penyusunannya ada beberapa kegiatan tersebut yang tidak dapat digali secara maksimal.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor

050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
22. Rencana Strategis Kecamatan Selo Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah memberikan arah, kebijakan program serta prioritas kegiatan sebagai landasan kebijakan operasional Kecamatan Selo.

Tujuan disusunnya Renja Kecamatan Selo adalah terarahnya program serta prioritas kegiatan tahunan dengan capaian rencana strategis Kecamatan Selo melalui pembiayaan APBD Kabupaten yang dilengkapi dengan indikator capaian sebagai tolok ukur penilaian kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Selo Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Selo Tahun 2024; berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Selo Tahun 2022 dan

Capaian Renstra Kecamatan Selo, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Selo, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Selo, Review terhadap Rancangan Awal Kecamatan Selo.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi Program dan kegiatan

Bab V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
KECAMATAN SELO TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Selo Tahun 2022

Realisasi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Selo Tahun 2022 telah selesai seluruhnya. Dari pelaksanaan program / kegiatan tersebut, beberapa program / kegiatan telah mencapai target yang direncanakan dan ada yang belum memenuhi target.

Adapun realisasi anggaran tahun 2022 yang terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan, dianggarkan sebesar Rp. 2.655.105.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.628.992.000,00 (99%), dengan rincian realisasi belanja menurut program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1). Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp 1.947.141.664.,00 atau 99,22% dari target anggaran Rp 1.962.493.000,00
      2). Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terealisasi Rp 117.000.000,00 atau 100% dari target anggaran Rp 117.000.000,00
   b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1). Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi Rp.2.592.000,00 atau 99,68% dari target anggaran Rp.2.600.200,00
      2). Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga teralisasi Rp.2.889.500,00 atau 96,32% dari target anggaran Rp.3.000.000,00
      3). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasi Rp.38.281.304,00 atau 99,97% dari target anggaran Rp.38.292.900,00

4). Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terealisasi Rp12.438.000,00 atau 98,27% dari target anggaran Rp12.657.000,00

5). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material terealisasi Rp17.324.500,00 atau 99,00% dari target anggaran Rp17.499.900,00

6). Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu terealisasi Rp90.723.200.00,00 atau 96,60% dari target anggaran Rp91.250.000,00

7). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi Rp9.975.000,00 atau 99,75% dari target anggaran Rp10.000.000,00

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terealisasi Rp900.000,00 atau 100% dari target anggaran Rp900.000,00

2). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi Rp13.790.718,00 atau 85,90% dari target anggaran Rp18.958.000,00

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terealisasi Rp19.647.100.00,00 atau 95,83% dari target anggaran Rp20.500.000,00

2). Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya terealisasi Rp6.000.000.00,00 atau 100% dari target anggaran Rp6.000.000,00

3). Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terealisasi Rp49.727.670,00 atau 99,45% dari target anggaran Rp50.000.000,00

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1). Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya terealisasi Rp19.869.000,00 atau 99,35% dari target anggaran Rp 20.000.000,00

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
        1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum terealisasi Rp99.572.000,00 atau 99,57% dari target anggaran Rp100.000.000,00
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
        1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan terealisasi Rp24.850.000,00 atau 99,40% dari target anggaran Rp25.000.000,00
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
    a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
        1). Sub Kegiatan Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan terealisasi Rp 39.967.608,00 atau 99,92% dari target anggaran Rp 40.000.000,00
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
    a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
        1) Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional terealisasi Rp1.000.000,00 atau 100% dari target anggaran Rp1.000.000,00

Faktor-faktor pendukung tercapainya target.

a. Komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dan desa dalam melaksanakan dan menyelesaikan program/kegiatan
b. Kerjasama yang baik antara pemerintahan kecamatan dan Pemerintah Desa, serta seluruh UPT kecamatan.
c. Peran aktif kelompok sasaran program/kegiatan

Solusi/pemecahan masalah :

a. Evaluasi kinerja dan pencapaian target kinerja secara rutin;
b. Peningkatan komitmen dari seluruh pelaksana kegiatan untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan dengan baik;
c. Pengambilan keputusan secara cepat dan proporsional sesuai dengan kewenangan Kecamatan untuk mengatasi keadaan tanpa ketergantungan dengan Pemerintah Kabupaten;
d. Meningkatkan pengelolaan administrasi.
e. Identifikasi setiap permasalahan yang muncul dan disertai dengan penyelesaiannya.
f. Membangun komunikasi dua arah antara pengambil kebijakan dan pelaksana kegiatan;
g. Peningkatan jalinan kerjasama baik dengan instansi pemerintah lainnya di Tingkat Kecamatan dan Desa maupun dengan kelembagaan masyarakat yang ada.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)* Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah : Kecamatan Selo. Lembar : 1.

kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu n-2			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi renja PD tahun n-2	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatans/d tahun berjalan n-1	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	01					**KECAMATAN**									
7	01	01				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boyolali**	**Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Terpenuhi sesuai standar**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7	01	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Gaji dan tunjangan ASN, Gaji non ASN	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
7	01	01	2	02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	99,22	1 Tahun	1 Tahun	100
7	01	01	2	02	002	Penyediaan Administrasi Pelayanan Tugas ASN	Gaji PTT dan Tenaga Honorer sebanyak Orang	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
7	01	01	2	02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
7	01	01	2	02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
7	01	01	2	02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Penyediaan barang	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
7	01	01	2	02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100	18 Laporan	18 Laporan	100
7	01	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	001	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	98,68	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99,35	12 bulan	12 bulan	100

7	01	01	2	06	003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	96,97	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	004	Penyediaan bahan logistik kantor	Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	98,27	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	007	Penyediaan bahan / Material	Bahan/ Material	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99,00	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	008	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99,12	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99,75	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
7	01	01	2	07	010	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnnya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	99,72	1 Paket	1 Paket	100
7	01	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100
7	01	01	2	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99,93	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	09	009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan bangunan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	98,27	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	100	25 Kegiatan	25 Kegiatan	100
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100

7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunsn Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100	15 dokumen	15 dokumen	100
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	100
7	01	02			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu	435	255	85	85	100	86	86	100
7	01	02	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan**	Jumlah IMB yang dilayani	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang diusulkan	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	100	15 desa	15 desa	100
7	01	02	2	02		**Penyelenggaraan urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di Kecamatan yang terselenggara	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah sosialisasi pelayanan di kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100
7	01	02	2	03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana**	Jumlah sarana dan prasarana umum dalam kondisi baik	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
7	01	02	2	03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun dan dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	99,61	1 Unit	1 Unit	100
7	01	04			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	**100**	100	100	100	100	100	100	100
7	01	04	2	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah sarana dan prasarana pendukung ketentraman dan keteriban umum yang tersedia	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	2 kegiatan	100
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	99,92	1 kegiatan	1 kegiatan	100

7	01	05			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	**100**	100	100	100	100	100	100	100
7	01	05	2	01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
7	01	05	2	01	**01**	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	99,24	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
7	01	05	2	01	**04**	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	99,98	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	100	100	100	100	100	100	100
7	01	03	2	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Usulan Hasil Musdes yang diverifikasi	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	03	2	03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang laksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	3 kegiatan	3 kegiatan	100
7	01	03	2	03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100

7	01	03	2	03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah desa yang menerima bantuan / modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	100	15 desa	15 desa	100
7	01	06			**Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa**		Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	100	15 desa	15 desa	100
7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pedampingan administrasi dan keuangan desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	100	15 desa	15 desa	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan fungsinya, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pengoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan
- Penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan
- Pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, indikator yang menjadi target sasaran Kecamatan Selo dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
    a. Prosentase kejadian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang ditindaklanjuti, dapat terealiasi sebesar 100%.
    b. Cakupan kegiatan Hari Besar yang dilaksanakan dengan realisasi 0%.
    c. Tingkat ketepatan pengisian Kepala Desa/Perangkat Desa, dengan realisasi 100%.
    d. Persentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi realisasi 100%.
    e. Capaian pembayaran PBB dapat terealisasi sebesar 100,00%.
    f. Jumlah Rakor Muspika dapat terealisasi 100%.
    g. Nilai IKM Kecamatan dengan realisasi dengan nilai 82,72%
    h. Cakupan pengiriman Tim Olah Raga (sepak bola) lomba ke tingkat Kabupaten dengan realisasi 0%
    i. Cakupan PKK desa yang dibina dengan realisasi 100%
    j. Cakupan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya dengan realisasi 100%
    k. Jumlah dokumen Skala Prioritas Pembangunan dengan realisasi 100%
    l. Cakupan pemeliharaan jalan di kecamatan dengan realisasi 100%

    Secara detail hasil capaian terhadap indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel T-C.30

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Selo
Kabupaten Boyolali

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2) 2021	Tahun (thn n-1) 2022	Tahun (tnn n) 2023	Tahun (thn n+1) 2024	Tahun (thn n-2) 2021	Tahun (thn n-1) 2022	Tahun (tnn n) 2023	Tahun (thn n+1) 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	**Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah**			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	Terlaksananya pengiriman surat dinas			12 bln	12 bln			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
3	Tersedianya listrik dan internet			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
4	Terbayarnya pajak kendaraan dinas			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
5	Terlaksananya kebersihan kantor			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
6	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
7	Tersedianya alat tulis kantor			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
8	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
9	Tersedianya komponen listrik			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
10	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	
11	Tersedianya bahan bacaan surat kabar			12 bln	0	0	0	12 bln	0	0	0	
12	Tersedianya bahan bakar bagi kendaraan dinas			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
13	Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
14	Terlaksananya keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	

15	Terlaksananya kebersihan kantor			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
16	**Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah**			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
17	Terlaksananya pembangunan rumah dinas			1 unit	1 unit							
18	Terlaksananya penataan lingkungan kantor			1 kegiatan	1 kegiatan							
19	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor			12 bulan	12 bulan	12 bln	12 bln	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
20	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas			12 bulan	12 bulan	12 bln	12 bln	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
21	**Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah**			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
22	Tersusunnya dokumen LKjIP			1 dok	1 dok			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
23	Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun			1 dok	1 dok			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
24	**Cakupan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan**			**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**			**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	
25	Terlaksananya kegiatan patroli wilayah			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
26												
27	**Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, sosial, keuangan dan olah raga**			**2 kegiatan**	**2 kegiatan**			**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	
28	Terlaksananya fasilitasi kegiatan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan			10 desa	10 desa							
29	Terlaksananya fasilitasi kegiatan olah raga			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg		1 keg	1 keg	1 keg	
30	**Terlaksananya Rakor Muspika/ Perangkat Desa**			**12 bulan**	**12 bulan**			**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	
31	Terlaksananya rakor muspika			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
32	**Cakupan fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan/ Kelurahan**			**2 kegiatan**	**2 kegiatan**			**0 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	
33	Terlaksananya kegiatan memperingati HUT RI dan hari besar lainnya			2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	0 keg	2 keg	2 keg	2 keg	
34	Terlaksananya kegiatan keagamaan			1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	0 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	

35	**Terlaksananya pengisian perangkat desa/ kelurahan**			**10 desa**	**10 desa**	**10 desa**	**10 desa**	**10 desa**	**10 desa**	**10 desa**	**10 desa**	
	Terlaksananya monitoring pengisian perangkat desa			10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	
	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan			**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**			**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	
	Terlaksananya rakor organisasi perempuan			12 bulan	12 bulan	2 keg	2 keg	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan desa/ kelurahan			**10 desa**	**10 desa**	**10 desa**	**10 desa**	**10 desa**	**10 desa**	**10 desa**	**10 desa**	
	Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa			10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	
	Terlaksananya pembinaan administrasi desa			10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	
	Terlaksananya evaluasi penyusunan APB Desa			10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	
	Terlaksananya implementasi undang-undang desa			10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	
	Tersusunnya dokumen evaluasi kegiatan di kecamatan			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Tersusunnya dokumen laporan evaluasi RKPDes			2 dokumen	2 dokumen			0 dok	0 dok	0 dok	0 dok	
	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja			2 dokumen	2 dokumen			0 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
	Tersusunnya DSP usulan kegiatan kecamatan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Terlaksanaya fungsi layanan di Kecamatan			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Terlaksananya fungsi layanan di kecamatan			12 bulan	12 bulan	2 keg	2 keg	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 menetapkan visi yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu **" BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI" Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)**. Sebagai upaya untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Boyolali, yaitu :

a. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan.
b. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.
c. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional.
d. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
e. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Kecamatan Selo Kabupatan Boyolali mempunyai tugas pokok "Membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan". Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
b. Penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
c. Pengoordinasikan, pembinaan, fasilitasi dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali tersebut di atas adalah untuk mendukung :

Misi keempat, yaitu Boyolali Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih,

Efektif dan Terpercaya

Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Kualitas sumber daya manusia harus selalu ditingkatkan agar memiliki daya saing dengan daerah lain yang lebih maju. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia ditandai oleh terpenuhinya hak sosial masyarakat dengan cakupan akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemuda dan olah raga, serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh bidang pembangunan (Indek Ketimpangan Gender). Tujuan peningkatan kualitas pembangunan manusia selaras dengan *Sustainable Development Goals*: (i) tujuan ketiga yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia; (ii) tujuan keempat yakni menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang; (iii) tujuan kelima yakni menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan; (iv) tujuan kedelapan yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.

Sasaran yang akan diwujudkan dari tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Selo secara umum dapat dikatakan baik, hal ini bisa dilihat dari tingkat capaian kinerja terhadap indikator yang ditetapkan baik dalam IKK maupun IKU. Sebagian besar tingkat capaian telah mencapai target yang direncanakan.

Hal kritis yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pelayanan di Kecamatan Selo, adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang meliputi :

2.3.1. Peningkatan pemerintahan yang efektif, efisien yang ditandai dengan semakin sederhananya birokrasi serta pelayanan yang cepat, tepat dan akurat serta murah.

2.3.2. Peningkatan pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang ditandai dengan kepastian dan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi dan program/kegiatan untuk masyarakat.

2.3.3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan perekonomian masyarakat dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

2.3.4. Peningkatan sistem pengendalian keamanan lingkungan secara sinergis antara pemerintah dan masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2023, tidak tercantum rencana kegiatan yang ada di Kecamatan, sehingga tidak bisa dibandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Hasil analisis kebutuhan Kecamatan Selo dapat dilihat dalam tabel T-C.31.

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah: Kecamatan Selo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				2.449.515.000	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**				2.469.515.000	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Selo	Gaji dan tunjangan ASN, Gaji non ASN	1 th	2.150.111.000	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec Selo	Gaji dan tunjangan ASN, Gaji non ASN	1 th	2.150.111.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Selo	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 th	2.020.111.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Selo	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 th	2.020.111.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Selo	Terbayarnya Upah Tenaga Kontrak	1 th	130.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Selo	Terbayarnya Upah Tenaga Kontrak	1 th	130.000.000	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec Selo	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 keg	0	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec Selo	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 keg	0	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec Selo	Jumlah Koordinasi dan Akuntasni SKPD	12 keg	0	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec Selo	Jumlah Koordinasi dan Akuntasni SKPD	12 keg	0	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec Selo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	18 kali	0	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec Selo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	18 kali	0	

	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec Selo	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan	2	0	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec Selo	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan	2	0	
	Kegiatan : Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Selo		12 bulan	218.416.000	Kegiatan : Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Selo		12 bulan	218.416.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Selo	Tersedianya komponen listrik	12 bulan	3.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Selo	Tersedianya komponen listrik	12 bulan	3.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Selo	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	3.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Selo	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	3.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Selo	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Selo	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	30.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Selo	Tersedianya bahan bakar bagi kendaraan dinas	12 bulan	39.991.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Selo	Tersedianya bahan bakar bagi kendaraan dinas	12 bulan	39.991.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Selo	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Selo	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec Selo	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	12 bulan	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec Selo	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	12 bulan	0	
	Penyediaan Bahan/ Material	Kec Selo	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	15.625.000	Penyediaan Bahan/ Material	Kec Selo	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	15.625.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Selo	Tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu	12 bulan	86.300.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Selo	Tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu	12 bulan	86.300.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Selo	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	30.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Selo	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	30.000.000	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Selo		12 bulan	19.058.000	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Selo		12 bulan	19.058.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat	Kec Selo	Tersedianya materai	12 bulan	1.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat	Kec Selo	Tersedianya materai	12 bulan	1.000.000	

	Menyurat					Menyurat					
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Selo	Tersedianya daya Listrik dan air	12 bulan	17.100.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Selo	Tersedianya daya Listrik dan air	12 bulan	17.100.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Kec Selo	Tersedianya buku cek dan jasa kliring	12 bulan	958.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Kec Selo	Tersedianya buku cek dan jasa kliring	12 bulan	958.000	
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kec Selo		12 bulan	61.930.000	Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kec Selo		12 bulan	81.930.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Selo	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas	12 bulan	20.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Selo	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan dinas	12 bulan	20.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainya	Kec Selo	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	5.930.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainya	Kec Selo	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	5.930.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainya	Kec Selo	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	36.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainya	Kec Selo	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	36.000.000	
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Selo		0 kegiatan	0	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec Selo		0 kegiatan	0	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Kec Selo	Terwujudnya pengadaan mebel	0 kegiatan	0	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Kec Selo	Terwujudnya pengadaan mebel	0 kegiatan	0	
	Sub Kegiatan : Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec Selo	Terwujudnya peralatan dan mesin	0 kegiatan	0	Sub Kegiatan : Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec Selo	Terwujudnya peralatan dan mesin	0 kegiatan	0	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Selo	Terwujudnya Gedung kantor atau bangunan	0 kegiatan	0	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Selo	Terwujudnya Gedung kantor atau bangunan lainnya	0 kegiatan	0	

			lainnya								
	Sub Kegiatan : Pengadaan Prasarana dan Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Selo	Terwujudnya prasarana dan sarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	0 kegiatan	0	Sub Kegiatan : Pengadaan Prasarana dan Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Selo	Terwujudnya prasarana dan sarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	0 kegiatan	0	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec Selo	Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu		1.039.224.000	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Kec Selo	Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu		1.039.224.000	
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Selo	Jumlah kegiatan pelayanan di kecamatan	0 keg	0	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Selo	Jumlah kegiatan pelayanan di kecamatan	0 keg	0	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Selo	Jumlah desa yang dilakukan pendataan IMB	10 Desa	0	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Selo	Jumlah desa yang dilakukan pendataan IMB	10 Desa	0	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Kec Selo	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di kecamatan yang terselenggara dengan baik	0 keg	0	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Kec Selo	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di kecamatan yang terselenggara dengan baik	0 keg	0	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Selo	Jumlah sosialisasi pelayanan di kecamatan	0 keg	0	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Selo	Jumlah sosialisasi pelayanan di kecamatan	0 keg	0	
	Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana	Kec Selo	Jumlah prasarana dan sarana umum yang dibangun dan dipelihara	1 keg	1.039.224.000	Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana	Kec Selo	Jumlah prasarana dan sarana umum yang dibangun dan dipelihara	1 keg	1.039.224.000	
	Sub Kegiatan : Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kec Selo	Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun dan dipelihara	1 keg	1.039.224.000	Sub Kegiatan : Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kec Selo	Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun dan dipelihara	1 keg	1.039.224.000	

	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec Selo	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	1 keg	0	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Kec Selo	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	1 keg	0	
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Selo	Jumlah kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban lingkungan	1 keg	0	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Selo	Jumlah kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban lingkungan	1 keg	0	
	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Selo	Jumlah kegiatan hibah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 keg	0	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Selo	Jumlah kegiatan hibah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 keg	0	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec Selo	**Prosentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**1 kegiatan**	**72.500.000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	Kec Selo	**Prosentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**1 kegiatan**	**72.500.000**	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Selo	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan imum sesuai penugasan kepala daerah	4 Keg	72.500.000	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Selo	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan imum sesuai penugasan kepala daerah	4 Keg	72.500.000	
	Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Kec Selo	Terlaksanya kegatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	2 keg	43.100.000	Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Kec Selo	Terlaksanya kegatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	2 keg	43.100.000	

	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
	Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Selo		2 Keg	29.400.000	Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Selo		2 Keg	29.400.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec Selo	Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	1 th	75.000.000	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Kec Selo	Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	1 th	75.000.000	
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec Selo	Jumlah usulan hasil musdes yang diverifikasi	1 th	75.000.000	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec Selo	Jumlah usulan hasil musdes yang diverifikasi	1 th	75.000.000	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Selo	Jumlah dokumen daftar skala prioritas tingkat kecamatan	1 Dok	0	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Selo	Jumlah dokumen daftar skala prioritas tingkat kecamatan	1 Dok	0	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Selo	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 keg	75.000.000	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Selo	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 keg	75.000.000	
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec Selo	Jumlah kegiatan Lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	3 keg	0	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec Selo	Jumlah kegiatan Lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	3 keg	0	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec Selo	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)	1 keg	0	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec Selo	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)	1 keg	0	

	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec Selo	Jumlah desa yang menerima bantuan/modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan	10 desa	0	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec Selo	Jumlah desa yang menerima bantuan/modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan	10 desa	0	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Selo	Presentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	100	0	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec Selo	Presentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	100	0	
	Kegiatan : Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Selo	Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa	10 desa	0	Kegiatan : Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Selo	Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa	10 desa	0	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Selo	Jumlah desa yang terfasilitasi pendampingan administrasi dan keuangan desa	10 desa	0	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Selo	Jumlah desa yang terfasilitasi pendampingan administrasi dan keuangan desa	10 desa	0	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain melakukan menggali permasalahan/kebutuhan dari internal kantor, Kecamatan Selo juga menjaring aspirasi atau usulan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun LSM, yang langsung ditujukan ke Kecamatan Selo berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Desa dan Kecamatan. Berdasarkan atas hasil Musrenbang baik di Desa maupun Kecamatan, usulan dari masyarakat terkait dengan pelayanan/tugas pokok fungsi di Kecamatan Selo sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah : Kecamatan Selo

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Anggaran	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan pariwisata	Dukuh Klakah Ngisor, Dukuh Bangunsari, Dukuh Sumber, Dukuh Bakalan (Desa Klakah)	8.000.000.000	4 dusun/dukuh	Bidang Ekonomi
2	Bantuan kelompok tani	Desa Jeruk	800.000.000	1 desa	Bidang Ekonomi
3	Bantuan bibit (bawang merah, kentang)	Desa Suroteleng	2.500.000	1 Ls	Bidang Ekonomi
4	Peningkatan fasilitas kesehatan desa	Desa Jeruk	100.000.000	1 desa	Bidang Pemsosbud
5	Bantuan alat kesenian	Desa Tlogolele	80.000.000	8 kelompok	Bidang Pemsosbud
6	Peningkatan SDM Pendidik PAUD	Desa Samiran	25.000.000	1 kegiatan	Bidang Pemsosbud
7	Pengadaan jamban keluarga sehat dan honor kader	Desa Selo	250.000.000	30 unit	Bidang Pemsosbud

	posyandu, PKK dan Posdaya				
8	Bantuan difabel	Desa Senden	100.000.000	1 kegiatan	Bidang Pemsosbud
9	Pembangunan selokan dan talud jalan kabupaten	Dukuh Ngapu-Sabrang Desa Tlogolele	500.000.000	2 km	Bidang Infrastruktur
10	Rehab air bersih dari Tuk Babon	Desa Suroteleng	500.000.000	1 paket	Bidang Infrastruktur
11	Pembangunan jalan menuju Embung Manajar	Desa Samiran	2.000.000.000	1.500 m	Bidang Infrastruktur
12	Pembangunan Jalur Usaha Tani	Desa Jrakah	800.000.000	1 desa	Bidang Infrastruktur
13	Pembuatan embung desa	Desa Selo	1.000.000.000	1 desa	Bidang Infrastruktur
14	Pembangunan Gedung serba guna	Desa Tarubatang	800.000.000	1 desa	Bidang Infrastruktur
15	Peningkatan pariwisata	Desa Lencoh	500.000.000	1 kegiatan	Bidang Infrastruktur

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan, yang paling relevan adalah reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Prioritas pembangunan tersebut telah menjadi arah tujuan, sasaran dalam menyusun program dan kegiatan di Kecamatan Selo.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan tersebut akan dituangkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Penjabaran tujuan dalam Renja merupakan turunan dari Renstra berdasarkan pada misi yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional
4. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi organisasi. Adapun rincian sasaran tersebut sebagai berikut :

a. Tujuan 1. : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas, anti KKN, responsif dan akuntabel, dijabarkan dengan sasaran sebagai berikut :
   1). Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
   2). Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel
b. Tujuan 2. : Mewujudkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial, dijabarkan dengan sasaran

sebagai berikut :

1). Terwujudnya masyarakat yang tertib, dan aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial

c. Tujuan 3. : Meningkatkan kualitas pembangunan manusia mendukung produktivitas dan daya saing daerah, dijabarkan dengan sasaran sebagai berikut :

1). Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat

d. Tujuan 4. : Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk daya saing dan kesejahteraan daerah, dijabarkan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Terpenuhinya infrastruktur dasar

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Selo Tahun 2023 merupakan penjabaran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Uraian tentang program dan kegiatan di Kecamatan Selo dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, sebagai berikut :
   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
   b. Peningkatan Pelayanan Publik
   c. Peningkatan Kesejateraan Rakyat
   d. Kondisi sarana prasrana gedung kantor
2. Rekapitulasi program dan kegiatan :
   a. Jumlah program dan kegiatan Kecamatan Selo terdiri dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan
   b. Lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kecamatan, beberapa kegiatan yang berlokasi di desa yaitu :
      - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota
      - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
      - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
   c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar : Rp3.636.239.000,00
3. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan, yaitu sebagai berikut:

Detail rencana program dan kegiatan Kecamatan Selo Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel T-C.33

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah : Kecamatan Selo.

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								3,636,239,000					3,636,239,000
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								2,449,515,000					2,449,515,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								2,150,111,000					2,150,111,000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji ASN Kecamatan Selo	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kelurahan	100 persen	17 Orang/bulan	1 tahun	2,020,111,000			Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	2,020,111,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	terbayarnya gaji ASN Kecamatan Selo	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kelurahan	100 persen	12 Dokumen	1 tahun	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	130,000,000

							Tugas ASN										
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								218,416,000				218,416,000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi sesuai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	tercapainya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kelurahan	12 bulan 100 persen	1 Paket	12 bulan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	12 bulan 100 persen	3,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyedia Peralatan Kantor	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi sesuai	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	tercapainya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kelurahan	12 bulan 100 persen	1 Paket	12 bulan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	12 bulan 100 persen	30,00,.000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi sesuai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	tercapainya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kelurahan	12 bulan 100 persen	2 Paket	12 bulan	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	12 bulan 100 persen	3,500,000

7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi sesuai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	tercapainya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kelurahan	12 bulan 100 persen	12 Paket	12 bulan	39,991,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	12 bulan 100 persen	39,991,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi sesuai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	tercapainya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kelurahan	12 bulan 100 persen	3 Paket	12 bulan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	12 bulan 100 persen	10,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi sesuai	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	tercapainya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kelurahan	12 bulan 100 persen	3 Paket	12 bulan	15,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	12 bulan 100 persen	15,625,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi sesuai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	tercapainya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan 100 persen	5 Laporan	12 bulan	86,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	12 bulan 100 persen	86,300,000

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi sesuai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tercapainya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kelurahan	12 bulan 100 persen	5 Laporan	12 bulan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	12 bulan 100 persen	30,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**19,058,000**					**19,058,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kelurahan	100 persen	2 Laporan	12 bulan	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	1,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	12 bulan	17,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	17,100,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kelurahan	100 persen	3 Laporan	12 bulan	958,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	958,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**61,930,000**					**61,930,000**

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kelurahan	100 persen	16 Unit	12 bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	20,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kelurahan	100 persen	24 Unit	12 bulan	5,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	5,930,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kelurahan	100 persen	1 Unit	12 bulan	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	36,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**1,039,224,000**					**1,039,224,000**

7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								**1,039,224,000**					**1,039,224,000**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	prosentase layanan publik kecamatan tepat waktu	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	jumlah prasarana dan sarana umum yang dibangun dan dipelihara	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kelurahan	86 nilai	2 Dokumen	1 kegiatan	1,039,224,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase layanan publik kecamatan tepat waktu	86 nilai	1,039,224,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**75,000,000**					**75,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**75,000,000**					**75,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	terlapornya dokumen Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kelurahan	100 persen	2 Laporan	1 dokumen	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 persen	75,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**72,500,000**					**72,500,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**72,500,000**					**72,500,000**

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kelurahan	100 persen	100 Orang	2 kegiatan	43,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 persen	43,100,000

7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	Kab. Boyolali, Selo, Semua Kelurahan	100 persen	100 Orang	2 kegiatan	29,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 persen	29,400,000
											TOTAL	**3,636,239,000**					**2,636,239,000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan rencana target capaian kinerja yang diinginkan untuk 1 tahun mendatang. Renja ini memuat berbagai kebutuhan yang berkaitan secara langsung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selo, yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Perumusan program dan kegiatan ini, mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai disertai dengan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Realisasi renja ini sangat tergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Sebagaimana tujuan renja ini yaitu “terarahnya program serta prioritas kegiatan tahunan dengan capaian rencana strategis Kecamatan Selo melalui pembiayaan APBD Kabupaten yang dilengkapi dengan indikator capaian sebagai tolak ukur penilaian kinerja”, maka renja ini tidak akan berarti banyak jika tidak dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan tidak dilaksanakanan sebagaimana mestinya. Oleh karena masih diperlukan komitmen yang kuat oleh seluruh komponen dalam rangka melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi secara terus-menerus sehingga renja ini dapat menjadi sarana dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Selo 2021-2026.

DD. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

KECAMATAN CEPOGO

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cepogo Tahun 2024 telah dapat diselesaikan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Kecamatan Cepogo mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik. Perwujudan dari komitmen tersebut, antara lain dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Cepogo yang merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cepogo Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Cepogo merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan Cepogo.

Penyusunan Renja Kecamatan Cepogo mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Penyusunan Renja Kecamatan Cepogo dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cepogo tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Cepogo.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cepogo Tahun 2024 ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL 4

BAB I PENDAHULUAN 5

A. Latar Belakang 5

B. Landasan Hukum 6

C. Maksud dan Tujuan 8

D. Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CEPOGO TAHUN 2022 10

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cepogo Tahun 2022 dan Capaian Resntra Perangkat Daerah 10

B. Analisis Kinerja Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah 20

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 26

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 28

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 43

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 46

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 46

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 46

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 47

A. Program dan Kegiatan .....

BAB V PENUTUP 58

DAFTAR TABEL

TABEL T-C.29 :	EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022	14
TABEL T-C.30 :	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI ….....…	22
TABEL T-C.31 :	RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI	29
TABEL T-C.32 :	DAFTAR RENCANA KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN CEPOGO	43
TABEL T-C.33 :	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 KECAMATAN CEPOGO	48

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik. Perwujudan dari komitmen tersebut, antara lain dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Cepogo yang merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali dan Renstra Kecamatan CepogoTahun 2021-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Cepogo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Cepogo untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cepogo Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Penyusunan Renja Kecamatan Cepogo dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cepogo tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Cepogo.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cepogo dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

Dalam tahapan perumusan rancangan Renja OPD, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan OPD;

3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal OPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
10. Penyempurnaan rancangan Renja OPD;
11. Pembahasan forum OPD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

Namun karena keterbatasan data dan adanya beberapa kesulitan dalam penyusunannya ada beberapa kegiatan tersebut yang tidak dapat digali secara maksimal.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
22. Rencana Strategis Kecamatan CepogoTahun 2021-2026.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah memberikan arah, kebijakan program serta prioritas kegiatan sebagai landasan kebijakan operasional Kecamatan Cepogo.

Tujuan disusunnya Renja Kecamatan Cepogoadalah terarahnya program serta prioritas kegiatan tahunan dengan capaian rencana strategis Kecamatan Cepogomelalui pembiayaan APBD Kabupaten yang dilengkapi dengan indikator capaian sebagai tolok ukur penilaian kinerja.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Cepogo Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan CepogoTahun 2024; berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan CepogoTahun 2022 dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal OPD.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi Program dan kegiatan

Bab V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
KECAMATAN CEPOGO TAHUN 2022

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cepogo Tahun 2022

Realisasi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan CepogoTahun 2022 telah selesai seluruhnya. Dari pelaksanaan program / kegiatan tersebut, beberapa program / kegiatan telah mencapai target yang direncanakan dan ada yang belum memenuhi target.

Adapun realisasi anggaran tahun 2022 yang terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan, dianggarkan sebesar Rp 2.927.324.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.898.739.639,00 (99,02%) dengan rincian realisasi belanja menurut program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1). Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp 1.975.730.091,00 atau 99,15% dari target anggaran Rp 1.992.581.000,00
      2). Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terealisasi Rp 117.000.000,00 atau 100% dari target anggaran Rp 117.000.000,00
   b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1). Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi Rp 1.973.247,00 atau 98,66% dari target anggaran Rp 2.000.000,00
      2). Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga teralisasi Rp 2.957.096,00 atau 98,57% dari target anggaran Rp 3.000.000,00
      3). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasi Rp 34.988.945,00 atau 99,97% dari target anggaran Rp 35.000.000,00
      4). Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terealisasi Rp 14.772.857,00 atau 96,76% dari target anggaran Rp 15.268.000,00

5). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material terealisasi Rp 18.093.803,00 atau 98,52% dari target anggaran Rp 18.366.000,00

6). Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu terealisasi Rp 163.349.400,00 atau 99,94% dari target anggaran Rp 163.450.000,00

7). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi Rp 17.898.103,00 atau 94,70% dari target anggaran Rp 18.900.000,00

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terealisasi Rp 1.500.000,00 atau 100% dari target anggaran Rp 1.500.000,00

2). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi Rp 14.271.927,00 atau 65,49% dari target anggaran Rp 21.793.000,00

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terealisasi Rp 48.371.862,00 atau 99,94% dari target anggaran Rp 48.400.000,00

2). Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya terealisasi Rp 6.999.850,00 atau 100% dari target anggaran Rp 7.000.000,00

3). Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terealisasi Rp 20.868.000,00 atau 98,27% dari target anggaran Rp 21.235.000,00

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1). Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya terealisasi Rp 29.681.400,00 atau 99,72% dari target anggaran Rp 29.766.000,00

2). Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terealisasi Rp 28.582.500,00 atau 99,37% dari target anggaran Rp 28.765.000,00

3). Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum terealisasi Rp 199.098.000,00 atau 99,55% dari target anggaran Rp 200.000.000,00

4). Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat terealisasi Rp 24.900.000,00 atau 99,60% dari target anggaran Rp 25.000.000,00

5). Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Sub Kegiatan Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan terealisasi Rp 39.967.608,00 atau 99,92% dari target anggaran Rp 40.000.000,00

6). Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

1) Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia terealisasi Rp 71.951.050,00 atau 99,24% dari target anggaran Rp 72.500.000,00

2) Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional terealisasi Rp 65.783.900,00 atau 99,98% dari target anggaran Rp 65.800.000,00

Faktor-faktor pendukung tercapainya target.

a. Komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dan desa dalam melaksanakan dan menyelesaikan program/kegiatan

b. Kerjasama yang baik antara pemerintahan kecamatan dan Pemerintah Desa, serta seluruh UPT kecamatan.
c. Peran aktif kelompok sasaran program/kegiatan

Solusi/pemecahan masalah :

a. Evaluasi kinerja dan pencapaian target kinerja secara rutin;
b. Peningkatan komitmen dari seluruh pelaksana kegiatan untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan dengan baik.
c. Pengambilan keputusan secara cepat dan proporsional sesuai dengan kewenangan Kecamatan untuk mengatasi keadaan tanpa ketergantungan dengan Pemerintah Kabupaten.
d. Meningkatkan pengelolaan administrasi.
e. Identifikasi setiap permasalahan yang muncul dan disertai dengan penyelesaiannya.
f. Membangun komunikasi dua arah antara pengambil kebijakan dan pelaksana kegiatan.
g. Peningkatan jalinan kerjasama baik dengan instansi pemerintah lainnya di Tingkat Kecamatan dan Desa maupun dengan kelembagaan masyarakat yang ada.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)* Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah : Kecamatan Cepogo.

kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu n-2			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi renja PD tahun n-2	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatans/d tahun berjalan n-1	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	01					**KECAMATAN**									
7	01	01				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boyolali**	**Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Terpenuhi sesuai standar**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7	01	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Gaji dan tunjangan ASN, Gaji non ASN	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
7	01	01	2	02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	99,15	1 Tahun	1 Tahun	100
7	01	01	2	02	002	Penyediaan Administrasi Pelayanan Tugas ASN	Gaji PTT dan Tenaga Honorer sebanyak Orang	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
7	01	01	2	02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
7	01	01	2	02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
7	01	01	2	02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Penyediaan barang	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
7	01	01	2	02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100	18 Laporan	18 Laporan	100

7	01	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	001	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	98,66	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	98,57	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	004	Penyediaan bahan logistik kantor	Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99,97	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	96,76	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	007	Penyediaan bahan / Material	Bahan/ Material	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	98,52	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	008	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99,94	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	94,70	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
7	01	01	2	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99,72	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	07	010	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnnya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	99,37	1 Paket	1 Paket	100
7	01	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100

7	01	01	2	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99,94	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	09	009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan bangunan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	98,27	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	100	25 Kegiatan	25 Kegiatan	100
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunsn Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100	15 dokumen	15 dokumen	100
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	100
7	01	02			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu	435	255	85	85	100	86	86	100
7	01	02	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan**	Jumlah IMB yang dilayani	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang diusulkan	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	100	15 desa	15 desa	100
7	01	02	2	02		**Penyelenggaraan urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit**	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di Kecamatan yang terselenggara	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100

						Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan									
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah sosialisasi pelayanan di kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100
7	01	02	2	03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana**	Jumlah sarana dan prasarana umum dalam kondisi baik	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
7	01	02	2	03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun dan dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	99,55	1 Unit	1 Unit	100
7	01	04			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	**100**	100	100	100	100	100	100	100
7	01	04	2	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah sarana dan prasarana pendukung ketentraman dan keteriban umum yang tersedia	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	2 kegiatan	100
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	99,92	1 kegiatan	1 kegiatan	100
7	01	05			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	**100**	100	100	100	100	100	100	100
7	01	05	2	01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
7	01	05	2	01	**01**	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	99,24	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100

7	01	05	2	01	**04**	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	99,98	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	100	100	100	100	100	100	100
7	01	03	2	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Usulan Hasil Musdes yang diverifikasi	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	03	2	03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang laksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	3 kegiatan	3 kegiatan	100
7	01	03	2	03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100
7	01	03	2	03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah desa yang menerima bantuan / modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	100	15 desa	15 desa	100
7	01	06			**Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa**		Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	100	15 desa	15 desa	100

7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pedampingan administrasi dan keuangan desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	100	15 desa	15 desa	100

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan fungsinya, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pengoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan
- Penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan
- Pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, indikator yang menjadi target sasaran Kecamatan Cepogo dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
   a. Sasaran Strategis Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan Indikator Kinerja Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Formulasi Hasil Perhitungan Survai Masyarakat. Adapun target Kinerja pada tahun 2022 82,11% dengan realisasi capaian 100%. Meliputi Program/Kegiatan ;
      - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Capaian Realisasi Kinerja 100%.
      - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian Realisasi Kinerja 100%.
      - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Capaian Realisasi Kinerja 100%.
      - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah Capian Realisasi Kinerja 100%.
      - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan

kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Capaian Realisasi Kinerja 100%.

b. Sasaran Strategis Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai Sakip, Formulasi Perhitungan Sumber Data dari Hasil Evaluasi dari Inspektorat Daerah. Target Kinerja tahun 2022 80% dengan realisasi Capaian 99,88%.
Meliputi Program/Kegiatan ;

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Realisasi Capaian Kinerja 100%.
    2. Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi Capaian Kinerja 100%.
    3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi Capaian Kinerja 100%.
    4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi Capaian Kinerja 100%.
    5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi Capaian Kinerja 100%.

Secara detail hasil capaian terhadap indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel T-C.30

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cepogo
Kabupaten Boyolali

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2) 2021	Tahun (thn n-1) 2022	Tahun (tnn n) 2023	Tahun (thn n+1) 2024	Tahun (thn n-2) 2021	Tahun (thn n-1) 2022	Tahun (tnn n) 2023	Tahun (thn n+1) 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A.	**Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah**			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Terlaksananya pengiriman surat dinas			12 bln	12 bln			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
2	Tersedianya listrik dan internet			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
3	Terbayarnya pajak kendaraan dinas			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
4	Terlaksananya kebersihan kantor			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
5	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
6	Tersedianya alat tulis kantor			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
7	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
8	Tersedianya komponen listrik			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
9	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	
10	Tersedianya bahan bakar bagi kendaraan dinas			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
11	Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	

12	Terlaksananya keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
13	Terlaksananya kebersihan kantor			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
B.	**Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah**			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Terlaksananya penataan lingkungan kantor			1 kegiatan	1 kegiatan							
2	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor			12 bulan	12 bulan	12 bln	12 bln	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
3	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas			12 bulan	12 bulan	12 bln	12 bln	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
C.	**Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah**			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Tersusunnya dokumen LKjIP			1 dok	1 dok			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
2	Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun			1 dok	1 dok			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
D.	**Cakupan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan**			**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**			**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	
1	Terlaksananya kegiatan patroli wilayah			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
E.	**Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, social.**			**2 kegiatan**	**2 kegiatan**			**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	
1	Terlaksananya fasilitasi kegiatan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan			15 desa	15 desa							
2	Terlaksananya fasilitasi kegiatan bantuan hibah			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg		1 keg	1 keg	1 keg	
F.	**Terlaksananya Rakor Muspika/ Perangkat Desa**			**12 bulan**	**12 bulan**			**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	
1	Terlaksananya rakor muspika			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	

G.	**Cakupan fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan/ Kelurahan**			**2 kegiatan**	**2 kegiatan**			**0 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	
1	Terlaksananya kegiatan memperingati HUT RI dan hari besar lainnya			2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	0 keg	2 keg	2 keg	2 keg	
2	Terlaksananya kegiatan keagamaan			1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	0 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	
H.	**Terlaksananya pengisian perangkat desa/ kelurahan**			**15 desa**	**15 desa**	**15 desa**	**15 desa**	**15 desa**	**15 desa**	**15 desa**	**15 desa**	
1	Terlaksananya monitoring pengisian perangkat desa			15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	
I.	**Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan**			**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**			**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	
1	Terlaksananya rakor organisasi perempuan			12 bulan	12 bulan	2 keg	2 keg	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
J.	**Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan desa/ kelurahan**			**15 desa**	**15 desa**	**15 desa**	**15 desa**	**15 desa**	**15 desa**	**15 desa**	**15 desa**	
1	Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa			15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	
2	Terlaksananya pembinaan administrasi desa			15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	
3	Terlaksananya evaluasi penyusunan APB Desa			15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	
4	Terlaksananya implementasi undang-undang desa			15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	
K.	**Tersusunnya dokumen evaluasi kegiatan di kecamatan**			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Tersusunnya dokumen laporan evaluasi RKPDes			2 dokumen	2 dokumen			0 dok	0 dok	0 dok	0 dok	
2	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja			2 dokumen	2 dokumen			0 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
3	Tersusunnya DSP usulan kegiatan kecamatan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

L.	**Terlaksanaya fungsi layanan di Kecamatan**			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Terlaksananya fungsi layanan di kecamatan			12 bulan	12 bulan	2 keg	2 keg	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 menetapkan visi yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu **" BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI" Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)**. Sebagai upaya untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Boyolali, yaitu :

a. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan.
b. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.
c. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional.
d. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
e. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Kecamatan CepogoKabupatan Boyolali mempunyai tugas pokok “Membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan”. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
b. Penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
c. Pengoordinasikan, pembinaan, fasilitasi dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali tersebut di atas adalah untuk mendukung :

Misi keempat, yaitu Boyolali Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Kualitas sumber daya manusia harus selalu ditingkatkan agar memiliki daya saing dengan daerah lain yang lebih maju. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia ditandai oleh terpenuhinya hak sosial masyarakat dengan cakupan akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemuda dan olah raga, serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh bidang pembangunan (Indek Ketimpangan Gender). Tujuan peningkatan kualitas pembangunan manusia selaras dengan *Sustainable Development Goals*: (i) tujuan ketiga yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia; (ii) tujuan keempat yakni menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang; (iii) tujuan kelima yakni menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan; (iv) tujuan kedelapan yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.

Sasaran yang akan diwujudkan dari tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Cepogo secara umum dapat dikatakan baik, hal ini bisa dilihat dari tingkat capaian kinerja terhadap indikator yang ditetapkan baik dalam IKK maupun IKU. Sebagian besar tingkat capaian telah mencapai target yang direncanakan.

Hal kritis yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pelayanan di Kecamatan Cepogo, adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang meliputi :

2.C.1. Peningkatan pemerintahan yang efektif, efisien yang ditandai dengan semakin sederhananya birokrasi serta pelayanan yang cepat, tepat dan akurat serta murah.

2.C.2. Peningkatan pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang ditandai dengan kepastian dan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi dan program/kegiatan untuk masyarakat.

2.C.3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan perekonomian masyarakat dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

2.C.4. Peningkatan sistem pengendalian keamanan lingkungan secara sinergis antara pemerintah dan masyarakat.

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024, tidak tercantum rencana kegiatan yang ada di Kecamatan, sehingga tidak bisa dibandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Hasil analisis kebutuhan Kecamatan Cepogo dapat dilihat dalam tabel T-C.31.

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah: Kecamatan Cepogo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**Kec Cepogo**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**		**2.168.067.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kec Cepogo**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**		**2.168.067.000**	
	Kegiatan : **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec Cepogo	Gaji dan Tunjangan ASN,Gaji Non ASN Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Kegiatan	1.963.517.000	**Kegiatan :** **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec Cepogo	Gaji dan Tunjangan ASN,Gaji Non ASN Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Kegiatan	1.963.517.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Cepogo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.846.517.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Cepogo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.846.517.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	13 Dokumen	117.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	13 Dokumen	117.000.000	

			Pelaksanaan Tugas ASN					Pelaksanaan Tugas ASN			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	18 Laporan	0	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan	0	

			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	
	Kegiatan : **Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Kec Cepogo	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Kegiatan	0	**Kegiatan :** **Administrasi Barang Milik Daerah pada** **Perangkat Daerah**	Kec Cepogo	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Kegiatan	0	
	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	0	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	0	
	Kegiatan : **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kec Cepogo	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Kegiatan	0	**Kegiatan :** **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kec Cepogo	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Kegiatan	0	
	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen	0	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen	0	
	Kegiatan : **Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec Cepogo	Fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan	10 Kegiatan	117.000.000	**Kegiatan :** **Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec Cepogo	Fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan	10 Kegiatan	117.000.000	

			Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Cepogo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Cepogo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.000.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Cepogo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Cepogo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Cepogo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Cepogo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.000.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Cepogo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Cepogo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Cepogo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Cepogo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/ Material	Kec Cepogo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/ Material	Kec Cepogo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	

	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	62.000.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	62.000.000	
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	10.000.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	10.000.000	
	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 Dokumen	0	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 Dokumen	0	
	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 Dokumen	0	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 Dokumen	0	
	Kegiatan : **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec Cepogo	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Kegiatan	19.150.000	**Kegiatan :** **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec Cepogo	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Kegiatan	19.150.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900.000	

	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.250.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.250.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	0	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	0	
	Kegiatan : **Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	Kec Cepogo	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	68.400.000	**Kegiatan :** **Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	Kec Cepogo	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	68.400.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Cepogo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	14.400.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Cepogo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	14.400.000	
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainya	Kec Cepogo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	4.000.000	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainya	Kec Cepogo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	4.000.000	
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainya	Kec Cepogo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	3 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainya	Kec Cepogo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	3 Unit	50.000.000	

			Dipelihara/Direhabilitasi					Dipelihara/Direhabilitasi			
	Kegiatan : **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec Cepogo	Jumlah Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 kegiatan	0	**Kegiatan :** **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec Cepogo	Jumlah Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 kegiatan	0	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	0	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	0	

			Penyusunan Dokumen DPA-SKPD atau bangunan lainnya					Penyusunan Dokumen DPA-SKPD atau bangunan lainnya			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	0	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	0	
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Kec Cepogo**	**Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu**		**200.000.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kec Cepogo**	**Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu**		**200.000.000**	
	Kegiatan :	Kec Cepogo	Jumlah Kegiatan Koordinasi	2 Kegiatan	0	**Kegiatan :**	Kec Cepogo	Jumlah Kegiatan Koordinasi	2 Kegiatan	0	

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	0	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	0	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	0	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	0	
	Kegiatan : **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**	Kec Cepogo	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Kegiatan	0	**Kegiatan :** **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**	Kec Cepogo	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Kegiatan	0	
	Sub Kegiatan :	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	2 Laporan	0	Sub Kegiatan :	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	2 Laporan	0	

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Kegiatan : **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana**	Kec Cepogo	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Kegiatan	200.000.000	**Kegiatan :** **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana**	Kec Cepogo	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Kegiatan	200.000.000	
	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	200.000.000	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	200.000.000	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Kec Cepogo**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**		**50.000.000**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec Cepogo**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**		**50.000.000**	
	Kegiatan : **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kec Cepogo	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatn	50.000.000	**Kegiatan :** **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kec Cepogo	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatn	50.000.000	

	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamatan	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	50.000.000	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kecamatan	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	50.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec Cepogo	**Prosentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**		**140.000.000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	Kec Cepogo	**Prosentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**		**140.000.000**	
	Kegiatan : **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec Cepogo	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	140.000.000	**Kegiatan :** **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec Cepogo	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	140.000.000	
	Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Kec Cepogo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	400 Orang	100.000.000	Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Kec Cepogo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	400 Orang	100.000.000	

	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
	Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Cepogo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	40.000.000	Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Cepogo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	40.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec Cepogo	Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		150.000.000	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Kec Cepogo	Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		150.000.000	
	Kegiatan : **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kec Cepogo	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Kegiatan	150.000.000	**Kegiatan :** **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kec Cepogo	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Kegiatan	150.000.000	

	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Cepogo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	0	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Cepogo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	0	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	150.000.000	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Cepogo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	150.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Cepogo	Presentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec Cepogo	Presentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti			
	Kegiatan : **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec Cepogo	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	0	**Kegiatan :** **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec Cepogo**	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	**0**	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	0	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	0	

	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen	0	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen	0	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	0	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Cepogo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	0	
Pagu Total					**2.708.067.000**	**Pagu Total**				**2.708.067.000**	

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain melakukan menggali permasalahan/kebutuhan dari internal kantor, Kecamatan Cepogo juga menjaring aspirasi atau usulan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun LSM, yang langsung ditujukan ke Kecamatan Cepogo berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Desa dan Kecamatan. Berdasarkan atas hasil Musrenbang baik di Desa maupun Kecamatan, usulan dari masyarakat terkait dengan pelayanan/tugas pokok fungsi di Kecamatan Cepogo sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah : Kecamatan Cepogo

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Anggaran	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitasi untuk kelompok tani dengan pemberian bantuan bibit tanaman pajale, pepaya, bawang merah, kelapa genjah dan mete	Wonodoyo, Gedangan, Mliwis, Jombong, Sukabumi,Gubug, Genting			Bidang Ekonomi
2	Kegiatan Pelatihan e-commerce(distribusi untuk menopang pemasaran hasil UMKM)	Bakulan, Jelok, Paras,Cepogo			Bidang Ekonomi
3	Pengadaan bibit ternak kambing	Cabeankunti, Gubug, Kembangkuning, Candigatak			Bidang Ekonomi

4	Pelatihan Ekonomi Kreatif di Sektor Pariwisata	Gedangan, Jombong, Paras, Cabeankunti, Gubug, Jelok.			Bidang Pemsos bud
5	Penyediaan Komposter untuk Pengelolaan Sampah Organik Menjadi Pupuk Kompos	Desa Se Kec Cepogo			Bidang Pemsos bud
6	Bantuan Peralatan Kesehatan	Desa Se Kec Cepogo			Bidang Pemsos bud
7	Jambanisasi	Desa Se Kec Cepogo			Bidang Pemsos bud
8	Peningkatan Kapasitas Bagi Forum Anak Tingkat Kecamatan (DESA) Terkait 2P (Pelaporan dan Pelapor)	Desa Se Kec Cepogo			Bidang Pemsos bud
9	Rehabilitasi jalan	Jalan Eks Londo Desa Cepogo, Cabeankunti, Bakulan, Penggung			Bidang Infrastruktur
10	Penggantian jembatan	Kali Gandul, Dukuh Margorejo RT.22 RW.03 Gedangan			Bidang Infrastruktur
11	Penggantian Jembatan	Jembatan Penjirit Dukuh RT.03 RW.02 Kembangkuning			Bidang Infrastruktur
12	Pembangunan gedung (gedung kantor, gedung evakuasi, dll)	Pembangunan gedung evakuasi Desa Candigatak			Bidang Infrastruktur
13	Drainase di jalan kabupaten	Talud jalan Kabupaten Gajian 16/02 Cabeankunti			Bidang Infrastruktur

14	Rehabiltasi jalan	Jalur evakuasi ruas Desa Gedangan-Wonodoyo			Bidang Infrastruktur
15	Drainase di jalan kabupaten	Drainase jalan DPU Dk. Tunggul Rejo Desa Gubug			Bidang Infrastruktur

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan, yang paling relevan adalah reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Prioritas pembangunan tersebut telah menjadi arah tujuan, sasaran dalam menyusun program dan kegiatan di Kecamatan Cepogo.

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan tersebut akan dituangkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Penjabaran tujuan dalam Renja merupakan turunan dari Renstra berdasarkan pada misi yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional
4. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi organisasi. Adapun rincian sasaran Restra sebagai berikut :

a. Tujuan 1. : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sasaran sebagai berikut :
   1). Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.
   2). Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Cepogo Tahun 2024 merupakan penjabaran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Uraian tentang program dan kegiatan di Kecamatan Cepogo dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, sebagai berikut :
   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
   b. Peningkatan Pelayanan Publik
   c. Peningkatan Kesejateraan Rakyat
   d. Kondisi sarana prasrana gedung kantor
2. Rekapitulasi program dan kegiatan :
   a. Jumlah program dan kegiatan Kecamatan Cepogo terdiri dari 6 (enam) program dan 14 (Kegiatan) kegiatan
   b. Lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kecamatan, beberapa kegiatan yang berkaitan langsung dengan desa yaitu :
      - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban.
      - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana.
      - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
      - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
      - Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.
   c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar : Rp. 2.708.067.000,00
3. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan, yaitu sebagai berikut:

Detail rencana program dan kegiatan Kecamatan Cepogo Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel T-C.33

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah : Kecamatan Cepogo.

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,708,067,000**					**2,708,067,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,168,067,000**					**2,168,067,000**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1.963.517.000**					**1.963.517.000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji ASN Kecamatan Selo	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	100 persen	17 Orang/bulan	1 tahun	1.846.517.000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	1.846.517.000

7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terbayarnya gaji ASN Kecamatan Selo	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	100 persen	12 Dokumen	1 tahun	117.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	117.000.000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**117.000.000**					**117,000,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	tercapainya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	12 bulan 100 persen	1 Paket	12 bulan	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	12 bulan 100 persen	2.000.000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	tercapainya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	12 bulan 100 persen	2 Paket	12 bulan	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	12 bulan 100 persen	3.000.000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	tercapainya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	12 bulan 100 persen	12 Paket	12 bulan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Persentase penunjang urusan pemerintahan yang	12 bulan 100 persen	15.000.000

								pemerintahan daerah								terpenuhi sesuai standar		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	tercapainya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	12 bulan 100 persen	3 Paket	12 bulan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	12 bulan 100 persen	10.000.000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	tercapainya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	12 bulan 100 persen	3 Paket	12 bulan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	12 bulan 100 persen	15.000.000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	tercapainya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan 100 persen	5 Laporan	12 bulan	62.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	12 bulan 100 persen	62.000.000

															sesuai standar		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tercapainya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	12 bulan 100 persen	5 Laporan	12 bulan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	12 bulan 100 persen	10,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**0**					**0**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	terwujudnya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	100 persen	1 Unit	1 kegiatan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	0
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	terwujudnya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	100 persen	1 Unit	1 kegiatan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	0

7	01	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	terwujudnya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	100 persen	1 Paket	1 Kegiatan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**19.150,000**					**19.150,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	100 persen	2 Laporan	12 bulan	900.,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	900,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	12 bulan	18.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	18.250.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	100 persen	3 Laporan	12 bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	0
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**68.400.000**					**68.400.000**

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	100 persen	10 Unit	12 bulan	14.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	14.400.000
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	100 persen	1 Unit	12 bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	0
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	100 persen	24 Unit	12 bulan	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	4.000.000

7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	100 persen	1 Unit	12 bulan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	50.000.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**200.000.000**					**200.000.000**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								**200.000.000**					**200.000.000**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	prosentase layanan publik kecamatan tepat waktu	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	jumlah prasarana dan sarana umum yang dibangun dan dipelihara	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	87 Persen	2 Dokumen	1 kegiatan	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase layanan publik kecamatan tepat waktu	87 Persen	200.000.000
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**50.000.000**					**50.000.000**
7	01	04	2	01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum								**50.000.000**					**50.000.000**

7	01	04	2	01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Hasil Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	100 Persen	13 Laporan	1 Kegiatan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	50.000.000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**150.000.000**					**150.000.000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**150.000.000**					**150.000.000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	terlapornya dokumen Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	100 persen	13 Laporan	2 Kegiatan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 persen	150.000.000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**0**					**0**
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)		terdatanya jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	100 persen		2 kegiatan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di	100 persen	0

															lingkup kecamatan(program kemiskinan)		
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**150.000.000**				**150.000.000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**150.000.000**				**150.000.000**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	100 persen	400 Orang	2 kegiatan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 persen	100.000.000

							Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	Kab. Boyolali, Cepogo, Semua Kelurahan	100 persen	500 Orang	2 kegiatan	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 persen	40.000.000
TOTAL													**2.708.067.000**				**2.708.067.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan CepogoKabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan rencana target capaian kinerja yang diinginkan untuk 1 tahun mendatang. Renja ini memuat berbagai kebutuhan yang berkaitan secara langsung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cepogo, yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Perumusan program dan kegiatan ini, mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai disertai dengan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Realisasi renja ini sangat tergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Sebagaimana tujuan renja ini yaitu “terarahnya program serta prioritas kegiatan tahunan dengan capaian rencana strategis Kecamatan Cepogo melalui pembiayaan APBD Kabupaten yang dilengkapi dengan indikator capaian sebagai tolak ukur penilaian kinerja”, maka renja ini tidak akan berarti banyak jika tidak dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan tidak dilaksanakanan sebagaimana mestinya. Oleh karena masih diperlukan komitmen yang kuat oleh seluruh komponen dalam rangka melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi secara terus-menerus sehingga renja ini dapat menjadi sarana dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cepogo 2021-2026.

EE. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

KECAMATAN MUSUK

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Panjatkan Kehadirat Alloh SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat, Taufiq, dan HidayahNya sehingga Kecamatan Musuk dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD) yang merupakan pedoman dan arahan dalam kegiatan yang mendukung dan mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Boyolali 2021 – 2026.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat apa yang menjadi tujuan, sasaran, target capaian kinerja serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali sesuai dengan tugas pokoknya serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan menyelaraskan Usulan/aspirasi Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023.

Penyusunan Renja Kecamatan Musuk dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Musuk tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Musuk

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran, kritik dan masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang. Semoga dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Musuk dapat bermanfaat bagi pembangunan di wilayah Kecamatan Musuk sekarang dan pada masa-masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata pengantar i
Daftar isi ii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 5
2.1. Latar Belakang 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi OPD 17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 30
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 34
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD 35
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 38
4.1. Program dan Kegiatan 38
BAB V. PENUTUP 48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah selama periode 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah selama periode 5 (lima) tahun. Tata cara penyusunan Rencana Kerja (Renja) terdiri dari :

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota menjadi Rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan : a) rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; b) hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.

Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Musuk adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah , Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Penmerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerimtah Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2009-2014;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2004-2014;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pelayanan Publik;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kab. Boyolali Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);

33. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);
34. Rencana Strategis Kecamatan Musuk Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Musuk 2024 adalah untuk memberikan Landasan Kebijakan Teknis Tahunan dalam Kerangka Pencapaian Visi Misi setiap tahapnya (satu tahunan) dan sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Camat pada Akhir Tahun Anggaran sebagai bagian dari pelaksanaan Kebijakan Daerah.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah menetapkan prioritas Program dan Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan sesuai Rencana Strategis yang dilaksanakan per tahap (tahunan) selama lima tahun ke depan melalui sumber pembiayaan APBD yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja yaitu Masukan, Keluaran, Hasil, Manfaat, Dampak.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Musuk, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MUSUK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Musuk

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) sebagaimana tabel Tabel T-C.29, mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Kecamatan Musuk mengacu pada hasil laporan Kinerja tahunan Kecamatan Musuk dan/atau realisasi APBD Kecamatan Musuk.

Pada tabel tersebut, dapat diketahui pokok-pokok materi :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor terpenuhinya atau melebihi target kinerja/program , disebabkan secara umum karena tingginya kesadaran dan peran serta dari aparatur dan masyarakat Kecamatan Musuk dalam menunjang kegiatan dan program Pemerintah dan Pembangunan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD adalah dapat memenuhi /melebihi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan, dengan demikian target capaian program Renstra OPD dapat tercapai.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan meningkatkan target capaian dari tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan potensi sumber daya dan dana yang ada.
7. Data tapat dilihat pada lampiran Tabel T-C.29

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)* Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah : Kecamatan Musuk

kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu n-2			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi renja PD tahun n-2	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatans/ d tahun berjalan n-1	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	01					**KECAMATAN**									
7	01	01				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boyolali**	**Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Terpenuhi sesuai standar**								
7	01	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Gaji dan tunjangan ASN, Gaji non ASN								
7	01	01	2	02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
7	01	01	2	02	002	Penyediaan Administrasi Pelayanan Tugas ASN	Gaji PTT dan Tenaga Honorer sebanyak Orang	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
7	01	01	2	02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
7	01	01	2	02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
7	01	01	2	02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Penyediaan barang	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100

kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu n-2			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi renja PD tahun n-2	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatans/ d tahun berjalan n-1	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2	02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	36 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100	18 Laporan	18 Laporan	100
7	01	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah								
7	01	01	2	06	001	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99,95	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan Rumah Tangga	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99,99	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	004	Penyediaan bahan logistik kantor	Bahan Logistik Kantor	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	97,73	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	97,71	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	007	Penyediaan bahan / Material	Bahan/ Material	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	98,69	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	008	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99,56	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99,95	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Barang Milik Daerah								
7	01	01	2	07	006	Pengadaan Mebel	Mebel	1 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0	1 paket	1 paket	100

kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu n-2			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi renja PD tahun n-2	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatans/ d tahun berjalan n-1	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
7	01	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7	01	01	2	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7	01	01	2	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kerja	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	09	009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan bangunan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat								
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100

kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu n-2			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi renja PD tahun n-2	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatans/ d tahun berjalan n-1	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunsn Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100	15 dokumen	15 dokumen	100
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	100
7	01	02			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu								
7	01	02	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan**	Jumlah IMB yang dilayani								100
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang diusulkan	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	100	10 desa	10 desa	100
7	01	02	2	02		**Penyelenggaraan urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di Kecamatan yang terselenggara								
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah sosialisasi pelayanan di kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100
7	01	02	2	03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana**	Jumlah sarana dan prasarana umum dalam kondisi baik								
7	01	02	2	03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau	Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun dan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	99,55	1 Unit	1 Unit	100

kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu n-2			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi renja PD tahun n-2	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatans/ d tahun berjalan n-1	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
						Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	dipelihara								
7	01	04				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**								
7	01	04	2	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah sarana dan prasarana pendukung ketentraman dan keteriban umum yang tersedia								
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	99,92	1 kegiatan	1 kegiatan	100
7	01	05				**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	**100**	100	100	100	100	100	100	100
7	01	05	2	01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								
7	01	05	2	01	**01**	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	99,24	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100

kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu n-2			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi renja PD tahun n-2	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatans/ d tahun berjalan n-1	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
7	01	05	2	01	**04**	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	99,98	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	100	100	100	100	100	100	100
7	01	03	2	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Usulan Hasil Musdes yang diverifikasi								
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)								
7	01	03	2	03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang laksanakan								
7	01	03	2	03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100

kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu n-2			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi renja PD tahun n-2	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatans/ d tahun berjalan n-1	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
7	01	03	2	03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah desa yang menerima bantuan / modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	100	10 desa	10desa	100
7	01	06			**Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa**		Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti								
7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	100	10 desa	10 desa	100
7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pedampingan administrasi dan keuangan desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	100	10 desa	10 desa	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Musuk

Kajian terhadap capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indicator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Musuk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kinerja pelayanan. Dimana tugas dan fungsi Kecamatan Musuk sebagai berikut :

1. Tugas Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali sebagai berikut :
    - Membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, sosial dan pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan serta ketentraman dan ketertiban umum Desa dan/atau Kelurahan serta penyelenggaraan pelayanan public;
    - Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
2. Fungsi Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali sebagai berikut :
    - Pengoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
    - Penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
    - Pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat;dan
    - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati dan peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara detail hasil capaian terhadap indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel T-C.30

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Musuk

Kabupaten Boyolali

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK(PP.6/80)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (tahun n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2022 (tahun n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**											
	1. Persentase layanan public kecamatan tepat waktu			83	86	87	88	83	86	87	88	
2	**Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**											
	1. Prosentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**											
	1. Prosentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	**Program Pemberdayan Masyarakat Desa dan Kelurahan**											
	1. Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK(PP.6/80)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (tahun n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2022 (tahun n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Prosentase stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran dilingkup kecamatan (Program kemiskinan)			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											
	1. Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar			100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelengggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Musuk

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Musuk tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Musuk sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan belum terintegrasi dan sering mengalami perubahan.
   Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum ynag berlaku baik berupa UU,PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering mengalami distorsi.
2. Belum optimalnya peran serta masyarakat (Partisipasi)
   Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang menghadiri umum para tokoh sehingga fungsi keterwalian belum optimal. Selain itu partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah. Disamping faktor eksternal juga terdapat Beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Keberdaan sumber daya Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Berikut ini Beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali :
   - Belum memadainya kualitas sumber daya manusia Kecamatan Musuk
     Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan Pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan. Dari segi pendidikan formal yang SDM yang berkualifikasi perencana relative sedikit, demikian pula yang bersertifikat (pendidikan non formal) menghasilkan rencana pembangunan yang

lebih berkualitas,OPD tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas.

- Keterbatasan anggaran dan anggaran belum sepenuhnya berbasis Kinerja.

  Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis Kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indicator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik. Seperti program-program di bidang penelitian dan pengembangan sangat terbatas mengingat untuk mengoptimalkan kinerja.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2022 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam renstra Kecamatan Musuk Tahun 2021-2026. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal yang tidak terdapat perbedaan, dimana program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada renstra Kecamatan Musuk Tahun 2021-2026 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif OPD dan pagu indikatif kewilayahan yang telah ditetapkan. Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Dimana Program pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah di lingkungan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pemberdayan Masyarakat Desa dan Kelurahan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dapat ditelaah terhadap rancangan awal RKPD, sebagaimana Tabel T-C.31.

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kecamatan Musuk

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Prosentase penunjang urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Prosentase penunjang urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar			
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat			
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 dokumen		
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen		
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen		
	4. Koordinasi dan Penyusunsn Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunsn Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen		
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15 dokumen		
	6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Musuk**	**Gaji dan tunjangan ASN, Gaji non ASN**		2.116.902	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Musuk**	**Gaji dan tunjangan ASN, Gaji non ASN**			
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Musuk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 org/bulan	2.093.502	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Musuk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 org/bulan	2.093.502	
	2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kec. Musuk	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 dokumen	23.400	2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kec. Musuk	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 dokumen	23.400	
	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen		3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen		
	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen		4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen		
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan		
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	18 laporan		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD								
	7. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen		7. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen		
	8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		
3.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec. Musuk	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 kegiatan		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec. Musuk	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 kegiatan		
	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Musuk	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.000	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Musuk	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.000	
	2. Peyediaan peralatan rumah tangga	Kec. Musuk	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	3.000	2. Peyediaan peralatan rumah tangga	Kec. Musuk	Tersedianya peralatan rumah tangga	4 paket	3.000	
	3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	0	3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	0	
	4. Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	3.000	4. Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	3.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	5. Penyediaan Bahan logistik Kantor	Kec. Musuk	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	15.000	5. Penyediaan Bahan logistik Kantor	Kec. Musuk	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	15.000	
	6. Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	Kec. Musuk	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.000	6. Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	Kec. Musuk	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.000	
	7. Penyediaan bahan/material	Kec. Musuk	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	15.000	7. Penyediaan bahan/material	Kec. Musuk	Tersedianya bahan/material yang Disediakan	4 paket	15.000	
	8. Fasilitasi Kunjungan tamu	Kec. Musuk	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	62.000	8.Fasilitasi Kunjungan tamu	Kec. Musuk	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	62.000	
	9. Penyelenggaran Rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Musuk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	10.000	9. Penyelenggaran Rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Musuk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	10.000	
	10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 dokumen	0	10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 dokumen	0	
	11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 dokumen	0	11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 dokumen	0	
4.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Musuk	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 kegiatan		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Musuk	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 kegiatan		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Musuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	900	1. Penyediaan Jasa surat menyurat	Kec. Musuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Musuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	29.760	2. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Musuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	29.760	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan		3. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan		
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Musuk	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Musuk	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 kegiatan		
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Kec. Musuk	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	14.000	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Kec. Musuk	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	14.000	
	2. Pemeliharaan mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	0	2 Pemeliharaan mebel		Jumlah mabel yang dipelihara	5 unit		
	3. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec. Musuk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	4.000	3. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kec. Musuk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	4.000	
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Musuk	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000	4.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Musuk	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	50.000	
6..	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Musuk				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Musuk				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Pengadaan Mebel	Kec. Musuk	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	0	1. Pengadaan Mebel	Kec. Musuk	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	0	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK					
	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan		Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 kegiatan		Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan		Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 kegiatan		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 dokumen		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 dokumen		
	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan		Jumlah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 kegiatan		Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan		Jumlah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 kegiatan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Lapoan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan		
1.	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan Umum**	Kec. Musuk				**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan Umum**	Kec. Musuk				
	1. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kec. Musuk	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	100.000	1. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kec. Musuk	Terpeliharanya sarana dan prasarana umum dan infrastruktur kecamatan	2 dokumen	100.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Musuk				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Musuk				
1.	**Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa**	Kec. Musuk	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 kegiatan		**Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa**	Kec. Musuk	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Musuk	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga kemasyarakatan	0	Peningkatan efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Musuk	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga kemasyarakatan	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 laporan	150.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 laporan	150.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)**			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 kegiatan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 kegiatan		
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga kemasyarakatan		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga kemasyarakatan		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti**			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan		Jumlah Fasilitasi,	3 kegiatan		Fasilitasi,		Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi	3 kegiatan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 dokumen		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 dokumen		
	PROGRAM PENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					PROGRAM PENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
1.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec. Musuk	Juumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec. Musuk	Juumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Pembinaaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional	Kec. Musuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	450 orang	20.000	Pembinaaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional	Kec. Musuk	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	450 orang	20.000	
	Pembinaan wawasan kebangsan dan ketahan Nasional dlm rangka memantapkan Pengamalan Pancasila,pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Musuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 org	50.000	Pembinaan wawasan kebangsan dan ketahan Nasional dlm rangka memantapkan Pengamalan Pancasila,pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Musuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 org	50.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum**	Kec. Musuk	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 kegiatan		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum**	Kec. Musuk	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 kegiatan		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonseia dan Instansi vertical di wilayah Kecamatan	Kec. Musuk	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	25.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonseia dan Instansi vertical di wilayah Kecamatan	Kec. Musuk	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	25.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini dapat diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari PD lain yang saling berkaitan berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan (yang sebelumnya diadakan musyawarah di tingkat Dusun/lingkungan RT, RW dan kelompok-kelompok masyarakat misalnya kelompok tani, kelompok perempuan dsb. Penggalian gagasan dan menyelenggarakan musyawarah dusun (Musdus) serta rembug warga untuk menetapkan jenis dari usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan, dilanjutkan dengan Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang Kabupaten.

Usulan tersebut disesuaikan dan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD, serta visi dan misi pembangunan daerah yang sudah ditetapkan. Hasil pengerjaan/penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, dapat terlihat dalam Tabel T-C.32.

Tabel T-C.32

Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Kabupaten Boyolali

Tahun 2023

Nama OPD : Kecamatan Musuk

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Musuk	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar		
1.	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	
	c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	
	d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	15 laporan	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Realisasi Kinerja SKPD		
	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 org/bulan	
	b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 dokumen	
	c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	
	d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	
	e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	
	g. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	
	h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	
3.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
	a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	
	c. Peyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	
	d. Penyediaan Bahan logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	
	e. Penyediaan Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	
	f. Penyediaan bahan/material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	
	g. Fasilitasi Kunjungan tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	
	h. Penyelenggaran Rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	
4.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
	a. Penyediaan Jasa surat menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	
	b. Pemeliharaan mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	
	c. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	
6.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
	a. Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	
	b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK	Kec. Musuk	**Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu**		
1	**Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan**		**Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		
	a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 laporan	
	b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 dokumen	
2	**Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**		**Jumlah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**		
	a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	
3.	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan Umum**		**Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		
	a. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumen	
C.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Musuk	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		
1.	**Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa**		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga kemasyarakatan	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	b. Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 laporan	
D.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Musuk	**Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)**		
1.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		
	a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga kemasyarakatan	
	b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	
E.	PROGRAM PENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Musuk	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**		
1.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				
	a. Pembinaaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional		Tersedianya fasilitasi terhadap penyelenggaraan kegiatan keagamaan	450 orang	
	b. Pembinaan wawasan kebangsan dan ketahan Nasional dlm rangka memantapkan Pengamalan Pancasila,pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Terlaksananya peringatan hari besar Nasional di wilayah Kecamatan	400 orang	
F.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Musuk	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**		
1.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum**		**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		
	a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonseia dan Instansi vertical di wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	
G.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kec. Musuk	**Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti**		
1.	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		
	a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 dokumen	
	b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
	c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 dokumen	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan, yang paling relevan adalah reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Prioritas pembangunan tersebut telah menjadi arah tujuan, sasaran dalam menyusun program dan kegiatan di Kecamatan Musuk.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas. Landasan keputusan yang diambil dalam sebuah kebijakan adalah mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien sejalan dengan misi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governenci dan akuntabilitas public. Prioritas dalam sebuah kebijakan kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan melalui pencapaian strategi pembangunan. Kebijakan, strategi,dan prioritas program pembangunan daerah terssebut menjadi acuan bagi Kecamatan Musuk, yaitu:

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

   Kebijakan pembangunan daerah untuk mendukung strategi pembangunan nasional ini diarahkan guna percepatan penurunan jumlah penduduk miskin, dengan strategi meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, dan perumahan; membangun prasarana dan sarana serta pemberdayaan ekonomi masyarakat; memperkuat kelembagaan dan mendayagunakan sumber daya potensial untuk penanggulanngan kemiskinan. Berbagai program pembangunan daerah dilaksanakan oleh Kecamatan Musuk untuk mendukung kebijakan ini, antara lain:

   a. Progam pendidikan non formal
   b. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
   c. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
   d. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
   e. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kebijakan pembangunan daerah Kecamatan Musuk untuk mendukung strategi pembangunan nasional ini diarahkan guna percepatan penurunan jumlah

pengangguran, dengan strategi meningkatkan kualitas dan keterampilan serta memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat. Berbagai program pembangunan daerah dilaksanakan oleh Kecamatan Musuk untuk mendukung kebijakan ini, antara lain: Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan. Kebijakan pembangunan daerah untuk mendukung strategi pembangunan nasional ini diarahkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kecamatan Musuk, dengan strategi menjaga realisasi investasi yang positif, meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan sektor-sektor ungulan daerah, mendorong sector riil, menjaga stabilitas harga, meningkatkan ekspor. Berbagai program pembangunan daerah dilaksanakan oleh Kecamatan Musuk untuk mendukung kebijakan ini, antara lain:Program pemeliharaan infrastruktur
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah Kebijakan pembangunan daerah untuk medukung strategi pembangunan nasional ini diarahkan guna menjaga kelestrarian dan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta mengurangi risiko bencana, dengan strategi meningkatkan konservasi ekosistem terersterial meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta meningkatkan upaya penanggulangan bencana. Berbagai program pembangunan daerah dilaksanakan oleh Kecamatan Musuk untuk mendukung kebijakan ini, antara lain:
   a. Program pengedalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
   b. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
5. Kecamatan Musuk dalam medukung kebijakan nasional dan provinsi mengambil kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu:
   a. Mengoptimalisasi pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati.
   b. Meningkatkan kualitas pelayanan public yang menjadi kewenangan Kecamatan Musuk dan peningkatan kualitas aparaturnya seperti administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perizinan dan surat keterangan lain.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD Kecamatan Musuk

Perumusan tujuan dan sasaran dalam rencana kerja (renja) OPD Kecamatan Musuk sangat diperlukan untuk membuat kerangka yang jelas dan memberi

arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang akan dilaksanakan.

Rumusan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Musuk. Dalam Renja Kecamatan Musuk tahun 2024 rumusan tujuan diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan;
2. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Adapun rumusan sasaran diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan perizinan;
2. Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator;
3. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan;

Perumusan Sasaran, melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Merumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya.
2. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra OPD, cuplik rumusan sasaran dalam Renstra OPD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan.
3. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra OPD) , jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut.
4. Rumusan sasaran tersebut , sajikan dalam bentuk pernyataan.

Langkah-langkah perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar T.IV.a

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD KABUPATEN/KOTA

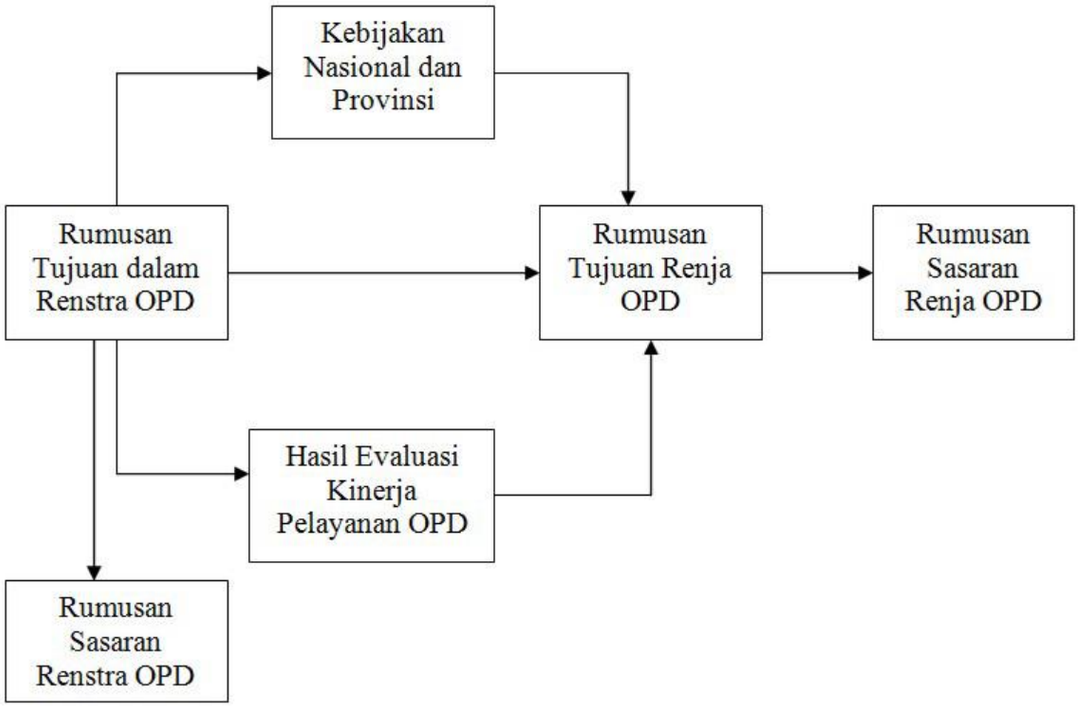

Sasaran yang hendak dicapai di Kecamatan Musuk adalah :

1. Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel
2. Tersusunnya Daftar Skala Prioritas usulan kegiatan Kecamatan/Kelurahan
3. Terwujudnya pelayanan public yang responsive dan akuntabel
4. Terwujudnya masyarakat yang tertib dan aman serta mendapat perlindungan jaminan kesjahteraan sosial
5. Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali sebagai leading sector dalam hal perencanaan di Kabupaten Boyolali melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain melaksanakan kegiatan rutin OPD juga melaksanakan urusan wajib dan pilihan.

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2024 yang dituangan dalam renja 2024 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah untuk mencapai visi-misi pembangunan daerah.Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan penudang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu pogram sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sarana strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan,visi dan misi organisasi.

Secara umum program dan kegiatan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
g. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   f. Penyediaan Bahan/Material
   g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
   c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan
   a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
   b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan
   a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
   a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
   b. Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
   b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
   a. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
   b. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

E. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

F. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
   b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program dan kegiatan) pada Tabel T-C. 33

Tabel T-C. 33

Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,677.562,000**					**2,677.562,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,332.562,000**					**2,332.562,000**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,116.902.000**					**2,116.902,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Jumlah Orang yangMenerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Musuk, Semua Kelurahan	100 persen	17 Orang/bul	100 persen	2.093.502.000			Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	2,164,429,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Musuk, Semua Kelurahan	100 persen	12 Dokumen	100 persen	23.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	100 persen	23,400,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**117,000,000**					**117,000,000**
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PenerangBangunan Kantor	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yang Disediakan	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Musuk, Semua Kelurahan	100 persen	1 Paket	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	100 persen	2,000,000
7	01	01	2.03	03	Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yang Disediakan	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Musuk, Semua Kelurahan	100 persen	10 Paket	100 persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	100 persen	3,000,000
7	01	01	2.03	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yang	Prosentase penunjang urusan	Kab. Boyolali, Musuk, Semua Kelurahan	100 persen	1 Paket	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase penunjang urusan	100 persen	15,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						yangterpenuhi sesuai standar	Disediakan	pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar								pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar		
7	01	01	2.03	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Musuk, Semua Kelurahan	100 persen	1 Paket	100 persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	100 persen	10,000,000
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Bahan/Material	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan/Material yangDisediakan	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Musuk, Semua Kelurahan	100 persen	1 Paket	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	100 persen	15,000,000
7	01	01	2.03	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Musuk, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	62,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	100 persen	62,000,000
7	01	01	2.03	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Musuk, Semua Kelurahan	100 persen	5 Laporan	100 persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	100 persen	10,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**0**					**30.600.000**
7	01	01	2.07		Pengadaan Mebel	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Musuk, Semua Kelurahan	100 persen	1 Unit	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	100 persen	0
7	01	01	2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Musuk, Semua Kelurahan	100 persen	1 Unit	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	100 persen	20,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								30,660,000					30,660,000
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Musuk, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 persen	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	100 persen	900,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yang Disediakan	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Musuk, Semua Kelurahan	100 persen	4 Laporan	100 persen	29,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	100 persen	29,760,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar		100 persen	2 Laporan	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	100 persen	0
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**68,000,000**					**68,000,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak danPerizinannya	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Musuk, Semua Kelurahan	100 persen	5 Unit	100 persen	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	100 persen	14,000,000
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Jumlah Mebel yangDipelihara	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar		100 persen	5 Unt	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	100 persen	0
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan	Prosentase	Jumlah Peralatan	Prosentase	Kab. Boyolali,	100 persen	0 Unit	100 persen	4,000,000	Dana Transfer		Prosentase	100 persen	4,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Peralatan dan Mesin Lainnya	penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	danMesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yang Dipelihara	penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Musuk, Semua Kelurahan		10 Unit			Umum-Dana Alokasi Umum		penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Musuk, Semua Kelurahan	100 persen	2 Unit	100 persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar	100 persen	50,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								100,000,000					100,000,000
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								100,000,000					100,000,000
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu	Kab. Boyolali, Musuk, Semua Kelurahan	100 persen	2 Dokumen	100 persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layananpublik kecamatan tepat waktu	100 persen	100,000,000
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								25.000.000					25.000.000
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			100 persen	12 laporan	100 persen	25.000.000			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal		25.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kecamatan									di Wilayah Kecamatan		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								150,000,000					150,000,000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								150,000,000					150,000,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepatsasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)	Kab. Boyolali, Musuk, Semua Kelurahan	100 persen	0 Laporan 10 Laporan	100 persen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(programkemiskinan)	100 persen	150,000,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								0					0
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepatsasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)	Kab. Boyolali, Musuk, Semua Kelurahan	100 percen	10 Laporan	100 persen	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(programkemiskinan)	100 percen	0
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								70,000,000					70,000,000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								70,000,000					70,000,000
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Persentase koordinasi pemerintahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	Persentase koordinasi pemerintahan	Kab. Boyolali, Musuk, Semua Kelurahan	100 persen	200 Orang	100 persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi pemerintahan	100 persen	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	umum yang ditindaklanjuti	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	umum yang ditindaklanjuti								umum yang ditindaklanjuti		
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan AntarSuku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,dan Nasional	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku danIntra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,dan Nasional	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Kab. Boyolali, Musuk, Semua Kelurahan	100 persen	100 Orang	100 persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 persen	20,000,000
												TOTAL	**2,677.562,000**					**2,677.562,000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Renstra yang telah dibuat, menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholder) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigm baru. Renja merupakan langkah awal perencanaan tahs yang harus dilakukan Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan dengan prinsip satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini OPD Kecamatan Musuk bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan Rancangan awal RKPD, Renstra OPD, Renja K/L dan Renja OPD Kabupaten.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Musuk disusun berdasarkan pertimbangan kebutuhan masyarakat serta mendukung fungsi aparatur sebagai fasilitator pembangunan dan organisasi pemerintah. Renja Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali.

Dalam penyusunan ini tentu saja masih banyak kekurangan atau kelemahan, akan tetapi penyusunan ini dibuat semaksimal mungkin dalam rangka meningkatkan perencanaan yang matang agar dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dapat dijalankan berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk itu, saran ataupun kritik membangun senantiasa kami nantikan dalam rangka perbaikan penyusunannya di masa mendatang.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

FF. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

KECAMATAN AMPEL

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Panjatkan Kehadirat Alloh SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat, Taufiq, dan HidayahNya sehingga Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan baik.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD) yang merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung dan mewujudkan capaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali memberikan gambaran tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran ke depan, Renja Perangkat Daerah ini menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran, target capaian kinerja serta bagaimana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali sesuai dengan tugas pokoknya serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan menyelaraskan Usulan/Aspirasi Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023.

Penyusunan Renja berdasarkan pada Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun yang lalu dan tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan Renja ini untuk itu kami mohon saran bersifat membangun demi menyempurnaan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali pada Tahun-tahun berikutnya. Kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan di wilayah

Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali sekarang dan pada masa-masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

	PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	iii
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II.	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	39
	3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	39
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	40
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
	4.1 Program dan Kegiatan	43
BAB V.	PENUTUP	66

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraaan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA-SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan Visi, Misi Kepala Daerah ke dalam Program dan Kegiatan dan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD (RENSTRA-SKPD) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. RENJA merupakan acuan SKPD untuk menuangkan Program dan Kegiatan kedalam KUA - PPAS dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024;

3. RENJA-SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan SKPD sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali pada Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali sebagai salah satu OPD yang menjalankan urusan kewilayahan di lingkungan Kabupaten Boyolali yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan kewilayahan Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali yang memiliki Program sebagai berikut;

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa

Disamping itu Kecamatan Ampel juga memiliki program non urusan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ampel adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan TataCara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah (7-164/2021);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 55).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ampel 2024 adalah untuk memberikan Landasan Kebijakan Teknis Tahunan dalam Kerangka Pencapaian Visi Misi setiap tahapnya (satu tahunan) dan sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Camat pada Akhir Tahun Anggaran sebagai bagian dari pelaksanaan Kebijakan Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Tahun 2024 antara lain sebagai berikut;

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan dan menetapkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ampel selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Ampel Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Ampel Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ampel Tahun 2024

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Ampel, terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dan realisasi Renstra Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Ampel dan/atau realisasi APBD Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Adapun hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 untuk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

1. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/keluaran yang telah direncanakan yaitu:
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   b. Penyediaan Bahan/Material;
   c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
   d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   e. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum;
   f. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
   g. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa terkait Penarikan Retribusi PBB.
2. Realisasi sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut:

a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
c. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
e. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
g. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan untuk Kecamatan Ampel nihil/tidak ada.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
   a. Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan PKK;
   b. Adanya efisiensi penggunaan/pemakaian Cek pembayaran dilakukan dengan CMS Banking Bank Jateng;
   c. Adanya efisiensi SPJ Termin I (95%) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Ruas Ngenden – Ngampon;
   d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah dapat memenuhi / melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, dengan demikian target capaian program Renstra PD dapat tercapai.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan meningkatkan target capaian dari tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan potensi sumber daya dan dana yang ada.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel T-C.29.

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)

KABUPATEN BOYOLALI

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN AMPEL

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) /2022						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)) / 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
												Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
X						NON UNSUR																	
X	XX					KECAMATAN																	
X	*XX*	*01*				*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH*	*Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar*																
X	XX	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan tunjangan ASN, Gaji non ASN																
X	XX	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	3	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	100	%	1	Tahun	3	Tahun	100	%
X	XX	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji PTT dan Tenaga Honorer sebanyak 1 orang	3	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	100	%	1	Tahun	3	Tahun	100	%
X	XX	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	24	Bulan	0		12	Bulan	12	Bulan	100	%	12	Bulan	24	Bulan	100	%
X	XX	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	24	Bulan	0		12	Bulan	12	Bulan	100	%	12	Bulan	24	Bulan	100	%
X	XX	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	4		0		2		2		100	%	2		4		100	%
X	XX	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36	Laporan	0		18	Laporan	18	Laporan	100	%	18	Laporan	36	Tahun	100	%
X	XX	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah																
X	XX	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	%	12	Bulan	36	Bulan	100	%
X	XX	01	2	06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan Rumah Tangga	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	%	12	Bulan	36	Bulan	100	%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) /2022						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)) / 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
												Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
X	XX	01	2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Bahan Logistik Kantor	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	%	12	Bulan	36	Bulan	100	%
X	XX	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	%	12	Bulan	36	Bulan	100	%
X	XX	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran Langganan Bulanan dan Buku Bacaan	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	%	12	Bulan	36	Bulan	100	%
X	XX	01	2	06	07	Penyediaan bahan / Material	ATK	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	%	12	Bulan	36	Bulan	100	%
X	XX	01	2	06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	%	12	Bulan	36	Bulan	100	%
X	XX	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	%	12	Bulan	36	Bulan	100	%
X	XX	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah																
X	XX	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	1	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	%	1	Paket	1	Paket	100	%
X	XX	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin lainnya	1	Paket	0	Paket	1	Paket	1	Paket	100	%	0	Paket	1	Paket	100	%
X	XX	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
X	XX	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	%	12	Bulan	36	Bulan	100	%
X	XX	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	%	12	Bulan	36	Bulan	100	%
X	XX	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	%	12	Bulan	36	Bulan	100	%
X	XX	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa pemeliharaan barang milik daerah																
X	XX	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36	Bulan	12	Unit	12	Bulan	12	Bulan	100	%	12	Bulan	36	Bulan	100	%
X	XX	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kerja yang dipelihara	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	%	12	Bulan	36	Bulan	100	%
X	XX	01	2	09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan bangunan	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	%	12	Bulan	36	Bulan	100	%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) /2022						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)) / 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
												Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
7	01					URUSAN KEWILAYAHAN																	
7	*01*	*02*				*PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK*	*Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu*																
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang dilayani																
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang diusulkan	20	Desa	0	Desa	10	Desa	10	Desa	100	%	10	Desa	20	Desa	100	%
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan penunjang pelayanan publik di Kecamatan yang terselenggara																
7	01	02	2	02	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya fungsi layanan di Kecamatan	2	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100	%	1	Kegiatan	2	Kegiatan	100	%
7	01	02	2	02	03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Aplikasi Baru Penunjang Pelayanan PATEN yang dilaksanakan (Aplikasi Antrian dan Aplikasi Display Layanan)	4	Kegiatan	0	Kegiatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100	%	2	Kegiatan	4	Bulan	100	%
7	01	02	2	03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana umum dalam kondisi baik																
7	01	02	2	03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah pembangunan / pemeliharaan sarana dan prasarana umum	2	Paket	0	Paket	1	Paket	1	Paket	100	%	1	Paket	2	Paket	100	%
7	*01*	*03*				*PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN*	*Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti*																

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) /2022						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)) / 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
												Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan hasil Musdes yang diverifikasi																
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan	3	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	%	1	Paket	3	Paket	100	%
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	2	Paket	0	Paket	1	Paket	1	Paket	100	%	1	Paket	2	Paket	100	%
7	*01*	*03*				*PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN*	*Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran dilingkup kecamatan(program kemiskinan)*																
7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang laksanakan																
7	01	03	2	03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)	20	Desa	0	Desa	10	Desa	10	Desa	100	%	10	10	20	Desa	100	%
7	01	03	2	03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah desa yang menerima bantuan / modal usaha ekonomi untuk lembagakepemudaan	20	Desa	0	Desa	10	Desa	10	Desa	100	%	10	Desa	20	Desa	100	%
7	*01*	*04*				*PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM*	*Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yangditindaklanjuti*																
7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana pendukung ketentraman dan keteribanumum yang tersedia																
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat kecamatan	2	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100	%	1	Kegiatan	2	Kegiatan	100	%
7	*01*	*05*				*PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM*	*Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti*																
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan KepalaDaerah																

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) /2022						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)) / 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
												Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian BhinnekaTunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	6	Kegiatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100	%	2	Kegiatan	6	Kegiatan	100	%
7	01	05	2	01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan pembinaan kerukunan antar umat beragama yang dilaksanakan	5	Kegiatan	1	Kegiatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100	%	2	Kegiatan	5	Kegiatan	100	%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK danSPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ampel, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Dimana Tugas dan Fungsi Kecamatan Ampel sebagai berikut:

1. Tugas Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali antara lain;
    a. Membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, sosial dan pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan serta ketenteraman dan ketertiban umum Desa dan/atau Kelurahan serta penyelenggaraan pelayanan publik;
    b. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
2. Fungsi Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali antara lain;
    a. pengoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
    b. penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
    c. pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat; dan
    d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali yaitu pada Tabel T-C.30.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampel 2022 Kabupaten Boyolali

No	Indikator*)	SPM / Standar Nasional	IKK(PP-6/'08	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (tahun n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2022 (tahun n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17	18	19
1	**Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**											
	1. Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu			85.00	86.00	87.00	88.00	84.98	85.14	87.00	88.00	
2	**Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**											
	1. Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti			100.00	100.00	100.00	100.00	100.04	100.00	100.00	100.00	
3	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**											
	1. Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindak lanjuti			100.00	100.00	100.00	100.00	100.28	100.00	100.00	100.00	
4	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**											
	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakatdan pembangunan yang ditindaklanjuti			100.00	100.00	100.00	100.00	100.01	100.00	100.00	100.00	
	2. Persentase stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilanrendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan (program kemiskinan)			100.00	100.00	100.00	100.00	100.07	100.00	100.00	100.00	
5	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											
	1. Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan			100.00	100.00	100.00	100.00	91.87	100.00	100.00	100.00	
6	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**											
	1. Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar			100.00	100.00	100.00	100.00	100.04	100.00	100.00	100.00	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Ampel tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain yaitu Kecamatan Ampel merupakan urusan Pemerintahan Umum, mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan.

Berdasarkan telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi terhadap Renstra Kecamatan Ampel tidak dilakukan karena tidak ada keterkaitan langsung antara pelayanan atau permasalahan di tingkat kecamatan dengan permasalahan di K/L maupun PD tingkat provinsi.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ampel, secara umum permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ampel adalah berikut:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan public yang meliputi;
   a. Masih perlunya penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan public;
   b. Belum optimalnya pelayanan kependudukan di kecamatan baru.

   Dimana akar permasalah pada pelayanan public di Kecamatan Ampel yaitu:
   - Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan;
   - Belum optimalnya pendistribusian sarana dan prasarana pelayanan
2. Belum optimalnya fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa yaitu Belum optimalnya asistensi pembangunan desa berpijak pada evidence based. Dimana akar masalahnya belum optimalnya fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa yaitu:
   a. Belum optimalnya pemutakhiran database pembangunan desa;
   b. Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa.

3. Belum optimalnya pengembangan potensi kewilayahan, dimana belum optimalnya pengembangan potensi kewilayahan adalah belum optimalnya peran kecamatan sebagai instansi terdepan dalam menyusun peta masalah dan potensi kecamatan;
4. Keterbatasan sumber daya aparatur baik itu kuantitas maupun kualitas. Selain terbatasnya jumlah sumber daya yang dimiliki, sumber daya aparatur yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi juga terbatas;
5. Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan masih kurang dan harus ditingkatkan sehingga pembangunan akan semakin berkembang di wilayah Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.

Dampak Pelayanan Kecamatan Ampel terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah Visi pembangunan daerah merupakan rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih yang secara substansi memuat tentang rumusan umum mengenai keadaan yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.Kondisi yang akan dicapai dalam bentuk visi, kemudian dijabarkan oleh misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.

Berbijak dari amanat dan upaya membangun sinkronisasi dengan visi pembangunan jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005 - 2025, serta dalam rangka menjawab isu strategis aktual dan menjaga keberlanjutan pembangunan, maka dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Boyolali 2021-2026 yaitu ;

"Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi" Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL)

Rumusan visi tersebut memiliki muatan kondisi dan prasyarat yang akan dicapai dalam pembangunan, dengan penjabaran sebagai berikut :

Boyolali Maju berarti :

- ✓ Proses pembangunan yang berkelanjutan dan terencana sistematis diharapkan membawa kemajuan di segala bidang.
- ✓ Boyolali Maju berarti *no-one left behind,* yakni tidak ada pihak yang terlewatkan untuk merasakan kemajuan, karena semua komponen telah menjadi subyek pembangunan.
- ✓ Maju dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dan daerah yang semakin berdaya saing yang ditopang dengan

pembangunan infrastruktur wilayah berkualitas dan merata, serta tata Kelola pemerintahan yang semakin bersih, efektif, dan dipercaya masyarakat.

Meneruskan Pro Investasi berarti :

- ✓ Pro investasi telah menjadi arah pembangunan dan identitas Kabupaten Boyolali dengan berbagai capaian pembangunan yang telah membawa manfaat bagi masyarakat.
- ✓ Melanjutkan arah pembangunan yang pro investasi berarti tidak hanya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membangun sinergi dengan arah pembangunan nasional, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional secara sistematis dan cepat.
- ✓ Arah pro investasi membutuhkan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan, yang muaranya tetap pada kesejahteraan masyarakat Boyolali, tanpa menghadirkan ketimpangan sosial.
- ✓ Pro investasi tetap dikendalikan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yakni selain berorientasi ekonomi dan sosial, tidak kalah penting pada keberlanjutan lingkungan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta membawa manfaat pembangunan bagi generasi masa depan.

Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL) berarti :

- ✓ Pembangunan yang efektif membutuhkan prasyarat berupa sinergi dan kolaborasi seluruh komponen governance, yakni masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.
- ✓ Seluruh komponen daerah diharapkan mampu melangkah dan menata bersama penuh totalitas yang merupakan implementasi dari prinsip gotong-royong.
- ✓ Gotong royong dengan menjalankan perannya masing-masing namun saling bersinergi dan berkolaborasi dalam ikatan visi pembangunan daerah maupun landasan nilai kearifan yang tertanam kuat di tengah masyarakat berupa filosofi dari Pangeran Sambernyawa “Tiji Tibeh (mati siji, mati kabeh, mukti siji mukti kabeh)”.

  Visi pembangunan Boyolali dicapai dengan beberapa misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Boyolali memiliki 5 misi

yang mencakup keseluruhan bidang pembangunan dengan muatan prinsip dasar dan arah pembangunan di setiap misi sebagai berikut :

Misi 1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan

Misi 2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya,

Misi 3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional, dengan

Misi 4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya,

dengan penjabaran sebagai berikut :

- ✓ Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- ✓ Pembangunan integritas dengan menumbuhkan karakter yang baik bagi individu maupun organisasi dalam mewujudkan tindakan maupun keputusan bagi kebaikan bersama.
- ✓ Pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance.
- ✓ Peran masyarakat yang melahirkan kontrol terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan sangat diharapkan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN. Tidak berhenti pada good and clean governance, Boyolali berusaha menumbuhkan Smart governance, atau pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi, dengan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi-inovasi dan adaptasi teknologi yang terpadu, yang bermuara pada efektifitas, efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.

Misi 5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing,

Kecamatan Ampel selaku Unsur Pembantu Kepala Daerah mendukung dan mensukseskan Visi Misi pembangunan daerah yang merupakan rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Kecamatan Ampel terutama memompang pelaksanaan Misi 4 Boyolali yaitu **Menghadirkan**

Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, Hal tersebut diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra OPD 2021-2026.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di Kecamatan Ampel dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan Kabupaten Boyolali mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

1. Tantangan
   - Implementasi *Good Governance* dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;
   - Perubahan regulasi yang dinamis seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi;
   - Perkembangan pemanfaatan aplikasi informasi teknologi dalam berbagai kegiatan menuntut peningkatan kapasitas SDM aparatur;
   - Keberadaan mayarakat miskin yang membutuhkan bantuan;
   - Pemberdayaan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel);
   - Pembangunan gedung kantor baru;
   - Pengembangan seni dan budaya yang berkembang di masyarakat serta destinasi wisata;
   - Mitigasi kawasan rawan bencana alam yang membutuhkan partisipasi masyarakat;
   - Pengelolaan sampah komunal berbasis partisipasi masyarakat.
2. Peluang
   - Intensifikasi koordinasi, kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi pelayanan prima dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.
   - Optimasi asistensi pembangunan desa dalam rangka penyusunan database pembangunan desa;
   - Optimasi asistensi pengelolaan administrasi desa dalam rangka tertib administrasi desa;
   - Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur pemerintah desa melalui berbagai pelatihan dan pembinaan;

- Pengembangan Kawasan Agropolitan tanaman hortikultura dan pangan yang meliputi wilayah Kecamatan Selo, Cepogo dan Ampel;
- Peningkatan CSR Perusahaan Wilayah Kecamatan Ampel dalam rangka penurunan angka kemiskinan dan pembangunan wilayah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Boyolali.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Dimana Program pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dilingkungan Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; dan

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, sebagaimana Tabel T-C.31.

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL
RKPD TAHUN 2024 KABUPATEN BOYOLALI

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	***Kecamatan Ampel***	***Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu***			***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	***Kecamatan Ampel***				
	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			
	a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	-	a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkaitdengan	13 Laporan	-	
	b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	-	b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	-	
	2. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan		**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**			**2. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**		**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**			
	a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	25,000	a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	25,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**			**3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**			
	a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	100,000	a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	100,000	
2.	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	***Kecamatan Ampel***	***Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti***			***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMANDAN KETERTIBAN UMUM***	***Kecamatan Ampel***	***Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti***			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			
	a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat kecamatan	1 kegiatan	25,000	a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat kecamatan	1 kegiatan	25,000	
3	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM***	***Kecamatan Ampel***	***Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti***			***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM***	***Kecamatan Ampel***	***Persentase koordinasi pemerintahan umum yangditindaklanjuti***			
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			
	a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	400 orang	50,000	a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	400 orang	50,000	
	b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	20,000	b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	20,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
4.	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	***Kecamatan Ampel***	***Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti***			***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***		***Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti***			
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			
	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	-	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	200,000	b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	200,000	
5	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	***Kecamatan Ampel***	***Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti***			***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	***Kecamatan Ampel***	***Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti***			
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			
	a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen		a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen		
	b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen		b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen		
	c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	13 Dokumen		c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	13 Dokumen		
6	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Kecamatan Ampel***	***Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar***			***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Kecamatan Ampel***	***Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar***			
	1. Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**6. Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	-	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	-	
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	-	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	-	
	e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 dokumen	-	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 dokumen	-	
	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	-	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	-	
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			
	a. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1,835,385	a. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3 Orang/bula	1,835,385	
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	76,050	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	76,050	
	c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	c. Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	
	d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	
	f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan TanggapanPemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	
	g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	-	g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			
	a. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,000	a. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,000	
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	
	c. Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Pake	3,000	c. Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Pake	3,000	
	d. Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Pake	15,000	d. Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Pake	15,000	
	e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Pake	10,000	e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Pake	10,000	
	f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	-	f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	-	
	g. Penyediaan bahan / Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Pake	15,000	g. Penyediaan bahan / Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Pake	15,000	
	h. Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	62,000	h. Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	62,000	
	i Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	10,000	i Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	10,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 Dokumen	-	j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 Dokumen	-	
	k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 Dokumen	-	k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 Dokumen	-	
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat	12 Laporan	900	
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7,200	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7,200	
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	-	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	14,000	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	14,000	
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	4,000	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	4,000	
	c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	50,000	c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	50,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Boyolali membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Boyolali. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan Top Down dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan (yang sebelumnya diadakan musyawarah di tingkat Dusun/lingkungan RT, RW dan kelompok-kelompok masyarakat misalnya kelompok tani, kelompok perempuan dsb. Penggalian gagasan dan menyelenggarakan musyawarah dusun (Musdus) serta rembug warga untuk menetapkan jenis dari usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan, dilanjutkan dengan Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang Kabupaten.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Boyolali yang mana penjaringan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem E-Planning yang diajukan ke Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Ampel berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Kecamatan Ampel sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang masuk kedalam RKPD dan Renja Kecamatan Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali adalah usulan yang terdapat kesesuaian dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali serta visi dan misi pembangunan daerah yang sudah ditetapkan. Hasil pengerjaan/penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, dapat terlihat dalam Tabel T-C.32.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Kepentingan Tahun 2023Kabupaten Boyolali

No	Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN AMPEL Program/Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	***Kecamatan Ampel***	***Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu***		
	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Jumlah IMB yang dilayani**		
	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah IMB yang diusulkan	10 desa	
	2. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan		**Jumlah kegiatan penunjang pelayanan publik di Kecamatan yang terselenggara**		
	a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah		Jumlah sosialisasi pelayanan di Kecamatan	1 kegiatan	
			Aplikasi Baru Penunjang Pelayanan PATEN yang dilaksanakan (Aplikasi Antrian dan Aplikasi Display Layanan)	2 kegiatan	
			Frekuensi Studi Banding PATEN untuk upgrade pelayanan PATEN yang dilaksanakan	1 kali	
			Frekuensi PDH/Seragam untuk Pelayanan PATEN	1 kali	
	3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**Jumlah sarana dan prasarana umum dalam kondisi baik**		
	a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah pembangunan / pemeliharaan sarana dan prasarana umum	1 unit	
			Jumlah pemeliharaan/rehab dan atau pembangunan saluran air Kecamatan	1 unit	
			Jumlah penataan lingkungan Tugu Lilin dan sekitarnya	-	
			Jumlah peningkatan sarpras dan kapasitas RPH Ampel	-	
			Jumlah pembangunan tempat sampah terpadu kecamatan	-	
			Jumlah pembangunan Gerbang Selamat Datang di Boyolali	-	
2.	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	***KecamatanAmpel***	***Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti***		
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteramandan Ketertiban Umum		**Jumlah sarana dan prasarana pendukung ketentraman dan keteriban umum yang tersedia**		
	a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat kecamatan	1 kegiatan	
3	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	***KecamatanAmpel***	***Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti***		
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		
	a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	2 kegiatan	
	b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah kegiatan pembinaan kerukunan antar umat beragama yang dilaksanakan	2 kegiatan	
4.	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	***KecamatanAmpel***	***Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti***		
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Jumlah usulan hasil Musdes yang diverifikasi**		
	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah dokumen Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan	1 dokumen	
	b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah		Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1 kegiatan	
			Jumlah Desa yang mendapatkan bantuan usaha untuk PKK	10 desa	
5	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	***KecamatanAmpel***	***Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)***		

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Jumah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang laksanakan**		
	a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)	2 kegiatan	
	b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah desa yang menerima bantuan / modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan	10 desa	
6	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	***Kecamatan Ampel***	***Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desayang di tindak lanjuti***		
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa**		
	a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah desa yang terfasilitasi pedampingan administrasi dan keuangan desa	10 desa	
7	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Kecamatan Ampel***	***Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar***		
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Gaji dan tunjangan ASN, Gaji non ASN**		
	a. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Gaji PTT dan Tenaga Honorer sebanyak 1 orang	1 tahun	
	c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	
	d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12 bulan	
	e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	18 laporan	
	f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	2	
	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah**		
	a. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	
	b. Penyediaan peralatan rumah tangga		Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	
	c. Penyediaan bahan logistik kantor		Bahan Logistik Kantor	12 bulan	
	d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	
	e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Koran Langganan Bulanan dan Buku Bacaan	12 bulan	
	f Penyediaan bahan / Material		ATK	12 bulan	
	g. Fasilitasi kunjungan tamu		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	
	h. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	
	3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jasa Surat Menyurat	12 bulan	
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	
	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	
	4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jasa pemeliharaan barang milik daerah**		
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	12 bulan	
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan kerja yang dipelihara	12 bulan	
	c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan bangunan	12 bulan	
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Barang milik daerah**		
	a. Pengadaan Mebel		Mebel	1 paket	
	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan Mesin lainnya	-	
	c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	-	
	d. Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	-	
	6. Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat**		
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 dokumen	
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	
	d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	1 dokumen	

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	1 dokumen	
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang	15 dokumen	
	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah ***"Indonesia Yang Mandiri, Adil dan Makmur".***

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMN (RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat;
2. RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian;
3. RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian dayasaing kompetitif perekonomian

berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat;

4. RPJMN ke-4 (2020–2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yangkokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Saat ini, kita sedang memasuki RPJM ke-4 (2020-2025), yang disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Presiden/Wakil Presiden. Visi dan misi pembangunan pemerintah dalam RPJM Nasional harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun RPJM Daerah.

Dalam Kajian Awal RPJMD 2021-2026, Visi Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026, yaitu ***"Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi; Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas*** (***Metal***)***"***.

Untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 5 (lima) misi adalah sebagai berikut:

1. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan;
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya;
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional;
4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi merupakan cara pandang kedepan, kearah mana Kecamatan Ampel akan diarahkan dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif untuk mencapai tujuan, dalam mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi guna mencapai kondisi yang diinginkan oleh Kecamatan Ampel secara terus menerus dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsinya agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengadakan perubahan kearah kebaikan. Perubahan tersebut harus disusun dengan tahapan terencana, konsisten dan

berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang senantiasa berorientasi pada pencapaian hasil.

Untuk mendukung visi Bupati Boyolali dan Wakil Bupati ***"Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi; Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (Metal)".*** Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali pelaksanaan Misi 4 Boyolali yaitu ***Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.***

Guna mencapai visi dan misi tersebut diatas maka Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali menetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ampel

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	800	823	833	893	903
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,11	82,72	83,55	84,18	85
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sakip Kecamatan Ampel	80,5	81,15	81,4	81,65	81,9

Berdasarkan pada tabel tujuan dan sasaran diatas rencana kerja Kecamatan Ampel adalah sebagai berikut:

3.2.1 Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

3.2.2 Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;

3.2.3 Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

3.2.4 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;

3.2.5 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;

3.2.6 Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerahKabupaten/Kota.

Dimana Sasaran yang hendak dicapai di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public;
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Langkah-langkah perumusan tujuan dan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

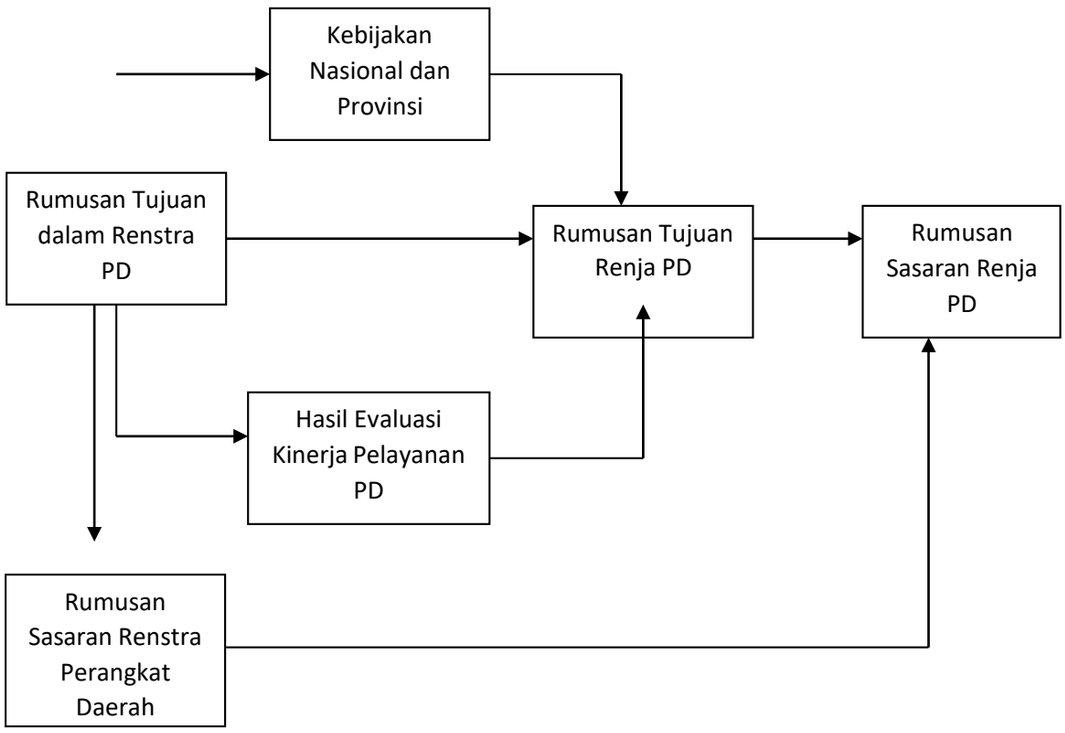

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Tahun 2024 tetap merujuk pada target RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2024, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan. Selain itu perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ampel juga ikut mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Boyolali dimana Kecamatan Ampel sebagai unsur kewilayahan memiliki program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut;

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan. Peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan terkait pelayanan administrasi maupun pelayanan sarana dan prasarana umum, dengan orientasi hasil berupa meningkatnya indeks kepuasan masyarakat di setiap kecamatan. Kerangka kegiatan yang akan dijalankan berupa koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan, serta koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Program ini diarahkan untuk menopang pelaksanaan peran strategis Kecamatan, yakni pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Program ini memiliki indikator kinerja yang berperan dalam pengentasan kemiskinan, yakni persentase stimulus bagi masyarakat miskin/berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan. Indikator kinerja di dalam program ini juga terkait tindak lanjut hasil koordinasi pemberdayaan masyarakat. Kerangka kegiatan untuk menjalankan pemberdayaan masyarakat, antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa atau kelurahan, pemberdayaan masyarakat kelurahan serta pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dan peningkatan kapasitas lembaga

722 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 kemasyarakatan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Program ini terkait salah satu peran Kecamatan di dalam koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan. Kerangka kegiatan teknis yang akan dijalankan, antara lain terkait sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

4. Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum

   Salah satu fungsi Kecamatan yakni menyelenggarakan pemerintahan umum di wilayahnya. Pemerintahan umum di wilayah Kecamatan diarahkan untuk penguatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, serta pembinaan kerukunan antar dan intra umat beragama dalam rangka menjaga kohesivitas sosial di wilayah Kecamatan.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   Kecamatan memiliki peran strategis sebagai intermediary antara pemerintah daerah dengan desa. Oleh karena itu, program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas desa di dalam menjalankan kewenangannya, serta membangun sinergi antara pembangunan daerah dengan desa. Kerangka kegiatan teknis yang akan dijalankan berupa fasilitasi administrasi pemerintahan dan keuangan desa.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali pada Tahun 2024 ini, maka disusun beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Fungsi Kewilayahan yang dijalankan oleh Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Ada 6 Program, 14 kegiatan dan 50 Sub Kegiatan pada Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dengan Rencana Anggaran sebesar Rp. 2.524.535.000,- yang digunakan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan dan Non Urusan sebagaimana tabel T-C.33.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN AMPEL KAB. BOYOLALI
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN AMPEL						**2.524.535.000,00**							**2.524.535.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.524.535.000,00**							**2.524.535.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.104.535.000,00**							**2.104.535.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yangTerpenuhi sesuai Standar***	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**2.104.535.000,00**						**100 Persen**	**2.104.535.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	7 Kegiatan		7 Kegiatan	7 Kegiatan	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	2 Dokumen	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	2 Dokumen	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	15 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	15 Laporan	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	4 Laporan	0,00	KECAMATAN AMPEL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	8 Kegiatan		8 Kegiatan	8 Kegiatan	1.911.435.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	13 Orang/bulan	1.911.435.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.835.385.000,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	13 Orang/bulan	1.835.385.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	76.050.000,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	13 Dokumen	76.050.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	1 Laporan	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	18 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	18 Laporan	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN AMPEL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	3 Laporan	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	3 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	3 Laporan	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	13 Dokumen	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	13 Dokumen	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	11 Kegiatan		11 Kegiatan	11 Kegiatan	117.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	4 Paket	117.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket	2.000.000,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	4 Paket	2.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	4 Paket	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket	3.000.000,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	4 Paket	3.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket	15.000.000,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	4 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket	10.000.000,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	4 Paket	10.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	4 Dokumen	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket	15.000.000,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	4 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Laporan	4 Laporan	62.000.000,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	4 Laporan	62.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	4 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	13 Dokumen	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	13 Dokumen	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	8.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	12 Laporan	8.100.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	12 Laporan	900.000,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	12 Laporan	900.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	7.200.000,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	12 Laporan	7.200.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	4 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	4 Laporan	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	68.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	6 Unit	68.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	6 Unit	14.000.000,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	6 Unit	14.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	38 Unit	4.000.000,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	38 Unit	4.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	3 Unit	50.000.000,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Ampel	3 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01	**KECAMATAN**						**420.000.000,00**							**420.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu***	**87 Persen**		**87 Persen**	**87 Persen**	**125.000.000,00**						**87 Persen**	**125.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	13 Laporan	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		Laporan	13 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	13 Laporan	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		Dokumen	39 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	39 Dokumen	0,00	KECAMATAN AMPEL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	2 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	2 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	2 Dokumen	100.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	2 Dokumen	100.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti*** ***Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)***	**100 Persen** **100 Persen**		**100 Persen** **100 Persen**	**100 Persen** **100 Persen**	**200.000.000,00**						**100 Persen** **100 Persen**	**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	6 Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan		Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	13 Laporan	200.000.000,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	13 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti***	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**25.000.000,00**						**100 Persen**	**25.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	13 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPDTAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET T2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	13 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	13 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANUMUM**	***Persentase koordinasi pemerintahan umum yangditindaklanjuti***	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**70.000.000,00**						**100 Persen**	**70.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah*	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	70.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	400 Orang	70.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Orang		Orang	400 Orang	50.000.000,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	400 Orang	50.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
			Negara Kesatuan RepublikIndonesia													
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang		Orang	500 Orang	20.000.000,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	500 Orang	20.000.000,00	KECAMATAN AMPEL
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti***	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**0,00**						**100 Persen**	**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	3 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Desa Se Kec. Ampel	8 Dokumen	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Desa Se Kec. Ampel	8 Dokumen	0,00	KECAMATAN AMPEL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		Dokumen	26 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Desa Se Kec. Ampel	26 Dokumen	0,00	KECAMATAN AMPEL
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Ampel, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Desa Se Kec. Ampel	13 Dokumen	0,00	KECAMATAN AMPEL
	J U M L A H							**2.524.535.000,00**							**2.524.535.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Ampel Tahun 2024 merupakan pedoman dan perencanaan awal tahunan yang harus dilaksanakan Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan dengan prinsip satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan dilingkungan Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, dimana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Tahun 2024 ini telah diupayakan sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel, disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada pada tahun tahun sebelumnya, isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali juga disusun berdasarkan pertimbangan kebutuhan masyarakat serta mendukung fungsi aparatur sebagai fasilitator pembangunan dan organisasi pemerintah.

Kaidah-kaidah pelaksanaan dalam Rencana Kerja ini adalah dengan pendekatan perencanaan pembangunan daerah model bottom-up dan atas-bawah Top-down diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, hingga kecamatan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah, menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan dengan pendekatan partisipatif yaitu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (Stakeholders), serta pendekatan politis untuk menjalankan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye yang disusun ke dalam Rancangan RPJMD dan dijalankan pada tahapan tiap tahunnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja PD. Dimana pelaksanaan Rencana Kerja PD Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali juga akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi. Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali dimana implikasinya Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali akan mengurangi jumlah pagu sub kegiatan dan merasionalisasi kembali anggaran pada setiap sub kegiatan yang ada. Dalam mengeliminasi dan merasioanalisasi RENJA yang ada, Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali akan benar-benar menelaah dimana sub kegiatan-sub kegiatan yang dapat dieliminasi tersebut adalah sub kegiatan-sub kegiatan yang paling kecil peranannya dalam pencapaian target dan sasaran dalam RENSTRA.

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan, serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu mohon aparat pemerintah khususnya Aparatur Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali dan lembaga lainya bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Renja ini.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran pada Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.

GG. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

KECAMATAN BOYOLALI

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Panjatkan Kehadirat Alloh SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat, Taufiq, dan HidayahNya sehingga Kecamatan Boyolali dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun yang lalu dan tahun berjalan. Hal tersebut bertujuan agar program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD sesuai dengan Renstra PD. Selain itu hasil evaluasi terhadap renja tahun lalu dan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja PD dilakukan dalam rangka optimasi pencapaian sasaran Renstra PD.

Renja Tahun 2024 Kecamatan Boyolali mendukung dan mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Boyolali 2021-2026 yaitu BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVENTASI, Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL) diarahkan pada “Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh, ikonik, mandiri, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan. Semoga dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Boyolali dapat bermanfaat bagi pembangunan di wilayah Kecamatan Boyolali sekarang dan pada masa-masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

	PENGANTAR	2
	DAFTAR ISI	3
BAB I.	PENDAHULUAN	4
	1.1 Latar Belakang	4
	1.2 Landasan Hukum	6
	1.3 Maksud dan Tujuan	8
	1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II.	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
	3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	40
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	41
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
	4.1 Program dan Kegiatan	43
BAB V.	PENUTUP	97

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.1 Latar Belakang

Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari perangkat daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah selama periode 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah selamaperiode 5 (lima) tahun. Tata cara / proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) terdiri dari:

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal RenjaPerangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahunlalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Boyolali adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang system Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2004-2014:
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pelayanan Publik:
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2008 rencana Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan Kabupaten Boyolali;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 232);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225) dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 224);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 78 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Kecamatan
15. Rencana Strategis Kecamatan Boyolali Tahun 2022-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Boyolali 2024 adalah untuk memberikan Landasan Kebijakan Teknis Tahunan dalam Kerangka Pencapaian Visi Misi setiap tahapnya (satu tahunan) dan sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Camat pada Akhir Tahun Anggaran sebagai bagian dari pelaksanaan Kebijakan Daerah. Renja Tahun 2024 Kecamatan Boyolali disusun sebagai acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Boyolali Tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2024 Kecamatan Boyolali adalah menetapkan prioritas Program dan Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan sesuai Rencana Strategis yang dilaksanakan per tahap (tahunan) melalui sumber pembiayaan APBD dan menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Boyolali Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Boyolali Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1. Program dan Kegiatan
BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Revieu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dan realisasi Renstra Kecamatan Boyolali yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Boyolali dan/atau realisasi APBD Kecamatan Boyolali.

Adapun hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 untuk Kecamatan Boyolali sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/keluaran yang telah direncanakan yaitu:
   a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
   b. Peningkatan Kapasitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut:
   a. PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN;
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
   c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   g. Penyediaan Bahan/Material;
   h. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
   i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
   j. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   k. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

l. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
n. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
o. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
p. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum;
q. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
r. Sinergitas denganKepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
s. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
t. Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan untuk Kecamatan Boyolali tidak ada;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
   a. Kelompok sasaran belum terjangkau program/kegiatan seluruhnya, dan dampak dari pandemi belum pulih maksimal; dan
   b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah dapat memenuhi / melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan demikian target capaian program Renstra PD dapat tercapai; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan meningkatkan target capaian dari tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan potensi sumber daya dan dana yang ada.

Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat Tabel T-C.29

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Boyolali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN									
	KECAMATAN BOYOLALI									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	100	100	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan									
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	7 Kegiatan	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100
	Kegiatan									
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100
	Kegiatan									
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Kegiatan	-	-	-	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
	Kegiatan									
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Kegiatan	-	-	-	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
	Kegiatan									

X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100
	Kegiatan									
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
	Kegiatan									
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
	Kegiatan									
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	-	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100	-	-	100
07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		87,00	84	85	85	100	86	86	100
	Kegiatan									
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
	Kegiatan									
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
	Kegiatan									
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Kegiatan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	100	100	100	100	**100**	100	100

		Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan (program kemiskinan)		100	100	100				
	Kegiatan									
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
	Kegiatan									
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	-	-	100
07:01:04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	**100**	100	100	100	100	**100**	100	100
	Kegiatan									
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
07:01:05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	100	100	100	100	**100**	100	100
	Kegiatan									
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
07:01:06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti**	**100**	100	100	100	100	**100**	100	100
	Kegiatan									
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	12 Desa	12 Desa	12 Desa	100	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Banyudono dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang telah disesuaikan Kecamatan Boyolali disajikan pada Tabel T-C.30

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Boyolali 2023
Kabupaten Boyolali

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Dearah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat			25 Dokumen	25 Dokumen	7 Kegiatan	7 Kegiatan	25 Dokumen	25 Dokumen	7 Kegiatan	7 Kegiatan	
2	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1 Tahun	1 Tahun	8 Kegiatan	8 Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	8 Kegiatan	8 Kegiatan	
3	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	1Kegiatan	
4	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
5	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 Bulan	12 Bulan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	10 Kegiatan	10 kegiatan	
6	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Bulan	12 Bulan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	
7	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Bulan	12 Bulan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	
8	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah			4 Paket	4 Paket	2 Kegiatan	2 Kegiatan	4 Paket	4 Paket	2 Kegiatan	2 Kegiatan	

9	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
10	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan			1 Keg	1 Keg	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
11	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			1 Unit	1 Unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Unit	1 Unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
12	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			1 Tahun	1 Tahun	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	
13	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			3 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
14	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
15	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			4 Kegiatan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	
16	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			6 Desa	6 Desa			6 Desa	6 Desa			

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Boyolali tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain, yaitu Kecamatan Boyolali merupakan urusan Pemerintahan Umum, mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan.

Berdasarkan telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi terhadap Renstra Kecamatan Boyolali tidak dilakukan karena tidak ada keterkaitan langsung antara pelayanan atau permasalahan di tingkat kecamatan dengan permasalahan di K/L maupun PD tingkat provinsi**.**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Boyolali, secara umum permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Boyolali adalah berikut:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang meliputi;
   a. Masih perlunya penerapan instrument pengendalian kualitas pelayanan publik;
   b. Belum optimalnya pelayanan kependudukan di kecamatan.

   Dimana akar permasalah pada pelayanan publik di Kecamatan Boyolali yaitu:
   - Masih perlunya SKM secara regular sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan;
   - Belum terdistribusinya sarana dan prasarana pelayanan.
2. Keterbatasan sumber daya aparatur, selain terbatasnya jumlah sumberdaya yang dimiliki, sumberdaya yang aparatur yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi juga terbatas.

Dampak Pelayanan Kecamatan Boyolali terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah Visi pembangunan daerah merupakan rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih yang secara substansi memuat tentang rumusan umum mengenai keadaan yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Kondisi yang akan dicapai dalam bentuk visi, kemudian dijabarkan oleh misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.

Berbijak dari amanat dan upaya membangun sinkronisasi dengan visi pembangunan jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005 - 2025, serta dalam rangka menjawab isu strategis aktual dan menjaga keberlanjutan pembangunan, maka dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Boyolali 2021-2026 yaitu:

"Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi" Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL).

Kecamatan Boyolali selaku Unsur Pembantu Kepala Daerah mendukung dan mensukseskan Visi Misi pembangunan daerah yang merupakan rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Kecamatan Boyolali terutama memompang pelaksanaan Misi 4 Boyolali yaitu **Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya,** Hal tersebut diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra OPD 2021-2026.

Tantangan dan peluang dalam pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Boyolali dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan Kabupaten Boyolali mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Tantangan
   - Kecamatan Boyolali merupakan wilayah penyangga pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali, sehingga ditutut kinerja yang lebih bila dibandingkan kecamatan lainnya;
   - Karakteristik masyarakat yang merupakan transisi dari desa ke kota yang cenderung kritis terhadap pemerintahan;
   - Perkembangan investasi nasional/internasional;
   - Aspek lingkungan sebagai penghambat perkembangan industri;
   - Banyaknya alih fungsi lahan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan.
2. Peluang
   - Dukungan Visi Bupati dalam mendukung investasi;
   - Kecamatan Boyolali masuk ke dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali;
   - Merupakan daerah pengembangan perumahan komersial;
   - Pelayananperijinan yang dipermudah;

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- Pengalihan pengelolaan PBB dari pusat ke daerah;
- Besarnya lahan kawasan industry menengah bias untuk menarik investor;
- Akses jalan guna kelancaran pergerakan barang/jasa;
- Dukungan dunia usaha (perusahaan/pabrik) berupa *Coorporate Social Responsibility* (CSR), karena merupakan daerah industry menengah;
- Sinergi pembangunan dengan pemerintah desa.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Boyolali untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Boyolali.

Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Boyolali Tahun 2021-2026 seperti dalam tabel berikut:

Tabel. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : "BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI" Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL)			
MISI : Boyolali menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik kecamatan 2. Penguatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan.	1. Peningkatan penerapan standar pelayanan publik 2. Peningkatan inovasi pelayanan
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	1. Pengembangan kelembagaan berbasis kinerja	1. Peningkatan fasilitasi perangkat daerah dalam mengimplementaikan SAKIP

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra PD Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Tahun 2022–2026.

Review terhadap rancangan Awal RKP berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Dengan demikian dapat ditelaah terhadap rancangan awal RKPD, sebagaimana pada Tabel T-C.31

Tabel T-C. 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Boyolali

Kecamatan Boyolali

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ca-tatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai -an	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kec Boyolali**	**Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	100	**1.383.169**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kec Boyolali**	**Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	100	1.383.169	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Perencana an,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan perencanaanpe nganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	7 Kegia tan	-	Perencana an,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan perencanaanpeng anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	7 Kegiat an	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyusunan Dokumen Perencana an Perang kat Daerah	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Perencana an Perang kat Daerah	2 Doku men	-	Penyusunan Dokumen Perencana an Perang kat Daerah	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Perencana an Perang kat Daerah	2 Doku men	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Doku men	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	1 Doku men	-	

			Dokumen RKA-SKPD					SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 laporan	-	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**	**Kec Boyolali**				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Kegiatan	4.343.501	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Kegiatan	4.343.501	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**	**Kec Boyolali**				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kec Boyolali**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang / bulan	3.986.028	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kec Boyolali**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang / bulan	3.986.028	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	357.473	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	357.473	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksa naan Akun tansi SKPD	12 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksa naan Akun tansi SKPD	12 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	1 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	-	

			Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	-	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**Kec Boyolali**	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**	**Kec Boyolali**				
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kec Boyolali**	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Kegiatan	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kec Boyolali**	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Kegiatan	-	

			pada SKPD								
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**	**Kec Boyolali**				
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Rekon siliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Rekon siliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kec Boyolali**	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Kegiatan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kec Boyolali**	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Kegiatan		
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen		
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Kegiatan	652.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Kegiatan	652.700	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**	**Kec Boyolali**				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Kec Boyolali**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.758	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Kec Boyolali**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.758	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kec Boyolali**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	123.150	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kec Boyolali**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	123.150	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Kec Boyolali**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	11.350	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Kec Boyolali**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	11.350	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Kec Boyolali**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	56.414	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Kec Boyolali**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	56.414	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	**Kec Boyolali**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	4 Paket	41.660	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	4 Paket	41.660	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	
	Penyediaan Bahan/Material	**Kec Boyolali**	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	4 Paket	58.905	Penyediaan Bahan/Material	**Kec Boyolali**	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	4 Paket	58.905	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	289.379	Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	289.379	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	62.084	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	62.084	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Penatausahaan	4 Laporan		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	4 Laporan		

			Arsip Dinamis pada SKPD					pada SKPD			
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik pada SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik pada SKPD	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 Dokumen		
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	3 Kegiatan	110.364	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	3 Kegiatan	110.364	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.700	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.700	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	103.164	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	103.164	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.500	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	3 Kegiatan	262.632	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	3 Kegiatan	262.632	

			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Daerah		Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Kec Boyolali**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	26.992	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Kec Boyolali**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	26.992	
	Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kec Boyolali**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	25.640	Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kec Boyolali**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	25.640	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Kec Boyolali**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	210.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Kec Boyolali**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	210.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kec Boyolali**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	-	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kec Boyolali**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	-	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Pengadaan Mebel	**Kec Boyolali**	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	Pengadaan Mebel	**Kec Boyolali**	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kec Boyolali**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kec Boyolali**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	**Kec Boyolali**	Jumlah Unit Gedung Kantor	-	-	Pengadaan Gedung Kantor atau	**Kec Boyola**	Jumlah Unit Gedung Kantor	-	-	

	lainnya		atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Bangunan lainnya	**li**	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Kec Boyolali**	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Kec Boyolali**	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**87,00**	100.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**87,00**	100.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	-	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	**Kec Boyolali**	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	-	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	**Kec Boyolali**	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	-	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Peningkatan	39 Dokumen	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	39 Dokumen	-	

			Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Tingkat Kecamatan		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Kegiatan	-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Kegiatan	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Kegiatan	2.150.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Kegiatan	2.150.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	2.150.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	2.150.000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	**953.014**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	953.014	
			Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/keluraha n yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)					**Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)**			
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Kegiatan	953.014	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Kegiatan	953.014	

	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**Kec Boyolali**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**Kec Boyolali**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	-	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	75.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	75.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	**Kec Boyolali**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	**Kec Boyolali**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Pember dayaan Kelurahan	3 Kegia tan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kec Boyola li**	Jumlah Kegiatan Pember dayaan Kelurahan	3 Kegia tan		
		Kec Boyolali	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokm as / Orma s	878.014	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kec Boyola li**	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokm as / Ormas		
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**32.800**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	**100**	878.014	
	Kegiatan					**Kegiatan**				32.800	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiat an	32.800	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kec Boyola li**	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiata n		
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**				32.800	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**Kec Boyolali**	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Lapor an	32.800	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**Kec Boyola li**	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Lapora n		

5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**85.366**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	32.800	
	Kegiatan					**Kegiatan**				85.366	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	**85.366**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan		
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**				85.366	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**Kec Boyolali**	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	400 Orang	41.116	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**Kec Boyolali**	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang		

			Republik Indonesia								
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	**Kec Boyolali**	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	44.250	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	**Kec Boyolali**	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	41.116	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti**	**100**	**-**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti**	**100**	44.250	
	Kegiatan					**Kegiatan**				-	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	-	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kec Boyolali**	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan		
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**				-	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	-	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen		

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen	-	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen	-	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 Dokumen	-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	**Kec Boyolali**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 Dokumen	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini dapat diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari PD lain yang saling berkaitan berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan (yang sebelumnya diadakan musyawarah di tingkat Dusun/lingkungan RT, RW dan kelompok-kelompok masyarakat misalnya kelompok tani, kelompok perempuan dsb. Penggalian gagasan dan menyelenggarakan musyawarah dusun (Musdus) serta rembug warga untuk menetapkan jenis dari usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan, dilanjutkan dengan Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang Kabupaten.

Usulan tersebut disesuaikan dan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD, serta visi dan misi pembangunan daerah yang sudah ditetapkan.

Hasil pengerjaan/penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, dapat terlihat dalam Tabel T-C.32

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali

No	Program/Kegiatan/ Subkeg	Lokasi	Rekomendasi Anggaran	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan gorong-gorong, drainase di jalan kabupaten	Mulyosari RT 02 Rw 10, Penggung, Boyolali, Kab. Boyolali		1 paket	DPUPR
6	Pelatihan Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dk. Sambirjo, Ds. Winong, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, Kab. Boyolali		1 kelompok	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah meliputi kebijakan program strategis nasional (PSN), amanat pembangunan global dan nasional, dan dinamika pembangunan nasional lainnya.

Isu strategis nasional tidak lepas dari Arahan Presiden Republik Indonesia sebagai dasar penyusunan RPJMN Tahun 2020- 2024, yaitu:

1. Pembangunan SDM: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri.
2. Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law terutama menerbitkan 2 undang-undang, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saat ini kita sedang memasuki RPJMN Tahun ke-4 yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Berpegang dari RPJMN visi Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2016 yaitu: "*Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi" Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas.*

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Boyolali ke depan telah tertuang dalam misi Bupati Boyolali sebagai berikut:

1. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan;
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, berkarakter dan Berbudaya;
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional;
4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efktif dan Terpecaya;dan
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Kecamatan Boyolali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diarahkan bisa mencapai tujuan yang telah direncanakan, dan secara terus menerus melakukan perbaikan/perubahan kearah yang lebih maju, inovatif dan berdaya saing. Kecamatan Boyolali dalam pelaksanaan misi ke-4 yaitu: "*Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya"* guna mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Boyolali Tahun 2024 sesuai Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 sebagaimana dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. Tujuan dan Sasaran Renja 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,55
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan Boyolali	80.90

Kecamatan Boyolali

Berdasarkan pada tabel tujuan dan sasaran diatas rencana kerja

Kecamatan Boyolali adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
3. Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
5. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
6. Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Adapun sasaran yang hendak dicapai di Kecamatan Boyolali adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah.

Langkah-langkah perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

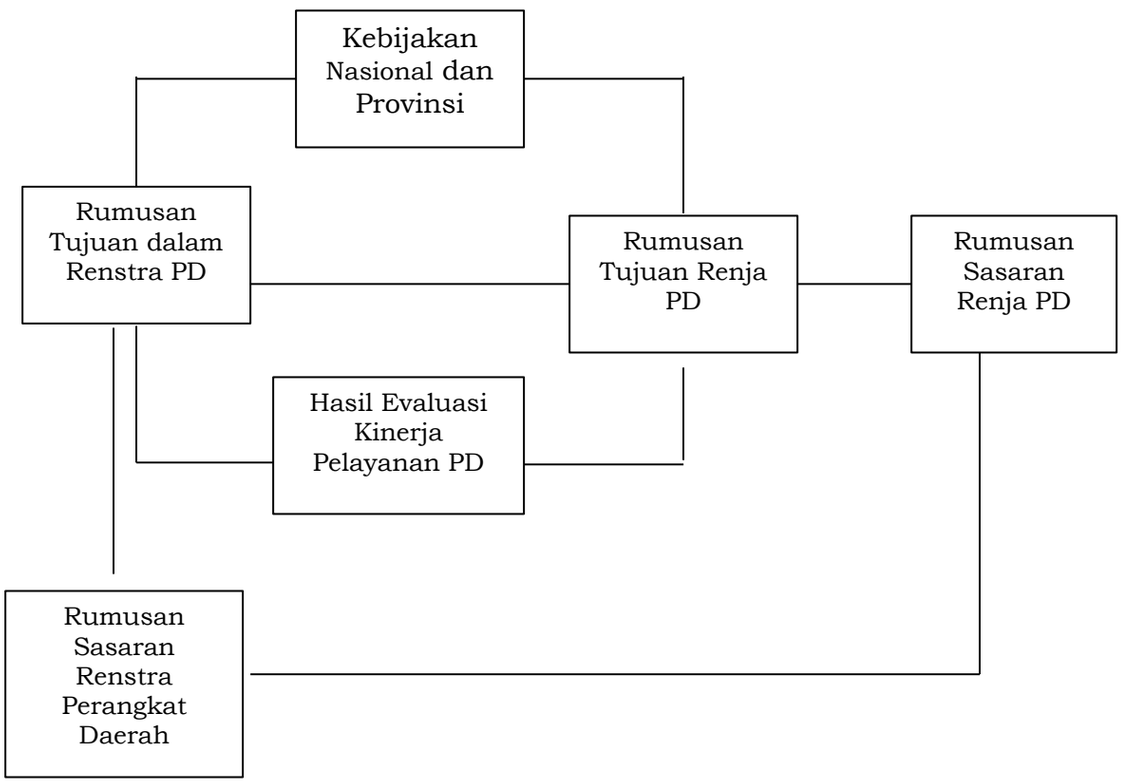

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Kecamatan Boyolali melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain melaksanakan kegiatan rutin Perangkat Daerah, juga melaksanakan urusan wajib dan pilihan.

Rencana Kerja Kecamatan Boyolali yang meliputi program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tetap mengacu pada target RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2024, juga mendukung pencapaian visi misi Bupati Boyolali.

Prioritas program Kecamatan Boyolali sebagai unsur kewilayahan yang sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum; dan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan pada Kecamatan Boyolali dan 3 kelurahan (Banaran, Siswodipuran dan Pulisen) Tahun Anggaran 2024, yang digunakan untuk urusan kewilayahan dan non urusan dengan rencana anggaran Rp. 8.858.073.000,-.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan, yaitu pada Tabel T-C.33

TABEL TC.33

Rumusan Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BOYOLALI						**6,138,973,000**							**7,443,843,000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1,885,249,000**							**3,457,815,000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1,885,249,000**							**3,457,815,000**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Prosentase Penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart***	**100 Persen**			**100 Persen**	**624,883,000**						**100 Persen**	**1,136,015,000**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	7 Kegiatan			7 Kegiatan	0			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	7 Kegiatan	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			2 Dokumen	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	2 Dokumen	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	1 Dokumen	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	1 Dokumen	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	1 Dokumen	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	1 Dokumen	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60 Laporan			16 Laporan	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	15 Laporan	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan			4 Laporan	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	4 Laporan	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	8 Kegiatan			8 Kegiatan	172,382,000			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	8 Kegiatan	291,650,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 Dokumen			13 Dokumen	172,382,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	13 Dokumen	291,650,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen			12 Dokumen	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	12 Dokumen	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48 Dokumen			12 Dokumen	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	12 Dokumen	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan			1 Laporan	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	1 Laporan	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen			1 Dokumen	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	1 Dokumen	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan			18 Laporan	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	18 Laporan	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen			1 Dokumen	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	1 Dokumen	0	KECAMATAN BOYOLALI

	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	1 Kegiatan			1 Kegiatan	0			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	1 Kegiatan	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan			3 Laporan	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	3 Laporan	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Kegiatan			1 Kegiatan	0			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	1 Kegiatan	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	39 Dokumen			13 Dokumen	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	13 Dokumen	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	10 Kegiatan			10 Kegiatan	272,941,000			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	10 Kegiatan	476,000,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	3,050,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	4 Paket	8,000,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	50,150,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	4 Paket	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	3,000,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	4 Paket	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	30,000,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	4 Paket	60,000,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	16,060,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	4 Paket	40,000,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	25,890,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	4 Paket	60,000,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16 Laporan			4 Laporan	114,791,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	4 Laporan	248,000,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan			4 Laporan	30,000,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	4 Laporan	60,000,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	39 Dokumen			13 Dokumen	0	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	13 Dokumen	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	39 Dokumen			13 Dokumen	0	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	13 Dokumen	0	KECAMATAN BOYOLALI

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Kegiatan			3 Kegiatan	47,400,000			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	3 Kegiatan	99,925,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan			12 Laporan	900,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	12 Laporan	3,600,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	45,500,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	12 Laporan	96,325,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan			4 Laporan	1,000,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	4 Laporan	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Kegiatan			3 Kegiatan	132,160,000			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	3 Kegiatan	268,440,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	14,660,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali		52,440,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			10 Unit	7,500,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	20 Unit	16,000,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			4 Unit	110,000,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	4 Unit	200,000,000	KECAMATAN BOYOLALI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu***	**89 Persen**			**87 Persen**	**1,100,000,000**						**89 Persen**	**1,150,000,000**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	2 Kegiatan			2 Kegiatan	0			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	2 Kegiatan	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	39 Laporan			13 Laporan	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	13 Laporan	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	156 Dokumen			39 Dokumen	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	39 Dokumen	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	1 Kegiatan			1 Kegiatan	0			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	1 Kegiatan	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan			2 Laporan	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	2 Laporan	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*	1 Kegiatan			1 Kegiatan	1,100,000,000			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	1 Kegiatan	1,150,000,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	8 Dokumen			2 Dokumen	1,100,000,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	2 Dokumen	1,150,000,000	KECAMATAN BOYOLALI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindak***	**100 Persen 100 Persen**			**100 Persen**	**75,000,000**						**0 Persen 100 Persen**	**1,076,800,000**	

			lanjuti												
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	2 Kegiatan			2 Kegiatan	75,000,000			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	2 Kegiatan	250,000,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan			6 Lembaga Kemasyarakatan	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	6 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	52 Laporan			13 Laporan	75,000,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	13 Laporan	200,000,000	KECAMATAN BOYOLALI

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 Kegiatan			3 Kegiatan	0			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan	3 Kegiatan	826,800,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan			6 Lembaga Kemasyarakatan	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas			6 Pokmas / Ormas	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	826,800,000	KECAMATAN BOYOLALI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti***	**89 Persen**			**87 Persen**	**0**						**89 Persen**	**25,000,000**	

	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	1 Kegiatan			1 Kegiatan	0			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan	1 Kegiatan	25,000,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	39 Laporan			13 Laporan	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan	13 Laporan	25,000,000	KECAMATAN BOYOLALI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti***	**100 Persen**			**100 Persen**	**85,366,000**						**100 Persen**	**70,000,000**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	2 Kegiatan			2 Kegiatan	85,366,000			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan	2 Kegiatan	70,000,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1600 Orang			400 Orang	41,116,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	400 Orang	50,000,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2000 Orang			500 Orang	44,250,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	500 Orang	20,000,000	KECAMATAN BOYOLALI

6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Presentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti***	**100 Persen**			**100 Persen**	**0**						**100 Persen**	**0**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	3 Kegiatan			3 Kegiatan	0			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Desa se Kecamatan Boyolali	3 Kegiatan	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	24 Dokumen			8 Dokumen	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Desa se Kecamatan Boyolali	8 Dokumen	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	78 Dokumen			26 Dokumen	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Desa se Kecamatan Boyolali	26 Dokumen	0	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	104 Dokumen			13 Dokumen	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Desa se Kecamatan Boyolali	26 Dokumen	0	KECAMATAN BOYOLALI
7.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Prosentase Penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart***	**100 Persen**			**100 Persen**	**4,253,724,000**						**100 Persen**	**3,986,028,000**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	8 Kegiatan			8 Kegiatan	4,253,724,000			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	8 Kegiatan	3,986,028,000	KECAMATAN BOYOLALI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan			37 Orang/bulan	4,253,724,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	37 Orang/bulan	3,986,028,000	KECAMATAN BOYOLALI
	J U M L A H							**6,138,973,000**							**7,443,843,000**	

TABEL TC- 33

Rumusan Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kelurahan Banaran Kecamatan Boyolali

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		KELURAHAN BANARAN						**931,212,000.00**							**4,271,692,000.00**		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**931,212,000.00**							**4,271,692,000.00**		
	7.01	**KECAMATAN**						**931,212,000.00**							**4,271,692,000.00**		
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart***	**100 Persen**			**100 Persen**	**298,044,000.00**						**100 Persen**	**3,638,524,000.00**		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	8 Kegiatan			8 Kegiatan	59,520,000.00			-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Banaran	8 Kegiatan	300,000,000.00	KELURAHAN BANARAN	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 Dokumen			12 Dokumen	59,520,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Banaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Banaran	13 Dokumen	300,000,000.00	KELURAHAN BANARAN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	10 Kegiatan			10 Kegiatan	153,624,000.00			-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	10 Kegiatan	3,253,624,000.00	KELURAHAN BANARAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	2,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Banaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	4 Paket	2,000,000.00	KELURAHAN BANARAN	
	7.01.01.2.06.0	Penyediaan Peralatan dan															

	002	Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	40,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	4 Paket	40,000,000.00	KELURAHAN BANARAN	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket			1 Paket	3,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Banaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	4 Paket	3,000,000.00	KELURAHAN BANARAN	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	15,914,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Banaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	4 Paket	15,914,000.00	KELURAHAN BANARAN	

	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	10,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Banaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	4 Paket	10,000,000.00	KELURAHAN BANARAN	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	15,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Banaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	4 Paket	15,000,000.00	KELURAHAN BANARAN	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16 Laporan			4 Laporan	57,710,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Banaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	4 Laporan	3,157,710,000.00	KELURAHAN BANARAN	

	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan			4 Laporan	10,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Banaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kecamatan Boyolali	4 Laporan	10,000,000.00	KELURAHAN BANARAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Kegiatan			3 Kegiatan	21,900,000.00			-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Banaran	3 Kegiatan	21,900,000.00	KELURAHAN BANARAN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan			12 Laporan	900,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Banaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Banaran	12 Laporan	900,000.00	KELURAHAN BANARAN	

	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	20,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Banaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Banaran	12 Laporan	20,000,000.00	KELURAHAN BANARAN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan			4 Laporan	1,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Banaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Banaran	4 Laporan	1,000,000.00	KELURAHAN BANARAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Kegiatan			3 Kegiatan	63,000,000.00			-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Banaran	3 Kegiatan	63,000,000.00	KELURAHAN BANARAN	

	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	7,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Banaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Banaran		7,000,000.00	KELURAHAN BANARAN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			3 Unit	6,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Banaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Banaran	20 Unit	6,000,000.00	KELURAHAN BANARAN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	50,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Banaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Banaran	4 Unit	50,000,000.00	KELURAHAN BANARAN	
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu***	**89 Persen**			**87 Persen**	**350,000,000.00**						**89 Persen**	**350,000,000.00**		
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*	1 Kegiatan			1 Kegiatan	350,000,000.00			-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	1 Kegiatan	350,000,000.00	KELURAHAN BANARAN	
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														

			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	8 Dokumen			2 Dokumen	350,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	2 Dokumen	350,000,000.00	KELURAHAN BANARAN	
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti***	**100 Persen 100 Persen**			**100 Persen**	**273,168,000.00**						**0 Persen 100 Persen**	**273,168,000.00**		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 Kegiatan			3 Kegiatan	273,168,000.00			-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan Banaran	3 Kegiatan	273,168,000.00	KELURAHAN BANARAN	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan			6 Lembaga Kemasyarakatan	0.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan Banaran	6 Lembaga Kemasyarakatan	0.00	KELURAHAN BANARAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas			6 Pokmas / Ormas	273,168,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan Banaran	6 Pokmas / Ormas	273,168,000.00	KELURAHAN BANARAN	
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti***	**89 Persen**			**87 Persen**	**10,000,000.00**						**89 Persen**	**10,000,000.00**		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	1 Kegiatan			1 Kegiatan	10,000,000.00			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan Banaran	1 Kegiatan	10,000,000.00	KELURAHAN BANARAN	

	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	39 Laporan			13 Laporan	10,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Banaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan Banaran	13 Laporan	10,000,000.00	KELURAHAN BANARAN	
J U M L A H								**931,212,000.00**						**J U M L A H**		**4,271,692,000.00**		

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN SISWODIPURAN						**872,976,000.00**							**0.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**872,976,000.00**							**0.00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**872,976,000.00**							**0.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Prosentase Penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart***	**100 Persen**			**100 Persen**	**229,830,000.00**						**100 Persen**	**0.00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	8 Kegiatan			2 Kegiatan	37,666,000.00			-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Siswodipuran	8 Kegiatan	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 Dokumen			12 Dokumen	37,666,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Siswodipuran	13 Dokumen	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	10 Kegiatan			10 Kegiatan	123,700,000.00			-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Siswodipuran	10 Kegiatan	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	2,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Siswodipuran	4 Paket	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	33,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Siswodipuran	4 Paket	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	3,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Siswodipuran	4 Paket	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	7,700,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Siswodipuran	4 Paket	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	8,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Siswodipuran	4 Paket	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	12,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Siswodipuran	4 Paket	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16 Laporan			4 Laporan	50,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Siswodipuran	4 Laporan	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan			4 Laporan	8,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Siswodipuran	4 Laporan	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Kegiatan			3 Kegiatan	18,964,000.00			-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Siswodipuran	3 Kegiatan	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan			12 Laporan	900,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Siswodipuran	12 Laporan	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	17,464,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Siswodipuran	12 Laporan	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan			4 Laporan	600,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Siswodipuran	4 Laporan	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Kegiatan			3 Kegiatan	49,500,000.00			-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Siswodipuran	3 Kegiatan	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	3,500,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Siswodipuran		0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			7 Unit	6,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Siswodipuran	20 Unit	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	40,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Siswodipuran	4 Unit	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN

2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu***	**89 Persen**			**100 Persen**	**350,000,000.00**						**89 Persen**	**0.00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*	1 Kegiatan			1 Kegiatan	350,000,000.00			-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan Siswodipuran	1 Kegiatan	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	8 Dokumen			2 Dokumen	350,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan Siswodipuran	2 Dokumen	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti***	**100 Persen 100 Persen**			**100 Persen**	**287,146,000.00**						**0 Persen 100 Persen**	**0.00**	

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 Kegiatan			3 Kegiatan	287,146,000.00			-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan Siswodipuran	3 Kegiatan	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 LembagaK emasyarakat an			6 LembagaK emasyarakat an	0.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan Siswodipuran	6 LembagaK emasyarakat an	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas			6 Pokmas / Ormas	287,146,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan Siswodipuran	6 Pokmas / Ormas	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN

4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti***	**89 Persen**			**87 Persen**	**6,000,000.00**						**89 Persen**	**0.00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	1 Kegiatan			1 Kegiatan	6,000,000.00			-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan Siswodipuran	1 Kegiatan	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	39 Laporan			13 Laporan	6,000,000.00	Kab. Boyolali, Boyolali, Siwodipuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan Siswodipuran	13 Laporan	0.00	KELURAHAN SISWODIPURAN
	J U M L A H							**872,976,000.00**							**0.00**	

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN PULISEN						**914,912,000**							**916,711,800**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**914,912,000**							**916,711,800**	
	7.01	**KECAMATAN**						**914,912,000**							**916,711,800**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Prosentase Penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standart***	**100 Persen**			**100 Persen**	**230,412,000**						**100 Persen**	**232,211,800**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	8 Kegiatan			8 Kegiatan	87,905,000			-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Pulisen	8 Kegiatan	87,905,000	KELURAHAN PULISEN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 Dokumen			12 Dokumen	87,905,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Pulisen	13 Dokumen	87,905,000	KELURAHAN PULISEN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	10 Kegiatan			10 Kegiatan	102,435,000			-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Pulisen	10 Kegiatan	102,434,800	KELURAHAN PULISEN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	2,708,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Pulisen	4 Paket	2,707,800	KELURAHAN PULISEN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Pulisen	4 Paket	0	KELURAHAN PULISEN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	2,350,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Pulisen	4 Paket	2,350,000	KELURAHAN PULISEN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	2,800,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Pulisen	4 Paket	2,800,000	KELURAHAN PULISEN
	7.01.01.2.06.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

	05														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket			12 Paket	7,600,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Pulisen	4 Paket	7,600,000	KELURAHAN PULISEN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	6,015,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Pulisen	4 Paket	6,015,000	KELURAHAN PULISEN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16 Laporan			12 Laporan	66,878,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbuday	Kelurahan Pulisen	4 Laporan	66,878,000	KELURAHAN PULISEN

	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan			12 Laporan	14,084,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Pulisen	4 Laporan	14,084,000	KELURAHAN PULISEN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Kegiatan			3 Kegiatan	22,100,000			-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Pulisen	3 Kegiatan	23,900,000	KELURAHAN PULISEN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan			12 Laporan	1,000,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Pulisen	12 Laporan	1,000,000	KELURAHAN PULISEN
	7.01.01.2.08.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

	02														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	20,200,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Pulisen	12 Laporan	22,000,000	KELURAHAN PULISEN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan			4 Laporan	900,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Pulisen	4 Laporan	900,000	KELURAHAN PULISEN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Kegiatan			3 Kegiatan	17,972,000			-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Pulisen	3 Kegiatan	17,972,000	KELURAHAN PULISEN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit			5 Unit	1,832,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Pulisen	25 Unit	1,832,000	KELURAHAN PULISEN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			10 Unit	6,140,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Pulisen	20 Unit	6,140,000	KELURAHAN PULISEN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	10,000,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kelurahan Pulisen	4 Unit	10,000,000	KELURAHAN PULISEN

2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu***	**89 Persen**			**87 Persen**	**350,000,000**						**89 Persen**	**350,000,000**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*	1 Kegiatan			1 Kegiatan	350,000,000			-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	1 Kegiatan	350,000,000	KELURAHAN PULISEN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	8 Dokumen			2 Dokumen	350,000,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat	2 Dokumen	350,000,000	KELURAHAN PULISEN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti***	**100 Persen 100 Persen**			**100 Persen**	**317,700,000**						**0 Persen 100 Persen**	**317,700,000**	

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	3 Kegiatan			3 Kegiatan	317,700,000			-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan Pulisen	3 Kegiatan	317,700,000	KELURAHAN PULISEN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 LembagaKemasyarakatan			6 LembagaKemasyarakatan	0	Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan Pulisen	6 LembagaKemasyarakatan	0	KELURAHAN PULISEN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas			6 Pokmas / Ormas	317,700,000	Kab. Boyolali, Boyolali, Pulisen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan Pulisen	6 Pokmas / Ormas	317,700,000	KELURAHAN PULISEN

4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti***	**89 Persen**			**87 Persen**	**16,800,000**						**89 Persen**	**16,800,000**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	1 Kegiatan			1 Kegiatan	16,800,000			-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan Pulisen	1 Kegiatan	16,800,000	KELURAHAN PULISEN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	39 Laporan			12 Laporan	16,800,000	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Kelurahan Pulisen	13 Laporan	16,800,000	KELURAHAN PULISEN
	J U M L A H							**914,912,000**							**916,711,800**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Boyolali yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Perumusan program dan kegiatan ini, mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai disertai dengan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Realisasi renja ini sangat tergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Sebagaimana tujuan renja ini yaitu “terarahnya program serta prioritas kegiatan tahunan dengan capaian rencana strategis Kecamatan Boyolali melalui pembiayaan APBD Kabupaten yang dilengkapi dengan indikator capaian sebagai tolak ukur penilaian kinerja”. Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian. Demikian RENJA Kecamatan Boyolali 2024 disusun dan semoga bermanfaat.

HH. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

KECAMATAN MOJOSONGO

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Dokumen Renja ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mojosongo ini merupakan penjabaran pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Renja Kecamatan Mojosongo Tahun 2024 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Mojosongo tahun 2022 dan uraian mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Di dalamnya memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kritik dan saran untuk kesempurnaan renja ini sangat kami harapkan dan tak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja ini.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4.. Sistematika Penulisan 4

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 19

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 24

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 30

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 46

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 48

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 48

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 48

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 49

4.1. Program dan Kegiatan 49

BAB V. PENUTUP..... 62

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel : T-C.29.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022.....	**10**
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojosongo	**21**
Tabel	Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan.....	**30**
Tabel T.C-31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	**31**
Tabel T.C-33	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	**51**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik. Perwujudan dari komitmen tersebut, antara lain dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Mojosongoyang merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali dan Renstra Kecamatan MojosongoTahun 2021-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Mojosongo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Mojosongo untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojosongo Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Penyusunan Renja Kecamatan Mojosongo dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mojosongo tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Mojosongo.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojosongo dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

Dalam tahapan perumusan rancangan Renja OPD, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan OPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;

4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal OPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
10. Penyempurnaan rancangan Renja OPD;
11. Pembahasan forum OPD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

Namun karena keterbatasan data dan adanya beberapa kesulitan dalam penyusunannya ada beberapa kegiatan tersebut yang tidak dapat digali secara maksimal.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
22. Rencana Strategis Kecamatan MojosongoTahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah memberikan arah, kebijakan program serta prioritas kegiatan sebagai landasan kebijakan operasional Kecamatan Mojosongo.

Tujuan disusunnya Renja Kecamatan Mojosongoadalah terarahnya program serta prioritas kegiatan tahunan dengan capaian rencana strategis Kecamatan Mojosongomelalui pembiayaan APBD Kabupaten yang dilengkapi dengan indikator capaian sebagai tolok ukur penilaian kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Mojosongo Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan MojosongoTahun 2024; berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan MojosongoTahun 2022 dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal OPD.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi Program dan kegiatan

Bab V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
KECAMATAN MOJOSONGO TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mojosongo Tahun 2022

Realisasi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan MojosongoTahun 2022 telah selesai seluruhnya. Dari pelaksanaan program / kegiatan tersebut, beberapa program / kegiatan telah mencapai target yang direncanakan dan ada yang belum memenuhi target.

Adapun realisasi anggaran tahun 2022 yang terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan, dianggarkan sebesar Rp 6.475.469.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.307.199.965,00 (97,40%) dengan rincian realisasi belanja menurut program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1). Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp.3.549.388.890,00 atau 99,27% dari target anggaran Rp.3.575.371.000,00
      2). Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terealisasi Rp.148.333.200,00 atau 95% dari target anggaran Rp.156.142.400,00
   b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1). Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi Rp.5.356.466,00 atau 89,27% dari target anggaran Rp.6.000.000,00
      2). Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga teralisasi Rp.8.976.389,00 atau 89,80% dari target anggaran Rp.9.995.800,00
      3). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasi Rp.36.429.324,00 atau 83,75% dari target anggaran Rp.43.500.000,00
      4). Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terealisasi Rp.41.429.000,00 atau 93,98% dari target anggaran Rp.44.500.000,00

5). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material terealisasi Rp.44.344.400,00 atau 95,98% dari target anggaran Rp.46.199.400,00

6). Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu terealisasi Rp.242.790.220,00 atau 96,43% dari target anggaran Rp.251.770.000,00

7). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi Rp.21.218.103,00 atau 52.26% dari target anggaran Rp. 40.600.000,00

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terealisasi Rp. 2.700.000,00 atau 100% dari target anggaran Rp 2.700.000,00

2). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi Rp. 48.722.163,00 atau 61,42% dari target anggaran Rp. 79.325.200,00

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terealisasi Rp.9.900.460,00 atau 33,22% dari target anggaran Rp.29.800.000,00

2). Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya terealisasi Rp.19.610.000,00 atau 68,37% dari target anggaran Rp. 28.680.000,00

3). Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terealisasi Rp. 178.407.000,00 atau 99,67% dari target anggaran Rp. 179.000.000,00

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1). Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya terealisasi Rp.92.332.000,00 atau 99,28% dari target anggaran Rp.93.000.000,00

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum terealisasi Rp 1.070.338.000,00 atau 99,34% dari target anggaran Rp .1.077.500.000,00

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
      1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat terealisasi Rp 24..838.000,00 atau 99,35% dari target anggaran Rp 25.000.000,00
      2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan terealisasi Rp.21.750.000,- atau 98,86 dari target anggaran Rp.22.000.000,-
      3) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan terealisasi Rp. 619.198.850,00 atau 96,77 % dari target anggaran Rp. 639.835.000,-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
      1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan terealisasi Rp.22.780.000,00 atau 99,04% dari target anggaran Rp. 23.000.000,00.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
      1) Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia terealisasi Rp.36.877.500,00 atau 96,29 % dari target anggaran Rp.38.300.000,00
      2) Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional terealisasi

Rp.61.480.000,00 atau 97,20% dari target anggaran Rp.63.250.000,00.

Faktor-faktor pendukung tercapainya target.

a. Komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dan desa dalam melaksanakan dan menyelesaikan program/kegiatan;
b. Kerjasama yang baik antara pemerintahan kecamatan dan Pemerintah Desa, serta seluruh UPT kecamatan;
c. Peran aktif kelompok sasaran program/kegiatan

Solusi/pemecahan masalah :

a. Evaluasi kinerja dan pencapaian target kinerja secara rutin;
b. Peningkatan komitmen dari seluruh pelaksana kegiatan untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan dengan baik sesuai yang di rencanakan;
c. Pengambilan keputusan secara cepat dan proporsional sesuai dengan kewenangan Kecamatan untuk mengatasi keadaan tanpa ketergantungan dengan Pemerintah Kabupaten.
d. Meningkatkan pengelolaan tertib administrasi.
e. Identifikasi setiap permasalahan yang muncul dan disertai dengan penyelesaiannya.
f. Membangun komunikasi dua arah antara pengambil kebijakan dan pelaksana kegiatan.
g. Peningkatan jalinan kerjasama baik dengan instansi pemerintah lainnya di Tingkat Kecamatan dan Desa maupun dengan kelembagaan masyarakat yang ada.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)* Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah : Kecamatan Mojosongo. Lembar : 1.

kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu n-2			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi renja PD tahun n-2	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatans/d tahun berjalan n-1	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	01					**KECAMATAN**									
7	01	01				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boyolali**	**Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Terpenuhi sesuai standar**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7	01	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Gaji dan tunjangan ASN, Gaji non ASN	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
7	01	01	2	02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
7	01	01	2	02	002	Penyediaan Administrasi Pelayanan Tugas ASN	Gaji PTT dan Tenaga Honorer sebanyak Orang	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
7	01	01	2	02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
7	01	01	2	02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
7	01	01	2	02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100

kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu n-2			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi renja PD tahun n-2	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatans/d tahun berjalan n-1	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
						Penyediaan barang									
7	01	01	2	02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100	18 Laporan	18 Laporan	100
7	01	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	001	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	004	Penyediaan bahan logistik kantor	Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	007	Penyediaan bahan / Material	Bahan/ Material	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	008	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	06	009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100

kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu n-2			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi renja PD tahun n-2	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatans/d tahun berjalan n-1	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
						Urusan Pemerintah Daerah									
7	01	01	2	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	07	010	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnnya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
7	01	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100
7	01	01	2	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100

kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu n-2			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi renja PD tahun n-2	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatans/d tahun berjalan n-1	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
						Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
7	01	01	2	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	09	009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan bangunan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7	01	01	2	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	100	25 Kegiatan	25 Kegiatan	100
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunsn Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capian	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100	15 dokumen	15 dokumen	100

kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu n-2			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi renja PD tahun n-2	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatans/d tahun berjalan n-1	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	100
7	01	02			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu	435	255	85	85	100	86	86	100
7	01	02	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan**	Jumlah IMB yang dilayani	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang diusulkan	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	100	13 desa/ kel	13 desa/ kel	100
7	01	02	2	02		**Penyelenggaraan urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di Kecamatan yang terselenggara	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah sosialisasi pelayanan di kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100

kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu n-2			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi renja PD tahun n-2	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatans/d tahun berjalan n-1	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
7	01	02	2	03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana**	Jumlah sarana dan prasarana umum dalam kondisi baik	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
7	01	02	2	03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun dan dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
7	01	04			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	**100**	100	100	100	100	100	100	100
7	01	04	2	01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah sarana dan prasarana pendukung ketentraman dan keteriban umum yang tersedia	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	2 kegiatan	100
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100
7	01	05			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	**100**	100	100	100	100	100	100	100

kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu n-2			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi renja PD tahun n-2	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatans/d tahun berjalan n-1	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
					Umum										
7	01	05	2	01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
7	01	05	2	01	**01**	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
7	01	05	2	01	**04**	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan	Jumlah kegiatan kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100

kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu n-2			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi renja PD tahun n-2	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatans/d tahun berjalan n-1	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
						Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	100	100	100	100	100	100	100
7	01	03	2	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Usulan Hasil Musdes yang diverifikasi	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)	100	100	100	100	100	100	100	100

kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu n-2			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi renja PD tahun n-2	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatans/d tahun berjalan n-1	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)
7	01	03	2	03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang laksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	3 kegiatan	3 kegiatan	100
7	01	03	2	03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100
7	01	03	2	03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah desa yang menerima bantuan / modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	100	13 desa/ kel	13 desa/ kel	100
7	01	06			**Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa**		Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	100	13 desa/ kel	13 desa/ kel	100
7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pedampingan administrasi dan keuangan desa	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	100	13 desa/ kel	13 desa/ kel	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan fungsinya Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Pengoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan
- Penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan
- Pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, indikator yang menjadi target sasaran Kecamatan Mojosongo dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
    a. Sasaran Strategis Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan Indikator Kinerja Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Formulasi Hasil Perhitungan Survai Masyarakat. Adapun target Kinerja pada tahun 2022 adalah 82,11% dengan realisasi 86,52 atau capaian diatas 100%. Meliputi Program/Kegiatan ;
        - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Capaian Realisasi Kinerja 100%.
        - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Capaian Realisasi Kinerja 100%.
        - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Capaian Realisasi Kinerja 100%.
        - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dengan

kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah Capian Realisasi Kinerja 100%.

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Capaian Realisasi Kinerja 100%.

b. Sasaran Strategis Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai Sakip, Formulasi Perhitungan Sumber Data dari Hasil Evaluasi dari Inspektorat Daerah. Target Kinerja tahun 2022 sebesar 79,20% dengan realisasi 79,90 atau Capaian 99,12%.

   Meliputi Program/Kegiatan ;

   - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
     1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Realisasi Capaian Kinerja 100%.
     2. Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi Capaian Kinerja 100%.
     3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi Capaian Kinerja 100%.
     4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi Capaian Kinerja 100%.
     5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi Capaian Kinerja 100%.

Secara detail hasil capaian terhadap indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel T-C.30

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojosongo
Kabupaten Boyolali

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2) 2021	Tahun (thn n-1) 2022	Tahun (tnn n) 2023	Tahun (thn n+1) 2024	Tahun (thn n-2) 2021	Tahun (thn n-1) 2022	Tahun (tnn n) 2023	Tahun (thn n+1) 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A.	**Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah**			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Terlaksananya pengiriman surat dinas			12 bln	12 bln			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
2	Tersedianya listrik dan internet			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
3	Terbayarnya pajak kendaraan dinas			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
4	Terlaksananya kebersihan kantor			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
5	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
6	Tersedianya alat tulis kantor			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
7	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
8	Tersedianya komponen listrik			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
9	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	
10	Tersedianya bahan bakar bagi kendaraan dinas			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
11	Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
12	Terlaksananya keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	

13	Terlaksananya kebersihan kantor			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
B.	**Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah**			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Terlaksananya penataan lingkungan kantor			1 kegiatan	1 kegiatan							
2	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor			12 bulan	12 bulan	12 bln	12 bln	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
3	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas			12 bulan	12 bulan	12 bln	12 bln	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
C.	**Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah**			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Tersusunnya dokumen LKjIP			1 dok	1 dok			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
2	Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun			1 dok	1 dok			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
D.	**Cakupan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan**			**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**			**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	
1	Terlaksananya kegiatan patroli wilayah			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
E.	**Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, social.**			**2 kegiatan**	**2 kegiatan**			**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	
1	Terlaksananya fasilitasi kegiatan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan			13 desa/ kel	13 desa/ kel							
2	Terlaksananya fasilitasi kegiatan bantuan hibah			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg		1 keg	1 keg	1 keg	
F.	**Terlaksananya Rakor Muspika/ Perangkat Desa**			**12 bulan**	**12 bulan**			**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	
1	Terlaksananya rakor muspika			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
G.	**Cakupan fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan/ Kelurahan**			**2 kegiatan**	**2 kegiatan**			**0 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	
1	Terlaksananya kegiatan memperingati HUT RI dan hari besar lainnya			2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	0 keg	2 keg	2 keg	2 keg	
2	Terlaksananya kegiatan keagamaan			1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	0 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	

H.	**Terlaksananya pengisian perangkat desa/ kelurahan**			**13 desa/ kel**	**13 desa/ kel**	**13 desa/ kel**	**13 desa/ kel**	**13 desa/ kel**	**13 desa/ kel**	**13 desa/ kel**	**13 desa/ kel**	
1	Terlaksananya monitoring pengisian perangkat desa			13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	
I.	**Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan**			**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**			**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	
1	Terlaksananya rakor organisasi perempuan			12 bulan	12 bulan	2 keg	2 keg	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
J.	**Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan desa/ kelurahan**			**13 desa/ kel**	**13 desa/ kel**	**13 desa/ kel**	**13 desa/ kel**	**13 desa/ kel**	**13 desa/ kel**	**13 desa/ kel**	**13 desa/ kel**	
1	Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa			13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	
2	Terlaksananya pembinaan administrasi desa			13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	
3	Terlaksananya evaluasi penyusunan APB Desa			13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	
4	Terlaksananya implementasi undang-undang desa			13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	13 desa/ kel	
K.	**Tersusunnya dokumen evaluasi kegiatan di kecamatan**			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Tersusunnya dokumen laporan evaluasi RKPDes			2 dokumen	2 dokumen			0 dok	0 dok	0 dok	0 dok	
2	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja			2 dokumen	2 dokumen			0 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
3	Tersusunnya DSP usulan kegiatan kecamatan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
L.	**Terlaksanaya fungsi layanan di Kecamatan**			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Terlaksananya fungsi layanan di kecamatan			12 bulan	12 bulan	2 keg	2 keg	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mojosongo tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Kecamatan Mojosongo merupakan urusan Pemerintahan Umum, mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan.

Berdasarkan telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi terhadap Renstra Kecamatan Mojosongo tidak dilakukan karena tidak ada keterkaitan langsung antara pelayanan atau permasalahan di tingkat kecamatan dengan permasalahan di K/L maupun PD tingkat provinsi**.**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mojosongo, secara umum permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mojosongo adalah berikut:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan public yang meliputi;
    a. Masih perlunya penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan public;
    b. Masih perlunya Survey Kepuasan Masyarakat secara Reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
2. Belum optimalnya fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa yaitu Belum optimalnya asistensi pembangunan desa berpijak pada evidence based. Dimana akar masalahnya belum optimalnya fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa yaitu:
    a. Belum optimalnya pemutakhiran database pembangunan desa;

b. Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa.

3. Belum optimalnya pengembangan potensi kewilayahan, dimana untuk Kecamatan Mojosongo masalahnya terletak pada belum optimalnya fungsi koordinasi kewilayahan. Akar masalah belum optimalnya pengembangan potensi kewilayahan adalah belum optimalnya peran kecamatan sebagai instansi terdepan dalam menyusun peta masalah dan potensi kecamatan.

Dampak Pelayanan Kecamatan Mojosongo terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah Visi pembangunan daerah merupakan rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih yang secara substansi memuat tentang rumusan umum mengenai keadaan yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Kondisi yang akan dicapai dalam bentuk visi, kemudian dijabarkan oleh misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.
Berbijak dari amanat dan upaya membangun sinkronisasi dengan visi pembangunan jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005 - 2025, serta dalam rangka menjawab isu strategis aktual dan menjaga keberlanjutan pembangunan, maka dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Boyolali 2021-2026 yaitu ;

"Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi" Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL)

Rumusan visi tersebut memiliki muatan kondisi dan prasyarat yang akan dicapai dalam pembangunan, dengan penjabaran sebagai berikut :

Boyolali Maju berarti :

- ✓ Proses pembangunan yang berkelanjutan dan terencana sistematis diharapkan membawa kemajuan di segala bidang.
- ✓ Boyolali Maju berarti *no-one left behind,* yakni tidak ada pihak yang terlewatkan untuk merasakan kemajuan, karena semua komponen telah menjadi subyek pembangunan.
- ✓ Maju dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dan daerah yang semakin berdaya saing yang ditopang

dengan pembangunan infrastruktur wilayah berkualitas dan merata, serta tata Kelola pemerintahan yang semakin bersih, efektif, dan dipercaya masyarakat.

Meneruskan Pro Investasi berarti :

- ✓ Pro investasi telah menjadi arah pembangunan dan identitas Kabupaten Boyolali dengan berbagai capaian pembangunan yang telah membawa manfaat bagi masyarakat.
- ✓ Melanjutkan arah pembangunan yang pro investasi berarti tidak hanya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membangun sinergi dengan arah pembangunan nasional, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional secara sistematis dan cepat.
- ✓ Arah pro investasi membutuhkan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan, yang muaranya tetap pada kesejahteraan masyarakat Boyolali, tanpa menghadirkan ketimpangan sosial.
- ✓ Pro investasi tetap dikendalikan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yakni selain berorientasi ekonomi dan sosial, tidak kalah penting pada keberlanjutan lingkungan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta membawa manfaat pembangunan bagi generasi masa depan.

Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL) berarti :

- ✓ Pembangunan yang efektif membutuhkan prasyarat berupa sinergi dan kolaborasi seluruh komponen governance, yakni masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.
- ✓ Seluruh komponen daerah diharapkan mampu melangkah dan menata bersama penuh totalitas yang merupakan implementasi dari prinsip gotong-royong.
- ✓ Gotong royong dengan menjalankan perannya masing-masing namun saling bersinergi dan berkolaborasi dalam ikatan visi pembangunan daerah maupun landasan nilai kearifan yang tertanam kuat di tengah masyarakat berupa filosofi dari Pangeran Sambernyawa “Tiji Tibeh (mati siji, mati kabeh, mukti siji mukti kabeh)”.

Visi pembangunan Boyolali dicapai dengan beberapa misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Boyolali memiliki 5 misi yang mencakup keseluruhan bidang pembangunan dengan muatan prinsip dasar dan arah pembangunan di setiap misi sebagai berikut :

Misi 1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan

Misi 2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya,

Misi 3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional, dengan

Misi 4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya,

Misi 5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing,

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali serta mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Boyolali maka Kecamatan Mojosongo kabupaten Boyolali mendukung :

Misi ke Empat, yaitu Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

Misi keempat RPJMD Boyolali mengandung muatan sebagai berikut**:**

- ✓ Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- ✓ Pembangunan integritas dengan menumbuhkan karakter yang baik bagi individu maupun organisasi dalam mewujudkan tindakan maupun keputusan bagi kebaikan bersama.

- ✓ Pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance.
- ✓ Peran masyarakat yang melahirkan kontrol terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan sangat diharapkan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN. Tidak berhenti pada good and clean governance, Boyolali berusaha menumbuhkan Smart governance, atau pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi, dengan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi-inovasi dan adaptasi teknologi yang terpadu, yang bermuara pada efektifitas, efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di Kecamatan Mojosongo dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan Kabupaten Boyolali mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

1. Tantangan
   - Implementasi *Good Governance* dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;
   - Perubahan regulasi yang dinamis seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi;
   - Perkembangan pemanfaatan aplikasi informasi teknologi dalam berbagai kegiatan menuntut peningkatan kapasitas SDM aparatur;
   - Keberadaan mayarakat miskin yang membutuhkan bantuan;
   - Pemberdayaan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel);
   - Pembangunan gedung kantor baru;

- Pengembangan seni dan budaya yang berkembang di masyarakat serta destinasi wisata;
- Mitigasi kawasan rawan bencana alam yang membutuhkan partisipasi masyarakat;
- Pengelolaan sampah komunal berbasis partisipasi masyarakat.

2. Peluang
   - Intensifikasi koordinasi, kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka optimasi pelayanan prima dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.
   - Optimasi asistensi pembangunan desa dalam rangka penyusunan database pembangunan desa;
   - Optimasi asistensi pengelolaan administrasi desa dalam rangka tertib administrasi desa;
   - Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur pemerintah desa melalui berbagai pelatihan dan pembinaan;

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Mojosongo untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Boyolali.

Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Mojosongo tahun 2021-2026 seperti dalam tabel berikut :

Tabel. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	:	Boyolali Maju, Melanjutkan Pro Investasi, Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)		
Misi 4	:	Boyolali Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya		
Tujuan		**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik kecamatan	Peningkatan implementasi Standart Pelayanan publik kecamatan
			Penguatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan	Peningkatan kapasitas ASN tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa
			Penguatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Pembangunan kelembagaan berbasis kinerja	Peningkatan fasilitasi perangkat daerah dalam mengimplementasikan SAKIP

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Dapat ditelaah terhadap rancangan awal RKPD, sebagaimana Tabel T-C.31

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah: Kecamatan Mojosongo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kec Mojosongo**	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	**100,00**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec Mojosongo**	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	**100,00**		
	Kegiatan	Kec Mojosongo				**Kegiatan**	Kec Mojosongo				
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Mojosongo	Jumlah kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Kegiatan		Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Mojosongo	Jumlah kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Kegiatan		
	Sub Kegiatan	Kec Mojosongo				**Sub Kegiatan**	Kec Mojosongo				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif**	**Program/ Kegiatan/Subkeg**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana**	
	Dokumen Perubahan RKA-SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Perubahan RKA-SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Mojosongo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Mojosongo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 laporan		
	Kegiatan	Kec Mojosongo				**Kegiatan**	Kec Mojosongo				
	Administrasi keuangan perangkat	Kec Mojosongo	Jumlah Kegiatan Administrasi	7 Kegiatan		Administrasi keuangan perangkat	Kec Mojosongo	Jumlah Kegiatan Administrasi	7 Kegiatan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	daerah		keuangan perangkat daerah			daerah		keuangan perangkat daerah			
	Sub Kegiatan	Kec Mojosongo				**Sub Kegiatan**	Kec Mojosongo				
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kec Mojosongo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan	3.466.387.000	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kec Mojosongo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan	3.466.387.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	174.160.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	174.160.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kec Mojosongo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec Mojosongo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	18 laporan	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
								n/Semesteran SKPD			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realissi anggaran	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realissi anggaran	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	-	
	Kegiatan	Kec Mojosongo			-	**Kegiatan**	Kec Mojosongo			-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec Mojosongo	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 kegiatan	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec Mojosongo	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 kegiatan	-	
	Sub Kegiatan	Kec Mojosongo			-	**Sub Kegiatan**	Kec Mojosongo			-	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kec Mojosongo	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kec Mojosongo	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	-	
	Kegiatan	Kec Mojosongo			-	**Kegiatan**	Kec Mojosongo			-	
	Administrasi umum perangkat daerah	Kec Mojosongo	Jumlah Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	10 kegiatan	-	Administrasi umum perangkat daerah	Kec Mojosongo	Jumlah Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	10 kegiatan	-	
	Sub Kegiatan	Kec Mojosongo			-	**Sub Kegiatan**	Kec Mojosongo			-	
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kec Mojosongo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	5.873.000	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kec Mojosongo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	5.873.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Mojosongo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Mojosongo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	-	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kec Mojosongo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	9.496.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kec Mojosongo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	9.496.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec Mojosongo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	46.153.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec Mojosongo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	46.153.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Mojosongo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	24.760.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Mojosongo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	24.760.000	
	Penyediaan bahan / Material	Kec Mojosongo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	62.131.000	Penyediaan bahan / Material	Kec Mojosongo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	62.131.000	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Kec Mojosongo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	231.740.000	Fasilitasi kunjungan tamu	Kec Mojosongo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	231.740.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec Mojosongo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	61.156.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec Mojosongo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	61.156.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 dokumen	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 dokumen	-	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	13 dokumen	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	13 dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Berbasis Elektronik pada SKPD		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Berbasis Elektronik pada SKPD		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
	Kegiatan	Kec Mojosongo			-	**Kegiatan**	Kec Mojosongo			-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Mojosongo	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Mojosongo	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	
	Sub Kegiatan	Kec Mojosongo			-	**Sub Kegiatan**	Kec Mojosongo			-	
	Pengadaan Mebel	Kec Mojosongo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		18.600.000	Pengadaan Mebel	Kec Mojosongo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		18.600.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kec Mojosongo**	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya		55.400.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kec Mojosongo**	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya		55.400.000	
	Kegiatan	Kec Mojosongo			-	**Kegiatan**	Kec Mojosongo			-	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kec Mojosongo	Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 kegiatan	-	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kec Mojosongo	Jumlah Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 kegiatan	-	
	Sub Kegiatan	Kec Mojosongo			-	**Sub Kegiatan**	Kec Mojosongo			-	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Mojosongo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Mojosongo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.300.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Mojosongo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	72.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Mojosongo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 laporan	72.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
			yang Disediakan					dan Listrik yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Mojosongo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Mojosongo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	-	
	Kegiatan	Kec Mojosongo			-	**Kegiatan**	Kec Mojosongo			-	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Kec Mojosongo**	jumlah Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Kegiatan	-	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Kec Mojosongo**	jumlah Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Kegiatan	-	
	Sub Kegiatan	Kec Mojosongo			-	**Sub Kegiatan**	Kec Mojosongo			-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Mojosongo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	19.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Mojosongo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	19.250.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kec Mojosongo	Jumlah Mebel yang dipelihara	9 unit	-	Pemeliharaan Mebel	Kec Mojosongo	Jumlah Mebel yang dipelihara	9 unit	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Mojosongo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 unit	28.582.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Mojosongo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 unit	28.582.000	
	Pemeliharaan /	Kec	Jumlah Gedung	3 unit		Pemeliharaan /	Kec	Jumlah Gedung	3 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif**	**Program/ Kegiatan/Subkeg**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana**	
	Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mojosongo	Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		80.000.000	Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mojosongo	Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		80.000.000	
		Kec Mojosongo	**Indeks Kepuasan Masyarakat ((Permendagri 18 dan Permendagri 86)**	**83,55**	-		Kec Mojosongo	**Indeks Kepuasan Masyarakat ((Permendagri 18 dan Permendagri 86)**	**83,55**	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Mojosongo	**Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu**	**87**	-	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec Mojosongo	**Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu**	**87**	-	
	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kec Mojosongo	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	2 kegiatan	-	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kec Mojosongo	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	2 kegiatan	-	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Mojosongo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 laporan	-	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Mojosongo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 laporan	-	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 dokumen	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Kegiatan	Kec Mojosongo			-	**Kegiatan**	Kec Mojosongo			-	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Kec Mojosongo	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 kegiatan	-	Penyelenggaraan urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Kec Mojosongo	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 kegiatan	-	
	Sub Kegiatan	Kec Mojosongo			-	**Sub Kegiatan**	Kec Mojosongo			-	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Mojosongo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Mojosongo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	-	
	Kegiatan				-	**Kegiatan**				-	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana		jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana	1 kegiatan	-	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana		jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana	1 kegiatan	-	
	Sub Kegiatan				-	**Sub Kegiatan**				-	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal	2 dokumen	850.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal	2 dokumen	850.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100	-	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100	-	
	Kegiatan				-	**Kegiatan**				-	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 kegiatan	-	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 kegiatan	-	
	Sub Kegiatan				-	**Sub Kegiatan**				-	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lkm	-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lkm	-	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 laporan	105.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	13 laporan	105.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
								Kecamatan			
	Kegiatan				-	**Kegiatan**				-	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	3 kegiatan	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	3 kegiatan	-	
	Sub Kegiatan				-	**Sub Kegiatan**				-	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 lembaga	-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 lembaga	-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	-	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 lembaga	695.700.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 lembaga	695.700.000	
	Kegiatan				-	**Kegiatan**				-	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang laksanakan	1 kegiatan	-	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang laksanakan	1 kegiatan	-	
	Sub Kegiatan				-	**Sub Kegiatan**				-	
	Peningkatan		Jumlah Lembaga	1 lembaga		Peningkatan Kapasitas		Jumlah Lembaga	1 lembaga		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		-	Lembaga Kemasyarakatan		Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		-	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	**100**	-	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	**100**	-	
	Kegiatan				-	**Kegiatan**				-	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	-	
	Sub Kegiatan				-	**Sub Kegiatan**				-	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	13 Laporan	-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	13 Laporan	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN		Persentase koordinasi pemerintahan umum	**100**	-	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN**		Persentase koordinasi pemerintahan	**100**	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	PEMERINTAHAN UMUM		yang ditindaklanjuti			**PEMERINTAHAN UMUM**		umum yang ditindaklanjuti			
	Kegiatan				-	**Kegiatan**				-	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	-	
	Sub Kegiatan				-	**Sub Kegiatan**				-	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 orang	59.100.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 orang	59.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 orang	35.579.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 orang	35.579.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti	**100,00**	-	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti	**100,00**	-	
	Kegiatan				-	**Kegiatan**				-	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 kegiatan	-	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 kegiatan	-	
	Sub Kegiatan				-	**Sub Kegiatan**				-	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan	8 dokumen	-	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan	8 dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Desa		Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
	Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen	-	Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen	-	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 dokumen	-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Mojosongo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 dokumen	-	
Pagu Total					**6.104.267.000**	**Pagu Total**				**6.104.267.000**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain melakukan menggali permasalahan/kebutuhan dari internal kantor, Kecamatan Mojosongo juga menjaring aspirasi atau usulan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun LSM, yang langsung ditujukan ke Kecamatan Mojosongo berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Desa dan Kecamatan. Berdasarkan atas hasil Musrenbang baik di Desa maupun Kecamatan, usulan dari masyarakat terkait dengan pelayanan/tugas pokok fungsi di Kecamatan Mojosongo sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah : Kecamatan Mojosongo

No	Program/Kegiatan/ Subkeg	Lokasi	Anggaran	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program kawasan Pemukiman - Peningkatan Kualitas RTLH Di Kawasan Kumuh	Kemiri, Metuk, Mojosongo, Butuh		50 unit rumah	Infrastruktur
2.	Program Pengelolaan dan pengembangan Sitem Drainase - Drainase jalan Kabupaten	Depan pintu Tol boyolali s.d jembatan Luwuk desa Kragilan		1 paket	Infrastruktur
3.	Program Penyelenggaraan Jalan - Pembangunan Talud Jalan	Demakan Selatan, Singkil Jl Karanggondang, Jalan metuk-Dlingo		480 Meter	Infrastruktur
4.	Program pengelolaan dan pengembangan system drainase - Drainase jLan Kabupaten	Dk Logerit, Dk temple, Ds Butuh		1 paket	Infrastruktur
5.	Program Pengelolaan dan pengembangan Sitem Drainase - Drainase jalan Kabupaten	Dk Logerit, Desa Butuh Kelurahan -Mojosongo		1 paket	Infrastruktur
6.	Program Penyelenggaran jalan - Pembangunan jalan	Dk Rejoso - Dk santren Mojolegi Ds Brajan		10,666 M2	Infrastruktur
7.	Program Pengelolaan dan pengembangan Sitem Drainase - Drainase jalan Kabupaten	Rw 05 dan RW 06 Kelurahan Mojosongo		1 paket	Infrastruktur

No	Program/Kegiatan/ Subkeg	Lokasi	Anggaran	Besaran/ Volume	Catatan
8	Program pemenuihan upaya kesehatan masyarakat - Jamkesda	Ds Kragilan, Ds Metuk, Ds Dlingo		40 KK	Non Infrastruktur
9.	Program rehabilitasi Sosial - Bantuan alat bantu Disabilitas	Ds Metuk- RW 2, Ds Karangnongko RT 04/05, RW 2, Kel Kemiri : RW 2 dan RW 3		9 unit	Non Infrastruktur
10.	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera - Pembentukan PIK Remaja, Penurunan stunting dan duta genre	Ds Jurug : RW 3, dan Ds Karangnongko Dk Karangnongko, Dk Kragilan , Dk Kebon ijo		2 paket	Non Infrastruktur
11.	Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum - Pembangunan dan peningkatan SPAm jaringan pedesaan	Ds singosari : Dk Dukuhsari RT 2 Rw 5		1 paket	Non Infrastruktur
12.	Program pengembangan SDM Pariwasata - Pelatihan ekonomi kreatif	Ds tambak: Dk tambak Rw 01, Ds butuh : ds Pereng dan Ds Dlingo: Dk Muning		3 paket	Non Infrastruktur
13.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian - Bantuan traktor, kultifator	Ds Brajan: gapoktan tani maju 1		1 paket	Non Infrastruktur
14.	Program pembinaan perpustakaan - Pelatihan UMKM	Ds singosari: dk Saren. Ds Tamba: RW 3. Desa Manggis: RT 5 RW 5 dan kelurahan mojosongp: Rw 1 dan Rw 2		4 paket	Non Infrastruktur
15.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian - Pengadaan bibit hijauan	Ds singosasri : Rw 4, Ds Tambak : Dk cermo Ds dlingp: Kadus I Ds Jurug: Kadus 3		4 unit	Non Infrastruktur

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan, yang paling relevan adalah reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Prioritas pembangunan tersebut telah menjadi arah tujuan, sasaran dalam menyusun program dan kegiatan di Kecamatan Mojosongo.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan tersebut akan dituangkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Penjabaran tujuan dalam Renja merupakan turunan dari Renstra berdasarkan pada misi yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional
4. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi organisasi. Adapun rincian sasaran Restra sebagai berikut :

a. Tujuan 1. : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sasaran sebagai berikut :
   1). Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.
   2). Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Mojosongo Tahun 2024 merupakan penjabaran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Uraian tentang program dan kegiatan di Kecamatan Mojosongo dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, sebagai berikut :
   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
   b. Peningkatan Pelayanan Publik
   c. Peningkatan Kesejateraan Rakyat
   d. Kondisi sarana prasrana gedung kantor
2. Rekapitulasi program dan kegiatan :
   a. Jumlah program dan kegiatan Kecamatan Mojosongo terdiri dari 6 (enam) program dan 16 (enam belas) kegiatan
   b. Lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kecamatan, beberapa kegiatan yang berkaitan langsung dengan kelurahan dan desa yaitu :
      - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban.
      - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana.
      - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
      - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
      - Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.
   c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar :Rp.6.104.267.000,00

3. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan, yaitu sebagai berikut:

Detail rencana program dan kegiatan Kecamatan Mojosongo Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel T-C.33

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah : Kecamatan Mojosongo.

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**6.104.267.000**					**6.104.267.000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4.358.888.000**					**4.358.888.000**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.640.547.000**					**3.640.547.000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji ASN Kecamatan Selo	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	100 persen	30 Orang/bulan	1 tahun	3.466.387.000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	3.466.387.000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terbayarnya gaji ASN Kecamatan Selo	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	100 persen	13 Dokumen	1 tahun	174.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	174.160.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**441.309.000**					**117,000,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	tercapainya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	12 bulan 100 persen	4 Paket	4 Paket	5.873.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	12 bulan 100 persen	5.873.000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	tercapainya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	12 bulan 100 persen	4 Paket	4 Paket	9.496.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	12 bulan 100 persen	9.496.000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	tercapainya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	12 bulan 100 persen	4 paket	4 paket	46.153.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	12 bulan 100 persen	46.153.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	tercapainya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	12 bulan 100 persen	4 Paket	4 paket	24.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	12 bulan 100 persen	24.760.000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	tercapainya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	12 bulan 100 persen	4 Paket	4 paket	62.131.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	12 bulan 100 persen	62.131.000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	tercapainya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan 100 persen	4 laporan	4 laporan	231.740.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	12 bulan 100 persen	231.740.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tercapainya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	12 bulan 100 persen	4 laporan	4 laporan	61.156.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Fasilitasi kunjungan tamu Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	12 bulan 100 persen	61.156.000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**74.000.000**					**74.000.000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18.600.000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	100 persen	20 Unit	20 Unit	18.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	0
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55.400.000	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	100 persen	3 Unit	3 Unit	55.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	0
7	01	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	0	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	100 persen	1 Paket	1 Kegiatan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**75.200,000**					**75.200,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	12 Laporan	2.300.,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	2.300.,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	12 Laporan	72.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	72.900.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	100 persen	4 Laporan	4 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	0
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**127.832.000**					**127.832.000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	100 persen	20 Unit	20 Unit	19.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	19.250.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Lapangan		Pajak dan Perizinannya	Dinas Operasional atau Lapangan										
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	100 persen	9 Unit	9 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	0
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	100 persen	26 Unit	26 Unit	28.582.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	28.582.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	100 persen	3 Unit	12 bulan	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	80.000.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**850.000.000**					**850.000.000**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								**850.000.000**					**850.000.000**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	prosentase layanan publik kecamatan tepat waktu	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	jumlah prasarana dan sarana umum yang dibangun dan dipelihara	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	87 Persen	2 Dokumen	1 kegiatan	850.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		prosentase layanan publik kecamatan tepat waktu	87 Persen	850.000.000
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**0**					**0**
7	01	04	2	01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum								**0**					**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	04	2	01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Hasil Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	100 Persen	13 Laporan	1 Kegiatan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 Persen	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**800.700.000**					**800.700.000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**105.000.000**					**105.000.000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	terlapornya dokumen Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	100 persen	13 Laporan	2 Kegiatan	105.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 persen	105.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**03**	**2.02**		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti												
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelurahan Mojosongo dan kelurahan Kemiri	100%	6 lembaga	6 lembaga	695.700.000					695.700.000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**0**					**0**
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)		terdatanya jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	100 persen		2 kegiatan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)	100 persen	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**94.679.000**					**94.679.000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**94.679.000**					**94.679.000**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	100 persen	400 Orang	2 kegiatan	59.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 persen	59.100.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Indonesia											
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	Kab. Boyolali, Mojosongo, Semua Kelurahan	100 persen	500 Orang	2 kegiatan	35.579.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 persen	35.579.000
TOTAL													**6.104.267.000**					**6.104.267.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan MojosongoKabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan rencana target capaian kinerja yang diinginkan untuk 1 tahun mendatang. Renja ini memuat berbagai kebutuhan yang berkaitan secara langsung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojosongo, yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Perumusan program dan kegiatan ini, mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai disertai dengan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Realisasi renja ini sangat tergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Sebagaimana tujuan renja ini yaitu “terarahnya program serta prioritas kegiatan tahunan dengan capaian rencana strategis Kecamatan Mojosongo melalui pembiayaan APBD Kabupaten yang dilengkapi dengan indikator capaian sebagai tolak ukur penilaian kinerja”, maka renja ini tidak akan berarti banyak jika tidak dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan tidak dilaksanakanan sebagaimana mestinya. Oleh karena masih diperlukan komitmen yang kuat oleh seluruh komponen dalam rangka melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi secara terus-menerus sehingga renja ini dapat menjadi sarana dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Mojosongo 2021-2026.

II. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

KECAMATAN TERAS

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Panjatkan Kehadirat Alloh SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat, Taufiq, dan HidayahNya sehingga Kecamatan Banyudono dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun yang lalu dan tahun berjalan. Hal tersebut bertujuan agar program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD sesuai dengan Renstra PD. Selain itu hasil evaluasi terhadap renja tahun lalu dan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja PD dilakukan dalam rangka optimasi pencapaian sasaran Renstra PD.

Renja 2024 Kecamatan Teras mendukung dan mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Boyolali 2021-2026 yaitu BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVENTASI, Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL) diarahkan pada “Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh, ikonik, mandiri, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan. Semoga dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Teras dapat bermanfaat bagi pembangunan di wilayah Kecamatan Teras sekarang dan pada masa-masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

	PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II.	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	18
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	27
	3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	27
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	27
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
	4.1 Program dan Kegiatan	31
BAB V.	PENUTUP	33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah selama periode 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah selama periode 5 (lima) tahun. Tata cara / proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) terdiri dari :

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau

kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota menjadi Rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan : a) rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; b) hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah meliputi kebijakan program strategis nasional (PSN), amanat pembangunan global dan nasional, dan dinamika pembangunan nasional lainnya. Selain itu juga kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 tetap memperhatikan keberlanjutan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian, sosial dan Kesehatan, serta dukungan terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) sebagai prioritas dalam penanggulangan kemiskinan. Disamping itu RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 meliputi:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan eksterm (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat

Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Teras adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yng dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

7. Rencana Strategis Kecamatan Karanggede Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Teras 2024 adalah untuk memberikan Landasan Kebijakan Teknis Tahunan dalam Kerangka Pencapaian Visi Misi setiap tahapnya (satu tahunan) dan sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Camat pada Akhir Tahun Anggaran sebagai bagian dari pelaksanaan Kebijakan Daerah. Renja Tahun 2024 Kecamatan Teras disusun sebagai acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Teras Tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2024 Kecamatan Teras adalah adalah menetapkan prioritas Program dan Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan sesuai Rencana Strategis yang dilaksanakan per tahap (tahunan) melalui sumber pembiayaan APBD dan menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Karanggede Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karanggede Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Teras, terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Revieu hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dan realisasi Renstra Kecamatan Teras yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Teras dan/atau realisasi APBD Kecamatan Teras. Adapun hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 untuk Kecamatan Teras sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   g. Penyediaan Bahan/Material
   h. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   j. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   k. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   l. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   n. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   o. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;

p. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
q. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
r. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
s. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
t. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

2. Faktor-faktor pendukung tercapainya target.
   a. Komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dan desa dalam melaksanakan dan menyelesaikan program/kegiatan
   b. Kerjasama yang baik antara pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa, serta seluruh lintas sektor perangkat daerah di wilayah kecamatan Teras.
   c. Peran aktif kelompok sasaran program/kegiatan di wilayah Kecamatan Teras.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah dapat memenuhi / melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, dengan demikian target capaian program Renstra PD dapat tercapai.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan meningkatkan target capaian dari tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan potensi sumber daya dan dana yang ada.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kecamatan Teras

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan realisasi Kinerja program kegiatan tahun lalu (2022)			Target Program /Keg Renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)=(7/6)**	**(9)**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**									
X.XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**									
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	100	100	100	100	100 %	100	100	3
X.XX.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	25	25	25	25	100 %	25	25	3
X.XX.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2	2	2	2	100 %	2	2	3
X.XX.01.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	1	1	1	100 %	1	1	3
X.XX.01.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	1	1	1	100 %	1	1	3
X.XX.01.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	1	1	1	100 %	1	1	3

X.XX.01.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	1	1	1	100 %	1	1	3
X.XX.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	15	15	15	15	100 %	15	15	3
X.XX.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	4	4	4	4	100 %	4	4	3
X.XX.01-2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, Gaji Non ASN	1	1	1	1	100 %	1	1	3
X.XX-01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	1	1	1	1	100 %	1	1	3
X.XX-01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji PTT dan tenaga honorer	1	1	1	1	100 %	1	1	3
X.XX-01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12	12	12	12	100 %	12	12	3
X.XX-01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi dan akutansi SKPD	12	12	12	12	100 %	12	12	3
X.XX-01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan	2	2	2	2	100 %	2	2	3
X.XX-01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	18	18	18	18	100 %	18	18	3
X.XX-01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	12	12	12	12	100 %	12	12	3
X.XX-01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	12	12	12	100 %	12	12	3
X.XX-01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	12	12	12	12	100 %	12	12	3
X.XX-01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor	12	12	12	12	100 %	12	12	3
X.XX-01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	12	12	12	12	100 %	12	12	3
X.XX-01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	12	12	12	100 %	12	12	3

X.XX-01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Bahan/material	12	12	12	12	100 %	12	12	3
X.XX-01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	12	12	12	12	100 %	12	12	3
X.XX-01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	12	12	100 %	12	12	3
X.XX-01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3	3	3	3	100 %	3	3	3
X.XX-01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Mebel	1	1	1	1	100 %	1	1	3
X.XX-01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	1	1	1	1	100 %	1	1	3
X.XX-01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1	1	1	1	100 %	1	1	3
X.XX-01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	12	12	12	100 %	12	12	3
X.XX-01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat	12	12	12	12	100 %	12	12	3
X.XX-01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	12	12	12	100 %	12	12	3
X.XX-01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa pemeliharaan barang milik daerah	12	12	12	12	100 %	12	12	3
X.XX-01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	12	12	12	100 %	12	12	3
X.XX-01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kerja	12	12	12	12	100 %	12	12	3
X.XX-01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12	12	12	12	100 %	12	12	3
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7,01	**KECAMATAN**									

7.01-02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu	85	85	85	85	100 %	85	255	3
7.01-02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang dilayani	1	1	1	1	100 %	1	3	3
7.01-02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang diusulkan	13	13	13	13	100 %	13	39	3
7.01-02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di Kecamatan yang terselenggara	1	1	1	1	100 %	1	3	3
7.01-02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah sosialisasi pelayanan di kecamatan	4	4	4	4	100 %	4	12	3
7.01-02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum dalam Kondisi Baik	1	1	1	1	100 %	1	3	3
7.01-02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum	1	1	1	1	100 %	1	3	3
7.01-03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	100	100	100	100	100 %	100	300	3
		Persentase stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah Desa/Kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan	100	100	100	100	100 %	100	300	3
7.01-03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan hasil musdes yang diverifikasi	1	1	1	1	100 %	1	3	3

7.01-03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen daftar skala prioritas	1	1	1	**1**	100 %	1	**1**	3
7.01-03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	1	1	1	100 %	1	1	3
7.01-03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan di kelurahan	1	1	1	1	100 %	1	1	3
7.01-03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan partisipasi pemberdayaan masyarakat di kelurahan	2	2	2	2	100 %	2	2	3
7.01-03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	2	2	2	2	100 %	2	2	3
7.01-03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di fasilitasi (PKK)	1	1	1	1	100 %	1	1	3
7.01-03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah desa yang menerima bantuan/modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan	13	13	13	13	100 %	13	13	3
7.01-04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	100	100	100	100	100 %	100	100	3
7.01-04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketetrtiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana pendukung ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	1	1	1	1	100 %	1	1	3
7.01-04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat kecamatan	1	1	1	1	100 %	1	1	3
7.01-05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	100	100	100	100	100 %	100	100	3
7.01-05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	4	4	4	4	100 %	4	4	3

7.01-05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	2	2	2	2	100 %	2	2	3
7.01-05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah kegiatan kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan	2	2	2	2	100 %	2	2	3
7.01-06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti**	100	100	100	100	100 %	100	100	3
7.01-06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa	13	13	13	13	100 %	13	13	3
7.01-06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pendampingan administrasi dan keuangan desa	13	13	13	13	100 %	13	13	3

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan fungsinya, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pengoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan
- Penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa
- Pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, indikator yang menjadi target sasaran Kecamatan Teras dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
   a. Prosentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi, dapat terealiasi sebesar 100%.
   b. Capaian pembayaran PBB dapat terealisasi 100%.
   c. Tingkat ketepatan pengisian Kades/Perangkat Desa, terealisasi 100%.
   d. Capaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), dapat terealisasi 82,72%.
   e. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat terealisasi sebesar 100%.
   f. Tingkat peran serta perempuan dalam pembangunan dapat terealisasi 100%.
   g. Cakupan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat desa, terealisasi 100%.

   Secara detail hasil capaian terhadap indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel.2 (lampiran)

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Teras

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
I	**Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat			7 dokumen	7 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	7 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	
2	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
3	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
4	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
5	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
6	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
7	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	1 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	
8	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah			1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
9	Gaji dan Tunjangan ASN, Gaji Non ASN			12 bulan	12 bulan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	12 bulan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
10	Gaji dan tunjangan ASN			12 bulan	12 bulan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	12 bulan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
11	Gaji PTT dan tenaga honorer			12 bulan	12 bulan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	12 bulan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
12	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD			1 dokumen	1 dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1 dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
13	Jumlah koordinasi dan akutansi SKPD			1 dokumen	1 dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1 dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
14	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan			1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
15	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD			18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	
16	Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah			12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
17	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	

18	Peralatan rumah tangga			12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
19	Bahan logistik kantor			12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
20	Barang cetakan dan penggandaan			12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
21	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
22	Bahan/material			12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
23	Fasilitasi kunjungan tamu			12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
24	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
25	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			12 unit	6 paket	3 paket	3 paket	3 paket	12 unit	3 paket	3 paket	3 paket	
26	Mebel			6 unit	2 paket	1 paket	1 paket	1 paket	6 unit	1 paket	1 paket	1 paket	
27	Peralatan dan mesin lainnya			6 unit	2 paket	1 paket	1 paket	1 paket	6 unit	1 paket	1 paket	1 paket	
28	Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			6 unit	2 paket	1 paket	1 paket	1 paket	6 unit	1 paket	1 paket	1 paket	
29	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
30	Jasa surat menyurat			12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
31	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
32	Jasa pemeliharaan barang milik daerah			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
33	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
34	Jasa perbaikan peralatan kerja			12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
35	Jasa pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
II	**Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu**			**100%**	**100%**	**85%**	**86%**	**86%**	**100%**	**85%**	**85%**	**86%**	
1	Jumlah IMB yang dilayani			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
2	Jumlah IMB yang diusulkan			13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	
3	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di Kecamatan yang terselenggara			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
4	Jumlah sosialisasi pelayanan di kecamatan			1 keg	1 keg	4 keg	4 keg	4 keg	1 keg	4 keg	4 keg	4 keg	
5	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum dalam Kondisi Baik			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
III	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Jumlah usulan hasil musdes yang diverifikasi			2 dokumen	2 dokumen	1 tahun	1 tahun	1 tahun	2 dokumen	1 tahun	1 tahun	1 tahun	

2	Jumlah dokumen daftar skala prioritas			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
3	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan			1 usulan	1 usulan	5 usulan	5 usulan	5 usulan	1 usulan	5 usulan	5 usulan	5 usulan	
4	Jumlah kegiatan pemberdayaan di kelurahan			1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
5	Jumlah kegiatan partisipasi pemberdayaan masyarakat di kelurahan			2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	
6	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan			2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	
7	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di fasilitasi (PKK)			13 klp	13 klp	1 keg	1 keg	1 keg	13 klp	1 keg	1 keg	1 keg	
8	Jumlah desa yang menerima bantuan/modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan			13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	
IV	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Jumlah sarana dan prasarana pendukung ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia			12 bulan	12 bulan	1 keg	1 keg	1 keg	12 bulan	1 keg	1 keg	1 keg	
2	Jumlah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat kecamatan			12 bulan	12 bulan	1 keg	1 keg	1 keg	12 bulan	1 keg	1 keg	1 keg	
V	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			3 keg	3 keg	4 Keg	4 keg	4 keg	3 keg	4 keg	4 keg	4 keg	
2	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan			2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	
3	Jumlah kegiatan kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan			1 keg	1 keg	2 keg	2 keg	2 keg	1 keg	2 keg	2 keg	2 keg	
VI	**Presentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa			13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	
2	Jumlah desa yang terfasilitasi pendampingan administrasi dan keuangan desa			13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Teras secara umum dapat dikatakan baik, hal ini bisa dilihat dari tingkat capaian kinerja terhadap indikator yang ditetapkan baik dalam IKK maupun IKU. Sebagian besar tingkat capaian telah mencapai target yang direncanakan.

Hal kritis yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pelayanan di Kecamatan Teras, adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang meliputi :

2.3.1. Peningkatan pemerintahan yang efektif, efisien yang ditandai dengan semakin sederhananya birokrasi serta pelayanan yang cepat, tepat dan akurat serta murah.

2.3.2. Peningkatan pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang ditandai dengan kepastian dan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi dan program/kegiatan untuk masyarakat.

2.3.3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan perekonomian masyarakat dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

2.3.4. Peningkatan sistem pengendalian keamanan lingkungan secara sinergis antara pemerintah dan masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2023, tidak tercantum rencana kegiatan yang ada di Kecamatan, sehingga tidak bisa dibandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Hasil analisis kebutuhan Kecamatan Teras dapat dilihat dalam tabel 3 (lampiran) .

Tabel 3. Hasil rivew terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Teras

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota***	***Kec. Teras***	***Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar***	***100%***	***2.345.089.000***	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota***	***Kec. Teras***	***Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.***	***100%***	***2.345.089.000***	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Gaji dan Tunjangan ASN, Gaji Non ASN**	**100%**	**2.045.493.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**12 bulan**	**100%**	**2.045.493.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Teras	Gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1.993.493.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Teras	12 bulan	1 tahun	1.993.493.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Teras	Gaji PTT dan tenaga honorer	24 orang/bulan	52.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Teras	12 bulan	24 orang/bulan	52.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kec. Teras**	**Fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**100%**	**155.221.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Teras**	**Fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**100%**	**155.221.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Teras	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Teras	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	2.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Teras	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Teras	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Teras	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	14.871.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Teras	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	14.871.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Teras	Jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	13.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Teras	Jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	13.500.000	

	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Teras	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 pkt	16.500.000	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Teras	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 pkt	16.500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Teras	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	95.350.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Teras	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	95.350.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Teras	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Teras	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	10.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Teras	**Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	12 Bulan	**78.825.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Teras	**Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	12 Bulan	**78.825.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Teras	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	14.825.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Teras	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	14.825.000	
	Pemeliharaan mebel	Kec. Teras	Jumlah mebel yang dipelihara	1 unit	10.000.000	Pemeliharaan mebel	Kec. Teras	Jumlah mebel yang dipelihara	1 unit	10.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Teras	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yan dipelihara	8 unit	4.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Teras	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yan dipelihara	8 unit	4.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Teras	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Teras	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Teras	**Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	12 Bulan	**35.550.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Teras	**Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	12 Bulan	**35.550.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Teras	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	900.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Teras	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	900.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Teras	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	33.650.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Teras	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	33.650.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Teras	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Teras	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	1.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Teras	**Jasa pemeliharaan barang milik daerah**	12 Bulan	**30.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Teras	**Jasa pemeliharaan barang milik daerah**	12 bulan	**30.000.000**	
	Pengadaan Mebel	Kec. Teras	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kec. Teras	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 unit	10.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Teras	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Teras	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	20.000.000	
2	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec. Teras**	**Prosentase layanan publik kecamatan tepat waktu**	**85%**	**100.000.000**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec. Teras**	**Prosentase layanan publik kecamatan tepat waktu**	**85%**	**100.000.000**	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana pelayanan Umum		**Jumlah Sarana dan Prasarana Umum dalam kondisi baik**	**1 unit**	**100.000.000**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana pelayanan Umum**		**Jumlah Sarana dan Prasarana Umum dalam kondisi baik**	**1 unit**	**100.000.000**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	1 dokumen	100.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	1 dokumen	100.000.000	

3	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	**Kec. Teras**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100%**	**75.000.000**	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	**Kec. Teras**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100%**	**75.000.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Jumlah usulan hasil musdes yang diverifikasi**	**1 tahun**	**50.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Jumlah usulan hasil musdes yang diverifikasi**	**1 tahun**	**50.000.000**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec. Teras**	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 laporan	50.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec. Teras**	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 laporan	50.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Teras	**Jumlah kegiatan pemberdayaan di kelurahan**	**1 tahun**	**25.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kec. Teras	**Jumlah kegiatan pemberdayaan di kelurahan**	**1 tahun**	**25.000.000**	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	13 unit	25.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	13 unit	25.000.000	
4	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec. Teras**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100%**	**120.000.000**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec. Teras**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100%**	**120.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kec. Teras**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4 Keg**	**120.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Teras**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4 Keg**	**120.000.000**	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Teras	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 org	50.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Teras	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 org	50.000.000	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Teras	Terlaksananya peringatan hari besar kebangsaan	1 Keg	70.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Teras	Terlaksananya peringatan hari besar kebangsaan	1 Keg	70.000.000	
					2.640.089.000					**2.640.089.000**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain menggali permasalahan/kebutuhan dari internal kantor, Kecamatan Teras juga menjaring aspirasi atau usulan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun LSM, yang langsung ditujukan ke Kecamatan Teras berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Desa dan Kecamatan. Berdasarkan atas hasil Musrenbang baik di Desa maupun Kecamatan, usulan dari masyarakat terkait dengan pelayanan/tugas pokok fungsi di Kecamatan Teras sebagaimana dalam tabel 4 (lampiran).

Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan dan para pemangku kepentingan Tahun 2024

Nomor	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota***	***Kec. Teras***	***Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar***	***100%***	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun**	**100%**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Teras	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1 tahun	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Teras	Gaji dan Tunjangan ASN, Gaji Non ASN	24 orang/bulan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kec. Teras**	**Fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**100%**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Teras	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Teras	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Teras	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Teras	Jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	
	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Teras	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 pkt	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Teras	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Teras	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Teras	**Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Teras	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	
	Pemeliharaan mebel	Kec. Teras	Jumlah mebel yang dipelihara	1 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Teras	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yan dipelihara	8 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Teras	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Teras	**Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Teras	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Teras	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Teras	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Teras	**Jasa pemeliharaan barang milik daerah**	12 bulan	
	Pengadaan Mebel	Kec. Teras	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Teras	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	
2	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec. Teras**	**Prosentase layanan publik kecamatan tepat waktu**	**85%**	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana pelayanan Umum		**Jumlah Sarana dan Prasarana Umum dalam kondisi baik**	**1 unit**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	1 dokumen	

3	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	**Kec. Teras**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100%**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Jumlah usulan hasil musdes yang diverifikasi**	**1 tahun**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec. Teras**	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 laporan	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Teras	**Jumlah kegiatan pemberdayaan di kelurahan**	**1 tahun**	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	13 unit	
4	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec. Teras**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100%**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kec. Teras**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4 Keg**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Teras	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 org	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Teras	Terlaksananya peringatan hari besar kebangsaan	1 Keg	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan, yang paling relevan adalah reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Prioritas pembangunan tersebut telah menjadi arah tujuan, sasaran dalam menyusun program dan kegiatan di Kecamatan Teras.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan tersebut akan dituangkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Penjabaran tujuan dalam Renja merupakan turunan dari Renstra berdasarkan pada misi yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1). Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan
2). Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya
3). Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional
4). Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
5). Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi organisasi. Adapun rincian sasaran tersebut sebagai berikut :

a. Tujuan 1. : Indeks kepuasan masyarakat, dijabarkan dengan sasaran sebagai berikut :
   1). Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
b. Tujuan 2. : Nilai Sakip Kecamatan, dijabarkan dengan sasaran sebagai berikut :
   1). Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Teras Tahun 2023 merupakan penjabaran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Uraian tentang program dan kegiatan di Kecamatan Teras dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, sebagai berikut :
    a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
    b. Pencapaian visi dan misi perangkat daerah
    c. Peningkatan Pelayanan Publik
    d. Peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan
    e. Kondisi sarana prasarana gedung kantor dan rumah dinas
2. Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan:
    a. Jumlah program sebanyak 4 program dan jumlah kegiatan sebanyak 9 kegiatan serta jumlah sub kegiatan sebanyak 23 sub kegiatan.
    b. Lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kecamatan dan beberapa kegiatan yang berlokasi di desa yaitu :
        - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana pelayanan Umum
        - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
        - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
        - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar : Rp. 3.520.528.000,-

Detail rencana program dan kegiatan Kecamatan Teras Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel 5 (lampiran).

Tabel 5. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TERAS TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
X				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**								
X	**XX**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**								
X	**XX**	**01**		**2.269.198.000**	**Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar.**	**%**	**Teras**	**100**	**2.269.198.000**		**100**	**2.345.089.000**
X	**XX**	**01**	2.02	1.964.587.000	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	%	Teras	100	1.964.587.000		100	2.045.493.000
X	**XX**	**01**	2.06	170.061.000	Fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	Teras	100	170.061.000		100	155.221.000
X	**XX**	**01**	2.07	30.000.000	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	Teras	12	30.000.000		12	78.825.000
X	**XX**	**01**	2.08	35.550.000	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	Teras	12	35.550.000		12	35.550.000
X	**XX**	**01**	2.09	69.000.000	Jasa pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	Teras	12	69.000.000		12	30.000.000

7												
7	**01**											
7	**01**	**02**		**1.062.4790.000**	**Prosentase layanan publik kecamatan tepat waktu**	%	Teras	100	**1.062.4790.000**			**100.000.000**
7	01	02	2.03	1.062.479.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum dalam kondisi baik	Unit	Teras	1	1.062.479.000		1	100.000.000
7	**01**	**03**		**75.000.000**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	%		100	**75.000.000**		100	**75.000.000**
7	01	03	2.01	50.000.000	Jumlah usulan hasil musdes yang diverifikasi	Tahun	Teras	1	50.000.000		1	50.000.000
7	01	03	2.02	25.000.000	Jumlah kegiatan pemberdayaan di kelurahan	Tahun	Teras	1	25.000.000		1	25.000.000
7	**01**	**05**		**113.851.000**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**%**		**100**	**113.851.000**		**100**	**120.000.000**
7	01	05	2.01	113.851.000	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Keg	Teras	4	113.851.000		4	120.000.000
Jumlah									**3.520.528.000**			**3.520.528.000**

Teras,

CAMAT Teras

Drs. JOKO SUSENO

Pembina Tk.I

NIP. 19680827 199703 1 007

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Teras untuk Tahun 2023 disajikan dalam tabel rencana kerja dan pendanaan organisasi perangkat daerah Kecamatan Teras secara detail kami sajikan pada Tabel 6

Tabel 6. PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TERAS TAHUN 2024

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Tahun 2023
1				2	3	4	5	9	10
X				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**					
X	**XX**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**					
X	**XX**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar.**	**%**	**Teras**	**100**	**2.269.198.000**
X	**XX**	**01**	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	%	Teras	100	1.964.587.000
X	**XX**	**01**	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	Teras	100	170.061.000
X	**XX**	**01**	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	Teras	12	30.000.000
X	**XX**	**01**	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	Teras	12	35.550.000
X	**XX**	**01**	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	Teras	12	69.000.000
7				**Unsur Kewilayahan**					
7	**01**			**Kecamatan**					
7	**01**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase layanan publik kecamatan tepat waktu**	%	Teras	**100**	**1.062.479.000**
7	01	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum dalam kondisi baik	Unit	Teras	1	1.062.479.000
7	**01**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	%		100	**75.000.000**
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan hasil musdes yang diverifikasi	Tahun	Teras	1	50.000.000
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan di kelurahan	Tahun	Teras	1	25.000.000
7	**01**	**05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**%**		**100**	**113.851.000**
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Keg	Teras	4	113.851.000
Jumlah									**3.520.528.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan rencana target capaian kinerja yang diinginkan untuk 1 tahun mendatang. Renja ini memuat berbagai kebutuhan yang berkaitan secara langsung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Teras, yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Perumusan program dan kegiatan ini, mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai disertai dengan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Realisasi renja ini sangat tergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Sebagaimana tujuan renja ini yaitu “terarahnya program serta prioritas kegiatan tahunan dengan capaian rencana strategis Kecamatan Teras melalui pembiayaan APBD Kabupaten yang dilengkapi dengan indikator capaian sebagai tolak ukur penilaian kinerja”, maka renja ini tidak akan berarti banyak jika tidak dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan tidak dilaksanakana sebagaimana mestinya. Oleh karena masih diperlukan komitmen yang kuat oleh seluruh komponen dalam rangka melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi secara terus-menerus sehingga renja ini dapat menjadi sarana dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Teras 2021-2026.

JJ. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

KECAMATAN SAWIT

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas kehendakNya kami dapat melaksanakan salah satu tugas Kecmatan sawit Tahun 2023 dengan baik guna menyusun sasaran strategis Kecamatan Sawit sebagaimana dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana StrategisPerangkat Dearah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.

Dokumen renja Kecamatan Sawit Tahun 2024 sebagai acuan Kecamatan sawit dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkandalam dokumen Renstra 2021-2026.

Dokumen ini berisi tentang informasi Perencanaan Kinerja Tahun 2024 pengukuran kinerja tahun 2022, anggaran tahun 2023 yang tertuang dalam DPA tahun 2023 serta mngemukan juga permasalahan yang terdapat pada tahun 2022, faktor pendukung dan kendala kegiatannya. Semoga dokumen inidapat bermanfaat bagi semua pihakyang memerlukan utamanya bagi Kecamatan Sawit dalam rangka meningkatkan kinerja ke depan.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Renja Kecamatan Sawit tahun 2024, baik dari aspek penyusunan maupun penyajian dokumen ini. Oleh karena itu kami berharap adanya masukan dari pihak pihak yang berkepentingan yang dapat menjadi pertimbangan untuk peningkatan kinerja, akuntabilitas dan perencanaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL & GAMBAR 1
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
Lampiran II 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12
Lampiran III 13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 17
Lampiran IV 19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 30
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 30
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 33
4.1 Program dan Kegiatan 33
BAB V PENUTUP 47

DAFTAR TABEL & GAMBAR

TABEL T-C-.29 8

TABEL T-C-.30 13

TABEL T-C-.31 19

Gambar G-VI.C.1 32

TABEL T-C-.33 34

BAB I

PENDAHULUAN

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari Desa , Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan metoda dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dilakukan dengan pendekatan partisipatif yaitu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders), serta pendekatan politis untuk menjalankan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye yang disusun ke dalam rancangan RPJMD dan dijalankan pada tahapan tiap tahunnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Tahapan dan Tata cara penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) terdiri dari :

1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, terdapat pada gambar G.IV.A.2 (Lampiran I).
2. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
5. Penetapan Renja Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen pelaksanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Kabupaten adalah dalam

perumusan Rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten, dan sebagai tindak lanjut proses penyusunan RAPBD. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-PERANGKAT DAERAH adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sawit adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusal dengan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah , Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Penmerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerimtah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan , Pengundangan, dan Penye barluasan Peraturan Perundang-Undangan;

23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2009-2014;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provisni Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2004-2014;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pelayanan Publik;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Kecamatan;
33. Rencana Strategis Kecamatan Sawit Tahun 2022-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sawit adalah untuk memberikan Landasan Kebijakan Teknis Tahunan Dalam Kerangka Pencapaian Visi Misi setiap tahapnya (satu tahunan) dan sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Camat pada Akhir Tahun Anggaran sebagai bagian dari pelaksanaan Kebijakan Daerah.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah

menetapkan prioritas Program dan Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan sesuai Rencana Strategis yang dilaksanakan per tahap (tahunan) selama lima tahun ke depan melalui sumber pembiayaan APBD yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja yaitu Masukan, Keluaran, Hasil, Manfaat , Dampak.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja ini , terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (tahun n-2) dan Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dapat ditampilkan dalam table T-C-29 (lampiran II) mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada tabel tersebut, dapat diketahui pokok-pokok materi :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaranyang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Lampiran II

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*

Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sawit.

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7				Urusan Kewilayahan									
7	01			Kecamatan									
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu								
7	01	02	2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah IMB yang dilayani	1 keg	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl	36 bl	
7	01	02	2.02	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di Kecamatan yang terselenggara	1 keg	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl		
7	01	02	2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana umum dalam kondisi baik	1 unit	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl		

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl		
7	01	04	2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana pendukung ketentraman dan keteriban umum yang tersedia	1 keg	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl		
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl		
7	01	05	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4 keg	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl		
7													
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl		
					Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)	100	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl		

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	03	2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan hasil Musdes yang diverifikasi	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl		
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl		
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang laksanakan	2 keg	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl		
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti	100	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl		
7	01	06	2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa	12 desa	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl		
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl		
			2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Gaji dan Tunjangan ASN , gaji Non ASN	1 tahun	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl		
			2.06	Administrasi Umum perangkat daerah	Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl		
			2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jasa penunjang urusan pemerintahahan daerah	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl		
			2.09	'Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jasa pemeliharaan barang milik daerah	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl		

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 paket	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl		
			2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	25	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl		
			2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl		
			2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	2	12 bl	12 bl	12 bl	100%	12 bl		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dapat dilihat dalam Lampiran 2.a (Format IKK).

Perangkat Daerah dalam menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi , serta norma standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan adalah dengan cara menganalisis terhadap indikator input , output dan outcome Perangkat Daerah Kecamatan Sawit. Selanjutnya hasil analisisnya tersebut dapat dipadukan dan disajikan pada table T-.C.30 (Lampiran 3). pada lembar berikutnya.

Lampiran III

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2023

Kabupaten Boyolali

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah IMB yang dilayani			1 keg	1 keg	1 keg	-	1 keg	1 keg	1 keg	-	
	Jumlah Desa yang dilakukan pendataan IMB			12 desa	12 desa	12 desa	-	12 desa	12 desa	12 desa	-	
	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di Kecamatan yang terselenggara			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
	Jumlah laporan sosialisasi pelayanan di kecamatan			1 keg	1 keg	1 keg	2 lap	1 keg	1 keg	1 keg	2 lap	
	Jumlah sarana dan prasarana umum dalam kondisi baik			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
	Jumlah dokumen kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum			1 keg	1 keg	1 keg	2 dok	1 keg	1 keg	1 keg	2 dok	
	Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
	Jumlah laporan kegiatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat kecamatan			1 unit	1 unit	1 unit	13 lap	1 unit	1 unit	1 unit	13 lap	
	Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	
	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
	Jumlah kegiatan kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
	Jumlah usulan hasil Musdes yang diverifikasi			15 usulan	15 usulan	15 usulan	15 usulan	15 usulan	15 usulan	15 usulan	15 usulan	
	Jumlah lemb kemasy yg mengikuti musrenbang Tingkat Kecamatan			3 keg	3 keg	3 keg	6 lemb kemasy	3 keg	3 keg	3 keg	6 lemb kemasya	
	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan			3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	
	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat			2 keg	2 keg	2 keg	1 lap	2 keg	2 keg	2 keg	1 lap	

	Jumlah dokumen Daftar Skala Prioritas Tingkat Kelurahan			-	-	-	-					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	
	Jumlah kegiatan partisipasi pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	
	Jumah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang laksanakan			1 keg	2 keg	2 keg	2 keg	1 keg	2 keg	2 keg	2 keg	
	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)			12 desa	12 desa	12 desa	1 lap	12 desa	12 desa	12 desa	1 lap	
	Jumlah desa yang menerima bantuan / modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan			-	12 desa	7 desa	12 desa	-	12 desa	7 desa	12 desa	
	Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa											
	Jumlah desa yang terfasilitasi pedampingan administrasi dan keuangan desa			12 desa	12 desa	7 desa	12 desa	12 desa	12 desa	7 desa	12 desa	
	Gaji dan Tunjangan ASN , gaji Non ASN											
	Gaji dan Tunjangan ASN			14 bulan	14 bulan	14 bulan	16 org	14 bulan	14 bulan	14 bulan	16 org	
	Jumlah laporan penyedian adm tugas ASN			12 bulan	12 bulan	12 lap	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 lap	
	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			18	18	18	18	18	18	18	18	
	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan			2	2	2	2	2	2	2	2	
	Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12 bulan	12 bulan	12 bulan	4 paket	12 bulan	12 bulan	12 bulan	4 paket	
	Peralatan dan kebersihan rumah tangga			12 bulan	12 bulan	12 bulan	4 paket	12 bulan	12 bulan	12 bulan	4 paket	
	Bahan Logistik Kantor			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 paket	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 paket	
	Barang Cetakan dan Penggandaan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	4 paket	12 bulan	12 bulan	12 bulan	4 paket	
	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 bulan	12 bulan	-	-	12 bulan	12 bulan	-	-	
	Bahan/Material			12 bulan	12 bulan	12 bulan	4 paket	12 desa	12 desa	12 desa	4 paket	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 bulan	12 bulan	12 bulan	4 lap	12 desa	12 desa	12 desa	4 lap	
	Fasilitasi Perjalanan Dinas			12 bulan	12 bulan	12 bulan	4 lap	12 desa	12 desa	12 desa	4 lap	
	Jasa penunjang urusan pemerintahahan daerah											

	Jasa Surat Menyurat			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 lap	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 lap	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 lap	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 lap	
	Jasa pemeliharaan barang milik daerah											
	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	8 unit	12 bulan	12 bulan	12 bulan	8 unit	
	Jasa perbaikan peralatan kerja			12 bulan	12 bulan	12 bulan	13 unit	12 bulan	12 bulan	12 bulan	13 unit	
	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan bangunan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 unit	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1 unit	
	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah											
	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
	Terlaksanya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak….unit			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
	Terlaksannya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya sebanyak…..unit			-	-	-	-					
	Terlaksanannya Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnnya sebanyak….unit			-	-	-	-					
	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat			26 dok	26 dok	26 dok	26 dok	26 dok	26 dok	26 dok	26 dok	
	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun			2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun			15	15	15	15	15	15	15	15	
	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah			4	4	4	4	4	4	4	4	
	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1	1	1	1	1	1	1	1	

	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1	1	1	1	1	1	1	1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah			2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1	1	1	1	1	1	1	1	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara umum permasalahan pelayanan di Kecamatan Sawit dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. Permasalahan tata kelola pemerintahan antara lain meliputi :
   a. Belum terpenuhinya rasio kecukupan dan kuantitas SDM aparatur dengan kompetensi khusus sesuai fungsi yang dibutuhkan
   b. Kurangnya sinergitas dan integrasi system perencanaan dan penganggaran
   c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan
   d. Kurang lengkapnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat waktu.
2. Permasalahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah antara lain meliputi:
   a. Kurangnya pemahaman masyarakat dan sosialisasi yang berkelanjutan terhadap pengelolaan tata guna lahan sesuai dengan peruntukannya
   b. Belum optimalnya pemanfaatan pengembangan energi.
3. Permasalahan tingkat kesejahteraan antara lain meliputi :
   a. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
   b. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesejahteraan
   c. Kurang maksimalnya peran perempuan dan tingkat pemberdayaan perempuan serta perlindungan ibu dan anak.
4. Permasalahan kondusivitas lingkungan sosial, politik, hukum, ketertiban dan keamanan antara lain meliputi :
   a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi
   b. Belum optimalnya penanganan gangguan ketertiban umum, HAM dan penyakit menular.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1 Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2 Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan

3 Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Dapat ditelaah terhadap rancangan awal RKPD , berdasarkan Tabel T-C.31 (Lampiran 4).

Lampiran IV

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten BOYOLALI*

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sawit

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan / Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Sawit	**Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu**	86,00	100.000.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Sawit	**Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu**	86,00	100.000.000	
	1. Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Sawit	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tk. kecamatan	1 Keg	-	1. Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Sawit	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tk. kecamatan	1 Keg	-	
	1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sawit	Jumlah dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tk. kecamatan	39 dokumen	-	1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sawit	Jumlah dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tk. kecamatan	39 dokumen	-	
	2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Sawit	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	1 keg	-	2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Sawit	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di Kecamatan yang terselenggara	1 keg	-	

	2.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sawit	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	-	2.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sawit	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	-	
	3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sawit	Jumlah kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 kegiatan	100.000.000	3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sawit	Jumlah kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 kegiatan	100.000.000	
	3.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Sawit	Jumlah dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumen	100.000.000	3.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Sawit	Jumlah dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumen	100.000.000	
2.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Sawit	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100,00	25.000.000	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Sawit	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100,00	25.000.000	
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sawit	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Keg	25.000.000,00	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sawit	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Keg	25.000.000	
	1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Sawit	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	13 laporan	25.000.000	1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sawit	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	13 laporan	25.000.000	

	Kecamatan		Kecamatan					Kecamatan			
3.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Sawit	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100,00	70.000.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Sawit	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100,00	70.000.000	
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sawit	Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Keg	70.000.000	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sawit	Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Keg	70.000.000	
	1.1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Sawit	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 orang	50.000.000	1.1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Sawit	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 orang	50.000.000	
	1.2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras,	Sawit	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan	500 orang	20.000.000	1.2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras,	Sawit	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan	500 orang	20.000.000	

	dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Sawit	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100,00	150.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Sawit	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100,00	150.000.000	
		Sawit	Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)	100,00	-		Sawit	Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)	100,00	-	
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sawit	Jumlah kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 kegiatan	50.000.000	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sawit	Jumlah kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 kegiatan	50.000.000	
	1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sawit	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipas dalam forum musyawarah perencana pembangunan di desa	6 lembaga kemasyarakatan	-	1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sawit	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipas dalam forum musyawarah perencana pembangunan di desa	6 lembaga kemasyarakatan	-	
	1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Sawit	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	13 laporan	150.000.000	1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Sawit	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	13 laporan	150.000.000	

	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.					
	2.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					2.1					
	2.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.2					
	2.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.3					
	3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					3.					
	3.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					3.1					
	3.2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					3.2					
5.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Sawit	Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti	100,00	-	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Sawit	Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti	100,00	-	
	1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Sawit	Jumlah kegiatan Fasilitasi,	1 kegiatan	-	1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Sawit	Jumlah kegiatan Fasilitasi,	1 kegiatan	-	

	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	1.1 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Sawit	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	13 dokumen	-	1.1 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Sawit	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	13 dokumen	-	
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sawit	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100,00	2.275.913.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sawit	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100,00	2.275.913.000	
	1. Administrasi keuangan perangkat daerah	Sawit	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	6 kegiatan	2.034.013.000	1. Administrasi keuangan perangkat daerah	Sawit	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	6 kegiatan	2.034.013.000	
	1.1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Sawit	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 orang/bulan	1.963.813.000	1.1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Sawit	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 orang/bulan	1.963.813.000	
	1.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sawit	Jumlah dokumen hasil penyediaanadministrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	70.200.000	1.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sawit	Jumlah dokumen hasil penyediaanadministrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	70.200.000	
	1.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sawit	Jumlah dokumen penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12,00	-	1.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sawit	Jumlah dokumen penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12,00	-	
	1.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sawit	Jumlah dokumen Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12,00	-	1.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sawit	Jumlah dokumen Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12,00	-	
	1.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Sawit	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18,00	-	1.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Sawit	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18,00	-	

		Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD						Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD					
	1.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sawit	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	1,00	-	1.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sawit	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	1,00	-	
2.	Administrasi Umum perangkat daerah		Sawit	Jumlah kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	11 kegiatan	117.000.000	2.	Administrasi Umum perangkat daerah	Sawit	Jumlah kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	11 kegiatan	117.000.000	
	2.1	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Sawit	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 paket	2.000.000	2.1	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Sawit	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 paket	2.000.000	
	2.2	Penyediaan peralatan rumah tangga	Sawit	Jumlah paket Peralatan dan kebersihan rumah tangga	4 paket	3.000.000,00	2.2	Penyediaan peralatan rumah tangga	Sawit	Jumlah paket Peralatan dan kebersihan rumah tangga	4 paket	3.000.000	
	2.3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	4 paket	20.000.0000	2.3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	4 paket	20.000.000	
	2.4	Penyediaan bahan logistik kantor	Sawit	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	15.000.000	2.4	Penyediaan bahan logistik kantor	Sawit	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	15.000.000	
	2.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sawit	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	10.000.000	2.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sawit	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	10.000.000	
	2.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sawit	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen	-	2.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sawit	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen	-	
	2.7	Penyediaan bahan / Material	Sawit	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	4 paket	15.000.000	2.7	Penyediaan bahan / Material	Sawit	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	4 paket	15.000.000	
	2.8	Fasilitasi	Sawit	Jumlah laporan	4		2.8	Fasilitasi	Sawit	Jumlah laporan	4		

	kunjungan tamu		Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	62.000.000		kunjungan tamu		Fasilitasi Kunjungan	laporan	62.000.000		
	2.9 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sawit	Jumlah laopran Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	10.000.000		2.9 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sawit	Jumlah laopran Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	10.000.000		
	2.10 Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Sawit	Jumlah dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	13 dokumen	-		2.10 Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	13 dokumen	-		
	2.11 Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Sawit	Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	13 dokumen	-		2.11 Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	13 dokumen	-		
3.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Sawit	Jasa penunjang urusan pemerintahahan daerah	12 bulan	36.900.000	3.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Sawit	Jasa penunjang urusan pemerintahahan daerah	12 bulan	36.900.000		
	3.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sawit	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	900.000		3.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sawit	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lapora	900.000		
	3.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sawit	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	36.000.000		3.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sawit	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	36.000.000		
4.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Sawit	Jasa pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	68.000.000	4.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Sawit	Jasa pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	68.000.000		
	4.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Sawit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 unit	14.000.000		4.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Sawit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 unit n	14.000.000		

	Operasional atau Lapangan						Operasional atau Lapangan					
	4.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sawit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 unit	4.000.000		4.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sawit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 unit	4.000.000	
	4.3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sawit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	50.000.000		4.3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sawit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	50.000.000	
	5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Sawit	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 pkt	20.000.000		5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Sawit	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 pkt	20.000.000	
	1.3 Pengadaan Mebel	Sawit		-				Sawit		-		
	5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sawit			-		***1.4***	Sawit			-	
	5.2 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Sawit			-		***1.5***	Sawit			-	-
	5.3 Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sawit			-		***1.6***	Sawit			-	-
	6. Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sawit	Jumlah kegiatan perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7,00	-		6. Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sawit	Jumlah kegiatanperencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	7,00	-	
	6.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sawit	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2,00	-		6.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sawit	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2,00	-	

	6.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sawit	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1,00	-	6.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sawit	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1,00	-	
	6.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sawit	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1,00	-	6.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sawit	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1,00	-	
	6.4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sawit	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	1,00	-	6.4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sawit	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	1,00	-	
	6.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sawit	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	1,00	-	6.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sawit	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	1,00	-	
	6.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sawit	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15,00	-	6.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sawit	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15,00	-	
	6.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sawit	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4,00	-	6.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sawit	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4,00	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini dapat diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan , baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah , LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah lain yang saling berkaitan berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan (yang sebelumnya diadakan musyawarah di tingkat Dusun/lingkungan RT, RW dan kelompok-kelompok masyarakat misalnya kelompok tani, kelompok perempuan dsb. Penggalian gagasan dan menyelenggarakan musyawarah dusun (musdus) serta rembug warga untuk menetapkan jenis dari usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan, dilanjutkan dengan Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang Kabupaten.

Usulan tersebut disesuaikan dan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, serta visi dan misi pembangunan daerah yang sudah ditetapkan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana yang dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan proritas pembangunan nasional dan yang terkait dalam tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada Tabel T-C.33 (Lampiran 5)

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Langkah-langkah perumusan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah
2. Membandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hal evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah, apakah masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kehidupan.
3. Identifikasi Kebijakan Nasional dan terkait dengan tugas dan fungsi pokok Perangkat Daerah, misalnya dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Millenium Development Goals (MDGs)
4. Unit Perangkat Daerah Kabupaten/Kota perlu mengidentifikan kebijakan provinsi.
5. Merumuskan pernyataan tujuan dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebelumnya.

Dengan demikian , Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Sawit adalah :

1. Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4. Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6. Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
8. Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
9. Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Perumusan Sasaran, melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Merumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya.
2. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra OPD, cuplik rumusan sasaran dalam Renstra OPD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan.
3. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra OPD) , jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut.
4. Rumusan sasaran tersebut , sajikan dalam bentuk pernyataan.
   Dan dapat dilihat pada Tabel T-C.33 (Lampiran 6)

Sasaran yang hendak dicapai di Kecamatan Sawit adalah :

1. Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel
2. Tersusunnya Daftar Skala Prioritas usulan kegiatan Kecamatan/Kelurahan
3. Terwujudnya pelayanan publik yang responsive dan akuntabel
4. Terwujudnya masyarakat yang tertib dan aman serta mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial
5. Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat.

Langkah-langkah perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar G-VI.C.1

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

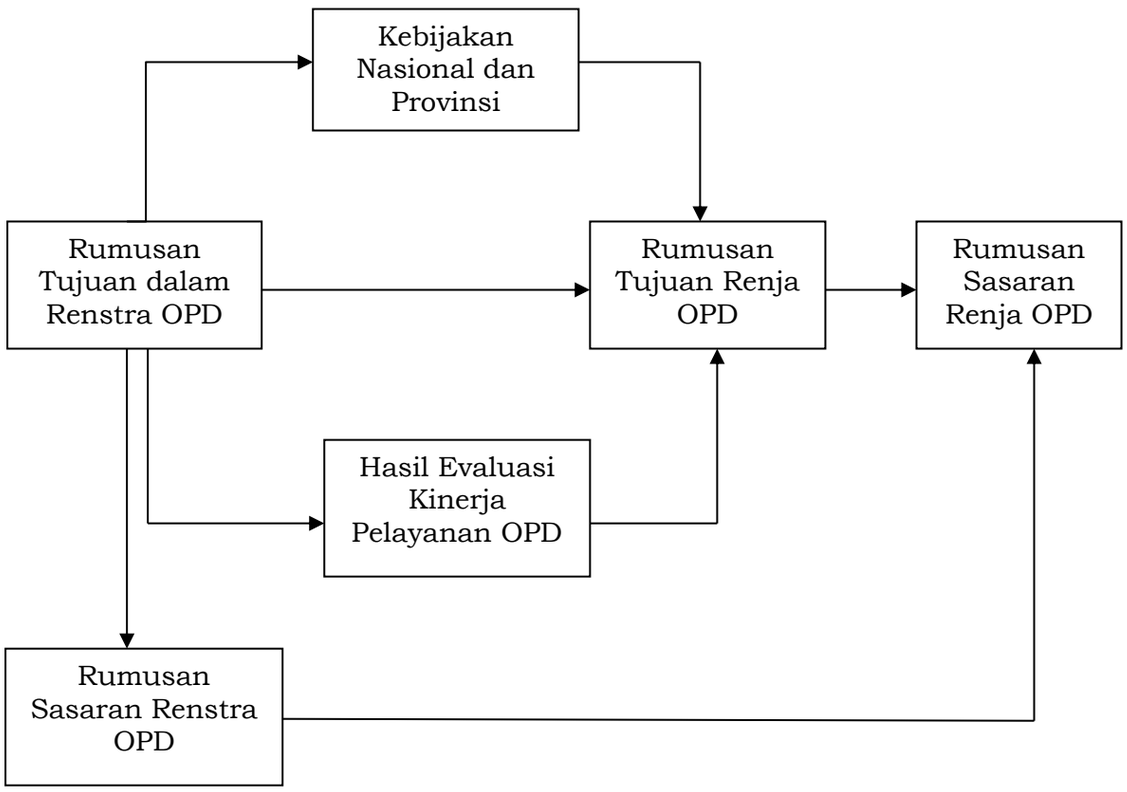

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

   Misal:

   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
   b. Pencapaian SDGs,
   c. Pengentasan kemiskinan,
   d. Pencapaian NSPK dan SPM,
   e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
   f. Pengembangan daerah terisolir,
   g. Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

   - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program dan kegiatan) pada Tabel T-C.33 (Lampiran 7), yaitu sebagai berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Boyolali

Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,950,086,000**					**2,597,078,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,655,086,000**					**2,277,078,000**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,394,343,000**					**2,034,013,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN , gaji Non ASN Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kelurahan	1 tahun 100 persen	Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	1.904.542.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1,963,813,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan Tunjangan ASN , gaji Non ASN Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Gaji PTT dan tnaga honorer sebanyak 2 orang	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kelurahan	1 tahun 100 persen	Gaji PTT dan tnaga honorer sebanyak 2 orang	100 persen	78,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	70,200,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Boyolali

Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**117,000,000**					**117,165,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kelurahan	100 persen	12 bulan	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Peralatan dan kebersihan Rumah Tangga	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kelurahan	100 persen	12 bulan	100 persen	2,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	3.000.000
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Renstra dan Renja th 2023 merupakan program kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	4 paket	20.000.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Boyolali

Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit

7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Bahan Logistik Kantor selama 1 tahun	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kelurahan	100 persen	12 bulan	100 persen	15,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	15,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kelurahan	100 persen	1 Paket	100 persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Bahan/Material yang Disediakan	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kelurahan	100 persen	12 bulan	100 persen	14,835,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	15,000,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Boyolali

Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit

7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kelurahan	100 persen	12 bulan	100 persen	62,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu standar	4 laporan	62,000,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Boyolali

Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Fasilitasi perjalanan dinas	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kelurahan	100 persen	12 bulan	100 persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	10,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**37,843,000**					
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kelurahan	100 Persen	1 paket	100 persen	17,843,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kelurahan	100 Persen	1 tahun	100 persen	20,000,000	Pendapatan Bagi Hasil				
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**37,900,000**					**37,900,000**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Boyolali

Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase penunjang urusan pemerintahan	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kelurahan	100 persen	12 bulan	100 persen	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	900,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kelurahan	100 persen	12 bulan	100 persen	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	36,000,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Boyolali

Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit

					Pelaksanaan jasa transaksi keuangan	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 persen	1,000,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	2 laporan	600,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**68,000,000**				**68,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kelurahan	100 persen	12 bulan	100 persen	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	8 unit	14,000,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Boyolali

Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit

7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kelurahan	100 persen	12 bulan	100 persen	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	4,000,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Boyolali

Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jasa pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kelurahan	100 persen	12 bulan	100 persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	50,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**100,000,000**					**100,000,000**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								**100,000,000**					**100,000,000**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu	Jumlah kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kelurahan	86 persen	1 kegiatan	86 persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumen	100,000,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Boyolali

Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**75,000,000**					**150,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**50,000,000**					**50,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kelurahan	100 persen	5 usulan	100 persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam	13 laporan	150,000,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**25,000,000**					**100,000,000**
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Boyolali

Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit
Sub Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								120,000,000					70,000,000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								120,000,000					70,000,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Boyolali

Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit

Sub Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Jumlah kegiatan peringatan hai besar nasional di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kelurahan	100 persen	2 kegiatan	100 persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	400 orang	50,000,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan **Prakiraan Maju Tahun 2024** Kabupaten Boyolali

Unit Organisasi : 7.01.2.19.8.01.06.0000 Kecamatan Sawit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Jumlah kegiatanKerukunan umat beragama di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Kab. Boyolali, Sawit, Semua Kelurahan	100 persen	2 kegiatan	100 persen	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 orang	20,000,000
TOTAL													**2,950,086,000**					**2,597,078,000**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja merupakan langkah awal perencanaan tahunan yang harus dilakukan Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan dengan prinsip satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Perangkat Daerah Kecamatan Sawit bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan Rancangan awal RKPD , Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten.

Yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan Rencana Kerja ini adalah agar dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sawit adalah benar-benar berdasarkan nilai kebutuhan masyarakat, bukan hanya kegiatan rutin yang diselenggarakan organisasi pemerintah dan pembangunan dengan meningkatkan fungsi aparatur sebagai fasilitator dan organisasi.

Kaidah-kaidah pelaksana dalam Rencana Kerja ini adalah dengan pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (Top-down) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa , hingga kecamatan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah, menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dilakukan dengan pendekatan partisipatif yaitu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (Stakeholders), serta pendekatan politis untuk menjalankan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye yang disusun ke dalam Rancangan RPJMD dan dijalankan pada tahapan tiap tahunnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana tindak lanjut yang direkomendasikan adalah agar dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sawit dapat mengakomodir

sebagaian besar usulan dan kebutuhan masyarakat , agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan.

Dalam penyusunan ini tentu saja masih banyak kekurangan atau kelemahan, akan tetapi penyusunan ini dibuat semaksimal mungkin dalam rangka meningkatkan perencanaan yang matang agar dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dapat dijalankan berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk itu, saran ataupun kritik membangun senantiasa kami nantikan dalam rangka perbaikan penyusunannya di masa mendatang.
Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Boyolali, 2023

CAMAT SAWIT

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO, SH
Pembina
NIP. 19740115 200604 1 003

KK. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

KECAMATAN BANYUDONO

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Panjatkan Kehadirat Alloh SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat, Taufiq, dan HidayahNya sehingga Kecamatan Banyudono dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun yang lalu dan tahun berjalan. Hal tersebut bertujuan agar program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD sesuai dengan Renstra PD. Selain itu hasil evaluasi terhadap renja tahun lalu dan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja PD dilakukan dalam rangka optimasi pencapaian sasaran Renstra PD.

Renja 2024 Kecamatan Banyudono mendukung dan mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Boyolali 2021-2026 yaitu BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVENTASI, Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL) diarahkan pada “Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh, ikonik, mandiri, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan. Semoga dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Banyudono dapat bermanfaat bagi pembangunan di wilayah Kecamatan Banyudono sekarang dan pada masa-masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

	PENGANTAR	I
	DAFTAR ISI	Ii
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II.	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	7
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	8
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	13
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	13
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	15
	3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	15
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	15
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	17
	4.1 Program dan Kegiatan	18
BAB V.	PENUTUP	19
LAMPIRAN		

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah selama periode 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah selama periode 5 (lima) tahun. Tata cara / proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) terdiri dari :

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan dengan tujuan untuk memastikan bahawa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal

Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota menjadi Rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan : a) rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; b) hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah meliputi kebijakan program strategis nasional (PSN), amanat pembangunan global dan nasional, dan dinamika pembangunan nasional lainnya. Selain itu juga kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 tetap memperhatikan keberlanjutan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada sector perekonomian, sosial dan Kesehatan, serta dukungan terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) sebagai prioritas dalam penanggulangan kemiskinan. Disamping itu RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 meliputi:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan eksterm (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Banyudono adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yng dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Rencana Strategis Kecamatan Banyudono Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Banyudono 2024 adalah untuk memberikan Landasan Kebijakan Teknis Tahunan dalam Kerangka Pencapaian Visi Misi setiap tahapnya (satu tahunan) dan sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Camat pada Akhir Tahun Anggaran sebagai bagian dari pelaksanaan Kebijakan Daerah. Renja Tahun 2024 Kecamatan Banyudono disusun sebagai acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Banyudono Tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2024 Kecamatan Banyudono adalah adalah menetapkan prioritas Program dan Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan sesuai Rencana Strategis yang dilaksanakan per tahap (tahunan) melalui sumber pembiayaan APBD dan menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Banyudono Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Banyudono Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Banyudono, terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan
BAB V. PENUTUP
LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Revieu hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dan realisasi Renstra Kecamatan Banyudono yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Banyudono dan/atau realisasi APBD Kecamatan Banyudono. Adapun hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 untuk Kecamatan Banyudono sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/keluaran yang telah direncanakan yaitu:
   a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
   b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
   c. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota;
   d. Peningkatan Kapasitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut:
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
   d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   e. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
   f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

g. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
h. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan untuk Kecamatan Banyudono tidak ada.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
   a. Masih dalam masa pandemi Covid 19 dimana kegiatan/aktivitas kantor adanya pembatasan untuk pengurangan penyebaran Covid 19;
   b. Adanya refocusing anggaran guna penanganan wabah covid19 pada tahun anggaran 2022;
   c. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena alasan Protokol Kesehatan Covid19 tidak diperkenankan berkerumun.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah dapat memenuhi / melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, dengan demikian target capaian program Renstra PD dapat tercapai.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan meningkatkan target capaian dari tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan potensi sumber daya dan dana yang ada.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel T-C.29 (Lampiran 1).

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah:Kecamatan Banyudono

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	arget Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									
				Program :									
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**								
				Kegiatan:									
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	14 bulan	100%
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji Non ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya perbaikan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	**Terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan**								
				Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kegiatan Kepemudaan	0	0	0	0	100%	0	0	100%
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum**								
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Umum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**								
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan**								

					Pemerintahan Umum.								
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	0	0	0	0	100%	0	0	100%
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Terlaksananya Rakor Muspika/ Perangkat Kelurahan**								
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	0	0	0	100%	0	0	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang telah disesuaikan pada Kecamatan Banyudono yaitu pada Tabel T-C.30.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banyudono 2021
Kabupaten Boyolali

No	Indikator*)	SPM / Standar Nasional	IKK(PP-6/'08	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (tahun n-2)	Tahun 2020 (tahun n-1)	Tahun 2021 (tahun n)	Tahun 2022 (tahun n+1)	Tahun 2019 (tahun n-2)	Tahun 2020 (tahun n-1)	Tahun 2021 (tahun n)	Tahun 2022 (tahun n+1)	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17	18	19
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**											
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	
	5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	
	6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	
	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	
	8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	
	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Telepon			12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	
	10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	
	11. Peyediaan Peralatan Rumah Tangga			12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	
	12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	
	13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	
	14. Penyediaan Makanan dan Minuman			12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	
	15. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	
	16. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran			0	0	0	0	0	0	0	0	

2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**											
	1. Pemb. Gedung Kantor			0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor			12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan**											
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3 dok	3 dok	3 dok	0	3 dok	3 dok	3 dok	0	
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			1 dok	1 dok	1 dok	0	1 dok	1 dok	1 dok	0	
4	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**											
	1. Pengendalian Keamanan Lingkungan			12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	
5	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan**											
	1. Penyelenggaraan Kegiatan kepemudaan dan olah raga			2 keg	2 keg	2 keg	0	2 keg	2 keg	2 keg	0	
	2. Fasilitasi kegiatan dan belanja hibah dan bantuan soial			15 desa	15 desa	15 desa	0	15 desa	15 desa	15 desa	0	
6	**Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah**											
	1. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan daerah/perangkat kelurahan			12 bl	12 bl	12 bl	0	12 bl	12 bl	12 bl	0	
7	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**											
	1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa			2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	
	2. Pembinaan peningkatan Iman dan Taqwa di kalangan masyarakat			2 keg	2 keg	2 keg	0	2 keg	2 keg	2 keg	0	
8	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**											
	1. Monitoring Pengisian dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa			15 desa	15 desa	15 desa	0	15 desa	15 desa	15 desa	0	
9	**Program Peningkatan Peran perempuan di pedesaan /kelurahan**											

	1. Pembinaan organisasi perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan			15 desa	15 desa	15 desa	0	15 desa	15 desa	15 desa	0	
10	**Program Pembinaan dan Fasilitasi penyelengaraan pemerintahan daerah**											
	1. Pendampingan pengelolaan keuangan desa			2 keg	2 keg	2 keg	0	0	2 keg	2 keg	0	
	2. Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan			15 desa	15 desa	15 desa	0	15 desa	15 desa	15 desa	0	
	3. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa			6 dok	6 dok	6 dok	0	6 dok	6 dok	6 dok	0	
	4. Pembinaan dan pengawasan Implementasi Undang-undang Desa			15 desa	15 desa	15 desa	0	15 desa	15 desa	15 desa	0	
	5. Pendampingan pengelolaan alokasi dana desa			0	0	0	0	0	0	0	0	
11	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**											
	1. Monitoring dan Evaluasi RKPDes			4 dok	4 dok	4 dok	0	4 dok	4 dok	4 dok	0	
	2. Penyusunan Renstra dan Renja OPD			1 dok	1 dok	1 dok	2 dok	1 dok	1 dok	1 dok	2 dok	
	3. Musrenbang Kecamatan/Desa/Kelurahan			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
	4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan			0	0	0		0	0	0	0	
12	**Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan**											
	1. Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan/Kelurahan			12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	
	2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0	0	0	1 keg	0	0	0	1 keg	
	3. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan			0	0	0	5 keg	0	0	0	5 keg	
	4. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			0	0	0	1 keg	0	0	0	1 keg	
13	**Program Pembinaan dan Fasilitasi penyelengaraan pemerintahan daerah**											
	1. Pendampingan pengelolaan keuangan desa			0	0	0	0	0	0	0	0	
14	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesan / Kelurahan**											
	1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan			0	0	0	0	0	0	0	0	

15	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)**											
	1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian			0	0	0	0	0	0	0	0	
16	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan**											
	1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan			0	0	0	0	0	0	0	0	
17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**											
	1. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah			0	0	0	0	0	0	0	0	
18	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga**											
	1. Penyelenggaraan kompetisi olahraga			0	0	0	0	0	0	0	0	
19	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**											
	1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan			0	0	0	0	0	0	0	0	
20	**Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**											
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0	0	0	1 keg	0	0	0	1 keg	
21	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**											
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			0	0	0	4 keg	0	0	0	4 keg	
22	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**											
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			0	0	0	1 dok	0	0	0	1 dok	
	2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			0	0	0	3 keg	0	0	0	3 keg	
23	**Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa**											
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			0	0	0	15 desa	0	0	0	15 desa	
24	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**											
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0	0	0	1 tahun	0	0	0	1 tahun	

	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah			0	0	0	12 bl	0	0	0	12 bl	
	3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0	0	12 bl	0	0	0	12 bl	
	4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0	0	12 bl	0	0	0	12 bl	
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0	0	1 paket	0	0	0	1 paket	
	6. Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	0	0	25 dok	0	0	0	25 dok	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Banyudono tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

Kecamatan Banyudono merupakan urusan Pemerintahan Umum, mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan.

Berdasarkan telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi terhadap Renstra Kecamatan Banyudono tidak dilakukan karena tidak ada keterkaitan langsung antara pelayanan atau permasalahan di tingkat kecamatan dengan permasalahan di K/L maupun PD tingkat provinsi**.**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banyudono, secara umum permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banyudono adalah berikut:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang meliputi;
   a. Masih perlunya penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik;
   b. Belum optimalnya pelayanan kependudukan di kecamatan.

   Dimana akar permasalah pada pelayanan publik di Kecamatan Banyudono yaitu:
   - Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan;
   - Belum terdistribusinya sarana dan prasarana pelayanan.
2. Belum optimalnya pengembangan potensi kewilayahan, dimana untuk Kecamatan Banyudono masalahnya terletak pada belum optimalnya fungsi koordinasi kewilayahan. Akar masalah belum optimalnya peran kecamatan sebagai instansi terdepan dalam menyusun peta masalah dan potensi kecamatan.

Dampak Pelayanan Kecamatan Banyudono terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah Visi pembangunan daerah merupakan rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih yang secara substansi memuat tentang rumusan umum mengenai keadaan yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan

daerah. Kondisi yang akan dicapai dalam bentuk visi, kemudian dijabarkan oleh misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.

Berbijak dari amanat dan upaya membangun sinkronisasi dengan visi pembangunan jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005 - 2025, serta dalam rangka menjawab isu strategis aktual dan menjaga keberlanjutan pembangunan, maka dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Boyolali 2021-2026 yaitu:

"Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi" Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL)

Rumusan visi tersebut memiliki muatan kondisi dan prasyarat yang akan dicapai dalam pembangunan, dengan penjabaran sebagai berikut :

Boyolali Maju berarti :

- Proses pembangunan yang berkelanjutan dan terencana sistematis diharapkan membawa kemajuan di segala bidang.
- Boyolali Maju berarti *no-one left behind,* yakni tidak ada pihak yang terlewatkan untuk merasakan kemajuan, karena semua komponen telah menjadi subyek pembangunan.
- Maju dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dan daerah yang semakin berdaya saing yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah berkualitas dan merata, serta tata Kelola pemerintahan yang semakin bersih, efektif, dan dipercaya masyarakat.

Meneruskan Pro Investasi berarti :

- Pro investasi telah menjadi arah pembangunan dan identitas Kabupaten Boyolali dengan berbagai capaian pembangunan yang telah membawa manfaat bagi masyarakat.
- Melanjutkan arah pembangunan yang pro investasi berarti tidak hanya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membangun sinergi dengan arah pembangunan nasional, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional secara sistematis dan cepat.
- Arah pro investasi membutuhkan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan, yang muaranya tetap pada kesejahteraan masyarakat Boyolali, tanpa menghadirkan ketimpangan sosial.
- Pro investasi tetap dikendalikan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yakni selain berorientasi ekonomi dan sosial,

tidak kalah penting pada keberlanjutan lingkungan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta membawa manfaat pembangunan bagi generasi masa depan.

Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL) berarti :

- Pembangunan yang efektif membutuhkan prasyarat berupa sinergi dan kolaborasi seluruh komponen governance, yakni masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.
- Seluruh komponen daerah diharapkan mampu melangkah dan menata bersama penuh totalitas yang merupakan implementasi dari prinsip gotong-royong.
- Gotong royong dengan menjalankan perannya masing-masing namun saling bersinergi dan berkolaborasi dalam ikatan visi pembangunan daerah maupun landasan nilai kearifan yang tertanam kuat di tengah masyarakat berupa filosofi dari Pangeran Sambernyawa "Tiji Tibeh (mati siji, mati kabeh, mukti siji mukti kabeh)".

  Visi pembangunan Boyolali dicapai dengan beberapa misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Boyolali memiliki 5 misi yang mencakup keseluruhan bidang pembangunan dengan muatan prinsip dasar dan arah pembangunan di setiap misi sebagai berikut:

Misi 1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan.

Misi 2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.

Misi 3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional, dengan

Misi 4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Misi 5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing,

dengan penjabaran sebagai berikut :

- Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

- Pembangunan integritas dengan menumbuhkan karakter yang baik bagi individu maupun organisasi dalam mewujudkan tindakan maupun keputusan bagi kebaikan bersama.
- Pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance.
- Peran masyarakat yang melahirkan kontrol terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan sangat diharapkan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN. Tidak berhenti pada good and clean governance, Boyolali berusaha menumbuhkan Smart governance, atau pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi, dengan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi-inovasi dan adaptasi teknologi yang terpadu, yang bermuara pada efektifitas, efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.
- Pemerintahan yang tertib, elok, rapi, sehat dan nyaman untuk masyarakat, dengan smart governance mendorong terwujudnya Boyolali kota cerdas/pintar, kota air, ramah lingkungan serta potensi daerah yang didorong guna kemandirian daerah dengan kinerja yang inovatif yang dapat meningkatkan daya saing daerah.

Kecamatan Banyudono selaku Unsur Pembantu Kepala Daerah mendukung dan mensukseskan Visi Misi pembangunan daerah yang merupakan rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Kecamatan Banyudono terutama memompang pelaksanaan Misi 4 Boyolali yaitu **Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya,** Hal tersebut diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra OPD 2021-2026.

Tantangan dan peluang dalam pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Banyudono dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan Kabupaten Boyolali mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

1. Tantangan

- Merupakan wilayah penyangga pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali, sehingga ditutut kinerja yang lebih bila dibandingkan kecamatan lainnya;
- Karakteristik masyarakat yang merupakan transisi dari desa ke kota yang cenderung kritis terhadap pemerintahan;
- Aspek lingkungan sebagai penghambat perkembangan industri;
- Banyaknya alih fungsi lahan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan.

2. Peluang
   - Dukungan Visi Bupati dalam mendukung investasi;
   - Merupakan daerah pengembangan perumahan komersial;
   - Pelayanan perijinan yang dipermudah;
   - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
   - Pengalihan pengelolaan PBB dari pusat ke daerah;
   - Besarnya lahan kawasan industri menengah bisa untuk menarik investor;
   - Akses jalan guna kelancaran pergerakan barang/jasa;
   - Dukungan dunia usaha (perusahaan/pabrik) berupa *Coorporate Social Responsibility* (CSR), karena merupakan daerah industri menengah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Banyudono untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Boyolali.

Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Banyudono tahun 2021-2026 seperti dalam tabel berikut :

Tabel. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : "BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI" Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL)			
MISI : Boyolali menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik kecamatan 2. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan 3. Peningkatan kapasitas ASN tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa 4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Peningkatan dan Pengembangan kualitas pelayanan sarana dan prasarana publik 2. Optimalisasi fungsi koordinasi kewilayahan 3. Peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran 4. Peningkatan tertib Administrasi Pemerintahan Desa
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	1. Peningkatan sistem kelembagaan berbasis kinerja	1. Peningkatan sistem administrasi umum dan kepegawaian

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Dapat ditelaah terhadap rancangan awal RKPD, sebagaimana Tabel T-C.31

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN BANYUDONO

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Prosentasse penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**		**2,856,971,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Prosentasse penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**		**2,856,971,000**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Gaji dan tunjangan ASN, Gaji non ASN		2,605,071,000	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Gaji dan tunjangan ASN, Gaji non ASN		**2,605,071,000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2,511,471,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2,511,471,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Gaji PTT dan Tenaga Honorer	1 Tahun	93,600,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Gaji PTT dan Tenaga Honorer	1 Tahun	93,600,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah**		**117,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah**		**117,000,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	2,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	2,000,000	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	3,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	3,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	15,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	15,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	10,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	10,000,000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 bulan	15,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 bulan	15,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	62,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	62,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	10,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	10,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Prosentase ketercapaian fungsi layanan sarana dan prasarana aparatur**		**20,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Prosentase ketercapaian fungsi layanan sarana dan prasarana aparatur**		**20,000,000**	
	Pengadaan Mebel	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	20,000,000	Pengadaan Mebel	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	20,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**46,900,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**46,900,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	900,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	900,000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	46,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	46,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**68,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**68,000,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	14,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	14,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	4,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	4,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**100,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**100,000,000**	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				**100,000,000**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				**100,000,000**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	100,000,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	100,000,000	
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**150,000,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**150,000,000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**50,000,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**50,000,000**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	50,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	50,000,000	

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				**100,000,000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**100,000,000**	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)	2 Kegiatan	50,000,000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)	2 Kegiatan	50,000,000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	50,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	50,000,000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**25,000,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**25,000,000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**25,000,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**25,000,000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	25,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	25,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**70,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**70,000,000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				**70,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**70,000,000**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	50,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	50,000,000	

	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	21 Orang	20,000,000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	21 Orang	20,000,000	
					3,201,971,000					**3,201,971,000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini dapat diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari PD lain yang saling berkaitan berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan (yang sebelumnya diadakan musyawarah di tingkat Dusun/lingkungan RT, RW dan kelompok-kelompok masyarakat misalnya kelompok tani, kelompok perempuan dsb. Penggalian gagasan dan menyelenggarakan musyawarah dusun (Musdus) serta rembug warga untuk menetapkan jenis dari usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan, dilanjutkan dengan Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang Kabupaten.

Usulan tersebut disesuaikan dan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD, serta visi dan misi pembangunan daerah yang sudah ditetapkan. Hasil pengerjaan/penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, dapat terlihat dalam Tabel T-C.32.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah : Kecamatan Banyudono

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeolaaan dan Pelatihan Pengelolaan Sampah	Bangak	400,000,000	1	Bidang Pemsosbud
2	Pembinaan, Pelatihan dan Penyuluhan Penyandang Disabilitas dan Penyakit Masyarakat	Tanjyngsari	500,000,000	1	Bidang Pemsosbud
3	Pengembangan Desa Wisata	Denggungan	2,000,000,000	1 keg	Bidang Pemsosbud
4	Pembinnan dan Pengembangan Seni Budaya	Tanjungsari	1,000,000,000	1 keg	Bidang Pemsosbud
5	Peningkatan Kapasitas Pendidik Keagamaan	Ngaru-Aru	500,000,000	1keg	Bidang Pemsosbud
1	Pengelolaan Sampah/ TPS3R	Desa Bendan, Desa Bangak, Desa Kuwiran Kecamatan Banyudono	1,125,000,000	1 keg	Bidang Ekonomi
2	Pengelolaan/ Pelatihan Desa Wisata	Desa Bendan, Desa Bangak, Desa Dukuh Kecamatan Banyudono	1,150,000,000	1 keg	Bidang Ekonomi
3	Pelatihan UMKM	Kuwiran	1,000,000,000	1 keg	Bidang Ekonomi
1	Rehab Saluran Irigasi	Desa Trayu	150,000,000	1 unit	Bidang Infrastruktur
		Desa Ketaon	150,000,000	3000 m2	Bidang Infrastruktur
		Desa Tanjungsari	100,000,000	500 m2	Bidang Infrastruktur
		Desa Kuwiran	100,000,000	500 m2	Bidang Infrastruktur
		Desa Cangkringan	50,000,000	48 m3	Bidang Infrastruktur
		Desa Dukuh	100,000,000	30000 m2	Bidang Infrastruktur
		Desa Denggungan	105,000,000	300 m2	Bidang Infrastruktur
		Desa Jipangan (Katongan-Jetis)	140,000,000	3 unit	Bidang Infrastruktur
		Desa Batan	850,000,000	1000 m2	Bidang Infrastruktur
		Desa Jembungan	75,000,000	6 unit	Bidang Infrastruktur
		Desa Jembungan	500,000,000	2 unit	Bidang Infrastruktur
		Desa Cangkringan	150,000,000	353 m3	Bidang Infrastruktur
		Desa Bangak	500,000,000	900 m3	Bidang Infrastruktur
		Desa Tanjungsaro	100,000,000	1 unit	Bidang Infrastruktur

		Desa Jipangan (Selatan dukuk Karangkepuh)	115,000,000	230 m3	Bidang Infrastruktur
		Desa Ngaru aru	150,000,000	2500 m3	Bidang Infrastruktur
		Desa Batan	500,000,000	2 unit	Bidang Infrastruktur
2	Pengelolaan Sampah TPS sarpras 3R	Desa Denggungan	200,000,000	1 paket	Bidang Infrastruktur
		Desa Bendan	100,000,000	1 keg	Bidang Infrastruktur
		Desa Bangak	1,000,000,000	2 keg	Bidang Infrastruktur
3	RTLH	Desa Denggungan	150,000,000	15 paket	Bidang Infrastruktur
		Desa Bendan	100,000,000	10 keg	Bidang Infrastruktur
		Desa Batan	400,000,000	40 keg	Bidang Infrastruktur
4	Aspal Jalan	Desa Ketaon-Desa Trayu	200,000,000	800 m2	Bidang Infrastruktur
		Peni-Perempatan Bantulan, Desa Jembungan	500,000,000	2000 m2	Bidang Infrastruktur
5	Penataan Kawasan Desa Wisata	Desa Bangak	1,000,000,000	1 paket	Bidang Infrastruktur
6	Infrastruktur Lumbung Pangan	Desa TAnjungsari	500,000,000	1 paket	Bidang Infrastruktur

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah meliputi kebijakan program strategis nasional (PSN), amanat pembangunan global dan nasional, dan dinamika pembangunan nasional lainnya. Selain itu juga kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 tetap memperhatikan keberlanjutan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian, sosial dan Kesehatan, serta dukungan terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) sebagai prioritas dalam penanggulangan kemiskinan. Disamping itu RKPD Tahun 2023 yang disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 meliputi:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta kemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Diskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada terlihat dalam Tabel T-C.32.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Langkah-langkah perumusan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah
2. Membandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hal evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah, apakah masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kehidupan.
3. Identifikasi Kebijakan Nasional dan terkait dengan tugas dan fungsi pokok Perangkat Daerah, misalnya dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Millenium Development Goals (MDGs)
4. Unit Perangkat Daerah Kabupaten/Kota perlu mengidentifikan kebijakan provinsi, dan
5. Merumuskan pernyataan tujuan dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebelumnya.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Kecamatan Banyudono sesuai Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel. Tujuan dan Sasaran Renja 2024

Kecamatan Bnyudono

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.72
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan Ampel	78,50

Berdasarkan pada tabel tujuan dan sasaran diatas rencana kerja Kecamatan Banyudono adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
3. Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
5. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
6. Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Perumusan Sasaran, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya;
2. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra PD, cuplik rumusan sasaran dalam Renstra PD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan;
3. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra PD), jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut;
4. Rumusan sasaran tersebut, sajikan dalam bentuk pernyataan.

Sasaran yang hendak dicapai di Kecamatan Banyudono adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah.

Langkah-langkah perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

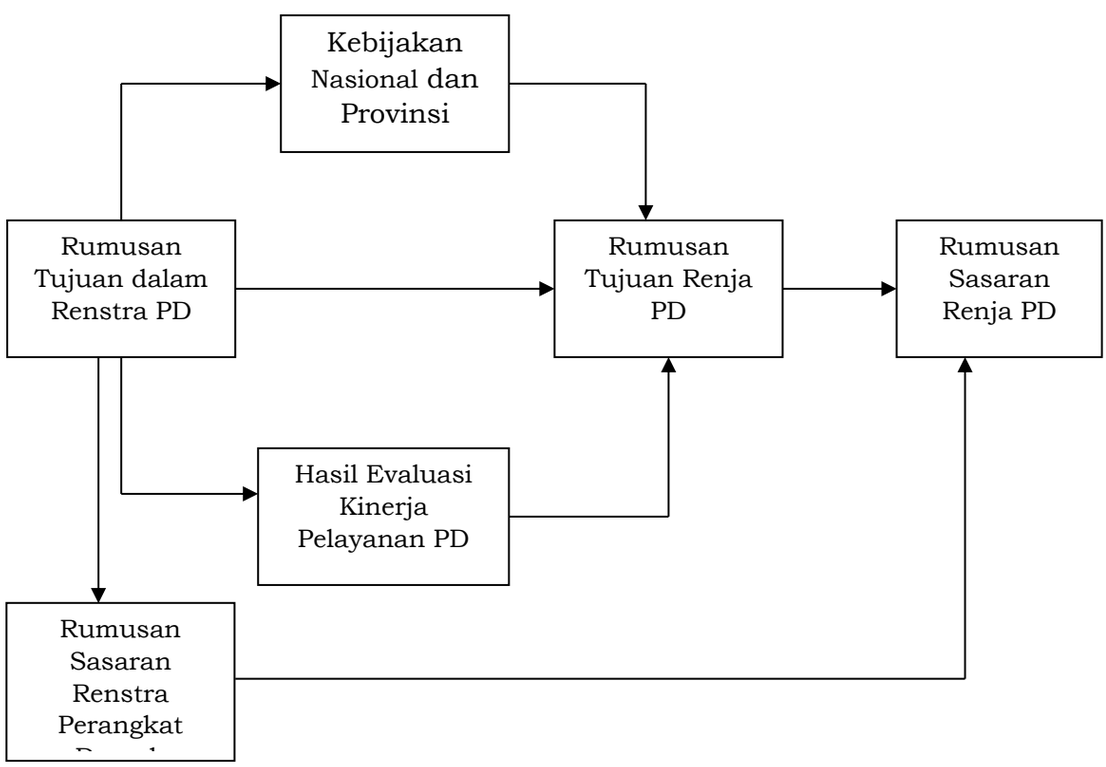

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

   Misal:

   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
   b. Pencapaian SDGs;
   c. Pengentasan kemiskinan;
   d. Pencapaian NSPK dan SPM;
   e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
   f. Pengembangan daerah terisolir; dan
   g. Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan, yaitu pada Tabel T-C.33

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Banyudono

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**				**3,013,519,000**				**3,186,971,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2,718,519,000**				**2,841,971,000**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2,384,215,000**				**2,605,071,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	19 Org/Bl	2,254,215,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	2,511,471,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	24 Dokumen	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	93,600,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**178,404,000**				**102,000,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	4 Paket	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	2,000,000

7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	4 Paket	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	3,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	0 Paket	28,001,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	4 Paket	16,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	10,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	4 Paket	16,699,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	15,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	24 Laporan	102,654,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	62,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	5 Laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	10,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**30,000,000**				**20,000,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	2 Unit	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	20,000,000

7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	0
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**47,900,000**				**46,900,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	2 Laporan	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	900,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	12 Laporan	46,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	46,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Dokumen 0 Laporan	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	0
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**78,000,000**				**68,000,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	7 Unit	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	14,000,000
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 Unit	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	0
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	8 Unit	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	4,000,000

7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	2 Unit	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	50,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**100,000,000**				**100,000,000**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				**100,000,000**				**100,000,000**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	2 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85 Persen	100,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**75,000,000**				**150,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**50,000,000**				**50,000,000**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	5 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	50,000,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**25,000,000**				**100,000,000**
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	2 Kegiatan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	50,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**120,000,000**				**70,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**120,000,000**				**70,000,000**

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	20 Orang	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	50,000,000
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Boyolali, Banyudono, Semua Kelurahan	21 Orang	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	20,000,000
								TOTAL	**3,013,519,000**			**3,186,971,000**

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banyudono yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Perumusan program dan kegiatan ini, mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai disertai dengan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Realisasi renja ini sangat tergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Sebagaimana tujuan renja ini yaitu “terarahnya program serta prioritas kegiatan tahunan dengan capaian rencana strategis Kecamatan Banyudono melalui pembiayaan APBD Kabupaten yang dilengkapi dengan indikator capaian sebagai tolak ukur penilaian kinerja”. Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

Demikian RENJA Kecamatan Banyudono 2024 disusun dan semoga bermanfaat.

LL. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

KECAMATAN SAMBI

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan…… 1

1.1. Latar Belakang…….. 4

1.2. Landasan Hukum…… 5

1.3. Maksud dan Tujuan……... 7

1.4. Sistematika Penulisan…….. 7

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sambi Tahun 2023…..…… 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sambi Tahun 2023…… 8

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD……..…….. 14

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD……..…… 18

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD……. 18

2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……...…… 24

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan…… 28

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional…….…….. 28

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD……..…….. 28

3.3 Program dan Kegiatan…….…….. 29

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah…… 30

4.1 Program dan Kegiatan……. **30**

Bab V Penutup……. 35

DAFTAR TABEL

TABEL T-C.29	:	REKAPITULASI EVALUASI dan HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH dan PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d Tahun 2023 KECAMATAN SAMBI	10
TABEL T-C.30	:	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI ….....	15
TABEL T-C.31	:	HASIL RE VIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 202 3 KECAMATAN SAMBI BOYOLALI	19
TABEL T-C.32	:	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023.....	25
TABEL T-C.33	:	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SAMBI TAHUN 202 3 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024.....	31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik. Perwujudan dari komitmen tersebut, antara lain dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sambi yang merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali dan Renstra Kecamatan Sambi Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Sambi adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sambi untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sambi Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Penyusunan Renja Kecamatan Sambi dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sambi tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Sambi.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sambi dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

Dalam tahapan perumusan rancangan Renja OPD, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan OPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
5. Telaah terhadap rancangan awal OPD;

6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
10. Penyempurnaan rancangan Renja OPD;
11. Pembahasan forum OPD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

Namun karena keterbatasan data dan adanya beberapa kesulitan dalam penyusunanannya ada beberapa kegiatan tersebut yang tidak dapat digali secara maksimal.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah'
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011– 2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026;
22. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

23. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021.
24. Rencana Strategis Kecamatan Sambi Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah memberikan arah, kebijakan program serta prioritas kegiatan sebagai landasan kebijakan operasional Kecamatan Sambi.

Tujuan disusunnya Renja Kecamatan Sambi adalah terarahnya program serta prioritas kegiatan tahunan dengan capaian rencana strategis Kecamatan Sambi melalui pembiayaan APBD Kabupaten yang dilengkapi dengan indikator capaian sebagai tolak ukur penilaian kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Sambi Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sambi Tahun 2021; berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sambi Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal OPD.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; berisi Telahaan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; berisi Program dan Kegiatan.

Bab V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN SAMBI TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sambi Tahun 2023

Realisasi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Sambi Tahun 2023 telah selesai seluruhnya. Dari pelaksanaan program / kegiatan tersebut, beberapa program / kegiatan telah mencapai target yang direncankan dan ada yang belum memenuhi target.

Hasil evaluasi terhadap capaian realisasi program/kegiatan dan capaian renstra di Kecamatan Sambi, sebagai berikut :

1. Realisasi Program / Kegiatan yang memenuhi/mencapai target :

   a. Program

      1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
      2). Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
      3). Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
      4). Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

   b. Kegiatan

      1).Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
      2).Administrasi Umum Perangkat Daerah;
      3).Pengadaan Barang Milik Daerah Penungang Urusan Pemerintah Daerah;
      4).Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
      5).Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum;
      6).Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa ;
      7).Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
      8).Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang belum memenuhi target adalah pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penigasan Kepala Daerah , Pada Sub Kegiatan Pembinaan kerukunan antar suku , umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan Lokal, Regional dan Nasional yaitu MTQ dan Buka Bersama

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target :

   Semua program/kegiatan yang dilaksanakan belum ada yang melebihi target rencana.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target

   Adanya Arahan dari OPD terkait yang menyarankan agar Kecamatan tidak melaksanakan kegiatan MTQ dan Buka Bersama

5. Faktor-faktor pendukung tercapainya target.
    a. Komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dan desa dalam melaksanakan dan menyelesaikan program/kegiatan
    b. Kerjasama yang baik antara pemerintahan kecamatan dan Pemerintah Desa, serta seluruh UPT kecamatan.
    c. Peran aktif kelompok sasaran program/kegiatan
6. Solusi/pemecahan masalah :
    a. Evaluasi kinerja dan pencapaian target kinerja secara rutin;
    b. Peningkatan komitmen dari seluruh pelaksana kegiatan untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan dengan baik;
    c. Pengambilan keputusan secara cepat dan proporsional sesuai dengan kewenangan Kecamatan untuk mengatasi keadaan tanpa ketergantungan dengan Pemerintah Kabupaten;
    d. Meningkatkan pengelolaan administrasi.
    e. Identifikasi setiap permasalahan yang muncul dan disertai dengan penyelesaiannya.
    f. Membangun komunikasi dua arah antara pengambil kebijakan dan pelaksana kegiatan;
    g. Peningkatan jalinan kerjasama baik dengan instansi pemerintah lainnya di Tingkat Kecamatan dan Desa maupun dengan kelembagaan masyarakat yang ada.

Secara detail hasil capaian terhadap kinerja diatas dapat dilihat pada tabel 1 (lampiran)

Tabel T.C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kecamatan Sambi

	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Output	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran KegiatanT s/d tahun 2020	Target dan realisasi Kinerja program kegiatan tahun lalu (2021)			Target Program/Keg Renja tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		(2)	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)=(7/6)**	**(9)**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
1	**X.XX**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**									
	X.XX-01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	100	100	100	100	1	100	300	3
	X.XX-01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Gaji dan tunjangan ASN,Gaji Non ASN**	1	100	100	100	1	100	300	3
	X.XX-01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	14	14	14	1	14	42	3
	X.XX-01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelsanaan tugas ASN	12 dokumen	12	12	12	1	12	36	3

	X.XX-01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.**	100	100	100	100	1	100	300	3
	X.XX-01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan.	2 Paket	12	12	12	1	12	36	3
	X.XX-01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga	2 Paket	12	12	12	1	12	36	3
	X.XX-01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistic kantor yang di sediakan	2 Paket	12	12	12	1	12	36	3
	X.XX-01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	2 paket	12	12	12	1	12	36	3
	X.XX-01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/ material yang di sediakan	2 paket	12	12	12	1	12	36	3
	X.XX-01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	2 laporan	12	12	12	1	12	36	3
	X.XX-01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	12	12	12	1	12	36	3
	X.XX-01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah fungsi layanan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah**	12	12	12	12	1	12	36	3
	X.XX-01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang di sediakan	-	1	1	1	1	1	3	3
	X.X>X.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainya yang di sediakan	-							
	X.XX-01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.**	100	100	100	100	1	100	300	3
	X.XX-01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12	12	12	1	12	36	3

	X.XX-01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12	12	12	1	12	36	3
	X.XX-01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase ketercapaian fungsi layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah.**	100	100	100	100	1	100	300	3
	X.XX-01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	10 Unit	12	12	12	1	12	36	3
	X.XX-01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainya yang di pelihara.	5 Unit	12	12	12	1	12	36	3
	X.XX-01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	12	12	12	1	12	36	3
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
	7,01	**KECAMATAN**									
2	**7.01-02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase layanan publik Kecamatan tepat waktu**	87	0	84	84	1	85	169	2
	7.01-02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Keg	1	1	1	1	1	3	3
	7.01-02.2.01.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerrja perangkat daerah yang ada di Kecamatan,	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerrja perangkat daerah yang ada di Kecamatan,	1 Keg	1	1	1	1	1	3	3
3	**7.01-03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang di tindaklanjuti**	100	100	100	100	1	100	300	3
	7.01-03.2.01	Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	1 Tahun	1	1	1	1	1	3	3

	7.01-03.2.01.03	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	2 Keg	16	16	**16**	16	16	48	3
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASIO KETENTRAMAN DAN KETETRTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum yang di tindaklanjuti**	100	100	100	**100**	**1**	100	300	3
	7.01.04.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah sarana dan Prasarana pendukung ketentraman dan ketertiban umum	2 Keg	2	2	2	1	2	6	3
5	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGATRAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi Pemerintahan Umum yang di tindaklanjuti**	100	100	100	100	1	100	300	3
	7.01.05.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala dearah	4 Keg	4	4	4	1	4	12	3
		Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Umdang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Umdang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	400 orang	2	2	2	1	2	8	4
	7.01-05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang Yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 orang	2	2	2	1	2	6	3

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan fungsinya, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan
b. Penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan
c. Pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, indikator yang menjadi target sasaran Kecamatan Sambi dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu :

1. **Indikator Kinerja Utama (IKU)**
    a. Prosentase desa/kelurahan yang tertib Administrasi, dapat terealisasi sebesar 100%.
    b. Tingkat ketetapan pengisian Kades/Perangkat Desa, Terealisasi 100%;
    c. Capaian Pembayaran PBB dapat terealisasi 82%;
    d. Dapaian Survey Kepuasan masyarakat (SKM) sealisasi 90.67%;
    e. Jumlah Rakor Muspika 100%;
    f. Prosentase kejadian, pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang di tindak lanjuti 100%;
    g. Cakupan monitoring dan Evaluasi tentang pembangunan, perekonomian dan bantuan lainya terealisasi 100%;
    h. Cakupan PKK Desa yang di bina 100%;
    i. Jumlah Dokumen skala prioritas pembangunan 100%.
    j. Cakupan pemeliharaan jalan di Kecamatan 100%

Secara detail hasil capaian terhadap indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel.2 (lampiran)

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Sambi

No		Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	
(1)		**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
I		***Prosentase penunjang urusan pemeringtahan yang terpenuhi sesuai standar***			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
		Gaji dan tunjangan ASN,Gaji Non ASN			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	1	Gajii dan tunjangan ASN			14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	
	2	Gaji PTT dan Tenaga Honorer			14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	
	3	Tersedianya komponen instalasi listrik/telepon selama 12 bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	4	Tersedianya peralatan rumah tangga selama 12 bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	5	Tersedianya BBM kantor selama 12 bulan			2500 liter	2.794	12 bulan	12 Bulan	2.500	2.751	12 Bulan	12 Bulan	
	6	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	7	Tersedianya bahan bacaan/ Surat Kabar selama 12 bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	
	8	Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	

	9	Tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	10	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 12 bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
II		**Prosentase ketercapaian fungsi layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah.**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	1	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			9 Unit	9 Unit	2 Paket	2 Paket	7 Unit	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
	2	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			9 Unit	9 Unit	2 Paket	2 Paket	7 Unit	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
III		**Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	1	Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 12 bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	2	Tersedianya jasa komunikasi, internet ,sumber daya air dan listrik selama 12 bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
IV		**Prosentase ketercapaian fungsi layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah.**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	1	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	2	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	3	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
V		**Prosentase partisipasi aktif Kecamatan dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan**			100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	
	1	partisipasi aktif kecamatan dalam 1 kegiatan kompetisi olahraga tingkat kabupaten			1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	0 Keg	0%	0%	
VI		**Terlaksananya fungsi pelayanan administrasi dan publik di Kecamatan**			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	

		Prosentase Jumlah Sarana Prasarana Umum dan infrastruktur kecamatan yang terbangun dan terpelihara			100%	100%	100%	100%	0%%	100%	100%	100%	
	1	Pelaksanaan fungsi layanan di Kecamatan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	2	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum sebanyak 1 paket kegiatan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
VII		**Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan**			16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	
		Cakupan pemberian stimulan pembangunan desa/kelurahan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
	1	terlaksana nya pemberian 1 Paket stimulan pembangunan desa			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
	2	Terlaksananya pembinaan PKK dan organisasi perempuan di kecamatan / kelurahan/desa			16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	
VIII		**Jumlah Kegiatan Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan**			1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	
	1	Jumlah fasilitasi terhadap kegiatan penyelenggaraan keagamaan			1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	0 Keg	0 Keg	2 Keg	2 Keg	
IX		**Jumlah Kegiatan Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di Kecamatan**			2 Keg	2 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	
	1	Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar kebangsaan			2 Keg	2 Keg	1 Keg	1 Keg	0 Keg	0 Keg	2 Keg	2 Keg	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Sambi secara umum dapat dikatakan baik, hal ini bisa dilihat dari tingkat capaian kinerja terhadap indikator yang ditetapkan baik dalam IKK maupun IKU. Sebagian besar tingkat capaian telah mencapai target yang direncanakan.

Hal kritis yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pelayanan di Kecamatan Sambi, adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang meliputi :

2.3.1. Peningkatan pemerintahan yang efektif, efisien yang ditandai dengan semakin sederhananya birokrasi serta pelayanan yang cepat, tepat dan akurat serta murah.

2.3.2. Peningkatan pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang ditandai dengan kepastian dan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi dan program/kegiatan untuk masyarakat.

2.3.3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan perekonomian masyarakat dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

2.3.4. Peningkatan sistem pengendalian keamanan lingkungan secara sinergis antara pemerintah dan masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024, tidak tercantum rencana kegiatan yang ada di Kecamatan, sehingga tidak bisa dibandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Hasil analisis kebutuhan Kecamatan Sambi dapat dilihat dalam tabel 3 (lampiran):

TABEL T-C.31

HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023

KECAMATAN SAMBI

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(000)	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	(12)
1	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kec. Sambi***	***Prosentase penunjang urusan pemeringtahan yang terpenuhi sesuai standar***	***100%***	**2.593.603.000**	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kec. Sambi***	***Prosentase penunjang urusan pemeringtahan yang terpenuhi sesuai standar***	***100%***	**2.593.603.000**	
a	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec.Sambi**	**Gaji dan tunjangan ASN,Gaji Non ASN**	**100%**	**2.329.202.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Gaji dan tunjangan ASN,Gaji Non ASN**	**100%**	**2.329.202.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sambi	Gajii dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.259.002.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sambi	Gajii dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.259.002.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Sambi	Gaji PTT dan Tenaga Honorer	12 Bulan	70.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Sambi	Gaji PTT dan Tenaga Honorer	12 Bulan	70.200.000	
b	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Sambi**	**Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.**	**100%**	**117.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Sambi**	**Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.**	**100%**	**117.000.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sambi	Tersedianya komponen instalasi listrik/telepon selama 12 bulan	12 bln	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sambi	Tersedianya komponen instalasi listrik/telepon selama 12 bulan	12 bln	2.000.000	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sambi	Tersedianya peralatan rumah tangga selama 12 bulan	12 bln	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sambi	Tersedianya peralatan rumah tangga selama 12 bulan	12 bln	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sambi	Tersedianya BBM kantor selama 12 bulan	12 bln	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sambi	Tersedianya BBM kantor selama 12 bulan	12 bln	18.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sambi	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	12 bln	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sambi	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	12 bln	11.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Sambi	Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan	12 bln	15.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Sambi	Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan	12 bln	25.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Sambi	Tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan	12 bln	62.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Sambi	Tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan	12 bln	146.750.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sambi	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 12 bulan	12 bln	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sambi	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 12 bulan	12 bln	15.000.000	
c	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan peemrintah Daerah**	**Kec,Sambi**	**Jumlah fungsi layanan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah**	**12 Bln**	**20.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan peemrintah Daerah**	**Kec,Sambi**	**Jumlah fungsi layanan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah**	**12 Bln**	**20.000.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	Kec,Sambi	Peralatan dan mesin lainya	1 Bln	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	Kec,Sambi	Peralatan dan mesin lainya	1 Bln	20.000.000	
d	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Sambi	**Prosentase ketercapaian fungsi layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah.**	100%	**69.500.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Sambi	**Prosentase ketercapaian fungsi layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah.**	100%	**69.500.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sambi	Jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan,Pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang di pelihara.	12 bln	15.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sambi	Jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan,Pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang di pelihara.	12 bln	15.500.000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sambi	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan	12 bln	4.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sambi	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan	12 bln	4.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sambi	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan	12 bln	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sambi	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan	12 bln	50.000.000	
e	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Sambi	**Jasa pen unjang urusan pemerintahan Daerah**	100%	**57.900.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Sambi	**Prosentase ketercapaian fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	100%	**57.900.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sambi	Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 12 bulan	12 bln	900.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sambi	Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 12 bulan	12 bln	900.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sambi	Tersedianya jasa komunikasi, internet ,sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	12 bln	57.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sambi	Tersedianya jasa komunikasi, internet ,sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	12 bln	57.000.000	
2	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec. Sambi**	**Prosentase layanan publik Kecamatan tepat waktu**	**100%**	**100.000.000**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec. Sambi**	**Prosentase layanan publik Kecamatan tepat waktu**	**100%**	**100.000.000**	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan saranan pelayanan umum		Jumlah sarana dan prasaranan umum dalam kondisi baik	**12 bulan**	**100.000.000**	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan saranan pelayanan umum		Jumlah sarana dan prasaranan umum dalam kondisi baik	**12 bulan**	**100.000.000**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sambi	Pelaksanaan fungsi layanan di Kecamatan	12 bln	90.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sambi	Pelaksanaan fungsi layanan di Kecamatan	12 bln	90.000.000	
3	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	**Kec. Sambi**	**Persentase hasil Koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang di tindaklanjuti**	**100%**	**150.000.000**	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	**Kec. Sambi**	**Persentase hasil Koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang di tindaklanjuti**	**100%**	**150.000.000**	

	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec.Sambi	Jumlah bantuan yang di salurkan sesui standar	1 Desa	50.000.000	*Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa*	Kec,sambi	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah kecamatan	**1 Desa**	50.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kec.Sambi**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**2 Keg**	**100.000.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**2 Keg**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**2 Keg**	**100.000.000**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambi	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1 Desa	50.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambi	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1 Desa	50.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sambi	Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)	16 Desa	50.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sambi	Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)	16 Desa	50.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec.Sambi	Jumlah Desa Yang Menerima bantuan/ modal usaha ekonomi/pertukangan	16 Desa	50.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sambi	Jumlah Desa Yang Menerima bantuan/ modal usaha ekonomi/pertukangan	16 Desa	50.000.000	
4	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec. Sambi**	**Persentase Koordinasi Pemerintahan umum yang di tindaklanjuti**	**100%**	**70.000.000**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec. Sambi**	**Persentase Koordinasi Pemerintahan umum yang di tindaklanjuti**	**100%**	**70.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Sambi	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah.	4 Keg	70.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Sambi	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah.	4 Keg	70.000.000	
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Umdang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Kec. Sambi	Jumlah Peringatan hari Besatr Nasional di Wilayah Kecamatan.	2 Keg	50.000.000	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Umdang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara	Kec. Sambi	Jumlah Peringatan hari Besatr Nasional di Wilayah Kecamatan.	**2 Keg**	50.000.000	

	Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.					Kesatuan Republik Indonesia.					
	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras, dan Golongan lainmya guna mewujudkan Stabilitas keamanan lokal, Regional dan Nasional	Kec. Sambi	Jumlah kegiatan kerukunan umat beragama di wilayah Kecamatan	2 Keg	20.000.000	*Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras, dan Golongan lainmya guna mewujudkan Stabilitas keamanan lokal, Regional dan Nasional*	Kec. Sambi	Jumlah kegiatan kerukunan umat beragama di wilayah Kecamatan	**2 Keg**	20.000.000	
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Sambi**	**Persentase koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum yang di tindaklanjuti**	**100%**	**25.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Sambi**	**Persentase koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum yang di tindaklanjuti**	**100%**	**25.000.000**	
	Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sambi	Jumlah sarana dan Prasarana pendukung Ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia.	1 Keg	25.000.000	Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sambi	Jumlah sarana dan Prasarana pendukung Ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia.	1 Keg	25.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayahn Kecamatan	Kec.Sambi	Jumlah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat Kecamatan.	1 Keg	25.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayahn Kecamatan	Kec.Sambi	Jumlah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat Kecamatan.	1 Keg	25.000.000	
JUMLAH					**2.938.602.000**					**2.938.602.000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain melakukan menggali permasalalan/kebutuhan dari internal kantor, Kecamatan Sambi juga menjaring aspirasi atau usulan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun LSM, yang langsung ditujukan ke Kecamatan Sambi berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Desa dan Kecamatan. Berdasarkan atas hasil Musrenbang baik di Desa maupun Kecamatan, usulan dari masyarakat terkait dengan pelayanan/tugas pokok fungsi di Kecamatan Sambi sebagaimana dalam tabel 4 (lampiran).

TABEL T-C.32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023

OPD : KECAMATAN Sambi

No mor	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Kec. Sambi**	**Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar.**	**100%**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Gaji dan tunjangan ASN,gaji non ASN**	**1 Tahun**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sambi	Gaji dan tunjangan ASN,gaji non ASN	1 Tahun	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Sambi	Gaji PTT dan Tenaga Honorer	1 Tahun	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Sambi	**Fungsi Layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah**	**100%**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sambi	Komponen Instalasi Listrik/Penerangn bangunan kantor	12 bln	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sambi	Peralatan Rumah Tangga	12 bln	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sambi	Bahan Logistik Kantor	12 bln	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sambi	Barang cetakan dan penggandaan	12 bln	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sambi	Tersedianya bahan bacaan/ Surat Kabar selama 12 bulan	-	
	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Sambi	Bahan/Material	12 bln	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Sambi	Fasilitas kunjungan Tamu yang tertpenuhi	12 bln	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sambi	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bln	
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kec.Sambi	Jumlah fungsi layanan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah	100%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	Kec.Sambi	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lianya	1 Paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		***Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan***	100%	
	Penyediaan Surat Menyurat	Kec.Sambi	Jasa surat menyurat	12 Bulan	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jasa Komunikasi, internet,sumber daya air dan listrik	12 Bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sambi	**Jumlah fungsi layanan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah.**	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sambi	Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara	12 bln	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sambi	Jasa perbaikan peralatan kerja	12 bln	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sambi	Jasa Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya.	12 bln	
2	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec. Sambi**	**Persentase layann publik Kecamatan tepat waktu**	**85%**	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Saranan Pelayanan Umum	**Kec.Sambi**	**Jumlah sarana dan prasarana umum dalam kondisi baik**	**1 Unit**	
	Koordinasi / sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum	Kec.sambi	**Jumlah sarana dan prasarana umum yang di bangun dan di pelihara**	**i Unit**	
2	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	**Kec. Sambi**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang di tindaklanjuti**	**100%**	

	Koordinsi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kec.Sambi**	**Prosentase stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan (program kemiskinan)**	**1 Paket**	
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakat Tingkat Kecamatan	**Kec.Sambi**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan lembaga masyarakat tingkat kecamatan**	**2 Keg**	
4	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN***	**Kec.sambi**	**Persentase koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum yang di tindak lanjuti.**	**100%**	
	Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Sambi	**Jumlah sarana dan prasarana pendukung ketentraman dan Ketertiban umum yang tersedia**	**1 Keg**	
	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiamdan instansi vertikal di Wiilayah Kecamatan.	Kec. Sambi	jumlaj peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat kecamatan.	**1 Keg**	
5	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec. Sambi**	**Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang di tindaklanjuti**	**100%**	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala daerah		**Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah**	**4 Keg**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka mementapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Kec. Sambi	Terlaksananya peringatan hari besar kebangsaan	2 Keg	
	Pembinaan kerukunan anatar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lianya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional	Kec.sambi	**jumlah Kegiatan kerukunan umat beragama di wilayah Kecamatan**	**2 Keg**	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan, yang paling relevan adalah reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Prioritas pembangunan tersebut telah menjadi arah tujuan, sasaran dalam menyusun program dan kegiatan di Kecamatan Sambi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan tersebut akan dituangkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Penjabaran tujuan dalam Renja merupakan turunan dari Renstra berdasarkan pada misi yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1). Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan
2). Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya
3). Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional
4). Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
5). Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi organisasi. Adapun rincian sasaran tersebut sebagai berikut :

a. **Tujuan 1** : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, di jabarkan dengan sasaran sebagai berikut :
   1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
   2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel.

b. **Tujuan 2** : Mewujudkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial, di jabarkan dengan sasaran sebagai berikut :
   1. Terwujudnya masyarakat yang tertib, aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial.

c. **Tujuan 3** : Meningkatkan kualitas pembangunan manusi mendukung produktifitas dan daya saing daerah, dijabarkan dengan sasaran sebagai berikut :
   1. Meningkatnya kemampuan produktifitas dan daya saing masyarakat.

d. **Tujuan 4** : Meningkatkan daya dukung insfrastruktur untuk daya saing dan

kesejahteraan daerah, di jabarkan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Terpenuhinya insfrastruktur dasar.

A. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Sambi Tahun 2024 merupakan penjabaran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Uraian tentang program dan kegiatan di Kecamatan Sambi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, sebagai berikut :
   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
   b. Pencapaian visi dan misi OPD
   c. Peningkatan Pelayanan Publik
   d. Peningkatan Kesejateraan Rakyat
   e. Kondisi sarana prasrana gedung kantor dan rumah dinas
2. Rekapitulasi program dan kegiatan :
   a. Jumlah program sebanyak 5 program dan jumlah kegiatan sebanyak 10 kegiatan
   b. Lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kecamatan beberapa kegiatan yang berlokasi di desa yaitu :
      - Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
      - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban.
      - Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengugasan Kepala Daerah.
      - Pemberdayaan Lembaga Kemasarakatan Tingkat Kecamatan.
      - Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.
   c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar : Rp. 2.918.602.000,-

Detail rencana program dan kegiatan Kecamatan Sambi Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel 5 (lampiran).

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Kecamatan Sambi Tahun 2024 merupakan penjabaran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Uraian tentang program dan kegiatan di Kecamatan Sambi dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan kegiatan :
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   - Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan :
   - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan :
   - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
   - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif Tahun 2024 sebesar : Rp. 2.918.602.000,-
Detail rencana program dan kegiatan Kecamatan Sambi Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel 5 (lampiran).

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN Sambi TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**xx**	**xx**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**					**2.503.254.000**			**2.622.285.000**
X	**XX**	**xx**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**2.223.971.000**			**2.356.885.000**
X	**XX**	**01**	**2.02**	**01**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase penunjang urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar.	**%**	**Sambi**	**100**	2.119.971.000		**100**	2.259.002.000
X	**XX**	**01**	**2.02**	**02**	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase penunjang urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar.	**%**	**Sambi**	**100**	104.000.000		**100**	97.883.000
X	**XX**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Fungsi layanan Admionistrasi perkantoran Perangkat Daerah.**	**Bulan**	**Sambi**	**12**	**110.883.000**		**12**	**118.000.000**

X	**XX**	**01**	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah fungsi layanan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah	**Bulan**	**Sambi**	**12**	**40.000.000**		**12**	20.000.000
X	**XX**	**01**	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah.	**Bulan**	**Sambi**	**12**	**58.900.000**		**12**	**57.900.000**
X	**XX**	**01**	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fungsi layanan sarana dan prasarana aparatur perangkat Daerah	**Bulan**	**Sambi**	**12**	**69.500.000**		**12**	**69.500.000**
7					**Unsur Kewilayahan**								
7	**01**				**Kecamatan**								
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**100.000.000**			**100.000.000**
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					100.000.000			100.000.000
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah dan/atau instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana pelayanan Umum	Prosentase layanan publik kecamatan tepat waktu.	Unit	sambi	85			85	100.000.000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan**	**%**	**Sambi**	**100**	**75.000.000**		**100**	**175.000.000**

						pembangunan yang di tindak lanjuti							
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat pembangunan yang di tandaklajuti	%	Sambi	1 Pokmas	**50.000.000**		**1 Pomas**	**50.000.000**
7	01	03	2.03		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat pembangunan yang di tandaklajuti	%	Sambi	16 Desa	**25.000.000**		**16 Desa**	**125.000.000**
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang di tindaklanjuti**	%	Sambi	100	**120.000.000**		**100**	**120.500.000**
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan pengamalan pancasila, Pelaksanaan Undang-	Prosentase Koordinasi Pemerintahan umum yang di tindak lanjuti.	%	Sambi	100	50.000.000		100	50.500.000

					undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,Peleatarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.								
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan antar suku intra suku, umat beragama Ras dan Golongan lainya, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan Nasional	Prosentase koordinasi pemerintahan umum yang di tindaklanjuti	%	Sambi	100	70.000.000		100	70.000.000
Jumlah										**2.798.254.000**			**3.017.785.000**

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan rencana target capaian kinerja yang diinginkan untuk 1 tahun mendatang. Renja ini memuat berbagai kebutuhan yang berkaitan secara langsung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sambi, yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Perumusan program dan kegiatan ini, mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai disertai dengan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Realisasi renja ini sangat tergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024. Sebagaimana tujuan renja ini yaitu "*terarahnya program serta prioritas kegiatan tahunan dengan capaian rencana strategis Kecamatan Sambi melalui pembiayaan APBD Kabupaten yang dilengkapi dengan indikator capaian sebagai tolak ukur penilaian kinerja*", maka renja ini tidak akan berarti banyak jika tidak dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karena masih di perlukan komitmen yang kuat oleh seluruh komponen dalam rangka melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi secara terus menerus sehingga renja ini dapat menjadi sarana dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sambi 2021-2026.

MM. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA) KECAMATAN SIMO TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan 3

1.1. Latar Belakang 3

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Perangkat Daerah 15

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 20

2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 30

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 30

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 30

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 33

4.1 Program dan Kegiatan 33

Bab V Penutup 43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah selama periode 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah selama periode 5 (lima) tahun. Tata cara / proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) terdiri dari :

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan

dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota menjadi Rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan : a) rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; b) hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah meliputi kebijakan program strategis nasional (PSN), amanat pembangunan global dan nasional, dan dinamika pembangunan nasional lainnya. Selain itu juga kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 tetap memperhatikan keberlanjutan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian, sosial dan Kesehatan, serta dukungan terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) sebagai prioritas dalam penanggulangan kemiskinan. Disamping itu RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 meliputi:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan eksterm (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Simo adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yng dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Rencana Strategis Kecamatan Simo Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Simo 2024 adalah untuk memberikan Landasan Kebijakan Teknis Tahunan dalam Kerangka Pencapaian Visi Misi setiap tahapnya (satu tahunan) dan sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Camat pada Akhir Tahun Anggaran sebagai bagian dari pelaksanaan Kebijakan Daerah. Renja Tahun 2024 Kecamatan Simo disusun sebagai acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Simo Tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2024 Kecamatan Simo adalah adalah menetapkan prioritas Program dan Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan sesuai Rencana Strategis yang dilaksanakan per tahap (tahunan) melalui sumber pembiayaan APBD dan menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Simo Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Simo Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Simo, terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Revieu hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dan realisasi Renstra Kecamatan Simo yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Simo dan/atau realisasi APBD Kecamatan Simo. Adapun hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 untuk Kecamatan Simo sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/keluaran yang telah direncanakan yaitu:
   a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
   b. Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   g. Penyediaan Bahan/Material
   h. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   j. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   k. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   l. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   n. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

o. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
p. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
q. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
r. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
s. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
t. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan untuk Kecamatan Simo tidak ada.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
   a. Terbatasnya pendanaan
   b. Kelompok sasaran belum terjangkau program/kegiatan seluruhnya
   c. Kurangnya informasi kegiatan dari Instansi setingkat kecamatan (UPT) dan kejadian di masyarakat
   d. Adanya situasi Pandemi Covid 19 (PPKM), yang menyebabkan kegiatan terkendala.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah dapat memenuhi / melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, dengan demikian target capaian program Renstra PD dapat tercapai.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan meningkatkan target capaian dari tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan potensi sumber daya dan dana yang ada.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Simo

Lembar :.....

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									
				Program :									
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**								
				Kegiatan:									
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, Gaji Non ASN								
				Sub Kegiatan :									
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji Non ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	-	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	-	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	18 Laporan	100%

				Kegiatan :								
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah							
				Sub Kegiatan :								
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit	3 unit	-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Kegiatan :								
				Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah							
				Sub Kegiatan :								
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	-	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

					dan listrik								
				Kegiatan :									
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah								
				Sub Kegiatan :									
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya perbaikan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Kegiatan :									
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Sub Kegiatan :									
				Pengadaan Mebel	Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
				Kegiatan :									
				Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat								
				Sub Kegiatan :									
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

					SKPD yang disusun								
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	-	-	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	15 Laporan	100%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum**								
				Kegiatan :									
				Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang dilayani								
				Sub Kegiatan :									
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang diusulkan	-	-	13 desa	13 desa	100%	13 desa	13 desa	100%
				Kegiatan :									
				Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di Kecamatan yang terselenggara								
				Sub Kegiatan :									
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah sosialisasi pelayanan di kecamatan			1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
				Kegiatan :									
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana umum dalam kondisi baik								
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun dan dipelihara	1 kegiatan	1 kegiatan	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									

				Kegiatan :									
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana pendukung ketentraman dan keteriban umum yang tersedia								
				Sub Kegiatan :									
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat kecamatan	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**								
				Kegiatan :									
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan hasil Musdes yang diverifikasi								
				Sub Kegiatan :									
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
				Kegiatan :									
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang laksanakan								
				Sub Kegiatan :									
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah desa yang menerima bantuan / modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan	-	-	0	-	100%	0	-	100%

				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.**								
				Kegiatan :									
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								
				Sub Kegiatan :									
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti**								
				Kegiatan :									
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa								
				Sub Kegiatan :									
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pedampingan administrasi dan keuangan desa	-	-	13 Desa	13 Desa	100%	13 Desa	13 Desa	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang telah disesuaikan pada Kecamatan Simo yaitu pada Tabel T-C.30 sebaga berikut :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Simo

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		NO
				Tahun 2022 (thnn-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thnn+1	Tahun 2022 (thnn-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2022 (thn-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			82.11	82.72	83.55	84.18	82.11	82.27	83.55	82.11	
2.	Nilai SAKIP			76,50	77	78	79	76,50	77	78	76,50	

Pencapaian kinerja pelayanan sesuai tabel diatas sudah tergolong baik, tetapi masih perlu ditingkatkan dengan berkomitmen dan bekerjasama seluruh ASN untuk lebih meningkatkan pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Simo tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

Kecamatan Simo merupakan urusan Pemerintahan Umum, mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan.

Berdasarkan telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi terhadap Renstra Kecamatan Simo tidak dilakukan karena tidak

ada keterkaitan langsung antara pelayanan atau permasalahan di tingkat kecamatan dengan permasalahan di K/L maupun PD tingkat provinsi**.**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Simo, secara umum permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Simo adalah berikut:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang meliputi;
   a. Masih perlunya penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik;
   b. Belum optimalnya pelayanan kependudukan di kecamatan.
   Dimana akar permasalah pada pelayanan publik di Kecamatan Simo yaitu:

   - Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan;
   - Belum terdistribusinya sarana dan prasarana pelayanan.
2. Belum optimalnya pengembangan potensi kewilayahan, dimana untuk Kecamatan Simo masalahnya terletak pada belum optimalnya fungsi koordinasi kewilayahan. Akar masalah belum optimalnya peran kecamatan sebagai instansi terdepan dalam menyusun peta masalah dan potensi kecamatan.

Dampak Pelayanan Kecamatan Simo terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah Visi pembangunan daerah merupakan rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih yang secara substansi memuat tentang rumusan umum mengenai keadaan yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Kondisi yang akan dicapai dalam bentuk visi, kemudian dijabarkan oleh misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.

Berbijak dari amanat dan upaya membangun sinkronisasi dengan visi pembangunan jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005 - 2025, serta dalam rangka menjawab isu strategis aktual dan menjaga keberlanjutan pembangunan, maka dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Boyolali 2021-2026 yaitu:

"Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi" Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL)

Rumusan visi tersebut memiliki muatan kondisi dan prasyarat yang akan dicapai dalam pembangunan, dengan penjabaran sebagai berikut :

Boyolali Maju berarti :

- Proses pembangunan yang berkelanjutan dan terencana sistematis diharapkan membawa kemajuan di segala bidang.

- Boyolali Maju berarti *no-one left behind,* yakni tidak ada pihak yang terlewatkan untuk merasakan kemajuan, karena semua komponen telah menjadi subyek pembangunan.
- Maju dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dan daerah yang semakin berdaya saing yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah berkualitas dan merata, serta tata Kelola pemerintahan yang semakin bersih, efektif, dan dipercaya masyarakat.

Meneruskan Pro Investasi berarti :

- Pro investasi telah menjadi arah pembangunan dan identitas Kabupaten Boyolali dengan berbagai capaian pembangunan yang telah membawa manfaat bagi masyarakat.
- Melanjutkan arah pembangunan yang pro investasi berarti tidak hanya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membangun sinergi dengan arah pembangunan nasional, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional secara sistematis dan cepat.
- Arah pro investasi membutuhkan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan, yang muaranya tetap pada kesejahteraan masyarakat Boyolali, tanpa menghadirkan ketimpangan sosial.
- Pro investasi tetap dikendalikan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yakni selain berorientasi ekonomi dan sosial, tidak kalah penting pada keberlanjutan lingkungan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta membawa manfaat pembangunan bagi generasi masa depan.

Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL) berarti :

- Pembangunan yang efektif membutuhkan prasyarat berupa sinergi dan kolaborasi seluruh komponen governance, yakni masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.
- Seluruh komponen daerah diharapkan mampu melangkah dan menata bersama penuh totalitas yang merupakan implementasi dari prinsip gotong-royong.
- Gotong royong dengan menjalankan perannya masing-masing namun saling bersinergi dan berkolaborasi dalam ikatan visi pembangunan daerah maupun landasan nilai kearifan yang tertanam kuat di tengah masyarakat berupa filosofi dari Pangeran Sambernyawa “Tiji Tibeh (mati siji, mati kabeh, mukti siji mukti kabeh)” .

Visi pembangunan Boyolali dicapai dengan beberapa misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Boyolali memiliki 5 misi yang mencakup keseluruhan bidang pembangunan dengan muatan prinsip dasar dan arah pembangunan di setiap misi sebagai berikut:

Misi 1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan.

Misi 2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.

Misi 3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional, dengan

Misi 4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Misi 5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing,

dengan penjabaran sebagai berikut :

- Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- Pembangunan integritas dengan menumbuhkan karakter yang baik bagi individu maupun organisasi dalam mewujudkan tindakan maupun keputusan bagi kebaikan bersama.
- Pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance.
- Peran masyarakat yang melahirkan kontrol terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan sangat diharapkan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN. Tidak berhenti pada good and clean governance, Boyolali berusaha menumbuhkan Smart governance, atau pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi, dengan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi-inovasi dan adaptasi teknologi yang terpadu, yang bermuara pada efektifitas, efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.
- Pemerintahan yang tertib, elok, rapi, sehat dan nyaman untuk masyarakat, dengan smart governance mendorong terwujudnya Boyolali kota cerdas/pintar, kota air, ramah lingkungan serta potensi daerah yang didorong guna kemandirian daerah dengan kinerja yang inovatif yang dapat meningkatkan daya saing daerah.

Kecamatan Simo selaku Unsur Pembantu Kepala Daerah mendukung dan mensukseskan Visi Misi pembangunan daerah yang merupakan rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Kecamatan Simo terutama memompang pelaksanaan Misi 4 Boyolali yaitu **Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya,** Hal tersebut diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra OPD 2021-2026.

Tantangan dan peluang dalam pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Simo dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan Kabupaten Boyolali mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

1. Tantangan

   - Merupakan wilayah penyangga pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali, sehingga ditutut kinerja yang lebih bila dibandingkan kecamatan lainnya;
   - Karakteristik masyarakat yang merupakan transisi dari desa ke kota yang cenderung kritis terhadap pemerintahan;
   - Aspek lingkungan sebagai penghambat perkembangan industri;
   - Banyaknya alih fungsi lahan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan.

2. Peluang

   - Dukungan Visi Bupati dalam mendukung investasi;
   - Merupakan daerah pengembangan perumahan komersial;
   - Pelayanan perijinan yang dipermudah;
   - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
   - Pengalihan pengelolaan PBB dari pusat ke daerah;
   - Besarnya lahan kawasan industri menengah bisa untuk menarik investor;
   - Akses jalan guna kelancaran pergerakan barang/jasa;
   - Dukungan dunia usaha (perusahaan/pabrik) berupa *Coorporate Social Responsibility* (CSR), karena merupakan daerah industri menengah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Simo untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Boyolali.

Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Simo tahun 2021-2026 seperti dalam tabel berikut :

Tabel. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : "BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI" Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL)			
MISI : Boyolali menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik kecamatan 2. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan 3. Peningkatan kapasitas ASN tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa 4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Peningkatan dan Pengembangan kualitas pelayanan sarana dan prasarana publik 2. Optimalisasi fungsi koordinasi kewilayahan 3. Peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran 4. Peningkatan tertib Administrasi Pemerintahan Desa
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	1. Peningkatan sistem kelembagaan berbasis kinerja	1. Peningkatan sistem administrasi umum dan kepegawaian

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Dapat ditelaah terhadap rancangan awal RKPD, sebagaimana Tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kecamatan Simo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				**100.000.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**100.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Simo	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Kegiatan	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Simo	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Kegaitan	0	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Simo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Simo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	0	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Simo	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	100.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Simo	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	100.000.000	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Simo	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	100.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Simo	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	100.000.000	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				**25.000.000**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**25.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Simo	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 kegiatan	25.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Simo	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 kegiatan	25.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Simo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	25.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Simo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	25.000.000	

	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				**70.000.000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**70.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Simo	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4 Kegiatan	70.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Simo	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4 Kegiatan	70.000.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Simo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 orang	50.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Simo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 orang	50.000.000	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Simo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 orang	20.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Simo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 orang	20.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				**150.000.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**150.000.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Simo	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Kegiatan	50.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Simo	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Kegiatan	50.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Simo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Simo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	0	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Simo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	50.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Simo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	50.000.000	
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Simo	Jumlah Kegiatan Lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	1 Paket	100.000.000	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Simo	Jumlah Kegiatan Lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	1 Paket	100.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga	Simo	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga	1 Paket	50.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga	Simo	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga	1 Paket	50.000.000	

	Kemasyarakatan		Kemasyarakatan			Kemasyarakatan		Kemasyarakatan			
	Fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat	Simo	Jumlah Kegiatan fasilitasi usaha masyarakat	1 Paket	50.000.000	Fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat	Simo	Jumlah Kegiatan fasilitasi usaha masyarakat	1 Paket	50.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**0**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**0**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Simo	Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa	13 Dokumen	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Simo	Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa	13 Dokumen	0	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Simo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Simo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	0	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				**1.918.147.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**1.918.147.000**	
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Simo	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat	25 Dokumen	0	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Simo	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat	25 Dokumen	0	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Simo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Simo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Simo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Simo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Simo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Simo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Simo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Simo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Simo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Simo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Simo	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Simo	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15 Laporan	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Simo	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Simo	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen		

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Simo	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Kegiatan	1.677.577.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Simo	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Kegiatan	1.677.577.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Simo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	1.630.777.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Simo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	1.630.777.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Simo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	46.800.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Simo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	46.800.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Simo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Simo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Simo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Simo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Simo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Simo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Simo	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Simo	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Simo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Simo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Simo	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Kegiatan	127.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Simo	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Kegiatan	127.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Simo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Simo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Simo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Simo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Simo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Simo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Simo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	10.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Simo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	10.000.000	

			yang Disediakan					yang Disediakan			
	Penyediaan Bahan/Material	Simo	Bahan/material	4 Paket	15.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Simo	Bahan/material	4 Paket	15.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Simo	Fasilitasi kunjungan yang tercukupi	4 Laporan	62.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Simo	Fasilitasi kunjungan yang tercukupi	4 Laporan	62.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Simo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Simo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Simo	Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	45.070.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Simo	Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah h	12 bulan	45.070.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Simo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Simo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Simo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44.170.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Simo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44.320.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Simo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Simo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Simo	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	68.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Simo	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	68.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Simo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	14.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Simo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	14.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Simo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Simo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Simo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Simo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	50.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Simo	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	68.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Simo	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	0	
	Pengadaan Mebel	Simo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Paket	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Simo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Paket	0	

	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Simo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Paket	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Simo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Paket	0	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Simo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Simo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	0	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Simo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Simo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	0	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini dapat diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari PD lain yang saling berkaitan berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan (yang sebelumnya diadakan musyawarah di tingkat Dusun/lingkungan RT, RW dan kelompok-kelompok masyarakat misalnya kelompok tani, kelompok perempuan dsb. Penggalian gagasan dan menyelenggarakan musyawarah dusun (Musdus) serta rembug warga untuk menetapkan jenis dari usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan, dilanjutkan dengan Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang Kabupaten.

Usulan tersebut disesuaikan dan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD, serta visi dan misi pembangunan daerah yang sudah ditetapkan. Hasil pengerjaan/penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, dapat terlihat dalam Tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah : Kecamatan Simo

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Desa Kedunglengkong		1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Penataan Bangunan Gedung	Desa Talakbroto		1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Desa Bendungan / Desa Teter		1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Desa Pelem		1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Desa Wates		50 KK	Dinas Kesehatan

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-1
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Desa Temon		1	Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Desa Gunung		1	Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Desa Gunung		1	paket	Dinas Pertanian
9	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Desa Pentur		2	unit	Dinas Pertanian
10	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Desa Walen		50	ekor	Dinas Peternakan dan Pertanioan
11	Program pengelolaan persampahan	Desa Blagung		1	unit	Dinas Lingkungan Hidup
12	Program pemasaran pariwisata	Desa Blagung		1	Paket	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
13	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Desa Sumber		1	Paket	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
14	Program Rehabilitasi Sosial	Desa Kedunglengkong		15	Orang	Dinas Sosial
15	Program Administrasi Pemerintah Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Temon		1	Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah meliputi kebijakan program strategis nasional (PSN), amanat pembangunan global dan nasional, dan dinamika pembangunan nasional lainnya. Selain itu juga kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 tetap memperhatikan keberlanjutan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian, sosial dan Kesehatan, serta dukungan terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) sebagai prioritas dalam penanggulangan kemiskinan. Disamping itu RKPD Tahun 2023 yang disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 meliputi:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta kemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Diskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada terlihat dalam Tabel T-C.32.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Langkah-langkah perumusan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah
2. Membandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hal evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah, apakah masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kehidupan.

3. Identifikasi Kebijakan Nasional dan terkait dengan tugas dan fungsi pokok Perangkat Daerah, misalnya dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Millenium Development Goals (MDGs)
4. Unit Perangkat Daerah Kabupaten/Kota perlu mengidentifikan kebijakan provinsi, dan
5. Merumuskan pernyataan tujuan dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebelumnya.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Kecamatan Simo sesuai Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel. Tujuan dan Sasaran Renja 2024

Kecamatan Simo

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.55
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan Ampel	80,00

das
ark
pad
a tabel tujuan dan sasaran diatas rencana kerja Kecamatan Simo adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
3. Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
5. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
6. Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Perumusan Sasaran, melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1. Merumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya;
2. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra PD, cuplik rumusan sasaran dalam Renstra PD tersebut

dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan;

3. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra PD), jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut;
4. Rumusan sasaran tersebut, sajikan dalam bentuk pernyataan.

Sasaran yang hendak dicapai di Kecamatan Simo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah.

Langkah-langkah perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

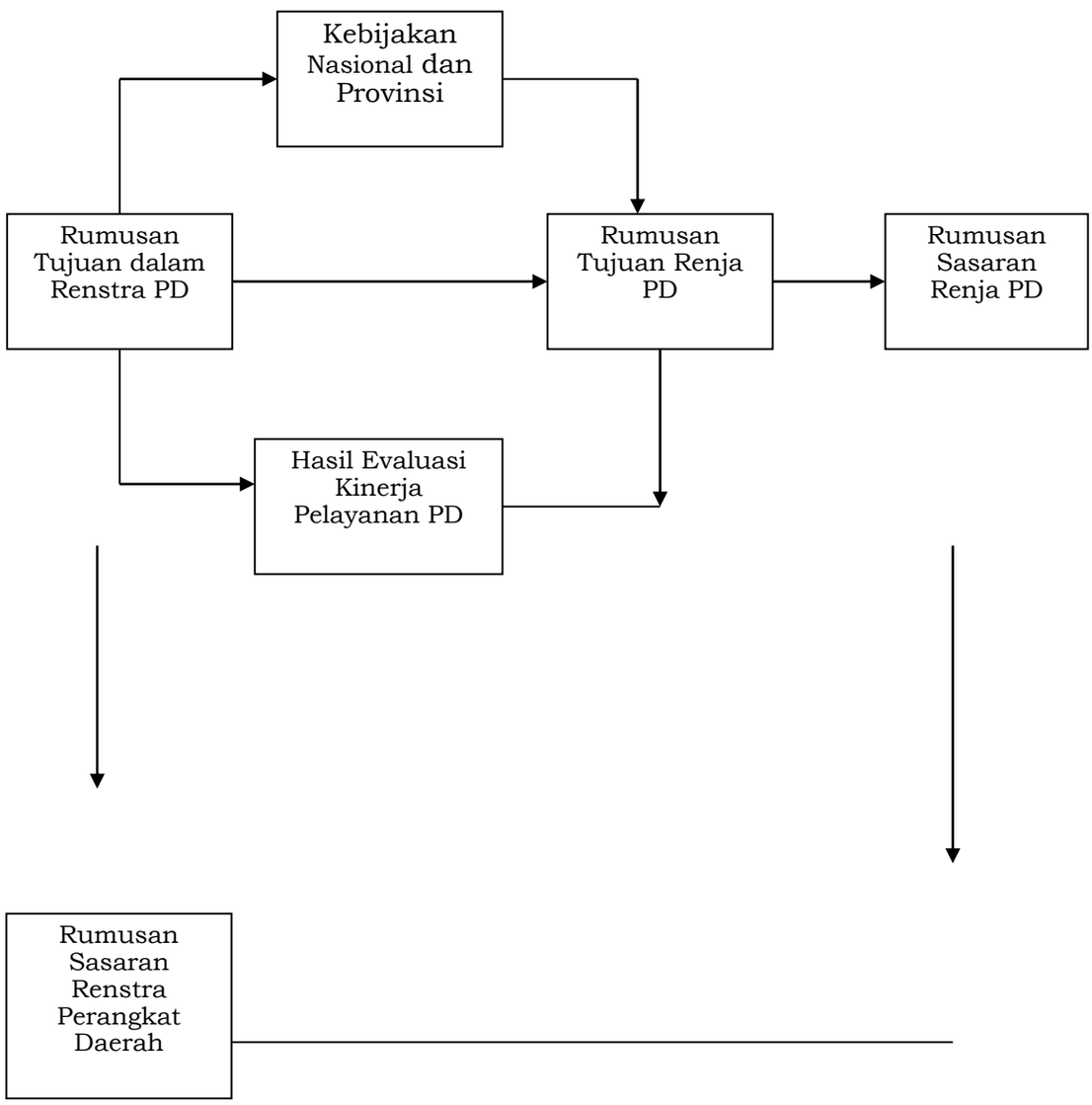

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

   Misal:

   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
   b. Pencapaian SDGs;
   c. Pengentasan kemiskinan;
   d. Pencapaian NSPK dan SPM;
   e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
   f. Pengembangan daerah terisolir; dan
   g. Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

   - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan, yaitu pada Tabel T-C.33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Simo Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Simo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET 2024	APBD Kab. (Rp)	APBD Prof (Rp)	APBN (Rp)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	(9)=(6)+(7)+(8)	-10	-11	-12
	KECAMATAN SIMO				**3.452.658.000,00**			**3.452.658.000,00**			**3.452.658.000,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.452.658.000,00**			**3.452.658.000,00**			**3.452.658.000,00**
7,01	**KECAMATAN**				**2.269.173.000,00**			**2.269.173.000,00**			**2.269.173.000,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar***		**100 Persen**	**2.269.173.000,00**			**2.269.173.000,00**		**100 Persen**	**2.269.173.000,00**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat*	KECAMATAN SIMO	7 Sub Kegiatan	0,00			0,00		7 Sub Kegiatan	0,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	KECAMATAN SIMO	2 Dokumen	0,00			0,00		2 Dokumen	0,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	KECAMATAN SIMO	1 Dokumen	0,00			0,00		1 Dokumen	0,00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	KECAMATAN SIMO	1 Dokumen	0,00			0,00		1 Dokumen	0,00

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	(9)=(6)+(7)+(8)	-10	-11	-12
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	KECAMATAN SIMO	1 Dokumen	0,00			0,00		1 Dokumen	0,00
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD*	KECAMATAN SIMO	1 Dokumen	0,00			0,00		1 Dokumen	0,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	KECAMATAN SIMO	15 Laporan	0,00			0,00		15 Laporan	0,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	KECAMATAN SIMO	4 Laporan	0,00			0,00		4 Laporan	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Gaji dan Tunjangan ASN dan Gaji Non ASN*	KECAMATAN SIMO	8 Sub Kegiatan	2.053.974.000,00			2.053.974.000,00		8 Sub Kegiatan	2.053.974.000,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	KECAMATAN SIMO	16 Orang/bulan	2.001.974.000,00			2.001.974.000,00		16 Orang/bulan	2.001.974.000,00
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	KECAMATAN SIMO	13 Dokumen	52.000.000,00			52.000.000,00		13 Dokumen	52.000.000,00
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	KECAMATAN SIMO	12 Dokumen	0,00			0,00		12 Dokumen	0,00

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	(9)=(6)+(7)+(8)	-10	-11	-12
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	KECAMATAN SIMO	12 Dokumen	0,00			0,00		12 Dokumen	0,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	KECAMATAN SIMO	1 Laporan	0,00			0,00		1 Laporan	0,00
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	KECAMATAN SIMO	17 Dokumen	0,00			0,00		17 Dokumen	0,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	KECAMATAN SIMO	18 Laporan	0,00			0,00		18 Laporan	0,00
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	KECAMATAN SIMO	1 Dokumen	0,00			0,00		1 Dokumen	0,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	KECAMATAN SIMO	1 Sub Kegiatan	0,00			0,00		1 Sub Kegiatan	0,00
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	KECAMATAN SIMO	3 Laporan	0,00			0,00		3 Laporan	0,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	KECAMATAN SIMO	1 Sub kegiatan	0,00			0,00		1 Sub kegiatan	0,00

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	(9)=(6)+(7)+(8)	-10	-11	-12
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	KECAMATAN SIMO	13 Dokumen	0,00			0,00		13 Dokumen	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	KECAMATAN SIMO	10 Sub Kegiatan	139.999.000,00			139.999.000,00		10 Sub Kegiatan	139.999.000,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	KECAMATAN SIMO	4 Paket	2.000.000,00			2.000.000,00		4 Paket	2.000.000,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	KECAMATAN SIMO	4 Paket	3.000.000,00			3.000.000,00		4 Paket	3.000.000,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*0*	KECAMATAN SIMO	4 0	25.000.000,00			25.000.000,00		4 0	25.000.000,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	KECAMATAN SIMO	4 Paket	10.600.000,00			10.600.000,00		4 Paket	10.600.000,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	KECAMATAN SIMO	-	0,00			0,00		-	0,00
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	KECAMATAN SIMO	4 Paket	15.399.000,00			15.399.000,00		4 Paket	15.399.000,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*0*	KECAMATAN SIMO	4 0	94.600.000,00			94.600.000,00		4 0	94.600.000,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	KECAMATAN SIMO	12 Laporan	25.125.000,00			25.125.000,00		12 Laporan	25.125.000,00
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	KECAMATAN SIMO	13 Dokumen	0,00			0,00		13 Dokumen	0,00

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	(9)=(6)+(7)+(8)	-10	-11	-12
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	KECAMATAN SIMO	13 Dokumen	0,00			0,00		13 Dokumen	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah*	KECAMATAN SIMO	0 Paket	0,00			0,00		0 Paket	0,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	KECAMATAN SIMO	0 Unit	0,00			0,00		0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	KECAMATAN SIMO	0 Unit	0,00			0,00		0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	KECAMATAN SIMO	0 Unit	0,00			0,00		0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	KECAMATAN SIMO	0 Unit	0,00			0,00		0 Unit	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	KECAMATAN SIMO	3 Sub Kegiatan	2.200.000,00			2.200.000,00		3 Sub Kegiatan	2.200.000,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	KECAMATAN SIMO	12 Laporan	1.200.000,00			1.200.000,00		12 Laporan	1.200.000,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	KECAMATAN SIMO	12 Laporan	32.220.000,00			32.220.000,00		12 Laporan	32.220.000,00

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	(9)=(6)+(7)+(8)	-10	-11	-12
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	KECAMATAN SIMO	4 Laporan	1.000.000,00			1.000.000,00		4 Laporan	1.000.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Pemiliharaan Barang Milik Daerah*	KECAMATAN SIMO	3 Sub Kegiatan	73.000.000,00			73.000.000,00		3 Sub Kegiatan	73.000.000,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	KECAMATAN SIMO	7 Unit	19.000.000,00			19.000.000,00		7 Unit	19.000.000,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	KECAMATAN SIMO	12 Unit	4.000.000,00			4.000.000,00		12 Unit	4.000.000,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	KECAMATAN SIMO	2 Unit	50.000.000,00			50.000.000,00		2 Unit	50.000.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu***		**3 Kegiatan**	**1.000.000.000,00**			**1.000.000.000,00**		**3 Kegiatan**	**1.000.000.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	KECAMATAN SIMO	1 Sub Kegiatan	0,00			0,00		1 Sub Kegiatan	0,00

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	(9)=(6)+(7)+(8)	-10	-11	-12
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	KECAMATAN SIMO	13 Laporan	0,00			0,00		13 Laporan	0,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	KECAMATAN SIMO	39 Dokumen	0,00			0,00		39 Dokumen	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di Kecamatan yang terselenggara*	KECAMATAN SIMO	1 Sub Kegiatan	0,00			0,00		1 Sub Kegiatan	0,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	KECAMATAN SIMO	2 Laporan	0,00			0,00		2 Laporan	0,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah sarana dan prasarana umum dalam kondisi baik*	KECAMATAN SIMO	1 Sub Kegiatan	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00		1 Sub Kegiatan	1.000.000.000,00
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	KECAMATAN SIMO	2 Dokumen	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00		2 Dokumen	1.000.000.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti***		**100,00 Persen**	**75.000.000,00**			**75.000.000,00**		**100,00 Persen**	**75.000.000,00**

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	(9)=(6)+(7)+(8)	-10	-11	-12
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah usulan hasil Musdes yang diverifikasi*	KECAMATAN SIMO	2 Sub Kegiatan	75.000.000,00			75.000.000,00		2 Sub Kegiatan	75.000.000,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	KECAMATAN SIMO	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00			0,00		6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	KECAMATAN SIMO	13 Laporan	75.000.000,00			75.000.000,00		13 Laporan	75.000.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti***		**100,00 Persen**	**40.540.000,00**			**40.540.000,00**		**100,00 Persen**	**40.540.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	KECAMATAN SIMO	2 Sub Kegiatan	40.540.000,00			40.540.000,00		2 Sub Kegiatan	40.540.000,00
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	KECAMATAN SIMO	400 Orang	20.540.000,00			20.540.000,00		400 Orang	20.540.000,00

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	(9)=(6)+(7)+(8)	-10	-11	-12
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	KECAMATAN SIMO	500 Orang	20.000.000,00			20.000.000,00		500 Orang	20.000.000,00
J U M L A H					**3.452.658.000,00**			**3.452.658.000,00**			**3.452.658.000,00**

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Simo yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Perumusan program dan kegiatan ini, mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai disertai dengan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Realisasi renja ini sangat tergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Sebagaimana tujuan renja ini yaitu "terarahnya program serta prioritas kegiatan tahunan dengan capaian rencana strategis Kecamatan Simo melalui pembiayaan APBD Kabupaten yang dilengkapi dengan indikator capaian sebagai tolak ukur penilaian kinerja". Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

Demikian RENJA Kecamatan Simo 2024 disusun dan semoga bermanfaat.

NN. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

KECAMATAN NGEMPLAK

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **6**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 16

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 19

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **40**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 40

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 42

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **45**

4.1. Program dan Kegiatan 45

BAB V. PENUTUP **76**

BAB I
PENDAHULUAN

Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD), dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah (PD), evaluasipelaksanaan kerja perangkat daerah (Renja PD) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD).

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Keterkaitan Renja PDdengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Kabupaten adalah dalam perumusan Rancangan Renja PD Kabupaten,dan sebagai tindak lanjut proses penyusunan RAPBD. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA – PD adalah dokumen perencanaan

dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngemplak adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); SALINAN.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2004-2014
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pelayanan Publik
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2008 rencana Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan Kabupaten Boyolali
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor.4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 232);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225) dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 224);

13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 78 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Kecamatan
14. Rencana Strategis Kecamatan Ngemplak Tahun 2022-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngemplak adalah untuk memberikan Landasan Kebijakan Teknis Tahunan Dalam Kerangka Pencapaian Visi Misi setiap tahapnya (satu tahunan) dan sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Camat pada Akhir Tahun Anggaran sebagai bagian dari pelaksanaan Kebijakan Daerah.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai:

a. menetapkan prioritas Program dan Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan sesuai Rencana Strategis yang dilaksanakan per tahap (tahunan) selama lima tahun ke depan melalui sumber pembiayaan APBD yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja yaitu Masukan, Keluaran, Hasil, Manfaat, Dampak.
b. Memudahkan seluruh jajaran aparatur PD Kecamatan Ngemplak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur PD Kecamatan Ngemplak untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat daerah terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1. Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali lalu (tahun n-2) dan Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dengan mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolai tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun lalu, dan realisasi Renstra Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolai dan/atau realisasi APBD Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

Pokok - pokok materi yang disajikan pada bab ini, antara lain :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kabijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Ngempalak Kabupaten Boyolali tahun lalu sebagaimana tabel T-C.29

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngemplak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN									
	KECAMATAN NGEMPLAK									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	100	100	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan									
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	7 Sub Kegiatan	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100	7 Sub Kegiatan	7 Sub Kegiatan	100
	Kegiatan									
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Sub Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	8 Sub Kegiatan	8 Sub Kegiatan	100
Kode	**Urusan/Bidang Urusan**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Realisasi**	**Target dan Realisasi Kinerja**			**Target**	**Perkiraan Realisasi**	

	Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	(*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan									
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Sub Kegiatan	-	-	-	100	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	100
	Kegiatan									
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Sub Kegiatan	-	-	-	100	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	100
	Kegiatan									
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Sub Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	10 Sub Kegiatan	10 Sub Kegiatan	100
	Kegiatan									
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	100
	Kegiatan									
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan									
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	-	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100	-	-	100
07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**87,00**	84	85	85	100	86,00	86	100
	Kegiatan									
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Sub Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	100
	Kegiatan									
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Sub Kegiatan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan									
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Sub Kegiatan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	100
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	100	100	100	100	**100**	100	100
		Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)		100	100	100				
	Kegiatan									
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Sub Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan									
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	-	-	100
07:01:04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	**100**	100	100	100	100	**100**	100	100
	Kegiatan									
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Sub Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	100
07:01:05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	100	100	100	100	**100**	100	100
	Kegiatan									
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Sub Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	100
Kode	**Urusan/Bidang Urusan**	**Indikator Kinerja Program**	**Target**	**Realisasi**	**Target dan Realisasi Kinerja**			**Target**	**Perkiraan Realisasi**	

	Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	(*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
07:01:06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti**	**100**	100	100	100	100	**100**	100	100
	Kegiatan									
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Sub Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Sub Kegiatan	12 Desa	12 Desa	12 Desa	100	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian Kinerja Pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing–masing Perangkat Darah, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

PD dalam menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi , serta norma standar pelayanan PD yang bersangkutan adalah dengan caramenganalisis terhadap indikator input , output dan outcome PD Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Selanjutnya hasil analisisnya tersebut dapatdipadukan dan disajikan pada table T-.C.30.

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngemplak
Kabupaten Boyolali

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Dearah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Sub Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat			25 Dokumen	25 Dokumen	7 Sub Kegiatan	7 Sub Kegiatan	25 Dokumen	25 Dokumen	7 Sub Kegiatan	7 Sub Kegiatan	
2	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1 Tahun	1 Tahun	8 Sub Kegiatan	8 Sub Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	8 Sub Kegiatan	8 Sub Kegiatan	
3	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-	-	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	-	-	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	
4	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			-	-	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	-	-	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	
5	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 Bulan	12 Bulan	10 Sub Kegiatan	10 Sub Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	10 Sub Kegiatan	10 Sub Kegiatan	
6	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Bulan	12 Bulan	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	
7	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Bulan	12 Bulan	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	
8	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah			4 Paket	4 Paket	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	4 Paket	4 Paket	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Peran kat Dearah				Realisasi Capaian		Proyas		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	
10	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan			1 Keg	1 Keg	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1 Keg	1 Keg	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	
11	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			1 Unit	1 Unit	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	1 Unit	1 Unit	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	
12	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			1 Tahun	1 Tahun	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	
13	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			3 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	
14	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	
15	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			4 Kegiatan	4 Kegiatan	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	
16	Jumlah Sub Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			12 Desa	12 Desa			12 Desa	12 Desa			

2.3 Isu-isu Penting Penyelengggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sesuai Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputipemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Fungsi Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali adalah:

1. Pengoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
2. Penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
3. Pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat;

Organisasi Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dibentuk berdasar Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, terdiri dari:

1) Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pengembangan perekonomian di wilayah Kecamatan

2) Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan surat-menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, pengelolaan barang, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- Pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan dan pengolahan administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan barang
b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan. Dan melaksanakan pengumpulan data penyusunan dokumen satuan kerja dan rencana anggaran, serta menyusun laporan.

3) Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan, fasilitasi kehidupan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi
4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja
5) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan program pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat
6) Seksi Perekonomian Pembangunan dan Pekerjaan Umum, dengan tugas pokok melakukan penyusunan program dan pembinaan bidang Pembangunan, Perekonomian dan Pekerjaan Umum.

7) Seksi Pelayanan, dengan tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan public.
8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali telah menjalankan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sebagaian besar sasaran kinerja Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dapat tercapai atau capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali berhasil melaksanakan tugas dengan baik sesuai perencanaan.

Secara umum permasalahan pelayanan di Kecamatan Ngemplak dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. Permasalahan tata kelola pemerintahan antara lain meliputi :
   a. Belum terpenuhinya rasio kecukupan dan kuantitas SDM aparatur dengan kompetensi khusus sesuai fungsi yang dibutuhkan
   b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan
   c. Kurang lengkapnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat waktu.
2. Permasalahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah antara lain meliputi:
   a. Kurangnya pemahaman masyarakat dan sosialisasi yang berkelanjutan terhadap pengelolaan tata guna lahan sesuai dengan peruntukannya
   b. Belum optimalnya pemanfaatan pengembangan energi.
3. Permasalahan tingkat kesejahteraan antara lain meliputi :
   a. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
   b. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesejahteraan
   c. Kurang maksimalnya peran perempuan dan tingkat pemberdayaan perempuan serta perlindungan ibu dan anak.
4. Permasalahan kondusivitas lingkungan sosial, politik, hukum, ketertiban dan keamanan antara lain meliputi :
   a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi

b. Belum optimalnya peran masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit menular dengan ketaatan penerapan protokol kesehatan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahunsebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2023. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra PD Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2022
– 2026.

Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program - program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra PD Kecamatan Ngemplak Tahun 2022 – 2026 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif PD dan pagu indikatif kewilayahan yang telah ditetapkan. Dapat ditelaah terhadap rancangan awal RKPD , berdasarkan Tabel T- C. 31

Tabel T- C. 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
TAHUN ANGGARAN 2024
KABUPATEN BOYOLALI

NAMA OPD : KECAMATAN NGEMPLAK

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kec Ngemplak**	**Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	100	**2.245.373**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Kec Ngemplak**	**Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	100	**2.245.373**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan perencanaan penganggaran dan	7 Sub Kegiatan	-	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan perencanaan penganggaran dan	7 Sub Kegiatan	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Perangkat Daerah		evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat			Perangkat Daerah		evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat			
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyusunan Dokumen Perencana an Perang kat Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Perencana an Perang kat Daerah	2 Doku men	-	Penyusunan Dokumen Perencana an Perang kat Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Perencana an Perang kat Daerah	2 Doku men	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Doku men	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Doku men	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Doku men	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Doku men	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Doku men	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Doku men	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Doku men	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Doku men	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	15 lapor an	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	15 lapor an	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Sub Kegiatan	1.989.473	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Sub Kegiatan	1.989.473	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kec Ngemplak**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ bulan	1.942.673	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kec Ngemplak**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ bulan	1.942.673	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	46.800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	46.800	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			Akhir Tahun SKPD					Akhir Tahun SKPD			
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	-	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**Kec Ngemplak**	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**Kec Ngemplak**	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kec Ngemplak**	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Sub Kegiatan	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kec Ngemplak**	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Sub Kegiatan	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Rekon siliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Rekon siliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kec Ngemplak**	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Sub Kegiatan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kec Ngemplak**	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Sub Kegiatan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen		
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Sub Kegiatan	127.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Sub Kegiatan	127.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Kec Ngemplak**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Kec Ngemplak**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kec Ngemplak**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kec Ngemplak**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Kec Ngemplak**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Kec Ngemplak**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Kec Ngemplak**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Kec Ngemplak**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	**Kec Ngemplak**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	4 Paket	10.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	**Kec Ngemplak**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	4 Paket	10.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Penyediaan Bahan/Material	**Kec Ngemplak**	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	4 Paket	15.000	Penyediaan Bahan/Material	**Kec Ngemplak**	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	4 Paket	15.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	62.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	62.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	10.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	10.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Laporan		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Laporan		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahaan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahaan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 Dokumen		
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	39.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	39.900	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Penyedia an	4 Lapo	-	Penyediaan Jasa Pelayanan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Penyedia an	4 Lapo	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	ran		Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	ran		
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	69.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	69.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	15.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	15.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kec Ngemplak**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	4.000	Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kec Ngemplak**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	4.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Kec Ngemplak**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	50.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Kec Ngemplak**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	50.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	-	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	-	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Pengadaan Mebel	**Kec Ngemplak**	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	Pengadaan Mebel	**Kec Ngemplak**	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kec Ngemplak**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kec Ngemplak**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	**Kec Ngemplak**	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	**Kec Ngemplak**	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	
	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Kec Ngemplak**	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Kec Ngemplak**	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**87,00**	100.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**87,00**	100.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Sub Kegiatan	-	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Sub Kegiatan	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	**Kec Ngemplak**	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	-	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	**Kec Ngemplak**	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	-	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Sub Kegiatan	-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Sub Kegiatan	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Sub Kegiatan	100.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Sub Kegiatan	100.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	100.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	100.000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat**	**100**	**150.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat**	**100**	**150.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			dan pembangunan yang ditindaklanjuti					**dan pembangunan yang ditindaklanjuti**			
			Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)					**Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)**			
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Sub Kegiatan	150.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Sub Kegiatan	150.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**Kec Ngemplak**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**Kec Ngemplak**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	-	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	150.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	150.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**25.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**25.000**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Sub Kegiatan	25.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Sub Kegiatan	25.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	25.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	25.000	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**70.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**70.000**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintaha	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Penyelengga	2 Sub Kegia	**70.000**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Penyelengga	2 Sub Kegia	**70.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	n Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		raan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	tan		Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		raan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	tan		
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**Kec Ngemplak**	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	50.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**Kec Ngemplak**	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	50.000	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	**Kec Ngemplak**	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	20.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	**Kec Ngemplak**	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	20.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai-an	Pagu Indikatif (Rp.000)	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti**	**100**	**-**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti**	**100**	**-**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Sub Kegiatan	-	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Sub Kegiatan	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	-	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	-	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen	-	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen	-	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini dapat diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan , baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD , LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari PD lain yang saling berkaitan berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan (yang sebelumnya diadakan musyawarah di tingkat Dusun/lingkungan RT, RW dan kelompok-kelompok masyarakat misalnya kelompok tani, kelompok perempuan dsb.) Penggalian gagasan dan menyelenggarakan musyawarah dusun (Musdus) serta rembug warga untuk menetapkan jenis dari usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan, dilanjutkan dengan Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang Kabupaten.

Usulan tersebut disesuaikan dan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD, serta visi dan misi pembangunan daerah yang sudah ditetapkan.

Hasil pengerjaan/penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, dapat terlihat dalam Tabel T-C.32

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngemplak

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kec Ngemplak**	**Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	100	
	Kegiatan				
	Perencana an,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan perencanaanpenganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	7 Sub Kegiatan	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan				
	Penyusunan Dokumen Perencana an Perang kat Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Perencana an Perang kat Daerah	2 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 laporan	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	
	Kegiatan				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Sub Kegiatan	
	Sub Kegiatan				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kec Ngemplak**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Kec Ngem plak**	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Kec Ngem plak**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksa naan Akun tansi SKPD	12 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Kec Ngem plak**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**Kec Ngemplak**	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	
	Kegiatan				
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kec Ngemplak**	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Sub Kegiatan	
	Sub Kegiatan				
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Rekon siliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	
	Kegiatan				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kec Ngemplak**	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Sub Kegiatan	
	Sub Kegiatan				
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen	
	Kegiatan				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Sub Kegiatan	
	Sub Kegiatan				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Kec Ngemplak**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kec Ngemplak**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Kec Ngemplak**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Kec Ngemplak**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda An	**Kec Ngemplak**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	4 Paket	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	
	Penyediaan Bahan/Material	**Kec Ngemplak**	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	4 Paket	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Laporan	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik pada SKPD	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 Dokumen	
	Kegiatan				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	3 Sub Kegiatan	
	Sub Kegiatan				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	
	Kegiatan				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	
	Sub Kegiatan				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	
	Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kec Ngemplak**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Kec Ngemplak**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	-	
	Sub Kegiatan				
	Pengadaan Mebel	**Kec Ngemplak**	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kec Ngemplak**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	**Kec Ngemplak**	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	
	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Kec Ngemplak**	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**87,00**	
	Kegiatan				
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Sub Kegiatan	
	Sub Kegiatan				
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	**Kec Ngemplak**	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	
	Kegiatan				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Sub Kegiatan	
	Sub Kegiatan				
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan				
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Sub Kegiatan	
	Sub Kegiatan				
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	
			Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)		
	Kegiatan				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Sub Kegiatan	
	Sub Kegiatan				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**Kec Ngemplak**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	
	Kegiatan				
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	
	Sub Kegiatan				
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	**100**	
	Kegiatan				
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Sub Kegiatan	
	Sub Kegiatan				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**Kec Ngemplak**	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	
	Kegiatan				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Sub Kegiatan	
	Sub Kegiatan				
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**Kec Ngemplak**	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	**Kec Ngemplak**	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti**	**100**	
	Kegiatan				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kec Ngemplak**	Jumlah Sub Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Sub Kegiatan	
	Sub Kegiatan				
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	**Kec Ngemplak**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana yang dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan proritas pembangunan nasional dan yang terkait dalam tugas pokok dan fungsi PD Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas. Landasan keputusan yang diambil dalam sebuah kebijakan adalah mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien sejalan dengan misi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Prioritas dalam sebuah kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan melalui pencapaian strategi pembangunan. Kebijakan, strategi, dan prioritas program pembangunan daerah tersebut menjadi acuan bagi Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, yaitu:

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguaran

   Kebijakan pembangunan daerah untuk mendukung strategi pembangunan nasional ini diarahkan guna percepatan penurunan jumlah penduduk miskin, dengan strategi meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan; membangun prasarana dan sarana serta pemberdayaan ekonomi masyarakat; memperkuat kelembagaan dan mendayagunakan sumber daya potensial untuk penanggulangan kemiskinan. Berbagai program pembangunan daerah dilaksanakan oleh Kecamatan Ngemplak untuk mendukung kebijakan ini, antara lain:

   a. Program pendidikan non formal

   b. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

   c. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

d. .Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

e. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kebijakan pembangunan daerah Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali untuk mendukung strategi pembangunan nasional ini diarahkan guna percepatan penurunan jumlah pengangguran, dengan strategi meningkatkan kualitas dan keterampilan serta memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat. Berbagai program pembangunan daerah dilaksanakan oleh Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali untuk mendukung kebijakan ini, antara lain:

   Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan. Kebijakan pembangunan daerah untuk mendukung strategi pembangunan nasional ini diarahkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, dengan strategi menjaga realisasi investasi yang positif, meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, mendorong sektor riil, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan ekspor.

   Berbagai program pembangunan daerah dilaksanakan oleh Kecamatan Ngemplak untuk mendukung kebijakan ini, antara lain:

   a. Program Pemeliharaan Infrstruktur

4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah Kebijakan pembangunan daerah untuk mendukung strategi pembangunan nasional ini diarahkan guna menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta mengurangi risiko bencana, dengan strategi meningkatkan konservasi ekosistem terersterial meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta meningkatkan upaya penanggulangan bencana. Berbagai program pembangunan daerah dilaksanakan

oleh Kecamatan Ngemplak untuk mendukung kebijakan ini, antara lain:

a. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

b. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);

5. Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dalam mendukung kebijakan nasional dan provinsi mengambil kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan pelayanan publik,yaitu:

   a. Mengoptimalisasi pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati .

   b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan Ngemplak dan peningkatan kualitas aparaturnya seperti administrasi kependudukan dan pencatata sipil, rekomendasi perizinan,dan surat keterangan lain.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ngemplak

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali yang dikaitkan dengan sasaran target Kinerja Renstra PD.

Langkah-langkah perumusan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra PD
2. Membandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hal evaluasi kinerja pelayanan PD, apakah masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kehidupan.
3. Identifikasi Kebijakan Nasional dan terkait dengan tugas dan fungsi pokok PD, misalnya dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Millenium Development Goals (MDGs)
4. Unit PD Kabupaten / Kota perlu mengidentifikan kebijakan provinsi, dan
5. Merumuskan pernyataan tujuan dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebelumnya.

Dengan demikian , Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Ngemplak adalah :

1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4. Meningkatnya Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan
6. Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
7. Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
9. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
10. Meningkatnya Peran Perempuan Di Perdesaan/Kelurahan
11. Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Terlaksananya Pembinaan Dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
13. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Dan Publik Kecamatan
14. Terlaksananya Pembangunan Dan Pemeliharaan Infrastuktur

Perumusan Sasaran, melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Merumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya.
2. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra PD, cuplik rumusan sasaran dalam Renstra PD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan.
3. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra PD) , jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut.
4. Rumusan sasaran tersebut , sajikan dalam bentuk pernyataan.

Sasaran yang hendak dicapai di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali adalah :

1. Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel
2. Tersusunnya Daftar Skala Prioritas usulan kegiatan Kecamatan/Kelurahan

3. Terwujudnya pelayanan public yang responsive dan akuntabel
4. Terwujudnya masyarakat yang tertib dan aman serta mendapat perlindungan jaminan kesjahteraan sosial
5. Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat.

Langkah-langkah perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut:

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD KABUPATEN/KOTA

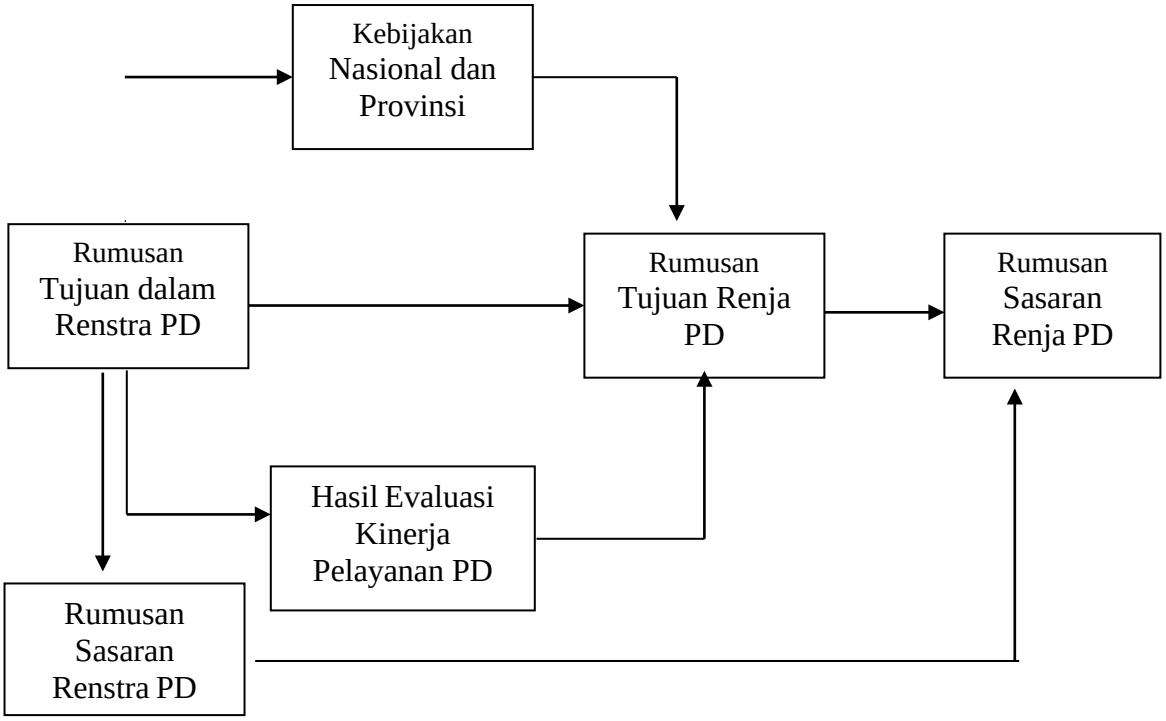

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

PD Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sebagai leading sektor dalam hal perencanaan di Kabupaten Boyolali melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain melaksanakan kegiatan rutin PD juga melaksanakan urusan wajib dan pilihan.

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2024 yangdituangkan dalam renja 2024 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah untuk mencapai visi-misi pembangunan daerah. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi PD Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi danmisi organisasi.

Secara umum rencana kerja berisikan Penjelasan mengenai :

a. faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Misalnya :
   1. Pencapaian Misi dan Visi Kepala Daerah
   2. Pencapaian MDGS.
   3. Pengentasan Kemiskinan
   4. Pencapaian SPM
   5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah
   6. Pengembangan Daerah Terisolir
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

c. Secara umum program dan kegiatan PD Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD
f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan peralatan rumah tangga
d. Penyediaan bahan logistik kantor
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
g. Penyediaan bahan / Material
h. Fasilitasi kunjungan tamu
i. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.8 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Mebel
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
d. Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan.

a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

2.3 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PelayananUmum

a. Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan /atau Instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayaan Umum.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan KepalaDesa
b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

d. Tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program dan kegiatan) pada Tabel T-C. 33

TABEL T-C.33

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN NGEMPLAK KAB. BOYOLALI

TAHUN 2024

Unit Organisasi : 7.01.8.01.2.19.08.0000 Kecamatan Ngemplak

Sub Unit Organisasi : 7.01.8.01.2.19.08.0000 Kecamatan Ngemplak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN NGEMPLAK						**2.570.373.000**							**2.570.373.000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.570.373.000**							**2.570.373.000**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.225.373.000**							**2.225.373.000**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	***Prosentase penunjang urusan pemerintahan yangterpenuhi sesuai standar***	**100 Persen**			**100 Persen**	**2.225.373.000**						**100 Persen**	**2.225.373.000**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Sub Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat*				7 Keg	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	7 Keg	0	Kecamatan Ngemplak
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dok			2 Dok	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfor masi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	2 Dok	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok			1 Dok	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	1 Dok	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok			1 Dok	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	1 Dok	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dok			1 Dok	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	1 Dok	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dok			1 Dok	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	1 Dok	0	KECAMATAN NGEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75 Laporan			15 Laporan	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	15 Laporan	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan			4 Laporan	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	4 Laporan	0	KECAMATAN NGEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	5 Tahun			8 Keg	1.989.473.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	8 Keg	1.989.473.000	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ bulan			16 Orang/ bulan	1.942.673.000	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	16 Orang/bulan	1.942.673.000	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65 Dok			13 Dok	46.800.000	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	13 Dok	46.800.000	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	60 Dok			12 Dok	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	12 Dok	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasidan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 Dok			12 Dok	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	12 Dok	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			1 Laporan	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	1 Laporan	0	KECAMATAN NGEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dok			1 Dok	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	1 Dok	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90 Laporan			18 Laporan	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	18 Laporan	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporandan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dok			1 Dok	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec	1 Dok	0	KECAMATAN NGEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerahpada SKPD*	15 Laporan			1 Keg	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	1 Keg	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan			3 Laporan	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	3 Laporan	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	65 Laporan			1 Keg	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	1 Keg	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	65 Dok			13 Dok	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	13 Dok	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.06	Administrasi UmumPerangkat Daerah	*Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	60 Bulan			10 Keg	127.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	10 Keg	127.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/PenerangBangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket			4 Paket	2.000.000,	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	4 Paket	2.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket			4 Paket	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	4 Paket	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yang Disediakan	20 Paket			4 Paket	3.000.000	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	4 Paket	3.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket			4 Paket	25.000.000	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	4 Paket	25.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket			4 Paket	10.000.000	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	4 Paket	10.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dok			0 Dok	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	0 Dok	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket			4 Paket	15.000.000	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	4 Paket	15.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan			4 Laporan	62.000.000	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	4 Laporan	62.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan			4 Laporan	10.000.000	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	4 Laporan	10.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan ArsipDinamis pada SKPD	65 Dok			13 Dok	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	13 Dok	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	65 Dok			13 Dok	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	13 Dok	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah*	20 Paket			Keg	0			-	-	Kec.	Keg	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel														
			-				-	0	-	-	-	-	Kec.	-	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	0 Unit	0	KECAMATAN NGEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit			0 Unit	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec	0 Unit	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec	0 Unit	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	60 Bulan			3 Keg	39.900.000			Memperku at Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec	3 Keg	39.900.000	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat	60 Laporan			12 Laporan	900.000	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	12 Laporan	900.000	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan			12 Laporan	39.000.000	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kec.	12 Laporan	39.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan			4 Laporan	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	4 Laporan	0	KECAMATAN NGEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	60 Bulan			3 Keg	69.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	3 Keg	69.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	15.000.000	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	5 Unit	15.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara	70 Unit			30 Unit	4.000.000	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	30 Unit	4.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			2 Unit	50.000.000	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Kec.	2 Unit	50.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01	**KECAMATAN**						**345.000.000**							**345.000.000**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK**	***Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu***				**87 Nilai**	**100.000.000**						**87 Nilai**	**100.000.000**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	5 kegiatan			2 Keg	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	2 Keg	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	65 Laporan			13 Laporan	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	13 Laporan	0	KECAMATAN NGEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan	195 Dok			39 Dok	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	39 Dokumen	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan*	5 kegiatan			1 Keg	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	1 Keg	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan			2 Laporan	0,	- Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	2 Laporan	0	KECAMATAN NGEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*				1 Keg	100.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	1 Keg	100.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana Pelayanan Umum	10 Dok			2 Dok	100.000.000	- Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	2 Dok	100.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana Pelayanan Umum	10 Dok			2 Dok	100.000.000	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	2 Dok	100.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana Pelayanan Umum	10 Dok			2 Dok	100.000.000	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	2 Dok	100.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***undefined*** ***Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakatdan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase Stimulus bagi masyarakat miskin/ berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan) Persentase hasil koordinasi***				**100 Persen**	**150.000.000**						**100 Persen**	**150.000.000**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			bidang pemberdayaan masyarakatdan pembangunan yang ditindaklanjuti													
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	1 Tahun			2 Keg	150.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	2 Keg	150.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30 Lembaga Kemasyarakatan			6 Lembaga Kemasyarakatan	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	6 Lembaga Kemasyarakatan	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65 Laporan			13 Laporan	150.000.000	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	13 Laporan	150.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan TingkatKecamatan	*Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan TingkatKecamatan*	3 keg			2 Keg	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	2 Keg	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan			0 Lembaga Kemasyarakatan	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	26 Laporan			0 Laporan	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	0 Laporan	0	KECAMATAN NGEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti***				**100 Persen**	**25.000.000,00**						**100 Persen**	**25.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	2 keg			1 Sub Kegiatan	25.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	1 Keg	25.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	39 Laporan			13 Laporan	25.000.000	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	13 Laporan	25.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti***				**100 Persen**	**70.000.000**						**100 Persen**	**70.000.000**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	4 keg			2 Keg	70.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	2 Keg	70.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	2000 Orang			400 Orang	50.000.000	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	400 Orang	50.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Negara Kesatuan Republik Indonesia													
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang			500 Orang	20.000.000	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	500 Orang	20.000.000	KECAMATAN NGEMPLAK
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti***				**100 Persen**	**0**						**100 Persen**	**0**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Sub Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	12 desa			3 Keg	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	3 Keg	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	40 Dok			8 Dok	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	8 Dok	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	130 Dok			26 Dok	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	26 Dok	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	65 Dok			13 Dok	0	Kab. Boyolali, Ngemplak, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dankolaboratif Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakterdan berbudaya	Masyarakat	13 Dok	0	KECAMATAN NGEMPLAK
	JUMLAH							**2.570.373.000**							**2.570.373.000**	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja merupakan langkah awal perencanaan tahunan yang harus dilakukan Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan dengan prinsip satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan Ngemplak bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan Rancangan awal RKPD , Renstra PD, Renja K/L dan Renja PD Kabupaten.

Yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan Rencana Kerja ini adalah agar dalam Rencana Kerja PD Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali adalah benar-benar berdasarkan nilai kebutuhan masyarakat, bukan hanya kegiatan rutin yang diselenggarakan organisasi pemerintah dan pembangunan dengan meningkatkan fungsi aparatur sebagai fasilitator dan organisasi.

Kaidah-kaidah pelaksana dalam Rencana Kerja ini adalah dengan pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (Top-down) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, hingga kecamatan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah, menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dilakukan dengan pendekatan partisipatif yaitu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (Stakeholders), serta pendekatan politis untuk menjalankan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye yang disusun ke dalam Rancangan RPJMD dan dijalankan pada tahapan tiap tahunnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja PD.

Rencana tindak lanjut yang direkomendasikan adalah agar dalam Rencana Kerja PD Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dapat mengakomodir sebagaian besar usulan dan kebutuhan masyarakat , agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan.

Dalam penyusunan ini tentu saja masih banyak kekurangan atau kelemahan, akin tetapi penyusunan ini dibuat semaksimal mungkin dalam rangka meningkatkan perencanaan yang matang agar dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dapat dijalankan berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu, saran ataupun kritik yang sifatnya membangun senantiasa kami nantikan dalam rangka perbaikan penyusunannya di masa mendatang.

OO. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

KECAMATAN NOGOSARI

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Alloh SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat, Taufiq, dan HidayahNya sehingga Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan baik.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD) yang merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung dan mewujudkan capaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali memberikan gambaran tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran ke depan,

Renja Perangkat Daerah ini menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran, target capaian kinerja serta bagaimana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali sesuai dengan tugas pokoknya serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan menyelaraskan Usulan/Aspirasi Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023.

Penyusunan Renja berdasarkan pada Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun yang lalu dan tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan Renja ini untuk itu kami mohon saran bersifat membangun demi menyempurnaan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali pada Tahun-tahun berikutnya. Kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali sekarang dan pada masa-masa yang akan datang

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segaya upaya kita dalam mengabdi bagi kepenting masyarakat, bangsa dan Negara.

DAFTAR ISI

	PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	iii
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II.	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	18
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
	3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	32
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	32
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
	4.1 Program dan Kegiatan	34
BAB V.	PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, kecamatan nogosari memiliki komitmen untuk dapat menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik. Komitmen tersebut diwujudkan dengan disusunnnya Renja Kecamatan Nogosari yang merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali dan Renstra Kecamatan Nogosari tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Nogosari yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun kedepan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renja Kecamatan Nogosari berisi tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Kecamatan Nogosari . Renja berhubungan dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renja dimulai dengan persiapan penyusunan Renja dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan Kecamatan Nogosari untuk menentukan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Nogosari sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan atas hasil review hasil evaluasi Renja Kecamatan Nogosari pada tahun sebelumnya berdasarkan Renstra yang mengacu pada penelaahan rancangan awal RKPD.

Renja dengan dokumene RKPD dan Renstra merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD dan RPJMD bagi RKA OPD, KUA, PPAS dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 4);

21) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
22) Rencana Strategis Kecamatan Nogosari Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Nogosari disusun dengan maksud memberikan arah, kebijakan program serta prioritas kegiatan sebagai landasan kebijakan operasional Kecamatan Nogosari tahun 2024. Renja Kecamatan Nogosari disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman agar program dan prioritas kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih terarah sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Nogosari yang telah di tetapkan sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Nogosari disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN NOGOSARI TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Nogosari Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Nogosari
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Nogosari
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Nogosari

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NOGOSARI

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

KECAMATAN NOGOSARI TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Nogosari Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Nogosari Tahun 2021 – 2026

Dalam menyusun Renja Kecamatan Nogosari Tahun 2024 diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Nogosari tahun 2022 terhadap capaian Renstra Kecamatan Nogosari Tahun 2021 – 2026 serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan proyeksi sampai tahun 2022 terhadap target tahun 2022 dan target akhir Renstra tahun 2021 – 2026.

Pada tahun 2022 Program / Kegiatan Kecamatan Nogosari telah terealisasi sepenuhnya. Dari beberapa Program/Kegiatan yang sudah direncanakan pada tahun 2022 terdapat beberapa Program/Kegiatan yang sudah mencapai target, namun masih terdapat beberapa Program/Kegiatan yang belum dapat memenuhi target yang ditetapka sebelumnya.

- Program dan Kegiatan Kecamatan Nogosari yang belum dapat memenuhi target yang ditetapkan antara lain :
  - Program Penunjang urusan pemerintahan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
    - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealiasi sebesar Rp. 29.408.681,00 atau 87,13 % dari anggaran sebesar Rp. 31.459.000,00
- Program dan Kegiatan di Kecamatan Nogosari yang telah Memenuhi target yang ditetapkan antara lain :
  - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp. 2.244.421.440,00 atau 99,93 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.245.993.000,00.
    - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terealisasi sebesar Rp. 75.600.000,00 atau 100,00 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 75.600.000,00.

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,00 atau 100,00 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,00.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp. 5.999.100,00 atau 99,99 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,00.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasi sebesar Rp. 39.997.550,00 atau 99,99 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 40.000.000,00.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan terealisasi sebesar Rp. 14.999.400,00 atau 99,99 % dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp. 15.000.000,00.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material terealisasi sebesar Rp. 16.223.150,00 atau 99,99 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 16.225.000,00.
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu terealisasi sebesar Rp. 85.833.750,00 atau 99,81% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 86.000.000,00.
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi sebesar Rp. 24.994.303,00 atau 99,98 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000,00.
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya terealisasi sebesar Rp. 34.675.000,00 atau 99,50 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 34.850.000,00.
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,00 atau 100,00 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,00.

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terealisasi sebesar Rp. 19.066.600,00 atau 95,33 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,00.
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya terealisasi sebesar Rp. 8.000.000,00 atau 100,00 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,00.
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gendung Kantor dan Bangunan Lainnya terealisasi sebesar Rp. 49.650.000,00 atau 99,30 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,00.
- Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
  - Sub Kegiatan Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum terealisasi sebesar Rp. 99.475.000,00 atau 99, 48 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,00.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat terealisasi Rp. 24.905.000,00 atau 99,62 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000,00.
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan terealisasi Rp. 31.066.550,00 atau 99,57 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 31.200.000,00.

- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
  - Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terealiasai sebesar Rp. 39.150.000,00 atau 97,88 % dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp. 40.000.000,00.
  - Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional terealisasi sebesar Rp. 63.300.000,00 atau 98,91 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 64.000.000,00.

➢ Program Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan di Kecamatan Nogosari yaitu :

- Tidak terdapat program kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Nogosari pada tahun 2022 berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Akan tetapi terdapat satu program kegaiatan yang tidak mencapai target yang telah di tetapkan. Adapun faktor – faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target realisasi yang ditetapkan antara lain :

a. Penambahan Tegangan Listrik di kecamatan yang dibarengi dengan naiknya tarif dasar listrik dari penyedia listrik yang pemasangannya di lakukan pada akhir tahun sehingga dalam perencanaanya dilakukan secara hati – hati untuk menghindari tagihan tidak terbayar, tetapi ternyata tagihan yang muncul lebih sedikit dari perkiraan yang menyebabkan terdapatnya sisa anggaran yang cukup banyak.
b. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun RPJMD dalam melaksanakan kegiatan.

c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan

Upaya dalam Mengatasi kendala dalam pencapaian target perencanaan dilakukan dengan :

1. Pengambilan keputusan secara cepat dan proporsional sesuai dengan kewenangan Kecamatan untuk mengatasi permasalahan yang timbul tanpa harus selalu melibatkan Kabupaten.
2. Adanya identifikasi setiap permasalahan yang timbul dan pemilihan tindakan penyelesaian yang sesuai
3. Meningkatkan kerjasama antar lini baik Instansi Pemerintah di tingkat Kecamatan maupun desa serta dengan lembaga lain
4. Meningkatkan pengelolaan admistrasi di kecamatan
5. Adanya evaluasi yang rutin terhadap capaian target
6. Meningkatkan komitmen dari seluruh pelaksana untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan dengan baik

Selain faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian target, terdapat pula beberapa faktor yang mendukung tercapainya target kinerja yang telah di tetapkan di Kecamatan Nogosari Pada Tahun 2021 antara lain :

1) Tingginya komitmen dari aparatur pemerintahan baik desa dan kecamatan dala melaksanakan program kegiatan yang sudah ditetapkan.
2) Kerjasama yang baik dari unsur pemerintahan di kecamatan baik dari kecamatan maupun unsur lain seperti desa dan UPT yang ada di kecamatan

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Nogosari

Lembar : .....

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7				Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang									
7	01			Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan									
7	**01**	**10**	**01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu yang diperlukan dalam penyediaan gaji ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99, 93	12 Bulan	12 Bulan	100
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga yang di perlukan dalam administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu yang diperlukan dalam Penyediaan Instalasi Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah waktu yang diperlukan dalam Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,99	12 Bulan	12 Bulan	100

				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu yang diperlukan dalam penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,99	12 Bulan	12 Bulan	100
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu yang diperlukan dalam menyediakan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah waktu yang diperlukan dala menyediakan bahan / material	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,99	12 Bulan	12 Bulan	100
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu yang diperlukan dalam memfasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,81	12 Bulan	12 Bulan	100
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu yang diperlukan untuk fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,91	12 Bulan	12 Bulan	100
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu yang diperlukan dalam penyedian peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,50	12 Bulan	12 Bulan	100
				Kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu yang diperlukan dalam menyediakan surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100
				Kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemeritnah daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu yang diperlukan dalam menyediakan jas komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	87,13	12 Bulan	12 Bulan	100
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Waktu yang diperlukan dalam Pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	95,33	1 Paket	1 Paket	100
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu yang diperlukan dalam Pemeliharaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100

				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
				Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu yang dibutuhkan dala pemeliharaan bangunan gedung	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	99,30	1 Paket	1 Paket	100
7	**01**	**10**	**04**	**Program Administrasi Pemerintah Desa**									
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah waktu yang diperlukan dalam pengawasan dan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
7	**01**	**10**	**02**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**									
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah waktu yang diperlukan dalam koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,48	12 Bulan	12 Bulan	100
7	**01**	**10**	**03**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**									
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang dibutuhkan dalam Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	99,62	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
7	**01**	**10**	**05**	**Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum**									
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah waktu yang diperlukan dala penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	98,91	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Nogosari

Berdasarkan fungsinya Kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan atau kelurahan.
2. Pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pengordinasian, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan

Dalam melaksanakan fungsi – fungsi tersebut terdapat indikator yang menjadi target sasaran Kecamatan Nogosari antara lain :

a. Persentase Desa yang tertib administrasi dapat terealisasi sebesar 100 %
b. Tingkat Ketepatan Pengisian Kades/Perangkat Desa dapat terealisasi sebesar 100 %.
c. Capaian pembayaran PBB dapat Terealisasi 86,5 %.
d. Nilai Survey Kepuasan Masyarakatan dapat terealisasi sebesar 81.
e. Jumlah rakor Muspika terealisasi 12 kali
f. Capaian monitoring dan evaluasi tentang pembangunan terealisasi 100 %.
g. Cakupan PKK desa yang dibina mencapai 100 %
h. Cakupan pemeliharaan jalan terealiasasi sebesar 100 %
i. Jumlah Dokumen Skala Prioritas pembangunan dapat terealisasai sebesar 1 dokumen.

T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Nogosari
Kabupaten Boyolali

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	**Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	Terlaksananya pengiriman surat dinas			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
3	Tersedianya listrik dan internet			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
4	Terbayarnya pajak kendaraan dinas			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
5	Terlaksananya kebersihan kantor			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
6	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
7	Tersedianya alat tulis kantor			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
8	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
9	Tersedianya komponen listrik			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
10	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	4 unit	0 unit	0 unit	
11	Tersedianya bahan bacaan surat kabar			12 bln	0	0	0	12 bln	0	0	0	
12	Tersedianya bahan bakar bagi kendaraan dinas			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
13	Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	

14	Terlaksananya keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
15	Terlaksananya kebersihan kantor			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
16	**Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
17	Terlaksananya pembangunan rumah dinas											
18	Terlaksananya penataan lingkungan kantor			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
19	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor			12 bulan	12 bulan	12 bln	12 bln	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
20	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas			12 bulan	12 bulan	12 bln	12 bln	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
21	**Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah**			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
22	Tersusunnya dokumen LKjIP			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
23	Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
24	**Cakupan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan**			**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	
25	Terlaksananya kegiatan patroli wilayah			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
26												
27	**Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, sosial, keuangan dan olah raga**			**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	
28	Terlaksananya fasilitasi kegiatan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan			13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	
29	Terlaksananya fasilitasi kegiatan olah raga			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	0 Keg	0 keg	1 keg	1 keg	
30	**Terlaksananya Rakor Muspika/ Perangkat Desa**			**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	
31	Terlaksananya rakor muspika			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	

32	**Cakupan fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan/ Kelurahan**			**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**0 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	
33	Terlaksananya kegiatan memperingati HUT RI dan hari besar lainnya			2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	0 keg	2 keg	2 keg	2 keg	
34	Terlaksananya kegiatan keagamaan			1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	0 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	
35	**Terlaksananya pengisian perangkat desa/ kelurahan**			**13 desa**	**13 desa**	**13 desa**	**13 desa**	**13 desa**	**13 desa**	**13 desa**	**13 desa**	
36	Terlaksananya monitoring pengisian perangkat desa			13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	
	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan			**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	
37	Terlaksananya rakor organisasi perempuan			12 bulan	12 bulan	2 keg	2 keg	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
38	**Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan desa/ kelurahan**			**13 desa**	**13 desa**	**13 desa**	**13 desa**	**13 desa**	**13 desa**	**13 desa**	**13 desa**	
39	Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa			13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	
40	Terlaksananya pembinaan administrasi desa			13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	
	Terlaksananya evaluasi penyusunan APB Desa			13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	
	Terlaksananya implementasi undang-undang desa			13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	
	Tersusunnya dokumen evaluasi kegiatan di kecamatan			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Tersusunnya dokumen laporan evaluasi RKPDes			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dok	0 dok	0 dok	0 dok	
	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
	Tersusunnya DSP usulan kegiatan kecamatan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Terlaksanaya fungsi layanan di Kecamatan			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Terlaksananya fungsi layanan di kecamatan			12 bulan	12 bulan	2 keg	2 keg	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	

2.3. Isu – isu Penting Pengelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Nogosari

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan kecamatan Nogosari tahun 2022, terdapat beberapa indikator yang sudah memenuhi target namun masih ada yang belum memenuhi target. Maka dapat dirumuskan beberapa isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan nogosari sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja Kecamatan Nogosari dari 12 Indikator utama yang telah ditetapkan terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 % yaitu :
   a. Indikator Capaian Pembayaran PBB hanya tercapai 85 %
      Hal ini dikarenakan dalam kondisi pandemi yang masih terjadi di tahun 2022 penghasilan masyarakat lebih banyak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari – hari, serta problem klasik dari kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat yang bukan warga nogosari sehingga menyulitkan dalam melakukan pemantauan pembayaran PBBnya.
2. Hambatan yang di alami dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan nogosari antara lain :
   a. Pandemi covid 19 yang masih terjadi di tahun 2022 membuat banyak kegiatan hari besar belum dapat dilaksanakan dengan meriah dengan menghadirkan banyak orang.
   b. Belum optimalnya perbaikan infrastruktur jalan yang ada di kecamatan dikarenakan anggaran yang di alokasikan dirasa masih terlalu sedikit dibandingkan dengan panjang kerusakan ruas jalan yang terjadi.
   c. Banyaknya kepemilikan tanah di kecamatan nogosari yang dimiliki oleh masyarakat yang tidak bertempat tinggal di kecamatan nogosari sehingga menimbulkan kesulitan dalam pemantauan pembayaran PBBnya.
   d. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Dampak dari permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan nogosari terhadap pelaksanan Misi dan Visi Bupati.
   Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2021 – 2026, menetapkan Visi Kabupaten Boyolali yaitu : “**Boyolali Maju Meneruskan Pro Investasi” Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL).** Sebagai upaya dalam menggapai Visi tersebut ditetapkan kedalam 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Boyolali sebagai berikut :
      a. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan.
      b. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.

c. Boyolali Kota Susu dan Lumbung Pangan Nasional
d. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
e. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mardiri dan Berdaya Saing.

Kecamatan Nogosari memiliki tugas pokok " Membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman, ketertiban, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Boyolali , Kecamatan Nogosari Memiliki tugas pokok dalam melaksanakan Misi keempat yaitu : Boyolali Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan pelayanan di Kecamatan Nogosari adalah dengan peningkatan pelayanan publik yang meliputi :

- Peningkatan pemerintahan yang efektif, efisien yang ditandai dengan reformasi birokrasi yang membuat pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, akurat dan murah.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan perekonomian masyarakat dan penyediaan insfrastruktur yang memadai.
- Peningkatan pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang ditandai dengan kepastian dan kemudahan masyarakat dalam mengakses inforasi dan program/kegiatan untuk masyarakat.
- Peningkatan sistem pengendalian keamanan lingkungan secara sinergis antara pemerintah dan masyarakat.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Beberapa kegaitan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sebagian besar dilaksanakan kembali di tahun berikutnya. Hal ini menandakan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan merupakan program kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Nogosari tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan antara Rancangan awal tidak terdapat perbedaan. Hasil analisisnya dapat dilihat pada Tabel C. 31 berikut :

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Nogosari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu**	**87**	**100.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu**	**86**	**100.000.000**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Nogosari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	-	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Nogosari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan		

7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Nogosari	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Kegiatan	-	Penyelenggaraan urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Nogosari	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Kegiatan	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Nogosari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Kegiatan	100.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Nogosari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Kegiatan	100.000.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	100.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	100.000.000	

07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**25.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**25.000.000**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Nogosari	Jumlah sarana dan prasarana pendukung ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	1 Kegiatan	25.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Nogosari	Jumlah sarana dan prasarana pendukung ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	1 Kegiatan	25.000.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	25.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	25.000.000	
07:01:05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**70.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**70.000.000**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
7.01.05.2.01.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Nogosari	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	70.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Nogosari	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	70.000.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Kecamatan Nogosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	400 Orang	50.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Kecamatan Nogosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	400 Orang	50.000.000	

	Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Nogosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Nogosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	20.000.000	
07:01:03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**		
	Kegiatan					**Kegiatan**					
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Nogosari	Jumlah usulan hasil Musdes yang di ferifikasi	2 Kegiatan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Nogosari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Kegiatan		
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					

7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Nogosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Nogosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	-	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	150.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	150.000.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti**	**100**	**-**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti**	**100**	**-**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Nogosari	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Sub Kegiatan	-	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Nogosari	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Sub Kegiatan	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 Dokumen	-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 Dokumen	-	

		Kecamatan Nogosari	**Nilai SAKIP Kecamatan Nogosari**	**78,55**			Kecamatan Nogosari	**Nilai SAKIP Kecamatan Nogosari**	**78,55**		
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	**100**	**2.674.451.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	**100**	**2.674.451.000**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
X.XX.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Nogosari	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Kegiatan	2.421.551.000	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kecamatan Nogosari	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Kegiatan	2.421.551.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Nogosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2.351.351.000	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Nogosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2.351.351.000	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	70.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	70.200.000	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	

X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	-	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		
	Kegiatan					**Kegiatan**					
X.XX.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Nogosari	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Sub Kegiatan	130.000.000	Administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Nogosari	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Sub Kegiatan	130.000.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Nogosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Nogosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.000.000	

X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Nogosari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Nogosari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Nogosari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Nogosari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6.000.000	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Nogosari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Nogosari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Nogosari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Nogosari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	-	
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Nogosari	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Nogosari	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	62.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	62.000.000	
X.XX.01.2.06.10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	10.000.000	
X.XX.01.2.06.11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 Dokumen		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 Dokumen		

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Kegiatan					**Kegiatan**					
X.XX.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kecamatan Nogosari	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Sub Kegiatan	34.900.000	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kecamatan Nogosari	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	34.900.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.000.000	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		
	kegiatan					**kegiatan**					
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Nogosari	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	68.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Nogosari	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	68.000.000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Nogosari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	10 Unit	14.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Kecamatan Nogosari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	10 Unit	14.000.000	

			dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Nogosari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	4.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Nogosari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	4.000.000	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Nogosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Nogosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
X.XX.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	25	-	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	25	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	-	

			Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	-	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Nogosari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	-	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Nogosari sebagai perangkat daerah yang melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat, selain memenuhi kebutuhan kantor, Kecamatan Nogosari juga menjaring usulan dari masyarakat Nogosari sebagai pemangku kepentingan.

Usulan tersebut berasal dari hasil musrenbang kecamatan yang usulan sebelumnya sudah dibahas dalam Musrenbang desa maupun Musrenbang Dusun. Usulan tersebut disesuaikan dan dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta visi dan misi pembangunan daerah yang sudah ditetapkan. Usulan program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel C. 32 berikut :

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2023

No	Urusan	Program	Nama Pekerjaan/Kegiatan	Lokasi
1	2	3	4	5
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Jalan Tegalgiri - Kepoh	Tegalgiri
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Jalan Ngangkruk – Demangan (Desa Bendo)	Bendo
3	Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penerangan Jalan Simo– Kalioso (Desa Ketitang), Penerangan Jalan Demangan – Ngangkruk (Bendo)	Ketitang, Bendo
4	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Jaringan Air Minum Perdesaan	Guli
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh	Potronayan, Jeron,Rembun, Tegalgiri, Guli,Bendo, Ketitang,Kenteng, Sembungan
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Pemeliharaan Jalan Glonggong – Sempu	Glonggong
7	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Pemeliharaan Jalan Temon – Kacangan (Desa Pojok)	Pojok

No	Urusan	Program	Nama Pekerjaan/Kegiatan	Lokasi
1	2	3	4	5
8	Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Tempat Sampah Terpilah dan alat angkut sampah	Sembungan,Guli, Ketitang, Rembun, Jeron
9	Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Cultivator	Kenteng, Keyongan, Bendo,
10	Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pemberian Bantuan Bibit Tanaman (padi, bawang merah, pajale, mete, kencur, kelapa genjah)	Bendo, Guli, Tegalgiri, Keyongan, Pulutan
11	Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Bibit Ternak Kambing	Ketitang, Guli, Pulutan
12	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan alat bantu Kaum difabel (kursi roda, krek dll)	3 desa
13	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Bantuan modal usaha KUBE	Bendo, Gul, Pulutan
14	Pangan	Program peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeka ragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (pertanian organik)	Guli
15	Kepemudaan dan Olah raga	Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Belanja Peralatan Olah raga yang diserahkan kepada mayarakat	Pulutan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah perlu memperhatikan kebijakan – kebijakan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Arah kebijakan nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nogosari yaitu : Mereformasi Birokrasi agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mengubah mindset kecepatan melayani, Kecepatan Memberi Izin.

Dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Nogosari mendukung kebijakan nasional dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan Nogosari dan peningkatan kualitas aparaturnya seperti administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perizinan dan surat keterangan lain.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan perangkat daerah merupakan pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dengan melaksanakan misi dan memecahkan permasalahan serta menangani isu – isu strategis yang muncul.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Adapun rincian sasaran tersebut sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas, anti KKN, responsif dan akuntabel, dijabarkan dengan sasaran sebagai berikut :
    - Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
    - Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel
- Tujuan 2. : Mewujudkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial, dijabarkan dengan sasaran sebagai berikut :
    - Terwujudnya masyarakat yang tertib dan aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial.
- Tujuan 3. : Meningkatkan kualitas pembangunan manusia mendukung prorduktivitas dan daya saing daerah, dijabarkan dengan sasaran sebagai berikut :

- Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat

- Tujuan 4. : Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk daya saing dan kesejahteraan daerah, dijabarkan dengan strategi sebagai berikut :
  - Terpenuhinya infrastruktur dasar.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Nogosari yang disusun dalam Rencana Kerja Kecamatan Nogosari tahun 2023 merupakan upaya dari perangkat daerah dalam mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Boyolali. Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, penjabaran program dan kegiatan kecamatan nogosari dapat di uraikan sebagai berikut :

- Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain :
  - Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
  - Pencapaian MDGS
  - Pengentasan Kemiskinan
  - Pencapaian SPM
  - Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah
  - Peningkatan Pelayanan Publik
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi :
  - Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

    Rencana Program Kecamatan Nogosari pada Tahun 2024 terdiri dari 5 Program yaitu :

    1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
    3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
    5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

    Sedangkan untuk Kegiatan Kecamatan Nogosari tahun 2023 merencanakan akan melaksanakan 9 Kegiatan Antara Lain ;

    1. Administrasi Keuangan Daerah
    2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
6. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7. Pembayaran Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
8. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Total Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Sebesar Rp. 2.999.451.000

- Tabel Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Nogosari tahun 2024 terlampir dalam Tabel T.C 33 berikut :

Tabel T-C.33
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN NOGOSARI KAB. BOYOLALI
TAHUN 2024

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KECAMATAN NOGOSARI						**2.999.451.000,00**							**2.999.451.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.999.451.000,00**							**2.999.451.000,00**	
7,01	**KECAMATAN**						**345.000.000,00**							**345.000.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**		**-**	**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Dokumen	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Dokumen	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	15 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	15 Laporan	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	4 Laporan	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7,01	**KECAMATAN**						**2.654.451.000,00**							**2.654.451.000,00**	

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2.421.551.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	ASN, PTT dan TKHL Kecamatan Nogosari	20 Orang/bulan	2.421.551.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.351.351.000,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	ASN, PTT dan TKHL Kecamatan Nogosari	20 Orang/bulan	2.351.351.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	70.200.000,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	ASN, PTT dan TKHL Kecamatan Nogosari	12 Dokumen	70.200.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7,01	**KECAMATAN**						**345.000.000,00**							**345.000.000,00**	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Laporan	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	18 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	18 Laporan	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	3 Laporan	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	3 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas	-	3 Laporan	0,00	KECAMATAN NOGOSARI

											berkarakter dan berbudaya				
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	13 Dokumen	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	13 Dokumen	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7,01	**KECAMATAN**						**2.654.451.000,00**							**2.654.451.000,00**	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	11 Kegiatan		11 Kegiatan	11 Kegiatan	130.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kegiatan Operasiona l Kecamatan	1 Paket	130.000.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	2.000.000,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kegiatan Operasiona l Kecamatan	1 Paket	2.000.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7,01	**KECAMATAN**						**345.000.000,00**							**345.000.000,00**	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	4 Paket	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7,01	**KECAMATAN**						**2.654.451.000,00**							**2.654.451.000,00**	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	6.000.000,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kegiatan Operasiona l Kecamatan	1 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	25.000.000,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kegiatan Operasiona l Kecamatan	1 Paket	25.000.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket	10.000.000,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kegiatan Operasiona l Kecamatan	4 Paket	10.000.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material														
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket	15.000.000,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kegiatan Operasiona l Kecamatan	4 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Laporan	4 Laporan	62.000.000,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kegiatan Operasiona l Kecamatan	4 Laporan	62.000.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kegiatan Operasiona l Kecamatan	1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN NOGOSARI

7,01	**KECAMATAN**						**345.000.000,00**							**345.000.000,00**	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	13 Dokumen	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	13 Dokumen	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7,01	**KECAMATAN**						**2.654.451.000,00**							**2.654.451.000,00**	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	34.900.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kegiatan Operasiona l Kecamatan	1 Laporan	34.900.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	1 Laporan	900.000,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kegiatan Operasiona l Kecamatan	1 Laporan	900.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	1 Laporan	34.000.000,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kegiatan Operasiona l Kecamatan	1 Laporan	34.000.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7,01	**KECAMATAN**						**345.000.000,00**							**345.000.000,00**	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	4 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	4 Laporan	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7,01	**KECAMATAN**						**2.654.451.000,00**							**2.654.451.000,00**	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-					68.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kegiatan Operasiona l Kecamatan	10 Unit	68.000.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	10 Unit	14.000.000,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kegiatan Operasiona l Kecamatan	10 Unit	14.000.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	14 Unit	4.000.000,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kegiatan Operasiona l Kecamatan	14 Unit	4.000.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	50.000.000,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Kegiatan Operasiona l Kecamatan	1 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7,01	**KECAMATAN**						**345.000.000,00**							**345.000.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**		**-**	**-**	**100.000.000,00**						**-**	**100.000.000,00**	

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		-	-	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	13 Laporan	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		Laporan	13 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	13 Laporan	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		Dokumen	39 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	39 Dokumen	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-		-	-	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Laporan	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	2 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	2 Laporan	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*[deleted] Jumlah Sarana dan Prasarana Umum dalam Kondisi Baik*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Pengguna Fasilitas Umum	2 Dokumen	100.000.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														

		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Pengguna Fasilitas Umum	2 Dokumen	100.000.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti***	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**150.000.000,00**						**100 Persen**	**150.000.000,00**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	150.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Umum dan Kelompok TP PKK Se Kecamatan Nogosari	6 Lembaga K emasyarakat an	150.000.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Ke masyarakat a n		Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga K emasyarakat an	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Umum dan Kelompok TP PKK Se Kecamatan Nogosari	6 Lembaga K emasyarakat an	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	13 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Umum dan Kelompok TP PKK Se Kecamatan Nogosari	13 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti***	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**25.000.000,00**						**100 Persen**	**25.000.000,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	-	25.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat at Umum dan TNI POLRI	13 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	13 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Umum dan TNI POLRI	13 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti***	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**70.000.000,00**						**100 Persen**	**70.000.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	70.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Umum dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	400 Orang	70.000.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang		Orang	400 Orang	50.000.000,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Umum dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	400 Orang	50.000.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang		Orang	100 Orang	20.000.000,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Masyarakat Umum dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	100 Orang	20.000.000,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**		**-**	**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-		-	-	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas	-	8 Dokumen	0,00	KECAMATAN NOGOSARI

											berkarakter dan berbudaya				
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	8 Dokumen	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		Dokumen	26 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	26 Dokumen	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	13 Dokumen	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
X	**-**						**0,00**							**0,00**	
X.XX	**-**						**0,00**							**0,00**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar***	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**0,00**						**100 Persen**	**0,00**	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	11 Kegiatan		11 Kegiatan	11 Kegiatan	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	4 Dokumen	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Nogosari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Pemantapa n tata kelola pem erintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	-	4 Dokumen	0,00	KECAMATAN NOGOSARI
J U M L A H							**2.999.451.000,00**							**2.999.451.000,00**	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Nogosari tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Nogosari Tahun 2021 – 2026. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan teknis tahunan bagi Perangkat Daerah yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Renja sebagai dokumen perencanaan memuat program dan kegiatan priritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berfikir sistematik, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Dalam rangka penyusunan serta penetapan program dan kegaitan pembangunan di dalam Renja Kecamatan Nogosari tahun 2024 bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2021 – 2026 dalam pelaksanaanya diperlukan prinsip tentang efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Adapun kaidah – kaidah dalam pelaksanaan yang dapat ditempuh dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Nogosari tahun 2024 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang;
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil – hasil pembangunan yang telah dilaksanakan;
3. Rencana Kerja Kecamatan Nogosari tahun 2023 masih belum sempurna sesuai dengan yang diamanatkan di dalam permendagri No. 58 tahun 2022 karuna aturan tata cara penyusunan Renja belum sepenuhnya dipahami;
4. Rencana Kerja Kecamatan Nogosari tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun bersumber dari APBN;

5. Rencana Kerja Kecamatan Nogosari tahun 2024 dalam proses penyusunannya harus memperhatikan dokumen – dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN,RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten Boyolali serta Renstra Kecamatan Nogosari tahun 2021 – 2026;
6. Renja Kecamatan Nogosari Tahun 2023 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupaun didalam kebijakan tersebut dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.

Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, makan diperlukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan;
2. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan;
3. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;
4. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kualitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai dapat berimbang;
5. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna;
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud;

7. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan;
8. Merancang sebuah sistem perencanaan melalui sistem e planning untuk menjaga konsistensi perencanaan dari perencanaan sampai dengan penganggaran sehingga mempercepat waktu penyusunan dokumen perencanaan serta pelaporannya.

PP. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

KECAMATAN ANDONG

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah Nya, sehingga Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali selaku salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD) yang merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung dan mewujudkan capaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Penyusun berharap bahwa demi sempurnanya penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Juwangi ini, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat kami harapkan dan kami hargai sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan di masa-masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

	PENGANTAR	2
	DAFTAR ISI	3
BAB I.	PENDAHULUAN	4
	1.1 Latar Belakang	4
	1.2 Landasan Hukum	6
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
	1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
	2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
	3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
	4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	25
	5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	37
	1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	37
	2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	37
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
	4.1 Program dan Kegiatan	40
BAB V.	PENUTUP	49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah selama periode 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah selama periode 5 (lima) tahun. Tata cara / proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) terdiri dari :

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pen danaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. e

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan

alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota menjadi Rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan : a) rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; b) hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah meliputi kebijakan program strategis nasional (PSN), amanat pembangunan global dan nasional, dan dinamika pembangunan nasional lainnya. Selain itu juga kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 tetap memperhatikan keberlanjutan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian, sosial dan Kesehatan, serta dukungan terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) sebagai prioritas dalam penanggulangan kemiskinan. Disamping itu RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 meliputi:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan eksterm (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Andong adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yng dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Rencana Strategis Kecamatan Andong Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Andong 2024 adalah untuk memberikan Landasan Kebijakan Teknis Tahunan dalam Kerangka Pencapaian Visi Misi setiap tahapnya (satu tahunan) dan sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Camat pada Akhir Tahun Anggaran sebagai bagian dari pelaksanaan Kebijakan Daerah. Renja Tahun 2024 Kecamatan Andong disusun sebagai acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Andong Tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2024 Kecamatan Andong adalah adalah menetapkan prioritas Program dan Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan sesuai Rencana Strategis yang dilaksanakan per tahap (tahunan) melalui sumber pembiayaan APBD dan menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Andong Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Andong Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Andong , terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan
BAB V. PENUTUP
LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Revieu hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dan realisasi Renstra Kecamatan Andong yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Andong dan/atau realisasi APBD Kecamatan Andong . Adapun hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 untuk Kecamatan Andong sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/keluaran yang telah direncanakan yaitu:
   a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
   b. Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   g. Penyediaan Bahan/Material
   h. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   j. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

k. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
l. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
n. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
o. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
p. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
q. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
r. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
s. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
t. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan untuk Kecamatan Andong tidak ada.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
   a. Terbatasnya pendanaan
   b. Kelompok sasaran belum terjangkau program/kegiatan seluruhnya
   c. Kurangnya informasi kegiatan dari Instansi setingkat kecamatan (UPT) dan kejadian di masyarakat
   d. Adanya situasi Pandemi Covid 19 (PPKM), yang menyebabkan kegiatan terkendala.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah dapat memenuhi / melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, dengan demikian target capaian program Renstra PD dapat tercapai.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah

dengan meningkatkan target capaian dari tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan potensi sumber daya dan dana yang ada.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah:Kecamatan Andong Lembar :.....

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									
				Program :									
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**								
				Kegiatan:									
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, Gaji Non ASN								
				Sub Kegiatan :									
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji Non ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	-	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	-	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	18 Laporan	100%
				Kegiatan :									
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah								
				Sub Kegiatan :									
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit	3 unit	-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

				Kegiatan :								
				Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah							
				Sub Kegiatan :								
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	-	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Kegiatan :								
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah							
				Sub Kegiatan :								
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya perbaikan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Kegiatan :								
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Sub Kegiatan :								
				Pengadaan Mebel	Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%

				Kegiatan :									
				Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat								
				Sub Kegiatan :									
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	-	-	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	15 Laporan	100%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum**								
				Kegiatan :									
				Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang dilayani								
				Sub Kegiatan :									
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang diusulkan	-	-	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	100%

				Kegiatan :									
				Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di Kecamatan yang terselenggara								
				Sub Kegiatan :									
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah sosialisasi pelayanan di kecamatan			1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
				Kegiatan :									
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana umum dalam kondisi baik								
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun dan dipelihara	1 kegiatan	1 kegiatan	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									
				Kegiatan :									
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana pendukung ketentraman dan keteriban umum yang tersedia								
				Sub Kegiatan :									
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat kecamatan	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**								

				Kegiatan :									
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan hasil Musdes yang diverifikasi								
				Sub Kegiatan :									
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
				Kegiatan :									
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang laksanakan								
				Sub Kegiatan :									
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah desa yang menerima bantuan / modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan	-	-	0	-	100%	0	-	100%
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.**								
				Kegiatan :									
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								

				Sub Kegiatan :								
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti**							
				Kegiatan :								
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa							
				Sub Kegiatan :								
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pedampingan administrasi dan keuangan desa	-	-	16 Desa	16 Desa	100%	16 Desa	16 Desa	100%

Andong , 2023

CAMAT ANDONG

EDY KRISTIAWAN, AP

Pembina Tk.I

NIP.197607211995011001

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang telah disesuaikan pada Kecamatan Andong yaitu pada Tabel T-C.30 sebaga berikut :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Andong

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		NO
				Tahun 2022 (thnn-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thnn+1	Tahun 2022 (thnn-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2022 (thnn-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			82,11	82,72	83,55	83,55	82,11	82,72	83,55	82,11	
2.	Nilai SAKIP			80	80,5	81	81	80	80,5	81	80	

Pencapaian kinerja pelayanan sesuai tabel diatas sudah tergolong baik, tetapi masih perlu ditingkatkan dengan berkomitmen dan bekerjasama seluruh ASN untuk lebih meningkatkan pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Andong tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

Kecamatan Andong merupakan urusan Pemerintahan Umum, mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan.

Berdasarkan telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi terhadap Renstra Kecamatan Andong tidak dilakukan karena tidak ada keterkaitan langsung antara pelayanan atau permasalahan di tingkat kecamatan dengan permasalahan di K/L maupun PD tingkat provinsi**.**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Andong , secara umum permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Andong adalah berikut:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang meliputi;
   a. Masih perlunya penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik;
   b. Belum optimalnya pelayanan kependudukan di kecamatan.

   Dimana akar permasalah pada pelayanan publik di Kecamatan Andong yaitu:
   - Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan;
   - Belum terdistribusinya sarana dan prasarana pelayanan.
2. Belum optimalnya pengembangan potensi kewilayahan, dimana untuk Kecamatan Andong masalahnya terletak pada belum optimalnya fungsi koordinasi kewilayahan. Akar masalah belum optimalnya peran kecamatan sebagai instansi terdepan dalam menyusun peta masalah dan potensi kecamatan.

Dampak Pelayanan Kecamatan Andong terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah Visi pembangunan daerah merupakan rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih yang secara substansi memuat tentang rumusan umum mengenai keadaan yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Kondisi yang akan dicapai dalam bentuk visi, kemudian dijabarkan oleh misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.

Berbijak dari amanat dan upaya membangun sinkronisasi dengan visi pembangunan jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005 - 2025, serta dalam rangka menjawab isu strategis aktual dan menjaga keberlanjutan pembangunan, maka dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Boyolali 2021-2026 yaitu:

"Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi" Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL)

Rumusan visi tersebut memiliki muatan kondisi dan prasyarat yang akan dicapai dalam pembangunan, dengan penjabaran sebagai berikut :

Boyolali Maju berarti :

- Proses pembangunan yang berkelanjutan dan terencana sistematis diharapkan membawa kemajuan di segala bidang.
- Boyolali Maju berarti *no-one left behind,* yakni tidak ada pihak yang terlewatkan untuk merasakan kemajuan, karena semua komponen telah menjadi subyek pembangunan.
- Maju dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dan daerah yang semakin berdaya saing yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah berkualitas dan merata, serta tata Kelola pemerintahan yang semakin bersih, efektif, dan dipercaya masyarakat.

Meneruskan Pro Investasi berarti :

- Pro investasi telah menjadi arah pembangunan dan identitas Kabupaten Boyolali dengan berbagai capaian pembangunan yang telah membawa manfaat bagi masyarakat.
- Melanjutkan arah pembangunan yang pro investasi berarti tidak hanya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membangun sinergi dengan arah pembangunan nasional, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional secara sistematis dan cepat.
- Arah pro investasi membutuhkan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan, yang muaranya tetap pada kesejahteraan masyarakat Boyolali, tanpa menghadirkan ketimpangan sosial.
- Pro investasi tetap dikendalikan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yakni selain berorientasi ekonomi dan sosial, tidak kalah penting pada keberlanjutan lingkungan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta membawa manfaat pembangunan bagi generasi masa depan.

Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL) berarti :

- Pembangunan yang efektif membutuhkan prasyarat berupa sinergi dan kolaborasi seluruh komponen governance, yakni masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

- Seluruh komponen daerah diharapkan mampu melangkah dan menata bersama penuh totalitas yang merupakan implementasi dari prinsip gotong-royong.
- Gotong royong dengan menjalankan perannya masing-masing namun saling bersinergi dan berkolaborasi dalam ikatan visi pembangunan daerah maupun landasan nilai kearifan yang tertanam kuat di tengah masyarakat berupa filosofi dari Pangeran Sambernyawa "Tiji Tibeh (mati siji, mati kabeh, mukti siji mukti kabeh)".

  Visi pembangunan Boyolali dicapai dengan beberapa misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Boyolali memiliki 5 misi yang mencakup keseluruhan bidang pembangunan dengan muatan prinsip dasar dan arah pembangunan di setiap misi sebagai berikut:

Misi 1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan.

Misi 2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.

Misi 3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional, dengan

Misi 4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Misi 5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing,

dengan penjabaran sebagai berikut :

- Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- Pembangunan integritas dengan menumbuhkan karakter yang baik bagi individu maupun organisasi dalam mewujudkan tindakan maupun keputusan bagi kebaikan bersama.
- Pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance.
- Peran masyarakat yang melahirkan kontrol terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan sangat diharapkan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN. Tidak berhenti pada good and clean

governance, Boyolali berusaha menumbuhkan Smart governance, atau pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi, dengan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi-inovasi dan adaptasi teknologi yang terpadu, yang bermuara pada efektifitas, efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.

- Pemerintahan yang tertib, elok, rapi, sehat dan nyaman untuk masyarakat, dengan smart governance mendorong terwujudnya Boyolali kota cerdas/pintar, kota air, ramah lingkungan serta potensi daerah yang didorong guna kemandirian daerah dengan kinerja yang inovatif yang dapat meningkatkan daya saing daerah.

Kecamatan Andong selaku Unsur Pembantu Kepala Daerah mendukung dan mensukseskan Visi Misi pembangunan daerah yang merupakan rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Kecamatan Andong terutama memompang pelaksanaan Misi 4 Boyolali yaitu **Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya,** Hal tersebut diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra OPD 2021-2026.

Tantangan dan peluang dalam pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Andong dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan Kabupaten Boyolali mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

1. Tantangan
   - Merupakan wilayah penyangga pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali, sehingga ditutut kinerja yang lebih bila dibandingkan kecamatan lainnya;
   - Karakteristik masyarakat yang merupakan transisi dari desa ke kota yang cenderung kritis terhadap pemerintahan;
   - Aspek lingkungan sebagai penghambat perkembangan industri;
   - Banyaknya alih fungsi lahan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan.

2. Peluang
   - Dukungan Visi Bupati dalam mendukung investasi;
   - Merupakan daerah pengembangan perumahan komersial;
   - Pelayanan perijinan yang dipermudah;
   - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
   - Pengalihan pengelolaan PBB dari pusat ke daerah;
   - Besarnya lahan kawasan industri menengah bisa untuk menarik investor;
   - Akses jalan guna kelancaran pergerakan barang/jasa;
   - Dukungan dunia usaha (perusahaan/pabrik) berupa *Coorporate Social Responsibility* (CSR), karena merupakan daerah industri menengah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Andong untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Boyolali.

Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Andong tahun 2021-2026 seperti dalam tabel berikut :

Tabel. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : "BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI" Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL)			
MISI : Boyolali menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik kecamatan 2. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan 3. Peningkatan kapasitas ASN tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa 4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Peningkatan dan Pengembangan kualitas pelayanan sarana dan prasarana publik 2. Optimalisasi fungsi koordinasi kewilayahan 3. Peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran 4. Peningkatan tertib Administrasi Pemerintahan Desa
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	1. Peningkatan sistem kelembagaan berbasis kinerja	1. Peningkatan sistem administrasi umum dan kepegawaian

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Dapat ditelaah terhadap rancangan awal RKPD, sebagaimana Tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kecamatan Andong

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				**100.000.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**100.000.00**	
	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Andong	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	0	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Andong	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	0	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Andong	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Andong	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	0	
	Peningkatan Efektifikas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Andong	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	0	Peningkatan Efektifikas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Andong	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	0	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Andong	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Kegaitan	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Andong	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Kegaitan	0	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Andong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Andong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	0	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Andong	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	100.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Andong	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	100.000.000	

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Andong	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	100.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Andong	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	100.000.000	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				**25.000.000**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**25.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Andong	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 kegiatan	25.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Andong	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 kegiatan	25.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Andong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	25.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Andong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	25.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				**70.000.000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**70.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Andong	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	70.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Andong	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	70.000.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Andong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 orang	50.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Andong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 orang	50.000.000	

	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Andong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 orang	20.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Andong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 orang	20.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				**150.000.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**150.000.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Andong	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Kegiatan	150.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Andong	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Kegiatan	150.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Andong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Andong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	0	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Andong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	150.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Andong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	150.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**0**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**0**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Andong	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Andong	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	0	
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Andong	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	8 Dokumen	0	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Andong	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	8 Dokumen	0	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Andong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Andong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen	0	

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Andong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Andong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	0	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				**2.443.223.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**2.403.785.000**	
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Andong	Jumlah Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Kegiatan	0	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Andong	Jumlah Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Kegiatan	0	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Andong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Andong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Andong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Andong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Andong	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Andong	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Andong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Andong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Andong	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Andong	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Andong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Andong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Andong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Andong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Andong	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Kegiatan	2.183.003.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Andong	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Kegiatan	2.115.826.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Andong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	2.089.403.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Andong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	2.045.626.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Andong	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	93.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Andong	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	70.200.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Andong	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Andong	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Andong	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Andong	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Andong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Andong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Andong	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Andong	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Andong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Andong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Andong	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Andong	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Andong	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Kegitan	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Andong	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Kegitan	0	

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Andong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Andong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Andong	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Kegiatan	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Andong	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Kegiatan	0	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Andong	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Andong	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Andong	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Kegiatan	127.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Andong	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Kegiatan	152.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Andong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Andong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Andong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Andong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Andong	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Andong	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Andong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Andong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	50.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Andong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Andong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Andong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	15.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Andong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	15.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Andong	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	62.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Andong	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	62.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Andong	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Andong	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	10.000.000	

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Andong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Andong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	0	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Andong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 Dokumen	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Andong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 Dokumen	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Andong	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	45.220.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Andong	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	47.959.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Andong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Andong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Andong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44.320.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Andong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	47.059.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Andong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Andong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Andong	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	68.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Andong	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	68.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Andong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	14.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Andong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	14.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Andong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Andong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Andong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Andong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Andong	Terwujudnya barang milik daerah	1 Paket	20.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Andong	Terwujudnya barang milik daerah	1 Paket	20.000.000	

	Pengadaan Mebel	Andong	Terwujudnya Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor	1 Paket	20.000.000	Pengadaan Mebel	Andong	Terwujudnya Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor	1 Paket	20.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini dapat diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari PD lain yang saling berkaitan berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan (yang sebelumnya diadakan musyawarah di tingkat Dusun/lingkungan RT, RW dan kelompok-kelompok masyarakat misalnya kelompok tani, kelompok perempuan dsb. Penggalian gagasan dan menyelenggarakan musyawarah dusun (Musdus) serta rembug warga untuk menetapkan jenis dari usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan, dilanjutkan dengan Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang Kabupaten.

Usulan tersebut disesuaikan dan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD, serta visi dan misi pembangunan daerah yang sudah ditetapkan. Hasil pengerjaan/penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, dapat terlihat dalam Tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah : Kecamatan Andong

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rehab Jembatan Tempuran	Dk. Tempuran,Desa Pranggong	3,500,000,000	1 Paket	Bidang Infrastruktur
2	Rehab Jalan Kacangan - Gondangrawe	Ruas Jalan Desa Mojo - Gondangrawe	2,000,000,000	3.000 meter	Bidang Infrastruktur
3	TMMD (Jalan Tembus Tempuran - Miribosok)	Desa Pranggong	750,000,000	1.000 meter	Bidang Infrastruktur
4	Rehab Jalan Kadipaten - Pelemrejo	Ruas Jalan Desa Kadipaten - Pelemrejo	2,000,000,000	3.000 meter	Bidang Infrastruktur
5	Pelebaran Ruas Jalan Pereng - Gondangrawe	Ruas Jalan Pakel-Gondangrawe	2,000,000,000	2.000 meter	Bidang Infrastruktur

6	Rehab Jembatan Sumurtumpang	Dk. Sumur Tumpang, Desa Mojo, Jl. Mojo - Gondangrawe	1,000,000,000	1 paket	Bidang Infrastruktur
7	Drainase Jalan Pelemrejo - Kacangan	Ruas Jalan Utama Desa Pranggong, Kunti, Pelemrejo	2,000,000,000	1 paket	Bidang Infrastruktur
1	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni	Andong, Beji, Semawung, Munggur, Kadipaten, Pelemrejo, Kacangan, Pranggong, Pakang, Senggrong, Mojo, Pakel, Kedungdowo, Gondangrawe, Pakel, Sempu	2,000,000,000	160 rumah	Bidang Pemsosbud
2	Bantuan Sarana Prasarana Pos Kesehatan RT , Posbindu dan Invanometri (untuk Penanganan Stunting)	Andong, Beji, Semawung, Munggur, Kadipaten, Pelemrejo, Kacangan, Pranggong, Pakang, Senggrong, Mojo, Pakel, Kedungdowo, Gondangrawe, Pakel, Sempu	800,000,000	16 desa	Bidang Pemsosbud
3	Bantuan Tabung Oksigen dan Regulator (Perlengkapan PKD)	Andong, Beji, Semawung, Munggur, Kadipaten, Pelemrejo, Kacangan, Pranggong, Pakang, Senggrong, Mojo, Pakel, Kedungdowo, Gondangrawe, Pakel, Sempu	32,000,000	16 desa	Bidang Pemsosbud
4	Operasional PAUD	Andong, Beji, Semawung, Munggur, Kadipaten, Pelemrejo, Kacangan, Pranggong, Pakang, Senggrong, Mojo, Pakel, Kedungdowo, Gondangrawe, Pakel, Sempu	192,000,000	16 desa	Bidang Pemsosbud
5	Peralatan Kesenian (Rebana)	Andong, Beji, Semawung, Munggur, Kadipaten, Pelemrejo, Kacangan, Pranggong, Pakang, Senggrong, Mojo, Pakel, Kedungdowo, Gondangrawe, Pakel, Sempu	160,000,000	16 desa	Bidang Pemsosbud
1	Sumur Pertanian	Andong, Beji, Semawung, Munggur, Kadipaten, Pelemrejo, Kacangan, Pranggong, Pakang, Senggrong, Mojo, Pakel, Kedungdowo, Gondangrawe, Pakel, Sempu	2,575,000,000	16 desa	Bidang Perekonomian

2	Pengadaan Alsintan	Andong, Beji, Semawung, Munggur, Kadipaten, Pelemrejo, Kacangan, Pranggong, Pakang, Senggrong, Mojo, Pakel, Kedungdowo, Gondangrawe, Pakel, Sempu	1,000,000,000	16 desa	Bidang Perekonomian
3	Pengadaan Bibit Pertanian	Andong, Beji, Semawung, Munggur, Kadipaten, Pelemrejo, Kacangan, Pranggong, Pakang, Senggrong, Mojo, Pakel, Kedungdowo, Gondangrawe, Pakel, Sempu	1,600,000,000	16 desa	Bidang Perekonomian

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah meliputi kebijakan program strategis nasional (PSN), amanat pembangunan global dan nasional, dan dinamika pembangunan nasional lainnya. Selain itu juga kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 tetap memperhatikan keberlanjutan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian, sosial dan Kesehatan, serta dukungan terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) sebagai prioritas dalam penanggulangan kemiskinan. Disamping itu RKPD Tahun 2023 yang disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 meliputi:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta kemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Diskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada terlihat dalam Tabel T-C.32.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Langkah-langkah perumusan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah
2. Membandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hal evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah, apakah masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kehidupan.
3. Identifikasi Kebijakan Nasional dan terkait dengan tugas dan fungsi pokok Perangkat Daerah, misalnya dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Millenium Development Goals (MDGs)
4. Unit Perangkat Daerah Kabupaten/Kota perlu mengidentifikan kebijakan provinsi, dan
5. Merumuskan pernyataan tujuan dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebelumnya.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Kecamatan Andong sesuai Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel. Tujuan dan Sasaran Renja 2024

Kecamatan Andong

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.72
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan Ampel	80.05

Berdasarkpada tabel tujuan dan sasaran diatas rencana kerja Kecamatan Andong adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
3. Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
5. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
6. Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Perumusan Sasaran, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya;
2. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra PD, cuplik rumusan sasaran dalam Renstra PD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan;
3. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra PD), jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut;
4. Rumusan sasaran tersebut, sajikan dalam bentuk pernyataan.

Sasaran yang hendak dicapai di Kecamatan Andong adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah.

Langkah-langkah perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

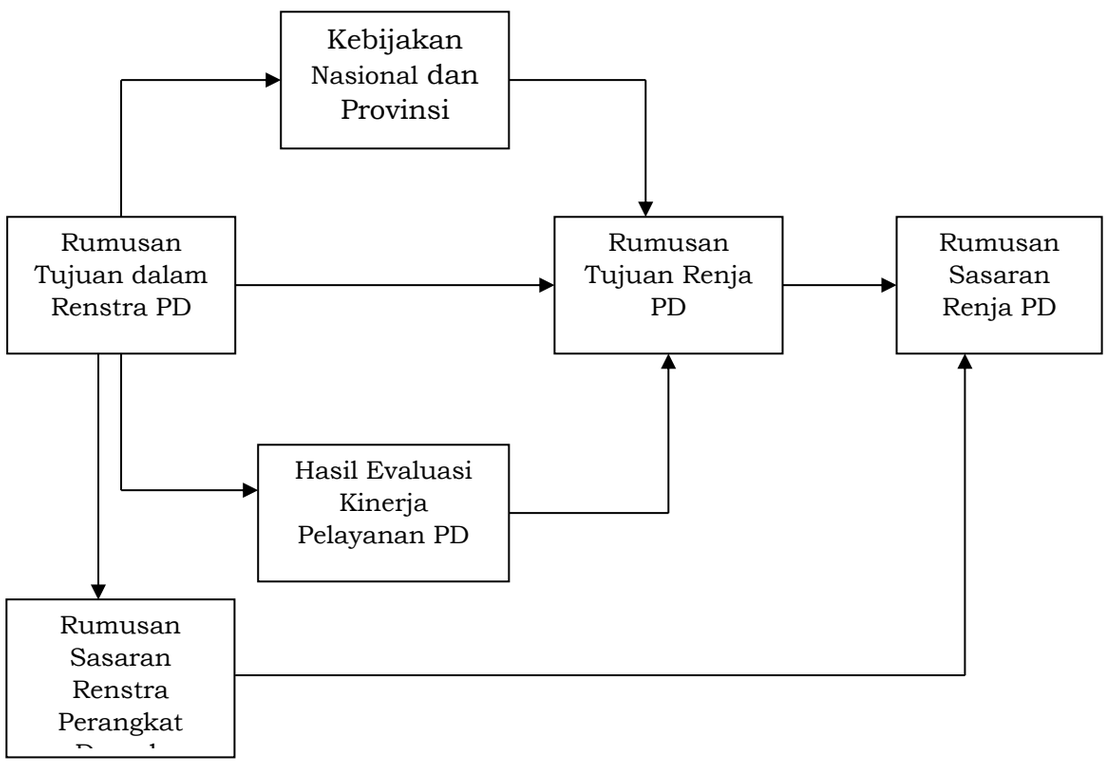

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

   Misal:

   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
   b. Pencapaian SDGs;
   c. Pengentasan kemiskinan;
   d. Pencapaian NSPK dan SPM;
   e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
   f. Pengembangan daerah terisolir; dan
   g. Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan, yaitu pada Tabel T-C.33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Andong Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Andong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**3.021.340.000**					**2.728.785.000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.696.340.000**					**2.383.785.000**
7	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.417.588.000**					**2.115.826.000**
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji PTT dan Tenaga Honorer sebanyak 3 orang	Kab. Boyolali, Andong, Semua Kelurahan	100 persen	23 Orang/bul	an1 Tahun	2.341.538.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	2.045.626.000
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase Penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji PTT dan Tenaga Honorer	Kab. Boyolali, Andong, Semua	100 persen	3 Dokumen	1 Tahun	76.050.000	Dana Transfer Umum -Dana		Prosentase Penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	70.200.000

								sebanyak 3 orang	Kelurahan					Alokasi Umum				
7	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**142.293.000**					**152.000.000**
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Kab. Boyolali, Andong, Semua Kelurahan	100 persen	1 Paket	8 kegiatan	2.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	2.000.000
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Kab. Boyolali, Andong, Semua Kelurahan	100 persen	1 Paket	8 kegiatan	3.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	3.000.000
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Kab. Boyolali, Andong, Semua Kelurahan	100 persen	1 Paket	8 kegiatan	40.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	50.000.000
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Kab. Boyolali, Andong, Semua Kelurahan	100 persen	2 Paket	8 kegiatan	10.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	10.000.000

7	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terpenuhinya Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Kab. Boyolali, Andong, Semua Keluraha n	100 persen	2 Paket	8 kegiata n	15.000.000	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	15.000.000
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Kab. Boyolali, Andong, Semua Keluraha n	100 persen	12 Laporan	8 kegiata n	63.500.000	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	62.000.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Kab. Boyolali, Andong, Semua Keluraha n	100 persen	12 Laporan	8 kegiata n	8.793.000	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	10.000.000
7	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**20.000.000**					**0**
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Boyolali, Andong, Semua Keluraha n	100 persen	3 Unit	1 Tahun	20.000.000	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum		Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	0
7	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**48.459.000**					**47.959.000**

7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai standar	Kab. Boyolali, Andong, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	12 bulan	1.950.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	900.000
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai standar	Kab. Boyolali, Andong, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	12 bulan	46.509.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	47.059.000
7	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**68.000.000**					**68.000.000**
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Barang Milik Daerah	Kab. Boyolali, Andong, Semua Kelurahan	100 persen	9 Unit	1 Paket	14.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	14.000.000
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Barang Milik Daerah	Kab. Boyolali, Andong, Semua Kelurahan	100 persen	8 Unit	1 Paket	4.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	4.000.000

7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Barang Milik Daerah	Kab. Boyolali, Andong, Semua Kelurahan	100 persen	4 Unit	1 Paket	50.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100 persen	50.000.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**100.000.000**					**100.000.000**
7	**01**	**02**	**2,03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**								**100.000.000**					**100.000.000**
7	01	02	2,03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Presentase layanan publik kecamatan tepat waktu	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Kab. Boyolali, Andong, Semua Kelurahan	86 nilai	3 Dokumen	1 unit	100.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Presentase layanan publik kecamatan tepat waktu	86 nilai	100.000.000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**105.000.000**					**150.000.000**
7	**01**	**03**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**50.000.000**					**50.000.000**

7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjutiProsentase stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan (program kemiskinan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kab. Boyolali, Andong, Semua Kelurahan	100 persen100 persen	2 Laporan	1 kegiatan	50.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjutiProsentase stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan (program kemiskinan)	100 persen100 persen	50.000.000
7	**01**	**03**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**55.000.000**					**100.000.000**
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan (program kemiskinan)	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)	Jumlah desa yang menerima bantuan / modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan	Kab. Boyolali, Andong, Semua Kelurahan	100 persen	2 kegiatan	16 desa	30.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Prosentase stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan (program kemiskinan)	100 persen	50.000.000

7	01	03	2,03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Prosentase stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan (program kemiskinan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah desa yang menerima bantuan / modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan	Kab. Boyolali, Andong, Semua Kelurahan	100 persen	2 Laporan	16 desa	25.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Prosentase stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan (program kemiskinan)	100 persen	50.000.000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**120.000.000**					**70.000.000**
7	**01**	**05**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**120.000.000**					**70.000.000**
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Prosentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan serta Jumlah kegiatan kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan	Kab. Boyolali, Andong, Semua Kelurahan	100 persen	200 Orang	4 kegiatan	50.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Prosentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 persen	50.000.000

							Kesatuan Republik Indonesia											
7	01	05	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, danGolongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Prosentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, danGolongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan serta Jumlah kegiatan kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan	Kab. Boyolali, Andong, Semua Kelurahan	100 persen	150 Orang	4 kegiatan	70.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Prosentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 persen	20.000.000
											TOTAL	**3.021.340.000**					**2.728.785.000**

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Andong yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Perumusan program dan kegiatan ini, mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai disertai dengan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Realisasi renja ini sangat tergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Sebagaimana tujuan renja ini yaitu “terarahnya program serta prioritas kegiatan tahunan dengan capaian rencana strategis Kecamatan Andong melalui pembiayaan APBD Kabupaten yang dilengkapi dengan indikator capaian sebagai tolak ukur penilaian kinerja”. Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

Demikian RENJA Kecamatan Andong 2024 disusun dan semoga bermanfaat.

QQ. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

KECAMATAN KLEGO

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Kecamatan Klego selaku salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024.

Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Mentri Dalam negri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian da Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RKPD dan RENJA SKPD, yang merupakan langkah awal yang harus dilakukan Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan dengan prinsip satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masingdaerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Oleh sebab itu, Kecamatan Klego sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah di Kabupaten Boyolali diwajibkan untuk menindaklanjuti dan melaksanakan dengan menuangkan kesinergisan tersebut dalam Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Klego.

Rencana Kerja tahun 2024 Kecamatan Klego adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebajikan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakanlangsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusun berharap bahwa demi sempurnanya penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Klego ini, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangan kami harapkan dan kami hargai sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan di masa-masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **1**
KATA PENGANTAR **2**
DAFTAR ISI **3**

BAB I PENDAHULUAN **4**
A. Latar Belakang **4**
B. Landasan Hukum **4**
C. Maksud dan Tujuan **6**
D. Sistematika Penulisan **6**

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU **7**
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD **7**
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD **13**
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD **14**
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD **16**
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyaraka **27**

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **29**
A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional **29**
B. Tujuan dan sasaran Renja SKPD **30**

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **31**
A. Program dan Kegiatan **31**
BAB V PENUTUP **38**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik. Perwujudan dari komitmen tersebut antara lain dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Klego yang merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali dan Renstra Kecamatan Klego Tahun 2022-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Klego adalah dokumen perencanaan Kecamatan Klego untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja OPD Kecamatan Klego. Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Klego Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Renvana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang di mutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 – 2031(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 140);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolai Tahun 2016 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Klego Tahun 2024 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi OPD Kecamatan Klego pada Tahun 2024

Renja OPD Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi OPD Kecamatan Klego dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2024;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur OPD Kecamatan Klego dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur OPD Kecamatan Klego untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2024.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja ini, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan
- B. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KLEGO TAHUN 2022

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Klego Tahun 2022

Realisasi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Klego Tahun 2022 telah selesai seluruhnya. Dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut, beberapa program/kegiatan telah mencapai target yang direncanakan dan ada yang belum memenuhi target.

Hasil evaluasi terhadap capaian realisasi program/kegiatan dan capaian renstra di Kecamatan Klego, sebagai berikut :

Pada tahun 2022 OPD Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun realisasi anggaran tahun 2022 yang terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan, dianggarkan sebesar Rp.2.915.992.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.852.357.106,00, dengan rincian realisasi belanja menurut program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Kegiatan Adiminstrasi Keuangan Daerah yang meliputi:
   - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp. 1.317.986.000,00 atau 97,79% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 1.288.799.745,00.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terealisasi Rp. 93.600.000,00 atau 100% dari target.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang meliputi beberapa sub kegiatan :
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, terealisasi sebesar Rp.1.955.800,00 atau 97,79 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00.
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, terealisasi sebesar Rp. 2.999.800,00 atau 99,99% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,00.
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, terealisasi sebesar Rp. 59.160.000,00 atau 99,65 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 59.367.500,00.
   - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, yang terealisasi sebesar Rp. 15.332.500,00 atau 98,08 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 15.632.500,00.
   - Penyediaan bahan/ material, yang teralisasi sebesar Rp. 14.744.600,00 atau 98,30 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00.
   - Fasilitas Kunjungan Tamu, yang terealisasi sebesar Rp. 101.662.000,00 atau 91,59 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 101.662.000,00.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, yang terealisasi sebesar Rp. 18.115.303,00 atau 90,58 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00.

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi beberapa sub kegiatan, antara lain:
   - Penyediaan jasa surat menyurat yang terealisasi sebesar Rp. 900.000,00 atau 100 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 900.000,00.
   - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terealisasi sebesar Rp. 24.097.144,00 atau 99,49 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 24.221.000,00.

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi beberapa kegiatan, antara lain:
   - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terealisasi sebesar Rp. 9.429.164,00 atau 65,03 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 14.500.000,00.
   - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang terealisasi sebesar Rp. 3.998.000,00 atau 99,95 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00
   - Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang terealisasi sebesar Rp. 49.899.000,00 atau 99,80 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00.

2. ***Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***

a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
   - Sub Kegiatan koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang terealisasi sebesar Rp. 99.668.000,00 atau 99,67 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00.

3. ***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan***

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   - Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang terealisasi sebesar Rp. 14.945.500,00 atau 99,64 % dari target yang direncanakan sebesar RP. 15.000.000,00.

b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   - Sub kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan yang terealisasi sebesar Rp. 4.995.000,00 atau 99,90 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00.

4. ***Program Penyelenggaraan Pemerintah Umum***

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
   - Sub kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD RI

1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan RI yang terealisasi Rp. 46.474.000,- atau 95,82 % dari target yang direncanakan sebesar Rp 48.500.000,-

- Sub kegiatan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional yang terealisasi Rp 65.900.000,- atau 97,63 % dari target yang direncanakan sebesar Rp 67.500.000,-

b. Belanja Hibah yang terealisasi Rp 24.500.000,- atau 98,00 % dari target yang direncanakan sebesar Rp 25.000.000,-

5 Belanja Modal

Kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi Rp 19.915.000,- atau 99,58 % dari target yang direncanakan sebesar Rp 20.000.000,-

LAMPIRAN TABEL T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah:Kecamatan Klego

Lembar :.....

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									
				Program :									
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**								
				Kegiatan:									
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	14 bulan	100%
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji Non ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	4 unit	4 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya perbaikan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	**Terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan**								
				Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kegiatan Kepemudaan	0	0	0	0	100%	0	0	100%
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum**								
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Umum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**								
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.**							
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	0	0	0	0	100%	0	0	100%
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Terlaksananya Rakor Muspika/ Perangkat Kelurahan**							
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	0	0	0	100%	0	0	100%

Klego, 2023
CAMAT KLEGO

MULYANTO, S. Sos,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19710606 199603 1 002

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

SKPD dalam menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan adalah dengan cara menganalisis terhadap indikator input, output dan outcome SKPD Kecamatan Klego. Selanjutnya hasil analisisnya tersebut dapat dipadukan dan disajikan pada **Tabel T-C.30**

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		NO
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			85	86	87	88	84,89	84,89	87	84,89	
2.	Nilai SAKIP			80.99	81.7	81,95	82,2	81,40	81,40	81,95	81,40	

Klego, 2023
CAMAT KLEGO

MULYANTO, S. Sos,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19710606 199603 1 002

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan hasil analisa kinerja pelayanan SKPD dalam hal ini Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD :
   a. Pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan tata laksana dalam mendukung kelancaran SKPD Kecamatan Klego dalam memfasilitasi pelayanan terhadap masyarakat yang setiap tahunnya semakin berkembang;
   b. Pembangunan yang berwawasan lingkungan (sesuai dengan RT RW dan KLHS yang ditentukan dari K/L dan Provinsi, maupun RT RW Kabupaten);
   c. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, keluarga berencana, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kepramukaan, keolahragaan, kesenian dan kebudayaan (sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, yang terakomodir dalam perencanaan di tingkat Kecamatan);
   d. Meningkatkan industri/kerajinan masyarakat (sesuai dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat);
   e. Tertib administrasi kelembagaan dan keuangan pemerintahan desa/kecamatan (sesuai dengan arahan dan Peraturan perundang-undangan);
   f. Penigkatan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan, dengan semakin majunya pertumbuhan dan perkembangan masyarakat disertai dengan semakin kompleksnya permasalahan.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD sebagai berikut :
   a. Program dan Kegiatan di Kecamatan adalah turunan dari tingkat atasnya, jadi hanya ada beberapa saja yang terakomodir. Dengan demikian renstra SKPD lainnya yang belum tertampung, dapat diberikan jalan/solusi untuk kemajuan Kec. Klego.
   b. Kurang kooperatifnya dari aparat desa dalam jadual kegiatan yang telah ditentukan dari kecamatan. Sehingga sering mengalami keterlambatan dalam waktu, pengelolaan administrasi desa/ keuangan, ataupun kegiatan lainnya yang telah dijadwalkan dari Kabupaten/tingkat diatasnya;
   c. Belum ada kajian lebih dalam terhadap RT/RW Kecamatan Klego;
   d. Belum ada kajian lebih dalam terhadap KLHS Kecamatan Klego;
   e. Masih kurangnya SDM perangkat Desa.
3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*):
   Faktor penghambat tersebut antara lain:

a. Kurang kooperatifnya dari aparat desa dalam jadual kegiatan yang telah ditentukan dari kecamatan. Sehingga sering mengalami keterlambatan dalam waktu, pengelolaan administrasi desa/ keuangan, ataupun kegiatan lainnya yang telah dijadwalkan dari Kabupaten/tingkat diatasnya;
b. Program dan Kegiatan di Kecamatan sebagian besarnya adalah turunan dari tingkat atasnya (bersifat rutin), jadi hanya ada beberapa saja yang terakomodir. Dengan demikian renstra SKPD lainnya yang belum tertampung, dapat diberikan jalan/solusi untuk kemajuan Kec. Klego;
c. Belum ada kajian lebih dalam terhadap RTRW Kecamatan Klego;
d. Belum ada kajian terhadap KLHS Kabupaten Boyolali maupun Kecamatan Klego.

Adapun faktor pendorong adalah sebagian besarnya program kegiatan di SKPD sudah Sejalan dengan Renstra Provinsi dan Kabupaten serta Renstra K/L. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :
   a. Tantangan :
      1) Pembangunan jalan yang relatif masih kurang baik;
      2) Arah pembangunan ramah lingkungan;
      3) Pertumbuhan dan permasalahan masyarakat yang semakin kompleks;
      4) Kajian lebih mendalam terhadap RT RW dan KLHS Kecamatan Klego sebagai tuntutan pertumbuhan pembangunan;
      5) Perubahan iklim yang tidak menentu, berpengaruh besar terhadap potensi unggulan pertanian;
      6) Mempertahankan prestasi sebagai wilayah andalan hasil pertanian dan daerah resapan air;
      7) Pengembangan kawasan wisata.
   b. Peluang :
      1) Sesuai dengan misi di tingkat K/L, Provinsi dan Kabupaten;
      2) Wilayah yang cukup kondusif;
      3) SDA dan SDM yang cukup memadai.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah sebagai berikut :
   a. Pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan tata laksana dalam mendukung kelancaran SKPD Kecamatan Klego dalam memfasilitasi pelayanan terhadap masyarakat yang setiap tahunnya semakin berkembang;

b. Tertib administrasi kelembagaan dan keuangan pemerintahan dari tingkat kecamatan, desa hingga tingkat bawahnya serta organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan arahan dan Peraturan yang berlaku;
c. Pembangunan yang berwawasan lingkungan (sesuai dengan RTRW dan KLHS yang ditentukan dari K/L dan Provinsi, maupun RTRW Kabupaten);
d. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, keluarga berencana, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kepramukaan, keolahragaan, kesenian dan kebudayaan (sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, yang terakomodir secara button up planning)
e. Peningkatan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan, dengan semakin majunya pertumbuhan dan perkembangan masyarakat disertai dengan semakin kompleksnya permasalahan.
f. Pembangunan kesejahteraan rakyat dalam bidang ekonomi, pangan, energi, infrastruktur, untuk kesejahteraan masyarakat;
g. Perkuatan pembangunan demokrasi, peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pemerintahan dan pembangunan di berbagai bidang;
h. Pembangunan penegakkan hukum, untuk terwujudnya pelaksanaan produk hukum Nasional dan Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan;
i. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga Kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja;
j. Meningkatnya sarana dan Prasarana pembangunan dan Pemerintahan;
k. Meningkatkan pemahaman dan komitmen tentang kesetaraan dan keadilan gender serta hak anak pada seluruh pelaku pembangunan,dalam rangka mewujudkan penguatan kelembagaan pengurusutamaan gender, serta mengoptimalkan perlindungan anak secara luas melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan anak, termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus (anak korban bencana, korban penelantaran, anak korban perlakuan salah, anak korban tindak kekerasan,anak yang berhadapan dengan hukum);
l. Merupakan Sub Wilayah Pembangunan yang dominan di bidang: perdagangan, pertanian, perikanan dan pariwisata.
m. KLHS bagi pelayanan SKPD, masih dalam tahap perencanaan pelaksanaan oleh instansi terkait, dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten

Boyolali Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Klego Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 disajikan pada **LAMPIRAN TABEL T-C.3.1**

Tabel T-C3.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Boyolali
Kecamatan Klego

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program					**Program**					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**100**	**2.430.584.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**100**	**2.430.584.000**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Klego		1 tahun	2.172.344.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Klego		1 tahun	2.172.344.000,00	
	Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Klego	Prosentase Ketercapaian Fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	21 orang	2.078.744.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Klego	Prosentase Ketercapaian Fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	21 orang	2.078.744.000,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Klego	Tersedianya jasa administrasi perkantoran selama 12 bulan	13 dokumen	93.600.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Klego	Tersedianya jasa administrasi perkantoran selama 12 bulan	13 dokumen	93.600.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Klego	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Klego	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Klego	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Klego	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Klego	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Klego	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan		

	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec. Klego	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec. Klego	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Klego	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Klego	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Klego	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 kegiatan		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Klego	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 kegiatan		
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Klego		1 kegiatan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Klego		1 kegiatan		
	Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Klego	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Klego	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan		
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Klego		1 kegiatan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Klego		1 kegiatan		
	Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Klego	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 laporan		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Klego	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 laporan		
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Klego		9 kegiatan	127.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Klego		9 kegiatan	127.000.000,00	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Klego	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Klego	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.000.000,00	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Klego	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Klego	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Klego	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	3.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Klego	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	3.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Klego	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	25.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Klego	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	25.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Klego	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Klego	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.000.000,00	
	Penyediaan Bahan/ Material	Kec. Klego	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	15.000.000,00	Penyediaan Bahan/ Material	Kec. Klego	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	15.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Klego	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	62.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Klego	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	62.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Klego	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	10.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Klego	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	10.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Klego	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 dokumen		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Klego	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 dokumen		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Klego	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 dokumen		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Klego	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 dokumen		
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Klego				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Klego				
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Pengadaan Mebel	Kec. Klego	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Pengadaan Mebel	Kec. Klego	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Klego	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Klego	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Klego	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Klego	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Klego	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Klego	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Klego		2 kegiatan	42.740.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Klego		2 kegiatan	42.740.000,00	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Klego	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	900.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Klego	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	900.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Klego	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	41.840.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Klego	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	41.840.000,00	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Klego		3 kegiatan	68.500.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Klego		3 kegiatan	68.500.000,00	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Klego	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	14.500.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Klego	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	14.500.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Klego	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 unit	4.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Klego	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 unit	4.000.000,00	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Klego	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	50.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Klego	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	50.000.000,00	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Klego		7 kegiatan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Klego		7 kegiatan		
	Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Klego	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Klego	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kec. Klego	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kec. Klego	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Klego	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Klego	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Klego	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Klego	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Klego	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Klego	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 laporan		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Klego	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Klego	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				100.000.000,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				100.000.000,00	
	Kegiatan					**Kegiatan**					

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Klego		2 kegiatan		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	Kec. Klego		2 kegiatan		
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Klego	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 laporan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Klego	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 laporan		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Klego	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 dkumen		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Klego	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 dkumen		
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Klego		1 kegiatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Klego		1 kegiatan		
	Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Klego	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Klego	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan		
	Kegiatan				**100.000.000,00**	Kegiatan				**100.000.000,00**	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Klego		1 kegiatan	100.000.000,00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Klego		1 kegiatan	100.000.000,00	
	Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam	Kec. Klego	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait	2 dokumen	100.000.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam	Kec. Klego	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait	2 dokumen	100.000.000,00	

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				150.000.000,00	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				150.000.000,00	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Klego		2 kegiatan	150.000.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			2 kegiatan	150.000.000,00	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Klego	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga kemasyarakatan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Klego	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga kemasyarakatan		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Klego	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 laporan	150.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Klego	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 laporan	150.000.000,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**25.000.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**25.000.000,00**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Klego		1 Kegiatan	25.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			1 Kegiatan	25.000.000,00	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Kec. Klego	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 laporan	25.000.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Kec. Klego	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 laporan	25.000.000,00	

	Vertikal di Wilayah Kecamatan					Vertikal di Wilayah Kecamatan					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				70.000.000,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				70.000.000,00	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Klego		2 kegiatan	70.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			2 kegiatan	70.000.000,00	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Klego	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 orang	50.000.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Klego	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 orang	50.000.000,00	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Klego	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 orang	20.000.000,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Klego	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 orang	20.000.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					

	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Klego		1 kegiatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Klego		1 kegiatan		
	Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Klego	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 dokumen		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Klego	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 dokumen		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Klego	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 dokumen		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Klego	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 dokumen		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Klego	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 dokumen		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Klego	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 dokumen		

Klego, 2023

CAMAT KLEGO

MULYANTO, S. Sos,MM

Pembina Tk.I

NIP. 19710606 199603 1 002

E. Penelahaan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat

Sebagai OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain melakukan menggali permasalalan/kebutuhan dari internal kantor, Kecamatan Klego juga menjaring aspirasi atau usulan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun LSM, yang langsung ditujukan ke Kecamatan Klego berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Desa dan Kecamatan. Berdasarkan atas hasil Musrenbang baik di Desa maupun Kecamatan, usulan dari masyarakat terkait dengan pelayanan/tugas pokok fungsi di Kecamatan Klego sebagaimana dalam **LAMPIRAN TABEL T-C.32.**

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Boyolali
Kecamatan Klego

No	Program/ Kegiatan / Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	Penyelenggaraan Jalan	Dukuh Ngablak – Gulon Desa Tanjung	Jumlah jalan yang dipelihara	3 Km	
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dukuh Gandu Desa Karanggatak	Jumlah pembangunan jaringan air minum perdesaan	1 paket	
3.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jalan PU Desa Bade	Terjaganya Keamanan di Jalan Desa	10 titik	
4.	Pengelolaan Sumber Daya Air	Kadus 3 Desa Karangmojo	Terpeliharanya jaringan irigasi desa	1 paket	
5.	Penyelenggaraan Jalan	Penghubung Desa Sumberagung-Desa Banyuurip	Terbangunnya jembatan penghubung antar desa	1 paket	
6.	Peyelenggaraan Jalan	Desa Gondanglegi-Desa Kauman	Terpeliharannya jalanPU	5 KM	
7.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kadus 1 Desa Blumbang	Terbangunnya jaringan air minum perdesaan	1 paket	
8.	Pembangunan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Waduk Bade Desa Bade	Terlatihnya SDM di destinasi wisata	1 paket	
9	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Desa Jaten	Terlatihnya SDM di bidang pembangunan ekonomi	1 paket	
10	Pembangunan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sendang Sedayu Desa Kalangan	Terlatihnya SDM di destinasi wisata	1 paket	

11	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kadus 2 Desa Karangmojo	Terlatihnya SDM di bidang industri	1 paket	
12	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kelompok SRI REJEKI Desa Banyuurip	Tersalurnya bantuan modal usaha	1 paket	
13	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kadus 1 Desa Blumbang	Terlatihnya SDM di bidang ekonomi	1 paket	
14	Kawasan Permukiman	Desa Gondanglegi	Terciptanya rumah layak huni di luar Kawasan kumuh	1 paket	
15	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kelompok Tani “Tani Mulyo” Desa Sangge	Tersalurnya bantuan bibit hijauan pakan ternak mesin chopper	1 paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas. Landasan keputusan yang diambil dalam sebuah kebijakan adalah mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien sejalan dengan misi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Prioritas dalam sebuah kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan melalui pencapaian strategi pembangunan. Kebijakan, strategi, dan prioritas program pembangunan daerah tersebut menjadi acuan bagi Kecamatan Klego, yaitu:

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguaran

   Kebijakan pembangunan daerah untuk mendukung strategi pembangunan nasional ini diarahkan guna percepatan penurunan jumlah penduduk miskin, dengan strategi meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan; membangun prasarana dan sarana serta pemberdayaan ekonomi masyarakat; memperkuat kelembagaan dan mendayagunakan sumber daya potensial untuk penanggulangan kemiskinan. Berbagai program pembangunan daerah dilaksanakan oleh Kecamatan Klego untuk mendukung kebijakan ini, antara lain:

   a. Program pendidikan non formal
   b. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
   c. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
   d. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
   e. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kebijakan pembangunan daerah Kecamatan Klego untuk mendukung strategi pembangunan nasional ini diarahkan guna percepatan penurunan jumlah pengangguran, dengan strategi meningkatkan kualitas dan keterampilan serta memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat. Berbagai program pembangunan daerah dilaksanakan oleh Kecamatan Klego untuk mendukung kebijakan ini, antara lain:

   Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.

3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan. Kebijakan pembangunan daerah untuk mendukung strategi pembangunan nasional ini diarahkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kecamatan Klego, dengan strategi menjaga realisasi investasi yang positif, meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan

daerah, mendorong sektor riil, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan ekspor.

Berbagai program pembangunan daerah dilaksanakan oleh Kecamatan Klego untuk mendukung kebijakan ini, antara lain:

a. Program Pemeliharaan Infrastruktur

4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah Kebijakan pembangunan daerah untuk mendukung strategi pembangunan nasional ini diarahkan guna menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta mengurangi risiko bencana, dengan strategi meningkatkan konservasi ekosistem terersterial meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta meningkatkan upaya penanggulangan bencana. Berbagai program pembangunan daerah dilaksanakan oleh Kecamatan Klego untuk mendukung kebijakan ini, antara lain:
   a. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
   b. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);
5. Kecamatan Klego dalam mendukung kebijakan nasional dan provinsi mengambil kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan pelayanan publik,yaitu:
   a. Mengoptimalisasi pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati .
   b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan Klego dan peningkatan kualitas aparaturnya seperti administrasi kependudukan dan pencatata sipil, rekomendasi perizinan,dan surat keterangan lain.

B. Tujuan dan Sasaran Renja OPD Kecamatan Klego

Perumusan tujuan dan sasaran dalam rencana kerja (renja) OPD Kecamatan Klego sangat diperlukan untuk membuat kerangka yang jelas dan memberi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang akan dilaksanakan.

Rumusan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Klego. Dalam Renja OPD Kecamatan Klego tahun 2024, rumusan tujuan diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan;
2. Meningkatkankualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

   Adapun rumusan sasaran diuraikan sebagai berikut:

   1. Meningkatnya pelayanan perizinan;
   2. Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator;.
   3. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan;

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Program dan Kegiatan,

OPD Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali sebagai leading sektor dalam hal perencanaan di Kabupaten Boyolali melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain melaksanakan kegiatan rutin OPD juga melaksanakan urusan wajib dan pilihan.

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2024 yang dituangkan dalam renja 2024 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah untuk mencapai visi-misi pembangunan daerah. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Secara umum program dan kegiatan OPD Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   - 1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   - 1.2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
     - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
     - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
     - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
     - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     - f. Penyediaan Bahan / Material
     - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
     - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - 1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
     - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
     - b. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
     - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.4 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pemeliharaan Mebel
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainya
d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2.3 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

5.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

TABEL T-C.33
Perumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Boyolali
Kecamatan Klego

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										
X.XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										
X.XX-01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										
X.XX-01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
X.XX-01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Klego	1 tahun	2.078.744.000			2.078.744.000	Klego	1 tahun	2.078.744.000
X.XX-01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	Klego	12 bulan	93.600.000			93.600.000	Klego	12 bulan	93.600.000
X.XX-01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
X.XX-01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/telepon	Klego	12 bulan	2.000.000			2.000.000	Klego	12 bulan	2.000.000
X.XX-01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Klego	12 bulan	3.000.000			3.000.000	Klego	12 bulan	3.000.000
X.XX-01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kanto	Klego	12 bulan	25.000.000			25.000.000	Klego	12 bulan	25.000.000
X.XX-01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Klego	12 bulan	10.000.000			10.000.000	Klego	12 bulan	10.000.000
X.XX-01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	Klego	12 bulan	15.000.000			15.000.000	Klego	12 bulan	15.000.000
X.XX-01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman	Klego	12 bulan	62.000.000			62.000.000	Klego	12 bulan	62.000.000

X.XX-01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Klego	12 bulan	10.000.000			10.000.000	Klego	12 bulan	10.000.000
X.XX-01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
X.XX-01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Klego	12 bulan	900.000			900.000	Klego	12 bulan	900.000
X.XX-01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Klego	12 bulan	41.840.000			41.840.000	Klego	12 bulan	41.840.000
X.XX-01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
X.XX-01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Klego	12 bulan	14.500.000			14.500.000	Klego	12 bulan	14.500.000
X.XX-01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Klego	12 bulan	4.000.000			4.000.000	Klego	12 bulan	4.000.000
X.XX-01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Klego	12 bulan	50.000.000			50.000.000	Klego	12 bulan	50.000.000
X.XX-01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
X.XX-01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Klego	1 paket	20.000.000			20.000.000	Klego	1 paket	0
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**										
7.01	**KECAMATAN**										
7.01-02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**										
7.01-02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										
7.01-02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Klego	1 unit	100.000.000			100.000.000	Klego	1 unit	100.000.000

7.01-03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										
7.01-03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
7.01-03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Klego	1 kegiatan	50.000.000			50.000.000	Klego	1 kegiatan	50.000.000
7.01-03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										
7.01-03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Bantuan Alat Usaha bagi Lembaga Perempuan	Klego	2 kegiatan	50.000.000			50.000.000	Klego	2 kegiatan	50.000.000
7.01-03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya bantuan/modal usaha ekonomi masyarakat untuk lembaga kepemudaan	Klego	13 Desa	50.000.000			50.000.000	Klego	13 Desa	50.000.000
7.01-04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										
7.01-04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum										
7.01-04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bantuan peralatan keamanan dan kenyaman lingkungan	Klego	1 kegiatan	25.000.000			25.000.000	Klego	1 kegiatan	25.000.000
7.01-05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**										
7.01-05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										
7.01-05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Nagara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	Klego	2 kegiatan	50.000.000			50.000.000	Klego	2 kegiatan	50.000.000

7.01-05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasiona	Klego	2 kegiatan	20.000.000			20.000.000	Klego	2 kegiatan	20.000.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Renstra yang telah dibuat, menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalanpersoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(stakeholders*) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Renja OPD Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja OPD Kecamatan Klego. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran OPD Kecamatan Klego kabupaten Boyolali. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf OPD Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.

RR. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

KECAMATAN KARANGGEDE

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat, Taufiq, dan HidayahNya sehingga Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan baik.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD) yang merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung dan mewujudkan capaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali memberikan gambaran tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran ke depan, Renja Perangkat Daerah ini menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran, target capaian kinerja serta bagaimana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali sesuai dengan tugas pokoknya serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan menyelaraskan Usulan/Aspirasi Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023.

Penyusunan Renja berdasarkan pada Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun yang lalu dan tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan Renja ini, untuk itu kami mohon saran bersifat membangun demi menyempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali pada tahun-tahun berikutnya. Harapan kami, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan

Karanggede Kabupaten Boyolali diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali sekarang dan di masa-masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

	PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	iv
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II.	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	24
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	39
	3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	39
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	39
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
	4.1 Program dan Kegiatan	42
BAB V.	PENUTUP	51

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah selama periode 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah selama periode 5 (lima) tahun. Tata cara / proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) terdiri dari :

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah juga

berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota menjadi Rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan : a) rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; b) hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah meliputi kebijakan program strategis nasional (PSN), amanat pembangunan global dan nasional, dan dinamika pembangunan nasional lainnya. Selain itu juga kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 tetap memperhatikan keberlanjutan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian, sosial dan Kesehatan, serta dukungan terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) sebagai prioritas dalam penanggulangan kemiskinan. Disamping itu RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 meliputi:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan eksterm (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;

4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karanggede adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yng dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Rencana Strategis Kecamatan Karanggede Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karanggede 2024 adalah untuk memberikan Landasan Kebijakan Teknis Tahunan dalam Kerangka Pencapaian Visi Misi setiap tahapnya (satu tahunan) dan sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Camat pada Akhir Tahun Anggaran sebagai bagian dari pelaksanaan Kebijakan Daerah. Renja Tahun 2024 Kecamatan Karanggede disusun sebagai acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Karanggede Tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2024 Kecamatan Karanggede adalah adalah menetapkan prioritas Program dan Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan sesuai Rencana Strategis yang dilaksanakan per tahap (tahunan) melalui sumber pembiayaan APBD dan menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Karanggede Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karanggede Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Karanggede, terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Revieu hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dan realisasi Renstra Kecamatan Karanggede yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Karanggede dan/atau realisasi APBD Kecamatan Karanggede. Adapun hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 untuk Kecamatan Karanggede sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/keluaran yang telah direncanakan yaitu:
    a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
    b. Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut:
    a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    g. Penyediaan Bahan/Material
    h. Fasilitasi Kunjungan Tamu
    i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    j. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

k. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
l. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
n. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
o. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
p. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
q. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
r. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
s. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
t. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan untuk Kecamatan Karanggede tidak ada.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
   a. Terbatasnya pendanaan
   b. Kelompok sasaran belum terjangkau program/kegiatan seluruhnya
   c. Kurangnya informasi kegiatan dari Instansi setingkat kecamatan (UPT) dan kejadian di masyarakat
   d. Adanya situasi Pandemi Covid 19 (PPKM), yang menyebabkan kegiatan terkendala.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah dapat memenuhi / melebihi

target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, dengan demikian target capaian program Renstra PD dapat tercapai.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan meningkatkan target capaian dari tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan potensi sumber daya dan dana yang ada.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel T-C.29 sebagai berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah:Kecamatan Karangede Lembar :.....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									
	Program :									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**								
	Kegiatan:									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, Gaji Non ASN								
	Sub Kegiatan :									

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji Non ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	-	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	-	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	18 Laporan	100%
	Kegiatan :									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah								
	Sub Kegiatan :									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit	3 unit	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-

	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Kegiatan :									
	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah								
	Sub Kegiatan :									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	-	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Kegiatan :									
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah								
	Sub Kegiatan :									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya perbaikan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Kegiatan :									

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Sub Kegiatan :									
	Pengadaan Mebel	Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Kegiatan :									
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat								
	Sub Kegiatan :									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	-	-	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	15 Laporan	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%

	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum**								
	Kegiatan :									
	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang dilayani								
	Sub Kegiatan :									
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang diusulkan	-	-	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	100%
	Kegiatan :									
	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di Kecamatan yang terselenggara								
	Sub Kegiatan :									
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah sosialisasi pelayanan di kecamatan			1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	Kegiatan :									
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana umum dalam kondisi baik								
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun dan dipelihara	1 kegiatan	1 kegiatan	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									
	Kegiatan :									
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana pendukung ketentraman dan keteriban umum yang tersedia								
	Sub Kegiatan :									
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat kecamatan	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**								
	Kegiatan :									
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan hasil Musdes yang diverifikasi								
	Sub Kegiatan :									
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	Kegiatan :									

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang laksanakan								
	Sub Kegiatan :									
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah desa yang menerima bantuan / modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan	-	-	0	-	100%	0	-	100%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.**								
	Kegiatan :									
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								
	Sub Kegiatan :									
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%

	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti**								
	Kegiatan :									
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa								
	Sub Kegiatan :									
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pedampingan administrasi dan keuangan desa	-	-	16 Desa	16 Desa	100%	16 Desa	16 Desa	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang telah disesuaikan pada Kecamatan Karanggede yaitu pada Tabel T-C.30 sebaga berikut :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanggede

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi
				Tahun 2022 (thnn-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thnn+1	Tahun 2022 (thnn-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			82.11	82.27	83.55	84.18	82.11	82.27	83.55
2.	Nilai SAKIP			78	79	80	81	78	79	80

Pencapaian kinerja pelayanan sesuai tabel diatas sudah tergolong baik, tetapi masih perlu ditingkatkan dengan berkomitmen dan bekerjasama seluruh ASN untuk lebih meningkatkan pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Karanggede tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

Kecamatan Karanggede merupakan urusan Pemerintahan Umum, mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan

masyarakat, pembangunan, dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan.

Berdasarkan telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi terhadap Renstra Kecamatan Karanggede tidak dilakukan karena tidak ada keterkaitan langsung antara pelayanan atau permasalahan di tingkat kecamatan dengan permasalahan di K/L maupun PD tingkat provinsi**.**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Karanggede, secara umum permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karanggede adalah berikut:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang meliputi;
    a. Masih perlunya penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik;
    b. Belum optimalnya pelayanan kependudukan di kecamatan.

    Dimana akar permasalah pada pelayanan publik di Kecamatan Karanggede yaitu:
    - Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan;
    - Belum terdistribusinya sarana dan prasarana pelayanan.
2. Belum optimalnya pengembangan potensi kewilayahan, dimana untuk Kecamatan Karanggede masalahnya terletak pada belum optimalnya fungsi koordinasi kewilayahan. Akar masalah belum optimalnya peran kecamatan sebagai instansi terdepan dalam menyusun peta masalah dan potensi kecamatan.

Dampak Pelayanan Kecamatan Karanggede terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah Visi pembangunan daerah merupakan rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih yang secara substansi memuat tentang rumusan umum mengenai keadaan yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Kondisi yang akan dicapai dalam bentuk visi, kemudian dijabarkan oleh misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.

Berbijak dari amanat dan upaya membangun sinkronisasi dengan visi pembangunan jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005 - 2025, serta dalam rangka menjawab isu strategis aktual dan menjaga keberlanjutan pembangunan, maka

dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Boyolali 2021-2026 yaitu:

"Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi" Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL)

Rumusan visi tersebut memiliki muatan kondisi dan prasyarat yang akan dicapai dalam pembangunan, dengan penjabaran sebagai berikut :

Boyolali Maju berarti :

Proses pembangunan yang berkelanjutan dan terencana sistematis diharapkan membawa kemajuan di segala bidang.

Boyolali Maju berarti *no-one left behind,* yakni tidak ada pihak yang terlewatkan untuk merasakan kemajuan, karena semua komponen telah menjadi subyek pembangunan.

Maju dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dan daerah yang semakin berdaya saing yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah berkualitas dan merata, serta tata Kelola pemerintahan yang semakin bersih, efektif, dan dipercaya masyarakat.

Meneruskan Pro Investasi berarti :

Pro investasi telah menjadi arah pembangunan dan identitas Kabupaten Boyolali dengan berbagai capaian pembangunan yang telah membawa manfaat bagi masyarakat.

Melanjutkan arah pembangunan yang pro investasi berarti tidak hanya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membangun sinergi dengan arah pembangunan nasional, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional secara sistematis dan cepat.

Arah pro investasi membutuhkan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan, yang muaranya tetap pada kesejahteraan masyarakat Boyolali, tanpa menghadirkan ketimpangan sosial.

Pro investasi tetap dikendalikan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yakni selain berorientasi ekonomi dan sosial, tidak kalah penting pada keberlanjutan lingkungan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta membawa manfaat pembangunan bagi generasi masa depan.

Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL) berarti:

Pembangunan yang efektif membutuhkan prasyarat berupa sinergi dan kolaborasi seluruh komponen governance, yakni masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Seluruh komponen daerah diharapkan mampu melangkah dan menata bersama penuh totalitas yang merupakan implementasi dari prinsip gotong-royong.

Gotong royong dengan menjalankan perannya masing-masing namun saling bersinergi dan berkolaborasi dalam ikatan visi pembangunan daerah maupun landasan nilai kearifan yang tertanam kuat di tengah masyarakat berupa filosofi dari Pangeran Sambernyawa "Tiji Tibeh (mati siji, mati kabeh, mukti siji mukti kabeh)".

Visi pembangunan Boyolali dicapai dengan beberapa misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Boyolali memiliki 5 misi yang mencakup keseluruhan bidang pembangunan dengan muatan prinsip dasar dan arah pembangunan di setiap misi sebagai berikut:

Misi 1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan.

Misi 2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.

Misi 3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional, dengan

Misi 4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Misi 5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing,

dengan penjabaran sebagai berikut :

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Pembangunan integritas dengan menumbuhkan karakter yang baik bagi individu maupun organisasi dalam mewujudkan tindakan maupun keputusan bagi kebaikan bersama.

Pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance.

Peran masyarakat yang melahirkan kontrol terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan sangat diharapkan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN. Tidak berhenti pada good and clean governance, Boyolali berusaha menumbuhkan Smart governance, atau pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi, dengan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi-inovasi dan adaptasi teknologi yang terpadu, yang bermuara pada efektifitas, efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan yang tertib, elok, rapi, sehat dan nyaman untuk masyarakat, dengan smart governance mendorong terwujudnya Boyolali kota cerdas/pintar, kota air, ramah lingkungan serta potensi daerah yang didorong guna kemandirian daerah dengan kinerja yang inovatif yang dapat meningkatkan daya saing daerah.

Kecamatan Karanggede selaku Unsur Pembantu Kepala Daerah mendukung dan mensukseskan Visi Misi pembangunan daerah yang merupakan rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Kecamatan Karanggede terutama memompang pelaksanaan Misi 4 Boyolali yaitu **Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya,** Hal tersebut diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra OPD 2021-2026.

Tantangan dan peluang dalam pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Karanggede dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan Kabupaten Boyolali mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

1. Tantangan
   - Merupakan wilayah penyangga pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali, sehingga ditutut kinerja yang lebih bila dibandingkan kecamatan lainnya;
   - Karakteristik masyarakat yang merupakan transisi dari desa ke kota yang cenderung kritis terhadap pemerintahan;
   - Aspek lingkungan sebagai penghambat perkembangan industri;
   - Banyaknya alih fungsi lahan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan.

2. Peluang
   - Dukungan Visi Bupati dalam mendukung investasi;
   - Merupakan daerah pengembangan perumahan komersial;
   - Pelayanan perijinan yang dipermudah;
   - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
   - Pengalihan pengelolaan PBB dari pusat ke daerah;
   - Besarnya lahan kawasan industri menengah bisa untuk menarik investor;
   - Akses jalan guna kelancaran pergerakan barang/jasa;
   - Dukungan dunia usaha (perusahaan/pabrik) berupa *Coorporate Social Responsibility* (CSR), karena merupakan daerah industri menengah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Karanggede untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra)

diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Boyolali.

Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Karanggede tahun 2021-2026 seperti dalam tabel berikut:

Tabel. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : "BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI" Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL)			
MISI : Boyolali menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik kecamatan 2. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan 3. Peningkatan kapasitas ASN tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa 4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Peningkatan dan Pengembangan kualitas pelayanan sarana dan prasarana publik 2. Optimalisasi fungsi koordinasi kewilayahan 3. Peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran 4. Peningkatan tertib Administrasi Pemerintahan Desa
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	1. Peningkatan sistem kelembagaan berbasis kinerja	1. Peningkatan sistem administrasi umum dan kepegawaian

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Dapat ditelaah terhadap rancangan awal RKPD, sebagaimana Tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kecamatan Karanggede

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg			Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Subkeg			Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						**100.000.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**						**100.000.00**	
		Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Karanggede	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	0		Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Karanggede	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	0	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Karanggede	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	0			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Karanggede	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	0	
			Peningkatan Efektifikas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Karanggede	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	0			Peningkatan Efektifikas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Karanggede	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	39 Dokumen	0	

											Tingkat Kecamatan			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan		Karanggede	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Kegaitan	0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan		Karanggede	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Kegaitan	0	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Karanggede	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	0			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Karanggede	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	0	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Karanggede	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	100.000.000		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Karanggede	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	100.000.000	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Karanggede	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	100.000.000			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Karanggede	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	100.000.000	

	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum						**25.000.000**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**						**25.000.000**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Karanggede	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 kegiatan	25.000.000		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Karanggede	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 kegiatan	25.000.000	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Karanggede	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	25.000.000			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Karanggede	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	25.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						**70.000.000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**						**70.000.000**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Karanggede	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	70.000.000		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Karanggede	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	70.000.000	
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Karanggede	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	400 orang	50.000.000			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Karanggede	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	400 orang	50.000.000	

			Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Karanggede	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 orang	20.000.000			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Karanggede	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 orang	20.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						**150.000.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**						**150.000.000**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Karanggede	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Kegiatan	150.000.000		Koordinasi Kegiatan		Karanggede	Jumlah Koordinasi Kegiatan	2 Kegiatan	150.000.000	

									Pemberdayaan Desa			Pemberdayaan Desa			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Karanggede	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	0			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Karanggede	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	0	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Karanggede	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	150.000.000			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Karanggede	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	150.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						**0**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**0**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Karanggede	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	0		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Karanggede	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	0	
			Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Karanggede	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	8 Dokumen	0			Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Karanggede	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	8 Dokumen	0	
			Fasilitasi Administrasi Tata	Karanggede	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam	26 Dokumen	0			Fasilitasi Administrasi Tata	Karanggede	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	26 Dokumen	0	

			Pemerintahan Desa		rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Pemerintahan Desa		dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Karanggede	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	0			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Karanggede	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	0	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						**2.443.223.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**						**2.443.223.000**	
		Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Karanggede	Jumlah Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Kegiatan	0		Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Karanggede	Jumlah Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Kegiatan	0	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Karanggede	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Karanggede	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Karanggede	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Karanggede	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Karanggede	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	0			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Karanggede	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	0	

			Perubahan RKA-SKPD		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Perubahan RKA-SKPD		Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Karanggede	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Karanggede	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Karanggede	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Karanggede	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Karanggede	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	0			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Karanggede	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	0	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Karanggede	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Karanggede	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Karanggede	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Kegiatan	2.183.003.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Karanggede	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Kegiatan	2.183.003.000	

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Karanggede	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	2.089.403.000			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Karanggede	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	2.089.403.000	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Karanggede	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	93.600.000			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Karanggede	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	93.600.000	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Karanggede	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Karanggede	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Karanggede	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Karanggede	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Karanggede	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Karanggede	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Karanggede	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Karanggede	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	Karanggede	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	18 Laporan	0			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	Karanggede	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	18 Laporan	0	

			n/Semesteran SKPD		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					n/Semesteran SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Karanggede	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Karanggede	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Karanggede	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Kegitan	0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Karanggede	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Kegitan	0	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Karanggede	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	0			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Karanggede	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	0	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Karanggede	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Kegiatan	0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Karanggede	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Kegiatan	0	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Karanggede	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen	0			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Karanggede	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen	0	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Karanggede	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Kegiatan	127.000.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Karanggede	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Kegiatan	127.000.000	

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Karanggede	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.000.000			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Karanggede	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.000.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karanggede	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karanggede	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Karanggede	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.000.000			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Karanggede	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.000.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Karanggede	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Karanggede	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Karanggede	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Karanggede	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	
			Penyediaan Bahan/Material	Karanggede	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	15.000.000			Penyediaan Bahan/Material	Karanggede	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	15.000.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Karanggede	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	62.000.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Karanggede	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	62.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Karanggede	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	10.000.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Karanggede	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	10.000.000	

			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Karanggede	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	0			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Karanggede	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	0	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Karanggede	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 Dokumen	0			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Karanggede	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 Dokumen	0	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Karanggede	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	45.220.00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Karanggede	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	45.220.00	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Karanggede	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900.000			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Karanggede	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Karanggede	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44.320.000			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Karanggede	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44.320.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Karanggede	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	0			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Karanggede	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	0	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Karanggede	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	68.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Karanggede	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan	3 Kegiatan	68.000.000	

									Pemerintahan Daerah			Pemerintahan Daerah			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Karanggede	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	14.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Karanggede	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	14.000.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Karanggede	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.000.000			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Karanggede	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Karanggede	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Karanggede	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini dapat diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari PD lain yang saling berkaitan berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan (yang sebelumnya diadakan musyawarah di tingkat Dusun/lingkungan RT, RW dan kelompok-kelompok masyarakat misalnya kelompok tani, kelompok perempuan dsb. Penggalian gagasan dan menyelenggarakan musyawarah dusun (Musdus) serta rembug warga untuk menetapkan jenis dari usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan, dilanjutkan dengan Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang Kabupaten.

Usulan tersebut disesuaikan dan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD, serta visi dan misi pembangunan daerah yang sudah ditetapkan. Hasil pengerjaan/penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, dapat terlihat dalam Tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 Kabupaten Boyolali
Perangkat Daerah : Kecamatan Karanggede

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan Bibit Ternak Kambing	Desa Manyaran	100.000.000	1 Kelompok	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	Bantuan Modal BUMDes	Desa Sranten	100.000.000	1 Kegiatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Pemeliharaan Jalan	Desa Sempulur	460.000.000	(1.300x4) M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Pembangunan Jalan	Desa Pinggir	750.000.000	(1.800x4) M	Dinas Pekerjaan Umum dan

					Penataan Ruang
5	Fasilitasi untuk Kelompok Tani dengan Pemberian Bantuan Bibit Tanaman Pajale, Pepaya, Bawang Merah, Kelapa Genjah dan Mete	Desa Pengkol	100.000.000	1 Kelompok	Dinas Pertanian
6	Bantuan Peralatan Pertanian	Desa Sendang	100.000.000	1 Kelompok	Dinas Pertanbunhut
7	Embung dan Jaringan Irigasi Tersier	Desa Bantengan	400.000.000	1.000 M	Dinas Pertanian
8	Drainase di Jalan Kabupaten	Desa Tegalsari	350.000.000	400 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Pembangunan Jalan	Desa Karangkepoh	550.000.000	1.500 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Embung dan Jaringan Irigasi Tersier	Desa Mojosari	300.000.000	300 M	Dinas Pertanian
11	Pembangunan Jalan	Desa Klumpit	200.00.000	(450x3) M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Penyediaan Alat Angkut Sampah untuk Penanganan Sampah	Desa Klari	100.000.000	1 Kegiatan	Dinas Lingkungan HIdup
13	Pengadaan Bibit Ternak Kambing	Desa Bangkok	100.000.000	1 Kelompok	Dinas Peternakan dan Perikanan
14	Jambanisasi	Desa Dologan	100.000.000	20 Buah	Dinas Kesehatan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah meliputi kebijakan program strategis nasional (PSN), amanat pembangunan global dan nasional, dan dinamika pembangunan nasional lainnya. Selain itu juga kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 tetap memperhatikan keberlanjutan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian, sosial dan Kesehatan, serta dukungan terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) sebagai prioritas dalam penanggulangan kemiskinan. Disamping itu RKPD Tahun 2023 yang disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 meliputi:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta kemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Diskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada terlihat dalam Tabel T-C.32.

1.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Langkah-langkah perumusan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah
2. Membandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hal evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah, apakah masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kehidupan.
3. Identifikasi Kebijakan Nasional dan terkait dengan tugas dan fungsi pokok Perangkat Daerah, misalnya dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Millenium Development Goals (MDGs)
4. Unit Perangkat Daerah Kabupaten/Kota perlu mengidentifikan kebijakan provinsi, dan
5. Merumuskan pernyataan tujuan dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebelumnya.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Kecamatan Karanggede sesuai Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel. Tujuan dan Sasaran Renja 2024 Kecamatan Karanggede

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.55
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan Ampel	80,00

Berdasarkpada tabel tujuan dan sasaran diatas rencana kerja Kecamatan Karanggede adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
3. Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;

5. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
6. Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Perumusan Sasaran, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya;
2. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra PD, cuplik rumusan sasaran dalam Renstra PD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan;
3. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra PD), jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut;
4. Rumusan sasaran tersebut, sajikan dalam bentuk pernyataan.

Sasaran yang hendak dicapai di Kecamatan Karanggede adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah.

Langkah-langkah perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

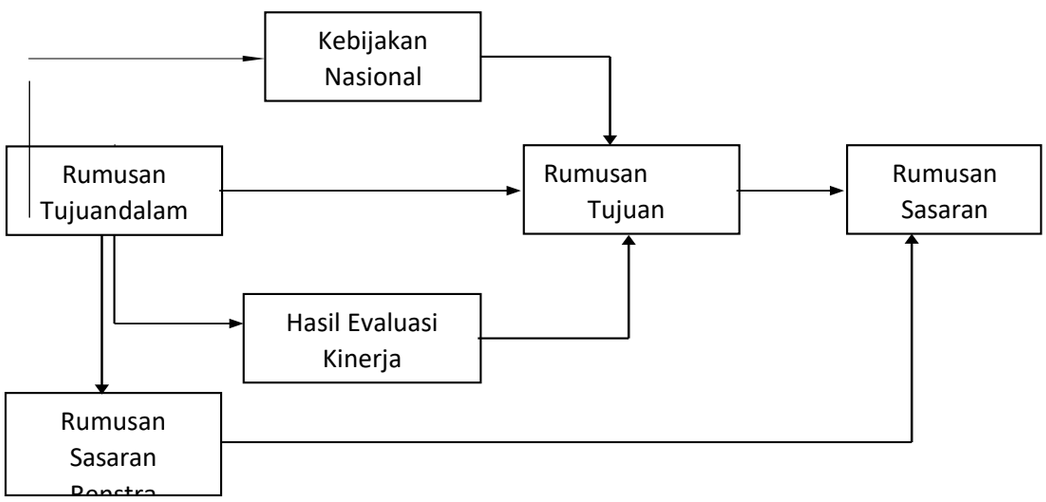

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

   Misal:

   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
   b. Pencapaian SDGs;
   c. Pengentasan kemiskinan;
   d. Pencapaian NSPK dan SPM;
   e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
   f. Pengembangan daerah terisolir; dan
   g. Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan, yaitu pada Tabel T-C.33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Karanggede Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Karanggede

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Subkeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
X	**UNSUR KEWILAYAHAN**										
X.XX	**KECAMATAN**										
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										
X.XX.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Karanggede	2 Dokumen	0			0	Karanggede	2 Dokumen	0
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Karanggede	1 Dokumen	0			0	Karanggede	1 Dokumen	0
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Karanggede	1 Dokumen	0			0	Karanggede	1 Dokumen	0
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Karanggede	1 Dokumen	0			0	Karanggede	1 Dokumen	0

		Penyusunan Dokumen DPA-SKPD									
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Karanggede	1 Dokumen	0			0	Karanggede	1 Dokumen	0
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Karanggede	15 Laporan	0			0	Karanggede	15 Laporan	0
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Karanggede	4 Laporan	0			0	Karanggede	4 Laporan	0
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Karanggede	15 orang/tahun	2.089.403.000			2.089.403.000	Karanggede	15 orang/tahun	2.089.403.000
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Karanggede	13 dokumen	93.600.000			93.600.000	Karanggede	13 dokumen	93.600.000
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Karanggede	12 Dokumen	0			0	Karanggede	12 Dokumen	0
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	Karanggede	12 Dokumen	0			0	Karanggede	12 Dokumen	0

		Akuntansi SKPD									
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Karanggede	1 Laporan	0			0	Karanggede	1 Laporan	0
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Karanggede	1 Dokumen	0			0	Karanggede	1 Dokumen	0
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Karanggede	18 Laporan	0			0	Karanggede	18 Laporan	0
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Karanggede	1 Dokumen	0			0	Karanggede	1 Dokumen	0
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Karanggede	3 Laporan	0			0	Karanggede	3 Laporan	0
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	Karanggede	13 Dokumen	0			0	Karanggede	13 Dokumen	0

	Penilaian Kinerja Pegawai	Kinerja Pegawai									
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/telepon	Karanggede	4 Paket	2.000.000			2.000.000	Karanggede	4 Paket	2.000.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Karanggede	4 Paket	0			0	Karanggede	4 Paket	0
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Karanggede	4 Paket	3.000.000			3.000.000	Karanggede	4 Paket	3.000.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kanto	Karanggede	4 Paket	25.000.000			25.000.000	Karanggede	4 Paket	25.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Karanggede	4 Paket	10.000.000			10.000.000	Karanggede	4 Paket	10.000.000
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Karanggede	4 Dokumen	0			0	Karanggede	4 Dokumen	0
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	Karanggede	4 Paket	15.000.000			15.000.000	Karanggede	4 Paket	15.000.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman	Karanggede	4 Laporan	62.000.000			62.000.000	Karanggede	4 Laporan	62.000.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Karanggede	4 Laporan	10.000.000			10.000.000	Karanggede	4 Laporan	10.000.000
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Karanggede	13 Dokumen	0			0	Karanggede	13 Dokumen	0
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Karanggede	13 Dokumen	0			0	Karanggede	13 Dokumen	0

X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Karanggede	12 Laporan	900.000			900.000	Karanggede	12 Laporan	900.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Karanggede	12 Laporan	44.320.000			44.320.000	Karanggede	12 Laporan	44.320.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Karanggede	4 Laporan	0			0	Karanggede	4 Laporan	0
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Karanggede	10 unit	14.000.000			14.000.000	Karanggede	10 unit	14.000.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Karanggede	7 Unit	4.000.000			4.000.000	Karanggede	7 Unit	4.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Karanggede	1 Unit	50.000.000			50.000.000	Karanggede	1 Unit	50.000.000
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**										
7.01	**KECAMATAN**										
7.01-02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**										

	DAN PELAYANAN PUBLIK										
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Karanggede	13 Laporan	0			0	Karanggede	13 Laporan	0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Karanggede	39 Dokumen	0			0	Karanggede	39 Dokumen	0
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan										
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Karanggede	2 Laporan	0			0	Karanggede	2 Laporan	0
7.01-02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										
7.01-02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan	Karanggede	2 Dokumen	100.000.000			100.000.000	Karanggede	2 Dokumen	100.000.000

		Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum									
7.01-03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										
7.01-03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
7.01-03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Karanggede	6 Lembaga Kemasyarakatan	0			0	Karanggede	6 Lembaga Kemasyarakatan	0
7.01-03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Karanggede	13 Laporan	150.000.000			150.000.000	Karanggede	13 Laporan	150.000.000
7.01-05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**										
7.01-05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										
7.01-05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Nagara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Karanggede	400 orang	50.000.000			50.000.000	Karanggede	400 orang	50.000.000

		Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
7.01-05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Karanggede	500 orang	20.000.000			20.000.000	Karanggede	500 orang	20.000.000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**										
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Karanggede	8 Dokumen	0			0	Karanggede	8 Dokumen	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Karanggede	26 Dokumen	0			0	Karanggede	26 Dokumen	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Karanggede	13 Dokumen	0			0	Karanggede	13 Dokumen	0

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karanggede yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Perumusan program dan kegiatan ini, mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai disertai dengan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Realisasi renja ini sangat tergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Sebagaimana tujuan renja ini yaitu “terarahnya program serta prioritas kegiatan tahunan dengan capaian rencana strategis Kecamatan Karanggede melalui pembiayaan APBD Kabupaten yang dilengkapi dengan indikator capaian sebagai tolak ukur penilaian kinerja”. Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

Demikian RENJA Kecamatan Karanggede 2024 disusun dan semoga bermanfaat.

SS. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

KECAMATAN WONOSEGORO

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, setelah melalui proses dan beberapa tahapan akhirnya penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wonosegoro Tahun 2024 telah selesai.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali, dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik. Perwujudan dari komitmen tersebut, antara lain dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Wonosegoro yang merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali dan Renstra Kecamatan Wonosegoro Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Wonosegoro adalah dokumen perencanaan Kecamatan Wonosegoro untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Kecamatan Wonosegoro mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Penyusunan Renja Kecamatan Wonosegoro dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Wonosegoro tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Wonosegoro.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wonosegoro Tahun 2024 ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II **1**
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN WONOSEGORO TAHUN 2022 ..... **1**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wonosegoro Tahun 2022 1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 24
2.4 2Review terhadap Rancangan Awal RKPD 35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 46
BAB III **48**
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **48**
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 48
BAB IV **49**
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **49**
4.1 Program dan Kegiatan 49
BAB V PENUTUP **59**

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Tabel T-C.29.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)* Kabupaten Boyolali 5
Tabel II. 2 Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali 14
Tabel II. 3 Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali 20
Tabel II. 4 Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Boyolali 36
Tabel II. 5 Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Boyolali 46

Tabel IV. 1 Tabel T-C.33.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Boyolali 50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik. Perwujudan dari komitmen tersebut, antara lain dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Wonosegoro yang merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali dan Renstra Kecamatan Wonosegoro Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Wonosegoro adalah dokumen perencanaan Kecamatan Wonosegoro untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan. Rencana Kerja Kecamatan Wonosegoro Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Penyusunan Renja Kecamatan Wonosegoro dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Wonosegoro tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Wonosegoro.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wonosegoro dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

Dalam tahapan perumusan rancangan Renja OPD, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan OPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;

4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal OPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
10. Penyempurnaan rancangan Renja OPD;
11. Pembahasan forum OPD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

Namun karena keterbatasan data dan adanya beberapa kesulitan dalam penyusunannya ada beberapa kegiatan tersebut yang tidak dapat digali secara maksimal.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui

Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
22. Rencana Strategis Kecamatan Wonosegoro Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah memberikan arah, kebijakan program serta prioritas kegiatan sebagai landasan kebijakan operasional Kecamatan Wonosegoro.

Tujuan disusunnya Renja Kecamatan Wonosegoro adalah terarahnya program serta prioritas kegiatan tahunan dengan capaian rencana strategis Kecamatan Wonosegoro melalui pembiayaan APBD Kabupaten yang dilengkapi dengan indikator capaian sebagai tolok ukur penilaian kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Wonosegoro Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Wonosegoro Tahun 2022; berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wonosegoro Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD,

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi Program dan kegiatan

Bab V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN WONOSEGORO TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wonosegoro Tahun 2022

Realisasi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Wonosegoro Tahun 2022 telah selesai seluruhnya. Dari pelaksanaan program / kegiatan tersebut, beberapa program / kegiatan / Sub Kegiatan telah mencapai target yang direncanakan dan ada yang belum memenuhi target.

Hasil evaluasi terhadap capaian realisasi program/kegiatan dan capaian renstra di Kecamatan Wonosegoro, sebagai berikut :

1. Realisasi Program / Kegiatan yang memenuhi/mencapai target :
   a. Program
      1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      2). Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
      3). Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
      4). Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   b. Kegiatan
      1). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan :
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      2). Administrasi Umum Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan :
      a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
      b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      e. Penyediaan Bahan / Material
      f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
      g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      3). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

atau Bangunan Kantor

4). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

5). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6). Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Sub Kegiatan :

- Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

7). Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

8). Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat

9). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan

Pancasila, Pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Pembinaan Kerukunan Antarsuku san Instrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

2. Realisasi Program/Kegiatan yang belum memenuhi target :
   a. Program
      1) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   b. Kegiatan
      1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

      Sub Kegiatan :

      - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target:

   Semua program/kegiatan yang dilaksanakan belum ada yang melebihi target rencana.

   Untuk lebih jelasnya capaian program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel T-C.29.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target

   Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 secara keseluruhan dapat berjalan dengan lancar dan pencapaian kinerja kegiatan sesuai dengan target yang direncanakan, namun demikian ada program dan kegiatan yang tidak mencapai target rencana dan bahkan tidak dilaksanakan, hal ini mengingat kondisi di tahun 2022 wabah virus corona 19 yang sudah mulai menurun di berbagai daerah di indonesia, sehingga tidak ada pengamanan even , karena masyarakat sudah bisa hidup bebas seperti dulu walupun tetap masih menerapkan protokol kesehatan.

5. Faktor-faktor pendukung tercapainya target.
   a. Komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dan desa dalam melaksanakan dan menyelesaikan program/kegiatan

b. Kerjasama yang baik antara pemerintahan kecamatan dan Pemerintah Desa, serta seluruh UPT kecamatan.
c. Peran aktif kelompok sasaran program/kegiatan

6. Solusi/pemecahan masalah :
   a. Evaluasi kinerja dan pencapaian target kinerja secara rutin;
   b. Peningkatan komitmen dari seluruh pelaksana kegiatan untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan dengan baik;
   c. Pengambilan keputusan secara cepat dan proporsional sesuai dengan kewenangan Kecamatan untuk mengatasi keadaan tanpa ketergantungan dengan Pemerintah Kabupaten;
   d. Meningkatkan pengelolaan administrasi.
   e. Identifikasi setiap permasalahan yang muncul dan disertai dengan penyelesaiannya.
   f. Membangun komunikasi dua arah antara pengambil kebijakan dan pelaksana kegiatan;
   g. Peningkatan jalinan kerjasama baik dengan instansi pemerintah lainnya di Tingkat Kecamatan dan Desa maupun dengan kelembagaan masyarakat yang ada.

Tabel II. 1 Tabel T-C.29.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)* Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah : Kecamatan Wonosegoro.

Lembar : 1.

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							N-3 (2021)	N-2 (2022)	N-2 (2022)		N-1 (2023)	N-1 (2023)	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	**100%**							
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Gaji dan tunjangan ASN, Gaji non ASN**	5 th	1 th	1 th	1 th				
				Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	12	12	12	100%	12	12	100%
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor TKHL	60 bln	12	12	12	100%	12	12	100%
				Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	60 dok	12	12	12	100%	12	12	100%
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	60 dok	12	12	12	100%	12	12	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90 lap	18	18	18	100%	18	18	100%
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5 dok	2	1	1	100%	1	1	100%
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		5 Keg	0	0	0	0%	1	1	100%
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		5 th	0	1 th	1 th	100%	1 th	1 th	100%
				Sub Kegiatan :									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		15 Lap	0	0	0	0%	3	3	100%
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		65 Dok	0	13	13	100%	13	13	100%
	Sub Kegiatan :									
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		65 Dok	0	0	0	0%	13	13	100%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah**	60 bln	12	12	12	100%	12	12	100%
	Sub Kegiatan :									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	20 Paket	12	12	12	100%	4	4	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20 Paket	12	12	12	100%	4	4	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya BBM Kantor	20 Paket	12	12	12	100%	4	4	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20 Paket	12	12	12	100%	4	4	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	60 bln	12	0	0	0%	0	0	0%
	Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya ATK Kantor	20 Paket	12	12	12	100%	4	4	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu	20 Laporan	12	12	12	100%	4	4	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulttasi SKPD	Terlaksananya keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi	20 Laporan	12	12	12	100%	4	4	100%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pasa SKPD		65 Dok	0	0	0	0%	13	13	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		65 Dok	0	0	0	0%	13	13	100%
				Kegiatan : **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 lap	12	12	12	100%	12	12	100%
				Sub Kegiatan :									
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	60 lap	12	12	12	100%	12	12	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Air dan Listrik Kantor	60 lap	12	12	12	100%	12	12	100%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		60 lap	0	0	0	0%	4	4	100%
				Kegiatan : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	60 bln	12	12	12	100%	12	12	100%
				Sub Kegiatan :									
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50 unit	12	12	12	100%	10	10	100%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	350 unit	12	12	12	100%	70	70	100%
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dann Bangunan Lainnya	20 unit	12	0	0	0%	4	4	100%
				Kegiatan : **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Uursan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik Daerah**	18 paket	4	4	4	100%	4	4	100%
				Sub Kegiatan :									
				Pengadaan Mebel	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnnya	4 paket	0	0	0	0%	1	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	4 paket	2	2	2	100%	3	3	100%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	0	1	1	100%	0	0	0%
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaa, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah Yang Dibuat**	125	25	25	25	100%	25	25	100%
	Sub Kegiatan :									
	Pemyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	10 dok	2	2	2	100%	2	2	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	5 dok	1	1	1	100%	1	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	5 dok	1	1	1	100%	1	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang disusun	5 dok	1	1	1	100%	1	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	5 dok	1	1	1	100%	1	1	100%
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	75 lap	15	15	15	100%	15	15	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 lap	4	4	4	100%	4	4	100%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Persentase Layanan Publik Kecamatan Tepat Waktu**								
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang dilayani dengan baik	39 dok	11	11	11	100%	39	39	100%
	Sub Kegiatan :									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		65 lap	0	0	0	0%	13 lap	13 lap	100%
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang diusulkan	39 dok	11	11	11	100%	39	39	100%
				Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di kecamatan yang terselenggara dengan baik	10 lap	1	1	1	100%	2	2	100%
				Sub Kegiatan :									
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah sosialisasi pelayanan di kecamatan	10 lap	1	1	1	100%	2	2	100%
				Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Sarana dan Prasarana Umum Dalam Kondisi Baik**	10 dok	2	2	2	100%	2	2	100%
				Sub Kegiatan :									
				Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum	10 dok	2	2	2	100%	2	2	100%
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	100%							
				Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		65 lap	13	13	13	100%	13	13	100%
				Sub Kegiatan :									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat kecamatan	65 lap	13	13	13	100%	13	13	100%
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	100%	2	2	2	100%	2	2	100%
				Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	10 keg	2	2	2	100%	2	2	100%
				Sub Kegiatan :									
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	2000 orang	400	400	400	100%	400	400	100%
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Instrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan kerukunan umat beragama di wiilayah kecamatan	2500 orang	500	500	500	100%	500	500	100%
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pem bangunan yang ditindaklanjuti**	100%	1	1	1	100%	1	1	100%
				Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah usulan hasil musdes yang diverifikasi Jumlah bantuan yang disalurkan sesuai standar**	5 th	1	1	1	100%	1	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan :									
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen daftar skala prioritas tingkat kecamatan	6 lembaga	1	1	1	100%	6	6	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65 lap	1	1	1	100%	13	13	100%
	Kegiatan : **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelompok masyarakat yang di berdayakan di kelurahan	5 th	0	0	0	0%	0	0	0%
	Sub Kegiatan :									
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen skala prioritas tingkat kelurahan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan partisipasi pemberdayaan masyarakat di kelurahan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Kegiatan : **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan**	10 keg	2	2	2	100%	0	0	0%
	Sub Kegiatan :									
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi(PKK)	5 keg	1	1	1	100%	0	0	0%
	Fasiltasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah desa yang menerima bantuan/ modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan	11 desa	0	0	0	0	0	0	0
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti**	100%	11	11	11	100%	11	11	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Kegiatan : **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa**	11 desa	11	11	11	100%	11	11	100%
				Sub Kegiatan :									
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		40 dok	0	0	0	0%	8	8	100%
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		130 dok	0	0	0	0%	26	26	100%
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pendampingan administrasi dan keuangan desa	65 dok	11	11	11	100%	13	13	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan fungsinya, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pengoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan
- Penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan
- Pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, indikator yang menjadi target sasaran Kecamatan Wonosegoro dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021
    a. Prosentase kejadian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang ditindaklanjuti, dapat terealiasi sebesar 100%.
    b. Cakupan kegiatan Hari Besar yang dilaksanakan dengan realisasi 0%.
    c. Tingkat ketepatan pengisian Kepala Desa/Perangkat Desa, dengan realisasi 100%.
    d. Persentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi realisasi 100%.
    e. Capaian pembayaran PBB dapat terealisasi sebesar 92,00%.
    f. Jumlah Rakor Muspika dapat terealisasi 100%.
    g. Nilai SKM Kecamatan dengan realisasi dengan nilai 99,34%
    h. Cakupan pengiriman Tim Olah Raga (sepak bola) lomba ke tingkat Kabupaten dengan realisasi 0%
    i. Cakupan PKK desa yang dibina dengan realisasi 100%
    j. Cakupan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya dengan realisasi 100%
    k. Jumlah dokumen Skala Prioritas Pembangunan dengan realisasi 100%
    l. Cakupan pemeliharaan jalan di kecamatan dengan realisasi 100%

Secara detail hasil capaian terhadap indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel T-C.30

Tabel II. 2 Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	**Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah**			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	Terlaksananya pengiriman surat dinas			12 bln	12 bln			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
3	Tersedianya listrik dan internet			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
4	Terbayarnya pajak kendaraan dinas			8 unit	8 unit	12 bln	12 bln	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	
5	Terlaksananya kebersihan kantor			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
6	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
7	Tersedianya alat tulis kantor			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
8	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
9	Tersedianya komponen listrik			12 bulan	12 bulan	12 bln	12 bln	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
10	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			5 unit	3 unit			0 unit	3 unit	0 unit	0 unit	
11	Tersedianya bahan bacaan surat kabar			694	0	0	0	694	0	0	0	
12	Tersedianya bahan bakar bagi kendaraan dinas			2300 liter	2430 liter	12 bln	12 bln	2300 liter	2430 liter	12 bln	12 bln	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
13	Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
14	Terlaksananya keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
15	Terlaksananya kebersihan kantor			12 bulan	12 bulan	12 bln	12 bln	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
16	**Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah**			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
17	Terlaksananya pembangunan rumah dinas			0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	
18	Terlaksananya penataan lingkungan kantor			1 kegiatan	0 keg	0 keg	0 keg	0 keg	0 keg	0 keg	0 keg	
19	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
20	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Terlaksananya pemeliharaan jalan/rehab jalan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
21	**Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah**			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
22	Tersusunnya dokumen LKjIP			1 dok	1 dok			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
23	Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun			1 dok	1 dok			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
24	**Cakupan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan**			**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**			**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	
25	Terlaksananya kegiatan patroli wilayah			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
26												
27	**Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, sosial, keuangan dan olah raga**			**2 kegiatan**	**2 kegiatan**			**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	
28	Terlaksananya fasilitasi kegiatan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan			11 desa	11 desa			11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	
29	Terlaksananya fasilitasi kegiatan olah raga			1 keg	0 keg	0 keg	0 keg	0	0 keg	0 keg	0 keg	
30	**Terlaksananya Rakor Muspika/ Perangkat Desa**			**12 bulan**	**12 bulan**			**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	
31	Terlaksananya rakor muspika			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
32	**Cakupan fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan/ Kelurahan**			**2 kegiatan**	**2 kegiatan**			**0 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	
33	Terlaksananya kegiatan memperingati HUT RI dan hari besar lainnya			2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	0 keg	2 keg	2 keg	2 keg	
34	Terlaksananya kegiatan keagamaan			1 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	0 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	
35	**Terlaksananya pengisian perangkat desa/ kelurahan**			**11 desa**	**2 desa**			**-**	**2 desa**	**11 desa**	**11 desa**	
	Terlaksananya monitoring pengisian perangkat desa			2 desa	2 desa	11 desa	11 desa	2 desa	2 desa	11 desa	11 desa	
	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan			**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**			**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	
	Terlaksananya rakor organisasi perempuan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan desa/ kelurahan			**11 desa**	**11 desa**			**11 desa**	**11 desa**	**11 desa**	**11 desa**	
	Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa			11 desa	11 desa			11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	
	Terlaksananya pembinaan administrasi desa			11 desa	11 desa			11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Terlaksananya evaluasi penyusunan APB Desa			11 desa	11 desa			11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	
	Terlaksananya implementasi undang-undang desa			11 desa	11 desa			0 desa	0 desa	0 desa	0 desa	
	Tersusunnya dokumen evaluasi kegiatan di kecamatan			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Tersusunnya dokumen laporan evaluasi RKPDes			1 dokumen	1 dokumen			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja			3 dokumen	2 dokumen			2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	
	Tersusunnya DSP usulan kegiatan kecamatan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Terlaksanaya fungsi layanan di Kecamatan			**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
	Terlaksananya fungsi layanan di kecamatan			12 bulan	12 bulan	2 keg	2 keg	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 - 2026
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target tahun 2022 sebesar 82,11 sedangkan realisasinya sebesar 84,84 atau 103, 18 %
   b. Nilai sakip Kecamatan Wonosegoro dengan target tahun 2022 sebesar 80,45 sedangkan realisasinya sebesar 79,15 atau 98,38 %

Secara detail hasil capaian terhadap indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel T-C.30

Tabel II. 3 Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	**Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	Jumlah IMB yang diusulkan			11 desa	11 desa			11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	
3	Jumlah sosialisasi pelayanan di kecamatan			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
4	Jumlah kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
5	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
6	Jumlah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat kecamatan			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
7	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
8	Jumlah kegiatan Peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan			2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	
9	Jumlah kegiatan kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan			3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
10	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
11	Jumlah dokumen Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
12	**Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
13	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
14	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan			0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Jumlah kegiatan partisipasi pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
17	Jumlah desa yang menerima bantuan / modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan			0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
18	**Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
19	Jumlah desa yang terfasilitasi pedampingan administrasi dan keuangan desa			11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	
20	**Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
21	Gaji dan Tunjangan ASN			1 th	1 th	1 th	1 th	1 th	1 th	1 th	1 th	
22	Gaji PTT dan Tenaga Honorer sebanyak 1 orang			1 th	1 th	1 th	1 th	1 th	1 th	1 th	1 th	
23	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
24	Peralatan rumah tangga			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
25	Peralatan dan perlengkapan kantor			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
26	Bahan Logistik Kantor			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
27	Barang Cetakan dan Penggandaan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
28	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Bahan/Material			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
30	Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
31	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
32	Jasa Surat Menyurat			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
33	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
34	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
35	Peralatan kerja yang dipelihara			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
36	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan bangunan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
37	Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
38	Peralatan dan Mesin lainnya			3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	
39	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2024 diarahkan pada penyelesaian dan penuntasan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan program unggulan daerah, dengan kebijakan yang diarahkan pada " Pembangunan Infrastruktur yang tangguh, ikonik, mandiri, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan".

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 menetapkan visi yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu " **BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI" Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)**. Sebagai upaya untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Boyolali, yaitu :

a. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan.
b. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.
c. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional.
d. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
e. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Boyolali tahun 2023 diarahkan untuk akselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah pada misi tersebut diatas. Penjelasan tiap misi sebagai berikut :

a. **Misi 1 Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan Meningkatnya nilai investasi.** Dengan sasaran antara lain : meningkatnya peran perusahaan dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan ; meningkatnya pemanfaatan BMD untuk meningkatkan PAD; meningkatnya perusahaan yang ramah lingkungan; meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata; meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian; meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian; meningkatnya kenyamanan

transportasi; meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa; menurunnya pengangguran; meningkatnya perlindungan hak hak tenaga kerja dan promosi lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi seluruh pekerja; meningkatnya pertumbuhan sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap perekonomian.

b. **Misi 2 Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.** Dengan sasaran antara lain : meningkatnya akses dan kulitas pendidikan; meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan; meningkatnya nilai budaya lokal sebagai identitas dan katalisator pembangunan; meningkatnya pengendalian penduduk dan keluarga yang berkualitas; meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak; meningkatnya kesejahteraan PMKS; meningkatnya keberdayaan desa; meningkatnya kohesivitas soisal masyarakat; menurunnya resiko bencana;
c. **Misi 3 Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional.** Dengan sasaran antara lain : meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian; meningkatnya agro industri susu; meningkatnya kualitas susu; meningkatnya ketahanan pangan;
d. **Misi 4 Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.** Dengan sasaran antara lain : meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; meningkatnya integritas dan kapasitas pemerintah daerah; meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik; terwujudnya smart governance Boyolali;
e. **Misi 5 Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing.** Dengan sasaran antara lain : meningkatnya Akses Rumah Layak Huni; meningkatnya kualitas prasarana, sarana dan utilitas permukiman berbasis smartness; meningkatnya kualitas bangunan dan penataan ruang; meningkatnya kualitas air; meningkatnya kualitas udara; meningkatnya kualitas tutupan lahan; meningkatnya penanganan sampah.

Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Boyolali

1. Isu Strategis Pembangunan

Memperhatikan gambaran kondisi daerah dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan. Isu – isu global,

nasional, dan regional termasuk dampak dari pandemi Covid- 19, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

1. **Pertumbuhan Ekonomi dan Iklim Investasi yang Berwawasan Lingkungan**

   Pertumbuhan ekonomi masih menjadi pintu masuk bagi pengembangan ekonomi daerah. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Boyolali tumbuh di angka sekitar 5,9% pada dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Namun demikian, angka tersebut masih bisa digenjot ke angka yang lebih tinggi dengan membuka peluang investasi yang lebih tinggi. Boyolali merupakan daerah dengan potensi investasi sangat terbuka mengingat dari sisi akses cukup mudah karena dilalui oleh jalan tol menuju Semarang dan dekat dengan salah satu pusat ekonomi terbesar di wilayah tenggara Jawa Tengah yaitu Kota Surakarta. Potensi investasi ada di berbagai sektor terutama pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata.

   Namun demikian , adanya kebutuhan untuk menggenjot perekonomian melalui peningkatan peluang investasi di Boyolali juga harus memperhatikan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui investasi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan kondisi lingkungan yang berkaitan dengan daya tampung dan daya dukung kewilayahan. Dengan demikian isu strategis yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi sangat tepat jika dirumuskan sebagai berikut : Pertumbuhan Ekonomi dan Iklim Investasi yang Berwawasan Lingkungan. Isu ini cukup merepresentasikan kebutuhan pengembangan ekonomi daerah ke depan yang juga selaras dengan isu strategis pada level provinsi dan sejalan dengan spirit pembangunan ekonomi nasional.

2. **Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan**

   Persentase penduduk miskin pada tahun 2019 berada pada angka 9,53%, mengalami penurunan sebanyak

2,92% dari tahun 2015. Rata- rata penurunan penduduk miskin di Kabupaten Boyolali per tahun mencapai 0,73%. Menurunya persentase kemiskinan juga turut disertai dengan capaian positif indeks kedalaman dan indeks keparahan keminskinan yang mengalami penurunan di setiap tahunnya.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali masih perlu ditingkatkan, mengingat jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih menunjukkan angka yang cukup tinggi,yaitu 66,885. Tercatat 90,23% atau 60,351 dari total jumlah PMKS adalah berasal dari keluarga miskin. Kondisi kemiskinan dapat menyebabkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Masalah lain yang perlu diselesaikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali adalah terkait tumpang tindihnya data penduduk miskin. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Pemutakhiran dan verifikasi data penduduk miskin menjadi penting untuk dilakukan dalam periode pembangunan yang akan datang, guna meningkatkan akurasi pemberian bantuan agar lebih tepat sasaran. Selain itu, intervensi yang lebih menyeluruh perlu dilakukan, tidak hanya pada pembenrian bantuan sosial tetapi penanganan lintas sektor melalui pengembangan ekonomi dan peningkatan fasilitas dasar.

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali perlu diikuti dengan upaya mengurangi tingkat kesenjangan sosial Adanya isu kesenjangan sosial merupakan indikasi tidak meratanya akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi di suatu daerah. Kondisi tersebut dapat terlihat dari sebaran masyarakat miskin yang hanya terkonsentrasi dibeberapa wilayah. Manyoritas rumah tangga miskin di Kabupaten Boyolali berada di wilayah bagian timur, yakni di Kecamatan Nogosari, Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Andong dengan total mencapai

27,042 atau 20,7% dari total rumah tangga miskin di Kabupaten Boyolali. Kondisi ini masyarakat perlu menjadi fokus lain dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

3. Pembangunan SDM yang Inklusif dan Berdaya Saing

Kualitas SDM dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilihat dari tiga aspek yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Nilai IPM Kabupaten Boyolali tahun 2020 sebesar 74,25 dengan rata – rata petumbuhan 0,51 per tahun. Jika dibanding dengan daerah sekitar, capaian IPM Kabupaten Boyolali masih perlu ditingkatkan.

Dilihat dari aspek pendidikan, angka Rata- rata Lama Sekolah (RLS) kabupaten Boyolali sebesar 7, 84 tahun. Artinya , rata- rata penduduk di Boyolali dapat menempuh pendidikan setara kelas 1 SMP. Merujuk pada program wajib belajar sembilan tahun, maka capaian tersebut perlu ditingkatkan. Pada aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) cukup tinggi yaitu sebesar 75,95. Namun, dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 123 per 100.000 kelahiran hidup masih diatas rata- rata target capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mengharuskan berada pada angka 70 per 100.000. Selain itu, masih perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan dan peningkatan pada setiap jenis pelayanan kesehatan.

Selain dimensi IPM, peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan inklusif juga harus memperhatikan aspek kesetaraan gender dalam setiap proses pembangunan. Kesetaraan gender dapat dilihat Indeks Pembangunan Gender (IPG). Selama periode 2016-2020, capaian IPG Kabupaten Boyolali cukup bagus yakni diatas angka 90. Namun demikian, capaian tersebut belum menunjukkan kondisi kesetaraan secara penuh. Untuk itu, masih perlu upaya pengarusutamaan gender dalam setiap pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, kontrol, menikmati manfaat pembangunan hingga evaluasi pembangunan. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan menitikberatkan aspek kolaborasi

antara perempuan dan laki – laki sehingga menciptakan kesetaraan akses dan keberdayaan dalam pembangunan.

4. Peningkatan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Boyolali masih perlu untuk terus ditingkatkan. Meskipun seluruh kecamatan sudah terhubung dengan jaringan jalan, kualitas jalan di Kabupaten Boyolali masih perlu untuk ditingkatkan. Jika dilihat berdasarkan jenis permukaan : 70, 54 % jalan di Kabupaten Boyolali berupa aspal; 4,88% berupa kerikil; 0,34 % berupa tanah dan 24,25% sisanya berupa rigid pavement. Lebih dari itu, pada tahun 2020, sekitar 17,75% dari total panjang jalan sudah dalam kondisi rusak dan rusak berat.

Di samping ketersediaan jalan, peningkatan konektivitas wilayah juga perlu di dukung dengan transportasi umum yang memadai. Kondisi transportasi umum di Kabupaten Boyolali saat ini sedang menghadapi tantangan yang cukup serius. Kondisi ini ditandai dengan semakin menurunnya armada yang melayani trayek angkutan. Selain itu, kenyamanan dan keselamatan transportasi juga perlu untuk ditingkatkan. Jumlah korban kecelakaan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, jumlah korban tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 1.194 orang. Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan edukasi kepada masyarakat tentang tertib berlalu lintas masih perlu untuk dilakukan.

Terkait akses terhadap air, persentase penduduk yang terlayani penggunaan air baku pada tahun 2019 mencapai 89,90%. Meskipun demikian, persentase ketersediaan air baku masih mencapai 6,70%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hanya 6,70% dari total kebutuhan air baku daerah yang sudah terpenuhi. Ketersediaan air masih menjadi tantangan bagi Kabupaten Boyolali. Hal ini disebabkan oleh kondisi alam yang sebagian berupa tanah berbatu dan pasir dan bersifat porous. Di samping itu, pada tahun 2020 cakupan penduduk yang mengakses air minum layak dan berkelanjutan masih berada pada angka 90,50% , artinya belum mencapai target SDGs yaitu sebesar 100%.

Pembangunan infrastruktur dasar juga bertujuan untuk meningkatkan kalayakhunian. Upaya ini meliputi pengembangan kawasan permukiman yang memenuhi standar teknis kelayakan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Pada tahun 2020, sisa luas kawasan kumuh yang belum tertangani adalah sebesar 5,07 ha atau sekitar 10,43% dari total luas kawasan kumuh yang ditetapkan melalui SK Bupati Boyolali Nomor 662.1/324 Tahun 2017.

Di samping itu, berdasarkan SK Kumuh yang ditetapkan pada tahun 2020, luas kawasan kumuh yang harus segera ditangani adalah sebesar 87,85 ha. Selain itu, penyediaan rumah layak huni juga masih perlu untuk ditingkatkan. Pada tahun 2020, ketersediaan rumah layak huni mencapai 88,00%. Data yang tersedia menunjukkan bahwa 11,993% atau sekitar 38,384 unit rumah di Boyolali masih termasuk dalam kategori rumah tidak layak huni.

5. Reformasi Birokrasi yang Akuntabel dan Agile

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Boyolali telah berjalan baik di dalam beberapa aspek yang ditandai dengan capaian kinerja yang memenuhi target nasional. Aspek pengawasan memiliki Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Level 3, serta kinerja penguatan integritas aparatur dan pejabat negara yang menjadi tolok ukur nasional dengan 100% kepatuhan pelaporan harta kekayaan. Aspek akuntabilitas keuangan mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ditopang oleh tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berjalan sistematis dengan sinergi antar perangkat daerah maupun dengan pemerintah desa. Tata kelola yang efektif dan berbasis elektronik, baik dalam pelayanan publik maupun integrasi dan koordinasi antar perngkat daerah.

Isu tata kelola yang masih menjadi tantangan Kabupaten Boyolali adalah belum optimalnya akuntabilitas kinerja yang ditandai dengan capaian SAKIP “B”. Persoalan akuntabilitas kinerja perlu diurai mulai dari sisi hulu, yakni peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, serta terciptanya manajemen kinerja berupa pembagian kinerja yang sinergis

antara kepala daerah dengan struktur perangkat daerah. Sedangkan capaian makro sebagai penanda utama reformasi birokrasi, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi masih belum optimal meskipun mengalami peningkatan, yaitu 52,27 pada tahun 2018 menjadi 56,84 pada tahun 2019. Pelembagaan reformasi birokrasi perlu diperkuat dengan tidak bergantung kepada salah satu perangkat daerah, misalnya Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Reformasi birokrasi membutuhkan sinergi dan komitmen seluruh perngkat daerah, karena setiap perngkat daerah memegang peran penting dalam pencapaian komponen pengungkit maupun komponen hasil dari reformasi birokrasi.

Isu reformasi birokrasi yang mendesak pula adalah penciptaan birokrasi yang tangkas dan lincah (agile) dalam memberikan pelayanan dan menjalankan pembangunan. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi mandatoris bagi pelayanan publik (pemerintah) dan hak bagi setiap warga. Hal ini selaras dengan penguatan Kabupaten Boyolali sabagai daerah pro investasi. Adanya pelayanan yang tepat waktu turut menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kabupaten Boyolali telah memiliki modal dengan penerapan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Meskipun demikian, tetap perlu diperkuat perluasan akses layanan disertai komitmen dan kesepahaman antar perngkat daerah, serta penciptaan kelembagaan yang efisien dan prosedur yang tidak berbelit.

6. Penanganan Bencana Alam dan Non Alam

Kabupaten Boyolali juga merupakan daerah rawan bencana terutama bencana alam. Kabupaten Boyolali memiliki kondisi geografis dan topografis yang beragam sehingga memiliki kerawanan bencana yang cukup tinggi. Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Boyolali tahun 2011-2031, empat jenkis bencana yang paling rawan terjadi di Boyolali antara lain banjir, banjijr lahar dingin, tanah longsor , dan kebakaran yang terbesar di semua bagian wilayah. Berdasarkan dokumen RPJPD Kabuapten Boyolali tahun 2005-2025, tingginya kerawanan bencana disebabkan oleh kurang terintegrasinya pengelolaan sumber daya alam,

lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Artinya, aspek pembangunan tidak sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana.

Tolok ukur keberhasilan penanggulangan bencana adalah Indeks Resiko Bencana (IRB) dan Indeks Kapasitas. Tahun 2020, Indeks Resiko Bencanadi Kabupaten Boyolali sebesar 130, 32 dan Indeks Kapasitas Kabupaten Boyolali sebesar 82. Artinya, penanggulangan bencana semakin optimal jika Indeks Kapasitas besar sehingga Indeks Resiko Bencana akan menurun. Indeks Kapasitas dipicu oleh beberapa komponen seperti penguatan kelembagaan penanggulangan bencana, ketersediaan sarana prasarana kebencanaan, kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana yang semakin meningkat, serta semakin optimalnya penggunaan sistem informasi kebencanaan.

Selain bencana alam, Kabupaten Boyolali juga tidak terlepas dari bencana non alam terutama dengan adanya pandemi. Saat ini semua daerah termasuk Boyolali sedang dilanda bencana non alam berupa pandemi Covid-19. Hingga saat ini, jumlah total kasus Covid-19 di Boyolali mencapai 24,606 dengan korban meninnggal sebanyak 1.412 orang atau sekitar 5,74%. Meskipun jumlahnya terus menurun, namun demikian isu pandemi ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam perencanaan pembangunan.

7. Inovasi dan Teknologi Informatika

Sejalan dengan apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan provinsi, isu strategis lain yang juga mendesak untuk dikedepankan dalam perencanaan pembangunan adalah inovasi kebijakan publik melalui penggunaan teknologi informasi yang masif. Inovasi kebijakan dibutuhkan untuk menopang pencapaian visi dan misi daerah terutama dalam rangka: meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan responsivitas dan efektifivas pelayanan publik, serta menjadi katalisator pembangunan sektoral terutama sektor- sektor unggulan daerah. Dengan dasar tersebut, dorongan terhadap inovasi (baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah

) akan menjadi penentu cepat atau lambatnya pembangunan Kabupaten Boyolali.

9). Prioritas dan Pembangunan Daerah Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah tahun 2024 ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah guna **“ Pembangunan Infrastruktur yang tangguh, ikonik, mandiri, produktif , berdaya saing dan bekerlanjutan “.’**

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 diarahkan pada pembangunan infrastruktur berorientasi untuk peningkatan konektivitas antar pusat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Boyolali, sehingga tidak terdapat ketimpangan antar wilayah. Infrastruktur juga berperan membangun ikon daerah yang mampu mengakselerasi pembangunan pariwisata dan sektor lainnya.

Prioritas pembangunan dalam arah kebijakan ini berupa :

1. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat pertumbuhan dan antar kecamatan, termasuk peningkatan pembangunan infrastruktur di wilayah Boyolali utara;
2. Peningkatan kenyamanan transportasi melalui penguatan kualitas layanan perhubungan;
3. Pembangunan infrastruktur ikonik, berupa taman hiburan rakyat, sarana simulasi ibadah haji, prototype pembangunan kantor desa dengan logo Boyolali, pembangunan ruang terbuka hijau dengan berbagai fasilitas bagi warga;
4. Revitalisasi infrastruktur perdagangan melalui pemindahan pasar;
5. Penataan wilayah melalui perubahan status desa/ kelurahan untuk efektivitas pembangunan dan pelayanan publik;
6. Pembangunan RTLH untuk masyarakat yang membutuhkan dilengkapi dengan jamban sehat;
7. Penguatan literasi masyarakat melalui penyusunan dan diseminasi bahan bacaan berbasis nilai budaya “ Boyolali Kaya Cerita “ serta pembangunan perpustakaan.

Bedasarkan uraian tersebut diatas, Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok "Membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan". Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
b. Penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
c. Pengoordinasikan, pembinaan, fasilitasi dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali tersebut di atas adalah untuk mendukung :

Misi keempat, yaitu Boyolali Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Kualitas sumber daya manusia harus selalu ditingkatkan agar memiliki daya saing dengan daerah lain yang lebih maju. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia ditandai oleh terpenuhinya hak sosial masyarakat dengan cakupan akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemuda dan olah raga, serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh bidang pembangunan (Indek Ketimpangan Gender). Tujuan peningkatan kualitas pembangunan manusia selaras dengan *Sustainable Development Goals*: (i) tujuan ketiga yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia; (ii) tujuan keempat yakni menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang; (iii) tujuan kelima yakni

menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan; (iv) tujuan kedelapan yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.

Sasaran yang akan diwujudkan dari tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Wonosegoro secara umum dapat dikatakan baik, hal ini bisa dilihat dari tingkat capaian kinerja terhadap indikator yang ditetapkan baik dalam IKK maupun IKU. Sebagian besar tingkat capaian telah mencapai target yang direncanakan.

Hal kritis yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pelayanan di Kecamatan Wonosegoro, adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang meliputi :

2.1.1. Peningkatan pemerintahan yang efektif, efisien yang ditandai dengan semakin sederhananya birokrasi serta pelayanan yang cepat, tepat dan akurat serta murah.

2.1.2. Peningkatan pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang ditandai dengan kepastian dan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi dan program/kegiatan untuk masyarakat.

2.1.3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan perekonomian masyarakat dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

2.1.4. Peningkatan sistem pengendalian keamanan lingkungan secara sinergis antara pemerintah dan masyarakat.

2.4 2Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024, tidak tercantum rencana kegiatan yang ada di Kecamatan, sehingga tidak bisa dibandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Hasil analisis kebutuhan Kecamatan Wonosegoro dapat dilihat dalam tabel T-C.31.

Tabel II. 4 Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah: Kecamatan Wonosegoro

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kec Wonosegoro**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	**100**	**2.982.852.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kec Wonosegoro**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	**100**	**2.982.852.000**	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Wonosegoro	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangjat daerah	8 keg	**2.726.592.000**	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec Wonosegoro	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangjat daerah	8 keg	**2.726.592.000**	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Wonosegoro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang/bln	2.703.192.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Wonosegoro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang/bln	2.703.192.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 dok	23.400.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 dok	23.400.000	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	0	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	0	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dok	0	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dok	0	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	0	Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dok	0	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dok	0	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 lap	0	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 lap	0	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	**0**	Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	0	
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec Wonosegoro	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 keg	0	**Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kec Wonosegoro	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 keg	0	
	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 lap	0	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 lap	0	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaia Perangkat Daerah	Kec Wonosegoro	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 keg	0	**Kegiatan : Administrasi Kepegawaia Perangkat Daerah**	Kec Wonosegoro	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 keg	0	
	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 dok	**0**	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 dok	**0**	
	Kegiatan : Adminitrasi Umum	Kec Wonosegoro	Fungsi layanan administrasi	10 keg	**127.000.000**	**Kegiatan : Adminitrasi Umum**	Kec Wonosegoro	Fungsi layanan administrasi	10 keg	**127.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perangkat Daerah		perkantoran perangkat daerah			**Perangkat Daerah**		perkantoran perangkat daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Wonosegoro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Wonosegoro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.000.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Wonosegoro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	0	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Wonosegoro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	0	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Wonosegoro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Wonosegoro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Wonosegoro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Wonosegoro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	25.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Wonosegoro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Wonosegoro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.000.000	
	Penyediaan Bahan/ Material	Kec Wonosegoro	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	15.000.000	Penyediaan Bahan/ Material	Kec Wonosegoro	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	15.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 lap	62.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 lap	62.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 lap	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 lap	10.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 dok	**0**	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 dok	**0**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 dok	**0**	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 dok	**0**	
	Kegiatan : Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Wonosegoro	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 keg	**59.960.000**	**Kegiatan : Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec Wonosegoro	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 keg	**59.960.000**	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	900.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	900.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanV	12 lap	59.060.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	59.060.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 lap	**0**	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 lap	0	
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kec Wonosegoro	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 keg	**69.300.000**	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	Kec Wonosegoro	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 keg	**69.300.000**	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Wonosegoro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	15.300.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Wonosegoro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	15.300.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec Wonosegoro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	4.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec Wonosegoro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	4.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainya	Kec Wonosegoro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainya	Kec Wonosegoro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	50.000.000	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Wonosegoro	Jumlah kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat	7 keg	0	**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec Wonosegoro	Jumlah kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat	7 keg	0	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	0	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	0	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	0	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	0	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	0	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	0	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	0	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	0	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dok	0	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dok	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan/Subkeg**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
			Perubahan DPA-SKPD					Perubahan DPA-SKPD			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 lap	0	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 lap	0	
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 lap	0	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 lap	0	
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kec Wonosegoro**	**Persentase layanan public kecamatan tepat waktu**	**87 %**	**100.000.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kec Wonosegoro**	**Persentase layanan public kecamatan tepat waktu**	**87 %**	**100.000.000**	
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Wonosegoro	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 keg	0	**Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kec Wonosegoro	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 keg	0	
	Sub Kegiatan : Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 lap	0	Sub Kegiatan : Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 lap	0	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 dok	0	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 dok	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Kec Wonosegoro	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 keg	0	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**	Kec Wonosegoro	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 keg	0	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 lap	0	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 lap	0	
	Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec Wonosegoro	Jumlah kegiatan koordinasi pemeliharaan	1 keg	0	**Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Kec Wonosegoro	Jumlah kegiatan koordinasi pemeliharaan	1 keg	0	
	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/Atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dok	**100.000.000**	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/Atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dok	**100.000.000**	
3	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec Wonosegoro**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**25.000.000**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec Wonosegoro**		**100**	**25.000.000**	
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Wonosegoro	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 keg	25.000.000	**Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kec Wonosegoro	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 keg	25.000.000	
	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	13 lap	25.000.000	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	13 lap	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
4	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kec Wonosegoro**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**70.000.000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kec Wonosegoro**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100**	**70.000.000**	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Wonosegoro	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 keg	70.000.000	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec Wonosegoro	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 keg	70.000.000	
	Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Wonosegoro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 org	50.000.000	Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Wonosegoro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 org	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Wonosegoro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 org	20.000.000	Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Wonosegoro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 org	20.000.000	
5	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kec Wonosegoro**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	**150.000.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kec Wonosegoro**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	**150.000.000**	
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec Wonosegoro	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 keg	150.000.000	**Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kec Wonosegoro	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 keg	150.000.000	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Wonosegoro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga	0	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Wonosegoro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga	0	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 lap	150.000.000	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Wonosegoro	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 lap	150.000.000	
6	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec Wonosegoro**	**Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang diitindaklanjuti**	**100**	**0**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec Wonosegoro**	**Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang diitindaklanjuti**	**100**	**0**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan : Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Wonosegoro	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 keg	0	**Kegiatan : Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec Wonosegoro	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 keg	0	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 dok	0	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 dok	0	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 dok	0	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 dok	0	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 dok	0	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Wonosegoro	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 dok	0	
	JUMLAH				**3.327.852.000**					**3.327.852.000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain melakukan menggali permasalahan/kebutuhan dari internal kantor, Kecamatan Wonosegoro juga menjaring aspirasi atau usulan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun LSM, yang langsung ditujukan ke Kecamatan Wonosegoro berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Desa dan Kecamatan. Berdasarkan atas hasil Musrenbang baik di Desa maupun Kecamatan, usulan dari masyarakat terkait dengan pelayanan/tugas pokok fungsi di Kecamatan Wonosegoro sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel II. 5 Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah : Kecamatan Wonosegoro

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penataan Bangunan Gedung/ Pembangunan Aula /Gedung Pertemuan Kantor Kec. Wonosegoro	Kantor Kec. Wonbosegoro	2.000.000.000	250 m2	Bidang Infrastruktur
2	Penyelenggaraan Jalan/ Jalan PU penghubung Banyusri Kauman (Tretes-Banyusri	Desa Banyusri	4.000.000.000	1500 m2	Bidang Infrastruktur
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase/ tidak ada drainase di sepanjang jalan trotoar (Depan Pasar Wonosegoro)	Desa Wonosegoro	350.000.000	300 m	Bidang Infrastruktur
4	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian/ Bantuan Jalan Usaha Tani	Desa Bandung	845.000.000	1500 m2	Bidang Infrastruktur
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase/ Drainase di jalan kabupaten (Ruas bJrebeng-Cukilan)	Desa Karangjati	1.500.000.000	2000 m2	Bidang Infrastruktur
6	Penyelenggaraan Jalan/ Pembangunan jembatan (penghubung antar Desa , Ruas Tretes—Banyusri)	Desa Kauman	5.000.000.000	43 m2	Bidang Infrastruktur
7	Penyelenggaraan Jalan/ Penggantian jembatan (Penggantian kaki Jembatan)	Desa Lemahireng	5.000.000.000	60 m2	Bidang Infrastruktur
8	Penyelenggaraan Jalan/ Penggantian Jembatan Gedukan	Desa Ketoyan	500.000.000	1 kegiatan	Bidang Infrastruktur
9	Pengelolaan Aplikasi dan Informatika/ Pembuatan aplikasi sederhana	Kantor Kec. Wonbosegoro	200.000.000	1 kegiatan	Bidang Non Infrastruktur
10	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Pengadaan Benih Kelapa Genjah	Desa Guwo	500.000.000	5000 benih	Bidang Non Infrastruktur

11	Penyelenggaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Kauman	3.000.000.000	25 buah	Bidang Non Infrastruktur
12	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanin/ Jaringan Irigasi tersier	Desa Ketoyan	400.000.000	500 meter	Bidang Non Infrastruktur
13	Penataan Desa/ TMMD	Desa Bojong	700.000.000	1 kegiatan	Bidang Non Infrastruktur
14	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat/ Kepersertaan Jamkesda	Desa Gosono	150.000.000	150 orang	Bidang Non Infrastruktur
15	Pengelolaan persampahan/ penyediaan alat angkut sampah untuk penanganan sampah (Gerobak Sampah)	Desa Bolo	1.100.000.000	7 unit	Bidang Non Infrastruktur
16	Pemasaran Pariwisata/ Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Boyolali,	Desa Karangjati	350.000.000	1 kegiatan	Bidang Non Infrastruktur

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan, yang paling relevan adalah reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Prioritas pembangunan tersebut telah menjadi arah tujuan, sasaran dalam menyusun program dan kegiatan di Kecamatan Wonosegoro.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan tersebut akan dituangkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Penjabaran tujuan dalam Renja merupakan turunan dari Renstra berdasarkan pada misi yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional
4. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi organisasi. Adapun rincian sasaran tersebut sebagai berikut :

Tujuan 1. : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dijabarkan dengan sasaran sebagai berikut :

1). Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik , dengan indikator kinerja nilai IKM kecamatan

2). Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah , dengan indikator kinerja adalah nilai SAKIP kecamatan Wonosegoro

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Wonosegoro Tahun 2024 merupakan penjabaran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Uraian tentang program dan kegiatan di Kecamatan Wonosegoro dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, sebagai berikut :
   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
   b. Peningkatan Pelayanan Publik
   c. Peningkatan Kesejateraan Rakyat
   d. Kondisi sarana prasrana gedung kantor
2. Rekapitulasi program dan kegiatan :
   a. Jumlah : 6 program dan 15 kegiatan
   b. Lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kecamatan beberapa kegiatan yang berlokasi di desa yaitu :
      - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
      - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
      - Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
   c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar : Rp. 3.768.595.000,-
3. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan, yaitu sebagai berikut:

Detail rencana program dan kegiatan Kecamatan Wonosegoro Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel T-C.33

Tabel IV. 1 Tabel T-C.33.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah : Kecamatan Wonosegoro.

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana) 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**										
7	01					**KECAMATAN**				**3.768.595.000**						**4.134.014.000**
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	Kec Wonosegoro	**100**	**2.630.685.000**			**2.630.685.000**			**2.996.014.000**
7	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dibuat**	Kec Wonosegoro	**25 Dok**	**0**			**0**			**0**
7	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Wonosegoro	2 dok	0			0			0
7	01	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kec Wonosegoro	1 dok	0			0			0
7	01	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kec Wonosegoro	1 dok	0			0			0
7	01	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kec Wonosegoro	1 dok	0			0			0
7	01	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kec Wonosegoro	1 dok	0			0			0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana) 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
7	01	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Wonosegoro	15 lap	0			0			0
7	01	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Wonosegoro	4 lap	0			0			0
7	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Gaji dan Tunjangan ASN, Gaji Non ASN**	**Kec Wonosegoro**	**1 Tahun**	**2.259.916.000**			**2.259.916.000**			**2.625.335.000**
7	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Wonosegoro	23 org/ bulan	2.234.044.000			2.234.044.000		100 %	2.599.463.000
7	01	01	2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Wonosegoro	13 dokumen	25.872.000			25.872.000		100 %	25.872.000
7	01	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verfikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verfikasi Keuangan SKPD	Kec Wonosegoro	12 dokumen	0			0			0
7	01	01	2	02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec Wonosegoro	12 dokumen	0			0			0
7	01	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Wonosegoro	1 laporan	0			0			0
7	01	01	2	02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kec Wonosegoro	1 dokumen	0			0			0
7	01	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kec Wonosegoro	18 laporan	0			0			0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana) 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
							Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
7	01	01	2	02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec Wonosegoro	1 dokumen	0			0			0
7	**01**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kec Wonosegoro**	**0**	**0**					**0**	**0**
7	01	01	2	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kec Wonosegoro	3 laporan	0			0			0
7	**01**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec Wonosegoro**	**0**	**0**			**0**		**0**	**0**
7	01	01	2	05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec Wonosegoro	13 dokumen	0			0			0
7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**Fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**Kec Wonosegoro**	10 kegiatan	**199.228.000**			**199.228.000**			**199.228.000**
7	01	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec Wonosegoro	4 paket	2.000.000			2.000.000		100 %	2.000.000
7	01	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec Wonosegoro	4 paket	0			0			0
7	01	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec Wonosegoro	4 paket	3.000.000			3.000.000		100 %	3.000.000
7	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec Wonosegoro	4 paket	35.000.000			35.000.000		100 %	35.000.000
7	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Wonosegoro	4 paket	14.100.000			13.500.000		100 %	14.100.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana) 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
							yang Disediakan									
7	01	01	2	06	0007	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec Wonosegoro	4 paket	18.428.000			19.028.000		100 %	18.428.000
7	01	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Wonosegoro	4 laporan	102.100.000			102.100.000		100 %	102.100.000
7	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Wonosegoro	4 laporan	24.600.000			24.600.000		100 %	24.600.000
7	01	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kec Wonosegoro	13 dokumen	0			0		0	0
7	01	01	2	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec Wonosegoro	13 dokumen	0			0		0	0
7	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dibeli	**Kec Wonosegoro**		**30.000.000**			**30.000.000**			**0**
7	01	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Kec Wonosegoro	0 unit	0			0			0
7	01	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec Wonosegoro	2 unit	30.000.000			30.000.000		100 %	30.000.000
7	01	01	2	07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec Wonosegoro	0 unit	0			0			0
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Wonosegoro**		**60.960.000**			**60.960.000**			**60.960.000**
7	01	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Wonosegoro	12 laporan	900.000			900.000		100 %	900.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana) 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
7	01	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec Wonosegoro	12 laporan	59.060.000			59.060.000		100 %	59.060.000
7	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec Wonosegoro	4 laporan	1.000.000			1.000.000		100 %	1.000.000
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Wonosegoro**		**80.581.000**			**80.581.000**			**80.581.000**
7	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec Wonosegoro	10 unit	15.300.000			15.300.000		100 %	15.300.000
7	01	01	2	09	0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipeliihara	Kec Wonosegoro	0 unit	0			0		100 %	0
7	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec Wonosegoro	66 unit	15.281.000			15.281.000		100 %	15.281.000
7	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec Wonosegoro	4 unit	50.000.000			50.000.000		100 %	50.000.000
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik Kecamatan Tepat Waktu**	**Kec Wonosegoro**	**87 persen**	**998.510.000**			**998.510.000**			**998.510.000**
7	**01**	**02**	**2**	**01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah IMB yang dilayani dengan baik**	**Kec Wonosegoro**	**1 kegiatan**	**0**			**0**			**0**
7	01	02	2	01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Kec Wonosegoro	13 laporan	0			0			0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana) 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
						Vertikal Terkait	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
7	01	02	2	01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Wonosegoro	39 dokumen	0			0			0
7	**01**	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik di Kecamatan yang Terselenggara dengan Baik**	**Kec Wonosegoro**	**0 kegiatan**	**0**			**0**			**0**
7	01	02	2	02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Diwilayah Kecamatan	Kec Wonosegoro	2 laporan	0			0			0
7	**01**	**02**	**2**	**03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah kegiatan koordinasi pemeliharaan**	**Kec Wonosegoro**	**2 dokumen**	**998.510.000**			**998.510.000**			**998.510.000**
7	01	02	2	03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec Wonosegoro	2 dokumen	998.510.000			998.510.000		100 %	998.510.000
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil koordinasi dibidang pemberdayaan masyarakt dan pembangunan yang ditindaklanjut** **Prosentase stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan (program**	**Kec Wonosegoro**	**100 persen**	**75.000.000**			**75.000.000**			**75.000.000**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana) 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
							kemiskinan)									
7	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kec Wonosegoro**	**0 tahun**	**75.000.000**			**75.000.000**			**75.000.000**
7	01	03	2	01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kec Wonosegoro	6 lembaga	0			0			0
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Wonosegoro	13 laporan	75.000.000			75.000.000		100 %	75.000.000
7	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	**Kec Wonosegoro**	**100 persen**	**0**			**0**			**0**
7	**01**	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec Wonosegoro**	**1 kegiatan**	**0**			**0**			**0**
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Wonosegoro	13 laporan	0			0			0
7	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi pemerintahan umumyang ditindaklanjuti**	**Kec Wonosegoro**	**100 persen**	**64.400.000**			**64.400.000**			**64.400.000**
7	**01**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec Wonosegoro**	**0 kegiatan**	**64.400.000**			**64.400.000**			**70.000.000**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana) 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
7	01	05	2	01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Wonosegoro	400 orang	31.900.000			31.900.000		100 %	31.900.000
7	01	05	2	01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan LaiNnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Wonosegoro	500 orang	32.500.000			32.500.000		100 %	32.500.000
7	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti**	**Kec Wonosegoro**	**100 persen**	**0**			**0**			**0**
7	**01**	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang tertib administrasi dan Keuangan Desa**	**Kec Wonosegoro**	**0 desa**	**0**			**0**			**0**
7	01	06	2	01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec Wonosegoro	8 dokumen	0			0			0
7	01	06	2	01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam Rangka	Kec Wonosegoro	26 dokumen	0			0			0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana) 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
							Adminnistrasi Tata Pemerintahan Desa									
7	01	06	2	01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec Wonosegoro	13 dokumen	0			0			0
Jumlah										**3.768.595.000**			**3.768.595.000**			**4.134.014.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan rencana target capaian kinerja yang diinginkan untuk 1 tahun mendatang. Renja ini memuat berbagai kebutuhan yang berkaitan secara langsung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonosegoro, yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Perumusan program dan kegiatan ini, mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai disertai dengan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Realisasi renja ini sangat tergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Sebagaimana tujuan renja ini yaitu “terarahnya program serta prioritas kegiatan tahunan dengan capaian rencana strategis Kecamatan Wonosegoro melalui pembiayaan APBD Kabupaten yang dilengkapi dengan indikator capaian sebagai tolak ukur penilaian kinerja”, maka renja ini tidak akan berarti banyak jika tidak dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan tidak dilaksanakanan sebagaimana mestinya. Oleh karena masih diperlukan komitmen yang kuat oleh seluruh komponen dalam rangka melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi secara terus-menerus sehingga renja ini dapat menjadi sarana dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Wonosegoro 2021-2026.

TT. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

KECAMATAN KEMUSU

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II 6
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 6
TAHUN LALU 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 31
BAB III 33
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 33
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 33
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 33
BAB IV 36
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 36
4.1 Program dan Kegiatan 36
BAB V 45
PENUTUP 45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah selama periode 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah selama periode 5 (lima) tahun. Tata cara / proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) terdiri dari :

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat

Daerah pada tahun berjalan dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota menjadi Rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan : a) rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; b) hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah meliputi kebijakan program strategis nasional (PSN), amanat pembangunan global dan nasional, dan dinamika pembangunan nasional lainnya. Selain itu juga kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 tetap memperhatikan keberlanjutan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian, sosial dan Kesehatan, serta dukungan terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) sebagai prioritas dalam penanggulangan kemiskinan. Disamping itu RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 meliputi:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan eksterm (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kemusu adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yng dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

7. Rencana Strategis Kecamatan Kemusu Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kemusu 2024 adalah untuk memberikan Landasan Kebijakan Teknis Tahunan dalam Kerangka Pencapaian Visi Misi setiap tahapnya (satu tahunan) dan sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Camat pada Akhir Tahun Anggaran sebagai bagian dari pelaksanaan Kebijakan Daerah. Renja Tahun 2024 Kecamatan Kemusu disusun sebagai acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Kemusu Tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2024 Kecamatan Kemusu adalah adalah menetapkan prioritas Program dan Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan sesuai Rencana Strategis yang dilaksanakan per tahap (tahunan) melalui sumber pembiayaan APBD dan menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Kemusu Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kemusu Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Kemusu, terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan
BAB V. PENUTUP
LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Revieu hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dan realisasi Renstra Kecamatan Kemusu yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Kemusu dan/atau realisasi APBD Kecamatan Kemusu. Adapun hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 untuk Kecamatan Kemusu sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/keluaran yang telah direncanakan yaitu:
   a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
   b. Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   g. Penyediaan Bahan/Material
   h. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

j. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
k. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
l. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
n. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
o. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
p. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
q. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
r. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
s. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
t. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan untuk Kecamatan Kemusu tidak ada.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
   a. Terbatasnya pendanaan
   b. Kelompok sasaran belum terjangkau program/kegiatan seluruhnya
   c. Kurangnya informasi kegiatan dari Instansi setingkat kecamatan (UPT) dan kejadian di masyarakat
   d. Adanya situasi Pandemi Covid 19 (PPKM), yang menyebabkan kegiatan terkendala.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah dapat memenuhi / melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, dengan demikian target capaian program Renstra PD dapat tercapai.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan meningkatkan target capaian dari tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan potensi sumber daya dan dana yang ada.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah:Kecamatan Karangede Lembar :.....

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									
				Program :									
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**								
				Kegiatan:									
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, Gaji Non ASN								
				Sub Kegiatan :									
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji Non ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	-	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	-	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	18 Laporan	100%
				Kegiatan :									
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah								
				Sub Kegiatan :									
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit	3 unit	-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

				Kegiatan :									
				Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah								
				Sub Kegiatan :									
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	-	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Kegiatan :									
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah								
				Sub Kegiatan :									
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya perbaikan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Kegiatan :									
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Sub Kegiatan :									
				Pengadaan Mebel	Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%

				Kegiatan :									
				Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat								
				Sub Kegiatan :									
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	-	-	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	15 Laporan	100%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum**								
				Kegiatan :									
				Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan PATEN di kecamatan								
				Sub Kegiatan :									
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Jumlah Laporan	-	-	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	100%

				Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Peningkatan Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Peningkatan Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
				Kegiatan :									
				Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di Kecamatan yang terselenggara								
				Sub Kegiatan :									
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah sosialisasi pelayanan di kecamatan			1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
				Kegiatan :									
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana umum dalam kondisi baik								
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 kegiatan	1 kegiatan	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									
				Kegiatan :									
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana pendukung ketentraman dan keteriban umum yang tersedia								
				Sub Kegiatan :									

				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat kecamatan	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**								
				Kegiatan :									
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan hasil Musdes yang diverifikasi								
				Sub Kegiatan :									
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
				Kegiatan :									
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang laksanakan								
				Sub Kegiatan :									
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah desa yang menerima bantuan / modal usaha ekonomi untuk lembaga	-	-	0	-	100%	0	-	100%

					kepemudaan								
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.**								
				Kegiatan :									
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								
				Sub Kegiatan :									
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti**								
				Kegiatan :									
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa								

				Sub Kegiatan :								
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pedampingan administrasi dan keuangan desa	-	-	10 Desa	10 Desa	100%	10 Desa	10; Desa	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang telah disesuaikan pada Kecamatan Kemusu yaitu pada Tabel T-C.30 sebaga berikut :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kemusu

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		NO
				Tahun 2022 (thnn-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thnn+1	Tahun 2022 (thnn-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2022 (thnn-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			81,89	82,72	83,55	85,18	82,03	82,72	83.55	82,03	
2.	Nilai SAKIP			77,52	79,85	80,10	80,35	79,10	79,85	80,10	79,10	

Pencapaian kinerja pelayanan sesuai tabel diatas sudah tergolong baik, tetapi masih perlu ditingkatkan dengan berkomitmen dan bekerjasama seluruh ASN untuk lebih meningkatkan pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kemusu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

Kecamatan Kemusu merupakan urusan Pemerintahan Umum, mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan.

Berdasarkan telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi terhadap Renstra Kecamatan Kemusu tidak dilakukan karena tidak ada keterkaitan langsung antara pelayanan atau permasalahan di tingkat kecamatan dengan permasalahan di K/L maupun PD tingkat provinsi**.**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kemusu, secara umum permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kemusu adalah berikut:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang meliputi;
   a. Masih perlunya penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik;
   b. Belum optimalnya pelayanan kependudukan di kecamatan.

   Dimana akar permasalah pada pelayanan publik di Kecamatan Kemusu yaitu:
   - Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan;
   - Belum terdistribusinya sarana dan prasarana pelayanan.
2. Belum optimalnya pengembangan potensi kewilayahan, dimana untuk Kecamatan Kemusu masalahnya terletak pada belum optimalnya fungsi koordinasi kewilayahan. Akar masalah belum optimalnya peran kecamatan sebagai instansi terdepan dalam menyusun peta masalah dan potensi kecamatan.

Dampak Pelayanan Kecamatan Kemusu terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah Visi pembangunan daerah merupakan rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih yang secara substansi memuat tentang rumusan umum mengenai keadaan yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Kondisi yang akan dicapai dalam bentuk visi, kemudian dijabarkan oleh misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.

Berbijak dari amanat dan upaya membangun sinkronisasi dengan visi pembangunan jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005 - 2025, serta dalam rangka menjawab isu strategis aktual dan menjaga keberlanjutan pembangunan, maka dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Boyolali 2021-2026 yaitu:

"Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi" Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL)

Rumusan visi tersebut memiliki muatan kondisi dan prasyarat yang akan dicapai dalam pembangunan, dengan penjabaran sebagai berikut :

Boyolali Maju berarti :

- Proses pembangunan yang berkelanjutan dan terencana sistematis diharapkan membawa kemajuan di segala bidang.
- Boyolali Maju berarti *no-one left behind,* yakni tidak ada pihak yang terlewatkan untuk merasakan kemajuan, karena semua komponen telah menjadi subyek pembangunan.
- Maju dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dan daerah yang semakin berdaya saing yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah berkualitas dan merata, serta tata Kelola pemerintahan yang semakin bersih, efektif, dan dipercaya masyarakat.

Meneruskan Pro Investasi berarti :

- Pro investasi telah menjadi arah pembangunan dan identitas Kabupaten Boyolali dengan berbagai capaian pembangunan yang telah membawa manfaat bagi masyarakat.
- Melanjutkan arah pembangunan yang pro investasi berarti tidak hanya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membangun sinergi dengan arah pembangunan nasional, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional secara sistematis dan cepat.
- Arah pro investasi membutuhkan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan, yang muaranya tetap pada kesejahteraan masyarakat Boyolali, tanpa menghadirkan ketimpangan sosial.
- Pro investasi tetap dikendalikan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yakni selain berorientasi ekonomi dan sosial, tidak kalah penting pada keberlanjutan lingkungan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta membawa manfaat pembangunan bagi generasi masa depan.

Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL) berarti :

- Pembangunan yang efektif membutuhkan prasyarat berupa sinergi dan kolaborasi seluruh komponen governance, yakni masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

- Seluruh komponen daerah diharapkan mampu melangkah dan menata bersama penuh totalitas yang merupakan implementasi dari prinsip gotong-royong.
- Gotong royong dengan menjalankan perannya masing-masing namun saling bersinergi dan berkolaborasi dalam ikatan visi pembangunan daerah maupun landasan nilai kearifan yang tertanam kuat di tengah masyarakat berupa filosofi dari Pangeran Sambernyawa "Tiji Tibeh (mati siji, mati kabeh, mukti siji mukti kabeh)".

  Visi pembangunan Boyolali dicapai dengan beberapa misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Boyolali memiliki 5 misi yang mencakup keseluruhan bidang pembangunan dengan muatan prinsip dasar dan arah pembangunan di setiap misi sebagai berikut:

Misi 1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan.

Misi 2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.

Misi 3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional, dengan

Misi 4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Misi 5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing,

dengan penjabaran sebagai berikut :

- Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- Pembangunan integritas dengan menumbuhkan karakter yang baik bagi individu maupun organisasi dalam mewujudkan tindakan maupun keputusan bagi kebaikan bersama.
- Pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance.
- Peran masyarakat yang melahirkan kontrol terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan sangat diharapkan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN. Tidak berhenti pada good and clean

governance, Boyolali berusaha menumbuhkan Smart governance, atau pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi, dengan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi-inovasi dan adaptasi teknologi yang terpadu, yang bermuara pada efektifitas, efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.

- Pemerintahan yang tertib, elok, rapi, sehat dan nyaman untuk masyarakat, dengan smart governance mendorong terwujudnya Boyolali kota cerdas/pintar, kota air, ramah lingkungan serta potensi daerah yang didorong guna kemandirian daerah dengan kinerja yang inovatif yang dapat meningkatkan daya saing daerah.

Kecamatan Kemusu selaku Unsur Pembantu Kepala Daerah mendukung dan mensukseskan Visi Misi pembangunan daerah yang merupakan rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Kecamatan Kemusu terutama memompang pelaksanaan Misi 4 Boyolali yaitu **Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya,** Hal tersebut diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra OPD 2021-2026.

Tantangan dan peluang dalam pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Kemusu dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan Kabupaten Boyolali mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

1. Tantangan
   - Merupakan wilayah penyangga pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali, sehingga ditutut kinerja yang lebih bila dibandingkan kecamatan lainnya;
   - Karakteristik masyarakat yang merupakan transisi dari desa ke kota yang cenderung kritis terhadap pemerintahan;
   - Aspek lingkungan sebagai penghambat perkembangan industri;
   - Banyaknya alih fungsi lahan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan.

2. Peluang
   - Dukungan Visi Bupati dalam mendukung investasi;
   - Merupakan daerah pengembangan perumahan komersial;
   - Pelayanan perijinan yang dipermudah;
   - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
   - Pengalihan pengelolaan PBB dari pusat ke daerah;
   - Besarnya lahan kawasan industri menengah bisa untuk menarik investor;
   - Akses jalan guna kelancaran pergerakan barang/jasa;
   - Dukungan dunia usaha (perusahaan/pabrik) berupa *Coorporate Social Responsibility* (CSR), karena merupakan daerah industri menengah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Kemusu untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Boyolali.

Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Kemusu tahun 2021-2026 seperti dalam tabel berikut :

Tabel. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : "BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI" Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL)			
MISI : Boyolali menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik kecamatan 2. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan 3. Peningkatan kapasitas ASN tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa 4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Peningkatan dan Pengembangan kualitas pelayanan sarana dan prasarana publik 2. Optimalisasi fungsi koordinasi kewilayahan 3. Peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran 4. Peningkatan tertib Administrasi Pemerintahan Desa
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	1. Peningkatan sistem kelembagaan berbasis kinerja	1. Peningkatan sistem administrasi umum dan kepegawaian

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Dapat ditelaah terhadap rancangan awal RKPD, sebagaimana Tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kecamatan Kemusu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				**100.000.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**100.000.00**	
	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kemusu	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	0	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kemusu	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	0	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kemusu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kemusu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	0	
	Peningkatan Efektifikas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kemusu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	0	Peningkatan Efektifikas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kemusu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	0	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Kemusu	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Kegaitan	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Kemusu	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Kegaitan	0	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kemusu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kemusu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	0	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kemusu	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	100.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kemusu	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	100.000.000	

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kemusu	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	100.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kemusu	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	100.000.000	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				**25.000.000**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**25.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kemusu	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 kegiatan	25.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kemusu	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 kegiatan	25.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kemusu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	25.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kemusu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	25.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				**70.000.000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**70.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kemusu	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	70.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kemusu	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	70.000.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kemusu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 orang	50.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kemusu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 orang	50.000.000	

	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kemusu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 orang	20.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kemusu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 orang	20.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				**150.000.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**150.000.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kemusu	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Kegiatan	150.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kemusu	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Kegiatan	150.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kemusu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kemusu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	0	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kemusu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	150.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kemusu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	150.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**0**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**0**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kemusu	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kemusu	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	0	
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kemusu	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	8 Dokumen	0	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kemusu	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	8 Dokumen	0	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kemusu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kemusu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen	0	

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kemusu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kemusu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	0	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				**2.574.044.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**2.574.044.000**	
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kemusu	Jumlah Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Kegiatan	0	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kemusu	Jumlah Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Kegiatan	0	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kemusu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kemusu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kemusu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kemusu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kemusu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kemusu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kemusu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kemusu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kemusu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kemusu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kemusu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kemusu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kemusu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kemusu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kemusu	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Kegiatan	2.279.704.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kemusu	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Kegiatan	2.279.704.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kemusu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/Bulan	2.231.704.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kemusu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/Bulan	2.231.704.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kemusu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	48.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kemusu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	48.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kemusu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kemusu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kemusu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kemusu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kemusu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kemusu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kemusu	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kemusu	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kemusu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kemusu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kemusu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kemusu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kemusu	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Kegitan	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kemusu	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Kegitan	0	

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kemusu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kemusu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kemusu	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Kegiatan	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kemusu	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Kegiatan	0	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kemusu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kemusu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kemusu	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Kegiatan	152.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kemusu	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Kegiatan	152.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kemusu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kemusu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kemusu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kemusu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kemusu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kemusu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kemusu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kemusu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	50.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kemusu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kemusu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kemusu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	15.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kemusu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	15.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kemusu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	62.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kemusu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	62.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kemusu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kemusu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	10.000.000	

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kemusu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kemusu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	0	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kemusu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 Dokumen	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kemusu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 Dokumen	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kemusu	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	54.300.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kemusu	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	54.300.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kemusu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kemusu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kemusu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	53.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kemusu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	53.400.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kemusu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kemusu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kemusu	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	68.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kemusu	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	68.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kemusu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	14.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kemusu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	14.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kemusu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kemusu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kemusu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kemusu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini dapat diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari PD lain yang saling berkaitan berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan (yang sebelumnya diadakan musyawarah di tingkat Dusun/lingkungan RT, RW dan kelompok-kelompok masyarakat misalnya kelompok tani, kelompok perempuan dsb. Penggalian gagasan dan menyelenggarakan musyawarah dusun (Musdus) serta rembug warga untuk menetapkan jenis dari usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan, dilanjutkan dengan Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang Kabupaten.

Usulan tersebut disesuaikan dan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD, serta visi dan misi pembangunan daerah yang sudah ditetapkan. Hasil pengerjaan/penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, dapat terlihat dalam Tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah : Kecamatan Kemusu

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Jalan	Klewor - Juwangi		1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
2	Pembangunan Jembatan	Ds.Bawu		1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
3	Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase	Ds.Kendel		1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
4	Penataan Lingkungan Gedung / Kantor	Ds.kedungmulyo		1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
5	Jalan Usaha Tani	Ds.Watugede		1 Paket	Dinas Pertanian

6	Pemeliharaan jalan	Ds.Kedungrejo		1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
7	Peningkatan Kwalitas RTLH Diluar Kawasan Kumuh	Ds Kedungrejo,Kedungmulyo,Watugede,Kemusu,Sarimulyo, Wonoharjo dan Bawu		1 Paket	Dinas Perumahan & Pemukiman Kawasan
8	Pengadaan bibit ternak kambing	Ds.Wonoharjo		100 ekor	Dinas Peternakan dan Perikanan
9	Pengadaan bibit ternak kambing	Ds.Kemusu		100 unit	Dinas Peternakan dan Perikanan
10	Pengadaan bibit ternak kambing	Bawu		100 unit	Dinas Peternakan dan Perikanan
11	Alsintan (Traktor)	Ds.Kendel		5 unit	Dinas Pertanian
12	Alsintan (Traktor)	Ds Kedungrejo		5 unit	Dinas Pertanian
13	Gerobak Sampah	Ds Sarimulyo		5 unit	Dinas Lingkungan Hidup
14	Gerobak Sampah	Ds.Klewor		5 unit	Dinas Lingkungan Hidup
15	Gerobak Sampah	Ds.Genengsari		5 unit	Dinas Lingkungan Hidup

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah meliputi kebijakan program strategis nasional (PSN), amanat pembangunan global dan nasional, dan dinamika pembangunan nasional lainnya. Selain itu juga kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 tetap memperhatikan keberlanjutan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian, sosial dan Kesehatan, serta dukungan terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) sebagai prioritas dalam penanggulangan kemiskinan. Disamping itu RKPD Tahun 2023 yang disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 meliputi:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta kemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Diskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada terlihat dalam Tabel T-C.32.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Langkah-langkah perumusan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah
2. Membandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hal evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah, apakah masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kehidupan.
3. Identifikasi Kebijakan Nasional dan terkait dengan tugas dan fungsi pokok Perangkat Daerah, misalnya dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Millenium Development Goals (MDGs)
4. Unit Perangkat Daerah Kabupaten/Kota perlu mengidentifikan kebijakan provinsi, dan
5. Merumuskan pernyataan tujuan dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebelumnya.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Kecamatan Kemusu sesuai Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel. Tujuan dan Sasaran Renja 2024

Kecamatan Kemusu

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.55
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan Kemusu	80,10

pada tabel tujuan dan sasaran diatas rencana kerja Kecamatan Kemusu adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
3. Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
5. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
6. Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Perumusan Sasaran, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya;
2. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra PD, cuplik rumusan sasaran dalam Renstra PD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan;
3. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra PD), jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut;
4. Rumusan sasaran tersebut, sajikan dalam bentuk pernyataan.

Sasaran yang hendak dicapai di Kecamatan Kemusu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah.

Langkah-langkah perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

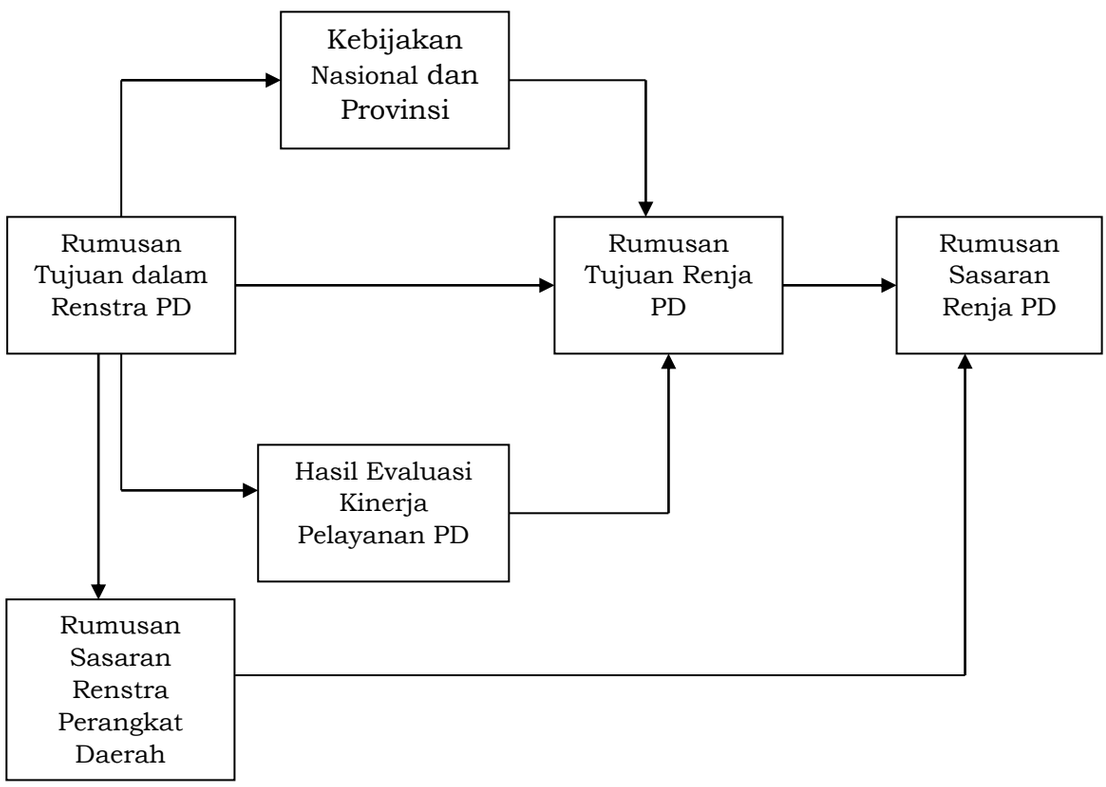

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

   Misal:

   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
   b. Pencapaian SDGs;
   c. Pengentasan kemiskinan;
   d. Pencapaian NSPK dan SPM;
   e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
   f. Pengembangan daerah terisolir; dan
   g. Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan, yaitu pada Tabel T-C.33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kemusu Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Kemusu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
X	**UNSUR KEWILAYAHAN**										
X.XX	**KECAMATAN**										
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										
X.XX.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kemusu	2 Dokumen	0			0	Kemusu	2 Dokumen	0
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kemusu	1 Dokumen	0			0	Kemusu	1 Dokumen	0
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kemusu	1 Dokumen	0			0	Kemusu	1 Dokumen	0
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kemusu	1 Dokumen	0			0	Kemusu	1 Dokumen	0

X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kemusu	1 Dokumen	0			0	Kemusu	1 Dokumen	0
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kemusu	15 Laporan	0			0	Kemusu	15 Laporan	0
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kemusu	4 Laporan	0			0	Kemusu	4 Laporan	0
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kemusu	15 orang/tahun	2.231.704.000			2.231.704.000	Kemusu	15 orang/tahun	2.231.704.000
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kemusu	13 dokumen	48.000.000			48.000.000	Kemusu	13 dokumen	48.000.000
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kemusu	12 Dokumen	0			0	Kemusu	12 Dokumen	0
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kemusu	12 Dokumen	0			0	Kemusu	12 Dokumen	0
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kemusu	1 Laporan	0			0	Kemusu	1 Laporan	0

X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kemusu	1 Dokumen	0			0	Kemusu	1 Dokumen	0
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kemusu	18 Laporan	0			0	Kemusu	18 Laporan	0
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kemusu	1 Dokumen	0			0	Kemusu	1 Dokumen	0
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kemusu	3 Laporan	0			0	Kemusu	3 Laporan	0
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kemusu	13 Dokumen	0			0	Kemusu	13 Dokumen	0
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/telepon	Kemusu	4 Paket	2.000.000			2.000.000	Kemusu	4 Paket	2.000.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kemusu	4 Paket	0			0	Kemusu	4 Paket	0
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kemusu	4 Paket	3.000.000			3.000.000	Kemusu	4 Paket	3.000.000

X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kanto	Kemusu	4 Paket	50.000.000			50.000.000	Kemusu	4 Paket	50.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kemusu	4 Paket	10.000.000			10.000.000	Kemusu	4 Paket	10.000.000
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kemusu	4 Dokumen	0			0	Kemusu	4 Dokumen	0
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	Kemusu	4 Paket	15.000.000			15.000.000	Kemusu	4 Paket	15.000.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman	Kemusu	4 Laporan	62.000.000			62.000.000	Kemusu	4 Laporan	62.000.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kemusu	4 Laporan	10.000.000			10.000.000	Kemusu	4 Laporan	10.000.000
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kemusu	13 Dokumen	0			0	Kemusu	13 Dokumen	0
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kemusu	13 Dokumen	0			0	Kemusu	13 Dokumen	0
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kemusu	12 Laporan	900.000			900.000	Kemusu	12 Laporan	900.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kemusu	12 Laporan	53.400.000			53.400.000	Kemusu	12 Laporan	53.400.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kemusu	4 Laporan	0			0	Kemusu	4 Laporan	0

X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kemusu	10 unit	14.000.000			14.000.000	Kemusu	10 unit	14.000.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kemusu	23 Unit	4.000.000			4.000.000	Kemusu	23 Unit	4.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kemusu	3 Unit	50.000.000			50.000.000	Kemusu	3 Unit	50.000.000
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**										
7.01	**KECAMATAN**										
7.01-02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**										
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kemusu	13 Laporan	0			0	Kemusu	13 Laporan	0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kemusu	39 Dokumen	0			0	Kemusu	39 Dokumen	0

7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan										
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kemusu	2 Laporan	0			0	Kemusu	2 Laporan	0
7.01-02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										
7.01-02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kemusu	2 Dokumen	100.000.000			100.000.000	Kemusu	2 Dokumen	100.000.000
7.01-03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										
7.01-03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
7.01-03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kemusu	6 Lembaga Kemasyarakatan	0			0	Kemusu	6 Lembaga Kemasyarakatan	0
7.01-03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kemusu	13 Laporan	150.000.000			150.000.000	Kemusu	13 Laporan	150.000.000
7.01-05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**										

7.01-05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										
7.01-05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Nagara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kemusu	400 orang	50.000.000			50.000.000	Kemusu	400 orang	50.000.000
7.01-05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kemusu	500 orang	20.000.000			20.000.000	Kemusu	500 orang	20.000.000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**										
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kemusu	8 Dokumen	0			0	Kemusu	8 Dokumen	0

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kemusu	26 Dokumen	0			0	Kemusu	26 Dokumen	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kemusu	13 Dokumen	0			0	Kemusu	13 Dokumen	0

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kemusu yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Perumusan program dan kegiatan ini, mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai disertai dengan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Realisasi renja ini sangat tergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Sebagaimana tujuan renja ini yaitu “terarahnya program serta prioritas kegiatan tahunan dengan capaian rencana strategis Kecamatan Kemusu melalui pembiayaan APBD Kabupaten yang dilengkapi dengan indikator capaian sebagai tolak ukur penilaian kinerja”. Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

Demikian RENJA Kecamatan Kemusu 2024 disusun dan semoga bermanfaat.

UU. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

KECAMATAN JUWANGI

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah Nya, sehingga Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali selaku salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD) yang merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung dan mewujudkan capaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi PD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Penyusun berharap bahwa demi sempurnanya penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Juwangi ini, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat kami harapkan dan kami hargai sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan di masa-masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksut Dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 ..... **4**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **33**
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 33
3.3 Program dan Kegiatan 36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **41**
4.1 Program dan Kegiatan 41
BAB V PENUTUP **64**

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik. Perwujudan dari komitmen tersebut, antara lain dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Juwangi yang merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali dan Renstra Kecamatan Juwangi Tahun 2021-2026.

Penyusunan. Rencana Kerja Kecamatan Juwangi Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Penyusunan Renja Kecamatan Juwangi dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Juwangi tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Juwangi.

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Kabupaten adalah dalam perumusan Rancangan Renja PD Kabupaten, dan sebagai tindak lanjut proses penyusunan RAPBD. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Juwangi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutahirkan melalui Kepmendagri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pelayanan Publik
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 232);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225) dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 224);

9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolai Tahun 2016 Nomor 37);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023
11. Rencana Strategis Kecamatan Juwangi Tahun 2022-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Tahun 2024 Kecamatan Juwangi disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Juwangi dalam penyusunan RKA Kecamatan Juwangi Tahun 2024

Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2024 Kecamatan Juwangi adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Juwangi Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Juwangi Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Juwangi Tahun

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Juwangi Tahun 2022 telah selesai seluruhnya. Dari pelaksanaan program / kegiatan tersebut, beberapa program / kegiatan / Sub Kegiatan telah mencapai target yang direncanakan dan ada yang belum memenuhi target.

Hasil evaluasi terhadap capaian realisasi program/kegiatan dan capaian renstra di Kecamatan Juwangi, sebagai berikut :

1. Realisasi Program / Kegiatan yang memenuhi/mencapai target :
   a. Program
      1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      2). Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
      3). Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
      4). Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
   b. Kegiatan
      1). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan :
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      2). Administrasi Umum Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan :
      a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
      b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
      f. Penyediaan Bahan / Material
      g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
      3). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :
      - Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      - Penyediaan Jasa Surat menyurat
      4). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah
      Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

5). Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Sub Kegiatan :

- Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

6). Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

7). Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

2. Realisasi Program/Kegiatan yang belum memenuhi target :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan

1) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penggunaan anggaran hanya pada perjalanan dinas luar daerah saja

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri,

Telah terpenuhi sesuai kebutuhan

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target:

Semua program/kegiatan yang dilaksanakan belum ada yang melebihi target rencana.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali tahun lalu sebagaimana tabel T-C.29

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Juwangi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							N-3 (2020)	N-2 (2021)	N-2 (2021)		N-1 (2022)	N-1 (2022)	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	**100%**							
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Gaji dan tunjangan ASN, Gaji non ASN**	5 th		1 th	1 th				
				Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	36	12	12	100%	12	12	100%
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor TKHL	60 bln	36	12	12	100%	12	12	100%
				Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	60	36	12	12	100%	12	12	100%
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	60	36	12	12	100%	12	12	100%
				Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan	90	54	18	18	100%	18	18	100%

				Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10	6	2	2	100%	2	2	100%
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah**	60 bln	36	12	12	100%	12	12	100%
				Sub Kegiatan :									
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60 bln	36	12	12	100%	12	12	100%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60 bln	36	12	12	100%	12	12	100%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya BBM Kantor	60 bln	36	12	12	100%	12	12	100%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 bln	36	12	12	100%	12	12	100%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	60 bln	36	12	12	100%	12	12	100%
				Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya ATK Kantor	60 bln	36	12	12	100%	12	12	100%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu	60 bln	36	12	12	100%	12	12	100%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulttasi SKPD	Terlaksananya keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi	60 bln	36	12	12	100%	12	12	100%
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 bln	36	12	12	100%	12	12	100%
				Sub Kegiatan :									
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	60 bln	36	12	12	100%	12	12	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Air dan Listrik Kantor	60 bln	36	12	12	100%	12	12	100%
				Kegiatan :	**Jasa Pemeliharaan**	60 bln	36	12	12	100%	12	12	100%

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah**							
				Sub Kegiatan :								
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60 bln	36	12	12	100%	12	12	100%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	60 bln	36	12	12	100%	12	12	100%
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dann Bangunan Lainnya	60 bln	36	12	12	100%	12	12	100%
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Uursan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah**	18 paket	12	4	4	100%	4	4	100%
				Sub Kegiatan :								
				Pengadaan Mebel	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnnya	0 paket	0	0	0	0	0	0	0
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	4 paket	3	2	2	100%	2	2	100%
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaa, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah Yang Dibuat**	125	75	25	25	100%	25	25	100%
				Sub Kegiatan :								
				Pemyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	10	6	2	2	100%	2	2	100%

				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	5	3	1	1	100%	1	1	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	5	3	1	1	100%	1	1	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang disusun	5	3	1	1	100%	1	1	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	5	3	1	1	100%	1	1	100%
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	75	45	15	15	100%	15	15	100%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	12	4	4	100%	4	4	100%
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Persentase Layanan Publik Kecamatan Tepat Waktu**	100%							
				Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang dilayani dengan baik	10 desa	10	10	10	100%	10	10	100%
				Sub Kegiatan :									
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang diusulkan	10 desa	10	10	10	100%	10	10	100%
				Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di kecamatan yang terselenggara dengan baik	5 keg	3	1	1	100%	1	1	100%
				Sub Kegiatan :									
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah sosialisasi pelayanan di kecamatan	5 keg	3	1	1	100%	1	1	100%
				Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Sarana dan Prsarana Umum Dalam Kondisi Baik**	5 unit	3	1	1	100%	1	1	100%

				Sub Kegiatan :								
				Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum	5 unit	3	1	1	100%	1	1	100%
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	100%							
				Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		10 keg	6	2	2	100%	2	2	100%
				Sub Kegiatan :								
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat kecamatan	5 keg	3	1	1	100%	1	1	100%
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	100%							
				Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	20	12	4	4	100%	4	4	100%
				Sub Kegiatan :								
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	10 keg	6	2	2	100%	2	2	100%

				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Instrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan kerukunan umat beragama di wiilayah kecamatan	10 keg	6	2	2	100%	2	2	100%
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	100%							
				Kegiatan : **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah usulan hasil musdes yang diverifikasi** **Jumlah bantuan yang disalurkan sesuai standar**	5 th	3	1	1	100%	1	1	100%
				Sub Kegiatan :									
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen daftar skala prioritas tingkat kecamatan	5 dok	3	1	1	100%	1	1	100%
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 keg	3	1	1	100%	1	1	100%
				Kegiatan : **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kelompok masyarakat yang di berdayakan di kelurahan	5 th	3	1	1	100%	1	1	100%
				Sub Kegiatan :									
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen skala prioritas tingkat kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	0
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	0
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan partisipasi pemberdayaan masyarakat di kelurahan	10 keg	6	2	2	100%	2	2	100%
				Kegiatan : **Pemberdayaan Lembaga**	**Jumlah kegiatan lembaga**	10 keg	6	2	2	100%	2	2	100%

				Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**kemasyarakatan yang dilaksanakan**								
				Sub Kegiatan :									
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi(PKK)	5 keg	3	1	1	100%	1	1	100%
				Fasiltasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah desa yang menerima bantuan/ modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan	10 desa	10	0	0	0	0	0	0
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti**	100%							
				Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa**	10 desa	10	10	10	100%	10	10	100%
				Sub Kegiatan :									
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pendampingan administrasi dan keuangan desa	10 desa	10	10	10	100%	10	10	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Juwangi dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Juwangi disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Juwangi

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		NO
				Tahun 2022 (thnn-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thnn+1	Tahun 2022 (thnn-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2022 (thnn-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			81.11	82.72	83,55	84,18					
2.	Nilai SAKIP			75,71	80,35	80,60	80,85					

Pencapaian kinerja pelayanan sesuai tabel diatas sudah tergolong baik, tetapi masih perlu ditingkatkan dengan berkomitmen dan bekerjasama seluruh ASN untuk lebih meningkatkan pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelengggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu Strategis Daerah Kabupaten Boyolali 2021-2026 (RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026):

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Iklim Investasi yang Berwawasan Lingkungan
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan
3. Pembangunan SDM yang Inklusif dan Berdaya Saing
4. Peningkatan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan
5. Reformasi Birokrasi yang Akuntabel dan Agile
6. Penanganan Bencana Alam dan Non Alam
7. Inovasi dan Teknoogi Informatika

Sedang Isu strategis jangka panjang Kabupaten Boyolali yang terdapat di dalam RPJPD 2005-2025 sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dari aspek pendidikan dan kesehatan;
2. Masih rendahnya produktivitas, nilai tambah produk-produk pertanian dalam arti luas dan belum optimalnya pendayagunaan serta pengembangan sumber daya

pertanian;

3. Belum optimalnya infrastruktur dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan industri dan jasa;
4. Masih rendahnya dukungan *stakeholder* dalam kegiatan penanaman modal;
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah sesuai dengan asas kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan masih kurang profesionalnya aparatur pemerintah daerah;
6. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha ekonomi rakyat;
7. Masih rendahnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kemiskinan;
8. Belum optimalnya peningkatan pendapatan asli daerah;
9. Menurunya kesadaran terhadap nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta keamanan dan ketenteraman masyarakat;
10. Kurang terintegrasinya pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana guna mendukung pembangunan berkelanjutan;
11. Masih cukup tingginya jumlah pencari kerja dan pengangguran terbuka;
12. Belum optimalnya kualitas hidup masyarakat yang memadai terhadap akses pelayanan perumahan;
13. Belum terpenuhinya perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta kesetaraan gender; dan
14. Masih lemahnya kerjasama kemitraan pemerintah daerah dan terbatasnya anggaran pemerintah guna membiayai pembangunan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Karanggede Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel T- C. 31

Tabel T- C. 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
TAHUN ANGGARAN 2024
KABUPATEN BOYOLALI

NAMA OPD : KECAMATAN JUWANGI

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**				**2.551.669.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**				**2.551.669.000**	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Juwangi	Jumlah Kegiatan Administrasi Keunagan Perangkat daerah	2 Keg	**2.149.094.000**	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec. Juwangi	Gaji dan tunjangan ASN, Gaji non ASN	1 th	**2.223.403.000**	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Juwangi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	2.019.094.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Juwangi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	2.019.094.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Juwangi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	130.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Juwangi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	130.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Juwangi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Juwangi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Juwangi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Juwangi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Juwangi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18 Laporan	0	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Juwangi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18 Laporan	0	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	Kec. Juwangi	Jumlah Dokumen Bahan	2 Dok	0	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	Kec. Juwangi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	2 Dok	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Tanggapan Pemeriksaan		Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			Tanggapan Pemeriksaan		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Kec. Juwangi**	**Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan**	**2 dokumen**	**0**	**Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Kec. Juwangi**	**Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan**	**2 dokumen**	**0**	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**Kec. Juwangi**	**Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	**1 Dok**	**0**	**Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	**Kec. Juwangi**	**Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	**1 Dok**	**0**	
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kec. Juwangi**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Keg**	**0**	**Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kec. Juwangi**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Keg**	**0**	
	Sub Kegiatan :	**Kec. Juwangi**	**Jumlah**	**3 Laporan**	**0**	**Sub Kegiatan :**	**Kec. Juwangi**	**Jumlah Laporan**	**3 Laporan**	**0**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		**Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**			**Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**		**Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**			
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kec. Juwangi**	**Jumlah KegiatanAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Keg**	**0**	**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Juwangi**	**Jumlah KegiatanAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Keg**	**0**	
	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Kec. Juwangi**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**13 Dok**	**0**	**Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**Kec. Juwangi**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**13 Dok**	**0**	
	Kegiatan : Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	**Kec. Juwangi**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**11 Keg**	**358.594.000**	**Kegiatan : Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Juwangi**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**11 Keg**	**358.594.000**	
	Sub Kegiatan :	Kec. Juwangi	Tersedianya	4 Paket	4.000.000	Sub Kegiatan :	Kec. Juwangi	Tersedianya	4 Paket	4.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		komponen listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		komponen listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Juwangi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Juwangi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.000.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Juwangi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	58.300.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Juwangi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	58.300.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Juwangi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	21.515.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Juwangi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	21.515.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	Kec. Juwangi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	36.020.000	Penyediaan Bahan/ Material	Kec. Juwangi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	36.020.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan :Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Juwangi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	177.995.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Juwangi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	177.995.000	
	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Juwangi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	54.764.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Juwangi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	54.764.000	
	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**Kec. Juwangi**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**	**13 dokumen**	**0**	**Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**	**Kec. Juwangi**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**	**13 dokumen**	**0**	
	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**Kec. Juwangi**	**Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**13 dokumen**	**0**	**Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**Kec. Juwangi**	**Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**13 dokumen**	**0**	
	Kegiatan :	**Kec. Juwangi**	**Jumlah**	**3 Kegiatan**	**65.031.000**	**Kegiatan :**	**Kec. Juwangi**	**Jumlah Kegiatan**	**3**	**65.031.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kegiatan**		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Juwangi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.800.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Juwangi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.800.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Juwangi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	61.231.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Juwangi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	61.231.000	
	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Kec. Juwangi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, Sumber Daya	4 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Kec. Juwangi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Air dan Listrik yang Disediakan								
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	**Kec. Juwangi**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Keg**	**156.000.000**	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Juwangi**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Keg**	**156.000.000**	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Juwangi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	28.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Juwangi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	28.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kec. Juwangi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	0	Pemeliharaan Mebel	Kec. Juwangi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainya	Kec. Juwangi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	28.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainya	Kec. Juwangi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	28.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainya	Kec. Juwangi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainya	Kec. Juwangi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec. Juwangi**		**1 paket**	**60.000.000**	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Juwangi**		**1 paket**	**60.000.000**	
	Pengadaan Mebel	Kec. Juwangi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0	Pengadaan Mebel	Kec. Juwangi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec. Juwangi	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	2 paket	60.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec. Juwangi	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	2 paket	60.000.000	
	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Juwangi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	0	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Juwangi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	0	
2	**Program**	**Kec. Juwangi**			**1.366.342.000**	**Program**	**Kec. Juwangi**			**450.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					**Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**					
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Juwangi	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Keg.	0	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Juwangi	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Keg.	0	
	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Juwangi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	0	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Juwangi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	0	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Kec. Juwangi	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	39 Dok	0	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Juwangi	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan	39 Dok	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Tingkat Kecamatan		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Kec. Juwangi	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Kegiatan	0	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Kec. Juwangi	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Kegiatan	0	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Juwangi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	0	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Juwangi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	0	
	Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana	Kec. Juwangi	Terbangunnya infra struktur	1 Paket	1.366.342.000	Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan	Kec. Juwangi	Terbangunnya infra struktur	1 Paket	1.366.342.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelayanan					Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					
	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Juwangi	Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun dan dipelihara termasuk di kelurahanPemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 paket	1.366.342.000	Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Juwangi	Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun dan dipelihara termasuk di kelurahanPemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 paket	1.366.342.000	
3	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Juwangi**		**1 keg**	**19.000.000**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Juwangi**		**1 keg**	**23.750.000**	
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Juwangi	Jumlah kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 keg	19.000.000	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Juwangi	Jumlah kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 keg	19.000.000	
	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan	Kec. Juwangi	Jumlah Laporan Hasil	13 Laporan	19.000.000	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan	Kec. Juwangi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	13 Laporan	19.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
4	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kec. Juwangi**			**85.305.000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kec. Juwangi**			**85.305.000**	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Juwangi	**Jumlah KegiatanPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	2 Keg	85.305.000	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Juwangi	**Jumlah KegiatanPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	2 Keg	85.305.000	
	Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Kec. Juwangi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan	400 Orang	52.818.000	Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Kec. Juwangi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan	400 Orang	52.818.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Juwangi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	500 Orang	32.487.000	Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Juwangi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	500 Orang	32.487.000	
5	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kec. Juwangi**		**1 th**	**138.834.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kec. Juwangi**		**1 th**	**138.834.000**	
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Juwangi	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Keg	75.000.000	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Juwangi	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Keg	75.000.000	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Juwangi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	6 Pokmas	0	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Juwangi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	6 Pokmas	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pembangunan di Desa					Desa			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Juwangi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Lap	138.834.000	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Juwangi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Lap	138.834.000	
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kec. Juwangi**	**Jumlah Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3keg**	**0**	**Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kec. Juwangi**	**Jumlah Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3 keg**	**0**	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec. Juwangi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Juwangi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Juwangi	Jumlah desa yang menerima bantuan/modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan	10 desa	0	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Juwangi	Jumlah desa yang menerima bantuan/modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan	10 desa	0	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain melakukan menggali permasalalan/kebutuhan dari internal kantor, Kecamatan Juwangi juga menjaring aspirasi atau usulan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun LSM, yang langsung ditujukan ke Kecamatan Juwangi berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Desa dan Kecamatan. Berdasarkan atas hasil Musrenbang baik di Desa maupun Kecamatan, usulan dari masyarakat terkait dengan pelayanan/tugas pokok fungsi di Kecamatan Juwangi sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Juwangi

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**Bantuan Pupuk Pertanian**	Desa Jerukan	500.000.000	1 Kelompok	
2.	**Pengaspalan jalan poros desa**	**Desa Jerukan**	1.500.000.000	2655 meter	
3	**Aspal Jalan Poros desa**	Desa Kronbokan	2.000.000.000	7 KM	
4	Pupuk Pertanian	Desa Krobokan	525.000.000	1 Kelompok	
5	**Pembangunan Jalan Desa**	Desa Ngleses	7.189.130.000	40 KM	
6	Bantuan mesin coper rumput	Desa Kayen	70.000.000	10 bh	
7	Betonisasi jalan dan talud	Sambeng Barat	200.000.000		
8	Betonisasi jalan dan talud	**Sambeng Timur**	200.000.000		
9.	RTLH	Desa Pilangrejo	276.000.000	23 unit	
10	Jambanisasi	**Desa Pilangrejo**	69.000.000	45 Unit	
11	Rabat beton jalan poros	Desa Pilangrejo	250.000.000	635 x	
12	**Aspal jalan poros kedung jati**	Desa Ngaren		624 M	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.” dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Mengembangkan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan bencana dan Perubahan Alam.
7. Memperkuat Stabilitas Polhubhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Boyolali ke depan telah tertuang dalam visi dan misi Bupati Boyolali antara lain:

Visi : “Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi” Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas. “

Misi:

1. **Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan**

Memantapkan “business friendly”, dengan mempertahankan iklim investasi yang kondusif, mendorong perusahaan yang ramah lingkungan (green company), strategi bisnis perusahaan (green strategy), dan proses bisnis yang aman, nyaman dan bersih (green process), serta pengembangan produk yang ramah lingkungan (green product) serta Pengembangan kompetensi dan perlindungan kepada sumber daya manusia (green employe).

Mensinergikan manajemen pemerintahan, peran masyarakat dan swasta dalam pembangunan sosial, pembangunan ekonomi dan pembangunan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kehidupan yang lebih maju, dengan mengedepankan peningkatan Kualitas manusia, ekonomi yang produktif, mandiri, berdaya saing serta pembangunan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pembangunan Sosial, guna pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berkualitas, keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastuktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Pembangunan tata kelola pemerintahan, tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mewujudkan prinsip dan standar pelayanan publik yang prima.

Mendorong pembangunan berkelanjutan, yang memanusiakan manusia dengan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, berlandaskan prinsip universal, terintegrasi dan inklusif untuk menyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind”.

2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya

Mencapai Boyolali sehat, ketangguhan/ketahanan terhadap dampak negatif akibat aktivitas alam dan non alam, serta ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, baik melalui pelayanan kesehatan, lingkungan, ataupun perilaku dengan pendekatan keluarga peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas.

Dengan adanya resiko bencana dan perubahan iklim dan dampaknya, tindakan cepat untuk mengatasi diperlukan sebagai bentuk wilayah yang tangguh.

Penyediaan dan pemeliharaan prasarana olah raga public.Adanya Pemeliharaan fakir miskin, yatim, anak terlantar dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Demikian pula dengan Sosial and Economy Safety Net yakni jaminan sosial daerah baik bidang kesehatan maupun sosial seperti cukup sandang, pangan, dan papan. Kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, kriminalitas, pelanggaran terhadap ketertiban umum, dan penanggulangan kerawanan sosial.

Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, adanya akses memperoleh pendidikan yang bermutu dan relevan disertai tatakelola pendidikan yang baik, penerapan teknologi dan standar untuk meningkatkan daya saing.

Pendidikan bertujuan menciptakan manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis .

3. **Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional**

Mempertahankan tradisi Boyolali kota susu, penghasil daging, pengembangan produksi perikanan darat, serta sektor peternakan lainnya adalah sesuatu yang prioritas.

Boyolali lumbung pangan sebagai aplikasi dari konsep ketahanan pangan (food security) lokal dan nasional terus dipertahankan dan dikembangkan, dengan prinsip pertanian yang maju, lestari, budaya saing internasional, dan berkontribusi penting bagi perekonomian bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan budaya untuk mensejahterakan masyarakat yang berperadaban.

Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, perikanan darat termasuk sektor sejenis lainnya. Aplikasi good farming practices, fasilitasi kebutuhan modal, pengembangan kemitraan yang sehat, kredit pengembangan kelompok/perorangan, pendampingan sampai dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan serta memberi nilai lebih pada pasca produksi.

4. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai utuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance. Peran masyarakat yang melahirkan kontrol terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan sangat diharapkan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN.

Pembangunan integritas dengan menumbuhkan karakter yang baik bagi individu maupun organisasi dalam mewujudkan tindakan maupun keputusan bagi kebaikan bersama.

Tidak berhenti pada good and clean governance, Boyolali berusaha menumbuhkan Smart governance, atau pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi, dengan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi-inovasi dan adaptasi teknologi yang terpadu, yang bermuara pada efektifitas, efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.

5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Boyolali dikenal dengan slogan Tersenyum, yang memiliki arti tertib, elok, rapi, sehat, nyaman untuk masyarakat. Tanpa meninggalkan tersenyum, Boyolali mulai dikenal dengan slogan nyaman ditinggali, nyaman investasi, nyaman untuk everybody. Sebagai identitas dari kota, city brand akan terus dikembangkan guna memasarkan segala aktivitas terutama potensi wisata dan budayanya.

Smart governance diharapkan dapat mendorong terwujudnya Smart City, Water City, dan Green City yakni konsep Boyolali kota cerdas/pintar, kota air, yang ramah lingkungan.

Boyolali tumbuh dengan infrastruktur yang tangguh dan iconik, pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Mengurangi kesenjangan intra dan antar wilayah.

Potensi ekonomi daerah, akan terus dioptimalkan guna kemandirian daerah dengan kinerja yang inovatif, termasuk peningkatan penerimaan daerah. Peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja yang terbuka terhadap persaingan domestik ataupun internasional, serta berbagai inovasi yang tumbuh diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah. Percepatan pembangunan yang mendorong pertumbuhan investasi dipadukan dengan koperasi umkm pasar tradisional danmodern.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Juwangi serta tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Juwangi Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Juwangi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Juwangi Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,55 Nilai
2.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	80,60 Nilai

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

   Misal:

   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
   b. Pencapaian SDGs,
   c. Pengentasan kemiskinan,
   d. Pencapaian NSPK danSPM,
   e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
   f. Pengembangan daerah terisolir,

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlahkegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan, yaitu sebagai berikut:

Tabel Program dan Kegiatan Kecamatan Juwangi Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
X	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**					
X.XX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**					
X.XX-01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**					
X.XX-01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
X.XX-01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Juwangi	18 Orang	2.019.094.000	APBD
X.XX-01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Juwangi	13 Dokumen	130.000.000	APBD
X.XX-01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
X.XX-01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Juwangi	4 Paket	4.000.000	APBD
X.XX-01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Juwangi	4 Paket	6.000.000	APBD
X.XX-01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantoJumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Juwangi	4 Paket	58.300.000	APBD
X.XX-01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Juwangi	4 Paket	21.515.000	APBD
X.XX-01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec. Juwangi	4 Paket	36.020.000	APBD
X.XX-01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Juwangi	4 Laporan	177.995.000	APBD
X.XX-01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Juwangi	4 Laporan	54.764.000	APBD

		SKPD				
X.XX-01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
X.XX-01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Juwangi	unit	0	APBD
X.XX-01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Juwangi	3 unit	60.000.000	APBD
X.XX-01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
X.XX-01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Juwangi	12 Laporan	1.800.000	APBD
X.XX-01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Juwangi	12 Laporan	61.231.000	APBD
X.XX-01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Juwangi	4 Laporan	2.000.000	APBD
X.XX-01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
X.XX-01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Juwangi	10 Unit	28.000.000	APBD
X.XX-01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kec. Juwangi	Unit	0	APBD
X.XX-01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Juwangi	10 Unit	28.000.000	APBD
X.XX-01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Juwangi	2 Unit	100.000.000	APBD
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					
7.01	**KECAMATAN**					
7.01-02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					
7.01-02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					

7.01-02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Juwangi	2 Dokumen	1.366.342.000	APBD
7.01-03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Kec. Juwangi			
7.01-03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
7.01-03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Juwangi	12 Laporan	75.000.000	APBD
7.01-03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
7.01-03.2.03.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Juwangi	12 Laporan	63.834.000	APBD
7.01-05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					
7.01-05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					
7.01-05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Nagara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Juwangi	400 Orang	52.818.000	APBD
7.01-05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Juwangi	500 Orang	32.487.000	APBD

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Program dan Kegiatan

PD Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali sebagai leading sektor dalam hal perencanaan di Kabupaten Boyolali melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain melaksanakan kegiatan rutin PD juga melaksanakan urusan wajib dan pilihan.

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2023 yang dituangkan dalam renja 2023 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah untuk mencapai visi-misi pembangunan daerah. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi PD Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Secara umum rencana kerja berisikan Penjelasan mengenai :

a. faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Misalnya :
   1. Pencapaian Misi dan Visi Kepala Daerah
   2. Pencapaian MDGS.
   3. Pengentasan Kemiskinan
   4. Pencapaian SPM
   5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

b. Secara umum program dan kegiatan PD Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
b. Penyediaan peralatan rumah tangga
c. Penyediaan bahan logistik kantor
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
f. Penyediaan bahan / Material
g. Fasilitasi kunjungan tamu
h. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Mebel
b. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor

1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pemeliharaan Mebel
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

a. Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan /atau Instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayaan Umum.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

c. Tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program dan kegiatan) pada Tabel T-C. 33

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah : Kecamatan Juwangi.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KECAMATAN JUWANGI				**3.848.611.000,00**					**3.918.666.004,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.846.211.000,00**					**3.916.266.004,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**3.846.211.000,00**					**3.916.266.004,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 80 Persen**	**-**	**2.589.269.000,00**				**100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 80 Persen**	**2.659.324.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-	7 Kegiatan	0,00			Kecamatan Juwangi	-	0,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan Juwangi		0,00	KECAMATAN JUWANGI

	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan Juwangi		0,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan Juwangi		0,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan Juwangi		0,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan Juwangi		0,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		16 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan Juwangi		0,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan Juwangi		0,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-	8 Kegiatan	2.097.094.000,00			Kecamatan Juwangi	-	2.167.149.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Orang/bulan	2.019.094.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan Juwangi		2.089.149.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		13 Dokumen	78.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Juwangi		78.000.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan Juwangi		0,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan Juwangi		0,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan Juwangi		0,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		2 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan Juwangi		0,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD		18 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan Juwangi		0,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan Juwangi		0,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-	1 Kegiatan	0,00			Kecamatan Juwangi	-	0,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		3 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan Juwangi		0,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-	1 Kegiatan	0,00			Kecamatan Juwangi	-	0,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		14 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan Juwangi		0,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	10 Kegiatann	283.344.000,00			Kecamatan Juwangi	-	283.344.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 Paket	4.500.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Juwangi		4.500.000,00	KECAMATAN JUWANGI

	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	42.050.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Juwangi		42.050.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	16.515.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Juwangi		16.515.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		4 Paket	28.520.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Juwangi		28.684.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4 Laporan	144.995.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Juwangi		144.995.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan	46.764.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Juwangi		46.600.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		13 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan Juwangi		0,00	KECAMATAN JUWANGI

	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		13 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan Juwangi		0,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-	0 Unit	40.000.000,00			Kecamatan Juwangi	-	40.000.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	40.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kecamatan Juwangi		40.000.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	3 Kegiatan	56.831.000,00			Kecamatan Juwangi	-	56.831.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	1.200.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Juwangi		1.200.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	54.631.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Juwangi		54.631.000,00	KECAMATAN JUWANGI

	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 Laporan	1.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan Juwangi		1.000.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	112.000.000,00			-	-	112.000.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit	21.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		21.000.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		7 Unit	16.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		16.000.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	75.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		75.000.000,00	KECAMATAN JUWANGI
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**89,00 Nilai**	**-**	**1.100.000.000,00**				**89,00 Nilai**	**1.100.000.002,00**	

	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-	2 Kegiatan	0,00			Masyarakat	-	1,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		13 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat		0,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		39 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat		1,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan*	-	1 Kegiatan	0,00			-	-	1,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	0,00	Kab. Boyolali, Juwangi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		1,00	KECAMATAN JUWANGI

	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*	-	1 Kegiatan	1.100.000.000,00			Mas yarakat	-	1.100.000.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum										
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		2 Dokumen	1.100.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mas yarakat		1.100.000.000,00	KECAMATAN JUWANGI
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**100 Persen100 Persen**	**-**	**75.000.000,00**				**100 Persen100 Persen**	**75.000.002,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-	1 Kegiatan	75.000.000,00			Mas yarakat	-	75.000.001,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mas yarakat		1,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		13 Laporan	75.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mas yarakat		75.000.000,00	KECAMATAN JUWANGI

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kelompok masyarakat yang di berdayakan di Kelurahan*	-	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00			Masyarakat	-	1,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat		1,00	KECAMATAN JUWANGI
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**100,00 Persen**	**-**	**19.000.000,00**				**100,00 Persen**	**19.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	-	1 Kegiatan	19.000.000,00			Masyarakat	-	19.000.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		13 Laporan	19.000.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat		19.000.000,00	KECAMATAN JUWANGI
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**100,00 Persen**	**-**	**62.942.000,00**				**100,00 Persen**	**62.942.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-	2 Kegiatan	62.942.000,00			Masyarakat	-	62.942.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, PelaksanaanUnda ng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		400 Orang	30.455.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat		30.455.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		500 Orang	32.487.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Masyarakat		32.487.000,00	KECAMATAN JUWANGI
6,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**100 Persen**	**-**	**0,00**				**100 Persen**	**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-	3 Kegiatan	0,00			Desa	-	0,00	KECAMATAN JUWANGI

	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa										
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		8 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Desa		0,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		26 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Desa		0,00	KECAMATAN JUWANGI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa										
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		13 Dokumen	0,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Desa		0,00	KECAMATAN JUWANGI
	X	**NON URUSAN**				**2.400.000,00**					**2.400.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**2.400.000,00**					**2.400.000,00**	
1,	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 80 Persen**	**-**	**2.400.000,00**				**100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 80 Persen**	**2.400.000,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	10 Kegiatann	2.400.000,00			-	-	2.400.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	2.400.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.400.000,00	KECAMATAN JUWANGI
	J U M L A H					**3.848.611.000,00**					**3.918.666.004,00**	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Perangkat Daerah : Kelurahan Sambeng

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

		KELURAHAN SAMBENG				**549.589.000,00**					**547.433.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**549.589.000,00**					**547.433.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**549.589.000,00**					**547.433.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 80 Persen**		**197.050.000,00**				**100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 80 Persen**	**194.894.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	-		52.000.000,00			TKHL	-	51.744.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			52.000.000,00	Kab. Boyolali, Juwangi, Sambeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	TKHL		51.744.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-		72.850.000,00			ASN dan Masyarakat	-	70.350.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1.600.000,00	Kab. Boyolali, Juwangi, Sambeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN dan Masyarakat		1.600.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN dan Masyarakat		1.500.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			16.250.000,00	Kab. Boyolali, Juwangi, Sambeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN dan Masyarakat		16.250.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	5.000.000,00	Kab. Boyolali, Juwangi, Sambeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN dan Masyarakat		500.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		0 Paket	7.500.000,00	Kab. Boyolali, Juwangi, Sambeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN dan Masyarakat		7.500.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		0 Laporan	33.000.000,00	Kab. Boyolali, Juwangi, Sambeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN dan Masyarakat		33.000.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	8.000.000,00	Kab. Boyolali, Juwangi, Sambeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN dan Masyarakat		10.000.000,00	KELURAHAN SAMBENG

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	20.000.000,00			-	-	31.000.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 Unit	9.000.000,00	Kab. Boyolali, Juwangi, Sambeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		20.000.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	11.000.000,00	Kab. Boyolali, Juwangi, Sambeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		11.000.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi*	-	12 Dokumen	8.200.000,00			ASN dan Masyarakat	-	7.800.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	1.000.000,00	Kab. Boyolali, Juwangi, Sambeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN dan Masyarakat		600.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	6.600.000,00	Kab. Boyolali, Juwangi, Sambeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN dan Masyarakat		6.600.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	600.000,00	Kab. Boyolali, Juwangi, Sambeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN dan Masyarakat		600.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa pemeliharaan barang milik daerah Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	12 Bulan 3 Kegiatan	44.000.000,00			ASN	-	34.000.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit	7.000.000,00	Kab. Boyolali, Juwangi, Sambeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN		7.000.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	12.000.000,00	Kab. Boyolali, Juwangi, Sambeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN		2.000.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	25.000.000,00	Kab. Boyolali, Juwangi, Sambeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN		25.000.000,00	KELURAHAN SAMBENG
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**89,00 Nilai**	**-**	**266.342.000,00**				**89,00 Nilai**	**266.342.000,00**	

	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*	-	100 persen 1 Kegiatan	266.342.000,00			ASN dan Masyarakat	-	266.342.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum										
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		12 Dokumen	266.342.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	ASN dan Masyarakat		266.342.000,00	KELURAHAN SAMBENG
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**100 Persen100 Persen**	**-**	**63.834.000,00**				**100 Persen100 Persen**	**63.834.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	-	5 Lembaga Kemasyarakat	63.834.000,00			RT, RW, Guru TK/PAUD/TPA	-	63.834.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		5 Lembaga Kemasyarakatan	63.834.000,00	Kab. Boyolali, Juwangi, Sambeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	RT, RW, Guru TK/PAUD/TPA		63.834.000,00	KELURAHAN SAMBENG
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**100,00 Pers en**	**-**	**22.363.000,00**				**100,00 Pers en**	**22.363.000,00**	

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-	2 Kegiatan	22.363.000,00			masyarakat boyolali	-	22.363.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		400 Orang	22.363.000,00	Kab. Boyolali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	masyarakat boyolali		22.363.000,00	KELURAHAN SAMBENG
	J U M L A H					**549.589.000,00**					**547.433.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan rencana target capaian kinerja yang diinginkan untuk 1 tahun mendatang. Renja ini memuat berbagai kebutuhan yang berkaitan secara langsung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Juwangi, yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Perumusan program dan kegiatan ini, mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai disertai dengan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Realisasi renja ini sangat tergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024

Sebagaimana tujuan renja ini yaitu “terarahnya program serta prioritas kegiatan tahunan dengan capaian rencana strategis Kecamatan Juwangi melalui pembiayaan APBD Kabupaten yang dilengkapi dengan indikator capaian sebagai tolak ukur penilaian kinerja”, maka renja ini tidak akan berarti banyak jika tidak dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan tidak dilaksanakanan sebagaimana mestinya. Oleh karena masih diperlukan komitmen yang kuat oleh seluruh komponen dalam rangka melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi secara terus-menerus sehingga renja ini dapat menjadi sarana dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Juwangi 2021-2026.

VV. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

KECAMATAN WONOSAMODRO

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN WONOSAMODRO TAHUN 2022	6
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wonosamodro Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah ...	13
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	51
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	54
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	54
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	55
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	56
	4.1. Program dan Kegiatan.....	56
BAB V	PENUTUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah selama periode 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah selama periode 5 (lima) tahun. Tata cara / proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) terdiri dari :

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat

Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan dengan tujuan untuk memastikan bahawa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota menjadi Rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan : a) rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; b) hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah meliputi kebijakan program strategis nasional (PSN), amanat pembangunan global dan nasional, dan dinamika pembangunan nasional lainnya. Selain itu juga kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 tetap memperhatikan keberlanjutan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada sector perekonomian, sosial dan Kesehatan, serta dukungan terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) sebagai prioritas dalam penanggulangan kemiskinan. Disamping itu RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 meliputi:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;

2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan eksterm (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Wonosamodro Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yng dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Rencana Strategis Kecamatan Wonosamodro Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wonosamodro 2024 adalah untuk memberikan Landasan Kebijakan Teknis Tahunan dalam Kerangka Pencapaian Visi Misi setiap tahapnya (satu tahunan) dan sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Camat pada Akhir Tahun Anggaran sebagai bagian dari pelaksanaan Kebijakan Daerah. Renja Tahun 2024 Kecamatan Wonosamodro disusun sebagai acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Wonosamodro Tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2024 Kecamatan Wonosamodro adalah adalah menetapkan prioritas Program dan Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan sesuai Rencana Strategis yang dilaksanakan per tahap (tahunan) melalui sumber pembiayaan APBD dan menyesuaikan

gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Wonosamodro Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Wonosamodro Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistimatika Penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Wonosamodro sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra PD

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Revieu hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dan realisasi Renstra Kecamatan Wonosamodro yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Wonosamodro dan/atau realisasi APBD Kecamatan Wonosamodro. Adapun hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 untuk Kecamatan Wonosamodro sebagai berikut:

Hasil evaluasi terhadap capaian realisasi program/kegiatan dan capaian renstra di Kecamatan Wonosamodro, sebagai berikut :

1. Realisasi Program / Kegiatan yang memenuhi/mencapai target :
    a. Program
        1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
        2). Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
        3). Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
        4). Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
        5). Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
        6). Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

b. Kegiatan

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
d) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

2) Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e) Penyediaan Bahan/Material
f) Fasilitasi Kunjungan Tamu
g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan

a) Pengadaan Mebel
b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Realisasi Program/Kegiatan yang belum memenuhi target :

Semua program/kegiatan Tahun 2022 dilaksanakan memenuhi target rencana.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target:

Semua program/kegiatan yang dilaksanakan belum ada yang melebihi target rencana.

Untuk lebih jelasnya capaian program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel T-C.29.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target

Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 secara keseluruhan dapat berjalan dengan lancar dan pencapaian kinerja kegiatan sesuai dengan target yang direncanakan.

5. Faktor-faktor pendukung tercapainya target.
    a. Komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dan desa dalam melaksanakan dan menyelesaikan program/kegiatan
    b. Kerjasama yang baik antara pemerintahan kecamatan dan Pemerintah Desa, serta seluruh UPT kecamatan.
    c. Peran aktif kelompok sasaran program/kegiatan
6. Solusi/pemecahan masalah :
    a. Evaluasi kinerja dan pencapaian target kinerja secara rutin;
    b. Peningkatan komitmen dari seluruh pelaksana kegiatan untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan dengan baik;
    c. Pengambilan keputusan secara cepat dan proporsional sesuai dengan kewenangan Kecamatan untuk mengatasi keadaan tanpa ketergantungan dengan Pemerintah Kabupaten;
    d. Meningkatkan pengelolaan administrasi.
    e. Identifikasi setiap permasalahan yang muncul dan disertai dengan penyelesaiannya.
    f. Membangun komunikasi dua arah antara pengambil kebijakan dan pelaksana kegiatan;

    Peningkatan jalinan kerjasama baik dengan instansi pemerintah lainnya di Tingkat Kecamatan dan Desa maupun dengan kelembagaan masyarakat yang ada

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 s/d Tahun 2026

Provinsi/Kabupaten/Kota Boyolali

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Wonosamodro Lembar : .....

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan 2022 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**									
1	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Prosentase Ketercapaian fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat Daerah								
1	01	2	02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan 2022 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	14 bulan	100%
1	01	2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji Non ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	01	2	06	**Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**									
1	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	01	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan 2022 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	01	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	01	2	07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
	001	08	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	01	2	08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
1	01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	01	08	02	Penyediaan Jasa	Tersedianya jasa	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan 2022 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	komunikasi, sumber daya air dan listrik								
	01	2	09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	01	09	09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Terlaksananya perbaikan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7				**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	01			**KECAMATAN**									
1	05	02		**PROGRAM**	Jumlah Kegiatan								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan 2022 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penyiapan tenaga, pengendalian kebisingan dan pengendalian keamanan lingkungan								
01	04	2	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	14 bulan	100%
02	2	01	03	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terbayarnya Gaji Non ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7	01	02		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum								
7	01	02	03	Koordinasi									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan 2022 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum									
02	2	03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Umum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
7	1	03		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat, meningkatnya kemampuan lembaga pengelola sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat, cakupan pemberian								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan 2022 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					stimulan pembangunan desa/kelurahan								
01	03	2	01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**									
03	2	01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
01	03	2	02	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ditingkat Kecamatan**									
03	2	02	03	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
7	01	05		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan disetiap kecamatan								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan 2022 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	05	2	01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**									
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesaatuan Republik Indonesia.	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
05	2	01	04	Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama,	Terlaksananya Pembinaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan 2022 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				RAS dan Golongan lainya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional	Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional								

7. Realisasi Program / Kegiatan yang memenuhi/mencapai target :

   Realisasi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Wonosamodro pada tahun 2022 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan.

8. Realisasi Program/Kegiatan yang belum memenuhi target :

   Realisasi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Wonosamodro pada tahun 2022 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan.

9. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target
   a. Terbatasnya personil dalam pelaksanaan program / kegiatan
   b. Terbatasnya kemampuan Aparatur Pemerintah desa sehingga belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan administrasi desa;
   c. Program/kegiatan belum seluruhnya menjangkau kelompok sasaran;
   d. Terbatasnya pendanaan

10. Faktor-faktor penyebab tercapainya/melampaui target
    a. Komitmen aparatur dalam melaksanakan program/kegiatan
    b. Pelaksanaan pemerintahan secara efektif dan efisien
    c. Kerjasama dan dukungan dari Pemerintah Desa, Instansi setingkat Kecamatan dan masyarakat
    d. Peran aktif kelompok sasaran program/kegiatan

11. Solusi/pemecahan masalah :
    a. Optimalisasi sumber daya yang ada sesuai dengan tugas pokoknya;
    b. Peningkatan jalinan kerjasama baik dengan instansi pemerintah lainnya di Tingkat Kecamatan dan Desa maupun dengan kelembagaan masyarakat yang ada;
    c. Evaluasi kinerja secara rutin;
    d. Peningkatan komitmen dari seluruh pelaksana kegiatan untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan dengan baik;
    e. Pengambilan keputusan secara cepat dan proporsional sesuai dengan kewenangan Kecamatan untuk mengatasi keadaan tanpa ketergantungan dengan Pemerintah Kabupaten;
    f. Identifikasi setiap permasalahan yang muncul dan disertai dengan penyelesaiannya.
    g. Membangun komunikasi dua arah antara pengambil kebijakan dan pelaksana kegiatan;
    h. Pengajuan usulan anggaran sesuai dengan kebutuhan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang telah disesuaikan pada Kecamatan Wonosamodro yaitu pada Tabel T-C.30 sebaga berikut :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonosamodro

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		NO
				Tahun 2022 (thnn-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thnn+1	Tahun 2022 (thnn-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2022 (thnn-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			82.11	82.72	83.55	84.18	82.11	82.72	83.55	82.11	
2.	Nilai SAKIP			78	78.75	79	79.25	80,45	78.75	79	80,45	

Pencapaian kinerja pelayanan sesuai tabel diatas sudah tergolong baik, tetapi masih perlu ditingkatkan dengan berkomitmen dan bekerjasama seluruh ASN untuk lebih meningkatkan pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2023 diarahkan pada penyelesaian dan penuntasan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan program unggilan daerah, degan kebijakan yang diarahkan pada " Pembangunan Infrastruktur yang tangguh, ikonik, mandiri, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan".

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 menetapkan visi yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu " **BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI" Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)**. Sebagai upaya untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Boyolali, yaitu :

a. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan.
b. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.
c. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional.
d. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
e. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Boyolali tahun 2023 diarahkan untuk akselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah pada misi tersebut diatas. Penjelasan tiap misi sebagai berikut :

a. **Misi 1 Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan Meningkatnya nilai investasi.** Dengan sasaran antara lain : meningkatnya peran perusahaan dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan ; meningkatnya pemanfaatan BMD untuk meningkatkan PAD; meningkatnya perusahaan yang ramah lingkungan; meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata; meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian; meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian; meningkatnya kenyamanan transportasi; meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa; menurunnya pengangguran; meningkatnya perlindungan hak hak tenaga kerja dan promosi lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi seluruh pekerja; meningkatnya pertumbuhan sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap perekonomian.

b. **Misi 2 Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.** Dengan sasaran antara lain : meningkatnya akses dan kulitas pendidikan; meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan; meningkatnya nilai budaya lokal sebagai identitas dan katalisator pembangunan; meningkatnya pengendalian penduduk dan keluarga yang berkualitas; meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak; meningkatnya kesejahteraan PMKS; meningkatnya keberdayaan desa; meningkatnya kohesivitas soisal masyarakat; menurunnya resiko bencana;

c. **Misi 3 Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional.** Dengan sasaran antara lain : meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian; meningkatnya agro industri susu; meningkatnya kualitas susu; meningkatnya ketahanan pangan;

d. **Misi 4 Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.** Dengan sasaran antara lain : meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; meningkatnya integritas dan kapasitas pemerintah daerah; meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik; terwujudnya smart governance Boyolali;

e. **Misi 5 Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing.** Dengan sasaran antara lain : meningkatnya Akses Rumah Layak Huni; meningkatnya kualitas prasarana, sarana dan utilitas permukiman berbasis smartness; meningkatnya kualitas bangunan dan penataan ruang; meningkatnya kualitas air; meningkatnya kualitas udara; meningkatnya kualitas tutupan lahan; meningkatnya penanganan sampah.

Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Boyolali

A. Isu Strategis Pembangunan

Memperhatikan gambaran kondisi daerah dari asil evaluasi pelaksanaan pembangunan. Isu – isu global, nasional, dan regional termasuk dampak dari pandemi Covid- 19, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Iklim Investasi yang Berwawasan Lingkungan

Pertumbuhan ekonomi masih menjadi pintu masuk bagi pengembangan ekonomi daerah. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Boyolali tumbuh di angka sekitar 5,9% pada dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Namun demikian, angka tersebut masih bisa digenjot ke angka yang lebih tinggi dengan membuka peluang investasi yang lebih tinggi. Boyolali merupakan daerah dengan potensi investasi sangat terbuka mengingat dari sisi akses cukup mudah karena dilalui oleh jalan tol menuju Semarang dan dekat dengan salah satu pusat ekonomi terbesar di wilayah tenggara Jawa Tengah yaitu Kota Surakarta. Potensi investasi ada di berbagai sektor terutama pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata.

Namun demikian , adanya kebutuhan untuk menggenjot perekonomian melalui peningkatan peluang investasi di Boyolali juga harus memperhatikan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui investasi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan kondisi lingkungan yang berkaitan dengan daya tampung dan daya dukung kewilayahan. Dengan demikian isu strategis yang berkaitan denagn pertumbuhan ekonomi sangat tepat jika dirumuskan sebagai berikut : Pertumbuhan Ekonomi dan Iklim Investasi yang Berwawasan Lingkungan. Isu ini cukup merepresentasikan kebutuhan pengembangan ekonomi daerah ke depan yang juga selaras dengan isu strategis pada level provinsi dan sejalan dengan spirit pembangunan ekonomi nasional.

2. Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan

Persentase penduduk miskin pada tahun 2019 berada pada angka 9,53%, mengalami penurunan sebanyak 2,92% dari tahun 2015. Rata- rata penurunan penduduk miskin di Kabupaten Boyolali per tahun mencapai 0,73%. Menurunya persentase kemiskinan juga turut disertai dengan capaian positif indeks kedalaman dan indeks keparahan keminskinan yang mengalami penurunan di setiap tahunnya.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali masih perlu ditingkatkan, mengingat jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih menunjukkan angka yang cukup tinggi,yaitu 66,885. Tercatat 90,23% attau 60,351 dari total

jumlah PMKS adalah berasal dari keluarga miskin. Kondisi kemiskinan dapat menyebabkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Masalah lain yang perlu diselesaikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali adalah terkait tumpang tindihnya data penduduk miskin. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Pemutakhiran dan verifikasi data penduduk miskin menjadi penting untuk dilakukan dalam periode pembangunan yang akan datang, guna meningkatkan akurasi pemberian bantuan agar lebih tepat sasaran. Selain itu, intervensi yang lebih menyeluruh perlu dilakukan, tidak hanya pada pembenrian bantuan sosial tetapi penanganan lintas sektor melalui pengembangan ekonomi dan peningkatan fasilitas dasar.

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali perlu diikuti dengan upaya mengurangi tingkat kesenjangan sosial Adanya isu kesenjangan sosial merupakan indikasi tidak meratanya akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi di suatu daerah. Kondisi tersebut dapat terlihat dari sebaran masyarakat miskin yang hanya terkonsentrasi dibeberapa wilayah. Manyoritas rumah tangga miskin di Kabupaten Boyolali berada di wilayah bagian timur, yakni di Kecamatan Nogosari, Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Andong dengan total mencapai 27,042 atau 20,7% dari total rumah tangga miskin di Kabupaten Boyolali. Kondisi ini masyarakat perlu menjadi fokus lain dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

3. Pembangunan SDM yang Inklusif dan Berdaya Saing

Kualitas SDM dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilihat dari tiga aspek yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Nilai IPM Kabupaten Boyolali tahun 2020 sebesar 74,25 dengan rata – rata petumbuhan 0,51 per tahun. Jika dibanding dengan daerah sekitar, capaian IPM Kabupaten Boyolali masih perlu ditingkatkan.

Dilihat dari aspek pendidikan, angka Rata- rata Lama Sekolah (RLS) kabupaten Boyolali sebesar 7, 84 tahun. Artinya , rata- rata penduduk di Boyolali dapat menempuh pendidikan setara

kelas 1 SMP. Merujuk pada program wajib belajar sembilan tahun, maka capaian tersebut perlu ditingkatkan. Pada aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) cukup tinggi yaitu sebesar 75,95. Namun, dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 123 per 100.000 kelahiran hidup masih diatas rata- rata target capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mengharuskan berada pada angka 70 per 100.000. Selain itu, masih perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan dan peningkatan pada setiap jenis pelayanan kesehatan.

Selain dimensi IPM, peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan inklusif juga harus memperhatikan aspek kesetaraan gender dalam setiap proses pembangunan. Kesetaraan gender dapat dilihat Indeks Pembangunan Gender (IPG). Selama periode 2016-2020, capaian IPG Kabupaten Boyolali cukup bagus yakni diatas angka 90. Namun demikian, capaian tersebut belum menunjukkan kondisi kesetaraan secara penuh. Untuk itu, masih perlu upaya pengarusutamaan gender dalam setiap pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, kontrol, menikmati manfaat pembangunan hingga evaluasi pembangunan. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan menitikberatkan aspek kolaborasi antara perempuan dan laki – laki sehingga menciptakan kesetaraan akses dan keberdayaan dalam pembangunan.

4. Peningkatan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Boyolali masih perlu untuk terus ditingkatkan. Meskipun seluruh kecamatan sudah terhubung dengan jaringan jalan, kualitas jalan di Kabupaten Boyolali masih perlu untuk ditingkatkan. Jika dilihat berdasarkan jenis permukaan : 70, 54 % jalan di Kabupaten Boyolali berupa aspal; 4,88% berupa kerikil; 0,34 % berupa tanah dan 24,25% sisanya berupa rigid pavement. Lebih dari itu, pada tahun 2020, sekitar 17,75% dari total panjang jalan sudah dalam kondisi rusak dan rusak berat.

Di samping ketersediaan jalan, peningkatan konektivitas wilayah juga perlu di dukung dengan transportasi umum yang memadai. Kondisi transportasi umum di Kabupaten Boyolali saat ini sedang menghadapi tantangan yang cukup serius. Kondisi ini

ditandai dengan semakin menurunnya armada yang melayani trayek angkutan. Selain itu, kenyamanan dan keselamatan transportasi juga perlu untuk ditingkatkan. Jumlah korban kecelakaan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, jumlah korban tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 1.194 orang. Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan edukasi kepada masyarakat tentang tertib berlalu lintas masih perlu untuk dilakukan.

Terkait akses terhadap air, persentase penduduk yang terlayani penggunaan air baku pada tahun 2019 mencapai 89,90%. Meskipun demikian, persentase ketersediaan air baku masih mencapai 6,70%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hanya 6,70% dari total kebutuhan air baku daerah yang sudah terpenuhi. Ketersediaan air masih menjadi tantangan bagi Kabupaten Boyolali. Hal ini disebabkan oleh kondisi alam yang sebagian berupa tanah berbatu dan pasir dan bersifat porous. Di samping itu, pada tahun 2020 cakupan penduduk yang mengakses air minum layak dan berkelanjutan masih berada pada angka 90,50% , artinya belum mencapai target SDGs yaitu sebesar 100%.

Pembangunan infrastruktur dasar juga bertujuan untuk meningkatkan kalayakhunian. Upaya ini meliputi pengembangan kawasan permukiman yang memenuhi standar teknis kelayakan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Pada tahun 2020, sisa luas kawasan kumuh yang belum tertangani adalah sebesar 5,07 ha atau sekitar 10,43% dari total luas kawasan kumuh yang ditetapkan melalui SK Bupati Boyolali Nomor 662.1/324 Tahun 2017.

Di samping itu, berdasarkan SK Kumuh yang ditetapkan pada tahun 2020, luas kawasan kumuh yang harus segera ditangani adalah sebesar 87,85 ha. Selain itu, penyediaan rumah layak huni juga masih perlu untuk ditingkatkan. Pada tahun 2020, ketersediaan rumah layak huni mencapai 88,00%. Data yang tersedia menunjukkan bahwa 11,993% atau sekitar 38,384 unit rumah di Boyolali masih termasuk dalam kategori rumah tidak layak huni.

5. Reformasi Birokrasi yang Akuntabel dan Agile

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Boyolali telah berjalan baik di dalam beberapa aspek yang ditandai dengan capaian kinerja yang memenuhi target nasional. Aspek pengawasan memiliki Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Level 3, serta kinerja penguatan integritas aparatur dan pejabat negara yang menjadi tolok ukur nasional dengan 100% kepatuhan pelaporan harta kekayaan. Aspek akuntabilitas keuangan mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ditopang oleh tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berjalan sistematis dengan sinergi antar perangkat daerah maupun dengan pemerintah desa. Tata kelola yang efektif dan berbasis elektronik, baik dalam pelayanan publik maupun integrasi dan koordinasi antar perngkat daerah.

Isu tata kelola yang masih menjadi tantangan Kabupaten Boyolali adalah belum optimalnya akuntabilitas kinerja yang ditandai dengan capaian SAKIP “B”. Persoalan akuntabilitas kinerja perlu diurai mulai dari sisi hulu, yakni peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, serta terciptanya manajemen kinerja berupa pembagian kinerja yang sinergis antara kepala daerah dengan struktur perangkat daerah. Sedangkan capaian makro sebagai penanda utama reformasi birokrasi, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi masih belum optimal meskipun mengalami peningkatan, yaitu 52,27 pada tahun 2018 menjadi 56,84 pada tahun 2019. Pelembagaan reformasi birokrasi perlu diperkuat dengan tidak bergantung kepada salah satu perangkat daerah, misalnya Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Reformasi birokrasi membutuhkan sinergi dan komitmen seluruh perngkat daerah, karena setiap perngkat daerah memegang peran penting dalam pencapaian komponen pengungkit maupun komponen hasil dari reformasi birokrasi.

Isu reformasi birokrasi yang mendesak pula adalah penciptaan birokrasi yang tangkas dan lincah (agile) dalam memberikan pelayanan dan menjalankan pembangunan. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi mandatoris bagi pelayanan publik (pemerintah) dan hak bagi setiap warga. Hal ini selaras dengan penguatan Kabupaten Boyolali sabagai daerah pro investasi. Adanya pelayanan yang tepat waktu turut menciptakan iklim

investasi yang kondusif. Kabupaten Boyolali telah memiliki modal dengan penerapan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Meskipun demikian, tetap perlu diperkuat perluasan akses layanan disertai komitmen dan kesepahaman antar perngkat daerah, serta penciptaan kelembagaan yang efisien dan prosedur yang tidak berbelit.

6. Penanganan Bencana Alam dan Non Alam

Kabupaten Boyolali juga merupakan daerah rawan bencana terutama bencana alam. Kabupaten Boyolali memiliki kondisi geografis dan topografis yang beragam sehingga memiliki kerawanan bencana yang cukup tinggi. Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Boyolali tahun 2011-2031, empat jenkis bencana yang paling rawan terjadi di Boyolali antara lain banjir, banjijr lahar dingin, tanah longsor , dan kebakaran yang terbesar di semua bagian wilayah. Berdasarkan dokumen RPJPD Kabuapten Boyolali tahun 2005-2025, tingginya kerawanan bencana disebabkan oleh kurang terintegrasinya pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Artinya, aspek pembangunan tidak sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana.

Tolok ukur keberhasilan penanggulangan bencana adalah Indeks Resiko Bencana (IRB) dan Indeks Kapasitas. Tahun 2020, Indeks Resiko Bencanadi Kabupaten Boyolali sebesar 130, 32 dan Indeks Kapasitas Kabupaten Boyolali sebesar 82. Artinya, penanggulangan bencana semakin optimal jika Indeks Kapasitas besar sehingga Indeks Resiko Bencana akan menurun. Indeks Kapasitas dipicu oleh beberapa komponen seperti penguatan kelembagaan penanggulangan bencana, ketersediaan sarana prasarana kebencanaan, kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana yang semakin meningkat, serta semakin optimalnya penggunaan sistem informasi kebencanaan.

Selain bencana alam, Kabupaten Boyolali juga tidak terlepas dari bencana non alam terutama dengan adanya pandemi. Saat ini semua daerah termasuk Boyolali sedang dilanda bencana non alam berupa pandemi Covid-19. Hingga saat ini, jumlah total kasus Covid-19 di Boyolali mencapai 24,606 dengan korban meninnggal

sebanyak 1.412 orang atau sekitar 5,74%. Meskipun jumlahnya terus menurun, namun demikian isu pandemi ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam perencanaan pembangunan.

7. Inovasi dan Teknologi Informatika

Sejalan dengan apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan provinsi, isu strategis lain yang juga mendesak untuk dikedepankan dalam perencanaan pembangunan adalah inovasi kebijakan publik melalui penggunaan teknologi informasi yang masif. Inovasi kebijakan dibutuhkan untuk menopang pencapaian visi dan misi daerah terutama dalam rangka: meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan responsivitas dan efektifivas pelayanan publik, serta menjadi katalisator pembangunan sektoral terutama sektor- sektor unggulan daerah. Dengan dasar tersebut, dorongan terhadap inovasi (baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah) akan menjadi penentu cepat atau lambatnya pembangunan Kabupaten Boyolali.

B. Prioritas dan Pembangunan Daerah Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah tahun 2023 ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah guna **“ Pembangunan Infrastruktur yang tangguh, ikonik, mandiri, produktif , berdaya saing dan bekerlanjutan “.’**

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 diarahkan pada pembangunan infrastruktur berorientasi untuk peningkatan konektivitas antar pusat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Boyolali, sehingga tidak terdapat ketimpangan antar wilayah. Infrastruktur juga berperan membangun ikon daerah yang mampu mengakselerasi pembangunan pariwisata dan sektor lainnya.

Prioritas pembangunan dalam arah kebijakan ini berupa :

1. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat pertumbuhan dan antar kecamatan, termasuk peningkatan pembangunan infrastruktur di wilayah Boyolali utara;
2. Peningkatan kenyamanan transportasi melalui penguatan kualitas layanan perhubungan;

3. Pembangunan infrastruktur ikonik, berupa taman hiburan rakyat, sarana simulasi ibadah haji, prototype pembangunan kantor desa dengan logo Boyolali, pembangunan ruang terbuka hijau dengan berbagai fasilitas bagi warga;
4. Revitalisasi infrastruktur perdagangan melalui pemindahan pasar;
5. Penataan wilayah melalui perubahan status desa/ kelurahan untuk efektivitas pembangunan dan pelayanan publik;
6. Pembangunan RTLH untuk masyarakat yang membutuhkan dilengkapi dengan jamban sehat;
7. Penguatan literasi masyarakat melalui penyusunan dan diseminasi bahan bacaan berbasis nilai budaya " Boyolali Kaya Cerita " serta pembangunan perpustakaan.

Bedasarkan uraian tersebut diatas, Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok "Membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan". Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
b. Penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
c. Pengoordinasikan, pembinaan, fasilitasi dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali tersebut di atas adalah untuk mendukung :

Misi keempat, yaitu Boyolali Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Kualitas sumber daya manusia harus selalu ditingkatkan agar memiliki daya saing dengan daerah lain yang lebih maju.

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia ditandai oleh terpenuhinya hak sosial masyarakat dengan cakupan akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemuda dan olah raga, serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh bidang pembangunan (Indek Ketimpangan Gender). Tujuan peningkatan kualitas pembangunan manusia selaras dengan *Sustainable Development Goals*: (i) tujuan ketiga yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia; (ii) tujuan keempat yakni menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang; (iii) tujuan kelima yakni menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan; (iv) tujuan kedelapan yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.

Sasaran yang akan diwujudkan dari tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Wonosamodro secara umum dapat dikatakan baik, hal ini bisa dilihat dari tingkat capaian kinerja terhadap indikator yang ditetapkan baik dalam IKK maupun IKU. Sebagian besar tingkat capaian telah mencapai target yang direncanakan.

Hal kritis yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pelayanan di Kecamatan Wonosamodro, adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang meliputi :

2.1.1. Peningkatan pemerintahan yang efektif, efisien yang ditandai dengan semakin sederhananya birokrasi serta pelayanan yang cepat, tepat dan akurat serta murah.

2.1.2. Peningkatan pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang ditandai dengan kepastian dan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi dan program/kegiatan untuk masyarakat.

2.1.3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan perekonomian masyarakat dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

2.1.4. Peningkatan sistem pengendalian keamanan lingkungan secara sinergis antara pemerintah dan masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2023, tidak tercantum rencana kegiatan yang ada di Kecamatan, sehingga tidak bisa dibandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Hasil analisis kebutuhan Kecamatan Wonosamodro dapat dilihat dalam tabel T-C.31.

Tabel T-C.31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah: Kecamatan Wonosamodro Lembar 1 dari 2

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu**	**87,00**	**100.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu**	**87,00**	**1.100.000.000**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	-	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Wonosa modro	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 laporan	-	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Wonosa modro	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 laporan	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan/Subkeg**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Wonosa modro	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Wonosa modro	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	-	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Wonosa modro	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di Kecamatan yang terselenggara	1 Kegiatan	-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Wonosa modro	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di Kecamatan yang terselenggara	1 Kegiatan	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Wonosa modro	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Wonosa modro	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Jumlah sarana dan prasarana umum dalam kondisi baik	1 unit	100.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Jumlah sarana dan prasarana umum dalam kondisi baik	1 unit	1.100.000.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan/Subkeg**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Wonosa modro	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Laporan	100.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Wonosa modro	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Laporan	1.100.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	**100,00**	**25.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	**100,00**	**10.000.000**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah sarana dan prasarana pendukung ketentraman dan keteriban umum yang tersedia	2 Kegiatan	25.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah sarana dan prasarana pendukung ketentraman dan keteriban umum yang tersedia	2 Kegiatan	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan/Subkeg**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Wonosa modro	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	25.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Wonosa modro	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	10.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100,00**	**70.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**100,00**	**66.750.000**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4 Kegiatan	70.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4 Kegiatan	66.750.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Wonosa modro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	50.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Wonosa modro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan/Subkeg**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Wonosa modro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	20.000.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Wonosa modro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	41.750.000	
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100,00**	**100.000.000**	**Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**		**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100,00**		
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desai	2 Kegiatan	100.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desai	2 Kegiatan	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan/Subkeg**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Wonosa modro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Wonosa modro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	-	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Wonosa modro	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	100.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Wonosa modro	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)**	**100,00**	**50.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)**	**100,00**	**30.000.000**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	50.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	30.000.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan/Subkeg**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Wonosa modro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Wonosa modro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		30.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Wonosa modro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Wonosa modro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10 Laporan		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti**	**100,00**	**-**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti**	**100,00**	**-**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa	3 kegiatan	-	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa	3 kegiatan	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Wonosa modro	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 dokumen	-	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Wonosa modro	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Wonosa modro	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 dokumen	-	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Wonosa modro	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 dokumen	-	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Wonosa modro	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Wonosa modro	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	**100,00**	**2.043.538.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	**100,00**	**2.340.579.000**	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Gaji dan tunjangan ASN, Gaji non ASN	1 Tahun	1.799.238.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Gaji dan tunjangan ASN, Gaji non ASN	1 Tahun	1.983.565.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Wonosamodro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.729.038.000	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Wonosamodro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.905.565.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Wonosamodro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	70.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Wonosamodro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	78.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Wonosamodro	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Wonosamodro	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Wonosamodro	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Wonosamodro	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Wonosamodro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Wonosamodro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec. Wonosamodro	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec. Wonosamodro	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Wonosamodro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Wonosamodro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	-	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Wonosamodro	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Wonosamodro	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	1 kegiatan	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	1 kegiatan	-	
	Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Wonosamodro	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Wonosamodro	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 kegiatan	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 kegiatan	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Wonosamodro	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Wonosamodro	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	12 bulan	152.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	12 bulan	237.774.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Wonosamodro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Wonosamodro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Wonosamodro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Wonosamodro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Wonosamodro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Wonosamodro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Wonosamodro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Wonosamodro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	71.060.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan/Subkeg**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Wonosamodro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Wonosamodro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Wonosamodro	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Wonosamodro	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	18.464.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Wonosamodro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	62.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Wonosamodro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	115.250.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Wonosamodro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Wonosamodro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	18.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Wonosamodro	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 Dokumen	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Wonosamodro	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 Dokumen	-	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Wonosamodro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 Dokumen	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Wonosamodro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 Dokumen	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	23.900.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	23.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan/Subkeg**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Wonosamodro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Wonosamodro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Wonosamodro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Wonosamodro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Wonosamodro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Wonosamodro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	68.400.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	75.000.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Wonosamodro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	14.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Wonosamodro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	18.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan/Subkeg**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Wonosamodro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	4.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Wonosamodro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	7.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Wonosamodro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Wonosamodro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang milik daerah		-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang milik daerah		20.340.000	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Wonosamodro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Wonosamodro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.340.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan/Subkeg**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	
	Kegiatan					**Kegiatan**					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	7 kegiatan	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	7 kegiatan	-	
	Sub Kegiatan					**Sub Kegiatan**					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 laporan	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	-	
					2.388.538.000					**3.547.329.000**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain melakukan menggali permasalahan/kebutuhan dari internal kantor, Kecamatan Wonosamodro juga menjaring aspirasi atau usulan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun LSM, yang langsung ditujukan ke Kecamatan Wonosamodro berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Desa dan Kecamatan. Berdasarkan atas hasil Musrenbang baik di Desa maupun Kecamatan, usulan dari masyarakat terkait dengan pelayanan/tugas pokok fungsi di Kecamatan Wonosamodro sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah : Kecamatan Wonosamodro

No	Program/Kegiatan/ Subkeg	Lokasi	Volume/Target		Bidang		PD Penanggung Jawab
			Jumlah	Satuan	Infrastruktur	Non Infrastruktur	
1	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penyelenggaraan Jalan - Peningkatan Jalan Ruas Jalan Jrebeng - Repaking	Desa Repaking dan Desa Garangan	7000	m	√		Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
2	Program Penyelenggaraan Jalan - Peningkatan Jalan Ruas Jalan Mongkrong – Gilirejo	Desa Gilirejo	5000	m	√		Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
3	Program Penyelenggaraan Jalan - Peningkatan Jalan Ruas Jalan Jrebeng – Cukilan	Desa Ngablak	3000	m	√		Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
4	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan - Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Ruas Jalan Kabupaten	Wonosamodro	1000	Titik	√		Perhubungan
5	Program Penataan Bangunan dan Gedung - Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Kedungpilang	Kedungpilang	1	Unit	√		Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Pembangunan sumur dalam	Garangan Gunungsari Repaking Bercak Bengle Jatilawang Kedungpilang Kalinanas	10	Desa	√		Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan/ Subkeg	Lokasi	Volume/Target		Bidang		PD Penanggung Jawab
			Jumlah	Satuan	Infrastruktur	Non Infrastruktur	
1	4	5	6	7	8	9	10
		Gilirejo Ngablak					
7	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya - Pembangunan Gelanggang Atletik	Kedungpilang dan Desa Ngablak	2	unit	√		Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
8	Program Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman - Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Garangan Gunungsari Repaking Bercak Bengle Jatilawang Kedungpilang Kalinanas Gilirejo Ngablak	10	Desa		√	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
9	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Jambanisasi	Garangan Gunungsari Repaking Bercak Bengle Jatilawang Kedungpilang Kalinanas Gilirejo Ngablak	250	KK		√	Kesehatan
10	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Pengadaan bibit tanaman durian	Garangan Gunungsari Repaking Bercak Bengle Jatilawang Kedungpilang Kalinanas Gilirejo Ngablak	1000	bibit		√	Pertanian
11	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Bantuan Ternak Kambing	Garangan Gunungsari Repaking Bercak Bengle Jatilawang Kedungpilang Kalinanas Gilirejo Ngablak	10	Kelompok		√	Pertanian
12	Program Penempatan Tenaga Kerja - Pelatihan Wirausaha, Pelatihan Ketrampilan dan latihan kerja (BLK)	Garangan Gunungsari Repaking Bercak Bengle Jatilawang Kedungpilang Kalinanas Gilirejo Ngablak	100	orang		√	Tenaga Kerja
13	Administerasi Pemerintahan Desa,Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adad dan Masyarakat Hukum Adat - Bantuan Modal Usaha BUMDes	Garangan Gunungsari Repaking Bercak Bengle Jatilawang Kedungpilang Kalinanas Gilirejo Ngablak	10	Bumdes		√	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Pengadaan Wifi	Garangan Gunungsari Repaking Bercak Bengle Jatilawang Kedungpilang	10	Desa		√	Komunikasi dan Informatika

No	Program/Kegiatan/ Subkeg	Lokasi	Volume/Target		Bidang		PD Penanggung Jawab
			Jumlah	Satuan	Infrastruktur	Non Infrastruktur	
1	4	5	6	7	8	9	10
		Kalinanas Gilirejo Ngablak					
15	Bantuan Peralatan alat Musik - Ketoprak - Hadroh - Rodat - Reog - Gamelan	Garangan Gunungsari Repaking Bercak Bengle Jatilawang Kedungpilang Kalinanas Gilirejo Ngablak	10	Desa		√	Pariwisata

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah meliputi kebijakan program strategis nasional (PSN), amanat pembangunan global dan nasional, dan dinamika pembangunan nasional lainnya. Selain itu juga kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 tetap memperhatikan keberlanjutan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian, sosial dan Kesehatan, serta dukungan terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) sebagai prioritas dalam penanggulangan kemiskinan. Disamping itu RKPD Tahun 2024 yang disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 meliputi:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta kemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Diskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada terlihat dalam Tabel T-C.32.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan tersebut akan dituangkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Penjabaran tujuan dalam Renja merupakan turunan dari Renstra berdasarkan pada misi yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional
4. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi organisasi. Dengan demikian, tujuan dan sasaran Kecamatan Wonosamodro sesuai Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel. TC.32

Tujuan dan Sasaran Renja 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.75
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan Wonosamodro	79,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Wonosamodro Tahun 2024 merupakan penjabaran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Uraian tentang program dan kegiatan di Kecamatan Wonosamodro dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, sebagai berikut :
   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
   b. Peningkatan Pelayanan Publik
   c. Peningkatan Kesejateraan Rakyat
   d. Kondisi sarana prasrana gedung kantor
2. Rekapitulasi program dan kegiatan :
   a. Jumlah : 6 program dan 16 kegiatan
   b. Lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kecamatan beberapa kegiatan yang berlokasi di desa yaitu :
      - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
      - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
      - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
   c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar : Rp. 3.547.329.000,-
3. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan, yaitu sebagai berikut:

Detail rencana program dan kegiatan Kecamatan Wonosamodro Tahun 2024 murni sebagaimana dalam tabel T-C.33

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Wonosamodro Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Wonosamodro

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	(9)=(6)+(7)+(8)	10	11	12
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.547.329.000,00**			**3.547.329.000,00**			**2.288.538.000,00**
7.01	**KECAMATAN**				**3.547.329.000,00**			**3.547.329.000,00**			**2.288.538.000,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar***	Kecamatan Wonosamodro	**100 persen 100 Persen**	**2.340.579.000,00**			**2.340.579.000,00**		**-**	**2.043.538.000,00**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	0,00			0,00		-	0,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kecamatan Wonosamodro	2 Dokumen	0,00			0,00	Wonosamodro	2 Dokumen	0,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Kecamatan Wonosamodro	1 Dokumen	0,00			0,00	Wonosamodro	1 Dokumen	0,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	Kecamatan Wonosamodro	1 Dokumen	0,00			0,00	Wonosamodro	1 Dokumen	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	(9)=(6)+(7)+(8)	10	11	12
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	Kecamatan Wonosamodro	1 Dokumen	0,00			0,00	Wonosamodro	1 Dokumen	0,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	Kecamatan Wonosamodro	1 Dokumen	0,00			0,00	Wonosamodro	1 Dokumen	0,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Kecamatan Wonosamodro	15 Laporan	0,00			0,00	Wonosamodro	15 Laporan	0,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kecamatan Wonosamodro	4 Laporan	0,00			0,00	Wonosamodro	4 Laporan	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Gaji dan tunjangan ASN, Gaji non ASN*	ASN dan Non ASN Kecamatan Wonosamodro	20 Orang/ Bulan	1.983.565.000,00			1.983.565.000,00	Wonosamodro	20 Orang/ Bulan	1.799.238.000,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	ASN Kecamatan Wonosamodro	17 Orang/bulan	1.905.565.000,00			1.905.565.000,00	Wonosamodro	17 Orang/bulan	1.729.038.000,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	ASN dan Non ASN Kecamatan Wonosamodro	13 Dokumen	78.000.000,00			78.000.000,00	Wonosamodro	13 Dokumen	70.200.000,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	Kecamatan Wonosamodro	12 Dokumen	0,00			0,00	Wonosamodro	12 Dokumen	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	(9)=(6)+(7)+(8)	10	11	12
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	Kecamatan Wonosamodro	12 Dokumen	0,00			0,00	Wonosamodro	12 Dokumen	0,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kecamatan Wonosamodro	1 Laporan	0,00			0,00	Wonosamodro	1 Laporan	0,00
7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	ASN dan Non ASN Kecamatan Wonosamodro	1 Dokumen	0,00			0,00	Wonosamodro	1 Dokumen	0,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	ASN dan Non ASN Kecamatan Wonosamodro	18 Laporan	0,00			0,00	Wonosamodro	18 Laporan	0,00
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	ASN dan Non ASN Kecamatan Wonosamodro	1 Dokumen	0,00			0,00	Wonosamodro	1 Dokumen	0,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	0,00			0,00	Wonosamodro	-	0,00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Kecamatan Wonosamodro	3 Laporan	0,00			0,00	Wonosamodro	3 Laporan	0,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	0,00			0,00	Wonosamodro	-	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	(9)=(6)+(7)+(8)	10	11	12
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	Kecamatan Wonosamodro	13 Dokumen	0,00			0,00	Wonosamodro	13 Dokumen	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			237.774.000,00			237.774.000,00	Wonosamodro		152.000.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kecamatan Wonosamodro	4 Paket	2.000.000,00			2.000.000,00	Wonosamodro	4 Paket	2.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kecamatan Wonosamodro	4 Paket	0,00			0,00	Wonosamodro	4 Paket	0,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Kecamatan Wonosamodro	4 Paket	3.000.000,00			3.000.000,00	Wonosamodro	4 Paket	3.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Kecamatan Wonosamodro	4 Paket	71.060.000,00			71.060.000,00	Wonosamodro	4 Paket	50.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kecamatan Wonosamodro	4 Paket	10.000.000,00			10.000.000,00	Wonosamodro	4 Paket	10.000.000,00
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	Kecamatan Wonosamodro	4 Paket	18.464.000,00			18.464.000,00	Wonosamodro	4 Paket	15.000.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Kecamatan Wonosamodro	4 Laporan	115.250.000,00			115.250.000,00	Wonosamodro	4 Laporan	62.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kecamatan Wonosamodro	4 Laporan	18.000.000,00			18.000.000,00	Wonosamodro	4 Laporan	10.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	(9)=(6)+(7)+(8)	10	11	12
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kecamatan Wonosamodro		20.340.000,00			20.340.000,00	Wonosamodro		0,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	Kecamatan Wonosamodro	8 Unit	0,00			0,00	Wonosamodro	8 Unit	0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	Kecamatan Wonosamodro	2 Unit	20.340.000,00			20.340.000,00	Wonosamodro	2 Unit	0,00
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Kecamatan Wonosamodro	1 Unit	0,00			0,00	Wonosamodro	1 Unit	0,00
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Kecamatan Wonosamodro	1 Unit	0,00			0,00	Wonosamodro	1 Unit	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan Wonosamodro		23.900.000,00			23.900.000,00	Wonosamodro		23.900.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kecamatan Wonosamodro	12 Laporan	900.000,00			900.000,00	Wonosamodro	12 Laporan	900.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kecamatan Wonosamodro	12 Laporan	23.000.000,00			23.000.000,00	Wonosamodro	12 Laporan	23.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kecamatan Wonosamodro	4 Laporan	0,00			0,00	Wonosamodro	4 Laporan	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan Wonosamodro		75.000.000,00			75.000.000,00	Wonosamodro		68.400.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau*	Kecamatan Wonosamodro	10 Unit	18.000.000,00			18.000.000,00	Wonosamodro	10 Unit	14.400.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	(9)=(6)+(7)+(8)	10	11	12
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*									
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kecamatan Wonosamodro	29 Unit	7.000.000,00			7.000.000,00	Wonosamodro	29 Unit	4.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kecamatan Wonosamodro	1 Unit	50.000.000,00			50.000.000,00	Wonosamodro	1 Unit	50.000.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu***		**87 persen**	**1.100.000.000,00**			**1.100.000.000,00**	Wonosamodro	**87 persen**	**100.000.000,00**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	Masyarakat	-	0,00			0,00	Wonosamodro	-	0,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	Masyarakat	13 Laporan	0,00			0,00	Wonosamodro	13 Laporan	0,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	Masyarakat	39 Dokumen	0,00			0,00	Wonosamodro	39 Dokumen	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								Wonosamodro		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	(9)=(6)+(7)+(8)	10	11	12
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Masyarakat	2 Laporan	0,00			0,00	Wonosamodro	2 Laporan	0,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah sarana dan prasarana umum dalam kondisi baik*	Masyarakat	1 unit	1.100.000.000,00			1.100.000.000,00	Wonosamodro	1 unit	100.000.000,00
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	Masyarakat	2 Dokumen	1.100.000.000,00			1.100.000.000,00	Wonosamodro	2 Dokumen	100.000.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan (program kemiskinan)***		**100 persen 100 persen**	**30.000.000,00**			**30.000.000,00**	Wonosamodro	**100 persen 100 persen**	**50.000.000,00**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	Masyarakat	6 Lembaga K emasyarakat an	0,00			0,00	Wonosamodro	6 Lembaga K emasyarakat an	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	(9)=(6)+(7)+(8)	10	11	12
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		-	30.000.000,00			30.000.000,00	Wonosamodro	-	50.000.000,00
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	Masyarakat	10 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00			30.000.000,00	Wonosamodro	10 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti***		**100 persen**	**10.000.000,00**			**10.000.000,00**	Wonosamodro	**100 persen**	**25.000.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	Masyarakat	-	10.000.000,00			10.000.000,00	Wonosamodro	-	25.000.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	Masyarakat	13 Laporan	10.000.000,00			10.000.000,00	Wonosamodro	13 Laporan	25.000.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti***		**100 persen**	**66.750.000,00**			**66.750.000,00**	Wonosamodro	**100 persen**	**70.000.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	Kecamatan Wonosamodro	-	66.750.000,00			66.750.000,00	Wonosamodro	-	70.000.000,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,*	Kecamatan Wonosamodro	400 Orang	25.000.000,00			25.000.000,00	Wonosamodro	400 Orang	50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	(9)=(6)+(7)+(8)	10	11	12
	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*									
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	Kecamatan Wonosamodro	470 Orang	41.750.000,00			41.750.000,00	Wonosamodro	470 Orang	20 .000.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti***		**100 persen**	**0,00**			**0,00**	Wonosamodro	**100 persen**	**0, 00**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	Pemerintahan Desa	-	0,00			0,00	Wonosamodro	-	0, 00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	Pemerintahan Desa	8 Dokumen	0,00			0,00	Wonosamodro	8 Dokumen	0, 00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	(9)=(6)+(7)+(8)	10	11	12
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	Pemerintahan Desa	26 Dokumen	0,00			0,00	Wonosamodro	26 Dokumen	0,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	Pemerintahan Desa	13 Dokumen	0,00			0,00	Wonosamodro	13 Dokumen	0,00
J U M L A H					**3.547.329.000,00**			**3.547.329.000,00**			**2.288.538.000,00**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan rencana target capaian kinerja yang diinginkan untuk 1 tahun mendatang. Renja ini memuat berbagai kebutuhan yang berkaitan secara langsung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonosamodro, yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Perumusan program dan kegiatan ini, mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai disertai dengan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Realisasi renja ini sangat tergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Sebagaimana tujuan renja ini yaitu “terarahnya program serta prioritas kegiatan tahunan dengan capaian rencana strategis Kecamatan Wonosamodro melalui pembiayaan APBD Kabupaten yang dilengkapi dengan indikator capaian sebagai tolak ukur penilaian kinerja”, maka renja ini tidak akan berarti banyak jika tidak dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan tidak dilaksanakanan sebagaimana mestinya. Oleh karena masih diperlukan komitmen yang kuat oleh seluruh komponen dalam rangka melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi secara terus-menerus sehingga renja ini dapat menjadi sarana dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Wonosamodro 2021-2026.

WW. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

KECAMATAN GLADAGSARI

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... 1

DAFTAR ISI..... 2

BAB I PENDAHULUAN..... 3

1.1. Latar Belakang..... 3

1.2. Landasan Hukum..... 5

1.3. Maksud dan Tujuan..... 6

1.4. Sistematika Penulisan..... 6

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU..... 7

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahu Lalu dan Capaian Renstra 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD..... 18

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi OPD..... 18

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 24

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 32

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 34

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 34

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD..... 34

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 37

4.1. Program dan Kegiatan..... 37

BAB V. PENUTUP..... 46

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah selama periode 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah selama periode 5 (lima) tahun. Tata cara / proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) terdiri dari :

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal

Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota menjadi Rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan : a) rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; b) hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah meliputi kebijakan program strategis nasional (PSN), amanat pembangunan global dan nasional, dan dinamika pembangunan nasional lainnya. Selain itu juga kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 tetap memperhatikan keberlanjutan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian, sosial dan Kesehatan, serta dukungan terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) sebagai prioritas dalam penanggulangan kemiskinan. Disamping itu RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 meliputi:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan eksterm (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gladagsari adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yng dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Rencana Strategis Kecamatan Gladagsari Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gladagsari 2024 adalah untuk memberikan Landasan Kebijakan Teknis Tahunan dalam Kerangka Pencapaian Visi Misi setiap tahapnya (satu tahunan) dan sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Camat pada Akhir Tahun Anggaran sebagai bagian dari pelaksanaan Kebijakan Daerah. Renja Tahun 2024 Kecamatan Gladagsari disusun sebagai acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Gladagsari Tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2024 Kecamatan Gladagsari adalah adalah menetapkan prioritas Program dan Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan sesuai Rencana Strategis yang dilaksanakan per tahap (tahunan) melalui sumber pembiayaan APBD dan menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Gladagsari Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gladagsari Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Gladagsari, terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan
BAB V. PENUTUP
LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Revieu hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dan realisasi Renstra Kecamatan Gladagsari yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Gladagsari dan/atau realisasi APBD Kecamatan Gladagsari. Adapun hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 untuk Kecamatan Gladagsari sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/keluaran yang telah direncanakan yaitu:
   a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
   b. Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   g. Penyediaan Bahan/Material
   h. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   j. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

k. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
l. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
n. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
o. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
p. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
q. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
r. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
s. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
t. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan untuk Kecamatan Gladagsari tidak ada.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
   a. Terbatasnya pendanaan
   b. Kelompok sasaran belum terjangkau program/kegiatan seluruhnya
   c. Kurangnya informasi kegiatan dari Instansi setingkat kecamatan (UPT) dan kejadian di masyarakat
   d. Adanya situasi Pandemi Covid 19 (PPKM), yang menyebabkan kegiatan terkendala.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah dapat memenuhi / melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, dengan demikian target capaian program Renstra PD dapat tercapai.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah

dengan meningkatkan target capaian dari tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan potensi sumber daya dan dana yang ada.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel T-C.29 sebagai berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah:Kecamatan Karangede Lembar :.....

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan(*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									
				Program :									
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**								
				Kegiatan:									
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN, Gaji Non ASN								
				Sub Kegiatan :									
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji Non ASN	12 bulan	12 bulan	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	-	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	-	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	18 Laporan	100%
				Kegiatan :									
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah								
				Sub Kegiatan :									
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

				Kegiatan :									
				Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah								
				Sub Kegiatan :									
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Kegiatan :									
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah								
				Sub Kegiatan :									
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya perbaikan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Kegiatan :									
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Sub Kegiatan :									
				Pengadaan Mebel	Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%

				Kegiatan :									
				Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat								
				Sub Kegiatan :									
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	-	-	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	15 Laporan	100%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum**								
				Kegiatan :									
				Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang dilayani								
				Sub Kegiatan :									
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah IMB yang diusulkan	-	-	10 desa	10 desa	100%	10 desa	10 desa	100%

				Kegiatan :									
				Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di Kecamatan yang terselenggara								
				Sub Kegiatan :									
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah sosialisasi pelayanan di kecamatan			1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
				Kegiatan :									
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana umum dalam kondisi baik								
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun dan dipelihara	1 tahun	1 tahun	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									
				Kegiatan :									
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana pendukung ketentraman dan keteriban umum yang tersedia								
				Sub Kegiatan :									
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peralatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disediakan tingkat kecamatan	-	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**								

				Kegiatan :								
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan hasil Musdes yang diverifikasi							
				Sub Kegiatan :								
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	10 desa	10 desa	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
				Kegiatan :								
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang laksanakan							
				Sub Kegiatan :								
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah desa yang menerima bantuan / modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan	-	-	10 Desa	10 Desa	100%	10 Desa	10 Desa	100%
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.**							
				Kegiatan :								
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							

				Sub Kegiatan :								
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti**							
				Kegiatan :								
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi dan keuangan desa							
				Sub Kegiatan :								
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pedampingan administrasi dan keuangan desa	-	-	10 Desa	10 Desa	100%	10 Desa	10 Desa	100%

Gladagsari, 2023

CAMAT GLADAGSARI

Drs. SARJI

-

NIP.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang telah disesuaikan pada Kecamatan Gladagsari yaitu pada Tabel T-C.30 sebaga berikut :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gladagsari

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		NO
				Tahun 2022 (thnn-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thnn+1	Tahun 2022 (thnn-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2022 (thnn-2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			82.11	82.27	83.55	84.18	82.11	82.27	83.55	82.11	
2.	Nilai SAKIP			80	80.5	81	81.5	80	80.5	81	80	

Pencapaian kinerja pelayanan sesuai tabel diatas sudah tergolong baik, tetapi masih perlu ditingkatkan dengan berkomitmen dan bekerjasama seluruh ASN untuk lebih meningkatkan pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Gladagsari tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

Kecamatan Gladagsari merupakan urusan Pemerintahan Umum, mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan.

Berdasarkan telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi terhadap Renstra Kecamatan Gladagsari tidak dilakukan karena tidak ada keterkaitan langsung antara pelayanan atau permasalahan di tingkat kecamatan dengan permasalahan di K/L maupun PD tingkat provinsi**.**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gladagsari, secara umum permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gladagsari adalah berikut:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang meliputi;
   a. Masih perlunya penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik;
   b. Belum optimalnya pelayanan kependudukan di kecamatan.

   Dimana akar permasalah pada pelayanan publik di Kecamatan Gladagsari yaitu:
   - Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan;
   - Belum terdistribusinya sarana dan prasarana pelayanan.
2. Belum optimalnya pengembangan potensi kewilayahan, dimana untuk Kecamatan Gladagsari masalahnya terletak pada belum optimalnya fungsi koordinasi kewilayahan. Akar masalah belum optimalnya peran kecamatan sebagai instansi terdepan dalam menyusun peta masalah dan potensi kecamatan.

Dampak Pelayanan Kecamatan Gladagsari terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah Visi pembangunan daerah merupakan rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih yang secara substansi memuat tentang rumusan umum mengenai keadaan yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Kondisi yang akan dicapai dalam bentuk visi, kemudian dijabarkan oleh misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.

Berbijak dari amanat dan upaya membangun sinkronisasi dengan visi pembangunan jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005 - 2025, serta dalam rangka menjawab isu strategis aktual dan menjaga keberlanjutan pembangunan, maka dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Boyolali 2021-2026 yaitu:

"Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi" Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL)

Rumusan visi tersebut memiliki muatan kondisi dan prasyarat yang akan dicapai dalam pembangunan, dengan penjabaran sebagai berikut :

Boyolali Maju berarti :

- Proses pembangunan yang berkelanjutan dan terencana sistematis diharapkan membawa kemajuan di segala bidang.
- Boyolali Maju berarti *no-one left behind,* yakni tidak ada pihak yang terlewatkan untuk merasakan kemajuan, karena semua komponen telah menjadi subyek pembangunan.
- Maju dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dan daerah yang semakin berdaya saing yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah berkualitas dan merata, serta tata Kelola pemerintahan yang semakin bersih, efektif, dan dipercaya masyarakat.

Meneruskan Pro Investasi berarti :

- Pro investasi telah menjadi arah pembangunan dan identitas Kabupaten Boyolali dengan berbagai capaian pembangunan yang telah membawa manfaat bagi masyarakat.
- Melanjutkan arah pembangunan yang pro investasi berarti tidak hanya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membangun sinergi dengan arah pembangunan nasional, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional secara sistematis dan cepat.
- Arah pro investasi membutuhkan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan, yang muaranya tetap pada kesejahteraan masyarakat Boyolali, tanpa menghadirkan ketimpangan sosial.
- Pro investasi tetap dikendalikan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yakni selain berorientasi ekonomi dan sosial, tidak kalah penting pada keberlanjutan lingkungan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta membawa manfaat pembangunan bagi generasi masa depan.

Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL) berarti :

- Pembangunan yang efektif membutuhkan prasyarat berupa sinergi dan kolaborasi seluruh komponen governance, yakni masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

- Seluruh komponen daerah diharapkan mampu melangkah dan menata bersama penuh totalitas yang merupakan implementasi dari prinsip gotong-royong.
- Gotong royong dengan menjalankan perannya masing-masing namun saling bersinergi dan berkolaborasi dalam ikatan visi pembangunan daerah maupun landasan nilai kearifan yang tertanam kuat di tengah masyarakat berupa filosofi dari Pangeran Sambernyawa "Tiji Tibeh (mati siji, mati kabeh, mukti siji mukti kabeh)".

  Visi pembangunan Boyolali dicapai dengan beberapa misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Boyolali memiliki 5 misi yang mencakup keseluruhan bidang pembangunan dengan muatan prinsip dasar dan arah pembangunan di setiap misi sebagai berikut:

Misi 1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan.

Misi 2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.

Misi 3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional, dengan

Misi 4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Misi 5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing,

dengan penjabaran sebagai berikut :

- Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- Pembangunan integritas dengan menumbuhkan karakter yang baik bagi individu maupun organisasi dalam mewujudkan tindakan maupun keputusan bagi kebaikan bersama.
- Pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance.
- Peran masyarakat yang melahirkan kontrol terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan sangat diharapkan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN. Tidak berhenti pada good and clean

governance, Boyolali berusaha menumbuhkan Smart governance, atau pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi, dengan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi-inovasi dan adaptasi teknologi yang terpadu, yang bermuara pada efektifitas, efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.

- Pemerintahan yang tertib, elok, rapi, sehat dan nyaman untuk masyarakat, dengan smart governance mendorong terwujudnya Boyolali kota cerdas/pintar, kota air, ramah lingkungan serta potensi daerah yang didorong guna kemandirian daerah dengan kinerja yang inovatif yang dapat meningkatkan daya saing daerah.

Kecamatan Gladagsari selaku Unsur Pembantu Kepala Daerah mendukung dan mensukseskan Visi Misi pembangunan daerah yang merupakan rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Kecamatan Gladagsari terutama memompang pelaksanaan Misi 4 Boyolali yaitu **Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya,** Hal tersebut diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra OPD 2021-2026.

Tantangan dan peluang dalam pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Gladagsari dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan Kabupaten Boyolali mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

1. Tantangan
   - Merupakan wilayah penyangga pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali, sehingga ditutut kinerja yang lebih bila dibandingkan kecamatan lainnya;
   - Karakteristik masyarakat yang merupakan transisi dari desa ke kota yang cenderung kritis terhadap pemerintahan;
   - Aspek lingkungan sebagai penghambat perkembangan industri;
   - Banyaknya alih fungsi lahan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan.

2. Peluang
   - Dukungan Visi Bupati dalam mendukung investasi;
   - Merupakan daerah pengembangan perumahan komersial;
   - Pelayanan perijinan yang dipermudah;
   - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
   - Pengalihan pengelolaan PBB dari pusat ke daerah;
   - Besarnya lahan kawasan industri menengah bisa untuk menarik investor;
   - Akses jalan guna kelancaran pergerakan barang/jasa;
   - Dukungan dunia usaha (perusahaan/pabrik) berupa *Coorporate Social Responsibility* (CSR), karena merupakan daerah industri menengah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Gladagsari untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Boyolali.

Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Gladagsari tahun 2021-2026 seperti dalam tabel berikut :

Tabel. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : "BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI" Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL)			
MISI : Boyolali menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik kecamatan 2. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan 3. Peningkatan kapasitas ASN tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa 4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Peningkatan dan Pengembangan kualitas pelayanan sarana dan prasarana publik 2. Optimalisasi fungsi koordinasi kewilayahan 3. Peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran 4. Peningkatan tertib Administrasi Pemerintahan Desa
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	1. Peningkatan sistem kelembagaan berbasis kinerja	1. Peningkatan sistem administrasi umum dan kepegawaian

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Dapat ditelaah terhadap rancangan awal RKPD, sebagaimana Tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kecamatan Gladagsari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				**100.000.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**100.000.00**	
	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	0	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	0	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Gladagsari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Gladagsari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	0	
	Peningkatan Efektifikas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Gladagsari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	0	Peningkatan Efektifikas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Gladagsari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	0	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Kegaitan	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Kegaitan	0	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Gladagsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Gladagsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	0	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	100.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	100.000.000	

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Gladagsari	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	100.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Gladagsari	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	100.000.000	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				**25.000.000**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**25.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 kegiatan	25.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 kegiatan	25.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Gladagsari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	25.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Gladagsari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	25.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				**70.000.000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**70.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	70.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	70.000.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Gladagsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 orang	50.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Gladagsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 orang	50.000.000	

	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Gladagsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 orang	20.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Gladagsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 orang	20.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				**150.000.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**150.000.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Gladagsari	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Kegiatan	150.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Gladagsari	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Kegiatan	150.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Gladagsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Gladagsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	0	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Gladagsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	150.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Gladagsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	150.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**0**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**0**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	0	
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Gladagsari	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	8 Dokumen	0	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Gladagsari	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	8 Dokumen	0	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Gladagsari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Gladagsari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen	0	

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Gladagsari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 Dokumen	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Gladagsari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 Dokumen	0	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				**1.947.015.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**1.947.015.000**	
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Kegiatan	0	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Kegiatan	0	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Gladagsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Gladagsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Gladagsari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Gladagsari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Gladagsari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Gladagsari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Gladagsari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Gladagsari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Gladagsari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Gladagsari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Gladagsari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Gladagsari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Gladagsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Gladagsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Kegiatan	1.724.215.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Kegiatan	1.724.215.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gladagsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	1.653.415.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gladagsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	1.653.415.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gladagsari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	70.800.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gladagsari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	70.800.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Gladagsari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Gladagsari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Gladagsari	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Gladagsari	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Gladagsari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Gladagsari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Gladagsari	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Gladagsari	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Gladagsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Gladagsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Gladagsari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Gladagsari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Kegitan	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Kegitan	0	

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Gladagsari	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Gladagsari	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Kegiatan	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Kegiatan	0	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Gladagsari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Gladagsari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Kegiatan	117.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Kegiatan	117.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Gladagsari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Gladagsari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Gladagsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Gladagsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Gladagsari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Gladagsari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Gladagsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Gladagsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Gladagsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Gladagsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Gladagsari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	15.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Gladagsari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	15.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Gladagsari	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	62.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Gladagsari	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	62.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Gladagsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Gladagsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	10.000.000	

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Gladagsari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Gladagsari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	0	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Gladagsari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 Dokumen	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Gladagsari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 Dokumen	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	37.400.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	37.400.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Gladagsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Gladagsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Gladagsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Gladagsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gladagsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gladagsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	68.400.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gladagsari	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	68.400.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Gladagsari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	14.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Gladagsari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	14.400.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Gladagsari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Gladagsari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gladagsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gladagsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini dapat diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari PD lain yang saling berkaitan berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan (yang sebelumnya diadakan musyawarah di tingkat Dusun/lingkungan RT, RW dan kelompok-kelompok masyarakat misalnya kelompok tani, kelompok perempuan dsb. Penggalian gagasan dan menyelenggarakan musyawarah dusun (Musdus) serta rembug warga untuk menetapkan jenis dari usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan, dilanjutkan dengan Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang Kabupaten.

Usulan tersebut disesuaikan dan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD, serta visi dan misi pembangunan daerah yang sudah ditetapkan. Hasil pengerjaan/penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, dapat terlihat dalam Tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Boyolali

Perangkat Daerah : Kecamatan Gladagsari

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemeliharaan jembatan	WEDUSAN RT 02 RW 04 CANDISARI GLADAGSARI, Kab. Boyolali	1	paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Pembangunan jembatan	Dk.Gondangsari - Dk. Jlarem, Kab. Boyolali (Ruas Jalan Kab. Ngegek - Jlarem)	3	unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3	Pemeliharaan Jalan	Drainase Jalan Kaligentong - Kembang, Kab. Boyolali (Ruas Jalan Baru, Kaligentong-Kembang)	1	paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh selain Kecamatan dan Desa diatas	Wilayah Desa Gladagsari, Kab. Boyolali	20	unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Pemeliharaan jalan	Dk. Drajud - Sendang, Desa Seboto, Kab. Boyolali (Jalan Kabupaten Ruas Seboto - Kembang)	400	m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Penataan drainase	Desa Ngadirojo, Kab. Boyolali (Jalan Kabupaten Ruas Jalan Ngadirojo - Sampetan)	1	paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh selain Kecamatan dan Desa diatas	Ds.Ngagrong Kec.Gladagsari, Kab. Boyolali	20	unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Bantuan Peningkatan taraf ekonomi	Desa Sampetan, Kab. Boyolali	12	org	Dinas Sosial
9	Kegiatan Pelatihan Aneka Kerajinan	Ds. CANDISARI, Kec. GLADAGSARI, Kab. Boyolali	40	org	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
10	Bantuan traktor	Desa Jlarem, Kab. Boyolali	1	unit	Dinas Pertanian
11	Pengadaan bibit ternak kambing	Desa Kembang, Kab. Boyolali	10	ekor	Dinas Peternakan dan Perikanan
12	Pengadaan bibit ternak kambing	Desa Ngargoloka, Kab. Boyolali	10	ekor	Dinas Peternakan dan Perikanan
13	Pengadaan bibit ternak kambing	Wilayah Desa Gladagsari, Kab. Boyolali	10	ekor	Dinas Peternakan dan Perikanan
14	Desa Mandiri Pangan (DMP)	Desa Seboto, Kab. Boyolali	1	keg	Dinas Ketahanan Pangan
15	Bantuan Cultivator	Ds. Ngagrong Kec. Gladagsari, Kab. Boyolali	19	unit	Dinas Pertanian

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah meliputi kebijakan program strategis nasional (PSN), amanat pembangunan global dan nasional, dan dinamika pembangunan nasional lainnya. Selain itu juga kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 tetap memperhatikan keberlanjutan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian, sosial dan Kesehatan, serta dukungan terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) sebagai prioritas dalam penanggulangan kemiskinan. Disamping itu RKPD Tahun 2023 yang disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 meliputi:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta kemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Diskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada terlihat dalam Tabel T-C.32.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Langkah-langkah perumusan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah
2. Membandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hal evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah, apakah masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kehidupan.
3. Identifikasi Kebijakan Nasional dan terkait dengan tugas dan fungsi pokok Perangkat Daerah, misalnya dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Millenium Development Goals (MDGs)
4. Unit Perangkat Daerah Kabupaten/Kota perlu mengidentifikan kebijakan provinsi, dan
5. Merumuskan pernyataan tujuan dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebelumnya.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Kecamatan Gladagsari sesuai Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel. Tujuan dan Sasaran Renja 2024

Kecamatan Gladagsari

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.55
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan Ampel	81,00

Berdasarkpada tabel tujuan dan sasaran diatas rencana kerja Kecamatan Gladagsari adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
3. Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
5. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
6. Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Perumusan Sasaran, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya;
2. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra PD, cuplik rumusan sasaran dalam Renstra PD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan;
3. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra PD), jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut;
4. Rumusan sasaran tersebut, sajikan dalam bentuk pernyataan.

Sasaran yang hendak dicapai di Kecamatan Gladagsari adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah.

Langkah-langkah perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

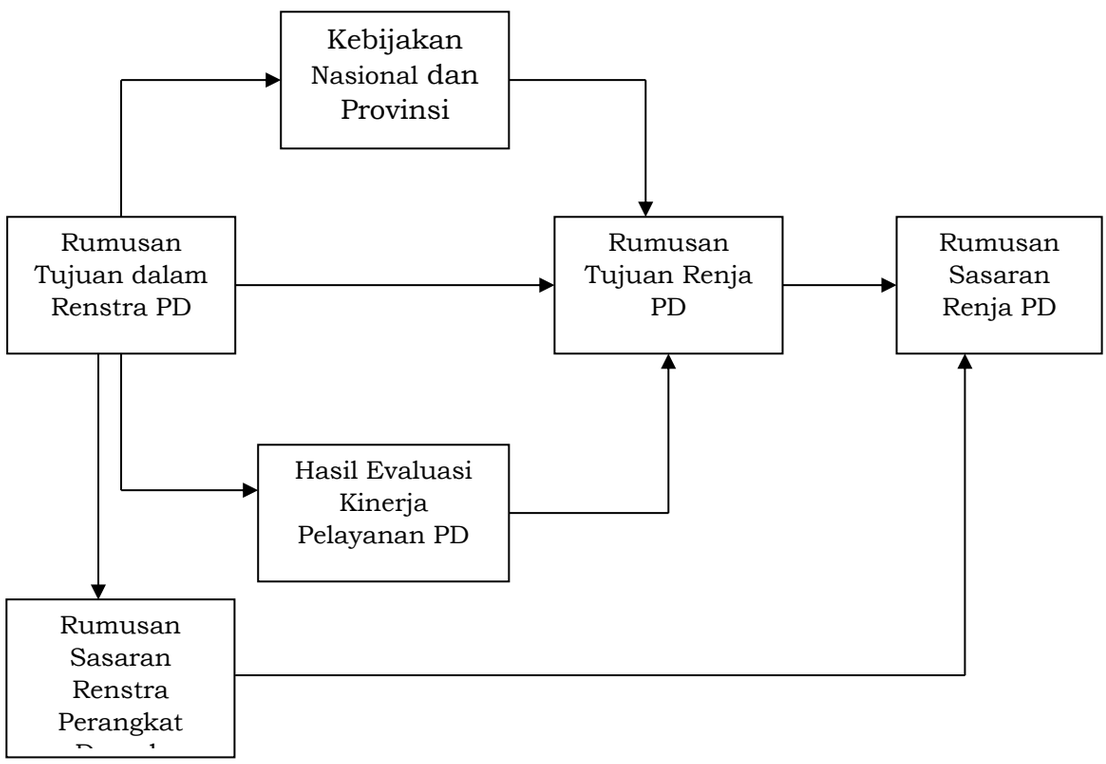

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

   Misal:

   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
   b. Pencapaian SDGs;
   c. Pengentasan kemiskinan;
   d. Pencapaian NSPK dan SPM;
   e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
   f. Pengembangan daerah terisolir; dan
   g. Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan, yaitu pada Tabel T-C.33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Gladagsari Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Gladagsari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
X	**UNSUR KEWILAYAHAN**										
X.XX	**KECAMATAN**										
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										
X.XX.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Gladagsari	2 Dokumen	0			0	Gladagsari	2 Dokumen	0
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Gladagsari	1 Dokumen	0			0	Gladagsari	1 Dokumen	0
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Gladagsari	1 Dokumen	0			0	Gladagsari	1 Dokumen	0
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Gladagsari	1 Dokumen	0			0	Gladagsari	1 Dokumen	0

X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Gladagsari	1 Dokumen	0			0	Gladagsari	1 Dokumen	0
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Gladagsari	15 Laporan	0			0	Gladagsari	15 Laporan	0
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Gladagsari	4 Laporan	0			0	Gladagsari	4 Laporan	0
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gladagsari	14 orang/tahun	1.653.415.000			1.653.415.000	Gladagsari	14 orang/tahun	1.653.415.000
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gladagsari	13 dokumen	70.800.000			70.800.000	Gladagsari	13 dokumen	70.800.000
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Gladagsari	12 Dokumen	0			0	Gladagsari	12 Dokumen	0
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Gladagsari	12 Dokumen	0			0	Gladagsari	12 Dokumen	0
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Gladagsari	1 Laporan	0			0	Gladagsari	1 Laporan	0

X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Gladagsari	1 Dokumen	0			0	Gladagsari	1 Dokumen	0
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Gladagsari	18 Laporan	0			0	Gladagsari	18 Laporan	0
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Gladagsari	1 Dokumen	0			0	Gladagsari	1 Dokumen	0
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Gladagsari	3 Laporan	0			0	Gladagsari	3 Laporan	0
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Gladagsari	13 Dokumen	0			0	Gladagsari	13 Dokumen	0
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/telepon	Gladagsari	4 Paket	2.000.000			2.000.000	Gladagsari	4 Paket	2.000.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Gladagsari	4 Paket	0			0	Gladagsari	4 Paket	0
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Gladagsari	4 Paket	3.000.000			3.000.000	Gladagsari	4 Paket	3.000.000

X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kanto	Gladagsari	4 Paket	15.000.000			15.000.000	Gladagsari	4 Paket	15.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Gladagsari	4 Paket	10.000.000			10.000.000	Gladagsari	4 Paket	10.000.000
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Gladagsari	4 Dokumen	0			0	Gladagsari	4 Dokumen	0
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	Gladagsari	4 Paket	15.000.000			15.000.000	Gladagsari	4 Paket	15.000.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman	Gladagsari	4 Laporan	62.000.000			62.000.000	Gladagsari	4 Laporan	62.000.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Gladagsari	4 Laporan	10.000.000			10.000.000	Gladagsari	4 Laporan	10.000.000
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Gladagsari	13 Dokumen	0			0	Gladagsari	13 Dokumen	0
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Gladagsari	13 Dokumen	0			0	Gladagsari	13 Dokumen	0
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Gladagsari	12 Laporan	900.000			900.000	Gladagsari	12 Laporan	900.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Gladagsari	12 Laporan	36.500.000			36.500.000	Gladagsari	12 Laporan	36.500.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Gladagsari	4 Laporan	0			0	Gladagsari	4 Laporan	0

X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Gladagsari	10 unit	14.400.000			14.400.000	Gladagsari	10 unit	14.400.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Gladagsari	7 Unit	4.000.000			4.000.000	Gladagsari	7 Unit	4.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gladagsari	1 Unit	50.000.000			50.000.000	Gladagsari	1 Unit	50.000.000
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**										
7.01	**KECAMATAN**										
7.01-02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**										
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Gladagsari	13 Laporan	0			0	Gladagsari	13 Laporan	0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Gladagsari	39 Dokumen	0			0	Gladagsari	39 Dokumen	0

7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan										
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Gladagsari	2 Laporan	0			0	Gladagsari	2 Laporan	0
7.01-02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										
7.01-02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Gladagsari	2 Dokumen	100.000.000			100.000.000	Gladagsari	2 Dokumen	100.000.000
7.01-03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										
7.01-03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
7.01-03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Gladagsari	6 Lembaga Kemasyarakatan	0			0	Gladagsari	6 Lembaga Kemasyarakatan	0
7.01-03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Gladagsari	13 Laporan	150.000.000			150.000.000	Gladagsari	13 Laporan	150.000.000
7.01-05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**										

7.01-05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										
7.01-05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Nagara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Gladagsari	400 orang	50.000.000			50.000.000	Gladagsari	400 orang	50.000.000
7.01-05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Gladagsari	500 orang	20.000.000			20.000.000	Gladagsari	500 orang	20.000.000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**										
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Gladagsari	8 Dokumen	0			0	Gladagsari	8 Dokumen	0

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Gladagsari	26 Dokumen	0			0	Gladagsari	26 Dokumen	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Gladagsari	13 Dokumen	0			0	Gladagsari	13 Dokumen	0

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gladagsari yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Perumusan program dan kegiatan ini, mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai disertai dengan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Realisasi renja ini sangat tergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Sebagaimana tujuan renja ini yaitu “terarahnya program serta prioritas kegiatan tahunan dengan capaian rencana strategis Kecamatan Gladagsari melalui pembiayaan APBD Kabupaten yang dilengkapi dengan indikator capaian sebagai tolak ukur penilaian kinerja”. Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

Demikian RENJA Kecamatan Gladagsari 2024 disusun dan semoga bermanfaat.

XX. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

KECAMATAN TAMANSARI

TAHUN 2024

KABUPATEN BOYOLALI

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN TAMANSARI
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2024

KECAMATAN TAMANSARI
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 3

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan..... 6

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN TAMANSARI TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tamansari Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Tamansari 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tamansari 24

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tamansari 30

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 30

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 43

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 46

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 46

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan 47

BAB V PENUTUP..... 80

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangakat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berdasarakan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja PD;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan surat edaran Sekretaris Daerah tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024.

Sistematika penyusunan Renja Kecamatan Tamansari Tahun 2024 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Tamansari selanjutnya disebut Renja

Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali Tahun 2024 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali dan Renstra OPD Kecamatan Tamansari Tahun 2021-2026, untuk memecahkan masalah yang ada dan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja Kecamatan Tamansari. Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Boyolali di tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali tahun 2024 ini adalah untuk menyiapkan

dokumen perencanaan kinerja tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Tamansari untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Tamansari melalui pembiayaan APBD Kabupaten Boyolali yang dilengkapi dengan indikator capaian sebagai tolok ukur penilaian kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Tamansari Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN TAMANSARI TAHUN 2022

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Tamansari tahun 2022 dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Tamansari, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tamansari, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TAMANSARI

Bab ini berisi telahaan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Tamansari.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi program dan kegiatan.

Bab V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
KECAMATAN TAMANSARI TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tamansari Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Tamansari

Realisasi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Tamansari Tahun 2022 telah selesai seluruhnya. Dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut, semua program/kegiatan telah mencapai target yang direncanakan. Hasil evaluasi terhadap capaian realisasi program/kegiatan dan capaian renstra di Kecamatan Tamansari, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan :

   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

   b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
      2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
      3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
      4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
      5) Penyediaan Bahan/Material;
      6) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
      7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

   c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

      Sub Kegiatan :

1) Pengadaan Mebel;
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan :
a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Sub Kegiatan :
1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan :
a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan :
1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan :

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Sub Kegiatan :

   1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Kegiatan :

   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

      Sub Kegiatan :

      1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      2) Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional

Faktor-faktor pendukung tercapainya target :

1. Komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dan desa dalam melaksanakan dan menyelesaikan program/kegiatan
2. Kerjasama yang baik antara pemerintahan kecamatan dan Pemerintah Desa, serta seluruh UPT kecamatan.
3. Peran aktif kelompok sasaran program/kegiatan.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tamansari Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Tamansari disajikan secara lengkap pada Tabel T-C.29.

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023

Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
x						**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**									
x	**xx**					**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**									
x	**xx**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

x	xx	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	7	kegiatan	-	25	dok	25	dok	100%	25	dok	50	100%
x	xx	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2	Dok	-	2	Dok	2	Dok	100%	2	Dok	4	200%
x	xx	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	Dok	-	1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	200%
x	xx	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	Dok	-	1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	200%
x	xx	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	Dok	-	1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	200%
x	xx	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun	1	Dok	-	1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	2	200%
x	xx	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	15	laporan	-	15	laporan	15	laporan	100%	15	laporan	30	200%
x	xx	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	-	4	laporan	4	laporan	100%	4	laporan	8	200%
x	xx	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan tunjangan ASN, gaji NON ASN	8	kegiatan	1 tahun	1	tahun	1	tahun	100%	1	tahun	3	100%

x	xx	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	16	Orang / bulan	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100%	1	tahun	3	100%
x	xx	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji PTT dan Tenaga Honorer	13	Dok	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100%	1	tahun	3	100%
x	xx	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dok	12	Dok	12	Dok	12	Dok	100%	12	Dok	36	300%
x	xx	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD	12	Dok	12	Dok	12	Dok	12	Dok	100%	12	Dok	36	300%
x	xx	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	-		-		-		-	-		-	-
x	xx	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	Dok	2	Dok	2	Dok	2	Dok	100%	2	Dok	6	100%
x	xx	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	100%	18	Laporan	54	300%
x	xx	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	-		-		-		-	-		-	-

x	xx	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Keg	-		-		-		-		-	-
x	xx	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	laporan	-		-		-		-		-	-
x	xx	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Keg	-		-		-		-		-	-
x	xx	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13	Dok	-		-		-		-		-	-
x	xx	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah	10	kegiatan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	36	100%
x	xx	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	paket	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	36	100%
x	xx	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	paket	12	bulan	-		-		-		-	12	100%
x	xx	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	4	paket	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	36	100%
x	xx	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor	4	paket	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	36	100%

x	xx	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	4	paket	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	36	100%
x	xx	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Bahan/Material	4	paket	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	36	100%
x	xx	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	laporan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	36	100%
x	xx	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4	laporan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	36	100%
x	xx	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13	Dok	-		-		-	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13	Dok	-		-		-	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100%		100%		100%		100%	100%		100%	100%
x	xx	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel	-		1	paket	1	paket	1	paket	100%	1	paket	3	100%
x	xx	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-		1	paket	1	paket	1	paket	100%	1	paket	3	100%

x	xx	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	12	kegiatan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	36	100%
x	xx	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	12	laporan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	36	100%
x	xx	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	36	100%
x	xx	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pemeliharaan barang milik daerah	3	kegiatan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	36	100%
x	xx	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	unit	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	36	100%
x	xx	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kerja	15	unit	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	36	100%
x	xx	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	2	unit	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	36	100%

7						UNSUR KEWILAYAHAN										-	
7	01					KECAMATAN											
7	**01**	**02**				**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu**	87			85	85		100%	86		86	
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan di kecamatan	2	kegiatan	- -	1	kegiatan	1	kegiatan	100%	1	kegiatan	2	100%
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13	Laporan	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39	dokumen	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan public di Kecamatan yang terselenggara	1	kegiatan	- -	1	Kegiatan	1	kegiatan	100%	1	kegiatan	2	200%-
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah sosialisasi pelayanan di kecamatan	2	Laporan	- -	1	kegiatan	1	kegiatan	100%	1	kegiatan	2	100%

7	01	02	2	03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	1	kegiatan	1	unit	1	unit	1	unit	100%	1	unit	3	300%
7	01	02	2	03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun dan dipelihara	2	dokumen	1	unit	1	unit	1	unit	100%	1	unit	3	100%
7	**01**	**03**				**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti**	100%		100%		100%		100%		100%	100%		3	
							Prosentase Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan (program kemiskinan)	100%		-	-	-		-		100%			-	-
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan hasil Musdes yang diverifikasi	2	Kegiatan	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100%	1	tahun	3	100%
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan	-	-	1	dok	1	dok	1	dok	100%	1	dok	3	100%

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lembaga kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa Fair	-	-	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100%	5	usulan	-	-
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	-	-	-	-	2	kegiatan	2	kegiatan	100%	2	kegiatan	2	100%
7	01	03	2	03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)	-	-	-		1	kegiatan	1	kegiatan	100%	1	kegiatan	2	100%
7	01	03	2	03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah desa yang menerima bantuan/modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan	-	-	-		10	desa	10	desa	100%	10	desa	10	100%

7	**01**	**04**				**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	100%	-	100%	100%	100%	100%	2	100%
7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana pendukung ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	1 kegiatan	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	4	100%
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang diberikan bantuan keamanan dan kenyamanan	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	2	100%
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 laporan	- -	-	-	-	-	-	-
7	**01**	**05**				**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	100%	-	100%	100%	100%	100%	1	100%
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	2 kegiatan	-	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	8	100%
7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Jumlah kegiatan peringatan hari besar	- -	-	2 kegiat	2 kegiat	100%	2 kegiata	4	100%

						Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	nasional di wilayah kecamatan				an		an			n		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	-		-		-		-		-	
7	01	05	2	01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan	- -	2 kegiatan	2	kegiat an	2	kegiat an	100%	2	kegi ata n	4	100%
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku	500 Orang	- -	-	-	-	-		-	-		

							, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
7	**01**	**06**				**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti**	100%	-	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%
7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-	- -	10 desa	10 desa	100%	10 Desa	10	100%
							Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 kegiatan	-	- -	- -	-	- -	-	-
7	01	06	2	01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	-	-	-	-	- -	-	-
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen	-	-	-	-	- -	-	-

7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pendampingan administrasi dan keuangan desa	-	-	-	-	10	Desa	10	Desa	100%	10	Desa	10	100%
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13	Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tamansari

Berdasarkan fungsinya, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pengoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- Penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- Pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, indikator yang menjadi target sasaran Kecamatan Tamansari dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat, dapat terealiasi sebesar 82,34.
   b. Nilai Sakip Kecamatan Tamansari, dapat terealisasi sebesar 78,50.

   Hasil capaian terhadap indikator kinerja diatas dapat dilihat pada Tabel T-C.30.

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tamansari

Kabupaten Boyolali

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu			-	85	86	87	-	85	86	87	
2	Jumlah kegiatan pelayanan di kecamatan			-	1 keg	1 keg	1 keg	-	1 keg	1 keg	1 keg	
4	Jumlah kegiatan sosialisasi pelayanan publik di Kecamatan yang terselenggara			-	1 keg	1 keg	1 keg	-	1 keg	1 keg	1 keg	
5	Jumlah sosialisasi pelayanan di kecamatan			-	1 keg	1 keg	1 keg	-	1 keg	1 keg	1 keg	
6	Jumlah sarana dan prsarana dalam kondisi baik			-	1 unit	1 unit	1 unit	-	1 unit	1 unit	1 unit	
7	Jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun dan dipelihara			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
8	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
9	Jumlah sarana dan prasarana pendukung ketentraman dan keteriban umum yang tersedia			-	2 keg	2 keg	2 keg	-	2 keg	2 keg	2 keg	
10	Jumlah desa yang diberikan bantuan keamanan dan kenyamanan lingkungan			-	1 keg	1 keg	1 keg	-	1 keg	1 keg	1 keg	

11	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
12	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			-	4 keg	4 keg	4 keg	-	4 keg	4 keg	4 keg	
13	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional di wilayah kecamatan			2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	
14	Jumlah kegiatan kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan			2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	
15	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
16	Prosentase Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
17	Jumlah usulan hasil Musdes yang diverifikasi			-	1 tahun	1 tahun	1 tahun	-	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
18	Jumlah Dokumen Daftar Skala Prioritas Tingkat Kecamatan			-	1 dok	1 dok	1 dok	-	1 dok	1 dok	1 dok	
19	Jumlah Desa Fair			-	5 usulan	5 usulan	5 usulan	-	5 usulan	5 usulan	5 usulan	
22	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan			-	2 keg	2 keg	2 keg	-	2 keg	2 keg	2 keg	
23	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi (PKK)			10 desa	1 keg	1 keg	1 keg	10 desa	10 desa	1 keg	1 keg	
24	Jumlah desa yang menerima bantuan/modal usaha ekonomi untuk lembaga kepemudaan			-	10 desa	10 desa	10 desa	-	10 desa	10 desa	10 desa	

25	Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
26	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			-	10 desa	10 desa	10 desa	-	10 desa	10 desa	10 desa	
27	Jumlah desa yang terfasilitasi pendampingan administrasi dan keuangan desa			-	10 desa	10 desa	10 desa	-	10 desa	10 desa	10 desa	
28	Nilai Sakip Kecamatan Tamansari			-	77	78	79	77,21	78,5	78	79	
29	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
30	Gaji dan tunjangan ASN, gaji NON ASN			14	1 tahun	1 tahun	1 tahun	14	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
31	Gaji dan Tunjangan ASN			14	1 tahun	1 tahun	1 tahun	14	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
32	Gaji PTT dan Tenaga Honorer			12	1 tahun	1 tahun	1 tahun	12	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
33	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD			-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
34	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD			-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	12 keg	12 keg	
35	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			-	18 dok	18 dok	18 dok	-	18 dok	18 dok	18 dok	
36	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaaan			-	2 dok	2 dok	2 dok	-	2 dok	2 dok	2 dok	

37	Fungsi layanan administrasi perkantoran perangkat daerah			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
38	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
39	peralatan rumah tangga			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
40	Bahan Logistik kantor			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
41	Barang Cetakan dan Penggandaan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
42	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan / Surat Kabar			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
43	Bahan/Material			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
44	Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
45	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
46	Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
47	Jasa Surat Menyurat			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
48	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
49	Jasa Pemeliharaan barang milik daerah			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
50	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	

51	Jasa perbaikan peralatan kerja			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
52	Jasa Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
53	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
54	Pengadaan mebel			-	1 paket	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	1 paket	
55	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-	1 paket	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	1 paket	
58	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat			-	25 dok	25 dok	25 dok	-	25 dok	25 dok	25 dok	
59	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun			-	2 dok	2 dok	2 dok	-	2 dok	2 dok	2 dok	
60	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun			-	1 dok	1 dok	1 dok	-	1 dok	1 dok	1 dok	
61	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun			-	1 dok	1 dok	1 dok	-	1 dok	1 dok	1 dok	
62	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun			-	1 dok	1 dok	1 dok	-	1 dok	1 dok	1 dok	
63	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun			-	1 dok	1 dok	1 dok	-	1 dok	1 dok	1 dok	
64	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun			-	15 dok	15 dok	15 dok	-	15 dok	15 dok	15 dok	
65	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah			-	4 dok	4 dok	4 dok	-	4 dok	4 dok	4 dok	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tamansari

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Tamansari secara umum dapat dikatakan baik, hal ini bisa dilihat dari tingkat capaian kinerja terhadap indikator yang ditetapkan baik dalam IKK maupun IKU. Sebagian besar tingkat capaian telah mencapai target yang direncanakan.

Hal kritis yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pelayanan di Kecamatan Tamansari adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang meliputi :

2.3.1. Peningkatan pemerintahan yang efektif, efisien yang ditandai dengan semakin sederhananya birokrasi serta pelayanan yang cepat, tepat dan akurat serta murah.

2.3.2. Peningkatan pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang ditandai dengan kepastian dan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi dan program/kegiatan untuk masyarakat.

2.3.3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan perekonomian masyarakat dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

2.3.4. Peningkatan sistem pengendalian keamanan lingkungan secara sinergis antara pemerintah dan masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024, merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Tamansari tahun 2021-2026. Sehingga berdasarkan analisis kebutuhan tidak terdapat perbedaan dengan rancangan

awal RKPD. Review terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan dalam Tabel T-C.31.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kecamatan Tamansari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Tamansari	Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu	87	100,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Tamansari	Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu	87	100,000,000	
	Kegiatan					Kegiatan					
	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	-	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	-	
	Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	-	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	-	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Dokumen	-	
	Kegiatan					Kegiatan					

	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Kegiatan	-	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	1 Kegiatan	-	
	Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	-	
	Kegiatan					Kegiatan					
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Kegiatan	100,000,000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Kegiatan	100,000,000	
	Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	100,000,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	100,000,000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Tamansari	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100	25,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Tamansari	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100	25,000,000	
	Kegiatan					Kegiatan					

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	25,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	25,000,000	
	Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	25,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	25,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tamansari	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100	70,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tamansari	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100	70,000,000	
	Kegiatan					Kegiatan					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	70,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	70,000,000	
	Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tamansari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	50,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tamansari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	50,000,000	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tamansari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	20,000,000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tamansari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	20,000,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tamansari	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100	150,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tamansari	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100	150,000,000	
		Kec. Tamansari	Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)	100			Kec. Tamansari	Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)	100		
	Kegiatan					Kegiatan					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Kegiatan	50,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Kegiatan	50,000,000	

	Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tamansari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tamansari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	-	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	50,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	50,000,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Tamansari	Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti	100		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Tamansari	Presentase Hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti	100		
	Kegiatan					Kegiatan					
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	-	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	-	
	Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	-	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dkumen	-	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen	-	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen	-	

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	-	
		Kec. Tamansari	Nilai Sakip Kecamatan Tamansari	79			Kec. Tamansari	Nilai Sakip Kecamatan Tamansari	79		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tamansari	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100	1,829,657,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tamansari	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	100	1,829,657,000	
	Kegiatan					Kegiatan					
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Kegiatan	-	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Kegiatan	-	
	Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	-	

			Dokumen DPA-SKPD					Dokumen DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	-	
	Kegiatan					Kegiatan					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Kegiatan	1,599,557,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Kegiatan	1,599,557,000	
	Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tamansari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang /bulan	1.532.777.000	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tamansari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ bulan	1.532.777.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	66.780.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	66.780.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	-	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	
	Kegiatan					Kegiatan					
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Kegiatan	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Kegiatan	-	
	Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	-	

	Kegiatan					Kegiatan					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Kegiatan	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Kegiatan	-	
	Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen	-	
	Kegiatan					Kegiatan					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Kegiatan	117.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Kegiatan	117.000.000	
	Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tamansari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tamansari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tamansari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tamansari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Tamansari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Tamansari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tamansari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tamansari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	15.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tamansari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tamansari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.000.000	

	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Tamansari	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	15.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Tamansari	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	15.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	62.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	62.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	10.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 Dokumen		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 Dokumen		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Tamansari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 Dokumen		
	Kegiatan					Kegiatan					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	45.100.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	45.100.000	
	Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kec. Tamansari	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44.200.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tamansari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	-	

			yang Disediakan					yang Disediakan			
	Kegiatan					Kegiatan					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	68.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tamansari	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	68.000.000	
	Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tamansari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	14.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tamansari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	14.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tamansari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	4.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tamansari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	4.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tamansari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tamansari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain menggali permasalalan/kebutuhan dari internal kantor, Kecamatan Tamansari juga menjaring aspirasi atau usulan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan maupun LSM, yang langsung ditujukan ke Kecamatan Tamansari. Pengumpulan informasi tersebut berdasarkan pada hasil pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan yang berupa usulan dari masyarakat terkait dengan pelayanan/tugas pokok fungsi di Kecamatan Tamansari sebagaimana tercantum pada Tabel T-C.32.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penyelenggaraan Jalan / Pembangunan Jalan	Jl. Tamansari – Karanyar	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	1 ruas jalan	DPU PR
2	Program Penyelenggaraan Jalan / Rehabilitasi Jalan	Jl. Tamansari – Karanyar	Jumlah jalan dalam kondisi nyaman	1 ruas jalan	DPU PR
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase / Pembangunan Gorong-gorong drainase di Jalan Kabupaten	Jl. Tamansari – Karanyar	Jumlah jalan dalam kondisi aman	1 ruas jalan	DPU PR
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase / Pembangunan Gorong-gorong drainase di Jalan Kabupaten	Jl. Tamansari – Karanyar	Jumlah jalan dalam kondisi aman	1 ruas jalan	DPU PR
5	Program Penyelenggaraan Jalan / Pembangunan Jembatan	Desa Karanganyar - Keposong	Akses penghubung antar desa semakin terjangkau	1 unit	DPU PR
6	Program Penyelenggaraan Jalan / Pembangunan Jembatan	Desa Sumur - Jemowo	Akses penghubung antar desa semakin terjangkau	1 unit	DPU PR
7	Program Penyelenggaraan Jalan / Sumur Uji	Desa Lanjaran	Tersedianya sumber air bersih	5 paket	DPU PR
8	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup / Pembangunan Digester IPAL Biogas ternak untuk dimanfaatkan gas metananya	Desa Jemowo	Pencemaran lingkungan berkurang	10 unit	DLH
9	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian / Fasilitasi untuk Kelompok Tani yang tanamannya terserang hama penyakit	Desa Dragan	Meningkatnya hasil pertanian	1 kegiatan	DINAS PERTANIAN

10	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian / Pengadaan Bibit Ternak Kambing	Dragan	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	100	Ekor	DINAS PETERNAKAN
11	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan / Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Desa Sangup	Pemanfaatan tanaman lokal	10	kelompok	DINAS KETAHANAN PANGAN
12	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian / Fasilitasi untuk kelompok tani dengan pemberian bantuan bibit tanaman pajale, papaya, bawang merah, kelapa, genjah dan mete	Desa Lampar	Jumlah diversivikasi tanaman pertanian	3	paket	DINAS PERTANIAN
13	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup / Pembangunan bak beserta instalasi penampung air hujan untuk masyarakat daerah sulit air	Desa Jemowo	Tersedianya air untuk kebutuhan sehari-hari	1	Paket	DLH
14	Program Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian / Bantuan traktor, bantuan cultivator, bantuan handsparayer	Tamansari	Pengolahan lahan pertanian yang semakin mudah	10	paket	DINAS PERTANIAN
15	Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat / Bantuan modal Bumdes	Tamansari	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	4	Paket	DISPERMASDES

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan, yang paling relevan adalah reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Prioritas pembangunan tersebut telah menjadi arah tujuan, sasaran dalam menyusun program dan kegiatan di Kecamatan Tamansari.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan tersebut akan dituangkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Penjabaran tujuan dalam Renja merupakan turunan dari Renstra berdasarkan pada misi pembangunan Kabupaten Boyolali yaitu sebagai berikut :

a. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan
b. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya
c. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional
d. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
e. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tamansari adalah untuk mendukung Misi ke empat, yaitu Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya dengan tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan sasaran yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tamansari Tahun 2024 merupakan penjabaran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Uraian tentang program dan kegiatan di Kecamatan Tamansari dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, sebagai berikut :
   a. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
   b. Pencapaian visi dan misi perangkat daerah;
   c. Peningkatan pelayanan publik;
   d. Peningkatan kesejahteraan rakyat;
   e. Kondisi sarana prasarana gedung kantor dan rumah dinas.
2. Rekapitulasi program dan kegiatan :
   a. Jumlah program sebanyak 6 program dan jumlah kegiatan sebanyak 14 kegiatan
   b. Lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kecamatan Tamansari dan beberapa kegiatan berlokasi di desa, yaitu :
      - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
      - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
      - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
      - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
      - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
      - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar : Rp. 2.174.657.000,00

Detail rencana program dan kegiatan Kecamatan Tamansari Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.33.

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kecamatan Tamansari

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja Opd Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4	15	16	17
		Kecamatan Tamansari						2.174.657.000,00							2.174.657.000,00	
	7	Unsur Kewilayahan						2.174.657.000,00							2.174.657.000,00	
	7.01	Kecamatan						1.829.657.000,00							1.829.657.000,00	
1,	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Terpenuhi Sesuai Standar*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	1.829.657.000,00					Kecamatan	100 Persen	1.829.657.000,00	

	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan ,Penganggaran Dan Evaluasi Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	25 Dokumen 7 Kegiatan		25 Dokumen 7 Kegiatan	25 Dokumen 7 Kegiatan	0,00			Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Tra Nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya		2 Dokumen	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Tra Nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Kecamatan	2 Dokumen	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd														

			Jumlah Dokumen Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Kecamatan	1 Dokumen	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd														
			Jumlah Dokumen Perubahan Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Kecamatan	1 Dokumen	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd														

			Jumlah Dokumen Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dpa-Skpd	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Kecamatan	1 Dokumen	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa- Skpd														
			Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa-Skpd	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	K Kecamatan	1 Dokumen	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd														

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Laporan		Laporan	15 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	K Kecamatan	15 Laporan	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	K Kecamatan	4 Laporan	0,00	Kecamatan Tamansari

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Gaji Dan Tunjangan Asn, Gaji Non Asn Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1 Tahun 8 Kegiatan		1 Tahun 8 Kegiatan	1 Tahun 8 Kegiatan	1.599.557.000,00			-	Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Asn Dan Tkhl	16 Orang/Bulan	1.599.557.000,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn														
			Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn	Orang/Bulan		Orang/Bulan	16 Orang/Bulan	1.532.777.000,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Asn Dan Tkhl	16 Orang/Bulan	1.532.777.000,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	66.780.000,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkara	Asn Dan Tkhl	13 dokumen	66.780.000,00	Kecamatan Tamansari

												kter Dan Berbudaya				
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Asn Dan Tkhl	12 Dokumen	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.02.04	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Skpd														

			Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Skpd	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Asn Dan Tkhl	12 Dokumen	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Asn Dan Tkhl	1 Laporan	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.02.06	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Asn Dan Tkhl	1 Dokumen	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a N/Semesteran Skpd	Laporan		Laporan	18 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Asn Dan Tkhl	18 Laporan	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

			Jumlah Dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Asn Dan Tkhl	1 Dokumen	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00			Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Kecamatan	3 Laporan	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd														

			Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd	Laporan		Laporan	3 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Tra Nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Kecamatan	3 Laporan	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00			Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Tra Nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Asn Dan Tkhl	13 Dokumen	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai													

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Asn Dan Tkhl	13 Dokumen	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Fungsi Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Bulan 10 Kegiatan		12 Bulan 10 Kegiatan	12 Bulan 10 Kegiatan	117.000.000,00			Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Kecamatan	4 Paket	117.000.000,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket	2.000.000,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Kecamatan	4 Paket	2.000.000,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	K Kecamatan	4 paket	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket	3.000.000,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	K Kecamatan	4 paket	3.000.000,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket	15.000.000,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	K Kecamatan	4 paket	15.000.000,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan													

			Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket	10.000.000,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Kecamatan	4 Paket	10.000.000,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket	15.000.000,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Kecamatan	4 Paket	15.000.000,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Laporan	4 Laporan	62.000.000,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Kecamatan	4 Laporan	62.000.000,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Laporan		Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Kecamatan	4 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd													

			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Kecamatan	13 Dokumen	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Kecamatan	13 Dokumen	0,00	Kecamatan Tamansari

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Bulan 3 Kegiatan		12 Bulan 3 Kegiatan	12 Bulan 3 Kegiatan	45.100.000,00			Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Tra Nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Kecamatan	12 Laporan	45.100.000,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	12 Laporan	900.000,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Tra Nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Kecamatan	12 Laporan	900.000,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	44.200.000,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Kecamatan	12 Laporan	44.200.000,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan		Laporan	4 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Kecamatan	4 Laporan	0,00	Kecamatan Tamansari

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Bulan 3 Kegiatan		12 Bulan 3 Kegiatan	12 Bulan 3 Kegiatan	68.000.000,00			Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Tra Nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Kecamatan	10 Unit	68.000.000,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Unit		Unit	10 Unit	14.000.000,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Tra Nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Kecamatan	10 Unit	14.000.000,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit		Unit	15 Unit	4.000.000,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Kecamatan	15 Unit	4.000.000,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	2 Unit	50.000.000,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Kecamatan	2 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Tamansari
	7.01	Kecamatan						345.000.000,00							345.000.000,00	

1,	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	*Persentase Layanan Publik Kecamatan Tepat Waktu Persentase Layanan Publik Kecamatan Tepat Waktu*	87 Nilai 87 Persen		87 Nilai 87 Persen	87 Nilai 87 Persen	100.000.000,00						87 Nilai 87 Persen	100.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	*[Deleted] Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Pelayanan Di Kecamatan*	2 Kegiatan 1 Kegiatan		2 Kegiatan 1 Kegiatan	2 Kegiatan 1 Kegiatan	0,00			Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Masyarakat	13 Laporan	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		Laporan	13 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkara	Masyarakat	13 Laporan	0,00	Kecamatan Tamansari

												kter Dan Berbudaya				
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Dokumen		Dokumen	39 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Masyarakat	39 Dokumen	0,00	Kecamatan Tamansari

	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00			Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Tra Nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Masyarakat	1 Kegiatan	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0		2 Laporan	2 Laporan	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Tra Nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya		2 Laporan	0,00	Kecamatan Tamansari

	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00			Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Masyarakat	2 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya		2 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Tamansari

2,	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	*Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti Prosentasi Stimulus Bagi Masyarakat Miskin Berpenghasilan Rendah Desa/ Kelurahan Yang Tepat Sasaran Di Lingkup Kecamatan(Program Kemiskinan)*	100 Persen 100 Persen		100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	150.000.000,00					Masyarakat	100 Persen 100 Persen	150.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	150.000.000,00			Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Masyaraka	6 Lembaga kemasyarakatan	150.000.000,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa														

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Lembaga Ke Masyarakata N		Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Masyarakat	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	13 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Masyarakat	13 Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Tamansari

3,	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	*Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditindaklanjuti*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	25.000.000,00						100 Persen	25.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum*	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00			Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Tra Nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Masyarakat	13 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	13 Laporan	25.000.000,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Tra Nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan	Masyarakat	13 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Tamansari

												Berbudaya				
4,	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	*Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum Yang Ditindaklanjuti*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	70.000.000,00						100 Persen	70.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	70.000.000,00			Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Masyarakat	400 Orang	70.000.000,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

			Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang		Orang	400 Orang	50.000.000,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Masyarakat	400 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional														
			Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional	Orang		Orang	500 Orang	20.000.000,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Masyarakat	500 Orang	20.000.000,00	Kecamatan Tamansari
5,	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Presentase Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Di Tindak Lanjuti*	100 Persen		100 Persen	100 Persen	0,00						100 Persen	0,00	

	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	3 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	0,00			Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Tra Nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Pemerintahan Desa	8 Dokumen	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkua T Stabilitas Polhukhank Am Dan Tra Nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Pemerintahan Desa	8 Dokumen	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

			Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		Dokumen	26 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Pemerintahan Desa	26 Dokumen	0,00	Kecamatan Tamansari
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	0,00	- Kab. Boyolali, Tamansari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah An Yang Adaptif Dan Kolaboratif Pemantapa N Tata Kelola Pem Erintahan, Serta Sdm Yang Tangguh, Cerdas Berkarakter Dan Berbudaya	Pemerintahan Desa	13 Dokumen	0,00	Kecamatan Tamansari
	J U M L A H							2.174.657.000,00							2.174.657.000,00	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali Tahun 2024 merupakan rencana target capaian kinerja yang diinginkan untuk 1 tahun mendatang. Renja ini memuat berbagai kebutuhan yang berkaitan secara langsung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tamansari, yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Perumusan program dan kegiatan ini, mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai disertai dengan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Realisasi renja ini sangat tergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2024.

Sebagaimana tujuan renja ini yaitu untuk menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Tamansari untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Tamansari melalui pembiayaan APBD Kabupaten Boyolali yang dilengkapi dengan indikator capaian sebagai tolok ukur penilaian kinerja, maka renja ini tidak akan berarti banyak jika tidak dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena masih diperlukan komitmen yang kuat oleh seluruh komponen dalam rangka melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi secara terus-menerus sehingga renja ini dapat menjadi sarana dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT